2024

LAPORAN TAHUNAN

Annual Report

J TRUST BANK

Jトラスト銀行

Advancing Our Journey for A Sustainable Future

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Penjelasan Tema

Theme Explanation

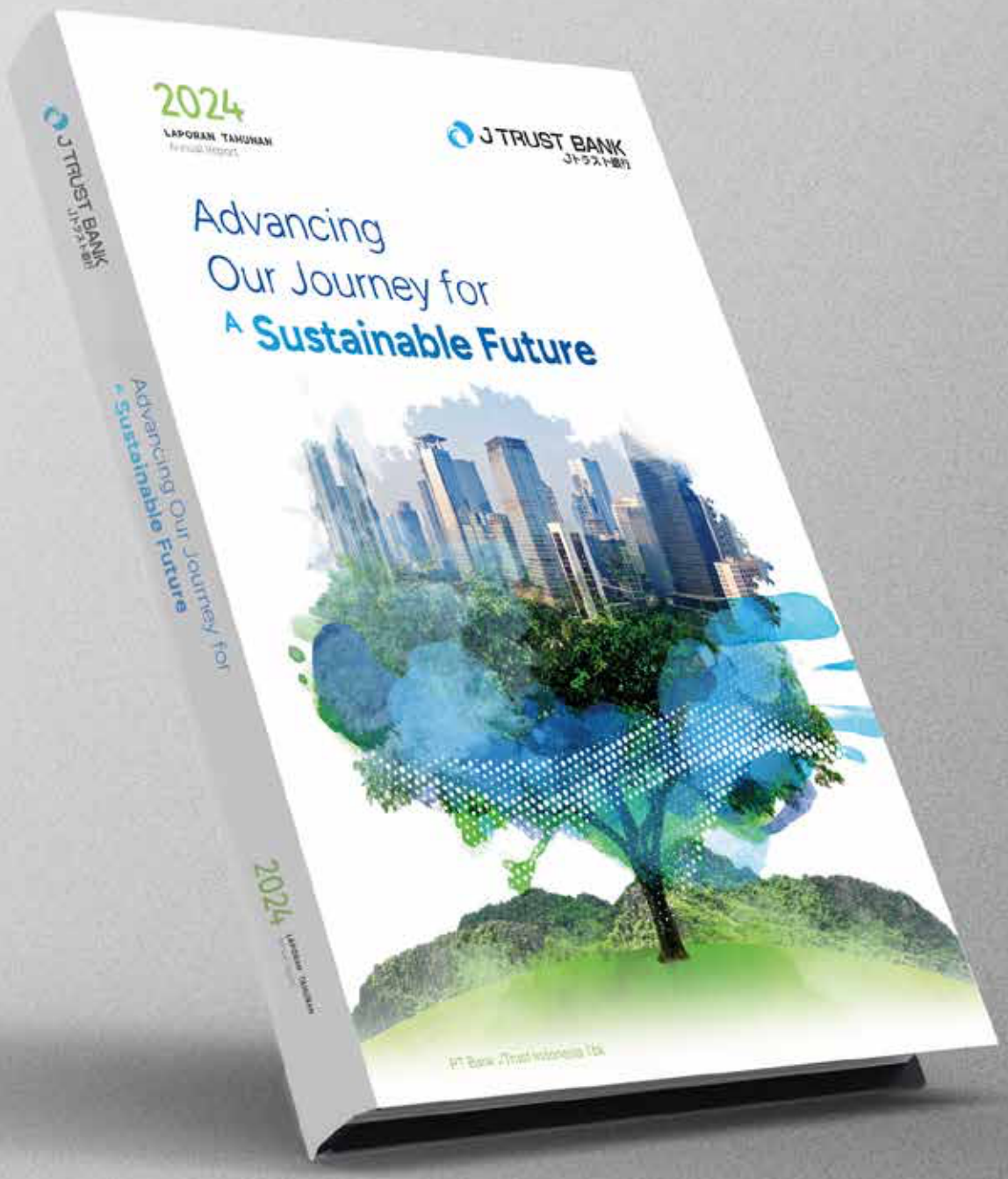

Advancing Our Journey for A **Sustainable Future**

J Trust Bank berhasil mencatatkan kinerja yang positif pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak hanya ditopang oleh kinerja operasional yang baik dan strategi bisnis yang efektif, tetapi juga inovasi yang terus dilakukan untuk meningkatkan layanan Bank kepada nasabah. Salah satunya melalui pembaruan digital, yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi nasabah. Pembaruan yang secara konsisten dilakukan terhadap layanan digital telah memperkuat posisi Bank di pasar yang semakin kompetitif. Dengan kombinasi antara kinerja operasional yang baik dan inovasi digital, Bank terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasabah di masa depan.

Selain itu, Bank terus memperkuat komitmen terhadap implementasi prinsip keberlanjutan. Tata kelola keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap aktivitas bisnis sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam penerapan dan pelaksanaan aspek keberlanjutan, J Trust Bank telah memiliki Komite Keberlanjutan yang bertugas membantu Direksi untuk memastikan bisnis dan operasional Bank selaras dengan upaya-upaya pelestarian alam dan kesejahteraan makhluk hidup yang ditopang dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kuat.

Bank juga memastikan bahwa program-program Keberlanjutan yang dilaksanakan akan memberikan keseimbangan atas lingkungan (*planet*), manusia dan mahluk hidup (*people*), serta keuntungan Bank (*profit*) di seluruh Indonesia dimanapun J Trust Bank beroperasi.

J Trust Bank achieved positive performance in 2024, supported by strong operational results and effective business strategies. A key factor in this success has been the continuous innovation aimed at enhancing the Bank's services for customers. Notably, the implementation of digital updates has provided greater convenience and security, reinforcing the Bank's competitive position in the market. With a combination of robust operational performance and digital advancements, J Trust Bank remains dedicated to delivering exceptional service that meets customer needs now and in the future.

Furthermore, the Bank is committed to embracing sustainability principles. Sustainability governance serves as a foundational element, ensuring that all business activities align with values that encompass economic, social, and environmental considerations.

To implement and oversee these sustainability efforts, J Trust Bank has established a Sustainability Committee. This committee supports the Board of Directors in ensuring that the Bank's business operations are consistent with the preservation of nature and the welfare of living beings, backed by sound corporate governance.

In its sustainability iniatives, J Trust Bank aims to achieve a balance among environmental health (planet), humans and living things (people), and profitability (profit) across all regions in Indonesia where the Bank operates.

DAFTAR ISI

Table of Contents

06

Kilas Kinerja 2024

Performance Highlights

Pencapaian 2024 2024 Highlights	6
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8
Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan 2024 Overview of Sustainability Performance in 2024	12
Informasi Saham Shares Information	14
Peristiwa Penting Event Highlights	18

22

Laporan Manajemen

Management Reports

Laporan Dewan Komisaris Boards of Commissioner Report	24
Dewan Komisaris Board of Commissioners	34
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	36
Direksi Board of Directors	48
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan Responsibility for Annual Report	50

52

Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Perusahaan Company Profile	54
Sekilas J Trust Bank J Trust Bank at A Glance	56
Jejak Langkah Milestones	58
Keanggotaan pada Asosiasi Membership in Associations	60
Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Vision, Mission, Values and Culture	62
Budaya Perusahaan Corporate Culture	64
Filosofi Logo J Trust Bank The Philosophy of J Trust Bank Logo	65
Struktur Organisasi Organizational Structure	66
Bidang Usaha Business Segment	68
Produk dan Layanan Products and Services	69
Jaringan Kantor Offices Network	71
Peta Area Operasional Operational Area Map	74
Profil Komisaris Profile of the Board of Commissioners	76
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	80
Profil Executive Vice President Profiles of Executive Vice President	88
Profil Anggota Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Profile of Members of Committees under the Board of Commissioners	90
Profil Kepala Divisi Profiles of Head of Division	92
Statistik Profil dan Komposisi Karyawan Statistics of Employee Profile and Composition	97
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	105
Informasi Website Information on the Company's Website	112
Penghargaan 2024 Awards 2024	114

116

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi Economic Review	118
Tinjauan Industri Perbankan Banking Industry Review	124
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review Per Business Segment	126
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review	140
Analisa Prospek Usaha Business Prospect Analysis	176
Teknologi Informasi Information Technology	198
Sumber Daya Manusia Human Resources	204
Manajemen Risiko Risk Management	218

298

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	300
Tonggak Sejarah GCG GCG Milestone	306
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi General Meeting of Shareholders (GMS), Implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors Duties	316
Dewan Komisaris Board of Commissioners	339
Penilaian terhadap Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Assessment of The Performance of Committees Under The Board of Commissioners	368
Direksi The Board of Directors	373
Kebijakan Remunerasi Remuneration Policy	405
Kebijakan Suksesi Direksi Board of Directors' Succession Policy	413
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy of The Composition of Board of Commissioners and Directors	413
Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions wth Conflict of Interest	416
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang Mencapai ≥5% (Lima Persen) dari Modal Disetor, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank Tersebut, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dn Perusahaan Lain Yang Berkedudukan Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Share Ownership of Members of The Board of Commissioners and Board of Directors With More than 5% (Five Percent) of The Paid-Up Capital, Which Includes The Type and Number of Shares In The Bank, Other Banks, Non- Bank Financial Institutions, and Other Companies Domiciled Domestically or Overseas	417
Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Financial and Family Relations of Members of The Board of Commissioners and Members of The Board of Directors	419
Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP) dan/ Atau Karyawan (Employee Stock Ownership Program/ESOP) yang Dimiliki oleh Bank Management Stock Ownership Program/MSOP and/or Employee Stock Ownership Program/ESOP Owned by The Bank	419
Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Committees Under The Board of Commissioners	420

Penilaian Terhadap Kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
Assessment of The Performance of Committees Under The Board of Commissioners 420

Komite Audit
Audit Committee 424

Komite Pemantau Risiko
Risk Commitee 437

Komite Nominasi dan Remunerasi
Remuneration and Nomination Committee 447

Pelaporan
Reporting 453

Mekanisme Evaluasi Kinerja
Performance Evaluation Mechanism 454

Komite-Komite Di Bawah Direksi
Committees Under The Board of Directors 457

The Asset & Liability Committee (ALCO)
The Asset & Liability Committee (ALCO) 462

Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee 470

Komite Kredit
Credit Committee 479

Komite Kebijakan Perkreditan
Credit Policy Committee 487

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Eksternal
The Implementation of The Bank's Compliance Function, Internal Audit and External Audit 491

Fungsi Audit Intern
Internal Audit Function 493

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Implementation of The Bank's Compliance Function 500

Fungsi Audit Ekstern
External Audit Function 521

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
The Implementation of Risk Management Including Internal Control System 524

Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Implementation of Internal Control System 533

Perkara Penting
Legal Cases 535

Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi, dan Pengungkapan Aspek Lainnya
Provision of Funds, Bank Strategic Plans, Transparency, and Disclosure of Other Aspects 538

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Corporate Information and Data 540

Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa dan Alih Daya
Policy on Procurement of Goods, Services and Outsourcing 544

Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik
Information on The Code of Ethics of Issuers/Public Companies 548

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
Donation for Social Activities 550

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain
Transparency of The Bank's Financial and Non-Financial Conditions that Have Not Been Disclosed in Other Reports 550

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan/atau Obligasi Bank
The Bank's Share and/or Bond Buyback 553

Pelindungan Konsumen
Consumer Protection 555

Contact Center
Contact Center 557

Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi Anti-Fraud
Policies and Activities in The Implementation of Anti Fraud Strategies 560

Penyimpangan (Internal Fraud)
Penyimpangan (Internal Fraud) 562

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System 563

Rencana Strategis Bank
The Bank Strategic Plan 565

Penerapan Kebijakan Anti Korupsi
Implementation of Anti-Corruption Policy 569

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait
Administrative Sanctions from Related Authorities 571

580
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Corporate Social Responsibility

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy 582

Mengelola Keberlanjutan
Managing Sustainability 592

Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Delivering Sustainable Economic Growth 604

Meningkatkan Kepedulian Lingkungan
Raising Environmental Awareness 610

Mengembangkan Sumber Daya Manusia
Developing Human Resources 620

Memberikan Manfaat kepada Masyarakat
Providing Benefits to The Community 626

Menghadirkan Produk dan Layanan Berkelanjutan
Providing Sustainable Products and Services 634

Tentang Laporan Keberlanjutan
About Sustainability Report 646

650
Laporan Keuangan
Financial Report

923
Lampiran
Attachment

INDEKS ISI GRI
GRI Content Index – with Reference 924

Pengungkapan Indeks Keuangan Berkelanjutan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Disclosure of Sustainable Finance Index POJK 51/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies 926

Lampiran
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9/SEOJK.03/2020: Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
Attachment
To Financial Services Authority Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020: Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports 929

Referensi SEOJK
Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
SEOJK Reference
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company 935

Lembar Umpan Balik
Feedback Sheet 959

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Jaya

Jaya si pemimpin yang selalu bertindak adil, ia juga mampu diandalkan. Sebagai salah satu maskot J Trust Bank, sosok Jaya dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Harimau Sumatera.

Jaya is a leader who always acts fairly and highly reliable. As one of the mascots of J Trust Bank, Jaya was created to send a message about the importance of preserving Indonesia's endemic wildlife, specifically the Sumatran tiger.

KILAS
KINERJA 2024

Performance Highlights

PENCAPAIAN 2024

2024 Highlights

Bank kembali berhasil membukukan laba bersih pada tahun 2024 berkat keberhasilannya memperluas pasar melalui beberapa inisiatif strategis. Bank juga berhasil mengembangkan produk baru dan memperluas layanan digital. Kinerja positif ini didukung oleh konsistensi Bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan pengelolaan risiko yang baik.

Peningkatan kinerja Bank dipicu oleh penyaluran kredit bruto yang meningkat sebesar 11,09%. Sementara itu, dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 5,92%. Prinsip kehati-hatian yang dijalankan Bank membuat Rasio Kredit Bermasalah (NPL) bruto masih tergolong rendah di level 1,95%.

Dari sisi profitabilitas, Bank berhasil mencatat pertumbuhan Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA) dari sebesar 0,06% di 2023 menjadi 0,26% di 2024, sejalan dengan peningkatan Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LFR) Bank dari 74,61% di 2023 menjadi 78,25% di 2024.

Kondisi permodalan Bank juga menunjukkan kondisi yang sehat dengan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) tetap solid di angka 13,89%. Sementara Bank juga memiliki rasio likuiditas yang kuat dengan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) Bank mencapai 116,76% dan Rasio Pendanaan Stabil (NSFR) Bank di level 115,87%.

The Bank successfully recorded a net profit in 2024, thanks to its success in expanding its market through several strategic initiatives. The Bank also succeeded in developing new products and expanding digital services. This positive performance was supported by the Bank's consistency in adhering to prudence principles and ensuring good risk management.

The Bank's improving performance was driven by gross loan distribution, which rose by 11.09%. Meanwhile, third-party funds increased by 5.92%. The Bank's adherence to prudence principles has kept the Gross Non-Performing Loan (NPL) ratio remained relatively low at 1.95%.

In terms of profitability, the Bank successfully recorded a higher growth in the Return on Assets (ROA) ratio, from 0.06% in 2023 to 0.26% in 2024. This was in line with higher Loan to Funding Ratio (LFR), from 74.61% in 2023 to 78.25% in 2024.

The Bank's capital position also showed a sound condition, with the Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) remain solid at 13.89%. Meanwhile, the Bank also has a strong liquidity ratio with the Bank's Liquidity Coverage Ratio (LCR) reaching 116.76% and the Bank's Net Stable Funding Ratio (NSFR) at 115.87%.

Pinjaman yang Diberikan
Loans

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Rp 26.528

Simpanan Nasabah
Customer Deposits

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Rp 33.900

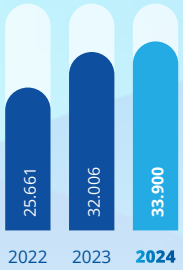

Jumlah Aset
Total Assets

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Rp 40.259

Total Ekuitas
Total Equity

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Rp 3.794

STRONG LOAN GROWTH WITH GOOD QUALITY

Pertumbuhan Pinjaman
Loan Growth

11,09%

Rasio Kredit Bermasalah - bruto
Non-Performing Loan (NPL) Ratio - gross

1,95%

STRONG CAPITAL AND LIQUIDITY

Rasio KPMM
CAR Ratio

13,89%

Rasio Kecukupan Likuiditas
Liquidity Coverage Ratio

116,76%%

GROWING DIGITAL CAPABILITIES

Pengguna Aplikasi
Application Users

69.811

Nilai Transaksi Layanan Berbasis Teknologi
Transaction value of Technology-based Services

Rp 27,1 Triliun
trillion

GREEN FINANCING

Pembiayaan Hijau
Green Financing

Rp 2,3 Triliun
trillion

Persentase total pembiayaan hijau dibanding dengan total pinjaman
Persentase total pembiayaan hijau dibanding dengan total pinjaman

8,7%

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam laporan tahunan ini menggunakan notasi Bahasa Indonesia
Numerical notations in all tables and graphs in this annual report are in Indonesian

Deskripsi (Dalam jutaan Rupiah) kecuali disebutkan lain	**2024**	2023	2022	Description (In million Rupiah) unless stated otherwise
ASET				ASSETS
Kas	331.700	201.930	188.750	Cash
Giro pada Bank Indonesia	474.261	2.013.146	339.539	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain-Neto	592.577	548.016	305.265	Current accounts with other banks-Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-Neto	2.162.566	3.370.260	3.490.376	Placements with Bank Indonesia and other banks-Net
Efek-Efek-Neto	5.040.567	3.884.345	3.324.845	Marketable securities-Net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	1.466.541	2.387.732	Securities purchased under resale agreements
Tagihan derivatif	4.987	18.906	12.322	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan-Neto	26.330.524	23.732.583	19.368.357	Loans-Net
Tagihan akseptasi-Neto	-	12.156	78.068	Acceptance receivables-Net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	187.725	207.121	185.357	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.732.467	2.854.304	3.018.983	Prepaid expenses and advances
Aset pajak tangguhan	226.668	324.591	320.039	Deferred tax assets
Aset tetap-Neto	438.874	221.114	215.825	Fixed assets-Net
Aset tidak berwujud-Neto	90.336	73.660	81.620	Intangible assets-Net
Aset hak-guna-Neto	54.250	92.757	126.222	Right-of-use assets-Net
Agunan yang diambil alih-Neto	93.124	83.238	99.709	Foreclosed assets-Net
Aset lain-lain-Neto	165.848	129.644	74.381	Other assets-Net
TOTAL ASET	**40.258.696**	**39.234.312**	**33.617.390**	TOTAL ASSETS
ASET PRODUKTIF	**34.393.573**	**30.552.678**	**27.052.948**	PRODUCTIVE ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	50.385	86.614	71.012	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	33.899.527	32.005.631	25.661.181	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.324.117	3.215.559	3.955.279	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	7.745	343	381	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	12.157	78.395	Acceptance payables
Utang pajak	39.362	33.736	23.657	Taxes payable
Bunga yang masih harus dibayar	107.921	87.123	60.658	Accrued interest expenses
Liabilitas imbalan kerja	23.834	22.112	19.257	Employee benefits liability
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	11.306	21.195	Accrued expenses and other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**36.464.540**	**35.474.581**	**29.891.015**	TOTAL LIABILITIES

Deskripsi (Dalam jutaan Rupiah) kecuali disebutkan lain	**2024**	2023	2022	Description (In million Rupiah) unless stated otherwise
EKUITAS				EQUITY
Modal ditempatkan dan disetor penuh	13.032.929	13.032.929	13.032.929	Issued and fully paid capital
Tambahan modal disetor	1.915.423	1.915.423	1.915.423	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain	1.053.735	1.001.860	1.001.860	Other components of equity
Kerugian aktuarial	(9.087)	(8.980)	(10.430)	Actuarial loss
Surplus revaluasi aset tetap - Neto	146.976	146.976	146.976	Revaluation surplus of fixed assets - Net
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain/tersedia untuk dijual	(28.319)	(8.144)	(12.148)	Unrealized gain (loss) on changes in marketable securities at fair value through other comprehensive income/available for sale
Saldo rugi	(12.317.501)	(12.320.333)	(12.348.235)	Deficit
Total Ekuitas	**3.794.156**	**3.759.731**	**3.726.375**	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**40.258.696**	**39.234.312**	**33.617.390**	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Keterangan dalam jutaan Rupiah	2024	2023	2022	2024-2023 Persentase (%) Percentage (%)	2023-2022 Persentase (%) Percentage (%)	Description (In million Rupiah)
				Kenaikan (Penurunan) Increased (Decreased)		
Pendapatan Bunga - neto	802.130	805.061	627.647	-0,36%	28,27%	Interest income - net
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(703.737)	(780.189)	(582.462)	-9,80%	33,95%	Other operating income (expenses)
Laba (Rugi) Operasional	98.393	24.872	45.185	295,60%	-44,96%	Profit (Loss) From Operations
Laba (Rugi) Non-Operasional	8.083	(3.062)	2.062	-	-	Non-Operating Income (Expenses)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	106.476	21.810	47.247	388,20%	-53,84%	Profit (Loss) Before Tax
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan - Neto	(103.644)	6.092	39.374	-	-84,53%	Income Tax Benefit (Expense) - Net
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.832	27.902	86.621	-89,85%	-67,79%	Net Profit (Loss) for the Year
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						**Net Profit (Loss) Attributable to:**
Pemilik	2.832	27.902	86.621	-89,85%	-67,79%	Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-			Non-Controlling Interest
Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						**Comprehensive Net Profit (Loss) Attributable to:**
Pemilik	(20.282)	5.454	(18.713)	-471,87%	-129,15%	Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali			-	-	-	Non-Controlling Interest
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Nilai Penuh)	0,16	1,54	5,47	-89,61%	-71,85%	Basic Earnings (Loss) per Share (Full Amount)

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOW

Keterangan dalam jutaan Rupiah	2024	2023	2022	2024-2023 Persentase (%) Percentage (%)	2023-2022 Persentase (%) Percentage (%)	Description (In million Rupiah)
				Kenaikan (Penurunan) Increased (Decreased)		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						**Interest income - net**
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.186.508)	2.376.950	(163.523)	-149,92%	-1.553,59%	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						**Cash Flows from Investment Activities**
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.438.673)	(566.729)	115.375	153,86%	-591,21%	Net cash provided by (used in) investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan						**Cash Flows from Financing Activities**
Kas neto (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	50.696	(1.555)	995.139	-3.360,19%	-100,16%	Net cash (used in) financing activities
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(2.574.485)	1.808.666	946.991	-242,34%	90,99%	Net Increase (Decrease) On Cash And Cash Equivalents
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	2.319	627	2.532	269,86%	-75,24%	Effect of changes in foreign currencies exchange rate
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.134.754	4.325.461	3.375.938	41,83%	28,13%	Cash and cash equivalents beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**3.562.588**	**6.134.754**	**4.325.461**	**-41,93%**	**41,83%**	**Cash and cash equivalents at end of year**

RASIO KEUANGAN UTAMA

MAIN FINANCIAL RATIO

RASIO KEUANGAN Dalam %, kecuali dinyatakan lain	2024	2023	2022	FINANCIAL RATIO In %, unless stated otherwise
PERMODALAN				CAPITAL
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	13,89	14,04	14,86	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aset Tetap Terhadap Modal	19,15	13,47	16,16	Fixed Assets to Capital
ASET PRODUKTIF				EARNING ASSETS
Aset Produktif Bermasalah	1,54	0,83	1,33	Non-Performing Earning Assets
Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (Bruto)	1,95	1,03	1,80	Non-Performing Loans (Gross)
Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (Neto)	1,43	0,71	1,31	Non-Performing Loans (Net)
Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) terhadap Aset produktif	0,59	0,50	0,64	Allowance for Possible Losses on Earnings Assets
Pemenuhan PPAP	58,47	40,71	53,63	Allowance for Possible Losses Compliance
RENTABILITAS				RENTABILITIES
Laba Rugi Terhadap Aset (ROA)	0,26	0,06	0,17	Return on Assets (ROA)
Laba Rugi Terhadap Ekuitas (ROE)	0,09	0,89	3,50	Return on Equity (ROE)
Margin Bunga Bersih	2,30	2,67	2,77	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,26	99,12	99,04	Operating Expense to Operating Revenue
Liabilitas terhadap Ekuitas	9,61	9,44	8,02	Debt to Equity
Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,91	0,90	0,89	Debt to Assets
LIKUIDITAS				LIQUIDITY
Rasio Kredit yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga (LFR)	78,25	74,61	76,11	Loan to Funding Ratio (LFR)
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)	115,87	122,19	132,68	Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)	116,76	120,35	148,70	Liquidity Coverage Ratio (LCR)
SOLVABILITAS				SOLVABILITY
Rasio Pengungkit	8,10	7,87	9,21	Leverage Ratio (LR)
EFISIENSI				EFFICIENCY
Rasio Beban terhadap Pendapatan	87,85	95,12	98,70	Cost to Income Ratio (CIR)
KEPATUHAN				COMPLIANCE
Persentase Pelanggaran BMPK	-	-	-	Percentage of LLL Violations
Persentase Pelampauan BMPK	-	-	-	Percentage of LLL Excess
GWM Primer Rupiah	5,91	8,12	7,63	Primary Reserve in Rupiah
GWM Valuta Asing	4,67	4,95	4,07	Reserve in Foreign Currencies
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,24	1,58	0,30	Net Open Position

IKHTISAR KINERJA BERKELANJUTAN 2024

Overview of Sustainability Performance in 2024

ASPEK EKONOMI [OJK B.1]

Economic Aspect [OJK B.1]

Laba tahun berjalan

Profit for the current year

Rp**2,83**

dalam Miliar Rupiah | in Billion Rupiah

Total penyaluran kredit KUBL dan UMKM terealisasi atau **8,74%** dari total portofolio kredit bank.

Total distribution of KUBL and MSME financing realized or **8.74%** of the bank's total financing portfolio

Rp**2,32**

dalam Triliun Rupiah | in Trillion Rupiah

ASPEK LINGKUNGAN [OJK B.2]

Environmental Aspect [OJK B.2]

88.009

Pengguna | Users

Pengguna *e-statement*, meningkat 55,2% dari tahun sebelumnya

Users of e-statements, increased by 55.2% from the previous year

Penanaman Mangrove

Mangrove Planting

12.000

Pohon | Trees

Penggunaan energi

Energy consumption

21.669

Gjoule

Total emisi yang dihasilkan

Total emissions generated

4.069,9

tons CO_2

ASPEK SOSIAL [OJK B.3]
Social Aspect [OJK B.3]

51%

Persen | Percents

Proporsi karyawan perempuan

The proportion of female employees

51

Jam | Hours

Rata-rata jam pelatihan per karyawan

Average training hours per employee

410

Penerima | Beneficiaries

Penerima manfaat program Literasi Keuangan

Beneficiaries of the Financial Literacy program

KEGIATAN-KEGIATAN TJSL SELAMA 2024
TJSL Activities During 2024

Pendampingan kewirausahaan sosial melalui budidaya sayuran dan melon hidroponik
Social entrepreneurship assistance through hydroponic vegetable and melon cultivation

Peningkatan kapasitas produk ramah lingkungan untuk pelaku usaha jahit perempuan
Increasing the capacity of environmentally friendly products for female sewing entrepreneurs

Kampanye dukungan kesetaraan kepada kelompok disabilitass
Equality support campaign for disabled groups

Literasi keuangan kepada pelaku usaha nano-mikro dan siswa SMK
Financial literacy for nano-micro entrepreneurs and vocational school students

Piloting project penggunaan energi terbarukan panel surya di J Trust Bank
Piloting project for the use of renewable energy solar panels at J Trust Bank

Dukungan untuk pendidikan kelompok usia dini dhuafa
Support for early childhood education for the poor

Dukungan untuk pendidikan informal untuk kelompok pra-sejahtera anak nelayan
Support for informal education for pre-prosperous groups of fishermen›s children

Field trip bersama anak-anak panti asuhan Hibunda
Field trip with children from the Hibunda orphanage

Santunan keluarga pra-sejahtera dan upaya menurunkan tingkat stunting
Compensation for pre-prosperous families and reduce stunting rates effort

Bantuan pendidikan kepada siswa SMK
Educational assistance for vocational school students

Donor darah
Blood donors

Penanaman Mangrove
Mangrove planting

Cepat tanggap bencana
Quick response to disasters

INFORMASI SAHAM

Stock Information

Saham J Trust Bank tercatat dengan kode BCIC di Bursa Efek Indonesia sejak 25 Juni 1997. Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada 21 November 2008. Namun pada 8 Januari 2020, Bursa Efek Indonesia mencabut penghentian sementara perdagangan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk di seluruh pasar.

Informasi Saham Bulanan Tahun 2023-2024

Monthly Share Information 2023-2024

Bulan Month	Pembukaan Opening		Tertinggi Highest		Terendah Lowest		Penutupan Closing	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Januari | January	121	192	128	220	113	122	116	127
Februari | February	117	126	119	130	110	116	113	119
Maret | March	112	118	114	130	101	98	104	111
April | April	104	110	116	110	98	100	100	103
Me i| May	100	103	100	114	92	93	94	96
Juni | June	95	97	101	122	88	93	91	106
Juli | July	91	106	129	124	88	104	99	112
Agustus | August	98	113	100	173	88	111	94	140
September | September	94	142	153	164	94	134	135	139
Oktober | October	136	140	212	140	134	116	190	121
November | November	192	121	226	143	152	121	206	127
Desember | December	206	128	228	139	168	116	187	120

Harga Penutupan (Dalam Rupiah)

Close Price (In Rupiah)

Volume Transaksi (Dalam Jutaan Lembar)

Transactions Volume (In Million Sheets)

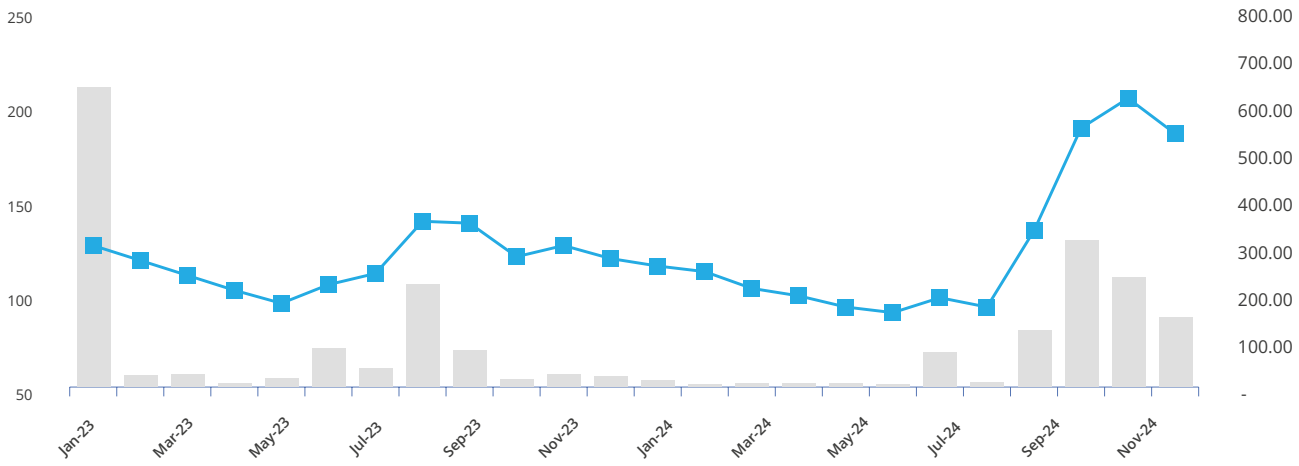

Volume Transaksi (Dalam Jutaan Lembar)
Transactions Volume (In Million Sheets)

Harga Penutupan (Dalam Rupiah)
Close Price (In Rupiah)

J Trust Bank shares have been listed with the code BCIC on the Indonesia Stock Exchange since 25 June 1997. The Indonesia Stock Exchange decided to temporarily suspend trading in shares of PT Bank JTrust Indonesia Tbk on 21 November 2008. However, on 8 January 2020, the Indonesian Stock Exchange lifted the temporary suspension of PT Bank JTrust Indonesia Tbk shares in all markets.

Perubahan Changes		Volume Transaksi Transaction Volume		Nilai (dalam ribuan Rupiah) Value (in thousand Rupiah)		Frekuensi Frequency	
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
-4	-47	13.581.200	643.302.000	1.623.151.125	114.748.000	2.171	76.430
-3	-8	6.284.600	24.172.000	720.001.925	2.987.000	940	3.955
-9	-8	6.806.600	26.214.000	741.883.050	2.984.000	1.088	3.584
-4	-8	6.460.700	6.691.000	669.060.950	690.000	1.635	1.144
-6	-7	7.222.900	18.419.000	690.599.175	1.871.000	1.005	2.626
-3	10	5.945.900	82.159.000	556.863.575	8.983.000	1.113	9.865
8	6	73.047.000	40.222.000	7.847.019.300	4.548.000	9.641	4.459
-5	28	10.456.500	220.687.000	969.689.800	32.631.000	1.183	27.658
41	-1	121.335.900	77.879.000	15.046.820.250	11.667.000	15.442	9.467
55	-18	315.176.700	16.727.000	56.637.712.175	2.111.000	27.507	2.908
16	6	235.513.900	26.190.000	46.331.463.500	3.394.000	18.838	5.281
-19	-7	148.439.700	23.199.000	29.835.376.800	2.911.000	8.256	4.434

Informasi Saham Triwulanan Tahun 2023-2024

Quarterly Share Information 2023-2024

Periode Period	Harga Saham/lembar (dalam Rupiah) Share Price/share (in Rupiah)				Volume Perdagangan Trading Volume	Jumlah Saham Beredar Number of Outstanding Shares	Kapitalisasi Pasar (dalam Rupiah) Market Capitalization (in Rupiah)
	Pembukaan Opening	Terendah Lowest	Tertinggi Highest	Penutupan Closing			
2024							
Triwulan 1 Quarter 1	121	101	128	104	26.672.400	18.109.922.009	1.883.431.888.936
Triwulan 2 Quarter 2	104	88	101	91	19.629.500	18.109.922.009	1.648.002.902.819
Triwulan 3 Quarter 3	91	88	100	135	204.839.400	18.109.922.009	2.444.839.471.215
Triwulan 4 Quarter 4	136	134	226	187	699.130.300	18.109.922.009	3.386.555.415.683
2023							
Triwulan 1 Quarter 1	192	98	220	111	693.688.000	18.109.922.009	2.010.201.342.999
Triwulan 2 Quarter 2	110	93	114	106	107.269.000	18.109.922.009	1.919.651.732.954
Triwulan 3 Quarter 3	106	104	173	139	338.788.000	18.109.922.009	2.517.279.159.251
Triwulan 4 Quarter 4	140	116	139	120	66.116.000	18.109.922.009	2.173.190.641.080

AKSI KORPORASI

Pada tahun 2024, J Trust Bank tidak melakukan aksi korporasi.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM

Tidak ada Penghentian Sementara Perdagangan Saham selama tahun 2024.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI

Pada tahun 2024, J Trust Bank tidak memiliki obligasi dalam bentuk apapun.

CORPORATE ACTION

J Trust Bank did not have any corporate actions in 2024..

INFORMATION ON TEMPORARY SUSPENSION OF STOCK TRADING

There was no temporary suspension in the trading of the Bank's shares in 2024.

SUMMARY OF BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS

J Trust Bank did not issue any bonds in 2024.

PERISTIWA PENTING

Event Highlights

Januari | January

Peresmian kantor cabang J Trust Bank ke-46 di Tarakan, Kalimantan Utara.

Inauguration of J Trust Bank 46th branch office in Tarakan, North Kalimantan.

Februari | February

Penyelenggaraan J Trust Bank Gourmet Choice 2024 untuk pertama kalinya, program inklusi keuangan dan apresiasi J Trust Bank bagi pelaku usaha kuliner, khususnya restoran premium di seluruh Indonesia.

J Trust Bank's first Gourmet Choice 2024, a financial inclusion program and an appreciation for culinary entrepreneurs throughout Indonesia, particularly premium restaurants.

Februari | February

Perayaan relokasi kantor cabang J Trust Bank ke Jl. Ahmad Yani, Pekanbaru. Sebelumnya berada di Jl. Sudirman, Pekanbaru.

Celebration of J Trust Bank branch office relocation to Jl. Ahmad Yani, Pekanbaru. Previously, it was on Jl. Sudirman, Pekanbaru.

Maret | March

Perayaan relokasi kantor cabang pembantu Medan Asia.

Celebration of J Trust Bank sub-branch office relocation in Medan Asia.

Maret | March

Perayaan relokasi Kantor Cabang Pembantu J Trust Bank ke Radio Dalam, Jakarta. Sebelumnya berada di Pondok Indah.

Celebration of J Trust Bank branch office relocation to Radio Dalam, Jakarta. Previously, it was on Pondok Indah.

April | April

Tabungan Tora J Trust Bank meraih peringkat II dalam Infobank "13th Digital Brand Award 2024" untuk kategori Bank Umum Konvensional KBMI 1.

J Trust Bank savings product Tabungan Tora ranked second in the Infobank 13th Digital Brand Award 2024 for Commercial Bank under the KBMI 1 category.

April | April

Peluncuran program simpanan ESG pertama J Trust Bank bertajuk TORA Green Savings untuk memperingati Hari Bumi Internasional.

Launching of the first J Trust Bank ESG saving program named TORA Green Savings to celebrate International Earth Day.

Mei | May

J Trust Bank Menanam 1.000 Bibit Mangrove untuk merayakan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional.

J Trust Bank Planted 1,000 Mangrove Seedlings to celebrate International Biodiversity day.

Juni | June

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Blue Institute untuk pembiayaan mikro kepada Koperasi Masyarakat Perikanan Pesisir.

The signing of Memorandum of Understanding (MoU) with Blue Institute to provide micro loans for the Coastal Fisheries Community Cooperative.

Juni | June

Penandatanganan kerja sama dengan Kagawa Bank untuk memperluas penetrasi pasar.

Signing of cooperation agreement with Kagawa Bank to expand market penetration.

Juni | June

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Bank Tanah untuk pemanfaatan lahan milik Badan Bank Tanah yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Signing of MoU with Indonesia Land Bank Agency for utilization of land in Penajam Paser, East Kalimantan.

Juni | June

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

J Trust Bank successfully held Annual General Meeting of Shareholders.

PERISTIWA PENTING
Event Highlights

Juli | July

Perayaan relokasi kantor cabang pembantu J Trust Bank ke Kelapa Gading, Jakarta.

Celebration of J Trust Bank sub-branch office relocation to Kelapa Gading, Jakarta.

Juli | July

Penyelenggaraan 'J Trust Bank Golf Tournament' sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah dan meningkatkan sinergi dengan nasabah setia J Trust Bank.

Hosting the 'J Trust Bank Golf Tournament' as a form of appreciation to customers and to improve synergy with loyal customers.

Agustus | August

Meraih penghargaan dalam kategori 'Implementing Sustainability in Banking Products' di ajang Indonesia Best Bank ke-9 yang diselenggarakan oleh wartaekonomi.co.id.

Winning the award in 'Implementing Sustainability in Banking Products' at the 9th Indonesia Best Bank Award by wartaekonomi.co.id.

September | September

Meraih penghargaan 'Green Saving Program of the Year' di ajang Marketeers Editor's Choice Award 2024.

Winning the 'Green Saving Program of the Year' at the Marketeers Editor's Choice Award 2024.

Oktober | October

Peluncuran program tabungan dan kartu debit co-branding "TORA PERSIJA" sebagai bentuk dukungan terhadap klub sepakbola Persija.

The launch of savings product and co-branding debit card "TORA PERSIJA" as a form of support for Persija football club.

Oktober | October

Memenangkan dua kategori penghargaan berupa Top Human Capital dan The Most Committed Human Capital Leader di ajang TOP Human Capital Awards.

Winning two award categories namely Top Human Capital and the Most Committed Human Capital Leader at TOP Human Capital Awards.

November | November

Menerima penyertaan modal dari Kagawa Bank Ltd.

Obtaining capital infusion from Japan-based Kagawa Bank Ltd.

Desember | December

Meraih penghargaan khusus dalam kategori Sustainability pada ajang "IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2024.

Winning special award under Sustainability category at the IDX Channel Innovation Award 2024.

Desember | December

Meluncurkan program simpanan ramah lingkungan, TORA Blue Ocean Savings, untuk mendukung pelestarian ekosistem laut.

The launch of environmentally-friendly savings program called TORA Blue Ocean Savings, to support the preservation of marine ecosystems.

Desember | December

Menggelar paparan publik tahunan dengan agenda terkait kinerja dan rencana bisnis Bank

Holding annual public expose with agenda related to J Trust Bank's business performance and plans.

Desember | December

Peresmian kantor cabang J Trust Bank ke-47 di Kuta, Bali.

The inauguration of J Trust Bank 47th branch office in Kuta, Bali.

Desember | December

J Trust Bank mendapat penghargaan di ajang "Indonesia 20 Best Corporate Secretary Awards 2024"

J Trust Bank received an award at the "Indonesia 20 Best Corporate Secretary Awards 2024" event

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Sangga

Sangga si Komodo ramah, ceria, suka menolong dan bersahabat Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Sangga dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Komodo.

Sangga is the owner of a friendly, cheerful, helpful, and sociable nature. As one of J Trust Bank's mascots, Sangga is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animals, namely the Komodo.

LAPORAN **MANAJEMEN**

Management Reports

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Boards of Commissioner Report

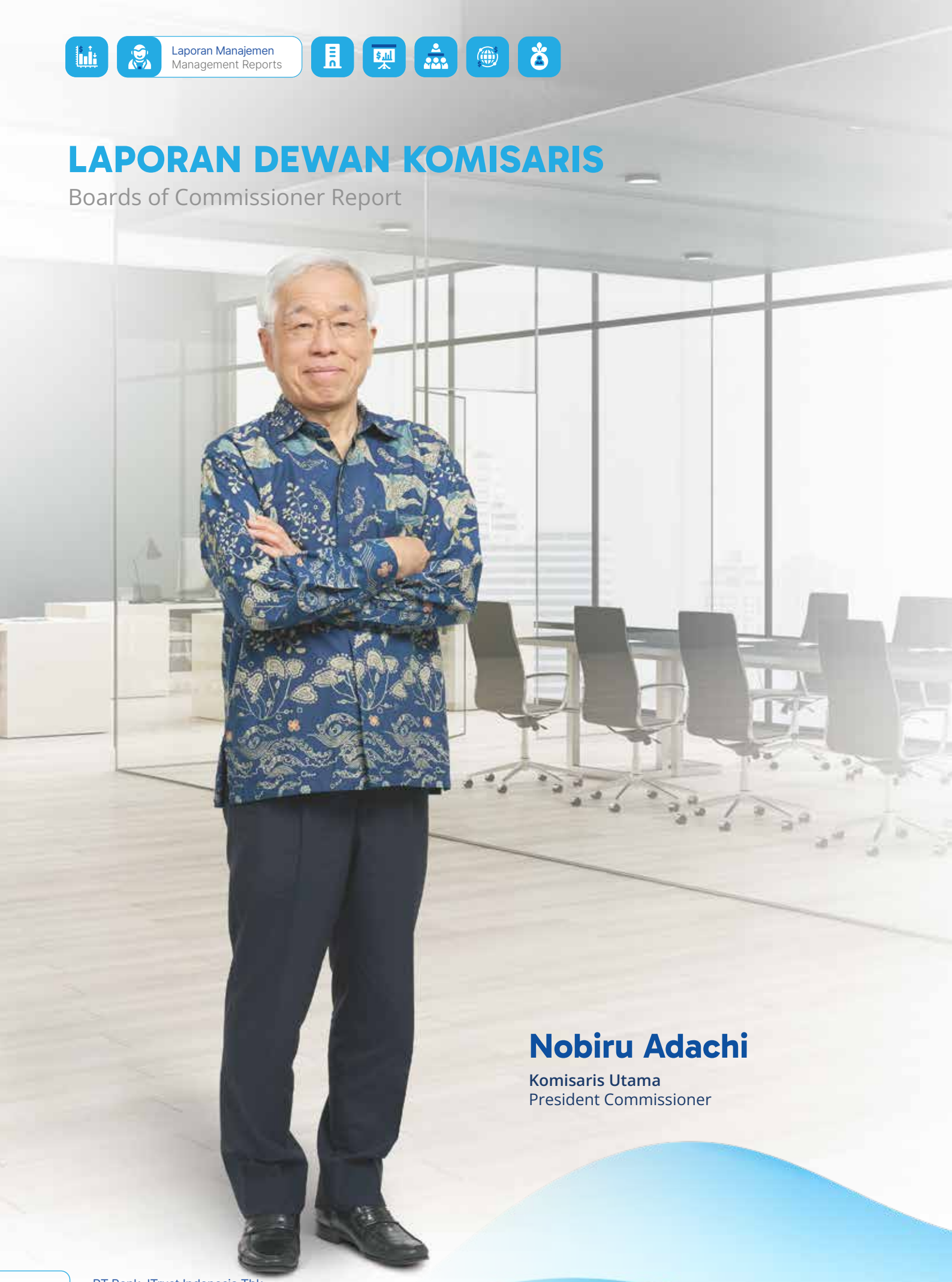

Nobiru Adachi

Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang Saham yang Terhormat,

Dear shareholders,

Tahun 2024 kembali diwarnai dengan tantangan makroekonomi dan ketegangan geopolitik yang meningkat, serta pergeseran konflik dagang yang dinamis dan berlanjutnya tekanan inflasi. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan mempengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi. Di tengah ketidakpastian yang ada, Dewan Komisaris terus konsisten melakukan pengawasan terhadap manajemen Bank serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian bank, juga kecukupan dan efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan kerangka manajemen risiko.

The year 2024 continued to be marked by macroeconomic challenges and heightened geopolitical tensions along with dynamic shifts in trade disputes and ongoing inflationary pressures. The varying pace of economic growth across regions influenced market sentiments and investment decisions. In the midst of these surrounding uncertainties, the Board of Commissioners consistently conducted oversight of the management of the Bank while ensuring adherence to prudential banking principles as well as adequacy and effectiveness of good corporate governance practices and risk management framework.

Bank menggunakan pendekatan yang penuh pertimbangan mengenai posisi dan respons terhadap masa kini dan masa depan. Dengan navigasi yang hati-hati dan cerdik sepanjang tahun, kami dengan bangga menyampaikan bahwa pada tahun 2024 J Trust Bank membukukan hasil yang baik. Kami terus berkomitmen dalam pencapaian rencana bisnis dan keberlanjutan sehingga momentum pertumbuhan Bank berlanjut, menghasilkan kinerja keuangan, operasional, dan keberlanjutan yang sehat. Kapabilitas organisasi terus ditingkatkan dan kami juga memperkuat kapabilitas digital agar dapat lebih baik melayani kebutuhan nasabah dan meningkatkan pengalaman nasabah.

Dalam laporan tahunan ini, kami menjelaskan fungsi pengawasan terhadap Bank pada tahun 2024, termasuk implementasi strategi dan kinerja Bank pada tahun 2024.

The Bank adopted a thoughtful approach towards positioning and responding for today and into the future. By navigating carefully and adroitly over the course of the year, we are pleased to share that for 2024, J Trust Bank delivered strong results. We continued to commit in achieving our business and sustainability plan so that the Bank's growth momentum continued, generating robust financial, operational, and sustainability performance. Our organizational capabilities were further enhanced and we continued to strengthen our digital capabilities strengthened to better serve our customer needs and enhance customer experiences.

In this annual report, we outlined our supervisory function towards the Bank during 2024 including the Bank's strategy implementation and performance in 2024.

Kondisi Ekonomi dan Perbankan 2024

Menurut proyeksi terakhir IMF, pertumbuhan global pada tahun 2024 diperkirakan menurun menjadi 3,1 persen dari 3,3 persen pada tahun 2023. Perbedaan pola pertumbuhan antara negara terus berlanjut, ditambah dengan meningkatnya fragmentasi perdagangan dan perekonomian global. Dinamika perekonomian global dan geopolitik memiliki dampak substansial pada kebijakan moneter bank sentral dan perkembangan pasar keuangan global.

Di tengah tantangan global, perekonomian Indonesia masih tetap kokoh dalam memitigasi dampak situasi global, mencapai pertumbuhan 5,03% YoY karena permintaan dalam negeri dan kinerja ekspor yang kuat. Inflasi masih terus rendah, mencapai 1,57 persen YoY, didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten dan sinergi erat antara bank sentral dan pemerintah. Ekspor produk pertambangan, pertanian, dan pengolahan mencatat pertumbuhan yang baik di tengah penurunan ekonomi global, sehingga surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 30,30 miliar dolar AS. Sementara, cadangan devisa tercatat sebesar 155,7 miliar dolar AS atau setara dengan 6,5 bulan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Sektor perbankan Indonesia tetap kuat dengan fungsi intermediasi yang baik dan permodalan yang cukup. Pada Desember 2024, pertumbuhan kredit bank mencapai 10,39 persen YoY, sementara pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 4,48 persen YoY. Kualitas kredit tetap sehat dengan rasio Kredit Bermasalah bersih mencapai 0,75 persen. Permodalan dan likuiditas bank tetap solid dengan Aset Likuid/Dana Pihak Ketiga dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) masing-masing mencapai 25,59 persen dan 26,89 persen.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dinilai berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Bisnis dan Keberlanjutan Bank. Permodalan dan likuiditas yang baik, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pengelolaan biaya yang efektif, dan manajemen risiko serta praktik tata kelola perusahaan yang mumpuni merupakan katalis yang mendorong kinerja kami yang kuat. J Trust Bank membukukan profitabilitas yang baik selagi mempertahankan kualitas aset yang baik dan mencapai kemajuan penting dalam komitmen kami terhadap agenda keberlanjutan Bank.

Economic and Banking Conditions in 2024

According to the latest projection by IMF, global growth in 2024 is expected to moderate to 3.1 percent from 3.3 percent in 2023. Divergence in growth patterns across countries continues, accompanied by increasing global economic and trade fragmentation. Geopolitical and global economic dynamics have a substantial impact on the monetary policy of central banks and global financial market developments.

In the midst of the global challenges, Indonesia's economy has demonstrated strong resilience in mitigating the impact of global spillovers, reaching 5.03 percent YoY range on the back of strong domestic demand and export performance. Inflation remains relatively low, reaching 1.57 percent YoY, supported by consistent monetary policy and close synergy between central bank and the government. Manufacturing, agricultural, and mining export maintained robust growth despite global economic moderation, resulting in Indonesia's trade surplus recorded at US$30.30 billion. Meanwhile, foreign currency reserves recorded at US$155.7 billion or equivalent to financing 6.5 months of imports and payment of the Government's foreign debt.

The Indonesia banking sector remained resilient as indicated by robust intermediary function and adequate capital. In December 2024, banking loans grew by 10.39 percent YoY, while third party funds grew by 4.48 percent YoY. Credit quality remained healthy with Non-Performing Loan ratio net reaching 0.75 percent. The banking liquidity and capital remained solid with Liquid Assets/Third Party Deposits and Capital Adequacy Ratio recorded at 25.59 percent and 26.89 percent, respectively.

Assessment on the Performance of Board of Directors

The performance of the Board of Directors is evaluated based on the predetermined targets described in the Bank Business and Sustainability Plan. Sound capital and liquidity, sustainable business growth, effective cost management, and adequate risk management as well as good corporate governance practices became a catalyst that drove our strong performance. J Trust Bank has delivered robust profitability while maintaining strong asset quality and make notable advancement in our commitment to the Bank's sustainability agendas.

Kredit Bank bertumbuh 11,09 persen YoY menjadi Rp26,53 triliun, disertai dengan kualitas kredit yang sehat yang tercermin pada rasio Kredit Bermasalah neto sebesar 1,43 persen. Bank juga mampu melanjutkan penetrasi pasar melalui berbagai program pemasaran dan promosi. Hasilnya, dana pihak ketiga naik 5,92 persen YoY menjadi Rp33, 90 triliun, dengan tingkat CASA yang kuat sebesar 15,14 persen. Dalam ekspansi bisnis, Bank didukung dengan permodalan dan likuiditas yang kuat, di mana rasio KPMM mencapai 13,89 persen dan AL/DPK mencapai 17,04 persen pada tahun 2024. Karenanya, Bank mampu mencapai pertumbuhan dengan laba operasional, yang didukung oleh marjin bunga bersih yang baik dan disiplin biaya, di mana laba tahun berjalan mencapai Rp2,83 miliar.

The Bank loans grew 11.09 percent YoY to Rp26.53 trillion along with healthy credit quality reflected in Non-Performing Loans – net of 1.43 percent. The Bank also managed to continue penetrating the market by conducting various marketing and promotion programs. As a result, deposits from customers increased 5.92 percent YoY to Rp33.90 trillion, along with a stronger Current Account Savings Account of 15.14 percent. In expanding its business, the Bank was supported by its strong capital and liquidity with Capital Adequacy Ratio of 13.89 percent and Liquid Assets/ Third Party Deposits of 17.04 percent for the year. As a result, the Bank managed to deliver growth with operating profit underpinned by a sound net interest margin and continued cost discipline, generating profit for the year of Rp2.83 billion.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik. Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi akan dapat melanjutkan momentum pertumbuhan Bank dan membukukan hasil yang baik pada tahun 2025.

The Board of Commissioners expressed the highest appreciation to the Board of Directors who had carried out their duties and responsibilities well amidst economic and geopolitical challenges. The Board of Commissioners is confident that the Board of Directors will continue the Bank's growth momentum and deliver strong results in 2025.

Dewan Komisaris berkomitmen terhadap perannya sebagai pengawas dan akan berhubungan erat dengan Direksi guna memastikan Bank dapat tumbuh berkelanjutan di tengah ketidakpastian dan tantangan agar dapat memberikan hasil yang optimal kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners is committed to its supervisory role and will work closely with the Board of Directors to ensure that the Bank can grow sustainably through uncertain times and challenges to deliver optimal value to our shareholders and all stakeholders.

Pengawasan atas Implementasi Strategi Bank

Dewan Komisaris mengawasi formulasi dan implementasi inisiatif strategis Bank, serta meninjau dan menyetujui rencana korporasi, bisnis, dan keberlanjutan Bank. Dewan Komisaris juga memberikan nasehat dan arahan sepanjang tahun melalui diskusi yang mencakup kinerja bisnis dan keberlanjutan Bank, termasuk mengawasi aktivitas pembiayaan dan pendanaan manajemen, rencana permodalan, manajemen risiko dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, rencana teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia, serta program keberlanjutan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bekerja bersama dan melalui Komite-komite, mendiskusikan dan menerima laporan terkini mengenai berbagai hal yang memiliki dampak terhadap Bank.

Supervision on the Bank's Strategy Implementation

The Board of Commissioners oversaw the formulation and implementation of the Bank's strategic initiatives as well as reviewed and approved the Bank's corporate, business, and sustainability plan. The Board of Commissioners also provided advice and guidance throughout the year through discussions covering the Bank's business and sustainability performances, including overseeing management's lending and funding activities, capital plan, risk management and good corporate governance practices, information technology and human resources development plan, as well as sustainability programs. In carrying out these responsibilities, the Board of Commissioners, working with and through its Committees, discussed and received regular updates on a wide variety of matters affecting the Bank.

Dewan Komisaris berkomunikasi secara berkala dengan Direksi untuk memastikan Bank dapat mencapai target

The Board of Commissioners communicated regularly with the Board of Directors to ensure the Bank can reach

bisnis sesuai rencana dan menumbuhkan bisnis secara hati-hati dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, kami terus mengintensifkan komunikasi dengan Direksi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan berlanjutnya ketidakpastian situasi makroekonomi.

Kami memiliki jalur komunikasi melalui rapat resmi seperti rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta komunikasi yang lebih informal. Dewan Komisaris mengadakan enam rapat gabungan dengan Direksi pada tahun 2024 untuk membahas strategi Bank dalam mengatasi tantangan dan ketidakpastian. Kami percaya bahwa Direksi telah menjalankan kepemimpinan yang kuat yang berfokus pada eksekusi strategi Bank dengan disiplin dan konsisten, sehingga menghasilkan kinerja bisnis dan keberlanjutan Bank yang mumpuni.

Pandangan atas Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap kuat, yang didukung dengan kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi di mana pemerintahan baru secara bertahap menjalankan bantuan sosial dan program investasi. Ekonomi Indonesia diperkirakan bertumbuh sebesar 5,1-5,5 persen pada tahun 2025, dan inflasi diharapkan tetap berada di dalam target acuan Bank Indonesia. Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan melebar karena dampak dari situasi global.

Di industri perbankan, sektor perbankan diharapkan tetap stabil dengan rasio KPMM yang tinggi, rasio Kredit Bermasalah yang rendah, dan profitabilitas yang kuat. Kredit sektor perbankan diharapkan untuk bertumbuh baik, sehingga berkontribusi pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diharapkan berjalan bersamaan dengan ekspansi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dewan Komisaris meyakini bahwa, di tengah dinamika perekonomian global dan geopolitik, Direksi akan mampu mencapai target-target Rencana Bisnis Bank pada tahun 2025 karena telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang ada. Kepemimpinan J Trust Bank memiliki pengalaman dan strategi untuk terus menjalankan prioritas strategis dan memanfaatkan peluang di pasar, serta terus berjaga-jaga terhadap risiko yang ada. Kami optimistis akan masa depan dan ingin terus memberikan nilai kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

its business targets as planned and grow its business prudently and sustainably. In 2024, we continued to intensify communication with the Board of Directors in the midst of elevation of geopolitical tensions and continuing uncertainties in the macroeconomic environment.

We managed communication channels through formal meetings such as joint meetings between the Board of Commissioners and Directors, as well as through less formal communication. The Board of Commissioners held six joint meetings with the Board of Directors in 2024 to discuss the Bank's strategy to overcome challenges and uncertainties. We believe that the Board of Directors has put strong leadership focused on consistent and disciplined execution of the Bank's strategy, resulting in notable achievements of the Bank's business and sustainability performances.

View on Business Prospects

Indonesia's economy is projected to remain resilient supported by a boost in public consumption and investment as the new administration gradually implements its social assistance and investment programs. The Indonesian economy is projected to grow at 5.1–5.5 percent in 2025 and inflation is anticipated to stay within the central bank's target band. The current account deficit is expected to widen due to the impact of global spillovers.

Looking at the industry, the stability of the banking sector is expected to be preserved with high Capital Adequacy Ratio, low Non-Performing Loans and strong profitability. Loans disbursed by the banking industry is expected to generate notable growth, contributing to financing economic growth. This condition is accompanied by continued expansion of the digital economic and financial ecosystem which will continue to drive inclusive economic growth. The Board of Commissioners is confident that in spite of geopolitical and global economic dynamics, the Board of Directors will be able to achieve the Bank's Business Plan targets in 2025 as they have demonstrated their ability to manage the challenges faced. J Trust Bank's leadership has the experience and strategy to continue to execute strategic priorities and capitalize on the opportunities in the markets, whilst being on guard against potential risks. We are optimistic about the future and look forward to continue to deliver value to our shareholders and all stakeholders.

Pandangan atas Tata Kelola Perusahaan

Sepanjang tahun, obyektif utama kami adalah memonitor agar sistem tata kelola Bank tetap layak dan tangkas untuk mencapai obyektif kami dan merespons risiko yang terus bergerak. Tantangan-tantangan ini termasuk mengakselerasi kinerja selagi mengarungi peraturan-peraturan yang ketat dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip perbankan yang bertanggung jawab.

Kerangka tata kelola Bank bertumpu pada budaya risiko yang kuat, kepemimpinan yang kompeten, pengendalian internal yang efektif, transparansi dan akuntabilitas, serta hasil yang berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan. Dewan Komisaris melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap praktik-praktik tata kelola Bank, memonitor kecukupan dan efektivitas praktik-praktik tata kelola Bank, dan memberikan wawasan untuk terus memperbaiki implementasi praktik-pratik tata kelola perusahaan di seluruh tingkatan organisasi guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai jangka panjang untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris akan terus melakukan pengawasan agar Bank memperbaiki dan menyesuaikan susunan tata kelola perusahaan yang baik dengan ketentuan-ketentuan terkini serta praktik-praktik terbaik, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja Bank, menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, dan memberikan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang, agar dapat memberikan kontribusi positif pada industri perbankan dan ekonomi Indonesia.

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Budaya manajemen risiko yang kuat dan manajemen risiko yang efektif adalah krusial bagi pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan Bank. Bank memiliki pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup semua tipe risiko, didukung dengan budaya risiko yang kuat. Pendekatan ini terwujud di dalam kerangka manajemen risiko kami yang menggabungkan selera risiko dan tata kelola dan mencakup berbagai prinsip, kebijakan, dan praktik yang digunakan untuk mengendalikan risiko.

Obyektif utama kami adalah menjaga Bank dalam menjalankan bisnis dan risiko terkait melalui cara yang memberikan ketahanan nilai kepada nasabah, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Jenis-jenis risiko utama dijaga dengan kompetensi dan sumber daya yang dibutuhkan, pedoman dan prosedur

View on Corporate Governance

Throughout the year, our primary objective has been to monitor that the Bank's governance systems remain fit and agile to deliver on our objectives and to respond to evolving risks. These challenges included accelerating performance while navigating tightened regulations and remain committed to the principles of responsible banking.

The Bank's governance framework is anchored on a strong risk culture, competent leadership, effective internal controls, transparency and accountability, as well as sustainability outcomes for all stakeholders. The Board of Commissioners evaluated thoroughly the Bank's corporate governance practices, monitored the adequacy and effectiveness of the Bank's corporate governance practices, and provided insights to continuously improving the implementation of corporate governance practices at all levels of the organization to create sustainable business growth and enhance long-term value for all stakeholders.

The Board of Commissioners will continue to oversee so that the Bank improves and adapts its good corporate governance arrangements to the latest requirements as well as best practices so that it can further boost the Bank's performance, protect the interest of all stakeholders, and provide a long-term sustainable value so that it can provide positive contributions to the banking industry and the Indonesian economy.

Risk Management and Internal Control

A strong risk management culture and effective risk management are crucial for the Bank's long-term growth and sustainability. The Bank has a comprehensive and integrated risk management approach that covers all types of risks, underpinned by a strong risk management culture. This approach is embodied in our risk management framework which incorporates our risk appetite and governance and covers the principles, policies, and practices we use to manage risks.

Our primary objective is to look after the Bank in conducting the businesses and its associated risks in a way that provides enduring value for our customers, shareholders, employees, and communities. Principal risk types are managed with the requisite competencies and resources, detailed guidelines and procedures,

yang rinci, infrastruktur dan sistem yang sesuai dengan parameter pengambilan risiko kami. Kami memberikan perhatian penuh dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan melaporkan risiko-risiko kami. Pendekatan dan kerangka manajemen risiko Bank secara berkala ditinjau dan ditingkatkan untuk memasukkan praktik-praktik terbaik di kelasnya agar secara konsisten dapat memenuhi kepentingan utama para pemangku kepentingan.

infrastructure and system that commensurate with our risk-taking parameters. We give thoughtful attention to identifying, measuring, monitoring, and reporting of our risks. The Bank's risk management frameworks and approaches are periodically reviewed and enhanced to incorporate best-in-class practices to consistently serve the best interests of our stakeholders.

Penerapan Sistem Whistleblowing

Sistem whistleblowing J Trust Bank adalah komponen kunci dari tindakan efektif dan kuat dalam manajemen risiko dan kerangka tata kelola perusahaan. Sistem whistleblowing adalah salah satu kanal yang mendorong dan memberdayakan insan-insan kami untuk berani berbicara dan mengangkat masalah pelanggaran.

Sistem whistleblowing memberikan perlindungan yang mumpuni bagi para individu yang melaporkan pelanggaran, memastikan tidak adanya kumandang terhadap mereka, dan memainkan peran penting dalam menjaga integritas Bank. Informasi yang diterima melalui sistem whistleblowing membantu mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin bisa tidak terdeteksi dan menindak hal-hal yang tidak mendukung tujuan, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan.

Dewan Komisaris terus meyakini bahwa setiap laporan whistleblowing telah ditindaklanjuti dengan sesuai. Dewan Komisaris juga memastikan efektivitas implementasi sistem whistleblowing terutama terkait dengan keamanan pelapor pelanggaran.

Whistleblowing System Implementation

J Trust Bank's whistleblowing system is a key component of our strong and effective conduct in risk management and corporate governance framework. The whistleblowing system is one of many channels encouraging and empowering our people to speak up and raise misconduct concerns.

The whistleblowing system provide strong protections for individuals who disclose misconduct, assuring that there will be no repercussion against them, and play a pivotal role in maintaining the Bank's integrity. The information received through the whistleblowing system helps to identify misconduct that may not otherwise be detected and to act on issues which do not support our purpose, values, and expected behaviors.

The Board of Commissioners always ensures that every whistleblowing report has been followed up properly. The Board of Commissioners also ensures the effectiveness of the whistleblowing system implementation especially concerning the safety of whistleblowers.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Karyawan J Trust Bank adalah penting bagi pertumbuhan strategis dan keberhasilan Bank. Karenanya, kami terus melibatkan para karyawan dan mendorong suatu budaya yang memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan yang memberikan hasil yang tepat kepada para nasabah dan masyarakat, serta bisnis kami.

Kami terus memelihara lingkungan kerja yang aman dan inklusif, melindungi hak-hak semua karyawan untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari perilaku buruk. Sebuah lingkungan yang inklusif di mana kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan didorong agar membantu para insan kami mencapai potensi

Human Resources and Information Technology

J Trust Bank employees are essential to the Bank's strategic growth and success. Hence, we continued to engage our people and promote a culture which empowers employees to make decisions that deliver the right outcomes for our customers and communities, as well as our business.

We also continued to foster a safe and inclusive workplace, protecting the right of all employees to work in an environment that is free from misconduct. An inclusive environment where health, safety, and well-being is promoted to help our people reach their

penuh. Selain itu, kami terus mempertahankan lingkungan yang dapat menerima perbedaan dan di mana karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Kami memahami adanya perubahan besar di dunia kerja sehingga terus menyediakan peluang bagi karyawan untuk belajar dan berkembang, meningkatkan kemampuan dan peluang karir. Pendekatan kami akan *upskilling* dan *reskilling* berfokus pada kemampuan teknis, perilaku, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mencapai strategi kami.

Kami juga memulai transformasi digital untuk memudahkan nasabah dalam melakukan keseluruhan transaksi harian sementara terus meningkatkan ketahanan teknologi dan tata kelola untuk mencapai pengalaman nasabah yang luar biasa, didukung dengan teknologi yang terpercaya dan aman. Bank akan terus melanjutkan upaya untuk menciptakan hubungan nasabah yang lebih erat dan dalam serta pengalaman nasabah yang lebih sesuai kebutuhan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank berkomitmen mendukung kapasitas dan ketahanan masyarakat, berkontribusi pada tujuan kami untuk membantu masyarakat semakin maju dan berkembang. Sepanjang tahun, kami terus bekerja erat dengan organisasi masyarakat dan institusi sosial, serta melibatkan tenaga kerja sebagai sukarelawan sehingga program-program dapat dieksekusi dengan baik, mencapai target spesifik dan terukur.

Salah satu program terkemuka kami, peningkatan kapasitas menggunakan material ramah lingkungan untuk penjahit wanita rumahan, telah mendapatkan berbagai pengakuan pada tahun sebelumnya dan sampai hari ini. Belum lama ini, kami menerima penghargaan Padmamitra Award 2024 dan Pemerintah Provinsi Jakarta karena sepanjang program berlangsung kami tidak hanya mendukung kewiraswastaan dan penciptaan lapangan kerja untuk wanita, namun juga berkontribusi pada upaya menyelamatkan ekosistem laut dengan mendorong produk-produk berkelanjutan untuk masa depan yang berkelanjutan.

Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

Perjalanan keberlanjutan kami telah mencapai pendekatan yang pragmatis, melibatkan hubungan dengan pemangku kepentingan yang menyeluruh serta

full potential. In addition, we continued to maintain an environment where we embrace differences and where employees have equitable opportunities to grow.

We recognized the rapidly changing world of work so we continued providing opportunities to learn and grow for our employees, enhancing their abilities and career opportunities. Our approach to upskilling and reskilling focused on the technical, behavioral, and leadership skills required to deliver our strategy.

We also embarked our digital transformation to make it easier for our customers to carry out the full range of everyday transactions while continue to enhance technology resiliency and governance to deliver exceptional customer experiences underpinned by reliable and safe technology. The Bank will continue to underpin our efforts to create stickier and deeper customer relationships as well as a more tailored customer experience.

Corporate Social Responsibility

The Bank is committed to support the communities' capacity and resilience, contributing to our purpose to help communities advanced and thrive. Throughout the year, we have continued to work closely with community organizations and social enterprises as well as to engage volunteers from our workforce so that the programs can be executed well, achieving specific and measurable goals.

One of our distinguished programs – capacity building using eco-friendly material for home-based female tailor, have received several recognitions in the previous year and continued to receive the acknowledgment up to this point. Recently, we have received Padmamitra Award 2024 from the DKI Jakarta Provincial Government because throughout this program we did not only encourage entrepreneurship and job creation for women but also contributed to efforts to save the marine ecosystem by promoting sustainable product for a sustainable future.

Sustainable Finance Initiatives

Our sustainability journey has embraced a pragmatic approach, involving a thorough stakeholder relationships as well as sustainability culture and

budaya keberlanjutan dan tata kelola. Komitmen kami adalah menciptakan dampak positif, mendorong kinerja bisnis yang bertanggung jawab, dan terlibat secara aktif dan terbuka dengan pemangku kepentingan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mendorong kesetaraan sosial dan keadilan sosial.

Strategi keberlanjutan kami didasarkan pada tiga pilar utama, termasuk memampukan transisi menuju ekonomi rendah karbon, mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta memastikan strategi implementasi aspek keberlanjutan Bank didasarkan pada fondasi yang kokoh. Kami terus meningkatkan agenda keberlanjutan dan perkembangannya sejauh ini menunjukkan komitmen kami terhadap kontribusi dalam transisi menuju masa depan tanpa emisi.

Beraksi terhadap perubahan iklim sangatlah penting karena kita telah mencapai titik kritis dalam transisi menuju ekonomi tanpa emisi. Kami terus memabngun kapabilitas untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap operasional kami dan mendukung transisi nasabah dan daya tahan pada masa depan berkelanjutan. Kami juga terus berkolaborasi dengan pihak-pihak dalam menjalankan program keberlanjutan terkait iklim untuk menanam pohon bakau guna menyediakan habitat penting yang mencakup pesisir tropis dan melindungi masyarakat dari peristiwa cuaca ekstrem.

Sepanjang tahun, kami terus bercita-cita menciptakan dampak positif melalui pemberian kredit terkait inisiatif hijau, mendorong produk deposito agar berkontribusi mencegah kerusakan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat dengan mendorong kesehatan dan kesejahteraan.

Penilaian atas Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris didukung oleh tiga komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam hal fungsi pengawasan terhadap hal-hal terkait kualitas informasi keuangan, efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal, efektivitas audit oleh auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

governance. Our commitment is to create positive impact, promote responsible business performance, and engage actively and openly with our stakeholders to prevent environmental damage as well as promote social equality and equity.

Our sustainability strategy anchored on three robust pillars such as enabling the transition to a low- carbon economy, promoting economic development and social well-being, and ensuring that the Bank's sustanability implementation strategy is based on a strong foundation. We continued to advance our sustainability agenda and the progress so far demonstrates our commitment to contribute to the transition to a net zero future.

Taking action on climate change is very important as we reaches a critical point in the transition to a net zero economy. We continued to build our capability to reduce the climate change impact of our operations and support our customers' transition and resilience to sustainable future. We also continued to collaborate with several parties in implementing climate-related sustainability programs to plant mangroves to provide critical habitat covering tropical coasts and shield communities from extreme weather events.

Throughout the year, we also continue to aspire to create positive impact by providing loans related to green initiatives, promoting deposit products to contribute prevent environmental damage, and empowering communities by promoting health and well-being.

Assessment on the Performance of Committees under the Board of Commissioners

In conducting its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by three committees, namely: Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

Audit Committee assisted the Board of Commissioners in its supervisory function on matters related to the quality of financial information, the effectiveness and adequacy of internal control systems, effectiveness of audits by internal and external auditors, and compliance to prevailing laws and regulations.

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasehat kepada Direksi guna memastikan praktik manajemen risiko Bank memenuhi elemen prosedur dan metodologi manajemen risiko yang cukup, sesuai dengan selera risiko dan toleransi risiko Bank.

Risk Oversight Committee assisted the Board of Commissioners in providing advices to the Board of Directors to ensure that the Bank's risk management practices meet the elements of adequate risk management procedures and methodologies, within the Bank's risk appetite and tolerance.

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal terkait nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pihak Independen serta kebijakan remunerasi di Bank.

Nomination and Remuneration Committee assisted the Board of Commissioners in matters relating to the nomination of member of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Independent Parties as well as remuneration policies within the Bank.

Dewan Komisaris mengakui bahwa ketiga Komite tersebut telah memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga sepanjang tahun 2024 sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing. Dewan Komisaris ingin menunjukkan apresiasi terhadap komite-komite yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners acknowledged that all three Committees have provided valuable inputs and recommendations throughout the year 2024 in line with their respective areas of responsibilities. The Board of Commissioners would like to show its appreciation to these committees have optimally performed their duties and responsibilities in supporting the oversight function of the Board of Commissioners.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tidak ada perubahan pada susuna Dewan Komisaris Bank. Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris J Trust Bank sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini:

Changes in the Composition of Board of Commissioners

There is no change in the composition of the Bank's Board of Commissioners. The following is the composition of Board of Commissioners of J Trust Bank as of the date of this Annual Report:

Komisaris Utama	**Nobiru Adachi**	President Commissioner
Komisaris	**Nobuiku Chiba**	Commissioner
Komisaris Independen	**Iwan Nataliputra**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Benny Siswanto**	Independent Commissioner

Apresiasi

Mewakili Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Direksi Bank, manajemen, dan karyawan atas kerja keras dan dedikasinya di tengah kondisi perekonomian dan geopolitik yang penuh tantangan pada tahun 2024. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pemegang saham, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan atas dukungannya terus menerus pada Bank. Terlepas dari berbagai tantangan, J Trust Bank menutup tahun dengan pencapaian luar biasa, dan akan terus membukukan kinerja yang kuat dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Appreciation

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to express gratitude and appreciation to the Bank's Board of Directors, management, and employees for their hard work and dedication in the midst of challenging economic and geopolitical conditions in 2024. I also want to express gratitude and appreciation to all shareholders, business partners, and stakeholders for their continued support to the Bank. Despite many challenges, J Trust Bank concluded this year with remarkable achievements, and will continue to deliver stronger and sustainable performance in the coming years and contribute positive impact to the communities.

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

DEWAN KOMISARIS

Boards of Commissioner

Nobuiku Chiba
Komisaris
Commissioner

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

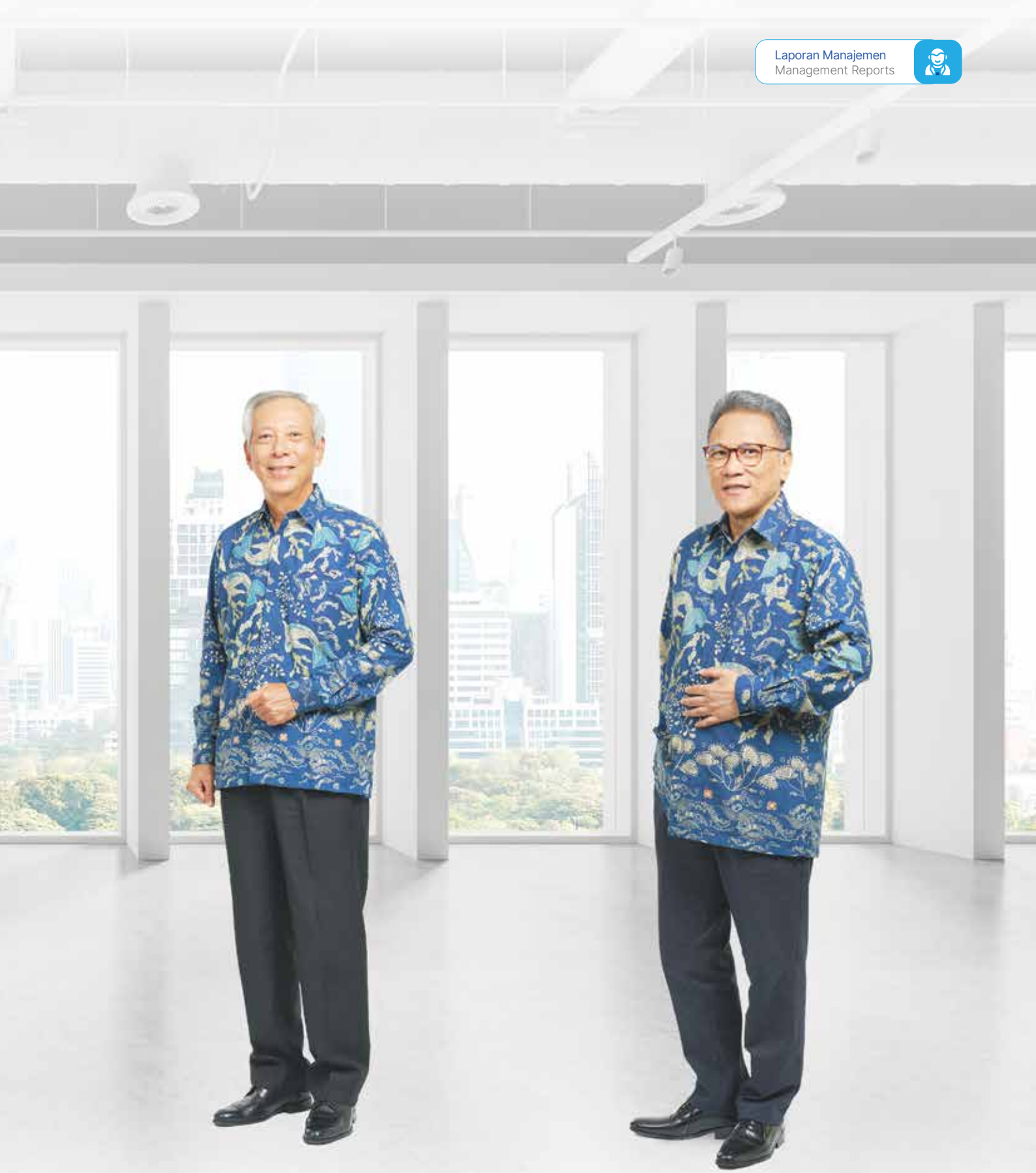

Iwan Nataliputra
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Benny Siswanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI [OJK D.1][GRI 2-22]

Report of the Board of Directors

Ritsuo Fukadai

Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham yang Terhormat,

Dear shareholders,

Walaupun menghadapi kondisi yang penuh tantangan, J Trust Bank terus meraih serangkaian hasil yang positif pada tahun keuangan 2024. Hasil yang ada memperlihatkan bahwa strategi kami adalah tepat, sehingga dapat meraih proposisi nasabah yang lebih kuat, hasil keuangan berkelanjutan untuk para pemegang saham, dan hasil keberlanjutan yang lebih hebat bagi masyarakat.

While operating in a challenging environment, J Trust Bank continued to deliver a strong set of results in the 2024 financial year. Our results demonstrate our strategy has served us well, delivering stronger customer propositions, sustainable financial outcomes for shareholders, and greater sustainability outcomes for the community.

Sepanjang tahun, kami terus berfokus untuk mengedepankan nasabah. Kami mencoba memperluas jaringan kantor serta berinovasi dan meningkatkan layanan untuk memberikan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah kami. Fokus nasabah kami, dikombinasikan dengan eksekusi operasional dan strategis yang disiplin dan konsisten, mampu membawa kinerja yang solid pada tahun 2024.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan berlanjutnya ketidakpastian di situasi makroekonomi, neraca kami yang tetap solid dengan likuiditas berlimpah, ekspansi bisnis yang hati-hati, dan permodalan yang sehat mampu memberikan ketahanan yang kuat terhadap ketidakpastian. Kami juga terus mengembangkan agenda keberlanjutan dengan aktif membangun kemitraan ekosistem untuk melakukan hal signifikan pada lingkungan dan masyarakat. Momentum pertumbuhan Bank terus berlanjut pada tahun 2024 dan dengan fundamental yang kuat, Bank berada di posisi yang baik untuk etrus tumbuh berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Throughout the year, we continued our focus on putting customers first. We pursued to expand our branch network as well as to innovate and enhance our services to deliver best-in-class experiences to our customers. Our customer focus, combined with consistent and disciplined strategic and operational execution, has delivered solid performance for the year.

In the midst of elevated geopolitical tensions and continuing uncertainties in the macroeconomic environment, our solid balance sheet with ample liquidity, prudent business expansion, and healthy capital provide us with strong buffers against uncertainties. We also continued to advance the sustainability agenda by actively built ecosystem partnerships to enable significant to the environment and community. The growth momentum of the Bank has continued in 2024 and with its strong fundamentals, the Bank is well positioned to grow sustainably in the coming years.

Kondisi Ekonomi dan Perbankan 2024

Tahun 2024 merupakan salah satu periode yang penuh gejolak. Peningkatan ketegangan geopolitik mengganggu arus perdagangan dan rantai pasokan. Perbedaan jalur kebijakan moneter antara negara menghasilkan pergerakan yang signifikan pada nilai tukar dan arus modal. Ketegangan perdagangan global yang meningkat menambah intensitas kebijakan proteksionisme. Di tengah meningkatnya ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih tetap kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,03 persen, didorong oleh permintaan dalam negeri yang kuat.

Dari perspektif perbankan dalam negeri, permintaan kredit masih tetap kuat sementara bank menghadapi kompetisi ketat untuk dana pihak ketiga, sehingga menekan Marjin Bunga Bersih. Pertumbuhan kredit sektor perbankan mencapai 10,39 persen (YoY) sementara dana pihak ketiga bertumbuh sebesar 4,48 persen YoY. Kualitas kredit tetap sehat dengan rasio Kredit Bermasalah bersih sebesar 0,75 persen.

Fungsi intermediasi bank dan daya tahan industri perbankan Indonesia tetap solid, didukung dengan permodalan dan likuiditas yang kuat. Permodalan bank masih kuat untuk menahan potensi guncangan yang merugikan, dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 26,89 persen, sementara likuiditas industri masih tetap berlimpah seperti terlihat pada Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga sebesar 25,59 persen. Secara keseluruhan, profitabilitas dan efisiensi sektor perbankan terus berada dalam kondisi yang baik dengan Marjin Bunga Bersih sebesar 4,69 persen dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 79,97 persen.

Analisis Kinerja Bank Tahun 2024

Strategi dan Kebijakan

Bank berfokus pada peluang pertumbuhan yang hati-hati dalam segmen bisnis dan nasabah, mengembangkan kehadirannya di dalam negeri, dan meluncurkan solusi berkelanjutan untuk nasabah. Kami terus mempertahankan posisi likuiditas yang kuat untuk mendukung pertumbuhan kredit dan memperkuat kapabilitas digital agar dapat melayani kebutuhan nasabah dengan lebih baik, meningkatkan pengalaman nasabah, mendorong produktivitas, dan memperkuat segmen fee-based.

Kinerja Bank pada tahun 2024 menunjukkan fokus dalam meraih laba yang berkelanjutan selagi mengembangkan bisnis dan mempertahankan

Economic and Banking Conditions in 2024

The year 2024 emerged as one of the volatile periods. Escalating geopolitical tensions distorted trade flows and disrupted supply chains. The divergent paths of monetary policy across countries generated significant movements in exchange rates and capital flows. Global trade tensions elevated added intensifications of protectionist policies. Against the backdrop of elevated uncertainty, Indonesia's growth remained resilient in 2024 with GDP growth of 5.03 percent, which was driven by robust domestic demand.

From the banking perspective in the country, loan demand remained robust while banks encountered fierce competition for deposits, exerting pressure on Net Interest Margin. Loan growth in the banking industry expanded by 10.39 percent (YoY) while third party funds grew by 4.48 percent YoY. Credit quality remained healthy with Non-Performing Loan ratio net of 0.75 percent.

Bank intermediation function and banking industry resilience in Indonesia remained solid supported by strong capital and liquidity. The industry's capital remained strong to withstand potential adverse shocks with Capital Adequacy Ratio of 26.89 percent, while liquidity in the industry remained ample as can be seen by Liquid Assets/Third Party Deposits at 25.59 percent. Overall, banking sector profitability and efficiency continued to be in a good condition with Net Interest Margin of 4.69 percent and operating cost to operating income of 79.97 percent.

Analysis on Bank Performance in 2023

Strategies and Policies

The Bank focused on prudent growth opportunities across its customers and business segments, expanded its presence in the country, and deployed sustainable solutions to customers. We also continued to maintain a strong liquidity position to support loan growth and strengthen digital capabilities to better serve customer needs, enhance customer experiences, drive productivity, and reinforce fee-based segment.

Our performance in 2024 demonstrated the continued focus on the delivery of sustainable returns while growing our businesses and maintaining a healthy

posisi keuangan yang sehat. Kredit bruto menopang momentum pertumbuhan, dengan kenaikan sebesar 11,09 persen YoY, di ats pertumbuhan industri sebesar 10,39 persen YoY. Kualitas kredit tetap baik, menunjukkan pertumbuhan bisnis yang hati-hati dengan rasio Kredit Bermasalah bersih sebesar 1,43 persen. Posisi permodalan dan likuiditas tetap kuat, dengan rasio KPMM sebesar 13,89 persen dan AL/DP sebesar 17,04 persen. Dana pihak ketiga juga mempertahankan momentum pertumbuhan, naik 5,92 persen YoY. Pertumbuhan di berbagai lini bisnis dan berlanjutnya disiplin biaya berkontribusi pada kinerja Bank yang kuat, sehingga mencapai laba tahun berjalan sebesar Rp2,83 miliar.

financial position. Gross loans sustained growth momentum, increasing by 11.09 percent YoY, higher than the industry growth of 10.39 percent YoY. Credit quality continued to be resilient – demonstrating prudent business growth with Non-Performing Loans net of 1.43 percent. Our capital and liquidity position remained strong with Capital Adequacy Ratio of 13.89 percent and Liquid Assets/Third Party Deposits of 17.04 percent. Deposits from customers also sustained growth momentum, increasing by 5.92 percent YoY. Growth across our businesses and continued cost discipline contributed to the Bank's strong performance, generating profit for the period of Rp2.83 billion.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Pelaksanaannya

Dalam memformulasikan arah strategis Bank, Direksi dengan sadar menyadari pentingnya kebutuhan untuk menumbuhkan dan memberikan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Direksi membuat rencana bisnis dan keberlanjutan, mengidentifikasi prioritas, dan meraih dan mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan rencana tersebut.

Direksi menekankan pada kepemimpinan cerdas untuk mengatur, mengawasi, dan mengkomunikasikan kinerja Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang efektif. Direksi juga terus meninjau implementasi strategi, memastikan agar strategi sesuai dengan kondisi pasar yang kian berubah, dan siap memformulasikan strategi baru manakala dibutuhkan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh komite-komite di bawah Direksi yang secara rutin bertemu dan bertanggung jawab atas bidang tertentu pada kegiatan operasional dan bisnis.

Pada tahun 2024, Bank berfokus menumbuhkan kredit secara hati-hati, didukung dengan dana pihak ketiga dan pendapatan fee-based yang baik, permodalan dan likuiditas yang kuat untuk mengarungi tantangan dan meraih peluang pertumbuhan, peningkatan jaringan dan kapabilitas digital, serta penyempurnaan profitabilitas. Bank juga terus memperkuat program keberlanjutan yang mencakup transisi menuju masa depan tanpa emisi, promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan implementasi kerangka tata kelola yang kuat guna meraih strategi keberlanjutan Bank.

Board of Directors' Role in Strategy Formulation and Implementation

In formulating the Bank's strategic direction, the Board of Directors conscientiously recognizes the pivotal need to cultivate and deliver long-term sustainable value for the Bank's shareholders and stakeholders. The Board of Directors set the business and sustainability plan, identified the priorities, and secured and allocated resources to implement the plan.

The Board of Directors emphasis on astute leadership on managing, monitoring, and communicating of the Bank's performance, conformance to the prevailing regulations as well as effective governance and risk management framework. The Board of Directors also continuously reviewed the strategy implementation, ensured the strategy is adequate in light of the ever changing market conditions, and prompted the formulation of new strategy when necessary. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors were supported by the committees under Board of Directors who met regularly and were responsible of specific areas of business and operational activities.

In 2024, the Bank focused to grow loans prudently supported by sound third party funds and fee-based income, strong capital and liquidity to navigate through challenges and to capitalize on growth opportunities, enhancement of network and digital capabilities, and refinement of profitability. The Bank also continued progressing its sustainable programs covering transition to a net zero future, promotion of economic development and social well-being, and implementation of strong governance framework to deliver the Bank's sustainable strategy.

Target vs Pencapaian

Pada tahun 2024, total kredit naik sebesar 11,09 persen menjadi Rp26,53 triliun dari Rp23,88 triliun pada tahun 2023. Kredit yang diberikan pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan target di dalam Rencana Bisnis Bank yaitu sebesar Rp28,32 triliun karena Bank berhati-hati dan bersikap strategis dalam memberikan kredit untuk mencapai kualitas kredit yang sehat.

Total dana pihak ketiga naik sebesar 5,92 persen menjadi Rp33,90 triliun pada tahun 2024, dari Rp32,01 triliun pada tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan target di dalam Rencana Bisnis Bank sebesar Rp34,88 triliun karena strategi ekspansi yang hati-hati.

Bank memiliki permodalan yang memadai dengan KPMM sebesar 13,89 persen, dibandingkan 13,02 persen di RBB, sehingga mendukung Bank untuk menghadapi tantangan selagi mencapai peluang pertumbuhan. Bank juga mampu meningkatkan profitabilitas menghasilkan NIM sebesar 2,30 persen dibandingkan 2,21 persen di RBB. Menghadapi ketidakpastian yang ada, Bank mampu mencapai hasil yang baik serta menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, berkontribusi pada ekonomi, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Tantangan Tahun 2024

Ketidakpastian global berlanjut pada tahun 2024 akibat dari ketidakstabilan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan transisi politik di berbagai negara. Konflik di Timur Tengah yang berlanjut memunculkan kekhawatiran terkait potensi gangguan harga minyak karena hambatan rantai pasokan. Pemerintahan AS yang baru mengubah dinamika geopolitik dan berdampak pada kebijakan ekonomi di seluruh dunia.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap baik di tengah dinamika perekonomian global dan geopolitik. Kebijakan fiskal Indonesia digeser menuju stimulus ekonomi untuk menarik investasi dan mendorong konsumsi swasta, sementara bank sentral memprioritaskan untuk melakukan kebijakan moneter dalam menjaga ekspektasi inflasi dan memitigasi dampak limpahan global. Kondisi ini membebani kegiatan pembiayaan dan pendanaan Bank serta struktur biaya Bank.

Di tengah lingkungan yang penuh tantangan, J Trust Bank mampu memperbaiki fungsi intermediasi yang terlihat dari portofolio pendanaan dan kredit yang

Targets vs Achievements

In 2024, total loans increased 11.09 percent to Rp26.53 trillion from Rp23.88 trillion in 2023. The actual loan disbursed for the year was lower compared to the target in the Bank's Business Plan of Rp28.32 trillion as the Bank disbursed loans cautiously and strategically to pursue healthy loan quality.

Total deposits from customers increased 5.92 percent to Rp33.90 trillion in 2024 compared to Rp32.01 trillion in the previous year. The actual deposits from customers in this year was lower compared to the target in the Bank's Business Plan of Rp34.88 trillion due to prudent expansion strategy.

The Bank has adequate capital with CAR of 13.89 percent compared to 13.02 percent in the business plan, supporting the Bank to manage challenges while pursuing growth opportunities. The Bank also managed to enhance its profitability, generating NIM of 2.30 percent compared to 2.21 percent in the business plan. Against the surrounding uncertainties, the Bank managed to achieve strong results while generating sustainable business growth, contributing to economic, community, and environmental sustainability.

Challenges in 2024

Global uncertainties persisted in 2024 given the economic instability, geopolitical tensions, and political transitions in several countries. The ongoing conflict in the Middle East continues to raise concerns regarding potential disruptions to oil prices due to supply chain disturbances. The new US administration reshaped geopolitical dynamics and affect economic policies worldwide.

Indonesia economic performance remained resilient in the midst of geopolitical and global economic dynamics. Indonesia's fiscal policy was oriented toward economic stimulus to nurture investment and to encourage private consumption, while the central bank prioritized to implement consistent monetary policy to manage inflation expectations and to mitigate the impact of global spillovers. This condition weighing on the Bank's lending and funding activities as well as the Banks' cost structures.

Despite the challenging environment, J Trust Bank managed to improve its intermediation function demonstrated by its growing loan and funding portfolio

bertumbuh, berkat pemodalan dan likuiditas yang kuat, juga profitabilitas.

Struktur Organisasi

J Trust Bank terus meningkatkan struktur organisasi guna mendukung pertumbuhan bisnis Bank, seperti terlihat pada bab Profil Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini. J Trust Bank akan terus memperbaiki efektivitas dan efisiensi organisasi serta memastikan suksesi organisasi dalam mendukung Bank mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Aktivitas Utama serta Jenis Produk dan Layanan yang Ditawarkan

J Trust Bank menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan di mana Bank menawarkan berbagai produk kredit dan deposito serta layanan perbankan yang didukung dengan peningkatan kapabilitas digital untuk melayani nasabah lebih baik. Informasi mengenai produk dan layanan Bank dapat ditemukan pada bab Profil Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

Suku Bunga Dana Pihak Ketiga dan Kredit

Informasi mengenai suku bunga Bank untuk kredit dan deposito nasabah berdenominasi Rupiah pada tahun 2024 dapat ditemukan pada bab Analisis & Pembahasan Manajemen di dalam Laporan Tahunan ini.

Jaringan dan Mitra Bisnis

Untuk menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi dan meningkatkan daya saing, J Trust Bank berkolaborasi dengan berbagai mitra bisnis. Hal ini termasuk kerja sama terkait bisnis kredit, bisnis digital, sistem teknologi informasi, bancassurance, dan kegiatan lainnya, memanfaatkan jaringan distribusi Bank dan basis nasabah yang beragam.

Jaringan Cabang, Jenis, dan Lokasi Cabang

Pada tahun 2024, kami terus mempertahankan tingkat kehadiran yang kuat dengan membuka 2 cabang baru. Jaringan kantor kami pada akhir tahun 2024 mencakup 47 kantor cabang dan 54 unit ATM di seluruh Indonesia. Walaupun perilaku nasabah bergeser ke kanal digital, kami terus melakukan ekspansi jaringan kantor secara selektif karena jaringan fisik Bank tetap merupakan bagian integral dari ekosistem Bank untuk melayani beragam basis nasabah, membangun dan mempertahankan hubungan, serta menjaga kepercayaan nasabah. Untuk terus meningkatkan pengalaman nasabah, J Trust Bank juga terus memperbaiki kapabilitas digital agar dapat melayani kebutuhan nasabah lebih baik.

on the back of strong capital and liquidity, as well as profitability.

Organizational Structure

J Trust Bank continued to enhance its organizational structure to support the Bank's business growth, as portrayed in the Company Profile chapter in this Annual Report. J Trust Bank will continue to improve organizational effectiveness and efficiency as well as to ensure organization succession to support the Bank in growing sustainably.

Key Activities and Types of Products and Services Offered

J Trust Bank provides various banking products and services where the Bank offers various loan and deposit products as well as banking services supported by enhanced digital capabilities to better serve our customers. The information about the Bank's products and services can be found in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Interest Rates for Customer Deposits and Loans

The information about the Bank's interest rates for its Rupiah denominated customer deposits and loans in 2024 can be found in the Management Discussion & Analysis chapter in this Annual Report.

Network and Business Partners

In order to provide a high quality banking services and increase its competitiveness, J Trust Bank collaborates with various business partners. This includes cooperation in relation to loan business, digital business, information technology system, bancassurance, and other activities, capitalizing on the Bank's distribution network and diverse customer base.

Branch Network, Type, and Location

In 2024, we continued to retain our strong presence by opening 2 new offices. Our office network at the end of 2024 consisted of 47 branch offices and 54 ATM units across Indonesia. Despite customer behavior shifting to digital channels, we continued to expand our offices network selectively as the Bank's physical network remains integral to the Bank's ecosystem for serving a wide array of customer base, building and maintaining relationships, and sustaining customer trust. To continue enhancing customer experience, J Trust Bank also continues to improve its digital capabilities to better serve customer needs.

Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha Bank

Komisaris Independen Bank tidak ada yang memiliki saham Bank sementara beberapa anggota Direksi memiliki saham Bank. Informasi mengenai pemegang saham termasuk kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris J Trust Bank dapat ditemukan pada bab Profil Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

Share Ownership of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders in the Bank's Business Group

None of the Bank's Independent Commissioner has share ownership of the Bank whilst a number of the Bank's Board of Directors do have shareholdings in the Bank. Information about shareholders including share ownership of members of Board of Directors and Board of Commissioners in J Trust Bank can be found in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Perubahan Penting di Bank

Sepanjang tahun, Bank mampu mengembangkan jaringan kantor, meningkatkan kapabilitas digital, dan membuat kemajuan penting dalam program keberlanjutan.

Important Changes at the Bank

Throughout the year, the Bank managed to expand offices network, enhance digital capabilities, and make notable progress on sustainability programs.

Prospek Usaha, Perkembangan Ekonomi dan Target Pasar Tahun 2025

Mengarungi kondisi perekonomian dan geopolitik yang kompleks terus menjadi sebuah tantangan. Berbagai faktor menyebabkan ketidakpastian terhadap prospek usaha. Penurunan suku bunga akan bergantung pada keyakinan bank sentral terkait inflasi dan ketahanan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan perdagangan juga memberikan risiko tambahan karena berbagai negara sudah mengeluarkan tarif. Risiko geopolitik masih tetap ada dengan konflik di beberapa negara, sehungga berpotensi menyebabkan berlanjutnya gangguan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

2025 Business Prospect, Economic Development and Target Market

Navigating the complex geopolitical and economic environment will continue to be very challenging. A range of factors present uncertainty around the outlook. Policy rate cuts will depend on central bank confidence around inflation and the resilience of labor market. Similarly, trade policies present some downside risks as a number of countries have announced tariffs. Geopolitical risks remain with conflicts in several countries, continuing the potential of further escalation which could disrupt trade and economic activity.

Prospek ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 masih tetap menjanjikan. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia masih tetap diperkirakan akan stabil selagi mencari peluang pertumbuhan melalui kebijakan dan reformasi strategis.

Indonesia's economic outlook for 2025 presents a promising picture. Amid global economic uncertainties, the country is poised to maintain stability while seeking growth opportunities through strategic reforms and policies.

Melihat tantangan ke depan, kami optimis namun waspada terhadap apa yang ada di depan. Kepemimpinan J Trust Bank memiliki pengalaman dan strategi untuk menjalani tantangan yang dihadapi dan kami telah menunjukkan kemampuan untuk memajukan perjalanan Bank menuju fase pertumbuhan berikutnya.

In view of the challenges ahead, we remain cautiously optimistic as to what lies ahead. J Trust Bank's leadership has the experience and strategy to manage the challenges that we face and we have demonstrated our ability to advance the Bank's journey to the next phase of growth.

Pada tahun 2025, kami akan tetap fokus untuk meningkatkan profitabilitas melalui target pertumbuhan kredit yang didukung oleh pertumbuhan CASA dan permodalan, menguatkan bisnis fee-based, dan membangun kapabilitas digital guna mendorong

In 2025, we will remain focus on driving profitability through targeted loan growth supported by CASA and capital growth, strengthening fee-based business, and build digital capabilities to drive greater resiliency and innovation to capture long-term value. Loan growth

inovasi dan ketahanan yang lebih kuat dalam menangkap nilai jangka panjang. Pertumbuhan kredit akan berasal terutama dari pertumbuhan segmen korporasi dan komersial & UKM, selagi melanjutkan penetrasi pasar dengan membuka lima cabang baru pada tahun 2025.

Kami percaya bahwa fokus ini akan dapat terus berjalan dengan baik pada tahun 2025 dan seterusnya, dan kami meyakini bahwa J Trust Bank berada pada posisi yang baik untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perkembangan Penting di Masa Depan

Kami akan terus membangun jaringan cabang, menumbuhkan kredit dengan hati-hati, memperkuat struktur pendanaan dan permodalan, dan melanjutkan berbagai program keberlanjutan. Kami juga memahami bahwa teknologi adalah penggerak (enabler) penting dan akan terus meningkatkan kabailitas digital dalam mendukung para nasabah. Kami tetap optimistis bahwa Bank akan terus mengembangkan kinerja secara berkelanjutan, menuju fase pertumbuhan berikutnya dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat.

Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2024, kami terus memperkuat kapabilitas dan hasil keberlanjutan. Tujuan kami adalah membantu orang-orang dan masyarakat bertumbuh. Kami mencapai strategi bisnis melalui pendekatan yang kolaboratif dan proaktif untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan serta terus mengembangkan strategi keberlanjutan di dalam kebijakan, proses, dan operasional kami.

Kami telah membuat metrik dan target untuk melacak tingkat kemajuan dari strategi keberlanjutan kami dan mengidentifikasi fokus keberlanjutan untuk menjaga strategi kami di bidang-bidang yang paling penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, kami mampu mencapai 10% dari total kredit bank sebagai kredit hijau. Di sisi pendanaan, kami menawarkan produk deposito yang membantu melindungi lingkungan yaitu Tora Green Savings dan Tora Blue Ocean Savings, di mana sebagian suku bunganya akan disalurkan untuk konservasi lingkungan dalam berkontribusi untuk keberlanjutan lingkungan.

Kami menyadari bahwa perubahan iklim adalah risiko yang signifikan bagi bumi dan merupakan sebuah tantangan besar yang dihadapi masyarakat. Strategi iklim

will be contributed mainly by the growth of corporate and commercial & SME segments while continue penetrating the market by opening five new branches in 2025.

We are confident that this focus will continue to serve us well in 2025 and beyond, and we believe that J Trust Bank is well positioned to deliver sustainable growth to our shareholders and stakeholders.

Important Future Developments

We will continue to build up branch network, expand loan prudently, strengthen capital and funding structure, and proceed various sustainability programs. We also recognize technology is a critical enabler and continue to enhance our digital capabilities to support our customers. We remain optimistic that the Bank will continue to grow its performance sustainably, heading into the next phase of growth and providing positive contributions to the communities.

Sustainable Finance

Throughout 2024, we have continuously deepened our sustainability capabilities and outcomes. Our purpose is to help people and communities thrive. We delivered on our business strategy through a collaborative and proactive approach to build relationships with stakeholders while continue to evolve our sustainability strategy in our policies, processes, and operations.

We have developed metrics and targets to track progress against our sustainable strategy and identify our sustainability focus to help guide our strategy on the areas of most importance to all our stakeholders. In 2024, we managed to carry out 10% of total bank loans as green loans. On the funding side, we offered deposit products to help protecting the environment namely Tora Green Savings and Tora Blue Ocean Savings, on which a fraction of the interest rate will be channeled to conduct environmental conservation to contribute to environmental sustainability.

We realize climate change is a significant risk to the planet and a major challenge for society to address. Our climate strategy captures our commitment to

kami menunjukkan komitmen kami untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada operasional kami, yang mencakup energi, air, dan limbah, serta mendukung nasabah untuk mengurangi karbon dan membangun ketahanan serta berinvestasi pada kabailitas iklim dengan bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk melindungi lingkungan dengan kegiatan-kegiatan seperti menanam pohon bakau dan mendorong fesyen daur ulang.

reduce the climate change impact of our operations covering energy, water, and waste, while supporting our customers to decarbonize and build resilience as well as investing in climate capabilities by working with the government, industry and community to protect the environment by conducting activities such as planting mangroves and promoting upcycling fashion.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bank memegang teguh standar tertinggi tata kelola perusahaan dan mematuhi berbagai aspek material terkait peraturan, kode, dan kaidah tata kelola perusahaan di Indonesia. Kerangka tata kelola kami yang kuat memberikan struktur yang solid untuk pengambilan keputusan yang efektif dan bertanggung jawab di dalam Bank untuk menjalankan kegiatan bisnis dan operasional.

Good Corporate Governance Implementation

The Bank upholds the highest standards of corporate governance and complies in all material aspects in corporate governance regulations, code, and guidelines in the country. Our strong governance framework provides a solid structure for effective and responsible decision-making within the Bank in carrying out business and operational activities.

Kami juga terus memperkuat budaya tata kelola perusahaan yang didasari nilai-nilai inti, yaitu etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Hal ini esensial untuk memastikan kinerja dan keberlanjutan jangka panjang Bank dan untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

We also continuously enhance our corporate governance culture underpinned by core values: ethics, transparency, accountability, and sustainability. This is essential to ensure long-term performance and sustainability of the Bank and to protect and enhance the interests of all shareholders and stakeholders.

Kami terus memperbaiki struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan pendukung untuk menciptakan pemisahan tugas dan tanggung jawab serta alur pengambilan keputusan dan pelaporan di dalam organ Bank. Kami juga menjalankan proses tata kelola melalui prosedur yang sistematis untuk mencapai hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan praktik-praktik terbaik.

We continuously enhance our governance structure that consists of the main organs and supporting organs to provide separation of duties and responsibilities as well as flow of decision making and reporting within the Bank's organs. We also carry out the governance process through systematic procedures so as to achieve the outcome in accordance with the principles of good corporate governance and best practices.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Insan-insan Bank adalah kunci keberhasilan kami, karena meningkatkan pengalaman karyawan akan meningkatkan pengalaman nasabah. Karenanya, kami terus memastikan tempat kerja yang inklusif di mana orang-orang dihormati karena keunikannya, dihargai berdasarkan kontribusinya, dan dirayakan karena menjadi dirinya yang sebenarnya. Kami juga terus fokus mencapai hasil yang adil dengan menghapus batasan dan menghargai perbedaan, memampukan setiap orang untuk bertumbuh dan bekerja dengan tujuan yang kuat.

Human Resources and Information Technology

Our people are key to our success as improving employee experience will improve customer experience. Hence, we continued to promote an inclusive workplace where people are respected for their uniqueness, valued for their contributions, and celebrated for being there authentic selves. We also continued to focus on achieving equitable outcomes by removing barriers and valuing differences, enabling everyone to be included to thrive and work with strong sense of purpose.

Membangun karyawan adalah hal yang paling fundamental di mana kami bisa memotivasi dan melibatkan para insan, membantu mereka untuk

Developing employees is the most fundamental way we can motivate and engage our people, helping them grow with us. Thus, we continued to invest in developing

berkembang bersama kami. Karena itu, kami terus berinvestasi pada pembangunan karyawan dengan campuran program pembelajaran dan dukungan pembinaan untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimalnya. Ini juga membantu kami membangun tenaga kerja yang berdaya tahan dengan bermacam kemampuan, karena kami ingin membuat mereka mampu memimpin dan berhasil di pasar yang disruptif sekarang dan di masa depan. Kami juga berkomitmen untuk mengolah tenaga kerja yang beragam dengan memelihara budaya komunikasi yang terbuka dan jujur, kepercayaan dan kredibilitas, serta perhatian dan bertindak dengan itikad baik, sehingga mereka merasa dihargai, dihormati, dan aman untuk membantu mencapai target Bank dan hasil positif bagi nasabah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

employees with a mix of learning programs and coaching support to help employees to reach their full potential. It also helps us build a more resilient workforce where there is a breadth of skills as we want to equip them to lead and succeed in the disruptive marketplace of today and for the future. We also committed to cultivating a diverse workforce by fostering a culture of open and honest communication, trust and creditability, as well as thoughtfulness and act in good faith, so people feel valued, respected, and safe to help achieve the Bank's targets and positive outcomes for our customers, our communities, and stakeholders.

Informasi terkait jumlah karyawan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dapat ditemukan pada bab Analisis & Diskusi Manajemen di dalam Laporan Tahunan ini.

Information regarding the number of employees, education, training, and development can be found in the Management Discussion and Analysis Chapter in this Annual Report.

Untuk memberikan pengalaman nasabah yang luar biasa memerlukan teknologi yang kokoh dan aman. Karena itu, kami terus meningkatkan kapabilitas teknologi sehingga nasabah dapat bergantung pada keandalan sistem Bank yang aman, sederhana, dan mudah digunakan, serta menjaga risiko siber agar dapat melindungi data nasabah dengan lebih baik dan memastikan penggunaan yang tepat.

Delivering exceptional customer experiences require a resilient and secure technology. Hence, we continue to enhance our technological capabilities so that customers can depend on the reliability of the Bank's systems that is secure, simple, and easy to use, while also managing cyber risks to better protect customers' data and ensure its appropriate usage.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kami bertekad untuk menciptakan dampak yang berarti pada masyarakat. Karenanya, kami mendukung program-program yang berdampak besar yang memberdayakan masyarakat dan memlihara keberlanjutan lingkungan. Kami coba memahami kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, berkolaborasi dengan organisasi sektor publik dan swasta untuk membuat dampak besar di masyarakat, dan menyediakan peluang bagi karyawan untuk terlibat dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga mareka dapat melakukan kontribusi langsung untuk mendukung ketahanan masyarakat.

Corporate Social Responsibility

We are determined to create meaningful impact to the communities. Hence, we advocate for impactful programs that empower communities and foster environmental sustainability. We try to understand the needs and expectations of communities, collaborate with both the public and the private sector organizations to make a greater impact in the communities, and provide opportunities for employees to involve in the Corporate Social Responsibility Programs so that they can make a direct contribution to support the communities' resilience.

Kami secara konsisten menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada tahun 2024 yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak serta pemberdayaan perempuan, yang antara lain terdiri dari pengalaman kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak panti asuhan, literasi keuangan dan beasiswa untuk sekolah menengah kejuruan,

We have consistently conducted various Corporate Social Responsibility programs in 2024 focusing on children's education and wellbeing as well as women empowerment consisting of among others health and educational experience for orphanage children, financial literacy and scholarship for a vocational high school, and training for home-based female

dan pelatihan bagi penjahit perempuan rumahan untuk membuat produk daur ulang. Komitmen kami dalam menjalankan program TJSL secara konsisten telah dikenali oleh berbagai institusi. Baru-baru ini, kami mendapatkan penghargaan Padmamitra Award 2024 dari Pemerintah Provinsi Jakarta berkat kontribusi dalam menunjukkan kontribusi hebat dengan memberdayakan perempuan melalui program pelatihan untuk penjahit perempuan rumahan untuk menciptakan produk daur ulang.

tailor to create upcycle products. Our commitment in conducting consistent CSR programs has received recognitions from various institutions. Recently, we received Padmamitra Award 2024 from Jakarta Provincial Government due to our contribution to demonstrate superior contribution by empowering women through training program for home-based female tailor to produce upcycling products.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite di bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Aset & Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kredit, dan Komite Kebijakan Kredit. Di tengah tantangan dan ketidakpastian lingkungan operasional Bank, komite-komite tersebut secara intensif membahas berbagai permasalahan serta langkah-langkah yang perlu diambil Bank. Semua komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi, mendukung Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Assessment on the Performance of Committees under the Board of Directors

In implementing its duties and responsibilities, Board of Directors has been supported by the Risk Management Committee, Asset & Liability Committee, Information Technology Steering Committee, Credit Committee, and Credit Policy Committee. Amidst challenges and uncertainties of the Bank's operating environment, these committees have intensively addressed various issues as well as measures to be taken by the Bank. All committees have discharged their duties and responsibilities effectively in providing recommendations to the Board of Directors, supporting Board of Directors in conducting its duties and responsibilities.

Perubahan Susunan Anggota Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank 2024, semua anggota Direksi diangkat kembali untuk periode satu tahun. Karena itu, tidak ada perubahan susunan anggota Direksi pada tahun 2024. Susunan Direksi J Trust Bank sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of Board of Directors

Based on the Bank's 2024 Annual General Meeting of Shareholders, all members of Board of Directors have been reappointed for one year term. As such, there is no change in the composition of Board of Directors in this year. The composition of Board of Directors of J Trust Bank as of the date of this Annual Report is as follows:

Direktur Utama	**Ritsuo Fukadai**	President Director
Wakil Direktur Utama	**Masayoshi Kobayashi**	Vice President Director
Direktur	**Felix I. Hartadi**	Director
Direktur	**Helmi A. Hidayat**	Director
Direktur	**Cho Won June**	Director
Direktur	**R. Djoko Prayitno**	Director
Direktur	**Widjaja Hendra**	Director

Apresiasi

Mewakili Direksi J Trust Bank, kami ingin memberikan terima kasih dan apresiasi setulusnya kepada semua nasabah atas loyalitas dan kepercayaannya pada Bank. Kami juga berterima kasih kepada semua karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya sepanjang tahun dan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk dukungannya terus menerus sepanjang tahun.

J Trust Bank mengakhiri tahun 2024 dengan pencapaian yang kuat dan mengatur fase pertumbuhan strategis berikutnya untuk mencapai hasil pemegang saham yang berkelanjutan guna menciptakan masa depan yang lebih baik untuk pemegang saham, nasabah, komunitas, masyarakat, dan lingkungan.

Appreciation

On behalf of J Trust Bank's Board of Directors, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to all customers for their loyalty and trust to the Bank. Thank you also to all employees for the dedication and hard work for the year and for all shareholders and stakeholders for the ongoing support throughout this year.

J Trust Bank ended the year 2024 with strong results and arranging its next strategic growth phase to achieve sustainable shareholder returns while advancing the Bank's sustainability programs to create better futures for our shareholders, customers, communities, society and the environment.

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

DIREKSI

Boards of Directors

Masayoshi Kobayashi
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

Felix I. Hartadi
Direktur
Director

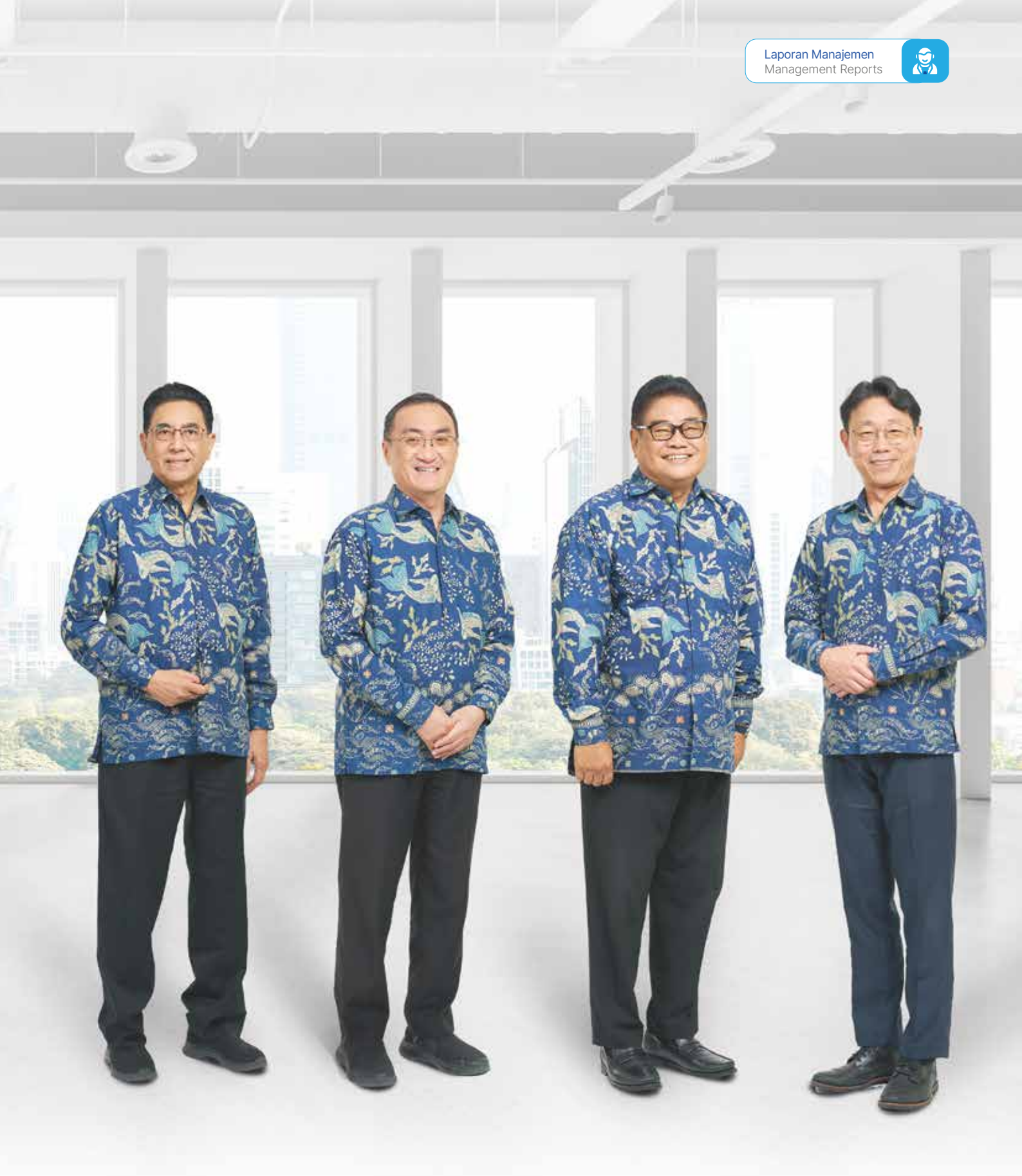

Helmi A. Hidayat
Direktur
Director

Widjaja Hendra
Direktur
Director

R. Djoko Prayitno
Direktur
Director

Cho Won June
Direktur
Director

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Responsibility for Annual Report

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2025

Statement from the Board of Commissioners regarding Responsibility for Annual Reporting 2024 PT Bank JTrust Indonesia Tbk

We the undersigned hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has been presented in its entirety and we are fully responsible for the validity of the Company's Integrated Annual Report contents.

This statement letter is made and signed in good faith.

Jakarta, 28 April 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

Nobuiku Chiba
Komisaris
Commissioner

Iwan Nataliputra
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Benny Siswanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2025

Statement from the Board of Directors regarding Responsibility for Annual Reporting 2024 PT Bank JTrust Indonesia Tbk

We the undersigned hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as been presented in its entirety' and we are fully responsible for the validity of the Company's Integrated Annual Report contents.

This statement letter is made and signed in good faith.

Jakarta, 28 April 2025

Direksi
Board of Directors

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

Masayoshi Kobayashi
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Felix I. Hartadi
Direktur
Director

Helmi A. Hidayat
Direktur
Director

Cho Won June
Direktur
Director

R. Djoko Prayitno
Direktur
Director

Widjaja Hendra
Direktur
Director

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Ulfa

Ulfa si Orangutan adalah sosok penyayang, mengayomi yang menjadikannya sangat mudah berteman. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Ulfa dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu orang utan.

Ulfa, the Orangutan, is a loving, protective figure that makes her easy to get along with. As one of J Trust Bank's mascots, Ulfa is featured here to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animals, like the orangutans.

PROFIL **PERUSAHAAN**

Company Profile

INFORMASI PERUSAHAAN [OJK C.2][OJK C.3][OJK C.4][GRI 2-1][GRI 2-6]

Company Profile

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Nama Perusahaan Company Name	**Nama Panggilan** Known as	**Bidang Usaha** Line of Business
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	J Trust Bank	Bank Umum Konvensional Conventional Commercial Bank

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta No. 136 yang dibuat di hadapan Notaris Lukman Kirana S.H tanggal 30 Mei 1989. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu menteri Kehakiman Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. C2-6196.HT.01.01 tanggal 12 Juli 1989, Berita Negara No. 1959/1993 tanggal 30 Mei 1989, tambahan Berita Negara No. 36 tanggal 4 Mei 1993.

Deed No. 136 made before Notaris Lukman Kirana S.H on 30 May 1989. The deed of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly the Minister of Justice of the Republic of Indonesia) with Decree No. C2-6196.HT.01.01 dated 12 July 1989, State Gazette No. 1959/1993 dated 30 May 1989, additional State Gazette No. 36 dated 4 May 1993.

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

3 Mei 1989
3 May 1989

Perubahan Nama
Change of Name

Pada tanggal 30 Mei 2015, terjadi perubahan nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar No. 87.
On 30 May 2015, it changed to PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on Articles of Association No. 87.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

J Trust Co., Ltd.	73,17%
J Trust Asia Pte. Ltd.	19,32%
J Trust Investments Indonesia	2,28%
Publik | Public	5,23%

Tanggal Pencatatan
Listing Date

25 Juni 1997
25 June 1997

Bursa Saham
Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia (BEI)
The Indonesia Stock Exchange (IDX)

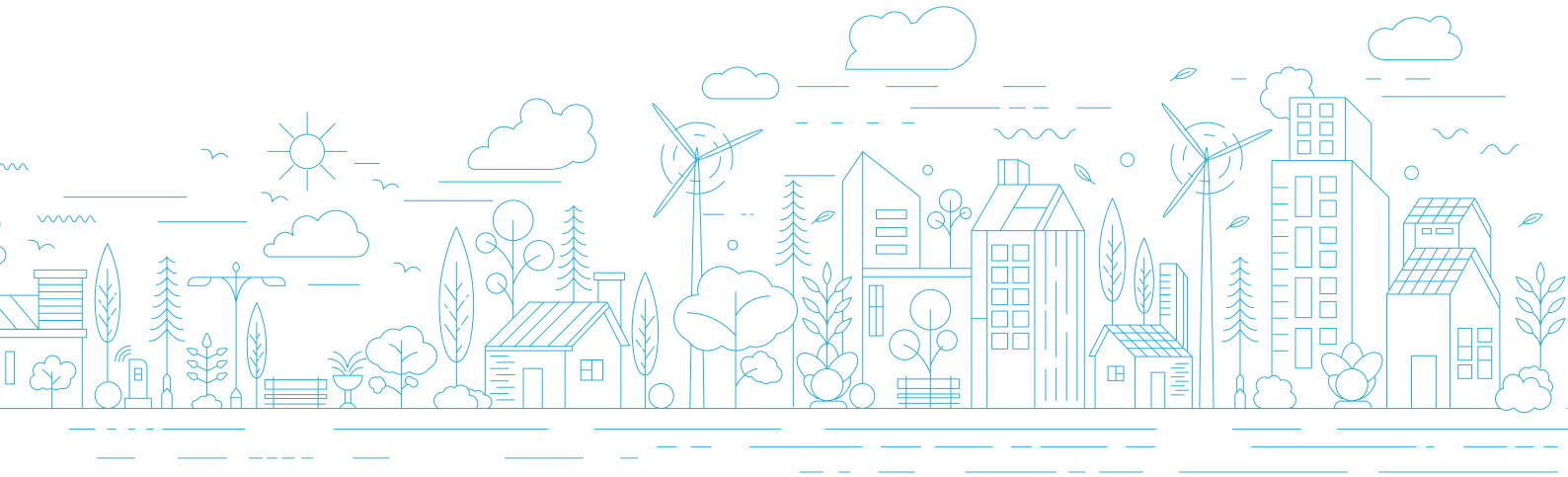

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp20.000.000.000.000,- terdiri dari 10.011.841.000 saham Seri A dengan nominal Rp1.000 per saham, 283.501 saham Seri B dengan nominal Rp7.800.000 per saham dan 77.768.512.000 saham Seri C dengan nominal Rp100 per lembar saham.
Rp20,000,000,000,-, consisting of 10,011,841,000 Series A shares with a nominal value of Rp1,000 per share, 283,501 Series B shares with a nominal value of Rp7,800,000 per share, and 77,768,512,000 Series C shares with a nominal value of Rp100 per share.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-up Capital

Rp13.032.928.550.800 atau 18.109.922.009 saham, terdiri dari:
- Saham Seri A 10.011.841.000 saham dengan nominal Rp1.000 per saham
- Saham Seri B 283.501 saham dengan nominal Rp7.800.000 per saham
- Saham Seri C 8.097.797.508 saham dengan nominal Rp100 per saham

Rp13,032,928,550,800 or 18,109,922,009 shares, consisting of:
- Series A shares: 10,011,841,000 shares with nominal value of Rp1,000 per share
- Series B shares: 283,501 shares with nominal value of Rp7,800,000 per share
- Series C shares: 8,097,797,508 shares with nominal value of Rp100 per share

Kode Saham dan Obligasi
Stock and Bond Codes

BCIC

Kode SWIFT
SWIFT Code

ICTIDJA

Jumlah karyawan tahun 2024
Number of Employees in 2024

937 karyawan | employees

Jumlah Aset tahun 2024
Total Assets in 2024

Rp40,26 triliun | trillion

Jaringan Kantor tahun 2024
Office Network in 2024

Per 31 Desember 2024, J Trust Bank memiliki 47 jaringan kantor, yang terdiri dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
As of 31 December 2024, J Trust Bank has 47 office networks, consisting of branch offices and sub-branch offices.

Situs Web
Website

www.jtrustbank.co.id

Alamat Kantor Pusat & Pusat Kontak
Head Office Address & Contact Center

Alamat Kantor Pusat & Pusat Kontak
Sahid Sudirman Center Lantai 33
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Indonesia
Tel: (62-21) 2926 1111 (Hunting)
Ask J: 1500 615
E-mail: customercare@jtrustbank.co.id

E-Mail Hubungan Investor/Sekretaris Perusahaaan
E-Mail of Investor Relation/Corporate Secretary

corsec@jtrustbank.co.id

Media Sosial
Social Media

Facebook: JTrustBankID
Instagram: jtrustbank
LinkedIn: J Trust Bank

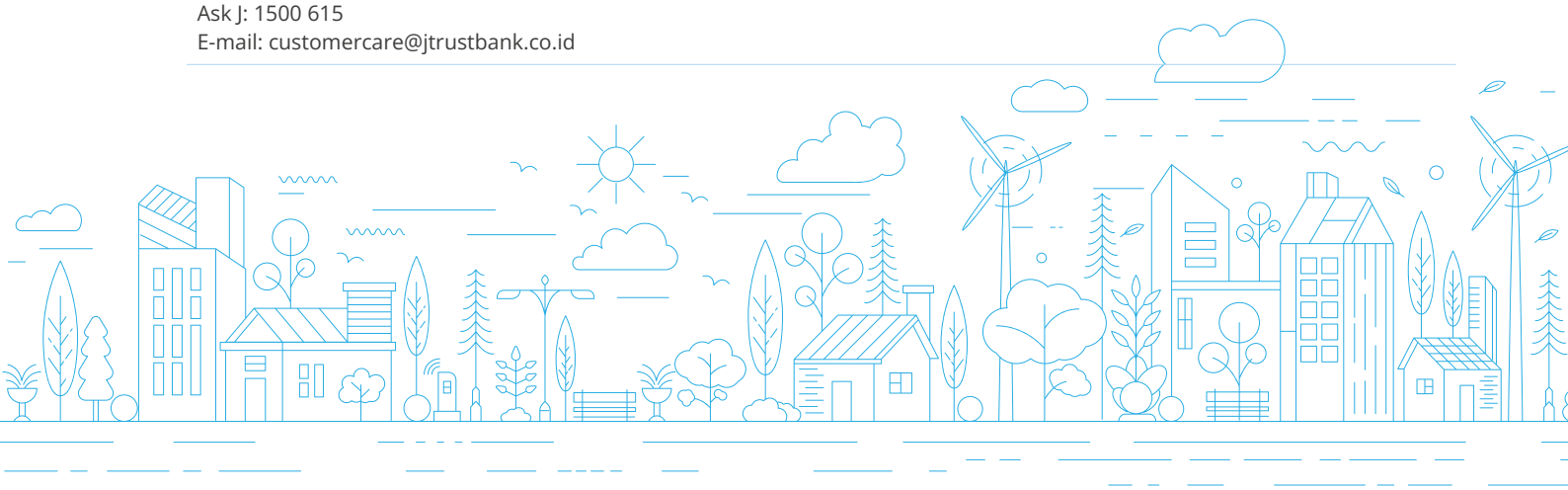

SEKILAS J TRUST BANK

J Trust Bank at a Glance

J Trust Bank telah hadir di Indonesia sebagai mitra strategis dalam memberikan pelayanan perbankan yang berkualitas. Sebagai bagian dari J Trust Co., Ltd., salah satu grup finansial ternama di Jepang, J Trust Bank secara aktif mendukung kegiatan bisnis di Indonesia, termasuk *business matching* antara perusahaan Jepang dan perusahaan lokal. Saat ini, J Trust Bank memiliki 47 kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Sementara itu, dalam menjalankan perannya, J Trust Bank memanfaatkan keunggulan dalam keahlian perbankan dan pengalaman keuangan ritel dari Jepang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong individu dan bisnis di Indonesia untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung kebutuhan finansial yang beragam, J Trust Bank menawarkan solusi produk pinjaman seperti kredit modal kerja, KPR/Apartemen, serta kredit investasi yang mencakup pembiayaan alat berat, aset industri, dan sektor pendukung lainnya. Untuk kebutuhan simpanan, bank menyediakan pilihan tabungan, giro, dan deposito dengan fleksibilitas yang sesuai dengan berbagai segmen nasabah. Selain itu, pengembangan layanan digital seperti J Trust Mobile dan J Trust Net menunjukkan komitmen bank dalam memberikan kemudahan akses keuangan di era digital.

J Trust Bank juga secara aktif menerapkan prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) yang selaras dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun standar global seperti Global Reporting Initiative (GRI). Langkah konkret diwujudkan dengan pembentukan Komite Keberlanjutan pada tahun 2023, yang memastikan kegiatan bisnis bank dijalankan secara bertanggung jawab serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, J Trust Bank tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia, memberdayakan kelas menengah, dan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat modern.

J Trust Bank's presence in Indonesia serves as strategic partner in providing qualified banking services. As part of J Trust Co., Ltd., one of the renowned financial groups in Japan, J Trust Bank actively supports business activities in Indonesia, including business matching between Japanese companies and local companies. Currently, J Trust Bank has 47 branch offices across major cities in Indonesia.

In carrying out its role, J Trust Bank leverages its expertise in banking and retail financial experience from Japan to meet the needs of the community in taking advantage of various economic activities. This support is expected to encourage individuals and businesses in Indonesia to grow and contribute to national economic growth.

To support various financial needs, J Trust Bank offers solutions through loan products, such as working capital loans, hope/apartment loans, as well as investment loans that cover financing for heavy equipment, industrial assets, and other supporting sectors. For savings, the Bank has several options, such as savings accounts, current accounts, and deposits with flexibility that caters to various customer segments. The development of digital services like J Trust Mobile and J Trust Net demonstrates its commitment in providing easy access to financial service in the digital era.

J Trust Bank also actively implements the Environment, Social, and Governance (ESG) principles, in line with the Financial Services Authority (OJK) regulations and global standards such as Global Reporting Initiative (GRI). One of the practical measures was the formation of Sustainability Committee in 2023, which ensures the Bank's business activities are conducted with accountability and supporting sustainable development in Indonesia.

With innovative and continuous approach, J Trust Bank does not only act as a provider of financial services, but also a partner that drives Indonesia's economic progress, empowers the middle class, and adapts to the changing needs of modern society.

JEJAK LANGKAH

Milestones

1989

Sebelum menjadi J Trust Bank, Perseroan ini didirikan dengan nama PT Bank CIC Internasional (Bank CIC).

Before becoming J Trust Bank, this Company was established under the name PT Bank CIC International (CIC Bank).

1997

Perseroan secara resmi menjadi Bank yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Juni 1997 setelah melakukan Penawaran Umum atau *Initial Public Offering* (IPO).

The Company officially became a Bank whose shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on June 25 1997 after conducting a Public Offering (IPO).

2004

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan merger, melalui peleburan PT Bank Danpac Tbk (Bank Danpac) dan PT Bank Pikko Tbk (Bank Pikko) untuk bergabung ke dalam Bank CIC, serta berubah nama menjadi PT Bank Century Tbk.

Through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) the Company obtained approval from shareholders to carry out a merger, through the merger of PT Bank Danpac Tbk (Bank Danpac) and PT Bank Pikko Tbk (Bank Pikko) to merge into Bank CIC, and changed its name to PT Bank Century Tbk.

2008

Perseroan diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) No. 04/KSSK.03/2008 pada tanggal 21 November 2008.

The Company was taken over by the Government of the Republic of Indonesia through the Deposit Insurance Corporation (LPS) based on Financial System Stability Committee (KSSK) decision No. 04/KSSK.03/2008 on November 21 2008.

2009

Perseroan resmi melakukan *rebranding* dengan mengubah nama menjadi Bank Mutiara dari sebelumnya Bank Century.

The Company officially rebranded by changing its name to Bank Mutiara from previously Bank Century.

2014

J Trust Co., Ltd. Secara resmi membeli dan mengambil alih Bank Mutiara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank.

J Trust Co., Ltd. officially bought and took over Bank Mutiara from the Deposit Insurance Corporation (LPS) through the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

2015

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui penambahan modal dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) approved the additional paid-in capital and rebranding to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2016

Restrukturisasi manajemen dan organisasi.

Management and organizational restructuring.

2017

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar Rp1 triliun.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders approved Private Placement of Rp1 trillion.

2018

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menyetujui untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) Perseroan untuk Saham Seri A maupun Saham Seri B dengan rasio setiap 100.000 (seratus ribu) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Dalam rapat tersebut Manajemen menyelenggarakan paparan publik kinerja keuangan selama tahun 2017. Reverse Stock tersebut terealisasikan terhitung tanggal 5 Oktober 2018.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders approved a reverse stock action for Series A and Series B Shares with the ratio of 100,000 (one hundred thousand) old shares into 1 (one) share with a new nominal value. In the AGM, the Management held a public expose for 2017 financial performance. The Reverse Stock was realized on October 5, 2018.

2024

J Trust Bank luncurkan program TORA Green Savings dan Blue Ocean Savings sebagai salah satu inisiatif program keberlanjutan Bank, di mana sebagian bunga yang diterima nasabah akan disalurkan untuk mendanai proyek pelestarian lingkungan masing-masing dalam bentuk penanaman Mangrove dan pengelolaan sampah. Bank juga mulai melakukan transisi ke energi bersih dengan menerapkan pemakaian panel surya, yang dimulai di cabang Depok.

J Trust Bank launched savings programs called TORA Green Savings and Blue Ocean Savings as part of the initiatives in the Bank's sustainability programs. In this program, a portion of the interest earned by customers will be disbursed to fund environmental preservation projects, including mangrove planting and waste management. The Bank has also begun the transition to clean energy by installing solar panel, starting from its branch in Depok.

2023

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dimana dalam RUPSLB tersebut disetujui agenda penambahan posisi Wakil Direktur Utama J Trust Bank.

The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) approved changes to the composition of the Company's Management where at the EGMS the agenda for adding the position of Vice President Director of J Trust Bank was approved.

Direksi J Trust Bank mensahkan pembentukan Komite Keberlanjutan yang diketuai oleh Direktur Bisnis.

J Trust Bank's Board of Directors approved the formation of a Sustainability Committee chaired by the Business Director.

2022

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 Desember 2021, Pemegang Saham menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas II – 2022 (PUT II – 2022) yang telah mendapatkan pernyataan efektif pada tanggal 29 Juli 2022. PUT II – 2022 direalisasikan pada tanggal 12-19 Agustus 2022 sebanyak 3.967.539.928 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp300 per saham.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 17 December 2021, Shareholders approved the capital increase through rights issue by conducting Limited Public Offering II - 2022 (PUT II - 2022), which was effective on 29 July 2022. The public offer was carried out on 12-19 August 2022 with a total of 3,967,539,928 shares at an exercise price of Rp300 per share.

Dengan dukungan J Trust Co., Ltd. selaku Pemegang Saham Pengendali J Trust Bank, Bank mendapatkan tambahan dana setoran modal yang membuat J Trust Bank mampu memenuhi modal inti minimun Rp3 T.

With the support of J Trust Co., Ltd. as the Controlling Shareholder of J Trust Bank, the Bank received additional capital deposit funds which enabled J Trust Bank to meet the minimum core capital of IDR3 T.

J Trust Bank menerbitkan Kebijakan mengenai Larangan Transaksi oleh Orang Dalam untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan melindungi hak pemegang saham.

J Trust Bank has issued a Policy regarding the Prohibition of Insider Transactions to ensure fair treatment of all shareholders and protect shareholder rights.

2019

J Trust Bank meluncurkan fitur internet banking J Trust Net Individual dan mobile version J Trust Mobile.

J Trust Bank launched internet banking feature called J Trust Net Individual and mobile version J Trust Mobile.

2020

Bursa Efek Indonesia mencabut suspensi perdagangan saham J Trust Bank yang sudah dimulai sebelum J Trust Co., Ltd. mengambil alih Bank.

The Indonesian Stock Exchange lifted the trading suspension of J Trust Bank shares, which was implemented before J Trust Co., Ltd. took over the Bank.

2020

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pemegang saham menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang telah dilaksanakan pada 26 November-2 Desember 2021 sebanyak 4.130.257.580 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330 per saham.

Through the Annual General Meeting of Shareholders, shareholders approved a Right Issue held on November 26 to December 2, 2021, for as much as 4,130,257,580 shares at an exercise price of Rp330 per share.

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI [OJK C.5][GRI 2-28]

Membership in Associations

J Trust Bank terus mengikuti perkembangan dunia perbankan dan ikut berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada asosiasi. Keanggotaan Bank pada asosiasi bersifat strategis. Bank tidak pernah memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi. Beberapa keanggotaan Bank pada asosiasi per akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

J Trust Bank continues to follow the latest developments in the banking sector and played an active role in providing knowledge and experience to associations. The Bank's memberships in associations is strategic. The Bank never makes financial contributions beyond regular memberships fees and does not contribute to politics or politicians. Some of the Bank's memberships in associations as of the end of 2024:

Nama Asosiasi Association Name	**Tujuan** Purpose
Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) National Banks Association	1. Menyalurkan aspirasi Perbankan kepada Pemerintah, DPR dan regulator industri perbankan (OJK dan BI). 2. Sebagai wadah untuk ikut menumbuhkembangkan serta menyehatkan sektor perbankan nasional melalui pemikiran aktif dan positif. 3. Mengembangkan kerja sama antar anggota yang saling menguntungkan demi terciptanya suatu organisasi perbankan yang profesional. 1. Providing banking aspirations to the Government, Parliament and banking industry regulators (OJK and BI). 2. As a forum to participate in developing and strengthening the national banking sector through active and positive thinking. 3. Developing mutual cooperation between members to create a professional banking organization.
Ikatan Bankir Indonesia Indonesian Bankers Association	1. Sebagai wadah tempat menyuarakan aspirasi. 2. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan standar-standar etika dalam menjalankan tugas dan peran sebagai bankir. 3. Meningkatkan komitmen profesi dan citra bankir. 1. As a forum to voice aspiration. 2. Increasing capacity, professionalism, and ethical standards in implementing tasks and roles as bankers. 3. Increasing professional commitment and image as bankers.
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public-Listed Companies Association (AEI)	Berpartisipasi dalam mempercepat pertumbuhan pasar modal dalam mengembangkan modal Indonesia. Participating in accelerating capital market growth in developing Indonesian capital.
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Program pendidikan komprehensif kepada sekretaris perusahaan untuk mendukung upaya pengembangan tata kelola perusahaan yang baik, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan forum komunikasi antara Sekretaris Perusahaan di Indonesia, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Comprehensive education program for Corporate Secretary to support the development of good corporate governance through knowledge and skills development, information exchange and communication forums between Corporate Secretary in Indonesia, regulators and other stakeholders.

Nama Asosiasi Association Name	**Tujuan** Purpose
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Indonesian Payment System Association (ASPI)	Memiliki peran, tugas, dan fungsi dalam lingkup mikro dan teknis untuk membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia. Having roles, duties, and functions in the micro and technical scope to establish provisions in the payment system industry that can accommodate various changes and dynamics that occur while continuing to take into account Bank Indonesia's regulations and policies.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK)	Menyelesaikan sengketa keperdataan sektor jasa keuangan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Resolve civil disputes in the financial services sector between Consumers and Financial Services Institutions (PUJK).
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Communication Forum of Banking Compliance Director	Wadah komunikasi dan konsultasi antar lembaga Direktur Kepatuhan dalam lingkungan perbankan Indonesia. An inter-agency communication and consulting forum for Compliance Director within the Indonesian banking environment.
Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan Communication Forum of Banking Operation Director	Wadah komunikasi dan konsultasi antar lembaga Direktur Operasional dalam lingkungan perbankan Indonesia. An inter-agency communication and consulting forum for Director of Operation within the Indonesian banking environment.

VISI, MISI, NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Vision, Mission, Values and Culture

VISI VISION

"Menjadi bank yang membahagiakan masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan melalui ide-ide baru dan produk-produk keuangan yang inovatif."

"To become a bank that brings happiness to Indonesian society by providing outstanding services through new ideas and innovative financial products."

MISI MISSION

- Memberikan nilai yang terbaik kepada pemangku kepentingan.
- Memiliki semangat untuk mengutamakan pelayanan kepada nasabah.
- Mengembangkan karyawan agar memiliki integritas yang tinggi.
- Memberikan pelayanan yang tercepat agar dapat memenuhi kepuasan nasabah.
- Melanjutkan semangat "KAIZEN" kepada nasabah.

- To provide maximum value to stakeholders.
- To have a customer-first spirit.
- To encourage employees to have high integrity.
- To provide the fastest service to meet customer satisfaction.
- To continue the "KAIZEN" spirit to customers.

SUPER INTEGRITY

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan berkarakter kuat.

Integrity is a concept related with consistency in actions, values, methods, measurements, principles, expectations, and outputs. People with integrity mean that they have an honest personality and strong character.

CUSTOMER FIRST

Setiap pikiran, kata, dan perbuatan yang akan dilakukan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan selalu menyenangkan nasabah sebagai pelanggan setia.

Every thought, word, and action made to reach out to more customers and always satisfy loyal customers.

LEARNING & TRYING MORE

Belajar berarti mengadopsi suatu kebiasaan, menciptakan ide yang bernilai, menghasilkan nilai-nilai, dan mengisi kembali.

Learning means to adopt habits, create value ideas, produce/deliver the values, and recharge.

BE DISCIPLINE & RESPONSIBLE

Kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan, tanpa paksaan dari luar.

The readiness of someone that comes from self-awareness to comply with the applicable rules in the organization and the behavior that reflects responsibilities.

BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

01

Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas

Build Trust and Credibility

02

Menciptakan Budaya Komunikasi yang Terbuka dan Jujur

Create a Culture of Open and Honest Communication

04

Melakukan Hal yang Benar

Do the Right Thing

03

Menghargai Setiap Individu

Respect Each Individual

FILOSOFI LOGO J TRUST BANK

The Philosophy of J Trust Bank Logo

Logo J Trust Bank adalah turunan dari logo korporat perusahaan induk J Trust di Jepang. Lingkaran pada logo merepresentasikan J Trust yang lahir di tengah-tengah masa pergolakan, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk melangkah ke depan. Ditempa ombak hebat namun tetap kokoh bertahan di tengah putaran arus, dan memiliki kekuatan untuk selamat dari masa-masa sulit.

Lingkaran pada logo menggambarkan keadilan, kenyamanan, dan fleksibilitas. Oleh sebab itu, inovasi dan kebebasan juga direpresentasikan pada logo ini.

Logo tersebut sekaligus merepresentasikan keyakinan bahwa kredibilitas dan reliabilitas sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari nasabah dan para pemangku kepentingan.

The J Trust Bank logo is derived from the corporate logo of J Trust, our parent company in Japan. The circle in the logo represents J Trust, which was established during turmoil, but still has the strength to move forward. Hit by great waves but remains firm amidst the tides and has the strength to survive from critical moments.

The circle in the logo also represents justice, comfort, and flexibility. Therefore, innovation and freedom are also represented in this logo.

The logo also represents the belief that credibility and reliability are highly needed to gain support from customers and stakeholders.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

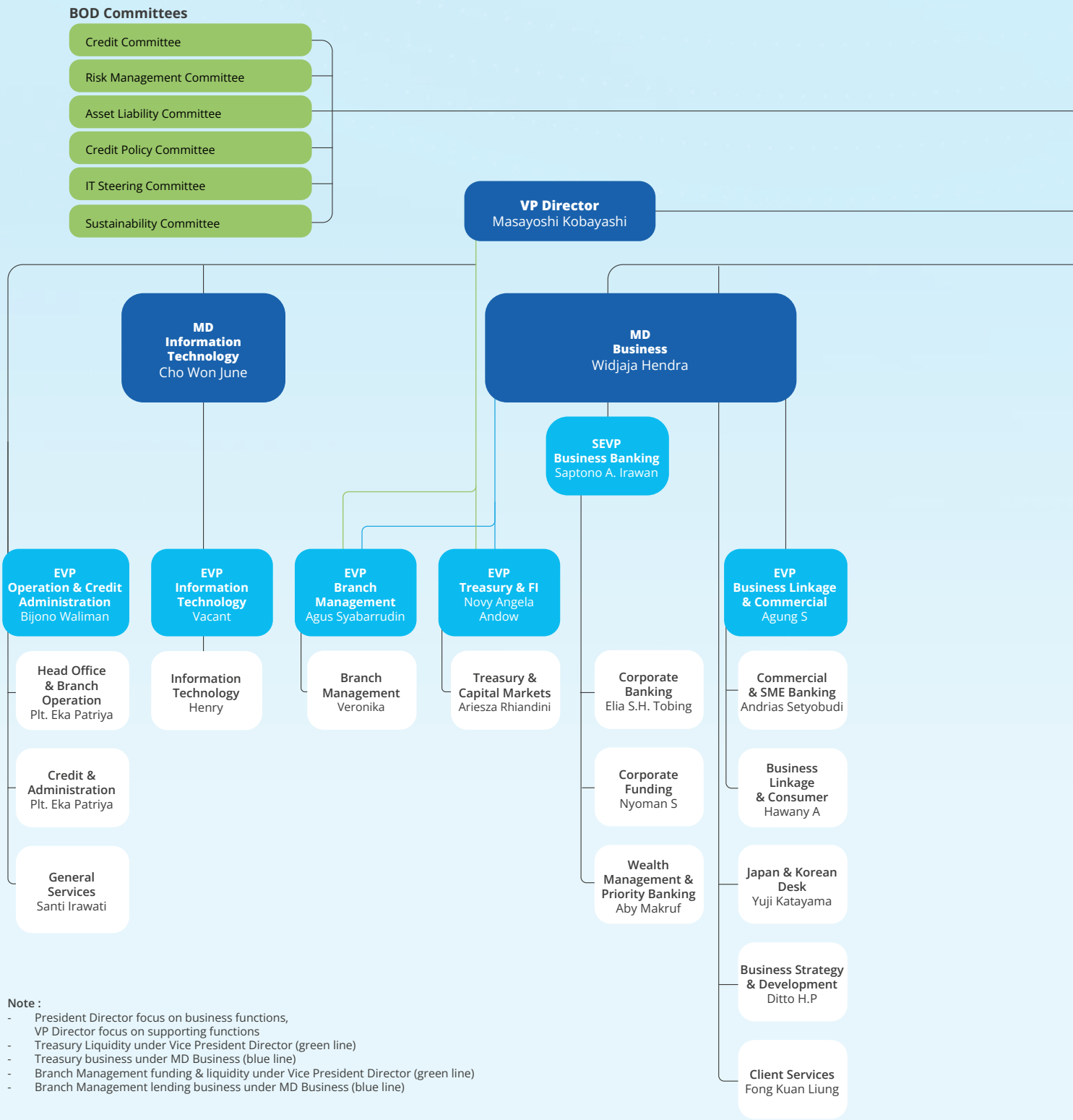

Note :
- President Director focus on business functions,
  VP Director focus on supporting functions
- Treasury Liquidity under Vice President Director (green line)
- Treasury business under MD Business (blue line)
- Branch Management funding & liquidity under Vice President Director (green line)
- Branch Management lending business under MD Business (blue line)

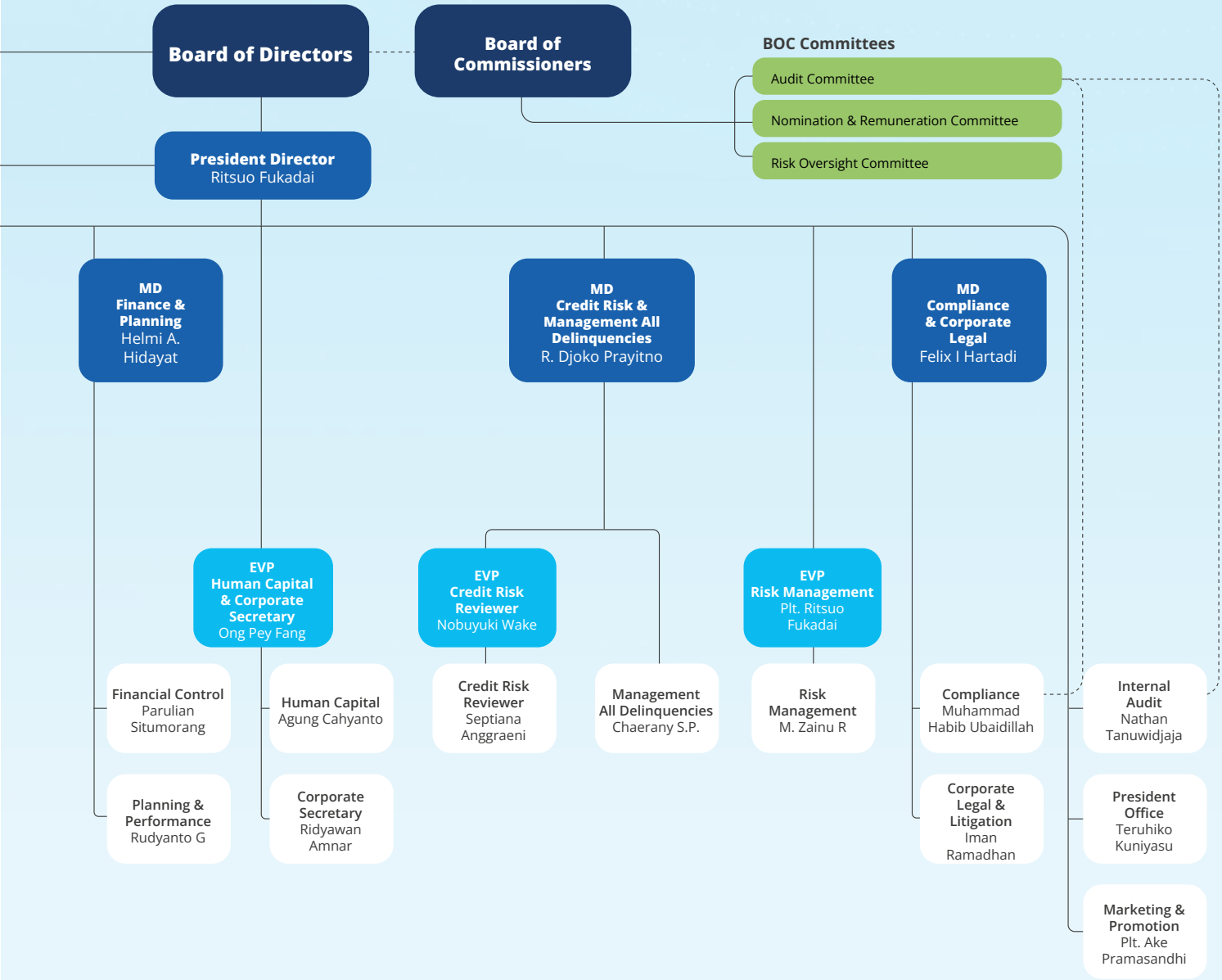
Board of Directors
Board of Commissioners
BOC Committees
Audit Committee
Nomination & Remuneration Committee
Risk Oversight Committee
President Director
Ritsuo Fukadai
MD
Finance & Planning
Helmi A. Hidayat
MD
Credit Risk & Management All Delinquencies
R. Djoko Prayitno
MD
Compliance & Corporate Legal
Felix I Hartadi
EVP
Human Capital & Corporate Secretary
Ong Pey Fang
EVP
Credit Risk Reviewer
Nobuyuki Wake
EVP
Risk Management
Plt. Ritsuo Fukadai
Financial Control
Parulian Situmorang
Planning & Performance
Rudyanto G
Human Capital
Agung Cahyanto
Corporate Secretary
Ridyawan Amnar
Credit Risk Reviewer
Septiana Anggraeni
Management All Delinquencies
Chaerany S.P.
Risk Management
M. Zainu R
Compliance
Muhammad Habib Ubaidillah
Corporate Legal & Litigation
Iman Ramadhan
Internal Audit
Nathan Tanuwidjaja
President Office
Teruhiko Kuniyasu
Marketing & Promotion
Plt. Ake Pramasandhi

BIDANG USAHA [OJK C.4][GRI 2-6]

Business Segment

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, Bank menjalankan kegiatan usaha dalam bidang bank umum konvensional.

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Tanda Daftar Perusahaan adalah berusaha di bidang bank umum konvensional. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan usaha-usaha pokok sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Based on the latest Articles of Association, the Bank runs business activities under the conventional commercial bank category.

The Company's purposes and objectives, in accordance with the Articles of Association and the Company Registration Certificate, are to operate as a conventional commercial bank. To achieve these purposes and objectives, the Bank carries out core business activities as follows:

a. To collect public funds in form of demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings, and/or other forms which are equivalent to them.
b. To provide credit/loans, either for long term, medium term, or short term, as well as other forms of loans as usually provided in the banking sector, by taking into account prevailing laws and regulations.
c. To engage in fund transfer, either for own use or on behalf of customers.
d. To engage in fund placement in, fund borrowing from, or fund lending to other banks, either using letters, telecommunication infrastructure, or money order, cheque, or other means.
e. To engage in foreign exchange activities in accordance with regulations from Bank Indonesia.

PRODUK DAN LAYANAN [OJK C.4][GRI 2-6]

Products and Services

PRODUK DAN LAYANAN

J Trust Bank menyediakan produk/jasa keuangan sebagai berikut:

Produk Pinjaman

Menjadi mitra dunia usaha dan bank pilihan dalam layanan pembiayaan untuk segmen Corporate Banking, Commercial & SME, Business Linkage & Consumer, Japan Korean Desk serta Asset-Based Financing dengan penawaran produk yang menarik dan kompetitif.

Produk dan jasa yang ditawarkan, antara lain:
- Kredit Investasi
- Kredit Angsuran Berjangka
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Executing Multifinance
- Kredit Investasi Alat Berat
- Kredit Pemilikan Rumah
- Kredit Serba Guna

Produk Simpanan dan Layanan Berbasis Teknologi

Menjadi bank pilihan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya melalui beragam produk simpanan dan layanan yang ditawarkan.

Produk dan layanan yang ditawarkan, adalah:
- Tabungan
  - Tabungan J Trust
  - Tabungan J Trust One
  - Tabungan Tora
  - Tabungan Rencana J Trust
  - TabunganKu
  - Tabungan Valas J Trust
  - Tabungan Employee Benefit Program (EBP)
- Layanan berbasis teknologi
  - J MOBILE dan J NET Individu
  - J NET Business
  - E Form
  - Virtual Account
  - Automatic Teller Machines
  - Electronic Data Capture
- Giro J Trust dan Giro Valas J Trust
- Deposito J Trust dan Deposito Valas J Trust

Products and Services

J Trust Bank provides financial products/services as follow:

Loan Products

To be the business partner and the bank of choice in financing services for Corporate Banking, Commercial & MSME, Linkage Business & Consumer, as well as Japan Korean Desk segments by providing attractive and competitive products.

Products and services provided are as follows
- Investment Loan
- Term Installment Loan
- Working Capital Loan
- Executing Multifinance Loan
- Heavy Equipment Investment Loan
- Housing Loan
- Multi-Purpose Loan

Deposit Products and Technology-Based Services

To be the Bank of choice for customers in meeting their needs by providing a variety of deposit products and services.

Products and services provided are as follows:
- Savings
  - J Trust Savings
  - J Trust One Savings
  - Tora Savings
  - J Trust Plan Savings
  - Tabunganku
  - J Trust Foreign Exchange Saving
  - Employee Benefit Program (EBP) Savings
- Techology-based services
  - J MOBILE dan J NET Individu
  - J NET Business
  - E Form
  - Virtual Account
  - Automatic Teller Machines
  - Electronic Data Capture
- J Trust Current Account and J Trust Foreign Currency Current Account
- J Trust Time Deposit and J Trust Foreign Currency Time Deposit

- Produk bancassurance dari penyedia asuransi
  - Asuransi Jiwa Dwiguna
  - Asuransi Jiwa Seumur Hidup
  - Asuransi Umum
  - Asuransi Jiwa Jangka Warsa

Treasury

Menjadi bank penyedia kebutuhan produk treasury dengan fokus utama pada kegiatan perdagangan valuta asing, baik Telegraphic Transfer (TT) maupun bank notes serta surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah RI maupun perusahaan.

Produk dan jasa yang dihasilkan adalah:

- Transaksi FX TT: Value Today, Value Tomorrow, Value Spot,
- Transaksi FX Banknotes,
- Transaksi FX Hedging: FX Forward dan FX Swap
- Surat-surat Berharga (Obligasi Pemerintah Indonesia dan Obligasi Korporasi)

Layanan Lain

- Bank Garansi
- Tender Bond
- Advance Payment Bond
- Performance Bond
- Maintenance Bond
- Shipping Guarantee
- Referensi Bank
- Letter of Credit
- Jual Beli Mata Uang Asing
- Kliring
- Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri
- Inkaso Dalam dan Luar Negeri
- Safe Deposit Box
- Payment & Billing
- Kartu ATM dan Kartu Debit
- Internet Banking
- Cash Pick Up

- Bancassurance products from insurance providers
  - Endowment Insurance
  - Whole Life Insurance
  - General Insurance
  - Term Life Insurance

Treasury

To be the Bank that provides treasury products, particularly on foreign exchange trading activities, whether it is in the form of Telegraphic Transfer (TT), banknotes, or debt securities issued by the government and companies.

Products and services provided are as follows:

- FX TT transactions: Value Today, Value Tomorrow, Value Spot,
- FX Banknotes transactions,
- FX Hedging transactions: FX Forward and FX Swap,
- Fixed Income Securities (Indonesia Government Bonds and Corporate Bonds)

Other Services

- Bank Guarantee
- Tender Bond
- Advance Payment Bond
- Performance Bond
- Maintenance Bond
- Shipping Guarantee
- Bank Reference
- Letter of Credit
- Buy and Sell of Foreign Exchange
- Clearing
- Domestic and Overseas Money Transfer
- Domestic and Overseas Money Collection
- Safe Deposit Box
- Payment & Billing
- ATM and Debit Cards
- Internet Banking
- Cash Pick Up

JARINGAN KANTOR

Offices Network

No.	Kantor Pusat/Cabang Head/Branch Office		Alamat Address	No. Telepon Phone Number	Provinsi Province
	Tipe Kantor Office Type	Nama Kantor Office Name			
	Kantor Pusat Head Office	Jakarta	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 33	021-29261111	DKI Jakarta
1	Kantor Cabang Branch Office	Jakarta - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gd. Sahid Sudirman Center Lt. GF	021-27889222	DKI Jakarta
2	Kantor Cabang Branch Office	Medan - Putri Hijau	Jl. Putri Hijau No. 4 BC	061-4159822	Sumatera Utara
3	Kantor Cabang Branch Office	Batam - Costa Rica	Komp. Pertokoan Costa Rica Niaga Blok B1 No. 3-3A	0778-4161230	Kepulauan Riau
4	Kantor Cabang Branch Office	Pekanbaru – Sudirman	Jl. Ahmad Yani No. 2-K, Padang Bulan - Senapelan	0761-5795075	Riau
5	Kantor Cabang Branch Office	Pangkal Pinang – Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 30-32	0717-422184 0717-432289	Bangka Belitung
6	Kantor Cabang Branch Office	Jambi – Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk No. 73-74	0741-3621751	Jambi
7	Kantor Cabang Branch Office	Palembang – Kebumen	Jl. Kebumen Darat No. 834	0711-355442	Sumatera Selatan
8	Kantor Cabang Branch Office	Bandar Lampung – Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 23 E-F	0721-5605339	Lampung
9	Kantor Cabang Branch Office	Bandung – Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 36	022-20542211	Jawa Barat
10	Kantor Cabang Branch Office	Bogor – Suryakencana	Jl. Suryakencana No. 294-296	0251-8311858	Jawa Barat
11	Kantor Cabang Branch Office	Karawang – KIIC	Ruko Rolling Hills Jl. Pacific Plaza Boulevard Cluster South One SOHO Kav. 017	021-29261130	Jawa Barat
12	Kantor Cabang Branch Office	Cirebon – Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 15 D-F	0231-239110	Jawa Barat
13	Kantor Cabang Branch Office	Solo – Slamet Riyadi	Jl. Slamet Riyadi No. 171	0271-6008006	Jawa Tengah
14	Kantor Cabang Branch Office	Semarang – Pemuda	Ruko Pemuda Mas Blok A4 Jl. Pemuda No. 150	024-3581265 024-269270	Jawa Tengah
15	Kantor Cabang Branch Office	Yogyakarta – Diponegoro	Jl. P. Diponegoro No. 9B	0274-543355	DI Yogyakarta
16	Kantor Cabang Branch Office	Surabaya – Darmo	Jl. Raya Darmo No. 71	031-99548006	Jawa Timur
17	Kantor Cabang Branch Office	Malang – Sutoyo	Jl. Letjen Sutoyo No. 27 E-F	0341-4387600 0341-4386800 0341-4387878 0341-4387877	Jawa Timur
18	Kantor Cabang Branch Office	Denpasar – Teuku Umar	Kompleks Pertokoan dan Perkantoran Teuku Umar Investama, Jl. Teuku Umar No. 121 Blok D1 dan D2	0361-8422132	Bali
19	Kantor Cabang Branch Office	Samarinda – Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 4C	0541-7771370	Kalimantan Timur
20	Kantor Cabang Branch Office	Balikpapan – Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 11	0542-791633	Kalimantan Timur
21	Kantor Cabang Branch Office	Pontianak – Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56	0561-8105968	Kalimantan Barat

No.	Kantor Pusat/Cabang Head/Branch Office		Alamat Address	No. Telepon Phone Number	Provinsi Province
	Tipe Kantor Office Type	Nama Kantor Office Name			
22	Kantor Cabang Branch Office	Makassar – Botolempangan	Jl. Botolempangan No. 18	0411-3633500	Sulawesi Selatan
23	Kantor Cabang Branch Office	Manado – Pierre Tendean	Ruko Mega Mas Jl. Pierre Tendean Blok I B1 No. 11	0431-7192394	Sulawesi Utara
24	Kantor Cabang Branch Office	Kendari – MT. Haryono	Jl. MT. Haryono No. 142	0401-3099045	Sulawesi Tenggara
25	Kantor Cabang Branch Office	Kupang - Tompello	Jl. Tompelo No. 9C	0380-8460982	Nusa Tenggara Timur
26	Kantor Cabang Branch Office	Tarakan	Jl. Mulawarman No. 14B	0551-3842018	Kalimantan Utara
27	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Medan - Asia	Jl. Asia No. 170A	061-7343166	Sumatera Utara
28	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Sungai Liat – Sungai Liat	Komplek Ruko Permata Indah Blok A No. 1A-B	0717-92156 0717-95578	Bangka Belitung
29	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Palembang – Rajawali	Jl. Rajawali No. 1087-1088	0711-5735867	Sumatera Selatan
30	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Serpong – Alam Sutera	Perumahan Alam Sutera, Jalur Sutera 29D No. 39	021-53141250 021-53141252	Banten
31	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Tangerang – Karawaci	Jl. Imam Bonjol No. 61 Blok N	021-59587452	Banten
32	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Tomang	Gedung Graha Sukandamulia Lt. 1 (Dasar) Jl. Tomang Raya Terusan Kav. 71-72	021-5636250	DKI Jakarta
33	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Pejagalan	Jl. Pejagalan Raya No. 62 Blok A No. 12 Pekojan Tambora	021-38873030	DKI Jakarta
34	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Puri Indah	Pasar Puri Indah Blok I No. 37 Jl. Puri Indah Raya	021-5823728 021-58302835	DKI Jakarta
35	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 11A-B	021-6329757	DKI Jakarta
36	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Tanah Abang	Komplek Pertokoan Tanah Abang Bukit Blok F No. 16-17	021-2301082	DKI Jakarta
37	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Mangga Dua	Ruko Orion Dusit, Jl. Mangga Dua Raya No. 06	021-6120107	DKI Jakarta
38	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Kemang	Jl. Kemang Selatan Raya No. 111H	021-71793188	DKI Jakarta
39	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Radio Dalam (d.h. Pondok Indah)	Jl. Radio Dalam No. 3C RT 001 RW 001 Gandaria Utara - Kebayoran Baru	021-38250210	DKI Jakarta
40	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Panglima Polim	Ruko Grand Panglima Polim Kav. No. 2	021-27099350	DKI Jakarta
41	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Klender	Jl. Buaran Raya Blok A No. 93-94	021-8611621 021-8611622 021-8611623	DKI Jakarta
42	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Kelapa Gading	Jl. Bukit Gading Raya Blok A/21 Kelapa Gading Barat	021-38879133	DKI Jakarta

No.	Kantor Pusat/Cabang Head/Branch Office		Alamat Address	No. Telepon Phone Number	Provinsi Province
	Tipe Kantor Office Type	Nama Kantor Office Name			
43	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Jakarta – Muara Karang	Jl. Muara Karang Raya Blok A8 Utara No. 21	021-66602537	DKI Jakarta
44	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Cikarang – M.H. Thamrin	Ruko Plaza Menteng Blok B No. 23	021-89903558 021-89918116	Jawa Barat
45	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Bekasi - Grand Mall	Grand Mall Bekasi Blok B No. 8, Jl. Jenderal Sudirman	021-88951968	Jawa Barat
46	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Depok – Margonda	Jl. Margonda Raya No. 208 Ruko 4	021-77269268 021-77268896 021-77268400 021-77268186	Jawa Barat
47	Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	Kuta - Badung	Jl. Raya Kuta No. 127, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	0361 - 9599090	Bali

PETA AREA OPERASIONAL [OJK C.3][GRI 2-1]

Operational Area Map

47 JARINGAN KANTOR

Office Network

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

PROFIL KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners

Nobiru Adachi

Komisaris Utama
President Commissioner

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	67/Laki-laki 67/Male
Kewarganegaraan Nationality	Jepang Japanese
Domisili Domicile	Jepang Japan

Riwayat Pendidikan Education	LLB dari University of Tokyo (1980) dan MA di bidang Economics dari Case Western University (1983)	Bachelor of Laws (LLB) from the University of Tokyo (1980) and Master of Arts (MA) in Economics from Case Western University (1983)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Komisaris Utama J Trust Bank (2015 – sekarang) • Managing Director Overseas Legal Affairs South East Asia di J Trust Co., Ltd. (2021 – sekarang) • Company Director, Executive Officer, Overseas Legal Affairs and Southeast Asia Finance (2020 – 2021) • Representative Director dan Senior Managing Director di J Trust Co., Ltd. (2014 - 2020) • Managing Director di J Trust Co., Ltd. (2013 – 2014) • Chairman dan CEO di M&A Solutions, Japan (2011 – 2012) • Representative Director di ETF Securities (Japan) Limited (2008 – 2011) • Executive Director - Senior Managing Director di JASDAQ Securities Exchange (2006 – 2008) • Director-General, Hakodate Customs di Ministry of Finance (2005 – 2006) • Director-General, Research Department, Policy Research Institute di Ministry of Finance (2004 – 2005) • Berbagai posisi di Ministry of Finance hingga Director, Research Division, International Bureau (1997 – 2004) • Associate Professor di University of Tokyo (1995 -1997) • Deputy Budget Examiner (1990 – 1992) dan Associate Director, International Finance Bureau (1992 – 1995) di Ministry of Finance • Advisor to Executive Director di International Monetary Fund (1987 – 1990) • Berbagai posisi di Ministry of Finance hingga Director, Onomichi Tax Office (1980 – 1987).	• President Commissioner of J Trust Bank (2015 – present) • Managing Director Overseas Legal Affairs South East Asia at J Trust Co., Ltd. (2021 – present) • Company Director, Executive Officer, Overseas Legal Affairs and Southeast Asia Finance (2020 – 2021) • Representative Director and Senior Managing Director at J Trust Co., Ltd. (2014 - 2020) • Managing Director at J Trust Co., Ltd. (2013 – 2014) • Chairman and CEO at M&A Solutions, Japan (2011 – 2012) • Representative Director at ETF Securities (Japan) Limited (2008 – 2011) • Executive Director - Senior Managing Director at JASDAQ Securities Exchange (2006 – 2008) • Director-General, Hakodate Customs at the Ministry of Finance (2005 – 2006) • Director-General, Research Department, Policy Research Institute at the Ministry of Finance (2004 – 2005) • Various positions at the Ministry of Finance up to Director, Research Division, International Bureau (1997 – 2004) • Associate Professor at the University of Tokyo (1995 -1997) • Deputy Budget Examiner (1990 – 1992) and Associate Director, International Finance Bureau (1992 – 1995) at the Ministry of Finance • Advisor to Executive Director at the International Monetary Fund (1987 – 1990) • Various positions at the Ministry of Finance up to Director, Onomichi Tax Office (1980 – 1987).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Managing Director & Executive Officer Overseas Legal Affairs and Southeast Asia di J Trust Co., Ltd.	• Managing Director & Executive Officer Overseas Legal Affairs and Southeast Asia at J Trust Co., Ltd
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 30 Desember 2014 dan efektif tanggal 14 April 2015. Pengangkatan terakhir sebagai Komisaris Utama J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023.	Appointed for the first time as President Commissioner of J Trust Bank based on AGMS resolution on 30 December 2014, and effective from 14 April 2015. Last reappointment as President Commissioner of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 31 May 2023.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but he is affiliated with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Commissioners section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 6, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 13 Mei 2027.	Level 6 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 13 May 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2023-2026	2023-2026

Nobuiku Chiba

Komisaris
Commissioner

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	52/Laki-laki 52/Male	
Kewarganegaraan Nationality	Jepang Japanese	
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia	
Riwayat Jabatan Work Experience	• Komisaris J Trust Bank (2019 – sekarang) • Representative Director, Executive Vice President, Executive Officer in charge of Southeast Asian Financial Business di J Trust Co., Ltd. (2020 – sekarang) • Direktur J Trust Asia Pte. Ltd. (2020 – sekarang) • Komisaris PT JTrust Investments Indonesia (2018 – sekarang) • Komisaris Utama PT JTrust Olympindo Multifinance (2018 – 2023) • Representative Director and Senior Managing Executive Officer atas Bisnis Finansial Asia Tenggara di J Trust Co., Ltd. (2019-2020) • Representative Director and Senior Managing Executive Officer yang bertanggung jawab atas Bisnis Finansial Indonesia dan Bisnis Non-Bank Asia Tenggara di J Trust Co., Ltd. (2018 – 2019) • Representative Director and Senior Managing Executive Officer yang bertanggung jawab atas Bisnis Finansial Korea dan Departemen Hubungan Masyarakat dan Hubungan Investor di J Trust Co., Ltd. (2015 – 2018) • Representative Director di A Capital Co., Ltd. (2015-2019) • Direktur JT Saving Bank (2015 – 2019) • Direktur Chinae Saving Bank Co., Ltd./ Sekarang JT Chinae Saving Bank Co., Ltd. (2012 – 2019) • Berbagai posisi di Nexus Card Co., Ltd. hingga menjabat President (2011 – 2015) • Berbagai posisi di J Trust Co., Ltd., hingga menjabat Direktur Representatif (2008 – 2015)	• Commissioner of J Trust Bank (2019 – present) • Representative Director, Executive Vice President, Executive Officer in charge of Southeast Asian Financial Business in J Trust Co., Ltd. (2020 – present) • Director of J Trust Asia Pte. Ltd. (2020 – present) • Commissioner of PT JTrust Investment Indonesia (2018 – present) • President Commissioner of PT JTrust Olympindo Multifinance (2018 – 2023) • Representative Director and Senior Managing Executive Officer in charge of Southeast Asian Financial Business at J Trust Co., Ltd. (2019 - 2020) • Representative Director and Senior Managing Executive Officer in charge of Indonesian Financial Business and Non-Bank Business in Southeast Asia at J Trust Co., Ltd. (2018 - 2019) • Representative Director and Senior Managing Executive Officer in charge of Korean Financial Business and Public Relations and Investor Relations Department of J Trust Co., Ltd. (2015 – 2018) • Representative Director of A Capital Co., Ltd. (2015-2019) • Director of JT Saving Bank (2015 – 2019) • Director of Chinae Saving Bank Co., Ltd., currently known as JT Chinae Saving Bank Co., Ltd. (2012 – 2019) • Various positions at Nexus Card Co., Ltd. to President (2011 – 2015) • Various position at J Trust Co., Ltd. to Representative Director (2008 – 2015
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Representative Director & Vice President Director di J Trust Co., Ltd. • Komisaris di PT JTrust Investment Indonesia • Direktur J Trust Asia Pte. Ltd.	• 'Representative Director & Vice President Director at J Trust Co., Ltd. • Commissioner of PT JTrust Investment Indonesia • Director of J Trust Asia Pte. Ltd.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 20 September 2018 dan efektif tanggal 12 Maret 2019. Pengangkatan terakhir sebagai Komisaris J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023.	Appointed for the first time as Commissioner of J Trust Bank based on EGMS resolution on 20 September 2018 and effective as of 12 March 2019. Last reappointment as Commissioner of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 31 May 2023.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but he is affiliated with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Commissioners section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 6, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 21 Mei 2027	Level 6 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 21 May 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2023-2026	2023-2026

PROFIL KOMISARIS
Profile of the Board of Commissioners

Iwan Nataliputra
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Riwayat Pendidikan Education	MSi dari Universitas Indonesia (2004), Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka (2003) dan Sarjana Tehnik dari Universitas Kristen Maranatha Bandung (1988)	Master of Science from the University of Indonesia (2004), Bachelor of Economics from Universitas Terbuka (2003), and Bachelor of Engineering from Maranatha Christian University, Bandung (1988)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Komisaris Independen J Trust Bank (2021 – sekarang) • Komisaris Utama PT Sahabat Finansial Keluarga (2011-2021) • Beberapa posisi hingga menjabat Board of Management PT Bank Permata (2003-2020) • Komisaris PT Astra Sedaya Finance (2017-2018) • Komisaris Utama PT Bali Securities (2009-2010) • Beberapa posisi hingga menjabat Head of Treasury & Operational Risk Management di PT Bank Bali (1989-2003	• Independent Commissioner of J Trust Bank (2021 – present) • President Commissioner of PT Sahabat Finansial Keluarga (2011-2021) • Several positions to the Board of Management at PT Bank Permata (2003 – 2020) • Commissioner of PT Astra Sedaya Finance (2017-2018) • President Commissioner of PT Bali Securities (2009-2010) • Several positions to Head of Treasury & Operational Risk Management at PT Bank Bali (1989 – 2003)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners or other position.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif tanggal 29 November 2021. Pengangkatan terakhir sebagai Komisaris Independen J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of J Trust Bank based on AGMS resolution on 15 October 2021 and effective as of 29 November 2021. The Last reappointment as Independent Commissioner of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 31 May 2023.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2023 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2023 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Commissioners section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 4 November 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 4 November 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2023-2026	2023-2026

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	60/Laki-laki 60/Male
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia

Benny Siswanto

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Riwayat Pendidikan Education	M.A di bidang ekonomi dari Williams College, Massachusetts, Amerika Serikat (1997) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1985)	M.A in Economics from Williams College, Massachusetts, US (1997) and Bachelor of Economics from Gajah Mada University, Yogyakarta (1985)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Komisaris Independen J Trust Bank (2021 – sekarang) • Komisaris Utama PT Mekar Prana Indah, Bidakara (2017 - 2023) • Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional I Sumatera Bank Indonesia (2017) • Direktur Eksekutif /Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (2014 - 2016) • Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kantor Wilayah III Bali & Nusa Tenggara (2013 - 2014) • Berbagai posisi di Bank Indonesia hingga menjabat Direktur/Kepala Biro Perencanaan Strategis Bank Indonesia (1988 – 2013)	• Independent Commissioner of J Trust Bank (2021 – present) • President Commissioner of PT Mekar Prana Indah, Bidakara (2017 – 2023) • Executive Director, Head of Department at Bank Indonesia for Region I Sumatra (2017) • Executive Director/Head of Bank Indonesia Regional Office of East Java Province (2014 - 2016) • Executive Director/Head of Bank Indonesia Regional Office III Bali & Nusa Tenggara (2013 - 2014) • Various positions at Bank Indonesia to Director/Head of Strategic Planning Bureau of Bank Indonesia (1988 – 2013)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap Jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris maupun jabatan lainnya	Not holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, Commissioners or other position
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif tanggal 22 Desember 2021. Pengangkatan terakhir sebagai Komisaris Independen J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of J Trust Bank based on AGMS resolution on 15 October 2021 and effective as of 22 December 2021. The Last reappointment as Independent Commissioner of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 31 May 2023.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2023 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2023 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Commissioners section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 4 November 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 4 November 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2023-2026	2023-2026

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	65/Laki-laki 65/Male
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia

PROFIL DIREKSI

Profile of the Board of Directors

Ritsuo Fukadai

Direktur Utama
President Director

Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Ekonomi dari University of Hitotsubashi (State University of Japan) (1987)	Bachelor of Economics from University of Hitotsubashi (State University of Japan) (1987)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Utama J Trust Bank (2019 – sekarang) • Business Advisor di J Trust Co., Ltd. (2019) • Direktur di Nihon Hoshou Co., Ltd. (2018 – 2019) • General Manager Seoul, Korea di JT Chinae Saving Bank (2016 – 2018) • Chief Financial Officer Yangoon, Myanmar di Super Seven Starts Motors Co., Ltd. (2015 – 2016) • General Manager Yangoon, Myanmar di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2012 – 2015) • General Manager Houston, U.S. di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2008 – 2012) • Berbagai posisi di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ hingga Senior Manager Corporate Banking Odenmacho Branch, Tokyo (1987 –2008)	• President Director of J Trust Bank (2019 – present) • Business Advisor at J Trust Co., Ltd. (2019) • Director at Nihon Hoshou Co., Ltd. (2018 – 2019) • General Manager Seoul, Korea at JT Chinae Saving Bank (2016 – 2018) • Chief Financial Officer Yangoon, Myanmar at Super Seven Starts Motors Co., Ltd. (2015 – 2016) • General Manager Yangoon, Myanmar at Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2012 – 2015) • General Manager Houston, U.S. at Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2008 – 2012) • Various positions at Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ up to Senior Manager Corporate Banking Odenmacho Branch, Tokyo (1987 – 2008)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 27 Juni 2019 dan efektif tanggal 7 November 2019. Pengangkatan terakhir sebagai Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as President Director of J Trust Bank based on AGMS resolution on 27 June 2019 and effective as of 7 November 2019. His latest reappointment as President Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan pelatihan di tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Directors section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 May 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	62/Laki-laki 62/Male
Kewarganegaraan Nationality	Jepang Japanese
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia

Masayoshi Kobayashi

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	55/Laki-laki 55/Male	
Kewarganegaraan Nationality	Jepang Japanese	
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia	
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Hukum dari Universitas Keio, Tokyo, Jepang (1993) dan Master of Science dalam Administrasi Industri dengan Konsentrasi Keuangan dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, AS (1999)	Bachelor of Laws from Keio University, Tokyo, Japan (1993) and Master of Science in Industrial Administration majoring in Finance from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA (1999)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Wakil Direktur Utama J Trust Bank (2023 – sekarang) • Executive Vice President Manajemen Risiko di J Trust Bank (2019 – 2023) • Wakil Direktur, Kantor Pemantauan Bank-Bank Besar, Biro Pengembangan dan Manajemen Strategi lainnya di Badan Jasa Keuangan, Pemerintah Jepang (2009 – 2018) • Penasihat Investasi di Oasis Advisors Limited Cabang Tokyo, Jepang (2008 – 2009) • Analis Investasi di ABN Amro Asset Management (Japan) Ltd, Tokyo, Jepang (2007) • Equity Analyst untuk Sektor Keuangan/ Perbankan Jepang di Deutsche Securities Inc. Tokyo, Jepang (2002 – 2007) • Treasurer/Assistant Investment Officer di Fuji Bank Limited, New York, AS (1999 – 2001) • Asisten Trader Produk Pendapatan Tetap di Fuji Bank Limited, Tokyo, Jepang (1995 – 1997) • Sales di Fuji Bank Limited, Tokyo, Jepang (1993 – 1995)	• Vice President Director of J Trust Bank (2023 – present) • Executive Vice President Risk Management at J Trust Bank (2019 – 2023) • Deputy Director, Big Bank Monitoring Office, Development and Other Management Strategy Bureau at the Financial Services Agency, the Japanese Government (2009 – 2018) • Investment Advisor at Oasis Advisros Limited, Tokyo Branch, Japan (2008 – 2009) • Investment Analyst at ABN Amro Asset Management (Japan) Ltd., Tokyo, Japan (2007) • Equity Analyst for Japanese Finance/ Banking Sector at Deutsche Securities Inc. Tokyo, Japan (2002 – 2007) • Treasurer/Assistant Investment Officer at Fuji Bank Limited, New York, USA (1999 – 2001) • Trader Assistant for Fixed Income Product at Fuji Bank Limited, Tokyo, Japan (1995 – 1997) • Sales at Fuji Bank Limited, Tokyo, Japan (1993 – 1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Wakil Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 3 Maret 2023. Pengangkatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as Vice President Director of J Trust Bank based on EGMS resolution on 3 March 2023. His latest reappointment as Vice President Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Directors section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 May 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors

Felix I. Hartadi
Direktur Kepatuhan & Hukum
Director - Compliance & Corporate Legal

Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Hukum di bidang Hukum Perdata dari Universitas Parahyangan (1985) dan Magister di bidang General Management dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (2006)	Bachelor of Laws in Civil Laws from Parahyangan University (1985) and master's degree in general management from Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (2006)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Kepatuhan J Trust Bank (2014 – sekarang) • Direktur Kepatuhan di PT Bank HSBC Indonesia (2009 – 2014) • Direktur Kepatuhan di PT Bank DBS (2006 – 2009) • Direktur Kepatuhan di PT Bank Rabobank International Indonesia (2000 – 2006) • Berbagai posisi di PT Bank Rabobank International Indonesia hingga Manager Credit Risk Control (1990 – 2000)	• Compliance Director of J Trust Bank (2014 – present) • Compliance Director at PT Bank HSBC Indonesia (2009 – 2014) • Compliance Director at PT Bank DBS (2006 – 2009) • Compliance Director at PT Bank Rabobank International Indonesia (2000 – 2006) • Various positions with PT Bank Rabobank International Indonesia up to Manager Credit Risk Control (1990 – 2000)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 26 Februari 2014 dan efektif tanggal 22 April 2014. Pengangkatan terakhir sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as President Director of J Trust Bank based on EGMS resolution on 26 February 2014 and effective as of 22 April 2014. Last reappointment as Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Directors section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 May 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	66/Laki-laki 66/Male
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia

Helmi A. Hidayat

Direktur Keuangan & Perencanaan

Director - Finance & Planning

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	67/Laki-laki 67/Male	
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian	
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia	
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana jurusan Elektro dari Universitas Dharma Sari 45 (1987) dan Magister dari Universitas Krisnadwipayana (1993)	Bachelor degree in Electrical Engineering from Dharma Sari University 45 (1987) and Master's degree from Krisnadwipayana University (1993)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur J Trust Bank (2016 – sekarang) • Executive Vice President di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2012 – 2016) • Kepala Divisi Keuangan, IT, dan Operasional di PT Bank Nationalnobu Tbk (2011 – 2012) • Pimpinan Cabang KPO Plaza Semanggi di PT Bank Nationalnobu Tbk (2010 – 2011) • Project Manager IT, Keuangan, dan Operasi di Lippo Group/PT Visionet Int. (2009 – 2010) • Kepala Divisi IT, Operasi, dan Keuangan di Bank Akita (2003 – 2009) • Kepala Grup Administrasi dan Monitoring Bank di BPPN (1999 – 2002) • Kepala Divisi IT dan Operasi di Bank Dana Asia (1989 – 1999)	• Director of J Trust Bank (2016 – present) • Executive Vice President at PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2012 – 2016) • Head of Finance, IT and Operations Division at PT Bank Nationalnobu Tbk (2011 – 2012) • Branch Manager, KPO Plaza Semanggi, PT Bank Nationalnobu Tbk (2010 – 2011) • Project Manager for IT, Finance and Operations at Lippo Group/PT Visionet Int. (2009 – 2010) • Head of IT, Operations and Finance Division at Bank Akita (2003 – 2009) • Group Head, Bank Administration and Monitoring, IBRA (1999 – 2002) • Head of IT and Operations Division at Bank Dana Asia (1989 – 1999)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 30 Juni 2016 dan efektif tanggal 5 September 2016. Pengangkatan terakhir sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as Director of J Trust Bank based on AGMS resolution on 30 June 2016 and effective as of 5 September 2016. Last reappointment as Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Directors section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 Mei 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors

Cho Won June
Direktur Teknologi Informasi
Director - Information Technology

Riwayat Pendidikan Education	Bachelor of Science di bidang Material Science & Engineering dari University of Myonggi (1995) dan Master of Business Administration dari Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002)	Bachelor of Science in Material Science & Engineering from University of Myonggi (1995) and Master of Business Administration from Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur J Trust Bank (2019 – sekarang) • Managing Director, Information Strategy Group di JTrust Group (JT Chinae Saving Bank) (2013 – 2019) • Department Head, Information Strategy Department di Gongpyung Saving Bank (2012 – 2013) • Senior Project Manager, IT Department di Solomon Financial Group (2005 – 2012) • Manager of New Business TPF di LG Group (2001 – 2005)	• Director of J Trust Bank (2019 – present) • Managing Director, Information Strategy Group at JTrust Group (JT Chinae Saving Bank) (2013 – 2019) • Department Head, Information Strategy Department at Gongpyung Saving Bank (2012- 2013) • Senior Project Manager, IT Department at Solomon Financial Group (2005 – 2012) • Manager of New Business TPF at LG Group (2001 – 2005)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 27 Juni 2019 dan efektif tanggal 7 November 2019. Pengangkatan terakhir sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as Director of J Trust Bank based on AGMS resolution on 27 June 2019 and effective as of 7 November 2019. Last reappointment as Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Directors section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 Mei 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	55/Laki-laki 55/Male
Kewarganegaraan Nationality	Korea Selatan South Korean
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia

R. Djoko Prayitno

Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies

DIRECTOR - CREDIT RISK & MANAGEMENT ALL DELINQUENCIES

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	67/Laki-laki 67/Male	
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian	
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia	
Riwayat Pendidikan Education	MBA dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat (1988) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1982)	MBA from Saint Louis University, Missouri, US (1988) and Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1982)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur J Trust Bank (2021 – sekarang) • EVP Management All Delinquencies J Trust Bank (2020 - 2021) • Direktur Kredit PT Bank Resona Perdania (2017 - 2020) • Komisaris Independen PT Bank Resona Perdania (2015 - 2016) • Konsultan Manajemen ISO, Daya Wisesa Sinergi (2012 - 2021) • Konsultan Perbankan, Daya Determination (2010 - 2012) • Instruktur tetap, LPPI (2006 - 2010) • Senior Instruktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003 – 2006) • GM of City Business Center PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001 – 2003) • Berbagai posisi di PT Bank Dagang Negara Indonesia – sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga menjabat Regional Manager Banjarmasin (1982 – 2021)	• Director of J Trust Bank (2021 – present) • EVP Management All Delinquencies at PT Bank J Trust Indonesia Tbk (2020 - 2021) • Credit Director at PT Bank Resona Perdania (2017 - 2020) • Independent Commissioner of PT Bank Resona Perdania (2015 - 2016) • ISO Management Consultant, Daya Wisesa Sinergi (2012 - 2021) • Banking Consultant, Daya Determination (2010 - 2012) • Permanent Instructor, LPPI (2006 - 2010) • Senior Instructor at PT Bank Mandiri (2003 - 2006) • GM of City Business Center at PT Bank Mandiri (2001 - 2003) • Several positions at PT Bank Dagang Negara Indonesia - now PT Bank Mandiri Persero (Tbk) to Regional Manager of Banjarmasin (1982 - 2021)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif tanggal 20 September 2021. Pengangkatan terakhir sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as Director of J Trust Bank based on EGMS resolution on 3 May 2021 and effective as of 20 September 2021. Last reappointment as Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Directors section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 Mei 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors

Widjaja Hendra
Direktur Bisnis
Director – Business

Riwayat Pendidikan Education	Sarjana dari Auckland University, Selandia Baru (1993)	Bachelor degree from Auckland University, New Zealand (1993)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur J Trust Bank (2021 – sekarang) • EVP Bisnis J Trust Bank (2021) • EVP/Group Head Corporate, Commercial, SME & Multifinance Lending PT Bank Mega Tbk (2014 - 2021) • Managing Director SME Lending PT Bank UOB Indonesia (2008 - 2014) • Kepala Divisi Commercial Loan Business & Strategy PT Bank OCBC NISP Tbk (2005 - 2008) • Head of Sales Commercial PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2005) • Head of Commercial Jabodetabek PT Bank Permata Tbk (1997 – 2004) • Marketing Manager PT Bank Tiara Asia (1993 – 1997)	• Director of J Trust Bank (2021 – present) • EVP Business J Trust Bank (2021) • EVP/Group Head Corporate, SME & Multifinance Lending at PT Bank Mega Tbk (2014 - 2021) • Managing Director SME Lending at PT Bank UOB Indonesia (2008 - 2014) • Head of Division of Commercial Loan Business & Strategy at PT Bank OCBC NISP Tbk (2005 - 2008) • Head of Sales Commercial at PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2005) • Head of Commercial Jabodetabek at PT Bank Permata Tbk (1997 – 2004) • Marketing Manager at PT Bank Tiara Asia (1993 – 1997)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, Komisaris, dan Komite maupun jabatan lainnya.	Has no concurrent position as member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees or other position.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif tanggal 29 November 2021. Pengangkatan terakhir sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan keputusan RUPST 28 Juni 2024.	Appointed for the first time as Director of J Trust Bank based on EGMS resolution on 15 October 2021 and effective as of 29 November 2021. Last reappointment as Director of J Trust Bank was based on AGMS resolution on 28 June 2024.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Ultimate and Controlling Shareholder.
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 Education and Training in 2024	Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 disajikan terpisah di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Education and training in 2024 are presented separately in the Education and/or Training of the Board of Commissioners section of this Annual Report.
Sertifikasi Certifications	Manajemen Risiko Jenjang 7, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) yang berlaku hingga 7 Mei 2027.	Level 7 Risk Management, issued by Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) and valid until 7 Mei 2027.
Periode Jabatan Term of Office	2024-2025	2024-2025

Usia/Jenis Kelamin Age/Gender	56/Laki-laki 56/Male
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Indonesia Indonesia

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada tahun 2024.

Bank telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 28 Juni 2024 dan menyetujui pengangkatan kembali semua anggota Dewan Direksi dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi J Trust Bank per akhir tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Nobiru Adachi
Komisaris: Nobuiku Chiba
Komisaris Independen: Iwan Nataliputra
Komisaris Independen: Benny Siswanto

Anggota Direksi

Direktur Utama: Ritsuo Fukadai
Wakil Direktur Utama: Masayoshi Kobayashi
Direktur: Felix I. Hartadi Tiono
Direktur: Helmi A. Hidayat
Direktur: Cho Won June
Direktur: R. Djoko Prayitno
Direktur: Widjaja Hendra

Information on the Changes in the Composition of the Board of Commissioners and/or Directors

There were no changes in the composition of the Board of Commissioenrs and the Board of Directors in 2024.

The Bank has held Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 28 June 2024 and approved the reappointment of all members of the Board of Directors for a term of 1 (one) year.

Composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of J Trust Bank as of the end of 2024:

Board of Commissioners

President Commissioner: Nobiru Adachi
Commissioner: Nobuiku Chiba
Independent Commissioner: Iwan Nataliputra
Independent Commissioner: Benny Siswanto

Board of Directors

President Director: Ritsuo Fukadai
Vice President Director: Masayoshi Kobayashi
Director: Felix I. Hartadi Tiono
Director: Helmi A. Hidayat
Director: Cho Won June
Director: R. Djoko Prayitno
Director: Widjaja Hendra

PROFIL EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Profiles of Executive Vice President

Saptono A. Irawan

Senior Executive Vice President Business Banking

Warga Negara Indonesia. 54 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2021 sebagai Senior Executive Vice President Business Banking.

Beliau memiliki pengalaman dan karir di institusi keuangan nasional dan internasional, seperti Assistant Director Corporate Banking di PT Bank Shinhan Indonesia. Beliau juga pernah menduduki berbagai jabatan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Rabobank Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan Asian Development Bank di Manila, Filipina.

Beliau menyelesaikan program MBA di Manuel Luis Quezon University di Manila, Filipina (1995).

Indonesian Citizen. 54 years old.

Joined J Trust Bank in 2021 as Senior Executive Vice President of Business Banking.

He has gained experience and career in national and international financial institutions, including as Assistant Director of Corporate Banking at PT Bank Shinhan Indonesia. He also held various positions at PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Rabobank Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, and the Asian Development Bank in Manila, the Philippines.

He completed his MBA program at Manuel Luis Quezon University in Manila, the Philippines (1995).

Bijono Waliman

Executive Vice President Operation & Credit Administration

Warga Negara Indonesia. 75 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Executive Vice President Operation & Credit Administration.

Beliau memiliki banyak pengalaman di sektor keuangan, seperti Vice President Citibank NA, Executive Vice President di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Direktur Keuangan di PT AKR Corporindo Tbk, Executive Vice President di PT Samuel International, dan Komisaris Utama di PT Bima Mult Finance. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur J Trust Bank.

Beliau menyelesaikan program Diploma Ingenieur di bidang Electrical Engineering dari University of Bochum (1976), dan MBA dari Delft University (1981).

Indonesian Citizen. 75 years old.

Joined J Trust Bank in 2019 and currently served as Executive Vice President of Operation and Credit Administration.

He has extensive work experiences in the financial sector, including as Vice President of Citibank NA, Executive Vice President at PT Bank Danamon Indonesia Tbk, and Finance Director at PT AKR Corporindo Tbk, Executive Vice President at PT Samuel International, and President Commissioner at PT Bima Mult Finance. Previously, he also served as Director of J Trust Bank.

He completed the Diplom Ingenieur program in Electrical Engineering from the University of Bochum (1976) in Germany and obtained his MBA at Delft University (1981), the Netherlands.

Agus Syabarrudin

Executive Vice President Branch Management

Warna Negara Indonesia. 58 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2023 sebagai Executive Vice President Branch Management.

Beliau memiliki pengalaman dan karir yang luas di industri perbankan, diantaranya yaitu sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dan Direktur Utama di Bank Kalsel. Selain itu, beliau juga pernah menjabat di PT AMC, Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, serta di beberapa bank lainnya.

Beliau menyelesaikan program Pasca Sarjana S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (2020), dan program Pasca Sarjana S2 di Universitas Indonesia (2005).

Indonesian Citizen. 58 years old.

Joined J Trust Bank in 2023 as Executive Vice President Branch Management.

He has extensive experience and career in the banking industry, including as President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk and President Director of Bank Kalsel. Previously, he also served in PT AMC, the Sharia Business Unit of PT Bank Danamon Indonesia Tbk, as well as at several other banks.

He completed his Doctoral degree at Lambung Mangkurat University in Banjarmasin (2020), and master's degree at University of Indonesia (2005).

Ong Pey Fang

Executive Vice President Human Capital and Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia. 61 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Executive Vice President Human Capital and Corporate Secretary.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Commonwealth, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, ABN Amro Bank NV, dan Citibank NA.

Beliau meraih gelar Sarjana Bisnis di bidang Akuntansi Bisnis dari Royal Melbourne Institute of Technology tahun 1988.

Indonesian Citizen. 61 years old.

Joined J Trust Bank in 2019 and currently served as Executive Vice President of Human Capital & Corporate Secretary.

She has held various positions at PT Bank Commonwealth, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, ABN Amro Bank NV, and Citibank NA.

She holds a Bachelor of Business in Business Accounting from the Royal Melbourne Institute of Technology in 1988.

Novy Angela Andow
Executive Vice President Treasury & Financial Institutions

Warga Negara Indonesia. 57 tahun.

Indonesian citizen. 57 years old.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2019 sebagai Executive Vice President Treasury.

Joined J Trust Bank in 2019 as Executive Vice President Treasury.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank QNB Indonesia Tbk dengan posisi terakhir sebagai Head of Treasury, dan Royal Bank of Scotland dengan posisi terakhir sebagai Director Corporate Risk Solution.

She has held various positions at PT Bank QNB Indonesia Tbk with her last postion as Head of Treasury, and Royal Bank of Scotland with her last position as Director Corporate Risk Solution.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Atmajaya tahun 1994.

She holds a Bachelor of Economics in Management from Atmajaya University in 1994.

Agung Subagiyo
Executive Vice President Business Linkage and Commercial

Warga Negara Indonesia. 53 tahun.

Indonesian citizen. 53 years old.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Executive Vice President Business Linkage & Commercial.

Joined J Trust Bank in 2019 and currently served as Executive Vice President Business Linkage & Commercial.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Special Asset Management dan Kepala Divisi Corporate Secretary di J Trust Bank. Beliau juga pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Director.

Prior, he served as Head of Special Asset Management Division and Head of Corporate Secretary Division at J Trust Bank. He has also held various positions at PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk with his last position as Deputy Director.

Beliau mteraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Indonesia tahun 2007 dan Sarjana Hukum dari STIH Dharma Andigha Bogor tahun 2018, serta Master of Human Resources Management dari Universitas Bina Sarana Informasi Bandung tahun 2011.

He holds a Bachelor of Economics from STIE Indonesia in 2007 and a Bachelor of Law from STIH Dharma Andigha Bogor in 2018, and Master of Human Resources Management from Bina Sarana Information University Bandung in 2011.

Nobuyuki Wake
Executive Vice President Credit Risk Reviewer

Warga Negara Jepang. 52 tahun.

Japanese citizen. 52 years old.

Bergabung dengan J Trust Bank tahun 2022 sebagai Executive Vice President Credit Risk Reviewer.

Joined J Trust Bank in 2022 as Executive Vice President of Credit Risk Reviewer.

Memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan dan pembiayaan, terutama dalam melakukan evaluasi kredit serta pengelolaan kredit bermasalah. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama JT Capital Co., Ltd. di Korea Selatan serta menduduki berbagai posisi di JT Chinae Savings Bank Ltd. di Korea Selatan. Di awal karirnya, ia bekerja di beberapa perusahaan di Jepang.

He has extensive experience in the financial and financing industry, especially in credit evaluation and non-performing loan management. He was the President Director of JT Capital Co., Ltd. in South Korea and has held various positions at JT Chinae Savings Bank Ltd. in South Korea. Early in his career, he worked in several companies in Japan.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Ritsumeikan University, Kusatsu, Shiga, Jepang pada tahun 1996.

He holds a Bachelor of Economics degree from Ritsumeikan University, Kusatsu, Shiga, Japan in 1996.

PROFIL ANGGOTA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Profile of Members of Committees under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT

Ketua: Benny Siswanto*
Sekretaris merangkap Anggota: Richard Steven Dompas
Anggota: I Gde Yadnya Kusuma

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Ketua: Benny Siswanto*
Sekretaris merangkap Anggota: Ong Pey Fang**
Anggota: Nobuiku Chiba* dan Iwan Nataliputra*

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ketua: Iwan Nataliputra*
Sekretaris merangkap Anggota: I Gde Yadnya Kusuma
Anggota: Benny Siswanto* dan Bambang Setyoko

*) Lihat profil Dewan Komisaris
**) Lihat profil Executive Vice President

AUDIT COMMITEE

Chairman: Benny Siswanto*
Secretary and Member: Richard Steven Dompas
Member: I Gde Yadnya Kusuma

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Chairman: Benny Siswanto*
Secretary and Member: Ong Pey Fang**
Member: Nobuiku Chiba* dan Iwan Nataliputra*

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Chairman: Iwan Nataliputra*
Secretary and Member: I Gde Yadnya Kusuma
Member: Benny Siswanto* and Bambang Setyoko

*) See profiles of the Board of Commissioners
**) See profiles of Executive Vice President

Bambang Setyoko

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Oversight Committee

Warga Negara Indonesia. 67 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen.

Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Panin Bank Tbk. Beliau pernah menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Resonia Perdania, anggota Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Fakar Mekar Indah, dan bekerja di Bank Indonesia selama 34 tahun di berbagai satuan kerja.

Memiliki latar pendidikan Akademi Uang & Bank Yogyakarta dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – IBEK bidang Ekonomi Manajemen tahun 1978. Memiliki sertifikasi profesi berupa Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari LSPP, Sharia Baking Operation oleh Karim Consulting Indonesia, dan CACP batch 14 oleh IKAI.

Indonesian citizen. 67 years old.

Joined J Trust Bank in 2019 and currently served as the Member of the Risk Oversight Committee from Independent Party.

Currently he also serves as Member of the Audit Committee and Risk Oversight Committee at PT Bank Panin Tbk. He previously served as member of the Audit Committee and Risk Oversight Committee of PT Bank Resonia Perdania, member of the Board of Directors at PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Fakar Mekar Indah, and worked in Bank Indonesia for 34 years in different work units.

He graduated from Yogyakarta Bank & Finance Academy of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – IBEK in Management Economics in 1978. Owned professional certifications include Risk Management Competency Certifications Level 7 from LSPP, Sharia Banking Operations from Karim Consulting Indonesia, and CACP Batch 14 from IKAI.

I Gde Yadnya Kusuma

Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit
Secretary and Member of the Risk Oversight Committee and Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia. 70 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2021 dan menjabat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit dari Pihak Independen.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Pihak Independen Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko di Bank HiBank. Beliau pernah menduduki berbagai posisi di Bank Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur PPATK, serta pernah menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit di Bank Rakyat Indonesia.

Meraih Sarjana Muda Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1977, Sarjana Ekonomi dari STIE Swadaya Jakarta pada tahun 1995, dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2004. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari LSPP.

Indonesian citizen. 70 years old.

Joined J Trust Bank in 2021 and served as Secretary concurrent Member of the Risk Oversight Committee and Audit Committee from Independent Party.

He currently also serves as an Independent Party Member of the Risk Management Monitoring Committee at HiBank. He served in various positions at Bank Indonesia with the latest role as PPATK Director, and served as member of the Risk Oversight Committee and Audit Committee at Bank Rakyat Indonesia.

He holds a Bachelor of Economics from Brawijaya University in Malang in 1977, Bachelor in Economics from STIE Swadaya Jakarta in 1995, and Masters in Economics from the University of Indonesia in 2004. He owned professional certification in the form of Risk Management Competency Certifications Level 7 from LSPP.

Richard Steven Dompas

Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit
Secretary and Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia. 65 tahun.

Bergabung di J Trust Bank tahun 2023 dan menjabat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit dari Pihak Independen dan saat ini merangkap Anggota Komite Audit di PT Bank Shinhan Indonesia dan PT Bank ICBC Indonesia.

Beliau pernah bekerja sebagai Senior Vice President dan anggota BOD Asset Management Credit/AMC di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); Vice President Head Office Audit Operations, Cabang dan IT, PT Bank Danamon Indonesia Tbk; Senior Vice President, Head Internal Audit, PT Bank Permata Tbk; dan Direktur Marketing, Sales, and Communication, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Memiliki latar pendidikan Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) dari The American University, Washington D.C, U.S.A. Beliau memiliki sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari LSPP dan Audit Manajer Kualifikasi VII KKNI dari LSPP. Beliau juga merupakan Asesor bersertifikat untuk sertifikasi wajib di bidang Manajemen Risiko Kualifikasi 4-7 KKNI, Manajemen Risiko Level 1-5 serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kualifikasi 6 KKNI.

Indonesian citizen. 65 years old.

Joined J Trust Bank in 2023 and served as Secretary and Independent Member of the Audit Committee. Concurrently, he also serves as Member of the Audit Committee at PT Bank Shinhan Indonesia and PT Bank ICBC Indonesia.

Previously served as Senior Vice President and member of BOD Asset Management Credit/AMC at the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN); Vice President Head Office Audit Operations, Branches and IT, PT Bank Danamon Indonesia Tbk; Senior Vice President, Head Internal Audit, PT Bank Permata Tbk; and Director of Marketing, Sales and Communication, Banking Professional Certification Institute (LSPP).

He holds a Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) degree from The American University, Washington D.C, U.S.A. He has Level Batch 7 of LSPP Risk Management competency certification and Audit Manager Qualification VII KKNI from LSPP. He is also a certified Assessor for the mandatory R in the area of Risk Management Qualification 4-7 KKNI isk Management Level 1-5 certification and Rupiah Payment Systems and Money Management Qualification 6 KKNI.

PROFIL KEPALA DIVISI

Profiles of Head of Division

Agung Cahyanto

Kepala Divisi Human Capital
Human Capital Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Resona Perdania, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Mega Syariah, dan PT Bank Permata Tbk.

Meraih gelar Sarjana di bidang Peternakan dari Institut Pertanian Bogor dan Magister di bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2018 and currently served as the Head of Human Capital.

He has held various positions at PT Bank Resona Perdania, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Mega Syariah, and PT Bank Permata Tbk.

He holds a Bachelor Degree in Animal Husbandry from the Bogor Agricultural Institute and a Master's Degree in Economics from Gadjah Mada University.

Aby Makruf

Kepala Divisi Wealth Management & Priority Banking
Wealth Management & Priority Banking Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Wealth Management & Priority Banking.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Bank Commonwealth.

Meraih gelar Sarjana di bidang Sasta Inggris dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Gadjah Mada.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2022 and currently served as Head of the Wealth Management & Priority Banking Division.

He has held various positions at PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Bank Commonwealth.

Obtained a Bachelor degree in English Literature from the Jakarta State Islamic University and a Master of Business Administration from Gadjah Mada University.

Ake Pramasandhi

(Plt) Kepala Divisi Pemasaran & Promosi
(Acting) Marketing & Promotion Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai (Plt) Kepala Divisi Marketing & Promotion.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di Renerpha Asgarde, Pangkho Megah, Fasttrack Indonesia, BCS Logistics, Banten Mitra Angkasa, dan Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Nasional Bandung.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2016 and currently served as (Acting) Head of Marketing & Promotion Division.

He has held various positions at Renerpha Asgarde, Pangkho Megah, Fasttrack Indonesia, BCS Logistics, Banten Mitra Angkasa, and Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Obtained a Bachelor degree in Mechanical Engineering from the National Institute of Technology Bandung.

Ariesza Rhiandini

Kepala Divisi Treasury & Capital Markets
Head of Treasury & Capital Markets Division

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2024 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury & Capital Markets.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di bidang treasury di PT Bank Artha Graha Internastional Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Royal Bank of Scotland N.V, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Publik dari Universitas Padjadjaran.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2024 and currently serves as the Head of the Treasury & Capital Markets Division.

He has held various positions in the treasury field at PT Bank Artha Graha International Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Royal Bank of Scotland N.V., and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

He holds a bachelor's degree in Public Administration from Padjadjaran University.

Andrias Setyobudi

Kepala Divisi Commercial & SME Banking
Commercial and SME Banking Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2024 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Commercial dan SME Banking.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Universal Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Meraih gelar Sarjana di bidang Petroleum Engineering dari Universitas Pembangunan Nasional.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2024 and currently serves as the Head of the Commercial and SME Banking Division.

He has held various positions at PT Bank Universal Tbk, PT Bank Permata Tbk, and PT Bank UOB Indonesia.

He holds a bachelor's degree in Petroleum Engineering from the Pembangunan Nasional University.

Chaerany Sukanta Putri

Kepala Divisi Management All Delinquencies
Management All Delinquencies Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2005 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Management All Delinquencies.	Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2005 and currently served as Head of Management All Delinquencies Division.
Beliau pernah menduduki berbagai posisi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT Bank Dharmala, dan PT YKK Indonesia Co., Ltd.	She has held various positions at the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN), PT Bank Dharmala, and PT YKK Indonesia Co., Ltd.
Meraih gelar Diploma di bidang Keuangan dan Perbankan dari ABA-ABI Indonesia.	She has a Diploma degree in Finance and Banking from ABA-ABI Indonesia.

Ditto Harnando Purwadi

Kepala Divisi Business Strategy and Development
Business Strategy and Development Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Business Strategy & Development.	Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2022 and currently served as Head of Business Strategy & Development Division.
Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Mega Tbk, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank Danamon Tbk.	He has held various positions at PT Bank Mega Tbk, PT Bank UOB Indonesia, and PT Bank Danamon. Tbk
Meraih gelar sarjana di bidang Teknik Industri dari Insitut Teknologi Sepuluh Nopember dan Magister di bidang Keuangan dari Prasetiya Mulya Business School.	He has a Bachelor degree in Industrial Engineering from the Technological Institute of Sepuluh Nopember and Master degree in Finance from Prasetiya Mulya Business School.

Eka Patriya

(Plt) Kepala Divisi Credit & Administration & Head Office & Branch Operation Division
(Acting) Credit & Administration and Head Office & Branch Operation Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Credit & Administration dan Head Office & Branch Operation.	Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 1999 and currently serves as the Acting Head of the Credit & Administration Division and Head of Office & Branch Operations.
Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Pikko, PT Bank Century dan PT Bank Mutiara.	He has held various positions at PT Pikko, PT Bank Century, and PT Bank Mutiara.
Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma dan Magister di bidang Keuangan dari Universitas Indonesia.	He holds a bachelor's degree in Information Management from Gunadarma University and a master's degree in Finance from the University of Indonesia.

Elia Sumuruan Hasoloan Tobing

Kepala Divisi Corporate Banking
Corporate Banking Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Banking 2.	Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2021 and currently served as Head of the Corporate Banking 2 Division.
Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank International Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank Mega Tbk.	He has held various positions at PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank International Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank Mega Tbk.
Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti.	He obtained Bachelor degree in Economics from Trisakti University.

Fong Kuan Liung

Kepala Divisi Client Services
Client Services Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 1994 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Client Services.	Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 1994 and currently served as the Head of Client Services Division.
Beliau memulai karirnya di Bank Pikko, hingga saat ini telah berganti kepemilikan menjadi J Trust Bank.	He started his career at Bank Pikko, which has changed ownership and become J Trust Bank.
Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I.	He holds a Bachelor degree in Management from the Y.A.I. College of Economics.

Hawany Afrianty

Kepala Divisi Business Linkage & Consumer
Business Linkage & Consumer Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Business Linkage & Consumer.	Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2023 and currently served as Head of Business Linkage & Consumer Division.
Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Mega Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia.	She has held various positions at PT Bank Mega Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia.
Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari STIE Perbanas dan Magister Manajemen Keuangan dari STIE Perbanas.	Obtained a Bachelor degree in Financial Management from STIE Perbanas and Master of Financial Management from STIE Perbanas.

Henry
Kepala Divisi Information Technology
Information Technology Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Information Technology.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank MNC International Tbk, Bank Index Selindo, dan Rabobank International Indonesia

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2022 and currently served as Head of Information Technology Division.

He has held various positions at PT Bank MNC International Tbk, Bank Index Selindo, and Rabobank International Indonesia.

He obtained Bachelor degree in Management Economics from Krisnadwipayana University.

Iman Ramadhan Siregar
Kepala Divisi Corporate Legal & Litigation
Head of Corporate Legal & Litigation Division

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Legal & Litigation.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Hoekel Bangun Abadi, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Kantor Notaris A. Partomuan Pohan SH LLM, dan PT Bank Central Asia Tbk.

Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Trisakti.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2021 and currently served as the Head of Corporate Legal & Litigation Division.

He has held various positions at PT Hoekel Bangun Abadi, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Notary Office A. Partomuan Pohan SH LLM, and PT Bank Central Asia Tbk.

He holds a Bachelor of Law from Trisakti University.

Muhammad Habib Ubaidillah
Kepala Divisi Compliance
Compliance Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2024 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Branch Compliance.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di bidang Compliance di PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Tbk, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Oke Indonesia, PT Bank Resona Perdania, serta pernah juga sebagai advokat di HKR Law Firm dan Farida Law Office.

Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Islam Indonesia dan Magister dari Universitas Gadjah Mada.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2024 and currently serves as the Head of Branch Compliance Division.

He has held various positions in the Compliance field at PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia Tbk, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Oke Indonesia, PT Bank Resona Perdania, and has also worked as a lawyer at HKR Law Firm and Farida Law Office.

He holds a bachelor's degree in Law from the Islamic University of Indonesia and a master's degree from Gadjah Mada University.

M. Zainu Rohman
Kepala Divisi Risk Management
Risk Management Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Risk Management.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Aladin Syariah Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Adira Insurance dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya.

Meraih gelar Diploma di bidang Keuangan dari Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar sarjana (ekstensi) di bidang Ekonomi & Bisnis.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2022 and currently served as Head of Risk Management Division.

He has held various positions at PT Bank Aladin Syariah Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Adira Insurance, and several other financial services institutions.

He holds a Diploma degree in Finance from Gadjah Mada University and a Bachelor degree from an extension program in Economics and Business.

Nathan Tanuwidjaja
Kepala Divisi Internal Audit
Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Panin Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PricewaterhouseCoopers, PT Bank Central Asia Tbk.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Komputer dari City College of New York dan Master Ilmu Komputer dari Columbia University.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2023 and currently served as Head of Internal Audit Division.

He has held various positions at PT Bank Panin Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PricewaterhouseCoopers, PT Bank Central Asia Tbk.

He holds a Bachelor of Computer Science from City College of New York and a Master in Computer Science from Columbia University.

Nyoman Sukreni
Kepala Divisi Corporate Funding
Corporate Funding Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 1998 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Funding.

Beliau memulai karirnya di Bank Pikko hingga saat ini telah berganti kepemilikan dan menjadi J Trust Bank.

Meraih gelar diploma di bidang Manajemen Perbankan dari STIE Perbanas.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 1998 and currently served as Head of Corporate Funding Division.

She started his career at Bank Pikko, which has changed ownership and become J Trust Bank.

She has a Diploma degree in Banking Management from STIE Perbanas.

Parulian Situmorang
Kepala Divisi Financial Control
Financial Control Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Financial Control.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di Deutsche Bank AG Indonesia, Deloitte Indonesia, Kompas Gramedia Group.

Meraih gelar Sarjana di bidang Akutansi dari Universitas Gajah Mada.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2023 and currently served as Head of the Financial Control Division.

He has held various positions at Deutsche Bank AG Indonesia, Deloitte Indonesia, Kompas Gramedia Group.

Obtained a Bachelor of Accounting from Gajah Mada University.

Ridyawan Amnar
Kepala Divisi Corporate Secretary
Corporate Secretary Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2020 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Intraco Penta Tbk, PT Adaro Energy Tbk, PT Indonesia AirAsia, PT Bank Andara, PT Trimegah Securities Tbk, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan & Perbankan Indonesia dan Magister di bidang Keuangan dari Monash University.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2020 and currently served as Head of Corporate Secretary Division.

He has held various positions at PT Intraco Penta Tbk, PT Adaro Energy Tbk, PT Indonesia AirAsia, PT Bank Andara, PT Trimegah Securities Tbk, and PT Bank HSBC Indonesia.

He holds a Bachelor degree in Economics from Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan & Perbankan Indonesia and a Master degree in Finance from Monash University.

Rudyanto Gunawan
Kepala Divisi Planning & Performance
Planning & Performance Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Planning & Performance.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Prima Express.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Parahyangan dan Magister di bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Massey.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2011 and currently served as Head of Planning & Performance Division.

He has held various positions at PT Bank Permata Tbk and PT Bank Prima Express.

He has a Bachelor degree in Civil Engineering from Parahyangan University and a Master degree in Banking and Finance from Massey University.

Septiana Anggraeni
Kepala Divisi Credit Risk Reviewer
Credit Risk Reviewer Division Head

Warga negara Indonesia bergabung di J Trust Bank tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Credit Risk Reviewer.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi Management dari Universitas Islam Indonesia dan Magister Business di bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada.

Indonesian citizen joined J Trust Bank in 2018 and currently serves as Head of the Credit Risk Reviewer Division.

She has previously assumed various positions at PT Bank Danamon Tbk and PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

She holds a Bachelor's Degree in Economics Management from the Islamic University of Indonesia and a Master of Business in Economics from Gadjah Mada University.

Santi Irawati
Kepala Divisi General Services
General Services Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi General Services.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank MNC International Tbk, Femina Group, PT Bank Panin Tbk, dan beberapa perusahaan lainnya.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari STIE Malangkucecwara.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2022 and currently served as Head of General Services Division.

She has held various positions at PT Bank MNC International, Femina Group, PT Bank Panin Tbk, and several other companies.

She holds a Bachelor of Economics from STIE Malangkucecwara.

Teruhiko Kuniyasu
Kepala Divisi President Office
President Office Division Head

Warga Negara Jepang. Bergabung di J Trust Bank tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi President Office.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di Mizuho Bank Ltd – Tokyo dan Fuji Bank Ltd – Tokyo.

Meraih gelar Magister di bidang Politik dan Ekonomi Internasional di Aoyama Gakuin University.

Japanese citizen. Joined J Trust Bank in 2021 and currently served as Head of President Office Division.

He has held various positions at Mizuho Bank Ltd – Tokyo and Fuji Bank Ltd – Tokyo.

He holds a Master degree in International Economics and Politics from Aoyama Gakuin University.

Veronika

Kepala Divisi Branch Management
Branch Management Division Head

Warga Negara Indonesia. Bergabung di J Trust Bank tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Branch Management.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di PT Bank Capital Indonesia, PT Bank MNC International, Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Ekonomi Raharja, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Prima Master Bank, PT Bank Central Asia Tbk.

Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Ekonomi dari Universitas YAI.

Indonesian citizen. Joined J Trust Bank in 2022 and currently served as Head of Branch Management Division.

She has held various positions at PT Bank Capital Indonesia, PT Bank MNC International, Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Ekonomi Raharja, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Prima Master Bank, PT Bank Central Asia Tbk.

Obtained a Bachelor degree in Management Economics from YAI University.

Yuji Katayama

Kepala Divisi Japan dan Korea Desk
Japan and Korean Desk Division Head

Warga Negara Jepang. Bergabung di J Trust Bank tahun 2024 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Japan dan Korea Desk.

Beliau pernah menduduki berbagai posisi di Saikyo Bank dengan posisi terakhir sebagai Deputy Manager.

Meraih gelar Sarjana dari Momoyama Academy dan Magister dari Seinan Gakuin University.

Japanese citizen. Joined J Trust Bank in 2024 and currently serves as the Head of the Japan and Korea Desk Division.

He has held various positions at Saikyo Bank, with his last position as Deputy Manager.

He holds a bachelor's degree from Momoyama Academy and a master's degree from Seinan Gakuin University.

STATISTIK PROFIL DAN KOMPOSISI KARYAWAN [OJK C.3][GRI 2-7]

Statistics of Employee Profile and Composition

Statistik profil dan komposisi karyawan, beserta data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi tercantum pada pembahasan Sumber Daya Manusia.

The statistics of employee profile and composition, along with data on employee competency development that reflects opportunities for each level of organization are presented in the discussion on Human Resources.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education

Pendidikan Education	Jumlah Karyawan Total Employees
D1 | Diploma 1	4
D2 | Diploma 2	3
D3 | Diploma 3	103
D4 | Diploma 4	2
S1 | Bachelor's Degree	714
S2 | Master's Degree	66
Lainnya | Others	45
Jumlah | Total	**937**

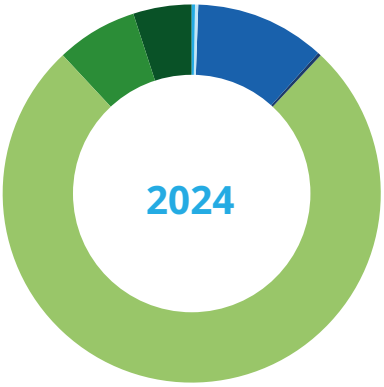

Pendidikan Education	Jumlah Karyawan Total Employees
D1 | Diploma 1	5
D2 | Diploma 2	3
D3 | Diploma 3	105
D4 | Diploma 4	2
S1 | Bachelor's Degree	671
S2 | Master's Degree	70
Lainnya | Others	57
Jumlah | Total	**913**

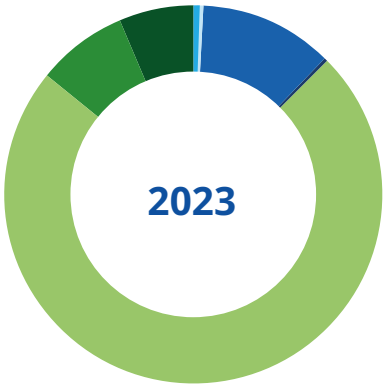

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position

Tingkat Jabatan Position	Jumlah Karyawan Total Employees
Kepala Divisi | Head of Division	24
Wakil Kepala Divisi | Deputy Head of Division	15
Kepala Departmen | Head of Department	120
Kepala Seksi | Head of Section	272
Karyawan Dasar | Clerk	341
Staf | Officer	165
Jumlah | Total	**937**

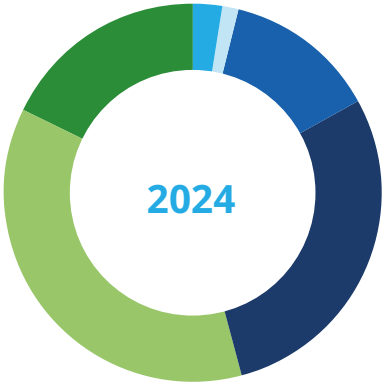

Pendidikan Education	Jumlah Karyawan Total Employees
Kepala Divisi | Head of Division	22
Wakil Kepala Divisi | Deputy Head of Division	18
Kepala Departmen | Head of Department	134
Kepala Seksi | Head of Section	249
Karyawan Dasar | Clerk	175
Staf | Officer	315
Jumlah | Total	**913**

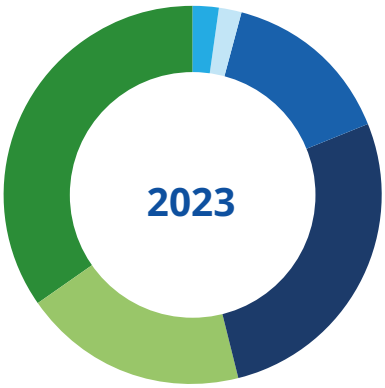

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status
Employee Composition by Status

Status Kepegawaian Employee Status	Jumlah Karyawan Total Employees
Pegawai Tetap | Permanent	750
Pegawai Kontrak | Contract	187
Jumlah | Total	**937**

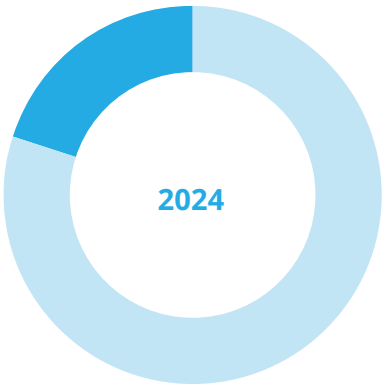

Status Kepegawaian Employee Status	Jumlah Karyawan Total Employees
Pegawai Tetap | Permanent	745
Pegawai Kontrak | Contract	168
Jumlah | Total	**913**

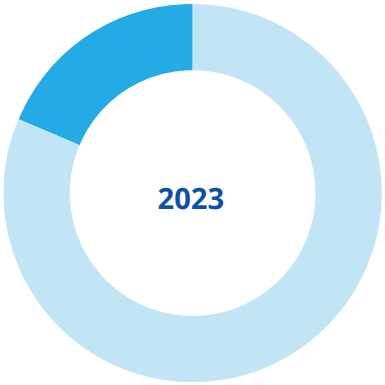

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (tahun)
Employee Composition by Age (years old)

Usia Age	Jumlah Karyawan Total Employees
20 - 24	19
25 - 29	134
30 - 34	172
35 - 39	194
40 - 44	153
45 - 49	109
50 - 54	125
55 - 59	30
> 60	1
Jumlah | Total	**937**

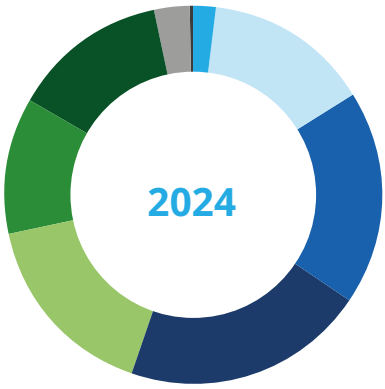

Usia Age	Jumlah Karyawan Total Employees
20 - 24	19
25 - 29	114
30 - 34	191
35 - 39	173
40 - 44	155
45 - 49	112
50 - 54	106
55 - 59	41
> 60	2
Jumlah | Total	**913**

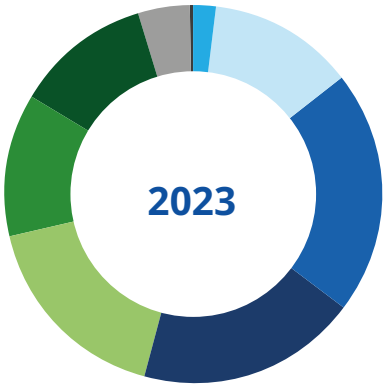

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Karyawan Total Employees
Laki-laki | Male	463
Perempuan | Female	474
Jumlah | Total	**937**

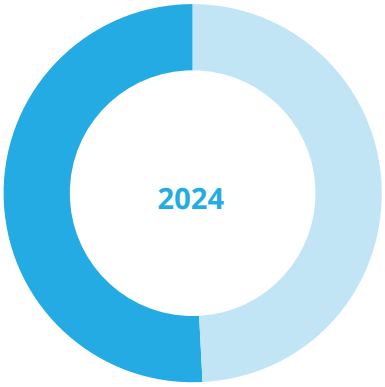

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Karyawan Total Employees
Laki-laki | Male	470
Perempuan | Female	443
Jumlah | Total	**913**

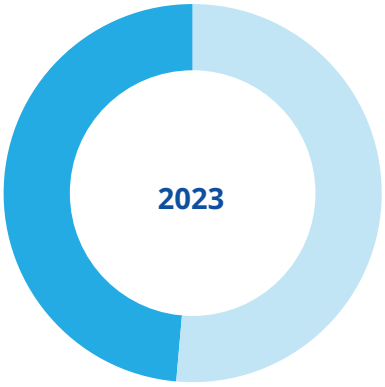

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja (tahun)
Employee Composition by Working Period (years)

Masa Kerja Working Period	Jumlah Karyawan Total Employees
0 – 5	539
6 – 10	162
11 – 15	94
16 – 20	48
21 – 25	44
Lainnya | Others	50
Jumlah | Total	**937**

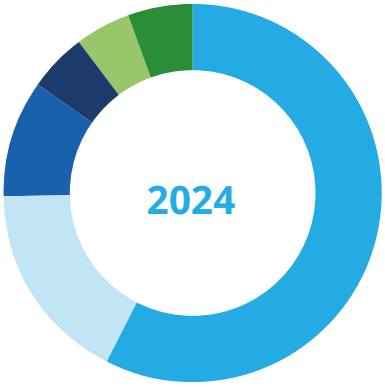

Pendidikan Education	Jumlah Karyawan Total Employees
0 – 5	515
6 – 10	164
11 – 15	82
16 – 20	53
21 – 25	43
Lainnya | Others	56
Jumlah | Total	**913**

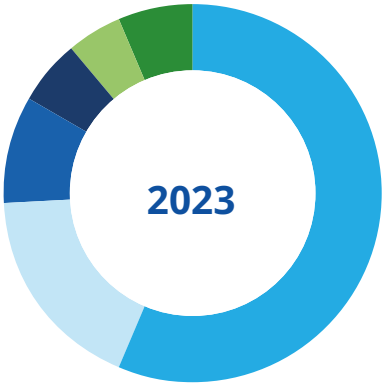

Alokasi Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 2024

Selama tahun 2024, Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp6.917.879.742,- untuk pengembangan sumber daya manusia.

Rincian mengenai hal ini terdapat pada pembahasan Sumber Daya Manusia.

Budget Allocation for Human Capital Development 2024

Throughout 2024, the Company has allocated Rp6,917,879,742 of funds for human capital development.

Further details on this matter are laid out in the discussion on Human Resources.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kantor Cabang

Total Employees by Branch Offices

Kantor Cabang Branch Offices	Jumlah Pegawai Total Employee		
	2024	2023	2022
Balikpapan	11	11	9
Bandar Lampung	9	12	10
Bandung	21	20	23
Batam	8	8	10
Bekasi	14	13	13
Bogor	10	11	11
Cirebon	7	7	6
Denpasar	13	16	18
Depok	6	7	5
Jakarta	575	521	509
Jambi	9	7	8
Karawaci	7	-	-
Karawang	11	10	9
Kendari	5	-	-
Kupang	6	-	-
Makassar	11	14	15
Malang	5	7	7
Manado	6	-	-
Medan	23	21	22
Palembang	29	35	32
Pangkal Pinang	18	19	16
Pekanbaru	12	13	12
Pontianak	8	8	8
Samarinda	12	7	9
Semarang	12	14	14
Solo	18	23	23
Surabaya	25	31	31
Tangerang	8	7	8
Tarakan	2	-	-
Yogyakarta	12	11	10

Kebijakan Program Pengembangan Pegawai

Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen

Direksi dan pihak independen mendapatkan program orientasi, manual handbook dan sesi tatap muka dengan jajaran manajemen dan eksekutif. Bank mendorong Direksi dan Dewan Komisaris untuk meningkatkan kapasitas melalui beragam pelatihan.

Karyawan

- Setiap karyawan baru diberikan program induksi selama 2 hari.
- Bank memfasilitasi karyawan yang membutuhkan sertifikasi profesi guna menunjang peran dan tugasnya.
- Bank mewajibkan setiap karyawan setidaknya memenuhi 16 jam pelatihan dalam satu tahun.

Employee Development Program Policy

Board of Directors, Board of Commissioners and Independent Parties

The Board of Directors and independent parties receive orientation programs, manual handbooks, and face-to-face sessions with management and executives. The Bank encourages the Board of Directors and the Board of Commissioners to increase capacity through various training programs.

Employee

- Each new employee will receive a 2-day on-board program
- The Bank facilitates employees who need professional certification to support their roles and duties
- The Bank requires every employee to fulfill at least 16 hours of training in one year.

Jenis, Tujuan, dan Peserta/Tingkat Jabatan Pelatihan

Training Type, Objectives, and Participants/ Level of Position

2024											
No	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Puncak Top			Menengah Middle			Muda Junior		
			Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants	Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants	Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Managerial Leadership & Soft Skill	Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemampuan manajerial serta keterampilan soft skills karyawan Develop leadership skills, managerial skills, and soft skills of employees	2	2	6	8	9	18	28	37	423
2	Product, Sales, & Marketing	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam penjualan dan pemasaran Improve competence and skills in sales and marketing	-	-	-	4	8	11	13	25	1.435
3	Business Linkage & Credit	Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam credit value chain dan menjalankan proses kredit secara hati-hati Improve competence and skills in credit value chain and carry out credit processes in a prudent manner	1	1	14	2	2	23	10	7	162

Jenis, Tujuan, dan Peserta/Tingkat Jabatan Pelatihan

Training Type, Objectives, and Participants/ Level of Position

2024											
No	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Puncak Top			Menengah Middle			Muda Junior		
			Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants	Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants	Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants
4	Tata Kelola, Risiko, Kepatuhan, Hukum & Audit Internal Governance, Risk, Compliance, Legal, & Internal Audit	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko, compliance, legal, dan audit Improve competence and skills in corporate governance, risk management, compliance, legal, and audit	4	4	21	23	31	179	54	61	5.508
5	IT, Operation	Mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan operasional Perusahaan dan membangun teknologi informasi yang kuat Develop skills and abilities to carry out the Company's operations and build a strong information technology	1	1	1	9	9	15	124	85	2.544
6	Human Capital	Mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam membangun budaya perusahaan dan sumber daya manusia sesuai dengan arah dan tujuan Perusahaan Develop skills and abilities to build corporate culture and human resources in accordance with the Company's direction and objectives	3	3	3	6	7	39	56	37	954
7	Treasuri, Keuangan & Pajak Treasury, Finance & Tax	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan perhimpunan pajak, bea cukai, dan keuangan Improve competence and skills in carrying out tax, customs, and financial collection activities	1	1	18	2	2	26	9	8	79

Jenis, Tujuan, dan Peserta/Tingkat Jabatan Pelatihan

Training Type, Objectives, and Participants/ Level of Position

2024											
No	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Puncak Top			Menengah Middle			Muda Junior		
			Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants	Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants	Jumlah Hari Number of Days	Jumlah Kelas Number of Classes	Jumlah Peserta Number of Participants
8	Digital & Data	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam era digitalisasi Improve competence and skills in the digitalization era	4	3	12	7	8	18	9	10	63
9	Lainnya Others	Mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dalam pengembangan diri dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Develop skills and abilities that are tailored to the needs of employees for self-development in order to achieve the Company's objectives	3	2	2	11	14	15	42	49	973
		Total	**19**	**17**	**77**	**72**	**90**	**344**	**345**	**319**	**12.141**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM [OJK C.3][GRI 2-1]

Shareholders Composition

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Composition of the 20 Largest Shareholders

2024			
No.	Nama Name	Jumlah Saham Total Shares	Persen
1	J TRUST CO., LTD.	13.250.746.064	73,17%
2	JTRUST ASIA PTE. LTD.	3.498.381.989	19,32%
3	SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT NO.2 LIMITED LIABILITY COMPANY	699.806.267	3,86%
4	PT. JTRUST INVESTMENTS INDONESIA	412.242.458	2,28%
5	Individu/Individual	24.459.900	0,14%
6	THE KAGAWA BANK, LTD	13.148.900	0,07%
7	Individu/Individual	11.571.700	0,06%
8	Individu/Individual	9.273.400	0,05%
9	Individu/Individual	7.272.100	0,04%
10	Individu/Individual	7.000.000	0,04%
11	Individu/Individual	6.386.300	0,04%
12	Individu/Individual	6.050.000	0,03%
13	Individu/Individual	5.394.402	0,03%
14	Individu/Individual	4.553.000	0,03%
15	Individu/Individual	4.419.606	0,02%
16	Individu/Individual	4.250.200	0,02%
17	Individu/Individual	3.969.300	0,02%
18	Individu/Individual	3.401.006	0,02%
19	Individu/Individual	3.398.200	0,02%
20	Individu/Individual	3.100.000	0,02%

Komposisi Pemegang Saham Lebih dari 5%

Shareholders with more than 5% Ownership

Per 2 Januari 2024 | As of 2 January 2024

Nama Name	Jumlah Saham Total Shares	Persen Percent
J Trust Co., Ltd.	13.430.561.631	74,161
J Trust Asia Pte. Ltd.	3.498.381.989	19,317

Per 31 Desember 2024 | As of 31 December 2024

Nama Name	Jumlah Saham Total Shares	Persen Percent
J Trust Co., Ltd.	13.250.746.064	73,168
J Trust Asia Pte. Ltd.	3.498.381.989	19,317

Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Per 2 Januari 2024

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap saham BCIC. Beberapa anggota Direksi memiliki kepemilikan langsung terhadap saham BCIC, dengan rincian sebagai berikut:

Share Ownership by Board of Directors and Board of Commissioners

As of 2 January 2024

Members of the Board of Commissioners did not have direct or indirect ownership of BCIC shares. Several members of the Board of Directors have direct ownership of BCIC shares, described as follows:

2 Januari 2024 | 2 January 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham Total Shares	Persen (%) Percent (%)
Direksi | Board of Directors				
1	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama | President Director	64.500	0,000
2	Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama | Vice President Director	-	-
3	Felix I Hartadi	Direktur | Director	657.900	0,004
4	Helmi A Hidayat	Direktur | Director	1.379.100	0,008
5	Cho Won June	Direktur | Director	-	-
6	R Djoko Prayitno	Direktur | Director	1.378.700	0,008
7	Widjaja Hendra	Direktur | Director	-	-

Per 31 Desember 2024

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap saham BCIC. Beberapa anggota Direksi memiliki kepemilikan langsung terhadap saham BCIC, dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2024

Members of the Board of Commissioners did not have direct or indirect ownership of BCIC shares. Several members of the Board of Directors have direct ownership of BCIC shares, described as follows:

31 Desember 2024 | 31 December 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham Total Shares	Persen (%) Percent (%)
Direksi | Board of Directors				
1	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama | President Director	111.100	0,001
2	Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama | Vice President Director	-	-
3	Felix I Hartadi	Direktur | Director	1.133.000	0,006

31 Desember 2024 | 31 December 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham Total Shares	Persen (%) Percent (%)
4	Helmi A Hidayat	Direktur | Director	2.332.200	0,013
5	Cho Won June	Direktur | Director	-	-
6	R Djoko Prayitno	Direktur | Director	2.330.600	0,013
7	Widjaja Hendra	Direktur | Director	-	-

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Ownership Percentage by Classification

2 Januari 2024 | 2 January 2024

Nama Name		Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Persen (%) Percent (%)
Pemodal Nasional National Investor	Perorangan | Individual	275.355.242	4.686	1,520
	Yayasan | Foundation	2	2	0,000
	Asuransi | Insurance	1	1	0,000
	Perseroan | Company	230.329.388	53	1,272
	Lain - lain | Others	183.851.007	2	1,015
Pemodal Asing Foreign Investor	Perorangan | Individual	132.728	22	0,001
	Perseroan | Company	17.420.253.641	40	96,192

31 Desember 2024 | 31 December 2024

Nama Name		Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Persen (%) Percent (%)
Pemodal Nasional National Investor	Perorangan | Individual	221.496.086	4.073	1,223
	Yayasan | Foundation	2	2	0,000
	Asuransi | Insurance	1	1	0,000
	Perseroan | Company	235.477.481	53	1,300
	Lain - lain | Others	184.051.007	3	1,016
Pemodal Asing Foreign Investor	Perorangan | Individual	698.928	20	0,004
	Perseroan | Company	17.468.198.504	44	96,457

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Ownership Percentage by Classification

2 Januari 2024 | 2 January 2024

Klasifikasi Classification	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage (%)
Kepemilikan Institusi Lokal | Ownership of Local Institutions	414.180.398	2,287
Kepemilikan Institusi Asing | Ownership of Foreign Institutions	17.420.253.641	96,192
Kepemilikan Individu Lokal | Ownership of Local Individuals	275.355.242	1,520
Kepemilikan Individu Asing | Ownership of Foreign Individuals	132.728	0,001

31 Desember 2024 | 31 December 2024

Klasifikasi Classification	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage (%)
Kepemilikan Institusi Lokal | Ownership of Local Institutions	419.528.491	2,316
Kepemilikan Institusi Asing | Ownership of Foreign Institutions	17.468.198.504	96,457
Kepemilikan Individu Lokal | Ownership of Local Individuals	221.496.086	1,223
Kepemilikan Individu Asing | Ownership of Foreign Individuals	698.928	0,004

Kronologi Pencatatan Saham

Pada bulan Juni 1997, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) menjual 70.000.000 sahamnya yang bernilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjualan saham kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No.S-1144/PM/1997 tanggal 3 Juni 1997.

The Chronology of Stock Listing

In June 1997, the Bank (formerly known as PT Bank CIC International Tbk) sold 70,000,000 shares at a nominal value of Rp500 per share (full value) to the public through capital market, based on applicable laws and regulations. The share sale has obtained effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) in Letter No.S-1144/PM/1997 dated 3 June 1997.

Keterangan	Jumlah Saham Number of Shares	Description
Saham Seri A:		**Series A shares:**
November 2008	676.236.100.000.000	November 2008
Januari 2014	124.948.000.000.000	January 2014
Januari 2015	30.000.000.000.000	January 2015
April 2015	30.000.000.000.000	April 2015
Oktober 2015	40.000.000.000.000	October 2015
Maret 2017	100.000.000.000.000	March 2017
Jumlah saham Seri A - sebelum Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock split)	1.001.184.100.000.000	Total Series A shares - before reverse stock split
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock split) Juni 2018	(1.001.174.088.159.000)	Effect of reverse stock split in June 2018
Jumlah saham Seri A - setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock split)	10.011.841.000	Total Series A shares - after reverse stock split
Saham Seri B:		**Series B shares:**
Saham pendiri	160.000.000	Founders shares
Saham dari Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 1997	70.000.000	Shares from Initial Public Offering in 1997
Saham bonus pada bulan Agustus 1998	55.200.000	Bonus shares in August 1998
Pemecahan nilai saham pada bulan Maret 1999	1.140.800.000	Stock split in March 1999
Saham setelah pemecahan	1.426.000.000	Shares after stock split
Penawaran Umum Terbatas I pada bulan April 1999	570.400.000	Limited Public Offering I in April 1999
Pelaksanaan Waran Seri I	13.119.000	Exercise of Series I Warrants

Keterangan	Jumlah Saham Number of Shares	Description
Penawaran Umum Terbatas II pada bulan Juli 2000	401.773.500	Limited Public Offering II in July 2000
Pelaksanaan Waran Seri II	1.033.900	Exercise of Series II Warrants
Penawaran Umum Terbatas III pada bulan Maret 2003	5.797.941.330	Limited Public Offering III in March 2003
Pelaksanaan Waran Seri I	66.331.650	Exercise of Series I Warrants
Pelaksanaan Waran Seri II	37.223.788	Exercise of Series II Warrants
Penawaran Umum Terbatas IV pada bulan Juli 2003	2.494.146.934	Limited Public Offering IV in July 2003
Pelaksanaan Waran Seri I	250.000	Exercise of Series I Warrants
Pelaksanaan Waran Seri II	142.800	Exercise of Series II Warrants
Saham sebelum penggabungan usaha	10.808.362.902	Shares before merger
Saham dari penggabungan usaha pada bulan Oktober 2004	6.769.653.639	Shares from merger in October 2004
Saham setelah penggabungan usaha	17.578.016.541	Shares after merger
Penempatan langsung oleh Klass Consultant Inc.	2.381.538.461	Direct placement by Klass Consultant Inc.
Pelaksanaan Waran Seri II	145.950.973	Exercise of Series II Warrants
Pelaksanaan Waran Seri III dan V	27.262	Exercise of Series III and V Warrants
Pelaksanaan Waran Seri IV	2.574.613.843	Exercise of Series IV Warrants
Penawaran Umum Terbatas V pada bulan Juni 2007	5.670.029.955	Limited Public Offering V in June 2007
Jumlah saham Seri B - sebelum Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock split)	28.350.177.035	Total Series B shares - before reverse stock split
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock split) Juni 2018	(28.349.893.534)	Effect reverse stock split in June 2018
Jumlah Saham Seri B - setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock split)	283.501	Total Series B shares - after reverse stock split
Saham Seri C:		**Series C shares:**
Penerbitan saham baru Seri C: melalui PMHMETD Desember 2021	4.130.257.580	Issuance of Series C new shares: via the PMHMETD December 2021
Agustus 2022	3.967.539.928	August 2022
Jumlah saham Seri C	**8.097.797.508**	**Total Series C shares**

KEPEMILIKAN SAHAM J TRUST BANK OLEH SENIOR EKSEKUTIF

Pejabat satu tingkat di bawah Direksi tidak mempunyai kepemilikan atas saham Bank, baik melalui Management/Employee Stock Option Program (MESOP) atau pembelian di pasar saham.

J TRUST BANK SHARE OWNERSHIP BY SENIOR EXECUTIVES

The Bank's officials, whose position was one level below the Board of Direcrtors, do not own the Bank's shares, either through Management/Employee Stock Option Program (MESOP) or purchases on the stock market.

J Trust Bank Ultimate Shareholders

Shareholders of J TRUST Co, Ltd Data Year Ended December 2024

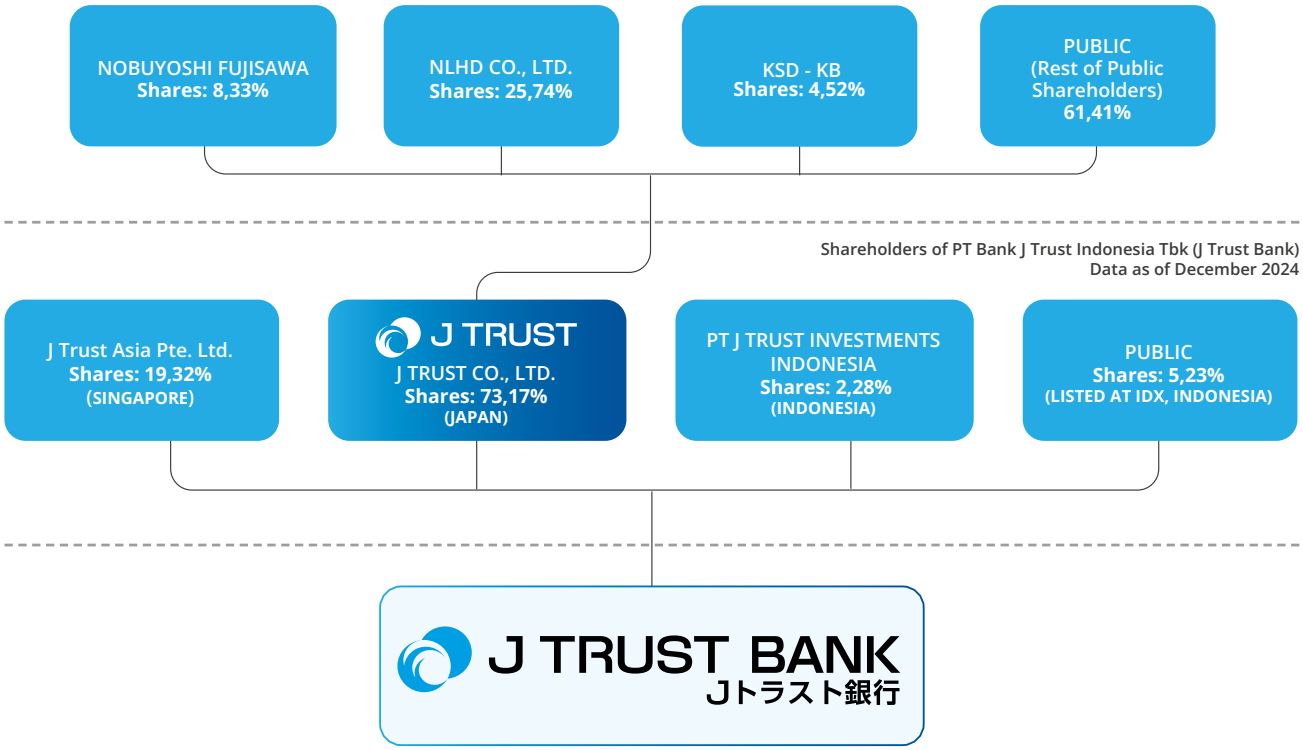

Struktur Bisnis Grup

Group Business Structure

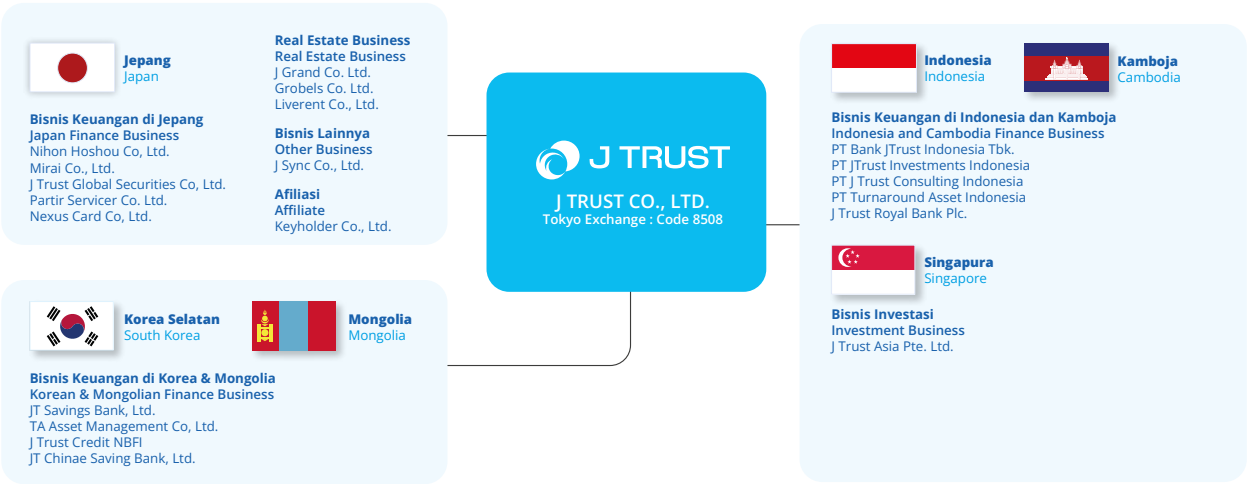

(Sumber:https://www.jtrustbank.co.id/id/information/information/about-j-trust-group)

Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali

J Trust Co., Ltd. merupakan Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali J Trust Bank. J Trust Co., Ltd. adalah sebuah perusahaan keuangan terintegrasi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam di bisnis keuangan dan non-keuangan di Jepang, Korea Selatan, Mongolia, dan Asia Tenggara.

J Trust Co., Ltd. terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Pemegang saham terbesar pada akhir 2024 adalah: (i) NLHD Co., Ltd. (25.74%), (ii) Nobuyoshi Fujisawa (8.33%), (iii) KSD – KB (4.52%), (iv), dan publik (61.41%).

J Trust Co., Ltd. berkantor pusat di Yebisu Garden Place Tower 7F, 4-20-3 Ebisu, Shibuya, Tokyo 1506007. Pada bagan Perusahaan Terafiliasi, terdapat beberapa entitas usaha J Trust Co., Ltd. di Indonesia, yang terdiri dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT JTrust Investments Indonesia, PT JTrust Consulting Indonesia dan PT Turnaround Asset Indonesia.

Jajaran Direksi J Trust Co. Ltd.:

Representative Director & CEO: Nobuyoshi Fujisawa
Representative Director & Vice President Director: Nobuiku Chiba
Senior Managing Director: Ryuichi Atsuta
Managing Director: Nobiru Adachi
Director: Katsuyuki Oda
Independent Director: Toshiya Natori
Independent Director: Tsuyoshi Hatatani
Independent Director: Susumu Fukuda
Independent Director: Kinji Hoshiba

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama

Bank tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama.

Ultimate Shareholders and Controlling Shareholders

J Trust Co., Ltd. is the Ultimate Shareholder and Controller of J Trust Bank. J Trust Co., Ltd. is an integrated financial company with in-depth experiences and knowledge in financial and non-financial businesses in Japan, South Korea, Mongolia and Southeast Asia.

J Trust Co., Ltd. is listed on the Tokyo Stock Exchange. The largest shareholders at the end of 2024 are: (i) NLHD Co., Ltd. (25.74%), (ii) Nobuyoshi Fujisawa (8.33%), (iii) KSD – KB (4.52%), (iv), dan publik (61.41%).

J Trust Co., Ltd. is headquartered at Yebisu Garden Place Tower 7F, 4-20-3 Ebisu, Shibuya, Tokyo 1506007. As shown by the Related Companies chart, there are several business entities of J Trust Co., Ltd. in Indonesia, including PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT JTrust Investments Indonesia, PT JTrust Consulting Indonesia, and PT Turnaround Asset Indonesia.

Board of Directors of J Trust Co. Ltd:

Representative Director & CEO: Nobuyoshi Fujisawa
Representative Director & Vice President Director: Nobuiku Chiba
Senior Managing Director: Ryuichi Atsuta
Managing Director: Nobiru Adachi
Director: Katsuyuki Oda
Independent Director: Toshiya Natori
Independent Director: Tsuyoshi Hatatani
Independent Director: Susumu Fukuda
Independent Director: Kinji Hoshiba

Subsidiaries, Associates, and Joint Venture Company

The Bank has no subsidiaries, associates, and joint venture companies.

INFORMASI WEBSITE

Information on the Company's Website

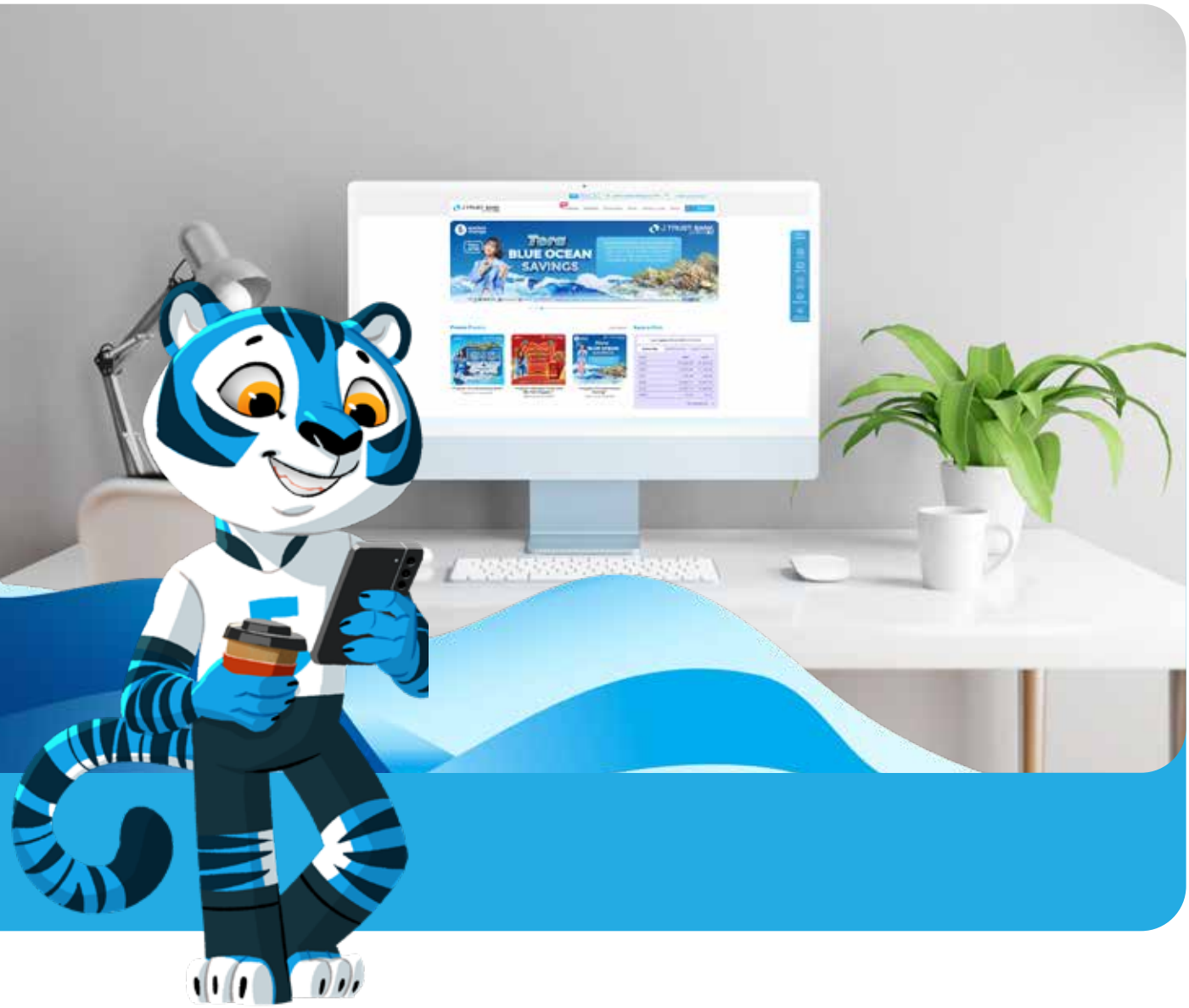

Sejalan dengan POJK No.8/POJK.04/2015, J Trust Bank telah membuat situs dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Situs tersebut juga turut meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya kepada pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Situs web Bank juga memuat informasi lainnya yang bersifat spesifik sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

In line with POJK No. 8/POJK.04/2015, J Trust Bank has a website in Indonesian, English, and Japanese. The website improves the implementation of good corporate governance, particularly towards shareholders, customers, the public, the government, and other stakeholders.

The Bank's website also contains other specific information as can be seen in the following table:

Informasi Information	Alamat Web Web Address
Informasi pemegang saham Information on shareholders	https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support/stock-information-bji
Isi kode etik & perilaku kepegawaian Contents of code of ethics & code of conduct	https://www.jtrustbank.co.id/id/information/good-corporate-governance/kode-etik
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan The General Meeting of Shareholders (GMS) includes agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates: the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date on which the summary of the minutes of the GMS is announced	https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support/shareholder-general-meeting
Laporan Keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) dan Laporan Keuangan triwulan terakhir Separate annual Financial Statements (last 5 years) and last quarter Financial Statements	https://www.jtrustbank.co.id/id/financial_reports
Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Annual Report & Sustainability Report	https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support/annual-report https://www.jtrustbank.co.id/id/about-jtrust/sustainability
Profil Dewan Komisaris dan Direksi (termasuk informasi terkait profil Komite, Sekretaris Perusahaan dan Senior Eksekutif) Profiles of the Board of Commissioners and Directors (including information on the profile of Committees, Corporate Secretary, and Senior Executive)	https://www.jtrustbank.co.id/id/information/corporate-information/board-of-commissioner https://www.jtrustbank.co.id/id/information/corporate-information/board-of-director
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit	https://www.jtrustbank.co.id/id/information/corporate-information/audit-committee

Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal

Stock Exchange Professional and Supporting Entity

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	**PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan** UOB Plaza 42nd & 30th Floor Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 Central Jakarta 10230 Indonesia - Tel.: (62 21) 29932121 / (62 21) 3144003
Notaris Notary	**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.** Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Jakarta Selatan 12420 Tel.: (62-21) 2912 5500 / (62-21) 2912 5600
Biro Administrasi Efek Share Registrar	**PT Sharestar Indonesia** SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12920 Tel./Fax.: (62-21) 5081 5211
Lembaga Pemeringkat Rating Agency	**Pefindo** Equity Tower Lt. 30 Sudirman Central Business District, Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Tel.: (62-21) 509 68469 Fax.: (62-21) 509 68468

PENGHARGAAN 2024

Awards 2024

IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2024

Marketeers Editor's Choice Award 2024

Human Capital 2024on Resilience Excellence Award

Indonesia Bank Award 2024

Indonesia 20 Best Corporate Secretary Award 2024

Infobank Digital 13th Digital Brand Award 2024

Corporate Secretary Award 2024

Indonesia Property and Bank Award 2024

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Tiara

Tiara merupakan sosok yang meskipun anggun, juga terkenal aktif dan lincah. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Tiara dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Badak Jawa.

Tiara is a graceful figure who is also known for her agile and active nature. As one of J Trust Bank's mascots, Tiara is featured here to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animals, like the Javan Rhinoceroses.

ANALISIS & **PEMBAHASAN MANAJEMEN**

Management Discussion & Analysis

TINJAUAN EKONOMI

Economic Review

Perekonomian Indonesia di tahun 2024 bertumbuh dengan laju relatif serupa dimana pertumbuhannya masih berada di atas 5%, tepatnya di 5,03% dengan aktivitas domestik yang relatif terjaga. Sementara inflasi terus menurun, sehingga memberikan ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter. Tahun 2024 juga diwarnai oleh Pemilihan Presiden baru yang dimenangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo Subianto akan melaksanakan berbagai program unggulan dan menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.

Indonesia's economy in 2024 continued to grow at a relatively stable pace, maintaining a rate above 5%, specifically at 5.03%, supported by resilient domestic activity. Meanwhile, inflation continued to decline, creating room for monetary policy easing. The year 2024 was also marked by the presidential election, which resulted in the victory of President Prabowo Subianto. The Prabowo Subianto administration is set to implement a range of flagship programs and has set an ambitious target of achieving 8% economic growth.

Tinjauan Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap stabil pada tahun 2024, sementara angka inflasi terus menurun sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter pada tahun-tahun sebelumnya. IMF memperkirakan perekonomian dunia pada tahun 2024 bertumbuh 3,2%, hanya sedikit di bawah pertumbuhan tahun 2023 sebesar 3,3%. Angka ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan di negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang sedikit mengalami penurunan. Tingkat konsumsi di Amerika Serikat membantu menopang pertumbuhan, sementara perekonomian Eropa sepertinya mulai bangkit dari titik terendahnya pada tahun 2023. Negara-negara berkembang mengalami penurunan pertumbuhan, bersamaan dengan melemahnya perekonomian Tiongkok dan India.

Tingkat inflasi global terus menurun, dari 6,7% pada tahun 2023 menjadi 5,8% pada tahun 2024. Upaya bank-bank sentral dunia sejak tahun 2022 untuk menahan laju inflasi membuahkan hasil. Inflasi inti juga turut menurun, berbeda dari tahun 2023 di mana inflasi menurun lebih karena penurunan harga minyak dunia. Laju inflasi yang lebih terkendali ini membuat bank-bank sentral dunia dapat mulai melonggarkan kebijakan moneter pada pertengahan tahun 2024 dengan memangkas suku bunga acuan. Harga-harga makanan dan energi cenderung tertahan pada tahun 2024, namun harga jasa masih tetap tinggi di beberapa kawasan terkait dengan pergeseran permintaan dari barang ke jasa pada tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian, baik dari otoritas moneter maupun fiskal.

Volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 3,1% dari 0,8% pada tahun 2023. Perdagangan barang meningkat, sementara perdagangan jasa terbilang stabil sesudah meningkat pesat pada tahun sebelumnya. Ketegangan geopolitik turut membatasi perdagangan lintas negara, yang menghambat kelancaran perdagangan dunia. Contohnya, serangan-serangan kepada kapal komersial di Laut Merah. Ke depannya, kebijakan perdagangan berpotensi berubah akibat dampak dari pergantian pemerintahan, mengingat separuh populasi dunia melakukan pemilihan umum pada tahun 2024.

Situasi sektor keuangan global terbilang akomodatif pada tahun 2024. Pasar negara berkembang tetap kuat dan volatilitas harga-harga aset termasuk rendah. Sektor perbankan global juga masih kokoh, dengan

Global Economic Review

Global economic growth is estimated to remain stable in 2024, with inflation continuing to decline due to the impact of monetary policy tightening in recent years. The IMF forecast the global economy to grow 3.2% in 2024, slightly less than the 3.3% growth posted in 2023. The number was backed by improved growth in advanced economies, while emerging countries saw lesser performance. Consumption level in the US helped support growth, while the EU economy began to recover from its lowest point in 2023. Emerging countries saw a decline in growth, as China and India suffered weaker economic performance.

Global inflation rate seen declining from 6.7% in 2023 to 5.8% in 2024. Moves by the central banks globally since 2022 to stem inflation have been fruitful. Core inflation also declined, unlike in 2023 where inflation slowed mainly due to the decline in global crude price. More manageable inflation allowed central banks globally to begin to loosen monetary policy starting from mid-2024 by cutting interest rates. Food and energy prices were relatively steady in 2024, nevertheless the price of services remained high in some regions due to the shift of demand from goods to services in 2023. This should be a concern for both monetary and fiscal authorities.

Global trade volume is expected to improve from the previous year, reaching 3.1% in 2024 from 0.8% in 2023. Goods trade increased, while services trade stayed stable after surging in the previous year. Geopolitical tensions limited cross-border trade, which hampered global trade. For instance, the attacks on commercial vessels in the Red Sea. Going forward, trade policy potentially changes due to the impact of the changes in governments, considering half of the world's population went to vote in 2024.

Global financial situations were accommodative in 2024. Markets in developing economies remained strong and asset prices saw little volatility. The global banking sector also remained sturdy, with strong

tingkat permodalan yang baik dan likuiditas yang cukup. Namun, pada bulan Agustus 2024 sempat terjadi turbulensi di pasar keuangan global, walaupun kembali stabil sesudahnya. Hal ini menandakan adanya semacam kerentanan di sektor keuangan global. Selain itu, perbedaan antara tingginya risiko geopolitik dan rendahnya volatilitas pasar juga perlu menjadi perhatian. Jumlah surat utang negara-negara yang terus bertambah dengan cepat, juga dapat meningkatkan volatilitas di pasar surat utang.

Di Asia, perkembangan ekonomi Tiongkok - sebagai ekonomi terbesar kedua dunia - masih tertahan karena permasalahan pada sektor properti dan rendahnya tingkat kepercayaan konsumen. Kedua hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian dunia, mengingat besarnya peranan Tiongkok di dalam alur perdagangan global. Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS juga akan berpengaruh pada relasi AS-Tiongkok, terkait dengan upaya proteksi AS terhadap produk-produk Tiongkok. Sementara itu, perekonomian ASEAN terbilang masih kuat, didorong terutama oleh investasi dan ekspor. Beberapa sektor yang menarik di Asia Tenggara termasuk otomotif, elektronik, pertambangan, dan jasa.

Tinjauan Perekonomian Dalam Negeri

Perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024, tidak jauh berbeda dibandingkan pertumbuhan 5,05% pada tahun sebelumnya, seiring dengan aktivitas domestik yang relatif terjaga. Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat, yang merupakan penggerak dominan pertumbuhan, masih tetap terjaga, sementara realisasi investasi menguat baik dari pemerintah maupun swasta. Konsumsi rumah tangga dan investasi total berkontribusi 83,19% pada pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan proyek infrastruktur terus berlanjut, sejalan dengan peningkatan belanja modal pemerintah untuk konstruksi serta pembangunan infrastruktur lainnya, termasuk jalan tol, bendungan, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Ekspor juga bertumbuh, di mana beberapa komoditas mengalami peningkatan nilai dan volume, seperti mesin atau peralatan listrik, nikel, dan alas kaki. Sementara, beberapa komoditas mengalami peningkatan volume namun nilainya menurun, seperti bahan bakar mineral, besi dan baja, serta minyak dan gas. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara mendorong angka ekspor jasa.

capital and adequate liquidity. There was turbulence in August 2024 in the global financial markets, but soon stabilized. This signified some kind of vulnerabilities in the global financial sector. Moreover, the discrepancies between high geopolitical risks and low market volatilities should become concerns. The rising amount of government debts could also increase volatility in the bond markets.

In Asia, the progress of the Chinese economy - as the world's second largest economy - was limited due to the property sector issue and low consumer confidence. Both could negatively impact the global economy, considering the huge role of China in the global trade flows. The comeback of Donald Trump as US president would affect the US-China relations, related to the US protectionist moves towards Chinese products. Meanwhile, the ASEAN economy remained strong, driven mainly by investments and exports. Several attractive sectors in Southeast Asia included automotive, electronics, mining, and services.

Domestic Economic Review

Indonesia's economy grew 5.03% in 2024, slightly lower than 5.05% growth posted in the previous year, as domestic economic activities were relatively sturdy. BPS data showed that private consumption, the main driver of the economy, was still sturdy, while investment realizations strengthened both from the public and private sectors. Household consumption and investment in total contributed 83.19% to economic growth.

Infrastructure development continues, in line with the increase in government capital spending for constructions as well as other infrastructure projects, including toll roads, dams, industrial zones, and tourism areas. Exports also grew, where several commodities saw rising values and volumes, such as machinery and electrical equipment, nickel, and footwear. Meanwhile several commodities saw volumes increased but values reduced, such as mineral fuel, iron, and oil and gas. Furthermore, the increased number of foreign tourist visits pushed up services exports.

Meningkatnya mobilitas masyarakat turut mendorong konsumsi dalam negeri. Sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi seiring dengan naiknya jumlah wisatawan dan berbagai acara olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan juga bertumbuh pesat, sejalan dengan kenaikan jumlah penumpang dan pengiriman barang, yang disusul oleh sektor akomodasi dan makan minum karena adanya berbagai acara nasional dan internasional, seperti MotoGP Mandalika di Lombok dan Pekan Olahraga Nasional XXI di Aceh dan Sumatera Utara.

Increasing mobility of people also helped drive domestic consumption. The other services sector posted the highest growth due to the rising number of tourist visits and sports and entertainment events. The transportation and warehouse sector also grew rapidly, in line with the increase in passengers and goods deliveries, followed by the accommodation and foods and beverages sector due to various local and international events, such as MotoGP Mandalika in Lombok and the 21st National Sports Week in Aceh and North Sumatra.

Lapangan-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian pada tahun 2024 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, sebesar 0,90% dari total pertumbuhan PDB 5.03%, berkat permintaan dari dalam dan luar negeri, termasuk untuk industri makanan dan minuman serta logam dasar. Angka Purchasing Managers' Index sektor manufaktur Indonesia dari S&P Global menunjukkan posisi ekspansi per Desember 2024, sesudah lima bulan berturut sebelumnya berada di zona kontraksi.

Economic sectors with the largest contributions to the economy in 2024 were manufacturing, trade, agriculture, construction, and mining. The manufacturing industry was the biggest source of growth, contributing 0.90% of total GDP growth of 5.03%, thanks to local and foreign demand, including for foods and beverages as well as base metals. The S&P Global Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index showed expansion in December 2024, after staying in the contraction zones in the previous five consecutive months.

Inflasi pada tahun 2024 berhasil dijaga di batas bawah target Bank Indonesia, mencapai 1,57% secara tahunan per Desember 2024. Pada akhir tahun 2023, inflasi mencapai sebesar 2,61%. Upaya Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga gejolak harga pangan terbilang berhasil, walaupun meningkat pada penghujung tahun. Imported inflation relatif terkendali, sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia. Rupiah mengalami depresiasi sebanyak 4,4% sepanjang tahun 2024, ditutup pada angka 16.157 rupiah per dolar AS, menurut data Bank Indonesia. Suku bunga acuan BI Rate sempat dinaikkan sebesar 25 bps pada bulan April, namun lalu diturunkan sebesar 25 bps kembali menjadi 6% pada bulan September untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inflation in 2024 was successfully managed in the bottom of Bank Indonesia's target range, reaching 1.57% year-on-year as of December 2024. By the end of 2023, inflation stood at 2.61%. Efforts by Bank Indonesia and the government to keep food price volatility in check were successful, although food prices increased at the end of the year. Imported inflation was relatively manageable, in line with Bank Indonesia's rupiah stability policy. The rupiah depreciated 4.4% throughout 2024, closing at 16,157 rupiah per US dollar, according to Bank Indonesia data. The benchmark BI rate was raised by 25 bps in April, but Bank Indonesia made a 25 bps cut in September to spur economic growth.

Sistem keuangan dalam negeri tetap menunjukkan daya tahan, termasuk industri perbankan dengan likuiditas dan permodalan yang solid. Sistem pembayaran tetap stabil, ditopang dengan struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang memadai. Interkoneksi antara pelaku sistem pembayaran terus menguat. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya akselerasi pembayaran digital yang makin diadopsi masyarakat. Volume transaksi memakai QRIS terus tumbuh pesat, sementara volume transaksi menggunakan kartu ATM atau debit menurun. Volume transaksi digital banking juga terus

Domestic financial system stayed resilient, including the banking industry with solid capital and liquidity. The payment system was stable, supported with healthy industry structure and sufficient infrastructure. Interconnection between payment system players strengthened, in line with the acceleration in digital payments as adopted by more people. Transaction volume using QRIS continued to surge, while transactions using ATM or debit cards declined. Transaction volume in digital banking also increased. The Indonesian capital market remained strong amid

bertambah. Pasar modal Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global, dengan kapitalisasi pasar bertumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2024 menjadi 7.036,57. Neraca Pembayaran Indonesia tetap sehat, dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan. Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 155,7 miliar dolar AS per akhir Desember 2024.

Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat setelah dilantik pada bulan Oktober 2024, menggantikan Presiden Joko Widodo selesai kepemimpinannya selama satu dekade. Presiden Prabowo membentuk sebuah koalisi gemuk untuk menguasai suara di Dewan Perwakilan Rakyat guna memperlancar pemerintahannya. Koalisi Indonesia Maju Plus juga memenangkan mayoritas kontestasi pemilihan kepala daerah yang berjalan serentak pada bulan November. Menteri-menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. masih didominasi orang-orang dari pemerintahan sebelumnya, sehingga memungkinkan terjadinya kesinambungan kebijakan. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, jauh di atas rerata tingkat pertumbuhan sebesar 4,95% pada abad ini.

global uncertainties, with market capitalization growing 5.05% in 2024 to 7,036.57. Indonesia's Balance of Payments was healthy, with surplus in financial and capital accounts as supported by foreign capital inflows and current account deficit in check. Indonesia's foreign exchange reserves stood at USD155.7 billion as of end-December 2024.

President Prabowo Subianto officially took office after his inauguration in October 2024, replacing President Joko Widodo after being in charge for a decade. President Prabowo formed a big coalition to control votes in the House of Representatives in order to expedite the government's agendas. The Indonesia Maju Plus coalition also won the majority of regional elections held simultaneously. Economic ministers in President Prabowo's Red and White Cabinet were still dominated by figures from the last government, allowing for policy continuity. President Prabowo aims for an economic growth of 8%, far above the average growth rate of 4.95% this century.

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN

Banking Industry Review

Sektor perbankan pada tahun 2024 menunjukkan daya tahan yang baik di tengah ketidakpastian global dan tantangan perekonomian dalam negeri. Kinerja intermediasi perbankan tetap kuat, dan likuiditas perbankan tetap memadai. Permodalan juga tetap dalam kondisi yang baik dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

The banking sector in 2024 remained resilient amid global uncertainty and domestic economic challenges. Banking intermediation showed strong performance, while banking liquidity was still adequate. Bank capital remained in good shape in absorbing risks and supporting loan growth.

Sektor perbankan Indonesia pada tahun 2024 terus menunjukkan ketahanan yang baik di tengah ketidakpastian global dan tantangan perekonomian dalam negeri. Pelonggaran kebijakan moneter terjadi di berbagai negara untuk merespons penurunan laju inflasi, sementara pasar keuangan global mengalami turbulensi pada bulan Agustus yang kemudian mereda. Di dalam negeri, ekonomi mengalami tantangan dari perlambatan konsumsi masyarakat yang sejatinya adalah motor utama pertumbuhan ekonomi. Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi lebih selektif dalam konsumsi.

The Indonesian banking sector in 2024 continued to show resilience amid global uncertainties and domestic economic challenges. Many countries eased monetary policy to respond to the decline in inflation, while the global financial markets saw turbulence in August which quickly subsided. Domestically, the economy faced challenges from slowing private consumption which is the main driver of economic growth. The layoff phenomena in various sectors caused declining purchasing power which forced the people to become more selective in spending.

Kendati demikian, kinerja intermediasi perbankan masih tetap kuat. Pertumbuhan kredit bank umum mencapai 10,39% secara tahunan (yoy) pada tahun 2024, seiring dengan meningkatnya kinerja usaha korporasi, termasuk korporasi yang berorientasi

Nevertheless, banking intermediation still shown good performance. Loan growth of commercial banks reached 10.39% year-on-year (yoy) in 2024, in line with increasing corporate performance, including the export-oriented ones. Investment loans grew the

ekspor. Kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 13,62% (yoy) yang diikuti oleh kredit konsumsi dengan pertumbuhan 10,61% (yoy), sementara kredit modal kerja tumbuh 8,35% (yoy). Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 pertumbuhan kredit mencapai 10,38%, terutama berasal dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Kualitas kredit pada tahun 2024 juga tetap baik dengan rasio NPL bruto sebesar 2,08%, dibandingkan 2,19% pada tahun sebelumnya.

highest by 13.62% (yoy), followed by consumer loans with a 10.61% growth (yoy) and working capital loans with an 8.35% growth. For comparison, in 2023 loan growth reached 10.38%, mainly from investment and working capital loans. Loan quality in 2024 was decent, with a gross NPL ratio of 2.08%, compared to 2.19% in the previous year.

Ketahanan sistem keuangan juga tercermin dari likuiditas perbankan yang tetap memadai, salah satu faktornya karena pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang membaik menjadi 4,48% dari 3,80% pada tahun 2023. Giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% (yoy). Rasio AL/NCD dan AL/DPK pada akhir 2024 masing-masing mencapai sebesar 112,87% dan 25,59%, jauh di atas threshold sebesar 50% dan 10%. Tingkat kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) juga tetap baik pada angka 26,68%, walaupun sedikit menurun dari tahun sebelumnya sebesar 27,66%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

The financial system remained resilient as reflected by adequate banking liquidity, which was partly due to the improved growth of third party funds (DPK) to 4.48% in 2024 from 3.80% in 2023. Current accounts, savings, and deposits grew 3.34%, 6.78%, and 3.50% (yoy) respectively. The AL/NCD and AL/DPK ratios by the end of 2024 reached 112.87% and 25.59%, respectively, far above the threshold of 50% and 10%. Capital Adequacy Ratio (CAR) remained good at 26.68%, although slightly declining from the previous year at 27.66%, but still strong enough to absorb risks and support loan growth.

Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong sektor perbankan untuk memperkuat permodalan. Untuk mematuhi POJK tentang Konsolidasi Bank Umum, jumlah bank yang memenuhi modal inti minimum terus meningkat. BPD diharuskan memiliki modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, atau membentuk kelompok usaha bank bila tidak mampu memenuhi modal inti tersebut. OJK pada tahun 2024 juga mengeluarkan Roadmap Penguatan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS untuk mendorong industri bank rakyat. Jumlah BPR dan BPRS menurun seiring dengan upaya untuk konsolidasi (merger) dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan single presence policy.

The Financial Services Authority continued to urge the banking sector to strengthen capital. The number of banks which fulfilled the minimum capital requirement increased in order to meet the POJK on Commercial Banks Consolidations. Regional Development Banks (BPD) should have a minimum capital requirement of Rp3 trillion, or form banks' business groups if unable to meet such requirements. OJK in 2024 also issued the Roadmap on Strengthening the Development and Industry of BPR-BPRS to support BPD banking industry development. The number of BPR and BPRS declined in line with the efforts to consolidate (merge) in meeting the minimum capital requirement and single presence policy.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus bertumbuh positif seiring dengan semakin terbiasanya masyarakat menggunakan pembayaran digital, dengan pertumbuhan sebesar 36,1% (yoy) yang mencapai 34,5 miliar transaksi. Pertumbuhan ini didominasi oleh pembayaran digital melalui mobile atau telepon. Jumlah transaksi melalui QRIS meningkat pesat sebesar 175,2% (yoy) dengan jumlah merchant dan pengguna yang bertambah, sedangkan jumlah transaksi melalui BI Fast naik 62,4%. Kenaikan penggunaan transaksi digital ini mengakibatkan penurunan pada jumlah transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM atau debit.

Digital financial and economic transactions continue to grow as people became more savvy in using digital payments, with growth of 36.1% yoy to reach 34.5 billion transactions. The growth is dominated by digital payments via mobile or phones. The number of transactions using QRIS rose rapidly by 175.2% yoy with an increasing number of merchants and users, while transactions via BI Fast rose 62.4%. The rise in digital transactions caused the number of payments using ATM or debit cards to decline.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operational Review Per Business Segment

Pada tahun 2024, kinerja bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk menunjukkan momentum pertumbuhan yang tetap terjaga dan fundamental yang kokoh, seperti tercermin dari kondisi likuditas dan permodalan Bank yang kuat. Pertumbuhan kredit berada di atas rata-rata industri, sedangkan dana pihak ketiga bertumbuh dengan komposisi CASA yang meningkat.

In 2024, PT Bank JTrust Indonesia Tbk's business performance showed resilient growth momentum and solid fundamentals, as reflected in the Bank's strong liquidity and capital conditions. Loan growth was above the industry average, while third party funds grew with an increasing CASA composition.

Kinerja bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tahun 2024 menunjukkan momentum pertumbuhan yang tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan kredit yang berada di atas rata-rata industri dan pertumbuhan dana pihak ketiga dengan komposisi CASA yang meningkat. Dalam menjalankan strategi ekspansi bisnisnya, Bank senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan bisnis Bank tersebut didukung oleh kondisi likuditas dan permodalan Bank yang kuat, yang menunjukkan bahwa Bank memiliki fundamental yang kokoh dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi serta memanfaatkan peluang pertumbuhan bisnis.

Business performance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk in 2024 showed a resilient growth momentum, as reflected in loan growth that was above the industry average and third party funds growth with an increased CASA composition. In implementing its business expansion strategy, the Bank continued prioritized prudential principles in order to maintain asset quality. The Bank's business growth was supported by the Bank's strong liquidity and capital conditions, underlining the Bank's solid fundamentals in facing economic challenges and uncertainties as well as tapping business growth opportunities.

Pada tahun 2024, kontribusi penyaluran kredit terbesar diberikan oleh segmen Commercial & SME, Corporate, serta Business Linkage. Pada saat yang bersamaan, Bank juga terus mengembangkan segmen usaha lainnya. Sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, perantara keuangan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, serta pertambangan, memberikan kontribusi terbesar bagi penyaluran kredit Bank pada tahun 2024.

In 2024, the largest contribution to loan distribution was from the Commercial & SME, Corporate, and Business Linkage segments. At the same time, the Bank continued to develop other business segments. Meanwhile, based on economic sectors, financial intermediaries, manufacturing industry, wholesale and retail trade, real estate, rental businesses, and corporate services, as well as mining, gave the largest contribution to the Bank's loan distribution in 2024.

Bank juga terus memperkuat struktur pendanaan yang didukung oleh peningkatan komposisi CASA serta memperkuat permodalan untuk menjaga momentum pertumbuhan pada tahun mendatang serta mendukung Bank dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, Bank juga terus mengoptimalkan aktivitas Treasury untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi valuta asing, surat berharga, serta transaksi terkait lainnya.

The Bank also continued to strengthen its funding structure which was supported by the increasing CASA composition and strengthen capital to maintain growth momentum in the coming years and support the Bank in facing economic challenges and uncertainties. Furthermore, the Bank continued to optimize Treasury activities to meet customer needs in carrying out foreign exchange transactions, securities, and other related transactions.

Pertumbuhan bisnis Bank juga didukung oleh peningkatan kapabilitas dan kapasitas digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik dan meningkatkan pelayanan nasabah. Tahun ini, Bank meluncurkan layanan mobile banking dan internet banking dalam tampilan baru dengan layanan yang lebih lengkap, sehingga mendukung Bank untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam menawarkan beragam produk dan layanan berbasis teknologi.

The Bank's business growth was also supported by increased digital capability and capacity to better meet customer needs and improve customer service. This year, the Bank launched new look mobile banking and internet banking services with more complete services, thereby supporting the Bank to increase its competitive advantage in offering a variety of technology-based products and services.

Informasi Segmen Operasi

Informasi segmen pada Bank mempertimbangkan aktivitas bisnis dan industri, berdasarkan segmen usaha dan geografis.

Segmen Geografis

Bank mempertimbangkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan sebagai segmen geografis. Informasi yang berkaitan dengan segmen geografis dari J Trust Bank disajikan pada catatan nomor 44 dalam laporan keuangan audit Bank.

Segmen Usaha

Untuk tujuan pelaporan manajemen, segmen usaha Bank dibagi menjadi pendanaan retail, pinjaman dan ekspor impor dan *treasury*. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha dari J Trust Bank disajikan pada catatan nomor 44 dalam laporan keuangan audit Bank.

Operating Segment Information

Segment information on the Bank considers the business activity and industry, based on business and geographical segments.

Geographical Segment

For management reporting purposes, the Bank considers Jakarta, Java, Sumatra, Sulawesi, Bali, and Kalimantan as geographical segment. Information relating to geographical segment of J Trust Bank is presented in note number 44 in the Bank's audited financial report.

Business Segments

For management reporting purposes, the Bank classified its business segments into retail funding, lending and export-import and treasury. Information relating to business segment of J Trust Bank is presented in note number 44 in the Bank's audited financial report.

TINJAUAN AKTIVITAS BISNIS

Aktivitas bisnis J Trust Bank terdiri dari Corporate Banking, Commercial & SME, Business Linkage & Consumer, Asset Based Financing (ABF), dan Japan Korean Desk, serta Pendanaan dan *Treasury*. Berikut ini adalah penjelasan dari kinerja masing-masing aktivitas bisnis pada tahun 2024 serta rencana dan strategi tahun 2025:

REVIEW OF BUSINESS ACTIVITIES

Business activities of J Trust Bank consist of Corporate Banking, Commercial & SME, Business Linkage & Consumer, Asset Based Financing (ABF), and Japan Korean Desk, as well as Funding and Treasury. The following is explanation of each business activity's performance in 2024 as well as plans and strategies for 2025:

CORPORATE BANKING

Sebagai salah satu segmen yang memberikan kontribusi besar kepada Bank, segmen Corporate Banking berfokus untuk memberikan dukungan finansial melalui produk-produk Bank kepada industri-industri yang stabil dan bertumbuh, termasuk industri pertambangan baik mineral/non-mineral dan batubara, konstruksi perumahan, pariwisata, perdagangan, pengolahan, serta terkait *green & sustainability financing*.

CORPORATE BANKING

As one of the segments with large contribution to the Bank, the Corporate Banking segment focuses on providing financial support through the Bank's products to stable and growing industries, including both mineral/non-mineral and coal mining industry, housing construction, tourism, trade, manufacturing, and green & sustainability financing-related industry.

Strategi dan Kinerja 2024

Selama tahun 2024, Segmen Corporate Banking menunjukkan kinerja bisnis yang baik dengan pertumbuhan kredit mencapai 19,3% YoY menjadi Rp9,08 triliun. Pada tahun 2024, segmen Korporasi tetap menjadi salah satu fokus utama Bank dengan tujuan kredit adalah perusahaan-perusahaan maupun grup-grup usaha yang mapan di masing-masing sektor industri yang potensial.

Strategy and Performance in 2024

In 2024, Corporate Banking Segment good business performance with loan growth reaching 19.3% YoY to Rp9.08 trillion. In 2024, the Corporate segment remained one of the Bank's main focuses with lending aimed at established companies or business groups in each potential industrial sector.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kredit adalah:

1. Mengembangkan beberapa sub-divisi baru untuk meningkatkan eksistensinya di dunia perbankan serta lebih aktif dalam berpartisipasi di transaksi-transaksi sindikasi.
2. Meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam kegiatan cross-selling atas produk-produk yang ada.
3. Memberikan dukungan perbankan pada perusahaan maupun grup usaha untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan usaha baru dalam rangka diversifikasi usaha grup tersebut pada sektor-sektor industri yang bertumbuh.

Pada tahun 2024, Segmen Corporate Banking mencatatkan pertumbuhan kredit yang disebabkan oleh keberhasilan Bank dalam menangkap momentum pertumbuhan ekonomi melalui nasabah Konglomerasi. Bank juga memasuki ceruk pasar yang lebih kecil, namun dengan pemberian jumlah kredit yang lebih besar serta profitabilitas yang lebih baik.

Rencana dan Strategi 2025

Untuk tahun 2025, Bank menargetkan pertumbuhan kredit Corporate Banking dengan target pasar perusahaan-perusahaan yang sudah mapan pada beberapa sektor industri, termasuk pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Bank juga akan mencoba membiayai proyek pembiayaan hijau (*Green Financing*) atau *Sustainable Projects*.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kredit adalah:

1. Akan lebih aktif dalam partisipasi pada deal-deal sindikasi bekerja sama dengan lead arranger bank-bank terkemuka/bank KBMI 4 & 3.
2. Fokus pada perusahaan dan grup usaha korporasi yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat dan reputasi yang baik dengan prioritas pembiayaan terkait pengembangan usaha dan/atau pembentukan usaha baru dalam rangka diversifikasi usaha grup tersebut.
3. Berfokus pada calon debitur yang memiliki kualitas baik, dengan jumlah kredit minimum Rp50 miliar.

COMMERCIAL & SME BANKING

Segmen Commercial & SME Banking (CSME) selama ini fokus pada pembiayaan modal kerja serta investasi untuk beberapa industri unggulan yang ada di masing-masing kota atau wilayah, yang meliputi: lembaga pembiayaan, industri/manufaktur, perdagangan besar, properti, perdagangan besar, hingga agrobisnis.

Several strategies implemented to achieve loan growth were:

1. Developing several new subdivisions to increase presence in the banking sector and be more active in participating in syndicated transactions.
2. Improving performance and effectiveness in cross-selling of existing products.
3. Providing banking support to companies and business groups for business development and/or new business creations to diversify the group's business in growing industrial sectors.

In 2024, the Corporate Banking Segment booked credit growth due to the Bank's success in capturing economic growth momentum through Conglomeration customers. The Bank also entered a smaller market niche, but with a larger credit amount and better profitability.

Plans and Strategies for 2025

For 2025, the Bank targets loan growth in Corporate Banking with target market of established companies in several industrial sectors, including mining, manufacturing, and trade. The Bank will also try to finance Green Financing projects or Sustainable Projects.

Several strategies that will be implemented to achieve loan growth are:

1. Be more active in participating in syndicated deals in collaboration with lead arrangers of leading banks/KBMI 4 & 3 banks.
2. Focus on companies and corporate business groups with strong financial capabilities and good reputations, with financing priorities related to business development and/or new business creations in order to diversify the group's business.
3. Focus on prospective debtors with good quality, with a minimum credit amount of Rp50 billion.

COMMERCIAL & SME BANKING

The Commercial & SME Banking (CSME) segment currently focuses on financing working capital and investment for several leading industries in each city or region, which include: financing institutions, industry/manufacturing, wholesale trade, property, wholesale trade, and agribusiness. The CSME segment is also

Segmen CSME juga secara paralel berusaha meningkatkan *cross selling* beberapa produk andalan seperti Bancassurance, *payroll,* dan CASA *transaction*, yang semuanya dilakukan untuk meningkatkan *relationship* yang lebih dalam dengan nasabah dan untuk meningkatkan pendapatan.

Strategi dan Kinerja 2024

Pertumbuhan penyaluran kredit 2024 mencapai Rp689 miliar atau meningkat 6,8% *year-on-year* (yoy) dari posisi *outstanding* per 31 Desember 2023 sebesar Rp10,1 triliun menjadi Rp10.8 triliun per 31 Desember 2024.

Pertumbuhan tersebut didasari atas beberapa strategi yang telah diImplementasikan dengan baik sebagai berikut:

1. Fokus pada beberapa industri unggulan di masing-masing kota area, khususnya sektor lembaga keuangan, industri dan manufaktur, perdagangan besar serta properti.
2. Meningkatkan hubungan dengan nasabah untuk dapat memperoleh referensi calon nasabah yang berkualitas dalam hal potensi bisnis.
3. Meningkatkan hubungan baik dengan nasabah agar dapat menelusuri potensi-potensi bisnis dengan tujuan meningkatkan hubungan dengan nasabah serta meningkatkan profitabilitas, seperti Bancassurance, transaksi perbankan bagi perusahaan, *payroll* bagi karyawan, hingga potensi bisnis *trade finance* dan *forex*.
4. Meningkatkan kualitas staff marketing untuk dapat meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, meningkatkan pemahaman produk hingga meningkatkan penetrasi pasar yang juga disertai *risk awareness* yang baik.

Rencana dan Strategi 2025

Penyaluran kredit 2025 ditargetkan bertumbuh sebesar Rp1,13 triliun dan disertai dengan kualitas kredit yang baik. Fokus strategi yang akan diterapkan segmen CSME adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada industri unggulan di masing-masing kota area, khususnya pada sektor industri yaitu industri manufaktur, perdagangan besar, properti, *general contractor*, dan agrobisnis.
2. Tetap terus meningkatkan kualitas relasi yang baik dengan nasabah eksisting, sehingga bisa memberikan solusi kebutuhan nasabah melalui produk-produk unggulan J Trust Bank dan selanjutnya nasabah dapat mereferensikan kepuasannya kepada rekan bisnisnya.

in parallel trying to increase cross selling of several mainstay products such as Bancassurance, payroll, and CASA transactions, all of which are aimedto improve deeper relationships with customers and to increase revenue.

Strategy and Performance in 2024

Loan growth in 2024 reached Rp689 billion or an increase of 6.8% year-on-year (yoy) from the outstanding position as of 31 December 2023 of Rp10.1 trillion to Rp10.8 trillion as of 31 December 2024.

The growth happened based on several strategies that have been implemented well as follows:

1. Focused on several leading industries in each city area, especially the financial institutions, industry and manufacturing, wholesale trade and property sectors.
2. Improved relationships with customers to be able to obtain quality prospective customer references in terms of business potential.
3. Improved good relationships with customers in order to explore business potential with the aim of improving relationships with customers and increasing profitability, such as Bancassurance, banking transactions for companies, payroll for employees, and trade finance and forex business potential.
4. Improved the quality of marketing staff to be able to improve service quality to customers, increase product understanding and increase market penetration, accompanied by good risk awareness.

Plans and Strategies for 2025

Lending in 2025 is targeted to grow by Rp1.13 trillion, followed with good loan quality. The strategic focus that will be implemented by the CSME segment is as follows:

1. Focus on leading industries in each city area, especially in the industrial sector, namely the manufacturing industry, wholesale trade, property, general contractor and agribusiness.
2. Continue to improve the quality of good relationships with existing customers, so that we can provide solutions to customer needs through superior J Trust Bank products and then customers can refer their satisfaction to business partners.

3. Terus meningkatkan kualitas internal tim CSME dan pemahaman produk yang mumpuni disertai dengan *risk awareness* yang baik sehingga dapat selalu memberikan solusi dan layanan terbaik kepada nasabah.

ASSET BASED FINANCING (ABF)

Untuk segmen ABF, J Trust Bank berfokus pada pemilik proyek seperti pertambangan batubara, pertambangan nikel, perkebunan kelapa sawit, serta kontraktor utama untuk para pemilik proyek tersebut dan kontraktor proyek konstruksi tingkat nasional, perusahaan dengan reputasi yang baik dan rekam jejak yang baik, dengan keahlian teknis yang sudah terbukti khususnya dalam pengoperasian alat berat, alat angkut, dan peralatan-peralatan lainnya dalam menopang bisnisnya.

Strategi dan Kinerja 2024

Pada tahun 2024, outstanding kredit segmen ini berhasil meningkat dari realisasi akhir tahun 2023 sebesar Rp548 miliar menjadi Rp843 miliar pada akhir tahun 2024.

Fokus strategi yang dilakukan bisnis ABF pada tahun 2024 adalah:

1. Memperkuat hubungan dengan distributor alat berat terkemuka.
2. Menjajaki pemberian fasilitas kredit kepada kontraktor dari debitur Corporate dan Commercial eksisting yang bergerak di bidang pertambangan, penggalian, konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertanian.
3. Menjajaki peluang baru di bidang maritim melalui pembiayaan kapal kepada perusahaan pelayaran terkemuka.
4. Melebarkan segmentasi pertambangan dari sebelumnya berfokus di batubara menjadi nikel dan turunannya.

Rencana dan Strategi 2025

Segmen ABF menargetkan pertumbuhan kredit yang tetap kuat pada tahun 2025. Fokus strategi segmen ABF adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada industri padat CAPEX seperti pengangkutan, konstruksi, manufaktur (khususnya galangan kapal), pertambangan, dan penyewaan.
2. Meningkatkan hubungan baik dengan debitur eksisting yang sudah terbukti *track record* pembayaran kreditnya dan memiliki peluang pengembangan usaha yang kuat.
3. Tetap memperkuat hubungan dengan distributor alat berat terkemuka.

3. Continue to improve the internal quality of the CSME team and have a good understanding of products accompanied by good risk awareness in order to continue providing the best solutions and services to customers.

ASSET BASED FINANCING (ABF)

For the ABF segment, the Bank focuses on project owners such as coal mining, nickel mining, palm oil plantations, and main contractors for the project owners and national-level construction contractors, companies with good reputation and good track record, with proven technical abilities in the operation of heavy equipment, transport equipment, and other supporting tools in the business.

Strategy and Performance in 2024

In 2024, outstanding loans for this segment increased from the realization at the end of 2023 of Rp548 billion to Rp843 billion at the end of 2024.

The strategic focus of ABF's business in 2024 was:

1. Strengthened relationships with leading heavy equipment distributors.
2. Explored the provision of loan facilities to contractors from existing Corporate and Commercial debtors who engaged in mining, excavation, construction, plantations, forestry, and agriculture.
3. Explored new opportunity in the maritime sector via ship financing to leading shipping company.
4. Expanded mining segments from focusing on coal to nickel and derivatives.

Plans and Strategies for 2025

The ABF segment targets strong loan growth in 2025. The ABF segment's strategic focus is as follows:

1. Focus on CAPEX intensive industries such as transportation, construction, manufacturing (especially shipbuilding), mining, and leasing.
2. Improve good relationships with existing debtors who have a proven track record of loan payments and have strong business development opportunities.
3. Continue to strengthen relationships with leading heavy equipment distributors.

4. Mengembangkan pembiayaan industri pengangkutan air khususnya pada pembiayaan kapal dan ekosistem usahanya seperti galangan kapal, *supplier*, jasa pengurusan pelayaran, *freight forwarding*, dan sebagainya.

BUSINESS LINKAGE & CONSUMER

J Trust Bank membagi segmen Business Linkage menjadi tiga sub-segmen yaitu *multifinance*, BPR, dan *consumer*. Bank memprioritaskan pembiayaan kepada *multifinance* dengan selektif, yaitu *multifinance* yang terkait dengan grup besar atau yang dimiliki oleh bank atau perusahaan milik pemerintah. Selain itu, Bank juga menambah portofolio pembiayaan pada BPR terutama pada BPR milik pemerintah setempat atau BPR besar dengan aset lebih dari Rp300 miliar.

Strategi dan Kinerja 2024

Pembiayaan dari segmen Business Linkage & Consumer pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,8% *year-on-year* (yoy) menjadi Rp5 triliun dari Rp3,1 triliun pada tahun 2023.

Untuk sub-segmen *multifinance* dan BPR, Bank menerapkan strategi berikut:

1. Optimalisasi pemberian fasilitas kredit kepada debitur eksisting dengan kualitas baik melalui pemberian penambahan fasilitas atas peningkatan kebutuhan mereka.
2. Memberikan pembiayaan kepada perusahaan *multifinance* dan BPR yang dimiliki oleh grup usaha konglomerasi/bank, BUMN, BUMD dengan reputasi baik.
3. Fokus ke BPR dengan *rating* Infobank top 200.

Sementara, fokus strategi pembiayaan konsumen mencakup:

1. Untuk KPR, fokus penambahan kerja sama dengan pengembang properti Jepang dan pengembang *developer* skala nasional besar, serta agen properti nasional.
2. Penambahan Tim Sales khusus untuk mendukung pengembangan KPR.
3. Program EBP akan diteruskan dengan menyasar karyawan perusahaan besar, BUMN/BUMD, perusahaan swasta dengan reputasi baik.
4. Menjajaki potensi EBP dari debitur Corporate Banking, Komersial, serta nasabah pendanaan di cabang. Untuk mendukung hal ini, dilakukan pertemuan rutin mingguan antara Branch Manager dan Credit Business Manager terkait.

4. Develop financing for the water transportation industry, especially ship financing and its business ecosystem such as shipyards, suppliers, shipping management services, freight forwarding, and so on.

BUSINESS LINKAGE & CONSUMER

J Trust Bank divides the Business Linkage segment into three sub-segments: multifinance, rural banks (BPR), and consumer. The Bank prioritizes financing to multifinance companies selectively, which are multifinance companies linked to large groups or owned by banks or government-owned companies. In addition, the Bank also increases its financing portfolio to BPRs, especially BPRs owned by local governments or large BPRs with assets of more than Rp300 billion.

Strategy and Performance in 2024

Loan growth from the Business Linkage & Consumer segment in 2024 decreased 1.8% year-on-year (yoy) to Rp5 trillion from Rp3.1 trillion in 2023.

For the sub-segment of multifinance and BPR, the Bank implemented the following strategy:

1. Optimized the provision of loan facilities to existing debtors with good quality by providing additional facilities to meet their increasing needs.
2. Provided financing to multi-finance companies and BPRs owned by conglomerate business groups/ banks, BUMN, BUMD with good reputation.
3. Focused on BPRs with a top 200 rating from Infobank.

Meanwhile, the strategy focus of consumer financing included:

1. For KPR, the focus was on increasing cooperation with Japanese property developers and large national scale developers, as well as national property agents.
2. Added a special Sales Team to support KPR growth.
3. The EBP program was continued by targeting employees of large companies, BUMN/BUMD, private companies with good reputation.
4. Explored the potential for EBP from Corporate Banking, Commercial debtors, as well as funding customers in branches. To support this, regular weekly meetings were held between relevant Branch Managers and Credit Business Managers.

Rencana dan Strategi 2025

Bank menargetkan pertumbuhan yang konservatif dari kinerja tahun 2024 karena tren likuiditas perbankan yang diperkirakan masih akan ketat terutama pada bank-bank kategori KBMI I.

Untuk sub-segmen *multifinance* dan BPR, Bank menerapkan strategi berikut:

1. Optimalisasi pemberian fasilitas kredit kepada debitur eksisting dengan kualitas baik melalui pemberian penambahan fasilitas atas peningkatan kebutuhan mereka.
2. Memberikan pembiayaan kepada perusahaan multifinance dan BPR yang dimiliki oleh grup usaha konglomerasi/bank, BUMN, BUMD dengan reputasi baik.
3. Fokus ke BPR dengan rating Infobank top 200.

Sementara, dalam hal pembiayaan konsumen Bank menerapkan strategi berikut:

1. Untuk KPR, akan dikembangkan dan menambahkan kerja sama dengan pengembang properti Jepang dan pengembang developer skala nasional besar tidak hanya di Jabodetabek saja, serta juga menyasar agen properti nasional di beberapa kota besar di Indonesia.
2. KPR J Trust Bank juga akan membentuk tim sales khusus untuk mendukung pengembangan KPR di beberapa cabang J Trust Bank.
3. Program EBP akan diteruskan dengan menyasar karyawan perusahaan besar, BUMN/BUMD, perusahaan swasta lokal/asing dengan reputasi baik yang dikhususkan untuk nasabah yang memiliki payroll di Bank.
4. Menjajaki potensi EBP dari debitur Corporate Banking, Komersial, serta nasabah pendanaan di cabang. Untuk mendukung hal ini, dilakukan pertemuan rutin mingguan antara Branch Manager dan Credit Business Manager terkait.

JAPAN KOREAN DESK

Melalui Japan & Korean Desk, Bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea, antara lain melalui pinjaman sindikasi atau dengan skema supply chain financing berupa kredit modal kerja.

Strategi dan Kinerja 2024

Pada tahun 2024, segmen ini tumbuh secara signifikan sebesar 40,6% menjadi Rp1 triliun dari Rp711 miliar pada tahun 2023, sebagai hasil dari akuisisi nasabah baru dan perluasan bisnis dengan nasabah pinjaman yang sudah ada.

Plans and Strategies for 2025

The Bank is targeting a conservative growth from the 2024 performance as bank liquidity is expected to remain tight especially among banks in the KBMI I category.

For the sub-segment of multifinance and BPR, the Bank will implement the following strategy:

1. Optimizes the provision of loan facilities to existing debtors with good quality by providing additional facilities to meet their increasing needs.
2. Provides financing to multi-finance companies and BPRs owned by conglomerate business groups/ banks, BUMN, BUMD with good reputation.
3. Focuses on BPRs with a top 200 rating from Infobank.

Meanwhile, the Bank will implement these strategies for consumer financing:

1. KPR will be developed and will add cooperation with Japanese property developers and large national scale developers outside of Greater Jakarta, as well as national property agents and in big cities.
2. J Trust Bank KPR will form a special Sales Team to support KPR growth in several J Trust Bank branches.
3. The EBP program will be continued by targeting employees of large companies, BUMN/BUMD, private companies with good reputation specifically targeted to customers with payroll in the Bank.
4. Explores the potential for EBP from Corporate Banking, Commercial debtors, as well as funding customers in branches. To support this, regular weekly meetings will be held between relevant Branch Managers and Credit Business Managers.

JAPAN KOREAN DESK

Through the Japan & Korean Desk, the Bank provides financing to Japanese and Korean companies, including through syndicated loans or supply chain financing schemes in form of working capital loans.

Strategy and Performance in 2024

In 2024, this segment significantly grew 40.6% to Rp1 trillion from Rp711 billion in 2023, as a result of new clients acquisitions and business expansions of existing debtors.

Segmen Japan & Korean Desk merupakan salah satu pilar pertumbuhan bisnis Bank. Pengembangan bisnis Japan & Korean Desk dilakukan melalui dua model, yaitu:

1. Menyusun *selection criteria* (fokus pada *supplier*) untuk daftar perusahaan Jepang dan Korea yang ada di Indonesia.
2. *Supply chain financing*, yakni pembiayaan modal kerja kepada distributor perusahaan produk-produk buatan Jepang dan Korea, industri makanan, perusahaan obat-obatan, dan infrastruktur teknologi informasi.

Beberapa target utama pembiayaan termasuk:

1. Kantor cabang yang dekat dengan kawasan industri di Cikarang dan Karawang diperkenalkan kepada para nasabah untuk meningkatkan *awareness* di wilayah tersebut dan mempromosikan penjualan berbasis komunitas.
2. Perusahaan Jepang dan Korea dan tenaga kerja asing di dalamnya. Bank juga mendorong pertumbuhan bisnis melalui transaksi valuta asing.
3. Mendapatkan nasabah baru melalui keterlibatan komunitas Jepang dan Korea.

Rencana dan Strategi 2025

Bank bertujuan untuk terus meningkatkan saldo pinjaman hingga tahun 2025, dan pada tahun 2024 telah memperkuat penjualannya dengan menunjuk Division Head dan Advisor dari Jepang dan mempekerjakan seorang Relationship Manager yang fasih berbahasa Jepang.

Japan & Korean Desk juga terus memperkuat basis nasabahnya melalui Relationship Manager yang telah direkrut pada tahun 2023, berlokasi di kantor cabang Cikarang, dekat dengan kawasan industri yang memiliki banyak perusahaan Jepang dan Korea. Selain itu, Japan & Korean Desk merekrut Relationship Manager untuk ditempatkan di kantor cabang Denpasar di Bali, tempat banyak perusahaan Jepang berada.

Pada tahun 2025, seorang Relationship Manager yang fasih berbahasa Jepang akan ditugaskan di kantor cabang Karawang dan seorang Relationship Manager yang fasih berbahasa Korea akan dipekerjakan untuk memperkuat tim Japan & Korean Desk.

Beberapa strategi yang akan dilakukan Japan & Korean Desk adalah:

1. Menargetkan perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea serta mereka yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea.

The Japan & Korean Desk Segment is one of the mainstays of the Bank's business growth. The development of Japan & Korean Desk business was done through three models:

1. Developing selection criteria (focusing on suppliers) for a list of Japanese and Korean companies in Indonesia.
2. Supply chain financing, or working capital financing for distributors of Japanese and Korean made products, food industry, pharmaceutical companies, and information technology infrastructure.

Some of the main financing targets included:

1. Branches around the industrial area of Cikarang and Karawang were referred to customers to increase awareness in the area and promoted community based sales.
2. Japanese and Korean companies and their expatriates. The Bank also encouraged business growth through forex transactions.
3. Secured new customers through the involvement of Japanese and Korean communities.

Plans and Strategies for 2025

The Bank aims to continue increasing loan balances until 2025, and in 2024 has strengthened sales by appointing a Division Head and Advisor from Japan and hiring a Japanese speaking Relationship Manager.

The Japan & Korean Desk also continues to strengthen its customer base through a Relationship Manager recruited in 2023, located at the Cikarang branch, close to the industrial area with many Japanese and Korean companies. Moreover, the Japan & Korean Desk is recruiting a Relationship Manager to be placed at the Denpasar branch in Bali, where many Japanese companies are located.

In 2025, a Japanese speaking Relationship Manager will be assigned to the Karawang branch and a Korean speaking Relationship Manager will be hired to strengthen the Japan & Korean Desk team.

Some of the strategies that the Japan & Korean Desk will implement are:

1. Targets Japanese and Korean companies as well as those who have business relationships with Japanese and Korean companies.

2. Mengembangkan pembiayaan distributor/ *distributor finance*, yang menyasar industri manufaktur tertentu.
3. Memperkuat aktivitas penjualan oleh Relationship Manager (yang dapat berbahasa Jepang) di kantor cabang Cikarang, Karawang, dan Denpasar untuk mengoptimalkan referensi cabang. Selain itu, seorang Relationship Manager khusus (berbahasa Korea) yang bertanggung jawab atas nasabah Korea akan ditunjuk untuk memperkuat penjualan kepada perusahaan dan nasabah Korea.
4. Perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan oleh komunitas Jepang dan Korea dan komunitas bisnis lainnya.

2. Develops distributor financing, which targets certain manufacturing industries.

3. Strengthens sales activities by Relationship Managers (Japanese speaking) at the Cikarang, Karawang and Denpasar branches to optimize branch references. Furthermore, a special Relationship Manager (Korean speaking) in charge of Korean customers will be appointed to strengthen sales to Korean companies and customers.
4. Companies recommended by Japanese and Korean communities and other business communities.

TREASURY

Sebagai salah satu segmen yang memberikan kontribusi besar kepada Bank terutama dari sisi pendapatan *fee-based*, segmen Treasury berfokus untuk meningkatkan pendapatan Bank melalui bisnis transaksi valuta asing dan surat berharga.

Strategi dan Kinerja 2024

Selama tahun 2024, J Trust Bank menunjukkan kinerja bisnis yang baik terutama dari sisi transaksi valas antar bank yang berhasil melebihi target.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah:

1. Meningkatkan volume transaksi valuta asing melalui transaksi dengan nasabah bank baik segmen retail maupun korporasi dengan selalu memberikan harga yang kompetitif dan mengembangkan produk treasury sesuai dengan kebutuhan nasabah.
2. Mengoptimalkan aktivitas *trading* valuta asing dengan memanfaatkan pergerakan kurs secara harian melalui transaksi *FX Spot* maupun *FX Swap*.
3. Melakukan *bookbuilding* asset Surat Utang Negara dan surat berharga korporasi yang memberikan *yield* yang menarik dan melakukan penjualan pada *asset* Obligasi yang dapat memberikan *capital gain* yang baik bagi bank.

Rencana dan Strategi 2025

Untuk tahun 2025, Bank menargetkan pertumbuhan pendapatan bunga dan pendapatan *fee-based* pada Divisi Treasury dengan beberapa fokus sebagai berikut:

1. Meningkatkan volume transaksi *banknotes* terutama dengan beberapa nasabah *money changer* yang telah lama menjadi nasabah utama bank.
2. Mengoptimalkan transaksi *telegraphic transfer* (TT) untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dan

TREASURY

As one of the segments that significantly contributes to the Bank, particularly in generating fee-based income, the Treasury segment focuses on enhancing the Bank's revenues through foreign exchange and securities transactions.

Strategy and Performance 2024

In 2024, J Trust Bank demonstrated strong business performance, particularly in interbank foreign exchange transactions, which successfully surpassed the target.

Several strategies carried out to achieve the target are:

1. Increasing the volume of foreign exchange transactions through transactions with bank customers, both retail and corporate segments, by always providing competitive prices and developing treasury products according to customer needs.
2. Optimizing foreign exchange trading activities by utilizing daily exchange rate movements through FX Spot and FX Swap transactions.
3. Carrying out bookbuilding of government securities and corporate securities assets that provide attractive yields and selling securities assets that have provided good capital gains for the bank.

2025 Plan and Strategy

In 2025, the Bank aims to drive growth in interest income and fee-based income within the Treasury Division by focusing on the following areas:

1. Increasing the volume of banknote transactions, especially with several money changer customers who have long been the bank's main customers.

2. Optimizing telegraphic transfer (TT) transactions to accommodate customer needs and continuing

terus meningkatkan hubungan dengan nasabah *funding* dan *lending* dalam rangka menawarkan produk-produk treasury lainnya.
3. Secara konsisten melakukan perdagangan mata uang valas melalui transaksi antar bank untuk menjaga keseimbangan antara tingkat profitabilitas bank dengan risiko nilai tukar. Selain itu, Divisi Treasury juga akan memanfaatkan transaksi *Domestic Non Delivery Forward* (DNDF) sebagai instrumen baru dalam melakukan perdagangan USD/IDR.
4. Melakukan investasi pada surat utang negara dan korporasi dengan memperhatikan kondisi pasar, peringkat yang baik dan kupon yang kompetitif serta tetap sesuai dengan peraturan internal dan eksternal.

to improve relationships with funding and lending customers in order to offer other treasury products.

3. Consistently conducting foreign exchange trading through interbank transactions to maintain a balance between the bank's profitability level and exchange rate risk. In addition, the Treasury Division will also utilize Domestic Non Delivery Forward (DNDF) transactions as a new instrument in conducting USD/IDR trading.

4. Investing in government and corporate securities by paying attention to market conditions, good ratings and competitive coupons and remaining in accordance with internal and external regulations.

PENDANAAN

Pendanaan Bank terutama berasal dari sumber dana pihak ketiga dalam rangka memperbaiki komposisi CASA. Pendanaan juga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menunjang ekspansi kredit dan juga obligasi korporasi. Berbagai program dilakukan untuk meningkatkan DPK.

FUNDING

The Bank's funding mainly comes from third party fund sources in order to improve the composition of CASA. Funding is also focused on meeting liquidity needs, supporting loan expansion and corporate bonds. Various programs have been made to increase DPK.

Strategi dan Kinerja 2024

Untuk menurunkan biaya dana, Bank menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan sumber daya pemasaran cabang secara optimal (kualitas dan kuantitas).
2. Mengoptimalkan fungsi kualitas layanan (infrastruktur, proses bisnis, dan kinerja) untuk menghasilkan *service excellence.*
3. Memperkuat tim Funding untuk melakukan akuisisi dan *cross selling* melalui produk yang inovatif.
4. Mengembangkan fitur dan layanan *internet banking* dan *mobile banking* seperti QRIS, Master Card, debit online, virtual account, dll.
5. Meninjau kembali lokasi kantor cabang yang dianggap belum optimal serta pengembangan kantor cabang baru antara lain KC Tarakan, KC Kendari, KC Bali Kuta.
6. Meningkatkan *marketing awareness* agar produk Bank lebih dikenal di masyarakat sehingga memancing pembukaan rekening baru pada Bank melalui komunitas dan penyelenggaraan *event* seperti pameran, perlombaan/pertandingan, marathon, balap sepeda, mewarnai untuk anak sekolah.

Strategy and Performance in 2024

To reduce cost of funds, the Bank implemented several strategies as follows:
1. Optimized branch marketing resources optimally (quality and quantity).
2. Optimized service quality functions (infrastructure, business process, and performance) to create service excellence.
3. Strengthened the Funding team to carry out acquisitions and cross selling through innovative products.
4. Developed internet and mobile banking features and services such as QRIS, Master Card, online debit, virtual account, etc.
5. Reviewed less-optimal branch locations and developed new branches.
6. Increased marketing awareness to make Bank products more familiar among the people in order to attract the opening of new accounts at the Bank, through communities and events such as exhibitions, competitions/matches, marathons, bicycle races, coloring for students.

7. Sebagai agen penjualan bancassurance bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
8. Meluncurkan program *champion* antara lain Program Tabungan Berhadiah Koper, Program JPRO Bundling, serta program yang mendukung lingkungan seperti Program Tabungan Blue Ocean dan Program Tabungan Green Saving. Selain itu, terdapat beberapa program lainnya seperti Triple Win Program, Program Tabungan Suka-Suka, Program Deposito Valas Blue Sakura Premiere, serta Program Deposit Referral sehingga menarik bagi nasabah eksisting. Karyawan juga dapat membantu mereferensikan calon nasabah baru.
9. Bekerja sama dengan divisi loan business seperti Linkage Business, Commercial, Japan/Korean Desk, maupun SME dengan memasarkan program EBP kepada perusahaan debitur.
10. Melakukan diversifikasi pada deposan besar untuk mengakuisisi nasabah baru.

Rencana dan Strategi 2025

Pada tahun 2025, Bank akan tetap melakukan ekspansi peningkatan jumlah DPK dengan tidak terlalu agresif jika dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Bank berencana untuk lebih fokus pada peningkatan laba serta memperbaiki komposisi portofolio pendanaan, dengan fokus penurunan COF melalui penurunan suku bunga deposito secara bertahap dan peningkatan CASA.

Untuk tahun 2025, Bank menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tim *Funding* untuk melakukan akuisisi nasabah.
2. Meningkatkan portfolio CASA melalui cross selling dengan *product loan, payroll,* dll.
3. Meningkatkan *fee based income* melalui produk bancassurance, bank notes, dll.
4. Memperkuat *relationship base funding* kepada nasabah eksisting untuk mempertahankan loyalitas dan meningkatkan dana untuk nasabah eksisting.
5. Melakukan pengembangan produk dan program layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
6. Mengembangkan produk dan fitur berbasis digital layanan internet banking dan mobile banking seperti virtual account, QRIS, Master Card, mesin EDC, online, dan layanan customer on boarding.
7. Mengembangkan edukasi untuk nasabah individu perihal pengetahuan investasi dan literasi dasar keuangan.

7. As a selling agent for mutual funds and bancassurance in cooperation with insurance firms.
8. Launched champion programs such as Suitcase Prize Savings Program, JPRO Bundling Program, as well as environmental-supporting programs such as the Blue Ocean Savings Program and Green Saving Savings Program. In addition, there were other programs such as the Triple Win Program, Suka-Suka Savings Program, Blue Sakura Premiere Foreign Currency Deposit Program, and Referral Deposit Program to attract existing customers. Employees could help refer potential new customers.
9. Cooperated with loan business divisions such as Linkage Business, Commercial, Japan/Korean Desk, and SME by marketing the EBP program to debtor companies.
10. Diversified large depositors to acquire new customers.

Plans and Strategies for 2025

In 2025, the Bank will continue expanding the amount of DPK without being too aggressive compared to the previous years. This year the Bank plans to focus more on increasing profits and improving the composition of funding portfolio, by reducing cost of funds through the gradual cut ion deposit rates and increasing CASA.

For 2025, the Bank has set several strategies as follows:

1. Strengthens the Funding Team for customer acquisitions.
2. Increases CASA portfolio through cross selling with product loans, payroll, etc.
3. Increases fee based income through bancassurance products, bank notes, etc.
4. Strengthens relationship base funding with existing customers to maintain loyalty and increases funds for existing customers.
5. Develops innovative products and service programs in line with market needs.
6. Develops products and features based on mobile banking and internet banking digital services such as virtual account, QRIS, Master Card, EDC machine, online, and customer on boarding services.
7. Develops education for individual customers regarding investment knowledge and basic financial literacy.

8. Melaksanakan program event dan *joint promo* dengan *merchant* untuk mendukung program akuisisi di kantor cabang.
9. Pengembangan jaringan kantor dengan mempertimbangan lokasi-lokasi yang strategis dan mendukung kegiatan bisnis Bank.
10. Memperkuat fungsi kontrol dan *monitoring* dalam pemantauan kinerja dan pencapaian target bisnis.

8. Implements event programs and joint promos with merchants to support acquisition programs in branches.
9. Develops office networks by considering strategic locations and supporting the Bank's business activities.
10. Strengthens control and monitoring functions in monitoring performance and achieving business targets.

J TRUST BANK

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut berpedoman pada Laporan Keuangan Audit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF Indonesia) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam segala hal yang material. Laporan keuangan tersebut disajikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan ini.

The analysis and discussion of the following financial performance is based on the Audited Financial Statements for the years ended 31 December 2024 and 31 December 2023, which was audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF Indonesia) with unqualified opinion in all material respects. The financial statements are also presented together with this Annual Report.

PEMBAHASAN UTAMA

Pada tahun 2024, ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik cukup memengaruhi perekonomian dan bisnis di Indonesia. Meski demikian, J Trust Bank menunjukkan ketahanan finansial dengan terus mencatatkan pertumbuhan kredit yang sehat dan pengelolaan keuangan yang baik.

Portofolio kredit Bank tumbuh sebesar 11,09%, meningkat dari Rp23.879,84 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp26.528,07 miliar pada tahun 2024. Dalam melakukan ekspansi kredit, Bank selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasional dan pengelolaan risiko kredit. Hal ini tercermin dari rasio Non-Performing Loans (NPL) yang terjaga di level yang aman, yakni sebesar 1,95% (bruto) dan 1,43% (neto) per 31 Desember 2024.

Ekspansi kredit Bank tidak terlepas dari dukungan simpanan nasabah, yang bertumbuh sebesar 5,92%. Dana pihak ketiga pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp33.899,53 miliar, meningkat dari Rp32.005,63 miliar pada tahun 2023, dimana deposito memberikan kontribusi terbesar.

Pada saat yang bersamaan, Bank juga terus memperkuat struktur pendanaan dengan perolehan rasio CASA yang meningkat menjadi 15,14%, dibandingkan dengan 13,94% pada tahun 2023.

Peran intermediasi Bank yang membaik juga tercermin dari meningkatnya rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga atau Loan to Funding Ratio (LFR) menjadi 78,25% dari 74,61% pada tahun 2023. Ekspansi kredit yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta stuktur pendanaan Bank yang semakin baik, berdampak positif terhadap profitabilitas Bank, dimana laba operasional Bank meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp98,39 miliar.

Dari sisi likuiditas, Bank mampu menjaga rasio kecukupan likuiditas (LCR) di level yang sehat, yakni sebesar 116,76%. Permodalan Bank juga tetap kuat, terlihat dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 13,89% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, kinerja Bank pada tahun 2024 mencerminkan ketahanan yang solid, pertumbuhan kredit yang sehat, dan strategi pengelolaan risiko yang efektif dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi.

MAIN ANALYSIS

In 2024, global economic uncertainty and geopolitical tensions significantly impacted the economy and business in Indonesia. Nevertheless, J Trust Bank demonstrated financial resilience by continuing to record healthy credit growth and effective financial management.

The Bank's credit portfolio grew by 11.09%, increasing from Rp23,879.84 billion in 2023 to Rp26,528.07 billion in 2024. In expanding its credit portfolio, the Bank always prioritized prudential principles in every operational aspect and credit risk management. This is reflected in the Non-Performing Loans (NPL) ratio, which remained at a safe level of 1.95% (gross) and 1.43% (net) as of 31 December 2024.

The Bank's credit expansion was supported by customer deposits, which grew by 5.92%. Third-party funds in 2024 amounted to Rp33,899.53 billion, up from Rp32,005.63 billion in 2023, with deposits making the largest contribution.

At the same time, the Bank also continues to strengthen its funding structure with the CASA ratio increasing to 15.14%, compared to 13.94% in 2023.

The improvement in the Bank's intermediary role was also reflected in higher loan-to-funding ratio (LFR), which rose to 78.25% from 74.61% in 2023. Credit expansion that prioritizes the principle of prudence and the Bank's increasingly stronger funding structure has had a positive impact on the Bank's profitability, where the Bank's operating profit has more than doubled to IDR98.39 billion.

On liquidity side, the Bank managed to maintain a healthy liquidity coverage ratio (LCR) of 116.76%. The Bank's capital position remained strong, as seen from the minimum capital adequacy ratio (CAR) of 13.89% in 2024.

Overall, the Bank's performance in 2024 reflected solid resilience, healthy credit growth, and effective risk management strategies in facing economic challenges and uncertainty.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

Keterangan (Dalam jutaan Rupiah) kecuali disebutkan lain	2024	2023	2022	Description (In million Rupiah) unless stated otherwise
ASET				**ASSETS**
Kas	331.700	201.930	188.750	Cash
Giro pada Bank Indonesia	474.261	2.013.146	339.539	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain Neto	592.577	548.016	305.265	Current accounts with other banks-Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Neto	2.162.566	3.370.260	3.490.376	Placements with Bank Indonesia and other banks-Net
Efek-Efek-Neto	5.040.567	3.884.345	3.324.845	Marketable securities-Net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	1.466.541	2.387.732	Securities purchased under resale agreements
Tagihan derivatif	4.987	18.906	12.322	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan-Neto	26.330.524	23.732.583	19.368.357	Loans-Net
Tagihan akseptasi-Neto	-	12.156	78.068	Acceptance receivables-Net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	187.725	207.121	185.357	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.732.467	2.854.304	3.018.983	Prepaid expenses and advances
Aset tetap-Neto	438.874	221.114	215.825	Fixed assets-Net
Aset tidak berwujud-Neto	90.336	73.660	81.620	Intangible assets-Net
Aset hak-guna-Neto	54.250	92.757	126.222	Right-of-use assets-Net
Agunan yang diambil alih-Neto	93.124	83.238	99.709	Foreclosed assets-Net
Aset lain-lain-Neto	165.848	129.644	74.381	Other assets-Net
Aset pajak tangguhan	226.668	324.591	320.039	Deferred tax assets
TOTAL ASET	**40.258.696**	**39.234.312**	**33.617.390**	**TOTAL ASSETS**
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segera	50.385	86.614	71.012	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	33.899.527	32.005.631	25.661.181	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.324.117	3.215.559	3.955.279	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	7.745	343	381	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	12.157	78.395	Acceptance payables
Utang pajak	39.362	33.736	23.657	Taxes payable
Bunga yang masih harus dibayar	107.921	87.123	60.658	Accrued interest expenses
Liabilitas imbalan kerja	23.834	22.112	19.257	Employee benefits liability
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	11.306	21.195	Accrued expenses and other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**36.464.540**	**35.474.581**	**29.891.015**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS				**EQUITY**
Modal ditempatkan dan disetor penuh	13.032.929	13.032.929	13.032.929	Issued and fully paid capital
Tambahan modal disetor	1.915.423	1.915.423	1.915.423	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain	1.053.735	1.001.860	1.001.860	Other components of equity
Kerugian aktuarial	(9.087)	(8.980)	(10.430)	Actuarial loss
Surplus revaluasi aset tetap - neto	146.976	146.976	146.976	Revaluation surplus of fixed assets - net

Keterangan (Dalam jutaan Rupiah) kecuali disebutkan lain	2024	2023	2022	Description (In million Rupiah) unless stated otherwise
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	(28.319)	(8.144)	(12.148)	Unrealized gain (losses) on changes in marketable securities at fair value through other comprehensive income
Saldo rugi	(12.317.501)	(12.320.333)	(12.348.235)	Deficit
Total Ekuitas	**3.794.156**	**3.759.731**	**3.726.375**	**Total Equity**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**40.258.696**	**39.234.312**	**33.617.390**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Aset

Di tengah tantangan ekonomi global dan geopolitik yang mempengaruhi kondisi bisnis di Indonesia, penyaluran kredit Bank tetap sehat dan bertumbuh. Kredit Bank meningkat 11,09 % dari Rp23.879,84 miliar di tahun 2023 menjadi Rp26.528,07 miliar di tahun 2024. Hal ini pada akhirnya berdampak pada total aset Bank yang tumbuh sebesar 2,61% dari Rp39.234,31 miliar di tahun 2023 menjadi Rp40.258,70 miliar di tahun 2024.

Asset

Amid global economic challenges and geopolitical situations which affected business activities in Indonesia, the Bank's lending remained healthy and growing. The Bank's loan expanded 11.09 % from Rp23,879.84 billion in 2023 to Rp26,528.07 billion in 2024. This led to an increase in the Bank 's total assets, which grew by 2.61% from Rp39,234.31 billion in 2023 to Rp40,258.70 billion in 2024.

Kas

Pada akhir tahun 2024, kas Bank mencapai Rp331,7 miliar, naik Rp129,77 miliar atau sebesar 64,26% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp201,93 miliar. Kenaikan kas terutama berasal dari kas dalam Rupiah sebesar Rp117,04 miliar dan Dolar Amerika Serikat sebesar Rp57,53 miliar.

Cash

At the end of 2024, the Bank's cash reached Rp331.7 billion, increasing Rp129.77 billion, or by 64,26%, from Rp201.93 billion in 2023. The increase was mainly due to cash in Rupiah amounted to Rp117.04 billion and United States Dollar amounted to Rp57.53 billion.

Kas	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)				Cash
				2024-2023		2023-2022		
	2024	2023	2022	Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Rupiah	227.139	110.096	114.422	117.043	106,31%	(4.326)	-3,78%	Rupiah
Mata uang asing:								**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	94.258	36.730	48.180	57.528	156,62%	(11.450)	-23,77%	United States Dollar
Mata uang asing lainnya	10.303	55.104	26.148	(44.801)	-81,30%	28.956	110,74%	Other foreign currencies
Jumlah Kas	**331.700**	**201.930**	**188.750**	**129.770**	**64,26%**	**13.180**	**6,98%**	**Total Cash**

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2024 sebesar Rp474,26 miliar dan mengalami penurunan sebesar 76,44% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.013,15 miliar. Penurunan ini tidak berdampak pada pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, mengingat perhitungan GWM adalah berdasarkan saldo rata-rata yang mana pada posisi akhir tahun saldonya menurun agar lebih efisien namun masih tetap memenuhi aturan GWM

Current Accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia in 2024 amounted to Rp474.26 billion and increased by 76,44% from the previous year of Rp2,013.15 billion. This decline has no effect on the fulfillment of the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM), taking into account that the calculation for GWM is based on the average balance, in which the decrease in balance at the end of the year is to be more efficient while still meeting the applicable GWM regulations. The decrease

yang berlaku. Penurunan giro pada Bank Indonesia terutama berasal dari giro pada Bank Indonesia mata uang Rupiah sebesar Rp1.534,28 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Giro Wajib Minimum Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang efektif pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 24/04/PBI/2022 yang efektif pada tanggal 1 Maret 2022, dan juga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang efektif pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 24/8/PADG/2022 yang efektif pada tanggal 30 Juni 2022.

mainly resulted from the Rupiah-denominated current accounts with Bank Indonesia, which decreased by Rp1,534.28 billion.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve has complied with Bank Indonesia (BI) Regulation No. 20/3/PBI/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units effective on July 16, 2018, where the regulation has undergone several amendments, with the latest amendment stipulated in the Bank Indonesia Regulation No. 24/04/PBI/2022 effective on March 1, 2022, and also Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 20/10/PADG/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units effective on July 16, 2018, where the regulation has undergone several amendments, with the latest amendment stipulated in the Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 24/8/PADG/2022 effective on June 30, 2022.

Giro pada Bank Indonesia	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Current accounts with Bank Indonesia
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rupiah	357.457	1.891.738	199.663	-81,10%	847,47%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	116.804	121.408	139.876	-3,79%	-13,20%	United States Dollar
Jumlah Giro pada Bank Indonesia	**474.261**	**2.013.146**	**339.539**	**-76,44%**	**492,91%**	**Total Current accounts with Bank Indonesia**

Giro pada Bank Lain – Neto

Giro pada bank Lain-neto tahun 2024 sebesar Rp592,58 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 8,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp548,02 miliar. Kenaikan giro pada bank lain terutama berasal dari giro mata uang Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, dan Euro Eropa masing-masing sebesar Rp291,84 miliar, Rp213,86 miliar, dan Rp16,89 miliar.

Current Accounts with Other Banks - Net

Current account with other banks - net in 2024 amounted to Rp592.58 billion and increased by 8,13% from the previous year of Rp548.02 billion. The increase was mainly due to increase in current account with other banks in United States Dollar, Japanese Yen, and Euro amounting to Rp291.84 billion, Rp213.86 billion, and Rp16.89 billion, respectively.

Giro pada Bank Lain - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Current Accounts with Other Banks - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pihak Ketiga						**Third parties**
Rupiah	44.416	47.687	26.803	-6,86%	77,92%	Rupiah
Mata uang asing	549.595	501.546	279.469	9,58%	79,46%	Foreign currencies
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.434)	(1.217)	(1.007)	17,83%	20,85%	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah Giro pada Bank Lain – Neto	**592.577**	**548.016**	**305.265**	**8,13%**	**79,52%**	**Total Current Accounts with Other Banks - Net**

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Neto

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-neto pada tahun 2024 sebesar Rp2.162,57 miliar dan mengalami penurunan sebesar 35,83% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.370,26 miliar. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan pada fasilitas deposito Bank Indonesia sebesar Rp1.529,77 miliar. Penurunan ini tujuannya untuk dialihkan ke tempat yang lain yang lebih produktif tanpa mengesampingkan pemenuhan rasio likuiditas.

Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net

Placements with Bank Indonesia and other banks - net in 2024 amounted to Rp2,162.57 billion and decreased by 35.83% from the previous year of Rp3,370.26 billion. This decrease mainly came from the decrease in deposit facility with Bank Indonesia of Rp1,529.77 billion. The decline aims is intended to be transferred to other, more productive place without disregarding the fulfillment of the liquidity ratio

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Placements with Bank Indonesia and Other Banks
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rupiah	1.840.675	3.370.445	3.490.900	-45,39%	-3,45%	Rupiah
Mata uang asing	321.941	-	-	100%	-	Foreign currencies
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(50)	(185)	(524)	-72,97%	-64,69%	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	**2.162.566**	**3.370.260**	**3.490.376**	**-35,83%**	**-3,44%**	**Total Current accounts with Bank Indonesia and other banks**

Efek-efek

Efek-efek pada tahun 2024 sebesar Rp5.040,57 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 29,77% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.884,35 miliar. Kenaikan efek-efek utamanya disebabkan oleh naiknya efek obligasi pemerintah dan medium term notes dalam mata uang Rupiah sebesar Rp1.155,47 miliar.

Suku bunga rata-rata per tahun untuk investasi efek-efek adalah sebesar 7,66% dalam mata uang Rupiah dan 2,8% dalam mata uang asing pada tahun 2024. Pada tahun 2023, suku bunga rata-rata per tahun mencapai 7,43% dalam mata uang Rupiah dan 2,8% dalam mata uang asing.

Marketable Securities

Marketable securities in 2024 amounted to Rp5,040.57 trillion and increased by 29.77% from the previous year of Rp3,884.35 billion. This increase was mainly due to the increase in government bonds and medium-term notes in Rupiah worth Rp1,155.47 billion.

The average annual interest rates of these marketable securities investments were 7.66% in Rupiah currency and 2.8% in foreign currency in 2024. In 2023, the average annual interest rates were 7.43% for Rupiah and 2.8% for foreign currency.

Seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan sebagai lancar.

All marketable securities as of December 31, 2024 and 2023 were classified as current.

Efek-efek	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Marketable Securities
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rupiah	5.012.050	3.856.579	3.297.583	29,96%	16,95%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	28.517	27.766	27.262	2,70%	1,85%	United States Dollar
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	0,00%	0,00%	Less: Allowance for impairment losses
Efek-efek - Neto	5.040.567	3.884.345	3.324.845	29,77%	16,83%	Marketable securities - Net
Jumlah Efek-efek	**5.040.567**	**3.884.345**	**3.324.845**	**29,77%**	**16,83%**	**Total Marketable securities**

Pinjaman yang Diberikan

Pada tahun 2024, total pemberian kredit bruto Bank mengalami kenaikan sebesar 11,09 % yang tercatat sebesar Rp26.528,07 miliar, dari tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp23.879,84 miliar. Sementara itu, posisi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) posisi 2024 tercatat sebesar Rp197,54 milliar.

Restrukturisasi pinjaman Bank dilakukan sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Bagi debitur yang terdampak Covid-19, Bank telah memberikan relaksasi pinjaman berdasarkan POJK No. 17/POJK.03/2021, POJK No. 11/POJK.03/2020, dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Wabah virus Covid-19. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, total pinjaman yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan tersebut masing-masing sebesar nihil dan Rp152,80 miliar. Restrukturisasi pinjaman yang diberikan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang antara lain berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, dan pengurangan pembayaran pokok kredit.

Loans

In 2024, total gross loans of the Bank increased by 11.09 % at Rp26,528.07 billion, from the previous year of Rp23,879.84 billion. Meanwhile, allowance for impairment losses (CKPN) position in 2024 was recorded at Rp197.54 billion.

The Bank's loan restructuring was made in accordance with POJK No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019, concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks. The restructuring scheme was generally carried out by extending the repayment period of the loan and by rescheduling the outstanding interest.

For debtors affected by Covid-19, the Bank has provided loan relaxation based on POJK No. 17/POJK.03/2021, POJK No. 11/POJK.03/2020, and POJK No. 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of Covid-19 Virus Disease Outbreak. As of December 31, 2024 and 2023, total loans restructured in accordance with these regulations amounted to nil and Rp152.80 billion. Loan restructuring is an effort made by the Bank in lending activities for debtors who experience difficulties in fulfilling their obligations, which include lowering loan interest rates, extending credit terms, reducing arrears in loan interest, and reducing loan principal payments.

Jaminan pemberian kredit pada umumnya berupa harta berwujud (tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, tagihan piutang, persediaan, giro, deposito berjangka, personal guarantee, dan corporate guarantee). Jumlah deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2,55 triliun dan Rp3,04 triliun. Jumlah tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp32,35 miliar dan Rp29,31 miliar. Jumlah giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp766,69 miliar dan Rp143,77 miliar.

Loan collaterals are generally in the form of tangible assets (land, buildings, machinery, equipment, vehicles, receivables collections, inventories, demand deposits, time deposits, personal guarantee, and corporate guarantee). Total time deposits pledged as cash collateral for loans granted as of December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp2.55trillion and Rp3.04 trillion, respectively. Savings deposits which were pledged as collateral on loans as of December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp32.35 billion and Rp29.31 billion, respectively. Demand deposits which were pledged as collateral on loans as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp766.69 billion and Rp143.77 billion, respectively.

Pinjaman yang diberikan - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loan - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rupiah						**Rupiah**
Pihak berelasi	350.957	375.911	207.967	-6,64%	80,76%	Related parties
Pihak ketiga	23.269.595	20.432.893	16.439.193	13,88%	24,29%	Third parties
Mata uang asing						**Foreign currencies**
Pihak berelasi	-	-	-	0,00%	-	Related parties
Pihak ketiga	2.907.514	3.071.034	2.884.787	-5,32%	6,46%	Third parties
Pinjaman yang diberikan – Bruto	26.528.066	23.879.838	19.531.947	11,09%	22,26%	Loan - Gross
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197.542)	(147.255)	(163.590)	34,15%	-9,99%	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah Pinjaman yang diberikan – Neto	**26.330.524**	**23.732.583**	**19.368.357**	**10,95%**	**22,53%**	**Total Loan - Net**

Pinjaman yang diberikan Berdasarkan Jenis Mata Uang

Kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah masih memiliki porsi dominan dalam portofolio kredit Bank JTrust Indonesia pada tahun 2024. Bank JTrust Indonesia menyalurkan kredit dalam mata uang Rupiah sebesar Rp23.620,55 miliar atau setara dengan 89,04% dari total kredit. Sementara itu, kredit dalam mata uang asing mencapai 10,96% dari total kredit atau setara dengan Rp2.907,51 miliar. Komposisi kredit Bank JTrust Indonesia pada tahun 2023 mata uang Rupiah dan kredit dalam mata uang asing sebesar 87,14% dan 12,86%.

Loans by Currency

Loans in Rupiah denomination remained as the dominant portion of the Bank's loans portfolio in 2024. Bank JTrust Indonesia disbursed a total of Rp23,620.55 billion of Rupiah denominated loans, which accounted for 89.04% of the total loan's portfolio. Whereas foreign currency denominated loans accounted for 10.96%, or a total of Rp2,907.51 billion, of the loan's portfolio. In 2023, Bank JTrust Indonesia's Rupiah-denominated and foreign currency denominated loans portion were 87.14% and 12.86%, respectively.

Pinjaman berdasarkan Jenis Mata uang dan Suku Bunga Rata-rata	2024	2023	2022	Loans Based on Currency and Average Interest Rate
Rupiah				**Rupiah**
Suku bunga rata-rata (Rupiah) %	12,38%	12,10%	12,62%	Average interest rate (Rupiah) %
Mata uang asing				**Foreign Currency**
Suku bunga rata-rata (Valas) %	6,28%	5,95%	5,08%	Average interest rate (Forex) %

Pinjaman yang diberikan Berdasarkan Geografis

Distribusi penyaluran kredit Bank JTrust Indonesia berdasarkan wilayah penyebaran masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan porsi penyaluran kredit sebesar 21,52% di tahun 2024. Wilayah Jakarta memiliki kontribusi terbesar dari total penyaluran kredit sebesar 70,67%, diikuti oleh Sumatera yang memiliki kontribusi sebesar 6,03% pada tahun 2024.

Loans by Geographical Area

The distribution of Bank JTrust Indonesia's loans based on geography was still largely concentrated in Java, which accounted for 21.52% of the total credit portfolio in 2024. The Greater Metropolitan Jakarta area held the largest share of loan distribution, amounting to 70.67%. This was followed by Sumatera which contributed to a share of 6.03% in 2024.

Pinjaman berdasarkan Geografis	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loans based on Geographic Area
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
DKI Jakarta	18.748.387	16.922.358	14.463.667	10,79%	17,00%	Jakarta
Jawa	5.710.143	5.068.364	3.547.591	12,66%	42,87%	Java
Sumatera	1.598.904	1.399.300	1.238.730	14,26%	12,96%	Sumatera
Sulawesi	166.670	125.767	116.507	32,52%	7,95%	Sulawesi
Bali	145.853	174.484	118.556	-16,41%	47,17%	Bali
Kalimantan	158.109	189.565	46.896	-16,59%	304,22%	Kalimantan
Total	**26.528.066**	**23.879.838**	**19.531.947**	**11,09%**	**22,26%**	**Total**

Pinjaman yang diberikan Berdasarkan Jenis Penggunaannya

Komposisi kredit yang disalurkan Bank JTrust Indonesia terdiversifikasi, sehingga tingkat risiko dapat dikelola dengan baik. Pada tahun 2024, kredit modal kerja memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 63,18% dari total kredit Bank JTrust Indonesia, diikuti kredit investasi dengan kontribusi 25,53%.

Loans by the Type of Use

The composition of loans disbursed by Bank JTrust Indonesia is diversified, enabling effective management of the credit risk. In 2024, working capital loans had the largest contribution of 63.18% of the Bank's total loans portfolio, followed by investment loans at 25.53%.

Pinjaman berdasarkan Jenis Penggunaannya	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loans based on Utilization Type
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kredit modal kerja	16.759.442	11.244.470	7.961.639	49,05%	41,23%	Working capital loans
Kredit investasi	6.771.688	9.916.402	7.083.130	-31,71%	40,00%	Investment loans
Kredit rekening koran	980.070	891.704	923.900	9,91%	-3,48%	Current account loans

Pinjaman berdasarkan Jenis Penggunaannya	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loans based on Utilization Type
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kredit kendaraan bermotor	56.598	86.410	442.550	-34,50%	-80,47%	Vehicle loans
Kredit pemilikan rumah	389.443	266.309	124.074	46,24%	114,64%	Housing loans
Kredit ekspor impor	597.718	373.217	2.057.636	60,15%	-81,86%	Export import loans
Lain-lain	973.107	1.101.326	939.018	-11,64%	17,28%	Others
Total	**26.528.066**	**23.879.838**	**19.531.947**	**11,09%**	**22,26%**	**Total**

Pinjaman yang diberikan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Pada tahun 2024, kredit Bank JTrust Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp2.648,23 miliar atau 11,09% dibandingkan tahun lalu. Terdapat enam jenis sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan tersebut yaitu perantara keuangan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; pertambangan; dan pertanian, perburuan, dan kehutanan. Keenam sektor tersebut memiliki porsi terbesar dalam komposisi kredit Bank JTrust Indonesia berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2024 dengan kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 22,24%, 16,79%, 13,99%, 13,07%, 9,75%, dan 5,74%.

Loans by Economic Sector

In 2024, Bank JTrust Indonesia's loans saw a significant increase of Rp2,648.238 billion or 11.09% compared to the previous year. There were six types of economic sectors that largely contributed to this increase, namely financial agent; processing industry; wholesaler and retailer; real estate, rental business and services; mining; and agribusiness, hunting, and forestry. These six sectors had the largest portion in Bank JTrust Indonesia's credit composition based on economic sectors in 2024 with contributions from each sector amounting to 22,24%, 16.79%, 13.99%, 13.07%, 9.75%, and 5,74%.

Pinjaman berdasarkan Sektor Ekonomi	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loans based on Economic Sectors
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Perantara keuangan	5.899.620	5.692.993	4.463.133	3,63%	27,56%	Financial agent
Industri pengolahan	4.453.177	3.729.534	3.622.413	19,40%	2,96%	Processing industry
Pertambangan	2.587.049	3.513.880	2.213.603	-26,38%	58,74%	Mining
Perdagangan besar dan eceran	3.712.262	2.999.269	2.959.692	23,77%	1,34%	Wholesaler and retailer
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	3.468.430	2.828.289	2.095.238	22,63%	34,99%	Real estate, rental, and services
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	1.523.136	1.091.707	1.420.455	39,52%	-23,14%	Agribusiness, hunting and forestry
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	1.442.212	1.028.393	347.313	40,24%	196,10%	Transportation, warehousing, and communication
Konstruksi	1.223.192	1.010.437	828.782	21,06%	21,92%	Constructions
Rumah tangga	1.055.147	889.043	999.845	18,68%	-11,08%	Household
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	722.214	626.983	260.618	15,19%	140,58%	Supply of accommodation, food and beverages

Pinjaman berdasarkan Sektor Ekonomi	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loans based on Economic Sectors
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	417.569	441.211	71.667	-5,36%	515,64%	Lifestyle, social cultural, entertainment and other individuals
Listrik, gas dan air	23.812	28.099	249.188	-15,26%	-88,72%	Electricity, gas and water
Jasa kesehatan dan kegiatan social	246	-	-	100,00%	0%	Healthcare services and social activities
Total	**26.528.066**	**23.879.838**	**19.531.947**	**11,09%**	**22,26%**	**Total**

Pinjaman yang Diberikan Berdasarkan Segmentasi Bisnis

Berdasarkan segmentasi usaha, Perbankan Korporasi yang mewakili 79,21% dari total kredit yang disalurkan oleh Bank JTrust Indonesia naik 14,63% menjadi Rp21.012,45 miliar pada tahun 2024, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp18.330,63 miliar. Perbankan Hubungan Bisnis memberikan kontribusi terhadap total kredit Bank JTrust Indonesia sebesar 15,54%, turun sebesar 7,33% menjadi Rp4.123,18 miliar dari sebelumnya sebesar Rp4.449,47 miliar.

Loans by Business Segment

Based on business segmentation, Corporate Banking accounted for 79.21% of the total loan's portfolio of Bank JTrust Indonesia, increasing by 14.63% to Rp21,012.45 billion in 2024 from Rp18,330.63 billion in 2023. Business Linkage Banking contributed 15.54% of the total loan's portfolio, decreasing by 7.33% to Rp4,123.18 billion from previously Rp4,449.47 billion.

Pinjaman berdasarkan Segmentasi	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Loans based on Geographic Area
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Perbankan Korporasi	21.012.454	18.330.628	14.549.916	14,63%	25,98%	Corporate Banking
Hubungan Bisnis	4.123.182	4.449.468	4.047.785	-7,33%	9,92%	Business Linkage
Perbankan Konsumer	962.781	751.254	535.283	28,16%	40,35%	Consumer Banking
Perbankan UKM	429.649	348.488	398.963	23,29%	-12,65%	SME Banking
Total	**26.528.066**	**23.879.838**	**19.531.947**	**11,09%**	**22,26%**	**Total**

Porsi Pinjaman Bermasalah

Jumlah kredit bermasalah (non-performing loan atau NPL) mengalami kenaikan sebesar Rp271,40 miliar menjadi Rp517,37 miliar pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp245,96 miliar. Hal tersebut mengakibatkan rasio NPL bruto Bank JTrust Indonesia naik dari 1,03% pada tahun 2023 menjadi 1,95% pada tahun 2024.

Portion of Non-Performing Loans

The amount of Non-Performing Loan (NPL) increased by Rp271.40 billion to Rp517.37 billion in 2024 compared to Rp245.96 billion in 2023. This resulted in the increase of Bank JTrust Indonesia's gross NPL from 1.03% in 2023 to 1.95% in 2024.

NPL berdasarkan Kolektibilitas	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		NPL based on Collectability
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kurang Lancar	129.850	29.256	1.827	343,84%	1501,31%	Sub-standard
Diragukan	56.070	2.270	744	2370,04%	205,11%	Doubtful
Macet	331.446	214.438	348.509	54,56%	-38,47%	Loss
Total	**517.366**	**245.964**	**351.080**	**110,34%**	**-29,94%**	**Total**

Dari sisi sektor ekonomi, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam hal kredit bermasalah tahun 2024 adalah real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; dan perdagangan besar dan eceran. Masing-masing sebesar 31,04%, 20,76%, dan 18,33%.

In terms of the economic sector, those giving the largest contribution to the Bank's non-performing loans in 2024 were real estate, rental, and services; supply of accommodation, food and beverages; and wholesaler and retailer. Each sector contributed 31.04%, 20.76%, and 18.33%, respectively.

NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		NPL based on Geographic Area
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	107.404	107.404	107.404	0,00%	0,00%	Supply of accommodation, food and beverages
Rumah tangga	82.744	70.053	80.822	18,12%	-13,32%	Household
Perdagangan besar dan eceran	94.843	28.759	43.041	229,79%	-33,18%	Wholesaler and retailer
Real estate , usaha persewaan, dan jasa Perusahaan	160.609	17.789	617	802,86%	2783,14%	Real estate, rental, and services
Konstruksi	11.301	11.301	12.456	0,00%	-9,27%	Constructions
Industri pengolahan	55.306	5.306	31.960	942,33%	-83,40%	Processing industry
Jasa	4.935	4.181	71.667	18,03%	-94,17%	Services
Perantara Keuangan	-	575	575	-100,00%	0,00%	Financial Agent
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	-	-	2.538	0,00%	-100,00%	Transportation, warehousing, and communication
Lain-lain	224	596	-	-62,42%	0,00%	Others
Total	**517.366**	**245.964**	**351.080**	**110,34%**	**-29,94%**	**Total**

Cadangan Pinjaman Diberikan yang Mengalami Penurunan Nilai

Pada tahun 2024, kredit Bank JTrust Indonesia yang mengalami penurunan nilai (impaired loans) tercatat sebesar Rp517,37 miliar naik dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar Rp245,96 miliar. Sedangkan untuk rasio kredit yang mengalami penurunan nilai naik menjadi 1,95% pada tahun 2024 dari 1,03% pada

Allowances for Impairment Losses

In 2024, J Trust Bank's impaired loans were recorded at Rp517.37 billion, higher than Rp245.96 billion in 2023. Meanwhile, the impaired loan ratio increased to 1,95% in 2024 from 1.03% in 2023, due to an increase in outstanding loans of current debtors in 2024. Meanwhile, loan ratio that experienced a decrease in

tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya kenaikan outstanding loan untuk debitur lancar pada tahun 2024. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang dibukukan Bank JTrust Indonesia adalah sebagai berikut:

value increased to 1.95% in 2024, compared to 1.03% in 2023, this was due to an increase in outstanding loan for performing debtors in 2024..Changes in the allowance for impairment losses recorded by J Trust Bank are as follows:

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Movement in Allowances for Impairment Losses
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Saldo awal tahun	147.255	163.590	211.697	-9,99%	-22,72%	Balance at beginning of the year
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	61.455	11.839	(7.085)	419,09%	-267,10%	Impairment during the year
Penghapusan selama tahun berjalan	(407)	(465)	(48.693)	-12,47%	-99,05%	Write-offs during the year
Lain-lain*	(10.761)	(27.709)	7.671	-61,16%	-461,22%	Others*
Saldo akhir tahun	197.542	147.255	163.590	34,15%	-9,99%	Balance at end of the year

*) Termasuk pemulihan yang timbul dari unwinding interest, selisih kurs karena penjabaran mata uang asing dan penjualan kredit bermasalah.
Including recoveries from unwinding interest, exchange differences due to foreign currency translation and sale of non-performing loans.

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang dibentuk telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman.

The allowance for loan impairment losses was in accordance with applicable accounting principles and was adequate to cover losses that may emerge because of uncollectible loans.

Tagihan Akseptasi – Neto

Tagihan akseptasi pada tahun 2024 tercatat sebesar nihil dan mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12,16 miliar. Penurunan disebabkan karena adanya penurunan tagihan akseptasi mata uang asing dan Rupiah sebesar Rp12,16 miliar.

Acceptance Receivables – Net

Acceptance receivables in 2024 was recorded at nil and decreased by 100% compared to Rp12.16 billion in 2023. This decrease was primarily due to the decrease in foreign currency acceptance claims of Rp12.16 billion.

Tagihan Akseptasi - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Acceptance Receivables - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pihak Ketiga						**Third parties**
Rupiah	-	10.935	2.823	-100,00%	287,35%	Rupiah
Mata uang asing	-	1.222	75.572	-100,00%	-98,38%	Foreign currencies
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1)	(327)	-100,00%	-99,69%	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah Tagihan Akseptasi - Neto	**-**	**12.156**	**78.068**	**-100,00%**	**-84,43%**	**Total Acceptance Receivables - Net**

Tagihan Derivatif

Tagihan derivatif mengalami penurunan sebesar Rp13,92 miliar menjadi Rp4,99 miliar pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp18,91 miliar. Penurunan disebabkan oleh turunnya transaksi *forward-sell* mata uang dolar Amerika Serikat.

Derivative Receivables

Derivatives receivables decrease of Rp13.92 billion amounted to Rp4.99 billion in 2024, from Rp18.91 billion in 2023. The decrease was mainly due to decrease in US Dollar forward-sell transaction.

Tagihan Derivatif	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Derivative Receivables
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pihak Ketiga						**Third parties**
Mata uang asing	4.987	18.906	12.322	-73,62%	53,43%	Foreign currencies
Jumlah Tagihan Derivatif	**4.987**	**18.906**	**12.322**	**-73,62%**	**53,43%**	**Total Derivative Receivables**

Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih harus diterima pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp187,73 miliar dan mengalami penurunan sebesar 9,36% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp207,12 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan atas pendapatan bunga yang masih harus diterima dari pinjaman, efek-efek, dan penempatan pada bank lain.

Accrued Interest Income

Accrued interest income in 2024 amounted to Rp187.73 billion and increased by 9.36% compared to 2023 of Rp207.12 billion. This decrease was caused of accrued interest income from loans, marketable securities, and placements with another bank.

Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Accrued Interest Income
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rupiah	177.006	187.511	169.365	-5,60%	10,71%	Rupiah
Mata uang asing	10.719	19.610	15.992	-45,34%	22,62%	Foreign currencies
Jumlah Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima	**187.725**	**207.121**	**185.357**	**-9,36%**	**11,74%**	**Total Accrued Interest Income**

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka dan uang muka pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.732,47 miliar dan mengalami penurunan sebesar 4,27% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.854,3 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penjaminan kredit dibayar dimuka sebesar Rp161,99 miliar pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses and advances in 2024 amounted to Rp2,732.47 billion and decreased by 4.27% compared to Rp2,854.3 billion in 2023. This decrease was due to prepaid credit guarantees amounted to Rp161.99 billion in 2024 compared to the previous year.

Biaya Dibayar dimuka dan Uang Muka	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Prepaid Expenses and Advances
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Biaya Dibayar Dimuka dan uang Muka	2.732.467	2.854.304	3.018.983	-4,27%	-5,45%	Prepaid Expenses and Advances
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan uang Muka	**2.732.467**	**2.854.304**	**3.018.983**	**-4,27%**	**-5,45%**	**Total Prepaid Expenses and Advances**

Aset Pajak Tangguhan

Pada tahun 2024, terdapat penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp97,92 miliar menjadi Rp226,67 miliar dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp324,59 miliar. Penurunan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian atas akumulasi rugi fiskal.

Deferred tax assets

In 2024, deferred tax assets increased by Rp97.92 billion to Rp226.67 billion as of the end of 2024, compared to Rp324.59 billion in 2023. The decrease was due to adjustment to deferred tax on accumulated fiscal loss.

Aset Pajak Tangguhan	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Deferred Tax Assets
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Pajak Tangguhan	226.668	324.591	320.039	-30,17%	1,42%	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**226.668**	**324.591**	**320.039**	**-30,17%**	**1,42%**	**Total Deferred Tax Assets**

Aset Tetap - Neto

Aset tetap Bank terdiri dari tanah, bangunan, perabot, inventaris kantor, dan kendaraan. Pada akhir 2024, aset tetap-neto Bank berjumlah Rp438,87 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 98,48% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp221,11 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2024, Bank membeli sebidang tanah di Jakarta yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Bank dengan total harga perolehan sebesar Rp209,23 miliar.

Fixed Assets - Net

The Bank's fixed assets consist of land, buildings, office equipment, and vehicles. At the end of 2024, the Bank's fixed assets-net amounted to Rp438.87 billion and increased by 98.48% compared to 2023 of Rp221.11 billion. The increase occurred as during 2024, the Bank purchased land in Jakarta to support its operational activities, with a total acquisition cost of Rp209.23 billion.

Aset Tetap - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Fixed Assets - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentase (%)	
Biaya/Nilai Revaluasi						**Revalued Amount/Cost**
Hak atas tanah	370.301	161.067	161.067	129,90%	0,00%	Land rights
Bangunan	24.928	24.928	24.928	0,00%	0,00%	Buildings
Inventaris Kantor	104.004	86.506	76.131	20,23%	13,63%	Office Equipment
Kendaraan	26.683	24.306	20.727	9,78%	17,27%	Vehicles
Total Biaya/Nilai Revaluasi	525.916	296.807	282.853	77,19%	4,93%	Total Revalued Amount/Cost

Aset Tetap - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Fixed Assets - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	2.492	1.246	-	100,00%	100,00%	Buildings
Inventaris Kantor	75.466	67.878	63.227	11,18%	7,36%	Office Equipment
Kendaraan	9.084	6.569	3.801	38,29%	72,82%	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	87.042	75.693	67.028	14,99%	12,93%	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	438.874	221.114	215.825	98,48%	2,45%	Net Book Value

Aset Tidak Berwujud – Neto

Aset tak berwujud Bank terdiri dari perangkat lunak dan lisensi. Pada akhir 2024, aset tak berwujud-neto Bank berjumlah Rp90,34 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 22,64% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp73,66 miliar. Kenaikan disebabkan karena adanya pergantian core banking baru pada tahun 2024.

Intangible Assets – Net

Intangible assets of the Bank consist of software and license. At the end of 2024, the Bank's intangible assets-net amounted to Rp90.34 billion and increased by 22.64% compared to 2023 of Rp73.66 billion. The increase was due to the replacement of new core banking in 2024.

Aset takberwujud - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Intangible assets - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Harga Perolehan	296.048	262.824	255.194	12,64%	2,99%	Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	205.712	189.164	173.574	8,75%	8,98%	Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	90.336	73.660	81.620	22,64%	-9,75%	Net Book Value

Aset Hak-Guna – Neto

Bank menyewa beberapa aset seperti bangunan dan kendaraan, dengan rata-rata masa sewa lebih dari 1 tahun sampai dengan 25 tahun. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa bernilai rendah untuk sewa dengan nilai pembayaran sewa dibawah Rp75 juta. Aset hak-guna Bank terdiri dari sewa bangunan. Pada akhir 2024, aset hak-guna neto Bank berjumlah Rp54,25 miliar dan mengalami penurunan sebesar 41,51% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp92,76 miliar.

Right-of-Use Assets – Net

The Bank leases several assets such as buildings, with the average lease period of more than 1 year to 25 years. The Bank applies the recognition on low-value assets for leases with lease payments below Rp75 million. At the end of 2024, the Bank's right-of-use assets - net amounted to Rp54.25 billion and decreased by 41.51% compared to 2023 of Rp92.76 billion.

Aset Hak-Guna - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Right-of-use Assets - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Harga Perolehan	144.614	146.835	248.794	-1,51%	-40,98%	Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	90.364	54.078	122.572	67,10%	-55,88%	Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	54.250	92.757	126.222	-41,51%	-26,51%	Net Book Value

Agunan yang Diambil Alih – Neto

Agunan yang diambil alih pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9,89 miliar menjadi Rp93,12 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp83,24 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penjualan sebesar Rp18,22 miliar serta perubahan nilai cadangan kerugian penurunan AYDA tercatat sebesar Rp160,65 miliar dikarenakan ada penyesuaian nilai likuiditas atas penilaian ulang AYDA Bank yang dilakukan oleh appraisal. Manajemen berpendapat bahwa pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Foreclosed Assets – Net

The amount of foreclosed assets in 2024 increased by Rp9.89 billion to Rp93.12 billion compared to Rp83.24 billion in 2023. This was due to write-off amounting to Rp18.22 billion and change in allowance for impairment losses for AYDA recorded at Rp160.65 billion due to adjustment in the liquidity value of the Bank's AYDA revaluation carried out by an appraisal. The management believed that allowance for impairment losses on foreclosed assets is adequate to cover any possible losses.

Agunan yang Diambil Alih - Neto	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Foreclosed Assets - Net
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Agunan yang Diambil Alih - Neto	93.124	83.238	99.709	11,88%	-16,52%	Foreclosed Assets - Net
Jumlah Agunan yang Diambil Alih - Neto	**93.124**	**83.238**	**99.709**	**11,88%**	**-16,52%**	**Total Foreclosed Assets - Net**

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain pada tahun 2024 adalah sebesar Rp165,85 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 27,93% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp129,64 miliar.

Other Assets

Other assets in 2024 amounted to Rp165.85 billion and increased by 27.93% compared to Rp129.64 billion in 2023.

Aset Lain-lain	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Other Assets
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Lain-lain	165.848	129.644	74.381	27,93%	74,30%	Other Assets
Jumlah Aset Lain-lain	**165.848**	**129.644**	**74.381**	**27,93%**	**74,30%**	**Total Other Assets**

Liabilitas

Pertumbuhan kredit Bank pada tahun 2024 didukung oleh pertumbuhan simpanan nasabah yang meningkat sebesar 5,92% dibandingkan tahun 2023. Meskipun komposisi simpanan nasabah terutama dikontribusi oleh deposito berjangka, komposisi CASA Bank tumbuh menjadi 15,14%.

Pertumbuhan simpanan nasabah berdampak pada kenaikan total liabilitas Bank yang tumbuh sebesar 2,79% dari Rp35.474,58 miliar di tahun 2023 menjadi Rp36.464,54 miliar di tahun 2024.

Liabilities

The Bank's loan growth in 2024 supported by the growth in customer deposits which rose by 5.92% compared to 2023. Although the composition of customer deposits was mainly contributed by time deposits, the Bank's CASA composition grew to 15.14%.

The growth in customer deposits impacted the increase in the Bank's total liabilities, which grew by 2.79% from Rp35,474.58 billion in 2023 to Rp36,464.54 billion in 2024.

Liabilitas	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Liabilities
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas segera	50.385	86.614	71.012	-41,83%	21,97%	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	33.899.527	32.005.631	25.661.181	5,92%	24,72%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.324.117	3.215.559	3.955.279	-27,72%	-18,70%	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	7.745	343	381	2158,02%	-9,97%	Derivative payables
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	0,00%	0%	Securities sold under repurchase agreement
Liabilitas akseptasi	-	12.157	78.395	-100,00%	-84,49%	Acceptance payables
Utang pajak	39.362	33.736	23.657	16,68%	42,60%	Taxes payable
Bunga yang masih harus dibayar	107.921	87.123	60.658	23,87%	43,63%	Accrued interest expenses
Liabilitas imbalan kerja	23.834	22.112	19.257	7,79%	14,83%	Employee benefits liability
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	11.306	21.195	3,03%	-46,66%	Accrued expenses and other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**36.464.540**	**35.474.581**	**29.891.015**	**2,79%**	**18,68%**	**TOTAL LIABILITIES**

Liabilitas Segera

Pada tahun 2024, liabilitas segera Bank tercatat sebesar Rp50,39 miliar dan mengalami penurunan sebesar 41,83% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp86,61 miliar.

Immediately Due Liabilities

In 2024, the Bank's obligations due immediately were recorded at Rp50.39 billion, falling by 41.83% compared with Rp86.61 billion in 2023.

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah Bank terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka. Jumlah simpanan dari nasabah Bank JTrust Indonesia pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp33.899,53 miliar, naik 5,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp32.005,63 miliar. Deposito berjangka masih memberikan kontribusi terbesar terhadap simpanan dari nasabah Bank JTrust Indonesia dengan kontribusi sebesar 84,86% atau Rp28.768,54 miliar.

Customer Deposits

Customer deposits consist of demand deposits, savings deposits, and time deposits. The amount of customer deposits at Bank JTrust Indonesia at the end of 2024 reached Rp33,899.53 billion, an increase of 5.92% from Rp32,005.63 billion in 2023. Time deposits remained the largest source for customer deposits of Bank JTrust Indonesia, contributing 84.86% or Rp28.768,54 billion.

CASA rasio pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,14%, naik 1,19% dibandingkan tahun 2023 sebesar 13,94%. Hal ini sejalan dengan peningkatan volume kredit yang besar serta penggunaan transaksi dengan menggunakan giro Bank yang juga meningkat.

CASA ratio in 2024 reached 15.14%, an increase of 1.19% from 13.94% in 2023. This was in line with the significant growth in credit volume and increasing transactions using the Bank's demand deposits.

Simpanan dari Nasabah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Customer Deposits
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Deposito berjangka	28.768.535	27.543.379	22.125.914	4,45%	24,48%	Time deposits
Tabungan	2.134.541	2.012.614	1.976.976	6,06%	1,80%	Savings deposits
Giro	2.996.451	2.449.638	1.558.291	22,32%	57,20%	Demand deposits
Total	**33.899.527**	**32.005.631**	**25.661.181**	**5,92%**	**24,72%**	**Total**

Simpanan Nasabah Berdasarkan Mata Uang

Pada tahun 2024, rekening dalam mata uang Rupiah masih mendominasi simpanan dari nasabah yang berhasil dihimpun Bank JTrust Indonesia, dengan kontribusi sebesar 92,43% atau setara dengan Rp31.334,87 miliar, sedangkan sisanya sebesar 7,57% atau setara dengan Rp2.564,66 miliar adalah simpanan dari nasabah dalam valuta asing. Komposisi tersebut tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana porsi simpanan dari nasabah dalam rupiah dan valas masing-masing sebesar 92,88% dan 7,12%.

Customer Deposits by Currency

In 2024, Rupiah denominated accounts still dominated customer deposits of Bank JTrust Indonesia, with a contribution of 92.43% or equivalent to Rp31,334.87 billion, whereas the remaining portion of 7.57% or equivalent to Rp2,564.66 billion were deposits in foreign currencies. This composition did not change much from the previous year, when the portion of customer deposits in rupiah and foreign currency denominations were 92.88% and 7.12%, respectively.

Simpanan Nasabah berdasarkan Mata Uang	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Customer Deposits by Currency
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Deposito berjangka						**Time deposits**
Rupiah	26.761.879	25.703.294	20.292.211	4,12%	26,67%	Rupiah
Mata uang asing	2.006.656	1.840.085	1.833.703	9,05%	0,35%	Foreign Currency
Tabungan						**Savings deposits**
Rupiah	2.097.175	1.995.920	1.976.976	5,07%	0,96%	Rupiah
Mata uang asing	37.366	16.694	-	123,83%	0,00%	Foreign Currency
Giro						**Demand deposits**
Rupiah	2.475.812	2.028.400	1.092.974	22,06%	85,59%	Rupiah
Mata uang asing	520.639	421.238	465.317	23,60%	-9,47%	Foreign Currency
Total	**33.899.527**	**32.005.631**	**25.661.181**	**5,92%**	**24,72%**	**Total**

Komposisi Deposito Berjangka berdasarkan Jangka Waktu Kontrak

Pada tahun 2024, produk deposito berjangka Bank JTrust Indonesia terdiversifikasi dengan baik. Deposito berjangka dengan tenor kurang dari satu bulan masih memiliki porsi terbesar dengan kontribusi 44,10% atau Rp12.687,14 miliar. Jumlah tersebut naik 1,31% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah Rp12.522,65 miliar dari tahun lalu. Deposito berjangka dengan tenor dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga bulan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 15,52% dibandingkan dengan tahun lalu.

Composition of Time Deposits by Maturity

In 2024, Bank JTrust Indonesia's time deposits were well diversified. Time deposits with maturity of less than 1 month still had the highest share, contributing 44.10% or Rp12,687.14 billion. That amount increased by 1.31% from Rp12,522.65 billion from the previous year. Time deposits with maturity of three up to six months had the highest growth in 2024, growing by 15.52% from the previous year.

Deposito Berjangka	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Time Deposits
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kurang dari 1 bulan	12.687.136	12.522.649	10.970.280	1,31%	14,15%	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	9.936.524	8.601.756	6.642.108	15,52%	29,50%	1 up to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	4.314.066	3.806.748	2.009.504	13,33%	89,44%	3 up to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	1.830.809	2.612.226	2.504.022	-29,91%	4,32%	6 up to 12 months
Total	**28.768.535**	**27.543.379**	**22.125.914**	**4,45%**	**24,48%**	**Total**

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka. Jumlah simpanan nasabah mengalami penurunan sebesar 27,72% dari tahun sebelumnya yaitu Rp3.215,56 miliar menjadi Rp2.324,12 miliar

Deposits from Other Banks

Deposits from other banks consist of demand deposits, savings deposits, and time deposits. The number of customer deposits decreased by 27.72% from the previous year of Rp3,215.56 billion to Rp2,324.12 billion.

Simpanan dari Bank Lain	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Deposits from Other Banks
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Deposito berjangka	1.561.818	1.422.988	2.403.480	9,76%	-40,79%	Time deposits
Giro	566.115	945.524	640.360	-40,13%	47,66%	Demand deposits
Tabungan	196.184	275.047	311.439	-28,67%	-11,69%	Savings deposits
Call Money	-	572.000	600.000	-100,00%	-4,67%	Call Money
Total	**2.324.117**	**3.215.559**	**3.955.279**	**-27,72%**	**-18,70%**	**Total**

Suku bunga rata-rata setahun dari simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

Average annual interest rates of customer deposits are as follows:

Suku Bunga Rata-Rata	2024		2023		2022	
	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas
Deposito berjangka	5,99%	3,32%	5,67%	2,26%	4,64%	1,30%
Tabungan	0,41%	1,24%	0,50%	1,03%	0,75%	0,00%
Giro	0,49%	0,55%	0,55%	0,74%	0,56%	0,54%

Simpanan dari Bank Lain Berdasarkan Mata Uang

Pada tahun 2024, komposisi simpanan dari bank lain memiliki komposisi 100% dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 2024, simpanan dari bank lain dalam Rupiah tercatat turun sebesar 27,72% atau Rp891,44 miliar menjadi Rp2.324,12 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.215,56 miliar.

Deposits from Other Banks by Currency

In 2024, the composition of deposits from other banks in Rupiah currency was 100%, which decreased by 27.72% or Rp891.44 billion to Rp2,324.12 billion from Rp3,215.56 billion in 2023.

Liabilitas Derivatif

Pada tahun 2024, liabilitas derivatif Bank tercatat Rp7,75 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp0,34 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya transaksi spot dalam mata uang asing.

Derivative Payables

In 2024, the Bank's derivative payables were recorded at Rp7.75 billion compared to Rp0.34 billion in 2023. This decrease was due to spot transactions in foreign currency.

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi Bank tercatat nihil dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp12,16 miliar. Penurunan disebabkan karena adanya penurunan liabilitas akseptasi mata uang asing dan Rupiah sebesar Rp12,16 miliar dengan debitur PT Pro Energi dan PT Kobexindo Tractors Tbk di tahun 2023.

Acceptance Payables

Bank's acceptance payables were recorded at nil compared to Rp12.16 billion in 2023. This decrease was primarily due to the decrease in foreign currency acceptance payables of Rp12.16 billion with PT Pro Energi and PT Kobexindo Tractors Tbk in 2023.

Utang Pajak

Utang pajak Bank tercatat Rp39,36 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp33,74 miliar. Kenaikan disebabkan oleh naiknya utang pajak atas PPh Final pasal 4 ayat 2.

Tax Payables

The Bank's tax payables were recorded at Rp39.36 billion compared to Rp33.74 billion in 2023. The increase was caused by tax payables on final withholding tax under article 4 paragraph 2.

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Bunga yang masih harus dibayar Bank tercatat Rp107,92 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp87,12 miliar. Kenaikan ini disebabkan dari transaksi mata uang rupiah dan mata uang asing lainnya.

Accrued Interest Expenses

The Bank's accrued interest expenses were recorded at Rp107.92 billion compared to Rp87.12 billion in 2023. The increase was due to Rupiah and other foreign currency transactions.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tahun 2024, liabilitas imbalan kerja Bank tercatat sebesar Rp23,83 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 7,79% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp22,11 miliar. Bank telah menghitung dan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perjanjian kerja bersama Bank dan PSAK 24,

Employee Benefits Liability

In 2024, the Bank's employee benefits liability was recorded at Rp23.83 billion and increased by 7.79% compared to Rp22.11 billion in 2023. The Bank has calculated and recorded the employee benefits liability based on the Bank's collective labour agreement and PSAK 24, "Employee Benefits". The employee benefits

"Imbalan Kerja". Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung oleh Aktuaris Independen.

liability as of December 31, 2024, was calculated by an Independent Actuary.

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain

Pada tahun 2024, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Bank tercatat Rp11,65 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp11,31 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pencadangan pembayaran.

Accrued Expenses and Other Liabilities

In 2024, the Bank's accrued expenses and other liabilities were recorded at Rp11.65 billion compared to Rp11.31 billion in 2023. The increase was due to additional allowances.

Ekuitas

Pada tahun 2024, total ekuitas Bank sebesar Rp3.794,16 miliar, meningkat 0,92% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp3.759,73 miliar.

Equity

In 2024, the Bank's total equity was Rp3,794.16 billion, an increase of 0.92% from Rp3,759.73 billion in 2023.

Ekuitas	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Equity
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	13.032.929	13.032.929	13.032.929	0,00%	0,00%	Issued and fully paid capital
Tambahan modal disetor	1.915.423	1.915.423	1.915.423	0,00%	0,00%	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain	1.053.735	1.001.860	1.001.860	5,18%	0,00%	Other components of equity
Kerugian aktuarial	(9.087)	(8.980)	(10.430)	1,19%	-13,90%	Actuarial loss
Surplus revaluasi aset tetap - neto	146.976	146.976	146.976	0,00%	0,00%	Revaluation surplus of fixed assets - net
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(28.319)	(8.144)	(12.148)	247,73%	-32,96%	Unrealized Gain (Loss) on changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Saldo rugi	(12.317.501)	(12.320.333)	(12.348.235)	-0,02%	-0,23%	Deficit
Total Ekuitas	**3.794.156**	**3.759.731**	**3.726.375**	**0,92%**	**0,90%**	**Total Equity**

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, modal ditempatkan dan disetor penuh tidak mengalami perubahan. susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Bank berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia.

Issued and Fully Paid Capital

As of December 31, 2024, and 2023, the issued and fully paid-up capital did not change. The Bank's shareholders and its share ownership were based on the report from the Shares Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia.

Tambahan Modal Disetor

Tidak terdapat peningkatan atas tambahan modal disetor pada tahun 2024, masih sebesar Rp1.915,42 miliar.

Additional Paid-up Capital

There was no increase in additional paid-in capital in 2024 amounted to Rp1,915.42 billion.

Komponen Ekuitas Lain

Pada tanggal 17 Desember 2024, Bank menerima dana setoran modal dari JTrust Co., Ltd., sebesar Rp51,88 miliar. Berdasarkan Surat OJK No. S-34/PB.312/2024 tanggal 24 Desember 2024, OJK menyetujui pencatatan dana setoran modal sebesar Rp51,88 miliar dari JTrust Co., Ltd., dan diperhitungkan sebagai komponen modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 31 Desember 2024 beserta dengan rencana penggunaan pada instrumen Depo Facility Bank Indonesia (DF), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan/atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

Other Equity Component

On December 17, 2024, the Bank received a capital deposit of Rp51.88 billion from JTrust Co., Ltd. Based on OJK's Letter No. S-34/PB.312/2024 dated December 24, 2024, OJK has approved the capital deposit from JTrust Co., Ltd., amounted to Rp51.88 billion and calculated as core capital component in the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for the December 31, 2024 position period along with the plan to use instruments in Bank Indonesia Depo Facility (DF), Bank Indonesia Rupiah Securities, and/or Bank Indonesia Deposit Certificate.

Kerugian Aktuarial

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang terjadi dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pada tahun 2024, kerugian aktuarial mengalami penurunan sebesar 1,19% atau Rp107 juta menjadi Rp9,08 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian sebesar Rp8,98 miliar.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh Aktuaris Independen, KKA Azwir Arifin dan Rekan, dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 Januari 2025 dan 2 Januari 2024. Bank menyelenggarakan dana pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Iuran pensiun ditanggung oleh Bank. Pendanaan tersebut diperhitungkan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja.

Actuarial Losses

Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they occur.

In 2024, actuarial losses decreased 1.19% or Rp107 million to Rp9.08 billion from the previous year's losses of Rp8.98.

The employee benefits liability as of December 31, 2024, and 2023 was calculated by Independent Actuary, KKA Azwir Arifin and Partners, on its report dated January 8, 2025, and January 2, 2024, respectively. The Bank has a pension fund covering substantially all its qualified permanent employees managed by Financial Institution Pension Fund Sinarmas MSIG. Retirement contributions are funded by the Bank. The funding is included in the employee benefits liability calculation.

Surplus Revaluasi Aset Tetap – Neto

Hak atas tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah ditinjau oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilai independen profesional KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan berdasarkan laporan penilaian No. 00458/2.0059-02/PI/07/0242/1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar (market approach) dan pendekatan pendapatan (income approach) untuk hak atas tanah dan bangunan berupa ruko, sementara pendekatan pendapatan (income approach) dan pendekatan biaya (cost approach) untuk penilaian tanah, bangunan, dan sarana pelengkap berupa gedung kantor.

Revaluation Surplus of Fixed Assets - Net

Land rights and buildings were recorded based on revaluation value, as reviewed by the management and supported by independent professional appraiser KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan based on its report No. 00458/2.0059-02/PI/07/0242/1/XII/2022 dated December 27, 2022. The method of approach used is market approach and income approach for land and building rights in the form of shop houses, while income approach and cost approach are used for the valuation of lands, buildings, and complementary facilities in the form of office buildings.

Keuntungan/Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Tersedia untuk Dijual).

Unrealized Gain/Loss on Changes in Fair Value of Marketable Securities through Other Comprehensive Income (Available for Sale).

Pada tahun 2024, kerugian yang belum direalisasikan atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain naik sebesar 247,73% atau sebesar Rp20,18 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian sebesar Rp8,14 miliar. Hal ini dikarenakan penurunan nilai Mark-to-Market atas efek-efek yang dimiliki Bank pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

In 2024, the unrealized gain on marketable securities on fair value through other comprehensive income increased 247.73% or Rp20.18 billion from an unrealized gain of Rp8.14 billion posted in the previous year. This is due to the decrease in the Mark-to-Market rate of marketable securities owned by the Bank in 2024 compared to 2023.

Saldo Rugi

Saldo Rugi Bank terdiri dari saldo rugi yang sudah ditentukan penggunaannya, dan yang belum ditentukan penggunaannya.

- Tidak terdapat perubahan saldo rugi yang ditentukan penggunaannya pada tahun 2024. Nilainya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1 miliar.
- Pada akhir tahun 2024, saldo rugi yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp12.317,5 miliar, mengalami penurunan 0,02% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp12.320,33 miliar.

Deficit

The Bank's deficit consists of an appropriated and unappropriated deficit.

- There was no change in appropriated deficit in 2024. As of December 31, 2024, and December 31, 2023, the deficit amounted to Rp1 billion.
- At the end of 2024, the unappropriated deficit was Rp12,317.5 billion, a decrease of 0.02% compared to Rp12,320.33 billion in 2023.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Bunga	3.024.176	2.525.270	1.678.244	19,76%	50,47%	Interest income
Beban Bunga	(2.222.046)	(1.720.209)	(1.050.597)	29,17%	63,74%	Interest expenses
Pendapatan Bunga - neto	802.130	805.061	627.647	-0,36%	28,27%	Interest income - net
Pendapatan Operasional Lainnya	414.573	255.800	599.801	62,07%	-57,35%	Total other operating income
Beban Operasional Lainnya	(1.118.310)	(1.035.989)	(1.182.263)	7,95%	-12,37%	Total other operating expenses
Laba Operasional	98.393	24.872	45.185	295,60%	-44,96%	Profit (Loss) From Operations
Pendapatan non-operasional	12.090	15.163	11.396	-20,27%	33,06%	Non-operating income
Beban non-operasional	(4.007)	(18.225)	(9.334)	-78,01%	95,25%	Non-operating expenses
Pendapatan (Beban) Non-Operasional - neto	8.083	(3.062)	2.062	-363,98%	-248,50%	Non-Operating Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	106.476	21.810	47.247	388,20%	-53,84%	Profit (Loss) Before Tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	(103.644)	6.092	39.374	-1.801,31%	-84,53%	Income Tax Benefit - Net
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.832	27.902	86.621	-89,85%	-67,79%	Profit (Loss) For the Year
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(20.282)	5.454	(18.713)	-471,87%	-129,15%	Other Comprehensive Income (Loss)
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	**(17.450)**	**33.356**	**67.908**	**-152,31%**	**-50,88%**	**Total Comprehensive Income (Loss) For the Year**

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga yang dicapai Bank pada 31 Desember 2024 sebesar Rp3.024,18 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp498,91 miliar atau 19,76% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2.525,27 miliar. Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan memiliki kontribusi sebesar 80,92% dari total pendapatan bunga pada tahun 2024, dilanjutkan dengan pendapatan bunga efek-efek sebesar 15,84% dan pendapatan bunga atas giro penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar 3,24%. Peningkatan pendapatan bunga pada tahun 2024 disebabkan adanya peningkatan penerimaan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp448,09 miliar atau sebesar 22,42% dari tahun lalu.

Interest Income

The Bank's interest income as of December 31, 2024, was Rp3,024.18 billion, increased by Rp498.91 billion or 19.76% compared to 2023 which was recorded at Rp2,525.27 billion. Loan interest income provided contributed 80.92% of total interest income in 2024, followed by securities interest income of 15.84% and interest income on placements with Bank Indonesia and other banks by 3.24%. Interest income increased in 2024 mostly because of the increase in interest income from loans at Rp448.09 billion or 22.42% from the previous year.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pinjaman yang diberikan	2.447.100	1.999.015	1.318.048	22,42%	51,66%	Loans
Efek-efek	479.011	493.405	344.512	-2,92%	43,22%	Marketable securities
Penempatan pada BI dan bank lain	98.065	32.850	15.684	198,52%	109,45%	Placements with BI and other banks
Jumlah Pendapatan Bunga	**3.024.176**	**2.525.270**	**1.678.244**	**19,76%**	**50,47%**	**Total Interest Income**

Beban Bunga

Beban bunga pada tahun 2024 sebesar Rp2.222,05 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 29,17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.720,21 miliar. Beban bunga simpanan nasabah memberikan kontribusi sebesar 91,16% dari beban bunga tahun 2024, diikuti simpanan dari bank lain sebesar 8,68%, provisi dan komisi sebesar 0,17%. Kenaikan beban bunga disebabkan adanya kenaikan beban bunga deposito berjangka sebesar Rp464,54 miliar atau setara 33,41% dan beban bunga simpanan giro sebesar Rp35,71 miliar atau 71,17% dari tahun sebelumnya.

Interest Expenses

Interest expenses in 2024 amounted to Rp2,222.05 billion and increased by 29.17% compared to the previous year of Rp1,720.21 billion. Interest expense on customer deposits contributed 91.16% of interest expenses in 2024, followed by deposits from other banks of 8.68%, provision and commission of 0.17%. Total interest expenses increase was mainly due to increases in interest expenses of time deposits amounted Rp464.54 billion or 33.41% and interest expenses of demand deposits amounted Rp35.71 billion or 71.17% from the previous year.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Simpanan Nasabah						**Deposits from Customers**
Deposito Berjangka	1.855.153	1.390.610	759.927	33,41%	82,99%	Time Deposits
Tabungan	84.461	84.642	88.838	-0,21%	-4,72%	Savings
Giro	85.896	50.182	28.173	71,17%	78,12%	Current Accounts
Simpanan dari bank lain	192.810	186.731	164.026	3,26%	13,84%	Deposits from Other Banks
Provisi dan komisi	3.723	8.044	8.774	-53,72%	-8,32%	Provision and commission
Efek-efek	3	-	859	100,00%	-100,00%	Marketable securities
Jumlah Beban Bunga	**2.222.046**	**1.720.209**	**1.050.597**	**29,17%**	**63,74%**	**Total Interest Expense**

Pendapatan Bunga – Neto

Pendapatan bunga bersih yang dihasilkan selama tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,36% atau sebesar Rp2,93 miliar dari Rp805,06 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp802,13 miliar pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya dana di tengah persaingan meningkatkan perolehan simpanan nasabah dan pemberlakukan suku bunga pinjaman yang kompetitif dalam melakukan ekspansi kredit yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Bank. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini adalah penerimaan dukungan operasional, keuntungan kurs mata uang asing, provisi lain-lain, provisi, administrasi dan penalti pinjaman yang diberikan, dan lain-lain. Pendapatan operasional lainnya pada akhir Desember 2024 sebesar Rp414,57 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 62,07% dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar Rp255,8 miliar.

Interest Income - Net

Net interest income generated in 2024 decreased by 0,36% or Rp2.93 billion from Rp805.06 billion in 2023 to Rp802,13 billion in 2024. This is in line with decreasing loans to corporations and the public compared to the previous year. This was mainly due to the increase in funding costs amidst competition to increase customer deposits and the implementation of competitive loan interest rates in carrying out credit expansion prudently.

Other Operating Income

Other operating income comes from revenue other than main activities of the Bank. This revenue includes receipt of operational support, gains on foreign exchange, other provisions, loan fees, administration and penalties, and others. Other operating income at the end of December 2024 amounted to Rp414.57 billion and increased by 62.07% compared to 2023 which was recorded at Rp255.8 billion.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Keuntungan kurs mata uang asing - neto	31.905	4.406	16.759	624,13%	-73,71%	Gains on foreign exchange - net
Provisi lain-lain	3.613	2.968	7.814	21,73%	-62,02%	Other provisions
Provisi, administrasi dan penalti pinjaman yang diberikan	61.802	18.866	6.919	227,58%	172,67%	Loan fees, administration and penalties
Keuntungan atas penjualan efek-efek - neto	7.032	10.625	24.056	-33,82%	-55,83%	Gains on sale of marketable securities - net
Penerimaan dukungan operasional	300.000	210.000	520.000	42,86%	-59,62%	Receipt of operational support
Lain-lain	10.221	8.935	24.253	14,39%	-63,16%	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**414.573**	**255.800**	**599.801**	**62,07%**	**-57,35%**	**Total other operating income**

Beban Operasional Lainnya

Total beban operasional lainnya yang terjadi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp1,19 triliun dan mengalami kenaikan sebesar Rp82,32 miliar atau 7,95% dari jumlah biaya operasional lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.035,99 miliar. Beban umum dan administrasi dan beban gaji dan tunjangan memiliki kontribusi terbesar dalam beban operasional lainnya sebesar 62,75% dan 32,19%. Kenaikan dari beban operasional lainnya disebabkan oleh adanya kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai - neto sebesar Rp22,50 miliar dari tahun sebelumnya.

Other Operating Expenses

Total other operating expenses that occurred during 2024 amounted to Rp1.19 trillion and increased by Rp82.32 billion or 7.95% from total other operating expenses in 2023 of Rp1.035.99 billion. General and administrative expenses and salaries and allowances expenses had the biggest contribution in other operating expenses with 62.75% and 32.19%. Increases in other operating expenses were due to increased provision for impairment losses of Rp22.50 billion from the previous year.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Umum dan administrasi	(701.775)	(669.866)	(931.839)	4,76%	-28,11%	General and administrative
Gaji dan tunjangan	(360.035)	(333.839)	(284.395)	7,85%	17,39%	Salaries and allowances
Penyisihan kerugian penurunan nilai - neto	(49.391)	(26.896)	36.325	83,64%	-174,04%	Provision for impairment losses - net
Lain-lain	(7.109)	(5.388)	(2.354)	31,94%	128,89%	Others
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(1.118.310)	(1.035.989)	(1.182.263)	7,95%	-12,37%	Total other operating expenses

Pendapatan Non-Operasional – Neto

Total pendapatan non-operasional yang terjadi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp12,09 miliar, turun sebesar Rp3,07 miliar atau 20,27% dari tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan non-operasional ini

Non-Operating Expenses – Net

Total other non-operating income that occurred during 2024 amounted to Rp12.09 billion, down Rp3.07 billion or 20.27% from the previous year. This increase in non-operational income shows that the Bank continues to

menunjukkan bahwa Bank terus memperkuat struktur pendapatan berbasis biaya, disamping pendapatan bunga.

strengthen its fee-based income structure, in addition to interest income.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Komisi asuransi	2.684	2.611	1.099	2,80%	137,58%	Insurance commission
Komisi notaris	272	-	-	100,00%	0,00%	Notary commision
Keuntungan penjualan aset tetap - neto	144	76	58	89,47%	31,03%	Gain on sale of fixed assets - net
Lain-lain	8.990	12.476	10.239	-27,94%	21,85%	Others
Total Pendapatan Non-Operasional	**12.090**	**15.163**	**11.396**	**-20,27%**	**33,06%**	**Total Non-Operating Income**

Beban Non-Operasional – Neto

Total beban non-operasional lainnya yang terjadi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp4,01 miliar, turun sebesar Rp14,22 miliar atau 78,01% dari tahun sebelumnya. Biaya perkara menjadi komponen terbesar dari beban non-operasional, yang turun sebesar Rp10,71 miliar atau 83,22% dibandingkan tahun sebelumnya.

Non-Operating Expenses – Net

Total other non-operating expenses that occurred during 2024 amounted to Rp4.01 billion decreased by Rp14.22 billion or 78.01% from the previous year. Legal fees had the biggest contribution to non-operating expenses, which decreased by 10.71 billion or 83.22% compared to the previous year.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Biaya Perkara	2.158	12.863	7.231	-83,22%	77,89%	Legal fees
Denda dan sanksi	275	1.034	104	-73,40%	894,23%	Fine and penalties
Rugi penjualan dan penghapusan aset tetap - neto	2	26	83	-92,31%	-68,67%	Loss on sale and disposal of fixed assets - net
Rugi hasil revaluasi aset tetap	-	-	864	0,00%	-100,00%	Loss on revaluation of fixed assets
Lain-lain	1.572	4.302	1.052	-63,46%	308,94%	Others
Total Beban Non-Operasional	**4.007**	**18.225**	**9.334**	**-78,01%**	**95,25%**	**Total Non-Operating Expense**

Laba (Rugi) Operasional

Pada tahun 2024, Bank mengalami laba operasional sebesar Rp98,39 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 295,60% dibandingkan laba tahun 2023 sebesar Rp24,87 miliar.

Peningkatkan laba operasional tersebut disebabkan oleh peningkatkan pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya di tengah kenaikan beban bunga.

Operating Profit (Loss)

In 2024, the Bank's operating profit was Rp98.39, increased by 295.60% compared to the 2023 profit of Rp24.87 billion.

The increase in operating profit was due to an increase in interest income and other operating income amidst an increase in interest expenses.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Neto

Beban pajak tangguhan Bank pada tahun 2024 sebesar Rp103,64 miliar. Hal ini dikarenakan turunnya nilai manfaat pajak tangguhan dari rugi fiskal dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan beban pajak tahun 2024 terutama disebabkan oleh pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024 yang efektif diundangkan tahun 2024 kepada seluruh bank di Indonesia, serta adanya koreksi fiskal dari laba tahun berjalan.

Hal ini menyebabkan beban pajak tahun 2024 J Trust Bank menjadi sebesar Rp103,64 miliar dan mempengaruhi laba tahun berjalan (laba bersih) menjadi Rp2,83 miliar. Dampak perhitungan pajak berdasarkan PMK Nomor 74 Tahun 2024 ini dipastikan hanya berlaku pada tahun 2024 dan tidak akan berdampak pada kinerja keuangan Bank pada tahun 2025 dan seterusnya.

Income Tax Benefit (Expense) – Net

The Bank's income tax expense in 2024 was Rp103.64 billion. This was due to decreasing deferred tax benefit from fiscal loss compared to the previous year. The increase in tax expense in 2024 was mainly due to the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 74 of 2024 which was effective in 2024 for all banks in Indonesia, as well as the fiscal correction of current year profit.

This caused J Trust Bank's 2024 tax expense to reach Rp103.64 billion and affects current year profit (net profit) to Rp2.83 billion. The impact of tax calculations based on PMK No. 74 of 2024 is confirmed to only apply in 2024 and will not have an impact on the Bank's financial performance in 2025 and beyond.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Tangguhan	(103.644)	6.092	39.374	-1.801,31%	-84,53%	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(103.644)	6.092	39.374	-1.801,31%	-84,53%	Income Tax Benefit - Net

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih pada tahun 2024 sebesar Rp2,83 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan laba bersih tahun 2023, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak tahun 2024 serta adanya koreksi fiskal dari laba tahun berjalan.

Net Profit (Loss) for the Year

Net profit in 2024 amounted to Rp2.83 billion, a decrease of 90% or Rp25.74 billion compared to the 2023 net profit of Rp27.90 billion, mainly due to the increase in tax expense in 2024 and the fiscal correction of current year profit.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Pada tahun 2024, Bank membukukan kerugian komprehensif lain sebesar Rp20,28 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp5,45 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif.

Other Comprehensive Income (Loss)

In 2024, the Bank posted other comprehensive loss of Rp20.28 billion, while posting other comprehensive income of Rp5.45 million the year before. This was caused by losses from remeasurements of employee benefits liability and changes in marketable securities at fair value through other comprehensive income.

Laba (Rugi) Per Saham Dasar

Bank JTrust Indonesia mencatatkan laba per saham dasar sebesar Rp1,06 per lembar saham pada tahun

Basic Earnings (Loss) Per Share

Bank JTrust Indonesia recorded basic earnings per share of Rp1.06 per share in 2024, whereas previously

2024, sedangkan sebelumnya tercatat sebesar Rp1,54 pada tahun 2023. Pada tahun 2022-2024 Bank JTrust Indonesia tidak memiliki potensi saham yang bersifat dilusian.

it was recorded at Rp1.54 in 2023. In 2022-2024, Bank JTrust Indonesia had no potential diluted shares.

LAPORAN ARUS KAS
STATEMENT OF CASH FLOW

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description in Million Rupiah
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.186.508)	2.376.950	(163.523)	-149,92%	-1553,59%	Net cash used in operating activities
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.438.673)	(566.729)	115.375	153,86%	-591,21%	Net cash provided by (used in) investing activities
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	50.696	(1.555)	995.139	3360,19%	-100,16%	Net cash provided by financing activities
Jumlah kenaikan/ (penurunan) bersih kas dan setara kas	(2.574.485)	1.808.666	946.991	-242,34%	90,99%	Net Increase (Decrease) On Cash and Cash Equivalents
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	2.319	627	2.532	269,86%	-75,24%	Effect of changes in foreign currencies exchange rate
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.134.754	4.325.461	3.375.938	41,83%	28,13%	Cash and Cash Equivalents Beginning of Year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3.562.588	6.134.754	4.325.461	-41,93%	41,83%	Cash and Cash Equivalents at End Of Year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3,56 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan adanya perubahan dalam penurunan serta kenaikan dalam aset dan liabilitas operasi Bank.

Cash Flow from Operating Activities
Cash flow from operating activities in 2024 decreased Rp3.56 trillion from the previous year because of changes in the decrease and increase of assets and liabilities within the Bank's operations.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp1,44 triliun dan naik sebesar Rp871,94 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp566,73 miliar. Kenaikan arus kas aktivitas investasi pada tahun 2024 berasal dari transaksi pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Cash Flows from Investment Activities
Net cash used for investing activities during 2024 amounted to Rp1.44 trillion, an increase of Rp871.94 billion from the previous year of Rp566.73 billion. The increase in cash flow from investing activities in 2024 came from the purchases of securities measured at amortized cost.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan selama tahun 2024 sebesar Rp50,70 miliar, naik sebesar Rp52,25 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 miliar. Penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari dana setoran modal sebesar Rp51,88 miliar yang diperhitungkan sebagai komponen modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 31 Desember 2024.

Cash Flow from Financing Activities
Net cash used from funding activities during 2024 amounted to Rp50.70 billion, increased by Rp52.25 billion from the previous year of Rp1.5 billion. Cash flow from financing activities came from capital deposits amounting to Rp51.88 billion, calculated as core capital component in the Bank 's Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation for the 31 December 2024 position period.

RASIO KEUANGAN UTAMA
MAIN FINANCIAL RATIO

Keterangan dalam % kecuali dinyatakan lain	2024	2023	2022	Description in %, unless stated otherwise
Rasio KPMM yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko operasional	13,90	14,07	14,86	CAR with credit and operational risk
Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	13,89	14,04	14,86	CAR with credit, market and operational risk
Aset tetap terhadap modal	19,15	13,47	16,16	Fixed assets to capital
Aset produktif bermasalah	1,54	0,83	1,33	Non-performing earning assets
Pinjaman yang diberikan bermasalah-kotor	1,95	1,03	1,80	Non-performing loans - gross
Pinjaman yang diberikan bermasalah - neto	1,43	0,71	1,31	Non-performing loans - net
Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) terhadap aset produktif	0,59	0,50	0,64	Allowance for Possible Losses (PPAP) on earning assets
Pemenuhan PPAP	58,47	40,71	53,63	Allowance for possible losses (PPAP) compliance
Rasio laba (rugi) sebelum pajak terhadap rata-rata aset	0,26	0,06	0,17	Return on Assets Ratio (ROA)
Rasio laba (rugi) setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas	0,09	0,89	3,50	Return on Equity Ratio (ROE)
Margin bunga bersih	2,30	2,67	2,77	Net Interest Margin
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	97,26	99,12	99,04	Operating Expenses to Operating Revenues Ratio (BOPO)
Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga	78,25	74,61	76,11	Loan to Funding Ratio (LFR)
Rasio pengungkit (LR)	8,10	7,87	9,21	Leverage ratio (LR)
Cost to Income Ratio (CIR)	87,85	95,12	98,70	Cost to Income Ratio (CIR)
Nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR)	115,87	122,19	132,68	Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)	116,76	120,35	148,70	Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Current Account Saving Account Ratio (CASA)	15,14	13,94	13,78	Current Account Saving Account Ratio (CASA)
Tier I	12,90	13,08	14,02	Tier I
Tier II	0,99	0,96	0,84	Tier II
DAR	90,58	90,42	88,92	DAR
DER	961,07	943,54	802,15	DER

Suku Bunga Dasar Kredit
Informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diberikan Bank pada tahun 2024 sebagai berikut:

Prime Lending Rate
Information regarding the Bank's Prime Lending Rate (SBDK) in 2024 is as follows:

KUARTAL	Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) Berdasarkan Segmen Kredit (By Loan Segment)					QUARTERLY
	Kredit Korporasi Corporate Loan	Kredit Ritel Retail Loan	Kredit Mikro Micro Loan	Kredit Konsumsi KPR Mortgage Consumer Loan	Kredit Konsumsi Non-KPR Non-Mortgage Consumer Loan	
2024						
Maret	11,55%	12,75%	-	11,35%	12,50%	March
Juni	11,75%	12,75%	-	11,75%	12,50%	June
September	11,75%	12,75%	-	11,75%	12,50%	September
Desember	11,75%	12,75%	12,75%	11,75%	12,50%	December
2023						
Desember 2023	12,05%	12,75%	-	11,85%	14,75%	December 2023

SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur.

Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor cabang dan/atau situs web Bank. Untuk Kredit Mikro, Bank tidak mencantumkan SBDK lagi karena produk tersebut sudah tidak tersedia.

The prime lending rate is used as the basis to determine loan interest rate that will be charged by the Bank to customers. The prime lending rate does not take into account the estimated risk premium component, the amount of which depends on the Bank's risk assessment of each debtor or group of debtors.

Therefore, the loan interest rate charged to debtors is not necessarily the same as the prime lending rate. Non-KPR consumer loan does not include distribution of funds via Credit Cards and Unsecured Loans (KTA). Valid information on prime lending rate can be found in publications at each branch office and/or on the Bank's website. For Micro Loan, the Bank no longer lists the prime lending rate because the product is no longer available.

Kemampuan Membayar Utang

Bagian ini menjelaskan kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Ability to Pay Off Debt

This section explains the Bank's ability to fulfil its short-term and long-term obligations that are measured through liquidity and solvency ratios.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Rasio Likuiditas)

Bank menggunakan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dalam melakukan pemantauan rasio likuiditas. LCR merupakan perbandingan antara High Quality Liquid Asset (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 30 hari ke depan dalam skenario stres. Pemenuhan LCR paling rendah di level 100% secara berkelanjutan. Sedangkan NSFR adalah perbandingan antara jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 tahun untuk mendanai aktivitas Bank dengan jumlah aset dan rekening administratif yang perlu didanai dengan pendanaan yang stabil. Pemenuhan NSFR juga ditetapkan paling rendah di level 100%.

Ability to Pay Off Short-Term Debt (Liquidity Ratio)

The Bank used the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) in monitoring liquidity ratio. LCR compares High Quality Liquid Assets (HQLA) and total net cash outflow over the next 30 days in a stress scenario. Lowest LCR fulfilment is set at 100% level on an ongoing basis. Meanwhile, NSFR is a comparison between the stable amount of liability and equity over a 1-year period to fund the Bank's activities with the amount of assets and administrative accounts that require stable funding. NSFR compliance is also set at the lowest level of 100%.

Selama ini Bank selalu mampu menjaga kedua rasio tersebut di atas batasan yang sudah ditetapkan oleh regulator di mana LCR Bank dan NSFR Bank per akhir Desember 2024 berada di atas 100% atau tepatnya di level 116,76% dan 115,87%.

To date, the Bank has always managed to maintain these two ratios above the limits set by the regulator where the Bank's LCR and NSFR as of end-December 2024 stood at above 100%, or 116.76% and 115.87%, respectively.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Rasio Solvabilitas)

Untuk memantau rasio solvabilitas, Bank menggunakan dua metode rasio, yaitu rasio liabilitas terhadap jumlah aset serta rasio liabilitas terhadap ekuitas. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan liabilitas untuk membiayai asetnya. Pada akhir tahun 2024 rasio liabilitas terhadap jumlah aset bank tercatat sebesar 90,58%.

Sementara, rasio liabilitas terhadap ekuitas menunjukkan proporsi liabilitas dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Pada akhir tahun 2024 rasio liabilitas terhadap ekuitas Bank berada di level 961,07%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas Bank dalam kondisi sehat.

Ability to Pay Off Long-Term Debt (Solvency Ratio)

To monitor the solvency ratio, the Bank uses two ratio methods, namely the ratio of liabilities to total assets and the ratio of liabilities to equity. The ratio of liabilities to total assets indicates how much a company uses liabilities to finance its assets. The Bank's ratio of liabilities to total assets stood at 90.58% at the end of 2024.

Meanwhile, the ratio of liabilities to equity shows the proportion of liabilities and equity used by a company to finance its assets. At the end of 2024, the Bank's liabilities to equity ratio stood at 961.07%. This indicated that the Bank's solvency ratio was in a healthy condition.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS KREDIT DAN ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF

Tahun 2024 terus diwarnai oleh tantangan ekonomi makro dan ketegangan geopolitik. Di tengah kondisi yang penuh tantangan, Bank tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas aset produktif. Bank membuat klasifikasi tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan tiga pilar sesuai POJK yang berlaku. Analisa kualitas aset produktif serta tingkat kolektibilitas kredit yang dimiliki Bank dalam kurun waktu 2022-2024 sebagai berikut:

LOANS COLLECTABILITY AND ANALYSIS OF EARNING ASSETS QUALITY

Year 2024 continued to be marked by macroeconomic challenges and geopolitical tensions. Amid these challenging conditions, the Bank remained committed to maintaining the quality of its productive assets. The Bank classified the credit collectability level granted to customers based on three pillars in accordance with the applicable Financial Services Authority (OJK) regulations. The analysis of the quality of productive assets and the credit collectability levels held by the Bank from 2022 to 2024 is as follows:

Keterangan	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) - Increased (Decreased)		Description
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Lancar	25.781.967	23.240.471	18.799.989	10,94%	23,62%	Current
Dalam perhatian khusus	228.733	393.403	380.878	-41,86%	3.29%	Special Mention
Total Kredit Bermasalah (NPL)*)	517,366	245,964	351,080	110.34%	-29.94%	Total Non-Performing Loan *)
Jumlah	**26.528.066**	**23.879.838**	**19.531.947**	**22,26%**	**95,01%**	**Total**

*) Terdiri dari Kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet / Comprising Sub-standard, Doubtful, and Loss Credit

Pada tahun 2024 terlihat pada tabel bahwa ekspansi bisnis Bank hampir seluruhnya berkualitas lancar, bahkan dengan pemulihan kredit yang dilakukan Bank telah menurunkan portofolio kredit bermasalah. Hal ini tercermin juga dari rasio NPL bruto yang sehat yang tercatat sebesar 1,95% dan rasio NPL neto sebesar 1,43%. Kondisi NPL Bank yang sehat tersebut terbilang positif karena diiringi oleh kemampuan Bank membukukan penumbuhan penyaluran kredit yang masih berada di atas industri. Hal ini menunjukkan bahwa Bank pada tahun 2024 telah berhasil melakukan upaya pengendalian risiko kredit di tengah ekspansi penyaluran kredit.

In 2024, as shown in the table, the Bank's business expansion was almost entirely of high quality, even with the credit recovery efforts made by the Bank, it has reduced its non-performing loan portfolio. This was also reflected in the healthy gross NPL ratio, recorded at 1.95%, and the net NPL ratio of 1.43%. The Bank's healthy NPL condition was considered positive because it was accompanied by the Bank's ability to achieve credit growth that remained above the industry average. This indicated that in 2024 the Bank had successfully carried out credit risk control efforts amid credit distribution expansion.

Struktur Modal

Pada tahun 2024, Bank berhasil meningkatkan posisi total modal Bank dari Rp3.292,88 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp3.500,91 miliar, sejalan dengan modal inti yang bertambah menjadi Rp3.250,94 miliar. Sehingga modal inti minimum yang ditetapkan oleh OJK telah terpenuhi karena sudah melampaui batas minimal Rp3 triliun. Hal ini dapat terjaga dengan baik hingga akhir tahun 2024.

Capital Structure

In 2024, the Bank succeeded in increasing its total capital position from Rp3,292.88 billion in 2023 to Rp3,500.91 billion, in line with increasing core capital to Rp3,250.84 billion. Therefore, the Bank has fulfilled the minimum core capital required by OJK, set at Rp3 trillion. The Bank was able to maintain this capital position until the end of 2024.

Keterangan Dalam jutaan rupiah	2024	2023	Description In Million Rupiah
Modal Inti	3.250.944	3.067.434	Core Capital
- Modal Disetor	13.032.929	13.032.929	Paid-In Capital -
- Cadangan Tambahan Modal	(9.781.985)	(9.965.495)	Reserve for Additional Capital -
Modal Pelengkap	249.970	225.441	Supplementary Capital
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	3.500.914	3.292.875	Total Core Capital and Supplementary Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit	24.343.565	22.829.305	Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar	12.074	53.026	Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional	851.240	568.795	Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit dan Operasional	13,90%	14,07%	CAR for Calculation of Credit Risk & Operation Risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	13,89%	14,04%	CAR for Market, Credit & Operational Risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang Diwajibkan	10,00%	10,00%	Minimum CAR Requirement

Kecukupan Permodalan

Bank memastikan telah memiliki kecukupan modal untuk menutup risiko dalam setiap kegiatan usaha dan operasionalnya. Kerangka kerja untuk pengelolaan modal Bank mengacu pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) atau KPMM sesuai profil risiko.

Capital Adequacy

The Bank makes sure that it has adequate capital to cover risks from its business and operational activities. The framework for the Bank's capital management refers to the Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) of Commercial Banks and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), or CAR based on risk profile.

KPMM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal atas risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dan dihitung sesuai metode standar regulator, sedangkan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) merupakan proses penilaian kecukupan modal yang disesuaikan dengan profil risiko Bank serta penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan guna menutup risiko, aktivitas usaha, dan operasional Bank sesuai pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Bank memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga struktur modal yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana komponen modal diklasifikasikan menjadi dua komponen, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis, mengambil peluang bisnis, dan melindungi Bank terhadap risiko-risiko yang timbul akibat tantangan dan ketidakpastian kondisi ekonomi dan geopolitik.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebutuhan permodalan Bank ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti kondisi ekonomi dan geopolitik, perkembangan industri perbankan, potensi risiko-risiko yang timbul, serta prospek dan peluang usaha ke depan.

Dengan rencana permodalan ini, Bank akan mempertahankan posisi modal yang sehat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan mempertahankan kepercayaan investor, nasabah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi tantangan usaha dan memasuki fase pertumbuhan Bank berikutnya.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Investasi barang modal terdiri dari tanah, bangunan, perabot, inventaris kantor dan kendaraan. Pada akhir tahun 2024, aset tetap Bank berjumlah Rp525,92 miliar atau mengalami kenaikan dari aset tetap tahun 2023 sebesar Rp296,81 miliar.

Dalam pembiayaan investasi barang modalnya, Bank menggunakan dana yang berasal dari hasil usaha dan mengutamakan pembelian barang modal dalam mata uang Rupiah. Manajemen berpendapat bahwa dampak dari fluktuasi mata uang asing tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap ikatan untuk investasi barang modal.

CAR is aimed at fulfilling capital needs for credit risk, market risk, and operational risk, and is calculated based on standard regulatory method, while Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) is the assessment process of capital adequacy, which is adjusted to the Bank's risk profile, as well as strategy setting to maintain capital at a certain level that will cover the Bank's risks, business activities, and operations, in accordance with the Bank's Business Plan.

Management Policy on Capital Structure

The Bank has a strong commitment to maintaining a healthy capital structure in accordance with applicable regulations, in which capital is classified into two components, namely core capital and supplementary capital. This classification is created to support business growth, seize business opportunities, and protect the Bank against risks arising from challenges and uncertainties in economic and geopolitical conditions.

Basis of Management Policy Setting on Capital Structure

The Bank's capital requirements are determined based on several factors, such as economic and geopolitical conditions, banking industry development, potential risks, as well as future business prospects and opportunities.

With this capital plan, the Bank will maintain a healthy capital position to support sustainable business growth and maintain the trust of investors, customers and all stakeholders to jointly face business challenges and prepare for the next phase of the Bank's growth.

Material Commitments for Capital Goods Investment

Capital goods investments consist of land, buildings, furniture, office inventory and vehicles. At the end of 2024, the Bank's net fixed assets amounted to Rp529.92 billion, an increase from Rp221.11 billion in 2023.

In financing capital goods investments, the Bank relies on the proceeds from its business and prioritizes purchases of capital goods in Rupiah currency. The management believes that the volatility in foreign exchange rates had no significant impact on the Bank's commitments to investing in capital goods.

INVESTASI BARANG MODAL
INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

Jenis Barang Modal
Type of Capital Goods

Jenis Barang Modal	dalam jutaan Rp (in Million Rp)			Kenaikan (Penurunan) Increased (Decreased)		Investment of Capital Goods
				2024-2023	2023-2022	
	2024	2023	2022	Persentase (%) Percentage (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Hak atas tanah	370.301	161.067	161.067	129,90%	0,00%	Land Rights
Bangunan	24.928	24.928	24.928	0,00%	0,00%	Buildings
Inventaris kantor	104.004	86.506	76.131	20,23%	13,63%	Office Inventories
Kendaraan	26.683	24.306	20.727	9,78%	17,27%	Vehicles
Jumlah	**525.916**	**296.807**	**282.853**	**77,19%**	**4,93%**	**Total**

KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 31 Januari 2025, pemegang saham Bank yaitu JTrust Asia Pte., Ltd., menyetorkan dana sebesar Rp50 miliar untuk mendukung operasional Bank.

Dukungan operasional yang diberikan merupakan dukungan finansial tanpa syarat untuk membantu kinerja keuangan Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tanpa kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut di masa mendatang.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On 31 January 2025, the Bank's shareholder, JTrust Asia Pte., Ltd., deposited Rp50 billion to support the Bank's operations.

This operational support is an unconditional financial contribution aimed at assisting the Bank's financial performance in carrying out its operations, with no obligation to repay the funds in the future.

ANALISA PROSPEK USAHA

Business Prospect Analysis

Tantangan geopolitik dan kondisi ekonomi yang kompleks akan terus menjadi tantangan yang sangat besar. Berbagai faktor menghadirkan ketidakpastian seputar prospek tersebut. Pemangkasan suku bunga kebijakan akan bergantung pada kebijakan bank sentral terhadap inflasi dan ketahanan pasar tenaga kerja.

Geopolitical challenges and complex economic conditions will continue to pose significant challenges. Several factors create uncertainty around the outlook. Policy rate cuts will depend on central bank policy on inflation and labor market resilience.

Demikian pula, kebijakan perdagangan menghadirkan sejumlah risiko karena sejumlah negara telah mengumumkan pemberlakukan tarif. Risiko geopolitik tetap ada dengan konflik di sejumlah negara, yang terus berlanjut hingga potensi eskalasi lebih lanjut yang dapat mengganggu perdagangan dan aktivitas ekonomi.

Similarly, trade policy poses risks as several countries have announced tariffs. Geopolitical risks remain, with conflicts in several countries continuing that further escalations can disrupt trade and economic activity.

Prospek ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 menyajikan gambaran yang beragam namun menjanjikan di mana perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh antara 5,1-5,5% dan inflasi diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target bank sentral. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia akan terus menjaga stabilitas serta mencari peluang pertumbuhan melalui reformasi dan kebijakan strategis.

Indonesia's economic outlook for 2025 presents a mixed but promising picture, with the Indonesian economy projected to grow between 5.1-5.5% and inflation expected to remain within the central bank's target range. Amid the global economic uncertainty, Indonesia will continue to maintain stability and seek growth opportunities through reforms and strategic policies.

Mengingat tantangan yang akan datang, kami tetap optimis dengan hati-hati tentang apa yang akan terjadi. Kepemimpinan J Trust Bank memiliki pengalaman dan strategi untuk mengelola tantangan yang kami hadapi dan kami telah menunjukkan kemampuan untuk memajukan perjalanan Bank ke fase pertumbuhan berikutnya.

Given the challenges ahead, we remain cautiously optimistic about what lies ahead. J Trust Bank's leadership has the experience and strategy to manage the challenges we face and we have demonstrated the ability to grow the Bank's journey into the next phase of growth.

Pada tahun 2025, kami akan tetap fokus pada peningkatan profitabilitas melalui pertumbuhan kredit sesuai target bisnis yang didukung oleh kondisi likuditas dan permodalan yang kuat, memperkuat bisnis berbasis biaya, dan membangun kapabilitas digital untuk mendorong ketahanan dan inovasi yang lebih besar guna meraih nilai jangka panjang. Pertumbuhan kredit akan disumbangkan terutama oleh pertumbuhan segmen korporasi dan komersial & UKM, di mana Bank akan terus melakukan penetrasi pasar dengan membuka lima kantor cabang baru pada tahun 2025.

In 2025, we will remain focused on increasing profitability through credit growth in line with business targets supported by strong liquidity and capital conditions, strengthening fee-based businesses, and building digital capabilities to drive greater resilience and innovation to achieve long-term value. Credit growth will be contributed mainly by the growth of the corporate and commercial & SME segments, where the Bank will continue market penetratation by opening five new branch offices in 2025.

Analisa & Prospek Perbankan Nasional 2025

Stabilitas sektor perbankan pada tahun 2025 diharapkan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal yang tinggi, rasio kredit bermasalah yang rendah, dan profitabilitas yang kuat. Kredit yang disalurkan oleh industri perbankan diharapkan tumbuh pesat, sehingga berkontribusi terhadap pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diiringi dengan terus berkembangnya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global, Bank akan fokus untuk mencapai target Rencana Bisnis Bank pada tahun 2025, di mana Bank sebelumnya juga telah melalui tantangan yang dihadapi dengan baik. Kepemimpinan Bank memiliki pengalaman dan strategi untuk terus menjalankan prioritas strategis dan memanfaatkan peluang di pasar, sekaligus waspada terhadap potensi risiko. Kami optimis terhadap masa depan dan berharap dapat terus memberikan nilai kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Analysis & Prospects of National Banks in 2025

The banking sector stability in 2025 is expected to remain resilient with a high capital adequacy ratio, low non-performing loan ratio, and strong profitability. Credit disbursed by the banking industry is expected to grow rapidly, contributing to economic growth financing. This condition is accompanied by the ongoing development of the digital economy and financial ecosystem which will continue to drive inclusive economic growth.

Amid the global economy and geopolitics dynamics, the Bank will focus on achieving the Bank's Business Plan target in 2025, where the Bank has previously gone through the challenges which we overcomed. The Bank's leadership has the experience and strategy to continue implementing strategic priorities and taking advantage of opportunities in the market, while being aware of potential risks. We are optimistic about the future and hope to continue providing value to shareholders and all stakeholders.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2024

Pinjaman yang Diberikan

Pada tahun 2024 Bank mampu merealisasikan kredit hingga sebesar Rp26.528,07 miliar di mana jumlah ini di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Perlambatan pertumbuhan kredit disebabkan oleh Bank bersikap selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ekspansi kredit di tengah dinamika kondisi ekonomi dan geopolitik sehingga rasio NPL net dan bruto tetap terjaga dalam kondisi sehat yaitu masing-masing sebesar 1,43% dan 1,95%.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2024

Loan Disbursement

In 2024, the Bank was able to achieve credit of Rp26,528.07 billion, below the target set in the Bank's Business Plan. The slowdown in credit growth was caused by the Bank being selective and prioritizing the prudential principle in making credit expansion amid the dynamics in geopolitical and economic conditions, so that the net and gross NPL ratios remained healthy at 1.43% and 1.95% respectively.

Keterangan	Target 2024 (dalam Jutaan Rp) Target 2024 (in Million Rp)	Realisasi Desember 2024 (dalam Jutaan Rp) Realization on December 2024 (in Million Rp)	Description
Total Pinjaman yang diberikan	29.471.057	26.528.066	Total Loans

Dana Pihak Ketiga

Hingga akhir Desember 2024 Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga hingga mencapai Rp33.899,53 miliar di tengah likuiditas perbankan yang semakin ketat. Kondisi likuditas Bank tetap kuat

Third Party Funds

As of the end of December 2024, the Bank managed to collect third party funds of Rp33,899.53 billion amid tighter banking liquidity. The Bank's liquidity conditions remained strong with the LCR and NSFR ratios recorded

dimana rasio LCR dan NSFR masing-masing tercatat sebesar 116,76 persen dan 115,87 persen, di mana hal ini mendukung Bank dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada.

at 116.76% and 115.87%, respectively, which supported the Bank in facing challenges and taking advantage of existing growth opportunities.

Keterangan	Target 2024 (dalam Jutaan Rp) Target 2024 (in Million Rp)	Realisasi Desember 2024 (dalam Jutaan Rp) Realization on December 2024 (in Million Rp)	Description
Dana Pihak Ketiga	36.811.334	33.899.527	Third-Party Fund

Struktur Modal

Sepanjang tahun 2024, Bank dapat mempertahankan struktur modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank serta menghadapi risiko-risiko terkait. Rasio KPMM Bank pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 13,89% atau di atas target yang ditetapkan, di mana Bank mengelola asset tertimbang menurut risiko secara optimal.

Capital Structure

Throughout 2024, the Bank was able to maintain a strong capital structure to support the Bank's business growth and face related risks. The Bank's CAR at the end of 2024 was 13.89% or above the set target, where the Bank managed risk-weighted assets optimally.

Keterangan	Target 2024 Persentase Target 2024 Percentage	Realisasi Desember 2024 (dalam Jutaan Rp) Realization on December 2024 (in Million Rp)	Description
KPMM	12,88%	13,89%	CAR

PROYEKSI 2025

Memasuki tahun 2025, Bank telah menetapkan sejumlah target, antara lain:

PROJECTIONS FOR 2025

For 2025, the Bank has set a number of targets, including:

Keterangan	Target 2025 Persentase Target 2025 Percentage	Description
Kredit yang Diberikan	12%-15%	Loans
Dana Pihak Ketiga	12%-15%	Third-Party Fund
Ekuitas	15%-17%	Total Capital
Pendapatan Bunga Neto	20%-25%	Net Interest Income

ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM MENYUSUN PROYEKSI 2025

Target tahun 2025 disusun dengan berfokus pada peningkatan skala bisnis yang bersifat moderat di mana pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan tetap stabil di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi dengan ketidakpastian serta gejolak geopolitik yang dapat berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi. Dengan potensi ekonomi domestik yang masih akan terjaga dengan baik, maka Bank akan menjalankan strategi sebagai berikut:

ASSUMPTIONS USED FOR 2025 PROJECTIONS

The 2025 targets were developed by focusing on a moderate expansion in business scale, with domestic economic growth forecast to stay stable amid uncertainty in the global economic conditions which could impact economic and political stability. With resilient domestic economic potentials, the Bank will implement strategies as follows:

1. Menjaga likuiditas
2. Melaksanakan ekspansi kredit secara selektif
3. Melakukan efisiensi biaya
4. Meningkatkan pendapatan operasional selain bunga melalui *fee* kredit dari kredit korporasi dan sindikasi serta transaksi *treasury* seperti transaksi valuta asing dan transaksi obligasi
5. Melakukan peningkatan modal untuk mendukung ekspansi usaha
6. Meningkatkan dana pihak ketiga yang disertai dengan perbaikan biaya dana
7. Meningkatkan kapabilitas digital Bank untuk meningkatkan efisiensi serta pendapatan Bank

Dengan menjalankan strategi-strategi tersebut maka Bank berharap dapat meningkatkan profitabilitasnya secara berkesinambungan yang didukung oleh fundamental Bank yang kuat.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Program pemasaran J Trust Bank berorientasi pada kebutuhan nasabah serta dilakukan untuk mendukung pencapaian target Bank dan mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. J Trust Bank menerapkan beragam program pemasaran yang efektif pada semua lini usaha dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing segmen bisnis.

Dengan 47 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Bank mengoptimalkan sumber daya pemasaran pada seluruh kantor cabang secara efektif melalui proses aktivitas penjualan termasuk akuisisi dan penjualan silang, yang didukung oleh kualitas layanan yang prima untuk meningkatkan kepuasan nasabah, membangun reputasi, dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Pendekatan kepada nasabah juga dilakukan dengan cara yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen. Hal ini dilakukan mengingat setiap segmen memiliki kebutuhan dan karakternya masing-masing.

Untuk saluran komunikasi pemasaran, J Trust Bank melakukan pemasaran secara *hybrid*, yaitu dengan mengkombinasikan pemanfaatan platform digital dan interaksi secara langsung. J Trust Bank mengoptimalkan penggunaan saluran media sosial dalam memasarkan produk dan layanan Bank, meningkatkan *brand awareness,* serta mengedukasi nasabah. Bank juga mengoptimalkan situs web untuk menyediakan informasi produk dan layanan Bank.

1. Maintaining liquidity
2. Carrying out selective loan expansion
3. Performing cost efficiency
4. Increasing operational income other than interest through credit fees from corporate and syndicated loans as well as treasury transactions such as forex transactions and bond transactions
5. Increasing capital to support business expansion
6. Increasing third party funds, followed by improvements in cost of funds
7. Increasing the Bank's digital capabilities to raise efficiency and the Bank's revenue

By implementing these strategies, the Bank hopes to maintain its profitability in a sustainable manner, accompanied by strong Bank fundamentals.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

J Trust Bank's marketing program is oriented towards customer needs and is carried out to support the Bank in achieving the targets and improving performance in a sustainable way. J Trust Bank implements various effective marketing programs in all business lines by considering the characteristics of each business segment.

With 47 branches spread across regions in Indonesia, the Bank optimizes marketing resources at all branches effectively through sales activity processes including acquisition and cross-selling, supported by excellent service quality to increase customer satisfaction, build reputation, and increase customer loyalty.

We approach customers in a personal way, tailored to the needs of each segment. This is done considering that each segment has its own needs and characteristics.

For marketing communication channels, J Trust Bank carries out hybrid marketing, by combining the use of digital platforms and direct interaction. J Trust Bank optimizes the use of social media channels in marketing the Bank's products and services, increasing brand awareness, and educating customers. The Bank also optimizes the website to provide information on Bank products and services.

Berbagai pameran dilakukan Bank dengan berkolaborasi dengan pihak lain maupun keterlibatan komunitas untuk meningkatkan *brand awareness* serta memasarkan produk dan layanan Bank. Bank juga memanfaatkan media periklanan secara efektif yang mencakup media cetak atau siaran, media digital, dan media luar ruang antara lain seperti papan iklan, poster serta spanduk di tempat publik.

The Bank holds exhibitions in collaboration with other parties and in involvement with communities to increase brand awareness and market the Bank's products and services. The Bank also makes effective use of advertisement which includes print or broadcast media, digital media, and outdoor media such as billboards, posters and banners in public places.

Konsistensi dalam penerapan strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran telah mendukung J Trust Bank meraih pencapaian kinerja yang solid serta menempatkan J Trust Bank dalam posisi yang baik untuk meraih kinerja yang lebih baik lagi secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Being consistent in implementing effective and targeted marketing strategies has supported J Trust Bank in achieving solid performance and has placed J Trust Bank in a good position to achieve even better performance in a sustainable way in the future.

Pangsa Pasar

Sebagai salah satu bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 di Indonesia, J Trust Bank memiliki tujuan untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang inovatif kepada masyarakat Indonesia di mana saja dan kapan saja.

Market Share

As one of the banks in the category of Banking Group based on Core Capital 1 in Indonesia, J Trust Bank aims to provide innovative financial products and services to all Indonesian people anywhere and anytime.

Mayoritas nasabah Bank masih merupakan nasabah korporasi, namun ke depannya Bank terus berupaya menumbuhkan nasabah-nasabah dari segmen ritel dengan dukungan 47 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia serta layanan perbankan berbasis teknologi melalui J Trust Net dan J Trust Mobile.

The majority of the Bank's customers are still corporate customers, however the Bank continues to grow its retail customers with the support of 47 branches nationwide as well as its technology-based services through J Trust Net and J Trust Mobile.

Bank juga terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan inklusif bagi UMKM untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar.

The Bank also continues to support the government's programs in increasing access to inclusive financing for MSMEs by supporting MSMEs in growing business, increasing productivity, and expanding the market.

Per 31 Desember 2024, pangsa pasar Bank di pasar Indonesia berada di angka 0,38% untuk DPK dan 0,33% untuk kredit.

As of 31 December 2024, the Bank's market share in the Indonesian market was 0.38% for funding and 0.33% for lending.

Service Excellence

Bank berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, baik melalui layanan kantor cabang, Customer Care, J Trust Call, maupun melalui aplikasi online. Untuk konsisten dalam memberikan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabah, J Trust Bank akan melakukan beberapa aktivitas berikut:

1. Meningkatkan standardisasi kelengkapan kantor cabang.
2. Penilaian cabang terhadap *service quality index*.

Service Excellence

The Bank is committed to continue providing the best service to customers, both through branch services, Customer Care, J Trust Call, or online applications. To be consistent in providing quality service and maintaining customer loyalty, J Trust Bank will carry out the following activities:

1. Increasing the standardization of branch equipment.
2. Branch assessment of service quality index.

Langkah-langkah tersebut diambil sebagai langkah dan tanggung jawab Bank untuk memberikan layanan yang baik ke nasabah. Salah satu Service Value Bank adalah Ultimate Customer First atau menjadikan nasabah sebagai prioritas utama bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Hal terpenting bagi Bank adalah memberikan kepuasan dan memastikan kebutuhan nasabah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Service Value J Trust Bank yang sangat menghargai dan melayani nasabah secara optimal serta berkesinambungan. Untuk itu, Bank akan melakukan sejumlah langkah perubahan dan perbaikan pada tahun 2025 berikut:

These steps were taken as the Bank's responsibility and move to provide good service to customers. One of the Bank's Service Values is Ultimate Customer First or making customers the main priority for the company and its stakeholders. The most important thing for the Bank is to provide satisfaction and ensure customer needs are met. This is in accordance with J Trust Bank's Service Value which highly respects and serves customers optimally and continuously. Therefore, the Bank will carry out several changes and improvements in 2025 as follows:

Rancangan Kerja Service Quality Development Tahun 2025

Work Plan for Service Quality Development 2025

No	Nama Kegiatan Name of Activities	Tujuan Objective	
1	Perubahan Ketentuan Berpakaian untuk Frontline Changes to Dress Code for Frontline	1. Pembaruan Desain – Mengganti model seragam frontline dengan desain yang lebih fleksibel, nyaman, profesional, dan menarik. 2. Optimalisasi Pemakaian – Menyesuaikan hari pemakaian seragam guna memperpanjang masa pakai seragam yang didistribusikan oleh kantor pusat. 3. Standardisasi Batik – Mewajibkan penggunaan batik setiap Rabu untuk memperkuat rasa kesatuan antara karyawan frontline dan non-frontline di seluruh cabang dan kantor pusat. 4. Peningkatan Kepuasan Karyawan – Meningkatkan kebanggaan dan kepuasan karyawan melalui desain seragam yang modern dan sederhana. 5. Efisiensi Pengadaan – Mengurangi variasi model seragam guna menghemat biaya pengadaan.	1. Design Renewal – Updating the frontline uniform with a more flexible, comfortable, professional, and attractive design. 2. Optimized Usage – Adjusting uniform usage days to extend the lifespan of uniforms distributed by the head office. 3. Batik Standardization – Requiring batik clothing every Wednesday to strengthen unity between frontline and non-frontline employees across branches and the head office. 4. Employee Satisfaction Improvement – Enhancing employee pride and satisfaction through a modern and simple uniform design. 5. Procurement Efficiency – Reducing the number of uniform models to optimize procurement costs.
2	Survei Kantor Cabang Branch Survey	Branch Survey untuk meninjau dan memastikan standar layanan dan standar pelaksanaan proses transaksi nasabah di cabang dilakukan dengan benar dan tepat. Bank akan mendapat gambaran dan data-data faktual di cabang atas hal-hal yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan proses transaksi nasabah konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank berharap dengan tercapainya konsistensi kualitas hasil, baik untuk proses operasional dan bisnis, akan menghasilkan tidak hanya peningkatan citra positif J Trust Bank tetapi juga peningkatan kepercayaan masyarakat kepada J Trust Bank Indonesia.	Branch Survey is to review and ensure standards of services and procedures for customer transaction process at branches are carried out correctly and appropriately. The Bank will get an overview and factual data at branches on procedures that have been carried out in accordance with the provisions and what needs to be improved in order to make customer transaction process consistent with applicable provisions. The Bank hopes that achieving consistent result quality for both operational and business processes will not only lead to better image of J Trust Bank, but also increase public trust in J Trust Bank Indonesia.
3	Program Pelatihan Kualitas Layanan Service Quality Training Program	Training memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas kerja, keterampilan pelaksanaan kerja, produktivitas, pengetahuan, kompetensi serta wawasan anggota tim kerja cabang. Dengan mengikuti program training pihak Bank mengharapkan tim kerja cabang dapat membantu tercapainya: (i) target cabang yang telah ditentukan oleh pihak manajemen, (ii) konsistensi dalam pelaksanaan Layanan Prima; (iii) peningkatan risk awareness; dan berdampak pada (iv) peningkatan kinerja.	Training plays a very important role in improving work quality, work execution skills, productivity, knowledge, competence, and insight of members of the work team at branches. By participating in the training program, the Bank hopes that the work team at branches can help achieve: (i) targets of each branch that has been set by management, (ii) consistency in the implementation of Excellent Service; (iii) higher risk awareness; and affect (iv) performance improvement.

No	Nama Kegiatan Name of Activities	Tujuan Objective	
4	Kompetisi Skill & Knowledge untuk Frontline Skill & Knowledge Competition for Frontline	Meningkatkan kualitas layanan dan pengetahuan produk frontliner melalui Competition Skill & Knowledge, dengan memperbarui keterampilan, mengukur pemahaman standar layanan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam melayani nasabah.	Improving the quality of service and product knowledge of frontliners through the Competition Skill & Knowledge, by updating skills, measuring understanding of service standards, and boosting confidence in serving customers.
5	Kaizen Champion	Membangun Budaya Positif. Mendorong Akuntabilitas melalui tanggung jawab pribadi, serta menanamkan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan. Motivasi dan Apresiasi: mendorong individu dan tim untuk terus berkembang.	1. Building a Positive Culture. 2. Encouraging Accountability through personal responsibility, promoting accountability in every decision and action. 3. Motivation and Appreciation: encouraging individuals and teams to continue growing."
5	Monitoring dan Checking Monitoring and Checking	Untuk mengetahui pencapaian kinerja cabang dan melihat apakah pencapaian sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui apakah ada masalah dan kendala dalam melaksanakan rencana target kerja yang sudah dibuat. Dengan diketahui sedini mungkin, maka dapat dilakukan tindakan perbaikan segera agar risiko dapat dikendalikan dengan baik dan juga terhindar dari risiko yang lebih besar. Jika diperlukan, Bank dapat melakukan perbaikan dan/atau modifikasi dari kebijakan yang ada untuk memastikan konsistensi dan efektivitas kantor cabang dalam mencapai hasil yang berkualitas.	To find out the performance achievement of branches and to see whether these achievements are in line with initial targets, as well as to find out whether there are problems and challenges in implementing the initial work plan. By figuring it out as early as possible, the Bank can take corrective measures to manage risks properly and avoid greater risks. If necessary, the Bank can make improvements and/or modifications to existing policies to ensure the consistency and effectiveness of branches in achieving quality results.
6	Dukungan SDM HC Support	Melaksanakan program training untuk tim kerja cabang yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan kompetensi. Pihak Bank berharap dengan mengikuti program training, tim kerja cabang mampu bersikap proaktif dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada.	Carrying out training program for work teams at branches in order to improve skills, knowledge, insights, and competence. The Bank hopes that by participating in the training program, work teams at branches will be able to be proactive in dealing with existing obstacles and challenges.
7	Dukungan Manajemen Risiko Risk Management Support	Melaksanakan Branch Forum dan Focus Group Discussion yang bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksanaan aktivitas proses transaksi nasabah di cabang sesuai dengan SOP yang berlaku dan mendukung tercapainya 0% fraud dan 0% temuan.	Organizing Branch Forum and Focus Group Discussion to ensure all activities of customer transaction process in branches comply with applicable SOP in order to have 0% fraud and 0% finding.

Bank berharap terobosan-terobosan tersebut akan meningkatkan kepuasan dan kenyamanan nasabah dalam memanfaatkan fasilitas dan produk layanan J Trust Bank. J Trust Bank berharap dapat tumbuh dan berkembang bersama nasabah secara berkesinambungan, serta semakin dikenal sebagai mitra terpercaya di sektor keuangan.

The Bank expects these breakthroughs will increase customer satisfaction and convenience in using J Trust Bank's facilities and service products. J Trust Bank expects to grow and develop together with customers on a sustainable basis, and become increasingly known as a trusted partner in the financial sector.

Kebijakan Dividen

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPT disebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Peseroan mempunyai saldo laba yang positif dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan dividen Perseroan adalah dapat mempertimbangkan

Dividend Policy

According to the provisions of Article 71 paragraph 3 UUPT, dividends may only be distributed if the Company has a positive profit balance and Article 22 of the Company's Articles of Association states that dividends may only be paid in accordance with the Company's financial capability based on decisions made at the GMS. In accordance with UUPT and the Company's Articles of Association, the Company's dividend policy is to consider issuing dividends if it has

untuk membagikan dividen apabila memiliki saldo laba yang positif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan.

Perseroan sejak tahun 2008 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat defisit (saldo rugi) sebesar Rp12.317,50 miliar per 31 Desember 2024, sebesar Rp12.320,33 miliar per 31 Desember 2023 dan sebesar Rp12.348,24 miliar per 31 Desember 2022. Mengacu pada kondisi tersebut secara akumulasi Perseroan masih mencatatkan defisit kerugian sehingga {erseroan tidak dapat membagikan dividen.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MESOP)

Bank tidak memiliki program ESOP/MESOP.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada tahun 2024, Perseroan tidak melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I tahun 2021 dan Penawaran Umum Terbatas tahun 2022, di mana seluruh dana hasil penawaran umum tersebut telah direalisasi.

Informasi Material terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi

Bank tidak melakukan transaksi terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi selama tahun buku 2024. Oleh karena itu, Bank juga tidak menyajikan informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana dari kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi tersebut.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024, Bank tidak mencatatkan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi yang Berulang

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, termasuk pinjaman subordinasi dari Pemegang Saham Pengendali Bank dan/atau afiliasinya untuk memperkuat struktur permodalan Bank.

a positive profit balance, considering the Company's financial capability.

The Company since 2008 has not paid dividends because it recorded a deficit (loss balance) of Rp12,317.50 billion as of 31 December 2024, Rp12,320.33 billion as of 31 December 2023, and Rp12,348.24 billion as of 31 December 2022. Referring to these conditions, the Company accumulatively still records a loss deficit that the Company cannot distribute dividends.

Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MESOP)

The Bank does not have an EOP/MESOP program.

The Use of Proceeds from Public Offering

In 2024, the Company did not raise capital through rights issue. But in the previous year, the Company held Limited Public Offering I in 2021 and Limited Public Offering II 2022, where all of the use of proceeds has been fully realized.

Material Information related to Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition and Restructuring

The Bank did not conduct any transactions related to investment, expansion, divestment, merger, acquisition, and restructuring during the fiscal year 2024. Therefore, the Bank does not present information related to the purpose, transaction value, and source of funds of the investment, expansion, divestment, merger, acquisition, and restructuring activities.

Information on Material Transactions that Contain Conflicts of Interest

In 2024, the Bank did not record any material transactions with conflicts of interest.

Recurring Transactions with Related Parties

The Bank conducts transactions with related parties which are business activities carried out to generate operating income regularly, periodically, and/or continuously, including subordinated loans from the Bank's Controlling Shareholder and/or its affiliates to strengthen the Bank's capital structure.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Direksi Bank menyatakan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar. Selain itu, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah melakukan perannya untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transactions with those related parties follow the same terms and conditions as transactions with other third parties. The Bank's Board of Directors states that affiliate transactions have passed suitable procedures to guarantee that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, including the principle of a fair transaction. Furthermore, the Board of Commissioners and the Audit Committee have performed their duties to ensure that affiliate transactions are conducted in conformity with generally accepted business practices.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dapat dilihat pada catatan Laporan Keuangan Audit Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 halaman 133 -134.

Transactions with related parties can be seen in the notes to the Bank's Audited Financial Report for the year ended December 31, 2024, pages 133-134.

Uraian mengenai Perubahan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Bank pada Tahun Buku Terakhir:

Description of Changes in Laws and Regulations on the Bank in the Last Financial Year:

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

The changes in laws and regulations mentioned above did not have a significant impact on the consolidated financial statements for the current period or the previous year period.

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
• PBI No. 11 Tahun 2023 dan • PADG No. 11 Tahun 2023 perihal Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial • PBI No. 11/2023 and • PADG No. 11/2023 regarding the Macroprudential Liquidity Incentive Policy	1. BI meningkatkan total insentif yang dapat diterima Bank, dari sebelumnya paling tinggi 2,8% menjadi paling tinggi 4% yang berlaku sejak 1 Oktober 2023, dengan rincian sebagai berikut: a. Insentif atas pemberian kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar maksimal 2%; b. Insentif atas pencapaian RPIM maksimal 1%; c. Insentif atas pemberian kredit atau pembiayaan kepada Ultra Mikro (UMi) maksimal 0,5%; d. Insentif atas pemberian kredit atau pembiayaan berwawasan lingkungan maksimal 0,5% 2. Bank wajib menyampaikan laporan triwulanan Ultra Mikro (UMi) maksimal tanggal 20 bulan berikutnya 1. BI increased the total incentives that banks can receive, from previously a maximum of 2.8% to a maximum of 4% with effect from 1 October 2023, with the following details: a. Incentives for providing credit or financing to certain sectors are a maximum of 2%; b. Incentive for achieving RPIM maximum 1%; c. Incentive for providing credit or financing to Ultra Micro (UMi) maximum 0.5%; d. Incentive for providing environmentally sound credit or financing is a maximum of 0.5% 2. Banks are required to submit quarterly Ultra Micro (UMi) reports by the 20th of the following month
• PADG No. 2 Tahun 2023 dan • PADG No. 12 Tahun 2023 perihal Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUK, BUS dan UUS • PADG No. 2/2023 and • PADG No. 12/2023 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for BUK, BUS and UUS	BI melakukan penyesuaian besaran GWM yang diberikan remunerasi/'athaya sejalan dengan bertambahnya jumlah insentif melalui pengurangan pemenuhan GWM rata-rata menjadi sehingga besaran GWM yang mendapat remunerasi/ pemberian 'athaya menjadi sebagai berikut: a. BUK: 5-7 % b. UUS: 3,5-5,5% BI adjusted the amount of GWM that was given remuneration/'athaya in line with the increase in the number of incentives through reducing the average GWM fulfillment so that the amount of GWM that received remuneration/'athaya was as follows: a. BUK: 5-7% b. UUS: 3.5-5.5%

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
• POJK No. 9 Tahun 2023 dan • SEOJK No. 18 Tahun 2023 perihal Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan • POJK No. 9/2023 and • SEOJK No. 18/2023 regarding the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities	1. Bank wajib menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang: a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. Tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK; dan c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. 2. Mengubah aturan pembatasan penggunaan Jasa Audit dan Masa jeda / *cooling-off period* untuk penggunaan AP yang sama yaitu: a. Pembatasan penggunaan Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif, yang dihitung secara akumulatif sejak tahun buku 2017. b. Masa jeda / cooling-off period untuk penggunaan AP yang sama yaitu: AP rekan perikatan: 5 (lima) tahun buku Pelaporan secara berturut-turut. AP penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan: 3 (tiga) tahun buku Pelaporan secara berturut-turut. Rekan perikatan audit lainnya: 2 (dua) tahun buku Pelaporan secara berturut-turut. c. Dalam memastikan pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda, Bank meminta KAP menyediakan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*). 3. Bank wajib mencantumkan ruang lingkup audit spesifik dalam perjanjian kerja antara Bank dengan KAP yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan audit dengan memperhatikan ketentuan yang terkait dengan Bank. 1. Banks are required to use Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP): a. Registered with the Financial Services Authority (OJK); b. Recorded in the list of active APs and KAPs at OJK; And c. Competent in accordance with the complexity of the Bank's business. 2. Change the rules for limiting the use of Audit Services and the cooling-off period for the use of the same AP, namely: a. Restrictions on the use of Audit Services on annual historical financial information from the same AP for 7 (seven) cumulative years, calculated accumulatively since the 2017 financial year. b. The cooling-off period for the use of the same AP is: Engagement partner AP: 5 (five) consecutive reporting financial years. AP is responsible for reviewing engagement quality control: 3 (three) consecutive reporting financial years. Other audit engagement partners: 2 (two) consecutive reporting financial years. c. In ensuring compliance with restrictions on the use of audit services and cooling off periods, the Bank asks KAP to provide the results of its self-assessment. 3. Banks are required to include the specific audit scope in the work agreement between the Bank and the KAP which functions as a guide for carrying out the audit by taking into account the provisions related to the Bank.
• PADG No. 10 Tahun 2023 dan • PADG No. 18 Tahun 2023 perihal Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi BUK, BUS dan UUS • PADG No. 10/2023 and • PADG No. 18/2023 regarding the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) for BUK, BUS and UUS	1. Menambahkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai salah satu jenis surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM; 2. Menyesuaikan besaran kewajiban PLM BUK menjadi 5% dari DPK BUK dalam Rupiah (termasuk di dalam nya DPK UUS) 1. Adding Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) as one type of securities that can be taken into account in fulfilling PLM; 2. Adjusting the amount of BUK PLM obligations to 5% of BUK DPK in Rupiah (including UUS DPK)

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
POJK No. 17 Tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks	1. Menambahkan aturan terkait minimal *requirement* yang harus diatur dalam Piagam Komite. 2. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dapat beranggotakan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Syariah. 3. *Cooling off period* sebagai pihak independen pada komite Bank, diatur sebagai berikut: a. Mantan Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank: minimal 6 (enam) bulan; b. Mantan Direksi/Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Pengawasan: tidak diatur *cooling-off period*. 4. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan manajemen risiko Bank telah mencakup *Country Risk* dan *Transfer Risk* sesuai dengan yang diatur dalam POJK Manajemen Risiko. 5. Menambahkan aturan terkait Kebijakan Dividen. 6. Penambahan *disclosure* hubungan keuangan dan/atau keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sampai dengan derajat kedua pada Laporan Tahunan GCG. 7. Perubahan jangka waktu laporan insidental oleh Dewan Komisaris, apabila terdapat pelanggaran ketentuan dan/atau keadaan yang membahayakan Bank, diubah menjadi 5 (lima) Hari Kerja (HK) sebelumnya 7 (tujuh) HK. 8. Menambahkan aturan terkait pemberhentian/penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan berakhir. 9. *Cooling-Off Period* untuk Komisaris Independen, diatur sebagai berikut: a. Minimal 1 (satu) tahun bagi: Mantan anggota Direksi; Mantan Pejabat Eksekutif; Pihak lain yang mempunyai b. hubungan dengan Bank; Komisaris Non Independen; c. Minimal 6 (enam) bulan bagi: Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan; Mantan Direksi yang membawahkan fungsi Pengawasan (sebagai contoh: Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko); Mantan PE yang melaksanakan fungsi pengawasan (sebagai contoh: PE yang membawahi bidang Audit Internal). 1. Added rules regarding minimum requirements that must be regulated in the Committee Charter. 2. Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee may consist of independent parties who have expertise in the field of Sharia. 3. Cooling off period as an independent party on the Bank committee, is regulated as follows: a. Former Directors, Executive Officers, or parties related to the Bank: minimum 6 (six) months; b. Former Directors/Executive Officers in charge of Supervisory functions: no cooling-off period is regulated. 4. The Board of Directors and Board of Commissioners are required to ensure that the Bank's risk management implementation includes Country Risk and Transfer Risk in accordance with those regulated in the Risk Management POJK. 5. Added rules regarding Dividend Policy. 6. Additional disclosure of financial and/or family relationships for the Board of Directors and Board of Commissioners, up to the second degree in the GCG Annual Report. 7. Changes in the time period for incidental reports by the Board of Commissioners, if there is a violation of provisions and/or conditions that endanger the Bank, have been changed to 5 (five) Working Days (WD) from previously 7 (seven) WD. 8. Added regulations regarding the dismissal/replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners carried out before the term of office ends. 9. Cooling-Off Period for Independent Commissioners is regulated as follows: a. Minimum 1 (one) year for: Former members of the Board of Directors; Former Executive Officer; other parties having relationship with the Bank; Non-Independent Commissioner; b. Minimum 6 (six) months for: c. Former President Director of the Bank concerned; Former Directors who were in charge of the Supervisory function (for example: Compliance Director, Risk Management Director); Former PE who implemented the supervisory function (for example: PE in charge of Internal Audit).

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 perihal Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 concerning Assessment of Commercial Bank Digital Maturity Levels	1. Penilaian tingkat maturitas digital merupakan panduan bagi Bank untuk menentukan, menilai, dan mengevaluasi tingkat digitalisasi Bank untuk dapat mengetahui kondisi digitalisasi Bank. 2. Bank wajib melakukan self- assessment atas tingkat Maturitas Digital Bank (DMAB) secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. 3. Penilaian tingkat maturitas digital dapat Bank lakukan secara mandiri (self-assessment) dan/atau menggunakan pihak ketiga. 4. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur intern dalam melakukan penilaian yang paling sedikit memuat pihak yang melakukan penilaian dan pihak yang melakukan peninjauan atas penilaian. 5. Laporan self-assessment tingkat maturitas digital Bank: a. Disampaikan pertama kali untuk posisi akhir Desember 2023 maksimal akhir Juni 2024 b. Selanjutnya disampaikan secara berkala sebagai bagian dari Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan TI (LKTPTI) maksimal hari Kerja ke-15 Januari. 1. The digital maturity level assessment is a guide for the Bank to determine, assess and evaluate the Bank's digitalization level in order to determine the condition of the Bank's digitalization. 2. Banks are required to carry out self-assessments on the Bank's Digital Maturity level (DMAB) periodically at least once a year. 3. Banks can assess digital maturity levels independently (self-assessment) and/or use third parties. 4. Banks are required to have internal policies and procedures in carrying out assessments that at least include the party conducting the assessment and the party conducting the review of the assessment. 5. Bank's digital maturity level self-assessment report: a. Submitted for the first time for positions at the end of December 2023, maximum at the end of June 2024 b. Furthermore, it will be submitted periodically as part of the Current Conditions of IT Implementation Report (LKTPTI) no later than the 15th Working Day of January.
PADG No. 20 Tahun 2023 perihal Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia PADG No. 20 Tahun 2023 concerning Implementation Procedure for Consumer Protection of Bank Indonesia	1. Bank wajib mencantumkan pernyataan bahwa "Bank berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia" dalam setiap dokumen penawaran dan/atau Informasi produk. 2. Bank wajib melakukan edukasi kepada Konsumen untuk meningkatkan literasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 3. Bank wajib memiliki Fungsi Edukasi yang antara lain bertugas untuk menyampaikan laporan rencana dan pelaksanaan edukasi. 4. Bank wajib memiliki mekanisme pengganti kerugian kepada nasabah serta memiliki ketentuan internal terkait mitigasi dan penanganan pengaduan konsumen terhadap transaksi yang berindikasi *fraud* dan penipuan. 5. Bank wajib menyampaikan laporan terkait Pelindungan Konsumen yaitu: a. Laporan Rencana Edukasi; b. Laporan Pelaksanaan Edukasi; dan c. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan. 1. Banks are required to include a statement that "The Bank is licensed and supervised by Bank Indonesia" in every offering document and/or product information. 2. Banks are required to provide education to consumers to increase literacy at least 1 (one) time in 1 (one) semester. 3. Banks are required to have an Education Function which, among other things, is tasked with submitting reports on education plans and implementation. 4. Banks are required to have a mechanism to compensate customers for losses and have internal provisions related to mitigating and handling consumer complaints regarding transactions that indicate fraud and fraud. 5. Banks are required to submit reports related to Consumer Protection, namely: a. Education Plan Report; b. Education Implementation Report; And c. Complaint Handling and Settlement Report.

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
POJK No. 21 Tahun 2023 perihal Layanan Digital Oleh Bank Umum POJK No. 21 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks	1. Tidak lagi ada pemisahan antara LPE dan LPD serta perizinan yang terpisah. Sekarang menggunakan istilah Layanan Digital Bank Umum (LDBU) dan tidak dipisahkan perizinannya. 2. Layanan Digital dapat diselenggarakan oleh: a. Bank; atau b. Dengan mitra Bank berdasarkan perjanjian kerja sama. 3. Layanan Digital terkait dengan sistem pembayaran yang perizinan sepenuhnya diatur oleh otoritas sistem pembayaran di Indonesia (contoh: Bank Indonesia), ditetapkan menjadi produk bank dasar. 4. Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah melalui Layanan Digital sesuai dengan ketentuan APU-PPT dan PPSPM. 5. Bank yang menyelenggarakan Layanan Digital wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Digital 6. Bank dapat memanfaatkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kewajiban laporan: a. Laporan daftar mitra dalam melakukan kerja sama Layanan Digital yang disampaikan sebagai bagian dari Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan TI Bank; b. Laporan Realisasi jika Bank telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan Layanan Digital maksimal 5 (lima) hari kerja setelah implementasi; c. Laporan evaluasi penyelenggaraan Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru maksimal 3 (tiga) bulan setelah implementasi. 1. There is no longer a separation between LPE and LPD and separate licensing. It now uses the term Commercial Bank Digital Services (LDBU) and licensing is not separated. 2. Digital Services can be organised by: a. Bank; or b. With the Bank's partners based on a cooperation agreement. 3. Digital Services related to payment systems whose licences are fully regulated by the payment system authority in Indonesia (e.g. Bank Indonesia), are designated as basic bank products. 4. Banks are required to conduct identification and verification in conducting business relationships with customers or prospective customers through Digital Services in accordance with AML-PPT and PPSPM provisions. 5. Banks that organise Digital Services must have a unit or function in charge of handling the implementation of Digital Services. 6. Banks can utilise the use of electronic signatures in the implementation of Digital Services in accordance with the provisions of laws and regulations. 7. Report obligations: a. Report on the list of partners in conducting Digital Services cooperation submitted as part of the Bank's IT Implementation Current Status Report; b. Realisation Report if the Bank has obtained permission to conduct Digital Services within 5 (five) working days after implementation; c. Evaluation report on the implementation of Digital Services that meet the criteria of new products maximum 3 (three) months after implementation.
PADG No. 22 Tahun 2023 perihal Kepesertaan Operasi Moneter PADG No. 22 of 2023 concerning Monetary Operation Participation	1. Bank sebagai peserta Operasi Moneter yang telah memperoleh izin dari BI, wajib menyampaikan bukti pedaftaran dealer tresuri paling lambat tanggal 1 Agustus 2024, melalui *front office* perizinan (*e-licensing*). 2. Laporan Insidental: a. Laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter: Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi (sebelum nya 30 hari kalender). b. Laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia berupa kepemilikan sertifikat tresuri maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi (sebelumnya 30 hari kalender). 1. Banks as Monetary Operation participants that have obtained permission from BI, are required to submit proof of treasury dealer registration no later than 1 August 2024, through the licensing front office (e-licensing). 2. Incidental Report: a. Report on changes in data, information, and/or information related to the fulfilment of requirements as a Monetary Operations participant: Maximum 20 (twenty) working days since the change occurs (previously 30 calendar days). b. Report on changes in data, information, and/or information related to the fulfilment of human resource competency aspects in the form of treasury certificate ownership: Maximum 20 (twenty) working days since the change occurred (previously 30 calendar days)

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
POJK No. 29 Tahun 2023 perihal Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka POJK No. 29 of 2023 regarding the Buyback of Shares Issued by Public Companies	1. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham yaitu wajib diselesaikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham (sebelumnya 18 (delapan belas) bulan). 2. Jika Bank akan menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham sebelum selesainya pembelian kembali saham, Bank wajib: a. Menyampaikan informasi mengenai penghentian pembelian kembali saham kepada OJK disertai dengan alasan penghentian pembelian kembali saham; dan b. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian pembelian kembali c. saham disertai dengan alasan penghentian pembelian kembali saham, maksimum 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan kembali saham. 3. Bank wajib melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali (refloat) dalam jangka waktu 3 tahun setelah selesainya pembelian kembali saham. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila: a. Bank telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali paling sedikit 10% dari saham hasil pembelian kembali; atau b. Harga saham Bank selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham Bank. 1. Changes to the period of implementation of share buybacks, which must be completed no later than 12 (twelve) months after the date of the GMS approving the share buyback (previously 18 (eighteen) months). 2. If the Bank will stop the implementation of the share buyback before the completion of the share buyback, the Bank shall: a. Submit information regarding the termination of the share buyback to OJK along with the reasons for the termination of the share buyback; and b. Announce to the public regarding the termination of share buyback c. shares along with the reasons for the termination of share buyback, at a maximum of 2 (two) business days after the decision on the termination of share buyback. 3. The Bank shall transfer the repurchased shares (refloat) within 3 years after the completion of the share buyback. The period may be extended if: a. The Bank has transferred the repurchased shares at least 10% of the repurchased shares; or b. The Bank's share price for 3 (three) years after the completion of the share buyback never exceeds the average price of the Bank's share buyback.
SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 perihal Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks	1. Bank wajib melakukan *self-assessment* terkait tingkat maturitas keamanan siber. 2. Bank wajib melakukan pengujian keamanan siber secara berkala atas keamanan jaringan, sistem dan data berdasarkan skenario dan analisis kerentanan. 3. Bank wajib membentuk unit/fungsi yang menangani ketahanan dan keamanan siber Bank. 1. Banks are required to conduct self-assessment regarding the level of cyber security maturity. 2. Banks are required to conduct periodic cybersecurity testing of network, system and data security based on scenarios and vulnerability analysis. 3. Banks are required to establish a unit/function that handles the Bank's cyber resilience and security.
PBI No. 6 Tahun 2023 perihal Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing PBI No. 6 of 2023 concerning the Money Market and Foreign Exchange Market	1. Treasury dealer harus terdaftar di BI. 2. BI dapat membentuk *Self-Regulatory Organization* (SRO) untuk mendukung pengembangan pasar uang dan/atau pasar valuta asing. 3. Perlindungan konsumen berlaku bagi semua pihak yang melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing yang berhubungan langsung dengan konsumen. Ketentuan tersebut sejalan dengan peraturan BI yang baru tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 1. Market Treasury dealers must be registered with BI. 2. BI may establish a Self-Regulatory Organisation (SRO) to support the development of money market and/or foreign exchange market. 3. Consumer protection applies to all parties conducting activities in the money market and foreign exchange market that are in direct contact with consumers. These provisions are in line with the new BI regulation on Bank Indonesia Consumer Protection.

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.	1. Bank wajib melakukan penilaian risiko TPPU TPPT PPSPM terhadap nasabah, negara/geografis, produk, layanan, transaksi atau jaringan distribusi dan menyampaikan dokumen penilaian risiko tersebut yaitu *Individual Risk Assessment* (IRA) kepada OJK setiap tahun. 2. Bank secara proaktif melakukan tindakan penanggulangan (counter measures) terhadap negara/yurisdiksi FATF yang berisiko tinggi. 3. Bank dapat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan pihak ketiga yang harus memenuhi kriteria dan pemanfaatannya diatur melalui perjanjian tertulis. 4. Anggota Konglomerasi Keuangan (KK) harus menerapkan standar APU PPT PPPSPM yang sama. Entitas Utama dalam KK bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penjaminan. 5. Bank wajib menyelaraskan kebijakan internal dengan POJK ini paling lambat di Desember 2023. 1. Banks are obliged to conduct a risk assessment of ML/TFT PPSPM on customers, countries/geographies, products, services, transactions or distribution networks and submit the risk assessment document, namely Individual Risk Assessment (IRA) to OJK every year. 2. Banks proactively take counter measures against high-risk FATF countries/jurisdictions. 3. Banks may use the results of identification and verification conducted by third parties that must meet the criteria and the utilisation is regulated through a written agreement. 4. Members of the Financial Conglomerate (FFC) must apply the same AML/CFT standards. The Lead Entity in the HH is responsible for implementation and assurance. 5. Banks are required to align internal policies with this POJK by December 2023.
PBI No. 3 Tahun 2023 perihal Pelindungan Konsumen Bank Indonesia PBI No. 3 of 2023 concerning Bank Indonesia Consumer Protection	1. Hak dan kewajiban Konsumen dan Penyedia Sistem Pembayaran (termasuk Bank) dan memastikan Penyedia memberikan edukasi kepada Konsumen mengenai Hak dan Kewajibannya. 2. Pengaturan tambahan penanganan pengaduan jika terjadi perselisihan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk memperkuat koordinasi dengan badan otoritas lain seperti OJK, Asosiasi, Kepolisian dalam penanganan pelindungan konsumen. 3. Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (Pelindungan Konsumen) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen. 4. Penyelenggara meliputi: a. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran; b. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; c. pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan d. pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, yang berhubungan langsung dengan Konsumen. 1. Rights and obligations of Consumers and Payment System Providers (including Banks) and ensuring Providers educate Consumers on their Rights and Obligations. 2. Additional arrangements for handling complaints in the event of a dispute through alternative dispute resolution institutions, including strengthening coordination with other authorities such as OJK, Associations, Police in handling consumer protection. 3. Bank Indonesia Consumer Protection (Pelindungan Konsumen) is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. 4. Organisers include: a. Organiser in the field of Payment System; b. Money Service Activity Organisers; c. parties conducting activities in the Money Market and Foreign Exchange Market; and d. other parties regulated and supervised by Bank Indonesia, which are in direct contact with consumers.

Peraturan Perundangan - Undangan Laws and Regulations	Perubahan Signifikan dari Peraturan Sebelumnya atau Pokok dari Peraturan yang Baru Significant Changes to Previous Regulations or the Principals of New
PBI No. 7 tahun 2023 perihal Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) PBI No. 7 of 2023 concerning Export Proceeds Foreign Exchange (DHE) and Import Payment Foreign Exchange (DPI)	1. Kewajiban eksportir untuk menempatkan 30% dana DHE > USD 250,000.00 paling sedikit selama tiga bulan di Sistem Keuangan Indonesia. Dana ini dapat ditempatkan dalam bentuk Rekening FCY Khusus Eksportir di Bank, *Foreign Currency* (FCY) TimenDeposit (FCY), Term Deposit FCY di Bank Indonesia (BI) melalui Bank Agen, atau *promissory note* LPEI. 2. Eksportir dapat menggunakan dana tersebut sebagai jaminan tunai atas pinjaman FCY atau sebagai dasar transaksi FX *Swap* antara Eksportir dan Bank. 3. Bank wajib memberikan penanda khusus untuk dana yang ditempatkan pada instrumen perbankan serta melaporkannya kepada Bank Indonesia setiap bulan. 1. The obligation of exporters to place 30% of DHE funds > USD 250,000.00 for at least three months in the Indonesian Financial System. These funds can be placed in the form of a Special FCY Account for Exporters at the Bank, Foreign Currency (FCY) Time Deposit (FCY), FCY Term Deposit at Bank Indonesia (BI) through an Agent Bank, or an LPEI promissory note. 2. Exporters may use these funds as cash collateral for FCY loans or as the basis for FX Swap transactions between Exporters and Banks. 3. Banks are required to provide special markers for funds placed in banking instruments and report them to Bank Indonesia every month.
PBI No. 10 Tahun 2023 perihal Perubahan atas PBI No. 4 Tahun 2023 perihal Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional PBI No. 10 of 2023 concerning Amendments to PBI No. 4 of 2023 concerning Short Term Liquidity Loans (PLJP) for Conventional Commercial Banks	1. SRBI dapat dijadikan agunan PLJP. 2. Nilai agunan berupa SRBI ditetapkan 100%. 1. SRBI can be used as collateral for PLJP. 2. The collateral value in the form of SRBI is set at 100%.

Alasan Perubahan Reasons for Change	Pengaruh terhadap BJI The Impact on BJI
BI memperkuat stimulus Kebijakan Makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan pengurangan giro Bank di BI. BI strengthens the Macroprudential Policy stimulus to encourage the growth of Banking Credit/Financing through the implementation of the Macroprudential Liquidity Incentive (KLM) Policy by reducing bank demand deposits at BI.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima Bank sehingga mempengaruhi besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah yang diberikan remunerasi/pemberian('athaya) pada Bank. Increase in the total amount of incentives that can be accepted by the Bank, thereby affecting the amount of the certain share from fulfilling GWM obligations in Rupiah which is given remuneration/gifts ('athaya) to the Bank.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Akuntan Publik yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa audit, diperlukan harmonisasi pengaturan yang ditujukan untuk mewujudkan hubungan yang independen dan juga memberikan *learning curve* yang memadai untuk memahami kondisi Pihak (dalam hal ini Bank) dalam pemberian jasa. In line with the provisions of laws and regulations and the Public Accountant professional code of ethics which regulate restrictions on the use of audit services, harmonization of regulations is needed which is aimed at creating an independent relationship and also providing an adequate learning curve to understand the conditions of the Party (in this case the Bank) in providing service.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. BI menerbitkan surat berharga berupa SRBI yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 2. Sebagai upaya untuk mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan serta memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh Perbankan dalam penyaluran kredit. 1. BI issued securities in the form of SRBI which can be taken into account in fulfilling the Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) 2. As an effort to encourage Credit or Financing distribution and provide flexibility in liquidity management by banks in credit distribution.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Alasan Perubahan Reasons for Change	**Pengaruh terhadap BJI** The Impact on BJI
1. Penyelarasan pengaturan Tata Kelola bagi Bank dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis terkini; 2. Harmonisasi berbagai ketentuan terkait Tata Kelola Bank, serta harmonisasi dengan sektor lain; dan 3. *Best Practice* terkini dan Benchmarking Negara lain. 1. Alignment of Governance arrangements for the Bank with the latest developments and business needs; 2. Harmonization of various provisions related to Bank Governance, as well as harmonization with other sectors; and 3. Latest Best Practice and Benchmarking from other countries.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. Diperlukan panduan untuk mengevaluasi tingkat digitalisasi Bank; 2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK No. 11/POJK.03/2022 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI) untuk mengatur mekanisme mengenai penilaian tingkat maturitas digital Bank 1. Guidelines are needed to evaluate the level of digitalization of Banks; 2. As an implementing regulation of POJK No. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks (POJK PTI) to regulate mechanisms regarding the assessment of Bank digital maturity levels	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. Respon dari Bank Indonesia atas penerbitan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), serta menjawab tantangan terselenggaranya Pelindungan Konsumen yang efektif di tengah perkembangan ekonomi keuangan digital. 2. Sebagai peraturan teknis untuk mendukung implementasi prinsip Pelindungan Konsumen oleh Bank Indonesia. 1. Response from Bank Indonesia to the issuance of Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK), as well as responding to the challenges of implementing effective Consumer Protection amidst the development of the digital financial economy. 2. As a technical regulation to support the implementation of Consumer Protection principles by Bank Indonesia.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. Sebagai tindak lanjut *Roadmap* Pengembangan PerbankanIndonesia 20202025 dan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 2021; 2. Respon atas penerbitan UU No. 4 Tahun 2023 perihal Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); 3. Solusi dari permasalahan penyelenggaraan Layanan Perbankan Elektronik (LPE) dan Layanan Perbankan Digital (LPD) 1. As a follow-up to the Indonesian Banking Development Roadmap 20202025 and Banking Digital Transformation Blueprint 2021; 2. Response to the issuance of Law No. 4 of 2023 regarding Strengthening the Financial Sector (P2SK Law); 3. Solutions to problems in the implementation of Electronic Banking Services (EBS) and Digital Banking Services (DBS)	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Diperlukan penyesuaian pengaturan kepesertaan Operasi Moneter oleh BI dalam rangka menjaga pemenuhan aspek tata kelola dan harmonisasi dengan perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Adjustments to the Monetary Operations participation arrangements by BI are required in order to maintain the fulfilment of governance aspects and harmonisation with the development of applicable regulations in the Money Market and Foreign Exchange Market.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Alasan Perubahan Reasons for Change	Pengaruh terhadap BJI The Impact on BJI
1. Merupakan upaya OJK untuk mengatasi kendala implementasi ketentuan mengenai pembelian kembali saham perusahaan Terbuka dan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. 2. Dalam rangka memperkuat aspek keterbukaan informasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembelian kembali saham serta pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali oleh Perusahaan Terbuka, menyesuaikan ketentuan dengan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain serta mengakomodir mekanisme pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dalam praktiknya sudah dapat dilakukan namun mekanismenya belum diatur secara rinci dalam regulasi 1. This is OJK's effort to overcome obstacles in the implementation of the provisions regarding the repurchase of shares of public companies and the transfer of shares resulting from the repurchase which were previously regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of Shares Issued by Public Companies. 2. In order to strengthen the aspects of information disclosure and supervision over the implementation of share buyback and fulfilment of the obligation to transfer shares resulting from buyback by Public Companies, adjusting the provisions with the best practices applied in other countries and accommodating the mechanism of transferring shares resulting from buyback which in practice can be done but the mechanism has not been regulated in detail in the regulation	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. Kebutuhan & Harapan Industri Perbankan serta risiko TI dalam rangka Transformasi Digital (Era Bank 4.0) 2. Perkembangan Industri Keuangan Baru dan Ekosistem Keuangan Digital 3. Perpres No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital 4. Arah Kebijakan Perbankan (RP2I 2020-2025) 5. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 6. Mendukung Transformasi Digital dan Resiliensi Siber Industri Perbankan 1. Banking Industry Needs & Expectations and IT risks in the context of Digital Transformation (Bank 4.0 Era) 2. Development of New Financial Industry and Digital Financial Ecosystem 3. Presidential Regulation No. 82 Year 2022 on Protection of Vital Information Infrastructure 4. Banking Policy Direction (RP2I 2020-2025) 5. Blueprint for Banking Digital Transformation 6. Supporting Digital Transformation and Cyber Resilience of the Banking Industry	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Alasan Perubahan Reasons for Change	Pengaruh terhadap BJI The Impact on BJI
1. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan Pasar Uang yang modern dan maju sebagaimana dimuat dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang. Pasar Uang yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional. 2. Pasar Uang yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang secara menyeluruh (end-to-end) yang meliputi: a. Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang (product) yang juga mencakup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap instrumen keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memiliki: 1) lebih dari 1 (satu) karakteristik antara Pasar Uang dengan pasar modal, dan/atau pasar komoditi misalnya transaksi repo repurchase agreement); dan/atau 2) karakteristik risiko, hak, dan manfaat yang setara terhadap investor atau penerbit; b. harga acuan (pricing) yang dapat digunakan dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, penerbitan instrumen keuangan, dan/atau transaksi di pasar keuangan lainnya; c. pelaku pasar (participants) yang berkaitan dengan Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang; dan d. penggunaan infrastruktur pasar keuangan di Pasar Uang, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (well-functioning money market). 1. Strengthening the authority to regulate, develop and supervise the Money Market is in line with Bank Indonesia's efforts to realise a modern and advanced Money Market as contained in the Money Market Development Blueprint. A modern and advanced Money Market will contribute to the development and deepening of financial markets, which in turn will support the effectiveness of monetary policy, financial system stability, and national economic financing synergies. 2. Modern and advanced Money Market can be realised through the regulation, development, and supervision of the Money Market as a whole (end-to-end) which includes: a. Money Market Instruments and Money Market Transactions (product) which also includes the regulation, development, and supervision of financial instruments and/or transactions on financial instruments that have: 1) Strengthening the authority to regulate, develop and supervise the Money Market is in line with Bank Indonesia's efforts to realise a modern and advanced Money Market as contained in the Money Market Development Blueprint. A modern and advanced Money Market will contribute to the development and deepening of financial markets, which in turn will support the effectiveness of monetary policy, financial system stability, and national economic financing synergies. 2) Modern and advanced Money Market can be realised through the regulation, development, and supervision of the Money Market as a whole (end-to-end) which includes: b. reference price (pricing) that can be used in the issuance of Money Market Instruments, Money Market Transactions, issuance of financial instruments, and/or transactions in other financial markets; c. market participants related to the issuance of Money Market Instruments and/or Money Market Transactions; and d. the use of financial market infrastructure in the Money Market, so that the Money Market becomes organised and well-functioning.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Alasan Perubahan Reasons for Change	Pengaruh terhadap BJI The Impact on BJI
1. Sebagai bentuk mitigasi atas potensi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dibutuhkan sebuah upaya konkrit yang salah satunya melalui penguatan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. 2. FATF sebagai badan internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan standar internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM telah menyusun FATF Recommendations sebagai standar internasional rezim APU, PP T, dan PPPSPM yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh negara. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, maka segala regulasi terkait berpedoman pada FATF Recommendations, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 1. As a form of mitigation of the potential risks of ML, TPPT, and/or PPPSPM that continue to grow and become a serious threat to many countries, including Indonesia, a concrete effort is needed, one of which is through strengthening the regulatory framework in accordance with the development of international principles governing the implementation of AML, PPT, and PPPSPM programmes. 2. FATF as an international body established with the aim of setting international standards regarding the prevention and eradication of ML, TPPT, and/or PPPSPM has compiled the FATF Recommendations as an international standard for AML, CFT, and PPPSPM regimes that must be used as guidelines by all countries. As a form of Indonesia's commitment in the global arena to prevent and eradicate ML, TPPT, and/or PPSPM, all related regulations are guided by the FATF Recommendations, including the provisions of laws and regulations in the financial services sector issued by the Financial Services Authority that do not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year period.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. Penerbitan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu isu utama yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya pelindungan konsumen dalam sektor keuangan. Pelindungan konsumen sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta mendukung tercapainya stabilitas sektor keuangan. 2. UU P2SK mengatur berbagai aspek yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam peraturan Bank Indonesia, seperti Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Selain itu, terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection. Untuk itu Bank Indonesia perlu menyesuaikan dan mengatur kembali mengenai aspek-aspek pelindungan konsumen yang berada dalam cakupan kewenangan Bank Indonesia, agar dapat sejalan dan mendukung penerapan UU tersebut. 1. The issuance of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) is the government's effort to promote public welfare through the reform of Indonesia's financial sector. One of the main issues that drives the issuance of the P2SK Law is the lack of consumer protection in the financial sector. Consumer protection is essential to increase public confidence in financial products and services, as well as to support the achievement of financial sector stability. 2. The P2SK Law regulates various aspects that have not previously been specifically regulated in Bank Indonesia regulations, such as Bank Indonesia Consumer Protection Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. In addition, the issuance of the Personal Data Protection Law (PDP Law) also encourages a review of data protection arrangements and follows the G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection. For this reason, Bank Indonesia needs to adjust and re-regulate aspects of consumer protection that are within the scope of Bank Indonesia's authority, in order to be in line with and support the implementation of the Law.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Alasan Perubahan Reasons for Change	Pengaruh terhadap BJI The Impact on BJI
1. DHE dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional dan mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih kuat serta stabilitas ekonomi makro. Manfaat DHE bagi perekonomian tersebut dapat dicapai dalam hal penempatannya dilakukan melalui sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan DHE. Selain DHE, terdapat DPI yang juga perlu dipantau penggunaannya guna mendukung optimalisasi perolehan informasi permintaan devisa pembayaran nasional. 2. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional, mendukung peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai pemasukan dan penempatan DHE yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia. 3. Diperlukan pengaturan yang dapat memastikan pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia, akurasi pelaporan DPI, serta efektivitas pelaksanaan pengawasannya 1. DHE can be a sustainable source of funds for national economic development and support the creation of stronger financial markets and macroeconomic stability. The benefits of DHE for the economy can be achieved if it is placed through the Indonesian financial system. Therefore, DHE monitoring is required. In addition to DHE, DPI also needs to be monitored in order to support the optimisation of information on the national demand for foreign exchange payments. 2. To maintain the continuity of national development, support the improvement and resilience of the national economy, and optimise the use of natural resources that are used to the greatest extent for the prosperity of the people, the Government has issued a policy regarding the entry and placement of DHE derived from the activities of exploitation, management, and/or processing of natural resources into the Indonesian financial system. 3. Regulations are needed to ensure the inclusion, placement, and utilisation of DHE SDA in the Indonesian financial system, the accuracy of DPI reporting, and the effectiveness of its supervisory implementation.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
1. Penerbitan UU No. 4 tahun 2023 (UU P2SK) menyebabkan perubahan pada beberapa UU terkait, termasuk UU yang mengatur mengenai pemberian PLJP/PLJPS oleh Bank Indonesia: a. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 mengenai Bank Indonesia b. UU No. 9 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 2. Penyelarasan dengan pengaturan, acuan, dan/atau kebijakan terkini, a.l. nilai agunan terhadap plafon untuk SBN, periode restrukturisasi aset kredit/pembiayaan dalam rangka stimulus COVID-19, serta penambahan kredit/pembiayaan pensiunan. 1. The issuance of Law No. 4 of 2023 (P2SK Law) led to changes in several related laws, including laws governing the provision of PLJP/PLJPS by Bank Indonesia: a. Law No. 23 Year 1999 as last amended by Law No. 6 Year 2009 on Bank Indonesia b. Law No. 9 Year 2016 on Financial System Crisis Prevention and Management 2. Alignment with current regulations, references, and/or policies, e.g. collateral value to ceiling for SBN, restructuring period for credit/financing assets in the context of COVID-19 stimulus, and additional pension credit/financing.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya Has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan sejumlah amandemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2024:

Changes in Accounting Policies

In the current year, the Bank has implemented several PSAK amendments/adjustments that are relevant to its operations and effective for accounting periods that begin on or after 1 January 2024. Adoption of the revised PSAK did not result in changes to the Bank's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the current year or previous years.

The following are changes and interpretations of financial accounting standards that are effective January 1, 2024:

- Perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- PSAK 116 (Amandemen), "Sewa": Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.
- PSAK 201 (Amandemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

- Changes in the numbering of PSAK and ISAK in the Indonesian Financial Accounting Standards.
- PSAK 116 (Amendment), "Lease": Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions.
- PSAK 201 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Long-Term Liabilities with Covenants.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

J Trust Bank mempertimbangkan prospek ekonomi dunia, regional, dan domestik dalam membuat rencana bisnis tahun 2025, selain kinerja Bank secara historis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sehingga manajemen Bank menetapkan pertumbuhan bisnis akan meningkat sejalan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank tidak melihat adanya hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya di Indonesia. Dengan dukungan Pemegang Saham Pengendali yang berkelanjutan, diharapkan J Trust Bank akan terus mengembangkan usahanya dan terus tumbuh berkesinambungan di masa yang akan datang.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

J Trust Bank secara berkala melakukan evaluasi rencana bisnis dan melakukan penilaian atas kemampuan Bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta terus melanjutkan kelangsungan usaha Bank. Di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian dan tantangan, Bank terus fokus untuk mengembangkan bisnis secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, memperkuat likuiditas dan permodalan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian, menangkap peluang pertumbuhan bisnis, meningkatkan praktik tata kelola yang baik dan meningkatkan pengelolaan risiko Bank, serta melakukan efisiensi di seluruh lapisan organisasi.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Dalam melakukan evaluasi kelangsungan usaha, manajemen Bank mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kondisi perekonomian dan industri, kinerja keuangan dan rencana strategis Bank, serta perkembangan kondisi geopolitik global.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Matters with Potentially Significant Effect on Business Continuity

J Trust Bank evaluated prospects of the global, regional, and domestic economies in In developing the 2025 business strategy, in addition to the Bank's historical performance. Indonesia's economic growth in 2025 is expected to be slightly higher than 2024, therefore the Bank's management set business growth to increase in line with the domestic economic growth.

The Bank sees no matters with potentially significant effect on its business continuity in Indonesia. With the continued support of Controlling Shareholder, J Trust Bank will be able to develop business and continue to grow sustainably in the future.

Management Assessment of Matters with Potentially Significant Effect on Business Continuity

J Trust Bank regularly evaluates business plan and makes assessment on the Bank's ability to meet the set targets while maintaining business continuity. Amid ongoing uncertainties and challenges, the Bank remains focused on developing business selectively by prioritizing prudential principles, strengthening liquidity and capital to face challenges and uncertainties, seizing business growth opportunities, improving good governance practices and the Bank's risk management, as well as implementing efficiency at all levels of the organization.

Assumptions Used by the Management in Conducting Assessments

In evaluating business continuity, the Bank's management considers several factors, including economic and industrial conditions, the Bank's financial performance and strategic plans, as well as development in global geopolitical conditions.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Bank terus menyempurnakan sistem teknologi informasi dan infrastruktur terkait untuk menyesuaikan dengan lanskap digital yang berkembang pesat. Kemampuan teknologi informasi yang tepat akan mampu mendukung Bank dalam mengeksekusi strategi yang dicanangkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Bank juga terus melatih dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya agar lebih tanggap secara digital.

The Bank continued to refine its information technology system and relevant infrastructure to adapt to the rapidly evolving digital landscape. The right information technology capabilities will support the Bank in executing its planned strategies to achieve the targeted performance. The Bank also continued to train and develop the capabilities of its human resources to be more digital-savvy.

Pada tahun 2024, divisi Teknologi Informasi J Trust Bank mampu menjalankan strategi yang dicanangkan dengan baik dalam mendukung kinerja Bank yang terus bertumbuh dari tahun sebelumnya. Sistem TI terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan lanskap digital yang berkembang pesat sejak pandemi COVID-19.

In 2024, the Information Technology Division of J Trust Bank effectively executed the planned strategy to support the Bank's performance, which continued to grow from the previous year. The IT system was refined continuously to adapt to the rapidly evolving digital landscape since the COVID-19 pandemic.

Selain sistem dan infrastruktur TI, J Trust Bank juga terus melatih dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya agar lebih tanggap secara digital. SDM Bank dapat melakukan pengembangan digital melalui berbagai pelatihan dan seminar dari internal atau eksternal (OJK, BI, badan sertifikasi, perusahaan teknologi lainnya).

In addition to the IT system and infrastructure, J Trust Bank continued to train and develop the capabilities of its human resources to be more digital-savvy. The Bank's human resources could enhance their digital skills through various training sessions and seminars from both internal and external sources (OJK, BI, certification bodies, and other technology companies).

Tata Kelola TI

Dalam penyelenggaraan TI, Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 24/SEOJK.03/2023 Tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.03/2022 Tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Selain itu, Bank juga memiliki prosedur standar operasional (SOP) sendiri, yang ditinjau dan diperbarui setiap 2 (dua) tahun atau jika terjadi perubahan praktik operasional.

IT Governance

For IT implementation, the Bank refers to Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 on Payment Service Providers, OJK Regulation No. 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2023 on the Digital Maturity Level Assessment in Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 29/SEOJK.03/2022 on Cyber Resilience and Security for Commercial Banks, OJK Regulation No. 11/POJK.03/2022 on the Information Technology Implementation by Commercial Banks, OJK Regulation No. 13/POJK.03/2021 on Product the Implementations in Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 on Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by Commercial Banks. In addition, the Bank also has its own standard operating procedures (SOP), which are reviewed and updated every 2 (two) years or whenever there is a change in operational practices.

Pengendalian atas Gangguan TI

Untuk memastikan kelancaran sistem TI Bank dan mengendalikan potensi gangguan (*disruption*), Bank menerapkan kebijakan manajemen risiko yang sejalan dengan SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Bank menentukan penanganan risiko TI berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kebijakan strategis Bank. Manajemen TI menentukan

Management of IT Disruption

To ensure the Bank's IT system runs smoothly and control potential disruption, the Bank implements a risk management policy in line with SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 on Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

The Bank determines IT risk management based on risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic policies. IT management determines

penanganan risiko dengan menerima, menghindari, mengalihkan, atau mengendalikan risiko tersebut. Unit *Risk Taking* melaporkan status mitigasi risiko pada unit kerja Manajemen Risiko dan kepada Direksi secara berkala.

Manajemen Pengamanan Informasi TI

Bank memiliki kebijakan manajemen pengamanan informasi TI untuk menjaga keamanan dunia maya, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan infrastruktur TI melalui implementasi kebijakan, rencana, dan prosedur pengamanan informasi serta aktivitas pemantauan, deteksi, pelaporan, dan tindak lanjut atas insiden keamanan dan laporan kelemahan keamanan.

Divisi TI berperan sebagai koordinator utama dari upaya-upaya pengamanan layanan TI. Dalam menjalankan peran sebagai koordinator utama divisi TI melakukan:

a) Pengendalian terhadap *malicious code*;
b) Menjamin ketersediaan data dan kemampuan pemulihan sistem;
c) Mengkoordinasikan implementasi pengendalian untuk mengamankan jaringan komunikasi data; dan
d) Membatasi akses terhadap layanan TI dan komponen pendukungnya sesuai kebutuhan Bank.

Rencana Pemulihan Bencana TI

Dalam hal pemulihan bencana (*disaster recovery*), manajemen TI memiliki kebijakan guna menjaga kelangsungan dan memulihkan layanan TI dalam keadaan darurat dengan menerapkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal penerapan prosedur *Disaster Recovery Plan*, divisi TI menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengadakan dan menjalankan sarana pemulihan bencana. Evaluasi tingkat kekritisan layanan dilakukan pada tahap awal rencana perubahan layanan TI.

Prosedur *Disaster Recovery Plan* TI Bank diselaraskan kepada prosedur *Business Continuity Plan*. Manajemen menetapkan pilihan dan strategi pemulihan berdasarkan hasil Business Impact Analysis dan hasil analisa risiko. Manajemen menetapkan struktur organisasi dan anggota tim *Disaster Recovery* yang diperbarui setiap tahunnya. Prosedur *Disaster Recovery Plan* juga diperbarui agar selalu mencerminkan kondisi terkini.

risk management by accepting, avoiding, diverting, or controlling the risks. The Risk Taking Unit reports the status of risk mitigation to the Risk Management work unit and the Board of Directors periodically.

Management of IT Information Security

The Bank has an IT information security management policy to maintain cyber security, confidentiality, integrity, and availability of information and IT infrastructure through the implementation of information security policies, plans, and procedures as well as monitoring, detection, reporting, and follow-up activities for security incidents and security weakness reports.

The IT Division acts as the main coordinator of efforts to secure IT services. In its role as the main coordinator of the IT division, it carries out:

a) Control of malicious code;
b) Guarantee of data availability and system recovery capabilities;
c) Coordination of the implementation of controls to secure data communications networks; and
d) Limit of access to IT services and supporting components according to the Bank's needs.

IT Disaster Recovery Plan

For disaster recovery, the IT management has policies in place to maintain continuity and restore IT services in emergency situations by implementing plans that align with the needs.

In implementing Disaster Recovery Plan procedures, the IT division provides necessary resources to organize and operate disaster recovery facilities. Evaluation of the service criticality levels is carried out at the initial stage of the IT service change plan.

The Bank's IT Disaster Recovery Plan procedures are aligned with the Business Continuity Plan procedures. The management determines recovery options and strategies based on the results of Business Impact Analysis and risk analysis. The management establishes the organizational structure and members of the Disaster Recovery team, which is updated annually. Disaster Recovery Plan procedures are also updated to continually reflect current conditions.

Pengujian *Disaster Recovery Plan* dilakukan minimal setiap tahun dan mencakup pengujian replikasi data dan pengujian fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Divisi TI melakukan pengujian bersama bagian-bagian lain di Bank dalam rangka pengujian *Disaster Recovery Plan*.

Disaster Recovery Plan is tested at least annually and includes testing of data replication as well as hardware and software functionality. The IT division conducts testing in collaboration with other departments within the Bank as part of the Disaster Recovery Plan testing.

Strategi TI 2024

Sebagai kontinuitas dari strategi TI di tahun-tahun sebelumnya, divisi TI Bank melakukan strategi-strategi berikut pada tahun 2024:

- Melakukan optimalisasi infrastruktur yang meliputi:
  - *Core-Banking Replacement phase 1*
- Peningkatan layanan kepada nasabah, di antaranya:
  - Penyempurnaan aplikasi *virtual account*
- Peningkatan operasional, di antaranya:
  - HRIS, *Human Resource Information System phase 1*
  - Integrasi New SMART AML ke *Core Banking System*.
  - Pengadaan laptop dan PC untuk cabang
- Penyempurnaan sistem TI, di antaranya:
  - *Network optimization*, memaksimalkan kinerja jaringan
  - Relokasi Pusat Data
  - *Endpoint management* (Ivanti)
  - *Add license Sophos server*
  - *Refreshment NAC appliance*
  - *Application Performance Management*
- Pengkinian Sistem Pelaporan, di antaranya:
  - Antasena, aplikasi pelaporan ke Bank Indonesia
  - OBOX, aplikasi pelaporan debitur dan kreditur terbesar ke OJK
  - Apolo, aplikasi pelaporan manajemen risiko dan modal ke OJK
  - LLD (*Migration*), aplikasi pelaporan transaksi devisa ke Bank Indonesia
  - SLIK (*Migration*), aplikasi sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
  - LPS *Application E-Reporting,* aplikasi pelaporan LPS ke OJK
- Peningkatan kompetensi karyawan TI melalui *training*
- Peningkatan sistem keamanan TI, di antaranya:
  - *Increase* PAM
  - *Vulnerability Management Tools*
  - *Source Code Review*
  - *Expand monitoring* SOC terhadap *server* dan *network device core banking*

IT Strategy in 2024

As a continuation of IT strategies in previous years, the Bank's IT division carried out the following strategies in 2024:

- Infrastructure optimization, including:
  - Core-Banking Replacement phase 1
- Improving services to customers, including:
  - Upgrading the virtual account application
- Operational improvements, such as:
  - HRIS, Human Resource Information System phase 1
  - Integration of New SMART AML to Core Banking System
  - Procurement of laptops and PCs for branch offices
- IT system improvements, including:
  - Network optimization, maximizing network performance
  - Data Center relocation
  - Endpoint management (Ivanti)
  - Add license Sophos server
  - Refreshment NAC appliance
  - Application Performance Management
- Reporting System Updates, including:
  - Antasena, reporting application to Bank Indonesia
  - OBOX, the largest debtor and creditor reporting application to OJK
  - Apolo, risk and capital management reporting application to OJK
  - LLD (Migration), application for reporting foreign exchange transactions to Bank Indonesia
  - SLIK (Migration), information system application to support supervision and information services in the financial sector
  - LPS application, E-Reporting, LPS reporting application to OJK
- Improving the competency of IT employees through training sessions
- Improving IT security system, including:
  - Increase PAM
  - Vulnerability Management Tools
  - Source Code Review
  - Expand monitoring SOC of server and network device core banking

- Implementasi DLP (*Data Loss Prevention*)
- *Upgrade Pam server*
- Simulasi serangan *cybersecurity*
- ISO 27001 *certification*

Strategi TI 2025

Pada tahun 2025, PT Bank JTrust Indonesia Tbk berencana melanjutkan penyempurnaan sistem TI melalui inisiatif-inisiatif berikut:

- *Integrated Platform Banking Automation* untuk mendukung rencana *digital banking*
- Peningkatan kompetensi karyawan IT melalui training

Strategi TI 2026

Pada tahun 2026, PT Bank JTrust Indonesia Tbk akan melanjutkan penyempurnaan sistem TI sebagai berikut:

- *Integrated Platform Banking Automation* untuk mendukung rencana digital banking
- Peningkatan kompetensi karyawan IT melalui *training*.

- Implementation of DLP (Data Loss Prevention)
- Pam server upgrade
- Simulation of cybersecurity attack
- ISO 27001 certification

IT Strategy in 2025

In 2025, PT Bank JTrust Indonesia Tbk plans to continue improving its IT system through the following initiatives:

- Integrated Platform Banking Automation to support digital banking plans
- Improving IT employee competency through training sessions

IT Strategy in 2026

In 2026, PT Bank JTrust Indonesia Tbk will continue improving its IT system with the following steps:

- Integrated Platform Banking Automation to support digital banking plans
- Improving IT employee competency through training sessions.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Kapabilitas pimpinan di Bank mampu membuat perubahan dan memberi pengaruh positif kepada para karyawan. Pimpinan adalah garda terdepan untuk mendorong keterlibatan karyawan dengan perusahaan.

Leadership capabilities at the Bank are able to make changes and influence employees. Leaders are the forefront to encourage employee engagement with the company.

Pada tahun 2024, J Trust Bank melanjutkan prinsip pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjangka panjang dan berkelanjutan, yang diiringi dengan komitmen penuh dari seluruh pihak di internal Bank.

Pengembangan organisasi dilakukan dengan komitmen kuat untuk selalu menjunjung integritas, mengutamakan nasabah disiplin dan bertanggung jawab, serta selalu belajar dan berusaha. Hal ini sejalan dengan corporate value Bank: *Super Integrity, Customer First, Be Discipline & Responsible, dan Learning & Trying More.*

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024 tetap berfokus pada kapabilitas pimpinan di Bank agar mampu membuat perubahan dan memberi pengaruh positif kepada para karyawannya. Pimpinan diharapkan menjadi garda terdepan untuk mendorong keterlibatan karyawan dengan perusahaan.

Bank juga terus berkomitmen dalam mendidik generasi muda untuk menjadi profesional muda di dunia perbankan, yang pada akhirnya akan turut mendorong kinerja Bank sebagai salah satu Bank pilihan di Indonesia.

Melalui Fresh Graduate Program yang jumlah peminatnya terus meningkat setiap tahunnya, Bank mencari talenta terbaik yang memiliki kecerdasan dan etos kerja yang baik sehingga dapat cepat beradaptasi dengan situasi dunia kerja.

REALISASI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2024

Pengembangan bisnis dan organisasi dilakukan secara jangka menengah-panjang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

In 2024, J Trust Bank continued the long-term and sustainable Human Resources (HR) management principle, with full commitment from all parties inside the Bank.

Organizational development is implemented with a strong commitment to always uphold integrity, prioritize customers, be disciplined and responsible, and always learn and try. This is in line with the Bank's corporate values: Super Integrity, Customer First, Be Discipline & Responsible, and Learning & Trying More.

Human Resources Management

Human Resources management in 2024 still focused on leadership capabilities at the Bank to be able to make changes and influence their employees. Leaders are expected to be at the forefront in encouraging employee engagement with the company.

The Bank also remained committed to educating the younger generation to become young professionals in the banking industry, which will eventually help boost the Bank's performance as one of the preferred banks in Indonesia.

Through the Fresh Graduate Program, whose number of applicants continues to increase every year, the Bank seeks for the best talents who have intelligence and good work ethic to be able to quickly adapt to work situations.

REALIZATION OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAM IN 2024

Organizational and business development is implemented in the medium to long term in line with the Bank's Business Plan.

Untuk tahun 2023-2025 pengembangan karyawan mencakup antara lain:

1. Melakukan peninjauan dan penyesuaian struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, Key Performance Indicator (KPI).
2. Melakukan pengkinian prosedur terkait pengelolaan SDM.
3. Penerapan Talent Management, yang prosesnya mencakup pencarian, penetapan, dan pengembangan talenta perusahaan.
4. Mengembangkan manajemen karir dalam rangka pengembangan karyawan.
5. Penerapan aktivitas SDM yang mencakup Planning, Acquiring, Developing, Maintaining & Retaining sebagai berikut:
   a. Planning: Perencanaan SDM yang mencakup perencanaan struktur organisasi, perencanaan jumlah tenaga kerja (MPP), dan perencanaan SDM lainnya.
   b. Acquiring: Penerapan strategi rekrutmen dan penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
   c. Developing: Penerapan strategi pengembangan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan karir, rotasi dan mutasi karyawan, on the job training, penugasan karyawan pada suatu pekerjaan tertentu, dan strategi kompetensi dan manajemen kinerja.
   d. Maintaining & Retaining: Penerapan strategi Compensation & Benefit, menciptakan suasana bekerja yang memotivasi, dan membina komunikasi dan hubungan karyawan serta hubungan industrial yang baik.

Selain itu, Bank juga terus melakukan pengembangan karyawan melalui berbagai hal berikut:

1. Penerapan *Talent Management,* yang prosesnya mencakup *talent identification, talent development dan talent successor.*
2. Pelaksanaan manajemen karir bagi karyawan kantor pusat dan kantor cabang.
3. Melaksanakan pengembangan karyawan melalui rotasi, mutasi dan penugasan karyawan, sejalan dengan strategi Bank dan kebutuhan organisasi.
4. Program sertifikasi eksternal dan internal seperti bidang kepatuhan, operasional, *treasury,* audit, manajemen risiko, produk, proses, dan lainnya dalam rangka mendukung kinerja bisnis.
5. Peningkatan kemampuan *service quality* Frontliners melalui berbagai pelatihan produk dan jasa.

For the 2023-2025 period, employee development covers:

1. Reviewing and adjusting organizational structure, job description, Key Performance Indicator (KPI).
2. Updating procedures related to HC management.
3. Implementing Talent Management, whose process includes searching, assignment, and development of company talent.
4. Developing career management as part of employee development.
5. Implementing HR activities which include Planning, Acquiring, Developing, Maintaining & Retaining as follows:
   a. Planning: HR planning which includes organizational structure planning, manpower planning (MPP), and other HR planning.
   b. Acquiring: Implementation of HR recruitment and placement strategies in accordance with company needs.
   c. Developing: Implementation of employee development strategies through training and career development programs, employee rotation and transfer, on the job training, employee assignment to certain jobs, and competency and performance management strategies.
   d. Maintaining & Retaining: Implementing Compensation & Benefit strategy, creating a motivating work atmosphere, and fostering good communication and employee relations as well as industrial relations.

In addition, the Bank continued employee development through these steps:

1. Implementing Talent Management, whose process includes searching, assignment, and development of company talent.
2. Implementation of career management for employees at head office and branches.
3. Implementing employee development through employee rotation, transfer and assignment, in line with the Bank's strategy and organizational needs.
4. External and internal certification program (compliance, operations, treasury, audit, risk management, product, process, and others) in supporting business performance.
5. Improving service quality of Frontliners through training of products and services.

6. Peningkatan pemahaman karyawan terhadap kebijakan dan prosedur Bank dengan melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara periodic.
7. Peningkatan pemahaman karyawan dalam menerapkan values Perusahaan yaitu: *Super Integrity, Customer First, Discipline & Responsible, Learning & Trying More.*

6. Improving employee understanding on the Bank's policy and procedures by periodically updating policy and procedures.
7. Improving employee understanding in implementing the Company's values: Super Integrity, Customer First, Discipline & Responsible, Learning & Trying More.

Inisiatif Sumber Daya Manusia 2023-2025

Human Resources Initiatives 2023-2025

Fungsi Function	2023	2024	2025
People Development, Compensation Benefit & Talent Acquisition	Melakukan peninjauan dan pengkinian Struktur Organisasi Reviewing and updating Organizational Structure	Melakukan peninjauan dan pengkinian Struktur Organisasi Reviewing and updating Organizational Structure	Melakukan peninjauan dan pengkinian Struktur Organisasi Reviewing and updating Organizational Structure
	Melakukan peninjauan dan pengkinian Deskripsi Pekerjaan Reviewing and updating Job Description	Melakukan peninjauan dan pengkinian Deskripsi Pekerjaan Reviewing and updating Job Description	Melakukan peninjauan dan pengkinian Deskripsi Pekerjaan Reviewing and updating Job Description
	Melakukan peninjauan dan pengkinian *Key Performance Indicator* (KPI) Reviewing and updating Key Performance Indicator (KPI	Melakukan peninjauan dan pengkinian *Key Performance Indicator* (KPI) Reviewing and updating Key Performance Indicator (KPI)	Melakukan peninjauan dan pengkinian *Key Performance Indicator* (KPI) Reviewing and updating Key Performance Indicator (KPI)
	Melakukan peninjauan dan perencanaan *Man Power Planning* (MPP) Reviewing and Formulating Man Power Planning	Melakukan peninjauan dan perencanaan *Man Power Planning* (MPP) Reviewing and Formulating Man Power Planning	Melakukan peninjauan dan perencanaan *Man Power Planning* (MPP) Reviewing and Formulating Man Power Planning
	Meninjau dan mengevaluasi Kompensasi & Manfaat Reviewing and evaluating Compensation & Benefit	Meninjau dan mengevaluasi Kompensasi & Manfaat Reviewing and evaluating Compensation & Benefit	Meninjau dan mengevaluasi Kompensasi & Manfaat Reviewing and evaluating Compensation & Benefit
	Meninjau dan mengevaluasi Program Asuransi Kesehatan Reviewing and evaluating Health Insurance Program	Meninjau dan mengevaluasi Program Asuransi Kesehatan Reviewing and evaluating Health Insurance Program	Meninjau dan mengevaluasi Program Asuransi Kesehatan Reviewing and evaluating Health Insurance Program
	Merencanakan implementasi sistem gaji Planning Implementation of payroll system	Implementasi sistem gaji Implementation of payroll system	Mengembangkan dan memelihara sistem gaji Development and Maintenance of payroll system
	Merencanakan perbaikan sistem absensi Planning for development of presence system	Implementasi sistem absensi Implementation of presence system	Memelihara sistem absensi Maintenance of presence system
	Mengelola basis data karyawan Managing employee database	Mengelola basis data karyawan Managing employee database	Mengelola basis data karyawan Managing employee database
	Melaksanakan program pelatihan berdasarkan strategi Bank, kebutuhan organisasi dan/atau rencana pengembangan individu, termasuk seleksi, pelatihan dan penempatan Management/Officer Development Program Carry out training programs based on the Bank's strategy, organizational needs, and/or individual development plans, including selection, training and placement of Officer Development Program.	Melaksanakan program pelatihan berdasarkan strategi Bank, kebutuhan organisasi dan/atau rencana pengembangan individu, termasuk seleksi, pelatihan dan penempatan Management/Officer Development Program Carry out training programs based on the Bank's strategy, organizational needs, and/or individual development plans, including selection, training and placement of Officer Development Program	Melaksanakan program pelatihan berdasarkan strategi Bank, kebutuhan organisasi dan/atau rencana pengembangan individu, termasuk seleksi, pelatihan dan penempatan Management/Officer Development Program Carry out training programs based on the Bank's strategy, organizational needs, and/or individual development plans, including selection, training and placement of Officer Development Program.
	Mengembangkan karyawan melalui manajemen talenta & manajemen karir Employee development through talent management & career management	Mengembangkan karyawan melalui manajemen talenta & manajemen karir Employee development through talent management & career management	Mengembangkan karyawan melalui manajemen talenta & manajemen karir Employee development through talent management & career management

Fungsi Function	2023	2024	2025
Government, Industrial Relations & Employee Services	Melaksanakan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Establish Industrial Relations in accordance with applicable provisions	Melaksanakan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Establish Industrial Relations in accordance with applicable provisions	Melaksanakan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Establish Industrial Relations in accordance with applicable provisions
	Memonitor pemberian *Rewards & Punishment* Monitor the Implementation of Rewards & Punishment	Memonitor pemberian *Rewards & Punishment* Monitor the Implementation of Rewards & Punishment	Memonitor pemberian *Rewards & Punishment* Monitor the Implementation of Rewards & Punishment
	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition

KOMPOSISI KARYAWAN 2024

Bank terus berkomitmen untuk menjaga komposisi karyawan yang berimbang dan sejalan dengan rencana bisnisnya, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan kesempatan kerja. Perubahan komposisi karyawan dilakukan melalui rekrutmen, promosi, dan mutasi secara berkesinambungan agar tercipta sebuah jenjang karir karyawan yang jelas dan terukur.

Per 31 Desember 2024, Bank memiliki 937 karyawan, naik dari 913 karyawan di tahun 2023.

Berikut ini adalah tabel komposisi karyawan:

EMPLOYEE COMPOSITION 2024

The Bank was committed to maintain a balanced employee composition to support its business plan, by considering work opportunity and equality. The change of employee composition was conducted through recruitment, promotion, and mutation in continuity in order to create clear and measured career paths.

As of 31 December 2024, the Bank had 937 employees, up from 913 employees in 2023.

Below is the employee's composition:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education

Pendidikan Education	Jumlah Karyawan Total Employees
D1 | Diploma 1	4
D2 | Diploma 2	3
D3 | Diploma 3	103
D4 | Diploma 4	2
S1 | Bachelor's Degree	714
S2 | Master's Degree	66
Lainnya | Others	45
Jumlah | Total	**937**

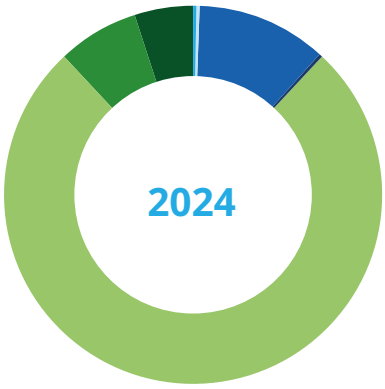

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (tahun)
Employee Composition by Age (years old)

Usia Age	Jumlah Karyawan Total Employees
20 - 24	19
25 - 29	134
30 - 34	172
35 - 39	194
40 - 44	153
45 - 49	109
50 - 54	125
55 - 59	30
> 60	1
Jumlah | Total	**937**

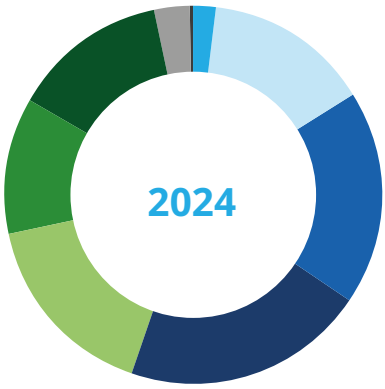

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position

Tingkat Jabatan Position	Jumlah Karyawan Total Employees
Kepala Divisi | Head of Division	24
Wakil Kepala Divisi | Deputy Head of Division	15
Kepala Departmen | Head of Department	120
Kepala Seksi | Head of Section	272
Karyawan Dasar | Clerk	341
Staf | Officer	165
Jumlah | Total	**937**

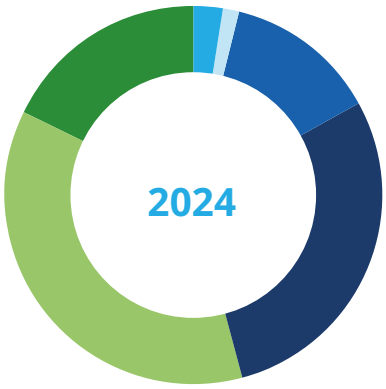

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Karyawan Total Employees
Laki-laki | Male	463
Perempuan | Female	474
Jumlah | Total	**937**

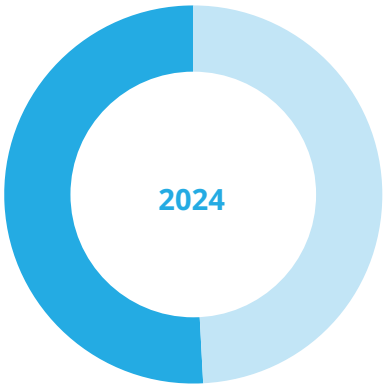

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja (tahun)
Employee Composition by Working Period (years)

Masa Kerja Working Period	Jumlah Karyawan Total Employees
0 – 5	539
6 – 10	162
11 – 15	94
16 – 20	48
21 – 25	44
Lainnya | Others	50
Jumlah | Total	**937**

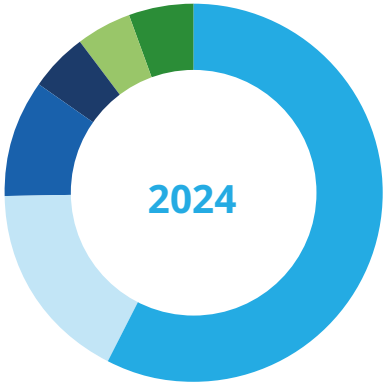

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja (tahun)
Employee Composition by Working Period (years)

Masa Kerja Working Period	Jumlah Karyawan Total Employees
0 – 5	539
6 – 10	162
11 – 15	94
16 – 20	48
21 – 25	44
Lainnya | Others	50
Jumlah | Total	**937**

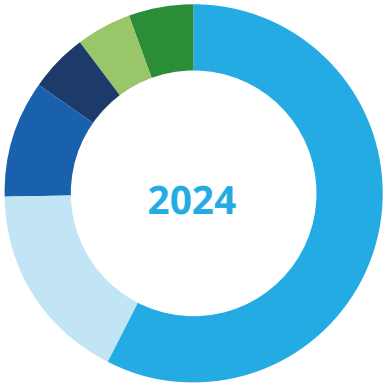

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

J Trust Bank menerapkan persamaan hak dan tidak melakukan diskriminasi terhadap gender, usia, ras, dan golongan dalam setiap kebijakan rekrutmen dan pengembangan karir. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Setiap karyawan Bank memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam program pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan, sesuai dengan sistem penilaian yang ditentukan. Bank juga membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kemampuan yang mereka miliki untuk pengembangan karir mereka, dengan memegang asas keadilan.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Work Opportunity and Equality

J Trust Bank applies equal rights and does not discriminate against gender, age, race, and class in every recruitment and career development policy. This aims to ensure the company's sustainability in the long term. Every employee of the Bank has the same rights and obligations in the planned education and training program, in accordance with the assessment system. The Bank also opens maximum opportunities for all employees to improve their abilities for career development, by adhering to the principle of fairness.

Pelatihan Karyawan

Pelatihan karyawan dilakukan melalui program eksternal dan internal. Pada tahun 2024, 937 karyawan mengikuti pelatihan dengan rata-rata jumlah pelatihan 50,22 jam per karyawan, naik dari 44,39 jam per karyawan di tahun 2023.

Employee Training

Employee training is conducted via external and internal programs. In 2024, 937 employees participated in training with the average training hour of 50.22 hours per employee, up from 44.39 hours per employee in 2023.

Deskripsi	2024		2023		Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	
Pelatihan, rata-rata jam pelatihan/orang (jam)					Training, average hours of trainings/employee (hours)
Direksi	53.7	-	37,4	-	Directors
Level VP	54.6	78	34,0	32,0	VP Level
Level GM	42.73	46.69	37,1	48,0	GM Level
Level Manajer	49.52	56.66	42,9	51,6	Manager Level
Level Supervisor	39.60	39.20	33,1	36,7	Supervisor Level
Staf	52.05	58.30	39,9	53,5	Staff
Total	**46.89**	**53.53**	**37,4**	**44,4**	**Overall**

Program-program pelatihan yang diberikan termasuk:

Training programs include:

No	Nama Pelatihan Training Name
1	APU PPT
2	Anti Fraud
3	Risk Awareness : Branch Operation
4	Risk Management
5	Budaya Sadar Kepatuhan (Compliance Awareness Culture)
6	Sosialisasi Anti Fraud, Operation, Compliance, risk, Code of Ethics & Business Conduct
7	Smart AML
8	New Core Banking System
9	Induction of New Employees
10	Standar Layanan Frontliner

Kebijakan Program Pengembangan Karyawan

Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pihak Independen

Dewan Direksi dan pihak independen mendapatkan program orientasi, manual handbook, dan sesi tatap muka dengan jajaran manajemen dan eksekutif. Bank mendorong Direksi dan Dewan Komisaris untuk terus meningkatkan kapasitas melalui berbagai pelatihan.

Karyawan

- Setiap karyawan baru diberikan program induksi selama 2 hari.
- Bank memfasilitasi karyawan yang membutuhkan

Employee Development Program Policy

Board of Directors, Board of Commissioners and Independent Parties

The Board of Directors and independent parties receive orientation program, manual handbook, and face-to-face sessions with the management and executives. The Bank encourages the Board of Directors and Board of Commissioners to increase capacity through various trainings.

Employee

- Each new employee is given a 2-day induction program.
- The Bank facilitates employees who need

sertifikasi profesi guna menunjang peran dan tugasnya.

- Bank mewajibkan setiap karyawan setidaknya memenuhi 16 jam pelatihan dalam satu tahun guna memastikan terlaksananya corporate value Bank Learning & Trying More. Hal tersebut juga tercantum dalam penetapan target tahunan masing-masing karyawan.

professional certification to support their roles and duties.

- The Bank requires every employee to fulfill at least 16 hours of training in one year to ensure the implementation of Bank's corporate value Learning & Trying More. This is stated in the annual goal setting of each employee.

Pengembangan Karir

Bank menyediakan jenjang karir yang jelas bagi karyawan dengan memprioritaskan promosi dan mutasi dari internal. Selama tahun 2024, penghargaan terhadap karyawan berprestasi diberikan berupa Most Valuable Person (MVP) of the Month dan BJI Winner. Penghargaan MVP diadakan oleh Bank untuk meningkatkan motivasi karyawan. Penghargaan ini diberikan kepada karyawan yang telah berkontribusi dalam pengembangan perusahaan dan menjadi panutan atau contoh teladan bagi karyawan lain.

Selama tahun 2024, Bank memberikan penghargaan MVP kepada 12 karyawan dan BJI Winner kepada 45 karyawan.

Pada tahun 2024, rata-rata perpindahan karyawan adalah 9%.

Career Development

The Bank provides a clear career path for employees by prioritizing internal promotion and mutation. In 2024, awards for outstanding employees were given in the form of Most Valuable Person (MVP) of the Month and BJI Winner. The MVP award is held by the Bank to increase employees' motivation. The award is given to employees who have contributed to the company's development and become role models for other employees.

In 2024, the Bank awarded MVP to 12 employees and BJI Winner to 45 employees.

In 2024, the average employee turnover was 9%.

ALOKASI DANA PENGEMBANGAN SDM 2024

Sepanjang tahun 2024, Bank telah mengalokasikan Rp 6.917.879.742,- untuk biaya pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

HR DEVELOPMENT BUDGET ALLOCATION 2024

In 2024, the Bank allocated budget of Rp6,917,879,742 for HR development fee with details as follows:

Deskripsi	2024		2023		2022		Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	
< 30 tahun	55	98	47	87	32	90	< 30 years
30-50 tahun	321	334	328	324	318	296	30-50 years
> 50 tahun	87	42	95	34	87	30	> 50 years
Rata-rata	49%	51%	51%	49%	51%	49%	Average

No	Deskripsi	Nominal	Description
1	Program/Kegiatan	2.673.377.199	Programs/Activities
2	Sertifikasi	2.493.612.245	Certifications
3	Pendukung /Perlengkapan Pelatihan	403.573.633	Training Support/Equipment
4	Perjalanan Dinas	943.877.993	Work Travel
5	ODP	403.438.672	ODP
	Total	**6.917.879.742**	**Total**

KEBIJAKAN REMUNERASI 2024

Sesuai dengan kondisi perusahaan, Bank melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi:
   - Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, seperti tunjangan (benefit), kompensasi berakhirnya kontrak kerja/keputusan RUPS.
   - Fasilitas lain dalam bentuk natura dan non-natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki dan benefit lainnya yang pernah diatur oleh Perusahaan.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi yang dimaksud meliputi:
   - Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.
   - Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dimaksud.

REMUNERATION POLICY 2024

In line with the company's condition, the Bank performed a review and adjustment on the Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024, with details as follows:

1. Remuneration policy/package and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors include:
   - Remuneration in form of non-natura, including salary and other benefits, such as benefit, compensation on contract expiry/GMS decision.
   - Other facilities in natura and non-natura form: other benefits, transports, health insurance, and other facilities that can be owned or cannot be owned and other benefits regulated by the Company.
2. Remuneration policy/package disclosure includes:
   - Remuneration policy/package and other facilities for the Board of Commissioners and Directors as determined by the Bank's GMS.
   - Type of remuneration and other facilities for all members of the Board of Commissioners and Directors, at least covering the number of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the number of all package/remuneration policy and other mentioned facilities.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank selalu berpegang pada prinsip gaji dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Dalam hal ini, hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukannya.

Upah yang diperbandingkan dalam rasio gaji di bawah ini adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap J Trust Bank dari tingkat pelaksana hingga Kepala Divisi.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2024 dan 2023 dalam skala perbandingan:

Highest and Lowest Salary Ratio

The Bank always upholds the salary principle in providing compensation to its employees. In this regard, salary is the employee's rights and stated in form of money as a compensation from the company to employees as determined and paid according to a work contract, agreement, or regulations, including benefits for the employees and their family for the work and/or services provided.

Salaries compared in the following ratio are compensation accepted by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees per month. Employee is a permanent employee of J Trust Bank from officers to Division Heads.

Below is the highest and lowest salary ratio in 2024 and as 2023 in comparison scale:

Rasio Gaji	Rasio Ratio		Salary Ratio
	2024	2023	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1:22	1:23	The ratio of the highest and lowest employee salaries
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1:2,3	1:2	The ratio of the highest and lowest BOD salaries
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1:1,7	1:1,7	The ratio of the highest and lowest BOC salaries
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1:3,2	1:3,2	The ratio of the highest BOD salary and highest employee salary

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PADA KARYAWAN

J Trust Bank memiliki nilai-nilai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan dan kredibilitas.
2. Menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan jujur.
3. Menghargai setiap individu.
4. Melakukan hal yang benar.

Nilai-nilai tersebut harus diterapkan oleh semua karyawan dan manajemen dalam kinerja sehari-hari, terutama terkait dengan *service excellence* kepada nasabah. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, maka Bank dapat mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi.

Hubungan Industrial dan Antar Karyawan

Dalam rangka menjalin Hubungan Industrial yang harmonis untuk menunjang kelancaran bisnis dan mendukung pemenuhan hak dan kewajiban karyawan, Bank dan karyawan beserta Serikat Pekerja berkomitmen untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan bersama-sama berusaha menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dan mensosialisasikan kebijakan, peraturan perusahaan, dan ketentuan yang telah disepakati; serta menjalankan reward dan Tindakan disiplin bagi seluruh karyawan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong produktivitas atau kinerja sesuai harapan sebagaimana mestinya.

RENCANA KERJA SDM 2025

Bank akan melanjutkan pengembangan SDM pada tahun 2025 sesuai dengan rencana pengembangan bisnis dan organisasi tahun 2025-2027.

CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT TO EMPLOYEES

J Trust Bank has Corporate Culture values as follows:

1. Build trust and credibility
2. Create a culture of open and honest communication
3. Respect each individual
4. Do the right thing

These values should be implemented by all employees and management in their daily activities, particularly related to service excellence to customers. By truly upholding these values, the Bank can develop its business in a better way.

Industrial Relations and Employee Relations

In establishing a harmonious Industrial Relations to support business and fulfill the rights and obligation of employees, the Bank and employees as well as the Labor Union are committed to improving the company's success by jointly implementing existing provisions and socializing policies, company regulations, and provisions approved; as well as carrying out reward and enforcement measures to all employees towards compliance on prevailing provisions, hence improving productivity or performance according to expectations.

HR WORKING PLAN 2025

The Bank will continue HR development in 2025 in accordance with the organizational and business development plan for the 2025-2027 period.

Rencana Kerja Divisi SDM 2024

Work Plan of Human Capital Division in 2024

Fungsi UIC	Rencana Kerja Work Plan	Hasil Result	Waktu Time
People Development, Compensation, Benefit and Talent Acquisition	Memenuhi target rekrutmen sesuai dengan rencana pemenuhan Man Power Planning yang sudah disetujui perusahaan dengan mengedepankan tingkat efisiensi seoptimal mungkin. Meeting the recruitment target in line with the approved Man Power Planning by prioritizing efficiency level optimally.	Pemenuhan target rekrutmen sesuai kebutuhan perusahaan. Meeting the recruitment target in accordance with the company's needs.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Membangun dan menyempurnakan Struktur Organisasi secara Bankwide dan seluruh bisnis serta unit kerja lainnya. Establishing and improving Bankwide Organizational Structure and all business and working units.	Melakukan pengkajian struktur organisasi secara bankwide. Bersama dengan pimpinan unit kerja, melakukan pengkajian organisasi di bawah supervisinya. Reviewing bankwide organizational structure. Reviewing organization under its supervision together with working unit leaders.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Penyempurnaan Deskripsi Pekerjaan. Improving Job Description.	Menyelesaikan seluruh Deskripsi Pekerjaan dan mendistribusikan manual ke setiap unit kerja. Completing all Job Descriptions and distributing the manuals to each working unit.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Peningkatan implementasi KPI. Improving KPI implementation.	Memonitor target KPI serta implementasinya. Monitoring the KPI target and its implementation.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Mengembangkan Talent Management Bank. Developing the Bank's Talent Management.	Implementasi dari Model Talent Management Mengembangkan karyawan yang merupakan talent melalui promosi, mengisi posisi yang penting, dan penugasan baru. Implementation of Talent Management Model Developing talented employees through promotion, filling important positions, and new assignments.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Mengembangkan karyawan melalui manajemen karir. Evolving employees through career management.	Implementasi manajemen karir baik secara vertikal maupun horizontal. Implementation of career management both vertically and horizontally.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Remunerasi berdasarkan kinerja organisasi Remuneration based on organization performance.	Besarnya remunerasi dinilai berdasarkan pencapaian target dan kinerja yang dinilai dalam KPI Individu. The amount of remuneration is based on the target achievement and performance assessment in individual KPI.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Melakukan peninjauan dan penyesuaian (bila diperlukan) terhadap Struktur Gaji 2025 Reviewing and making adjustments (if needed) to the Salary Structure in 2025	Struktur gaji berdasarkan internal equity, external equity dan kemampuan Bank. Salary structure is based on internal equity, external equity, and the Bank's capabilities.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Human Capital Budgeting 2025.	Tersedianya Human Capital Budgeting dan Control Budget 2025. Availability of HC Budgeting and Budget Control 2025	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
Government, Industrial Relations & Employee Services	Menjaga Hubungan Industrial yang baik dan kondusif. Maintaining a good and conducive Industrial Relations.	Komunikasi dengan baik secara periodik dan menjalankan PKB dengan baik. Communicating periodically and implementing PKB.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025
	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition.	Menjalankan dan menegakkan Reward & Discipline secara baik dan konsisten. Implementing and enforcing Reward & Discipline thoroughly and consistently.	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025

Inisiatif Sumber Daya Manusia 2025-2027

Human Resources Initiatives for 2025-2027

Fungsi Function	2025	2026	2027
People Development, Compensation Benefit & Talent Acquisition	Melakukan peninjauan dan pengkinian Struktur Organisasi Reviewing and updating Organizational Structure	Melakukan peninjauan dan pengkinian Struktur Organisasi Reviewing and updating Organizational Structure	Melakukan peninjauan dan pengkinian Struktur Organisasi Reviewing and updating Organizational Structure
	Melakukan peninjauan dan pengkinian Deskripsi Pekerjaan Reviewing and updating Job Description	Melakukan peninjauan dan pengkinian Deskripsi Pekerjaan Reviewing and updating Job Description	Melakukan peninjauan dan pengkinian Deskripsi Pekerjaan Reviewing and updating Job Description
	Melakukan peninjauan dan pengkinian *Key Performance Indicator* (KPI) Reviewing and updating Key Performance Indicator (KPI	Implementasi *Electronic Performance Management System* (E-PMS) Implementation of Electronic Performance Management System (E-PMS)	Memelihara *Electronic Performance Management System* (E-PMS) Maintenance of Electronic Performance Management System (E-PMS)
	Melakukan peninjauan dan perencanaan *Man Power Planning* (MPP) Reviewing and Formulating Man Power Planning	Melakukan peninjauan dan perencanaan *Man Power Planning* (MPP) Reviewing and Formulating Man Power Planning	Melakukan peninjauan dan perencanaan *Man Power Planning* (MPP) Reviewing and Formulating Man Power Planning
	Meninjau dan mengevaluasi Kompensasi & Manfaat Reviewing and evaluating Compensation & Benefit	Meninjau dan mengevaluasi Kompensasi & Manfaat Reviewing and evaluating Compensation & Benefit	Meninjau dan mengevaluasi Kompensasi & Manfaat Reviewing and evaluating Compensation & Benefit
	Meninjau dan mengevaluasi Program Asuransi Kesehatan Reviewing and evaluating Health Insurance Program	Meninjau dan mengevaluasi Program Asuransi Kesehatan Reviewing and evaluating Health Insurance Program	Meninjau dan mengevaluasi Program Asuransi Kesehatan Reviewing and evaluating Health Insurance Program
	Memelihara sistem gaji Maintenance of payroll system	Memelihara sistem gaji Maintenance of payroll system	Memelihara sistem gaji Maintenance of payroll system
	Memelihara sistem absensi Maintenance of presence system	Memelihara sistem absensi Maintenance of presence system	Memelihara sistem absensi Maintenance of presence system
	Mengelola *database* karyawan Managing employee database	Mengelola *database* karyawan Managing employee database	Mengelola *database* karyawan Managing employee database
	Melaksanakan program pelatihan berdasarkan strategi Bank, kebutuhan organisasi dan/atau rencana pengembangan individu, termasuk seleksi, pelatihan dan penempatan Officer Development Program Carrying out training programs based on the Bank's strategy, organizational needs, and/or individual development plans, including selection, training and placement of Management/Officer Development Program	Melaksanakan program pelatihan berdasarkan strategi Bank, kebutuhan organisasi dan/atau rencana pengembangan individu, termasuk seleksi, pelatihan dan penempatan Officer Development Program Carrying out training programs based on the Bank's strategy, organizational needs, and/or individual development plans, including selection, training and placement of Management/Officer Development Program	Melaksanakan program pelatihan berdasarkan strategi Bank, kebutuhan organisasi dan/atau rencana pengembangan individu, termasuk seleksi, pelatihan dan penempatan Officer Development Program Carrying out training programs based on the Bank's strategy, organizational needs, and/or individual development plans, including selection, training and placement of Management/Officer Development Program
	Mengembangkan karyawan melalui manajemen talenta & manajemen karir Employee development through talent management & career management	Mengembangkan karyawan melalui manajemen talenta & manajemen karir Employee development through talent management & career management	Mengembangkan karyawan melalui manajemen talenta & manajemen karir Employee development through talent management & career management
Government, Industrial Relations & Employee Services	Melaksanakan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Establishing Industrial Relations in accordance with applicable provisions	Melaksanakan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Establishing Industrial Relations in accordance with applicable provisions	Melaksanakan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Establishing Industrial Relations in accordance with applicable provisions
	Memonitor pemberian *Rewards & Punishment* Monitor the Implementation of Rewards & Punishment	Memonitor pemberian *Rewards & Punishment* Monitor the Implementation of Rewards & Punishment	Memonitor pemberian *Rewards & Punishment* Monitor the Implementation of Rewards & Punishment
	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving a disciplined culture and a good working condition

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING 2024

Pada tahun 2024, Bank melakukan pemanfaatan tenaga kerja asing di J Trust Bank yang dimaksudkan dalam rangka mendapatkan transfer ilmu, keahlian, dan pengalaman.

Pada posisi Dewan Komisaris terdapat 2 (dua) tenaga kerja asing dan pada Direksi terdapat 3 (tiga) tenaga kerja asing. Selain itu, ada 3 (tiga) tenaga kerja asing yang menjabat sebagai pejabat eksekutif dan 1 (satu) orang sebagai tenaga ahli/konsultan.

RENCANA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING 2025

Pada tahun 2025, Bank berencana melakukan rencana terkait pemanfaatan tenaga kerja asing, dengan komposisi Komisaris sebanyak 2 orang, Direksi 3 orang, Pejabat Eksekutif 3orang dan Tenaga Ahli 1 orang.

FOREIGN WORKFORCE UTILIZATION 2024

In 2024, the Bank utilized foreign workers at J Trust Bank with the aim of transfer of knowledge, expertise and experience.

In the position of the Board of Commissioners there were 2 (two) foreign workers and in the Board of Directors there were 3 (three) foreign workers. In addition, there were 3 (three) foreign workers who served as executive officers and 1 (one) person as an expert/consultant.

FOREIGN WORKFORCE UTILIZATION PLAN 2025

In 2025, the Bank plans to utilize foreign workers, with the composition of Commissioners of 2 people, Directors of 3 people, Executive Officers of 3 people, and Expert of 1 person.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perkembangan bisnis perbankan dan semakin pesatnya era digital perbankan saat ini menjadikan fungsi dan proses manajemen risiko sangat berperan penting dalam mengelola risiko pada aktivitas bisnis, operasional, support dan teknologi Informasi.

Penerapan manajemen risiko Bank saat ini meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko (SIM); dan
4. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

The development of the banking business and the rapid growth of digital banking era have increased the significance of risk management function and process in managing risks in business activities, operations, support, and information technology.

The implementation of the Bank's risk management includes:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Adequate policies, procedures, and limit setting as the guidelines in implementing Risk Management;
3. Adequate process in risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as Risk Management information system; and
4. An effective internal control system in carrying out the Bank's operational activities.

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara proaktif dan tepat yang didukung dengan prinsip kehati-hatian sehingga diharapkan dapat melindungi Bank dari potensi kerugian dan juga memaksimalkan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Beberapa ketentuan/regulasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/ POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/ POJK.03/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum, beserta perubahannya pada POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan POJK No.32/ POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum, beserta perubahannya pada Nomor 20 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan POJK No. 50/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum.
6. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

The implementation of risk management is conducted proactively and appropriately, supported by the prudence principles, which aims to protect the Bank from potential losses and maximize added values for stakeholders.

The Basis for Risk Management Implementation

Several provisions/regulations concerning the implementation of risk management include:

1. Financial Services Authority Regulation No. 4/ POJK.03/2016 dated 26 January 2016 regarding the Assessment of Commercial Bank's Soundness Level.
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 27/POJK.03/2022 dated 26 December 2022 regarding the Second Amendment to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/ POJK.03/2016 regarding the Obligation to Provide Minimum Capital for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 42/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 regarding the Obligation to Fulfill the Liquidity Coverage Ratio (LCR) for Commercial Banks, along with its amendment in POJK No. 19 of 2024 on the Amendment to POJK No. 32/POJK.03/2015 regarding the Obligation to Fulfill Liquidity Coverage Ratio (LCR) for Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 50/POJK.03/2017 dated 17 July 2017 regarding the Obligation to Fulfill the Net Stable Funding Ratio (NSFR) for Commercial Banks, along with its amendment in POJK No. 20 of 2024 regarding the Amendment to POJK No. 50/POJK.03/2017 on the Obligation to Fulfill the Net Stable Funding Ratio (NSFR) for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 32/POJK.03/2018 dated 27 December 2018 regarding the Maximum Limit for Credit Provision and Large Fund Provision for Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Circular Letter No. 34/ SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/ SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017, concerning the Assessment Commercial Banks' Soundness Level.

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.21/ SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/ SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/ SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 23/ SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/ SEOJK.03/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Dalam kerangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang efektif. Bank telah menentukan struktur manajemen risiko disertai dengan tugas dan tanggung jawab pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha. ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan Good Corporate Governance, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Dewan Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (KMR).

Komite Pemantau Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan kebijakan, prosedur, limit dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

9. Financial Services Authority Circular Letter No. 21/ SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
10. Financial Services Authority Circular Letter No. 12/ SEOJK.03/2018 dated 21 August 2018 regarding the Implementation of Management and Measurement of the Standard Approach for IRRBB for Commercial Banks.
11. Financial Services Authority Circular Letter No. 6/ SEOJK.03/2020 dated 29 April 2020 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk using the Standard Approach for Commercial Banks.
12. Financial Services Authority Circular Letter No. 24/ SEOJK.03/2021 dated 7 October 2021 concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk using the Standard Approach for Commercial Banks.
13. Financial Services Authority Circular Letter No. 23/ SEOJK.03/2022 dated 7 December 2022 concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks.
14. Financial Services Authority Circular Letter No. 28/ SEOJK.03/2022 dated 22 December 2022 regarding Risk Management Certification.

Risk Management Organizational Structure

In the framework of implementing effective risk management and governance, the Bank has established a risk management structure, along with duties and responsibilities of all work units, which are tailored to the Bank's business objectives and policies, as well as the size and complexity of the Bank's operations.

To supervise and manage the Bank's risks, as well as implement Good Corporate Governance, the Bank's Board of Commissioners is assisted by the Risk Oversight Committee, while the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee (RMC).

The Risk Oversight Committee assists the Board of Commissioners in carrying out duties and responsibilities to oversee and provide advice to the Board of Directors to ensure that the implementation of the Bank's risk management meets the necessary elements, such as adequate policies, procedures, limits, and risk management methodologies. This way, the Bank's business activities remain under control within acceptable limits and remain beneficial to the Bank.

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun dan menyesuaikan kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko sehingga pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko dapat berjalan efektif. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga mengevaluasi kondisi dan perkembangan Profil Risiko Bank serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan untuk membahas masalah yang spesifik pada jenis risiko tertentu.

The Risk Management Committee is responsible for formulating and adjusting policies, strategies, and guidelines for risk management implementation so the process and system can run effectively. Additionally, the Risk Management Committee also evaluates the Bank's Risk Profile conditions and developments, as well as provides recommendations and corrective actions to address issues specific to certain types of risks.
Risk Management Division (RMD)

Divisi Manajemen Risiko (Risk Management Division/RMD)

RMD di bawah Kepala Divisi dan EVP Risk Management adalah unit kerja yang independen terhadap unit usaha/operasional unit kerja. RMD memiliki fungsi untuk mengidentifikasi. mengukur. memantau dan mengendalikan risiko dan meminimalkan potensi dampak dari berbagai jenis risiko.

The RMD is under the Head of Division and EVP of Risk Management

RMD is an independent work unit. Its role is to identify, measure, monitor, and control risks, as well as minimize the potential impact of various types of risks.

Struktur organisasi RMD membawahi 4 bidang yaitu:

1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar & Likuiditas;
3. Risiko Operasional; dan
4. Quality Control.

The organizational structure of RMD oversees four areas, including:

1. Credit Risk
2. Market & Liquidity Risk
3. Operational Risk
4. Quality Control

Tugas dan tanggung jawab RMD meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko;
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
3. Pemantauan terhadap strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
4. Memantau posisi/risiko eksposur secara keseluruhan dan jenis risiko;
5. Penerapan stress testing untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko;
6. Melakukan penilaian risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru yang diusulkan;
7. Melakukan review dan rekomendasi batas risiko dari unit bisnis dan operasi yang diusulkan;
8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan profil risiko ke Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
9. Menyusun laporan KPMM sesuai Profil Risiko Bank (Internal *Capital Adequacy Assessment Process*/ ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

Duties and responsibilities of RMD:

1. Provide inputs to the Board of Directors in the formulation of risk management policies, strategies, and framework.
2. Develop procedures and tools to identify, measure, monitor, and control risks.
3. Monitor risk management strategies that have been approved by the Board of Directors.
4. Monitor the overall position/risk exposures and types of risks.
5. Conduct stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies.
6. Conduct risk assessments on new products and/or activities being propose.
7. Review and provide recommendations on risk limits for business and operational units.
8. Prepare and deliver risk profile reports to the Risk Management Committee periodically, which will then be presented to the Board of Directors and the Financial Services Authority (OJK).
9. Prepare reports on the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) and the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) periodically, in accordance with the Bank's risk profile, for submissions to the Board of Directors and OJK.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

Organizational Structure of the Bank's Risk Management

The Bank's Risk Management Organizational Structure is as follows:

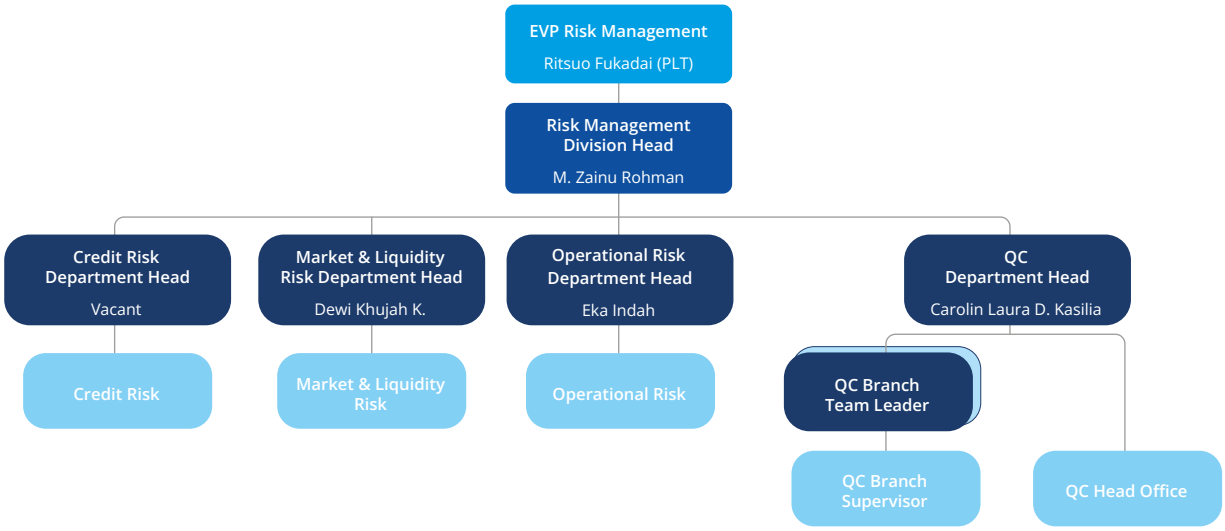

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Pengelolaan pada 8 (delapan) risiko Bank adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan organisasi manajemen risiko menggunakan *four eyes principles* dalam proses pemberian dan persetujuan kredit dalam rapat Komite Kredit. Penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) lebih rinci dijelaskan pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Kredit yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar yang disebabkan karena risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan dengan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas yang disesuaikan jangka waktu dan jenis suku bunga (*fixed/floating)* baik pada posisi *banking book* maupun *trading book.*

Sebagai bank devisa. tentunya terdapat risiko fluktuasi nilai tukar (*Foreign Exchange Risk*) sehingga pengelolaan aset dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

Types of Risk and Their Management

The management of 8 (eight) types of risk at the Bank are as follows:

Credit Risk

Credit risk management is carried out through a credit risk management organization, namely four-eyes principles, in the process of granting and approving credit requests at the Credit Committee meetings. The determination of Credit Approval Authority Limits (BWMK) is further explained in the Qualitative Disclosure of Credit Risk Management of this Annual Report.

Market Risk

The management of market risk, which is caused by interest rate risk and exchange rate risk, is carried out by managing asset and liability portfolios, which are adjusted to the maturity periods and types of interest rates (fixed/floating) both in the banking book and the trading book.

As a foreign exchange bank, the Bank is exposed to exchange rate fluctuations (Foreign Exchange Risk), so the management of assets and liabilities in foreign exchange must be in accordance with provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority to avoid potential losses in the event of exchange rate volatility.

Risiko Likuiditas

Untuk memitigasi Risiko likuiditas yang timbul karena Bank tidak mampu memenuhi kewajban dari nasabah atau dengan pihak lain telah jatuh tempo, maka dilakukan pengelolaan *maturity gap*, proyeksi arus kas, *monitoring* limit risiko likuiditas dan kontrol risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. J Trust Bank juga telah memiliki & menerapkan Standar Prosedur Operasional *Liquidity Contigency Plan* (LCP) atau Rencana Pendanaan Kontinjensi dan juga senantiasa melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan Bank koresponden.

Liquidity Risk

To mitigate Liquidity Risk arising from the Bank's inability to fulfil maturing obligations to customers or other parties, the Bank manages maturity gap, cash flow projections, liquidity risk limits monitoring, and liquidity risk controls, particularly under stress conditions. J Trust Bank also establishes and implements Operational Standard Procedure for the Liquidity Contingency Plan (LCP) or Contingency Funding Plan, and always provides access to the money market by fostering relationships with correspondent Banks.

Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal.

Operational Risk

Operational risk management is also one of the Bank's concerns due to insufficiency and/or non-functioning internal processes, human errors, system failures, or external problems.

Risiko Hukum

Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum antara lain:

- Peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya perkembangan dari setiap kasus hukum. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

Legal Risk

The Bank has conducted legal risk management including:

- Review of legal documents, agreements or contracts with third parties.
- An inventory of previous legal cases, including the progress of each legal case. The handling of legal cases is carried out based on priority scale and all developments are well monitored for a follow-up through a settlement that contains the least potential legal risk.

Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko oleh Bank dilakukan dengan cara pemantauan terhadap media publikasi melalui kerja sama dengan jasa pihak ketiga dan melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera dengan optimalisasi fungsi Call Center.

Selain itu, Bank juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat. Bank juga meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada pemangku kepentingan seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan website Bank dan menerbitkan rilis kepada media.

Reputational Risk

The Bank's risk management is carried out by monitoring media publication through collaboration with third party services and monitoring customers' complaints and handling these complaints promptly by optimizing the Call Center function.

In addition, the Bank also takes part in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and other social activities with customers, including becoming a sponsor in various community activities. The Bank also improves the implementation of Financial Information Transparency to stakeholders, such as presenting financial information, updating the Bank's website, and issuing press releases to media.

Risiko Strategi

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara target yang ingin dicapai oleh Bank dengan Rencana Bisnis Bank.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan menjalankan pemantauan dan mengingatkan ke unit kerja terkait perihal kewajiban pelaporan ke regulator dengan didukung sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM), pemantauan terhadap Kebijakan Kepatuhan serta Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single* CIF dan rekening pasif/dorman, dan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan ketentuan Regulator.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada 4 (empat) pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

1. Perumusan Tingkat Risiko
   Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara bank wide didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite & Risk Tolerance.*

2. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
   Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai.

   Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tugas dan tanggun jawab antara lain:
   a. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
   b. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
   c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

Strategic Risk

The risk management is carried out by supervising financial performance by comparing the Bank's targets with the Bank's Business Plan.

Compliance Risk

The compliance risk management is carried out by monitoring and reminding relevant work units regarding the obligation to report to regulators, which is supported by the Compliance Report Monitoring (CRM) system; monitoring the Compliance Policy as well as Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy; monitoring updates on customer data and implementing single CIF and passive/dormant accounts; and Implementing the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program, in accordance with Regulatory provisions.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Review of the effectiveness of the Risk Management implementation in the four pillars of the risk management system has been carried out accordingly, which includes:

1. Risk Level Formulation
   The formulation of risk appetite and risk tolerance is sufficient and aligned with the Bank's strategic and business objectives laid out in the Bank's Business Plan. Bank-wide risk tolerance parameters are documented in the internal provisions of Risk Appetite & Risk Tolerance.

2. Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors
   The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including adequate implementation of authorities and responsibilities by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

   The Board of Commissioners has created the Risk Oversight Committee with the following duties and responsibilities:
   a. Evaluate and analyze the adequacy of risk management policies periodically.
   b. Evaluate and analyze risk profile reports on a quarterly basis and the Bank's Soundness Level on a semi-annual basis.
   c. Supervise and evaluate the implementation of duties by the Risk Management Committee and the Risk Management Division.

3. Alat Organisasi Manajemen Risiko

   Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha. antara lain:

   a. Dalam mengelola risiko, kredit Bank menerapkan *four eyes principles* yaitu Unit Bisnis, Unit Client Service, dan Unit Credit Risk Reviewer. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin.

   b. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas. fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi Treasury & Capital Markets, Divisi Head Operation, Divisi Credit Administration dan Divisi Manajemen Risiko.

   c. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa dan penandatangan (segregasi tugas dan *dual control)* terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.

   d. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko adalah wajib bagi Dewan Komisaris Direksi dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, refreshment kepada karyawan juga dilakukan secara rutin.

4. Sistem Informasi

   Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem *Core Banking*, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai reminder ke unit kerja pelapor mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator dan *Credit Rating System* (CRS) sebagai pertimbangan analisa kelayakan kredit untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang dilakukan oleh bank.

3. Risk Management Organizational Tools

   Organizational tools that support the effective implementation of Risk Management are deemed adequate with clear authorities and responsibilities in each business activity, including:

   a. In managing risk, the Bank's credit implements the four-eyes principles, which are Business Unit, Client Service Unit, and Credit Risk Reviewer Unit. The delegation of authority is stipulated in internal provisions regarding the Credit Committee and Limits of Authority to Approve Credit (BWMK) and these are evaluated regularly by authorized officials.

   b. In managing market and liquidity risks, the risk management function consists of the Treasury & Capital Markets Division, the Head of Operation Division, Credit Administration Division, and the Risk Management Division.

   c. In operational risk management, there is a separation of duties and authorities between the creator, auditor, and signatory (duty segregation and dual control) in conducting all operational activities in work units.

   d. To develop competency in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Bank's officials up to four levels below the Board of Directors to join training programs for Risk Management certification. In addition, employee refreshment is also carried out on a regular basis.

4. Information System

   Information system support for the implementation of risk management is considered adequate, including transaction approval and delegation of authority in the Core Banking system, the implementation of Risk Control Self-Assessment (RCSA) in operational risk measurement, Compliance Report Monitoring (CRM) as a reminder to reporting units about the obligation to submit reports to the regulators, and the Credit Rating System (CRS) as a consideration in the credit feasibility analysis to enhance the prudence principles in credit granting by the Bank.

1. PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

1. DISCLOSURE OF RISK EXPOSURE

Tabel 1.a. Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan Ukuran Utama (Key Metrics)

Table 1.a. Key Metrics Risk Exposure and Capital Reports

No.	Keterangan (dalam jutaan Rupiah) Description (in million Rupiah)	Des-24 Audited Dec-24 Audited	Sep-24 Sep-24	Jun-24 Jun-24	Mar-24 Mar-24	Des-23 Audited Dec-23 Audited
MODAL YANG TERSEDIA (NILAI) | AVAILABLE CAPITAL (VALUE)						
1	Modal Inti Utama (CET1) | Main Core Capital (CET1)	3.250.944	3.200.599	3.083.962	3.103.360	3.067.434
2	Modal Inti (Tier 1) | Core Capital (Tier 1)	3.250.944	3.200.599	3.083.962	3.103.360	3.067.434
3	Total Modal | Total Capital	3.500.913	3.452.159	3.327.920	3.344.174	3.292.875
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (NILAI) | RISK WEIGHTED ASSETS (VALUE)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) | Total Risk Weighted Assets (RWA)	25.310.713	26.379.299	25.869.247	25.634.183	23.451.125
RASIO MODAL BERBASIS RISIKO DALAM BENTUK PERSENTASE DARI ATMR | RISK BASED CAPITAL RASIO IN PERCENTAGE OF ATMR						
5	Rasio CET 1 (%) | CET1 Ratio (%)	12.84%	12.13%	11.92%	12.11%	13.08%
6	Rasio Tier 1 (%) | Tier 1 Ratio (%)	12.84%	12.13%	11.92%	12.11%	13.08%
7	Rasio Total Modal (%) | Total Capital Ratio (%)	13.83%	13.08%	12.86%	13.05%	14.04%
TAMBAHAN CET 1 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BUFFER DALAM BENTUK PERSENTASE DARI ATMR | ADDITIONAL CET1 FUNCTIONED AS BUFFER IN PERCENTAGE OF ATMR						
8	Capital conservation buffer (2,5% dari ATMR) (%)| Capital conservation buffer (2.5% of ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2,5% dari ATMR) (%) | Countercyclical Buffer (0 - 2.5% of ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%) | Capital Surcharge for Systemically Important Banks (1% - 2.5%) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10) | Total CET1 as buffer (Row 8 + Row 9 + Row 10)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	Komponen CET1 untuk buffer | CET1 component for buffer	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RASIO PENGUNGKIT SESUAI BASEL III | LEVERAGE RATIO ACCORDING TO BASEL III						
13	Total Eksposur | Total Exposure	39.027.354	36.912.110	36.319.895	32.840.618	39.027.354
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) | Nilai Rasio Value, including the impact from adjustment to temporary exclusion of placement of current accounts with Bank Indonesia in meeting GWM requirements (if any)	7.87%	8.46%	8.72%	9.58%	7.87%
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LCR) | LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA) | Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	7,715,766	7.031.573	7.991.193	8.241.375	7.293.952
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow) | Total Net Cash Outflow	6.608.483	5.771.198	5.465.906	5.325.869	6.060.858
17	LCR (%)	116,76%	121,84%	146,20%	154.74%	120,35%

No.	Keterangan (dalam jutaan Rupiah) Description (in million Rupiah)	Des-24 Audited Dec-24 Audited	Sep-24 Sep-24	Jun-24 Jun-24	Mar-24 Mar-24	Des-23 Audited Dec-23 Audited
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NSFR) | NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) | Total Available Stable Funding (ASF)	27.896.892	28.331.728	28.650.409	28.043.872	27.723.861
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF) | Total Required Stable Funding (RSF)	24.075.775	25.476.574	25.084.361	24.054.309	22.689.472
20	NSFR (%)	115,87%	111,21%	114,22%	116,59%	122,19%

Analisa Kualitatif | Qualitative Analysis

- Rasio Total Modal (CAR) naik menjadi 14,04% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama berasal dari pengklasifikasian ulang kategori portofolio yang dimiliki Bank.
- Rasio Pengungkit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu menjadi 7,87% seiring dengan pertumbuhan Bank yang agresif, namun tetap berada di atas ketentuan yaitu sebesar 3%.
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulan Desember 2024 sebesar 116,76% berada di atas ketentuan minimum Rasio LCR sebesar 100% yang ditetapkan oleh Regulator. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi *High Quality Liquid Asset* (HQLA) Level 1 telah memenuhi kebutuhan likuiditas dengan baik apabila terjadi arus kas keluar.
- Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada bulan Desember 2024 adalah 115,87%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi bulan September 2024 sebesar 111,21%. Secara keseluruhan, NSFR Bank JTrust Indonesia selalu berada di atas ketentuan OJK sebesar minimum 100%.
- Total Capital Adequacy Ratio (CAR) increased to 14,04% compared to the previous quarter, mainly due to the reclassification of the Bank's portfolio categories.
- Leverage Ratio decreased compared to the previous quarter, namely to 7.87%, in line with the Bank's aggressive growth, but it is still above the provisions of 3%.
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) in December 2024 of 116,76% is above the minimum LCR Ratio requirement of 100% set by the Regulator. This shows that the composition of High-Quality Liquid Asset (HQLA) Level 1 has met liquidity needs well in the event of a cash outflow.
- Net Stable Funding Ratio (NSFR) in December 2024 was 115.87%, an increase compared to the position in September 2024 of 111.21%. Overall, JTrust Bank Indonesia's NSFR is always above the OJK requirement of a minimum of 100%.

Tabel 1.b. Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan kehati-hatian

Table 1.b. The difference between Consolidated Coverage according to accounting standards and prudential provisions

Keterangan (dalam jutaan Rp)	a	b	c
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan Carrying value as stated in the financial statement publication	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian Carrying value based on prudential principle	Sesuai kerangka risiko kredit In accordance with the credit risk framework
Aset			
Kas	331.700	331,700	331,700
Penempatan pada Bank Indonesia	2.335.977	2,335,977	2,335,977
Penempatan pada bank lain	894.911	894,911	894,911
Tagihan spot dan derivatif/forward	4.987	4,987	-
Surat berharga yang dimiliki	5.040.567	5,040,567	5,040,567
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.332.222	1,332,222	1,332,222
Tagihan akseptasi	-	-	-
Kredit yang diberikan	26.528.066	26,528,066	26,528,066
Pembiayaan syariah	-	-	-
Penyertaan modal	-	-	-
Aset keuangan lainnya	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		-	-
a. Surat berharga yang dimiliki	-	-	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(197.542)	(197,542)	(197,542)
c. Lainnya	(1.484)	(1,484)	(1,484)
Aset tidak berwujud	296.048	296,048	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(205.712)	(205,712)	-
Aset tetap dan inventaris	670.530	670,530	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(177.406)	(177,407)	-
Aset non produktif			-
a. Properti terbengkalai	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	93.124	93,124	93,124
c. Rekening tunda	-	-	-
d. Aset antar kantor	-	-	-
Aset lainnya	3.312.708	3.312.708	3.312.708
Total aset	40.258.696	40.258.696	39.670.250
Kewajiban			
Giro	2.996.451	-	-
Tabungan	2.134.541	-	-
Deposito	28.768.535	-	-
Uang Elektronik	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	2.324.117	-	-

d	e	f	g	
Nilai tercatat masing-masing risiko |Carrying amount of each risk				
Sesuai kerangka *counterparty credit risk* In accordance with counterparty credit risk	**Sesuai kerangka sekuritisasi** In accordance with the securitization framework	**Sesuai kerangka risiko pasar** In accordance with the market risk framework	**Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal** Does not refer to capital requirements or based on capital reduction	**Description** (in million Rp)
				Assets
-	-	-	-	Cash
-	-	-	-	Placement to Bank Indonesia
-	-	-	-	Interbank Placement
4,987	-	4,987	-	Spot and derivative/forward claims
-	-	-	-	Marketable securities owned
-	-	-	-	Securities sold under repurchase agreement (repo)
-	-	-	-	Claims on securities bought under reverse repo
-	-	-	-	Acceptance claims
-	-	-	-	Loan delivered
-	-	-	-	Sharia financing
-	-	-	-	Equity investment
-	-	-	-	Other financial assets
				Impairment of financial assets -/-
-	-	-	-	a. Marketable securities owned
-	-	-	-	b. Loan delivered and sharia financing
-	-	-	-	c. Others
-	-	-	296,048	Intangible asset
-	-	-	(205,712)	Accumulated amortisation on intangible assets
-	-	-	670,530	Fixed assets and equipment
-	-	-	(177,407)	Accumulated depreciation on fixed and equipment -/-
				Non productive assets
-	-	-	-	a. Abandoned property
				b. Foreclosed assets
-	-	-	-	c. Suspense accounts
-	-	-	-	d. Interbranch assets
-	-	-	-	Other assets
4,987	-	4,987	583,460	Total assets
				Liabilities
2,996,451	-	-	-	Current account
2,134,541	-	-	-	Savings account
28,768,535	-	-	-	Time deposit
-	-	-	-	Electronic money
-	-	-	-	Liabilities to Bank Indonesia
2.324.117	-	-	-	Interbank liabilities

Keterangan (dalam jutaan Rp)	a	b	c
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan Carrying value as stated in the financial statement publication	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian Carrying value based on prudential principle	Sesuai kerangka risiko kredit In accordance with the credit risk framework
Liabilitas spot dan derivatif/forward	7.745	-	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	-	-	-
Setoran jaminan	929	-	-
Liabilitas antarkantor	-	-	-
Liabilitas lainnya	232.222	-	-
Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	-
Total liabilitas	**36.464.540**	**-**	**-**

Analisa Kualitatif
Analisa Kualitatif Terdapat beberapa aset keuangan yang dikenakan lebih dari satu kerangka risiko yaitu:
1. Tagihan *Spot* dan Derivatif, dicatat dalam kerangka risiko *counterparty credit* dan risiko pasar.
2. Surat Berharga, dicatat dalam kerangka risiko kredit dan risiko pasar.
3. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), dicatat dalam kerangka risiko kredit. risiko *counterparty credit* dan risiko pasar
4. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), dicatat dalam kerangka risiko *counterparty credit* dan risiko pasar.

Atas perhitungan masing-masing kerangka risiko pada aset keuangan telah mengikujti aturan OJK yaitu:
1. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
2. SEOJK Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
3. SEOJK Nomor 38/SEOJK/2016 mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

d	e	f	g	
Nilai tercatat masing-masing risiko | Carrying amount of each risk				
Sesuai kerangka *counterparty credit risk* In accordance with counterparty credit risk	**Sesuai kerangka sekuritisasi** In accordance with the securitization framework	**Sesuai kerangka risiko pasar** In accordance with the market risk framework	**Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal** Does not refer to capital requirements or based on capital reduction	**Description** (in million Rp)
7.745	-	7.745	-	spot and derivative/forward liabilities
-	-	-	-	Liabilities on securities sold under repurchase agreeement (repo)
-	-	-	-	Acceptance liabilities
-	-	-	-	Issued securities
-	-	-	-	Loan received
929	-	-	-	Margin deposit
-	-	-	-	Interbranch liabilities
232.222	-	-	-	Other liabilities
-	-	-	-	Minority interest
36.464.540	**-**	**-**	**-**	**Total liabilities**

Qualitative Analysis

There are several financial assets that are subject to more than one risk framework, namely:

1. Spot Bills and Derivatives are recorded within the framework of counterparty credit risk and market risk.
2. Securities are recorded within the framework of credit risk and market risk.
3. Securities sold with an agreement to repurchase (repo) are recorded within the framework of credit risk, counterparty credit risk, and market risk.
4. Receivables on securities purchased with an agreement to resell (reverse repo) are recorded within the framework of counterparty credit risk and market risk.

The calculation of each risk framework for financial assets has complied with OJK regulations, namely:

1. SEOJK Number 24/SEOJK.03/2021 concerning Guidelines for Calculating Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach.
2. SEOJK Number 48/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines for Calculating Net Receivables for Derivative Transactions in Calculating Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using a Standard Approach.
3. SEOJK Number 38/SEOJK/2016 concerning Guidelines for Using Standard Methods in Calculating Minimum Capital Requirements for Commercial Banks by Taking Market Risk into Account.

Tabel 1.c. Sumber perbedaan utama antara eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian dengan carrying values sesuai standar akuntansi keuangan

Table 1.c. The main source of difference between exposures in accordance with prudential regulations and carrying values in accordance with financial accounting standards

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	a	b			c
	Item sesuai | Items				
	Total	Kerangka risiko kredit Credit risk framework	Kerangka sekuritisasi Securitization framework	Kerangka Counterparty credit risk Counterparty credit risk framework	Kerangka risiko pasar Market risk framework
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1) Carrying value of assets is in accordance with the prudential consolidated coverage (as reported in table LI1)	60.903.166	39.586.379	4.986	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1) Carrying amount of the liability is in accordance with the prudential consolidated coverage (as reported in table LI1)	-	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian Total net value is in accordance with the prudential consolidated coverage	-	-	-	-	-
Nilai rekening administratif Administrative account value	2.914.140	2.914.140	-	-	-
Perbedaan valuasi Difference in valuation	-	-	-	-	-
Perbedaan antara netting rules. selain dari yang termasuk pada baris 2. Difference because netting rules. other than those included in line 2	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi Difference in provision	-	-	-	-	-
Perbedaan prudential filters Difference dure to prudential filters	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan. sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian Exposure value considered is in accordance with the consolidated scope of the prudential provisions	-	-	-	-	-

Analisa Kualitatif

Total nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian dengan jumlah nilai tercatat masing-masing risiko yang berasal dari nilai Tagihan Spot Derivatif dan Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo). Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tagihan Spot dan Derivatif
   - Mengacu ke aturan OJK untuk aset keuangan berupa Tagihan Spot dan Derivatif dikenakan lebih dari satu risiko yaitu dalam kerangka risiko counterparty credit risk dan kerangka risiko pasar.
   - Pada kerangka risiko counterparty credit risk, perhitungan Transaksi Derivatif dengan Pendekatan Standar memiliki perbedaan kriteria perhitungan dengan nilai tercatat secara akuntansi dikarenakan kalkulasi mempergunakan data penjumlahan Replacement Cost dan Potential Future Exposure yang dikali dengan 1,4 sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 48/SEOJK,03/2017.
   - Pada kerangka risiko pasar, perhitungan megacu ke SEOJK Nomor 38/SEOJK/2016 mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
2. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo).
   - Mengacu ke aturan OJK untuk aset keuangan berupa reverse repo dikenakan lebih dari satu jenis risiko yaitu risiko counterparty credit risk dan kerangka risiko pasar.
   - Pada kerangka risiko pasar, perhitungan Transaksi Reverse Repo mengacu ke ketentuan SEOJK Nomor 38/SEOJK/2016 Kerangka risiko pasar tentang transaksi Reverse Repo dalam Trading Book, bahwa jika surat berharga yang menjadi agunan transaksi reverse repo diperdagangkan, maka Bank harus membukukan transaksi tersebut sebagai posisi short dalam Trading Book sehingga terekspos Risiko Pasar.
   - Pada kerangka risiko counterparty credit risk, perhitungan reverse repo mengacu ke SEOJK Nomor SEOJK 24 - 03 - 2021 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Qualitative Analysis

The total carrying value of assets is in accordance with the consolidated scope of prudential provisions, with the total carrying value of each risk originating from the value of Spot Derivative Receivables and Receivables on securities purchased with an agreement to resell (reverse repo). The explanation is as follows:

1. Spot Bills and Derivatives
   - Referring to OJK regulations, financial assets in the form of Spot Bills and Derivatives are subject to more than one risk, namely within the framework of counterparty credit risk and market risk
   - In the counterparty credit risk framework, the calculation of Derivative Transaction using the Standard Approach have different calculation criteria from the accounting recorded value because the calculation uses the sum of Replacement Cost and Potential Future Exposure data multiplied by 1.4 in accordance with the provisions of SEOJK Number 48/SEOJK.03/2017.
   - In the market risk framework, the calculation refers to SEOJK Number 38/SEOJK/2016 concerning Guidelines for Using Standard Methods in Calculating Minimum Capital Requirements for Commercial Banks by Taking Market Risk into Account.
2. Receivables on securities purchased with an agreement to resell (reverse repo).
   - Referring to OJK regulations, financial assets in the form of reverse repos are subject to more than one type of risk, namely counterparty credit risk and market risk framework.
   - In the market risk framework, the calculation of Reverse Repo Transaction refers to the provisions of SEOJK Number 38/SEOJK/2016 concerning Market Risk Framework on Reverse Repo transactions in the Trading Book, which state that if the securities that are collateral for reverse repo transactions are traded, then the Bank must record the transaction as a short position in the Trading Book so that it is exposed to Market Risk.
   - In the counterparty credit risk framework, the calculation of reverse repo refers to SEOJK Number SEOJK 24 - 03 - 2021 concerning Guidelines for Calculating Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach.

PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO BANK KETERKAITAN MODEL BISNIS DENGAN PROFIL RISIKO DAN TOLERANSI RISIKO

Aspek risiko adalah salah satu hal yang dipertimbangkan dalam proses perencanaan bisnis Bank, dan Bank akan menetapkan *Risk Appetite* yang diformulasikan sejalan dengan strategi yang telah disetujui untuk memastikan kesesuaian antara strategi, pertumbuhan, rencana operasional, permodalan dan risiko.

Risk Appetite harus mempertimbangkan kemampuan Bank dalam mendukung pertumbuhan bisnis, *Return on Equity* yang diharapkan dan target *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Selain Itu, *Risk Appetite* juga mencakup aspek-aspek parameter risiko yang tercakup dalam ketentuan regulator terkait profil risiko antara lain rasio-rasio kualitas aset, risiko konsentrasi, parameter risiko operasional, likuiditas dan kepatuhan.

Aspek-aspek yang terdapat dalam risk appetite ini sejalan dengan jenis risiko yang tercakup dalam ketentuan regulator terkait profil risiko.

STRUKTUR TATA KELOLA RISIKO

Struktur tata kelola perusahaan harus berfungsi untuk memastikan independensi dan transparansi dalam seluruh proses manajemen risiko, sehingga konsistensi penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan baik. Direksi dibantu oleh komite-komite risiko dan fungsi kontrol dalam rangka memastikan efektivitas manajemen risiko di Bank dievaluasi oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertanggung jawab atas penerapan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. Struktur organisasi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko telah dijelaskan lebih detail di bagian Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank.

KOMUNIKASI BUDAYA RISIKO

Untuk memperkuat budaya risiko, penerapan manajemen risiko di Bank melekat pada filosofi tiga garis pertahanan (*three lines of defense*), di mana risiko dikelola dari titik aktivitas pengambilan risiko (*risk taking activities*) untuk memastikan akuntabilitas atas risiko yang jelas di seluruh organisasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank untuk membangun budaya risiko dalam setiap aktivitas operasional sehari-hari di seluruh jajaran organisasi Bank telah dijelaskan lebih detail di bagian Budaya Risiko.

APPROACHES TO BANK RISK MANAGEMENT IN RELATION TO BUSINESS MODEL WITH RISK PROFILE AND RISK TOLERANCE

The risk aspect is one of the things considered in the Bank's business planning process and the Bank will determine the Risk appetite, which is formulated in line with the approved strategy, to ensure compatibility between strategies, growth, the operational plan, capital, and risk.

Risk Appetite must consider the Bank's ability to support business growth, the expected Return on Equity and the Capital Adequacy Ratio (CAR) target. In addition, Risk Appetite also covers aspects of risk parameters that are included in regulatory provisions regarding risk profiles, such as asset quality ratios, concentration risk, operational risk parameters, liquidity, and compliance.

The aspects contained in this risk appetite are in line with the types of risks covered in regulatory provisions regarding risk profiles.

RISK GOVERNANCE STRUCTURE

The corporate governance structure must ensure independence and transparency in the entire risk management process, so that consistent implementation of risk management can run well. The Board of Directors is assisted by risk committees and control functions to ensure that the risk management effectiveness at the Bank is evaluated by the Risk Management Committee (RMC), which is responsible for the implementation of the overall risk management framework. The organizational structure related to the implementation of risk management has been described in detail in the Bank's Risk Management Organizational Structure section.

RISK CULTURE COMMUNICATION

To strengthen the risk culture, the implementation of risk management at the Bank adheres to the three lines of defense philosophy, where risk is managed from the point of risk-taking activities to ensure accountability for clear risks throughout the organization and the Risk Management Work Unit (SKMR). The actions taken by the Bank to build a risk culture in every daily operational activity at all levels of the Bank's organization are explained in more detail in the Risk Culture section.

Dalam Komite Manajemen Risiko (KMR) telah dikomunikasikan dan dibahas isu risiko secara terbuka baik dari sisi bisnis dan risiko. Selain itu Bank juga menggunakan media internal seperti *e-mail blast*, *Garoon blast*, aplikasi *GreatDay* dan aplikasi Learning untuk mendorong kesadaran penerapan manajemen risiko dan *anti-fraud*.

RUANG LINGKUP DAN FITUR UTAMA SISTEM PENGUKURAN RISIKO

Pengukuran risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank untuk mengetahui profil risiko Bank.

Pengukuran risiko disesuaikan dengan jenis risikonya baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dan didukung oleh infrastruktur (metodologi, model, dan data) serta berdasarkan pendekatan praktik terbaik (*best practice*) di industri perbankan.

Pengukuran risiko telah dijelaskan di bagian Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko (per masing-masing risiko).

PROSES PELAPORAN INFORMASI RISIKO KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelaporan mengenai eksposur risiko secara keseluruhan disampaikan secara berkala kepada Direksi dalam rapat komite eksekutif seperti *Risk Management Committee* (RMC) dan *Asset & Liability Committee* (ALCO).

Di samping itu, pelaporan risiko kepada Dewan Komisaris dilakukan secara berkala melalui Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*). Laporan yang disampaikan mencakup informasi mengenai hal-hal berikut:

a. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan *Risk Appetite & Risk Tolerance.*
b. Eksposur risiko secara menyeluruh yang mencakup eksposur per jenis risiko dan per jenis kegiatan fungsional.
c. Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.

STRESS TESTING DALAM MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan proses *stress testing* secara periodik untuk mengetahui dampak perubahan kondisi eksternal yang cukup signifikan terhadap kinerja Bank, termasuk kondisi likuiditas dan permodalan.

The Risk Management Committee (RMC) has openly communicated and discussed risk issues from both business and risk sides. Furthermore, the Bank also uses internal media such as e-mail blasts, Garoon blast, GreatDay application, and the Learning application to promote awareness of the implementation of risk management and anti-fraud.

SCOPE AND MAIN FEATURES OF THE RISK MEASUREMENT SYSTEM

Risk measurement is carried out on all types of risks inherent in the Bank's business activities to determine the Bank's risk profile.

Risk measurement is adjusted to the type of risk using both qualitative and quantitative approaches, supported by infrastructure (methodology, models, and data), and based on best practice approaches in the banking industry.

Risk measurement has been described in the Risk Measurement and Control Mechanism section (per each risk).

RISK INFORMATION REPORTING PROCESS TO THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Reports regarding overall risk exposure are submitted periodically to the Board of Directors in executive committee meetings such as the Risk Management Committee (RMC) and Asset & Liability Committee (ALCO).

In addition, risk reporting to the Board of Commissioners is carried out periodically through the Risk Oversight Committee. The report submitted includes information regarding the following matters:

a. Risk Management Policy and Risk Appetite & Risk Tolerance Policy.
b. Overall risk exposure, which includes exposure of each type of risk and each type of functional activity.
c. Assessment of the Bank's Risk Profile and Soundness Level.

STRESS TESTING IN RISK MANAGEMENT

The Bank carries out a periodic stress testing process to determine the impact of significant changes in external conditions on the Bank's performance, including liquidity and capital conditions.

Ruang lingkup pelaksanaan stress test mencakup jenis jenis risiko utama yaitu risiko kredit (skenario dampak penurunan kualitas kredit), risiko pasar (skenario shock suku bunga dan risiko nilai tukar) dan risiko likuiditas (skenario dampak arus kas keluar dari deposan besar).

Dalam kaitan dengan risiko di atas, stress test dapat digunakan untuk menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai dan cadangan aktiva likuid yang dimiliki serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Bank untuk mengantisipasi dalam kondisi stress.

STRATEGI DAN PROSES MITIGASI DAN PENGENDALIAN RISIKO

Bank mengatur strategi pengendalian risiko. antara lain melalui kebijakan dan prosedur, penetapan limit, melakukan *stress testing*, asuransi dan lain-lain dengan tetap memperhatikan prinsip *risk and return* yang memadai dan kesesuaiannya dengan *risk appetite* dan strategi bisnis Bank.

Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Bank

Perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2024 masih menantang dan mempengaruhi bisnis perbankan nasional, Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan sangat memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

J Trust Bank telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan adanya budaya risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai dari pada seluruh unit kerja di Bank, di mana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh Bank meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari pengawasan Manajemen,

The scope of the stress test implementation includes the main types of risks, namely credit risk (scenario of the impact of a decline in credit quality), market risk (scenario of interest rate shocks and exchange rate risk), and liquidity risk (scenario of the impact of cash outflows from large depositors).

In relation to the risks mentioned above, stress tests can be used to assess the adequacy of the allowance for impairment losses and the liquidity assets held, as well as measures that can be taken by the Bank to anticipate and manage stress conditions.

STRATEGY AND MITIGATION PROCESS AND RISK CONTROL

The Bank establishes risk control strategies, including through policies and procedures, setting limits, conducting stress testing, insurance, and other measures, while referring to the principles of adequate risk and return and ensuring alignment with the Bank's risk appetite and business strategy.

Risk Exposure and Implementation of Risk Management

The global economic development in 2024 has been challenging and has affected the national banking business. The implementation of effective and sound risk management and Good Corporate Governance (GCG) has played a crucial role in enhancing added value and providing a comprehensive view of the potential risks and losses that the Bank may face in the future, tailored to the Bank's complexity and internal condition.

J Trust Bank has implemented risk management based on the Regulation of Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Bank, and its implementing regulations.

To achieve objectives mentioned above, it is necessary to create a risk culture (risk awareness) and an adequate technical competence of all work units in the Bank. This responsibility involves and engages all work units in the Bank.

The effectiveness of the implementation of governance and risk management framework by the Bank consists of four (4) pillars:

a. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors as part of management

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan Dewan Komisaris meliputi antara lain:

(1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
(2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
(3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
(4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Divisi Internal Audit dan Eksternal Audit telah ditindaklanjuti. Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris.

Sementara itu, Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja, Pengawasan aktif Direksi, di antaranya meliputi:

1) Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
2) Memantau, mengevaluasi dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi serta action plan telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/ pertemuan berkala;
3) Memastikan Standar Prosedur Operasional (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;

supervision. The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management implementation at the Bank and ensure the implementation of an adequate risk management, which is in accordance with the Bank's characteristics, complexity and risk profile. Supervision by the Board of Commissioners include, among others:

(1) Approve the risk management policy, including risk management strategies and framework that are established in accordance with the level of risk taken (risk appetite) and the Bank's risk tolerance.
(2) Evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.
(3) Hold Regular Meetings with the Board of Directors to evaluate the achievement of the follow-up of each work plan (action plan).
(4) Ensure that any recommendations from the Audit Result Report (LHA) of Internal Audit Division and External Audit have been followed up as a form of supervision and risk management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance. The Board of Commissioners is assisted by the Risk Oversight Committee in Commissioner level.

Meanwhile, the Board of Directors is responsible for determining the direction of risk management policies and strategies comprehensively, including their implementation, and ensuring that all material risks and their impacts have been addressed. The Board of Directors is also responsible for fostering risk culture and awareness across all work units. Active supervision by the Board of Directors includes, among others:

1) Develop risk management policies, strategies, and framework by considering the level of risk appetite and risk tolerance of the Bank.
2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plans, strategies, and action plans have been carried out as planned through periodic conference/meeting.
3) Ensure Standard Operating Procedures (SOP), Policies and Procedures have been understood and implemented.
4) Ensure and implement corrective measures or recommendations from the Internal Audit Work Unit and External Audit have been implemented effectively.

5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran riisko pada seluruh jenjang organisasi.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko.
Penerapan manajemen risiko di Bank telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR berfungsi sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan batas tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

c. Kecukupan proses identifikasi. pengukuran. pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko
Proses penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, dan risiko reputasi.
1) Identifikasi
Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.
2) Pengukuran
Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan memperkirakan dampaknya terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan dan *Risk Control Self Assessment* (RCSA).
3) Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* dan efektivitas proses manajemen risiko.
4) Pengendalian
Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *moderate to high dan high.*

5) Develop risk management culture and raise risk awareness at all levels of the organization.

b. The adequacy of policies, procedures, and limit setting as a guideline in the implementation of Risk Management.
The implementation of risk management in the Bank has been stipulated in several policies and procedures, such as the Risk Management General Policy (KUMR). KUMR functions as the highest authority in providing policy direction for risk management and control to safeguard the Bank against the risks faced in its business activities. The establishment of limits is managed within business activities and products and has been adjusted to the level of risk the Bank is willing to take (risk appetite). These limits are reviewed periodically to align with changes in current conditions.

c. The adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, and risk control, as well as Risk Management information system.
The process of risk management includes identification, measurement, monitoring, management and control of eight risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.
1) Identification
Risk identification is carried out across all business activities to analyze the sources and potential emergence of risks, as well as their impact.
2) Measurement
Risk measurement is intended to enable the Bank to calculate the risk exposure inherent in business activities and estimate its impact on capital. One of the risk measurements is reflected in the quarterly Risk Profile Report and the Risk Control Self-Assessment/RCSA.
3) Monitoring
Risk monitoring is conducted, among others, by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of risk management process.
4) Control
Risk control includes taking follow-up actions on risks that are classified as moderate to high and high.

d. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
Pengendalian internal telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu juga dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

d. Effective internal control system in the Bank's operational activities.
Internal control has been carried out by the Internal Audit Division to assess the implementation of risk management processes and systems in functional activities with risk exposure. In addition, there is a clear separation of functions between the operational work units (risk-taking units) and the work units that carry out risk control functions (risk management unit).

Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Bank secara khusus

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit antara lain adalah Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement (settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Penerapan manajemen risiko kredit yang telah dilakukan meliputi:

a. Organisasi manajemen risiko kredit
Dalam organisasi manajemen risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eyes Principle* yang merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Credit Risk Review* yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1) Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan/aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana dan penanganan debitur kualitas kredit agar tidak berpotensi menjadi NPL (*Non-Performing Loan*) serta dilengkapi kewenangan memutus kredit dalam batas limit tertentu bersama dengan Divisi *Credit Risk Reviewer* dalam Komite Kredit. Selain itu, pada level Divisi Bisnis terdapat Divisi baru yaitu *Client Service* yang membantu unit bisnis dalam melakukan analisa, pemantauan dan pemenuhan persyaratan kredit sebagai upaya dalam dalam proses pemberian kredit pada level *first line of defense* serta memperkuat fungsi four eyes dalam proses pemberian kredit.

Risk Exposure and Specific Risk Management Implementation at the Bank

1. Credit Risk

Credit risk is the risk of loss due to the failure of other parties to fulfill their obligations. Included in Credit Risk are Credit Risk due to debtor failure, Credit Concentration Risk due to excessive exposure in provision of funds, Credit Risk due to the failure of counterparty (Counterparty Credit Risk), credit risk due to the failure of settlement (Settlement Risk), and Credit Risk due to country risk.

The implementation of credit risk management that has been carried out includes:

a. Credit risk management organization
In the credit risk management organization, the Bank has implemented the Four Eyes Principle as the main principle underlying the credit decision making by involving the business units and units of Commercial Credit Risk, which mutually independent of each other with a separation of authorities and responsibilities as follows:
1) The Business Division is a business unit to implement the proposal/activity of credit or provision of funds and handling debtors credit quality to avoid the potential of Non-Performing Loan (NPL) and equipped with the authority to decide credit within certain limits in collaboration with the Credit Risk Review Division in the Credit Committee. In addition, at the Business Division level there is a new division, namely Client Service, which assists business units in analyzing, monitoring and fulfilling credit requirements as an effort in the credit granting process at the first line of defense level and strengthening the four eyes function in the credit granting process.

2) Divisi *Credit Risk Reviewer* adalah unit yang melakukan review Nota Analisis Kredit dan membuat Nota Analisis Risiko & Rekomendasi serta dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak proposal yang diusulkan oleh Divisi Bisnis;
3) Divisi Corporate Legal & Litigation dan Divisi Compliance sebagai Non-Voting Member dalam pemberian opini kepatuhan dan legal dalam mekanisme proses kredit.
4) Divisi Head Operation, Divisi Credit Administration dan Divisi Financial Control sebagai *Non-Voting Member (ad hoc)* apabila diperlukan opini operasional dan restrukturisasi kredit.
5) Divisi Management *All Deliquencies* bersama-sama dengan Divisi Bisnis membantu melakukan penagihan kualitas kredit dan penanganan debitur kualitas kredit serta penyelesaian aset bermasalah.
6) Divisi Risk Management berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi. pengukuran. pemantauan dan pengendalian risiko kredit.
7) Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas dan Wewenang Memutus Kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

b. Strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan

Strategi manajemen risiko kredit berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank, dan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kondisi pasar dan kondisi ekonomi.

c. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit antara lain:

1) Melakukan penyusunan Portofolio Kredit per Sektor Industri yang digunakan sebagai batas penyaluran kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu.
2) Penetapan *inhouse limit* dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, debitur grup dan individu (BMPK) dengan tidak mengabaikan ketentuan regulator.

d. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

2) The Credit Risk Reviewer Division is a unit that reviews the Credit Analysis Note and formulate a Risk Analysis and Recommendation Note, with the authority to approve or reject proposals suggested by the Business Division, with certain limit boundaries.
3) Corporate Legal & Litigation Division and Compliance Division as Non-Voting Member in giving opinions on compliance and legal within the mechanisms of the credit processing.
4) Head Operation Division, Credit Administration Division and Financial Control Division as Non-Voting Member (ad hoc) in giving opinions required in operational and loan restructuring.
5) Management All Delinquencies Division (MAD), in collaboration with Business Division, assists in credit quality collections, handling credit quality debtors, and resolving problematic assets.
6) Risk Management Division (RMD) functions as an independent unit to identify, measure, monitor, and control credit risk.
7) Credit Committee is a mechanism for credit approval process in accordance with the Credit Decision Limits and Authorities set by the Board of Directors.

b. Credit risk management strategies for activities that have significant credit risk exposure.

Credit risk management strategy is based on the provisions of Bank Indonesia/the Financial Services Authority, the Bank Business Plan and the prudence principles, as well as also pays attention to market and economic conditions.

c. Credit concentration risk management policy.

Credit concentration risk management includes:

1) Preparing a Credit Portfolio per Industrial Sector, which is used as a limit for credit distribution to specific economic sectors.
2) Determination of legal lending limits for providing funds to related parties, group of debtors, and individuals (BMPK), without disregarding regulatory requirements.

d. Credit risk measurement and control mechanisms

1) Me*review* dan menyempurnakan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit secara berkala. dan terus melengkapi serta menyempurnakan ketentuan internal bidang perkreditan secara berkesinambungan agar selaras dengan kondisi terkini sesuai dinamika organisasi, rencana bisnis Bank, *best practice* industri perbankan, dan ketentuan regulator.
2) Melakukan penetapan limit/ Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang ditinjau secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat namun tetap berpedoman terhadap azas prudential banking.
3) Pengukuran risiko kredit melalui kualitas analisis kredit.
4) Melakukan penyempurnaan pedoman monitoring kredit melalui: Penerapan Analisis 3 Pilar & Early Warning Monitoring.
5) Melakukan pemantauan Kredit Kualitas Rendah (KKR) melalui Rapat KKR dengan me*review* debitur *watch list* membuat *Action Plan Report* terkait Pemantauan, Pengawasan & Tindak Lanjut.
6) Melakukan pengendalian kredit melalui proses *account strategy* dan manajemen kredit bermasalah.
7) Risk awareness dari Dewan Komisaris dan Direksi atas strategi bisnis perkreditan, *enforcement* pelaksanaan budaya risiko dan internalisasi budaya risiko kredit ke seluruh jenjang organisasi.

e. Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai/ *impairment*
   1) Tagihan yang telah jatuh tempo adalah tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga;
   2) Tagihan yang mengalami penurunan nilai adalah suatu kondisi ditemukannya bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas di masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi dengan andal.

1) Review and refine the Bank's Credit Policy and Credit Implementation Guidelines periodically and continuously updating and improving internal credit regulations to align with current conditions, organizational dynamics, the Bank's business plans, banking industry best practices, and regulatory requirements.
2) Determining limits of the Credit Decision Authority (BWMK), which are reviewed periodically, and making improvements to the credit process so that the credit decision- making process runs quicker but is still guided by the principles of prudential banking.
3) Measuring credit risk through credit analysis quality.
4) Improving credit monitoring guidelines through: Implementation of 3 Pillar Analysis & Early Warning Monitoring.
5) Monitoring Low Quality Credit (KKR) through TRC Meetings by reviewing the debtor watch list and creating an Action Plan Report related to Monitoring, Supervision & Follow-up Actions.
6) Carry out credit control through the account strategy process and non-performing credit management.
7) Risk awareness from the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding credit business strategies, enforcement of risk culture implementation, and internalization of credit risk culture at all levels of the organization.

e. Definition of overdue receivables and impaired receivables
   1) Overdue receivables are receivables that have been overdue for more than 90 (ninety) days, whether in terms of principal payments and/or interest payments.
   2) Impaired receivables refer to a condition in which there Is objective evidence of a loss event resulting from one or more adverse events occurring after the initial recognition of the credit. These adverse events have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets, which can be reliably estimated.

f. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.

Bank menggunakan teknik perhitungan dalam cadangan kerugian penurunan (CKPN) nilai aset keuangan secara individual dan kolektif sebagai berikut:

(a) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Individual

Bank melakukan evaluasi kerugian penurunan nilai dan perhitungan pembentukan CKPN aset keuangan kredit secara individual menggunakan teknik *discounted cash flow* (nilai kini estimasi arus kas masa datang) dan *fair value of collateral* (nilai kini dari nilai wajar agunan), Estimasi arus kas masa datang (*discounted cash flow*) bersumber dari ekspektasi penerimaan pokok, bunga dan atau denda. dapat juga bersumber dari penerimaan realisasi hasil klaim jaminan pihak ketiga dan atau pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi. Sedangkan estimasi arus kas masa datang yang berasal dari ekspektasi penerimaan realisasi agunan (*fair value of collateral*) bersumber dari realisasi penjualan agunan. Aset keuangan kredit yang telah dievaluasi secara individual namun jika tidak terdapat bukti objektif kerugian penurunan nilai. maka evaluasi kerugian penurunan nilai dan CKPN dilakukan secara kolektif.

(b) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kolektif

Perhitungan CKPN kolektif menggunakan metode *roll rates* atau *migration analysis* dengan *parameter probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD) berdasarkan data historis bank. Aset keuangan yang telah dievaluasi secara kolektif namun jika ditemukan dan/atau jika terdapat bukti objektif terjadi kerugian penurunan nilai maka evaluasi kerugian penurunan nilai dan CKPN dinilai secara individual.

f. An explanation of the approach used to establish individual and collective Allowance for Impairment Losses (CKPN), as well as the statistical methods used in calculating CKPN.

The Bank uses the following calculation techniques for allowance for impairment losses (CKPN) on the value of financial assets individually and collectively:

(a) Allowance for Individual Impairment Losses

The Bank evaluates impairment losses and calculates the formation of CKPN for individual credit financial assets using discounted cash flow techniques (the present value of estimated future cash flows) and the fair value of collateral (the present value of the fair value of collateral). Estimated future cash flow (discounted cash flow) comes from expected principal income, interest, and/or fines, and it can also come from the realization of third-party guarantee claims and/or compensation payments from insurance companies. Meanwhile, estimates of future cash flows derived from expectations of receipt of realized collateral (the fair value of collateral) originate from realized sales of collateral. Credit financial assets that have been evaluated individually, but where there is no objective evidence of impairment loss, then the evaluation of impairment losses and CKPN is carried out collectively.

(b) Allowance for Collective Impairment Losses

The collective CKPN calculation uses the roll rates or migration analysis method with probability of default (PD) and loss given default (LGD) parameters based on the Bank's historical data. Financial assets that have been evaluated collectively, but if found and/or if there is objective evidence of an impairment loss, then the evaluation of the impairment loss and CKPN are assessed individually.

Tabel 1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank secara individual
Table 1.1. Disclosure of Net Receivables by Region – Bank individually

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 Audited | 31 December 2024 Audited				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables based on Region				
		Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	5.563.266	-	5.563.266
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	73.920	-	73.920
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	82.327	72.684	1.401.334	32.572	1.588.917
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	34.508	4.589.198	262.648	4.886.354
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.307	26.457	467.635	17.438	516.837
7	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	11.739	77.346	89.085
8	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	79.061	60.637	960.622	832.330	1.932.650
10	Tagihan Kepada Korporasi	1.428.079	3.080.791	12.813.930	2.491.074	19.813.874
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	10.670	101.329	267.130	4.777	383.905
12	Aset Lainnya	-	-	4.042.913	-	4.042.913
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**1.605.444**	**3.376.405**	**30.191.687**	**3.718.185**	**38.891.721**

Tabel 1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank secara individual
Table 1.2. Disclosure of Net Receivables Based on Remaining Contract Term – Bank individually

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 Audited | 31 December 2024 Audited					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Net receivables by Remaining Contractual Maturity					
		≤ 1 tahun ≤ 1 year	>1 thn s.d. 3 thn > 1 year to 3 year	>3 thn s.d. 5 thn > 3 year to 5 year	> 5 thn > 5 year	Non-Kontraktual Non Contractual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.096.771	-	120.019	1.010.499	2.335.977	5.563.266
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	73.920		73.920
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	977.155	347.369	182.907	81.486	-	1.588.917
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	715.372	1.058.901	3.019.628	92.452		4.886.354
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.004	25	1.040	513.768		516.837
7	Kredit Beragun Properti Komersial	-	759	-	88.326		89.085
8	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-		-
9	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	989.512	146.187	95.381	701.570		1.932.650
10	Tagihan Kepada Korporasi	6.217.464	3.152.558	4.067.709	6.376.143		19.813.874
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	83.197	23.236	123.984	153.489		383.905
12	Aset Lainnya	-	-	-	-	4.042.913	4.042.913
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**11.081.476**	**4.729.035**	**7.610.668**	**9.091.653**	**6.378.889**	**38.891.721**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2023 Audited | 31 December 2023 Audited					Portfolio Category
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables based on Region					
Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(2)
-	-	6.379.013	-	6.379.013	Receivables on Sovereign
-	61.984	221.355	154.042	437.381	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
82.579	102.584	1.331.147	44.725	1.561.035	Receivables on Banks
-	20.999	3.631.058	214.128	3.866.185	Receivables on Securities Companies and Other Financial Institutions
4.850	10.595	264.500	17.073	297.018	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	Loan Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	Employee/Pensions Loans
206.882	85.118	706.221	145.615	1.143.836	Receivables on Micro. Small Business & Retail Portfolio
1.105.232	3.002.170	13.723.249	2.147.822	19.978.473	Receivables on Corporate
8.977	8.967	134.434	13.523	165.901	Past Due Receivables
-	-	3.907.580	-	3.907.580	Other Assets
-	-	-	-	-	Exposure in Sharia Business Units (if any)
1.408.520	**3.292.417**	**30.298.557**	**2.736.928**	**37.736.422**	**TOTAL**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2023 Audited | 31 December 2023 Audited						Portfolio Category
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Net receivables by Remaining Contractual Maturity						
≤ 1 tahun ≤ 1 year	>1 thn s.d. 3 thn > 1 year to 3 year	>3 thn s.d. 5 thn > 3 year to 5 year	> 5 thn > 5 year	Non-Kontraktual Non Contractual	Total	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
2.096.771	-	120.019	1.010.499	2.335.977	5.563.266	Receivables on Sovereign
-	-	-	73.920	-	73.920	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
977.155	347.369	182.907	81.486	-	1.588.917	Receivables on Banks
715.372	1.058.901	3.019.628	92.452	-	4.886.354	Receivables on Securities Companies and Other Financial Institutions
2.004	25	1.040	513.768		516.837	Loans Secured by Residential Property
-	759	-	88.326	-	89.085	Loan Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	-	Employee/Pensions Loans
989.512	146.187	95.381	701.570	-	1.932.650	Receivables on Micro. Small Business & Retail Portfolio
6.217.464	3.152.558	4.067.709	6.376.143	-	19.813.874	Receivables on Corporate
83.197	23.236	123.984	153.489	-	383.905	Past Due Receivables
-	-	-	-	4.042.913	4.042.913	Other Assets
-	-	-	-	-	-	Exposure in Sharia Business Units (if any)
5.970.599	**6.744.267**	**8.207.594**	**6.844.670**	**9.969.292**	**37.736.422**	**TOTAL**

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara individual
Table 1.3. Disclosure of Net Receivables Based on Economic Sector – Bank individually

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Publik Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	Kredit Beragun Rumah Tinggal Residential Loan with Collaterals
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2024						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	2.004
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	1.588.917	4.886.354	-
12	Real estat	-	73.920	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	54
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	514.779
23	Lainnya	5.563.266	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**5.563.266**	**73.920**	**-**	**1.588.917**	**4.886.354**	**516.837**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Loan with Collaterals	Kredit Pegawai/ Pensiun Loan for Employee/ Pensioners	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables to Micro, Small, Business and Retails Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivables to Corporates	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Matured Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Business Unit (if any)	Economic Sector
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(2)
							31 December 2024 Audited
-	-	62.721	1.493.689	81	-	-	Agriculture. Forestry. and Fisheries
-	-	92.193	2.135.822	-	-	-	Mining and Quarrying
-	-	63.413	4.457.921	52.543	-	-	Manufacturing
-	-	-	298.140	-	-	-	Procurement of electricity. gas. steam/ hot water. and cold air
-	-	-	-	-	-	-	Water Management. Wastewater Management. Waste Management and Recycling
-	-	166.269	1.052.494	7.552	-	-	Construction
74.398	-	968.041	2.998.508	53.482	-	-	Wholesale and Retail Trading; Car and Motorcycle Repair and Maintenance
-	-	-	681.044	-	-	-	Transportation and warehousing
-	-	13.022	603.825	88.688	-	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink
-	-	-	882.439	-	-	-	Information and Communication
759	-	481	986.669	-	-	-	Financial and Insurance Activities
-	-	121.331	1.908.139	128.969	-	-	Real Estate
-	-	-	460.231	-	-	-	Professional. Scientific. and Technical Activities
-	-	127	650.083	17.559	-	-	Rental and Leasing Activities Without Option Rights. Employment. Travel Agencies. and Other Business Support
-	-	-	-	-	-	-	Mandatory Government Administration. Defense. and Social Security Education
-	-	-	-	-	-	-	Human Health Activities and Social Activities
-	-	247	-	-	-	-	Arts. Entertainment and Recreation
-	-	-	-	-	-	-	Other Service Activities
-	-	434	-	1.523	-	-	Household Activities as an Employer
-	-	-	-	-	-	-	Activities of International Bodies and Other Extra-International Agencies
-	-	-	-	-	-	-	Non-Business Field
13.928	-	444.372	523	33.509	-	-	Other Assets
-	-	-	1.204.348	-	4.042.913	-	Others
89.085	**-**	**1.932.650**	**19.813.874**	**383.905**	**4.042.913**	**89.085**	**TOTAL**

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank secara individual
Table 1.4. Disclosure of Claims and Provisions by Region – Bank individually

No.	Keterangan	31 Desember 2024 Audited | 31 December 2024 Audited				
		Wilayah | Areas				
		Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	1.605.444	3.376.405	30.191.687	3.718.185	38.891.721
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	23.273	146.161	2.640.501	24.078	2.834.012
	a. belum jatuh tempo	23.273	97.374	2.632.479	24.078	2.777.204
	b. telah jatuh tempo	-	48.787	8.021	-	56.808
3	CKPN - Stage 1	9.830	25.850	131.773	14.453	181.906
4	CKPN - Stage 2	91	117	611	2	822
5	CKPN - Stage 3	4	1.957	12.822	32	14.815
6	Tagihan yang dihapus buku	-	202	46.822	22.307	69.331
	JUMLAH	**1.638.642**	**3.550.693**	**33.024.215**	**3.779.056**	**41.992.607**

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara individual
Table 1.5. Disclosure of Claims and Provisions by Economic Sector –Bank Individually

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables	
			Belum Jatuh Tempo Not Past Due	Telah jatuh tempo Past Due
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31 Desember 2024 Audited			
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.558.495	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	2.228.015	-	-
3	Industri pengolahan	4.573.877	1.121	51.421
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	298.140	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-
6	Konstruksi	1.226.315	-	7.552
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4.094.428	9.380	44.101
8	Pengangkutan dan Pergudangan	681.044	-	-
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	705.534	88.688	-
10	Informasi dan Komunikasi	882.439	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	7.463.180	-	-
12	Real estat | Real Estate	2.232.358	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	460.231	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	667.769	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2023 Audited | 31 December 2023 Audited					Description
ilayah | Areas					
Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(2)
1.381.495	3.226.360	16.191.266	2.667.640	23.466.761	Receivables
17.805	49.438	308.479	37.356	413.077	Receivables with increased and worsening credit risk (Stage 2 and Stage 3)
9.548	35.192	182.553	12.451	239.744	a. non past due
8.257	14.246	125.926	24.905	173.333	b. past due
4.465	6.396	43.758	6.005	60.624	Allowance for Impairment Losses - Stage 1
190	858	11.671	597	13.316	Allowance for Impairment Losses - Stage 2
626	4.045	57.423	11.221	73.315	Allowance for Impairment Losses - Stage 3
-	-	46.878	22.307	69.185	Written-off receivables
1.422.386	**3.336.535**	**16.967.954**	**2.782.482**	**24.509.355**	**TOTAL**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 Allowance for Impairment Losses - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for Impairment Losses - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for Impairment Losses - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sector
(6)	(7)		(8)	(2)
				31 December 2024 Audited
3,125	91	1,484	-	Agriculture. Forestry. and Fisheries
3,603	-	18	-	Mining and Quarrying
-	-	-	-	Manufacturing
1,247	-	-	-	Procurement of electricity. gas. steam/hot water. and cold air
-	-	-	-	Water Management. Wastewater Management. Waste Management and Recycling
8,253	-	0	-	Construction
49,616	2	722	67,403	Wholesale and Retail Trading; Car and Motorcycle Repair and Maintenance
-	-	-	-	Transportation and warehousing
-	-	-	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink
3,063	-	892	-	Information and Communication
901	-	-	-	Financial and Insurance Activities
1,206	-	82	-	Real Estate
-	-	-	-	Professional. Scientific. and Technical Activities
-	-	-	-	Rental and Leasing Activities Without Option Rights. Employment. Travel Agencies. and Other Business Support
-	-	-	-	Mandatory Government Administration. Defense. and Social Security
-	-	-	-	Education

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables	
			Belum Jatuh Tempo Not Past Due	Telah jatuh tempo Past Due
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	247	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	2.010	1.477	47
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-
21	Aktivitas Badan internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	1.007.112	10.480	23.030
23	Lainnya	10.810.527	-	-
	Jumlah	**38.891.721**	**111.146**	**126.151**

Tabel 1.6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Bank secara individual
Table 1.6. Disclosure of Mutation Details of Allowance for Impairment Losses – Bank individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 Audited			31 Desember 2023 Audited		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(7)	(8)
1	Saldo awal CKPN | Beginning balance of allowance for impairment losses	60.624	13.316	73.315	67.483	1.427	94.680
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) Additional/reversal allowance for impairment losses during the year (net)						
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan Additional allowance for impairment losses during the year	41.381	2.088	17.986	28.406	4.651	-
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan Reversal allowance for impairment losses during the year	-	-	-	-	-	(21.218)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan Allowance for impairment losses used to cover written off receivables during the year	-	-	(407)	(3)	(17)	(445)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan Other additional (reversal) allowance during the year	17.504	(6.844)	(21.421)	(11.306)	(5.307)	(11.096)
Saldo akhir CKPN | Ending Balance of Allowance for Impairment Losses		119.509	8.560	69.473	84.580	754	61.921

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 Allowance for Impairment Losses - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for Impairment Losses - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for Impairment Losses - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sector
	(6)	(7)		(8)	(2)
	-	-	-	-	Human Health Activities and Social Activities
	444	-	-	-	Arts. Entertainment and Recreation
	-	-	-	-	Other Service Activities
	-	-	-	-	Household Activities as an Employer
	-	-	-	-	Activities of International Bodies and Other Extra-International Agencies
	-	-	-	1,578	Non-Business Field
	-	-	-	-	Others
	71,457	**93**	**3,198**	**68,981**	**Total**

g. Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Pelaporan Pendekatan Standar oleh Bank saat ini tidak menggunakan peringkat eksternal terhadap kategori portfolio. Posisi eksposur risiko kredit Bank berdasarkan peringkat seperti terlihat pada tabel berikut:

g. Credit Risk with the Standard Approach

The Bank's current Standard Approach reporting does not use external ratings for portfolio categories. The Bank's credit risk exposure positions based on ratings are shown in the following table:

Tabel 2.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank secara individual
Table 2.1. Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Rating Scale –Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited					
		Lembaga Pemeringkat Company Rating	Tagihan Bersih Net Receivables				
			Peringkat Jangka panjang Long-term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ – AA-	A+ – A-	BBB+ – BBB-	BB+ – BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ – AA-	A+ – A-	BBB+ – BBB-	BB+ – BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 – Aa3	A1 – A3	Baa1 – Baa3	Ba1 – Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) – AA-(idn)	A+(idn) – A-(idn)	BBB+(idn) – BBB-(idn)	BB+(idn) – BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ – idAA-	idA+ – id A-	id BBB+ – id BBB-	id BB+ – id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Receivables on Sovereign		5.563.266	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Receivables on Public Sector Entities		-	-	-	73.920	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Receivables on Banks		322.557	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions		685.213	183.876	574.935	63.922	-
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Loans Secured by Residential Property		-	-	-	-	-
7	Kredit Beragun Properti Komersial | Loan Secured by Commercial Real Estate		-	-	-	-	-
8	Kredit Pegawai/Pensiunan | Employee/Pensions Loans		-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio		-	-	-	-	-
10	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate		39.251	115.667	1.275.123	148.505	-
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Past Due Receivables		-	-	-	-	-
12	Aset Lainnya | Other Assets		-	-	-	-	-
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Exposure in Syariah Business Unit (if any)		-	-	-	-	-
	JUMLAH | TOTAL		**6.610.287**	**299.543**	**1.850.057**	**286.347**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 December 2024 Audited								
Tagihan Bersih Net Receivables								
Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating							Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
	B+ – B-	Kurang dari/ Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari/ Less than A-3		
	B+ – B-	Kurang dari/ Less than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari/ Less than F3		
	B1 – B3	Kurang dari/ Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari/ Less than P-3		
	B+(idn) – B-(idn)	Kurang dari/ Less than B-(idn)	F1+(idn) – F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari/ Less than F3(idn)		
	id B+ – id B-	Kurang dari/ Less than idB-	idA1	idA2	idA3 – id A4	Kurang dari/ Less than idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	5.563.266
	-	-	-	-	-	-	-	73.920
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1.266.360	1.588.917
	-						3.378.407	4.886.354
	-	-	-	-	-	-	516.837	516.837
	-	-	-	-	-	-	89.085	89.085
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1.932.650	1.932.650
	259.786	-	-	-	-	-	17.975.543	19.813.874
	-	-	-	-	-	-	383.905	383.905
	-	-	-	-	-	-	4.042.913	4.042.913
	-	-	-	-	-	-	-	-
	259.786	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.585.701**	**38.891.721**

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan

Bank memiliki eksposur derivatif yang tidak terlalu signifikan, dengan porsi terbesar adalah pada transaksi FX swap dengan Bank lain, sedangkan eksposur derivatif suku bunga berasal dari transaksi interest rate swap. Posisi transaksi reverse repo adalah dengan bank lain dan korporasi Bank Indonesia, sedangkan transaksi repo adalah dengan bank lain dengan Underlying Obligasi Pemerintah maupun SBI.

Berdasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eskposur Bank di transaksi derivatif, repo dan reverse repo adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Derivatif Over The Counter
b. Transaksi Repo
c. Transaksi Reverse Repo

h. Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar

Bank menggunakan berbagai teknik mitigasi risiko kredit, antara lain melalui agunan. Berdasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eksposur Bank dan mitigasi risiko kredit yang digunakan dengan agunan sebagai secondary way out dalam hal debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, Kebijakan. prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan Bank sesuai dengan ketentuan/Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan telah dituangkan kedalam kebijakan dan prosedur penilaian (appraisal) internal Bank.
2. Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (credit worthiness) dari pihak-pihak tersebut.

   Kelayakan kredit (credit worthiness) adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Fokus utama analisis kredit terletak pada risiko, bukan profitabilitas. Analisis kredit berfokus pada sisi buruk risiko, bukan sisi baik potensi. Hal ini meliputi analisis likuiditas maupun solvabilitas, alat analisis kredit dan kriterianya untuk penilaian beragam ketentuan (tanggal jatuh tempo), jenis, dan tujuan kontrak utangnya.
3. Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit.

Disclosure of Counterparty Credit Risk

The Bank has derivative exposures that are not too significant, with the biggest portion being in foreign exchange swap transaction with other banks, while the interest derivative exposure comes from interest rate swap transaction. The reverse repo transactions are with other banks and Bank Indonesia, while repo transactions are with other banks with Government Bonds or Treasury Bills (SBI) as underlying assets.

According to Standard Approach reporting, the Bank's exposure in derivative transaction, repo, and reverse repo are as follows:

a. Over the Counter Derivative Transactions
b. Repo Transactions
c. Reverse Repo Transactions

h. Credit Risk Mitigation using Standard Approach

The Bank uses various credit risk mitigation techniques, such as through collateral. According to Standard Approach reporting, the Bank's exposure and credit risk mitigation using collateral as a secondary way out if debtors are unable to pay their obligations are as follows:

1. Policies, procedures and processes to assess and manage the collateral.

   The Bank's policies, procedures and processes to assess and manage collateral are in accordance with the provisions/Bank Indonesia Regulations and have been outlined in the Bank's internal appraisal policies and procedures.
2. The main parties providing collateral/guarantees and the creditworthiness of these parties.

   Creditworthiness refers to the company's ability to meet its credit obligations. The primary focus of credit analysis is on risks rather than profitability. Credit analysis emphasizes the negative side of the risk, rather than the positive potential. This includes analysis of liquidity and solvency, credit analysis tools and criteria for the assessment of various conditions (date of maturity), the type of credit, and objectives of debt contracts.
3. Information on the level of concentration arising from the use of credit risk mitigation techniques.

Pengungkapan konsentrasi berdasarkan penggunaan teknik mitigasi risiko kredit adalah dengan Bank memiliki konsentrasi pada tagihan korporasi. Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan menentukan limit untuk sektor industri untuk mengoptimalkan alokasi modal Bank pada suatu tingkat risiko yang bisa diterima.

Dengan melaksanakan manajemen risiko kredit yang baik dapat menghasilkan pengelolaan kredit secara sehat dan prudent, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan membawa arah positif bagi Bank untuk menjadikan integritas dan independensi dalam proses penilaian risiko kredit dimaksud.

The disclosure of concentration based on the use of credit risk mitigation techniques indicates that the Bank has concentration in corporate receivables. The Bank manages credit concentration risk by setting limits for industry sectors to optimize the allocation of the Bank's capital at an acceptable risk level.

By implementing a good credit risk management, the Bank can achieve healthy and prudent credit management, which will have a positive impact and lead the Bank in a positive direction. This ensures integrity and independence in the credit risk assessment process.

Tabel 3.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual

Table 3.1. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Considering the Impact of Credit Risk Mitigation - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited										
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Disclosure of Net Charges by Risks Weight After Considering Credit Risk Mitigation										
		0%	20%	25%	30%	40%	50%	70%	75%	100%	150%	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	**Eksposur Neraca | Balance Sheet Exposure**											
1	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	5.563.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik | Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	73.920	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	116.678	953.469	-	-	254.710	264.059	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	75.895	869.089		574.935	3.312.237	54.197	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Loans Secured by Residential Property	-	37.869	21.111	75.947	95.919	229.051	56.939	-	-	-	-
7	Kredit Beragun Properti Komersial | Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	89.085	-	-	-
8	Kredit Pegawai/Pensiunan | Loans for Retired	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | Receivables on Micro, Small Business, & Retail Portfolio	224.445	-	-	-		-	-	1.708.205	-	-	-
10	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate	2.585.790	257.444	-	-	-	1.239.146	-	148.505	15.582.989	-	-
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Past Due Receivables	-	-	-	-		64.359	-	-	63.558	255.988	-
12	Aset Lainnya | Other Assets	331.700	-	-	-		-		-	3.618.089	93.124	-
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Exposure in Syariah Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca | Total Balance Sheet Exposure	**8.897.774**	**2.117.871**	**21.111**	**650.881**	**3.662.867**	**1.924.733**	**56.939**	**1.945.796**	**19.264.636**	**349.112**	**-**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif | Administrative Account Exposure**											
1	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	-	-	-	-	-	-	-			-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik | Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-	-			-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-			-	-
4	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	-	-	-	-	-	-	-			-	-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	-	-	-	-	-	-	-			-	-
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-			-	-
7	Kredit Beragun Properti Komersial | Loan Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-			-	-
8	Kredit Pegawai/Pensiunan | Loans for Retired	-	-	-	-	-	-	-			-	-
9	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | Receivables on Micro, Small Business, & Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-			-	-
10	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate	59.144	-	-			-		-	59.144	-	-
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-	-			-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Exposure in Syariah Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif | Total Exposure TRA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.144	-	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	31 December 2023 Audited										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Disclosure of Net Charges by Risks Weight After Considering Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
-	-	6.379.013	-	-	-	-	-	-			-	-	-
36.960	2.957	-	146.831				290.550					174.641	13.971
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
424.608	33.969		560.403	-	-	330.190	547.738	-	-	-	-	518.026	41.442
1.698.292	135.863		899.745		137.422	2.352.214	242.087		89.087		95.906	1.493.778	119.502
228.386	18.271	-		42.143	35.572	63.845	67.383	51.540	36.535		-	114.773	9.182
66.814	5.345	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
1.281.154	102.492	-	-	-	-	-	-	-	989.023		-	-	-
16.365.430	1.309.234		217.939				629.444	-	142.592	15.354.079		741.767	59.341
479.720	38.378						32.404			12.514	120.984	15.944.660	1.275.573
3.757.775	300.622	-	-	-	-	-	-	-		3.747.269		210.191	16.815
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	3.747.269	299.782
24.339.139	**1.947.131**	**6.379.013**	**1.867.060**	**35.572**	**201.267**	**2.749.787**	**1.793.764**	**36.535**	**1.220.702**	**19.113.862**	**216.889**	**22.945.105**	**1.835.608**
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
59.144	4.732	-	-	-	-	-	-	-		87.253	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
59.144	4.732	-	-	-	-	-	-	-	-	87.253	-	-	-

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited										
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Disclosure of Net Charges by Risks Weight After Considering Credit Risk Mitigation										
		0%	20%	25%	30%	40%	50%	70%	75%	100%	150%	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) | Counter Party Credit Risk Exposure**											
1	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	1.332.222	-	-			-		-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik| Receivables on Public Sector Entities	-	-	-			-		-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-			-		-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	-	-	-			-		-	-	-	-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	-	-	-			-		-	-	-	-
6	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | Receivables on Micro, Small Business, & Retail Portfolio	-	-	-			-		-	-	-	-
7	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate	-	-	-	-	-	-	-			-	-
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk | Total Counterparty Credit Risk Exposure	**1.332.222**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.2. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual

Tabel 3.2. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited			
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Secured by		
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Neraca | Balance Sheet Exposure**				
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Government	5.563.266	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	73.920	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	1.588.917	116.678	-	-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	4.886.354	75.895	-	-
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	516.837	-	-	-
7	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	89.085	-	-	-
8	Kredit Pegawai/Pensiunan Loans for Retired	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business, & Retail Portfolio	1.932.650	224.445	-	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	31 December 2023 Audited										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
			Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Disclosure of Net Charges by Risks Weight After Considering Credit Risk Mitigation											
			0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
	-	-	1.466.541	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	-	-	18.906	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	-											3.781	302
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	**-**	**1.466.541**	**18.906**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.781**	**302**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	31 December 2023 Audited							
	Lainnya Others	Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion	Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Secured by				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
				Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
	(7)	8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+ (12)+(13)]
	5.563.266	-	6.379.012	-	-	-	-	6.379.012
	-	73.920	437.380	-	-	-	-	437.380
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.472.239	1.561.035	122.703	-	-	-	1.438.332
	-	4.810.459	3.866.185	49.725			-	3.866.185
	-	516.837	297.018	-	-	-	-	247.293
	-	89.085	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.708.205	1.143.835	154.813	-	-	-	989.022

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited			
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Secured by		
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	19.813.874	2.688.316	-	-
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	383.905	-	-	-
12	Aset Lainnya Other Assets	4.042.913	-	-	-
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Exposure in Syariah Business Unit (if any)	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca | Total Balance Sheet Exposure	**38.891.722**	**3.105.335**	**-**	**-**
B	**Eksposur Rekening Administratif | Administrative Accunt Exposure**				
1	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik| Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Loan Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Loans for Retired	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business, & Retail Portfolio	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	59.144	59.144	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Exposure in Syariah Business Unit (if any)	-	-	-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif | Total Exposure TRA	**59.144**	**59.144**	**-**	**-**
C	**Eksposur (Counterparty Credit Risk) | Exposure (Counterparty Credit Risk)**				
1	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	1.332.222	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik | Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | Receivables on Micro. Small Business. & Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Exposure in Syariah Business Unit (if any)	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk | Total Counterparty Credit Risk Exposure	**1.332.222**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (A+B+C)		**40.283.088**	**3.164.479**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 December 2023 Audited								
	Lainnya Others	Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion	Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Secured by				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
				Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
	(7)	8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+ (12)+(13)]
	-	17.125.558	19.978.473	3.634.418	-	-	-	16.344.055
	-	383.905	165.901	-	-	-	-	165.901
	-	4.042.913	3.907.580	-	-	-	-	3.907.580
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**30.223.121**	**37.736.421**	**3.961.659**	**-**	**-**	**-**	**33.774.762**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	87.253	-	-	-	-	87.253
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**87.253**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87.253**
	1.332.222	-	1.466.540	-	-	-	-	1.466.540
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.332.222	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**1.466.540**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.466.540**
	6,895,488	**30.223.121**	**33.744.110**	**39.290.214**	**3.498.563**	**-**	**-**	**26.178.859**

Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Bank tidak mempunyai eksposur pada pengungkapan terkait.

Disclosure of Asset Securitization

As of 31 December 2024 and 31 December 2023, the Bank has no exposure on related disclosures.

j. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan Standar
Kebijakan untuk perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dilakukan dengan Standard Approach yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia/OJK.

j. Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk using a Standard approach
The policy for calculating risk-weighted assets for credit risk is carried out by using the Standard Approach, which refers to Bank Indonesia/OJK regulations.

Tabel 4.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca (Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar – Bank secara Individual
Table 4.1. Disclosure of Asset Exposure on the Balance Sheet (Credit Risk RWA Calculation Standard Approach – Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited 31 December 2024 Audited			31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Setelah MRK RWA after MRK	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA after MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	5.563.266	-	-	6.379.012.84	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik | Receivables on Public Sector Entities	73.920	36.960	36.960	437.380.55	174.641.08	174.641.08
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	1.588.917	471.279	424.608	1.561.035.12	567.107.29	518.025.94
5.	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	4.886.354	1.729.622	1.698.292	3.866.185.31	1.514.640.96	1.493.778.41
6.	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Loans Secured by Residential Property	516.837	228.386	228.386	297.018.04	114.772.81	114.772.81
7.	Kredit Beragun Properti Komersial | Loans Secured by Commercial Real Estate	89.085	66.814	66.814	-	-	-
8.	Kredit Pegawai atau Pensiunan | Loans on Retired	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	1.932.650	1.449.488	1.281.154	1.143.835.51	857.876.63	741.767.04
10.	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate	19.813.874	19.015.252	16.365.430	19.978.473.00	19.442.442.63	15.944.659.81
11.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Past Due Receivables	383.905	479.720	479.720	165.901.17	210.191.11	210.191.11
12.	Aset Lainnya | Other Assets	4.042.913	-	3.757.775	3.907.580.29		3.747.268.94
	JUMLAH | TOTAL	**38.891.722**	**23.477.522**	**24.339.139**	**37.736.421.84**	**22.881.672.51**	**22.945.105.14**

Tabel. 4.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk

Table. 4.3. Disclosure of Exposures that Generate Credit Risk due to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited 31 December 2024 Audited			31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA after MRK	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA after MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan kepada Pemerintah | Receivables on Government	1.332.222	-	-	6.379.012	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik | Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	437.380	174.641	174.641
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank | Receivables on Banks	-	-	-	1.561.035	567.107	518.025
5.	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | Receivables on Securities Companies and Other Financial Services Institutions	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | Receivables on Micro, Small Business, & Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-
7.	Tagihan kepada Korporasi | Receivables on Corporate	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH | TOTAL	**1.332.222**	**-**	**-**	**1.466.541**	**-**	**-**

Tabel. 4.4. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Table. 4.4. Disclosure of Total Credit Risk Measurements

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited 31 December 2024 Audited			31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deductable Factor	ATMR Setelah MRK RWA after MRK	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deductable Factor	ATMR Setelah MRK RWA after MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Delivery versus payment Delivery versus payment	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari) | Capital Expenses 8% (5-15 days)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari) | Capital Expenses 50% (16-30 days)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari) | Capital Expenses 75% (31-45 days)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) | Capital Expenses 100% (more than 45 days)	-		-	-		-
2	Non-delivery versus payment Non-delivery versus payment	-	-		-	-	
	JUMLAH | TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 4.5. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Table 4.5. Disclosure of Total Credit Risk Measurements
(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited 31 December 2024 Audited	31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT | TOTAL CREDIT RISK RWA	24,343,565	22.829.305
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL | TOTAL CAPITAL DEDUCTION FACTOR	-	-

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif yang dapat merugikan Bank. Hal-hal yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas, termasuk turunan dari variable-variabel tersebut.

a. Organisasi manajemen risiko pasar terdiri dari Divisi Treasury & Capital Market sebagai unit *first line* dan RMD sebagai satuan *second line* atau satuan Independen.
b. Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi semua instrumen keuangan yang tergolong dalam *Trading Book* yang terkena Risiko Suku Bunga dan Perhitungan risiko nilai tukar mata uang asing dengan metode standar dilakukan pada posisi devisa yang terkena Risiko Mata Uang Asing.
c. Faktor risiko yang dipertimbangkan dalam risiko suku bunga dan nilai tukar dalam metode standar adalah:
   1) Risiko Spesifik dari sekuritas atau keuangan instrumen, terlepas dari posisi panjang atau pendek.
   2) Risiko *General Market* keseluruhan portofolio, di mana posisi long atau posisi *short* dari sekuritas atau instrumen yang berbeda dapat saling mengimbangi.
   3) Perhitungan Risiko nilai tukar dan suku bunga dilakukan untuk *banking book* dan trading book dalam mata uang asing.

d. Lingkup portofolio yang dihitung dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR), antara lain:
   1) Posisi diadakan untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
   2) Posisi yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga aktual dan/atau potensial.
   3) Instrumen derivatif seperti Forward dan Swap Mata Uang Asing.

1. Market Risk

Market Risk arises from market variables movement on the Bank's portfolio, both cash and derivative transactions, which can adversely affect the Bank. Some of market variables are interest rates, exchange rates, stock prices, and commodity prices, including derivatives of these variables.

a. Market risk management organization consists of the Treasury & Capital Market Division as the first line of defense and RMD as the second line of defense or independent entity.
b. Interest Rate Risk Calculation by using standard method is applied to all financial instruments included in the Trading Book that is subject to Interest Rate Risk. Calculation of foreign exchange risk using the standard method is carried out on foreign exchange positions that are exposed to Foreign Exchange Risk.

c. The risk factors considered in interest rate and exchange rate risk in standard methods are:
   1) Specific Risk from securities or financial instruments, regardless of long or short positions.
   2) General Market Risk of the overall portfolios, in which long positions or short positions of different securities or instruments can co-exist.
   3) Calculation of exchange rate risk and interest rate is conducted for banking book and trading book in foreign currencies.

d. The portfolios calculated in the Capital Adequacy Ratio (CAR), among others:
   1) Positions held for resell in the short term.
   2) Position held for short-term gain from actual price movements and/or potential price movements.
   3) Derivative instruments, such as Forward and Foreign Currency Swap

4) Semua efek hutang dengan tingkat bunga tetap atau mengambang.
5) Posisi devisa dalam trading book dan banking book yang terkena risiko valuta asing.

e. *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)
Risiko Suku Bunga dalam Banking Book merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum". Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:
1) Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2) Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih, yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

f. Langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko pasar yang dilakukan Bank adalah:
1) Bank mengoptimisasi struktur aset dan kewajibannya untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan.
2) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
3) Memonitor perkembangan harga pasar sekaligus memperkokoh kebijakan pricing aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan strategis seperti *cost of fund, base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.

4) All debt securities with fixed or floating interest rates.
5) Foreign exchange positions in trading book and banking book that are exposed to foreign exchange risk.

e. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
Interest Rate Risk in the Banking Book is a risk due to interest rates movement in the market that are contrary to the Banking Book position, which has the potential to have an impact on the Bank's capital and income, both in the present and in the future.

In accordance with SEOJK Number 12/SEOJK.03/2018 concerning "Implementation of Risk Management and Risk Measurement of Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book) for Commercial Banks," the Bank uses 2 (two) methods in measuring IRRBB as follows:
1) Measurement based on changes in the economic value of equity, hereinafter abbreviated as EVE, which is a method that measures the impact of changes in interest rates on the economic value of the Bank's equity; and
2) Measurement based on changes in net interest income, hereinafter referred to as NII, which is a method that measures the impact of changes in interest rates on the Bank's income.

f. Some anticipation/risk mitigation strategies from the Bank are as follows:
1) The Bank optimizes its asset and liability structure to curtail risks and maximize profit.
2) Increase the long-term Third-Party Funds (TPFs).
3) Monitor the market price development while strengthening the pricing policy of asset and liability through the Asset & Liability Committee (ALCO) meetings by discussing some strategic calculations, such as the cost of fund, the base lending rate and other calculations. Therefore, any problems that occur in the Bank, particularly those related to interest rate risk, can be anticipated as early as possible.

4) Melakukan *monitoring* atas *risk limits* dan aktivitas dari Divisi Treasury Capital Markets & Financial Institution secara harian dan melaporkannya kepada Direksi.
5) Senantiasa melakukan monitoring pergerakan harga dari portofolio investasi Bank, sehingga dapat segera diambil tindakan sedini mungkin jika terjadi indikasi merugikan.
6) Mengelola dan melakukan mitigasi risiko konsentrasi dengan membuat aturan yang jelas mengenai batas transaksi mulai dari *cut-loss* limit, limit *open positition*, limit *notional*, limit *interbank*, limit dealer, limit PV01, dan lain-lain.
7) Melakukan analisis yang mendalam (*rating, maturity, issuer, underlying transaction*, dan lain-lain) sebelum melakukan investasi.

4) Monitor risk limits and activities of Treasury, Capital Markets & Financial Institution Division on daily basis and report it to the Board of Directors.
5) Continuously monitoring the price movements of the Bank's investment portfolios, to carry out an immediate action as early as possible should there be any adverse indication.
6) Manage and mitigate concentration risk by imposing clear rules on transaction limits, starting from cut-loss limits, open position limits, notional limits, interbank limits, dealer limits, PV01 limits, and others.
7) Conducting in-depth analysis (rating, maturity, issuer, underlying transaction, etc) prior to investing.

STRESS TESTING

Bank secara periodik melakukan *stress testing* untuk mengestimasi potensi kerugian pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Tresuri terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.

Pelaksanaan *stress testing* harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai macam skenario yang dijalankan termasuk pengalaman kerugian terbesar yang dialami pada masa lalu (*large historical market moves*). Asumsi yang digunakan dalam stress testing harus secara cermat dikembangkan untuk menguji kecenderungan kondisi portofolio Tresuri.

Stress testing dilakukan secara kuantitatif, mencakup identifikasi berbagai kemungkinan skenario krisis yang dapat berdampak buruk bagi kondisi Bank, antara lain terhadap pendapatan dan permodalan. *Stress testing* dilakukan terhadap seluruh portofolio *trading book* yang terekspos atas risiko suku bunga dan portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar dengan memperhitungkan aspek risiko pasar dan aspek likuiditas. Skenario *stress testing* mencakup pergerakan paralel maupun *non-parallel* atas faktor risiko yang relevan.

STRESS TESTING

The Bank periodically conducts stress testing to estimate potential losses under abnormal market conditions to identify the sensitivity of the Treasury's performance against changes in risk factors and identify causes that has a significant impact on the Bank's portfolio.

The stress testing must be flexible enough to accommodate various scenarios, including the biggest loss experienced in the past (large historical market moves). The assumptions used in stress testing must be carefully developed to test the trend of Treasury portfolio conditions.

Stress testing is carried out quantitatively, including the identification of various possible crisis scenarios that may adversely affect the Bank's condition, which include income and capital. Stress testing is carried out on the entire trading book portfolios that are exposed to interest rate risk, as well as trading book and banking book portfolios that are exposed to foreign exchange risk by considering market risk and liquidity aspects. Stress testing scenarios include parallel and non-parallel movement of relevant risk factors.

Tabel 5.1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
Table 5.1. Disclosure of Market Risk Using Standard Methods

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Jenis Risiko Type of Risk	31 Desember 2024 Un Audited 31 December 2024 Un Audited				31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited			
		Bank Bank		Konsolidasi Consolidated		Bank Bank		Konsolidasi Consolidated	
		Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga | Interest Rate Risk								
	a. Risiko Spesifik | Specific Risk	-	-			-	-		
	b. Risiko Umum | General Risk	675,29	8.441,13			-	-		
2	Risiko Nilai Tukar | Foreign Exchange Risk	282,70	3.533,75			427	5.342		
3	Risiko Ekuitas *) | Equity Risk *)	-	-			-	-		
4	Risiko Komoditas *) | Commodity Risk *)	-	-			-	-		
5	Risiko Option | Option Risk	-	-			-	-		
	Credit Valuation Adjustment (CVA)		99,50			-	-		
	Jumlah | Total	**957.99**	**12.074,38**			**427**	**5.342**	**-**	**-**

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud | For banks with subsidiaries that have such risk exposures

Tabel 5.2. Pengungkapan Eksposure Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB).
Table 5.2. Disclosure of Interest Rate Risk Exposure in Banking Book (IRRBB).

Berdasarkan hasil simulasi sensitivity analysis per akhir tahun 2024, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

Based on the results of the sensitivity analysis simulation as of the end of 2024, the impact of changes in interest rates on the economic value of equity and net interest income is as follows:

	Analisis Kualitatif IRRBB	IRRBB Qualitative Analysis
1	**Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko**	**Explanation on how the Bank defines IRRBB for measurement and risk control.**
	Risiko suku bunga dalam Banking Book atau Interest Rate Risk in The Banking Book, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banking Book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (earnings) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (economic value of equity) atau disingkat EVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (net interest income) atau disingkat NII. Simulasi EVE dan NII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (rate shock) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan liabilities atau strategi hedging.	Interest Risk in the Banking Book or Interest Rate Risk in the Banking Book, inhereafter abbreviated with IRRBB, is a risk caused by interest rate movement in the market which contradict with the position in the Banking Book, which potentially affect capital and rentability (earnings) of the Bank, both for current and future condition. The Bank carried out IRRBB measurement using two methods: measurement based on the changes on economic value of equity or EVE and measurement based on the changes in net interest income or NII. Simulation of EVE and NII is carried out according to the scenario of the increase and decrease of the interest rate (rate shock) in SE OJK Number 12/SEOJK.03/2018 dated 21 August 2018. The Bank carried out control and mitigation of interest risk through asset recomposition and liabilities strategy or hedging strategy.
2	**Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB**	**Explanation on IRRBB management strategy and mitigation**
	Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung dari posisi duration (rata-rata repricing maturity) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2024, ΔEVE Bank Jtrust Indonesia sebesar 8,73% masih jauh di bawah limit regulator yakni 15%.	The Bank determine IRRBB control strategy that in line with the Bank's overall business strategy by considering risk appetite and risk tolerance approved by the Board of Directors. Meanwhile, IRRBB mitigation strategy against economic value change from capital (ΔEVE) is determined depending on the duration position (average of repricing maturity) from asset and obligation. As of 31 December 2024, EVE of the Bank was a much as 8.73%, far below the regulator's limit of 15%.

	Analisis Kualitatif IRRBB	IRRBB Qualitative Analysis
3	**Periodisasi perhitungan IRRBB bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.**	**Periodical calculation of the Bank's IRRBB, and explanation on specific measures used by the Bank to measure its sensitivity towards IRRBB.**
	Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut: • Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi Banking Book dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank • Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.	To ensure IRRBB is monitored in a good manner, the Bank carries out IRRBB calculation every end of the reporting month and carries out reporting according to the prevailing provisions. The sensitivity measure toward IRRBB is carried out according to the provision in SE OJK Number 12/SEOJK.03/2018 dated 21 August 2018, among others are: • IRRBB calculation considering entire position in the Banking Book by extracting equity and grouped based on the currency position that matters for the Bank. • Calculation of ΔEVE is not considering the existence of commercial margins in the cash flow and discounted cash flow.
4	**Penjelasan mengenai skenario shock suku bunga dan skenario stress yang digunakan Bank untuk mengestimasi perubahan economic value dan earnings.**	**Explanation on interest shock scenario and stress scenario used by the Bank to estimate the change of economic value and earnings.**
	Berdasarkan ketentuan regulator, untuk EVE, Bank menerapkan skenario: • Shock suku bunga yang paralel ke atas • Shock suku bunga yang paralel ke bawah • Shock suku bunga yang melandai • Shock suku buga yang mendatar • Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat • Shock suku bunga jangka pendek yang menurun Untuk ΔNII, Bank menerapkan skenario: • Shock suku bunga yang paralel ke atas • Shock suku bunga yang paralel ke bawah	According to the regulator's provision, for EVE, the Bank implements these scenarios: • Parallel shock up • Parallel shock down • Steepener shock • Flattener shock • Short rates shock up • Short rates shock down For ΔNII, the Bank Implements these scenarios: • Parallel shock up • Parallel shock down
5	**Asumsi permodelan yang berdampak signifikan dalam perhitungan**	**Modelling assumption that impacted significantly on the calculation**
	Dalam perhitungan IRRBB, Bank menggunakan asumsi permodelan dengan pendekatan standar maupun acuan yang ditetapkan oleh regulator.	In calculation of IRRBB, the Bank uses assumption in the modelling with standard or benchmark approach determined by the regulator.
6	**Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung EVE dan NII**	**Comprehensive explanation on the main assumption on the model and parameter used in in calculating EVE and NII**
	Asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung IRRBB merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas. Bank memperhitungkan margin komersial dan spread components dalam arus kas, serta menggunakan risk-free rate untuk penentuan tingkat suku bunga diskonto dalam perhitungan ΔEVE. Asumsi untuk perhitungan profil perilaku Non-Maturity Deposit (NMD) dan Term Deposit Redemption Ratio (TDRR) telah merujuk kepada ketentuan regulator yang berlaku.	Assumption used by the Bank in calculating IRRBB is according to Financial Services Authority regulation pertaining the Implementation of Risk Managemenr and Risk Measurement with Standard Approach for Interest Rate in the Banking Book (Interest Risk in the Banking Book) and Financial Services Authority Regulation pertaining the obligation to fulfill liquidity adequacy ratio. The Bank takes into account commercial margins and spread components in cash flow, and uses the risk-free rate to determine discounted interest rates in the ΔEVE calculation. Assumptions for the calculation of the behavioural profile for Non-Maturity Deposit (NMD) and Term Deposit Redemption Ratio (TDRR) have been made with reference to applicable regulatory provisions.
	Analisis Kuantitatif	**Quantitative Analysis**
1	**Rata-rata repricing maturity yang ditetapkan untuk NMD**	**Average of repricing maturity determined for NMD**
	Rata - rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) yang diterapkan untuk NMD segmen Wholesale dan Retail Transaksional berada pada 3-6 bulan sementara untuk segmen Retail Non-Transaksional berada pada 1-3 bulan.	The average period for interest rate adjustments (repricing maturity) applied to NMD for Wholesale and Retail Transactional segments is 3-6 months, while for Retail Non-Transactional segment is 1-3 months.
2	**Repricing maturity terpanjang yang diterapkan untuk NMD**	**The longest repricing maturity implemented for NMD**
	Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing tenor) terlama yang diterapkan untuk core deposit NMD adalah di bucket 2-3 tahun. Penetapan tersebut berdasarkan hasil analisis perilaku nasabah Bank yang dilakukan melalui pergerakan volume NMD Bank selama 5 (lima) tahun terakhir.	The longest repricing tenor applied for NMD core deposits is at bucket 2-3 years. This determination is based on the analysis of the Bank's customers behavior carried out through movement of NMD balance for the last 5 (five) years.

3. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan oleh Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau *counter-party* yang telah jatuh waktu.

a. Organisasi manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Divisi Treasury & Capital Market dan Divisi Branch Management sebagai first line of defense. RMD sebagai *second line of defense* dan Divisi Audit Internal sebagai *third line of defense*.
b. Mekanisme pengukuran, *stress testing*, teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini dan rencana pendanaan darurat.

Bank berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan ketimpangan likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi tertekan. Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan *counterparty bank*. Untuk mendeteksi risiko likuiditas. Bank telah mempunyai *Standard Operation Procedure* LCP (*Liquidity Contigency Plan*) dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

c. Beberapa strategi (pendanaan) yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:
   1) Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
   2) Menurunkan konsentrasi deposan inti dan mengganti dengan dana retail sehingga menjadi lebih sustainable (berkesinambungan).
   3) Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low-cost fund*.
   4) Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap*, proyeksi *cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
   5) Meningkatkan kerja sama dengan Bank lain agar dapat memanfaatkan fasilitas *Call Money* maupun Repo Surat Berharga intern bank.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk was partly due to the Bank's inability to fulfil maturing obligations to customers or counterparty. Some of the strategies taken by the Bank to anticipate things are:

a. The liquidity risk management organization is conducted by the Treasury & Capital Markets Division and the Branch Management Division as the first line of defense. RMD is the second line of defense, and the Internal Audit Division is the third line of defense.
b. Measurement mechanisms, stress testing, liquidity risk mitigation techniques are early warning indicators and emergency funding plans.

The Bank strives to improve the effectiveness of managing the liquidity imbalances (maturity gap and cashflow projections) to anticipate liquidity risk as early as possible, as well as to control liquidity risks, particularly during stress conditions. The Bank has also set up a Contingency Funding Plan, as well as maintaining its ability to access money market by continuing to establish relationships with correspondent banks. To detect liquidity risk, the Bank has a Standard Operating Procedure LCP (Liquidity Contingency Plan) and performs daily liquidity monitoring to be reported to the Board of Directors.

c. Some of the Bank's (funding) strategies to anticipate these risks are:
   1) Conducting investment portfolio towards more liquid investments.
   2) Reducing the concentration of core depositors and replacing it with retail funds to be more sustainable.
   3) Encouraging the growth in the number of low-cost fund investments or customers in the low-cost fund category.
   4) Improving the effectiveness of liquidity gap management (maturity gap, projected cash flow) to anticipate liquidity risk as early as possible.
   5) Enhancing cooperation with other banks to utilize interbank Call Money and Securities Repo facilities.

d. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

Bank juga telah mengadopsi perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berdasarkan kerangka kerja BASEL III. LCR tersebut merupakan rasio aset likuid berkualitas tinggi terhadap potensi arus kas keluar. LCR yang diperhitungkan ini juga mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas apabila terjadi arus keluar yang cukup besar atau pada saat kondisi stress. Pada kondisi stress, diharapkan aset-aset likuid berkualitas tinggi yang dimiliki oleh Bank seperti Surat Berharga Pemerintah atau Bank Indonesia dapat dijual dengan harga yang sesuai untuk memenuhi likuiditas apabila terjadi arus kas keluar yang besar.

Rasio LCR posisi Triwulan IV 2024 adalah 116,76% dan LCR posisi bulan Desember 2024 adalah 111,56% atau berada di atas ketentuan minimum Rasio LCR sebesar 100% yang ditetapkan oleh Regulator. Hal ini menunjukan bahwa Bank dapat mengelola likuditas dengan baik.

d. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

The Bank has also adopted a Liquidity Coverage Ratio (LCR) calculation based on the BASEL III framework. The LCR represents a high-quality liquid asset ratio against the potential cash outflows. This calculated LCR also measures the Bank's ability to meet liquidity requirements in the event of a substantial outflow or under stressful conditions. Under stressful conditions, it is expected that high quality liquid assets held by the Bank, such as such as Government or Bank Indonesia Securities, can be sold at a fair price to meet liquidity if there is a large cash outflow

The LCR ratio for Q4 2024 stood at 116.76% and the LCR position as of December 2024 was 111.56%, or above the minimum LCR ratio of 100% set by the Regulator. This indicates that the Bank can manage liquidity well.

Tabel 6.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara individual
Table 6.1. Disclosure of Rupiah Maturity Profile - Bank individually

No.	Pos - pos Accounts	Saldo Balance
I	**NERACA** | Balance	
	A Aset | Asset	
	1. Kas | Cash	227.139
	2. Penempatan pada Bank Indonesia | Placement at Bank Indonesia	1.896.796
	a. Giro | Current Account	1.539.775
	b. TDBI&DFBI | TDBI&DFBI	357.021
	c. Lainnya | Others	-
	3. Penempatan pada bank lain | Placement at Other Bank	345.316
	4. Surat Berharga ** | Marketable Securities **	5.016.652
	a. Milik Pemerintah | Government Bonds	3.178.568
	1) diperdagangkan | trading	-
	2) tersedia untuk dijual | available for sale	3.178.568
	3) dimiliki hingga jatuh tempo | held to maturity	-
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang | Loan and Receivables	-
	b. Korporasi | Corporate	1.838.085
	1) diperdagangkan | Trading	-
	2) tersedia untuk dijual | available for sale	1.838.085
	3) dimiliki hingga jatuh tempo | held to maturity	-
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang | Loan and Receivables	-

Tabel. 4.4. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Table. 4.4. Disclosure of Total Credit Risk Measurements

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 Audited 31 December 2024 Audited			31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deductable Factor	ATMR Setelah MRK RWA after MRK	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deductable Factor	ATMR Setelah MRK RWA after MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Delivery versus payment Delivery versus payment	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari) | Capital Expenses 8% (5-15 days)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari) | Capital Expenses 50% (16-30 days)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari) | Capital Expenses 75% (31-45 days)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) | Capital Expenses 100% (more than 45 days)	-		-	-		-
2	Non-delivery versus payment Non-delivery versus payment	-	-		-	-	
	JUMLAH | TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2024 | 31 December 2024						
Jatuh Tempo*) | Past Due*)						
s.d 1 minggu until 1 week	> 1 minggu s.d 2 minggu > 1 week until 2 weeks	> 2 minggu s.d 1 bulan > 2 weeks until 1 month	> 1 bulan s.d. 3 bulan > 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan > 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan > 6 months until 12 months	> 12 bulan > 12 months
227.139	-	-	-	-	-	-
1.896.796	-	-	-	-	-	-
1.539.775	-	-	-	-	-	-
357.021	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
345.316	-	-	-	-	-	-
209.961	54.915	159.406	631.395	1.263.430	77.210	2.620.335
209.961	54.915	159.406	451.522	1.263.430	77.210	962.124
-	-	-	-	-	-	-
209.961	54.915	159.406	451.522	1.263.430	77.210	962.124
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	179.873	-	-	1.658.211
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	179.873	-	-	1.658.211
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

No.	Pos - pos Accounts	Saldo Balance
	c. Lainnya (Bank & BUMN) | Other (Bank & SOE)	-
	5. Kredit yang Diberikan | Loan	23.620.553
	a. belum jatuh tempo | non past due	23.309.577
	b. sudah jatuh tempo ***) | past due ***)	310.976
	6. Tagihan lainnya | Other Receivables	-
	a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | Claims on securities bought under reverse repo (Reverse Repo)	-
	b. Tagihan Lainnya (Akseptasi) | Other Receivables (Acceptance)	-
	7. Aset Keuangan Lainnya | Other Financial Assets	176.388
	8. Lain-lain | Others	3.721.103
	a. Aset Tidak Berwujud | Intangible Assets	90.336
	b. Akumulasi Amortisasi -/- | Accumulated Amortisation -/-	205.712
	c. Aset Lainnya | Other Assets	3.425.056
	Total Aset | Total Assets	**36.336.169**
	B Kewajiban | Liabilities	
	1. Dana Pihak Ketiga | Third Party Funds	31.334.867
	a. Giro | Current Accounts	2.475.812
	b. Tabungan | Savings	2.097.176
	c. Simpanan Berjangka | Time Deposits	26.761.879
	1) Deposit on call | Deposit on call	931.212
	2) Deposito berjangka | Time Deposits	25.830.667
	3) Lainnya | Others	-
	2. Kewajiban kepada Bank Indonesia | Liabilities to Bank Indonesia	-
	3. Kewajiban kepada bank lain | Liabilities to Other Bank	2.324.117
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan | Securities Issued	-
	a. Obligasi | Bonds	-
	b. Subordinasi ****) | Subordinated ****)	-
	c. Lainnya | Others	-
	5. Pinjaman yang Diterima | Borrowings	-
	a. Pinjaman Subordinasi ****) | Subordinated Loans ****)	-
	b. Lainnya | Others	-
	6. Kewajiban lainnya | Other Liabilities	-
	a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | Securities sold under repurchase agreements (Repo)	-
	b. Kewajiban Akseptasi | Acceptance payables	230.918
	7. Lain-lain | Others	928
	a. Setoran Jaminan | Security deposits	229.989
	b. Kewajiban Lainnya | Other Liabilities	33.889.901
	Total Kewajiban | Total Liabilities	**2.446.268**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca | On Balance Sheet Assets and Liabilities	**2.124.617**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2024 | 31 December 2024						
Jatuh Tempo*) | Past Due*)						
s.d 1 minggu until 1 week	**> 1 minggu s.d 2 minggu** > 1 week until 2 weeks	**> 2 minggu s.d 1 bulan** > 2 weeks until 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month until 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 months until 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 months until 12 months	**> 12 bulan** > 12 months
-	-	-	-	-	-	-
582.550	245.780	1.429.185	3.824.890	2.236.245	2.238.698	13.063.205
271.574	245.780	1.429.185	3.824.890	2.236.245	2.238.698	13.063.205
310.976	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
176.388	-	-	-	-	-	-
3.721.103	-	-	-	-	-	-
90.336	-	-	-	-	-	-
205.712	-	-	-	-	-	-
3.425.056	-	-	-	-	-	-
8.491.474	**300.695**	**1.588.591**	**4.456.285**	**3.499.676**	**2.315.908**	**15.683.540**
7.794.551	3.000.039	6.088.098	8.741.141	4.262.090	1.091.674	357.273
2.475.812	-	-	-	-	-	-
2.082.354	51	35	1.317	2.466	3.874	7.080
3.236.385	2.999.988	6.088.063	8.739.825	4.259.624	1.087.801	350.193
492.294	218.025	220.894	-	-	-	-
11.040	-	6.826.396	4.563.702	6.345.294	6.398.537	1.685.697
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.049.850	415.358	346.232	367.600	133.877	11.200	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
230.918	-	-	-	-	-	-
928	-	-	-	-	-	-
229.989	-	-	-	-	-	-
9.075.319	3.415.397	6.434.330	9.108.741	4.395.966	1.102.874	357.273
(583.845)	**(3.114.702)**	**(4.845.740)**	**(4.652.456)**	**(896.291)**	**1.213.034**	**15.326.268**
6.844.009	**(3.392.487)**	**(5.396.724)**	**(3.958.197)**	**(1.609.217)**	**1.655.085**	**12.993.431**

No.	Pos - pos Accounts	Saldo Balance
II	**REKENING ADMINISTRATIF | OFF BALANCE SHEET**	
A	**Tagihan rekening Administratif | Off Balance Sheet Receivables**	
1.	Komitmen | Commitment	-
a.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | Unused Borrowing	-
b.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | Outstanding spot and derivatives (purchased)	-
1)	Spot | Spot	-
2)	Derivatif | Derivatives	-
d.	Lainnya | Others	-
2.	Kontinjensi *****)(Bank Garansi) | Contingency *****)(Bank Guarantee)	-
A	**Kewajiban Rekening Administratif | Off Balance Sheet Liabilities**	
1.	Komitmen | Commitment	544.280
a.	Fasilitas kredit yang belum ditarik (Commited/UnCommited) | Unused Borrowing (Commited/UnCommited)	429.589
b.	Irrevocable L/C yang masih berjalan | Outstanding irrevocable L/C	2.806
c.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | Outstanding spot and derivatives (purchased)	-
1)	Spot | Spot	-
2)	Derivatif | Derivatives	-
d.	Lainnya | Others	-
2.	Kontinjensi *****)(Bank Garansi) | Contingency *****)(Bank Guarantee)	111.885
	Total Kewajiban Rekening Administratif | Total Off Balance Sheet Liabilities	**544.280**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif | On Balance Sheet Assets and Liabilities Differences	**(544.280)**
	Selisih ((IA - IB) + (IIA - IIB)) | Differences ((IA - IB) + (IIA - IIB))	**1.901.988**
	Selisih Kumulatif | Cumulative Differences	**-**

Tabel 6.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank secara individual
Table 6.2. Disclosure of Maturity Profile in Valuta Asing – Bank, individually

No.	Pos - pos Accounts	Saldo Balance
I	**NERACA | Balance**	
A	**Aset | Asset**	
1.	Kas | Cash	104.560
2.	Penempatan pada Bank Indonesia | Placement at Bank Indonesia	438.744
a.	Giro | Current Account	116.804
b.	TDBI&DFBI | TDBI&DFBI	321.940
c.	Lainnya | Others	-
3.	Penempatan pada bank lain | Placement at Other Bank	548.796
4.	Surat Berharga ** | Marketable Securities **	28.517
a.	Milik Pemerintah | Government Bond	28.517
1)	diperdagangkan | trading	-
2)	tersedia untuk dijual | Available for Sale	28.517
3)	dimiliki hingga jatuh tempo | Hold until Maturity	-
4)	pinjaman yang diberikan dan piutang | Loans and Receivables	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2024 | 31 December 2024						
Jatuh Tempo*) | Past Due*)						
s.d 1 minggu until 1 week	**> 1 minggu s.d 2 minggu** > 1 week until 2 weeks	**> 2 minggu s.d 1 bulan** > 2 weeks until 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month until 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 months until 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 months until 12 months	**> 12 bulan** > 12 months
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.367	30.000	27.565	106.128	70.061	209.789	74.370
2.812	30.000	27.565	97.688	68.691	202.796	37
-	-	-	1.586	1.220	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23.555	-	-	6.854	150	6.993	74.333
(26.367)	**(30.000)**	**(27.565)**	**(106.128)**	**(70.061)**	**(209.789)**	**(74.370)**
(49.921)	**(30.000)**	**(27.565)**	**(112.982)**	**(70.211)**	**(216.782)**	**(148.703)**
(610.212)	**(3.144.702)**	**(4.873.305)**	**(4.758.584)**	**(966.352)**	**1.003.245**	**15.251.898**
(610.212)	**(3.754.913)**	**(8.628.218)**	**(13.386.802)**	**(14.353.154)**	**(13.349.910)**	**1.901.988**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2024 | 31 December 2024						
Jatuh Tempo*) | Past Due*)						
s.d 1 minggu until 1 week	**> 1 minggu s.d 2 minggu** > 1 week until 2 weeks	**> 2 minggu s.d 1 bulan** > 2 weeks until 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month until 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 months until 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 months until 12 months	**> 12 bulan** > 12 months
104.560	-	-	-	-	-	-
438.744	-	-	-	-	-	-
116.804	-	-	-	-	-	-
321.940	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
548.796	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28.517
-	-	-	-	-	-	28.517
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28.517
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

No.	Pos - pos Accounts	Saldo Balance
	b. Korporasi | Corporate	-
	1) diperdagangkan | Trading	-
	2) tersedia untuk dijual | Available for Sale	-
	3) dimiliki hingga jatuh tempo | Hold until Maturity	-
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang | Loans and Receivables	-
	c. Lainnya (Bank & BUMN) | Others (Bank & BUMN)	-
	5. Kredit Yang Diberikan | Loans	2.907.514
	a. belum jatuh tempo | Non Due Date	2.907.514
	b. sudah jatuh tempo ***) | Due Date ***)	-
	6. Tagihan lainnya | Other Receivables	-
	a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | Claims on securities bought under reverse repo (Reverse Repo)	-
	b. Tagihan Lainnya (Akseptasi) | Other Receivables (Acceptance)	-
	7. Aset Keuangan Lainnya | Other Financial Assets	10.719
	8. Lain-lain | Others	2.650
	a. Aset Tidak Berwujud | Intangible Asssets	-
	b. Akumulasi Amortisasi -/- | Accumulated Amortisation -/-	-
	c. Aset Lainnya | Other Assets	2.650
	Total Aset | Total Assets	**4.041.500**
	B Kewajiban | Liabilities	
	1. Dana Pihak Ketiga | Third Party Funds	2.564.661
	a. Giro | Current Accounts	520.639
	b. Tabungan | Savings	37.366
	c. Simpanan Berjangka | Time Deposits	2.006.656
	1) Deposit on call | Deposit on call	309.459
	2) Deposito berjangka | Time Deposits	1.697.197
	3) Lainnya | Others	-
	2. Kewajiban kepada Bank Indonesia | Liabilities to Bank Indonesia	-
	3. Kewajiban kepada bank lain | Liabilities to Other Bank	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan | Securities Issued	-
	a. Obligasi | Bonds	-
	b. Subordinasi ****) | Subordinated ****)	-
	c. Lainnya | Others	-
	5. Pinjaman yang Diterima | Borrowings	-
	a. Pinjaman Subordinasi ****) | Subordinated Loans ****)	-
	b. Lainnya | Others	-
	6. Kewajiban lainnya | Other Liabilities	-
	a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | Securities sold under repurchase agreements (Repo)	-
	b. Kewajiban Akseptasi | Acceptance payables	5.746
	7. Lain-lain | Others	-
	a. Setoran Jaminan | Security deposits	5.746
	b. Kewajiban Lainnya | Other Liabilities	**2.570.407**
	Total Kewajiban | Total Liabilities	**1.471.093**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca | On Balance Sheet Assets and Liabilities	**1.628.068**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2024 | 31 December 2024						
Jatuh Tempo*) | Past Due*)						
s.d 1 minggu until 1 week	**> 1 minggu s.d 2 minggu** > 1 week until 2 weeks	**> 2 minggu s.d 1 bulan** > 2 weeks until 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month until 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 months until 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 months until 12 months	**> 12 bulan** > 12 months
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23.319	58.495	694.625	294.336	598.640	56.233	1.181.867
23.319	58.495	694.625	294.336	598.640	56.233	1.181.867
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.719	-	-	-	-	-	-
2.650	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.650	-	-	-	-	-	-
1.128.789	**58.495**	**694.625**	**294.336**	**598.640**	**56.233**	**1.210.384**
1.112.553	82.819	296.030	732.767	209.956	130.329	206
520.639	-	-	-	-	-	
37.366	-	-	-	-	-	-
554.548	82.819	296.030	732.767	209.956	130.329	206
309.459	-	-	-	-	-	-
-	-	278.453	603.125	379.551	399.375	36.693
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.746	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.746	-	-	-	-	-	-
1.118.299	**82.819**	**296.030**	**732.767**	**209.956**	**130.329**	**206**
10.489	**(24.324)**	**398.594**	**(438.432)**	**388.684**	**(74.097)**	**1.210.178**
(53.948)	**(82.379)**	**(214.108)**	**(209.868)**	**116.033**	**32.333**	**1.963.051**

No.	Pos - pos Accounts	Saldo Balance
II	**REKENING ADMINISTRATIF | OFF BALANCE SHEET**	
A	**Tagihan rekening Administratif | Off Balance Sheet Receivables**	
1.	Komitmen | Commitment	366.822
	a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | Unused Borrowing	-
	b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | Outstanding spot and derivatives (purchased)	-
	1) Spot | Spot	-
	2) Derivatif | Derivatives	-
	d. Lainnya | Others	366.822
2.	Kontinjensi *****)(Bank Garansi) | Contingency *****)(Bank Guarantee)	-
A	**Kewajiban Rekening Administratif | Off Balance Sheet Liabilities**	
1.	Komitmen | Commitment	1.827.077
	a. Fasilitas kredit yang belum ditarik (Commited/UnCommited) | Unused Borrowing (Commited/UnCommited)	7.039
	b. Irrevocable L/C yang masih berjalan | Outstanding irrevocable L/C	26.828
	c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | Outstanding spot and derivatives (purchased)	1.793.211
	1) Spot | Spot	1.793.211
	2) Derivatif | Derivatives	-
	d. Lainnya | Others	-
2.	Kontinjensi *****)(Bank Garansi) | Contingency *****)(Bank Guarantee)	14.674
	Total Kewajiban Rekening Administratif | Total Off Balance Sheet Liabilities	**1.841.751**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif | On Balance Sheet Assets and Liabilities Differences	**(1.474.929)**
	Selisih ((IA - IB) + (IIA - IIB)) | Differences ((IA - IB) + (IIA - IIB))	**(3.836)**
	Selisih Kumulatif | Cumulative Differences	**-**

Tabel 6.3 Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Table 6.3 Disclosure of Liquidity Coverage Ratio (LCR) Value

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

NILAI LCR (%) | LCR Value (%)

Keterangan Description	Triwulan I 1st Quarter	Triwulan II 2nd Quarter	Triwulan III 3rd Quarter	Triwulan IV 4th Quarter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank Secara Individu | Bank Individually	154,74%	146,20%	121,84%	116,76%
Bank Secara Konsolidasi | Bank Consolidated				

4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank, di mana risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

a. Organisasi manajemen risiko operasional dilakukan oleh seluruh Unit Kerja (baik di kantor cabang dan kantor pusat) sebagai first line of defense. dan RMD sebagai second line of defense. serta dan Divisi Intenal Audit sebagai third line of defense.

4. Operational Risk

Operational risk management is also a concern for the Bank. Operational risk is a risk that occurred partly due to insufficient or failed internal processes, human errors, system failure, or external problems affecting the Bank's operations.

a. The operational risk management organization is carried out by all work units (both at the branch offices and head office) as the first line of defense. RMD becomes the second line of defense, and the Internal Audit Division is the third line of defense.

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2024 | 31 December 2024						
Jatuh Tempo*) | Past Due*)						
s.d 1 minggu until 1 week	**> 1 minggu s.d 2 minggu** > 1 week until 2 weeks	**> 2 minggu s.d 1 bulan** > 2 weeks until 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month until 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 months until 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 months until 12 months	**> 12 bulan** > 12 months
366.822	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
366.822	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.793.211	-	26.828	-	6.939	100	-
-	-	-	-	6.939	100	-
-	-	26.828	-	-	-	-
1.793.211	-	-	-	-	-	-
1.793.211	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14.674	-
1.793.211	**-**	**26.828**	**-**	**6.939**	**14.774**	**-**
(1.426.389)	**-**	**(26.828)**	**-**	**(6.939)**	**(14.774)**	**-**
(1.415.899)	**(24.324)**	**371.767**	**(438.432)**	**381.745**	**(88.870)**	**1.210.178**
(1.415.899)	**(1.440.224)**	**(1.068.457)**	**(1.506.888)**	**(1.125.143)**	**(1.214.013)**	**(3.836)**

b. Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko operasional adalah sebagai berikut:
   1) Bank telah membentuk Quality Control (QC) sebagai second line of defense yang berfungsi untuk memastikan bahwa unit kerja di cabang telah melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku. serta melakukan review & menyempurnakan ketentuan internal.
   2) Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan Irregulatory Risk Report.
   3) Melakukan pencatatan atas data kerugian yaitu Loss Event Database (LED) dan Risk Event Database (RED) di mana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
   4) Bank telah menerapkan Risk & Control Self Assessment (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-

b. Several steps taken by the Bank in identifying, measuring and mitigating operational risks are as follows:
   1) The Bank has established Quality Control (QC) as the second line of defense which function is to ensure that work units at branch offices have conducted operational transactions in accordance with applicable internal provisions. QC also reviews and updates internal provisions.
   2) To identify risks that occur at branch office, which have a loss impact, the monitoring is carried out using the Irregularity Risk Report.
   3) Recording loss data or Loss Event Database (LED) and Risk Event Database (RED) where the data is used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profile.
   4) The Bank has implemented Risk & Control Self-Assessment (RCSA), which is a methodology for identifying risk sources,

sumber risiko. yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau tren tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA diterapkan pada seluruh unit kerja.

5) Melakukan kajian ulang dan penyempurnaan atas Standard Operation Procedure masing-masing unit kerja secara berkala.
6) Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
7) Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru, Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
8) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
9) Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan keandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun human error dapat ditekan.
10) Melakukan peningkatan pada IT Security System untuk seluruh sistem yang ada pada Bank.
11) Memastikan ketersediaan Disaster Recovery Plan (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
12) Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal.
13) Adanya Anti Fraud Department sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian Intern.
14) Bank telah memiliki Bussiness Continuity Plan (BCP) yang dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

which is used to measure the level of risk, monitor risk level trends, as well as control and mitigate risks. The identification process through RCSA is applied to all work units.

5) Conduct regular review and improvement of the Standard Operation Procedure of each work unit.
6) Determine the limits of authority in performing operational transactions.
7) In every new product or activities, the Bank always performs risk assessment in accordance with the provisions from regulator.
8) Improving the quality of human resources by increasing the frequency of internal and external training programs in credit, product marketing, and work motivation.
9) Operational risk management is also carried out by strengthening the security and reliability of information technology; thus system failure and human errors can be suppressed.
10) Making improvements to the IT Security System for all existing systems in Bank.
11) Ensuring the availability of Disaster Recovery Plan (DRP) that is tested periodically as a precaution in case of IT disruptions.
12) Improving internal control function through Internal Audit WorkUnit.
13) Establishing the Anti-Fraud Department as an effort to strengthen the internal control system.
14) The Bank has a Bussiness Continuity Plan (BCP) intended to minimize risks, deal with the impact of disruption/disaster, and accelerate the recovery process so that operational activities and customer services can continue to run smoothly.

Business Countinuity Plan (BCP)

Business Continuity Plan (BCP) atau Rencana Keberlangsungan Bisnis merupakan sebuah strategi yang dirancang untuk memastikan kelanjutan operasi bisnis perbankan dalam situasi krisis atau bencana. BCP membantu bank meminimalkan gangguan dan memulihkan layanan dengan cepat, sehingga dapat terus melayani nasabah dan menjaga reputasi.

Pada tahun 2024 J Trust Bank memiliki lokasi BCP Site yang disiapkan sebagai lokasi alternatif dalam penanganan gangguan/bencana.

Penerapan BCP di J Trust Bank senantiasa meminimalkan potensi kerugian finansial maupun non-finansial yang diakibatkan faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, yang berdampak pada kemampuan teknologi Bank dan kegiatan operasional bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah dengan berpedoman pada Kebijakan maupun Standard Operational Procedure Bussiness Continuity Plan (BCP).

Tim Organisasi BCP yang dibentuk Bank memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP dalam penanganan aktivitas bisnis dalam keadaan darurat (disaster) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan Review Business Impact Analysis (BIA) sesuai dengan business process dan telah melakukan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan BCP sesuai dengan skenario. Bank melakukan Review secara berkala atas Kebijakan dan SOP BCP, dan melakukan Uji Coba BCP sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.

Business Continuity Plan (BCP)

Business Continuity Plan is a strategy designed to ensure the continuity of banking business operations during a crisis or disaster. BCP helps the Bank minimize disruptions and restore service quickly, allowing it to continue serving customers and maintain its reputation.

In 2024, J Trust Bank have established a BCP Site, which is prepared as an alternative location for handling disruptions or disasters.

The implementation of BCP at J Trust Bank always minimizes the potential for financial and non-financial losses caused by external factors, such as natural disasters, fire, and unrest, which could affect the Bank's technological capabilities and business operational activities, especially services to customers. This implementation is guided by the Business Continuity Plan (BCP) Policies and Standard Operational Procedures.

The BCP Organization Team formed by the Bank has the task of coordinating the implementation of BCP in handling business activities during emergencies (disaster), in accordance with the Bank's needs and conditions. The Bank has refined the BCP with a Business Impact Analysis (BIA) Review, in accordance with the business process and has carried out socialization and simulation of BCP implementation according to the scenario. The Bank carries out regular reviews of BCP Policies and SOP, as well as BCP trials based on predetermined scenarios.

Tabel 7.1. Pengungkapan Kuantitatif Risiko
Table 7.1. Quantitative Risk Disclosure

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan Indicator Approach	31 Desember 2024 Un Audited 31 December 2024 Un Audited			31 Desember 2023 Audited 31 December 2023 Audited		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Average Gross Income in the Last 3 Years	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Average Gross Income in the Last 3 Years	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar | Standard Basic Indicator Approach	511.761	68.005	850.074	252.122	45.500	568.756
	Jumlah | Total						

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah suatu risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/ perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidaksanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain dengan:

a. Melakukan peninjauan kembali (review) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
c. Fungsi Corporate, Legal & Litigation Division yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisis/review dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi. melakukan review atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

5. Legal Risk

Legal risk is a risk arising from the weakness in juridical/legal aspect, or from transactions that are not properly documented. This risk is not limited to risks arising from the possibility of unenforceable contracts/ agreements, lawsuits/ claims from third-parties, non-compliance with applicable regulations and laws, weaknesses in contractual commitments, imperfect collateral binding, inability to enforce court decisions, or court rulings that may disrupt or affect the Bank's operations and condition.

Legal Risk Management is carried out through the following strategies:

a. Reviewing legal documents, agreements or contracts with third parties.
b. Making inventory of legal cases that have occurred, including monitoring the progress of any existing legal cases. The handling of legal cases is carried out based on priorities with all developments being well-monitored and regularly reported to the Management for follow-up through resolutions that carry the least potential legal risks.
c. The Corporate, Legal & Litigation Division has an important role in providing analysis/review from the legal standpoint for the Bank's new products or activities, providing inputs on the legal front due to regulatory changes, reviewing the agreements made between the Bank and third parties, as well as addressing legal issues related to litigation.

6. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Melalui pengelolaan manajemen risiko stratejik diharapkan Bank dapat meminimalkan potensi dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, maupun perubahan regulasi.

6. Strategic Risk

Strategic Risk is a risk arising from inappropriate determination and implementation of the Bank's strategy and business decisions, or the Bank's lack of responsiveness to external changes. Through strategic risk management, the Bank is expected to minimize the potential negative impact of inaccuracy in strategic decision-making and failure to anticipate changes in technology, macroeconomic conditions, or regulatory developments.

Dalam mengidentifikasi dan merespon perubahan eksternal maupun internal Bank maka terdapat serangkaian proses perencanaan yang bersifat strategis meliputi penyelarasan strategi secara top down untuk memastikan seluruh fungsi di Bank telah sejalan dengan rencana bisnis Bank.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini dilakukan dengan cara:

a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.
b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/target yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
c. Fungsi dari Planning Performance Division yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (performance review) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.
d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan & ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat memberikan dampak signifikan apabila tidak dikelola dengan baik karena sanksi yang diberikan oleh Regulator. Organisasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan seluruh unit kerja sebagai first line of defense. Divisi Compliance sebagai second line of defense dan Divisi Internal Audit sebagai third line of defense. Pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan oleh Bank adalah:

a. Menyempurnakan dan monitoring Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penanganan rekening pasif/dormant.
c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, di mana Bank secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Divisi Compliance.

In identifying and responding to external and internal changes, the Bank carries out a series of strategic planning processes, including top-down strategy alignment to ensure all functions in the Bank are in line with the Bank's business plan.

Several measures taken to anticipate this risk are:

a. Formulating the Bank's Business Plan, which is used as a guideline by the Management and employees.
b. Monitoring financial performance by comparing the realization with the Bank's objectives/targets that are outlined in the Bank's Business Plan.
c. The Performance Planning Division regularly conducts periodic monitoring (performance review) upon performance achievement of each division/regional office/branch office/sub-branch office and the Bank as a whole.
d. Revising and updating strategies that want to be achieved, in accordance with developments in internal and external conditions, so they remain realistic in relation to the Bank's target achievements.

2. Compliance Risk

Compliance Risk is a risk that arises when the Bank fails to comply with and/or implement applicable laws, regulations, and provisions. Compliance risk can have significant consequences if not managed properly due to sanctions imposed by the Regulator. The compliance risk management organization is carried out by all work units as the first line of defense, the Compliance Division as the second line of defense, and the Internal Audit Division as the third line of defense. Compliance risk management conducted by the Bank is as follows:

a. Improve and monitor Compliance Policy and policy on Anti- Money Laundering and Counter Financing of Terrorism.
b. Monitor customer data updates and handle the passive account/dormant.
c. Implement the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Program, in accordance with the mandate outlined in Bank Indonesia Regulation, in which the Bank regularly conduct dissemination to relevant units through the Compliance Division.

d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
e. Peningkatan fungsi Compliance oleh Divisi Compliance dengan memastikan kepatuhan ketentuan internal sesuai/memenuhi dari regulasi, melalui gapping analysis dan mendiskusikan hasil gap analysis kepada unit kerja serta dilakukan penyempurnaan/ perbaikan dari ketentuan internal tersebut.
f. Fungsi kepatuhan ini didukung oleh Compliance Report Monitoring sebagai reminder unit kerja atas kewajiban menyampaian laporan rutin kepada regulator.

d. Formulate Compliance Report to Internal and External parties.
e. Enhance Compliance function by the Compliance Division by ensuring compliance with internal provisions, in accordance with regulation, through gapping analysis and discussing gap analysis result to work units, as well as improve/ updated internal provisions.
f. This compliance function is supported by the Compliance Report Monitoring (CRM) system as a reminder for work units of their obligations to submit routine reports to regulators.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko reputasi dapat disebabkan karena kelemahan berbagai aktivitas Bank yang dapat menimbulkan keluhan nasabah hingga pemberitaan negatif di berbagai media massa. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko reputasi dapat berdampak signifikan bagi Bank karena penurunan kepercayaan nasabah sehingga Bank dapat ditinggalkan oleh para nasabahnya.

Pengelolaan risiko reputasi oleh Bank dilakukan dengan cara:
a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh Corporate Secretary.
b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui Call Center & Customer Care guna menangani keluhan dengan segera. serta melakukan optimalisasi fungsi Call Center dalam penanganan keluhan nasabah.
c. Bank juga ikut ambil bagian dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility, serta ikut melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat.
d. Meningkatkan corporate image JTrust Bank melalui penyempurnaan website Bank dan melaksanakan press release dengan media.

Bank menyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Perseroan yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan GCG akan memperbaiki reputasi.

8. Reputational Risk

Reputational Risk is a risk resulting from a decline of trust from the public and stakeholders, stemming from negative perceptions of the Bank. Reputation risk can be caused by weaknesses in various Bank activities, which can lead to customer complaints and negative reporting in various media. If not managed well, reputation risk can have significant consequences for the Bank, as it can lose customer trust, potentially leading to customers leaving the Bank.

Reputational risk management by the Bank is carried out by:
a. Monitoring media publications, in which the Corporate Secretary collaborates with third parties.
b. Monitoring customer complaints via Call Center & Customer Care to handle complaints promptly, as well as optimize the function of Call Center in the handling of customer complaints.
c. The Bank also takes part in implementing Corporate Social Responsibility programs, as well as other social activities together with customers, including as a sponsor in various community activities.
d. Increasing J Trust Bank corporate image by improving the Bank's website and deliver press releases to the media.

The Bank believes that every aspect of effective implementation of the Company's management (including risk management and internal control systems) in relation to GCG would improve the reputation.

Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan POJK No. 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, penilaian dilakukan terhadap risiko yang melekat (inherent risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses self-assessment pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, dan risiko reputasi. Penilaian Profil Risiko secara self-assessment periode Triwulan IV tahun 2024 adalah Low to Moderate (2) dengan peringkat inherent risk adalah Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah Satisfactory.

Sejalan dengan POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, J Trust Bank juga melakukan penilaian atas Tingkat Kesehatan Bank pada periode Semester II 2024 yang mencakup 4 faktor, yaitu profil risiko dengan peringkat low to moderate (2), Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat Baik (2), Rentabilitas (Earning) dengan peringkat memadai (2) dan Permodalan (Capital) dengan peringkat memadai (2).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan hasil penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK yaitu di Semester I tahun 2023 berada pada peringkat komposit 3 (Cukup Sehat).

Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

The Bank's Risk Profile and Soundness Level

The Risk Profile Assessment is in accordance with POJK No. 4/POJK.3/2016 dated 27 January 2016 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks and its implementing regulations. The assessment evaluates both the inherent risks and the quality of risk management implementation through a self-assessment process covering all the Bank's business activities, which include 8 (eight) types of risk: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputational risk. The Risk Profile assessment for the Q4 2024 was Low to Moderate (2), with the inherent risk rated as Low to Moderate and the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) rated as Satisfactory.

In line with POJK No. 4 / POJK.03 / 2016 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Bank, J Trust Bank also assessed the Bank's Soundness level in the second half of 2024, which included 4 (four) factors, namely risk profile with low to moderate rating (2), Good Corporate Governance (GCG) with good rating (2), Rentability (Earning) with adequate rating (2), and Capital with adequate rating (2).

The assessment of the Bank's Soundness Level based on the result of the latest assessment conducted by OJK on the first half of 2023 was on a composite rating of 3 (Moderately Sound).

This reflects the general condition of the Bank is Fairly Healthy and the Bank is considered quite capable of dealing with significant negative effects from changes in business conditions and other external factors.

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
REPORT ON THE CALCULATION OF LIQUIDITY COVERAGE RATIO FULFILLMENT OBLIGATIONS

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Komponen Components	Posisi Desember 2024 Unaudited December 2024 Position Unaudited	Posisi Desember 2023 Audited December 2023 Position Audited
		Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*) The value of HQLA affter a haircut or outstanding liabilities and commitments multiplied by the run-off rate or the value of contractual invoices times the inflow rate	**Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)** The value of HQLA affter a haircut or outstanding liabilities and commitments multiplied by the run-off rate or the value of contractual invoices times the inflow rate
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)	7.715.766	7.293.952
ARUS KAS KELUAR | CASH OUTFLOW			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: Individual customers savings and Fundingg from the Small, Medium, Enterprises customers, consisting:		
	a. Simpanan/Pendanaan stabil | Savings/stable funding	95.876	1.460
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil | Savings/unstable funding	494.088	731.535
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: Savings from corporate customers, consisting"		
	a. Simpanan operasional | Operational savings	374.722	243.084
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional | Non-operational savings and/or other obligations that are non-operational	5.543.061	4.331.723
4	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) | Secured funding	-	-
5	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari: Additional requirement, consisting:		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif | Cash outflow on derivative transaction	-	-
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas | Cash outflow on the increasing liquidity requirement	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan | Cash outflow on the loss of funding	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas | Cash outflow on the retractment of credit facility and liquidity facility	-	-
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana | Cash outflow on other contractual obligation related to funding delivery	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya | Cash outflow on the contigency obligation for other funding	-	-
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya | Cash outflow on other contractuals	746.817	785.107
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		**7.254.564**	**6.092.908**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Komponen Components	Posisi Desember 2024 Unaudited December 2024 Position Unaudited	Posisi Desember 2023 Audited December 2023 Position Audited
		Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*) The value of HQLA affter a haircut or outstanding liabilities and commitments multiplied by the run-off rate or the value of contractual invoices times the inflow rate	**Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)** The value of HQLA affter a haircut or outstanding liabilities and commitments multiplied by the run-off rate or the value of contractual invoices times the inflow rate
ARUS KAS MASUK | CASH INFLOW			
6	Pinjaman dengan agunan *Secured lending* | Lending with Secured lending collateral	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) | Receivables from counterparty	472.426	-
8	Arus kas masuk lainnya | Other cash inflow	173.655	32.050
	TOTAL ARUS KAS MASUK TOTAL CASH INFLOW	**646.081**	**32.050**
	TOTAL ADJUSTED VALUE	**646.081**	**32.050**
	TOTAL HQLA	**7.715.766**	**7.293.952**
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH NET CASH OUTFLOW	**6.608.483**	**6.060.858**
	LCR (%)	**116,76%**	**120,35%**

LAPORAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL (NSFR)
REPORT ON THE STABLE FUNDING RATIO (NSFR) FULFILLMENT OBLIGATIONS

Komponen ASF ASF Component		Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
1	**Modal | Capital:**						
1.1	Modal bagi Bank Umum berkantor pusat di indonesia | Capital for General Bank based in Indonesia:	13.032.929		-		-	
1.1.1	Modal inti (Tier 1) | Core Capital (Tier 1)	13.032.929	100%		n.a.		n.a.
1.1.2	Modal pelengkap (Tier 2) | Complementary Capital (Tier 2)	252.110	100%	-	0%	-	0%
1.2	Modal bagi KCBA | Capital for KCBA		100%		0%		0%
1.3	Instrumen modal lainnya | Other capital instruments	-	100%	-	0%	-	0%
2	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan:** **Deposit originating from individual customers:**						
2.1	Simpanan stabil | stable deposits	1.017.566	n.a.	132.473	95%	2.298	95%
2.1.1	Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) Deposits without period (e.g. current account, savings)	1.017.566	95%	-	n.a.		n.a.
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (contoh: Deposito) Deposits with terms (e.g. time deposits)	-	n.a.	132.473	95%	2.298	95%
2.2	Simpanan kurang stabil | Less stable deposits	296.341		12.443.443		444.697	
2.2.1	Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) Deposits without terms (e.g. current account, savings)	296.341	90%	-	n.a.		n.a.
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (contoh: Deposito) Deposits with terms (e.g. time deposits)	-	n.a.	12.443.443	90%	444.697	90%
3	**Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:** **Funding originating from micro and small business customers:**						
3.1	Pendanaan stabil | Stable funding	17.926		3.414		344	
3.1.1	Pendanaan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) Funding without terms (e.g. current account, savings)	17.926	95%		n.a.		n.a.
3.1.2	Pendanaan dengan jangka waktu (contoh: deposito, surat berharga) Funding with terms (e.g. time deposits, securities)	-	n.a.	3.414	95%	344	95%
3.2	Pendanaan kurang stabil | Less stable funding	121.465		62.104		-	
3.2.1	Pendanaan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) Funding without terms (e.g. current account, savings)	121.465	90%		n.a.		n.a.
3.2.2	Pendanaan dengan jangka waktu (contoh: deposito, surat berharga) Funding with terms (e.g. time deposits, securities)		n.a.	62.104	90%		90%
4	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:** **Funding originating from corporate customers:**						
4.1	Simpanan operasional | Operational Deposits	1.449.787	50%	-	50%	-	50%
4.2	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi sebagai berikut: Other funding originating from coprorate customers as follow:	3.050.706		16.050.690		779.990	
4.2.1	perusahaan non-keuangan | non-financial companies		0%		50%		50%
4.2.2	pemerintah pusat | central government		0%		50%		50%
4.2.3	pemerintah negara lain | government from other countries		0%		50%		50%
4.2.4	entitas sektor publik | public sector entities		0%		50%		50%
4.2.5	bank pembangunan multilateral | multilateral development bank		0%		50%		50%
4.2.6	Bank Indonesia		0%		0%		50%
4.2.7	bank sentral negara lain | central banks from other countries		0%		0%		50%
4.2.8	lembaga keuangan | financial entities	822.058	0%	1.492.118	0%	9.200	50%
4.2.9	lainnya | others	2.228.647	0%	14.558.572	0%	770.790	50%
5	**Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung** **Liabilities with interdependent asset pairs**		**0%**		**0%**		**0%**
6	**Liabilitas dan ekuitas lainnya | Liabilities and other equities:**						
6.1	NSFR liabilitas derivatif | NSFR derivative liabilities			0			
6.2	liabilitas pajak tangguhan | deffered tax liabilities		100%		0%		50%

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

				Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								
				Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year		Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		< 6 bulan - 1 tahun <6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
			13.285.038,08									**13.259.140,23**
			13.285.038	13.032.929		-		-		226.211,68		13.032.929
		n.a.	13.032.929	-	100%	-	n.a.	-	n.a.	13.032.929	n.a.	13.032.929
		100%	252.110	-	100%	-	0%		0%	226.211	100%	226.211
		100%	-	-	100%		0%		0%		100%	0
	-	100%	-	-	100%	-	0%	-	0%	0	100%	-
	-		**13.094.615**									**12.972.939**
	10		1.094.730	13.692		505	-		-	-	-	32.104
	-	n.a.	966.687	13.692	n.a.	-	n.a.	13.692			n.a.	30.909
	10	100%-	128.043	-	95%	505	95%	-	-	n.a.	100%	1.195
	133.852		11.999.885	1.428.321		10.445.674		212.986		130.513		12.940.835
	-	n.a.	266.707	1.428.321	90%	-	n.a.		n.a.	-	n.a.	1.428.321
	133.852	100%	11.733.178	-	n.a.	10.445.674	90%	212.986	90%	130.513	100%	-
			200.812									
			20.600	-		-		-				-
	-	n.a.	17.029	95%		n.a.		n.a.	-	n.a.		-
	-	100%	3.570	n.a.	-	95%	-	95%	-	100%		-
	15.000		180.212	-		-		-				-
		n.a.	109.318	90%		n.a.		n.a.		n.a.	-	-
	15.000	100%	70.894	n.a.		90%		90%		100%	-	-
	-		**1.316.426**							**-**		**1.491.782**
	-	100%	724.894	784.951	50%	-	-	-	50%	-	100%	392.475
	201.537		591.532	2.177.363		11.546.925		2.323.304		547.713		1.118.973
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	-		0%		50%		50%	0	100%	-
		100%	4.600	779.919	0%		50%	404.125	50%		100%	5.037
	201.537	100%	586.932	1.397.444	0%		50%	1.919.179	50%	547.713	100%	1.113.935
		0%	**-**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**	
			-									
		100%		100%		0%		50%		100%		-

Komponen ASF ASF Component		Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
6.3	kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1) non-controlling interest that does not meet the requirement to be included as the main core capital (Tier 1)		100%		0%		50%
6.4	utang tanggal perdagangan (trade date payable)		0%		0%		0%
6.5	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu*) other equities and liabilities that are not included in above categories, including other liabilities without period		0%	-	0%		50%
7	**Total ASF**						

Komponen RSF RSF Component		Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
1	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR** **Total HQLA for NSFR calculation**	**805.524**		**4.100.917**		**77.210**	
1.1	HQLA Level 1	805.524		4.000.949		77.210	
1.1.1	kas dan setara kas | cash and cash eequivalent	331.700	0		n.a.		n.a.
1.1.2	penempatan pada Bank Indonesia | placement on Bank Indonesia	473.825	0%	1.861.716	0%		0%
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0% HQLA Level 1 not including asset that get 0% RSF factor	-		2.139.233		77.210	
1.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	2.139.233	5%	77.210	5%
1.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset encumbered, based on the remaining period of binding assets		n.a.		5%		50%
1.2	HQLA Level 2A	-		-		-	
1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.		15%		15%
1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset encumbered, based on the remaining period of binding assets		n.a.		15%		50%
1.3	HQLA Level 2B	-		99.967		-	
1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	99.967	50%	-	50%
1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset encumbered, based on the remaining period of binding assets		n.a.		50%		50%
2	**Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional** **Savings or fund placement on other financial entities for operational activities**	**592.757**		**-**	**n.a.**	**-**	**n.a.**
2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	592,757	50%	0	50%	0	50%
2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		50%		50%		50%
2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		50%		50%		50%
2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		100%		100%		100%

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

			Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
				Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year			Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		< 6 bulan - 1 tahun <6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
		100%		100%		0%		50%		100%	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	-	-
		100%		0%	-	0%		50%		100%	-	-
			27.896.892									27.723.861

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

			Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
				Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year			Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
	1.596.350		**513.192**	**2.215.076**		**3.371.885**		**-**		**1.717.367**		**433.381**
	990.641		160.354	2.215.076		3.261.878	-		-	1.083.161		61.275
		n.a.	-	201.930	0%		n.a.		n.a.	-	n.a.	-
	-	0%	-	2.013.146	0%	3.119.545	0%	-	0%	-	0%	-
	990.641	-	160.354	-				142.333		1.083.161	5%	61.275
	990.641	n.a.	160,354		n.a.		5%	142.333	5%	1.083.161	100%	61.275
		n.a.			n.a.	-			-	-	15%	-
	-		-		-		-		-		-	-
			-		15%		15%		15%	-	15%	-
			-		15%		50%		100%	-	100%	-
	605.709		352.838			110.007		-		634.206		372.106
	605.709		352.838		n.a.	110.007	50%	-	50%	634.206	50%	372.106
			-		n.a.		50%		100%	-	100%	-
	-	**n.a.**	**296.379**	**549.320**		**-**	**n.a.**	**-**	**n.a.**	**-**	**n.a.**	**274.660**
	0	100%	296,379	549.320	50%	-	50%	-	0	100%	274.660	305.258
	-		-		-		-		-		-	-
			50%		50%		50%		100%	-	100%	-
	-		50%		50%		50%	-	100%	-	100%	-
			100%		100%		100%		100%	-	100%	-

Komponen RSF RSF Component		Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
3	**Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default)** **Performing loans and defaulted securities**	**899**		**11.465.998**		**2.287.602**	
3.1	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) yang diberikan kepada: Performing loans that delivered to:	899		11.386.096		2.287.602	
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan Financial entities guaranteed by HQLA Level 1 that meet requirements	-		-		-	
3.1.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	-	n.a.	-	10%	-	50%
3.1.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.1.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		10%		50%
3.1.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		50%
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin dengan non-HQLA Level 1, atau tidak memenuhi persyaratan tertentu atau tanpa agunan Financial entities that guaranteed with non-HQLA Level 1, or do not meet particular requirements or without collaterals	-		1.403.253		599.940	
3.1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	-	n.a.	1.403.253	15%	599.940	50%
3.1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.1.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		15%		50%
3.1.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year	-	n.a.		50%		50%
3.1.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		50%
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional Financial entities and without collaterals, including fund placement (without period and with period) on other financial entities and not for opetational activities	899		509.708		121	
3.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	899	15%	509.708	15%	121	50%
3.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.1.3.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		15%		50%
3.1.3.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.3.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		50%
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain, yang di antaranya: Non-financial entities, individual customers and micro and small businesses customers, the Government of Indonesia, government of other countries, public sector entities and other loans, including:	-		8.138.810		1.687.201	
3.1.4.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar risk weighted ≤ 35% on credit risk ATMR calculation with standard approach	-		138,026		55	
3.1.4.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	138,026	50%	55	50%
3.1.4.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.1.4.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		50%		50%
3.1.4.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.4.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		50%

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

			Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
			Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
	14.959.768		**18.712.114**	**-**		**9.845.225**		**3.681.124**		**13.748.483**		**17.668.459**
	13.908.222		17.778.349	-		9.845.225		2.973.855		12.541.113		16.288.561
	-		-		-		-		-		-	-
	-	100%	-	-	n.a.	-	10%	-	50%	-	100%	-
	-		-		-		-		-		-	
		100%			n.a.		10%		50%		100%	-
	-	100%			n.a.		50%		50%		100%	-
		100%			n.a.		100%		50%		100%	-
	3.169.881		3.680.339			46.126		9.534		297.568		309.254
	3.169.881	100%	3.680.339		n.a.	46.126	15%	9.534	50%	297.568	100%	309.254
	-		-		-		-		-			-
		100%	-		n.a.		15%		50%		100%	-
	-	100%	-		n.a.		50%		50%		100%	-
		100%	-		n.a.		100%		50%		100%	-
	502.412		579.063			331.159		7.286		315.593		368.910
	502.412	100%	579.063	331.159	15%	331.159	50%	7.286	100%	315.593	100%	368.910
	-	-		-		-		-		-		-
		100%		15%		50%		100%	-		100%	-
		100%		50%		50%			-			-
		100%		100%		50%	-	5%	-		5%	-
	9.725.434		13.126.721			8.000.958		2.956.881		11.630.441		15.364.795
	264,516		240,976	-		-		-		-		-
	264,516	65%	240,976		n.a.		50%		50%		65%	-
	-		-		-		-		-	-		-
		65%			n.a.	50%	50%		50%		65%	-
		65%	-		n.a.		50%		50%		65%	-
		100%	-		n.a.		100%		50%		100%	-

Komponen RSF RSF Component		Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
3.1.4.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar risk weighted > 35% on credit risk ATMR calculation with standard approach	-		8.000.785		1.687.146	
3.1.4.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	8.000.785	50%	1.687.146	50%
3.1.4.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		50%		50%
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.4.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		50%
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain Receivables (including loans) to Bank Indonesia and central bank from other countries with the remaining period less than 1 year other than securities issued or guaranteed by Bank Indonesia and central banks from other countries.	-		1.332.222		-	
3.1.5.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	1.332.222	0%		50%
3.1.5.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.1.5.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		0%		50%
3.1.5.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.5.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		100%
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain) Receivables to Bank Indonesia and central banks form other countries (e.g. securities issued by Bank Indonesia and central banks from other countries)	-		-		-	
3.1.6.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	-	-	-	0,05
3.1.6.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)			-		-	
3.1.6.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		0%		5%
3.1.6.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.6.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		100%
3.1.7	Kredit beragunan rumah tinggal, yang di antaranya | residential loan with collaterals, including :			2.103		340	
3.1.7.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar risk weighted ≤ 35% on credit risk ATMR calculation with standard approach	-		2.103		340	
3.1.7.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	2,103	50%	340	50%
3.1.7.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)			-		-	
3.1.7.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		50%		50%
3.1.7.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.7.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		100%
3.1.7.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar risk weighted > 35% on credit risk ATMR calculation with standard approach	-		-		-	
3.1.7.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	-	50%	-	50%
3.1.7.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)			-		-	
3.1.7.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.		50%		50%

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

			Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
				Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year			Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
	9.460.918		12.885.746	-	-	8.000.958		2.956.881		11.630.441		15.364.795
	9.460.918	85%	12.885.746		n.a.	8.000.958	50%	2.956.881	50%	11.630.441	85%	15.364.795
	-		-	-								
		85%	-		n.a.		50%		50%		85%	-
		85%	-		n.a.		50%		50%		85%	-
		100%	-		n.a.		100%		50%		100%	-
	-		-	-		1.466.541				-		-
			-			1.466.541	0%		50%			
	-		-	-	-		-		-		-	
			-		n.a.		0%		50%			-
			-		n.a.		50%		50%			-
			-		n.a.		100%		100%			-
	-		-			-		-		-		-
	-	0,05	-		n.a.		-	-	50%		50%	
	-		-				-		-		-	
		5%	-		n.a.		0%		5%		5%	-
		65%	-		n.a.		50%		50%		65%	-
		100%	-		n.a.		100%		100%		100%	-
	510.495		392.226	441		154		297.511		245.602		
	214,585		140,702		-	168		106		37.898		24.771
	214,585	65%	140,702		n.a.	168	50%	106	50%	37.898	65%	24.771
	-		-			-		-		-		-
		65%	-		n.a.		50%		50%		65%	-
		85%	-		n.a.		50%		50%		85%	-
		100%	-		n.a.		100%		100%		100%	-
	295.910		251.523		-	273		48		259.613		220.831
	295.910	85%	251,523		n.a.	273	50%	48	50%	259.613	85%	220.831
	-		-			-		-		-		-
		85%	-		n.a.		50%		50%		85%	-

Komponen RSF RSF Component		Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
3.1.7.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year		n.a.		50%		50%
3.1.7.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		100%
3.2	Surat berharga yang tidak mengalami gagal bayar dan non-HQLA serta saham yang diperdagangkan di bursa dan non-HQLA, dengan syarat tertentu Performed securities and non-HQLA and stocks traded in stock exchange and non-HQLA with particular requirements:	-		79.902		-	
3.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		n.a.	79.902	50%	-	50%
3.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	-		-		-	
3.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan remaining period for binding assets < 6 months		n.a.	-	50%		50%
3.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 6 months to 1 year	-		-		-	
3.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun remaining period for binding assets ≥ 1 year		n.a.		100%		100%
4	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung** **Assets with interdependent liabilities pairs**		**0%**		**0%**		**0%**
5	**Aset lainnya | Other assets**	**3.707.936**		**604.532**		**1.113**	
5.1	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas Physical commodities that are traded, including gold						
5.2	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP) Cash, securities and other assets recorded as initial margin for derivative contracts and cash or other assets submitted as default funds to the central coutnerparty (CCP)				85%		85%
5.3	NSFR aset derivatif | NSFR derivative assets				100%		100%
5.4	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin Piutang tanggal perdagangan 20% derivative liabilities before deducted with variation margin for trade date of receivables				100%		100%
5.5	Piutang tanggal perdagangan | trade date receivables		0%		0%		0%
5.6	Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (Non-Performing Loan) Loan or funding with sub-standard, doubtful, and non-performing qualities		100%	143,660	100%	1,113	100%
5.7	Saham yang tidak diperdagangkan di bursa Stock that are note traded in the stock market		n.a.		100%		100%
5.8	Aset tetap | fixed assets		n.a.	460,873	100%		100%
5.9	Faktor pengurang modal | capital deduction factor		n.a.	-	100%	-	100%
5.10	Surat berharga yang gagal bayar | defaulted securities		n.a.		100%		100%
5.11	Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim (encumbered) Other encumbered assets		mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim following RSF assets while free of any claims				
5.12	Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas **) Other assets that are not included in above categories **)	3.707.936	100%	-	100%	-	100%

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

			Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
				Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year			Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
		85%	-		n.a.		50%		50%		85%	-
		100%	-		n.a.		100%		100%		100%	-
	1.051.545		933.764	-		-	-	707.269	-	1.207.369		1.379.898
	1.051.545	85%	933.764	-	n.a.	-	50%	707.269	50%	1.207.369	50%	1.379.898
	-		-	-		-	-	-		-		-
		85%	-	-	n.a.	-	50%	707.269	50%	1.207.369	85%	1.379.898
	-		-	-	-	-	-		-		-	
		100%	-	-	n.a.	-	100%	-	100%	-	100%	-
		0%	**-**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**	**-**
	235.823		**4.549.405**	**3.613.139**		**552.011**		**7.487**		**135.050**		**4.307.686**
					85%							
		85%	-				85%		85%		85%	-
		100%	-				100%		100%		100%	-
		100%	-				100%		100%		100%	-
		0%	-		0%		0%		0%		0%	-
	235,823	100%	380,596		100%	93.648	100%	7.487	100%	135.050	100%	236.185
		100%	-		n.a.		100%		100%		100%	-
		100%	460,873		n.a.	446.206	100%		100%		100%	446.206
	-	100%	-		n.a.	-	100%	-	100%		100%	-
		100%	-		n.a.		100%		100%		100%	-
		100%	-		mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim following RSF assets while free of any claims						100%	-
	-	100%	3.707.936	3.613.139	100%	12.157	100%	-	100%		100%	3.625.295

	Komponen RSF RSF Component	Posisi 31 Desember 2024 31 December 2023 Position					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period					
		Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year	
		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor
6	**Total Aset**	5.107.117		16.171.447		2.365.925	
	Transaksi Rekening Administratif | Administrative Account Transaction						
7	**Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (irrevocable) atau dapat dibatalkan dengan syarat (conditionally revocable)** Commitment in a form of credit facility and liquidity facility that are irrevocable or conditionally revocable				5%		5%
8	**Fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (unconditionally revocable)** Credit and liquidity facility that unconditionally revocable			228.877	0%	202.896	0%
9	**Kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance (termasuk garansi dan letters of credit (L/C)** Obligation that originated from trade finance instrument (including guarantee and letters of credit or L/C)			30.559	3%	51.300	3%
10	**Letters of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance** Letters of credit (L/C) and guarantees that are not related to trade finance obligation				5%		5%
11	**Kewajiban non-kontraktual** | Non-contractual obligation				5%		5%
12	**Total Transaksi Rekening Administratif** | Total Administrative Account Transaction			259.436		254.196	
13	**Total RSF**						
14	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))**						

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

			Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	Posisi 31 Desember 2023 31 December 2023 Position								Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
				Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Outstanding Value Based on Remaining Period								
	≥ 1 tahun ≥ 1year			Tanpa Jangka Waktu No Period		< 6 bulan < 6 months		≥ 6 bulan - 1 tahun ≥ 6 months - 1 year		≥ 1 tahun ≥ 1year		
	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor		Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	Nilai Tercatat Recorded Value	Faktor ASF ASF Factor	
	16.791.940		24.071.089	6.377.535		13.769.121		3.688.610		15.600.900		22.684.187
							5%		5%		5%	-
	37	0%	-			159.420	0%	99.997	0%		0%	-
	74.333	3%	4.686			158.989	3%	101.178	3%		3%	-
							5%		5%		5%	-
		5%	-				5%		5%		5%	-
	74.370		4.686			299.614		137.604		53.543		5.286
			24.075.775									22.689.472
			115,87%									122,19%

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Ratna

Ratna si pemilik pemikiran inovatif yang suka menantang hal-hal baru. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Ratna dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Harimau Sumatra.

Ratna is an innovative thinker who likes to challenge new things. As one of J Trust Bank's mascots, Ratna is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animal, the Sumatran Tiger.

TATA KELOLA **PERUSAHAAN**

Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Prinsip dan komitmen tata kelola J Trust Bank adalah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengembangan kegiatan usaha yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

The principles and commitments of J Trust Bank are to continuously improving the quality of a healthy business development based on prudential principles and ethics while contributing to the implementation of social and environmental responsibility.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Bank) terus menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aspek bisnis. Ini demi meningkatkan nilai perusahaan bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan serta menumbuhkan kepercayaan pelanggan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

J Trust Bank melaksanakan kegiatan perbankan dengan meninjau dan menerapkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia (BI). Selain itu, Bank menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

PRINSIP DAN KOMITMEN TATA KELOLA BANK

Bank berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan didukung penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.

Komitmen Penerapan *Environmental, Social,* dan *Governance* (ESG)

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank memberikan kontribusi nyata terkait keuangan berkelanjutan guna mendukung terciptanya pembangunan nasional jangka panjang yang berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2024, 8,74% dari total portofolio pembiayaan Bank didistribusikan untuk kegiatan usaha berkelanjutan.

Bank secara konsisten dan berkelanjutan juga mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG untuk menciptakan dan memaksimalkan manfaat dan nilai tambah serta menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dan kelangsungan usaha. Komite Keberlanjutan terus merumuskan peta jalan keberlanjutan dan kerangka kerja yang efektif sehubungan dengan penerapan praktik-praktik keberlanjutan di Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Bank) continues improving the implementation of good corporate governance principles in every business aspect, in order to increase the company's value for investors and all stakeholders while fostering customer trust by adhering to prudential principles.

J Trust Bank conducts banking activities by reviewing and implementing regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and/or Bank Indonesia (BI). In addition, the Bank implements the governance principles issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

PRINCIPLES AND COMMITMENTS OF BANK GOVERNANCE

The Bank is committed to continuously improving the quality of a healthy Bank's business development based on prudential principles and ethics while contributing to the implementation of social and environmental responsibility, and focusing on the interests of shareholders and stakeholders supported by the implementation of integrated governance, risk management and compliance.

Commitment to Environmental, Social and Governance (ESG) Implementation

In line with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Sustainable Finance Implementation, the Bank makes real contributions related to sustainable finance to support the creation of a sustainable long-term national development. Until the end of 2024, 8.74% of the Bank's total financing portfolio was distributed to sustainable business activities.

The Bank consistently and continuously implements ESG principles to create and maximize benefits and added value as well as to maintain the level of trust of stakeholders and business continuity. The Sustainability Committee continues to formulate the sustainability roadmap and effective framework regarding the implementation of sustainability practices at the Bank.

Dasar dan Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam menerapkan GCG, Bank merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK), khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola;
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF);
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
6. Kebijakan Bank terkait tata kelola yang baik.

Bank mengikuti Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) 2024, yang sejalan dengan praktik governansi global untuk menciptakan nilai korporasi dalam jangka panjang. Bank menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "ETAK" yaitu: Perilaku beretika, Transparansi, Akuntabilitas dan Berkelanjutan.

Tujuan/Manfaat dari Penerapan Tata Kelola yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada Bank yang konsisten baik secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi Bank dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memerhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan.
- Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing, kinerja, efisiensi, dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham atau memenuhi kepentingan pemegang saham atas peningkatan nilai saham Bank.

The Basis and Guidelines of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

In implementing GCG, the Bank refers to the following laws and regulations, and policies:

1. Laws of the Republic of Indonesia on Capital Market, Limited Liability Companies, and Banking;
2. Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circular Letters (SEOJK), on Governance, Annual Report, Risk Management, and various POJK and SEOJK on governance implementation;
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
4. General Guidelines of Indonesian Corporate Governance issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
5. The Bank's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); as well as
6. The Bank's policy regarding good governance.

In addition, the Bank follows the 2024 General Guidelines for National Committee for Governance Policy (KNKG), which are in line with global governance practices to create long-term corporate values. The Bank implements all governance principles known as "ETAK" Ethical behavior, Transparency, Acuntability and Sustainability.

Objectives/Benefits of Good Corporate Governance Implementation

Consistent implementations of governance principles at the Bank, directly or indirectly, are beneficial for the Bank in the long term to:

- Protect and meet the interests of all parties/ stakeholders.
- Improve work behavior in implementing good governance and prudential principles in the Bank's management so as to create a foundation for the Bank to grow and develop in the long term.
- Improve and enhance the Bank's image in increasing competitiveness, performance, efficiency, and services to stakeholders.
- Attract interest and increase the confidence of investors and other business partners.
- Maximize added value for shareholders or fulfill shareholder interests in increasing the value of Bank shares.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA BANK

Dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada empat pilar tata kelola, yaitu komitmen tata kelola, struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola yang merupakan perwujudan tanggung jawab J Trust Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

Komitmen Tata Kelola

Penerapan prinsip GCG Bank berawal dari komitmen atas penerapan tata kelola, yang dimulai dari manajemen tertinggi Bank sampai ke seluruh jajaran di bawahnya, sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari budaya Perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, Bank merumuskan Visi dan Misi yang jelas dan realistis, serta nilai-nilai utama yang menggambarkan sikap dan moral yang baik dan positif. Bank memiliki kebijakan internal, seperti Kode Etik & Perilaku Bisnis dan Piagam. Selain itu, Bank juga menerapkan manajemen risiko dan strategi anti-fraud berupa whistleblowing system, pakta integritas, dan pernyataan tahunan, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Struktur Tata Kelola [GRI 2-9]

J Trust Bank memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG. Berikut struktur tata kelola perusahaan di J Trust Bank:

STRUCTURE AND MECHANISM OF BANK GOVERNANCE

The basis of good corporate governance implementation refers to the four pillars of governance: governance commitment, governance structure, governance process, and governance results, which are the embodiment of J Trust Bank's responsibility to interested parties, namely customers, employees, other stakeholders and the community.

Governance Commitment

The implementation of the Bank's GCG principles begins with a commitment to governance implementation, starting from the Bank's highest management down to all levels underneath, so that it ultimately becomes part of the Company's culture. To achieve this, the Bank formulates a clear and realistic Vision and Mission, as well as core values that describe good and positive attitudes and morals. The Bank has internal policies, such as Code of Ethics & Business Conduct and Charter. In addition, the Bank implements risk management and anti-fraud strategies such as a whistleblowing system, integrity pact, and annual statement, as well as implementing Social and Environmental Responsibility (TJSL).

Governance Structure [GRI 2-9]

J Trust Bank has a governance structure consisting of main organs, supporting organs, and GCG infrastructure. The following is the corporate governance structure at J Trust Bank:

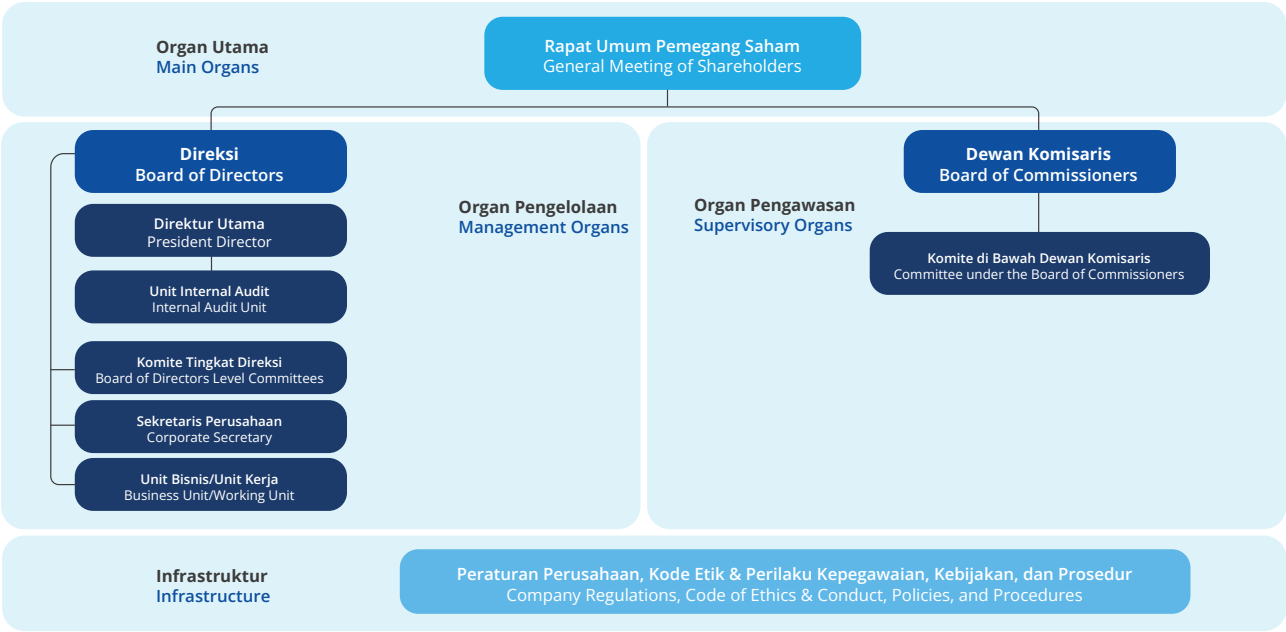

Sejalan dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank. Organ utama dalam struktur tata kelola Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi pada RUPS. Mereka dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan unit-unit bisnis. Selain itu, juga oleh infrastruktur yang tersedia.

Komite-komite pada tingkat Dewan Komisaris mencakup, komite-komite pada tingkat Direksi antara lain terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Komite Asset dan Liability (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kredit, dan, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Berkelanjutan.

Proses Tata Kelola

Proses tata kelola di lingkungan Bank dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Hasil Tata Kelola

Hasil tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

a. Kecukupan transparansi laporan;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. Perlindungan konsumen;
d. Objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
f. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran BMPK (batas maksimal pemberian kredit), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada OJK.

In line with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, corporate governance implementation is realized from the interaction of all Bank organs. The main organs in the Bank's governance structure consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, with the GMS at the highest position. They are assisted by supporting organs consisting of committees, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and business units; as well as by the available infrastructure.

Committees at the Board of Commissioners level include the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Committees at the Board of Directors level include the Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), Information Technology Steering Committee, Credit Committee, Credit Policy Committee, and Sustainability Committee.

Governance Process

Governance process in the Bank is carried out through structured and systematic procedures and mechanisms, and is supported by adequate governance structure and infrastructure to obtain results in line with stakeholder expectations.

Governance Results

Governance results include qualitative and quantitative aspects, such as:

a. Adequacy of report transparency;
b. Compliance with laws and regulations;
c. Consumer protection;
d. Objectivity in conducting assessments or audits;
e. Bank performance such as profitability, efficiency, and capital; and/or
f. Increasing or decreasing compliance to applicable regulations and resolutions of problems faced by the Bank such as fraud, LLL (maximum credit limit) violations, violations of provisions related to bank reports to the OJK.

TONGGAK SEJARAH GCG

GCG Milestone

2014

1. J Trust Co.,Ltd menjadi pemegang saham pengendali baru dari PT Bank Mutiara Tbk.
2. Memperkuat kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan.
3. Menerapkan prinsip mengenai nasabah terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).
4. Memperkuat pelaksanaan program budaya perusahaan.

1. J Trust Co., Ltd became the new controlling shareholder of PT Bank Mutiara Tbk.
2. Strengthened the quality of management policies and decisions regarding products and services.
3. Carried out customer principles, in regards to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) programs.
4. Strengthened the implementation of corporate culture programs.

2015

1. Mengumumkan perubahan nama dari PT Bank Mutiara Tbk menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. *Grand launching* PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta produk dan layanan.
3. Memperkuat implementasi dual control dan meningkatkan kualitas melalui penerapan RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) dan komponen JSOX.
4. Pengembangan dan perbaikan delapan jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis.

1. Announced the name change from PT Bank Mutiara Tbk to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. Grand launching of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and its products and services.
3. Strengthened the implementation of dual control and improved quality through the implementation of RCSA (Risk Control Self-Assessment) and JSOX-based components.
4. Development and improvement of eight types of management risk profile that are separated from business managers.

2017

1. Memiliki *Good Corporate Governance Charter.*
2. Memenuhi ketentuan untuk jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Menyempurnakan struktur organisasi untuk pelaksanaan *check and balance.*
4. Menjalankan *reward* dan *punishment.*
5. Transparan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

1. Created a Good Corporate Governance Charter.
2. Complied with the provision on the number and composition of the Board of Commissioners, Directors and Committees under the Board of Commissioners and Directors.
3. Improved the organizational structure to carry out check and balances.
4. Enforced rewards and punishment.
5. Be transparent on financial and non-financial conditions, the Bank's product information and use of customer personal data.

2016

1. Mempertajam visi, misi,dan nilai-nilai Perusahaan serta mensosialisasikan pada pihak internal dan eksternal.
2. Membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
3. Membuat rumusan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
4. Menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Memiliki *whistle blowing system.*
6. Meraih penghargaan GCG Terbaik Sektor Keuangan Bank Buku II
dari Economic *Review.*

1. Sharpened the Company's vision, mission and values and disseminated them to internal and external parties.
2. Established the Work Guidelines and Procedures (Charter) for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Formulated Business Ethics and the Company's Code of Conduct.
4. Carried out corporate social responsibility programs.
5. Established a whistle blowing system.
6. Obtained the Best GCG Award in the Financial Sector for BUKU II Bank from the Economic Review.

2018

1. Memperkuat manajemen risiko, kepatuhan, dan kendali internal.
2. Transparan dalam tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah.

1. Strengthened risk management, compliance and internal control.
2. Be transparent on procedures for customer complaints and dispute resolution for customers.

2019

1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan.
2. Menetapkan unit kerja *Corporate Secretary Division* sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Penerbitan perdana Laporan Tahunan perusahaan yang dilengkapi dengan Laporan Keberlanjutan.

1. Conducted dissemination and training about Sustainable Finance for employees.
2. Determined the Corporate Secretary Division as the person responsible for implementing the Sustainable Finance Action Plan program.
3. The first publication of the company's Annual Report along with the Sustainability Report.

2020

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG.
2. Mengangkat satu orang Direktur *Treasury*, Bisnis, dan *Retail*.
3. Mengangkat satu orang Pihak Independen untuk melengkapi komposisi Komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Mengembangkan aplikasi sistem informatika untuk menjalankan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*New Smart AML System).*
5. Mengembangkan sistem pelaporan transaksi keuangan baru (*GoAML System*).

1. Built and improved GCG infrastructure.
2. Appointed one Director of Treasury, Business, and Retail.
3. Appointed one Independent Party to complete the composition of the Committees under the Board of Commissioners.
4. Developed an information system application to run the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program (New Smart AML System).
5. Developed a new financial transaction reporting system (GoAML System).

2021

1. Merekrut 1 (satu) orang Direktur *Credit Risk & Management All Delinquencies,* 1 (satu) orang Direktur Bisnis, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.
2. Memiliki Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan dan menetapkan unit kerja *Performance and Planning Division* sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Pembaharuan situs web Bank, khususnya terkait GCG dan Hubungan Investor.
4. Menerbitkan *Manual Handbook* untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Membuat Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan/atau Investor.
6. Pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (*voting*) secara individual pada masing-masing mata acara rapat.
7. Meraih penghargaan di ajang the 12th IICD *Corporate Governance Award* untuk "*Best Right of Shareholders*" untuk kapitalisasi pasar menengah (MidCap).
8. Meraih penghargaan di ajang Indonesia *Corporate Secretary and Corporate Communication Award* (ICCA) - VI-2021 untuk "1st *The Best Informative Website* 2021 Bank Buku II".
9. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, J Trust Bank mulai menyelaraskan dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals yaitu: SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #11, SDGs #14, dan SDGs #15.

1. Recruited 1 (one) Director of Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (one) Business Director, and 1 (one) experienced and professional Independent Party to complete the composition of the Board of Directors and membership of Committees under the Board of Commissioners.
2. Created a Sustainable Finance Task Force and appointed the Performance and Planning Division as the one responsible for carrying out the Sustainable Finance Action Plan program.
3. Revamped the Bank's website, especially the section about GCG and Investor Relations.
4. Published Manual Handbook for the Board of Commissioners and Directors.
5. Established Communication Policy for Shareholders and/or Investors.
6. Shareholders can vote individually on each meeting agenda.
7. Obtained an award at the 12th IICD Corporate Governance Award for "Best Right of Shareholders" for middle market capitalization (MidCap).
8. Obtained an award at the Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award (ICCA) - VI- 2021 for "1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku II".
9. In implementing business activities and corporate social responsibility, J Trust Bank has begun to align its activities with several Sustainable Development Goals, namely: SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #11, SDGs #14, and SDGs #15.

2022

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG seperti penerbitan kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, larangan transaksi bagi orang dalam, serta terkait nominasi dan remunerasi.
2. Melanjutkan peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang berpedoman pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
3. Meraih penghargaan di ajang the 13th IICD *Corporate Governance Awards* untuk kategori "Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik" dan "*Best Responsibility of The Board*".
4. Dalam implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank meningkatkan skema kemitraan dengan beragam pihak. Pada tahun 2022, Bank berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, dan SDGs #17.

1. Built and improved GCG infrastructure, such as issued policies on affiliate transactions and conflict of interest transactions, prohibiting insider transactions, as well as policies on nomination and remuneration.
2. Continued to enhance the implementation of corporate governance based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Obtained awards at the 13th IICD Corporate Governance Awards for the category of "Top 50 Issuers with Middle Market Capitalization with the Best Corporate Governance Practices" and "Best Responsibility of the Board".
4. In carrying out corporate social responsibility activities, the Bank boosted its partnership schemes with various parties. In 2022, the Bank has contributed to achieving SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, and SDGs #17.

2023

1. Membangun fondasi tata kelola di bidang bisnis yang berkelanjutan melalui pembentukan Komite Keberlanjutan.
2. Meraih predikat "Sangat Baik" dalam penilaian penerapan APU & PPT melalui kegiatan *Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing* yang dilakukan oleh PPATK dan PT Sucofindo.
3. Membentuk Komite Pemantau Risiko yang sepenuhnya independen terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Dalam implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank terus meningkatkan skema kemitraan dengan beragam pihak. Pada tahun 2023, Bank berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, dan SDGs #17.

1. Built a sustainable governance foundation in the business sector through the establishment of a Sustainability Committee.
2. Achieved the "Very Good" predicate in the assessment of AML & CFT implementation through the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing activities that were carried out by PPATK and PT Sucofindo.
3. Created a fully independent Risk Oversight Committee, which consisted of Independent Commissioners and Independent Parties.
4. In implementing corporate social responsibility activities, the Bank continues to enhance its partnership with various parties. In 2023, the Bank has contributed to achieving SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, and SDGs #17.

2024

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG diantaranya dengan penerbitan Kebijakan Kode Etik dan Pelindungan Konsumen & Masyarakat dan juga Kebijakan Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim.
2. Meraih nilai FIR ML/TF PT Bank JTrust Indonesia di tahun 2024 sebesar 9.14 yang masuk dalam kategori "Sangat Baik" dalam hasil pelaksanaan *assessment Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang telah diselenggarakan oleh PPATK.
3. Bank membentuk enam gugus tugas di bawah Komite Keberlanjutan, yaitu (1) Peraturan Internal; (2) Pengembangan Produk dan Layanan; (3) Peningkatan Kapasitas Karyawan; (4) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Komunikasi; (5) Operasional Hijau; dan (6) Perencanaan dan Pelaporan.
4. Bank juga sudah memiliki Kebijakan Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim yang digunakan sebagai dasar dalam implementasi Keuangan Keberlanjutan.

1. Built and improved GCG infrastructure, including by issuing the Code of Ethics and Consumer & Community Protection Policy as well as the Sustainable Policy and Climate Change Mitigation.
2. Achieved PT Bank JTrust Indonesia's FIR ML/TF score in 2024 of 9.14 which was categorized as "Very Good" in the results of the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing assessment carried out by PPATK.
3. The Bank has set up six task forces under the Sustainability Committee, namely (1) Internal Regulations; (2) Product and Service Development; (3) Employee Capacity Building; (4) Corporate Social Responsibility and Communication; (5) Green Operations; and (6) Planning and Reporting
4. The Bank also has a Sustainability Policy and Climate Change Mitigation, which is used as a basis for implementing Sustainable Finance.

Fokus Penerapan/Penyempurnaan Tata Kelola Bank pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, Bank berfokus pada penerapan serta penyempurnaan tata kelola, di antaranya sebagai berikut:

1. Pembaruan Kebijakan Risk Appetite dan Risk Tolerance yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2024;
2. Pembaruan Kebijakan Teknologi Informasi yang ditetapkan tanggal 1 Februari 2024;
3. Pembaruan Kebijakan Remunerasi yang ditetapkan tanggal 5 Maret 2024;
4. Pembaruan Kebijakan Larangan Transaksi Orang Dalam yang ditetapkan tanggal 3 April 2024;
5. Pembaruan Kebijakan Tata Kelola yang Baik yang ditetapkan tanggal 2 Mei 2024;
6. Pembaruan Kebijakan *Human Capital* yang ditetapkan tanggal 8 Mei 2024;
7. Pembarun Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang ditetapkan Tanggal 5 Juli 2024;
8. Pembaruan Kebijakan Perkreditan Bank yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2024;
9. Kebijakan Baru yaitu Kebijakan Kode Etik dan Pelindungan Konsumen & Masyarakat yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2024;
10. Pembaruan Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang ditetapkan tanggal 10 September 2024;
11. Kebijakan baru yaitu Kebijakan Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim yang berlaku Tanggal 30 September 2024;
12. Pembaruan Kebijakan Hukum PT Bank JTrust Indonesia yang ditetapkan tanggal 1 November 2024;
13. Pembaruan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada Januari 2024;
14. Pembaruan Deklarasi Anti Fraud di November 2024.

Penyempurnaan tata kelola tersebut didukung oleh berbagai inisiatif yang dilakukan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Terus menumbuhkan komitmen manajemen dalam penerapan tata kelola Bank secara menyeluruh pada setiap lini organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan seluruh pemangku kepentingan.
b. Berupaya untuk meningkatkan kualitas perbaikan dalam proses perkreditan secara *end-to-end* dan penerapan risiko operasional yang lebih memadai.
c. Berupaya untuk meningkatkan penerapan risiko yang lebih memadai dalam proses pemberian keputusan penyaluran kredit oleh komite kredit terutama kepada debitur besar.

Focus on the Implementation/Improvement of Bank Governance in 2024

In 2024, the Bank focused on the implementation and improvement of governance, including the following:

1. Update the Risk Appetite and Risk Tolerance Policy established on January 31, 2024;
2. Update to the Information Technology Policy established on February 1, 2024;
3. Update to the Remuneration Policy established on March 5, 2024;
4. Update to the Insider Trading Prohibition Policy established on April 3, 2024;
5. Update to the Good Governance Policy established on May 2, 2024;
6. Update to the Human Capital Policy established on May 8, 2024;
7. Update to the Information Security Management System Policy established on July 5, 2024;
8. Update to the Bank Credit Policy established on August 15, 2024;
9. New Policy, the Code of Ethics and Consumer & Community Protection Policy, established on August 15, 2024;
10. Update to the General Risk Management Policy established on September 10, 2024;
11. New policy, the Sustainable and Climate Change Mitigation Policy, effective on September 30, 2024;
12. Update to PT Bank JTrust Indonesia's Legal Policy established on November 1, 2024;
13. Renewal of the Remuneration and Nomination Committee Charter established on January 2024;
14. Update on the Anti-Fraud Declaration in November 2024.

The improvement of governance is supported by various initiatives, as elaborated below:

a. Continued to grow the management's commitment in implementing Bank governance thoroughly in every line of organization to provide added value for the Bank and all stakeholders.
b. Strived to improve the quality of improvements in the end-to-end credit process and more adequate implementation of operational risks.
c. Strived to increase more adequate risk implementation in the decision-making process for loan disbursements by the credit committee, especially to large debtors.

d. Berupaya memperbaiki kualitas fungsi *dual control* dalam memproses transaksi nasabah sehingga dapat memitigasi potensi risiko fraud.
e. Dengan adanya sistem core banking baru, Bank senantiasa berupaya memastikan bahwa pengelolaan infrastruktur TI telah dilaksanakan secara memadai dan optimal.
f. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain:
   - Memperbaharui Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
   - Menerbitkan, mengkaji ulang dan mengkinikan kebijakan, SOP, Surat Keputusan Direksi, dan regulasi internal lainnya secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator terbaru dan/atau kebutuhan kebijakan internal Bank yang berlaku serta mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui media komunikasi e-mail maupun aplikasi internal Bank yang tersedia.
   - Menerbitkan kebijakan baru terkait Kode Etik Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
   - Menerbitkan Kebijakan Baru terkait Kebijakan Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim.
   - Memperbaharui struktur organisasi Bank yang disesuaikan dengan kondisi dan strategi Bank saat ini, lingkup kewenangan dan deskripsi pekerjaan di masing-masing unit kerja/divisi.
   - Reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan governance process.
   - Dalam RUPS, pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (voting) secara individual pada masing-masing agenda rapat.
g. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan dengan melaksanakan uji kompetensi/sertifikasi manajemen risiko (berkelanjutan), sertifikasi *treasury*, sertifikasi auditor, Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan training secara internal (inhouse training) yaitu Materi *program Awareness* dan *Culture* melalui E-Learning mengenai: APU PPT,Smart AML, Anti Fraud, Budaya Sadar Kepatuhan, Operation Cabang (Branch Operation), Manajemen Risiko dan Risk Awereness (perkreditan dan operasional), *IT risk awareness, anti-fraud awareness*, compliance awareness, APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), melakukan induction session bagi karyawan baru, melakukan coaching study session di kantor cabang, pengisian coaching

d. Strived to improve the quality of dual control function in processing customer transactions to mitigate fraud risk potentials.
e. With the new core banking system, the Bank continued to ensure that IT infrastructure management has been implemented adequately and optimally.
f. Built and improved GCG infrastructure, which includes:
   - Updated the Remuneration and Nomination Committee Charter.
   - Published, reviewed, and updated policies, SOPs, Directors' Decrees, and other internal regulations periodically in accordance with the latest regulatory provisions and/or applicable internal Bank policy requirements and are easily accessible to all employees via e-mail communication or available internal Bank applications.
   - Issued new policies regarding the Code of Ethics for Consumer and Community Protection.
   - Issued New Policies related to Sustainable Policies and Climate Change Mitigation.
   - Updated the Bank's organizational structure to suit the Bank's current conditions and strategy, scope of authority and job descriptions in each work unit/division.
   - Continuous reorganization in an effort to increase competitiveness while being guided by the prudential principles and governance process.
   - At the GMS, shareholders could vote individually on each meeting agenda.
g. Continuous improvement of Human Resources quality and competency by carrying out competency test/risk management certification (ongoing), treasury certification, auditor certification, Payment System and Rupiah Money Management Certification according to applicable regulatory provisions. Implementation of inhouse training includes Awareness and Culture program material through E-Learning regarding: APU PPT, Smart AML, Anti Fraud, Compliance Awareness Culture, Branch Operations, Risk Management and Risk Awareness (credit and operations), IT risk awareness, anti-fraud awareness, compliance awareness, APU-PPT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism), induction sessions for new employees, coaching study sessions in branches, filling out coaching forms by divisions/work units periodically and implementing a Performance Management

form oleh divisi/unit kerja secara periodik dan implementasi Performance Management System untuk menilai KPI (*key performance indicator*) karyawan yang dikoordinasikan oleh Human Capital Division, Sedangkan pelaksanaan training secara eksternal Training berupa Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, Training terkait Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan peran Industri Keuangan guna Pencegahan Green Financial Crime dan Tindak Pidana Lainnya maupun penerapan program APU, PPT&PPSPM serta Proses Audit, Forum Group Discussion (FGD) "*From Risk to Reliability: Mitigating Cyber Threats and Enhancing Data Quality* maupun Workshop Digital Forensik di Sektor Jasa Keuangan.

h. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan di divisi/unit kerja dan kantor cabang atas ketentuan internal Bank melalui *e-mail blast, garoon blast*, untuk meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) dan kesadaran kepatuhan (*compliance awareness*). Hal ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan yang merupakan bagian dari budaya perusahaan.

i. Penguatan fungsi *quality control* (QC) - RMD di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Pusat untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.

j. Memperkuat teknologi informasi Bank (TI) dengan penggunaan sistem Core Banking Baru untuk meningkatkan kualitas ketersediaan layanan teknologi informasi.

k. Bank memiliki DMS Reminder Internal Regulation Application sebagai sistem internal yang mengawasi dan mengingatkan secara otomatis melalui e-mail untuk mengkaji atau melakukan pengkinian ketentuan internal 3 bulan sebelum jatuh tempo masa review 2 tahunan kepada seluruh PIC Divisi yang bertanggung jawab terhadap ketentuan internal Bank.

l. Bank berperan aktif dalam membantu PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melalui pemanfaatan Aplikasi SIGAP dan APOLO milik OJK, SIPENDAR dan PEP Database milik PPATK. Serta berperan aktif dalam Collaborative Analyst Team (CAT) yang dibentuk oleh PPATK dalam rangka melakukan pemantauan transaksi terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024. serta pemantauan aliran dana dari hasil tindak pidana perjudian daring (judi online).

System to assess employee KPIs (key performance indicators) coordinated by the Human Capital Division Meanwhile, external training includes the Risk Management Certification Refreshment, training related to Suspicious Financial Transactions Identification, the role of Financial Industry in preventing Green Financial Crime and other crimes, as well as implementing APU, PPT & PPSPM programs and Audit Processes, Forum Group Discussion (FGD) "From Risk to Reliability: Mitigating Cyber Threats and Enhancing Data Quality" and Digital Forensics Workshop in the Financial Services Sector.

h. Conducted education and dissemination to employees in divisions/work units and branches regarding the Bank's internal regulations via e-mail blast, garoon blast, to increase risk awareness and compliance awareness. It was expected to increase understanding and awareness of compliance culture which is part of the company culture.

i. Strengthening the quality control (QC) function - RMD in each Branch Office and Head Office to monitor and ensure that the implementation of transactions is in accordance with applicable policies and SOPs.

j. Strengthened the Bank's information technology (IT) by using the new Core Banking system to improve the quality of information technology service availability.

k. The Bank has a DMS Reminder Internal Regulation Application as an internal system that monitors and reminds automatically via e-mail to review or update internal regulations 3 months before the 2-year review period is due to all Division PICs in charge of the Bank's internal regulations.

l. The Bank was active in assisting PPATK and Law Enforcers to eradicate money laundering and preventing the financing of terrorism, through the use of the OJK's SIGAP and APOLO applications, SIPENDAR and PPATK's PEP Database. The Bank was also active in the Collaborative Analyst Team (CAT) formed by PPATK in order to monitor transactions related to the preparation and implementation of the 2024 General Election and Regional Election simultaneously, as well as monitoring the flow of funds from the proceeds of online gambling.

m. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan Forum Group Discusion yang diselenggarakan oleh OJK dan PPATK antara lain diseminasi Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing tahun 2024, penilaian indeks efektifitas kinerja PPATK tahun 2024.
n. Menetapkan Pilar Keberlanjutan dan memperkuat kapasitas Gugus Tugas Keberlanjutan.

o. Melaksanakan 29 kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada 3 (tiga) sektor yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN GCG BANK

Bank melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penilaian GCG ditujukan untuk menghasilkan peringkat tata kelola yang menjadi faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Bank melakukan penilaian sendiri secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek dalam sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
   Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. Proses Tata Kelola
   Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
   Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

m. Actively participated in socialization activities and Group Discussion Forums organized by OJK and PPATK, including the dissemination of Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing in 2024, assessment of the PPATK performance effectiveness index in 2024.
n. Established the Sustainability Pillars and strengthened the capacity of Sustainability Task Force.
o. Carried out 29 corporate social responsibility (CSR) activities focused on 3 (three) sectors: namely social, economic, and environmental.

REPORT OF SELF-ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GCG IMPLEMENTATION

The Bank self-assessed the implemented of governance principles in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The GCG assessment is intended to produce a governance rating which becomes a factor in determining the Bank's soundness level in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016.

Assessment Procedure

Based on OJK regulations, the Bank conducted a comprehensive and structured self- assessment, integrated into 3 (three) aspects of the governance system:

1. Governance Structure
   Assessment on governance structure aimed to evaluate the adequacy of Bank's governance structure and infrastructure to ensure the good governance principles process creates an outcome in line with stakeholders' expectations.
2. Governance Process
   Assessment on governance process aimed to evaluate the effectiveness of good governance principles implementation process, supported by adequate Bank's governance structure and infrastructure in order to get outcome that is in line with stakeholders' expectations.
3. Governance Outcome
   Assessment on governance outcome aimed to evaluate the Bank's outcome quality (covering qualitative and quantitative aspects), which is the result of good governance principles implementation process supported by adequate Bank's governance structure and infrastructure.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri yang dilakukan Bank mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank;

Selain itu, Bank juga melakukan penilaian sendiri yang mencakup informasi lain terkait penerapan tata kelola Bank di luar 11 faktor penilaian tersebut. Hasil akhir penilaian implementasi tata kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas *self-assessment* pada kertas kerja 11 faktor penilaian penerapan tata kelola yang diberikan oleh divisi/unit kerja terkait dan komite di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti internal audit, *risk management*, *human capital*, compliance dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi tata kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem tata kelola dan kualitas hasil tata kelola Bank.

Assessment Criteria

The Bank's self-assessment includes 11 (eleven) governance implementation assessment factors:

1. Implementation of the Board of Directors' duties, responsibilities, and authorities;
2. Implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
3. Comprehensiveness and implementation of committees' duties;
4. Resolutions of conflicts of interest;
5. Implementation of the Bank's compliance function;
6. Implementation of the internal audit function;
7. Implementation of the external audit function;
8. Implementation of risk management including internal control system;
9. Fund provision to related parties and provision of large exposure;
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, governance implementation report, and internal reporting;
11. The Bank's strategic plan.

In addition, the Bank conducted self-assessments that included other information related to the Bank's governance implementation beyond the 11 assessment factors. Final outcome of the Bank's governance implementation assessment is based on the verification of self-assessment on Working Paper of 11 assessment factors of governance principles given by related divisions/work units and committees under the Board of Commissioners as selected respondents by considering significant findings in the Bank, such as internal audit, risk management, human capital, compliance and other data/information, including regulator findings.

Parties Conducting Assessment

Self-assessment on the Bank's governance implementation involved the Board of Commissioners, Board of Directors, Independent Parties, Executive Officers, and independent units at the Bank in order to get a comprehensive and structured assessment on the effectiveness of the governance system and the quality of the Bank's governance.

Hasil dan Peringkat Penilaian

Hasil dan peringkat penilaian sendiri penerapan tata kelola pada tahun 2024 adalah:

Assessment Result and Ranking

The self-assessment results and rating for the governance implementation in 2024 were:

Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2024 Self-Assessment Results of Governance Implementation in the Second Half/As of December 2024		
Peringkat Rank	Definisi Peringkat	Rating Description
2	Baik	Good

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

General Meeting of Shareholders (GMS), Implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors Duties

Pada tahun 2024, Bank menyelenggarakan satu kali RUPS yaitu RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 28 Juni 2024, dengan agenda termasuk persetujuan laporan keuangan tahun sebelumnya, penetapan gaji tahun 2024, penunjukan Kantor Akuntan Publik, persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pengangkatan anggota Direksi.

In 2024, the Bank held one GMS, which was the Annual GMS (AGMS) on 28 June 2024, with the following agenda: approval of the previous year's financial statements, determination of salaries for 2024, appointment of Public Accounting Firm, approval of the amendment to the Company's Articles of Association, and reappointment of BOD members.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola bank, yang memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang terbaru.

Hak, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Bank memiliki tiga jenis saham, yaitu Saham Seri A, Seri B, dan Seri C. Pemegang saham dari ketiga seri tersebut memiliki hak yang sama, di mana setiap saham berhak memperoleh 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham antara lain:

1. Hak atas saham miliknya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Bank's governance structure, possessing rights and authority that are not held by the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits set by applicable laws and the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk

The implementation of the Bank's GMS is carried out based on several provisions, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on the Planning and Implementation of GMS for Public Companies.
3. The latest Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Rights, Authorities and Responsibilities of Shareholders

The Bank has three types of shares: Series A, Series B, and Series C. Shareholders of all three series have equal rights, with each share entitling the holder to one (1) vote.

The rights of Shareholders include:

1. The rights to the shares they owned so that shareholders' rights are protected and can be exercised in accordance with the laws and regulations and the Bank's Articles of Association.
2. The opportunity to submit a request to hold a GMS by 1 (one) shareholder or more, who represents 1/10 (one tenth) or more of total shares with voting rights.
3. The opportunity to propose meeting agenda, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors by 1 (one) or more shareholders that represent 1/20 (one twentieth) or more of total shares with voting rights.
4. Shareholders or their representatives have the rights to attend GMS, ask questions and/or give opinions and exercise their voting rights in the decision-making process.
5. Being treated equally by PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Bank serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Bank.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Bank beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Bank.

Tanggung jawab Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang utama (ultimate shareholders) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
   a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Shareholders' Authority include:

1. Approve and accept the Bank's Annual Report and ratify the Bank's Annual Financial Report.
2. Appoint and discharge members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Determine salary or honorarium and other benefits, as well as tantiem for the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appoint Public Accounting Office (KAP) and Public Accountant that are listed in the Financial Services Authority (OJK) to audit the Bank's Annual Financial Report, as well as determine the amount of honorarium and other requirements.
5. Make decisions regarding amendments to the Articles of Association, merger, consolidation, acquisition, separation, dissolution, and liquidation of the Bank.

Responsibilities of the Shareholders include:

1. Controlling shareholders should be able to:
   a. Give attention to the interests of minority shareholders and stakeholders, in accordance with applicable laws and regulations.
   b. In the event of any alleged violation of laws and regulations or as requested by the relevant authorities, the names of controlling shareholders up to the beneficial owner must be disclosed to law enforcement agencies, especially information regarding the Bank's ultimate shareholders, or information requested by the relevant authorities.
2. Controlling shareholders, who own shares in several Public Companies, must be transparent in terms of accountability and relations between Public Companies.
3. Proper use of the rights of minority shareholders must be in accordance with the Bank's Articles of Association and the laws and regulations.
4. Shareholders should be able to:
   a. Separate the ownership of assets of Public Company with ownership of his/her personal assets.
   b. Separate functions as shareholders and as members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, if the said shareholders serve as members of one of the two organs.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2024

Selama tahun 2024, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yaitu: RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 28 Juni 2024.

General Meeting of Shareholders in 2024

In 2024, the Bank held 1 (one) GMS, which was the Annual GMS (AGMS) on 28 June 2024.

Proses Penyelenggaraan RUPST 31 Mei 2023 Annual GMS on 31 May 2023	
Tanggal & Waktu Date & Time	28 Juni 2024 pukul 14.22 WIB s.d 15.09 WIB 28 Juni 2024 pukul 14.22 WIB s.d 15.09 WIB
Lokasi Location	Ruang Pertemuan Candi Mendut, Lantai 2 Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 Candi Mendut Meeting Room, 2nd Floor Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Kuorum Quorum	RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 17.845.132.941 saham atau setara 98,5379% % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. The AGMS was attended by Shareholders or their Proxies which represented a total of 17,845,132,941 shares orequivalent to 98.5379% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
Pimpinan RUPS Chairman of AGMS	Benny Siswanto selaku Komisaris Independen Benny Siswanto as Independent Commissioner
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including President Commissioner	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Iwan Nataliputra - Benny Siswanto All members of the Board of Commissioners were present physically: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Iwan Nataliputra - Benny Siswanto
Kehadiran Dewan Direksi, termasuk Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I Hartadi - Helmi A Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra All members of the Board of Directors were present physically: - Ritsuo Fukadai - Felix I Hartadi - Helmi A Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra
Kehadiran Komite Audit Presence of Audit Committee	Komite Audit hadir secara fisik The Audit Committee was present physically
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat Number of shareholders who raised questions and/or gave opinions	Seluruh pemegang saham atau kuasa dari pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat. All shareholders or their proxies were given opportunities to ask questions and/or express their opinions on each AGM agenda, but none of them asked questions and/or gave opinions.

Tahapan Pelaksanaan RUPST 28 Juni 2024

Bank mengadakan RUPST pada tanggal 28 Juni 2024, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

Implementation Order of Annual GMS on 28 June 2024

The Bank held AGMS on 28 June 2024, with the following schedule for notification, announcement, invitation, implementation, and submission of AGMS resolutions:

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Realisasi Realizations
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Tanggal 22 Mei 2024 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPST yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Notification of AGMS to Regulators	On 22 May 2024, the Company submitted a notification letter of AGMS to OJK	Notification on the date and agenda of AGMS which is disclosed in a clear and detailed manner, and submitted no later than 5 (five) working days prior to the Announcement dat of the AGMS to the public.
Pengumuman RUPST	Tanggal 22 Mei 2024 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id)	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPST. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
AGMS Announcement	Announced on 22 May 2024 2023 in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange (IDX) website (via e-Reporting), the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank. co.id	Submitted through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's official website no later than 14 (fourteen) days before the date of the AGMS invitation. Proof of the Announcement Advertisement is submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to the IDX on the same day as the date of the advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST	Tanggal 6 Juni 2024 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id).	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPST dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Invitation and explanation of AGMS agenda	Announced on on 6 June 2024 in Indonesian and English through the IDX website (via e-Reporting), the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website via the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id.	Submitted no later than 21 (twenty one) days prior to the GMS. Proof of Announcement Advertisement is submitted to OJK within 2 (two) working days at the latest after GMS announcement and submitted to IDX on the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPST	Tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Candi Mendut Meeting Lantai 2 Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220.	-
Implementation of AGMS	On 28 June 2024 at Candi Mendut Meeting Room 2nd Floor Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220.	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Tanggal 2 Juli 2024 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id).	Pengumuman ringkasan risalah RUPST diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Minutes of the AGMS	Announced on 2 July 2024 in Indonesian and English through the IDX website (via e-Reporting), the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website via the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id.	Announcement of AGMS minutes is announced in 2 (two) working days at the latest, after the GMS was held

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Realisasi Realizations
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	Tanggal 2 Juli 2024 melalui situs web OJK dan BEI (melalui e-Reporting) dan situs web Bank (www.jtrustbank.co.id).	Laporan hasil RUPST disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPST dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPST disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPST dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Report to Regulators and submission of proof of advertisement of AGMS Minutes	Submitted on 2 July 2024 through OJK and IDX website (through e-Reporting) and the Company's website www.jtrustbank.co.id.	Report of AGMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the AGMS implementation and completed with a resume of AGMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of AGMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of AGMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPST	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 16 Juli 2024.	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan.
Minutes of AGMS	Deed of AGMS Minutes was submitted to OJK on 16 July 2024	Deed of AGMS Minutes is submitted to OJK no later than 30 (thirty) working days after the AGMS was held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan RUPST. Pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan untuk setiap agenda RUPST. Prosedur pemungutan suara dan perhitungan suara dalam RUPST telah dijelaskan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat, yang diumumkan atau diunggah di situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPST dimulai.

Voting and Vote Counting Mechanism

The decision-making mechanism at the AGMS is carried out through deliberation for consensus. However, if consensus is not reached, a voting process will be carried out to make decisions in the AGMS. The voting is conducted by Shareholders or their proxies.

Voting is conducted for each agenda of the AGMS. The procedures for voting and vote counting in the AGMS are detailed in the Meeting Rules, which are announced or uploaded on the Bank's website along with the AGMS invitation and read by the moderator before the AGMS begins.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPST 28 Juni 2024, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

(i) Notaris Diharini, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan

(ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Independent Party for Vote Counting

At the AGMS on 28 June 2024, the Bank has appointed independent parties, namely:

(i) Notary Diharini, S.H., M.Kn., as Public Notary, and

(ii) PT Sharestar Indonesia as Security Administration Bureau
to count and/or validate the quorum as well as the voting at the AGMS, either in person or electronically, in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of GMS for Publicly-listed Companies Electronically.

Keputusan RUPST 28 Juni 2024

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"), dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0168404 tanggal 4 Juli 2024 dan No. AHU-AH.01.09-0222189 tanggal 4 Juli 2024.

RUPST tahun 2024 memiliki beberapa agenda dengan hasil keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

AGMS Resolutions on 28 June 2024

All decisions have been ratified in:

Deed No. 251 dated 28 June 2024, drafted by and before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in the Administrative City of South Jakarta, and has received notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. Surat No. AHU-AH.01.03-0168404 tanggal 4 Juli 2024 dan No. AHU-AH.01.09-0222189 dated 4 July 2024

The 2024 AGMS has several agendas with the following realized decisions:

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 1st Agenda Approval of the Annual Report and Financial Report of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 April 2024.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2024 untuk Laporan Keuangan dan 15 Mei 2024 untuk Laporan Tahunan Perseroan.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved and accepted the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023, including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company, and approve the financial statements of the Company ending 31 December 2023 audited by Public Accountant Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & partners (BDO Indonesia) with the opinion of Unmodified Audit (formerly "Unqualified") as stated in the report dated 30 April 2024.	Has been realized in 2024. The Company's Financial Report and Annual Report for the 2023 fiscal year have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Stock Exchange on 6 May 2024 for the Financial Report and 15 May 2024 for the Company's Annual Report.
Agenda ke-2 Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 2nd Agenda Determination of salaries/honorarium, including facilities and allowances for Financial Year 2024 to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil keputusan RUPST yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp31.049.159.020
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the determination of total salaries or honorarium, including facilities and allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 financial year with an estimate of IDR IDR 40,000,000,000,- (forty billion Rupiah) considering the results of evaluation and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company..	Has been realized in 2024. According to the AGMS resolution that authorized the Company's Board of Commissioners based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee to determine the amount of salaries for members of the Board of Directors, honorarium for members of the Board of Commissioners, as well as bonuses and other benefits for the 2024 Fiscal Year, amounting to Rp31,049,159,020
Agenda ke-3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3rd Agenda Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the year ending 31 December 2024.		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Pada tanggal 11 Oktober 2024, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Akuntan Publik (AP) partner penanggung jawab (partner in charge) adalah Riva Utama Winata, CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024. Berdasarkan persetujuan RUPST telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Riva Utama Winata, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.1692 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.AP-10/PB.122/2021 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2024 untuk tahun buku 2024.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2024 based on recommendations from the Audit Committee and determined a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reasons, cannot complete the audit on the Company's financial statement for the fiscal year ending 31 December 2024.	Has been realized in 2024. On 11 October 2024, the Board of Commissioners with recommendations from the Audit Committee reappointed the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & rekan. The Public Accountant (AP) partner in charge was Riva Utama Winata, CPA who conducted an audit of the Company's Financial Report as of 31 December 2024. Based on the GMS resolution, a Public Accountant (AP) has been appointed, namely Riva Utama Winata, CPA with AP Registration Number from the Minister of Finance No.AP.1692 and/or a Public Accountant Firm, namely Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & rekan with Registration Certificate Number STTD.AP-10/PB.122/2021 to audit annual historical financial information on 31 December 2024 for the 2024 fiscal year.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-4 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 4th Agenda Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association.		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	1. Menyetujui perubahan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Perubahan anggaran dasar telah disahkan dalam Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	1. Approved the amendment of Articles 11 to 16 of the Company's Articles of Association in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) on the Implementation of Governance for Commercial Banks. 2. Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to formalize the resolutions of this Meeting, including to prepare and restate all provisions of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed, and to submit requests for approval and notification of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as to take any necessary actions related to the amendment of the Articles of Association.	Deed No. 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-5 Pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. 5th Agenda Reappointment of Mr. Ritsuo Fukadai as President Director of the Company		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Ritsuo Fukadai as President Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-6 Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. 6th Agenda Reappointment of Masayoshi Kobayashi as the Deputy President Director of the Company.		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Masayoshi Kobayashi as Deputy President Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-7 Pengangkatan kembali Bapak Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan. 7th Agenda Reappointment of Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono as Director of the Company		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono as Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-8 Pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. 8th Agenda Reappointment of Mr. Helmi A. Hidayat as Director of the Company		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Helmi A. Hidayat as the Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-9 Pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. 9th Agenda Reappointment of Mr. Cho Won June as Director of the Company		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Cho Won June as Director of the Company effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-10 Pengangkatan kembali Bapak Raden. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. 10th Agenda Reappointment of Mr. Raden. Djoko Prayitno as Director of the Company		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Raden Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Raden Djoko Prayitno as Director of the Company effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-11 Pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. 11th Agenda Reappouintment of Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company		
Setuju 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	Approved the reappointment of Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Has been realized in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Diharini, S.H.,M.Kn., a Notary in Jakarta.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Bank telah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 31 Mei 2023 dan RUPSLB pada tanggal 3 Maret 2023. Hasil keputusan RUPS telah dilaporkan kepada OJK, diumumkan pada situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs web Bank (www.jtrustbank.co.id).

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2023 meliputi:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
   Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 31 Mei 2023 umumnya sudah terealisasi.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
   Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Maret 2023 umumnya sudah terealisasi.

GMS Resolutions in Previous Year

The Bank has held AGMS on 31 May 2023 and an EGMS on 3 March 2023. The GMS resolutions have been reported to OJK, announced on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), as well as the Bank's website (www.jtrustbank.co.id).

Information about GMS resolutions in 1 (one) year throughout 2023 includes:

1. Annual GMS (AGMS)
   All resolutions at the Annual GMS on 31 May 2023 have generally been realized.
2. Extraordinary GMS (EGMS)
   All resolutions at the Extraordinary GMS on 3 March 2023 have generally been realized.

RUPST
AGMS

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 **1st Agenda** Approval of the Annual Report and Financial Report of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2022		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak Memberikan Suara** Tidak ada	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2023.	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2023 untuk Laporan Keuangan dan 28 April 2023 untuk Laporan Tahunan Perseroan.
Agree 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Approved and accepted the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022, including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company, and approve the financial statements of the Company ending 31 December 2022 audited by Public Accountant Firm Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) with the opinion of Unmodified Audit (formerly "Unqualified") as stated in the report dated 24 March 2023.	Has been realized in 2023. The Company's Financial Report and Annual Report for the 2022 fiscal year have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Stock Exchange on 28 Maret 2023 for the Financial Report and 28 April 2023 for the Company's Annual Report.
Agenda ke-2 Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan **2nd Agenda** Determination of salaries/honorarium, including facilities and allowances for Financial Year 2023 to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak Memberikan Suara** Tidak ada	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil keputusan RUPST yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp31.049.159.020
Agree 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Approved the determination of total salaries or honorarium, including facilities and allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2023 financial year with an estimate of IDR IDR 40,000,000,000,- (forty billion Rupiah) considering the results of evaluation and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.	Has been realized in 2023. In accordance with the AGMS resolution the amount of salaries for members of the Board of Directors, honorarium for members of the Board of Commissioners, as well as allowances and other benefits for the 2023 Fiscal Year, amounted to Rp31,049,159,020

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-3 **Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.** **3rd Agenda** **Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the year ending 31 December 2023.**		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak Memberikan Suara** Tidak ada	Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Pada tanggal 18 Agustus 2023, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia. Akuntan Publik (AP) partner penanggung jawab (partner in charge) adalah Tjiong Eng Pin, SE, CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023. Berdasarkan persetujuan RUPST telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Tjiong Eng Pin, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.0517 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.AP-19/PB.122/2018 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 untuk tahun buku 2023.
Agree 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2023 based on recommendations from the Audit Committee and determined a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reasons, cannot complete the audit on the Company's financial statement for the fiscal year ending 31 December 2023.	Has been realized in 2023. On 18 August 2023, the Board of Commissioners with recommendations from the Audit Committee reappointed the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia. The Public Accountant (AP) partner-in-charge was Tjiong Eng Pin, CPA who conducted an audit of the Company's Financial Report as of 31 December 2023. Based on the GMS resolution, a Public Accountant (AP) has been appointed, namely Tjiong Eng Pin, CPA with AP Registration Number from the Minister of Finance No.AP.0517 and/or a Public Accountant Firm, namely Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) with Registration Certificate Number STTD.AP-19/PB.122/2018 to audit annual historical financial information on 31 December 2023 for the 2023 fiscal year.
Agenda ke-4 Pengangkatan Kembali Bapak Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan **4th Agenda** Re-appointment of Mr. Nobiru Adachi as President Commissioner of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak Memberikan Suara** Tidak ada	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agree 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Approved the reappointment of Mr. Nobiru Adachi as President Commissioner the Company . effective from the closing of the meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment of members of the Board of Commissioners.	Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of Management of the Company have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-5 Pengangkatan Kembali Bapak Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan **5th Agenda** Reappointment of Mr. Nobuiku Chiba as Commissioner-of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Nobuiku Chiba as Commissioner of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment of members of the Board of Commissioners.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-6 Pengangkatan Kembali Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan **6th Agenda** Reappointment of Mr. Iwan Nataliputra as Independent Commissioner of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Iwan Nataliputra as Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment of members of the Board of Commissioners.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-7 Pengangkatan Kembali Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan. **7th Agenda** Reappointment of Mr. Benny Siswanto as Independent Commissioner of the Company.		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Benny Siswanto as Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment of members of the Board of Commissioners.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-8 Pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan **8th Agenda** Reappointment of Mr. Ritsuo Fukadai as President Director of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Ritsuo Fukadai as President Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-9 Pengangkatan kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan **9th Agenda** Reappointment of Mr. Felix I. Hartadi as Director of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Felix I. Hartadi as Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-10 Pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan **10th Agenda** Reappointment of Mr. Helmi A. Hidayat as Director of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Helmi A. Hidayat as the Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-11 Pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. **11th Agenda** Reappointment of Mr. Cho Won June as Director of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Cho Won June as Director of the Company effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.
Agenda ke-12 Pengangkatan kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan **12th Agenda** Reappointment of Mr. R. Djoko Prayitno as Director of the Company		
Setuju **17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat** **Tidak Setuju** **Tidak ada** **Abstain/Tidak** **Memberikan Suara** **Tidak ada** **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. R. Djoko Prayitno as Director of the Company effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta.
Agenda ke-13 Pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. **13th Agenda** Reappouintment of Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada **Agree** 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** None	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. Approved the reappointment of Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company, effective from the closing of the meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Company's Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-14 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan **14th Agenda** Approval of Changes in the composition of Management		
Setuju 17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat **Tidak Setuju** Tidak ada **Abstain/Tidak** Memberikan Suara Tidak ada	1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan bersamaan dengan ditutupnya Rapat ini. Maka Bapak Bijono Waliman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bijono Waliman atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Bapak Bijono Waliman atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan). 3. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: **DEWAN KOMISARIS:** Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto **DIREKSI:** Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi* Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra * Pengangkatan Bapak Masayoshi Kobayashi berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa 3 Maret 2023 sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Telah direalisasikan di tahun 2023. Akta No. 187 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agree 17,845,132,941 shares or 100% of all shares with voting rights at the Meeting **Disagree** None **Abstain/Not Voting** Non	1. Approved the end of Mr. Bijono Waliman's office term as the Director of the Company at the same time as the closing of this Meeting, Thus, Mr. Bijono Waliman will no longer be the Director of the Company. The Company would like to thank Mr. Bijono Waliman for the contributions he had made while serving in the Company. 2. Provided the release and discharge of responsibilities to Mr. Bijono Waliman for his management actions that have been carried out to the extent that these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company which will be approved and ratified at the Meeting and was not a criminal act that was detrimental to the Company and the following conditions were met: a. Had managed the Company as a member of the Board of Directors in good faith and with prudence for the benefit of and in accordance with the aims and objectives of the Company, or had carried out supervisory and advisory duties as a member of the Board of Commissioners to the Board of Directors for the benefit of the Company in good faith, with prudence and in accordance with the aims and objectives of the Company; b. There was no violation of SOP of the Company or the applicable laws and regulations; c. The losses of the Company are not due to mistakes or negligence (if there is a loss to the Company). 3 Therefore, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors as of the close of this Meeting are as follow: **BOARD OF COMMISSIONERS:** President Commissioner: Nobiru Adachi Commissioner: Nobuiku Chiba Independent Commissioner: Iwan Nataliputra Independent Commissioner: Benny Siswanto **BOARD OF DIRECTORS:** President Director: Ritsuo Fukadai Vice President Director: Masayoshi Kobayashi* Director: Felix I. Hartadi Director: Helmi A. Hidayat Director: Cho Won June Director: R. Djoko Prayitno Director: Widjaja Hendra * The appointment of Mr. Masayoshi Kobayashi based on the resolution of the Extraordinary GMS on 3 March 2023 as Vice President Director of the Company which will be effective upon receiving OJK Fit & Proper approval as well as complying with the prevailing laws and regulations. 4. Granted power and authority to the he Board of Directors of the Companywith the rights of substitution to declare changes in Management of the Company in a separate Notarial Deed and convey the notification of change of data of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.	Has been realized in 2023. Deed No. 187 dated 31 May 2023, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the composition of the Management have also been ratified. The deed was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realizations
Agenda ke-15 Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas II - 2022 ("PUT II – 2022") dalam hal Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") **15th Agenda** Realization Report on the Use of Funds from the Limited Public Offering II - 2022 ("PUT II - 2022") with regards to the Capital Increase with Pre-emptive Rights ("PMHMETD")		
Tidak ada pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat ini bersifat sebagai laporan	Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana PUT II – 2022 Perseroan dengan tanggal laporan 31 Desember 202, terdapat dana yang masih tersisa sebesar Rp731.412.486.687,- Penggunaan Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil PUT II - 2022 per 31 Desember 2022 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Januari 2023.
There was no decision making because the Meeting Agenda is a report	Based on the RealizationReport on the Use of Funds from PUT II - 2022 as of 31 December 2022, remaining funds amounted to Rp731,412,486,687. The proceeds will be used to strengthen the capital structure in order to develop business through loan disbursement.	The Report on the Use of Proceeds from PUT II - 2022 as of 31 December 2022 has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) on 12 January 2023.

RUPSLB
EGMS

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation Results	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realization
Agenda ke-1 Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk halhal sebagai berikut: a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1st Agenda Approval of Capital Increase with Pre-emptive Rights ("PMHMETD") as referred to in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 in conjuction with POJK No. 14/POJK.04/2019 and Granting Power and Authority to Board of Directors of the Company for the following matters: a. Determine the number of shares offered through PMHMETD; b. Determine the PMHMETD exercise price; c. To carry out all actions for the implementation of PMHMETD by taking into account the applicable laws and regulations.		
Setuju 17.824.638.078 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. 2. Menyetujui penyetoran saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan mengkompensasi Dana Setoran Modal senilai Rp1.001.860.000.000, - (satu trilliun satu miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dalam PMHMETD melalui PUT III – 2023. 3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.	Belum terealisasi pada tahun 2023.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation Results	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realization
Agree 17,824,638,078 shares or 100% of all shares with voting rights that are present at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	1. Approve PMHMETD as referred to in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 in conjunction with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 to a maximum amount of 10,000,000,000 (ten billion) shares with a nominal value of IDR 100,- (one hundred Rupiah) per share. 2. Approve the payment of shares by the Major Shareholders of the Company; namely, J Trust Co., Ltd. in the implementation of HMETD which will be carried out by compensating Capital Deposit Funds in the amount of IDR 1,001,860,000,000,- (one trillion one billion eight hundred and sixty million Rupiah) in PMHMETD through PUT III – 2023. 3. Approve and grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the following: a. Determine the number of shares offered through PMHMETD; b. Determine the exercise price for PMHMETD; c. To carry out all actions for the implementation of PMHMETD by taking into account applicable laws and regulations. 4. Approve and grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to declare the results and changes to the Issued and Fully Paid-up Capital of the Company after the implementation of the PMHMETD.	Has not yet been realized in 2023
Agenda ke-2 Perubahan susunan pengurus Perseroan 2nd Agenda Changes in the composition of the Management		
Setuju 17.824.638.078 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju Tidak ada Abstain/Tidak Memberikan Suara Tidak ada	1. Menyetujui pengangkatan Bapak Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak diterimanya persetujuan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: **DEWAN KOMISARIS:** Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto **DIREKSI:** Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan persetujuan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Akta No. 28 tanggal 11 September 2023 dan telah didaftarkan kepada Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation Results	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realization
Agree 17,824,638,078 shares or 100% of all shares with voting rights that are present at the Meeting Disagree None Abstain/Not Voting None	1. Approved the appointment of Mr. Masayoshi Kobayashi as Vice President Director of the Company will be effective upon receiving OJK Fit & Proper approval as well as complying with the prevailing laws and regulations. 2. Therefore, composition of Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting is as follows: **BOARD OF COMMISSIONERS:** President Commissioner: Nobiru Adachi Commissioner: Nobuiku Chiba Independent Commissioner: Iwan Nataliputra Independent Commissioner: Benny Siswanto **DIRECTORS:** President Director: Ritsuo Fukadai Vice President Director: Masayoshi Kobayashi Director: Felix I. Hartadi Director: Helmi A. Hidayat Director: Cho Won June Director: Bijono Waliman Director: R. Djoko Prayitno Director: Widjaja Hendra With the condition that the appointment of Mr. Masayoshi Kobayashi as Vice President Director of the Company which will be effective upon receiving OJK Fit & Proper approval as well as complying with the applicable laws and regulations. 3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to declare changes in Management of the Company in a separate Notarial Deed and convey the notification of change of data of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.	Has been realized in 2023. Deed No. 28 dated 11 September 2023, which has been registered to the Ministry of Law and Human Rights and changes to the composition of the Company's Management have been ratified, both of which were made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.

Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia adalah sebagai berikut:

Shareholders

The Shareholders' composition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of 31 December 2024 based on reports from the Securities Administration Bureau PT Sharestar Indonesia was as follows:

No	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Nominal Value	%
I	Saham Seri A (Rp1.000, - per saham) | Series A Share (Rp1,000, - per share)			
	1. J Trust Co. Ltd	8.679.019.445	8.679.019.445.000	47,924
	2. J Trust Asia PTE LTD	467.700.928	467.700.928.000	2,583
	3. J Trust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	0,553
	4. Masyarakat	764.999.382	764.999.382.000	4,224
	Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	55,284
II	Saham Seri B (Rp7.800.000,- per saham) | Series B Share (Rp7,800,000, - per share)			
	1. J Trust Co. Ltd	27.033	210.857.400.000	0,000
	2. Masyarakat	256.468	2.000.450.400.000	0,001
	Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,002
III	Saham Seri C (Rp100,- per saham) | Series C Share (Rp100, - per share)			
	1. J Trust Co. Ltd	4.571.699.586	457.169.958.600	25,244
	2. J Trust Asia PTE LTD	3.030.681.061	303.068.106.100	16,735
	3. J Trust Investments Indonesia	312.121.213	31.212.121.300	1,723
	4. Masyarakat	183.295.648	18.329.564.800	1,012
	Subtotal	8.097.797.508	809.779.750.800	44,715
	Total Modal disetor | Total Paid-Up Capital	**18.109.922.009**	**13.032.928.550.800**	**100,000**

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Bank. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Bank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk" yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Dasar penyusunan piagam Dewan Komisaris adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

The Board of Commissioners is a governance body whose functions are to supervise the Bank's Board of Directors, both generally and/or specifically. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS), and results of their supervision are reported to the Shareholders.

Legal Basis

Legal basis which becomes the reference for setup and appointment of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations:

1. Laws of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) and OJK Circular Letter concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Regulation concerning Commercial Banks.
3. The Bank's Articles of Association.

Board of Commissioner Charter

The BOC Charter is stipulated as "Guideline and Code of Conduct of the Board of Commissioners Performance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk" that bind for every member of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioner can carry out the supervisory function efficiently, effectively, transparently, independently, and with accountability.

The basis for formulation of the Board of Commissioners charter is:

1. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which was then amended by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. Bank Indonesia Regulation Number 12/23/PBI/2010 concerning Fit and Proper Tests.

5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

5. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.
6. The Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
7. The Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
8. The Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines for the Audit Committee.
9. The Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Governance in Public Company.
10. The Financial Services Authority Circular Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.
11. The Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
12. The Financial Services Authority Regulation Number 17 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
13. The Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
14. The Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans.
15. The Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Functions.
16. The Financial Services Authority Regulation Number 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.
17. The Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2021 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 34 /POJK.03/2018 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions.
18. The Financial Services Authority Circular Number 9/SEOJK.03/2019 concerning Reassessment for Main Bank Parties.
19. The Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.

20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.
21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
22. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbaharui pada 20 Desember 2023 dan telah diunggah ke situs web Bank. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen (POL-CSD-03) di mana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dirinci. Kebijakan tersebut mengatur:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris

   a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
   b. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
   c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan mengevaluasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

20. The Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk including its amendments.
21. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) from the National Committee for Governance Policy (KNKG); And
22. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

The Board of Commissioners' Charter was updated on 20 December 2023 and has been uploaded to the Bank's website. Furthermore, the Board of Commissioners' Work Guidelines and Code of Conduct will be evaluated and updated periodically with reference to applicable laws and regulations.

Mechanism of Selection, Appointment, Discharge, and/or Resignation, as well as Office Term of Member of the Board of Commissioners

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a Nomination Policy for Candidates for the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Independent Parties (POL-CSD-03), which outlines the procedures for the selection, appointment, dismissal, and/or resignation of Members of the Board of Commissioners. The policy stipulates:

1. Procedure for Selection of Members of the Board of Commissioners

a. Members of the Board of Commissioners, Directors and/or Shareholders can submit suggestions for candidates of members of the Board of Commissioners to the Bank. Shareholders who can nominate candidates of members of the Board of Commissioners are 1 (one) or more shareholders that represent 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.

b. Banks can also use the services of independent and reputable third parties in the selection process for candidates for the Board of Commissioners. A third party appointed by the Bank will assist in the candidate identification and selection process as well as provide consultations required by the Nomination and Remuneration Committee.

c. The Nomination and Remuneration Committee reviews and evaluates prospective members of the Board of Commissioners and/or Independent Parties and recommends prospective members of the Board of Commissioners and/or Independent Parties to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.

2. Kriteria Calon Anggota Dewan Komisaris

   Calon anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.
3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian, di antaranya termasuk:
   a. Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris hanya akan berlaku efektif setelah mendapat surat persetujuan OJK terkait lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   b. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

   c. Bank melaporkan anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

   d. Anggota Dewan Komisaris yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru kepada Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Dewan Komisaris lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.

2. Criteria for Candidates for Members of the Board of Commissioners
   Prospective members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must at least meet the requirements which include integrity, competence and good financial reputation, as stipulated in the Bank's Articles of Association, applicable laws and regulations in Indonesia and have passed the Capability and Proper Test in accordance with provisions of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia Regulations.
3. Appointment and Dismissal Procedures, including:

   a. The Bank appoints and dismisses members of the Board of Commissioners through the GMS based on the recommendations of the Board of Commissioners by considering recommendations of the Remuneration and Nomination Committee. The appointment of members of the Board of Commissioners will only become effective after receiving an approval letter from OJK regarding the passing of the fit and proper test in accordance with applicable regulations.
   b. Prospective members of the Board of Commissioners who have not been declared effective cannot carry out their duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners and cannot make legally-binding decisions, and therefore do not have their rights and obligations as members of the Board of Commissioners.
   c. The Bank reports members of the Board of Commissioners, who have been declared effective, to OJK (Capital Market Division and Banking Supervision Division) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) no later than 10 (ten) working days after the effective appointment date. The report must also attach the GMS deed, and effective members write and submit a Statement Letter of Members of the Board of Commissioners to the Deposit Insurance Corporation (LPS) no later than 30 (thirty) days after the effective date, in accordance with applicable regulations.
   d. New members of the Board of Commissioners are required to take part in an orientation program with the aim of introducing new members to the Bank, its organization, leadership structure, other members of the Board of Commissioners, as well as their duties and responsibilities.

e. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
f. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan hal-hal sesuai peraturan yang berlaku yang tertera pada Piagam Dewan Komisaris.
g. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.

4. Pengunduran Diri
   a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
   b. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
   c. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, dan Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta 2 (dua) hari kerja setelah diputuskan oleh RUPS.
   d. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.

5. Masa Jabatan
   a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga).

e. Dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners must prioritize the Bank's main interests.
f. Dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners that was carried out before the end of office term of respective members must adhere to applicable regulation laid out in the Board of Commissioners Charter.
g. Dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the end of their term must obtain OJK approval.

4. Resignation
   a. Members of the Board of Commissioner may resign before the end of their office term by submitting a resignation letter in writing at least 60 (sixty) days or 2 (two) months before the effective date of resignation along with the reason. They will still be held accountable for their responsibilities on the implementation of their duties up to the effective date of resignation on the closest Annual GMS.
   b. Then, the Bank must hold GMS no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation request.
   c. The Bank must disclose information to the public and report the resignation of members of the Board of Commissioners to Capital Market and Banking Supervision divisions at OJK, and the Indonesia Stock Exchange no later than 2 (two) working days after receiving the letter of the resignation from members of the Board of Commissioners and 2 (two) working days after the GMS decision.
   d. Members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, money laundering crimes, and other criminal activities, are required to resign from the Board of Commissioners.

5. Office Term
   a. 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years or until the closing of the third annual GMS.

b. Jika calon anggota Dewan Komisaris diangkat dalam rangka menggantikan dan/atau mengisi posisi tambahan dalam Dewan Komisaris, maka periode jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang baru akan berakhir mengikuti periode berjalan dari Dewan Komisaris lainnya.

c. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
d. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
   - Mempertimbangkan hasil penilaian kinerja;
   - Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
   - Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Kepala satuan kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
e. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   - Meninggal dunia;
   - Masa jabatannya berakhir;
   - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   - Mengundurkan diri;
   - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
   - Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
   - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. If a prospective member of the Board of Commissioners is appointed to replace and/or fill an additional position on the Board of Commissioners, then the office term of the new member of the Board of Commissioners will end following the current period of the other members of the Board of Commissioners.
c. Members of the Board of Commissioners whose office term has ended, may be reappointed by the GMS for the next period by considering applicable provisions.
d. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms can be reappointed in the next period as Independent Commissioner by the GMS if:
   - It has considered the commissioners' performance assessment;
   - The meeting of members of the Board of Commissioners assessed that Independent Commissioners can still act independently;
   - It has considered performance assessment by the Head of Internal Audit work unit and Executive Officer in charge of Human Resources, which state that Independent Commissioner can still act independently; and
   - The Independent Commissioner states at the GMS regarding the independence concerned and the Independent Commissioner's statement of independence is disclosed in the Bank's annual report.
e. Office Term of a member of the Board of Commissioners ends if:
   - Passed away;
   - Office term ends;
   - Dismissed based on GMS decision;
   - Resign;
   - Declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision,
   - Convicted of committing a criminal offense and/or committing a significant violation of applicable laws and regulations; and
   - No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

Susunan, Jumlah, Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam hal susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank, sebagaimana telah diatur di dalam Piagam Dewan Komisaris, yaitu:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2024, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
2. 3 (tiga) orang dari 4 (empat) Anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.
3. 2 (dua) orang atau 50% dari Anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia .
4. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
6. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Structure, Number, Composition of the Membership of the Board of Commissioners

The Bank has complied with all applicable provisions in terms of the structure and composition of the Bank's Board of Commissioners, as stipulated in the Board of Commissioners' Charter, namely:

1. Based on the Annual GMS resolutions dated 28 June 2024, the Board of Commissioners has 4 (four) members, in which 2 (two) people or 50% of all members are Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) President Commissioner.
2. 3 (three) out of 4 (four) members of the Board of Commissioners are based in Indonesia and 1 (one) person is based in Japan.
3. 2 (two) person or 50% of members of the Bank's Board of Commissioners are Indonesian citizens.
4. The number of the Board of Commissioners does not exceed the number of the Board of Directors.
5. Replacement and/or appointment of members of the Bank's Board of Commissioners has considered recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from the GMS and OJK.
6. All members of the Board of Commissioners do not have family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Directors or Controlling Shareholders.
7. All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper test and obtained approval from the Financial Services Authority (OJK).
8. In terms of expertise, the majority of the members of the Board of Commissioners have working experiences in banking.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Number and Composition of Members of the Board of Directors in 2024 are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/ Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS Legal Basis of Appointment	Tanggal Efektif Persetujuan OJK Effective Date	Periode Jabatan Term of Office
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Jepang/Japan	RUPSLB 30 Desember 2014 EGMS 30 December 2014	14 April 2015	2014 – 2017 2017 – 2020 2020 - 2023 2023 - 2026
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	RUPSLB 20 September 2018 EGMS 20 September 2018	12 Maret 2019 12 March 2019	2019 – 2020 2020 - 2023 2023 - 2026
3.	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesian	RUPSLB 15 Oktober 2021 EGMS 15 October 2021	29 November 2021	2021 - 2023 2023 - 2026
4.	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesian	RUPSLB 15 Oktober 2021 EGMS 15 October 2021	22 Desember 2021 22 December 2021	2021 - 2023 2023 - 2026

Komisaris Independen

Berdasarkan POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Per Desember 2024, Bank memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dari total 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, 50% dari total anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan telah sesuai dengan POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Anggota Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

Independent Commissioner

Based on OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Bank, Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholder, or a relationship with the Bank that may affect the person's ability to act independently.

As of December 2024, the Bank has 2 (two) Independent Commissioners from a total 4 (four) members of the Board of Commissioners. Thus, 50% of total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners, which is in line with OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

All of the Bank's Independent Commissioners have passed the Fit and Proper Test and obtained approval from OJK as Independent Commissioner and appointed based on the GMS agreement.

Members of the Bank's Independent Commissioners are as follow:

Keterangan Masa Jabatan Term of Office Description	Nama Name
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023 hingga RUPST tahun 2026. Appointed as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Resolution on 15 October 2021 and was reappointed based on AGMS Resolution on 31 May 2023 until the AGMS in 2026.	Iwan Nataliputra
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023 hingga RUPST tahun 2026. Appointed as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Resolution on 15 October 2021 and was reappointed based on AGMS Resolution on 31 May 2023 until the AGMS in 2026.	Benny Siswanto

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan telah dipilih berdasarkan kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris serta definisi POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

Criteria of Independent Commissioners

Independent Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk are members of the Board of Commissioner that has no connection to the Bank and have been selected based on the criteria of Independent Commissioner, which are stipulated in the Board of Commissioners Charter, and the definition on OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21, as follows:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

a. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the following period.
b. Does not own the Bank's shares, both directly or indirectly.
c. Has no affiliation with the Bank, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or the Ultimate Shareholder of the Bank.
d. Has no direct or indirect business relations related to the Bank's business activities.
e. Meet other requirements of the Independent Commissioner as stipulated on applicable laws and regulations.
f. Independent Commissioner that also serves as the Head of Committee, may only serve concurrently as the Head of Committee at most for 1 (one) another Committee.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sesuai ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Statement on Independency of Independent Commissioner

As part of the Fit and Proper Test process at the Financial Services Authority (OJK), members of Independent Commissioners have prepared and signed a Statement of Independency to be submitted to the Financial Services Authority (OJK).

All Independent Commissioners have met the independence aspects according to provision of POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioner for Issuers or Commercial Company.

Aspek Independensi Aspect of Independence	Iwan Nataliputra	Benny Siswanto
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of Bank JTrust Indonesia within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no shares, directly or indirectly, at PT Bank JTrust Indonesia.	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no affiliation with PT Bank JTrust Indonesia, member of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholder of the Company.	√	√

Aspek Independensi Aspect of Independence	Iwan Nataliputra	Benny Siswanto
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Does not have financial relationship, organizational relationship, shareholder relationship, familial relationship with members of the Board of Directors, other members of the Board of commissioner, and/or Controlling Shareholders of the Bank.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no direct or indirect business relations that are related to the activities of PT Bank JTrust Indonesia.	√	√
Surat Pernyataan Independensi Statement Letter of Independency	√	√

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2024 ini.

Profile of members of the Board of Commissioners

Complete profile is listed in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers of this 2024 Annual Report.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris tunduk kepada etika kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, dan kebijakan internal Bank.

Tugas pokok Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia, antara lain namun tidak terbatas untuk:

1. Melakukan pengawasan strategis terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik, termasuk pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, Anggaran Perusahaan dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, serta meninjau kebijakan risiko dan kinerja perusahaan;
2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya;
3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Bank's Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities independently, with good faith, full of responsibilities and prudence. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners ensures the implementation of Good Governance and compliance with applicable regulations in each of the Bank's business activities at every level of the organization. The Board of Commissioners complies with work ethics, applicable laws and regulations, regulations and the Bank's internal policies.

The main duties of the Board of Commissioners are stated below, but not limited to:

1. Carry out strategic supervision of the Board of Directors in executing their duties and responsibilities by monitoring, directing, and evaluating the implementation of strategic policies, including the implementation of business plans, the Company's Articles of Association and its provisions, as well as reviewing the company's risk and performance policies;
2. Ensure the Board of Directors follow up the audit findings and recommendation from Internal Audit Work Unit, external audit, and supervisory results from banking authority and other authorities;
3. Ensure the implementation of good corporate governance in each of the Bank's business activities at all levels of the organization;

4. Melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.
6. Membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko, dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
7. Memantau, mengkaji, dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank serta memastikan integritasnya.

Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia memiliki kewenangan, antara lain untuk:
1. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi, mencakup namun tidak terbatas pada segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank.
2. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya melalui rapat Dewan Komisaris;
3. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
4. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris

Dalam hal belum dimasukkan ke dalam Rencana Bisnis Bank, maka Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:
1. Pembukaan atau penutupan kantor cabang/ perwakilan, di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
2. Untuk memberlakukan rencana tahunan dan anggaran biaya tahunan;
3. Meminjam uang yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

4. Carry out corporate supervision with the help from the Audit Committee, the Risk Oversight Committee and the Remuneration and Nomination Committee, to support the Board of Commissioners effectiveness in carrying out its duties and responsibilities.
5. Review the Bank's vision and mission on a regular basis.
6. Make recommendations on improvements or suggestions submitted by the Audit Committee and/or Risk Oversight Committee, and submit these recommendations to the Board of Directors.
7. Monitor, review, and approve the Annual Report and the Sustainability Report, and ensure their integrity.

The Board of Commissioners has authorities, among others to:
1. Know all policies and activities that have been carried out by the Board of Directors, including but not limited to all matters related to the Bank's management.
2. Temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reasons after holding the Board of Commissioners' meeting;
3. Carry out the Bank's management in certain circumstances for a certain period of time;
4. Communicate directly with employees, the Board of Directors, and other parties;
5. Involve independent parties outside the Board of Commissioner to assist the implementation of their duties.

The Board of Commissioners may exercise other authorities as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and/or the GMS Resolutions.

Directors' Actions that Require Approval from the Board of Commissioners

If it has not been included in the Bank's Business Plan, the Board of Directors must obtain approval from the Board of Commissioners. These actions are:

1. Open or closure of branch/representative offices, whether it is inside or outside the territory of the Republic of Indonesia;
2. Enforce the annual plan and annual cost budget;
3. Borrow money that exceeds the amount periodically set by the Board of Commissioners' Meeting;

4. Mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang (debt instrument) lain, baik melalui Pasar Modal atau tidak;
5. Mengeluarkan jaminan atau letter of credit untuk suatu jumlah yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
6. Penyertaan dalam suatu usaha atau perusahaan atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait;
7. Menunjuk arbiter atau menunjuk advokat, penasehat hukum atau pihak lain untuk mewakili Bank dalam penyelesaian suatu perselisihan atau perkara yang biayanya melampaui jumlah yang sewaktu waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
8. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
9. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam Perusahaan atau badan lain; dan
10. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS di mana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Etika Kerja

a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank. Kode etik ini dimuat secara lengkap dalam situs Bank.

b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Bank.
c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.

4. Issue bonds or other debt instruments, whether through the Capital Market or not;

5. Issue a guarantee or letter of credit for an amount that exceeds the amount periodically set by the Board of Commissioners' Meeting;
6. Invest in a business or company or establish a new company that is not for the purpose of saving receivables, by taking into account the relevant laws and regulations;

7. Appoint an arbitrator or appoint an advocate, legal advisor or other party to represent the Bank in resolving a dispute or case whose costs exceed the amount determined at any time by the Board of Commissioners Meeting;

8. Release or sell immovable property that belongs to the Bank that exceeds a certain amount determined by the Board of Commissioners Meeting;
9. Divest part or all of the Bank's investment in a Company or other entity; and
10. Decisions to no longer collect, transfer or relinquish the rights to collect bad debts that have been written off.

The Board of Commissioners is accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS where the Board of Commissioners is jointly responsible for the Bank's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

Work Ethics

a. The Board of Commissioners together with the Board of Directors must formulate a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors, members of the Board Commissioners, employees as well as supporting organs owned by the Bank and work for the Bank. The code of ethics is stipulated completely in the Bank's website.
b. The Board of Commissioners must comply with the Bank's code of ethics, carry out their duties in good faith, responsibly and prudently by always taking into account the prevailing laws, among others laws that are related to the implementation of Good Corporate Governance and the Bank's Article of Associations.
c. The Board of Commissioners is obliged to uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioners as well as the related parties.

d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mencederai reputasi atau mengurangi keuntungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.
g. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan dan/atau menawarkan atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak lain, secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memberi pengaruh atau dianggap mempengaruhi keputusan bisnis atau hubungan secara timbal balik.
h. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
   i. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum;
   ii. Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
   iii. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

d. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking advantage from PT Bank JTrust Indonesia Tbk for their own interests, family and/or other parties that can harm reputation or reduce profits of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
e. Members of the Board of Commissioners must not take and/or receive any personal benefits from PT Bank JTrust Indonesia Tbk other than remuneration and other facilities and determined in the General Meeting for Shareholders.
f. Members of the Board of Commissioners must not directly or indirectly make a false statement on material facts or must not expose material facts hence statement made is not falsely interpreted on the condition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk when the statement is made.
g. Members of the Board of Commissioners are prohibited from giving and/or offering or accepting gifts in any form from other parties, directly or indirectly, with the aim of influencing or being deemed as influencing business decisions or reciprocal relationships.
h. The Board of Commissioners must not involve in decision making process that relates to the Bank's operational activities, except in the case of:
   i. Approval of fund provision to related parties as regulated in the OJK provisions concerning the legal lending limit and provision of large funds for commercial banks;
   ii. Other decisions that are implemented in the Articles of Association or prevailing regulations. Decisions made by the Board of Commissioners as mentioned above are part of the supervisory duty of the Board of Commissioners hence not eliminating the responsibility of the Board of Directors on the implementation of the Bank's management.
   iii. Including but not limited to other matters as long as they do not conflict with applicable laws and regulations concerning the Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Entities, the Article of Association, and/or the GMS resolutions.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama J Trust Bank mengemban tugas dan tanggung jawab tambahan selain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris;
2. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris;
4. Memimpin RUPS. Jika Komisaris Utama berhalangan hadir atau terkendala Bahasa (Indonesia), maka Komisaris Utama memberikan kuasa kepada salah satu Anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.
5. Memimpin rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

a. Bertindak untuk kepentingan terbaik Bank;
b. Memberikan masukan terkait Transaksi Afiliasi serta memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali.
   Memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*) dan tidak merugikan Bank;
c. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan
d. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

President Commissioner of J Trust Bank has additional duties and responsibilities other than the ones mentioned previously. The duties and responsibilities are as follows:

1. Lead the Board of Commissioner in carrying out their supervision duty and arrange the division of tasks between members of the Board of Commissioners;
2. Facilitate communication between the Board of Commissioner and the Board of Directors;
3. Lead or play a key role in succession planning of President Director and lead the evaluation process of the Board of Commissioners; and
4. Chair the Board of Commissioner meeting. If the President Commissioner is unable to attend or has language barrier (Indonesia), then the President Commissioner grants power of attorney to one of the Board members who is present to chair the meeting;
5. Chair the Board of Commissioners' meetings.

Roles and Responsibilities of Independent Commissioners

a. Act in accordance to the Bank's best interests;
b. Provide inputs regarding Affiliate Transactions and monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or controlling shareholders.
   Ensure the transactions are carried out in accordance with the arm's length principle and do not harm the Bank;
c. Independently pay attention to the views of minority shareholders and other stakeholders; and
d. Encourage dialogues between management, shareholders and other stakeholders.

Division of Duties of Members of the Board of Commissioners and Concurrent Positions in Committees

Several members of the Board of Commissioners also hold concurrent positions according to their respective competencies and areas of expertise, as the Chairman and/or members of Committees that are created to assist in carrying out duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Komite Committee	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris Committee Membership by Members of the Board of Commissioners
Komite Audit Audit Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 21 Juni 2023, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut: 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua 2. Richard S. Dompas (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota 3. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Anggota Based on the Decree of the Board of Directors on 21 June 2023 the structure and membership of the Risk Oversight Committee are: 1. Benny Siswanto (Independent Commissioner) as Chairman 2. Richard S. Dompas (Independent Party) as Secretary and Member 3. I Gde Yadnya Kusuma (Independent Party) as Member
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 15 Februari 2023, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1. Iwan Nataliputra (Komisaris Independen) sebagai Ketua 2. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Anggota 3. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota. 4. Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota Based on the Decree of the Board of Directors on 15 February 2023, the structure and membership of the Risk Oversight Committee are: 1. Iwan Nataliputra (Independent Commissioner) as Chairman 2. Benny Siswanto (Independent Commissioner) as Member 3. I Gde Yadnya Kusuma (Independent Party) as Secretary and Member 4. Bambang Setyoko (Independent Party) as Member
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 September 2022, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi diubah menjadi sebagai berikut: 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Iwan Nataliputra (Komisaris Independen) sebagai Anggota 3. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 4. Ong Pey Fang (EVP HC & Corporate Secretary) sebagai Sekretaris merangkap Anggota Based on the Decree of the Board of Directors on 30 September 2022, the structure and membership of the Nominantion and Remuneration Committee are: 1. Benny Siswanto (Independent Commissioner) as Chairman and Member 2. Iwan Nataliputra (Independent Commissioner) as Member 3. Nobuiku Chiba (Commissioner) as Member 4. Ong Pey Fang (EVP HC & Corporate Secretary) as Secretary and Member

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan memastikan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras dengan yang tercantum pada piagam Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mencederai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank.

Independency of the Board of Commissioners

In carrying out their duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners uphold the independence principle, prioritize the Bank's interest above their own and make sure that it cannot be influenced by any parties. This commitment is in line with principles stipulated in the Charter of Board of Commissioners of the Bank, as follow:

1. The Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities independently with good faith, full accountability and with prudence. Implementation of their duties must be carried out objectively and free from pressures and interests of any parties.
2. The Board of Commissioners shall uphold the highest standard of integrity and avoid any conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioner as well as any related parties.
3. Members of the Board of Commissioners shall not take advantage of the Bank for their own interest, family and/or any other parties that might harm the Bank's reputation or reduce profit.

4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris Bank J Trust Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah atau Pejabat Eksekutif:
   a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
   b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
   c. pada bidang tugas fungsional bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
   c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

4. Members of the Board of Commissioners shall not take and/or accept their own personal interest from the Bank except for remuneration and other facilities determined in the GMS.
5. Members of the Board of Commissioners shall not directly or indirectly make a false statement on material facts or not expose material facts so that the statement made is not falsely interpreted on the Bank's condition when the statement is made.

Policy on Concurrent Position of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners Charter has stipulated provisions regarding concurrent positions in accordance with OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Bank, which states that:

1. Members of the Board of Commissioners must not hold concurrent positions as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board, or Executive Officer:
   a. in financial institutions or companies, both bank or non-bank;
   b. in more than 1 (one) non-financial institution or non-financial entity, whether located domestically or abroad.
   c. in functional duties of bank and/or non-bank financial institutions, whether located domestically or overseas;
   d. on other positions that can cause conflicts of interest in carrying out their duties as members of the Board of Commissioner;
2. Not including concurrent positions as mentioned on the article (1) in terms of:
   a. A member of the Board of Commissioners serves as a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or Executive Officer whp carries out supervisory function in 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;
   b. Non-Independent Commissioners carry out functional duties from the Bank's shareholders as legal entities in the Bank's business group; and/or
   c. Members of the Board of Commissioners serve a position in a non-profit organization.

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia telah sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, di mana Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank. Pada periode tahun 2024, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

3. Duties in position and function as stated in the Article (2) shall be carried out as far as the related party is not neglecting the implementation of their duties and responsibilities as the member of the Board of Commissioners of the Bank.
4. Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as public officials.

Concurrent positions by members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia have complied with OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, in which Non-Independent Commissioner has concurrent positions to carry out functional duties from the Bank's institutional shareholders, who are also part of the Bank's business group. In 2024, concurrent positions of members of the Board of Commissioners were:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain Other Position
1.	**Nobiru Adachi**	Komisaris Utama President Commissioner	• Direktur Pelaksana Corporate Strategy Group and Southeast Asia Business di J Trust Co., Ltd. • Direktur J Trust Asia, Pte. Ltd • Managing Director of Corporate Strategy Group and Southeast Asia Business of J Trust Co., Ltd. • Director of J Trust Asia Pte. Ltd
2.	**Nobuiku Chiba**	Komisaris Commissioner	• Direktur Representatif, Wakil Presiden Eksekutif di J Trust Co., Ltd. • Direktur J Trust Asia Pte. Ltd. • Komisaris PT J Trust Investment Indonesia. • Representative Director, Executive Vice President of J Trust Co., Ltd. • Director of J Trust Asia Pte. Ltd. • Commissioner of PT J Trust Investment Indonesia.
3.	**Iwan Nataliputra**	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Chairman of the Risk Oversight Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4.	**Benny Siswanto**	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Ketua Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Chairman of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Chairman of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Member of the Risk Oversight Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, tidak ada transaksi pembelian dan/atau penjualan saham J Trust Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris J Trust Bank. Per 31 Desember 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham Bank.

Share Purchase/Sale by the Board of Commissioners

In 2024, there were no purchase and/or sale transactions of J Trust Bank shares carried out by the Board of Commissioners. As of 31 December 2024, all members of the Board of Commissioners do not own the Bank's shares.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners' Affiliation

In 2024, financial and family relations of members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholder of the Bank can be seen from the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with						Hubungan Keuangan dengan Finance Relations with					
		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota

Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Throughout 2024, the Bank ensures that all members of the Board of Commissioners do not own conflicts of interest and potential conflicts of interest toward the Bank. All members of the Board of Commissioners have committed to avoiding the potential conflict of interest or always placing themselves not to be in the position of potential conflict of interest in any situation, as stipulated in the Board of Commissioners Charter.

If conflict of interest occurs, members of the Board of Commissioners must not take any actions that can be harmful for the Bank or reduce the Bank's profit. They are obliged to disclose the potential conflict of interest in every decision. Procedures that must be carried out by members of the Board of Commissioners should there will be a conflict of interest are as follows:

1. Must avoid conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioners as well as related parties and disclose every condition that may create conflict of interest.
2. Require approval from the GMS to carry out transactions that stipulate conflict of interest between personal economic interest of members

Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, di mana RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Bank, Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Komisaris Independen dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi. Sedangkan untuk Komisaris Non Independen beserta keluarga dan pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat diberikan pinjaman dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

A. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
   1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
   2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
   3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
   4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota Dewan Komisaris.
   5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
   6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
   7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

of the Board of the Commissioners with the Bank's economic interest, where the GMS is led by member of the Board of Commissioners that does not have conflict of interest, or other parties according to the applicable laws and regulations.

Loan Provision Policy for the Board of Commissioners

As stated in the Bank's Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transaction Policy, the Bank is prohibited from providing funds to Independent Commissioners, their families and their affiliated parties. On the other hand, Non-Independent Commissioners, their families and their affiliated parties can secure loans based on arm's-length principle (fair price and normal conditions), as required for parties who are not related to the Bank.

Provisions and Implementation of the Board of Commissioners Meeting

A. Provisions of the Board of Commissioners Meeting
   1. The Board of Commissioners must hold meetings at least 1 (once) in 2 (two) months, including via teleconference.
   2. The Board of Commissioners must hold meetings with the Board of Directors periodically, at least 1 (once) in 4 (four) months.
   3. The Board of Commissioners must hold a minimum of 2 (two) meetings of the Board of Commissioners within a year that are attended physically by all members.
   4. Meetings of the Board of Commissioners can be held if attended by at least 75% (seventy five percent) of members of the Board of Commissioners.
   5. Members of the Board of Commissioners must attend the Board of Commissioners meetings at least 75% (seventy five percent) of the total meetings of the Board of Commissioners in a year.
   6. The Board of Commissioners must schedule meetings for the next year before the end of fiscal year.
   7. On the scheduled meetings above, meeting invitations and materials must be delivered to participants no later than 5 (five) days before the meeting takes place. If the meeting is not scheduled, meeting materials are delivered to participants at least before the meeting is held.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, maka Komisaris Utama memberikan kuasa kepada salah satu Anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
11. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
12. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
13. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak di mana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
16. Rapat Dewan Komisaris juga dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

8. The Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present, then he/she must grant power of attorney to one of the members of the Board of Commissioners who is present to chair the meeting.
9. Decisions at meetings of the Board of Commissioners are made based on deliberation to reach consensus.
10. If no consensus is reached, the decision is taken based on the majority vote, in accordance with the principle of one man one vote.
11. In a Board of Commissioners meeting, a member of the Board of Commissioner can only be represented by another member of the Board of Commissioner with a power of attorney.
12. All decisions of the Board of Commissioners are binding to all members of the Board of Commissioners. Any dissenting opinions in the Board of Commissioners meeting must be stated clearly in the minutes of meeting along with the reason for the dissenting opinions.
13. Results of the Board of Commissioners' meetings, including results of joint meeting with the Board of Directors, must be written in the minutes of meeting and signed by all members of the Board of Commissioner who are present in the meeting and delivered to all members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and must be well-documented.
14. If members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioner do not sign the meeting outcome as mentioned above, they must state their reasons in writing in a separate letter and attach the letter to the minutes of meetings.

15. Every member of the Board of Commissioners, in any way, both directly and indirectly, has personal interest or conflict in a transaction, contract or contract proposal where PT Bank JTrust Indonesia Tbk become one of the parties, must state the nature of the interest in a Board of Commissioner meeting and must not participate in the voting related to this transaction, contract or contract proposal mentioned above, except the Board of Commissioners meeting decided otherwise.

16. The Board of Commissioner meetings can also be held if one or several members of the Board of Commissioners consider it necessary by mentioning topics that should be discussed.

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatanganinya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
18. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

B. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
Rapat bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 6 (enam) kali, dan rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri secara fisik maupun via konferensi video oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Pada tahun 2024, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris masih dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 berdasarkan periode menjabat adalah:

17. The Board of Commissioners may also take a legal and binding decision without holding the Board of Commissioners meeting, as long as all members of the Board of Commissioners are informed in writing on the proposal and all members of the Board of Commissioners give their approvals on these written proposals and sign it. The decisions taken under these procedures have the same power with decisions taken legally in a Board of Commissioners meeting.
18. The mechanism for organizing meetings always refers to applicable laws and regulations, as well as the Articles of Association.

B. In 2024, the Board of Commissioners has held the following meetings:
Joint meetings with members of the Board of Directors 6 (six) times, and meetings between members of the Board of Commissioners 6 (six) times, which were attended physically or via video conference by all members of the Board of Commissioners who had passed the fit and proper test by the OJK.

In 2024, meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners were a mix of online and offline meetings.

The frequency of attendance and attendance rate at meetings of members of the Board of Commissioners in 2024 based on office term are:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris Meetings between Members of the Board of Commissioners				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026	6/6	100%
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026	6/6	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris
Meeting Agenda of the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	2 Februari 2024 2 February 2024	- Evaluasi Kinerja Keuangan 2023 - RBB 2024 - 2026 - IT Project Update - Financial Performance Evaluation 2023 - RBB 2024 - 2026 - Pembaruan Proyek IT	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto
2	4 April 2024 4 April 2024	Laporan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris Reports by Committees under the Board of Commissioners	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto
3	15 Juli 2024 15 July 2024	- Rating RBBR Semester Pertama & Profil Risiko - GCG Semester Pertama 2024 - Laba Semester Pertama - Fisrt Semester Rating RBBR & Risk Profile - GCG First Semester 2024 - First Half Profit	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto
4	15 Agustus 2024 15 August 2024	- Penunjukkan Lawyer - Strategi Penurunan COF - Lawyer Appointment - COF Reduction Strategy	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto
5	25 September 2024	- Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris - Reports by Committees under the Board of Commissioners	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto
6	26 November 2024	- Rencana Pemulihan dan Resolusi - Recovery and Resolution Plan	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto

Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi
Agenda of the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meetings Agenda	Kehadiran Komisaris Board of Commissioners Attendance	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance
1	29 April 2024 29 April 2024	- Perubahan RBB - Laporan Keuangan Q1 - Amendment of RBB - Financial Statement Q1	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
2	29 April 2024 29 April 2024	- Q1 Profil Risiko - Q1 Risk Profile	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
3	27 Juni 2024 27 June 2024	- Revisi RBB - Revised RBB	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
4	1 Agustus 2024 1 August 2024	- Revisi RBB - Revised RBB	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi
Agenda of the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meetings Agenda	Kehadiran Komisaris Board of Commissioners Attendance	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance
5	21 Agustus 2024 21 August 2024	- Arahan OJK - Progress report on OJK audit	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
6	28 November 2024 28 November 2024	- RBB 2025 - 2027 - RBB 2025 - 2027	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat:
   - Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
   - Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami baik profil Bank termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.
2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

Training and/or Competency Improvement of Members of the Board of Commissioners

1. Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners:
   - The Board of Commissioners is obliged to participate in a competency test/certification program in accordance with the provisions of the regulator, namely Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with Bank Indonesia Regulation Number 11/19/PBI/2009 dated 4 June 2009 and its amendments in Bank Indonesia Regulation Number 12/7/PBI/2010 dated 19 April 2010 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks and OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources at Commercial Banks.
   - Newly appointed members of the Board of Commissioners must attend an orientation program so that new members of the Board of Commissioners become acquainted with and understand the Bank's profile, including the characteristics and business processes of the Bank, so that they can work in harmony with other Bank organs.
2. Trainings and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners have Risk Management Certification and/or Refreshment in accordance with applicable regulations.

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa Tanggal Kadarluarsa
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	1	BSMR	24 Januari 2023 24 January 2023	24 Januari 2027 24 January 2027
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	1	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	11 November 2025
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	7 Oktober 2021 7 October 2021	7 Oktober 2025 7 October 2025
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	23 Oktober 2021 23 October 2021	23 Oktober 2025 23 October 2025

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia mengikuti program peningkatan kompetensi. Selama tahun 2024, mereka telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi dan seminar. Beberapa di antaranya adalah:

To support the implementation of their duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia take part in competency improvement programs. In 2024, they have participated in various training programs, workshops, conferences, seminars. Some of them were:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada Lentera Mulia Persada	17-18 Apr 2024, Jakarta 17-18 Apr 2024, Jakarta
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada Lentera Mulia Persada	17-18 Apr 2024, Jakarta 17-18 Apr 2024, Jakarta
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada Lentera Mulia Persada	4–5 Sept 2024, Jakarta 4–5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectvieness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa BARa	18–20 Sept 2024, Bali 18–20 Sept 2024, Bali
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman The Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Domain	IKAI IKAI	1 Agt 2024, Jakarta 1 Aug 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada Lentera Mulia Persada	4–5 Sept 2024, Jakarta 4–5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectvieness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa BARa	18–20 Sept 2024, Bali 18–20 Sept 2024, Bali

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Dewan Komisaris yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
   - Filosofi Logo;
   - Tonggak sejarah;
   - Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan; dan,
   - Produk & Layanan
2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
   - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
   - Profil & Piagam Direksi;
   - SEVP & EVP; dan
   - Struktur Organisasi
3. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
   - Anggota dan Piagam Komite Audit;
   - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
   - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4. Komite-Komite di Bawah Direksi
   - Anggota dan Piagam Komite Manajemen Risiko
   - Anggota dan Piagam Komite Kredit
   - Anggota dan Piagam Komite Kebijakan Perkreditan
   - Anggota dan Piagam Komite Aset & Liabilitas (ALCO)
   - Anggota dan Piagam Komite Pengarah IT
5. Tata Kelola Perusahaan
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis
   - Kerahasiaan
   - Benturan Kepentingan
   - Transaksi Orang Dalam
   - Komunikasi dengan Media
   - Penyalahgunaan Wewenang
   - Perilaku Orang Dalam
   - Akurasi Data
   - Peraturan Perbankan
6. Hukum dan Peraturan

   Selain Buku Panduan, Anggota Dewan Komisaris yang baru diaturkan untuk rapat bertemu dengan Direksi, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners

Newly appointed members of the Board of Commissioners are given a Handbook containing information so that they can get familiar with the Bank. This Handbook is available in soft copy and a summary is also available on the Bank's website.

The Handbook includes:

1) Company History
   - The Philosophy of logo;
   - Milestones;
   - Vision, mission, and Corporate Value; and,
   - Products & Services
2) Company Structure & Management Profile
   - Profile & Charter of the Board of Commissioners;
   - Profile & Charter of the Board of Directors;
   - SEVP & EVP; and
   - Organizational structure
3) Committees Under the Board of Commissioners
   - Members and Charter of the Audit Committee,
   - Members and Charter of the Risk Oversight Committee; and
   - Members and Charter of the Nomination & Remuneration Committee
4) Committees under the Board of Directors
   - Members and Charter of the Risk Management Committee
   - Members and Charter of the Credit Committee
   - Members and Charter of the Credit Policy Committee
   - Members and Charter of the Asset & Liability Committee (ALCO)
   - Members and Charter of the IT Steering Committee
5) Corporate Governance
   - Code of Ethics and Business Conduct;
   - Confidentiality;
   - Conflict of Interest;
   - Insider Trading;
   - Communication with the Media
   - Abuse of Authority
   - Insider Behavior
   - Data Accuracy
   - Banking Regulations
6) Laws and Regulations

   In addition to the Handbook, new members of the Board of Commissioners are set up to meet the Board of Directors, SEVP/EVP, and key management personnel.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris [GRI 2-18]

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan penilaian sendiri atau self-assessment sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) oleh KNKG.

1. Pihak yang melakukan penilaian
   Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas kinerja Dewan Komisaris secara kolegial serta masing-masing anggota Dewan Komisaris.

2. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja
   Kebijakan dan prosedur penilaian yang dilakukan meliputi:
   a. Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris; dan

   b. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Penilaian dilakukan oleh masing-masing Komisaris atas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan serta memberikan penilaian terhadap kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris. Seluruh jawaban yang diberikan oleh pihak-pihak di atas disampaikan langsung kepada Corporate Secretary. Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan dan membahas seluruh hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut di dalam rapat Dewan Komisaris. Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan maupun action plan (jika diperlukan).

3. Kriteria yang digunakan
   Seluruh hasil evaluasi dan penilaian dijadikan dasar oleh Bank dalam menyusun rencana perbaikan kinerja Dewan Komisaris dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria mencakup 3 (tiga) aspek Governance:

1. Penilaian Board Structure
   Menilai kecukupan struktur dan komposisi Dewan Komisaris agar proses pengawasan sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik guna menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners [GRI 2-18]

The Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a self-assessment policy as a form of accountability for the collegial assessment of the performance of the Board of Commissioners in accordance with OJK Circular Letter number 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Company and General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) by KNKG.

1. The party conducting the assessment
   The Bank carries out a performance evaluation process for the Board of Commissioners to assess the effectiveness of the collegial performance of the Board of Commissioners and individual performance of the Board of Commissioners.
2. The Performance Assessment Procedures
   The performance policy and procedure include:

   a. Collegial performance assessment of the Board of Commissioners; and
   b. Individual performance assessment of each member of the Board of Commissioners.

The assessment is carried out by each Commissioner on the overall performance of the Board of Commissioners as well as provide assessment of the individual performance of each member of the Board of Commissioners. All answers given by the parties above are submitted directly to the Corporate Secretary. The Nomination and Remuneration Committee submits and discusses all results of the Board of Commissioners' performance assessment at the Board of Commissioners meeting. The results of the discussion will be followed up in the form of improvements or action plans (if necessary).

3. Criteria
   All evaluation and assessment results will be used by the Bank as the basis in formulating plans to improve performance of the Board of Commissioners and submitted to stakeholders.

The assessment of the collegial performance of the Board of Commissioners uses several criteria covering 3 (three) aspects of Governance:

1. Board Structure Assessment
   Assess the adequacy of the structure and composition of the Board of Commissioners so that the supervisory process is in accordance with the principles of good governance in order to produce outcomes that are in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

2. Penilaian Board Process
   Menilai efektivitas proses, fungsi, dan dinamika kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Penilaian Board Outcome
   Menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Individu Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris:
1. Kompetensi dan Kapabilitas
2. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

2. Board Process Assessment
   Assess the effectiveness of the processes, functions and performance dynamics of the Board of Commissioners in carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Board Outcome Assessment
   Assess the quality of outcomes that meet the Stakeholders' expectations, which is the result of good governance principles implementation, supported by the adequacy of the Board of Commissioners structure.

Criteria for Individual Performance Evaluation of Each Member of the Board of Commissioners:
1. Competency and Capability
2. Effectiveness in Implementing Duties and Responsibilities

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat "Memenuhi Ekspektasi" dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial maupun individu secara rinci sebagai berikut:

Results of the 2024 Board of Commissioners Performance Assessment

In 2024, the Board of Commissioners carried out its duties and functions and was ranked with a predicate of "Meet Expectations" in supervising and providing advice to the Board of Directors, as well as ensuring the implementation of good governance and compliance with applicable regulations in each of the Bank's business activity at every level of organization.

The results of the collegial and individual performance assessment of the Board of Commissioners are as follows:

Penilaian Kinerja Kolegial Collegial Performance Assessment	Penilaian Kinerja Individu Individual Performance Assessment
3,45	3,45

Tabel Rentang Nilai
Score Range Table

Nilai Score	Penjelasan Description
> 4,50	Istimewa | Exemplary
3,50 - 4,49	Melampaui ekspektasi | Exceed expectations
2,50 - 3,49	Memenuhi ekspektasi | Meet expectations
1,50 - 2,49	Cukup memenuhi ekspektasi | Partially meet expectations
0,01 - 1,49	Memerlukan Perbaikan yang signifikan | Need significant improvement

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris.

Beberapa pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2024 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank;
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakukan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
4. Melakukan pengkajian atas Laporan Pengawasan setiap semester, Laporan *Assessment* Tata Kelola, transaksi pihak terkait, serta menyetujui kebijakan internal yang memerlukan persetujuan hingga tingkat Dewan Komisaris;
5. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya;
6. Melakukan pengawasan atas investasi dan pencapaiannya terkait dengan operasional dan teknologi informasi yang diimplementasikan pada tahun 2022;
7. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia serta suksesi Direksi;
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.

Supervision and Recommendations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners plays an active role in carrying out supervisory functions, providing input and recommendations through discussions at Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, as well as discussions in Committees under the Board of Commissioners, which support the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions smoothly.

Some of the Board of Commissioners' supervision throughout 2024 includes:

1. Carried out supervision over the realization of the Bank's Business Plan;
2. Conducted reviews of the Bank's financial performance supported by the Audit Committee, including the presentation of financial reports, accounting treatment and conformity with generally accepted accounting principles;
3. Carried out active supervision supported by the Risk Oversight Committee on the effectiveness of risk management at the Bank and ensure that the implementation of risk management is adequate and in accordance with the Bank's characteristics, complexity and risk profile;
4. Reviewed Supervision Reports every semester, Governance Assessment Reports, related-party transactions, and approve internal policies that require approval up to the Board of Commissioners level;
5. Discussed macroeconomic and industrial conditions as well as new banking regulations, as well as the impact on the Bank's business and its follow-up actions;
6. Supervised investments and achievements related to operations and information technology that were implemented in 2022;
7. Monitored human resource policies and succession of Directors through the Nomination and Remuneration Committee;
8. Ensured that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit (SKAI), including improvements to the audit findings of external auditors and regulators.

Sepanjang tahun 2024, beberapa rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Menganalisa serta memberikan evaluasi, masukan, dan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023-2025 termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank (RAKB) dan rencana strategis Bank;
2. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menangani deviasi yang ada;
3. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*;
4. Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank;
5. Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi serta proyek *Core Banking System*.
6. Memberikan masukan atas perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
7. Memberikan evaluasi, masukan, dan persetujuan atas transaksi afiliasi terkait pemberian kredit dan transaksi jual-beli aset.
8. Memberikan evaluasi, masukan, dan persetujuan atas kebijakan-kebijakan internal Bank yang memerlukan persetujuan hingga Dewan Komisaris.

Throughout 2024, several recommendations and decisions issued by the Board of Commissioners include:

1. Analyzed and provided evaluation, input, and approval of the Bank's Business Plan (RBB) 2023-2025, including the Bank's Sustainable Financial Action Plan (RAKB) and the Bank's strategic plan;
2. Provided evaluation and input on the Bank's financial performance and its achievements when compared to the Bank's targets and efforts in dealing with existing deviations;
3. Provided evaluation and input on the Bank's Health Level, including monitoring the Bank's risk management and stress test results;
4. Provided input regarding the funding structure and liquidity as well as the Bank's funding strategy including increasing low-cost funds (CASA) and the Bank's fee income;
5. Provided input regarding efficiency and cost discipline including the information technology transformation program and the Core Banking System project.
6. Provided input on improvements to the audit findings of external auditors and regulators and ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit (SKAI).
7. Provided evaluation, input and approval of affiliate transactions related to providing credit and asset purchase and sale transactions.
8. Provided evaluation, input and approval of the Bank's internal policies, which require approval from the Board of Commissioners.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Assessment of The Performance of Committees Under The Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris, yaitu:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi Bank berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/ Piagam Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan praktik operasional terbaik yang diperbaharui secara berkala.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

The Board of Commissioners has supporting committees which have duties and responsibilities to support the performance of the Board of Commissioners:

- Audit Committee
- Risk Oversight Committee
- Remuneration and Nomination Committee

The appointment of the above Committee members is carried out by the Bank's Board of Directors based on the Decree of the Board of Commissioners with the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. Committees under the Board of Commissioners are chaired by an Independent Commissioner who has no financial relations, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other forms of relations with the Bank that could affect their independence.

The implementation of duties and responsibilities of the committees under the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to the Work Guidelines and Rules/Committee Charter, which are formulated based on applicable regulations in Indonesia, especially the Financial Services Authority (OJK) Regulations on the Implementation of Governance for Commercial Banks and best operational practices that are updated regularly.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Evaluation is carried out based on the following criteria:
1. Meeting frequency and attendance level
2. Implementation of duties and responsibilities

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite secara kolegial di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimum satu kali setahun. Evaluasi hasil penilaian Komite secara kolegial akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penilaian atas struktur Komite dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite secara kolegial di tingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang meliputi efektivitas rapat Komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

Penilaian kinerja Komite Audit

i. **Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran**

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan Financial Control Division (FCD) dan rapat internal komite selama tahun 2024 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi atas perubahan Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 16 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

ii. **Tugas dan tanggung jawab**

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris, termasuk:

a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
   1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
   2. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
   3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
   4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Policies and Procedures for Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The collegial performance assessments of committees under the Board of Commissioners are carried out at least once a year. Evaluation of the results of the committee's collegial assessment will be presented at the Board of Commissioners' meeting by the Remuneration and Nomination Committee.

The assessment of the committee structure is carried out by the Remuneration and Nomination Committee. Collegial performance assessments of committees under the Board of Commissioners are carried out by all members of the Board of Commissioners, which include the effectiveness of committee meetings and implementation of the committee's duties and responsibilities.

Audit Committee Performance Assessment

i. **Meeting frequency and attendance rate**

The implementation of Audit Committee meetings with the internal audit division (SKAI), Financial Control Division (FCD) unit, and internal committee meetings in 2024 has gone accordingly with their duties and responsibilities, which include monitoring the realization of audit plans, monitoring the follow-up on the completion of internal and external audits, appointing public accountants and public accounting firms that will audit financial reports, as well as providing recommendations on changes to the Head of SKA ofl PT Bank JTrust Indonesia Tbk. In 2024, the Audit Committee held 16 meetings, which were attended by all members.

ii. **Duties and responsibilities**

The Board of Commissioners views that the implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee has been in accordance with its main duties and functions, which include providing evaluations and recommendations to support the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties.

a. Evaluating the audit by Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) on the annual financial statements based on:
   1. Conformity of audit implementation by KAP and/or AP with applicable audit standards.
   2. Sufficient time for work in the field.
   3. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling tests.
   4. Recommendations for improvements.

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan. Hal ini akan diputuskan dalam rapat pemegang saham.
d. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.
e. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
f. Memberikan rekomendasi penunjukan Kepala SKAI yang baru setelah adanya pengunduran diri dari Kepala SKAI yang menjabat.
g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko

i. **Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran**

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melakukan rapat sebanyak 34 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Tata Kelola Bank, Budaya Kepatuhan, serta aspek kegiatan usaha Bank seperti: perkreditan, likuiditas, *treasury*, *funding*, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

ii. **Tugas dan tanggung jawab**

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

b. Evaluating the audit by KAP and/or AP to the relevant work units, to be reported to OJK within 6 months after the financial year ends through the operational work unit.
c. Giving recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of KAP and AP that will audit the financial report. The decision will be made during the general meeting of shareholders.
d. Giving recommendations on the appointment of KAP and AP to OJK no later than 10 days after the appointment through the operational work unit.
e. Evaluating SKAI's performance and making sure that SKAI works independently.
f. Giving recommendations on the appointment of the new Head of SKAI after the resignation of the current Head of SKAI.
g. Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding SKAI's annual audit plan and budget allocation, which will be approved by the President Director and Board of Commissioners.

Risk Oversight Committee Performance Assessment

i. **Meeting frequency and attendance rate**

In 2024, the Risk Oversight Committee held 34 meetings or more than the minimum frequency required by the provisions and the Committee Charter. The meetings were attended by more than 51% of committee members, including Independent Commissioners and independent parties in accordance with applicable provisions.

In these meetings, the committee periodically discussed several topics, such as the Bank's risk profile, the Bank's soundness level, implementation of the Bank's governance, compliance culture, as well as aspects of the Bank's business activities including: credit, liquidity, treasury, funding, and the Bank's internal infrastructure aspects, such as policies and SOPs.

ii. **Duties and responsibilities**

The Board of Commissioners views that the implementation of duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee is in accordance with its main duties and functions, such as:

- Evaluating risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.

- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan).
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

i. **Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran**

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) telah melakukan rapat KNR sebanyak 4 kali, melebihi minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite di bawah Dewan Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP. Rapat juga meninjau dan mengusulkan kandidat Direksi, pengangkatan atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perubahan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris & Direksi.

ii. **Tugas & Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris menilai bahwa KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, di antaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Evaluating the responsibility of the Board of Directors to the Board of Commissioners for the implementation of the risk management policy.
- Monitoring and evaluating the conformity between risk management policy and the implementation of this policy.
- Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee, Risk Management Division, and other relevant divisions.
- Providing input and recommendations regarding the provision of loans to certain debtors.
- Providing input and recommendations on proposed improvements to the Bank's credit policies and procedures.
- Providing input and recommendations on the Bank's risk profile (especially on initiatives to improve its assessment in the future period).
- Providing input and recommendations on improvement initiatives carried out by the Risk Management Division, Compliance Division (especially related to updating the AML-CTF system), and others.

Performance Assessment of the Remuneration and Nomination Committee

i. **Meeting frequency and attendance rate**

In 2024, the Remuneration and Nomination Committee held 4 meetings, exceeding the minimum frequency required by the provisions and the existing RNC Charter, attended by all RNC members in accordance with applicable regulations.

The RNC meetings discussed, among other things, about reviewing the composition of committees under the Board of Commissioners, as well as the policies on compensation, benefits & facilities of the BOC, BOD, and EVP. The meetings also reviewed and proposed candidates for the Board of Directors, appointment or reappointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), changes in membership of committees under the Board of Commissioners and performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ii. **Duties and responsibilities**

The Board of Commissioners views the RNC has carried out its duties and responsibilities well and provided appropriate recommendations, including those regarding:

- Perubahan komposisi anggota Pemantau Risiko.
- Perubahan susunan Komite Audit.
- Rekomendasi pihak Independen sebagai Sekretaris /Anggota Komite Audit yang baru.
- Peninjauan dan rekomendasi untuk pengangkatan/pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- Rekomendasi penggantian dan penugasan kembali Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris untuk 1 periode berikutnya.
- Rekomendasi tugas dan tanggung jawab Wakil Presiden Direktur terkait adanya perubahan struktur organisasi Bank.
- Rekomendasi total gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui lebih lanjut oleh RUPST 2024.
- Rekomendasi gaji, honorarium dan tunjangan SEVP/EVP.
- Pelaksanaan Board Assessment (secara kolegial dan masing-masing anggota)
- Rekomendasi perubahan remunerasi karyawan, Tenaga Kerja Asing dan pengurus Bank.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KNR dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

- Changes in the composition of the Risk Oversight Committee.
- Changes in the composition of the Audit Committee.
- Recommendation of independent party as Secretary/Member of the new Audit Committee.
- Review and recommendations on the appointment/reappointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
- Recommendations on replacement and reassignment of members of committees under the Board of Commissioners for the next period.
- Recommendations on duties and responsibilities of Vice President Director regarding changes in the Bank's organizational structure.
- Recommendations on total salaries, honorarium and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for approval at the 2024 AGMS.
- Recommendations on salaries, honorarium, and allowances of SEVP/EVP.
- Implementation of Board Assessment (collegially or individually).
- Recommendations on changes in remuneration of employees, foreign workers, and the Bank's management.

Overall, recommendations by the Remuneration and Nomination Committee can provide an optimal contribution to the Board of Commissioners in its supervisory function.

DIREKSI

The Board of Directors

Direksi adalah organ tata kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh secara kolegial atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi juga mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang Saham di dalam RUPS.

Dasar Hukum

Pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi

Piagam Direksi dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar penyusunan Piagam Direksi adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

The Board of Directors is the governance body that has the authority and is fully responsible, collegially, for managing the Bank in the best interest of the Bank, in accordance with the Bank's aims and objectives.

The Board of Directors also represents the Bank both inside and outside of court, in accordance with the provisions of the Articles of Association, as well as applicable laws and regulations. The Board of Directors is accountable for its performance to shareholders at the GMS.

Legal basis

The formation and appointment of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to several provisions, including:

1. Law of the Republic of Indonesia concerning Limited Liability Companies and Banking.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letter concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Regulations concerning Commercial Banks.
3. The Bank's Articles of Association.

Board of Directors Charter

The Board of Directors Charter is outlined in the form of "Guidelines and Code of Conducts for the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk" as guidelines and work procedures that are binding for each member of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities.

The basis for the drafting of the Board of Directors Charter is:

1. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking, which has been amended based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 & Surat Edaran Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Companies.
4. Bank Indonesia Regulation Number 12/23/PBI/2010 concerning Fit and Proper Tests.
5. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.
6. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
7. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
8. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.
9. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Public Company Governance.
10. Financial Services Authority Circular Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.
11. Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
12. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
13. Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 & Circular Letter Number 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
14. Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans.
15. Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Functions.
16. Financial Services Authority Regulation Number 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.
17. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2021 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 34 /POJK.03/2018 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions.

18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.
21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
22. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Direksi terakhir diperbaharui pada bulan Oktober 2023 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Direksi [GRI 2-10]

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen di mana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Direksi telah dirinci. Kebijakan tersebut mengatur:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Direksi
   a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Direksi adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
   b. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota Direksi.
   c. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direktur. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

18. Financial Services Authority Circular Letter Number 9/SEOJK.03/2019 concerning Reassessment for Main Bank Parties.
19. Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.
20. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk including its amendments.
21. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) from the National Committee for Governance Policy (KNKG);
22. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

The latest update on Board of Directors Charter was in October 2023 and has been uploaded on the Bank's website www.jtrustbank.co.id. Afterwards, the Working Guideline and Code of Conduct of the Board of Directors will be evaluated and updated regularly by referring to prevailing laws and regulations.

Mechanism for Selection, Appointment and Dismissal, Resignation, as well as Office Term of Members of the Board of Directors [GRI 2-10]

PT Bank JTrust Indonesia has a policy for the Nomination of Candidates for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Independent Parties, in which procedures for the selection, appointment, dismissal, and/or resignation of Members of the Board of Directors have been detailed. The policy stipulates:

1. Procedure for Selection of Members of the Board of Directors
   a. Members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Shareholders may submit proposals for candidates for the Board of Directors to the Bank. Shareholders who may propose candidates for members of the Board of Directors are 1 (one) or more shareholders, who represent 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.
   b. Nominations for members of the Board of Directors may come from internal executive officers who have been prepared to to succeed current members of the Board of Directors.
   c. Banks can also use the services of an independent and reputable third party in the selection process for prospective members of the Board of Directors. A third party appointed by the Bank will assist with the identification and selection process of candidates and provide necessary consultations by the Nomination and Remuneration Committee.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon Direktur dan merekomendasikan calon Direktur ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Calon anggota Direksi akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK di mana OJK akan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.

2. Kriteria Calon Anggota Direksi
Calon anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
b. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
c. Bank melaporkan anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat serta menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

d. The Nomination and Remuneration Committee reviews and evaluates candidates for members of the Board of Directors and recommends them to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.
e. Prospective members of the Board of Directors will undergo a fit and proper test process held by OJK, in which OJK will determine the results of the fit and proper test, namely approved or disapproved.

2. Criteria for Prospective Members of the Board of Directors
Prospective members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia must at least meet the requirements and criteria, which include integrity, competence, and a good financial reputation, as stipulated in the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations in Indonesia and have passed the Fit and Proper Test in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia Regulations.

3. Procedure for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors
a. Members of the Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS based on the proposal from the Board of Commissioners by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and has passed the Fit and Proper Test from OJK, and/or met other requirements set by other relevant agencies before being declared effective as Director.
b. Prospective members of the Board of Directors, who have not obtained effective statement, shall not carry out their duties and responsibilities as a member of Board of Directors and cannot make a legally binding decision, hence their rights and obligations are not attached as members of Board of Directors.
c. The Bank must report members of the Board of Directors who have been declared effective to OJK in charge of Capital Market, OJK in charge of Banking Supervision, and the Indonesia Stock Exchange no later than 10 (ten) working days after the effective date of appointment. The report must be attached with the deed of the GMS, and the concerned individual must write and submit a Director's Statement Letter to the Deposit Insurance Corporation (LPS) no later than 30 (thirty) days after the effective date, in accordance with the prevailing provisions.

d. Anggota Direksi yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru dengan Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Direksi lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.
e. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.

f. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
h. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.
i. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:

   - Menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
   - Mewakili Bank di dalam maupun di luar Pengadilan.

4. Pengunduran Diri Anggota Direksi
   a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
   b. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
   c. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal,

d. The newly-appointed member of the Board of Director shall participate in the Orientation Program aimed at introducing the new member of the Bank, its organization, leadership structure, other members of the Board of Directors, duties, and responsibilities.
e. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons for the dismissal.
f. Temporary dismissal must be notified in writing to the concerned member of the Board of Directors and followed up in accordance with applicable regulations.
g. Dismissal or replacement of members of the Board of Directors must prioritize the Bank's main interests.
h. Dismissal or replacement of President Director and/or Director in charge of compliance before the end of their office term must obtain OJK approval beforehand.

i. Members of the Board of Directors that are temporarily discharged do not have authorization to:
   - Managing the Bank for the interest of the Bank according to the Bank's objective and purpose.
   - Represent the Bank inside or outside of Court.

4. Resignation of the Board of Directors
   a. Members of the Board of Directors may resign from their position before their end of their office term and they are obliged to submit a written resignation request to the Bank no later than 60 (sixty) days or 2 (two) months before the effective resignation date, along with reasons for the resignation. They will be held accountability for the implementation of their duties since their latest accountability report until the effective date of their resignation at the closest Annual GMS.
   b. The Bank is obliged to hold GMS to make a decision on the resignation request from members of the Board of Directors no later than 90 days after receiving the request.
   c. The Bank must hold public expose and report the resignation of members of the Board of Directors to OJK in charge of Capital Market, OJK in charge

OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi serta setelah diputusnya hasil penyelenggaraan RUPS.

d. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi.

5. Masa Jabatan Anggota Direksi
   a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1 (satu).
   b. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
   c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
      - Meninggal dunia;
      - Masa jabatannya berakhir ;
      - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
      - Mengundurkan diri ;
      - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
      - Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
      - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2024, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- Per Desember 2024 jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1

of Banking Supervision, and IDX, no later than 2 (two) working days after the resignation letter is accepted and after the decision is made in the GMS.

d. Members of the Board of Directors who are involved in a financial crime such as manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, money laundering crimes, as well as other criminal acts, must resign from the Board of Directors.

5. Office Term of the Board of Directors
   a. 1 (one) office term of members of the Board of Directors is 1 (one) year or until the closing of the first annual GMS.
   b. A Director whose office term has ended may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for the next period.
   c. The office term of members of the Board of Directors ends when:
      - Pass away;
      - Office term ends;
      - Dismissed based on the decision of the GMS;
      - Resign;
      - Declared bankrupt or placed under custody based on a Court decision;
      - Convicted for committing a criminal offense and/or committing a significant violation of applicable laws and regulations; and
      - No longer meets the requirements as member of the Board of Directors based on provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Number and Composition of member of the Board of Directors

According to the Annual GMS decisions dated 28 June 2024, the number and composition of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is in line with the criteria stipulated by POJK No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks:

- As of December 2024, there were 7 (seven) members of the Board of Directors, including 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one)

(satu) orang Wakil Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 4 (empat) orang Direktur. Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang anggota Direksi.

- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) & IMTA (izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi adalah :

Compliance Director, and 4 (four) Directors. Most members of the Board of Directors are Indonesian citizens, which is 4 (four) out of 7 (seven) members of the Board of Directors.

- All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia, with proof that members of the Board of Directors who are foreign nationals have KITAS (Limited Stay Permit Card) & IMTA (Permit to Employ Foreign Workers) from the relevant institution.
- Replacement and/or appointment of member of Board of Directors has considered the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and approved by the GMS and OJK.
- All members of the Board of Directors do not have familial relationships up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as well as with the Controlling Shareholders.
- All members of the Bank's Board of Directors have passed the Fit and Proper Test and has been approved by the Financial Services Authority.

The number and composition of the member of Board of Directors are:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/ Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS Basis of Appointment GMS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK Effective Date of OJK Approval	Periode Jabatan Term of Office
1.	Ritsuo Fukadai*	Direktur Utama President Director	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 - 2025
2.	Masayoshi Kobayashi *	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	RUPSLB 3 Maret 2023 EGMS 3 March 2023	23 Agustus 2023 23 August 2023	2023 – 2024 2024 - 2025
3.	Felix I. Hartadi*	Direktur Director	Indonesia/Indonesian	RUPSLB 26 Februari 2014 EGMS 26 February 2014	22 April 2014	2014 – 2017 2017 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 - 2025
4.	Helmi A. Hidayat*	Direktur Director	Indonesia/Indonesia	RUPST 30 Juni 2016 AGMS 30 June 2016	5 September 2016	2016 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 - 2025

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/ Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS Basis of Appointment GMS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK Effective Date of OJK Approval	Periode Jabatan Term of Office
5.	Cho Won June*	Direktur Director	Korea Selatan/ Indonesia South Korean/ Indonesia	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 - 2025
6.	R. Djoko Prayitno*	Direktur Director	Indonesia/Indonesia	RUPSLB 3 Mei 2021 EGMS 3 May 2021	20 September 2021	2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 - 2025
7.	Widjaja Hendra*	Direktur Director	Indonesia/Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021 EGMS 15 October 2021	29 November 2021	2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 - 2025

* Diangkat kembali sebagai Direksi Bank JTrust Indonesia berdasarkan Keputusan RUPST 28 Juni 2024, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST Bank No.251 tanggal 28 Juni 2024, efektif sejak ditutupnya RUPS.
Re-appointed as a Board of Directors of Bank JTrust Indonesia Tbk based on the AGMS Decision of 28 June 2024, based on the Deed of Resolution of the Bank's AGMS No. 251 dated 28 June 2024, and effective since the closing of the GMS.

Profil Anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/ Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2024 ini.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.

1. Direksi bertugas untuk:
   a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.
   b. Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
      - Satuan Kerja Audit Intern
      - Satuan Kerja Manajemen Risiko
      - Satuan Kerja Kepatuhan
      - Komite Manajemen Risiko

      serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

Profile of members of the Board of Directors

Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers of this 2024 Annual Report.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors

The Bank's Board of Directors carries out their duties and responsibilities independently, in good faith, with full accountability, and with caution. In performing their duties and responsibilities, Directors must pay attention to the alignment of environmental, economic, social, and governance aspects in formulating short-term and long-term business strategies, in conducting the Bank's business activities as a form of implementing sustainable business practices.

1. The Board of Directors has duties to:
   a. Directors have duties to carry out every action related to the Bank's management in accordance with the objective and purposes of the Bank as well as represent the Bank both inside and outside of Court, as regulated in the laws, Article of Association and/or the GMS decisions.
   b. In implementing the good governance principle in each of the Bank's business and its entire level of organization, the Directors must at least form:
      - Internal Audit Work Unit
      - Risk Management Work Unit
      - Compliance Work Unit
      - Risk Management Committee

      as well as establishing Committees that are in accordance with the prevailing laws, which are adjusted to the Bank's needs.

c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
d. Menyusun rencana Bisnis Bank yang memuat anggaran tahunan Bank dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
e. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi menyampaikan pencapaian kinerja kepada pemegang saham dan/atau investor, termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank serta bisa mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.
g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2. Direksi bertanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
   b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir a di atas apabila dapat membuktikan:
      - Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
      - Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
      - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Conduct an evaluation of the performance of committees under the Board of Directors at least at the end of each fiscal year.
d. Formulate the Bank's Business Plan, which contains the Bank's annual budget, and it must be submitted to the Board of Commissioners for approval.
e. As a public company, the Board of Directors presents the Bank's performance achievements to shareholders and/or investors, including holding public exposure on matters that can have material impacts on the Bank, as well as information that can affect share price or investment decisions of shareholders and investors to the Bank or to the Bank's securities, by taking into account prudential factors and complying with regulations regarding customer privacy.
f. Follow up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, as well as supervisory results from OJK, BI, and/or other regulators.
g. Provide accurate, relevant, and timely manner of data and information to the Board of Commissioners.

2. The Board of Directors is responsible for:
   a. Carry out the Bank's management in good faith, with caution, full responsibility, and jointly and severally bear the Bank's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
   b. Members of the Board of Directors shall not be responsible for the Bank's loss as mentioned in the point a above should they provide proof that they:
      - Have managed the Bank in good faith and with caution for the Bank's interest, in accordance with the Bank's objective and purpose.
      - Do not have personal interest, both direct and indirectly, on the Bank's management, that causes damage or losses.
      - Have taken actions to prevent the emergence or the continuity of the damage.

c. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
   - Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
   - Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
   - Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

3. Direksi berwenang untuk:
   a. Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
   b. Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Etika Kerja

a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta organ pendukung yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.

c. In carrying out the internal audit function, the Board of Directors is responsible for:
   - Developing internal control framework to identify, measure, monitor, and control entire risks faced by the Bank.
   - Ensuring the Internal Audit Work Unit has information related to ongoing development, initiatives, projects, products, and operational changes, as well as risks that have been identified and anticipated.
   - Making sure that the correct and rapid improvements have been carried out based on the findings and recommendations from the Internal Audit Work Units, external auditors, and supervisory results of OJK, BI, and/or other authorities.

3. The Board of Directors has authority to:
   a. Manage the Bank according to the correct policies, in line with the objectives and purposes that are stated in the Articles of Association.
   b. Adjust accordingly to the needs of Committees under the Board of Directors.

Work Ethics

a. Directors must formulate code of ethics that applies to members of the Board, employees, as well as supporting organs that are owned by the Bank and work for the Bank and stipulated thoroughly in the Bank's website.
b. Directors must comply with the code of ethics applicable at the Bank, carry out their duties in good faith, with full accountability and with caution by considering prevailing regulations, which, among others, are related to the implementation of Good Corporate Governance and the Bank's Article of Association, by prioritizing the Bank's interest professionally, as well as work and behave with high integrity.
c. Directors must uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interest between the Bank and Directors, as well as related parties.
d. Directors are prohibited to take any information from PT Bank JTrust Indonesia Tbk for their personal interests, family and/or other parties that can reduce profits and harm the Bank's reputation.

e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (alternate) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, alternate yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.
h. Direksi dilarang:
   - Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
   - Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
   - Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
   - Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
   - Menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
   - Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Rangkap jabatan diperbolehkan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris

e. Directors are jointly responsible for the Bank's loss that was caused by mistake or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties and exempted from the joint responsibilities according to applicable laws and regulations.
f. Members of the Board of Directors who take annual leave must appoint an alternate Director to carry out their duties and authorities. For the Compliance Director, the appointed alternate Director must be the one who does not oversee the Bank's transactional activities. If the leave is more than 7 (seven) consecutive days, then they must report it to OJK according to the prevailing provisions.
g. If the Compliance Director is permanently unable to carry out their duties, due to resignation or the end of office term, their replacement must be appointed within 6 (six) months.
h. The Board of Directors is prohibited to:
   - Have family relationship up to second degree with fellow members of the Board of Directors, and/or with members of the Board of Commissioners. This applies to a majority of members of the Board of Directors.
   - Transfer their general authorities to other parties that can transfer the Board of Directors' function. The definition of general authority transfer is a transfer of authority to one or more employees, or other persons that cause transfer of the entire duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors, without scope and time limitations.
   - Use the Bank for personal interests, family, and/or other parties that can harm and reduce the Bank's profits.
   - Take and/or accept personal interest from the Bank except remuneration and other facilities that has been determined in the Bank's internal policy and approved by the GMS.
   - Accept, deliver, or offer any kind of gratification, both directly and indirectly, from and/or to Officials and business partners.
   - Concurrently serve as a member of the Board of Commissioner, the Board of Directors, or Executive Officers for banks, other companies and/or institutions. Concurrent positions are permitted if members of the Board of Directors are responsible for supervision of the Bank's subsidiaries, carrying out functional duties as

pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

- Memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
  1. untuk proyek bersifat khusus;
  2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
  3. merupakan Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis dan kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
  4. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
  5. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama

a. Memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang Bank dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.
b. Menjaga kesadaran lanskap pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, dan perkembangan industri.
c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Bank dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Presiden Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Bank, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya,

a member of Board of Commissioners for the non-bank subsidiaries that are controlled by the Bank, as long as these concurrent positions do not lead to negligence in carrying out their duties and responsibilities as members of the Bank's Board of Directors.

- Own more than 25% (twenty five percent) shares from the Bank's paid-up capital or in other companies, whether it is individually or collectively.
- Use individual advisor and/or professional services as a consultant. The use of individual advisor and/or professional services as a consultant may be carried out under the following conditions:
  1. for special projects;
  2. based on a clear working contract;
  3. an Independent Party who has technical knowledge and qualifications to carry out particular projects.
  4. carried out by parties who do not hold structural positions at the Bank; and
  5. carried out by parties who do not have authority to make the Bank's operational decisions.

Scope of Work and Responsibility of Each Director

Each member of the Board of Directors carries out their duties in accordance with the division of tasks and authority (as described in job description in the Bank's Organizational Structure), as follows:

1) Ritsuo Fukadai - President Director

a. To lead the development of the Bank's short-term and long-term strategies with the aim of increasing shareholders value.
b. To maintain awareness of the competitive market landscape, expansion opportunities and industry developments.
c. To lead and coordinate the implementation of the Company's management as stipulated in the Articles of Association and GMS resolutions of the Company based on applicable regulations.
d. To lead, coordinate, direct and supervise the Directorates and Divisions in their respective fields under direct supervision from the President Director in order to achieve the Company's objectives, including ensuring the implementation of strategic plan (the Bank's Business Plan) and the achievement of its

pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Bank.

e. Mengembangkan dan memperkuat citra Bank dan membangun hubungan baik dengan Bank-Bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh stakeholder Bank.
f. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Bank yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan Bank dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Bank.
g. Sebagai Ketua Business Command Center (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.

2) Masayoshi Kobayashi – Wakil Presiden Direktur

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan pada bidang non-bisnis dan proses kontrol di bawah supervisinya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi yang tercantum dalam struktur organisasi dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Wakil Direktur Utama sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis [Rencana Bisnis Bank], pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
c. Mengembangkan dan memperkuat citra Perseroan dan membangun hubungan dengan regulator, Bank-Bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh stakeholder Perseroan.
d. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja sesuai dengan tujuan Perseroan dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
e. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang-bidang di bawahnya, serta memperkuat proses kontrol di bawah supervisinya.

performance targets, compliance to rules, regulations, and internal regulations of the Company.

e. To develop and strengthen the image of the Company and build relationships with correspondent Banks, financial institutions, clients, business institutions, financial authorities and all stakeholders of the Company.
f. To ensure the development and implementation of an adequate Company's strategy in all areas of work in accordance with the objectives of the Company and to ensure the achievement of cross- sectoral alliances of Directorate and utilization of all Company's resources.
g. As the Head of Business Command Center (BCC), who is in charge to determine whether the Bank is in liquidity crisis, and activate the BCC function and formulate handling strategies immediately, systematically, pragmatically, and integrated.

2) Masayoshi Kobayashi – Vice President Director

a. Lead and coordinate the practice of the Company's management in the non-business sector and control process that are under his supervision, as stipulated in the Board of Directors decisions, which are laid out in the organizational structure, based on applicable regulations.
b. Lead, coordinate, direct and supervise the Directorates and Divisions that are under Vice President Director's direct supervision according to their respective fields in order to achieve the Company's objectives, including ensuring the implementation of the Bank's Business Plan and the Bank's compliance with applicable laws and regulations, as well as the Company's internal provisions.
c. Develop and strengthen the Company's image and build relations with regulators, correspondent Banks, financial institutions, customers, business institutions, financial authorities and all of the Company's stakeholders.
d. Ensure adequate development and implementation of the Company's strategies in all work areas, in line with the Company's objectives as well as ensuring the formation of alliances between Directorates and utilization of all Company's resources.
e. Lead and direct the formulation and implementation of policies in areas that are under his supervision, as well as strengthening control processes under his supervision.

f. Melakukan koordinasi, memantau dan mengelola proyek strategis non-bisnis Bank dan memastikan penyelesaiannya dengan baik.
g. Melaksanakan supervisi dan koordinasi Direktorat di bawah supervisinya dalam menerapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Bank dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (performance management system dan value-based management) yang efektif.

3) Felix I. Hartadi – Direktur (Managing Director Compliance & Corporate Legal)
a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang kepatuhan & hukum korporasi sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Compliance & Corporate Legal sesuai dengan rencana dan tujuan Bank.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Compliance & Corporate Legal dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis dengan menjaga standar kepatuhan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Compliance & Corporate Legal dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

4) Helmi A. Hidayat – Direktur (Perencanaan & Keuangan)
a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.

f. Coordinate, monitor and manage the Bank's non-business strategic projects and ensure their completion.
g. Oversee and coordinate the Directorates under his supervision in implementing human resources coaching and development at the Bank and ensure effective implementation of competency-based employee development, performance management system and value-based management.

3) Felix I. Hartadi – Direktur (Managing Director Compliance & Corporate Legal)
a. To ensure the development and implementation of appropriate strategies in compliance & corporate legal in accordance with the objectives of the Company and utilizing all of the Bank's resources.
b. To lead and direct the preparation and implementation of policies in all areas under the Directorate of Compliance & Corporate Legal in accordance with the Bank's plans and objectives.
c. To lead and direct the preparation and supervision of the work plan of the Compliance & Corporate Legal Directorate and all sectors under it to support the implementation of functions, duties and responsibilities of the President Director and Business Directorates by maintaining compliance standards and good corporate governance, minimizing legal risks, drafting operational risk policies and ensuring the availability of competent and productive human resources.
d. To carry out mentoring and development of the Bank's resources in all work units under the Directorate of Compliance & Corporate Legal and ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value-based management.

4) Helmi A. Hidayat – Director (Finance & Planning)
a. To ensure the development, planning, and implementation of the Bank's strategy, performance management system, financial control, and operations that are adequate in accordance with the Bank's objectives and utilize all of the Bank's resources effectively.

b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Finance & Planning.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Finance & Planning dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Finance & Planning dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Bank dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Finance & Planning.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Finance & Planning dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

5) Cho Won June – Direktur (Managing Director Information Technology)
a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.

b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Information Technology.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja teknologi informasi dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Information Technology dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Bank dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Information Technology.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Information Technology, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

b. To lead and direct the formulation and implementation of policies in all sectors under the Directorate of Finance and Planning.
c. To lead, direct the formulation, and supervise the implementation of work plan of the Directorate Finance & Planning and all sectors under this Directorate in a bid to support the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Finance & Planning, as well as joint target with other Directorates for the interest and purpose of the Bank in utilizing the competence of the resources of the Directorate Finance & Planning.
d. To carry out mentoring and development of the Bank's resources in all worki units under the Directorate Finance & Planning and ensure the implementation of competence-based employee development, performance management system, and effective value-based management.

5) Cho Won June – Director (Managing Director Information Technology)
a. To ensure development, planning, and implementation of the Bank's strategy, performance management system, financial control, and operations, that are adequate in accordance with the Bank's objectives, as well as utilize all of the Bank's resources.
b. To lead and direct the formulation and implementation of policies in all sectors under the Directorate of Information Technology.
c. To lead, direct the formulation, and supervise the implementation of work plan of the Directorate Information Technology and all sectors under this Directorate to support the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Information Technology, as well as joint target with other Directorates for the interest and purpose of the Bank in utilizing the competence of the resources in the Directorate Information Technology.
d. To implement the nurturing and development of the Bank's resources in all work units under the Information Technology Directorate, and ensure the implementation of competence-based employee development, performance management system and effective value-based management.

6) R. Djoko Prayitno – Direktur (Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies)
   a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perusahaan dalam bidang Management All Delinquencies sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
   b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja pada bidang di bawah Management All Delinquencies.
   c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Management All Delinquencies serta menerapkan seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan.
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Management All Delinquencies dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

7) Widjaja Hendra – Direktur (Managing Director Business)
   a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
   b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Business.
   c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Business dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Bank dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Business.
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Business dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

6) R. Djoko Prayitno – Director (Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies)
   a. To ensure the development and implementation of strategies in Management All Delinquencies, in accordance with the Bank's objectives and utilize all of the Bank's resources.
   b. To lead and direct the formulation and implementation of policies and work plans in all areas under the Management All Delinquencies.
   c. To lead and direct the necessary processes of change, as well as ensure that all operational activities under the Management All Delinquencies are carried out and implement all strategic plans that have been established.
   d. To conduct mentoring and development of the Bank's resources in all work units under the Directorate of Management All Delinquencies and ensure the implementation of competency-based employee development, performance management systems and effective value-based management.

7) Widjaja Hendra - Director (Managing Director Business)
   a. To ensure development, planning and implementation of the Bank's strategy, performance management system, financial control and operations that are adequate in accordance with the Bank's objectives and utilize all of the Bank's resources.
   b. To lead and direct the formulation and implementation of policies in all divisions under the Directorate of Business.
   c. To lead, direct the formulation, and supervise the implementation of work plans of the Directorate of Business and all divisions under this Directorate to support the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Business, as well as joint target with other Directorates for the interest and purpose of the Bank in utilizing the competence of resources in the Directorate Business.
   d. To carry out nurturing and development of the Bank's resources in all work units under the Information Technology Directorate and ensure the implementation of competence-based employee development, performance management system and effective value-based management.

Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2024 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, Bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Pembelian/Penjualan Saham Direksi

Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCIC kepada Sekretaris Perusahaan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah diatur dalam kebijakan internal yang telah disosialisasikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi.

Independency of The Board of Directors

Members of the Board of Directors do not have any relations in terms of financial, organizational and share ownership. All members of the Board of Directors also do not have family relations with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the Bank's Controlling Shareholders.

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors continues to uphold the independence principle and prioritize the Bank's interest above their own interest, as well as working and acting with high integrity.

Concurrent Position of the Board of Directors

According to the provision in OJK regulation on the Governance Implementation for Commercial Banks, members of Board of Directors are prohibited from serving concurrently as members of the Board of Directors or Board of Commissioners or Executive Officers at Banks, companies and/or other institutions, except as members of Board of Directors, they are responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary company, performing functional duties as member of Board of Commissioner of a non-Bank subsidiary controlled by the Bank, so long as it does not result in neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors.

In 2024, none of the members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia held concurrent positions as members of Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers at the controlling shareholder company, other banks, companies and/or other institutions. Furthermore, none of members of the Board of Directors served as members of the committees under the Board of Commissioners.

Purchase/Sale of Directors' Shares

Members of the Board of Directors are obliged to submit information on BCIC share ownership and its changes within 3 (three) working days to be reported to the Financial Services Authority. This policy is in accordance with Article 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares and has been regulated in internal policies which have been socialized by the Corporate Secretary to all Directors.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2024 kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan regulator mengenai laporan kepemilikan saham.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has also submitted a report on any changes to the Board of Directors' share ownership in 2024 to the OJK and IDX as a form of compliance with internal and regulatory policies regarding share ownership reports.

Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan afiliasi Direksi diatur dalam POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum di mana mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Aturan ini juga berisi mengenai aspek transparansi Direksi di mana anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Affiliation Relationship of the Board of Directors

Affiliation relationship of the Board of Directors has been regulated in the POJK No. 17 of 2023 concerning Governance in Commercial Banks, in which the majority of members of the Board of Directors must not have family relations up until the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. This regulation also contains a transparency aspect of the Board of Directors where members shall report their financial and family relations with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or the Bank's controlling shareholders.

Pada tahun 2024, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

In 2024, the Financial and Family Relations of Members of the Board of Directors with Other Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Bank's Controlling Shareholders are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with						Hubungan Keuangan dengan Finance Relations with					
		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Felix I. Hartadi	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cho Won June	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Widjaja Hendra	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Anggaran Dasar Bank menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi apabila di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

The Company's Article of Association stated that the GMS may discharge members of the Board of Directors should there one of members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of Board of Commissioners have family relations up to the third degree, whether it is vertically or horizontally, including relations due to marriage.

Benturan Kepentingan Direksi [GRI 2-15]

Sepanjang tahun 2024, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya tidak diperkenankan turut serta dalam pengambilan keputusan.
2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
   a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
3) Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan bank.
4) Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, kebijakan internal Bank, dan Anggaran Dasar.
5) Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Direksi

Anggota Direksi beserta keluarga dan pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat diberikan pinjaman dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan kebijakan harga dan syarat normal (*on Arms-Length basis*), sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank.

Conflict of Interest of the Board of Directors [GRI 2-15]

Throughout 2024, the Bank ensures that all members of the Board of Directors do not have constrict of interest or potential conflict of interest against PT Bank JTrust Indonesia Tbk. This is in line with the Board of Directors charter as follows:

1) Every member of the Board of Directors that personally in any way, both direct and indirectly, has conflict of interest or potential conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, where the Bank becomes one of the parties, is prohibited from participating in the decision making.
2) Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Bank if:
   a. There is a case in the court between the Bank with the concerned member of the Board of Directors.
   b. The concerned member of the Board of Directors has conflict of interest against the Bank.
3) In the event of a conflict of interest, the authorized party to represent the Bank is:
   a. Other members of the Board of Directors that do not have conflict of interest against the Bank.
   b. The Board of Commissioners if all members of the Board of Directors have conflict of interest against the Bank.
   c. Other parties appointed by the GMS if all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have conflict of interest against the Bank.
4) Members of the Board of Directors shall abide by other provisions related to conflict of interest according to regulations by the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia, the Bank's internal policies, and the Bank's Article of Association.
5) In case of potential conflict of interest against the Bank, the Board of Directors must report it to the Audit Committee, hence the Audit Committee can provide recommendation to the Board of Commissioners.

Loan Provision Policy for Directors

Members of the Board of Directors, their families and other parties affiliated with them can obtain loans from the Bank after securing approval of the Board of Commissioners under fair price policies that reflect market conditions (based on Arm's-Length principle), as required for parties that are not related to the Bank.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2024, tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2024 sebagai berikut :

a. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024.
b. Menyusun RBB dan RAKB 2025.
c. Membuat rencana strategis Bank.
d. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan customer experience serta produk dan layanan Bank.
e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
f. Melakukan self-assessment Tingkat Kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan stress test.
g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
h. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan fee income Bank.
i. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.
j. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
k. Memantau kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:
   a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
   b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Other than carrying out the GMS resolutions held in 2024, duties and responsibilities of the Board of Directors throughout 2024 are as follows:

a. Implementing the Bank's Business Plan (RBB) and the Sustainable Financial Action Plan (RAKB) for 2024.
b. Preparing the Bank's Business Plan (RBB) and Sustainable Financial Action Plan (RKAB) for 2025.
c. Formulating the Bank's strategic plan.
d. Prioritizing the needs of the customers by improving customer experience as well as the Bank's product and services.
e. Taking necessary steps and making the best efforts to ensure that the Bank's financial performance meet the targets that have been set.
f. Carrying out self-assessment on the Bank's Soundness Level including managing the Bank's risk management and conducting stress tests.
g. Following up audit findings and recommendation form the Internal Audit Working Unit (SKAI), including improvement on the findings from external auditors and regulators.
h. Managing the Bank's funding structure and liquidity, as well as funding strategy, including increasing low-cost funding (CASA) and the Bank's fee-based income.
i. Conducting cost efficiency and discipline including transformation program for of information technology.
j. Implementing effective risk management and ensure that it is adequate according to the Bank's characteristic, complexity, and risk profile to manage risk, credit, liquidity, market, operational, legal, reputation, strategic, and compliance.
k. Monitoring macroeconomic and industrial conditions, banking regulations updates, as well as its impact to the Bank's business and the follow-up actions.

Provisions and Implementation of the Board of Directors Meetings

1. Provisions of the Board of Directors Meetings stipulate:
   a. The Board of Directors must hold meetings at least 1 (once) every month.
   b. The Board of Directors must hold joint meetings with the Board of Commissioners regularly, at least 1 (once) in 4 (four) months or at least 3 (three) times in a year.

c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
d. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
e. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) di antaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
f. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat pada hari H meeting sesuai ketentuan yang berlaku.
h. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.
i. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri atau diwakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota Direksi.
j. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
k. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
l. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang

c. The Board of Directors must schedule its meetings and joint meetings with the Board of Commissioners for the following year before the end of the fiscal year.
d. The Board of Directors meeting may be conducted physically or using teleconference, or via other electronic media.
e. Meeting attendance must be at least 75% (seventy five percent) per year, in which all members of the Board of Directors must attend.
f. Every strategic policy and decision shall be determined through the BOD meeting by considering the provisions on the Article of Association and prevailing laws and regulations.
g. At meetings that have been scheduled as mentioned above, meeting invitations and materials must be delivered to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. In the event that a meeting is not scheduled, the meeting materials are delivered to the meeting participants on the day of the meeting in accordance with applicable regulations.
h. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, in the event that the President Director is vacant or unable to attend or is unavailable, which does not need to be proven to a third party, then the Board of Directors meeting will be chaired by members of the Board of Directors who are present and elected by the Directors who are present at the Meeting.
i. Directors meeting can be held if attended/ represented by at least 75% (seventy five percent) of the total members of the Board of Directors.
j. Decisions at Board of Directors meetings are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus is not reached, the decision will be made through a vote, with the "agree" votes constituting at least 2/3 (two thirds) of the total number of Directors present at the meeting.
k. If there is a dissenting opinion that occurred in the Directors meeting, it must be clearly stated in the minutes of meetings along with reasons for the dissenting opinions.
l. The decision in the Board of Directors meeting in which the Board of Commissioners is invited, shall be stipulated in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Directors

hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.

m. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
o. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

2. Selama tahun 2024 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
   Rapat antara anggota Direksi dilaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali untuk membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Bank. Rapat Bersama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Pada tahun 2024, pelaksanaan rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara *hybrid* yaitu hadir fisik dan virtual.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2024 berdasarkan periode menjabat adalah:

and Board of Commissioners that present in the meeting, and reported to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the Corporate Secretary.

m. In case a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners does not sign the above minutes of meeting, the related party shall provide their reasons in writing in a separate letter that is attached to the minutes of meeting.
n. The Board of Directors may also take a legal and binding decision without holding the Board of Directors Meeting, with the provision that all members of the Board of Directors approve and sign the decision letter stipulating the proposal (Circular Decision).

o. The mechanism for organizing meetings always refers to applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

2. Throughout 2024, the BOD has conducted the following meetings:
   Members of the Board of Directors held 24 (twenty four) meetings to discuss all issues and/or the Bank's management strategies. Joint meetings between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners were held 6 (six) times, attended by the majority of members of the Board of Directors and Board of Commissioners who have passed the fit and proper test by the OJK.

In 2024, meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners were held in a hybrid format, both physically and virtually.

The attendance frequency and attendance level at meetings of members of the Board of Directors in 2024 based on the term of office is:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Antara Anggota Direksi Meetings of the Board of Directors				
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	23/24	98%
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	1 Januari -31 Desember 2024 11 September-31 December 2024	24/24	100%
Felix I. Hartadi	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	19/24	88%
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	21/24	94%

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Cho Won June	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	22/24	96%
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	24/24	100%
Widjaja Hendra	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	22/24	96%
Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meetings with the Board of Commissioners				
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	6/6	100%
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	1 Januari -31 Desember 2024 11 September-31 December 2024	6/6	100%
Felix I. Hartadi	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	6/6	100%
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	5/6	98%
Cho Won June	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	4/6	96%
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	5/6	98%
Widjaja Hendra	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2024 1 January-31 December 2024	6/6	100%

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi:

Table of Meeting Attendance by Each Member of the Board of Directors

Agenda Rapat Direksi
Meeting Agenda of the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	18-Jan-24	• Pembahasan IT • RBBR • IT Related • RBBR	1. Masayoshi Kobayashi 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra
2	29-Jan-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
3	26-Feb-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Cho Won June 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra
4	27-Mar-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Cho Won June 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Direksi
Meeting Agenda of the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5	22-Apr-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Cho Won June 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra
6	2-Mei-24	• Konsultan mengenai masalah GL vs Nominatif • Consultant regarding GL vs Nominative issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
7	6-May-24	• Laporan Keuangan yang telah diaudit • Audited Financial Statement	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
8	29-May-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
9	25-Jun-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
10	5-Jul-24	• Proyek Pembangunan Kantor Pusat • Head Office Building Project	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
11	15-Jul-24	• RBBR • RBBR	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
12	24-Jul-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
13	30-Jul-24	• Revisi RBB • Revison of RBB	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Direksi
Meeting Agenda of the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14	22-Agt-24	• Revisi RBB • Revison of RBB	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
15	29-Agt-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
16	25-Sep-23	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
17	11-Oct-24	• Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Anggaran 2021 • Tax Audit Result of Fiszal Year 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
18	15-Oct-24	• Profil Risiko Q III • Risk Profile Q III	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
19	23-Oct-24	• Pertemuan Awal dengan PKF • Kick off Meeting with PKF	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno
20	28-Oct-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
21	8-Nov-24	• Rencana Pemulihan dan Resolusi • Recovery and Resolution Plan	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
22	25-Nov-24	• Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 • Bank Business Plan 2025 - 2027	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Direksi
Meeting Agenda of the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
23	29-Nov-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
24	23-Des-24	• Prognosis keuangan • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya • Paparan manajemen risiko • Pembahasan Internal Audit • Financial Prognosis • Discussion on Compliance issues and others • Risk management presentation • Internal Audit presentation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Lihat Uraian 2. Dewan Komisaris > tercantum "Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi".

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners

See Description 2. The Board of Commissioners contains "Agenda of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors".

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada)
   - Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
   - Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi

Training and/or Competency Improvement for Members of the Board of Directors

1. Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Directors, including orientation program for newly-appointed members of the Board of Directors (if any)
   - The Board of Directors must follow certification/competence test programs according to regulatory requirements: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with the change of Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated 4 June 2009 and the amendment in Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 dated 19 April 2010 on Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, as well as OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources at Commercial Banks.
   - Newly appointed members of the Board of Directors are required to attend an orientation program in order to gain an understanding of the Bank so that they can carry out their duties effectively and efficiently.
2. Training and/or Competency Improvement for Members of the Board of Directors

Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

All members of the Board of Directors have owned Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing provisions.

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2024 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

To implement training programs and improve competency for all members of the Board of Directors to support the implementation of their duties and responsibilities, throughout 2024, members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have participated in various training programs, workshops, conferences, seminars, including:

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa Tanggal Kadarluarsa
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Felix I. Hartadi	Direktur Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Cho Won June	Direktur Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Widjaja Hendra	Direktur Director	7	LSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2024 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

To carry out training programs and increase competency for all members of the Board of Directors to support their duties and responsibilities, throughout 2023, members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have participated in various training programs, workshops, conferences, seminars, including:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		Digital Innovations for Global Integrity Digital Innovations for Global Integrity	Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA)	10-11 Des 2024, Jakarta 10-11 Dec 2014, Jakarta

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/ Seminar Name of Training/Workshop/Conference/ Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Felix Istyono Hartadi	Direktur Kepatuhan & Corporate Legal Director of Compliance & Corporate Legal	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas 2045 Economic Prospects in 2025 to reach Golden Indonesia 2045	FKDKP	11 Des 2024, Jakarta 11 Dec 2024, Jakarta
Helmi Arief Hidayat	Direktur Keuangan & Perencanaan Director of Finance & Planning	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Navigating for Sustainability: Financial Leadership in a Changing World Navigating for Sustainability: Financial Leadership in a Changing World	Perbanas	1-3 Agt 2024, Bali 1-3 Aug 2024, Bali
Cho Won June	Direktur Informasi Teknologi Director of Information Technology	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		From Risk to Reliability: Mitigating Cyber Threats and Enhancing Data Quality From Risk to Reliability: Mitigating Cyber Threats and Enhancing Data Quality	Bank Indonesia	12-13 Agt 2024, Jakarta 12-13 Aug 2024, Jakarta
R. Djoko Prayitno	Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies Director of Credit Risk & Management All Delinquencies	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
Widjaja Hendra	Direktur Bisnis Business Director	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta

Program Orientasi Anggota Direksi yang Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Direksi yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk soft copy dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
   - Filosofi Logo;
   - Tonggak sejarah;
   - Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan; dan,
   - Produk & Layanan

Orientation Program for New Member of the Board of Directors

The newly-appointed members of the Board of Directors are provided with a Handbook containing information to help them orient themselves to the Bank. This Guidebook is available in soft copy and a summary is also available on the Bank's website.

The Handbook includes:

1. Company History
   - Logo philosophy;
   - Milestones;
   - Vision, Mission, and Corporate Value; and,
   - Products & Services

2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
   - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
   - Profil & Piagam Direksi;
   - SEVP & EVP; dan
   - Struktur Organisasi

3. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
   - Anggota dan Piagam Komite Audit;
   - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
   - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

4. Komite-Komite di Bawah Direksi
   - Anggota dan Piagam Komite Manajemen Risiko
   - Anggota dan Piagam Komite Kredit
   - Anggota dan Piagam Komite Kebijakan Perkreditan
   - Anggota dan Piagam Komite Aset & Liabilitas (ALCO)
   - Anggota dan Piagam Komite Pengarah IT

5. Tata Kelola Perusahaan
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
   - Kerahasiaan;
   - Benturan Kepentingan;
   - Transaksi Orang Dalam;
   - Komunikasi dengan Media
   - Penyalahgunaan wewenang
   - Perilaku Orang Dalam
   - Akurasi Data
   - Peraturan Perbankan

6. Hukum dan Peraturan
   Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Direksi yang baru untuk bertemu dengan Dewan Komisaris, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian Kinerja Direksi [GRI 2-18]

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan penilaian sendiri atau self-assessment sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) oleh KNKG.

2. Company Structure & Management Profile
   - Profile & Charter of the Board of Commissioners;
   - Profile & Charter of the Board of Directors;
   - SEVP & EVP; and
   - Organizational structure

3. Committees Under the Board of Commissioners
   - Members and Charter of the Audit Committee;
   - Member and Charter of the Risk Oversight Committee; and
   - Nomination & Remuneration Committee Members and Charter

4. Committees under the Board of Directors
   - Members and Charter of the Risk Management Committee;
   - Members and Charter of the Credit Committee;
   - Members and Charter of the Credit Policy Committee;
   - Members and Charter of the Asset & Liability Committee (ALCO);
   - Members and Charter of the IT Steering Committee

5. Corporate Governance
   - Code of Ethics and Business Conduct;
   - Confidentiality;
   - Conflict of Interest;
   - Insider Trading;
   - Communication with the Media
   - Abuse of authority
   - Insider Behaviour
   - Data Accuracy
   - Banking Regulations

6. Laws and Regulations
   In addition to the Handbook, meetings are arranged for new Members of the Board of Directors to meet with the Board of Commissioners, SEVP/EVP and key management personnel.

Performance Assessment of the Board of Directors [GRI 2-18]

The Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a self-assessment policy as a form of accountability for evaluating the performance of the Board of Directors collegially and individually in accordance with OJK Circular Letter number 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines and General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) by KNKG.

1. Pihak yang melakukan penilaian
   Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi untuk menilai efektivitas kinerja Direksi secara kolegial serta masing-masing anggota Direksi. Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi. Penilaian kinerja Direksi secara kolegial dilakukan melalui self-assessment di mana Direksi melalui Corporate Secretary Division mengisi Kertas Kerja Self-Assessment untuk faktor penilaian secara kolegial.

2. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja
   Kebijakan dan prosedur penilaian yang dilakukan meliputi:
   a. Penilaian kinerja kolegial Direksi; dan

   b. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi.

aian dilakukan oleh masing-masing Direksi atas kinerja Direksi secara keseluruhan serta memberikan penilaian terhadap kinerja individu masing-masing anggota Direksi. Seluruh jawaban atas kertas kerja yang diberikan oleh pihak-pihak di atas disampaikan langsung kepada Corporate Secretary. Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan dan membahas seluruh hasil penilaian kinerja tersebut di dalam rapat Dewan Komisaris. Hasil pembahasan akan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan maupun action plan (jika diperlukan).

3. Kriteria yang digunakan
   Penilaian Kinerja Masing-Masing Direksi dengan *Self-Assessment*.
   Dalam rangka mengarahkan kegiatan Bank sesuai dengan visi misinya, Bank memformulasikan strategi perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya. Untuk mengukur kinerja atau prestasi Bank dalam mengimplementasikan hal ini, Bank menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang melekat pada *Balance Scorecard* (BSC).

Indikator kinerja ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing anggota Direksi dan meliputi aspek keuangan, *customer, internal process & learning & growth* untuk selanjutnya diturunkan juga kepada seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, dilakukan minimal satu kali dalam setahun (dengan review 6 bulan sekali).

1. The party carrying out the assessment
   The Bank carries out a performance evaluation process for the Board of Directors to assess the their performance effectiveness collegially and individually. The President Director assesses the performance of each individual Director. Collegial assessment of the Board of Directors' performance is carried out through self-assessment where the Board of Directors, through the Corporate Secretary Division, fills out the Self-Assessment Working Paper for collegial assessment factors.
2. Procedures for implementing performance assessments
   The assessment policies and procedures include:
   a. Assessment of the collegial performance of the Board of Directors; and
   b. Assessment of the individual performance of each member of the Board of Directors.

The assessment is carried out by each Director on the overall performance of the Board of Directors as well as assessment of the individual performance of each member of the Board of Directors. All answers to working papers are submitted directly to the Corporate Secretary. The Nomination and Remuneration Committee conveys and discusses all performance assessment results at the Board of Commissioners meeting. The results of the discussion will be followed up in the form of improvements or action plans (if necessary).

3. Criteria
   Performance Assessment of Each Director with Self-Assessment.
   In order to align the Bank's activities with its vision and mission, the Bank formulates corporate strategies and work plans to achieve them. To measure the Bank's performance or achievements in implementing this, the Bank uses Key Performance Indicators (KPI) attached to the Balance Scorecard (BSC).

Performance indicators are determined in accordance with the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors and include financial, customer, internal process & learning & growth aspects and are then passed down to all employees to achieve company goals.

The performance assessment of the Board of Directors is carried out at least once a year (with a review every 6 months).

Adapun *key performance indicator* yang digunakan dalam evaluasi masing-masing kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut:

The key performance indicators used in evaluating the performance of each member of the Board of Directors are as follows:

	Presiden Direktur President Director	**Wakil Presiden Direktur** Vice President Director	**Direktur Keuangan & Perencanaan** Finance & Planning Director	**Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies** Credit Risk & Management All Delinquencies Director	**Direktur Bisnis** Business Director	**Direktur Kepatuhan & Hukum Perusahaan** Compliance & Corporate Legal Director	**Direktur Teknologi Informasi** Information Technology Director
Keuangan Finance	50%	40%	30%	20%	60%	10%	20%
Mengutamakan Pelanggan Customer First	20%	20%	20%	40%	10%	40%	40%
Proses Internal Internal Process	20%	30%	40%	30%	20%	40%	30%
Pembelajaran & Pertumbuhan Learning & Growth	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Penilaian Kolegial Melalui Self-Assessment

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup:

1. Efektivitas peran, dinamika, fungsi, serta tugas & tanggung Jawab Direksi
2. Komitmen atas perlindungan hak pemegang saham
3. Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan
4. Komitmen atas transparansi dan keterbukaan informasi
5. Komitmen untuk menjunjung tinggi etika

Penilaian kinerja Direksi akan dilakukan kembali pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2024 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Collegial Assessment Through Self-Assessment

The criteria/indicators used include:

1. Effectiveness of the role, dynamics, functions, and duties & responsibilities of the Board of Directors
2. Commitment to protecting shareholder rights
3. Establishment of good relationships with stakeholders
4. Commitment to transparency and disclosure of information
5. Commitment to upholding ethics

The performance assessment of the Board of Directors will be carried out again during the Bank's annual report accountability for the 2024 fiscal year at the Annual GMS to shareholders which will be held in 2025.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024

Pada tahun 2024, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat "memenuhi ekspektasi", dengan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Results of the Directors' Performance Assessment in 2024

In 2024, the Board of Directors has carried out its duties and functions with the predicate "meets expectations", by performing its duties and responsibilities, as well as ensuring the implementation of good governance and compliance with applicable regulations in each of the Bank's business activity at all levels of the organization.

Adapun hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial secara rinci sebagai berikut:

The results of the collegial performance assessment of the Board of Directors in detail are as follows:

Penilaian Kinerja Kolegial Collegial Performance Assessment
2,98

Tabel Rentang Nilai
Score Range Table

Nilai Score	Penjelasan Description
> 4,50	Istimewa | Exemplary
3,50 - 4,49	Melampaui ekspektasi | Exceed expectations
2,50 - 3,49	Memenuhi ekspektasi | Meet expectations
1,50 - 2,49	Cukup memenuhi ekspektasi | Partially meet expectations
0,01 - 1,49	Memerlukan Perbaikan yang signifikan | Need significant improvement

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Direksi

Penilaian kinerja Komite Direksi dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh Direksi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Jumlah rapat yang dilaksanakan
b. Kehadiran Direksi
c. Service Level Agreement Risalah Rapat
d. Action Matters Arising
e. Distribusi undangan rapat

Sepanjang tahun 2024, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Direksi dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2024, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat dapat menjadi acuan .

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank, serta menyetujui Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.
2. Asset & Liability Committee (ALCO) telah menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari market dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga, memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank, serta memantau keadaan asset dan liability Bank dan menyampaikannya secara berkala.

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

Performance Assessment Procedures for Committees under the Board of Directors

The performance assessment of the Board of Directors Committee is carried out annually (at least once a year). Evaluation of performance effectiveness is carried out by the Board of Directors, with the following assessment criteria:

a. Number of meetings held
b. Attendance of the Board of Directors
c. Service Level Agreement Minutes of Meeting
d. Action Matters Arising
e. Distribution of meeting invitations

Throughout 2024, the Board of Directors assessed that these committees have carried out their duties, responsibilities and discussions in the Committee meetings, effectively and efficiently. The participation and attendance of the Board of Directors in the committee meetings during 2024, including decisions taken during meeting discussions, can be used as a reference.

This assessment is based on several things including the following:

1. The Risk Management Committee has provided recommendations and/or approval for policies, strategies and guidelines for implementing the Bank's risk management, as well as approved the Bank's Risk Profile Report and Bank Soundness Level Report, which are carried out periodically.
2. The Asset & Liability Committee (ALCO) has conveyed the latest market conditions and developments and their implications for the Bank in determining business direction related to interest rates, provide recommendations and/or approval of policies, strategies and guidelines for implementing the Bank's interest rate policy, as well as monitor the condition of assets and Bank liabilities and submit them periodically.

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan review terhadap strategi Teknologi Informasi, review anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke IT Road Map dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.
4. Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan four eyes principle sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit yang berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Surat Edaran (SE) serta Peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang terkait.
5. Komite Kebijakan Perkreditan telah merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikannya.

KEBIJAKAN REMUNERASI [GRI 2-19]

Tujuan dan Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank, meningkatkan keunggulan kompetitif yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi utama, Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan remunerasi disusun oleh Bank dalam rangka menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di Bank.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja dan risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan profil risiko Bank dengan tetap memperhatikan berbagai faktor penting

3. The Information Technology Steering Committee has reviewed the Information Technology strategy and budget, carried out an evaluation of developing Information Technology projects in accordance with the needs of business users by referring to the IT Road Map and/or Bank Business Plan and ensured investment in Information Technology projects which will be implemented to provide optimal results.
4. In making credit decisions, the Credit Committee has taken into account the prudence principle and implemented the four eyes principle, in accordance with the limits of its authority in the credit granting process which is guided by the provisions of the Bank Credit Policy (KPB), Credit Implementation Guidelines (PPK), applicable laws and regulations, as well as Circular Letters (SE) and related Bank Indonesia (BI)/OJK Regulations.
5. The Credit Policy Committee has formulated policies, supervised policy implementation, monitored the development of the credit portfolio and provided suggestions for improvement steps.

REMUNERATION POLICY [GRI 2-19]

Purpose and Background

To support the achievement of the Bank's vision, increase competitive advantages that are able to attract the best talents in the market and also maintain added value in each main function, the Bank has established a remuneration policy which has been prepared based on Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated 28 December 2015 and Financial Services Authority Circular Letter Number 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

The Bank formulates the remuneration policy to maintain work morale in the organization by creating equal practices that are internally fair and competitive with market prices as well as enforcing equal application of compensation and remuneration systems in the Bank.

Remuneration Policy Associated with Risk

The Bank has formulated remuneration policies that are based on performance and risk. The main types of risk in the remuneration policy are adjusted to the Bank's risk profile while taking into account various

lainnya seperti kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja, dan kemampuan Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang berlaku sejak Februari 2022, dan telah ada pembaruan kebijakan ini (kebijakan internal Bank) pada Maret 2024, yang mengatur gaji dan remunerasi sesuai ketentuan Bank dan melakukan upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan market pada industri yang sama.

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank mengkaji sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan secara berkala dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank;
2. Kompetensi dan kinerja karyawan;
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar;
4. Asas kelayakan dan kepantasan sesuai dengan posisi/jabatan;
5. Kesetaraan internal;
6. Tingkat risiko jabatan; dan
7. Strategi jangka panjang Bank.

Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit kontrol, maka Bank memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penentuan Remunerasi/Kompensasi Jangka Panjang yang Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko [GRI 2-20]

Penentuan remunerasi dalam bentuk variabel dikaitkan dengan pencapaian target atau kinerja tertentu dan mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi di hari kemudian. Penetapan remunerasi yang bersifat variabel merupakan hak penuh Bank dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan, kinerja unit kerja terkait, kinerja individu dan potensi risiko yang bisa terjadi pada waktu yang akan datang.

Bank menetapkan pihak *Material Risk Taker* (MRT) adalah Dewan Komisaris, Direksi, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

other important factors such as market conditions, industrial developments, performance, and the Bank capabilities.

The Bank has a Remuneration Policy, which has been stipulated since February 2022 and there was an update of this policy (the Bank's internal policy) in March 2024. The policy regulates salary and remuneration adjustments in accordance with the Bank's provisions and a review of remuneration from the previous year by measuring the salary scale structure based on the market in the same industry.

Review and Independence of Implementation of Remuneration Policy

The Bank reviews the employee remuneration and welfare system periodically by paying attention and considering matters including the following:

1. The Bank's financial performance and condition;
2. Employee competency and performance;
3. Remuneration practices applicable in the market;
4. Principles of suitability and appropriateness according to the position;
5. Internal equality;
6. Position risk level; And
7. The Bank's long-term strategy.

In order to ensure independence in providing remuneration to all employees, including employees in the control unit, the Bank ensures that performance evaluation and determination of remuneration is carried out through supervision and review from the Nomination and Remuneration Committee.

Determination of Long-Term Remuneration/ Compensation Associated with Performance and Risk [GRI 2-20]

Determining remuneration in variable form is linked to the achievement of certain targets or performance and considers risks that may occur in the future. Determining variable remuneration is the Bank's full rights by considering the Bank's overall performance, the performance of related work units, individual performance and potential risks that may occur in the future.

The Bank determines that the Material Risk Taker (MRT) is the Board of Commissioners, Directors, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP) and employees with certain positions who, because of their duties and responsibilities, make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.

Bank menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu dengan tujuan agar pejabat Bank melakukan keputusan bisnis dengan berorientasi jangka panjang, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal berjangka pendek (profitabilitas, kualitas aset, pertumbuhan bisnis berkelanjutan) serta agar pejabat Bank meningkatkan rasa memiliki dan loyal terhadap Bank. Jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan adalah sebesar 30% dan jangka waktu penangguhan adalah selama 3 (tiga) tahun.

The Bank postpones the payment of variable remuneration to individuals who are part of the MRTs by a certain percentage, aiming to encourage the Bank's officials to make business decisions with a long-term focus, rather than only considering short-term factors (such as profitability, asset quality, sustainable business growth). This is also done to foster a sense of belonging and loyalty towards the Bank. The amount of deferred variable remuneration is 30% and the suspension period is 3 (three) years.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

The implementation of variable remuneration at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has not been carried out so far due to the company's performance conditions.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Bank.

Remuneration and Facilities Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

The GMS approved to grant authority to the Bank's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (honorarium, bonus, and determination of other facilities/benefits/allowances) for members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee while still considering the Bank's financial condition.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris
- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Procedure for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

- Phase 1
  The Remuneration and Nomination Committee prepares and proposes recommendations for remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners.
- Phase 2
  The Board of Commissioners reviews the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Phase 3
  The GMS acting on behalf of the majority shareholders approved granting authority to the Bank's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure and Facility for the Board of Commissioner and Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Ketentuan Provisions
1	Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the Board of Commissioners, Board of Directors, & EVP
2	Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Bonus, monthly allowances, incentives, and other facilities in the form of in-kind	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the Board of Commissioners, Board of Directors, & EVP

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners include the remuneration structure and details of the nominal amount, as in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2023 Remuneration and Facilities in 2023	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun*) Amounts Received in 1 (One) Year*			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Directors	
	Orang People	Rupiah	Orang People	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonuses, monthly allowances, incentives and other facilities in the form of cash)	4	5.600.850.982	8	22.371.541.007
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other non-cash facilities (housing, transportation, health insurance and so on) which: a. Can be owned (retired) b. Cannot be owned	2 3	357.294.554 646.600.698	3 7	819.917.789 1.252.953.990
Total	**4**	**6.604.746.234**	**8**	**24.444.412.786**

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
*) Remuneration received includes tax

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2024 Remuneration and Facilities in 2024	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun*) Amounts Received in 1 (One) Year*			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Directors	
	Orang People	Rupiah	Orang People	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonuses, monthly allowances, incentives and other facilities in the form of cash)	4	5.600.850.982	7	22.887.142.933
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other non-cash facilities (housing, transportation, health insurance and so on) which: a. Can be owned (retired) b. Cannot be owned	2 3	368.777.076 692.153.889	3 7	838.648.074 1.440.345.830
Total	**4**	**6.893.470.385**	**7**	**25.166.136.837**

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
*) Remuneration received includes tax

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration packages are grouped into income levels received by Directors and members of the Board of Commissioners in 1 (one) year, as shown in the table below:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*) Total Remuneration per person in 1 (one) year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners		Jumlah Direksi Number of Directors	
	2023	2024	2023	2024
Di atas Rp2 miliar | Above Rp2 billion	1	1	6	7
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar | Between Rp1 billion to Rp2 billion	2	2	1	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | Between Rp500 million to Rp1 billion	-	-	1	-
Rp500 juta ke bawah | Below Rp500 million	-	-	-	-

*) Diterima secara tunai
*) Accepted In cash
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
*) Remuneration received includes tax

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, *peers' group*, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Variable remuneration includes:

a. Variable forms of remuneration and the reasons for choosing this form.

Variable remuneration is remuneration that is linked to performance and risk, including bonuses or other equivalent forms. The decision to award bonuses takes into account the Company's condition, peers' group, inflation rate and does not conflict with applicable regulations and pays attention to the precautionary principle.

b. Explanation in the event that there are differences in the provision of variable remuneration between Directors, the Board of Commissioners and/or Employees, including an explanation of factors that determine these differences along with the underlying considerations.

Pemberian bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS dan atas usulan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta mempertimbangkan faktor kinerja dan risiko.

Bonuses are awarded based on the decision of the GMS and recommendations of the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, as well as considering performance and risk factors.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

The number of Directors, Board of Commissioners and Employees who receive variable remuneration for 1 (one) year and the total nominal amount is shown in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2024 Remuneration and Facilities in 2024	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun*) Amounts Received in 1 (One) Year*					
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employees	
	Orang People	Juta Rp Million Rp	Orang People	Juta Rp Million Rp	Orang People	Juta Rp Million Rp
Bonus/Saham Bonus/Shares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT)

Bank menetapkan jabatan sebagai pihak yang digolongkan ke dalam MRT adalah Dewan Komisaris, Direksi, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Position and number of parties who are Material Risk Takers (MRT)

The Bank determines parties that are classified as MRT, namely the Board of Commissioners, Directors, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), and employees with certain positions who, because of their duties and responsibilities, make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Share option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Shares options owned by the Board of Directors, Board of Commissioners and Executive Officers

Shares option is an option to purchase shares by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Executive Officers carried out through a share offering or share option offer in the context of providing compensation to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Bank Executive Officers, and those decided in the General Meeting of Shareholders and/or the Bank's Articles of Association.

Selama tahun 2024, tidak ada *shares option* dimaksud sebagaimana tabel berikut:

In 2024, there were no share options as referred to in the following table:

Keterangan Description		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham) Number of Shares Owned (shares)	Jumlah Opsi Number of Options		Harga Opsi (Rp) Option Price (Rp)	Jangka Waktu Time Perid
			Yang diberikan (lembar saham) Given (shares)	Yang telah dieksekusi (lembar saham) Exercise (shares)		
Komisaris Commissioner	-	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Directos	-	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Pejabat Eksekutif Official, Executive (sendiri)	-	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Total		-	-	-	-	-

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Salary is an employees' rights that is received and expressed in the form of money as compensation from the company/employer to the employee, which is determined and paid according to a work agreement, agreement or statutory regulations for the work and/or services they have performed.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2023 dan 2024, dalam skala perbandingan: [GRI 2-21]

The following is the ratio of the highest and lowest salaries in 2023 and 2024, in comparison: [GRI 2-21]

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Comparison	
	2023	2024
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest employee salaries	1:24	1 : 22
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest Directors' salaries	1:2,3	1 : 2,3
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and the lowest Commissioners' salaries	1:1,6	1 : 1,7
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of the highest Director's salary and the highest employee's salary	1:3,2	1 : 3,2

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

The salaries compared in the salary ratio are the compensation received by members of the Board of Commissioners, Directors and employees per month. What is meant by employees are permanent employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk from executive level to Division Head.

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja:

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijaminkan tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

The number of recipients and the total amount of Variable Remuneration that is unconditionally guaranteed, will be provided by the Bank to prospective Directors, prospective Board of Commissioners, and/or prospective Employees during the first 1 (one) year of employment.

Currently, the Bank has not provided variable remuneration, so no employees have received guaranteed unconditional remuneration by the Bank.

Selama tahun 2024 jumlah karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena karyawan pensiun normal dan atas permintaan karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

In 2024, the number of employees who received Termination of Employment (PHK) or dismissal due to normal retirement, or resignation at the employee's own request, the amount of severance pay is as follows:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2024 Nominal amount of severance pay per person in 1 (one) year 2024	Jumlah Pegawai Number of Employees
Di atas Rp1 miliar | Above Rp1 billion	2
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | Between Rp500 million to Rp1 billion	12
Rp500 juta ke bawah | Below Rp500 million	61

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Total amount of deferred Variable Remuneration, consisting of cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Total amount of deferred Variable Remuneration paid for 1 (one) year

The Bank does not provide compensation in the form mentioned above.

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

Details of the amount of remuneration given in 1 (one) year, including:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) Fixed Remuneration		
1. Tunai | Cash	Rp 28.719.682.353,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Variable Remuneration		
	Tidak Ditangguhkan Not Deferred	Ditangguhkan Deferred
1. Tunai | Cash	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	N/A	N/A

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak)
Only for MRT and expressed in millions of rupiah (including tax)

Informasi kuantitatif

a. Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
b. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
c. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative information

a. Total remaining deferred remuneration, whether exposed to implicit or explicit adjustments.
b. Total reduction in remuneration due to explicit adjustments during the reporting period.
c. Total reduction in remuneration due to implicit adjustments during the reporting period.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Type of Variable Remuneration*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan The Remaining Deferred Remuneration	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta Rupiah) Cash (in million Rupiah)	N/A	N/A		N/A
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) Shares/share-based instruments issued by the Bank (in number of shares and nominal in million rupiah, which is a conversion of such shares)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : *) Hanya untuk MRT
Note : *) only for MRT

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Bank memiliki Kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pihak Independen yang berlaku sejak Januari 2022, dan telah diperbaharui pada Januari 2024 (POL-CSD-03). Bank juga memiliki sistem pengelolaan talenta yang dilakukan oleh Direktorat SDM untuk memetakan pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Direksi guna mempertahankan visi, misi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Bank.

J Trust Bank adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama, dan perekrutan dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan agama. Calon anggota Direksi dinilai berdasarkan kualifikasi, pengetahuan perbankan, pengalaman yang luas, kompetensi, keterampilan, rekam jejak yang teruji, dan kesesuaian untuk posisi yang dilamar.

- Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota direksi.

- Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memberikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier dan lain-lain.
- Karyawan yang bertalenta yang teridentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota Direksi, akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank.

- Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan usulan calon anggota Direksi. Calon anggota Direksi akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BOARD OF DIRECTORS' SUCCESSION POLICY

The Bank has a Nomination Policy for Prospective Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Independent Parties, which has been effective since January 2022 and was updated in January 2024 (POL-CSD-03). The Bank also has a talent management system handled by the HR Directorate to map executive officials who have the potential to become Directors in order to maintain the Bank's vision, mission and long-term business sustainability.

J Trust Bank provides equal opportunities for its employees and the hiring process is done without regards to gender, race, and religion. Prospective members of the Board of Directors are assessed based on their qualifications, banking knowledge, extensive experience, competence, skills, proven track record, and suitability for the position applied for.

- Candidates for members of the Board of Directors can be acquired from internal executive officers, who have been prepared to become successors for directors.
- For the Bank's talented employees, the HR Directorate and the Directors and EVP carry out evaluations in order to provide opportunities for self-development for these talented employees in the form of training programs, task assignments, and anything that is needed, as well as opportunities for career development and so on.

- Identified talented employees who could be potential candidates to replace members of the Board of Directors will be evaluated and must meet the criteria requirements for candidates of the Bank's Board of Directors.
- The Nomination and Remuneration Committee discusses the proposals for prospective members of the Board of Directors. Prospective members of the Board of Directors will undergo a fit and proper test process by the Financial Services Authority (OJK).

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal

DIVERSITY POLICY OF THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The diverse composition of Board of Commissioners and Directors is stated in the Attachment of Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on November 17, 2015 on the Governance Guidelines of Public Companies, and accommodated in the Code of

17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan atau pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
   a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
      i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
      ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
      iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
   b. Kewarganegaraan
      Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50% (lima puluh persen).
   c. Usia
      Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
   d. Independensi
      i. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
      ii. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

Conduct Guidelines for the Board of Commissioners and Directors of the Bank. The appointment of Board of Commissioners and Directors is made by considering the diversity, expertise, knowledge or understanding of the banking industry, integrity, and dedication of all individuals, and experience needed.

An accurate and proper diversity policy of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank in line with the Bank's needs will support the effectiveness of task implementation of Board of Commissioners and Directors while supporting the achievement of the Bank's vision and mission to continue growing and developing.

Diverse Composition of Members of the Board of Commissioners

1. The diversity factor of composition of members of the Board of Commissioners consists of:
   a. Expertise/Experience, at least:
      i. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
      ii. 1 (one) member with expertise/work experience in banking industry, and
      iii. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
   b. Nationality
      Members of the Board of Commissioners have a balanced number of Foreign Nationals and Indonesian Citizens by 50% (fifty percent) each.
   c. Age
      Members of the Board of Commissioners have diverse age levels.
   d. Independence
      i. Minimum 50% (fifty percent) of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
      ii. Term of office of an Independent Commissioner is maximum 3 (three) years, and can be reappointed in consideration of existing regulations

2. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2. Diversity factor of the composition of the member of the Board of Commissioners in 2024 are as follows:

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris Diversity Aspect of the Member of the Board of Commissioners	
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari: 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang. Consist of: 1. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Indonesian. 2. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Japanese.
Keahlian Expertise	Keahlian yang beragam, antara lain: Ekonomi/Bisnis/Keuangan, Hukum, Manajemen Risiko, Audit, Sumber Daya Manusia, dan Analisa Kredit Various expertise, such as: Economy/Business/Finance, Law, Risk Management, Audit, Human Capital, and Credit Analysis
Pengalaman Kerja Working Experiences	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : International Monetary Fund (IMF), Kementerian Keuangan Jepang, Penasehat Hukum, Direktur Jenderal Bea Cukai, Pejabat Eksekutif Bursa Efek, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan kartu kredit, dan Bank Indonesia. Various working experiences, including: International Monetary Fund, Japanese Financial Department, Legal Advisor, Director General of Custom, IDX Executive Officer, banking, financial company, credit card company, and Bank Indonesia.
Independensi Independence	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen. All members of the Board of Commissioners do not have affiliated relations with members of the Board of Commissioners, Directors, Controlling and Main Shareholders of the Bank. There are 2 (two) Independent Commissioners.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 52 tahun – 67 tahun. Age diversity of members of the Board of Commissioners in a productive and mature age range, between 52 years old and 67 years old.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
   a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
      i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau di bidang ekonomi/bisnis,
      ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
      iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.
   b. Kewarganegaraan
      Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
   c. Usia
      Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
   d. Independensi
      i. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
      ii. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

Diverse Composition of Members of the Board of Directors

1. The diversity factor of composition of members of the Board of Directors consists of:
   a. Expertise/Experience, at least:
      i. 1 (one) member with expertise/work experience in banking industry or in field of economics/business,
      ii. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management,
      iii. 1 (one) member with expertise/work experience in finance/accounting.
   b. Nationality
      Majority (more than 50% (fifty percent)) of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens.
   c. Age
      Members of the Board of Directors have diverse age levels.
   d. Independence
      i. President Director is an independent party of the Bank's controlling shareholders.
      ii. Having and/or appointing 1 (one) Compliance Director.

2. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi Bank JTrust Indonesia di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2. Diversity factor of the composition of the member of the Board of Directors in 2024 are as follow:

Aspek Keberagaman Anggota Direksi Diversity Aspect of Members of the Board of Director	
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari: 1. 4 (lima) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea. Consist of: 1. 4 (five) members of the Board of Directors are Indonesian citizens. 2. 2 (one) member of the Board of Directors is Japanese national. 3. 1 (one) member of the Board of Directors is a Korean national.
Keahlian Expertise	Keuangan/ekonomi/bisnis, Hukum, Operasional Perbankan, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Manajemen ISO, Analisa Kredit. Finance/economics/business, Law, Banking Operations, Risk Management, Information Technology, ISO Management, Credit Analysis
Pengalaman Kerja Working Experiences	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Industri perbankan, keuangan, dan teknologi informasi. Various Working Experiences including: Banking, financing, and information technology
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. All members of the Board of Directors do not have affiliated relations with members of the Board of Directors, Commissioners, Controlling and Main Shareholders of the Bank.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang, yaitu 55 tahun – 67 tahun. Age diversity of members of the Board of Directors in a productive and mature age range, between 55 years old and 67 years old.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas.

Achievement of the Diversity Composition of the Board of Commissioners and Directors

Composition of members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors is currently adequate to fulfill the diversity aspect mentioned above.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk menjalin hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan

TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST

If transactions may cause conflict of interest between the Bank and personal interest of the owner, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, then members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Executive Officers are prohibited from taking actions/decisions that could harm the Bank or reduce the Bank's profitability.

In carrying out daily duties and responsibilities to establish business relations with customers, partners and co-workers, as well as safeguarding the public interest, PT Bank JTrust Indonesia Tbk always upholds personal integrity and noble professionalism, which is outlined in its Corporate Ethics Handbook and the Integrity Pact, as ethical and behavioral standards that

Pernyataan Pakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

must be used as guidelines by all members of the Bank (Board of Commissioners, Directors and Permanent/ Contract Employees).

Dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis Perusahaan, serta Pernyataan Pakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

The Company's Code of Ethics and Business Conduct, as well as Integrity Pact regulate matters that must be avoided to prevent potential conflicts of interest in any activity with customers, partners or fellow Bank members, including in decision making.

Selama tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

Throughout 2024, there were no transactions containing conflicts of interest, as shown in the following table:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Parties with Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Policymaker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Total Transaction (million Rupiah)	Keterangan *) Description
	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

*) Tidak sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku
*) Against existing systems and procedures

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENCAPAI ≥5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM PADA BANK TERSEBUT, BANK LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, DAN PERUSAHAAN LAIN YANG BERKEDUDUKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI

Hal ini meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 2024, anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WITH MORE THAN 5% (FIVE PERCENT) OF THE PAID-UP CAPITAL, WHICH INCLUDES THE TYPE AND NUMBER OF SHARES IN THE BANK, OTHER BANKS, NON- BANK FINANCIAL INSTITUTIONS, AND OTHER COMPANIES DOMICILED DOMESTICALLY OR OVERSEAS

This includes the type and number of shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies domiciled within or outside the country.

In 2024, members of the Board of Commissioners do not own shares amounting to ≥5% (five percent) of the paid-up capital of the Bank, other banks, non-bank financial institutions, or other companies, whether domestic or foreign.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Companies	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Iwan Nataliputra	-	-	-	-	-
4.	Benny Siswanto	-	-	-	-	-

Di tahun 2024, Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

i. Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
ii. Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

In 2024, members of the Board of Directors have drafted and signed statements regarding matters including:

i. Share ownership of members of the Board of Directors, either individually or collectively, does not exceed 25% (twenty five percent) of the paid-up capital in other companies.
ii. Share ownership of members of the Board of Directors that reaches ≥5% (five percent) of the paid-up capital, whether it is in PT Bank JTrust Indonesia Tbk or other banks and companies, both domestic and overseas.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Directors

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Companies	%
1.	Ritsuo Fukadai	111.120	-	-	-	0,001%
2.	Masayoshi Kobayashi	-	-	-	-	-
3.	Felix I. Hartadi	1.133.000	-	-	-	0,006%
4.	Helmi A. Hidayat	2.332.200	-	-	-	0,013%
5.	Cho Won June	-				-
6.	R. Djoko Prayitno	2.330.600				0,013%
7.	Widjaja Hendra	-				-

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2024 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

FINANCIAL AND FAMILY RELATIONS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, there were no financial or family relations between members of the Board of Commissioners and Directors with other members of the Board of Commissioners, other Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank as disclosed in the affiliate relationship.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM/MSOP) DAN/ATAU KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP) YANG DIMILIKI OLEH BANK

Bank belum memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan di tahun 2024.

MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ MSOP AND/OR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP OWNED BY THE BANK

The Bank does not have a share ownership program by Management and/or Employees in 2024.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris, yaitu:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi Bank berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/ Piagam Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan praktik operasional terbaik yang diperbaharui secara berkala.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja komite secara kolegial di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali setahun. Evaluasi hasil penilaian komite secara kolegial akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penilaian atas struktur komite dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja komite

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has supporting committees which have duties and responsibilities to support the performance of the Board of Commissioners:

- Audit Committee
- Risk Oversight Committee
- Remuneration and Nomination Committee

The appointment of the above Committee members is carried out by the Bank's Board of Directors based on the Decree of the Board of Commissioners with the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. Committees under the Board of Commissioners are chaired by an Independent Commissioner who has no financial relations, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other forms of relations with the Bank that could affect their independence.

The implementation of duties and responsibilities of the committees under the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to the Work Guidelines and Rules/Committee Charter, which are formulated based on applicable regulations in Indonesia, especially the Financial Services Authority (OJK) Regulations on the Implementation of Governance for Commercial Banks and best operational practices that are updated regularly.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Evaluation is carried out based on the following criteria:
1. Meeting frequency and attendance level
2. Implementation of duties and responsibilities

Policies and Procedures for Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The collegial performance assessments of committees under the Board of Commissioners are carried out at least once a year. Evaluation of the results of the committee's collegial assessment will be presented at the Board of Commissioners' meeting by the Remuneration and Nomination Committee.

The assessment of the committee structure is carried out by the Remuneration and Nomination Committee.

secara kolegial di tingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang meliputi efektivitas rapat komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

Collegial performance assessments of committees under the Board of Commissioners are carried out by all members of the Board of Commissioners, which include the effectiveness of committee meetings and implementation of the committee's duties and responsibilities.

Penilaian Kinerja Komite Audit

i. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran
Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan Financial Control Division (FCD), dan rapat internal komite selama tahun 2024 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi atas perubahan Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 16 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

ii. Tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris, termasuk:

a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
   1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
   2. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
   3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
   4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan. Hal ini akan diputuskan dalam rapat pemegang saham.

Audit Committee Performance Assessment

i. Meeting frequency and attendance rate
The implementation of Audit Committee meetings with the internal audit division (SKAI), Financial Control Division (FCD) unit, and internal committee meetings in 2024 has gone accordingly with their duties and responsibilities, which include monitoring the realization of audit plans, monitoring the follow-up on the completion of internal and external audits, appointing public accountants and public accounting firms that will audit financial reports, as well as providing recommendations on changes to the Head of SKA ofI PT Bank JTrust Indonesia Tbk. In 2024, the Audit Committee held 16 meetings, which were attended by all members.

ii. Duties and responsibilities
The Board of Commissioners views that the implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee has been in accordance with its main duties and functions, which include providing evaluations and recommendations to support the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties.

a. Evaluating the audit by Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) on the annual financial statements based on:
   1. Conformity of audit implementation by KAP and/or AP with applicable audit standards.
   2. Sufficient time for work in the field.
   3. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling tests.
   4. Recommendations for improvements.

b. Evaluating the audit by KAP and/or AP to the relevant work units, to be reported to OJK within 6 months after the financial year ends through the operational work unit.

c. Giving recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of KAP and AP that will audit the financial report. The decision will be made during the general meeting of shareholders.

d. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.

e. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.

f. Memberikan rekomendasi penunjukan Kepala SKAI yang baru setelah adanya pengunduran diri dari Kepala SKAI yang menjabat.

g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

i. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melakukan rapat sebanyak 34 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti profil risiko Bank, tingkat kesehatan Bank, penerapan tata kelola Bank, budaya kepatuhan, serta aspek kegiatan usaha Bank termasuk: perkreditan, likuiditas, treasury, funding, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi

d. Giving recommendations on the appointment of KAP and AP to OJK no later than 10 days after the appointment through the operational work unit.

e. Evaluating SKAI's performance and making sure that SKAI works independently.

f. Giving recommendations on the appointment of the new Head of SKAI after the resignation of the current Head of SKAI.

g. Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding SKAI's annual audit plan and budget allocation, which will be approved by the President Director and Board of Commissioners.

Risk Oversight Committee Performance Assessment

i. Meeting frequency and attendance rate

In 2024, the Risk Oversight Committee held 34 meetings or more than the minimum frequency required by the provisions and the Committee Charter. The meetings were attended by more than 51% of committee members, including Independent Commissioners and independent parties in accordance with applicable provisions.

In these meetings, the committee periodically discussed several topics, such as the Bank's risk profile, the Bank's soundness level, implementation of the Bank's governance, compliance culture, as well as aspects of the Bank's business activities including: credit, liquidity, treasury, funding, and the Bank's internal infrastructure aspects, such as policies and SOPs.

ii. Duties and responsibilities

The Board of Commissioners views that the implementation of duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee is in accordance with its main duties and functions, such as:

- Evaluating risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
- Evaluating the responsibility of the Board of Directors to the Board of Commissioners for the implementation of the risk management policy.
- Monitoring and evaluating the conformity between risk management policy and the implementation of this policy.
- Monitoring and evaluating the implementation

pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.

- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan Bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan).
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

i. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) telah melakukan rapat KNR sebanyak 4 kali, melebihi minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi komite di bawah Dewan Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP. Rapat juga meninjau dan mengusulkan kandidat Direksi, pengangkatan atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perubahan keanggotaan komite di bawah Dewan Komisaris, dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris menilai bahwa KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, di antaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Perubahan komposisi anggota Pemantau Risiko.
- Perubahan susunan Komite Audit.

of the duties of the Risk Management Committee, Risk Management Division, and other relevant divisions.

- Providing input and recommendations regarding the provision of loans to certain debtors.
- Providing input and recommendations on proposed improvements to the Bank's credit policies and procedures.
- Providing input and recommendations on the Bank's risk profile (especially on initiatives to improve its assessment in the future period).
- Providing input and recommendations on improvement initiatives carried out by the Risk Management Division, Compliance Division (especially related to updating the AML-CTF system), and others.

Performance Assessment of the Remuneration and Nomination Committee

i. Meeting frequency and attendance rate

In 2024, the Remuneration and Nomination Committee held 4 meetings, exceeding the minimum frequency required by the provisions and the existing RNC Charter, attended by all RNC members in accordance with applicable regulations.

The RNC meetings discussed, among other things, about reviewing the composition of committees under the Board of Commissioners, as well as the policies on compensation, benefits & facilities of the BOC, BOD, and EVP. The meetings also reviewed and proposed candidates for the Board of Directors, appointment or reappointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), changes in membership of committees under the Board of Commissioners and performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ii. Duties and responsibilities

The Board of Commissioners views the RNC has carried out its duties and responsibilities well and provided appropriate recommendations, including those regarding:

- Changes in the composition of the Risk Oversight Committee.
- Changes in the composition of the Audit Committee.

- Rekomendasi pihak independen sebagai Sekretaris/Anggota Komite Audit yang baru.
- Peninjauan dan rekomendasi untuk pengangkatan/pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- Rekomendasi penggantian dan penugasan kembali anggota komite di bawah Dewan Komisaris untuk 1 periode berikutnya.
- Rekomendasi tugas dan tanggung jawab Wakil Presiden Direktur terkait adanya perubahan struktur organisasi Bank.
- Rekomendasi total gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui lebih lanjut oleh RUPST 2024.
- Rekomendasi gaji, honorarium dan tunjangan SEVP/EVP.
- Pelaksanaan Board Assessment (secara kolegial dan masing-masing anggota).
- Rekomendasi perubahan remunerasi karyawan, Tenaga Kerja Asing, dan pengurus Bank.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KNR dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- Recommendation of independent party as Secretary/Member of the new Audit Committee.
- Review and recommendations on the appointment/reappointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
- Recommendations on replacement and reassignment of members of committees under the Board of Commissioners for the next period.
- Recommendations on duties and responsibilities of Vice President Director regarding changes in the Bank's organizational structure.
- Recommendations on total salaries, honorarium and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for approval at the 2024 AGMS.
- Recommendations on salaries, honorarium, and allowances of SEVP/EVP.
- Implementation of Board Assessment (collegially or individually).
- Recommendations on changes in remuneration of employees, foreign workers, and the Bank's management.

Overall, recommendations by the Remuneration and Nomination Committee can provide an optimal contribution to the Board of Commissioners in its supervisory function.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by and responsible to the Board of Commissioners to support the Board of Commissioners conduct effective implementation of duties and supervisory functions on matters related to financial statements, internal control system, implementation of internal and external audit functions, implementation of Good Corporate Governance (GCG), as well as compliance with applicable laws and regulations.

Legal Basis

The Audit Committee is established based on the following regulations:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. OJK Regulation No. 9 of 2023 dated 11 July 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.

3. Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
4. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Anggaran Dasar J Trust Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit yang mengatur mengenai:

I. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
II. Komposisi,struktur organisasi, dan persyaratan keanggotaan
III. Tata cara dan prosedur kerja
IV. Waktu kerja
V. Rapat dan mekanisme pengambilan keputusan rapat
VI. Pelaporan
VII. Mekanisme evaluasi kinerja
VIII. Masa tugas dan honorarium

Piagam Komite Audit ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit terakhir dikaji dan dimutakhirkan di akhir bulan Desember 2023.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 2 Februari 2022 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Januari 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2022.

3. OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.
4. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
5. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 on the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee.
6. Articles of Association of J Trust Bank on the Duties and Authorities of the Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has Work Guidelines in form of the Audit Committee Charter which regulates:

I. Duties, responsibilities, and authority;
II. Composition, organizational structure, and membership requirements
III. Procedures and work procedures
IV. Working hours;
V. Meetings and decision making mechanism in meetings
VI. Reporting
VII. Performance evaluation mechanism
VIII. Term of office and honorarium

The Audit Committee Charter is reviewed and updated periodically by the Board of Commissioners to ensure the Audit Committee functions can be implemented optimally in accordance with applicable provisions. The Audit Committee Charter was last reviewed and updated in December 2023.

Number, Structure, and Composition of the Audit Committee Membership

Members of the Audit Committee were appointed by the Board of Directors through the Board of Directors Decree dated 2 February 2022 and based on the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee dated 26 January 2022, which have obtained approval from the Board of Commissioners through the Circular Letter of the Board of Commissioners dated 27 January 2022.

Maka jumlah, susunan, dan komposisi keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Therefore, the number, structure, and composition of the Audit Committee membership are as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee	Periode Jabatan Office Term	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Positions in Other Committees
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua /Anggota Chairman/Member	2 Februari 2022 - sekarang 2 February 2022 - present	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Member of the Risk Oversight Committee • Chairman/Member of the Nomination and Remuneration Committee
2	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021 - present	Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko Member/Secretary of the Risk Oversight Committee
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	19 Juli 2019- 24 September 2020 25 September 2020-31 Mei 2023 19 July 2019 - 24 September 2020 25 September 2020 - 31 May 2023	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee

Anggota Komite Audit mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 21 Juni 2023 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 12 Juni 2023 yang memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Juni 2023.

There was a change in members of the Audit Committee based on the Board of Directors Decree dated 21 June 2023 and recommendation from the Remuneration and Nomination Committee dated 12 June 2023, which have obtained approval from the Board of Commissioners through the Circular Letter of the Board of Commissioners dated 20 June 2023.

Maka, jumlah, susunan, dan komposisi keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Therefore, the number, structure, and composition of the Audit Committee membership are as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee	Periode Jabatan Office Term	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Positions in Other Committees
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua /Anggota Chairman/Member	2 Februari 2022 - sekarang 2 February 2022 - present	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Member of the Risk Oversight Committee • Chairman/Member of the Nomination and Remuneration Committee
2	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021 - present	Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko Member/Secretary of the Risk Oversight Committee
3	Richard S Dompas	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	21 Juni 2023 - sekarang 21 June 2023 - present	Tidak Ada None

Sebagaimana dinyatakan di atas, hingga 31 Desember 2024 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

As stated above, as of 31 December 2024, the Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

- 1 (one) Independent Party who is an expert in accounting and finance
- 1 (one) Independent Party who is an expert in banking

Setiap perubahan struktur dan komposisi Komite Audit telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, informasi tersebut juga dimuat dalam situs web Bank.

Sepanjang tahun 2024, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah 100% dan telah sesuai dengan peraturan OJK No 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Komisaris Independen yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Anggota Komite Audit Perseroan memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite, antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan/atau auditor.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Benny Siswanto, Ketua Komite Audit**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Richard S. Dompas, Anggota merangkap Sekretaris** Komite Audit
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Any changes to the structure and composition of the Audit Committee have been submitted to OJK, in accordance with applicable regulations. In addition, the information has been published on the Bank's website.

In 2024, the number of Independent Commissioners and Independent Parties who were members of the Audit Committee is 100% and in accordance with OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Office Term of Audit Committee Members

The office term of members of the Audit Committee must not be longer than the office term of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association and they can only be re-elected for 1 (one) subsequent period.

Qualification and Profile of Audit Committee Members

Independent Commissioner as the Chair and member of the Audit Committee has effectively been declared to have passed the fit and proper test by OJK. The appointment of the Chairman and members of the Audit Committee as referred to above has met the criteria set out in the OJK Regulation.

Members of the Company's Audit Committee understand financial statements, banking business especially related to banking activities, audit process, risk management and laws and regulations in the capital market, as well as other related laws and regulations.

All members of the Audit Committee have professional certification or competency certification to support their functions and responsibilities, such as certification in risk management, public accountant, accountant and/or auditor.

Qualification and profile of the Audit Committee members are as follows:

- **Benny Siswanto, Chairman of the Audit Committee**
  The complete profile is listed in the Profile of the Board of Commissioners/Directors//Executive Officers.
- **Richard S. Dompas, Member and Secretary of the Audit Committee**
  The complete profile is listed in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **I Gde Yadnya Kusuma, Anggota Komite Audit**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **I Gde Yadnya Kusuma, Member of the Audit Committee**
  The complete profile is listed in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2024, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

Independency of Audit Committee Members

In 2024, all independent members of the Audit Committee have fulfilled the following independency requirements:

Persyaratan Independensi Independency Requirements	Benny Siswanto	Richard S Dompas	I Gde Yadnya
Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Financial relations with members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relations with the Bank.	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan kepengurusan pada Bank, pada Perusahaan atau Perusahaan afiliasi Bank Management relations with the Bank, with the Company or with the Bank's affiliated companies	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Family relations with members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung The Bank's share ownership, both directly and indirectly	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank Affiliate relations with the Bank, Board of Commissioners, Directors or Main Shareholders of the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Business relations, both direct and indirect, with the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan bank 6 bulan terakhir Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities in the last 6 months	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Bank dalam 6 bulan terakhir Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Bank in the last 6 months	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang tercantum dalam Komite Audit Charter mencakup 8 (delapan) kategori sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Duties, Responsibilities and Authorities

Duties and Responsibilities

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee acts independently to provide professional opinions to the Board of Commissioners.

Duties and responsibilities of the Audit Committee stated in the Audit Committee Charter include the following 8 (eight) categories:

1. Create an annual work plan as approved by the Board of Commissioners.

2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
3. Mengevaluasi kinerja SKAI
4. Mengevaluasi kinerja eksternal audit termasuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
5. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistim pengendalian internal Bank yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistim tata kelola Bank yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku
7. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistim manajemen risiko Bank termasuk penerapan budaya risiko yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

2. Review financial information that will be disclosed by the Bank to the public and/or authorities, such as financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information.
3. Evaluate the internal audit work unit (SKAI) performance
4. Evaluate external audit performance, including giving recommendation on the appointment of public accountant and/or public accounting firm to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders (GMS) and submitting periodic reports to the Financial Services Authority (OJK) annually, no later than 10 (ten) working days after the approved appointment of public accountant and/or public accounting firm.
5. Monitor and review the Bank's standard internal control system, in accordance with applicable best practices.
6. Monitor and review the Bank's standard governance system, in accordance with applicable best practices.
7. Monitor and review the Bank's risk management system, including the implementation of standard risk culture, in accordance to applicable best practices.
8. Review compliance with internal regulations, as well as laws and regulations related to the Bank's activities.

Authorities

The Board of Commissioners authorizes the Audit Committee within the scope of its duties to:

1. Access the Bank's documents, data, and information about employees, funds, assets, and its other resources that are related to the implementation of its duties.
2. Perform other authorizations as granted by the Board of Commissioners.
3. Communicate directly with the Bank's employees, including the Board of Directors and those carrying out internal audit and risk management, as well as accountants regarding duties and responsibilities of the Audit Committee.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division serta Divisi yang terkait.
5. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
3. Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
9. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan balk.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan 16 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Internal, unit kerja lainnya seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP BDO).

4. The Audit Committee carries out its duties by working closely with the Board of Commissioners, Directors, Risk Oversight Committee, Internal Audit Unit (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division, and other related divisions.
5. If necessary, it is authorized to involve independent parties outside of the Audit Committee to assist in implementing its duties.

Meetings and Decision-Making Mechanism

1. The Audit Committee meetings must be held periodically, at least once a month.
2. The Audit Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of all members, including a commissioner from an independent party.
3. The Audit Committee meetings with the Internal Audit Unit (SKAI) must be held periodically, at least once a month.
4. The Audit Committee meetings with the Board of Commissioners can be held as needed.
5. The Audit Committee meetings involving operational work units can be held as needed.
6. The Audit Committee internal meetings can be held as needed.
7. Decisions of the Audit Committee meetings are made based on deliberation to reach consensus.
8. If there is no consensus, the decision is made through voting, with approval of 2/3 (two thirds) of the Audit Committee members, who are present at the meeting.
9. Results of the Audit Committee meetings must be recorded in meeting minutes and documented properly.
10. Any dissenting opinion that occurs during the Audit Committee meeting must be stated clearly in minutes of meeting, along with the reasons for the argument.

In 2024, the Audit Committee held 16 meetings involving the Internal Audit Unit (SKAI) and other work units, such as: Anti Fraud unit and external auditor (KAP BDO).

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

The attendance frequency and attendance rate of each member of the Audit Committee are as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Komite Audit The Number of Audit Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	16	16	100%
Richard S Dompas (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris) (Independent Party, Member/Secretary)	16	16	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	16	16	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2024 anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain:

Training and/or Competency Improvement of Audit Committee Members

To support the execution of duties and responsibilities of Audit Committee members, in 2024 members of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has attended various training programs, workshops, conferences, seminars, and/or competency improvement, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Benny Siswanto	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman The Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Domain	IKAI	1 Agt 2024, Jakarta 1 Aug 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4-5 Sept 2024, Jakarta 4-5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectiveness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa	18-20 Sept 2024, Bali 18-20 Sept 2024, Bali
Richard Steven Dompas	Sekretaris Komite Audit Secretary of Audit Committee	Manajemen Risiko Risk Management	Arfaidhams Secret	4 Des 2024, Jakarta 4 Dec 2024, Jakarta
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota Komite Audit Member of Audit committee	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4-5 Sept 2024, Jakarta 4-5 Sept 2024, Jakarta
		Digital Forensik di Sektor Jasa Keuangan Digital Forensics in the Financial Services Sector	OJK Institute	28-30 Okt 2024, Jakarta 28-30 Oct 2024, Jakarta

Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2024

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Tindak lanjut penyelesaian temuan audit internal maupun eksternal.
3. Melakukan penelaahan penyusunan informasi laporan keuangan triwulanan.

Work Program Realization of the Audit Committee in 2024

The Audit Committee's work programs in 2024 were:

1. The implementation of internal audit by SKAI.
2. Follow up on the completion of internal and external audit findings.
3. Review the formulation of quarterly financial statements information.

4. Merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan yang disampaikan kepada OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

4. Recommend on the appointment of Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) to audit historical financial reports.
5. Evaluation on audit carried out by KAP on annual financial statements.
6. Monitor reports submitted to OJK.
7. Development and training

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

The realization of the Audit Committee Work Programs throughout 2024 was as follows:

No.	Realisasi Program Kerja 2024	2024 Work Program Realization
1	Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	Prepared recommendations to the Board of Commissioners on the SKAI annual audit plan and budget allocation to be approved by the President Director and the Board of Commissioners.
2	Melakukan pertemuan regular dengan SKAI membahas hasil temuan audit.	Held regular meetings with SKAI to discuss audit results.
3	Melakukan evaluasi Kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.	Evaluated SKAI performance and ensured SKAI worked independently.
4	Monitoring temuan audit internal dan rencana penyelesaian audit.	Monitored internal audit results and completion of audit plan
5	Monitoring pelaksanaan rencana kerja audit tahunan.	Monitored the implementation of the annual audit work plan.
6	Melakukan monitoring temuan audit OJK dan regulator lain (Bank Indonesia) dan penyelesaian temuan audit.	Monitored audit findings from OJK and other regulators (Bank Indonesia) and resolution of the findings.
7	Melakukan monitoring temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit.	Monitored KAP audit findings and resolution of the findings.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yang mengatur.	Monitored the formulation of quarterly financial reports published in newspapers, in accordance with OJK regulations.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan.	Monitored the implementation of Financial Accounting Standard Statements (PSAK) in preparing financial reports.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan tahunan yang diputus dalam rapat pemegang saham.	Prepared recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of KAP and AP, who will audit the year-end financial reports based on the decision in the shareholders' meeting.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.	Submitted recommendation on the appointment of KAP and AP to OJK, no later than 10 working days after the appointment through the operational work unit.
12	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan: a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku. b. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan. c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik. d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.	Evaluated audit implementation by KAP and/or AP on annual financial report based on: a. The conformity of audit implementation by KAP and/or AP with applicable auditing standards. b. Sufficient time for working in the field. c. Assessment on the scope of services provided and the adequacy of sampling. d. Recommended improvements
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.	Submitted evaluation results from KAP and/or AP audit implementation to relevant work units to be reported to OJK within 6 months after the fiscal year ends through the operational work unit.
14	Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disusun oleh SKAI secara semesteran yaitu tanggal 31 Juli dan 31 Januari secara luring kepada OJK	Reported the implementation and main points of audit findings prepared by SKAI on a semi-annual basis on 31 July and 31 January through offline to OJK.
15	Melaporkan hasil pengkajian dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat Dewan Komisaris.	Reported review results and revision of the Audit Committee charter in the Board of Commissioners' meeting.
16	Mengikuti training/pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.	Participated in training programs related to the implementation of Committee duties.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit telah menetapkan rencana kerja tahun 2025 dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI, termasuk melakukan monitoring untuk meningkatkan kinerja SKAI dalam mengelompokkan temuan audit ke dalam 3 kategori yaitu tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal
2. Monitoring dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian audit internal
3. Monitoring dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian audit eksternal (OJK, BI, KAP).
4. Menelaah Laporan Keuangan Bank (laporan tahunan 2024 dan laporan publikasi triwulanan 2025) dan monitor dan evaluasi integritas laporan keuangan bank (berdasarkan POJK 15/2024)
5. Menyampaikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
7. Monitoring pelaporan wajib ke OJK (laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran).
8. Melakukan pengembangan dan pelatihan.

The Audit Committee Work Plan in 2025

The Audit Committee has set up a work plan for 2025 with the following strategic priorities:

1. The implementation of internal audits by SKAI, including monitoring to improve SKAI's performance by grouping audit findings into 3 categories, namely governance, risk management, and internal control.
2. Monitor and report the follow up on the completion of internal audit findings
3. Monitor and report the follow up on the completion of external audit findings (OJK, BI, KAP).
4. Review the Bank's financial statements (2024 annual financial statements and 2025 quarterly financial statements) and monitor and evaluate the integrity of the Bank's financial statements (based on POJK 15/2024).
5. Give recommendations on the appointment of Public Accounting Firm (KAP) and/or a Public Accountant (AP) to audit historical financial statements.
6. Evaluate KAP audit implementation on the annual financial statements.
7. Monitor mandatory reporting to OJK (implementation reports and key points of audit findings on a semi-annual basis).
8. Carry out development and training programs.

Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKAI selama tahun 2024 secara umum sudah sesuai (*Generally Conform*) dengan ketentuan OJK maupun dengan standar dari IPPF (*International Professional Practices Framework*) yang dikeluarkan oleh The IIA (*The Institute of Internal Auditors*).

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

a. Melanjutkan mengelompokkan temuan audit di satker berdasarkan GRC dan manajemen risiko dan konklusi audit rating secara bankwide year on year dan melakukan evaluasi atas hal ini secara berkala
b. Memastikan tindak lanjut temuan-temuan yang signifikan dilakukan secara tepat waktu tanpa ada perpanjangan waktu.

The Audit Committee Evaluation

The Audit Committee periodically (on a semi-annual basis) evaluates the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, effectiveness of external audit, and supervision of the Bank's compliance with applicable provisions and laws and regulations.

Based on the Audit Committee's evaluation results, it is concluded that in general SKAI's performance in 2024 was adequate (Generally Conform) with OJK provisions or IPPF (International Professional Practices Framework) standards issued by the Institute of Internal Auditors (IIA).

Several things that need attention:

a. Continue to incorporate audit findings in work units based on GRC and risk management, as well as bank wide audit rating conclusions year-on-year, and evaluate these periodically.
b. Ensure follow up actions on significant findings are carried out on time without time extensions.

c. Menimalisir temuan berulang termasuk monitor temuan terkait penyimpangan yang berindikasikan fraud secara berkesinambungan
d. Melakukan sosialisasi secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan pihak-pihak terkait mengenai penerapan audit rating yang sudah dijalankan mulai tahun 2023 termasuk parameter yang digunakan dan potensi sanksi atas audit rating yang kurang baik seperti *marginal* dan *unsatisfactory* sehingga dapat menimbulkan efek jera yang pada akhirnya memberikan nilai tambah SKAI bagi Bank.
e. Mengisi kekosongan tenaga auditor yang masih kosong sejak 2024

Penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2024 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Penilaian ini telah dilengkapi dengan surat perjanjian (*engagement letter*) No. PKF-CYBER2/RUW/EL-0101/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 serta Surat *Self-Assessment* auditor Independen kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan No. PKF-CYBER2/RUW/OL-0185/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN).

Pernyataan Komite Audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara umum dinilai sudah efektif dan memadai untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjaga harta kekayaan Bank, mengelola risiko pada setiap aktivitas Bank yang selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehatian-hatian.

Untuk menjaga kesinambungan dan perkembangan usaha Bank yang terus meningkat, Direksi perlu terus menyempurnakan kebijakan, standar, dan prosedur dalam rangka meningkatkan efektivitas

c. Minimize repeated audit findings including monitoring findings related to indicative fraud violations on an ongoing basis.
d. Conduct socialization periodically with the Board of Directors, Board of Commissioners, and related parties regarding the implementation of audit rating since 2023, including the parameters used and potential sanctions for bad audit ratings, such as marginal and unsatisfactory, so they can have a deterrent effect that would ultimately provide value-added SKAI for the Bank.
e. Fill in the vacant auditor positions since 2024.

The assessment of the fairness in the historical financial statements preparation in 2024 was carried out by Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. The assessment was complemented by engagement letter No. PKF-CYBER2/RUW/EL-0101/X/2024 dated 14 October 2024 and Self-Assessment Letter by Independent Auditor to parties carrying out financial services activities No. PKF-CYBER2/RUW/OL-0185/X/2024 dated 14 October 2024.

The Bank's compliance with applicable provisions and existing laws and regulations went accordingly with no violations found, such as in the report of Legal Lending Limit (LLL) and Net Open Position (NOP).

Statement of the Audit Committee on the Adequacy of Internal Control System and Risk Management System

The internal control system and risk management system implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk is generally considered effective and adequate to assist the Board of Directors and Board of Commissioners in safeguarding the Bank's assets, managing risks in every Bank activity in line with the Bank's business and strategic objectives, ensuring the availability of reliable managerial and financial reports, increasing the Bank's compliance with laws and regulations, and reducing the risk of losses, deviations and violations of prudential aspects.

To maintain the continuity and development of the increasing Bank's business, the Board of Directors needs to continue improving policies, standards, and procedures to increase the effectiveness of Internal

Sistem Pengendalian Internal dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit antara lain dengan berperan aktif memastikan telah dilakukan perbaikan terhadap setiap temuan audit internal maupun eksternal serta permasalahan yang dapat mengganggu efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

Fungsi pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara efektif melalui Komite Pemantau Risiko guna mendukung perbaikan dan penyempurnaan keempat pilar sistem manajemen risiko.

Bank terus memperkuat kebijakan dan standar prosedur operasional secara berkala agar tetap relevan dengan lingkungan operasional saat ini, serta mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan pengelolaan risiko beserta tools analisis asesmennya utamanya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, stratejik, hukum, reputasi, dan/atau lainnya, sambil memantau perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi operasi dan bisnisnya.

Rencana kesinambungan bisnis dan pengelolaan berdasarkan profil risiko terus disempurnakan untuk menanggapi perubahan lingkungan tanpa adanya gangguan material terhadap layanan bisnis utama Bank.

Control System with supervision by the Board of Commissioners through the Audit Committee, including by actively ensuring that improvements have been made to every internal and external audit finding and problems that may disturb the effectiveness of Internal Control System.

The active supervisory function of the Board of Commissioners is always carried out effectively through the Risk Oversight Committee to support improvement and refinement of the four pillars of the risk management system.

The Bank continues to strengthen operational standard procedures and policies periodically to remain relevant to the current operational environment, as well as taking steps to enhance risk management and its assessment analysis tools, especially risks in credit, market, liquidity, operational, compliance, strategic, legal, reputation, and/or others, while monitoring global and domestic economic developments that may affect operations and business.

Business continuity plans and management based on risk profiles continue to be updated to respond to environmental changes without any material disruption to the Bank's main business services.

Remunerasi Anggota Komite Audit

Remuneration of Audit Committee Members

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Remuneration package and other facilities

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit The Amount Received in 1 Year by Members of the Audit Committee				Type of Remuneration and Other Facilities
	2023		2024		
	Orang Person	Rp Juta Rp million	Orang Person	Rp Juta Rp million	
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	2.241	3	2.549	Remuneration (salary, routine allowance, bonus, and other non-nature facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:					Other facilities in nature form (housing, transportation, health insurance, and others) which:
Dapat dimiliki	1	179	1	184	Can be owned
Tidak dapat dimiliki	3	33	3	36	Cannot be owned
Total	**3**	**2.453**	**3**	**2.769**	**Total**

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya
Including remuneration of Committee member whose office term has ended

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Audit Total Audit Committee Members		Remuneration per Person
	2023	2024	
Di atas Rp5 miliar			Above Rp5 billion
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar			Between Rp2 billion and Rp5 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1	1	Between Rp1 billion and Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar			Between Rp500 million and Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	2	2	Below Rp500 million

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit
Variable Remuneration for Members of the Audit Committee

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Received in 1 Year by Members of the Audit Committee			
	2023		2024	
	Orang Person	Rp Juta Rp million	Orang Person	Rp Juta Rp million
Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Seluruh anggota Komite Audit J Trust Bank tidak menerima remunerasi yang bersifat variabel (saham atau bonus, baik bonus kinerja, bonus non kinerja, maupun opsi saham).

All members of the J Trust Bank Audit Committee do not receive variable remuneration (shares or bonuses, whether performance bonuses, non-performance bonuses or stock options).

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko yang mengatur:

I. Tujuan pembentukan komite;
II. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
III. Struktur dan keanggotaan komite;
IV. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
V. Masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;
VI. Mekanisme evaluasi kinerja; dan
VII. Periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikaji dan dimutakhirkan pada bulan Desember 2023.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 15 Februari 2023 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi

RISK COMMITEE

The Risk Oversight Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners to fulfill its duties and responsibilities by monitoring and evaluating the policy and the policy implementation of the Bank's risk management, which includes reviewing its conformity with existing regulations, evaluating the consistency of the policy implementations, and monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Committee ("RMC") and Risk Management Business Unit ("SKMR") to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Legal Basis

The establishment of the Risk Oversight Committee refers to the following regulations:

- Financial Services Authority Regulation No. 17 dated 14 September 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Risk Oversight Committee Charter

The Risk Oversight Committee has Work Guidelines in the form of Risk Oversight Committee Charter, which regulates:

I. The committee's objectives;
II. The committee's duties, responsibilities, and authorities;
III. The committee's structure and membership;
IV. The committee's meetings, quorum, and decision making;
V. Office terms of committee's members from Independent Party;
VI. Performance evaluation mechanism; and
VII. Periodic review of the committee's guidelines and code of conduct.

The Risk Oversight Committee Charter will be reviewed and updated periodically by the Board of Commissioners so the Risk Monitoring Committee function can be performed optimally in accordance with prevailing laws and regulations. The Risk Oversight Committee Charter was last reviewed and updated in December 2023.

Number, Structure, and Composition of the Risk Oversight Committee Membership

Members of the Risk Oversight Committee were appointed by the Board of Directors through the Board of Directors Decree dated 15 February 2023 and based on the recommendation of the Remuneration and

dan Remunerasi tanggal 2 Februari 2023 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 15 Februari 2023.

Nomination Committee dated 2 February 2023, which was approved by the Board of Commissioners through the Circular Decision of the Board of Commissioners dated 15 February 2023.

Jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

The number, structure, and composition of membership of the Risk Oversight Committee are as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position in the Bank	Jabatan di Komite Position in Committee	Periode Jabatan Office Term	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Position in Other Committees
1	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	2 Februari 2022-sekarang 2 February 2022– Present	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee
2	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	2 Februari 2022-sekarang 2 February 2022– Present	• Ketua Komite Audit • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Chairman/Member of the Audit Committee • Member of the Nomination and Remuneration Committee
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	1 Januari 2020-sekarang 1 January 2020– Present	Tidak terdapat rangkap jabatan pada komite lainnya No concurrent positions at other committees
4	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021– Present	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee

Sebagaimana dinyatakan di atas, hingga 31 Desember 2024, Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk seorang sebagai ketua)
b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

As stated above, as of 31 December 2024, the Risk Oversight Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

a. 2 (two) Independent Commissioners (including one as chairman)
b. 1 (one) Independent Party who is an expert in risk management
c. 1 (one) Independent Party who is an expert in banking

Sepanjang tahun 2024, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

In 2024, the number of Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Risk Oversight Committee was more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Risk Oversight Committee.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Office Term of Risk Oversight Committee Members

The office term for members of the Risk Oversight Committee must not be longer than the office term of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Qualification and Profile of Risk Oversight Committee Members

Each Commissioner who is the Chair and member of the Risk Oversight Committee has effectively been declared to have passed the fit and proper test by OJK. The appointment of the Chairman and members of the Risk Oversight Committee as referred to above has met the criteria set out in the OJK Regulation.

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki sertifikasi profesi berupa sertifikasi manajemen risiko level 1-4 dari BSMR dan LSPP, Sharia Banking Operation oleh Karim Consulting Indonesia, dan CACP batch 14 oleh IKAI.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Iwan Nataliputra, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Benny Siswanto, Anggota Komite Pemantau Risiko.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif

- **Bambang Setyoko, Anggota Komite Pemantau Risiko.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **I Gde Yadnya Kusuma, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2024, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali J Trust Bank.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Members of the Risk Oversight Committee have professional certifications, such as risk management certification level 1-4 from BSMR and LSPP, Sharia Banking Operation by Karim Consulting Indonesia, and CACP batch 14 by IKAI.

Qualification and profile of the Risk Oversight Committee members are as follows:

- **Iwan Nataliputra, Chairman/Member of the Risk Oversight Committee**
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Benny Siswanto, Member of the Risk Oversight Committee**
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Bambang Setyoko, Member of the Risk Oversight Committee.**
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **I Gde Yadnya Kusuma, Member and Secretary of the Risk Oversight Committee**
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

Independency of Risk Oversight Committee Members

In 2024, all independent members of the Risk Oversight Committee have fulfilled the following independency requirements:

- All independent members of the Risk Oversight Committee shall have no financial relations, management relations, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

- Not former members of the Board of Directors or parties who have relations with the Bank which may affect the ability to act independently.

- Have no affiliations with J Trust Bank, the Board of Commissioners, the Board of Directors or Major Shareholders of J Trust Bank.
- Have no direct or indirect business relations which are related to business activities of J Trust Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan rekomendasi dan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan di bidang manajemen risiko, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.
5. Menelaah ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko.
7. Menelaah dan meneliti yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko.
8. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
10. Memantau dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dan pengelolaan terhadap 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.

Duties and Responsibilities of Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee's duties are to provide recommendation and independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, in assisting the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties and responsibilities in risk management, including identifying issues that require the attention of the Board of Commissioners and supporting other duties related to the duties of the Board of Commissioners, such as:

1. Evaluate the risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
2. Evaluate the accountability of the Board of Directors to the Board of Commissioners for the implementation of the Risk Management Policy.
3. Monitor and evaluate the conformity between risk management policy and the implementation of these policies.
4. Monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee, Risk Management Division, and other relevant divisions.
5. Review the Bank's compliance with laws and regulations in risk management and others related to the Bank's activities.
6. Provide inputs and recommendations to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors on information and/or events identified as potentially risky or risk-bearing.
7. Conduct review and research deemed necessary for the implementation of authority and responsibility of the Board of Directors in implementing risk management.
8. Evaluate the Board of Directors' request relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
9. Monitor and evaluate the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control and information system of risk management.
10. Monitor and evaluate the Risk Profile Report and management of 8 types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputational Risk and Strategic Risk.

11. Memantau dan mengevaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.
12. Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

11. Monitor and evaluate the Risk-Based Bank's Soundness Level Reports.
12. Ensure continuous improvements of risk management policies and implementation of risk management practices and procedures at all levels to ensure healthy risk management and control.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan divisi-divisi lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
5. Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta pihak independen.
6. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam *minutes of meeting* atau risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 34 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait.

Policy and Implementation of Risk Oversight Committee Meetings

1. Risk Oversight Committee meetings are held as necessary.
2. Risk Oversight Committee meetings involve the Risk Management Division and other divisions at least once in a month.
3. Risk Oversight Committee meetings with the Board of Commissioners are held as necessary.
4. Every Risk Oversight Committee meeting is chaired by the Chairman of the Risk Oversight Committee, who is an Independent Commissioner of the Bank, or by other Independent Commissioners who are appointed to lead the meeting when the Chairman of the Risk Monitoring Committee is absent.
5. Risk Oversight Committee meetings are always attended by more than 51% of the Risk Oversight Committee members comprising Independent Commissioners and independent parties.
6. Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If no consensus is reached, the decision shall be made by voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.
7. Results of the Risk Oversight Committee meetings shall be laid out in minutes of meetings and properly documented.
8. Dissenting opinions occuring in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting, including the reasons for the disagreement.

In 2024, the Risk Oversight Committee conducted 43 meetings involving the Risk Management Work Unit and other related work units.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran **rapat rutin** setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

The attendance frequency and attendance rate at regular meetings for each member of the Risk Oversight Committee are as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Iwan Nataliputra (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	12	12	100%
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	12	12	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	12	12	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	12	12	100%

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran **rapat teknis** setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

The attendance frequency and attendance rate at technical meetings for each member of the Risk Oversight Committee are as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Iwan Nataliputra (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	22	22	100%
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	22	22	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	22	20	90%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	22	22	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk selama tahun 2024, mereka telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, workshop, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain:

Training and/or Competency Improvement of Risk Oversight Committee Members

To support the implementation of duties and responsibilities of members of the Risk Oversight Committee of PT Bank J Trust Indonesia, in 2024 they have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Iwan Nataliputra	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Oversight Committee	Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4-5 Sept 2024, Jakarta 4-5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectiveness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa	18 – 20 Sept 2024, Bali 18 – 20 Sept 2024, Bali

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
I Gde Yadnya Kusuma	Sekretaris Komite Pemantau Risiko Secretary of Risk Oversight Committee	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4-5 Sept 2024, Jakarta 4-5 Sept 2024, Jakarta
		Digital Forensik di Sektor Jasa Keuangan Digital Forensics in the Financial Services Sector	OJK Institute	28-30 Okt 2024, Jakarta 28-30 Oct 2024, Jakarta
Benny Siswanto	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Oversight Committee	Green House (GHG) Emission Inventory Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman The Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Domain	IIKAI	1 Agt 2024, Jakarta 1 Aug 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4-5 Sept 2024, Jakarta 4-5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectiveness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa	18-20 Sept 2024, Bali 18-20 Sept 2024, Bali

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mereview profil risiko Bank yang disusun setiap triwulan sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   1.1. Profil Risiko Bank Triwulan 4 Tahun 2023 pada tanggal 17 Januari 2024.
   1.2. Profil Risiko Bank Triwulan 1 Tahun 2024 pada tanggal 29 Mei 2024.
   1.3. Profil Risiko Bank Triwulan 2 Tahun 2024 pada tanggal 24 Juli 2024.
   1.4. Profil Risiko Bank Triwulan 3 Tahun 2024 pada tanggal 23 Oktober 2024.

2. Memantau dan mengevaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko Semester II/2023 dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024-

3. Mereview dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, kebijakan perkreditan, kebijakan pendanaan, penyusunan dashboard profil risiko, modal dan lain-lain serta implementasinya, melalui pelaksanaan rapat yang membahas hal-hal sebagai berikut:
   3.1. Risk Appetite dan Risk Tolerance, pada tanggal 24 Januari 2024 dan 23 Oktober 2024.
   3.2. Penyusunan dash board risiko hukum, pada tanggal 10 Januari 2024, 31 Juli 2024, 9 Oktober 2024
   3.3. Strategi pendanaan pada tanggal 24 Januari 2024, 19 Juni 2024, 3 Juli 2024.

Work Program Realization of the Risk Oversight Committee in 2024

The work programs of the Risk Oversight Committee in 2024 were:

1. Review the Bank's risk profile, which was compiled quarterly before submission to the OJK, with the following details:
   1.1. The Bank's Risk Profile for the Fourth Quarter of 2023 on 17 January 2024.
   1.2. The Bank's Risk Profile for the First Quarter of 2024 on 29 May 2023.
   1.3. The Bank's Risk Profile for the Second Quarter of 2024 on 24 July 2024.
   1.4. The Bank's Risk Profile for the Third Quarter of 2024 on 23 October 2024.

2. Monitor and evaluate the Risk-Based Bank's Soundness Level Report for the Second Half of 2023 on 17 January 2024.

3. Review and evaluate the policies and the implementation of risk management policy, credit policy, funding policy, formulation of risk profile dashboards, capital and others, as well as their implementation through meetings that discussed the following agenda:
   3.1. Risk Appetite and Risk Tolerance on 24 January 2024 and 23 October 2024.
   3.2. Preparation of legal risk dashboard on 10 January 2024, 31 July 2024, 9 October 2024.
   3.3. Funding strategy on 24 January 2024, 19 June 2024, 3 July 2024.

3.4. Penyusunan *dashboard* risiko kepatuhan, pada tanggal 7 Februari 2024, 28 Februari 2024, 6 Maret 2024
3.5. New booking loan, pada tanggal 21 Februari 2024.
3.6. Branch management, pada tanggal 21 Februari 2024.
3.7. Stress test likuiditas, pada tanggal 20 Maret 2023.
3.8. Penyusunan dash board risiko reputasi, pada tanggal 20 Maret 2024, 27 Maret 2024.
3.9. Internal model/credit rating system, pada tanggal 8 Mei 2024, 17 Juli 2024
3.10. Penanganan kredit bermasalah & AYDA, pada tanggal 15 Mei 2024.
3.11. Penyusunan *Dashboard* risiko kredit, pada tanggal 5 Juni 2024
3.12. Penyusunan dash board risiko operasional, pada tanggal 12 Juni 2024, 10 Juli 2024, 31 Juli 2024
3.13. Temuan pemeriksaan OJK, pada tanggal 24 Juli 2024
3.14. Penyusunan dash board risiko *stratejik*, pada tanggal 14 Agustus 2024, 21 Agustus 2024, 11 September 2024.
3.15. Sistem IT dan Cyber security, pada tanggal 2 Oktober 2024.
3.16. Laporan recovery plan dan resolution plan, pada tanggal 6 November 2024.
3.17. Penyusunan dash board risiko likuiditas, pada tanggal 4 Desember 2024

3.4. Preparation of compliance risk dashboard on 7 February 2024, 28 February 2024, 6 March 2024.
3.5. New booking loan on 21 February 2024.
3.6. Branch management on 21 February 2024.
3.7. Liquidity stress test on 20 March 2023.
3.8. Preparation of reputational risk dashboard on 20 March 2024, 27 March 2024.
3.9. Internal model/credit rating system on 8 May 2024, 17 July 2024.
3.10. Handling of bad loans & foreclosed collateral on 15 May 2024.
3.11. Preparation of credit risk dashboard on 5 June 2024.
3.12. Preparation of operational risk dashboard on 12 June 2024, 10 July 2024, 31 July 2024.
3.13. OJK audit findings on 24 July 2024.
3.14. Preparation of strategic risk dashboard on 14 August 2024, 21 August 2024, 11 September 2024.
3.15. IT and cyber security system on 2 October 2024.
3.16. Report of recovery plan and resolution plan on 6 November 2024.
3.17. Preparation of liquidity risk dashboard on 4 December 2024.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap pengajuan persetujuan kebijakan baru atau pengkinian kebijakan terkait dengan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan : *Risk Framework*, *Risk Strategy* serta *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.
3. Mengikuti pembahasan RBB tahun 2025 serta evaluasi terhadap realisasi RBB

Risk Oversight Committee Work Plan in 2025

The Risk Oversight Committee is committed to implement its duties and responsibilities, namely to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to risk management.

The work plan of the Risk Oversight Committee in 2025 is as follows:

1. Conduct evaluations and provide input on submissions for new policies approval or updates to policies related to risk management that require the approval of the Board of Commissioners.
2. Evaluate the implementation of risk management in accordance with: Risk Framework, Risk Strategy, Risk Appetite and Risk Tolerance.
3. Following the discussion of 2025 RBB and evaluation of the RBB realization.

4. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap temuan audit OJK dan *action plan* tindak lanjut perbaikannya melalui rapat koordinasi dengan IAD.
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas saran perbaikan yang diberikan KPR sepanjang tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan profil risiko BJI yang wajib dilaporkan kepada OJK setiap triwulan.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap 3 jenis risiko yang signifikan berpengaruh terhadap aktifitas BJI, yaitu :
   a. Risiko likuiditas, paling tidak mencakup
      - Proyeksi *cash flow*
      - Pengelolaan alat likuid
      - Kemampuan *funding* untuk medukung penanaman dalam *earning assets*
      - Kebijakan dan pengelolaan investasi terhadap *excess* likuiditas
      - *Stress test* dan *liquidity contingency plan*
   b. Risiko operasional, paling tidak mencakup
      - Kehandalan sistim IT setelah diberlakukannya new CBS (*Core Banking System*) dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan transaksi.
      - Sistem pengamanan *Cyber*
   c. Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan internal dan eksternal dalam operasional Bank. Risiko kredit, paling tidak mencakup
      - Pertumbuhan kredit dan kualitas kredit
      - Kecukupan CKPN
      - Penerapan prinsip 4 *eyes principles*
      - Keberhati-hatian dalam proses pemberian kredit sejak tahap permohonan, analisis, persetujuan, pencairan dan pengawasan paska pencairan kredit.
      - Mengevaluasi dan memantau perkembangan debitur Col-2 serta progress dan hasil collection NPL.
8. Melakukan rapat internal KPR guna menyamakan persepsi mengenai permasalahan penting dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Manajemen dalam pelaksanaan manajemen risiko.

4. Conduct evaluation and monitoring of OJK audit findings and action plans for follow-up improvements through coordination meetings with IAD.
5. Conduct follow-up monitoring of suggestions for improvement provided by the Risk Oversight Committe throughout 2024 related to the implementation of risk management.
6. Conduct monitoring and evaluation of BJI's risk profile reports which must be reported to OJK every quarter.
7. Conduct more intensive monitoring and evaluation of 3 types of risks that significantly affect BJI activities, namely:
   a. Liquidity risk, at least includes:
      - Cash flow projection
      - Liquid assets management
      - Funding ability to support investment in earning assets
      - Investment policy and management of excess liquidity
      - Stress test and liquidity contingency plan
   b. Operational risks, at least include:
      - IT system reliability after the implementation of the new CBS (Core Banking System) in supporting the improvement of service quality and transaction security.
      - Cyber security system.
   C. Compliance with the fulfillment of internal and external provisions in the Bank's operations. Credit risk, at least includes:
      - Credit growth and credit quality
      - Loan impairment (CKPN) adequacy
      - Implementation of the 4 eyes principles
      - Prudent in the credit approval process from the application stage, analysis, approval, disbursement and post-credit disbursement supervision.
      - Evaluate and monitor the development of Col-2 debtors as well as the progress and results of NPL collection.
8. Conduct Risk Oversight Committee internal meetings to align perceptions regarding important issues and corrective steps that need to be taken by the Management in implementing risk management.

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Remuneration of Risk Oversight Committee Members

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Remuneration packages and other facilities

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko The Amount Received in 1 Year by Members of the Risk Oversight Committee				Type of Remuneration and Other Facilities
	2023		2024		
	Orang Person	Rp Juta Rp million	Orang Person	Rp Juta Rp million	
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	4	4.130	4	4.260	Remuneration (salary, routine allowance, bonus, and other non-nature facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:					Other facilities in nature form (housing, transportation, health insurance, and others) which:
Dapat dimiliki	2	357	2	369	Can be owned
Tidak dapat dimiliki	4	38	4	42	Cannot be owned
Total	**4**	**4.525**	**4**	**4.671**	**Total**

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya
Including remuneration of Committee member whose office term has ended

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko Number of Members of the Risk Oversight Committee		Remuneration per Person
	2023	2024	
Di atas Rp5 miliar	-	-	Above Rp5 billion
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	1	-	Between Rp2 billion and Rp5 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2	2	Between Rp1 billion and Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-	Between Rp500 million and Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	2	2	Below Rp500 million

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Pemantau Risiko
Variable Remuneration for Risk Oversight Committee Members

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko The Amount Received in 1 Year by Members of the Risk Oversight Committee			
	2023		2024	
	Orang Person	Rp Juta Rp million	Orang Person	Rp Juta Rp million
Total	**Nihil** **None**	**Nihil** **None**	**Nihil** **None**	**Nihil** **None**

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko J Trust Bank tidak menerima remunerasi yang bersifat variabel (saham atau bonus, baik bonus kinerja, bonus non kinerja, maupun opsi saham).

All members of the J Trust Bank Audit Committee do not receive variable remuneration (shares or bonuses, whether performance bonuses, non-performance bonuses or stock options).

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris serta kerangka remunerasi bagi pegawai Bank. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Kementerian Tenaga Kerja dan peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
b. Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Bank mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee is formed to assist the Board of Commissioners in supervising the remuneration and nomination policies of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of committees under the Board of Commissioners. In addition, the Committee is established to ensure the following:

a. Ensure compliance with the requirements from the Bank's supervisory authorities, the Ministry of Manpower, other regulations as well as matters specified in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
b. Ensure the implementation of governance duties of the Board of Commissioners and meet the requirements stipulated by the Bank's supervisory authorities.

Legal Basis

The Remuneration and Nomination Committee is established in reference to the following regulations:

- Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 dated 14 September 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies.
- The Bank's Articles of Association on the Duties and Authorities of the Board of Commissioners.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai:

I. Akuntabilitas, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
II. Penetapan/penggantian anggota;
III. Tugas dan tanggung jawab;
IV. Wewenang;
V. Rapat, kuorum & pengambilan keputusan;
VI. Pelaporan;
VII. Mekanisme evaluasi kinerja;
VIII. Larangan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan evaluasi secara berkala atau akan dilakukan pengkinian jika diperlukan agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

Jumlah, Susunan, dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.

2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.

3. Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.
4. Anggota Komite terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu:
   a. 2 (dua) Komisaris Independen di mana satu Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua;
   b. 1(satu) orang Komisaris; dan,
   c. 1(satu) pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

Remuneration and Nomination Committee Charter

The Remuneration and Nomination Committee has Work Guidelines in form of the Remuneration and Nomination Committee Charter, which stipulates the following:

I. Accountability, composition, structure and membership requirements;
II. Determination/replacement of members;
III. Duties and responsibilities;
IV. Authority;
V. Meetings, quorum & decision making;
VI. Reporting;
VII. Performance evaluation mechanism;
VIII. Prohibition.

The Remuneration and Nomination Committee Charter is reviewed periodically or updated if it is deemed necessary to ensure the Remuneration and Nomination Committee functions can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

Number, Structure, and Composition of Remuneration and Nomination Committee Membership

1. The committee is created to support the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners on nomination and remuneration of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Independent Party. The Committee is responsible to the Board of Commissioners and must be independent in carrying out its duties.
2. Committee members are appointed and dismissed based on the Board of Commissioners' Meeting resolution and formalized by a decision letter of the Board of Directors.
3. The Committee is chaired by an Independent Commissioner and one of the Committee members is appointed as Committee Secretary.
4. The Committee consists of 4 (four) members, namely:
   a. 2 (two) Independent Commissioner, one of which also serves as Chairman;

   b. 1 (one) Commissioner; and,
   c. 1 (one) executive officer in charge of Human Resources.
5. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Committee.

6. Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama J Trust Bank;
   b. Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
7. Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
8. Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

6. Other members of the Committee may come from outside of J Trust Bank and must meet the following requirements:
   a. Has no affiliation with J Trust Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of J Trust Bank;
   b. Has experiences related to nomination & remuneration; and does not have a concurrent position as a member of another committee at J Trust Bank.
7. If there are more than 3 (three) members of the Committee, there must be at least 2 (two) Independent Commissioners.
8. The Committee Chairman may only hold concurrent positions as chairman of one other committee.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 5 April 2023 yang disetujui dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 6 April 2023, dan Surat Keputusan Direksi tertanggal 5 Juni 2023, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

Based on the Recommendation from the Remuneration and Nomination Committee dated 5 April 2023, with approval from the Circular Decision of the Board of Commissioners dated 6 April 2023 and the Board of Directors Decree dated 5 June 2023, structure and membership of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen | Independent Commissioner	Ketua/Anggota | Chairman/Member
2	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen | Independent Commissioner	Anggota | Member
3	Nobuiku Chiba	Komisaris | Commissioner	Anggota | Member
4	Ong Pey Fang	EVP HC & Corporate Secretary	Sekretaris/Anggota | Secretary/Member

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Each Commissioner who becomes the Chairman and member of the Remuneration and Nomination Committee has passed the fit and proper test by OJK. Appointment of the Chairman and members of the Remuneration and Nomination Committee as mentioned above has met the criteria set in the OJK Regulations.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.

Office Term of Remuneration and Nomination Committee Members

- Committee members are appointed for a certain period and may be reappointed.
- Committee members' term of office must not be more than the office term of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
- Replacement of Committee members who are not from the Board of Commissioners is conducted 60 (sixty) days at the latest after the Committee member is no longer able to carry out their function.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- **Benny Siswanto, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Iwan Nataliputra, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobuiku Chiba, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Ong Pey Fang, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.**
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif .

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024, seluruh anggota komisaris independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Anggota Komisaris dalam Komite Nominasi dan Remunerasi mayoritas adalah Komisaris Independen. KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
   1. Komite menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada

Qualification and Profile of Remuneration and Nomination Committee Members

Qualifications and profiles of members of the Company's and Remuneration and Nomination Committee as of 31 December 2024 are as follows:

- **Benny Siswanto, Chairman of the Remuneration and Nomination Committee.**
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Iwan Nataliputra, Member of the Remuneration and Nomination Committee.**
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Nobuiku Chiba, Member of the Remuneration and Nomination Committee.**
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Ong Pey Fang, Member and Secretary of the Remuneration and Nomination Committee.**
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

Independency of Remuneration and Nomination Committee Members

In 2024, all members of independent commissioners on the Remuneration and Nomination Committee (RNC) have no financial relations, management relations, share ownership, and/or family relations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank, which may affect the ability to act independently. The majority of members of the Remuneration and Nomination Committee are Independent Commissioners. RNC has carried out its duties and responsibilities professionally and independently.

Roles and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to the following:

a. Related to Nomination Policy:
   1. The Committee prepares and provides recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
   - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
3. Komite mengidentifikasi, meninjau dan memberikan rekomendasi kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Komite mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
5. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
6. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
   1. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi
      - Kebijakan tentang remunerasi
      - Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   2. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan, untuk kemudian disampaikan kepada Direksi.

of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

2. The Committee gives recommendations to the Board of Commissioners on:
   - Composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
   - Policies and criteria required in the nomination process;
   - Policy for performance evaluation of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or Independent Party.
3. The Committee identifies, reviews, and recommends candidates for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or Independent Party to the Board of Commissioners to be proposed and approved at the General Meeting of Shareholders.
4. The Committee evaluates candidates based on equal opportunity, regardless of their gender, race, religion, or the source of recommendations.
5. The Committee supports the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Independent Party, based on the benchmarks set for evaluation purposes.
6. The Committee gives recommendations to the Board of Commissioners regarding the competency development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

b. Related to Remuneration Policy:
   1. The Committee evaluates and provides recommendations to the Board of Commissioners on:
      - Remuneration structure
      - Remuneration policy
      - Remuneration package including salary, allowance, bonus, and other incentives (if applicable) for Board of Directors, Board of Commissioners, and Independent Parties, to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
   2. The Committee evaluates and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for employees, to be submitted to the Board of Directors

3. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Komite memastikan bahwa evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
   - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
   - Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
   - Kinerja kerja individu;
   - Keadilan/kewajaran terhadap "peer group";
   - Risiko;
   - Keseimbangan antara tunjangan tetap dan tunjangan variabel lainnya;
   - Pertimbangan sasaran/tujuan dan strategi jangka panjang Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang/ pemenuhan cadangan Bank dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Komite secara berkala meninjau dan memperbaharui kebijakan, struktur dan paket remunerasi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk kehadiran:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 orang perwakilan pegawai Bank.
3. Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
4. Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
5. Hasil rapat Komite ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3. The Committee supports the Board of Commissioners in assessing performance against the remuneration received by members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
4. The Committee ensures that the evaluation of remuneration policy, structure and package have considered the following factors:
   - Remuneration in the industry in line with the Bank's business scale and activities;
   - Duties, role and responsibilities of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or employees are in line with the Bank's objectives and performances;
   - Individual performance;
   - Fairness to "peer group";
   - Risks;
   - Balance between fixed allowance and other variables allowance;
   - Consideration of the Bank's long-term targets/objectives and strategies, the Bank's financial stability, the Bank's capital adequacy and short-term and long-term liquidity needs/fulfillment of the Bank's reserves and the Bank's potential income in the future.
5. The Committee evaluates and ensures that the remuneration policy is heeding the prevailing regulations.
6. The Committee periodically reviews and updates remuneration policy, structure, and package.

Policy and Implementation of Remuneration and Nomination Committee Meetings

1. Committee meetings must be done periodically at least 1 (one) meeting in every 3 (three) months.
2. Committee meetings can be held if being attended by more than 51% of the members, including the attendance of:
   a. 1 (one) Independent Commissioner;
   b. 1 (one) Executive Officer in charge of human resources function or 1 representative of Bank employees.
3. The Committee meetings' decisions can only be reached through a consensus.
4. If no consensus is reached, the decision making shall be made based on 2/3 (two thirds) of the majority vote of the Committee members present.
5. Committee meeting results must be set forth in the minutes of meeting and are well documented.

6. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

6. Dissenting opinions occuring in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting and the reasons for such dissent.

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 4 kali rapat. Frekuensi Kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

In 2024, the Remuneration and Nomination Committee held 4 meetings. The attendance frequency and attendance rate of each member of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi
Meetings and Attendance Rate of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Periode Jabatan Office Term	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Number of Nomination and Remuneration Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	1 Januari – 31 Desember 2024 1 January – 31 December 2024	4	4	100%
Iwan Nataliputra (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	1 Januari – 31 Desember 2024 1 January – 31 December 2024	4	4	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris/Anggota) (Commissioner, Member)	1 Januari – 31 Desember 2024 1 January – 31 December 2024	4	4	100%
Ong Pey Fang (EVP HC & Corsec, Sekretaris/Anggota) (EVP HC & Corsec, Secretary/Member)	1 Januari – 31 Desember 2024 1 January – 31 December 2024	4	4	100%

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	26 Maret 2024 March 26, 2024	1. Hasil Employee Survey 2023 2. *Action plan* SDM yang akan dilakukan pada tahun 2024 dengan memperhatikan hasil employee survey	1. 2023 Employee Survey Results 2. HR action plan to be carried out in 2024 taking into account employee survey results
2	29 Mei 2024 May 29, 2024	1. Permohonan rekomendasi Komite Nominasi Remunerasi untuk remunerasi BOC, BOD, dan EVP tahun 2024 serta mengajukan rekomendasi tersebut ke BOC, untuk selanjutnya diusulkan persetujuan oleh RUPS 2. Mereview dan merekomendasikan komposisi BOD di tahun 2024, untuk selanjutnya diusulkan persetujuan oleh RUPS	1. Request for recommendations from the Remuneration Nomination Committee for BOC, BOD and EVP remuneration in 2024 and submit these recommendations to the BOC, for further approval by the GMS 2. Review and recommend the composition of the BOD in 2024, to be further proposed for approval by the GMS
3	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Permohonan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk remunerasi khususnya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas	Request for recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, for remuneration, especially transportation and accommodation for business travel
4	26 November 2024 November 26, 2024	1. Pembahasan employee survey dengan berfokus pada perubahan dan alasan perubahan tersebut. 2. Terkait dengan talent management, kriteria untuk talent	1. Discussion of employee surveys focusing on changes and the reasons for these changes. 2. Related to talent management, criteria for talent

PELAPORAN

Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedurnya kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi Remunerasi juga membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.

REPORTING

The Committee shall report the implementation of its duties, responsibilities, and procedures to the Board of Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee also prepares an annual report on the implementation of Committee activities which is included in the Annual Report.

MEKANISME EVALUASI KINERJA

Penilaian kinerja Komite Nominasi & Remunerasi dilakukan minimum 1 (satu) kali setahun. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang meliputi realisasi atas rencana kerja dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM

The performance assessment of the Remuneration and Nomination Committee is conducted at least once a year. The performance assessment of the Remuneration and Nomination Committee is carried out by all members of the Board of Commissioners, which includes the realization of work plans and the effectiveness in implementing its duties and responsibilities.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2024 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

Training and/or Competency Improvement of Remuneration and Nomination Committee Members

To improve the competence and understanding in supporting the implementation of its duties and responsibilities in 2024, Remuneration and Nomination Committee members of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Benny Siswanto	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Chairman of Nomination & Remuneration Committee	Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman The Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Domain	IKAI	1 Agt 2024, Jakarta 1 Aug 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4–5 Sept 2024, Jakarta 4–5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectiveness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa	18–20 Sept 2024, Bali 18 – 20 Sept 2024, Bali
Ong Pey Fang	Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi Secretary of Nomination & Remuneration Committee	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	19-20 Mar 2024, Jakarta 19-20 Mar 2024, Jakarta
		Emisi Scope 3 & Verifikasi GHG Scope 3 Emissions & GHG Verification	Asosiasi Emiten Indonesia & Global Reporting Initiative (GRI)	26 Mar 2024, Jakarta 26 Mar 2024, Jakarta
		Peran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia The Role of the Taxonomy for Indonesian Sustainable Finance (TKBI) in Driving the Energy Transition Towards Net Zero Emissions in Indonesia	OJK Institute	28 Mar 2024, Jakarta 28 Mar 2024, Jakarta
		Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Keamanan Siber Bank Bank Cybersecurity	OJK Institute	7 Nov 2024, Jakarta 7 Nov 2024, Jakarta
		Board Governance Forum: Climate Reporting in the Financial Statements	KPMG Indonesia	14 Nov 2024, Jakarta 14 Nov 2024, Jakarta
Nobuiku Chiba	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of Nomination & Remuneration Committee	Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	17-18 Apr 2024, Jakarta 17-18 Apr 2024, Jakarta

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/ Seminar Name of Training/Workshop/Conference/ Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Iwan Nataliputra	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of Nomination & Remuneration Committee	Green House (GHG) Emission Inventory	Insolity Consulting	15 Mei 2024, Jakarta 15 May 2024, Jakarta
		Manajemen Risiko Risk Management	Lentera Mulia Persada	4-5 Sept 2024, Jakarta 4-5 Sept 2024, Jakarta
		Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan Increase the Effectiveness of Risk Management Implementation to Create a Sustainable Banking Industry	BARa	18 – 20 Sept 2024, Bali 18 – 20 Sept 2024, Bali

Realiasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024
Realization of the Nomination and Remuneration Committee Work Program in 2024

No.	Realisasi Program Kerja 2024	2024 Work Program Realization
1	Evaluasi kinerja anggota Direksi, berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.Penilaian dan rekomendasi kandidat calon Direksi dan Dewan Komisaris	Evaluation of the performance of members of the Board of Directors, based on benchmarks established for evaluation purposes.Assessment and recommendation for candidates of Directors and Commissioners
2	Rekomendasi Komite Nominasi Remunerasi untuk remunerasi BOC, BOD, dan EVP tahun 2024Evaluasi masa jabatan Anggota Komite	Remuneration Nomination Committee recommendations for BOC, BOD and EVP remuneration in 2024Evaluation of the Committee Members' Office Term
3	Mereview dan merekomendasikan komposisi BOD di tahun 2024Meninjau dan menyesuaikan total gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, serta fasilitas & benefit Pejabat Eksekutif	Review and recommend BOD composition in 2024Review and adjust total salaries, honorarium and allowances for the Board of Commissioners, Directors, as well as facilities & benefits for Executive Officers
4	Rekomendasi mengenai perubahan fasilitas remunerasi bagi BOD BOC dan karyawan	Recommendations regarding changes to remuneration facilities for BOD BOC and employeesGive recommendations and carry out Board Assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as part of the Bank's efforts to continuously improve the practices of Corporate Governance
5	Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan karyawan yang akan menduduki posisi tertentuEvaluasi dan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Policies and criteria required in the process of nominating employees who will occupy certain positionsEvaluation and changes in the composition of members of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee , and the Remuneration and Nomination Committee

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Pada 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan kepada Pemegang Saham.
2. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
3. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Remuneration and Nomination Committee Work Plan in 2025

In 2025, the Remuneration and Nomination Committee has set out work plans with several strategic priorities as follows:

1. Identify, review, and propose candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. Periodically review and give recommendations on human resources policies and implementations related to remuneration and nomination, especially for the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers.
3. Review and give recommendations on the appointment and changes in the composition of committee members.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

The remuneration that has been paid to members of the Remuneration and Nomination Committee for 1 (one) year are:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2024	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *) The Amount Received in 1 Year		Types of Remuneration and Other Facilities in 2024
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee		
	Orang Person	Rupiah Rupiah	
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	4	8.458.921.758	Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other non-natura facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	Other Facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that:
1. Bisa dimiliki 1. Can be owned	3	570.219.948	Can be owned
2. Tidak bisa dimiliki 2. Can not be owned	4	705.153.957	Cannot be owned
Total Total	**4**	**9.734.295.663**	**Total**

Keterangan | Note:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak | Remuneration received already includes tax

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk dan menetapkan komite-komite di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan. Komposisi keanggotaan komite-komite di bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite.

Komite-komite di bawah Direksi antara lain:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has formed and established committees under the Board of Directors based on the Board of Director's Decree whose duties and responsibilities collectively are to assist the Board of Directors in carrying out certain functions that require special expertise by providing guidance/suggestions/recommendations regarding policies and supervising the Bank's risk management. Recommendations from each committee become a reference for the Board of Directors in the decision-making process. The composition of committees membership under the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is arranged in accordance with the complexity of the committee's duties and responsibilities.

Committees under the Board of Directors include:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Structure and Membership

The Risk Management Committee is a non-structural Committee in the Bank's Risk Management System based in the Head Office, which formulates policies, strategies, and guidelines for risk management implementation, oversees the implementation of policies, monitors the development and condition of risk profile, and provides suggestions and directions for improvement at a meeting forum, which is held at least 1 (once) a month. The establishment of this Committee is based on OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 11.02/S.Kep.Dir-RMD/Jtrust/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Komite Manajemen Risiko, maka susunan anggota Komite Manajemen Risiko (KMR) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Based on the Board of Directors Decree (SK) No. 11.02/S.Kep.Dir-RMD/Jtrust/X/2023 dated 11 October 2023 regarding the Risk Management Committee, the composition of Risk Management Committee members as of 31 December 2024 was as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko **The Composition of Risk Management Committee**	
Ketua Chairman	Wakil Direktur Utama | Vice President Director
Wakil Ketua Deputy Chairman	MD Compliance & Corporate Legal
Sekretaris Secretary	EVP Risk Management
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	1. Wakil Direktur Utama/Vice President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Finance & Planning 4. MD Business 5. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 6. MD Information Technology 7. SEVP Business Banking 8. SEVP Information Technology & Operation 9. EVP Risk Management 10. EVP Treasury & FI 11. EVP Business Linkage & Commercial 12. EVP Human Capital & Corporate Secretary 13. EVP Credit Risk Reviewer 14. EVP Branch Management
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Permanent Members with No Voting Rights	1. Risk Management Division (RMD) 2. Compliance Division (CPD) 3. Internal Audit Division (IAD) Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputi Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 2 (dua) orang level Kepala Departemen. Represented by the Head of Division/Deputy Head of Division. If they are unable to attend, they can appoint/be replaced by 2 (two) people, whose position tantamount to Head of Department.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Financial Control Division 2. Planning & Performance Division 3. Head Office & Branch Operation Division 4. Credit Administration Division 5. General Service Division 6. Branch Management Division 7. Treasury Capital Markets & FI Division 8. Business Linkage & Consumer Division 9. Commercial & SME Banking Division 10. Corporate Banking Division 11. Japan & Korea Desk Division 12. Business Strategy & Development Division 13. Corporate Funding & Business Product Division 14. Human Capital Division 15. Corporate Secretary Division 16. Corporate Legal & Litigation Division 17. Credit Risk Reviewer Division 18. Management All Delinquencies Division 19. Information Technology Division 20. President Office Division 21. Marketing & Promotion Division Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen. Represented by the Head of Division/Deputy Head of Division. If they are unable to attend, they can appoint/be replaced by 1 (one) person, whose position tantamount to Head of Department.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Appetite*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi,
3. Penetapan (*Justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu: menyusun jadwal dan agenda pertemuan, mempersiapkan materi, data dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta menyusun risalah rapat (notulen) hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko dan mendistribusikan risalah rapat kepada anggota Tetap Komite (walaupun tidak hadir dalam forum Komite Manajemen Risiko).
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko wajib untuk:
   a. Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.
   b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite Manajemen Risiko diadakan minimal 1 (satu) kali pertemuan per bulan dalam forum secara daring atau luring.
2. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua berhalangan hadir,

Authority and Responsibility

The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to evaluate and provide recommendations to the President Director regarding Risk Management, which at least include:

1. Formulation of Risk Management policies and their amendments, including Risk Management strategy, Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Management framework, as well as contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions.
2. Improvements on the Risk Management process, which include identification, measurement, monitoring, and control, which are conducted periodically or incidentally following changes in the Bank's external and internal conditions that affect the Bank's capital adequacy and risk profile, as well as the ineffectiveness of Risk Management based on evaluation results.
3. Irregularities of business decision and/or justification, such as a significant achievement of business expansions compared to the initial Bank's Business Plan or taking a position or risk exposure that exceeds a predetermined limit.
4. Duties of the Secretary of Risk Management Committee are to set meeting agendas and schedules, prepare materials, data, and distribute Risk Management Committee meeting materials 1 working day prior to the meeting and create the minutes of meeting of Risk Management Committee meetings and distribute them to the permanent members of the Committee (even if they are not present at the Risk Management Committee forum).
5. In carrying out duties and responsibilities, the Risk Management Committee is obliged to:
   a. Work with full commitment and dedication, and be available at any time when needed.
   b. Maintain the confidentiality of the Bank's data and/or information following their membership in the team.

Meetings and Decision Making Mechanisms

1. Risk Management Committee meetings are held at least 1 (one) per month in online or offline forums.
2. The Committee meeting is led by the Chairman, and in the event that the Chairman is unable to attend, the meeting is chaired by the Deputy Chair. If the

maka rapat dipimpin oleh anggota Tetap dengan Hak Suara dengan urutan sebagai berikut:

a. *MD Finance & Planning*
b. *MD Business*
c. *MD Credit Risk & Management All Delinquencies*
d. *MD Information Technology*

3. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila sekurang-kurangnya telah dihadiri antara lain:
   a. Sebanyak 51% dari anggota Tetap dengan Hak Suara dan minimum dihadiri 2 (dua) Direksi; dan
   b. Sebanyak 2 (tiga) dari anggota Tetap pemberi kontribusi Tanpa Hak Suara.
4. Keputusan Komite dianggap sah apabila rapat dinyatakan kuorum.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat, maka putusan diambil dengan menggunakan voting suara terbanyak dan dicantumkan dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara memadai.

Deputy Chair is unable to attend, the meeting is chaired by one of the permanent members with Voting Rights in the following order:

a. MD Finance & Planning
b. MD Business
c. MD Credit Risk & Management All Delinquencies
d. MD Information Technology

3. The Risk Management Committee meeting is declared as a quorum if attended by:
   a. At least 51% of the permanent members with Voting Rights and minimum 2 (two) Directors; and
   b. at least 2 (two) contributing permanent members with No Voting Rights.
4. Committee decisions are deemed to be valid if the meeting is declared a quorum.
5. If there is a dissenting opinion in the meeting, the decision is taken using the majority vote and included in the minutes of meeting.
6. The results of the meeting shall be set out in the minutes of meeting and adequately documented.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 14 kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Implementation of Activities and Meeting Frequency

Throughout 2024, the Risk Management Committee held 14 meetings, which discussed the following agendas:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Quorum	
			Minimum	Realisasi Realization
1	18 Januari 2024 18 January 2024	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester II tahun 2023 Report on the Bank's Soundness Level (Risk-based Bank Rating) for the Second Half of 2023	51.%	78,5%
2	29 Januari 2024 29 January 2024	Laporan Manajemen Risiko per Desember 2023 Risk Management Report as of December 2023	51.%	92,8%
3	26 Februari 2024 26 February 2024	Laporan Manajemen Risiko per Januari 2024 Risk Management Report as of January 2024	51.%	78,5%
4	27 Maret 2024 27 March 2024	Laporan Manajemen Risiko per Februari 2024 Risk Management Report as of February 2024	51.%	71,4%
5	22 April 2024 22 April 2024	Laporan Manajemen Risiko per Maret 2024 Risk Management Report as of March 2024	51.%	71,4%
6	29 Mei 2024 29 May 2024	Laporan Manajemen Risiko per April 2024 Risk Management Report as of April 2024	51.%	71,4%
7	25 Juni 2024 25 June 2024	Laporan Manajemen Risiko per Mei 2024 Risk Management Report as of May 2024	51.%	71,4%
8	24 Juli 2024 24 July 2024	Laporan Manajemen Risiko per Juni 2024 Risk Management Report as of June 2024	51.%	64,2%
9	24 Juli 2024 24 July 2024	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2024 Report on the Bank's Soundness Level (Risk-based Bank Rating) for the first Half of 2024	51.%	64,2%
10	29 Agustus 2024 29 August 2024	Laporan Manajemen Risiko per Juli 2024 Risk Management Report as of July 2024	51.%	71,4%

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Quorum	
			Minimum	Realisasi Realization
11	25 September 2024 25 September 2024	Laporan Manajemen Risiko per Agustus 2024 Risk Management Report as of August 2024	51.%	85,7%
12	28 Oktober 2024 28 October 2024	Laporan Manajemen Risiko per September 2024 Risk Management Report as of September 2024	51.%	92,8%
13	29 November 2024 29 November 2024	Laporan Manajemen Risiko per Oktober 2024 Risk Management Report as of October 2024	51.%	71,4%
14	23 Desember 2024 23 December 2024	Laporan Manajemen Risiko per November 2024 Risk Management Report as of November 2024	51.%	78,5%

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 14 kali, yang telah memenuhi ketentuan. Rapat memenuhi kuorum yang ditentukan.

1. Prosedur penilaian kinerja
   Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode self-assessment.
2. Kriteria penilaian kinerja
   Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko berdasarkan masing-masing Term of Reference (TOR) sebagai berikut:
   a) Jumlah rapat yang diadakan
   b) Kehadiran anggota komite dalam rapat
   c) Tindakan atas masalah yang timbul

Performance Assessment of Risk Management Committee

In 2024, the Risk Management Committee had 14 meetings, which have fulfilled requirements. The meetings had fulfilled the quorum.

1. Performance appraisal procedures
   The Risk Management Committee performance assessment is carried out annually (at least once a year). Evaluation of performance effectiveness is carried out by each committee member through a self-assessment method.
2. Performance assessment criteria
   The criteria and basis for assessing the performance of the Risk Management Committee based on each Term of Reference (TOR) are as follows:
   a) Number of meetings held
   b) Attendance of committee members at the meeting
   c) Action on problems that arise

REALISASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank, antara lain dengan menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.

REALIZATION OF WORK PLAN IN 2024

The Risk Management Committee regularly and actively implements its duties and responsibilities, as well as committee meetings' discussion to ensure that the Bank's risk management is implemented accordingly and effectively, so the Bank can anticipate any changes resulting from business developments and changes in external conditions. Attendance participation of members of the Committee in meetings, including decisions made during the meeting discussions, can also be used as a reference. In 2024, the Risk Management Committee has, among others, carried out the following:

- Ensure that the risk management framework has provided adequate protection against the risks faced by the Bank, among others by formulating policies, strategies, and guidelines for the implementation of risk management.

- Merumuskan strategi manajemen risiko selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance. Serta menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa eksposur risiko dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan kredit, prosedur internal Bank.
- Melaporkan perkembangan Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Melaporkan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali pertemuan per bulan.
2. Kajian berkala terhadap strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta kerangka Manajemen Risiko.
3. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap Laporan Manajemen Risiko per bulan, Laporan Profil Risiko per Triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank per Semester.

THE ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Bank membentuk Asset & Liability Committee (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. Asset & Liability Committee (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi tanggal 3 Oktober 2023 No. 03.02/S.Kep.Dir-TCMD/JTRUST/X/2023 tentang ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO), Struktur dan Keanggotaan Asset & Liability Committee (ALCO) sebagai berikut:

- Formulate a risk management strategy in line with the overall business strategy with due regard to risk appetite and risk tolerance; as well as formulating risk management strategy to ensure that risk exposures are managed in a controlled manner according to credit policies, internal Bank procedures.
- Report on the development of the Bank's Risk Profile Report periodically.
- Report the Bank's Soundness Level Report periodically.

WORK PLAN IN 2025

The Risk Management Committee has the following work plan for 2025:

1. Hold Risk Management Committee meetings at least 1 (once) per month.
2. Periodic review of the Risk Management strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance, as well as the Risk Management framework.
3. Carry out discussion and evaluation of the Monthly Risk Management Report, Quarterly Risk Profile Report, and the Bank's Soundness Level Report per semester.

THE ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

In accordance with Bank Indonesia Regulations, the Bank creates an Asset & Liability Committee (ALCO), with the committee size adjusted to the Bank's complexity. The Asset & Liability Committee (ALCO) is a committee responsible for establishing interest rate policies and strategies for managing the Bank's assets and liabilities based on prudential principles and in accordance with applicable regulations, in order to carry out its function to manage interest rate risks, exchange rate risks, and liquidity risks.

Structure and Membership

The Asset & Liability Committee (ALCO) is responsible to the Board of Directors.

According to the Board of Directors Decree dated 3 October 2023 No. 03.02/S.Kep.Dir-TCMD/JTRUST/X/2023 on the Asset & Liability Committee (ALCO), the structure and membership of the Asset & Liability Committee (ALCO) are as follows:

Susunan Asset & Liability Committee (ALCO) **Structure of Asset & Liability Committee (ALCO)**	
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua Deputy Chairman	EVP Treasury, Capital Markets & Financial Institution
Sekretaris Secretary	Treasury, Capital Market & Financial Institution Division Head
A. Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	1. Direktur Utama/President Director 2. MD/SEVP/EVP Business 3. EVP Treasury, Capital Markets & Financial Institution 4. MD Finance & Planning
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara **Contributing Members with No Voting Rights**	
B Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Permanent Members with No Voting Rights	1. Wakil Direktur Utama/Vice President Director 2. MD Compliance & Corp Legal 3. SEVP Business Banking 4. EVP Branch Management 5. Head of President Office Division 6. Head of Business Strategy & Development Division 7 Head of Compliance Division 8. Head of Planning Performance Division
B. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara yang hadir sesuai dengan keterkaitan dengan agenda/topik. Contributing Non-Permanent Members with No Voting Rights, whose presence related to meeting agendas/topics.	1. Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi materi pembahasan Rapat ALCO (jika ada). Head of Regional Office related to the material being discussed at ALCO meeting (if any). 2. Head of Head Office & Branch Operation Division.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain:

1. Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA).
2. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva, termasuk mekanisme penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
3. Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifikan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:
   - Risiko likuiditas
     a) Mengalokasikan likuiditas di saat langka maupun berlebih, yang didasarkan pada tingkat risiko dan keuntungan terbaik bagi Bank.
     b) Mendukung usulan limit likuiditas tahunan atau usulan pembaharuannya.
     c) Mendukung dan menyetujui atas pengukuran dan hasil mekanisme *fund transfer* (FTP), termasuk di antaranya menyetujui *benchmark yield curve* untuk FTP.

Duties and Responsibilities

Main Duties of ALCO

In carrying out its functions, ALCO must carry out several main duties properly, which include:

1. Conduct development, review, and simulation of Asset and Liabilities Management (ALMA) strategies.
2. Review the pricing of assets and liabilities in order to optimize income from assets and lower expenses (costs) from liabilities, including the mechanism for determining the Prime Lending Rate (SBDK).
3. Review the realization and the Bank's business plan that have a significant impact on ALMA strategies, especially those related to:
   - Liquidity risk
     a) Allocate liquidity when it is scarce or excessive, based on risk levels and the best return for the Bank.
     b) Support the proposed annual liquidity limit or its proposed renewal.
     c) Support and approve the measurement and mechanism result of fund transfer (FTP), such as approving the benchmark yield curve for FTP.

d) Mengalokasikan biaya pemenuhan kewajiban likuiditas Bank termasuk kepada regulator.
e) Menyetujui kebijakan dan *action plan* terkait *short-term liquidity*, *structural liquidity* dan *capital*.

- Risiko pasar
  i. Risiko Suku Bunga (proses *Fund Transfer Pricing*), dan
  ii. Risiko Valuta Asing (strategi *hedging*)
- Aspek permodalan

4. Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

Tata Tertib Rapat ALCO

Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Non-Permanent Voting Members dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. MD Business.
b. MD Finance & Planning.

Prosedur Percepatan

a. Dalam hal terdapat keadaan mendesak/urgensi sehingga perlunya keputusan yang tidak dapat dimasukkan dalam frekuensi pertemuan bulanan standar, Prosedur Percepatan dapat dilakukan.
b. Prosedur Percepatan dilakukan dengan ditetapkannya jadwal rapat ALCO oleh Ketua atau Wakil Ketua. Mekanisme dan ketentuan lain tidak berbeda dengan rapat ALCO biasa.

Working Group

a. Jika dianggap diperlukan, komite dapat membentuk Kelompok Kerja ALCO. Ini merupakan kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi dari anggota ALCO, minimal diwakili oleh Kepala Departemen dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara. Kelompok Kerja bertanggung jawab untuk mendukung ALCO dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus di dalam Rapat ALCO. Peserta Kelompok Kerja dapat disesuaikan dengan materi yang akan diusulkan atau dibahas dalam rapat ALCO.

d) Allocate costs for fulfilling the Bank's liquidity obligations, including to regulators.
e) Approve policies and action plans related to short-term liquidity, structural liquidity and capital.

- Market risk
  i. Interest Rate Risk (Fund Transfer Pricing process), and
  ii. Foreign Exchange Risk (hedging strategy)
- Capital Aspect

4. Deliver information to the Board of Directors on any updates in provisions and regulations that affect ALMA's strategies and policies.

ALCO Meeting Rules

ALCO meetings are led by the Chair and if the Chair is unable to attend, the meeting is led by the Deputy Chair, and if the Deputy Chair is unable to attend, the meeting is chaired by Non-Permanent Voting Members in the following order:

a. MD Business.
b. MD Finance & Planning.

Acceleration Procedure

a. If there is something urgent that requires decisions that cannot be included in the regular monthly meeting frequency, the Committee can carry out Acceleration Procedure.
b. The Acceleration Procedure is carried out with the Chair or Deputy Chair setting up an ALCO meeting schedule. Other mechanisms and provisions are the same with regular ALCO meetings.

Working Group

a. If deemed necessary, the committee can form an ALCO Working Group. It is a working group whose members are representatives of each Division from ALCO members, at least represented by the Department Head of Contributing Permanent Members with No Voting Rights and Contributing Non-Permanent Members with No Voting Rights. The Working Group is responsible for supporting ALCO in formulating proposals from work units into recommendations that will be decided at the ALCO Meeting. Working Group participants depend on the materials that will be proposed or discussed at the ALCO meeting.

b. Dalam mendukung persiapan rapat ALCO, Kelompok Kerja akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat ALCO.
c. Pertemuan Kelompok Kerja diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat ALCO dan membahas materi yang akan diputuskan pada rapat ALCO.
d. Rapat Kelompok Kerja dipimpin oleh Sekretaris ALCO sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris ALCO yang bertindak sebagai pimpinan rapat Kelompok Kerja yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris ALCO.
e. Risalah rapat Kelompok Kerja dibuat oleh Sekretaris ALCO dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada Anggota Tetap dengan Hak Suara.
f. Kelompok Kerja bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat ALCO.
g. Jika usulan materi yang dibahas telah menghasilkan rekomendasi yang tetap dalam rapat Kelompok Kerja, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota Tetap dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.

Pengambilan Keputusan

a. Quorum (minimum kehadiran) rapat ALCO adalah 3/4 dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara.
b. Sekurang-kurangnya keputusan rapat ALCO diputuskan oleh 3/4 dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara.
c. Keputusan rapat ALCO dianggap sah bila rapat dinyatakan quorum.

Tim Support ALCO

Tim *Support* ALCO adalah *staff* dari *Treasury, Capital Markets and Fixed Income Division* (TCMFID) selaku koordinator. Lainnya termasuk *Planning & Performance Division* (PPD), *Financial Control Division* (FCD), *Corporate Funding & Business Product Division* (CFBPD), *Branch Management Division* (BMD), *Business Linkage & Consumer Division (BLCD), Commercial* & *SME Banking Division* (CSBD), *President Office Division* (POD), dan *Risk Management Division* (RMD.

b. In supporting the preparation for the ALCO meeting, the Working Group will discuss proposals related to the ALCO Meeting Agenda.
c. The Working Group meeting is held no later than 2 (two) working days prior to the ALCO meeting and discusses the materials that will be decided at the ALCO meeting.
d. Working Group meetings are chaired by the ALCO Secretary, according to the topic of discussion. If the ALCO Secretary is unable to attend, a substitute secretary is appointed by the ALCO Secretary, who acts as the leader of the Working Group meeting. The ALCO Secretary will appoint a structural officer.
e. Minutes of the Working Group meeting are drafted by the ALCO Secretary and delivered to meeting participants with a copy to Permanent Members with Voting Rights.
f. The Working Group is responsible for discussing meeting materials and providing recommendations to be presented at the ALCO meeting.
g. If the discussion of a proposed material has resulted in a permanent recommendation at the Working Group meeting, then the validation and/or approval process from Permanent Members with Voting Rights can be carried out in a circular manner.

Decision-making

a. The quorum (minimum attendance) for ALCO meetings is 3/4 of Permanent Members with Voting Rights.
b. ALCO meeting decisions are approved by at least 3/4 of Permanent Members with Voting Rights.
c. ALCO meeting decisions are considered valid if the meeting is declared as quorum.

ALCO Support Team

The ALCO Support Team is staff from Treasury, Capital Markets, and Fixed Income Division (TCMFID) as coordinator. The rest are Planning & Performance Division (PPD), Financial Control Division (FCD), Corporate Funding & Business Product Division (CFBPD), Branch Management Division (BMD), Business Linkage & Consumer Division (BLCD), Commercial & SME Banking Division (CSBD), President Office Division (POD), and Risk Management Division (RMD).

Tugas dari Tim *Support* ALCO tersebut adalah:

a. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi rapat ALCO.
b. Membuat undangan rapat ALCO.
c. Sebagai Notulis dalam rapat ALCO.
d. Menindaklanjuti hasil rapat ALCO.

Duties of the ALCO Support Team are:

a. Prepare the necessary data for ALCO meeting presentation materials.
b. Create ALCO meeting invitation.
c. Become a note taker at ALCO meetings.
d. Follow up ALCO meeting results.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2024, Asset & Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan 12 kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda rapat sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan. Rapat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

The Implementation of Activities and Meeting Frequency

In 2024 the Asset & Liability Committee (ALCO) held 12 meetings and carried out various work programs that discussed meeting agendas in order to determine the Memo for circulation. Following are ALCO meetings throughout the year:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
1	30 Januari 2024 30 January 2024	- Tidak ada usulan perubahan suku bunga baik dari sisi funding dan lending - Mengubah FTP Funding Rate untuk mata uang asing selain USD, yaitu AUD 2,00%, EUR 1,00%, JPY 1,00%, dan SGD 2,50%. - Memberikan counterparty limit tersendiri untuk transaksi Repo dan Reverse Repo antar bank, dan tidak lagi menggunakan counterparty limit Money Market. - There are no proposed changes to the interest rates for both funding and lending. - Change the FTP Funding Rate for foreign currencies other than USD, namely AUD 2.00%, EUR 1.00%, JPY 1.00%, and SGD 2.50%. - Provide a separate counterparty limit for Repo and Reverse Repo transactions between banks, and no longer use the Money Market Limit.	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Finance & Planning MD 5. Compliance & Corp Legal MD 6. Business Banking SEVP 7. TCM & FI EVP 8. TCM & FI Division Head 9. Risk Management Division Head 10. President Office Division Head 11. TCM Staff 12. Market Liquidity Risk Staff
2	26 Februari 2024 26 February 2024	- Tidak ada usulan perubahan pada suku bunga DPK, Kredit dan FTP Rates. - Mengubah SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) - There are no proposed changes to the Deposit Interest Rates (DPK), Credit Rates, and FTP Rates. - Change the SBDK (Base Lending Rate).	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Finance & Planning MD 5. Compliance & Corp Legal MD 6. TCM & FI EVP 7. Business Linkage & Commercial EVP 8. TCM & FI Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Business Strategy & Development Division Head 11. TCM Staff 12. Market Liquidity Risk Staff
3	25 Maret 2024 25 March 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada Februari 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in February 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Finance & Planning MD 5. Compliance & Corp Legal MD 6. Business Banking SEVP 7. TCM & FI EVP 8. TCM & FI Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Business Strategy & Development Division Head 11. TCM Staff 12. Market Liquidity Risk Staff

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
4	29 April 2024	- Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan dan kredit. - Terdapat perubahan pada rate FTP mata uang IDR maupun mata uang asing - There are no changes to the deposit and credit interest rates. - There are changes to the FTP rates for both IDR and foreign currencies.	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Finance & Planning MD 5. Compliance & Corp Legal MD 6. TCM & FI EVP 7. TCM & FI Division Head 8. Risk Management Division Head 9. Planning & Performance Division Head 10. President Office Division Head 11. Business Strategy & Development Division Head 12. TCM Staff
5	28 Mei 2024 28 May 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada April 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in April 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Finance & Planning MD 5. Business Banking SEVP 6. TCM & FI EVP 7. TCM Division Head 8. TCM Staff 9. Market Liquidity Risk Staff 10. Branch Management Staff
6	24 Juni 2024 24 June 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada Mei 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in May 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. Business MD 2. Finance & Planning MD 3. Compliance & Corp Legal MD 4. TCM & FI EVP 5. TCM & FI Division Head 6. Risk Management Division Head 7. Planning & Performance Division Head 8. Business Strategy & Development Division Head 9. TCM Staff 10. Market Liquidity Risk Staff
7	22 Juli 2024 22 July 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada Juni 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in June 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Compliance & Corp Legal MD 5. Business Banking SEVP 6. TCM & FI EVP 7. Business Linkage & Commercial EVP 8. TCM & FI Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Business Strategy & Development Division Head 11. TCM Staff 12. Market Liquidity Risk Staff
8	22 Agustus 2024 22 August 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada Juli 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in July 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Finance & Planning MD 5. Compliance & Corp Legal MD 6. TCM & FI EVP 7. Business Linkage & Commercial EVP 8. TCM & FI Division Head 9. Risk Management Division Head 10. TCM Staff 11. Market Liquidity Risk Staff

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
9	22 September 2024	- Terdapat penurunan pada suku bunga simpanan, - Tidak ada perubahan pada suku bunga kredit, - Terdapat penurunan sebesar 25 bps pada FTP rate IDR - Tidak ada perubahan pada SBDK. - There is a decrease in the deposit interest rate. - There are no changes to the credit interest rates. - There is a 25 bps decrease in the IDR FTP rate. - There are no changes to the Base Lending Rate (SBDK).	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Business MD 4. Compliance & Corp Legal MD 5. TCM & FI EVP 6. TCM & FI Division Head 7. Planning & Performance Division Head 8. President Office Division Head 9. Business Strategy & Development Division Head 10. TCM Staff 11. Market Liquidity Risk Staff 12. RMD Staff 13. HOBD Staff
10	21 Oktober 2024 21 October 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada September 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in September 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Finance & Planning MD 4. Business Banking SEVP 5. TCM & FI EVP 6. Business Linkage & Commercial EVP 7. TCM & FI Division Head 8. Risk Management Division Head 9. Business Strategy & Development Division Head 10. TCM Staff 11. Market Liquidity Risk Staff
11	25 November 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada September 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in September 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. VP Director 3. Finance & Planning MD 4. Compliance & Corp Legal MD 5. TCM & FI EVP 6. Branch Management EVP 7. TCM & FI Division Head 8. Risk Management Division Head 9. Planning & Performance Division Head 10. Business Strategy & Development Division Head 11. TCM Staff 12. Market Liquidity Risk Staff
12	23 Desember 2024 23 December 2024	- Tidak ada usulan perubahan dari hasil rapat ALCO sebelumnya pada September 2024 - No proposed changes to the previous ALCO meeting results in September 2024	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance (Quorum) 1. President Director 2. Business MD 3. Finance & Planning MD 4. Compliance & Corp Legal MD 5. Business Banking SEVP 6. TCM & FI EVP 7. Business Linkage & Commercial EVP 8. TCM & FI Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Planning & Performance Division Head 11. Business Strategy & Development Division Head 12. TCM Staff 13. Market Liquidity Risk Staff

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite ALCO pada tahun 2024 adalah:

The attendance frequency and attendance rate of ALCO Committee members at meetings in 2023 were:

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	Presiden Direktur | President Director	11	91.67%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	MD Business	10	83.33%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	MD Finance & Planning	10	83.33%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	EVP Treasury Capital Market & Financial Institution Division	12	100%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	Vice President Director	10	83.33%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	MD Compliance & Corporate Legal	10	83.33%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	SEVP Business Banking	6	50%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	EVP Branch Management	2	33.33%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	Head of Risk Management Division	10	83.33%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	Head of Planning & Performance Division	5	41.67%
Permanent Members Non- Voting Rights Permanent Members with No Voting Rights	Head of President Office Division	2	16.67%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members with No Voting Rights	Head of Business Strategy & Development Division	8	66.67%

Penilaian Kinerja Komite ALCO

1. Prosedur penilaian kinerja
   Penilaian kinerja Komite ALCO dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self-assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja
   Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), selain peninjauan terbaru terhadap kondisi pasar secara global maupun domestik, juga dibahas mengenai strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

   Kehadiran dalam rapat selalu memenuhi syarat minimum kehadiran sehingga dianggap Quorum dan bisa dianggap memenuhi syarat dalam pengambilan keputusan ALCO.

   Terkait kompetensi anggota ALCO seperti telah diungkapkan, sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara.

Performance Assessment of ALCO Committee

1. Performance appraisal procedures
   The ALCO performance assessment is carried out annually (at least once a year). Evaluation of performance effectiveness is carried out by each committee member through a self-assessment method.
2. Performance assessment criteria
   The ALCO holds regular monthly meetings to monitor liquidity risk and Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), as well as reviewing the latest market conditions globally and domestically, and discussing strategies for optimizing the composition of Balance Sheet and optimizing the Bank's Net Interest Margin (NIM).

   Meeting attendance always meets the minimum attendance requirements so that it is considered Quorum and can be regarded as meeting the requirements for ALCO decision making.

   The competency of ALCO members, as has been stated, at least Committee and Sub-Committee decisions are decided by 75% of the Permanent Members with Voting Rights and at least 1 (one) Non-Permanent Member with Voting Rights.

REALIASI PROGRAM KERJA TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite ALCO secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan Asset dan Liability di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan.

Selama tahun 2024, Komite ALCO telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga.
- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank.
- Memantau keadaan *asset* dan *liability* Bank dan menyampaikannya secara berkala.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimal.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan Arsitektur Teknologi Informasi dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan

REALIZATION OF WORK PROGRAMS IN 2024

In 2024, the ALCO routinely and actively carried out its duties and responsibilities as well as discussed the committee meetings to ensure that the Bank's Asset and Liability management was implemented properly and effectively, so that the Bank could anticipate any changes caused by business developments and changes in external conditions. The participation and presence of committee members in meetings, including decisions made during these meetings, can also be used as a reference.

In 2024, the ALCO implemented several matters, including:

- Present the latest market conditions and developments and their implications to the Bank in determining business direction related to interest rates.
- Provide recommendations and/or approval of policies, strategies and guidelines for implementing the Bank's interest rate policy.
- Monitor the condition of the Bank's assets and liabilities and submit them periodically.

WORK PLAN IN 2025

1. Establish and evaluate policies and strategies for managing the Bank's assets and liabilities to ensure that liquidity, interest rate, and exchange rate risks are under control.
2. Establish and evaluate pricing policies and strategies for funding products, loans, and inter-office accounts.
3. Establish and evaluate policies and strategies for managing investment portfolios.
4. Establish and evaluate policies and strategies for managing the balance sheet structure by anticipating changes in interest rates in order to achieve an optimal net interest margin.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee is created to assist the Board of Directors in formulating Information Technology Architecture and establishing strategic plans and policies in every phase of information technology usage from the planning process, procurement, development, operation, and maintenance to termination and deletion of

sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

information technology resources, to increase the effectiveness and efficiency of data processing in PT Bank JTrust Indonesia Tbk business activity, so it can provide correct, accurate, and timely results, as well as guarantee information confidentiality.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut :

Structure and Membership

The Membership Structure of the Information Technology Steering Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the Decree of the Board of Directors dated 15 June 2023 is as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi **Membership Structure of Information Technology Steering Committee**	
Ketua Chairman	Director of Information Technology
Wakil Ketua Deputy Chairman	SEVP IT & Operation
Sekretaris Secretary	Head of Information Technology Division
Anggota Voting Members	1. VP Director 2. Managing Director Finance & Planning 3. Managing Director Business 4. Head of Head Office & Branch Operation Division 5. Head of Planning & Performance Division 6. Head Of General Service Division
Anggota Non Voting Members	1. Managing Director Compliance & Corporate Legal 2. EVP Risk Management 3. Head of Internal Audit Division 4. Head of Risk Management Division 5. Head of Compliance Division 6. Head Of Financial Control Division

Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Menentukan dan memberikan rekomendasi mengenai Arsitektur Teknologi Informasi kepada Direksi yang antara lain menggambarkan:
   a. Visi dan misi Bank
   b. Rencana korporasi Bank
   c. Proses dan kapabilitas bisnis Bank
   d. Tata kelola Teknologi Informasi
   e. Prinsip pengelolaan data, aplikasi, dan teknologi Bank
   f. Ukuran dan kompleksitas bisnis Bank
   g. Kemampuan permodalan Bank
   h. Standar yang berlaku secara nasional maupun internasional
   i. Ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan rekomendasi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi kepada Direksi yang antara lain menggambarkan visi dan misi Teknologi Informasi, strategi yang mendukung visi dan misi Teknologi Informasi, dan prinsip utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta mendukung rencana korporasi 5 tahun.

Authority and Responsibility

1. Determine and provide recommendations regarding the Information Technology Architecture to the Board of Directors, which describes:
   a. The Bank's vision and mission
   b. The Bank's corporate plan
   c. The Bank's business processes and capabilities
   d. Information Technology governance
   e. The Bank's principles of managing data, applications, and technology
   f. The size and complexity of the Bank's business
   g. The Bank's capital capability
   h. National and international standards
   i. The provisions of laws and regulations
2. Provide recommendations on Information Technology Strategic Plan to the Board of Directors, which among other things describes Information Technology's vision and mission, strategies to support the vision and mission, and the main principles as benchmark in the implementation of Information Technology, in order to meet business needs and support the five-year corporate plan.

3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas kesesuaian antara Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan rencana strategis PT Bank JTrust Bank Indonesia Tbk, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan mengevaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi maksimal terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan aktivitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna atau penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, di mana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.
9. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan vendor terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi:
   a. Eksistensi dan sejarah perusahaan (profil perusahaan).
   b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.

3. Provide recommendations to the Board of Directors on the conformity between the Information Technology Development Plan and Information Technology Strategic Plan, which have been approved and are in line with the strategic plans of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, as well as set up priority scales based on the critical level (significant impact) on the Bank's operational activities.
4. Provide recommendations to the Board of Directors so the implementation of activities or projects is in accordance with the agreed plans in Information Technology, and evaluate the cost effectiveness of Information Technology in achieving the targeted advantages.
5. Provide recommendations to the Board of Directors on matters related to the effectiveness of measures to minimize risks on the Bank's investment in the information technology sector so that these investments give maximum contribution in achieving the Bank's business objectives.
6. Provide recommendations to the Board of Directors based on supervision and monitoring on Information Technology performance and efforts made to improve the performance.
7. Provide recommendations to the Board of Directors as a form of effort to resolve various problems related to Information Technology, which cannot be resolved by work units (users) or administrators in an effective, efficient, and timely manner.
8. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the readiness of the Data Recovery Center, in this case, the availability of replacement facilities when the Data Center experiences troubles or is unable to function, and recommend the importance for regular tests as a safeguard in supporting business continuity plans. This includes the readiness of Data Center and Data Recovery Center in case of relocation between the two.
9. Provide recommendations to the Board of Directors in the selection of vendors related to (third party) for the implementation of Information Technology activities, by having due diligence through evaluations and assessments of the profiles, products, expertise, and experiences of service providers, which include:
   a. The company's existence and history (company profile).
   b. Qualifications, backgrounds, and reputation of the company's owner.

c. Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
d. Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
e. Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk jaminan dan dukungan purna jual.
f. Teknologi dan arsitektur sistem.
g. Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
i. Terpercaya dan berhasil dalam berhubungan dengan klien dan sub kontraktor.
j. Jaminan asuransi.
k. Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
l. Menerapkan Manajemen Risiko.
m. Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.

10. Memberikan rekomendasi atas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan operasional bank.
11. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
12. Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Terdapat 9 (sembilan) anggota dengan hak suara dan 6 (enam) anggota tanpa hak suara. Anggota dengan hak suara memiliki 1 (satu) hak suara.
2. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per tahun atas undangan Ketua atau yang diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
3. Rapat tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.
4. Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan "musyawarah untuk mufakat". Jika tidak ada kesepakatan antar anggota, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.

c. Other companies that have used the same services from the service provider, as a reference.
d. Financial conditions, including review of audited financial statements.
e. Service delivery capability and effectiveness, including warranty and after-sales support.
f. Technology and system architecture.
g. Areas of internal control, history of safeguards, and scope of audits.
h. Compliance with applicable laws and regulations.
i. Trusted and successful in dealing with clients and subcontractors.
j. Insurance guarantee.
k. Ability to provide data recovery center, business continuity plans, and business activities.
l. Risk Management implementation.
m. Provide reports of the audit results by an independent party.

10. Provide recommendations on the adequacy and allocation of resources owned by the Bank. If the resources are inadequate, the Bank will use other parties' services in the implementation of Information Technology to support the Bank's operational activities.
11. Provide recommendations to the Board of Directors regarding management control, which includes planning, policy establishment, standards and procedures, as well as work units (departments/divisions) that are related to the use of Information Technology in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
12. Conduct reviews and evaluations periodically every 6 (six) months on the implementation of all Information Technology projects that are carried out to ensure alignment with the original plan.

Meetings and Decision-Making Mechanisms

1. There are 9 (nine) voting members and 6 (six) non-voting members. A voting member has 1 (one) voting right.
2. Information Technology Steering Committee meetings are held at least 4 (four) times a year on the invitation of the Chair or a representative, who also acts as a meeting leader.
3. The meeting must be attended by at least 2/3 of the members. The minutes of meeting must be documented and archived by the Secretary of the Information Technology Steering Committee.
4. Decision-making in meetings is carried out based on "deliberation for consensus". If there is no agreement among members, decisions will be made based on a majority vote.

5. Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat tersebut.
6. Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah tersebut harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.
7. Risalah Rapat berisi keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke Rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.
8. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi di luar Direksi adalah para Kepala Divisi. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini dengan jumlah hak suara 1 (satu).
9. Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawakan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.
10. Komite Pengarah Teknologi Informasi menyampaikan Laporan Kerja kepada Direksi secara berkala minimal 2 (dua) kali per tahun, di antaranya:
    a. Ringkasan hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.
    b. Pemetaan detail antara rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
    c. Peninjauan dan evaluasi atas implementasi proyek Teknologi Informasi.
    d. Progress pengembangan Teknologi Informasi apabila terdapat pelaksanaan project dengan kondisi lagging.
    e. Kesesuaian hasil pengujian Data Center dan DRC.

5. All opinions, questions, and statements at the meeting must be recorded in the minutes of meeting, including documents presented at the meeting.
6. All minutes of meeting must be made in softcopy and distributed to all members of the Information Technology Steering Committee and other meeting participants who have attended the meeting, no later than 2 (two) working days after the meeting was held, to be reviewed by meeting participants. After all meeting participants agree with the minutes of meeting, it must be printed and signed by the Chair, Secretary, and all members of the Committee, as well as all meeting participants.
7. The Minutes of Meeting contain decisions made by the Information Technology Steering Committee and will be disseminated or circulated to relevant Work Units. The results of the Information Technology Steering Committee meetings will be submitted to the Board of Directors meeting in form of suggestions or recommendations to obtain approval from the Board of Directors.
8. Other than the Board of Directors, members of the Information Technology Steering Committee are Heads of Division. If the person concerned is unable to attend, the respective division can assign a person, who is responsible for this matter, with 1 (one) voting rights.
9. If deemed necessary, the Chair and/or chair of the meeting are allowed to invite other parties, from both internal and external, to assist on related topics/subjects that will be brought up in the meeting of the Information Technology Steering Committee, without having voting rights.
10. The Information Technology Steering Committee submits Work Reports to the Board of Directors periodically, at least 2 (two) times a year, such as:
    a. Summary of the Information Technology Steering Committee meeting results.
    b. Detailed mapping between the Bank's business strategic plans and the Information Technology Strategic Plan.
    c. Review and evaluation of the implementation of Information Technology projects.
    d. Information Technology development progress if there is a lagging in the implementation of a project.
    e. Conformity of Data Center and DRC test results.

f. Laporan Insiden dan semua hal yang terkait aktivitas Teknologi Informasi.
g. Dokumen Kriteria Penilaian Tender.

11. Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur Teknologi Informasi).

f. Reports on incidents and all matters related to Information Technology activities.
g. Tender Assessment Criteria Document.

11. Other than meetings, the Information Technology Steering Committee can also provide recommendations to the Board of Directors in form of Circular Memo (signed by all members of the Information Technology Steering Committee) or the Board of Directors' Approval Memo (signed by the President Director and the Director of Information Technology).

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 6 kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Implementation of Activities and Meeting Frequency

In 2024, the Information Technology Steering Committee held 6 meetings discussing the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
1	12 Februari 2024 12 February 2024	Evaluasi project 2023	1. VP Director 2. Managing Director Information Technology 3. SEVP IT & Operation 4. Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies 5. Managing Director Finance & Planning 6. Managing Director Compliance & Corporate Legal 7. Head of ITD 8. Head of IAD 9. Head of RMD 10. Head of PPD 11. Head of HOBD 12. Head of FCD 13. Head of GSD
2	6 Maret 2024 6 March 2024	Network Access Control Forescout	1. VP Director 2. Managing Director Information Technology 3. SEVP IT & Operation 4. Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies 5. Managing Director Finance & Planning 6. Head of ITD 7. Head of PPD 8. Head of GSD
3	29 Mei 2024 29 May 2024	Pengadaan Pergantian PC dan Laptop Cabang & Endpoint Management	1. VP Director 2. Managing Director Information Technology 3. SEVP IT & Operation 4. Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies 5. Managing Director Finance & Planning 6. Managing Director Business 7. Head of ITD 8. Head of IAD 9. Head of RMD 10. Head of HOBD 11. Head of GSD

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
4	23 September 2024 23 September 2024	Project LOS JTrust Bank	1. VP Director 2. Managing Director Information Technology 3. SEVP IT & Operation 4. Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies 5. Managing Director Business 6. Head of ITD 7. Head of PPD 8. Head of HOBD 9. Head of GSD 10. Head of FCD 11. Head of CPD 12. Head of BSD 13. Head of BLSD 14. Head of RMD
5	25 Oktober 2024 25 October 2024	OPICS Upgrade 4.10	1. VP Director 2. Managing Director Information Technology 3. SEVP IT & Operation 4. Managing Director Finance & Planning 5. Managing Director Compliance & Corporate Legal 6. Head of ITD 7. Head of IAD 8. Head of RMD 9. Head of FCD 10. Head of TCMD
6	20 November 2024 20 November 2024	ITD – Project Evaluation Base On RPTI 2024	1. VP Director 2. Managing Director Information Technology 3. SEVP IT & Operation 4. Managing Director Finance & Planning 5. Managing Director Compliance & Corporate Legal 6. Head of ITD 7. Head of IAD 8. Head of PPD 9. Head of FCD 10. Head of CPD 11. Head of GSD 12. Head of HOBD 13. Head of RMD

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi pada tahun 2024 adalah:

The attendance frequency and the attendance rate of members of the Information Technology Steering Committee meetings in 2024:

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ketua dan Anggota Chair and Member	Cho Won June	MD Information Technology	6/6	100%
Wakil Ketua dan Anggota Vice Chair and Member	Yudiana Mustari	SEVP IT & Operation	6/6	100%
Sekretaris dan Anggota Secretary and Member	Henry	Head of Information Technology Division	6/6	100%
Anggota Member	Helmi Arief Hidayat	MD Finance & Planning	5/6	83%
Anggota Member	R Djoko Prayitno	MD Credit Risk & Management All Delinquencies	4/6	67%
Anggota Member	Widjaja Hendra	Managing Director Business	2/6	33%
Anggota Member	Felix Istyono Hartadi	Managing Director Compliance & Corporate Legal	3/6	50%
Anggota Member	Masayoshi Kobayashi	VP DIrector	6/6	100%
Anggota Member	1. Dessy Fitriani 2. Eka Patria	Head of Head Office Operation Division (HOPD)	4/6	67%
Anggota Member	Parulian Situmorang	Head of Financial Control Division (FCD)	4/6	67%

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Anggota Member	Rudyanto Gunawan	Head of Planning & Performance Division (PPD)	4/6	67%
Anggota Member	Santi Irawati	Head of General Services Division (GSD)	5/6	83%
Anggota Member	1. Iman R Siregar 2. M Habib Ubaidilah	Head of Compliance Division (CPD)	2/6	33%
Anggota Member	Nathan Tanuwidjaja	Head of Internal Audit Division (IAD)	4/6	67%
Anggota Member	1. M. Zainu Rohman 2. Eka I Hanisa 3. Budi Charles	Head of Risk Management Division (RMD)	5/6	83%

Penilaian Kinerja Komite Pengarah TI

Seluruh rapat yang dilakukan pada tahun 2024 telah memenuhi quorum. Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, di antaranya melakukan review terhadap strategi Teknologi Informasi, review anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

IT Steering Committee Performance Assessment

All meetings held in 2024 have met a quorum. The Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all activities related to Information Technology, including reviewing Information Technology strategy, reviewing Information Technology budget, carrying out evaluations of Information Technology projects in accordance with the needs of business users by referring to the IT Road Map and/or Bank Business Plan and ensuring that investments in Information Technology projects which will be implemented to provide optimal results.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, di antaranya:

1. Melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi
2. Me*review* anggaran Teknologi Informasi.
3. Melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank.
4. Memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

REALIZATION OF WORK PROGRAMS IN 2024

In 2024, the Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all activities related to Information Technology, including:

1. Reviewed the Information Technology strategy
2. Reviewed the Information Technology budget.
3. Evaluated Information Technology projects that were developed according to the needs of business users with reference to the IT Road Map and/or Bank Business Plan.
4. Ensured investment in Information Technology projects which would be implemented to provide optimal results.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Komite IT dalam fungsinya untuk mendukung operasional dan bisnis bank dari segi Teknologi dan digital, memiliki rencana kerja untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. *Selling System for Mutual Fund*, Sistem pengelolaan dan pemasaran Reksa Dana.

WORK PLAN IN 2025

The IT Committee, in its function to support the Bank's operations and business in terms of technology and digital, has set up the following work plan for 2025:

1. Selling System for Mutual Fund, Mutual Fund management and marketing system.

2. Integrasi CRS - LOS, aplikasi untuk LOS.
3. Peningkatan *Smart AML to GoAML*, aplikasi untuk AML.
4. *Virtual Account Enhancement*, aplikasi VA.
5. QRIS *enhancement* & Debit *online*, pengembangan layanan pembayaran non tunai (*Quick Response Indonesian Standard*) dan Debit *Online*.
6. EDC *Machine Payment*, mengembangkan kapasitas Mesin EDC, untuk transaksional.
7. *Fraud Detection System*, aplikasi *Fraud Detection System*.
8. *Budgeting Application System*, Sistem pengelolaan *budget*.
9. *Upgrade* OPICS 4.9 & Module SWIFT MX termasuk peningkatan perangkat lunak, aplikasi pelaporan.
10. LOS, aplikasi LOS.
11. Vulnerability Management Tools, aplikasi IT security.
12. Source Code Review, aplikasi IT security.
13. Mastercard International, Kerjasama dengan Jaringan Internasional menggunakan Mastercard Internasional.
14. SmartFX Sistem, transaksi FX dengan nasabah
15. Core Banking Replacement - phase 2
16. New system IPC Voice recording, *feature touchscreen* dan *wireless* untuk mencover BCP *Site*
17. New smart AML 2024 - translator MX SWIFT, fungsi translator data di aplikasi SWIFT.
18. Implementasi DLP (*Data Loss Prevention*), Untuk mencegah kebocoran informasi dan data-data bank.
19. Expand monitoring SOC terhadap server core banking dan peralatan jaringan, memonitor server S1 dan switch device kedalam SOC monitoring.
20. Audit Analytic (ACL), Aplikasi untuk data analisis
21. Audit Management System (AMS), Aplikasi untuk Internal Audit.
22. DWH/MIS system advance, system advancement.
23. Simulasi Serangan Cybersecurity, Tools security.
24. Online On Boarding, aplikasi pembukaan account customer secara online.
25. *Enhancement* Internet Banking Korporasi, Internet Banking Individual, Internet Banking Mobile Version, Aplikasi perbankan yang dapat diakses melalui internet.
26. Smart SOP, system advancement untuk SOP
27. Pengadaan Laptop dan PC, Hardware refreshment
28. Bitera DC, Pemindahan DC untuk development
29. Fleet Management System (Carpooling), sistem tracking mobil dan supir
30. Virtual Server Renewal License Server

2. CRS - LOS integration, application for LOS.
3. Improved Smart AML to GoAML, application for AML.
4. Virtual Account Enhancement, VA application.
5. QRIS enhancement & online Debit, development of non-cash payment services (Quick Response Indonesian Standard) and Online Debit.
6. EDC Machine Payment, developing EDC Machine capacity, for transactions.
7. Fraud Detection System, Fraud Detection System application.
8. Budgeting Application System, budget management system.
9. Upgrade OPICS 4.9 & SWIFT MX Module including software upgrades, reporting applications.
10. LOS, LOS application.
11. Vulnerability Management Tools, IT security applications.
12. Source Code Review, IT security applications.
13. Mastercard International, Collaboration with International Networks using Mastercard International.
14. SmartFX System, FX transactions with customers
15. Core Banking Replacement - phase 2
16. New IPC Voice recording system, touchscreen and wireless features to cover the BCP Site
17. New smart AML 2024 - MX SWIFT translator, data translator function in the SWIFT application.
18. Implementation of DLP (Data Loss Prevention), to prevent leaks of information and bank data.
19. Expand SOC monitoring of core banking servers and network equipment, monitoring S1 servers and switch devices into SOC monitoring.
20. Audit Analytic (ACL), Application for data analysis
21. Audit Management System (AMS), Application for Internal Audit.
22. DWH/MIS system advance, system advancement.
23. Cybersecurity Attack Simulation, Security tools.
24. Online On Boarding, application for opening customer accounts online.
25. Enhancement of Corporate Internet Banking, Individual Internet Banking, Internet Banking Mobile Version, banking applications that can be accessed via the internet.
26. Smart SOP, system advancement for SOP.
27. Procurement of Laptops and PCs, Hardware refreshment.
28. Bitera DC, DC transfer for development.
29. Fleet Management System (Carpooling), car and driver tracking system.
30. Virtual Server Renewal License Server.

31. HRIS (Phase 2) enhancement, Human Resource Information System
32. ISO 27001 2022 surveillance renewal sertificate Sertifikasi IT Security
33. Open API, Bill payment
34. Customer On Boarding additional features, Aplikasi Front End
35. Network Improvement, Peningkatan kinerja Jaringan network
36. Endpoint management additional License, Kebutuhan inventori, software distribution & hardware monitoring
37. Mobile security tools, untuk meningkatkan keamanan aplikasi mobile banking
38. Perlindungan Data Pribadi, Sesuai dengan UUPDP yang berlaku
39. Accounts Substantiation, setting account ownership
40. *Payment* Poin Online Bank, Pembayaran online bank

31. HRIS (Phase 2) enhancement, Human Resource Information System.
32. ISO 27001 2022 surveillance renewal certificate IT Security Certification.
33. Open API, Bill payment.
34. Customer On Boarding additional features, Front End Application.
35. Network Improvement, increasing network performance.
36. Endpoint management additional licenses, inventory requirements, software distribution & hardware monitoring .
37. Mobile security tools, to increase the security of mobile banking applications.
38. Protection of Personal Data, in accordance with the applicable UUPDP.
39. Accounts Substantiation, setting account ownership.
40. Online Bank Payment Points, online bank payments.

KOMITE KREDIT

Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *Business Unit* sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain termasuk namun tidak terbatas pada Manual Produk/Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemberian kredit. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya, di mana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen dan mewakili fungsi *Business Unit* di satu pihak, dan Credit Risk Reviewer (CRR) pada pihak lainnya. Komite Kredit tersebut telah memiliki kemampuan, kompetensi dan Integritas sehingga setiap pemberian keputusan kredit telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkular sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member*), pejabat non-voting members sebagai perwakilan Divisi Compliance dan Corporate Legal, perekomendasi, dan pengusul kredit.

CREDIT COMMITTEE

Credit proposals or initiations are completely written by the Business Unit in accordance with the Bank's Credit Policy, Guidelines for Credit Implementation, and other provisions including, but not limited to, Product Manuals/Standard Operating Procedures (SOP) related to lending. The four-eyes Credit Approval Process is carried out by the Credit Committee according to its authority limits, where every credit decision must be at least approved by a minimum of 2 (two) independent authority holders, who represent the Business Unit function on one hand, and Credit Risk Reviewer (CRR) on the other. The Credit Committee has the ability, competence, and integrity so that each credit decision made has considered the prudential principle and good risk management.

Structure and Membership

Credit decisions are made by authority holders through a Credit Committee Meeting or circular, in accordance with the proposed credit limit.

The Credit Committee Meeting (RKK) is attended by authorized officials to approve credit proposals based on established limits (voting members), with non-voting member officials representing the Compliance Division and Corporate Legal, as well as people who provide recommendations, and credit proposals.

Pejabat pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *Four Eyes principle*.

Credit decision officials are officials who, because of their ability, competence, and integrity, are authorized to make decisions on credit and represent functions of the Business Unit and Credit Risk Reviewer based on the Four Eyes principle.

Susunan Anggota Komite Kredit

Sesuai dengan limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit per Maret 2024, diketahui bahwa susunan anggota Komite Kredit atau pemegang kewenangan adalah terdiri atas:

The Composition of Credit Committee Members

In accordance with the credit limit stipulated in the Credit Implementation Guidelines dated March 2024, the structure of Credit Committee members or the authority holder consists of:

Kategori A1 (> Rp20 milyar) Category A1 (> Rp20 billion)	
Voting Member	1. President Director 2. Managing Director (MD) Business 3. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
Non-Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (≤ Rp20 milyar) Category A2 (≤ Rp20 billion)	
Voting Member	1. Managing Director (MD) Business 2. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 3. SEVP Business Banking 4. EVP Credit Risk Reviewer
Non-Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/*rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

Duties and Responsibilities

The Credit Committee is responsible for reviewing and making decisions on applications/credit facility application based on the Credit Approval Authority Limits (BWMK), in order to comply with the prudential principle of sound credit, for application of new credit facility, credit top-up, credit extensions, and modifications (such as collateral replacement, changes in time period or rescheduling, restructuring, and so on).

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Duties, Responsibilities, and Authority of the Credit Committee	Anggota Pengusul Proponent Member	Anggota Pemutus Kredit Authorized Member	Anggota Independen Independent Member
1.	Menyediakan informasi dan hasil analisa yang lengkap untuk mendukung pengajuan kredit. Provide complete information and analysis results to support credit applications.	√		
2.	Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Ensure that every approval on credit has met or complied with banking regulations and sound credit principles.	√	√	√
3.	Memastikan setiap pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Ensure that each credit disbursement is in accordance with the Bank's Credit Policy (KPB).	√	√	√

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Duties, Responsibilities, and Authority of the Credit Committee	Anggota Pengusul Proponent Member	Anggota Pemutus Kredit Authorized Member	Anggota Independen Independent Member
4.	Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen. Ensure that the credit approval is based on an honest, objective, careful, thorough, and independent assessment/evaluation.			√
5.	Memberikan opini/komentar independen menyangkut risiko kredit dan kepatuhannya. Provide independent opinion/comment regarding credit risk and compliance.			√
6.	Memutuskan usulan kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan KPB. Make decisions on credit proposals based on banking regulations and sound credit principles, as well as in accordance with the Bank's Credit Policy.		√	
7.	Memutus/menolak usulan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan. Approve/reject credit proposals, in accordance with the established limits of authority.		√	
8.	Menetapkan jangka waktu kredit, suku bunga, biaya administrasi dan provisi. Determine terms of credit, interest rates, administration fees, and provision fees.		√	

Rapat dan mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka/menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh *Credit Risk Reviewer Unit* dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh *Division head/Deputy Division* Head atau Pejabat setingkat pada Business Unit dan *Credit Risk Reviewer Division*. Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana e-mail.
2. Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member* dan keputusan kredit diambil berdasarkan suara terbanyak diatas 50% dari keputusan *Voting Member* yang menghadiri RKK.
3. Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
   - Notulen Rapat teknis dan Lembar Opini,
   - Nota Analisa Kredit (NAK),
   - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR), dan
   - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
4. *Credit Risk Reviewer Unit* memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.

Meetings and Decision-Making Mechanisms at Meetings

1. The Credit Committee can attend meetings face-to-face/using online communication to make decisions on credit proposals, in which the meeting agenda is initiated by the Credit Risk Reviewer Unit and can only be held if the Credit Analysis Note (NAK) and Risk Analysis and Recommendations (ARR) have been signed by the Division Head/Deputy Division Head, or an equivalent official in the Business Unit and Credit Risk Reviewer Division. Under certain conditions, members of the Credit Committee are considered present if they join the Credit Committee Meeting via teleconference and also sign the attendance list sent via email.
2. Credit Committee meeting is considered a quorum if attended by more than 50% of the voting members and credit decisions are made based on the majority vote, or above 50% of voting members, who attended the meeting.
3. Important documents in the Credit Committee meeting:
   - Minutes of technical meetings and Opinion Sheets,
   - Credit Analysis Note (NAK),
   - Risk Analysis & Recommendations (ARR), and
   - Other relevant supporting documents.
4. The Credit Risk Reviewer Unit facilitates the distribution of documents containing material discussions in the Credit Committee to the Credit Approval Officers at least 2 (two) working days prior to the Credit Committee meeting.

5. Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
6. Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan *voting* suara di atas 50% dari *voting member* dan dicantumkan dalam notulen rapat.
7. Apabila terdapat *voting member* yang berhalangan hadir dan jumlah *Voting Member* yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh *alternate Voting Member* yang ditunjuk President Director dan MD Compliance & Corporate Legal dan dituangkan dalam surat kuasa.
8. Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Unit. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan tanda tangan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
9. Notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat akan disirkulasikan ke semua anggota komite.

5. Loans that have not been approved during the Credit Committee meeting can only be reconsidered if there is underlying data or information. A review can only be done once and is processed according to the provisions stated in the Credit Implementation Guidelines.
6. Decision making based on quorum is made through a vote by above 50% of the Voting Members and included in the minutes of the meeting.
7. If a voting member is unable to attend and the number of voting members attending the Credit Committee meeting is less than 50%, then credit decisions must be made and signed by an alternate voting member who is appointed by the President Director and MD Compliance & Corporate Legal, and stated in a power of attorney.
8. Credit decisions are set forth in the Credit Decision Sheet (LKK) made by the Credit Risk Reviewer Unit. If the credit decision is made through the Credit Committee Meeting (RKK) mechanism, then the minutes of meeting are written in the LKK form and the Credit Committee signs the form directly, in accordance with the limits of authority.
9. Minutes of meetings including any disagreements will be circulated to all committee members.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2024, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit yaitu setiap minggu rata-rata mengadakan rapat untuk membahas setidaknya atau minimal 2-3 proposal/ permohonan kredit. Adapun beberapa tanggal pelaksanaan Rapat Komite Kredit adalah sebagai berikut:

The Implementation of Activities and Meeting Frequency

In 2024, the Credit Committee held meetings as needed and based on credit applications. The meetings were held every week on average to discuss at least 2-3 credit proposals or applications. Details of the Credit Committee Meetings are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	4 Januari 2024 4 January 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Finance 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Business 6. SEVP Business Banking 7. EVP Credit Risk Reviewer
2	17 Januari 2024 17 January 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Finance 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Business 6. SEVP Business Banking 7. EVP Credit Risk Reviewer

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
3	6 Februari 2024 6 February 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Finance 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Business 6. SEVP Business Banking 7. EVP Credit Risk Reviewer
4	26 Februari 2024 26 February 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Finance 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Business 6. SEVP Business Banking 7. EVP Credit Risk Reviewer
5	7 Maret 2024 7 March 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Finance 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Business 6. SEVP Business Banking 7. EVP Credit Risk Reviewer
6	25 Maret 2024 25 March 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Finance 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Business 6. SEVP Business Banking 7. EVP Credit Risk Reviewer
7	24 April 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
8	30 April 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
9	8 Mei 2024 8 May 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
10	22 Mei 2024 22 May 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
11	14 Juni 2024 14 June 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
12	28 Juni 2024 28 June 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
13	5 Juli 2023 5 July 2023	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
14	10 Juli 2024 10 July 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
15	5 Agustus 2024 5 August 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
16	16 Agustus 2024 16 August 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
17	3 September 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
18	27 September 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
19	2 Oktober 2024 2 October 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
20	30 Oktober 2024 30 October 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
21	4 November 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
22	6 November 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
23	3 Desember 2024 3 December 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer
24	13 Desember 2024 13 December 2024	Pembahasan Proposal Kredit Discussion of Credit Proposals	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% Quorum 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. MD Business 5. SEVP Business Banking 6. EVP Credit Risk Reviewer

Catatan: MD Finance sudah tidak menjadi anggota Komite Kredit sejak 31 Maret 2023
Note: MD Finance is no longer a member of the Credit Committee since 31 March 2023

Penilaian Kinerja Komite Kredit

Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Kredit dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self-assessment*.

Kriteria penilaian kinerja

a. Kehadiran rapat anggota Komite Kredit telah memenuhi minimal 50% dari anggota.

b. Komite Kredit telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite Kredit telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit dan sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Perseroan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja Komite Kredit untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 yaitu merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan atau perubahan struktur kredit.
2. Melakukan evaluasi atas usulan kebijakan/strategi kredit dan/atau pengkiniannya agar tetap mengacu kepada kondisi dan peraturan terkini yang berlaku, termasuk penyesuaian atas keadaan makro ekonomi, peraturan regulator dan *risk appetite* bank, agar pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dapat terjaga dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian termasuk menyetujui usulan kebijakan kredit dan/atau perubahannya.

Credit Committee Performance Assessment

Performance assessment procedures

Credit Committee performance assessment is carried out annually (at least once a year). Evaluation of performance effectiveness is conducted by each committee member through the self-assessment method.

Performance assessment criteria

a. The attendance of the Credit Committee meetings has met the minimum requirement of 50% of the members.
b. The Credit Committee has contributed to the implementation of all activities related to the application of the prudential principle and the four eyes principle, according to the limits of authority in the credit approval process.

REALIZATION OF WORK PROGRAMS IN 2024

In 2024, the Credit Committee has made decisions or recommendations on lending (new, top-up, reduction and/or extension, as well as restructuring) based on the limits of authority, including determination or change of credit structure, and in accordance with the Bank's Credit Policy and the Company's Credit Implementation Guidelines by upholding the prudential principle.

WORK PLAN IN 2025

The Credit Committee Work Plan for 2025 is as follows:

1. Establish the work plan for 2025, such as recommending and/or terminating credit approval (new, top-up, reduction, and/or extension, as well as restructuring) according to the limits of authority, as well as determining/changing credit structure.

2. Evaluate proposals on credit policies/strategies and/or update in order to remain in line with the current conditions and applicable regulations, such as adjustments to macroeconomic conditions, regulations and the Bank's risk appetite, so that credit growth with good quality can be maintained by taking into account prudential aspects, including approve credit policy proposals and/or amendments.

3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen dan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB).

3. Ensure that credit approval is based on independent, honest, objective, accurate, and thorough assessment/evaluation, as well as complied with banking regulations, sound credit principles, and the Bank's Credit Policy (KPB).

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan J Trust Bank adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran saran untuk perbaikan.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 19.02/S.Kep.Dir-RMD/JTRUST/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Komite Kebijakan Perkreditan, maka susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) per 31 Desember 2024 adalah berikut:

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee of J Trust Bank is a committee that assists the Board of Directors in formulating policies, supervising the implementation of policies, monitoring the development and conditions of credit portfolios, and providing suggestions for corrective measures.

Structure and Membership

Based on the Decree (SK) of the Board of Directors No. 19.02/S.Kep.Dir-RMD/JTRUST/IX/2023 dated 19 October 2023 on the Credit Policy Committee, the composition of members of the Credit Policy Committee (KKP) as of 31 December 2024 is as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan **Composition of the Credit Policy Committee Membership**	
Ketua Chairman	Direktur Utama | President Director
Wakil Ketua Deputy Chairman	EVP Risk Management
Anggota Voting | Voting Member	1. Direktur Utama/President Director 2. VP Director 3. MD Business 4. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 5. MD Compliance & Corporate Legal 6. SEVP Business Banking 7. EVP Risk Management 8. EVP Business Linkage & Commercial 9. EVP Credit Risk Reviewer 10. EVP Branch Management
Anggota Non-Voting | Non-Voting Member	1. Head of Business Linkage & Consumer Division 2. Head of Commercial & SME Banking Division 3. Head of Corporate Banking Division 4. Head of Japan & Korean Desk Division 5. Head of Management All Delinquencies Division 6. Head of Credit Risk Reviewer Division 7. Head of Head Office & Branch Operation Division 8. Head of Credit & Administration Division 9. Head of Internal Audit Division 10. Head of Risk Management Division 11. Head of Compliance Division 12. Head of Corporate Legal & Litigation Division 13. Head of Business Strategy & Development Division 14. Head of Client Service Division

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan adalah:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan.
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai:
      - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
      - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
      - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan Debitur-debitur besar tertentu;
      - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
      - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
      - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB (Kebijakan Perkreditan Bank);
      - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN).
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tertulis secara berkala yang disampaikan kepada Direksi pada poin pertama.
3. Menyampaikan Risalah Rapat KKP sebagai laporan tertulis yang akan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan *Risk Management Division*.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota Voting yaitu VP *Director* atau MD *Business* atau anggota Direksi lainnya melalui penunjukkan oleh Ketua Komite.
2. Rapat komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari total Anggota *Voting* termasuk minimal 3 (tiga) Anggota *Voting* yang merupakan bagian dari Direksi, di mana Ketua Komite termasuk salah satunya.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Credit Policy Committee are:

1. Submit written reports periodically to the Board of Directors, with a copy to the Board of Commissioners regarding:
   a. Results of supervision on the implementation of the Credit Implementation Guidelines.
   b. Results of monitoring and evaluation regarding:
      - Overall development and quality of credit portfolio;
      - Correct implementation of credit approval authority;
      - Correct process of granting, development, and quality of credit disbursed to parties related to the Bank and certain large debtors;
      - Correct implementation of the Legal Lending Limit (LLL) provisions;
      - Compliance with statutory provisions and other regulations in credit disbursement;
      - Settlement of non-performing loans, in accordance with the Bank's Credit Policy (KPB);
      - The Bank's efforts to meet the adequacy of Allowance for Impairment Losses (CKPN).
2. Provide suggestions for corrective measures to the Board of Directors, with a copy to the Board of Commissioners, regarding the regular written reports to the Board of Directors as mentioned in the first point.
3. Deliver the minutes of the Credit Policy Committee meeting as a written report, which will be submitted to the Board of Directors and copied to the Board of Commissioners and the Risk Management Division.

Meetings and Decision-Making Mechanisms

1. The Committee meeting is led by the Chairman, and if the Chair is unable to attend, the meeting is led by a Voting Member, namely VP Director or MD Business or other members of the Board of Directors appointed by the Committee Chairman.
2. A committee meeting is declared a quorum if it is attended by 2/3 (two-thirds) of the total Voting Members, including at least 3 (three) Voting Members, who are also members of the Board of Directors including the one being the Chair.

3. Apabila salah satu Anggota *Voting* yang merupakan bagian dan Direksi berhalangan hadir, maka persetujuan Kebijakan Kredit dapat diperoleh melalui sirkulasi dengan proposal terlebih dahulu mendapat rekomendasi di dalam forum KKP.

4. Rapat KKP diadakan minimal 2 (dua) kali per tahun atau sewaktu-waktu diperlukan melalui forum secara tatap muka atau media komunikasi daring.

5. Notulen KKP akan diedarkan kepada seluruh Anggota *Voting* (walaupun tidak hadir dalam forum KKP) dan Anggota *non-Voting* yang hadir dalam KKP.

3. If one of the Voting Members, who is also members of the Board of Directors is unable to attend, then Credit Policy approval can be obtained through a circular, but the proposal must have received initial recommendation in the Credit Policy Committee forum.
4. The Credit Policy Committee meetings are held at least 2 (two) times per year, or whenever necessary, through face-to-face forums or online communication.
5. Minutes of the Credit Policy Committee meeting will be circulated to all Voting Members (even if they are not present at the meeting) and Non-Voting Members who are present at the meeting.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan 3 kali rapat yang membahas agenda serta tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Implementation of Activities and Meeting Frequency

In 2024, the Credit Policy Committee held 3 meetings to discuss the following agenda, with the attendance rate as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kuorum Quorum		Keterangan Description
			Minimal Minumum	Realisasi Realization	
1	5 Juli 2024 5 July 2024	1. Komposisi Komite Kebijakan Perkreditan 2. Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) 3. Perubahan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) R013 4. Pemantauan Kualitas Kredit 5. Pemantauan BMPK, Debitur Inti, dan CKPN 6. Pengelolaan NPL 1. Credit Policy Committee Composition 2. Credit Decision Authority Limit (BWMK) 3. Changes In Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) R013 4. Credit Quality Monitoring 5. LLL, Core Debtors, and CKPN Monitoring 6. NPL Handling	66.67%	77.78%	Rapat luring dan daring (*hybrid*) Online and offline meeting (hybrid)
2	30 September 2024 30 September 2024	1. Update Kebijakan di 2024 2. Pemantauan Kualitas Kredit 3. Pemantauan BMPK, Debitur Inti, dan CKPN 4. Pengelolaan NPL 1. Policy Update in 2024 2. Credit Quality Monitoring 3. LLL, Core Debtors & CKPN Monitoring 4. NPL Handling	66.67%	88.88%	Rapat luring dan daring (*hybrid*) Online and offline meeting (hybrid)
3	30 Desember 2024 30 December 2024	1. Update Kebijakan di 2024 2. Pemantauan Kualitas Kredit 3. Pemantauan BMPK, Debitur Inti, dan CKPN 4. Pengelolaan NPL 5. Tinjauan Inhouse Limit BMPK 1. Policy Update in 2024 2. Credit Quality Monitoring 3. LLL, Core Debtors & CKPN Monitoring 4. NPL Handling 5. Review Inhouse Limit LLL	66.67%	88.88%	Rapat luring dan daring (*hybrid*) Online and offline meeting (hybrid)

Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Perkreditan

1. Prosedur penilaian kinerja
   Penilaian kinerja Komite Kredit dilakukan setiap tahun (minimum dua kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self-assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja
   a. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali per tahun. Pada tahun 2024 , Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali rapat, yang mana telah memenuhi ketentuan.
   b. Kehadiran rapat anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah memenuhi minimal 2/3 dari anggota.
   c. Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portofolio perkreditan dan memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Credit Policy Committee Performance Assessment

1. Performance assessment procedures
   The Credit Policy Committee performance assessment is conducted annually (minimum twice a year). Evaluation of performance effectiveness is carried out by each committee member through self-assessment method.

2. Performance assessment criteria
   a. The Credit Policy Committee Meetings are held at least 2 (twice) per year. In 2024, the Credit Policy Committee held 3 (three) meetings, which have fulfilled the stipulation.
   b. The attendance of the Credit Policy Committee members at these meetings has fulfilled the requirement of at least 2/3 of the members.
   c. The Credit Policy Committee has contributed to formulating policies, supervising policy implementations, monitoring the development of credit portfolios, and providing suggestions for corrective measures.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan program kerja terkait:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan Bank.
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
3. Memantau perkembangan sektor ekonomi dan industri serta kondisi portofolio perkreditan.
4. Memberikan saran-saran langkah perbaikan.

REALIZATION OF WORK PROGRAMS IN 2024

In 2024, the Credit Policy Committee has carried out its work programs related to:

1. Provided inputs to the Board of Directors in the creation of the Bank's Credit Policy, especially policies related to the formulation of prudential principle in the Bank's credit disbursement.
2. Supervised the policy implementation.
3. Monitored developments in the economic and industrial sectors, as well as conditions of the credit portfolios.
4. Provided suggestions for corrective measures.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja Kebijakan Perkreditan untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Kebijakan Perkreditan minimal 3 (dua) kali pertemuan per tahun.
2. Kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.
3. Evaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
4. Evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas perkreditan yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

WORK PLAN IN 2025

The Credit Policy Work Plan for 2025 includes the following:

1. Hold the Credit Policy Committee meetings at least 3 (three times) per year.
2. Conduct periodic reviews of the Bank's Credit Policy (KPB) and provide advice to the Board of Directors if changes or improvements to the policies are required.
3. Evaluate the development and quality of the overall credit portfolios.
4. Evaluate the implementation of corporate governance to visualize sound credit principles by implementing the prudential principle.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERNAL

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting untuk memelihara citra Bank dan melindungi kepentingan Bank dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (e-reporting). Efektif sejak tanggal 29 Januari 2020 jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdri. Ong Pey Fang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 29 Januari 2020.

THE IMPLEMENTATION OF THE BANK'S COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT

Corporate Secretary

Corporate Secretary has an important role in maintaining the Bank's image and protecting the Bank's interests by building communications and good relations with all stakeholders, especially with people related to the capital market, the public, and internal policies related to the implementation of good corporate governance.

Legal Basis

Provisions for the establishment of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk refer to the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Profile of Corporate Secretary

Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors. The appointment of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has fulfilled all of the requirements, reported to OJK, and announced to the public through the IDXNet website (e-reporting). Effective since 29 January 29 2020, the position of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is held by Ms. Ong Pey Fang, based on the Decree of the Board of Directors dated 29 January 2020.

Nama | Name: **Ong Pey Fang**	
Usia | Age	61 tahun | 61 years old
Jenis Kelamin | Gender	Perempuan | Female
Kewarganegaraan | Citizenship	Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile	Jakarta | Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. • SK Direksi No.29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/I/2020 tanggal 29 Januari 2020. • Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. • Board of Directors' Decree No.29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/I/2020 dated 29 January 2020.
Riwayat Pendidikan | Educational Background	S1 di bidang Akuntansi (Royal Melbourne Institute of Technology), lulus cum laude pada tahun 1988. Bachelor degree in Accounting (Royal Melbourne Institute of Technology) with a cum laude in 1988.
Riwayat Pekerjaan | Work Experiences	• PT Bank JTrust Indonesia Tbk (April 2019 – sekarang) • EVP Compliance, PT Commonwealth Bank Indonesia (Maret 2017- Agustus 2018). • EVP Compliance, PT Danamon Indonesia Tbk (Desember 2009 – Februari 2017). • VP Business Support, ABN Amro NV Indonesia (Januari 2006 – Februari 2009). • VP Business Coordinator, Citibank N.A. Indonesia (September 2002 – Desember 2005). • PT Bank JTrust Indonesia Tbk (April 2019 – present) • EVP Compliance, PT Commonwealth Bank Indonesia (March 2017- August 2018). • EVP Compliance, PT Danamon Indonesia Tbk (December 2009 – February 2017). • VP Business Support, ABN Amro NV Indonesia (Januari 2006 – Februari 2009). • VP Business Coordinator, Citibank N.A. Indonesia (September 2002 – December 2005).

Kualifikasi/Sertifikasi | Qualification/ Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 • Risk Management Certificate Level 5
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2024 | Training/ Competency Improvement in 2024	• Manajemen Risiko - Lentera Mulia Persada, 19-20 Mar 2024, Jakarta • Emisi Scope 3 & Verifikasi GHG - Asosiasi Emiten Indonesia & Global Reporting Initiative (GRI), 26 Mar 2024, Jakarta • Peran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia - OJK Institute, 28 Mar 2024, Jakarta • Green House (GHG) Emission Inventory - Insolity Consulting, 15 Mei 2024, Jakarta • Keamanan Siber Bank - OJK Institute, 7 Nov 2024, Jakarta • Board Governance Forum: Climate Reporting in the Financial Statements - KPMG Indonesia, 14 Nov 2024, Jakarta • Risk Management - Lentera Mulia Persada, 19-20 Mar 2024, Jakarta • Scope 3 Emissions & GHG Verification - Asosiasi Emiten Indonesia & Global Reporting Initiative (GRI), 26 Mar 2024, Jakarta • The Role of Taxonomy for Indonesian Sustainable Finance (TKBI) in Driving Energy Transition Towards Net Zero Emissions in Indonesia - OJK Institute, 28 Mar 2024, Jakarta • Green House (GHG) Emission Inventory - Insolity Consulting, 15 May 2024, Jakarta • Bank Cybersecurity - OJK Institute, 7 Nov 2024, Jakarta • Board Governance Forum: Climate Reporting in the Financial Statements - KPMG Indonesia, 14 Nov 2024, Jakarta

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/ POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan—perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan—perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Other than the mentioned above, the Corporate Secretary always follows/attends the dissemination of new regulations from OJK and IDX.

The Implementation of Corporate Secretary Duties

In carrying out its activities, Corporate Secretary refers to POJK No.35/POJK.04/2014 and SOP for the Corporate Secretary. The Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has carried out her duties, with a brief description of the duties as follows:

1. Follow current financial industry developments—banking and capital markets, especially laws and regulations in the financial sector—banking and capital markets.
2. Provide inputs to the Board of Directors and the Board of Commissioners to comply with the provisions of applicable laws and regulations in banking and capital markets.
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing good corporate governance, which includes:
   a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Issuer's or Public Company's Website;
   b. Report submissions to the Financial Services Authority in a timely manner;
   c. Organization and documentation of the General Meeting of Shareholders;
   d. Organization and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
   e. Implementation of the Company's orientation programs for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

4. Sebagai penghubung antara Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lingkungan.
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengkoordinir pelaksanaan *Office of the Board* yang mencakup:
   a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehinggga keputusan yang dihasilkan sah.
   c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Membangun citra positif Bank melalui strategi komunikasi yang efektif dengan mengangkat berita – berita positif.
9. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Act as a liaison between the Bank as Issuer or Public Company with the Financial Services Authority and other stakeholders.
5. Act as a facilitator in the implementation of corporate social responsibility (CSR) and the environment.
6. Perform the communication function in order to build the Company's image and reputation, as well as establish goodwill outside the Company; maintain the consistency of the message and image that will be conveyed to the public; and ensure that the information disclosure does not violate the law.
7. Coordinate the implementation of Office of the Board which includes:
   a. Ensuring information availability in decision making of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
   b. Ensuring the attendance of meeting participants in order to reach a quorum and create lawful decisions.
   c. Ensuring function of the Company's secretariat in administering the documentation of meeting decisions and corporate filings.
8. Build a positive image of the Bank through an effective communication strategy by highlighting positive news.
9. Act as a liaison between the Bank and shareholders, regulators, and other stakeholders.

FUNGSI AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola bank yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk berperan sebagai *strategic business partner* bagi Manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, memberikan nilai tambah dengan memberikan rekomendasi untuk peningkatan proses operasional baik melalui layanan yang bersifat asuran maupun konsultasi.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, SKAI memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di setiap *line of defense* diterapkan

INTERNAL AUDIT FUNCTION

Internal Audit is part of the internal control system with scope of work covering audit and assessment on the adequacy and effectiveness of internal control system, risk management, as well as the Bank's governance process and system, in order to provide reasonable assurance that internal control has been carried out accordingly.

Internal Audit Division (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk acts as a strategic business partner for the Management to achieve organizational goals, and provide added value by giving recommendations to improve operational process both through assurance and consulting services.

With its role as the Third line of defense, IAD ensures that governance, risk management, and internal control in each line of defense are adequately and sustainably

secara memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu SKAI akan senantiasa melakukan pengembangan metodologi, tools, serta kompetensi auditor sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Piagam Audit Intern

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Intern yang mencakup tujuan, aktivitas, kewenangan dan tanggung Jawab SKAI dalam organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Intern dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI memiliki dan melaksanakan Piagam Audit Intern yang memuat:

a. struktur dan kedudukan SKAI;
b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
c. wewenang SKAI;
d. Kode Etik Audit Intern;
e. persyaratan auditor intern dalam SKAI;
f. pertanggungjawaban SKAI;
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor eksternal;
m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak ekstern.

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

implemented. Therefore, IAD will always develop methodologies, tools, and auditor competencies to make audit implementations more effective and efficient.

Internal Audit Charter

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has an Internal Audit Charter, which covers objectives, activities, authorities and responsibilities of IAD in the organization, including its relationship with the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment of Guidelines for Internal Audit Charter Development and POJK No. 01/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, IAD has set up and implemented Internal Audit Charter, containing:

a. structure and position of IAD;
b. IAD duties and responsibilities, as well as its relations with work units that implement other control functions;
c. IAD authority;
d. Internal Audit Code of Ethics;
e. IAD auditor requirements;
f. accountability of IAD;
g. prohibition of internal auditor's dual duties and positions as well as executor in IAD from carrying out the Bank's operational activities, including in subsidiaries;
h. criteria for using external experts to support the internal audit function;
i. terms and conditions that must be met by IAD to maintain its independence when providing consulting services or other special assignments;
j. responsibility and accountability of the head of IAD;
k. requirements to comply with the Professional Standards for Internal Auditing;
l. procedures in coordinating internal audit function with legal experts or external auditors;
m. policy of periodic assignment limitation and an adequate cooling-off period for IAD members; and
n. policy of service limitation and an adequate cooling-off period for external parties.

The Internal Audit Charter is reviewed periodically, or at any time when necessary.

Struktur Organisasi SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk per 31 Desember 2024

Organizational Structure of IAD at PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of 31 December 2024

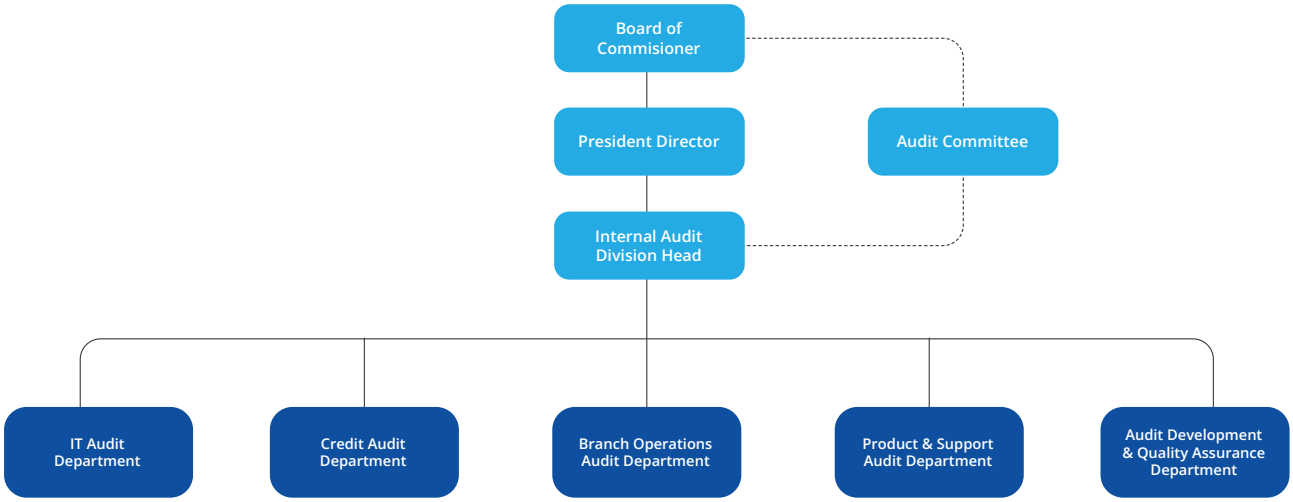

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil penilaian dan pengawasannya dalam hal proses pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

In order to maintain independence of the internal audit function, the Head of IAD is directly responsible to the President Director and has a reporting line to the Board of Commissioners through the Audit Committee. IAD's role is to assist the President Director in elaborating the results of assessment and monitoring in internal control, risk management and corporate governance processes.

The Head of IAD is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee. The decision is then reported to the Financial Services Authority.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern/Profile of Head of Internal Audit

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern/Profile of Head of Internal Audit

Nama | Name: Nathan Tanuwidjaja	
Riwayat Pendidikan | Educational Background	1988-1990 Msc in Computer Science, Columbia University, USA 1985-1988 Bsc in Computer Science, Columbia University, USA
Riwayat Pekerjaan | Work Experiences	• Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2023 – sekarang) • Process Improvement Specialist PT Bank Pan Indonesia Tbk (2021-2023) • Kepala IT Security & Policy PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2020-2021). • Group Head Internal Audit & Acting Chief Internal Auditor PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2020) • IT Audit Senior Manager PricewaterhouseCooper (1994-2004) • Pro-Manager Application Development PT Bank Central Asia Tbk (1992-1994) • Software Engineer Expert Objective System Development, USA (1990-1991) • Programmer Baird Technologies, USA (1989-1990) • Head of SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2023 – sekarang) • Process Improvement Specialist PT Bank Pan Indonesia Tbk (2021-2023) • Head of IT Security & Policy PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2020-2021) • Group Head Internal Audit & Acting Chief Internal Auditor PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2020) • IT Audit Senior Manager PricewaterhouseCooper (1994-2004). • Pro-Manager Application Development PT Bank Central Asia Tbk (1992-1994) • Software Engineer Expert Objective System Development, USA (1990-1991) • Programmer Baird Technologies, USA (1989-1990)

Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kompetensi

SKAI PT Bank JTrust Indonesia memiliki 23 pegawai yang terdiri dari satu orang Kepala SKAI dan 22 pegawai Internal Audit.

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Intern secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*added value*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2024 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi auditor yang:

a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas;
b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas;
c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
d. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan secara efektif;
e. Patuh terhadap standar profesi dan kode etik Auditor Intern;
f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab audit intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
g. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;

Human Resources and Competence Improvement

Internal Audit Division PT Bank JTrust Indonesia has 23 employees, which consist of one Head of IAD and 22 Internal Audit staff.

To continuously improve the competence of Internal Audit in order to provide added value for the organization, in 2024 all auditors enrolled in several training and certification programs. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk always includes IAD officers and officials in internal and external training in order to obtain qualifications of auditors that:

a. Have integrity and behavior that is professional, independent, honest, and objective in carrying out duties;
b. Have knowledge and experience regarding audit technicalities and other disciplines relevant to the line of work;
c. Have knowledge of laws and regulations in banking, capital market and other related laws and regulations;
d. Have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
e. Comply with professional standards and the Internal Auditor's code of ethics;
f. Maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of internal audit duties and responsibilities, unless required by laws and regulations or court rulings/decisions;
g. Understand the principles of good corporate governance and risk management;

Sertifikasi Certification	Jumlah SDM Tersertifikasi Certified Staff
Mandatory	
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 6/Risk Management Certification Level 6	1
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 5/Risk Management Certification Level 5	9
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 4/Risk Management Certification Level 4	9
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor	2
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor	15
Non-Mandatory	
Certified Internal Auditor (CIA)	1
Certified Information Security Auditor (CISA)	1
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)	1
Programmer	1
ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor	1
Data Analytics	1

Rencana dan Pelaksanaan Audit

Kepala SKAI menyusun *Annual Audit Plan* yang disusun berdasarkan analisis risiko atas seluruh entitas audit yang ada. Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian keandalan/efektivitas dari Sistem Pengendalian Intern untuk dapat meminimalisir risiko.

Disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective* dan *preventive action* atas kelemahan pengendalian intern dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Kantor Cabang/ Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat yang termasuk dalam rencana audit yang telah disusun berdasarkan *risk assessment* terhadap *auditable* unit di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Dalam menjalankan peran advisori, SKAI senantiasa memperhatikan aspek Independensi dalam pemberian layanan advisori kepada pihak intern Bank.

Audit Plan and Assignment

The Head of IAD prepares an Annual Audit Plan based on risk assessment of all audit entities. The audit is conducted using the Risk Based Audit methodology aimed at evaluating the comprehensiveness and assessing the reliability/effectiveness of the Internal Control System in order to minimize risks.

Moreover, audit findings will be used as a basis for carrying out corrective and preventive actions on internal control weaknesses and increasing the risk awareness of officers/personnel in her/his duty.

Audits are carried out in Branch Offices/Sub-Branch Offices and Divisions at the Head Office, which are included in the audit plan that has been established based on risk assessment of the auditable units at the Head Office and Branch Offices.

In carrying out its advisory role, IAD always looks after the Independence aspect in providing advisory services to the Bank's internal parties.

Realisasi pelaksanaan audit tahun 2024
2024 Audit assignment realization

Obyek Audit Audit Object	Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Pencapaian (%) Completion (%)
Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Branch and Sub Branch Office	13	14	108%
Divisi Kantor Pusat - Operasional/*Support* Divisions at Head Office – Operations/Support	17	17	100%
Divisi Kantor Pusat – Kredit/Bisnis Divisions at Head Office – Credit/Business	11	23	209%
Teknologi Informasi Information Technology	9	9	100%
Total Penugasan Total Assignments	**50**	**63**	**126%**

Pemantauan atas Penyelesaian Temuan Audit

SKAI melakukan pemantauan secara seksama dan berkelanjutan untuk pemenuhan tindak lanjut perbaikan atas kelemahan yang ditemukan sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan unit kerja terkait. Progres penyelesaian temuan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen.

Monitoring of Audit Findings

IAD conducts thorough and continuous monitoring on the fulfilment of follow-up actions for the noted weaknesses, in accordance with the commitments set by the related work unit. The progress on the closure of findings is reported periodically to the Management.

Komunikasi SKAI

SKAI berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Direksi, seluruh unit kerja, serta pihak eksternal seperti Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank

IAD Communications

IAD communicates with the Board of Commissioners and its committees, the Board of Directors and its committees, all work units, and external parties such as regulators, i.e. The Financial Services Authority

Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan eksternal auditor. Komunikasi dapat disampaikan melalui laporan, diskusi, maupun pelaksanaan rapat.

a. SKAI dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
b. SKAI dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis, seperti rapat ALCO, rapat IT *Steering Committee*, rapat Komite Manajemen Risiko, dan sebagainya sesuai ketentuan regulator.

Dalam menjalankan perannya sebagai *advisor*, SKAI selalu terbuka untuk memberikan ruang diskusi dan memberikan rekomendasi atau masukan kepada unit kerja yang membutuhkan untuk perbaikan atau peningkatan proses bisnis.

(OJK), Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) and external auditor. The communication can be submitted through reports, discussions, as well as meetings.

a. IAD can hold meetings periodically and occasionally with the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee.
b. IAD can participate in strategic meetings, such as ALCO meetings, IT Steering Committee meetings, Risk Management Committee meetings, and others, in accordance with regulatory provisions.

In carrying out its role as an advisor, IAD is always open for discussion and provides recommendation or advice to work units that need to improve or enhance the business process.

No	Agenda	Frekuensi Frequency	Peserta SKAI IAD Participants
1	Rapat dengan Direktur Utama Meeting with President Director	19 kali 19 times	Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA Internal Audit Division Head, Internal Audit Deputy Division Head, and Internal Audit Department Heads
2	Rapat dengan Dewan Komisaris Meeting with Board of Commissioners	3 kali 3 times	Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA Internal Audit Division Head, Internal Audit Deputy Division Head, and Internal Audit Department Heads
3	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	19 kali 19 times	Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA Internal Audit Division Head, Internal Audit Deputy Division Head, and Internal Audit Department Heads
4	Rapat dengan Dewan Direksi Meeting with Board of Directors	17 kali 17 times	Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI dan/atau Kepala Departemen IA Internal Audit Division Head, Internal Audit Deputy Division Head, and Internal Audit Department Heads
5	Rapat Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Meeting	17 kali 17 times	Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA Internal Audit Division Head and Internal Audit Department Heads
6	Rapat Komite Kebijakan Perkreditan Credit Policy Committee Meeting	3 kali 3 times	Kepala SKAI Internal Audit Division Head
7	Rapat Komite Pengarah TI IT Steering Committee	4 kali 4 times	Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA Internal Audit Division Head and Internal Audit Department Heads

Evaluasi atau Kaji Ulang atas Fungsi Audit Internal

Kaji ulang atas fungsi Audit Intern PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dilakukan pada tahun 2022 untuk periode audit Juli 2019 - Juni 2022 dan dinyatakan bahwa kegiatan audit intern secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, serta POJK No.13/POJK.03/2020 dan Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.03/2017 tentang penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum khususnya terkait proses Internal Audit. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap ketentuan POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Evaluation or Review of Internal Audit Function

Review of the Internal Audit function of PT Bank JTrust Indonesia Tbk was carried out in 2022 for the audit period of July 2019 - June 2022 and the result stated that Bank's internal audit activities were generally conformed with provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03 /2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, as well as POJK No. 13/POJK.03/2020 and OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 on the implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, especially related to Internal Audit process. The next evaluation/review on the work results of the Bank's IAD and its compliance with POJK provisions regarding the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks will be carried out in 2025.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Implementation of The Bank's Compliance Function

Fungsi Kepatuhan pada PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk:

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Compliance Function in PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Implementation of the Bank's Compliance Function refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 46/POJK.03/2017 on the Compliance Function of Commercial Banks, which is managing ex-ante (preventive) measures to:

a. Realize the implementation of Compliance Culture at all levels of the organization and the Bank's business activities.
b. Manage Compliance Risk faced by the Bank.
c. Ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities have complied with the provisions of the OJK and applicable laws and regulations.
d. Ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisors.

Dasar Hukum

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank merujuk pada POJK dan SEOJK terkait Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Legal Basis

The establishment of the Bank's Compliance Function refers to POJK and SEOJK regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, Assessment of the Bank's Soundness Level and the Implementation of Compliance Functions for Commercial Banks.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Division Head diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Mechanism of Appointment and Dismissal of Head of Compliance Division

The Head of Compliance Division is appointed and dismissed based on the Board of Directors Decree and must be reported to OJK.

Profil & Pelatihan Kepala Divisi Kepatuhan

Sdr. Muhammad Habib Ubaidillah resmi menjabat Compliance Division Head berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tugas PT Bank JTrust Indonesia, Tbk No. 554/JTrust/SK-HCGD/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024.

Profile & Training of the Head of Compliance Division

Mr. Muhammad Habib Ubaidillah officially serves as Compliance Division Head based on the Decree on Duties Assignment of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk No. 554/JTrust/SK-HCGD/X/2024 dated 30 October 2024.

Nama | Name: Muhammad Habib Ubaidillah	
Usia Age	43 tahun 43 years old
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK PT Bank JTrust Indonesia, Tbk No. 554/JTrust/SK-HCGD/X/2024 Decree of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk No. 554/JTrust/SK-HCGD/X/2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	- S-2 Hukum Bisnis , Universitas Gajah Mada, Lulus Tahun 2008 Master Degree-Business Law, Gajah Mada University, Graduated in 2008 - S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Lulus Tahun 2001 Bachelor Degree-Faculty of Law Indonesia Islamic University, Graduated in 2001
Riwayat Pekerjaan Work Experiences	• PT Bank JTrust Indonesia Tbk (October 2024-saat ini) • PT Bank QNB IndonesiaTbk (April 2023- October 2024) • PT Bank ICBC Indonesia (April 2022 -April 2023) • PT Bank CTBC Indonesia(October 2018-April 2022) • PT Bank OK Indonesia (July 2013- October 2018) • PT Bank Resona Perdania (December 2013-May 2017) • Farida Law Office (March 2010-January 2013)
Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Professional Qualification/Professional Certification	• Advocate License PERADI • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 • Sertifikasi Kepatuhan Level 2 • Advocate License PERADI • Certification on Risk Management Level 4 • Certification on Compliance Level 2
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2024 Training/Competency Improvement in 2024	• Training Anti Fraud 2024 diadakan oleh J Trust Bank • Training Basic APU PPT diadakan oleh J Trust Bank • Training APU PPT Advance Phase 2 diadakan oleh J Trust Bank • Training Risk Awareness: Manajemen Risiko 2024 diadakan oleh JTrust Bank • Training Regulatory Compliance Budaya Sadar Kepatuhan 2024 diadakan oleh JTrust Bank • Anti-Fraud Training 2024 held by J Trust Bank • AML-CTF Basic Training held by J Trust Bank • AML-CTF Advance Phase 2 Training held by J Trust Bank • Risk Awareness Training: Risk Management 2024 held by J Trust Bank • Compliance Training: Compliance Awareness Culture 2024 held by J Trust Bank

Pedoman Operasional Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan *berupa Standard Operating Procedure* Kepatuhan Bank Revisi 03 yang berlaku efektif sejak tanggal 5 September 2023.

Prinsip Kepatuhan

Prinsip Kepatuhan yang diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia adalah pelaksanaan fungsi Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian Bank dengan *tone from the top*, dan berkomitmen bahwa seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat karena merupakan industri yang mendapat izin untuk mengelola dana masyarakat. Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Operational Guidelines for Compliance

PT Bank JTrust Indonesia Tbk already has Compliance Operational Guidelines in form of Bank Compliance Standard Operating Procedure – Revision 03, effective from 5 September 2023.

Compliance Principle

The Compliance Principle implemented by PT Bank JTrust Indonesia is that all of the Bank's personnel, with tone from the top, are responsible for implementing Compliance function, and the Bank is committed that all of its business activities, at every level of the organization, are in accordance with the provisions of laws and regulations as stipulated in:

- OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated 26 January 2016 on Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on the Implementation of Compliance Function in Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Banking is a highly-regulated industry as it has obtained a license to manage public funds. Therefore, the management of compliance risk at the Bank is very important, especially in the midst of rapid development in information technology innovation and digitalization in the financial industry. The implementation of Compliance Function is one of the factors in implementing Governance and PT Bank JTrust Indonesia Tbk is committed to complying with rules and regulations, by managing compliance risks based on compliance principles, namely:

1. Compliance starts at the top;
2. Compliance is the responsibility of all parties;
3. Compliance is carried out for conformity with laws and regulations;
4. Implementation of compliance must be carried out with competence and integrity in accordance with the responsibilities;
5. Stakeholder oriented;
6. Dedicated to the Bank; and
7. Problem-solving oriented.

Struktur Organisasi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk No. 16.07/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan yang strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Compliance Organizational Structure

The Company's Compliance function is carried out by the Compliance Director and the Compliance Division, in accordance with the Decree of the Board of Directors of Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk No. 16.07/S.Kep. Dir-HCD/JTRUST/XII/2024 dated 16 December 2024 on Organizational Structure of the Compliance Work Unit which can be described as follows:

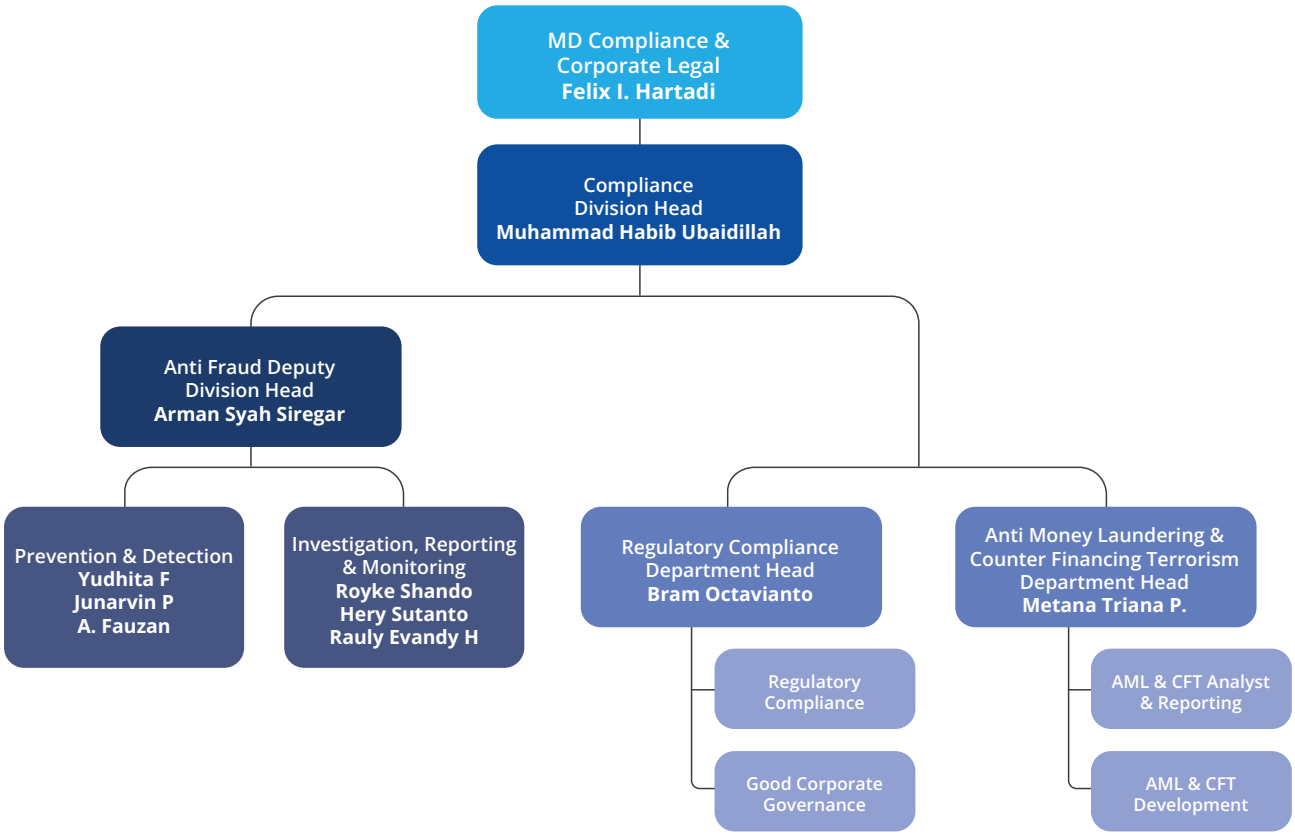

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
   a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners and the Board of Directors

1. The Board of Commissioners is obliged to carry out active supervision of the Bank's Compliance Function, by:
   a. Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (twice) a year through the task implementation reports submitted by the Director in charge of the Compliance Function to the Financial Services Authority, copied to the President Director and the Board of Commissioners, as well as reports on the implementation of the Bank's Compliance Function submitted by the Compliance Division/ Work Unit. A proper and accurate evaluation is carried out through meetings, namely meetings

rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.

b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

2. Direksi berkewajiban:
   a Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
   b Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
   b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
   d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal email.
   e. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan, memantau dan menjaga kepatuhan Bank untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank selalu mematuhi/telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan tata kelola perusahaan yang baik.
   f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
   g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
   h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Directors and meetings of committees.

b. Based on the evaluation results of the implementation of Compliance Function, the Board of Commissioners provides suggestions to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function, in order to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function.

2. The Board of Directors is obliged to:
   a. Fostering and realizing the implementation of Compliance Culture at all levels of the organization and the Bank's business activities.
   b. Ensuring the implementation of the Bank's Compliance Function.

Director in Charge of Compliance Function

1. Duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function are:
   a. Formulating strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.
   b. Reviewing and proposing compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors.
   c. Establishing compliance system and procedure that will be used to create the Bank's internal regulations and guidelines.
   d. Communicating policy and procedure to work units/employees through circular letters or internal memos or internal emails.
   e. Establishing the necessary measures, monitoring and maintaining the Bank's compliance to make sure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities always comply with/are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Indonesian Deposit Insurance Corporation, and applicable laws and regulations, as well as implementing the Bank's prudential principle and good corporate governance.
   f. Minimizing the Bank's Compliance Risks.
   g. Carrying out various efforts to improve and update internal provisions and mechanisms for reporting systems and internal controls.
   h. Taking preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations.

i. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Kepala Divisi Kepatuhan

1. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
4. Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU-PPT-PPPSPM, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan di Bank.
5. Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
6. Memberikan masukan, melakukan koreksi dan/atau menyetujui opini kepatuhan, rancangan kebijakan dan prosedur (SOP) Bank, maupun penyampaian laporan kepada pihak internal dan pihak eksternal yang telah dibuat oleh Kepala Seksi Kepatuhan dan/atau Officer/Staf serta telah diperiksa oleh Kepala Bagian Kepatuhan
7. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
8. Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
9. Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
10. Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.

i. Carrying out other tasks related to the Compliance Function, including monitoring and maintaining the Bank's compliance with the Bank's commitments to the Financial Services Authority and other authorized supervisors.

2. These duties and responsibilities do not diminish the rights and obligations of the Director in charge of the Compliance Function as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies.

Head of Compliance Division

1. Assist the Director of Compliance in carrying out the duties and responsibilities.
2. Following up on information from the Director of Compliance, in which the information is a concern to the authority (regulator).
3. Reporting the implementation of duties and responsibilities, both periodically and occasionally, to the Director of Compliance.
4. Ensuring that the Compliance Policy, Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT-CPF) Implementation Policy, Code of Conduct and the principles of Good Corporate Governance are implemented in the Bank.
5. Providing compliance advice on draft policies and decisions of the Board of Directors.
6. Providing input, making corrections and/or approving compliance opinions, draft Bank policies and procedures (SOP), as well as submitting reports to internal and external parties that have been prepared by the Head of Compliance Section and/or Officer/Staff and have been reviewed by the Head of Compliance Section
7. Becoming a member of the committee established by the Board of Directors or the Board of Commissioners regarding compliance, attending meetings held by the committee, and submitting meeting reports to the Director of Compliance.
8. Ensuring that applicable internal provisions are comprehensive, accurate and up-to-date, and in accordance with the latest regulations.
9. Becoming a liaison officer for banking regulators and other authorities.
10. Preparing Reports to the Director of Compliance; Reports of the Director of Compliance to the President Director; Reports of the Director of Compliance to Bank Indonesia/Financial Services Authority; Internal Compliance Report; and other reports required in managing the Bank's compliance.

11. Memastikan penerapan program APU-PPT PPPSPM dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya
13. Mengembangkan dan menerapkan metodologi Compliance Risk Management.
14. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola Compliance Risk Information System.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
2. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
3. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Menilai efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan review kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
5. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.

11. Ensuring that the AML-CFT, CPF program is carried out accordingly in all Work Units that manage customers and their transactions, including reporting to PPATK and other authorized agencies, in accordance with applicable regulations.
12. Preparing and updating the Compliance Policy, Standard Operating Procedures for Compliance, and conducting dissemination for the updates.
13. Developing and implementing the Compliance Risk Management methodology.
14. Developing, implementing, and managing the Compliance Risk Information System.

Compliance Work Unit

The Compliance Work Unit has the same position as Division and is responsible to the Director in charge of compliance function as an independent work unit.

In order to carry out the Bank's compliance function, the Compliance Division/Work Unit has duties and responsibilities including:

1. Develop compliance policies and procedures and conduct periodic reviews or updates.
2. Create a compliance program in order to support the establishment of Compliance Culture in all of the Bank's business activities at every level of the organization.
3. Coordinate with the Risk Management Work Unit to identify, measure, monitor, and control Compliance Risk by referring to the provisions of the Financial Services Authority regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
4. Assess the effectiveness, adequacy, and suitability of the Bank's policies, provisions, systems, and procedures by implementing provisions of the competent authorities/laws and regulations. In addition, it also conducts compliance reviews on the implementation of compliance aspects in work units.
5. Review and/or recommend updates and improvements on the Bank's policies, provisions, systems, and procedures in order to comply with provisions of the Financial Services Authority and provisions of applicable laws and regulations.
6. Report the implementation of the Bank's compliance function and compliance status to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Compliance Director.

7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
   - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
   - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
   - Bertindak sebagai narahubung untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2024

Selama tahun 2024 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance Department* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut:

1. Pemantauan Pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self-Assessment* /RCSA) dan dari hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Satuan kerja ini juga memantau kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring* (CRM) secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai pengingat sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.
2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.
3. Menyusun, mengkaji dan melakukan pengkinian atas ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yaitu Kebijakan Tata Kelola yang Baik Revisi 04 yang berlaku efektif pada 2 Mei 2024 dan SOP Tata Kelola yang Baik berlaku efektif pada 8 Maret 2024,
4. Mensosialisasikan kesadaran mengenai kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan dengan:

7. Perform other tasks related to the Compliance Function, such as:
   - Ensuring compliance with the Bank's commitments to the Financial Services Authority and other authorized supervisory authorities.
   - Dissemination/training to all of the Bank's employees regarding applicable regulations related to the Compliance function.
   - Act as a contact person for the Bank's compliance issues for internal and external parties, such as providing input/clarification on questions from internal parties/relevant work units and external parties regarding the implementation of BI/OJK Regulations.

Compliance Activities in 2024

In 2024, the Compliance Work Unit through the Regulatory Compliance Department has carried out the Bank's Compliance Function in all work units as follows:

1. Monitor compliance in the Bank's work units through Regulatory Compliance Self-Assessment (RCSA and results of other independent units (such as the Internal Audit unit, Risk Management unit), and from audit results by competent authorities. The work unit also monitors the obligation to submit routine/non-routine reports to regulators in an accurate and timely manner, by implementing Compliance Report Monitoring (CRM) more effectively and regularly to deliver the report to each related work unit as a reminder, so the Bank is averted from administrative sanctions in the form of written warnings or fine.
2. Conduct compliance tests to provide "Compliance Opinion/Advisory" on internal policies as well as new products and/or activities, in order to comply with provisions of competent authorities. Providing "opinions/advice" to work units is based on the prudential principle and compliance with external regulations.
3. Compile, review and update the Bank's internal provisions regarding compliance and good corporate governance (GCG) functions, which is the Good Governance Policy Revision 04 effective on 2 May 2024 and the Good Governance SOP effective on 8 March 2024
4. Promote compliance awareness to all personnel of J Trust Bank in order to develop Compliance Culture by:

a. Melaksanakan sosialisasi atau diseminasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan baru yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/ Capem. Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
b. Menatausahakan dan mengkinikan dalam database internal (aplikasi Garoon dan E-mail) terhadap ketentuan baru perbankan yang diterbitkan oleh pihak regulator dan pihak internal Bank.
c. Melakukan *Weekly Discussion* dalam rangka mensosialisasikan dan mengidentifikasi gap berdasarkan adanya penerbitan ketentuan Regulator.
d. Berpartisipasi menjadi narasumber dalam menyampaikan materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen masing-masing pada:
   - Program Mingguan Induksi Pegawai Baru yang diselenggarakan oleh HCGD.
   - Rapat Bulanan Direksi yang diselenggarakan oleh CSD.
e. Meningkatkan *Compliance Awareness* mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan melalui aplikasi Garoon, serta melakukan sosialisasi kepatuhan Bank dalam *Compliance Awareness Lounge* melalui aplikasi J Trust U.

5. Laporan Kepatuhan
Regulatory Compliance Department menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2024, Bank telah menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK dengan rincian sebagai berikut:

a. Carrying out dissemination and training related to new applicable procedures, regulations, and provisions, which are held internally or with external parties at designated training locations for all employees in work units/Divisions and Branch Offices/Sub-branch offices. This socialization and training activities are carried out face-to-face or through other electronic communication media.

b. Administering and updating internal databases (Garoon application and E-mail) on new banking regulations issued by regulators and the Bank's internal parties.

c. Conducting Weekly Discussions in order to socialize and identify gaps based on the issuance of provisions by Regulators.

d. Participating as a source in delivering materials, in accordance with the main tasks and functions of each department on:

   - Weekly Induction Program for New Employees, organized by HCGD.
   - Monthly Board of Directors meetings, organized by CSD.
e. Increasing Compliance Awareness on Prudential Banking Principles through Garoon application, as well as socializing the Bank's compliance in the Compliance Awareness Lounge through the J Trust U application.

5. Compliance Report
The Regulatory Compliance Department submits the Bank's compliance activities/functions periodically in the Compliance Report to internal parties and the competent authorities in accordance with applicable provisions.

The compliance report is signed by the Director in charge of the Compliance Function and submitted semi-annually (every June and December) and presented comparatively in 2 (two) reporting periods with copies sent to the Board of Commissioners and the President Director. In 2024, the Bank has submitted Compliance Reports to OJK with the following details:

Laporan Kepatuhan Compliance Report	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Date of Letter
Semester II Th. 2023 Second Half of 2023	No.31.02/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2024	31 Januari 2024 31 January 2024
Semester I Th. 2024 First Half of 2024	No.31.14/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2024	31 Juli 2024 31 July 2024

6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
   a. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
   b. Melakukan sosialisasi dan menerapkan JTrust *Employee Appraisal System* secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
   c. Terhadap *Governance Structure*, Bank membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP dan melakukan reorganisasi yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan governance process.
   d. Terhadap *Governance Process*, Bank memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
   e. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
   f. Secara berkala/tahunan memberikan masukan/pengkinian data dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk melengkapi penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Division*.
   g. Bank melalui koordinasi *Compliance Division* qq. unit kerja GCG melakukan penilaian sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola (GCG) dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
   h. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

6. The Bank has carried out and evaluated the implementation process of Good Corporate Governance (GCG), including:
   a. Fostering the Management's commitment to implementing Governance thoroughly at every line of the organization.
   b. Conducting socialization and implementing the JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy) continuously in order to assess, build, and improve culture-based individual performance of each employee.
   c. In Governance Structure, the Bank establishes and improves GCG infrastructure, such as by completing and updating Policies and SOP and through continuous reorganization in order to increase competitiveness, by referring to the prudential principle and governance process.
   d. For Governance Process, the Bank monitors the implementation of Governance and always strives to improve GCG infrastructure through the book titled "Policies and SOP for Good Governance (GCG) at PT Bank JTrust Indonesia Tbk."
   e. Increasing the responsibility of each line of the organization to safeguard the interests of stakeholders.
   f. Periodically/annually providing data inputs/updates and establishing the Bank's Governance Implementation Report to complement the preparation of the Annual Report, coordinated by the Corporate Secretary Division.
   g. The Bank, through coordination with the Compliance Division qq GCG Work Unit, conducts self-assessment on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and compiles Governance Implementation Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk periodically or annually, to be submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders, as well as published on the Bank's website in accordance with applicable provisions on report submission.
   h. To comply with applicable regulatory requirements regarding the Assessment of

Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui *Compliance Division* qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasikan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) faktor Tata Kelola/GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Juni 2024. Hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 2 (Baik) yang mempunyai hasil yang sama apabila dibandingkan dengan hasil *Self-Assessment* Bank untuk posisi Desember 2023

Selama tahun 2024 Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU & PPT-PPPSPM) sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:

a. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
b. Melakukan peninjauan dan perbaikan atas kecukupan kebijakan dan prosedur dengan melakukan penyusunan dan pengkinian ketentuan internal Bank terkait penerapan program APU & PPT di Tahun 2024 yaitu SOP Pelaporan dalam penerapan APU-PPT ke PPATK Revisi ke 2 yang efektif pada 15 Juli 2024, SOP Konfigurasi Transaction Alert Rules and Costumer Risk Profile Rules Pada Aplikasi New Smart AML Revisi ke 2 yang efektif 27 Agustus 2024, dan WI Pengoperasian aplikasi New Smart AML System Revisi ke 7 yang efektif pada 26 Agustus 2024.
c. Menyusun Rencana Kerja Penerapan Program APU & PPT Tahun 2025.
d. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
   - Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2024.
   - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2024.
d. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM kepada seluruh karyawan Bank melalui sosialisasi/pelatihan tatap muka dan electronic learning.
e. Melakukan Analisa dan reviu atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU PPT dan PPPSPM.
f. Pemenuhan permintaan data atau informasi dan korespondensi kepada Pihak Eksternal.
g. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK dan OJK dan mendukung implementasi Go AML, SIPENDAR, dan APOLO berdasarkan peraturan

Soundness Level of Commercial Banks, and Governance Implementation for Commercial Banks, the Bank through the Compliance Division qq GCG Work Unit has conducted self-assessment of the Governance/GGC factor of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of June 2024. The self-assessment rating was 2 (Good), which is the same result as compared to the Bank's Self-Assessment result as of December 2023.

In 2024, the Compliance Work Unit through through the Department of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML & CFT-CPF) in accordance with applicable regulatory provisions, has:

a. Regularly reporting the implementation of AML-CFT and CPF to the Board of Directors and Board of Commissioners, within the framework of supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners.
b. Reviewing and improving the adequacy of policies and procedures by preparing and updating the Bank's internal regulations regarding the implementation of the AML-CFT program in 2024, namely SOP for Reporting in the application of AML-CFT to PPATK 2nd Revision effective on 15 July 2024, SOP for Configuring Transaction Alert Rules and Customer Risk Profile Rules in the New Smart AML Application 2nd Revision effective 27 August 2024, and WI Operation of the New Smart AML application 7th Revision System effective on 26 August 2024.
c. Preparing Action Plan for the Implementation of the AML-CFT Program in 2025.
d. Submitting Reports on Data Updating Activity to the Financial Services Authority in the form of:
   - Realization Report on Data Update Plan for PT Bank JTrust Indonesia Tbk in 2024.
   - Report on Data Update Plan of PT Bank JTrust Indonesia Tbk for 2024.
d. Increase understanding and ability in implementing AML-CFT and CPF for all Bank employees through face-to-face socialization/training and electronic learning.
e. Conduct analysis and review of planned new products and activities to ensure they have complied with AML-CFT and CPF regulations.
f. Fulfilment of requests for data or information and correspondence with external parties.
g. Carrying out reporting obligations to PPATK and OJK and supporting the implementation of Go AML, SIPENDAR, and APOLO based on the regulations

dan perundangundangan yang mengatur tentang penerapan APU PPT dan PPPSPM di Indonesia.

h. Turut membantu Institusi Penegak Hukum dan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

i. Dalam rangka penerapan *Customer Risk Based Approach*, secara periodik melakukan pemetaan terhadap profil risiko dan transaksi nasabah/rekening. Pendataan terhadap jumlah nasabah dengan produk/layanan yang digunakan (CASA) berdasarkan jenis nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), nasabah prima/priority customer, transfer dana, dan profil risiko nasabah.

j. Berkoordinasi dengan IT Division dengan meningkatkan fungsi Sistem Informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada otoritas atau regulator serta pemantauan tingkat risiko nasabah berdasarkan profil dan transaksi yang dilakukan.

k. Memantau profil dan transaksi nasabah.

l. Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan pihak Eksternal/Regulator dan Internal Bank.

m. AML-CFT Department telah menyelesaikan pelaksanaan assessment Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing dengan nilai FIR ML/TF PT Bank JTrust Indonesia di Tahun 2024 sebesar 9.14 yang masuk dalam kategori Sangat Baik.

n. Mendukung proses analisa yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Yang Berwenang

Sepanjang tahun 2024 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/progress penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator Kepatuhan pada Tahun 2024

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2024 menunjukkan keadaan antara lain:

and laws governing the implementation of AML-CFT and CPF in Indonesia.

h. Helping Law Enforcement Institutions and PPATK in preventing and eradicating money laundering criminal acts, terrorism financing and proliferation financing of weapons of mass destruction.

i. In implementing the Customer Risk Based Approach, the Bank is periodically mapping the risk profile and customer/account transactions. Data collection on the number of customers with the products/services used (CASA) is categorized by type of customers, Third Party Funds (DPK), priority customers, fund transfers, and customer risk profiles.

j. Coordinating with the IT Division by improving the supporting Information Systems function in order to carry out reporting obligations to authorities or regulators as well as monitoring customer risk levels based on profiles and transactions implemented.

k. Monitoring customer profiles and transactions.

l. Attending coordination meeting invitations with External parties/Regulator and the Bank's Internal parties.

m. The AML-CFT Department has completed the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing assessment with PT Bank JTrust Indonesia's FIR ML/TF score in 2024 of 9.14 which is in the Very Good category.

n. Supporting the analysis process carried out by PPATK in efforts to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia.

Fulfillment of Commitments to Authorities

Throughout 2024, the Compliance Work Unit coordinated with the Internal Audit Division in monitoring and ensuring the Bank's compliance with its commitments to regulators, such as the implementation or progress in following-up on the audit findings of the Financial Services Authority Supervisory Team.

Compliance Indicators in 2024

The Bank's compliance indicators from the development of each factor monitored throughout 2024, show the following conditions:

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	Indikator/Rasio Indicator/Ratio Posisi Desember 2024 As of December 2024	Keterangan Description
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit, Operational, & Market Risks	13,83%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator Comply, meets regulators' minimum limit requirement
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) | Legal Lending Limit (LLL) BMPK Kredit | Credit Limit Pelanggaran | Violations Pelampauan | Excess	 Nil Nil	Patuh/Comply Patuh/Comply
Posisi Devisa Neto (PDN) | Net Open Position (NOP)	0,07%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20% Comply, meets the maximum requirement of 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL) | Quality of Earning Assets/Non-Performing Loan (NPL)		Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets the requirement of below 5%
NPL Gross	1,95%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets the requirement of below 5%
NPL Net	1,43%	
Giro Wajib Minimum (GWM) | Statutory Reserve Requirement GWM Rupiah | Rupiah Reserve Requirement • Harian | Daily • Rata-rata | Average	 0,00% 5,91%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3,5% Comply, meets the minimum requirement of 3.5% Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 6% Comply, meets the minimum requirement of 6%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) | Macroprudential Liquidity Buffer	13,67%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 4% Comply, meets the minimum requirement of 4%
GWM Valas | Foreign exchange Reserve Requirement	2,67%	
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	116,76%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply, meets the minimum requirement of 100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	115,87%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply, meets the minimum requirement of 100%
Ratio Pengungkit | Leverage Ratio	8,10%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3% Comply, meets the minimum requirement of 3%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB) | The Bank's Soundness Level	2 (Sehat) 2 (Sound)	Trend Peringkat Komposit TKB meningkat The trend in the Bank's Soundness Level Composite Rating is rising
Profil Risiko Bank | The Bank's Risk Profile Profil Risiko | Risk Profile	 2	Trend Peringkat Komposit Profil Risiko meningkat The trend in Risk Profile Composite Rating is rising
Risiko Inheren | Inherent Risks	Low To Moderate	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Quality of Risk Management Implementation	Satisfactory	

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan 2024

A. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2024 sebagai berikut:
   Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.
B. Posisi Devisa Neto (PDN)
   Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh PBI No. 17/5/PBI/2015 tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tanggal 29 Mei 2015 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Berikut Posisi PDN bulan Desember 2024: Tidak terdapat pelanggaran PDN.
C. Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
   Sesuai Laporan Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW IV tahun 2024, peringkat Profil Risiko Bank berada di peringkat 2 (*Low to Moderate*), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2011 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank bahwa penyediaan modal minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Berikut posisi KPMM pada bulan Desember 2024: Kondisi KPMM masih memenuhi batas minimum yang berlaku.
D. Pemantauan Rasio NPL
   NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Berikut perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2024: Tidak terdapat pelanggaran NPL.
E. Pemantauan Giro Wajib Minimum
   1. GWM Primer Rupiah
      Pemenuhan GWM Primer Rupiah mengacu kepada PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum

The Implementation of Compliance Work Unit Duties

In general, the implementation of duties and responsibilities of the Compliance Work Unit includes the following:

Compliance Indicator 2024

A. The Legal Lending Limit (LLL) and Provision of Funds to Related Parties in December 2024 are as follows: There were no violations or excesses of Legal Lending Limit in providing funds to the Bank's Related Parties or Non-Related Parties.

B. Net Open Position (NOP)
   Based on PBI No. 5/13/PBI/2003 dated 17 July 2003 on the Net Open Position (NOP) of Commercial Banks, which has been amended several times and most recently with PBI No. 17/5/PBI/2015 on the Fourth Amendment of Bank Indonesia Regulation No, 5/13/PBI/2003 dated 29 May 2015 on the Net Open Position of Commercial Banks, it is regulated that the highest Net Open Position is 20% of the Bank's capital. The NOP for December 2024: There is no violation in NOP.
C. Monitoring of the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)
   According to the Risk Profile Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk in the 4th Quarter of 2024, the Bank's Risk Profile level was ranked 2 (Low to Moderate). Therefore, based on POJK No. 11/POJK.03/2016 dated 29 January 2016 on Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks as amended by POJK No. 27 of 2022 date 26 December 2022 on the Second Amendment to the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2011 on the Minimum Capital Adequacy Requirement for Banks, in which the minimum capital adequacy is set at 10%-11% of RWA. KPMM position in December 2024: KPMM conditions still meet the applicable minimum limits.
D. NPL Ratio Monitoring
   The maximum NPL is 5% of the total Disbursed Loans. The following is the NPL position as of December 2024: There is no violation in NPL ratio.
E. Monitoring of Minimum Statutory Reserves
   1. Primary GWM (Rupiah)
      The fulfilment of Rupiah Primary Reserve Requirement has amended in May according to the refers to PADG No. 24/8/PADG/2022 on the Implementing Regulations for Fulfillment of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial

Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PADG Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2020. Posisi GWM Primer Rupiah diuraikan sebagai berikut:

a. GWM Rupiah Utama Harian (0,0%)
b. GWM Rupiah Utama Rata-Rata (5,91%)

2. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)
Pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial mengacu kepada:
   - PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PADG No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
   - Sesuai ketentuan ini PLM Minimum adalah sebesar 6%
   - Rasio PLM per Desember 2024 adalah sebesar 13,67% (masih memenuhi ketentuan)

3. GWM Valas
Sesuai ketentuan, GWM Valas ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode tertentu. Rasio GWM Valas sudah sesuai ketentuan.

4. GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (Giro RIM) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. Target RIM berkisar di antara 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%. Parameter Giro RIM adalah:

Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units as amended several times, most recently by PADG No. 12 of 2023 on the Second Amendment to the Members of the Board of Governors Regulation No. 24/8/PADG/2022 on the Implementing Regulations for Fulfillment of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, effective on 1 May 2020. The position of the Rupiah Primary GWM is described as follows:

a. Rupiah Primary GWM (Daily): 0.0%
b. Rupiah Primary GWM (Average): 5,91%

2. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM)
Fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer refers to:
   - PADG No. 21/22/PADG/2019 dated 28 November 2019 on the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units as amended several times, most recently by PADG No. 18 of 2023 on the Seventh Amendment to the Members of the Board of Governors Regulation No. 21/22/PADG/2019 on the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units;
   - According to this provision, the Minimum PLM is 6%
   - The PLM ratio as of December 2024 is 13.67% (still meets the requirements)

3. Foreign Currency GWM
In accordance with regulations, Foreign Currency GWM is set at 4% of third-party funds in foreign currency for a certain period. The ratio of GWM in foreign currency is in accordance with the provisions.

4. GWM on Macroprudential Intermediation Ratio (RIM)
RIM Current Account is equal to the calculation between Lower Disincentive Parameters or the Upper Disincentive Parameters and the difference between the Bank's RIM and the targeted RIM by taking into account the Bank's KPMM. The targeted RIM ranges from 84% -94% with an Incentive KPMM of 14%. Parameters of RIM Current Account are:

- Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol)
- Parameter Disinsentif Atas sebesar 0 (nol)

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2025

A. Rencana Kerja Bidang Kepatuhan pada tahun 2025 mencakup:
   1. Melaksanakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait agar senantiasa mematuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku untuk memitigasi eksposur risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi.
   2. Melaksanakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) secara independen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari benturan kepentingan.
   3. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Kepatuhan Bank sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Bank dalam melaksanakan kepatuhan agar kegiatan Bank selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
   4. Sosialisasi berkesinambungan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan penerapan kesadaran budaya kepatuhan, serta terlibat dalam memberikan opini terkait dengan produk dan aktivitas baru, penerbitan ketentuan internal, dan melakukan kajian terhadap kegiatan usaha Bank.
   5. Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
   6. Memantau dan membantu mengingatkan unit kerja lain melalui "*Compliance Report Monitoring*" terkait dengan pelaporan rutin dan tenggat waktu pelaporan yang harus disampaikan kepada OJK/BI maupun pihak lainnya.
   7. Program sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di OJK dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk seluruh

- Lower Disincentive Parameter of 0 (zero)
- Upper Disincentive Parameter of 0 (zero)

Compliance Work Plan for 2025

A. The Work Plan of Compliance Division in 2025 includes:
   1. Carry out preventive measures (ex-ante) through coordination with related work units to ensure compliance with various applicable banking regulations to mitigate possible risk exposures in the Bank's business activities.
   2. Carry out preventive measures (ex-ante) independently to increase the effectiveness of task implementation and avoid conflicts of interest.
   3. Formulate and review/update the Bank's Compliance Policy and/or Standard Operating Procedure (SOP) periodically as a guideline for all levels of the Bank's organization in implementing compliance so that the Bank's activities always comply with applicable laws and regulations and are carried out based on the prudential principle and Bank's Good Corporate Governance (GCG).
   4. Conduct continuous dissemination of applicable rules and regulations to increase awareness on compliance culture, as well as being involved in providing opinions regarding new products and activities, internal regulations issuance, as well as conducting reviews of the Bank's business activities.
   5. Monitor the Bank's compliance with commitments made with regulators, including monitoring the resolutions of audit findings of the Financial Services Authority Supervisory (OJK) Team in coordination with IAD, as well as monitoring and following up requests for information/data by OJK and Bank Indonesia, and other regulatory parties in terms of banking supervision.
   6. Monitor and remind other work units through "Compliance Report Monitoring" regarding routine reporting and deadlines on reporting that must be submitted to OJK/BI or other parties.
   7. Continue participating in the compliance certification program organized by the Banking Professional Certification Institute (LSPP) in order to improve competency of all staff responsible

staf yang menjalankan fungsi kepatuhan dan penerapan APU-PPT di *Compliance Division* akan terus dilaksanakan sesuai kewajiban level sertifikasi untuk setiap jenjang jabatan.

8. Sertifikasi Manajemen Risiko terhadap seluruh staf yang menjalankan fungsi kepatuhan (*regulatory compliance*) dan penerapan APU-PPT di *Compliance Division* berdasarkan jenjang jabatan (berkelanjutan), serta mengikuti undangan *refreshment* sebagai persyaratan untuk memperpanjang sertifikat manajemen risiko yang akan jatuh tempo.
9. Penyampaian Pelaporan Kepatuhan kepada pihak regulator dan para pemangku kepentingan secara akurat, dan tepat waktu.
10. Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*) berkomitmen untuk:
    a. Bekerja sesuai fungsi kepatuhan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, serta ketentuan yang berlaku.
    b. Peningkatan pengetahuan dan wawasan karyawan Divisi Kepatuhan melalui keikutsertaan pada berbagai forum seperti pelatihan (*training*), lokakarya/sarasehan (*workshop*), seminar/simposium maupun sertifikasi, serta berkoordinasi dengan HCGD di mana *Compliance Division* memberikan *training* kepatuhan kepada karyawan pada unit kerja lain.
    c. Menyampaikan opini kepatuhan yang diminta unit kerja atau pihak terkait lainnya dan memenuhi target waktu yang ditetapkan, dimana opini yang diberikan senantiasa mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku.
11. Melakukan pemantauan rasio-rasio keuangan Bank dan rasio kepatuhan Bank sebagai indicator pelaksanaan prinsip kehati-hatian kepatuhan (CAR, PDN, GWM, BMPK, NPL, PPA/CKPN, ROA, ROE, PLM, LCR, NSFR), dan mengingatkan unit kerja terkait dalam hal *monitoring* dan menjaga rasio-rasio keuangan tersebut agar sesuai ketentuan, karena hal ini berimbas terhadap kondisi Tingkat Kesehatan Bank dan kualitas dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik.
12. Mengembangkan infrastruktur kepatuhan yang lebih efektif bagi pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan di *Compliance Division*, seperti:
    a. Compliance Risk Scoring for External Regulation yakni penggunaan Kertas Kerja Kepatuhan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dan kewajiban bagi Bank dari setiap ketentuan eksternal terbaru dari regulator

to carry out the compliance function and implement AML-CFT in the Compliance Division, according to the required level of certification for each position level.

8. Risk Management Certification for all staff responsible to carry out regulatory compliance function and implement AML-CFT in the Compliance Division based on their respective position (continuously), as well as participating in refreshment invitations as a requirement to extend risk management certificates that are due.
9. Submitting Compliance Reports to regulators and stakeholders in an accurate and timely manner.
10. The Compliance Division is committed to:
    a. Working according to the compliance function by referring to policies and procedures, as well as applicable provisions.
    b. Increasing knowledge and insights of employees in the Compliance Division by participating in various forums such as training, workshops, seminars/symposiums, and certification, as well as coordinating with HCGD where the Compliance Division provides compliance training to employees in other work units.
    c. Delivering opinions on compliance as requested by work units or other related parties within a certain period, where the opinion must always refer to applicable provisions and procedures.
11. Monitoring the Bank's financial ratios and Bank compliance ratios as indicators of the implementation of prudential principle(CAR, NOP, GWM, LLL, NPL, PPA/CKPN, ROA, ROE, PLM, LCR, NSFR), and reminding related work units in terms of monitoring and maintaining financial ratios to comply with the provisions, as these ratios affect the Bank's Soundness Level and the quality of good Bank Governance.
12. Developing more effective compliance infrastructure in carrying out compliance duties in the Compliance Division, such as:
    a. Compliance Risk Scoring for External Regulation, namely the use of Compliance Working Papers to identify and measure the impact and obligation for the Bank from each of the latest external regulations from regulators.

b. *Regulatory Compliance Self Assessment* (RCSA), yakni penggunaan Kertas Kerja kepatuhan untuk memastikan bahwa peraturan eksternal yang berlaku telah dipantau, dilakukan *gap analysis* antara peraturan yang berlaku dengan kondisi internal Bank, memastikan adanya proses implementasi peraturan tersebut dan memantau pelaksanaannya.
c. *Regulatory Compliance Librarian*, yakni memastikan pemantauan dan tersedianya seluruh peraturan eksternal yang berlaku dalam suatu data base/situs portal internal Bank untuk dijadikan acuan bagi setiap penyusunan Kebijakan, SOP dan ketentuan internal lainnya.
d. *Regulatory Compliance Questionnary*, sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan yang berlaku terkait bidang tugasnya.
e. *Regulatory Compliance e-Learning*, sebagai alat pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan media elektronik dan komunikasi sebagai cara penyampaian dan sosialisasi serta pemahaman kepada karyawan atas ketentuan yang berlaku.

B. Rencana Kerja Bidang Tata Kelola (GCG)
Memperbaiki dan memperkuat penerapan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:
1. Meningkatkan tata kelola yang baik termasuk budaya tata kelola Bank yang baik (GCG) dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
2. Melakukan penyusunan dan pengkajian/ pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penguatan infrastruktur terkait dengan *Governance Structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank yang baik melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran aktivitas Bank

b. Regulatory Compliance Self Assessment (RCSA), which is the use of compliance Working Papers to ensure that applicable external regulations have been monitored, and a gap analysis between applicable regulations and the Bank's internal conditions has been conducted, as well as ensuring that there is a process for implementing these regulations and monitoring the implementation.
c. Regulatory Compliance Librarian, which is ensuring monitoring and availability of all applicable external regulations in a database/ the Bank's internal portal site to be used as a reference for each formulation of Policies, SOPs, and other internal provisions.
d. Regulatory Compliance Questionnaire, which is a tool to ensure that every employee has adequate knowledge and understanding of applicable regulations relevant to their field of work.
e. Regulatory Compliance e-Learning, which is an effective learning tool by utilizing electronic media and communication as a way of conveying and socializing, as well as instilling understanding to employees of applicable regulations.

B. The Work Plan of Governance (GCG)
Improving and strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and corporate culture through various positive efforts, including:
1. Improve good governance, including the Bank's good corporate governance (GCG) culture by building GCG awareness in all organizational lines.
2. Conduct regular preparation and review/ updates on the Good Corporate Governance (GCG) Policies and/or Standard Operating Procedure (SOP), as a work guideline for the implementation of the Bank's governance, which refers to applicable provisions and laws and regulations.
3. Strengthen infrastructure related to the Governance Structure in order to monitor the implementation of the Bank's good governance through information technology support that produces an adequate Management Information System, including increasing the quantity and quality of competency in Human Resources to support smooth running of the Bank's activities

terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment)* Penerapan Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
6. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola yang baik/ GCG berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan, standar, nilai, etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.
7. Memperbaiki dan menjaga rasio-rasio keuangan serta hal-hal lainnya yang menjadi faktor peningkatan nilai peringkat dari penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG) sebagai salah satu faktor penilaian dalam laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
8. Mengembangkan *self-assessment* tata kelola (GCG) *tools* yang memperhatikan kemampuan Bank untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi *self-assessment* faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/ informasi penilaian faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).

related to Governance Process, so that it can run well based on the prudential principle.

4. Coordinate the self-assessment of governance (GCG) factors from related work units on a semi-annual basis in order to submit a "Self-Assessment Report on the Implementation of the Bank's Governance", which is required as one of the assessment factors, other than factors like the Risk Profile, Earnings, and Capital, to support the preparation and submission of "Report on the Bank's Soundness Level Based on Risk Level (Risk-Based Bank Rating)" to the Financial Services Authority (OJK).
5. Coordinate the self-assessment of the implementation of Bank's governance (GCG) from related work units on a regular/annual basis in order to prepare "Report on the Bank's Governance Implementation", which will be submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders and published on the website of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, in accordance with applicable provisions on report submission.
6. Monitor and assess each business activity, operation, and other banking activities so that they are carried out in accordance with applicable provisions and procedures, so the Bank can implement good corporate governance/GCG based on laws and regulations, standards, values, ethics, principles and best practices.
7. Improve and maintain financial ratios and other matters that become contributing factors in increasing the rating of the Bank's good corporate governance (GCG) implementation, as one of the assessment factors in the Bank's Soundness Rating report.
8. Develop self-assessment of governance (GCG) tools that take into account the Bank's ability to support the preparation of a more effective Report on the Bank's Soundness Level by utilizing/using an application system that is designed to optimally integrate data/information on self-assessment of governance (GCG) factors with data/information on assessment of factors such as Risk Profile, Earnings, and Capital.

C. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT-PPPSPM pada tahun 2025

Penerapan Program APU & PPT-PPPSPM mengacu pada POJK nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Peraturan-peraturan di atas telah di adopsi ke dalam peraturan internal di PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang tertuang dalam Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Revisi 08 yang berlaku Tanggal 12 Desember 2023.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan:

1. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hasil kajian risiko di dalam naskah *National Risk Assessment on Money Laundering* & *Terrorism Financing* serta hasil *assesment* dalam laporan individual *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing*.
2. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang& Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Senjata Pemusnah Massal (APU PPT&PPPSPM) kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning* (*e-learning*).
3. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (AML *System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator yang diwajibkan dalam penerapan APU PPT dan PPSPM.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan di Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam rangka pemantauan pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

C. Work Plan of AML-CFT-CPF Implementation in 2025

The implementation of AML-CFT and CPF Program refers to POJK No. 8 of 2023 on the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and CPF) Programs in the Financial Services Sector and SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering Counter-Terrorist Financing Programs.

The above regulations have been adopted into internal regulations at PT Bank JTrust Indonesia Tbk, which are laid out in the Policy on Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Revision 08, effective on 12 December 2023.

In order to increase the effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism programs, AML & CFT continuously carries out the following processes:

1. Review internal policies and procedures based on the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector, Regulations of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), results of the study on National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorism Financing, as well as assessment results of the individual report on Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing.
2. Conduct dissemination on the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and CPF) to employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk through direct meeting and/or Electronic Learning (e-learning) media.
3. Develop function of the information system (AML System) to support customer risk monitoring activities based on profiles and/or transactions, and submit reports to regulators as required in the implementation of AML CTF and CPF.
4. Enhance the knowledge and understanding of employees in the AML and CFT Special Work Unit in order to monitor the implementation of AML & CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap penerapan APU PPT & PPSPM di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU dan PPT.
7. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
8. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif terhadap program PPATK & OJK antara lain yaitu, pelaksanaan Nasional *Risk Assesment* dan *Sectoral Risk Assessment On Money Laundering* & *Terrorism Financing* serta pelaksanaan *Financial Integrity Rating On Money Laundering* & *Terrorism Financing*, penilaian indeks persepsi kinerja PPATK, diskusi grup dalam penyusunan rancangan perubahan peraturan OJK tentang penerapan APU PPT & PPSPM, implementasi sistem pelaporan transaksi melalui Go AML PPATK, implementasi platform Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) PPATK serta implementasi platform Sistem Informasi Pelaporan Program APU PPT & PPSPM (SIGAP) dan Aplikasi Pelaporan Online Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Bank Umum OJK (APOLO).
9. Mendukung institusi Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
10. Mendukung Rezim Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) yang ke empat puluh pada tahun 2023.
11. Mendukung program PPATK dan lembaga Negara terkait dalam rangka pemantauan transaksi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 melalui partisipasi aktif di dalam kelompok kerja kolaborasi dan koordinasi pertukaran informasi (*Collaborative Analysis Team*) serta mendukung pemberantasan tindak pidana keuangan di bidang lingkungan hidup (Green Financial Crimes) dalam rangka mendukung program nasional menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan.

5. Review and evaluate the implementation of AML CTF & CPF at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
6. Improve the quality and effectiveness of Internal Control processes related to the implementation of AML and CTF.
7. Provide support and actively participate in the implementation of supervisory duties and strategic implementation by the Bank's management.
8. Provide support and actively participate in PPATK & OJK programs, such as the implementation of National Risk Assessment and Sectoral Risk Assessment On Money Laundering & Terrorism Financing, as well as the implementation of Financial Integrity Rating On Money Laundering & Terrorism Financing, assessment of PPATK performance perception index, group discussion in the preparation of draft changes to OJK regulations on the implementation of AML-CFT and CPF, implementation of a transaction reporting system through Go AML PPATK, implementation of the Alleged Terrorism Financing Information System (SIPENDAR) platform and the Integrated Service User Information System (SIPESAT) PPATK, implementation of AML-CFT & CPF Program Reporting Information System (SIGAP) platform, as well as Online Reporting Application for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML-CFT) for Commercial Banks by OJK (APOLO).
9. Support law enforcers in preventing and eradicating money laundering and terrorism financing.
10. Support the Indonesian Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and CPF) Regime as full member of the 40th Financial Action Task Force (FATF) in 2023.
11. Support the PPATK program and related State institutions in the context of monitoring transactions related to the simultaneous General Elections and Regional Head Elections in 2024 through active participation in the Collaborative Analysis Team as well as supporting the eradication of Green Financial Crimes in order to support national programs towards achieving sustainable development.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pengawasan terhadap Perseroan selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip governansi korporat yang turunannya dijiwai oleh empat pilar, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang objektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2024, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank adalah KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (a member firm of PKF Global). Penunjukan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

EXTERNAL AUDIT FUNCTION

The Company's supervision is carried out by internal auditors, as well as external auditors, including the Financial Services Authority and Public Accounting Firms (KAP). To ensure the effectiveness of external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to the provisions regarding the relationship between the Bank, Public Accounting Firms, and Bank Indonesia, as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority on Transparency of Bank Financial Conditions.

One important component/factor in the implementation of good governance is the availability of adequate financial reports and the sufficiency of financial reporting process, in accordance with the corporate governance principle, which derivatives are inspired by four pillars, namely ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability.

The role and functions of External Auditor (in this regard Public Accounting Firms/KAP) include:

1. Ensuring conformity of financial statements with applicable accounting standards.
2. Ensuring that internal financial statements have complied with applicable provisions of the Financial Services Authority on Transparency of Bank Financial Conditions.

The audit results of the Financial Statements by Public Accounting Firm are the outcome of an objective, independent, and professional process, which is expected to support the principles of good governance in the Bank's management in order to fulfil expectations of the Bank's stakeholders.

The Effectiveness of External Audit Implementation

In 2024, the Public Accounting Firm (KAP) auditing the Bank's financial statements was KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (a member firm of PKF Global). The appointment of KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan was made according to applicable regulations. The appointment has been reviewed, supervised, and recommended by the Audit Committee, including the determination of audit fees on a fair basis.

Nama Akuntan Publik
Riva Utama Winata, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik
KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Alamat Kantor Akuntan Publik
Cyber 2 Tower, 9th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta Pusat 12950

Pengawasan Atas Auditor Eksternal
Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan dilakukan, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi

Selama proses pemeriksaan, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank
Sesuai POJK No. 9 of 2023 menggantikan POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Penunjukan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai auditor di tahun 2024 telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 16.01/S.Dir-FCD/JTRUST/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024.

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Name of Public Accountant
Riva Utama Winata, CPA

Name of Public Accounting Firm
KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Addres of Public Accounting Firm
Cyber 2 Tower, 9th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta Pusat 12950

Supervision on External Auditor
The Audit Committee supervises the implementation of external audit process through regular meetings with the Public Accountant to discuss plans to cross-examine all findings and developments during the audit process, assist and ensure that there are no obstacles in the audit implementation, evaluate the quality of audit process, ensure that the audit implementation is in accordance with applicable regulations and standards.

Communication Frequency of Public Accountant and the Board of Directors
During the audit process, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors were carried out intensively and regularly.

Total Periods of Accountants and Public Accounting Firms (KAP) Auditing the Bank's Financial Statements
In accordance with POJK No. 9 of 2023 which replaces POJK No. 13/POJK.03/2017 and SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the appointment of the same Public Accounting Firm (KAP) can only last for 5 (five) consecutive financial years, unless it meets certain conditions and obtains approval of competent authority.

The appointment of KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as auditor in 2024 has been reported to OJK through Letter No. 16.01/S.Dir-FCD/JTRUST/X/2024 dated 16 October 2024.

Information regarding the Public Accounting Firm that has audited the Bank's financial statements over the last 5 (five) years is as follows:

Tahun Pemeriksaan Date of Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) The Public Accounting Office	Penanggung Jawab Person in Charge
2024	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Riva Utama Winata, CPA
2023	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Tjiong Eng Pin, SE, CPA
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Riva Utama Winata, CPA
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2020	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA

Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, terdapat fee yang dibayarkan kepada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sehubungan dengan Agreed Upon Procedure (AUP) untuk spesifik akun yaitu sebesar Rp 250.000.000.

Other Services Performed by Accountants & KAP for PT Bank JTrust Indonesia Tbk Other than Audit Services (Non-Audit Fees) in 2024

In 2024, there was a fee paid to KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as the firm which provided services for the Agreed Upon Procedure (AUP) for specific account worth Rp 250,000,000.

Biaya Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, total biaya audit/review Bank sebesar Rp 3.180.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Audit Fees for 2024

In 2024, total fee for the Bank's audit/review was Rp 3,180,000,000 with the following details:

Periode/Tahun Pemeriksaan Period/Year of Audit	Biaya Fee
Review - Maret 2024 | March 2024	Rp 335.000.000
Review - Juni 2024 | June 2024	Rp 335.000.000
Review - September 2024	Rp 335.000.000
Audit - Desember 2024 | December 2024	Rp 2.175.000.000

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan tahun buku 2024 telah disusun dan diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan partner penanggung jawab adalah Riva Utama Winata, CPA yang berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00108/2.114/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

The 2024 Financial Statements have been prepared and audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with the partner in charge Riva Utama Winata, CPA, who based on the Independent Auditor's Report No. 00108/2.114/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 dated 14 February 2025 expressed an unqualified opinion, in all material respects, the financial position of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of 31 December 2024, as well as the Company's financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank yang tepat dan sehat akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik, J Trust Bank telah mengembangkan kerangka manajemen risiko yang mencakup berbagai aspek, termasuk risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, serta risiko lingkungan dan sosial. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis dilandasi oleh analisis risiko yang komprehensif, sehingga dapat meminimalkan potensi dampak negatif pada keberlanjutan perusahaan.

Bank telah mengintegrasikan manajemen risiko sebagai elemen kunci dalam operasional perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan perlindungan bagi pemangku kepentingan. Pendekatan ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan, reputasi, serta pencapaian tujuan keberlanjutan Bank. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principles), Bank berupaya mengelola risiko secara proaktif guna menghadapi dinamika pasar dan tantangan global.

Bank juga melakukan penelaahan secara berkala efektivitas penerapan manajemen risiko yang diterapkan. Tinjauan tersebut, setidaknya meliputi 4 (empat) hal: perumusan tingkat risiko; kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; alat organisasi manajemen risiko; dan sistem informasi manajemen risiko.

THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT INCLUDING INTERNAL CONTROL SYSTEM

Risk Management Implementation

PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements risk management based on provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) N0. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 on the Implementation of Risk Management for Banks.

An appropriate and sound implementation of risk management and governance at the Bank will increase added value and provide a comprehensive picture of potential risks and losses of the Bank in the future, which are adjusted to the complexity and internal conditions of the Bank.

As part of its commitment to good governance, J Trust Bank has developed a risk management framework that covers a wide range of aspects, including credit, operational, market, liquidity, and environmental and social risks. The framework is designed to ensure that every strategic decision is underpinned by a comprehensive risk analysis, thereby minimizing potential negative impacts on the company's sustainability.

The Bank has integrated risk management as a key element in the company's operations to ensure business continuity and protection for stakeholders. This approach includes identifying, measuring, monitoring, and controlling risks that have the potential to affect the Bank's financial performance, reputation, and sustainability goals achievement. By applying prudential principles, the Bank tries to manage risks proactively to face market dynamics and global challenges.

The Bank also conducts periodic reviews of the effectiveness of risk management implementation. The reviews include at least 4 (four) things: formulation of risk levels; the adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors; risk management organizational tools; and risk management information system.

Adapun pengelolaan manajemen risiko di Bank melibatkan organisasi hingga Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Di tingkat pelaksanaan teknis, Bank telah memiliki Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Keempat pilar tersebut dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain:

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
3. Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
4. Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan

Risk management at the Bank involves the organization to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors. At the technical implementation level, the Bank has the Risk Management Division and Risk Management Committee that are directly responsible to the President Director.

The effectiveness of governance implementation and risk management framework by PT Bank JTrust Indonesia Tbk include 4 (four) pillars, namely:
1. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Adequate policies, procedures, and limit setting;
3. Adequate process in risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as Risk Management information system; and
4. A comprehensive internal control system.

These four pillars are described in detail as follows:

1. Active Supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for effective risk management implementation of the Bank and making sure that the implementation is adequate, in accordance with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile. Active supervision by the Board of Commissioners includes, among others:

1. Approve the Risk Management policy including the Risk Management strategy and framework that are set according to the Bank's risk appetite and risk tolerance;
2. Evaluate the policies and implementation of risk management carried out by the Board of Directors;
3. Hold regular meetings with the Board of Directors to evaluate the follow-up progress of each action plan;
4. Make sure that the recommendations for each Audit Result Report of the Internal Audit Work Unit and External Auditor have been followed up.

Meanwhile, the Board of Directors is tasked with determining the direction of risk management policy and strategy in a comprehensive manner, including

bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, di antaranya meliputi:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
2. Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
3. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
4. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
5. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian "Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk".

Komite Manajemen Risiko

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian "Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.".

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Division/RMD) berada di bawah *EVP Risk Management* merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

the implementation, and ensuring that material risks and their impacts have been followed up. The Board of Directors is also responsible for promoting risk awareness culture in all work units. Active supervision by the Board of Directors includes:

1. Formulate Risk Management policy, strategy, and framework by taking into account the Bank's risk appetite and risk tolerance;
2. Monitor, evaluate, and ensure that the Bank's Business Plan, strategies, and action plans have been carried out according to plan through regular meetings;
3. Ensure that Standard Operating Procedures (SOPs), Policies, and Procedures have been understood and implemented;
4. Make sure that corrective measures or recommendations from the Internal Audit Work Unit and External Audit have been carried out effectively;
5. Develop risk management culture and increase risk awareness at all levels of the organization.

In supervising and managing the Bank's risk and implementing Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Oversight Committee at the Commissioner's level and by the Risk Management Committee at the Director's level.

Organizational Structure of Risk Management

Risk Oversight Committee

Details about the Risk Oversight Committee can be seen in the section of "Completion and Implementation of Duties of Committees at PT Bank JTrust Indonesia Tbk ".

Risk Management Committee

Details about the Risk Management Committee can be seen in the section of "Completion and Implementation of Duties of Committees at PT Bank JTrust Indonesia Tbk ".

Risk Management Work Unit

The Risk Management Work Unit (Risk Management Division/RMD) under the EVP Risk Management is an independent work unit, from the business/operational work units. The RMD's function is to identify, measure, monitor, and control risks to minimize the potential and impact of various types of risks encountered in business activities and processes.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 4 (empat) unit kerja, yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja *Quality Control* (QC).

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk:

The RMD organizational structure consists of 4 (four) work units, namely the credit risk work unit, market & liquidity risk work unit, operational risk work unit, and Quality Control (QC) work unit.

Below is the Organizational Structure of Risk Management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

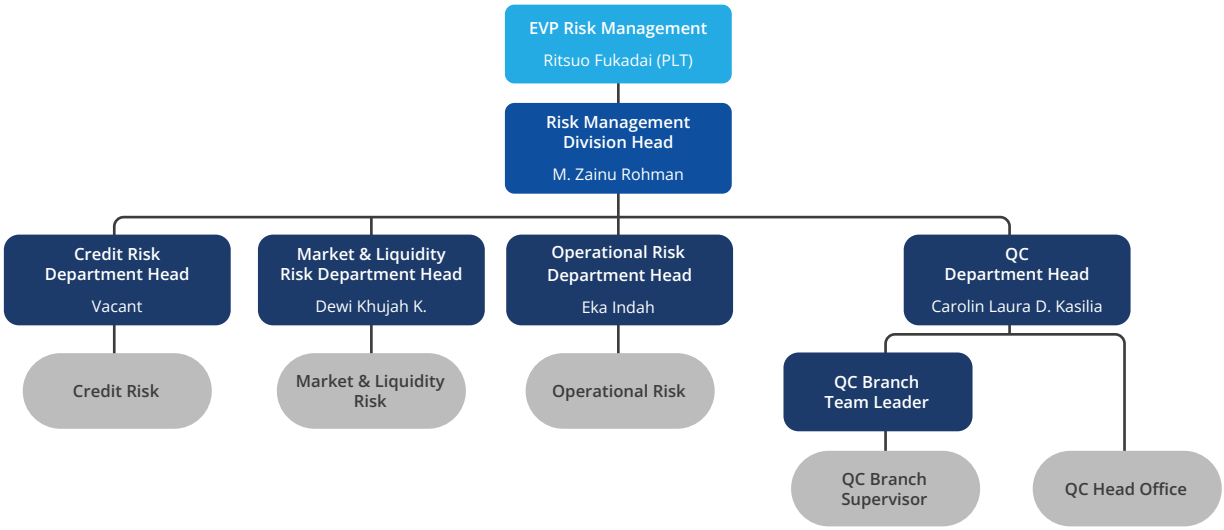

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
4. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
5. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
7. Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Work Unit

1. Provide inputs to the Board of Directors in risk management planning, policy, strategy, and framework.
2. Develop procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control.
3. Monitor risk management strategy that has been approved by the Board of Directors.
4. Monitor overall risk position/exposure and type of risk.
5. Conduct stress testing to determine the impact of implementation of risk management policy and strategy.
6. Conduct risk studies on new product and/or activity proposals.
7. Review and recommend risk limits from proposals submitted by business and operational work units.
8. Prepare and submit risk profile reports to the Risk Management Committee periodically for submission to the Board of Directors and the Financial Services Authority (OJK).
9. Prepare reports on the Capital Adequacy Requirement (KPMM) and the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) periodically for submission to the Board of Directors and OJK.

Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2024 jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

Risk Management Certification Program

In 2024, the number of employees who have obtained Risk Management Certification are as follows:

Jenjang	Jumlah Pegawai Number of Employees		
	Wajib Sertifikasi Mandatory Certification	Telah Sertifikasi Certified	%
4	427	325	76%
5	60	49	82%
6	4	4	100%
7	14	9	64%
Total	**427**	**325**	**76%**

Untuk tahun 2025, jumlah pegawai yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko akan ditingkatkan pemenuhannya.

In 2025, more employees will be required to have Risk Management Certification.

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

2. Adequacy of Risk Management Policy and Procedure and Determination of Risk Limits

The implementation of risk management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has been outlined in several policies and procedures, including the Risk Management General Policy (KUMR). KUMR acts as the highest provision in giving policy guidance on risk management and control in an effort to protect PT Bank JTrust Indonesia Tbk from risks inherent in its business activities. The limit setting is managed in business activities and products and has been adjusted to the Bank's risk appetite, and the limit is reviewed periodically to adjust to changes in current conditions.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

3. Adequacy in the Process of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control and Risk Management Information System

The process of risk management implementation includes identifying, measuring, monitoring, managing, and controlling the eight types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

Identification

Risk identification covers all business activities by analysing the sources and possible risks and their impacts.

Pengukuran
Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

Pengendalian
Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas aktivitas yang berisiko tinggi.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan *assessment* secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya
Pengelolaan pada 8 (delapan) risiko Bank adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit
Pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan organisasi manajemen risiko kredit, yaitu four eyes principles dalam proses pemberian dan persetujuan kredit pada rapat Komite Kredit, penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), dan lebih rinci dijelaskan pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Kredit yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

Risiko Pasar
Pengelolaan risiko pasar yang disebabkan karena risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan dengan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas yang disesuaikan jangka waktu dan jenis suku bunga (*fixed/floating*).

Sebagai bank devisa, tentunya terdapat risiko fluktuasi nilai tukar (Foreign Risk) sehingga pengelolaan aset dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan

Measurement
Risk measurement is aimed so the Bank can calculate the risk exposure inherent in business activities, and estimate its impact on capital. One of the risk measurements is reflected in the quarterly Risk Profile Report.

Monitoring
Risk monitoring is carried out by evaluating treasury transaction limits and the effectiveness of risk management process.

Control
Risk control includes conducting follow-up on high-risk activities.

4. Comprehensive Internal Control System

The Internal Audit Division continuously assesses activities and internal control system to ensure the quality of qualified risk management implementation in all processes with high risk exposures has been carried out accordingly. Additionally, there is a clear separation of functions between risk-taking units and risk management units.

Types of Risk and the Management
The management of 8 (eight) types of risk at the Bank are as follows:

Credit Risk
Credit risk is managed by implementing credit risk management organization, namely four eyes principles, in the process of granting and approving credit requests at the Credit Committee meetings, setting up Credit Approval Authority Limits (BWMK), and more detailed information is elaborated in the Qualitative Disclosure of Credit Risk Management of this Annual Report.

Market Risk
The management of market risk due to interest rate risk and exchange rate risk is carried out by managing assets and liabilities portfolios, which are adjusted to the time period and type of interest rate (fixed/floating).

As a foreign exchange bank, there is an exposure to exchange rate fluctuations (Foreign Risk), so the management of assets and liabilities in foreign

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar. Penjelasan lebih rinci terdapat pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Pasar yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

exchange must be in accordance with provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority to avoid potential losses during exchange rate volatility. More detailed explanation can be seen in the Qualitative Disclosure of Market Risk Management of this Annual Report.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena Bank tidak mampu memenuhi kewajiban dari nasabah atau dengan pihak lain telah jatuh tempo, efektivitas pengelolaan kesenjangan likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk batas risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga kontrol risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. J Trust Bank juga telah memiliki Kebijakan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) atau Rencana Pendanaan Kontinjensi dan juga senantiasa melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden.

Liquidity Risk

Liquidity risk emerges because the Bank is unable to fulfil maturing obligations from customers or other parties, effectiveness in managing liquidity gaps (maturity gap and cash flow projection) for liquidity risk limit as early as possible, and control liquidity risk, especially under stress conditions. J Trust Bank also has a Liquidity Contingency Plan (LCP) Policy or Contingency Funding Plan and always creates access to the money market by continuing to foster relationships with correspondent banks.

Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal.

Operational Risk

Operational risk management is also one of the Bank's concerns due to insufficiency and/or non-functioning internal process, human errors, system failures, or external problems.

Risiko Hukum

Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum antara lain: Peninjauan kembali (review) atas dokumen hukum, perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya perkembangan dari setiap kasus hukum. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

Legal Risk

The Bank has conducted legal risk management including: Review of legal documents, agreements or contracts with third parties.

An inventory of previous legal cases, including the progress of each legal case. The handling of legal cases is formulated based on priority scale and all developments are well monitored for follow-up through a settlement that contains the least potential legal risk.

Faktor Reputasi

Pengelolaan risiko oleh Bank dilakukan dengan cara pemantauan terhadap media publikasi melalui kerja sama dengan jasa pihak ketiga dan melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera dengan optimalisasi fungsi Call Center dan Customer Care. Selain itu, Bank juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya

Reputation Factor

The Bank's risk management is carried out by monitoring media publication through collaboration with third party services and monitoring customers' complaints and handling these complaints promptly by optimizing the Call Center and Customer Care functions. In addition, the Bank also takes part in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and other social activities with customers, including becoming a sponsor in various community activities. The Bank also improves the implementation

sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat. Bank juga meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada pemangku kepentingan seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan website Bank, serta menerbitkan rilis kepada media.

of Financial Information Transparency to stakeholders, such as presenting financial information, updating the Bank's website, and issuing press releases.

Risiko Strategi

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara target yang ingin dicapai oleh Bank dengan Rencana Bisnis Bank.

Strategy Risk

The risk management is carried out by supervising financial performance by comparing the Bank's targets with the Bank's Business Plan.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan menjalankan pemantauan dan mengingatkan ke unit kerja terkait perihal kewajiban pelaporan ke regulator dengan didukung sistem Compliance Report Monitoring (CRM); pemantauan terhadap Kebijakan Kepatuhan serta Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF dan rekening pasif/dorman; dan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan ketentuan Regulator.

Compliance Risk

Compliance risk is managed by monitoring and reminding relevant work units regarding the obligation to report to regulators, supported by the Compliance Report Monitoring (CRM) system; monitoring the Compliance Policy as well as Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy; monitoring updates on customer data and implementing single CIF and passive/dormant accounts; and Implementing the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program, in accordance with Regulatory provisions.

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

a. Perumusan Tingkat Risiko

Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bank wide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite* & *Risk Tolerance*.

b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, yang fungsinya antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.

Review of the effectiveness of Risk Management implementation

Review of the effectiveness of Risk Management implementation in the four pillars of the risk management system has been carried out accordingly, which includes:

a. Risk Level Formulation

The formulation of risk appetite and risk tolerance is sufficient and aligned with the Bank's strategic and business objectives set in the Bank Business Plan. Bank-wide risk tolerance parameters are documented in the internal provisions of Risk Appetite & Risk Tolerance.

b. Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors

The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the implementation of authorities and responsibilities by the Board of Commissioners and the Board of Directors, is seen as adequate. The Board of Commissioners has formed the Risk Oversight Committee with the following functions:

1. Evaluate and analyze the adequacy of risk management policy periodically.

2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen.

c. Alat Organisasi Manajemen Risiko

Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:

1. Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury* & *Capital Market*, Divisi *Head Office* & *Branch Operation* dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatanganan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

d. Sistem Informasi

Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) & penerapan *Key Operational Risk Indicator* (KRI) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator dan sistem *Internal Regulation Reminder Application* (IRRA) sebagai *reminder* ke unit kerja mengenai pengkinian ketentuan internal sebelum masa review berakhir.

2. Evaluate and analyze risk profile reports on a quarterly basis and the Bank's Soundness Level on a semi-annual basis.
3. Supervise and evaluate the implementation of duties by the Management Committee.

c. Risk Management Organizational Tools

Organizational tools that support the effective implementation of Risk Management are deemed adequate with clear authorities and responsibilities in each business activity, including:

1. In managing credit risk, there are different loan officers between the Business Unit and the Credit Risk Review Unit. The delegation of authority is stipulated in internal provisions regarding the Credit Committee and Credit Approval Authority Limit (BWMK) and evaluated regularly by authorized officials.
2. In managing market and liquidity risks, the risk management function consists of the Treasury & Capital Market Division, the Head Office & Branch Operation Division, and the Risk Management Division.
3. In operational risk management, there is a separation of duties and authorities between the creator, auditor, and signatory (duty segregation and dual control) in the implementation of all operational activities in work units.
4. To develop competency in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials up to four levels below the Board of Directors to join training for Risk Management certification. In addition, refreshment of Human Resources is also carried out on a regular basis.

d. Information System

Information system support for the implementation of risk management is seen as adequate, which includes transaction approval and delegation of authority in the Core Banking information system, daily Liquidity Risk Report, daily Credit Daily Report, Risk Control Self-Assessment (RCSA), the implementation of Key Operational Risk Indicator (KRI) in measuring operational risk, Compliance Report Monitoring (CRM) system as a reminder to reporting work units and the Board of Directors about the obligation to submit reports to Regulators, and the Internal Regulation Reminder Application (IRRA) system as a reminder to work units about updates on internal provisions before the end of review period.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris melihat bahwa sistem manajemen risiko Bank mampu mengelola risiko-risiko yang ada untuk mendukung Bank mencapai rencana bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kondisi bisnis yang terjadi.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Adequacy of Risk Management System

The Board of Directors and Board of Commissioners see that the Bank's risk management system is able to manage existing risks to support the Bank in achieving its business plans, in accordance with applicable provisions and current business conditions.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan sistem pengendalian intern sebagai suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
3. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. POJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif membantu menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran atas aspek kehati-hatian.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements an internal control system as a monitoring mechanism established by the Bank's management on a continuous basis. The system aims to ensure compliance with applicable laws and regulations, including the Bank's internal provisions, the availability of a comprehensive, accurate, relevant, and timely financial and management information, effectiveness and efficiency in operational activities, as well as the effectiveness of risk culture within the Bank's overall organization, by referring to the following applicable regulations:

1. The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 of 2023 on Governance Implementation for Commercial Banks.
2. OJK Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017 dated 7 July 2017 on Standard Guidelines for Internal Control System in Commercial Banks.
3. OJK regulation No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
4. OJK regulation No. 11/POJK.03/2022 dated 7 July 2022 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
5. OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

The Internal Control System is implemented to make sure the Bank's operational activities can run in a sound, secure, and controlled manner.

Effective implementation of internal control system helps to protect the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reports, improve the Bank's compliance with laws and regulations, and lower the risk of losses, irregularities, and violations of prudential principles.

Bank telah mengimplementasikan fungsi pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan fungsi dan pemisahan tugas dan tanggung jawab, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

Bank JTrust Indonesia Tbk. menerapkan sistem pengendalian intern yang meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:
1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, diimplementasikan secara terpadu dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut:
1. *Strategic*, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. *Operation*, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. *Reporting*, akurat, dan dapat dipercaya.
4. *Compliance*, aktivitas, dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Efektivitas serta keandalan dalam penyelenggaraan pengendalian intern senantiasa menjadi prioritas jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Sistem pengendalian intern dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian intern, antara lain fungsi audit intern, manajemen risiko, kepatuhan, kontrol finansial dan operasional.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Secara umum, selama tahun 2024 terjadi peningkatan dalam proses Sistem Pengendalian Intern yang tercermin dari dilaksanakannya perbaikan secara

The Bank has implemented the internal control function in its operational activities, including through separation of functions, division of duties and responsibilities, dual control, reconciliation, as well as work process standards and implementation guidelines.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements internal control system that consists of 5 (five) control components, namely:
1. Supervision by management and control culture.
2. Risk identification and assessment.
3. Control activities and segregation of functions.
4. Accounting, information and communication systems.
5. Monitoring activities and corrective actions for deviations.

Each component is interconnected, implemented in an integrated manner, and the responsibility for its implementation lies with all work units, with the following objectives:
1. Strategic: the Bank's Business Plan has been understood, aligned, and supported by all work units.
2. Operation: running effectively and efficiently in using human resources and infrastructure.
3. Reporting: accurate, and reliable.
4. Compliance: activities and transactions are in accordance with provisions and laws.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of Internal Control System

The effectiveness and reliability of internal control implementation are always a priority for the Bank's management team. In addition, the management is also responsible for enhancing an effective risk culture within the Bank's organization and ensuring that it is embedded at every level of the organization.

The internal control system carried out by PT Bank JTrust Indonesia Tbk is deemed effective and adequate, as reflected in the effectiveness of the implementation of internal control functions, including internal audit, risk management, compliance, as well as financial and operational controls.

Review of the Effectiveness of Internal Control System

In general, there has been an improvement in the Internal Control System process in 2024, as reflected in the continuous improvement in areas of concern

berkelanjutan pada aspek-aspek yang menjadi perhatian manajemen dan regulator. Strategi pertumbuhan Bank dilaksanakan dengan tetap mengedepankan efektifitas Sistem Pengendalian Intern sehingga Bank dapat bertumbuh dengan sehat.
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern antara lain:

1. Menanamkan budaya pengendalian dan budaya sadar risiko kepada manajemen dan seluruh karyawan, serta melakukan peningkatan kompetensi karyawan di bidang pengendalian.
2. Secara berkelanjutan melakukan monitoring atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern.
3. Meningkatkan koordinasi pada unit kerja pengendalian seperti Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.
4. Penerapan *reward and punishment* secara *fair*.
5. Penguatan tata kelola dan penerapan manajemen risiko pada aspek-aspek strategis Bank untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat

for the management and regulators. The Bank's growth strategy was implemented by prioritizing the effectiveness of the Internal Control System, ensuring the Bank can grow healthily.

The initiatives that have been performed to improve the Internal Control System include:

1. Promote a control culture and risk-awareness culture to the management and all employees, as well as improving employees' competencies in control areas.
2. Continuously monitoring the effectiveness of the Internal Control System.
3. Strengthen coordination within control work units, such as the Compliance Work Unit, Risk Management Work Unit and Internal Audit Work Unit.
4. Implementation of reward and punishment in a fair manner.
5. Strengthen the governance and implementation of risk management in strategic aspects of the Bank to protect the interests of customers and the public.

PERKARA PENTING

Selama tahun 2024, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

LEGAL CASES

Throughout 2024, the number of legal cases faced by J Trust Bank and submitted through legal processes can be seen in the following table:

1. The Bank as Defendant/Respondent/Reported Party

Permasalahan Hukum Legal Case	Jumlah Kasus Total Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
A. Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan | Cases with the Bank as Defendant/Opposing Party		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Legally settled (Has reached a verdict with binding legal power)	12	
Dalam proses penyelesaian In settlement process	24	
Total	**36**	
B. Perkara Bank sebagai Terlapor | Cases with the Bank as the Reported		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Legally settled (Has reached a verdict with binding legal power)		1
Dalam proses penyelesaian In settlement process		2
Total		**3**

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

2. The Bank as Plaintiff/Counterpart/Petitioner/Reporting Party

Permasalahan Hukum Legal Case	Jumlah Kasus Total Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
A. Perkara Bank sebagai Penggugat/Pelawan | Cases with the Bank as Plaintiff/Counterpart		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Legally settled (Has reached a verdict with binding legal power)	0	
Dalam proses penyelesaian In settlement process	12	
Total	**12**	
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan | Cases with the Bank as the Petitioner regarding Bankruptcy		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Legally settled (Has reached a verdict with binding legal power)	0	
Dalam proses penyelesaian In settlement process	2	
Total	**2**	
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana | Cases with the Bank as the Party Reporting on Alleged Criminal Acts		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Legally settled (Has reached a verdict with binding legal power)		1
Dalam proses penyelesaian In settlement process		5
Total		**6**

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain:

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

The Bank's efforts to resolve legal issues include:

- Analyze the cases and discuss them with Legal Team and relevant Business Units regarding the legal issues in question;
- The Legal Team collectively determines whether the case will be handled internally by the Bank or use an external Lawyer with approval from the Board of Directors, in accordance with applicable legal provisions;
- Monitor the progress of legal cases handled by both the Bank's internal team and external lawyers.

3. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Bank

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara yang signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2024.

3. Legal Cases with Material Impacts Faced by the Bank

Civil/Criminal cases with significant case values faced by the Bank until 31 December 2024.

No	Perkara/ Kasus Cases	Pokok Perkara/ Gugatan Major Case/Lawsuit	Nilai Gugatan (juta) Lawsuit Value (million)	Pengaruh pada Kondisi Bank The Impact on Bank's Condition	Upaya Bank & Status Penyelesaian Perkara/ Gugatan The Bank's Efforts & Case Settlement Status
1	ADS : WP	• BJI sebagai Tergugat • Adanya gugatan agar bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS berupa Discretionary Fund • BJI as Defendant • A lawsuit for the Bank to return product investment funds issued by ADS in the form Discretionary Fund	Dari Nilai Gugatan Antaboga Surabaya sebesar Rp. 94.324,- telah berkurang akibat lelang eksekusi asset milik Bank JTrust sebesar Rp. 23.054,- sehingga menjadi Rp.71.270,- Surabaya, the amount has decreased by Rp23,054 due to the auction of assets owned by J Trust Bank. Hence, the value was at Rp71,270	Membayar ganti rugi Pay the compensation	Bahwa guna untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum, Bank JTrust melalui Kuasa Hukumnya (SIHIN ADVOCATES) telah mengunakan hak hukumnya dengan mengajukan dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke II melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.Sby sebagaimana Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali No. 55/ Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 18 Juli 2024 Selanjutnya, Bank akan memonitor proses pemeriksaan Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung. To maintain its legal rights and interests, through its Legal Counsel (SIHIN ADVOCATES), J Trust Bank has exercised its legal right by submitting and delivering the Second Petition for Judicial Review to the Registrar's Office of the Surabaya District Court regarding case Number: 55/Pdt.G/2012/PN.Sby as Receipt of Judicial Review No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby dated 18 July 2024 Furthermore, the Bank will monitor the Judicial Review examination process through the Surabaya District Court until the Supreme Court Decision is made.
2	WST FGFL Dkk	• BJI sebagai Tergugat II • BJI Dkk sebagai Tergugat • BJI as Defendant II • BJI et al as Defendants	USD 116 USD 959	Membayar ganti rugi Pay the Compensation	Bahwa Kasus masih berputar tentang siapa pihak yang berwenang mewakili Weston Group, ada beberapa persoalan diantara pemegang saham mereka pada hukum Mauritius. Jadi memang belum pernah masuk lagi ke persidangan atas kasus yang melibatkan BJI, masih berputar untuk menentukan pihak yang berwenang mewakili Weston. Bank akan tetap berkoordinasi dengan Kuasa Hukum jika terdapat hal – hal yang akan menentukan langkah selanjutnya. The case is still revolving around determining who has the authority to represent the Weston Group, following several issues among their shareholders under Mauritius law. Therefore, the case has never gone to trial since the Weston Group is still determining the party that will be authorized as its representative. The Bank will continue to coordinate with the Legal Counsel for the next steps.

4. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2024.

4. Legal Cases with Material Impacts Faced by Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

There were no legal cases faced by individual members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024.

PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI, DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Bank mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku yang mana pengaturan dan implementasinya dilakukan dengan komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Mengacu pada POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, Bank memiliki Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang memuat prinsip-prinsip/pokok-pokok kebijakan yang mendasari pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sebagai pedoman dan proses di internal Bank guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan Ini dikaji ulang secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal dianggap perlu untuk menyelaraskan kesesuaian pelaksanaan kebijakan ini dengan kondisi internal Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku.

Bank memiliki prosedur yang memadai dengan membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi, sehingga transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip transaksi yang wajar, dan tidak mengandung Benturan Kepentingan. Bank wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank.

Divisi yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib berkoordinasi dengan Corporate Secretary Division (CSD) yang akan melakukan assessment bersama Direktur Kepatuhan untuk memastikan transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi, serta apakah jenis transaksi merupakan kegiatan yang perlu dimasukkan ke Rencana Bisnis Bank.

PROVISION OF FUNDS, BANK STRATEGIC PLANS, TRANSPARENCY, AND DISCLOSURE OF OTHER ASPECTS

POLICY OF AFFILIATED TRANSACTIONS AND TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST

The Bank regulates provisions regarding transactions with affiliated parties and transactions containing conflicts of interest in accordance with applicable regulations, the regulation and implementation of which is carried out with high commitment from the Management and employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Referring to POJK Number 42/POJK.04/2020 dated 1 July 2020, the Bank has an Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transaction Policy, which contains the policy principles underlying the implementation of transactions with affiliated parties and transactions containing conflicts of interest in 1 (one) transaction or a series of transactions for a specific purpose or activity. This policy acts as a guideline and process within the Bank to protect the interests of minority shareholders and as part of implementing the principles of good corporate governance. This Policy is reviewed periodically at least once every 2 (two) years or if deemed necessary, in order to align the implementation of this policy with the Bank's internal conditions and applicable external regulations.

The Bank has adequate procedures in place by comparing the terms and conditions of transactions with those conducted between parties that have no affiliation, to make sure that transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, meet the arm's-length principle, and do not contain any Conflict of Interest. Banks are obliged to keep documents related to the implementation of these procedures within the document storage period in accordance with the provisions of laws and regulations and the Bank's internal regulations.

Divisions that conduct Affiliated Transaction are required to coordinate with the Corporate Secretary Division (CSD), who will carry out an assessment with the Compliance Director to ensure that the transaction is an Affiliated Transactions, and determine whether the type of transaction is an activity that needs to be included in the Bank's Business Plan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas pengungkapan dan pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, memberikan masukan dan persetujuan atas pemberian kredit pihak terafiliasi serta melakukan pengawasan aktif terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, didukung oleh Komite Audit yang melakukan tugasnya dalam menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam Bank.

The Board of Commissioners is responsible for providing inputs on the disclosure and implementation of Affiliated Transactions and/or Conflict of Interest Transactions, providing inputs and approval for the granting of credit to affiliated parties and carrying out active supervision of the Maximum Legal Lending Limit (LLL). In addition, it is supported by the Audit Committee, which carries out its duties in reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Bank.

Transaksi Benturan Kepentingan guna memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar dan tidak merugikan Bank. Detail mengenai Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Bank sepanjang tahun 2024 telah diungkapkan dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Analysis on the Conflict of Interest Transactions is aimed at ensuring that transactions are carried out in accordance with the arm's-length principle and do not harm the Bank. Details regarding Affiliated Transactions carried out by the Bank throughout 2024 have been disclosed in the Management Discussion and Analysis chapter of this Annual Report.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*)dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Provision of Fund to Related Parties and Provision of Large Fund (Large Exposure) is carried out by referring to POJK No.32/POJK.03/2018, as amended by POJK No.38/POJK.03/2019 concerning LLL and Provision of Large Funds for Commercial Banks, and must not conflict with the Bank's internal credit policies/provisions, as well as must obtain approval from the Board of Commissioners before transactions to provide funds to related parties are realized.

Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terafiliasi dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

The overall portfolio for providing funds to parties affiliated with the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal, serta telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

The Bank has conducted Fund Provisions to Related Parties (individuals or groups, including other related parties) and Large Exposure of Fund (key debtors: individuals or groups) in a reasonable manner with normal pricing policies and terms, and has obtained approval from the Board of Commissioners.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Provision of funds to related parties and key debtors (individuals or groups) as of 31 December 2024 can be seen in the following table:

Penyediaan Dana Provision of Fund	Jumlah Debitur Number of Debtors	Nominal (jutaan rupiah) Nominal (million rupiah)
Kepada Pihak Terkait To Related Party	6	Rp 350,957
Kepada Debitur Inti To Key Debtors	25	Rp 10,369,238
• Individu Individual	13	Rp 4,881,100
• Grup Group	12	Rp 5,488,138

Keterangan:
Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia
Note:
Information regarding provision of funds to Related Parties and Large Exposure of Funds has been disclosed in the Audited Financial Statements and reported to Bank Indonesia

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank dan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember 2024.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has and manages a detailed list of Related Parties and has submitted the list to the Financial Services Authority (OJK) as of the end of June and December 2024.

Bank tidak memiliki kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, maupun peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir

The Bank had no cases of non-compliance with laws, rules or regulations related to significant or material related party transactions over the past three years.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara transparan sebagai salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank memberikan kemudahan kepada seluruh kepentingan dalam mengakses informasi dan data kinerja Bank, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan melalui jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank juga menyebarluaskan informasi ke media cetak dan elektronik termasuk situs web Bank yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki beberapa kanal komunikasi yaitu:
- Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
- *E-mail*: customercare@jtrustbank.co.id
- Situs *web*: www.jtrustbank.co.id
- Layanan Investor Relations Bank melalui halaman *web*: https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Departemen Investor Relations yang menjalankan fungsi untuk membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para

ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk is always committed to carrying out all business processes transparently as part of the Good Corporate Governance principles. The Bank provides stakeholders with easy access to all information and data on the Bank's performance, both financial and non-financial, through communication channels such as press releases and public exposes. The Bank also publishes information in printed and electronic media, including the Bank's website that is available in Indonesian and English.

For further information, the Bank has several communication channels, namely:
- JTrust Call Service: Ask J 1500 615
- E-mail: customercare@jtrustbank.co.id
- Website: www.jtrustbank.co.id
- The Bank's Investor Relations service via webpage: https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has an Investor Relations Department, whose function is to create and maintain good relations and interact with capital market players.

pelaku pasar modal. Dengan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membantu pada investor dalam proses pengambilan keputusan investasi termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi investor terkait strategi, kinerja operasional dan kinerja keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Investor Relations adalah:

a. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya;
b. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan khusus;
d. Menyampaikan laporan berkala maupun insidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan Publik;
e. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
f. Penyelenggaraan Paparan Publik.

Dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, Paparan Publik wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pada tahun 2024, Perseroan melakukan paparan publik sebanyak 2 (dua) kali. Perseroan juga menjalin hubungan strategis dengan pelaku pasar modal dengan senantiasa melakukan *update* kinerja keuangan dan non-keuangan agar meningkatkan kepercayaan di mata *stakeholder*.

Media Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 3 (tiga) akun media sosial yaitu:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram: @jtrustbank
- LinkedIn: J Trust Bank

Seluruh akun tersebut berfungsi sebagai media penyampai informasi aktivitas Bank seperti brand, promo dan pengetahuan produk, dan tips keuangan. Selain itu kedua akun ini juga memberikan respons terhadap pertanyaan masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah.

By providing accurate, timely, and easily accessible information for stakeholders, it is hoped that it can help investors in the process of making investment decisions, including shaping investors' perceptions and expectations regarding the Bank's strategies, operational performance, and financial performance.

Duties and responsibilities of the Investor Relations Department are:

a. Study and understand the development of applicable laws and regulations, as well as monitor compliance with applicable laws and regulations issued by the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, the Indonesian Central Securities Depository, and other related institutions;
b. Disclose information to Regulators and Shareholders, in accordance with applicable regulations;
c. Manage the shareholder register and special ownership register;
d. Submit reports on the Company's compliance as a Public Company, periodically and occasionally;
e. Coordinate the implementation of the General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
f. Organize Public Expose.

As a public company, Public Expose must be conducted at least 1 (once) a year as part of efforts in implementing the principles of impartiality and transparency. In 2024, the Bank held 2 (two) public exposes. The Bank also maintains strategic relations with capital market players by continuously updating financial and non-financial performances in order to increase stakeholders' trust.

Social Media

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has and manages 3 (three) social media accounts, namely:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram: @jtrustbank
- LinkedIn: J Trust Bank

All of these accounts become a medium for conveying information on the Bank's activities, such as brands, promos, product knowledge, and financial tips. In addition, two of these accounts also respond to questions from the public, both customers or non-customers.

Siaran Pers

Membangun hubungan baik dengan media massa melalui berbagai kegiatan merupakan salah satu prioritas utama Bank, mengingat pentingnya peran media massa dalam perjalanan, perkembangan dan capaian dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Press Releases

Building good relations with mass media through various activities is one of the Bank's main priorities, given the important role of mass media in the journey, development, and achievements of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

No	Bulan Month	Judul Title
1	Januari January	J Trust Bank Lanjutkan Perkuat Aspek Lingkungan, Sosial, Ekonomi serta Tata Kelola Perusahaan J Trust Bank Continues to Strengthen Its Environmental, Social, Economic and Corporate Governance Aspects
2		J Trust Bank Buka dan Resmikan Kantor Cabang Ke-46 di Tarakan, Kalimantan Utara J Trust Bank Opens and Inaugurates 46th Branch Office in Tarakan, North Kalimantan
3	Februari February	Tahun 2024, J Trust Bank Optimis Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga Lanjut Positif In 2024, J Trust Bank is Optimistic that Lending and Third Party Funds will Continue Positively
4		J Trust Bank Gourmet Choice 2024: Apresiasi untuk Pelaku Usaha Kuliner J Trust Bank Gourmet Choice 2024: Appreciation for Culinary Businesses
5	Maret March	Dukung Atlet Muda Berbakat, PT Bank JTrust Indonesia Menandatangani Perjanjian Kerjasama Sponsorship untuk Golfer Perempuan Aihi Takano Supporting Young Talented Athletes, PT Bank JTrust Indonesia Signs Sponsorship Agreement for Female Golfer Aihi Takano
6		Dorong Kepemilikan Properti Berkonsep Green Living J Trust Bank Tanda Tangani Kerja Sama dengan The First Stone, Serpong Encouraging Green Living Property Ownership J Trust Bank Signs Cooperation with The First Stone, Serpong
7		Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Perbankan, J Trust Bank Adakan Relokasi Kantor Cabang Pembantu Medan Asia To Improve the Quality of Banking Services, J Trust Bank Relocates Medan Asia Sub-Branch Office
8		J Trust Bank dan Sudin Nakertransgi Salurkan Bantuan Sembako dan Pencegahan Stunting di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu J Trust Bank dan Nakertransgi Sub-Department Distribute Basic Food Aid and Stunting Prevention in Panggang Island, Thousand Islands
9	April April	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara J Trust Bank dan Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia Kabupaten Bogor Signing of Cooperation Agreement between J Trust Bank and Indonesian Taekwondo Branch Management of Bogor Regency
10		J Trust Bank Raih Penghargaan SWA untuk Corporate Secretary Champion 2024 J Trust Bank Receives SWA Award for Corporate Secretary Champion 2024
11		Memaknai Hari Bumi Internasional, J Trust Bank Luncurkan Program Simpanan TORA Green Savings Commemorating International Earth Day, J Trust Bank Launches TORA Green Savings Program
12	Mei May	Kinerja J Trust Bank Kembali Tumbuh Positif di Kuartal I 2024 J Trust Bank's Performance Returns to Positive Growth in the First Quarter of 2024
13		Manjakan Nasabah dengan Ragam Promosi Merchant: J Trust Bank Tanda Tangan Kerja Sama dengan Kushikatsu Daruma Pampering Customers with Various Merchant Promotions: J Trust Bank Signs Partnership with Kushikatsu Daruma
14		J Trust Bank Raih Indonesia Property & Bank Award XVIII J Trust Bank Wins Indonesia Property & Bank Award XVIII
15		Perkuat Komitmen pada Mitigasi Perubahan Iklim, J Trust Bank Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pulau Harapan Kepulauan Seribu Strengthening Commitment to Climate Change Mitigation, J Trust Bank Plants 1,000 Mangrove Seedlings on Harapan Island, Thousand Islands
16	Juni June	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara J Trust Bank dan Kagawa Bank Signing of Cooperation Agreement Between J Trust Bank and Kagawa Bank
17		J Trust Bank Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan J Trust Bank Holds Annual General Meeting of Shareholders
18		Badan Bank Tanah Menandatangani Nota Kesepahaman dengan J Trust Bank dan J Trust Consulting Indonesia Badan Bank Tanah Signs Memorandum of Understanding with J Trust Bank and J Trust Consulting Indonesia

No	Bulan Month	Judul Title
19	Juli July	J Trust Bank Resmi Gunakan Bitera untuk Data Center J Trust Bank Officially Use Bitera for Data Center
20		J Trust Bank Siap Berperan Aktif Mendukung Ekonomi Biru Menuju Indonesia Berkelanjutan J Trust Bank Ready to Play An Active Role in Supporting Blue Economy Towards Sustainable Indonesia
21		Perkuat Pilar Sosial, J Trust Bank Jalankan Serangkaian Kegiatan CSR Selama Bulan Juni 2024 Strengthening Social Pillar, J Trust Bank Runs Series of CSR Activities During June 2024
22		Kinerja Melaju Positif, J Trust Bank Apresiasi Nasabah Melalui J Trust Bank Golf Tournament Positive Performance, J Trust Bank Appreciates Customers Through J Trust Bank Golf Tournament
23		J Trust Bank Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartment untuk Proyek The BRANZ Mega Kuningan Jakarta J Trust Bank Signed Cooperation Agreement to Provide Apartment Ownership Credit Facility for the BRANZ Mega Kuningan Jakarta Project
24		Kinerja J Trust Bank Kuartal II 2024: Bisnis Melaju Positif Disertai Peningkatan Kapasitas Digital Perbankan dan Komitmen ESG J Trust Bank Second Quarter 2024 Performance: Positive Business Growth Accompanied by Enhanced Digital Banking Capacity and ESG Commitment
25		J Trust Bank Dukung Persija Memasuki Musim Baru J Trust Bank Supports Persija Entering the New Season
26	Agustus August	J Trust Bank Raih Penghargaan "Indonesia Best Bank 2024" J Trust Bank Receives "Indonesia Best Bank 2024" Award
27		J Trust Bank Resmi Gunakan Bitera untuk Data Center J Trust Bank Officially Use Bitera for Data Center
28	September September	J Trust Bank Rayakan Akulturasi Budaya Jepang dan Indonesia di Bon Odori & Yosakoi Matsuri 2024 J Trust Bank Celebrates Japanese and Indonesian Cultural Acculturation at Bon Odori & Yosakoi Matsuri 2024
29		J Trust Bank Raih Penghargaan "Green Saving Program of the Year" di Marketeers Editor's Choice Award 2024 J Trust Bank Wins "Green Saving Program of the Year" Award at Marketeers Editor's Choice Award 2024
30	Oktober October	Dukung Persija, J Trust Bank Luncurkan Kartu Debit Co-Branding "TORA PERSIJA" untuk Jakmania Supporting Persija, J Trust Bank Launches Co-Branding Debit Card "TORA PERSIJA" for Jakmania
31		Dukung Pendidikan Vokasi, J Trust Bank Berikan Bantuan Pendidikan Kepada SMK Mitra Industri MM2100 Supporting Vocational Education, J Trust Bank Provides Educational Assistance to SMK Mitra Industri MM2100
32		Gelar Paparan Publik Insidentil, J Trust Bank dalam Kondisi Fundamental yang Kuat Holds Incidental Public Expose, J Trust Bank in Strong Fundamental Condition
33		J Trust Bank Mampu Melanjutkan Kinerja Positif di Kuartal III 2024 J Trust Bank Able to Continue Positive Performance in the Third Quarter of 2024
34	November November	J Trust Bank Lawan Krisis Iklim Melalui Penanaman 3.000 Mangrove J Trust Bank Fights Climate Crisis Through Planting 2,000 Mangroves
35		Pemberitahuan Penyertaan Modal J Trust Bank oleh Kagawa Bank Notice of Capital Participation of J Trust Bank by Kagawa Bank
36	Desember December	J Trust Bank Serahkan Hadiah Mobil kepada Nasabah Program Tabungan Berhadiah Suka-Suka J Trust Bank Serahkan Hadiah Mobil kepada Nasabah Program Tabungan Berhadiah Suka-Suka
37		Gelar Paparan Publik Tahunan, J Trust Bank dalam Kondisi Fundamental yang Kuat Holds Annual Public Expose, J Trust Bank is in Strong Fundamental Condition
38		J Trust Bank Buka dan Resmikan Kantor Cabang Ke-47 di Kuta Bali J Trust Bank Opens and Inaugurates 47th Branch Office in Kuta Bali
39		Terus Tingkatkan Komitmen Penerapan ESG Perusahaan: J Trust Bank Luncurkan Program TORA Blue Ocean Savings Continue to Improve the Company's ESG Implementation Commitment: J Trust Bank Launches TORA Blue Ocean Savings Program

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG, JASA DAN ALIH DAYA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan dan prosedur Pengadaan Barang Jasa dan Alih Daya yang telah diperbarui pada tahun 2024. Kebijakan tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang, jasa dan/atau alih daya yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank, dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

a. Mengatur hal–hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat/Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu.
b. Berlaku untuk proses Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain Jasa Konsultan (Bidang Hukum, Audit, Perekrutan Karyawan, IT, Renovasi Gedung, Barang Promosi, dan Jasa lainnya).
c. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (*core business*) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
d. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, seperti pekerjaan penunjang pada kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, meliputi:

i. melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik;
ii. menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.

POLICY ON PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES AND OUTSOURCING

PT Bank JTrust Indonesia Tbk establishes and implements policies and procedures for Procurement of Goods, Services, and Outsourcing, which have been updated in 2024. This policy becomes the main reference for all procurement of goods, services and/ or outsourcing activities carried out by the Bank's work units. The scope of the policy is as follows:

a. Regulate matters that must be carried out by all Work Units at the Head Office/Branch Offices/Sub-branch Offices.
b. Applicable for the Procurement of Goods, Services & Outsourcing that use investment budget allocations from the work unit. Procurement of services includes, among others, Consulting Services (Legal, Audit, Employee Recruitment, IT, Building Renovations, Promotional Items, and other Services).
c. Help the Company focus on core business by handing over several works to other parties, so the Bank's resources can be utilized for core businesses.
d. Delegate several works to other parties, such as supporting works in business activities and supporting business operations.

Delegating several works to other parties could potentially increase risks faced by the Bank, including operational risk, compliance risk, legal risk and reputation risk. Thus, the handover must be carried out by implementing the prudence principles and adequate risk management, such as:

i. Conduct proper analysis and assessment of Service Provider Companies (PPJ) to make sure that the selected company has good financial performance, reputation, human resources, facilities, and infrastructure, as well as many experiences so that the Outsourcing can do their works accordingly;
ii. Formulate Outsourcing agreement with PPJ based on the minimum scope of agreement required in the POJK on Outsourcing, in order to ensure that the quality and procedures for doing the outsourced work are in accordance with aspects and standards stipulated in the agreement.

iii. menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
iv. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
v. melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Alih Daya kepada PPJ.

iii. Carry out effective risk management in Outsourcing, including conducting supervision of the work done by PPJ periodically and taking early and effective corrective measures on identified problems, so the work continues to run smoothly and customers' interests are protected.
iv. Comply with applicable laws and regulations.
v. Strive to protect customers' rights and interests since the use of Outsourcing does not eliminate the Bank's responsibility in providing protection for customers' rights and interests for the works carried out by Outsourcing to PPJ.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang, Jasa Dan Alih Daya

1. Transparan
   Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa dan alih daya, termasuk syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka
2. Akuntabel
   Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang jasa dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan
3. Bertanggung jawab
   Proses pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku
4. Independen
   Keputusan pengadaan barang jasa dan alih daya diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan
5. Adil dan Tidak Diskriminatif:
   Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
6. Efektif
   Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank

Basic Principles of Procurement of Goods, Services, and Outsourcing

1. Transparent
   All provisions and information regarding the procurement of goods, services and outsourcing, including technical and administrative requirements, evaluation procedures, evaluation results, and determination of prospective Service Provider Companies (PPJ) can be accessed.
2. Accountable
   The processes, results, and payments for the procurement of goods, services and outsourcing must be accountable.
3. Responsible
   The procurement process of goods, services, and outsourcing are carried out based on prudence principles and in accordance with applicable regulations.
4. Independent
   Decisions on procurement of goods, services, and outsourcing are made objectively and free from any pressures or conflicts of interest.
5. Fair and Non-Discriminatory
   Provide equal treatment for all Service Provider Companies (PPJ) and do not intentionally benefit certain parties in any way and/or reason.
6. Effective
   Procurement of goods, services, and outsourcing must be in accordance with the initial needs or plans and provide maximum benefits for the Bank.

7. Efisien
   Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik yang senantiasa berlandaskan pada 4 Values – J Trust Bank:
   a. *Super Integrity*
   b. *Customer First*
   c. *Discipline and Responsible*
   d. *Learning and Trying More*

Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa

1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/Firma).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan Financial Report/Financial Highlight perusahaan.
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara Web ataupun dilakukannya *benchmarking*.
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:
   a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan uang secara pribadi kepada Pelanggan/Vendor Bank;
   b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
   c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.
6. Perusahaan Alih Daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Dilakukan melalui Metode Penunjukkan Langsung yaitu, masing- masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.

7. Efficient
   Procurement of goods, services, and outsourcing is carried out to achieve certain quality and must be in line with the agreed time and at the best price, which is based on the 4 Values of J Trust Bank:
   a. Super Integrity
   b. Customer First
   c. Discipline and Responsible
   d. Learning and Trying More

Criteria for Service Provider Company

1. Must have a clear legal entity (Limited Liability Company/Limited Partnership /Firm).
2. The company must have a clear location, its presence can be traced, and it has adequate employees.
3. Can provide Financial Report/Financial Highlights.
4. Have a good reputation after web browsing or benchmarking.
5. To avoid actual or potential conflicts of interest, members of the Bank (Commissioners, Independent Parties, Directors, and Employees) must comply with the following prohibitions:
   a. A member of the Bank or their family must not personally borrow or lend money to the Bank's Customers/Vendors;
   b. A member of the Bank or their family is prohibited from accepting gifts or entertainment offered by third parties; and
   c. A member of the Bank or their family is prohibited from being involved in the procurement of goods and services for their personal interests.
6. The Outsourcing company has been established for at least 2 (two) years.
7. Has adequate facilities and infrastructure for Outsourcing.

Procurement Methods of Goods and Services

1. Procurement of Goods and Services
   a. Carried out through Direct Appointment Method where each appointment is done via a selection and negotiation process on price offers from at least 3 (three) vendors.

b. Dilakukan melalui Metode Penunjukkan Tidak Langsung/Pemilihan/Tender.

Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.

2. Alih Daya
   a. Pemborongan pekerjaan. Alih Daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan.
   b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.
   c. Kriteria Pekerjaan yang dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok, baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.
   d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
      - Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
      - Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
      - Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

Cakupan Minimum Perjanjian Alih Daya

Untuk memastikan hasil dari Perusahaan Penyedia Jasa, maka perlu dilakukan standarisasi perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan mencantumkan butir-butir sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Jangka waktu perjanjian
3. Nilai kontrak
4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa.

b. Carried out through the Indirect Appointment/ Selection/Tender Method.

Vendors must be evaluated once a year or at the end of a contract to find out results of the vendor's performance assessment.

2. Outsourcing
   a. Chartering a job. Outsourcing is carried out under a work agreement between the Bank and the Service Provider Company to do certain contract works by emphasizing more on the standard results of the contract works.
   b. Provision of labor services (PJTK) is carried out under a work agreement between the Bank and the Service Provider Company to provide workers with certain qualifications in order to do particular jobs.
   c. The criteria for Outsourced Work are those that are of a supporting nature, not main activities, whether the jobs are within the Bank's business activities or within activities that support the Bank's business.
   d. The criteria in determining whether a job can be outsourced are as follows:
      - Low risk, which means a failure in doing the job will not significantly disrupt the Bank's operational activities.
      - Does not require high competency in the banking sector. The job does not need high qualifications in formal education, knowledge, or experience in the banking sector.
      - Is not directly related to the decision-making process that can affect the Bank's operations, which means the job does not involve analysis, consideration, and/or decision-making that can affect the Bank's operations.

Minimum Scope of Outsourcing Agreement

To ensure results from the Service Provider Company, there must be a standardized agreement with the Service Provider Company that includes the following points:

1. Scope of work
2. The agreement periods
3. Contract value
4. Fee structure and payment mechanism
5. Rights, obligations, and responsibilities of the Bank and the Service Provider Company.

INFORMASI TENTANG KODE ETIK EMITEN/ PERUSAHAAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti pembaharuan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank menetapkan stándar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Anggota Bank yaitu:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Karyawan Tetap dan atau Kontrak

Pedoman ini wajib dijalankan dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama Anggota Bank.

a. Hal-Hal Pokok yang Diatur dalam Etika Korporasi

1. Kerahasiaan
2. Konflik kepentingan
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Perilaku pihak internal
5. Akurasi data
6. Integritas sistem perbankan
7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
8. Supervisi dan administrasi

b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya

Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, di mana seluruh karyawan diharapkan memahami informasi dan konsekuensinya.

c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten

Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

INFORMATION ON THE CODE OF ETHICS OF ISSUERS/PUBLIC COMPANIES

To improve the Bank's performance and compliance with applicable laws and regulations, as well as to monitor updates and implement Good Corporate Governance, the Bank establishes ethical and behavioral standards that must be used as guidelines by all members of the Bank, namely:

- The Board of Commissioners
- The Board of Directors
- Permanent and/or Contract Employees

These guidelines must be implemented in managing business relations with customers, partners, and co-workers. Compliance with the Code of Ethics and Business Conduct is expected to prevent the impartial relations with customers, partners, or between fellow Members of the Bank.

a. Main Things Regulated in Corporate Ethics

1. Confidentiality
2. Conflict of interest
3. Abuse of authority
4. Behavior of internal parties
5. Data accuracy
6. Banking system integrity
7. Sanctions for violation/non-compliance
8. Supervision and administration

b. Dissemination of the code of ethics and its enforcement

The Bank holds dissemination of the book on Corporate Ethics for all employees, especially when they first join PT Bank JTrust Indonesia Tbk. All employees are expected to understand the information and its consequences.

c. A statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer

The statement is made by filling out the annual disclosure 1 (once) a year. Members of the Bank must understand and acknowledge that all information related to the Bank and customers is confidential, as stated in the Bank secrecy Act and other regulations. Members of the Bank are required to maintain the confidentiality of such information.

d. Dalam pelaksanaannya, seluruh Anggota Bank diwajibkan:

1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikatkan diri untuk melaksanakan:
   - Kode Etik Bankir Indonesia
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk
   - Semua peraturan yang berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada maupun peraturan yang akan ada dikemudian hari
   - Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhuungan dengan kegiatan perbankan
2. Membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

e. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

1. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya
2. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

d. In the implementation, all Members of the Bank are required to:

1. Make a Statement that binds themselves to carry out:
   - The Indonesian Banker Code of Ethics
   - Code of Ethics and Business Conduct of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
   - All applicable regulations at PT Bank JTrust Indonesia Tbk, both existing and future regulations
   - All applicable laws and regulations, whether they generally apply or are related to banking activities.
2. Create an Annual Disclosure, which contains all circumstances or situations that may cause violations /non-compliance with the Code of Ethics and Business Conduct.

e. Sanctions on Violation/Non-Compliance

1. Any violations of the Code of Ethics and Business Conduct will be subject to sanctions according to the level of violation
2. All conflicts of interest or violations must be reported and handled according to the provisions outlined in the Code of Ethics and Business Conduct.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/ CSR). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2024, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, yang fokus membantu masyarakat dalam bidang ekonomi-kreatif, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan lingkungan hidup .

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" dan Laporan Keberlanjutan tahun 2024 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2024.

DONATION FOR SOCIAL ACTIVITIES

PT Bank JTrust Indonesia Tbk donates for social activities through Corporate Social Responsibility (CSR) programs. The Bank's CSR programs and activities are targeted to create a better and empowered community that are resilient in facing various changes in life. These programs and activities will ultimately create a mutual and beneficial relation between PT Bank JTrust Indonesia Tbk and the wider community.

In 2024, PT Bank JTrust Indonesia Tbk allocated some of its operational budget to develop and empower the community and environment by creating programs that focus on helping the community in creative economy, education, health, social, religion, and environment.

Detailed explanations related to the Bank's social responsibility are presented in a special section on "Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility" and the 2024 Sustainability Report, which is an integral part of the 2024 Integrated Annual Report.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik selama tahun 2024.

DONATION FOR POLITICAL ACTIVITIES

As in previous years, PT Bank JTrust Indonesia Tbk never engages in political activities or give financial contributions for political activities in 2024.

No	Nama Kegiatan Politik Political Activities	Jumlah Amount (Rp)
NIHIL | NONE		

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para stakeholders melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TRANSPARENCY OF THE BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS THAT HAVE NOT BEEN DISCLOSED IN OTHER REPORTS

As a public company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has provided clear and transparent/disclosure regarding its financial and non-financial conditions to stakeholders through Publication of Annual Financial Report, Quarterly Financial Reports, and other reports that are submitted to regulators, such as Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the Indonesia Stock Exchange (IDX), as well as other stakeholders, in accordance with applicable regulations.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan dan Triwulanan (periode Juni dan Desember) disampaikan pada media yang mudah diakses yaitu melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id.

Di samping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan. Laporan Tahunan diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut.

Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi ini minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya

Transparency of Financial Condition

The Annual and Quarterly Financial Reports (for the period of June and December) are published in easily accessible media, such as the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the Bank's website www.jtrustbank.co.id.

In addition to publishing Financial Reports, PT Bank JTrust Indonesia Tbk also prepares and submits a publication in the form of Annual Report. The Annual Report is expected to be able to provide transparency of the Bank's overall condition, including ownership, management, operational activities, business development, and the Bank's performance, to the general public in order to maintain public trust in the Bank.

The Annual Report contains a wide range of information, including Overview of the Company, Annual Financial Report, Opinions from a Public Accounting Firm (KAP), transparency related to Business Group, transparency of staff reports, transparency of financial statements based on provisions in financial accounting standards (PSAK), Risk Exposure and Management, as well as other information related to the Bank's Operation.

The Overview includes: Management Structure, Details on Share Ownership, the Bank's business development, the management's goals, strategies, and policies, organizational structure, core business, Information Technology, office network, other important things that are expected to occur in the future, as well as the number and HR structure. Meanwhile, the Annual Financial Report is a financial report at the end of the year, which has been audited by a Public Accounting Firm (KAP) with its opinion.

Transparency of Non-Financial Condition

Transparency must also be applied to information regarding the Bank's products or products from other financial institutions, such bancassurance that is sold through the Bank, so customers receive clear information about the benefits, risks, and costs inherent to these products.

This transparency can be in the form of information in Indonesian, which is delivered to customers in a complete and clear manner regarding product characteristics, both verbally and in writing. This information must at least include product name, product type, inherent benefits and risks, procedures

produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk.

Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk yang disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat diketahui dengan mendatangi kantor cabang terdekat, mengakses website www.jtrustbank.co.id atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615 dan Customer Care melalui e-mail customercare@jtrustbank.co.id.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank harus transparan dan merupakan data terkini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi Bank dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 5 (lima) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 10 (sepuluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit kerja dengan fungsi di bidang pengaduan nasabah yang berada di Kantor Pusat Bank. Unit kerja ini bertugas menyelesaikan pengaduan nasabah yang masuk melalui Contact Center di ASK J 1500615, Kantor Cabang/Cabang Pembantu, Customer Care di e-mail customercare@jtrustbank.co.id, Media Sosial, dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK.

for using the product, product costs, calculation of interest or profit sharing and profit margin, product validity period, and issuer of the Bank's products, including whether there is a product guarantee or not.

If there is a change in product characteristics, the Bank immediately notifies the customer. Information about products is conveyed clearly, correctly, and honestly using media that is easy to read and accessible to customers.

Information about products offered to customers and non-customers can be found by visiting the nearest branch office, accessing the Bank's website at www.jtrustbank.co.id or directly contact the J Trust Bank Call Center at
J Trust Call at 1500615 and Customer Care at customercare@jtrustbank.co.id.

The Bank also continuously updates customer data, so personal information provided by customers to the Bank are not only transparent, but also up to date. The objective is to increase protection of customers' personal rights that are related to the Bank and minimize other risks caused by incorrect or inaccurate customer data. The Bank must also obtain written approval from a customer if the Bank will provide and/or disseminate the customer's personal data to other parties for commercial purposes, unless stated otherwise by other applicable laws and regulations.

Transparency must also be implemented in the settlement of customer complaints, which is one form of increasing customer protection so that customer rights in transactions with the Bank are always guaranteed. Customer complaints must be followed up immediately so as not to reduce the Bank's reputation and public confidence in banking institutions. The Bank has 5 (five) working days to resolve oral complaints and 10 (ten) working days to resolve written complaints.

The Bank has a working unit with functions in the field of customer complaints located at the Bank's Head Office. This work unit is tasked with resolving customer complaints that come in through the Contact Center at ASK J 1500615, Branch Offices/Sub-Branch Offices, Customer Care at e-mail customercare@jtrustbank.co.id, Social Media, and OJK Consumer Protection Portal Application (APPK).

Staff unit kerja Customer Care akan mencatat detail pengaduan nasabah untuk kemudian dilakukan eskalasi ke unit kerja bersangkutan untuk diselesaikan, melalui sistem aplikasi Ticketing Pengaduan Nasabah secara *online*, yaitu: JTrust Help Desk.

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat khususnya nasabah. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

Staff of the Customer Care work unit will record details of customer complaints and deliver them to related work units to be resolved through the online Customer Complaint Ticketing application system, namely: JTrust Help Desk.

The Bank is required to publish the presence of this unit to the public, especially customers. The handling and settlement of these complaints are reported quarterly and annually to the Financial Services Authority (OJK) through the website of Information System for Reporting on Customer Education and Protection (SIPEDULI).

For other stakeholders, such as shareholders and regulators, the J Trust Bank website has also provided various information on other non-financial conditions, including Good Corporate Governance (GCG) Reports, Shareholders Structure, the Company's Activities through Press Releases, Award Acceptance, etc.

PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Pembelian kembali (*Buyback*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2024 tidak ada pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

THE BANK'S SHARE AND/OR BOND BUYBACK

The Bank's shares or bonds buyback is an effort to reduce the number of shares/bonds that have been issued by the Bank by buying back the shares or bonds through payment procedures based on applicable regulations.

Throughout 2024, there was no buy back of shares or bonds by PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Kebijakan Dividen

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Bank, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Bank untuk ekspansi usaha lebih lanjut tanpa mengurangi hak dari RUPS Bank untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPT disebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif dan Pasal 22 Anggaran Dasar Bank disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Bank berdasarkan keputusan

Dividend Policy

Determination of the dividend amount and payment can be carried out by observing and considering several factors, including the soundness level of the Bank's financial, the level of capital adequacy, and the Bank's needs for funds to further expand business, without prejudice to the rights of the Company's GMS to determine otherwise, in accordance with provisions of the Bank's Articles of Association.

Provisions of Article 71 paragraph 3 concerning Limited Liability Company states that dividends may only be distributed if the Bank has a positive profit and Article 22 of the Bank's Articles of Association states that dividends can only be paid in accordance with the Bank's financial capacity based on the GMS resolutions.

yang diambil dalam RUPS. Sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Bank, kebijakan dividen Bank adalah bisa dipertimbangkan untuk membagikan dividen apabila memiliki saldo laba yang positif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bank.

To comply with the law and the Company's Articles of Association, the Bank's dividend policy is to consider distributing dividends if it has a positive profit balance by taking into account the Bank's financial capacity.

Saldo Rugi Bank terdiri dari saldo rugi yang sudah ditentukan penggunaannya, dan yang belum ditentukan penggunaannya.

The Bank's Loss Balance consists of appropriated and unappropriated loss balances.

- Tidak terdapat perubahan saldo rugi yang ditentukan penggunaannya pada tahun 2024. Nilainya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1 miliar.
- Pada akhir tahun 2024, saldo rugi yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp12.317.501 miliar, mengalami penurunan 0,02% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp12.320,33 miliar.

- There is no change in the balance of loss carried forward in 2024. Its value as of December 31, 2024 and December 31, 2023 amounted to Rp1 billion.
- At the end of 2024, the balance of unappropriated losses amounted to Rp12,317,501 billion, a decrease of 0.02% compared to Rp12,320.33 billion in 2023.

Kebijakan Pengungkapan Informasi/Larangan Transaksi oleh Orang Dalam/(Termasuk Insider Trading)

Policy on Disclosure of Information/Prohibition of Insider Transactions/(Including Insider Trading)

Bank memiliki Kebijakan Larangan Transaksi Oleh Orang Dalam yang telah diperbaharui pada April 2024 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The Bank has a Prohibiting Transactions by Insiders Policy, which was renewed in April 2024 based on OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares, as has been amended by POJK No. 4 of 2024 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares and Public Company Share Guarantee Activity Report, OJK Regulation No. 78/POJK.04/2017 concerning Securities Transactions that are Not Prohibited for Insiders, OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter no. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

Kebijakan tersebut disusun guna memastikan bahwa orang dalam Bank tidak mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari Informasi yang tidak dan/atau belum tersedia di pasar. Kebijakan ini berlaku juga sebagai panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Bank.

This policy was formulated to ensure that the Bank's internal do not gain benefits directly or indirectly from information that is not and/or not yet available on the market. This policy also applies as a basic guide in carrying out business activities, including for the personal interests of each member of the Board of Commissioners, Directors and the Bank's Employees.

Bank memberlakukan periode larangan atau *Blackout* transaksi Efek Bank di mana Orang Dalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank selama jangka waktu di bawah ini:

The Bank enacts a prohibition or a Blackout period on its securities transaction where Insiders are not allowed to conduct the Bank's securities transactions during the following period:

a. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan.
b. 30 (tiga puluh) hari sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan tahunan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah publikasi laporan keuangan tersebut.
c. Periode lainnya yang ditentukan Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi mengenai tindakan korporasi yang dilakukan Bank.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Divisi Corporate Secretary paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank untuk kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan transparansi Bank dapat ditingkatkan dan praktik transaksi oleh orang dalam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat dicegah.

Tidak terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan Direksi/Dewan Komisaris, Manajemen, dan Karyawan Bank dalam tiga tahun terakhir.

PELINDUNGAN KONSUMEN

Bank memiliki nilai–nilai perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah yang tercermin dalam *Corporate Value*, yaitu *Customer First*. Bank juga memiliki Kebijakan Perlindungan Konsumen, Kebijakan Kode Etik Pelindungan Konsumen dan SOP Customer Protection sebagai upaya untuk melengkapi nasabah dengan informasi mengenai pelayanan dan pengaduan terkait produk dan layanan Bank.

Bank memiliki Departemen Pelindungan Konsumen yang berfungsi :
1. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan.
2. Berkoordinasi dengan divisi/department untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan.

a. 10 (ten) working days before the Bank submits monthly and quarterly financial statements.
b. 30 (thirty) days before the Bank submits an annual financial statement up to 2 (two) working days after the publication of the financial statements.
c. Other periods that are determined by the Board of Directors any time in connection with information disclosure regarding the Bank's corporate actions.

Members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners are required to notify the Corporate Secretary Division no later than 3 (three) working days after having ownership or changing their ownership of the Bank's shares, which then must be reported to the Financial Services Authority no later than 10 (ten) days after the transaction.

The implementation of these policies is expected to improve the Bank's transparency and prevent insider transactions, which aim to gain personal benefits, from happening.

There was no insider trading involving the Board of Directors/Board of Commissioners, Management and the Bank's Employees over the past three years.

CONSUMER PROTECTION

The Bank's corporate values are aimed at protecting customer interests, which are reflected in the Corporate Value, namely Customer First. The Bank also established a Consumer Protection Policy, Code of ethics of Consumer Protection Policy and Standard Operating Procedure on Consumer Protection as an effort to provide customers with information about assistance and complaints related to the Bank's products and services.

The Bank has a Consumer Protection Department with the following functions:
1. Coordinating the Bank's planning process and compliance with provisions regarding Consumer and Community Protection in the financial services sector.
2. Coordinating with a related division/department for monitoring and evaluation of the Bank's compliance with provisions regarding Consumer and Community Protection in the financial services sector.

3. Melaporkan kepada Direksi dan Divisi terkait secara bulanan mengenai implementasi dan aktivitas Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
4. Melaporkan Laporan *Self Assesment* terkait Pelindungan Konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahun maksimal dilaporkan pada 30 September.

Departemen Pelindungan Konsumen mendukung dan memastikan terlaksananya penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Edukasi yang memadai yaitu memberikan pemahaman yang baik kepada nasabah mengenai manfaat produk dan/atau layanan, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan Bank pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan.

2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan yaitu memberikan informasi yang jelas, tidak menyesatkan dan akurat mengenai Produk/ Layanan Bank kepada nasabah.

3. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen yaitu melakukan perlindungan atas data-data, aset dan privasi nasabah.

4. Menangani pengaduan dari nasabah dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

5. Penegakan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pelindungan Konsumen.

6. Persaingan produk dan program Bank yang sehat dan kompetitif dengan Bank lainnya, dengan memberikan produk yang kompetitif untuk nasabah.

Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai Penerapan Perlindungan Konsumen. Kebijakan tersebut mencakup antara lain:
1. Bank menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
2. Bank wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan, tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK.

3. Giving monthly reports to the Board of Directors and related Divisions regarding the implementation and activities of Consumer and Community Protection, as well as providing recommendations for improvements and development of Consumer and Community Protection.
4. Submit an annual Self Assessment Report related to Consumer Protection to the Financial Services Authority (OJK), no later than September 30 each year.

Consumer Protection Department supports and ensures the implementation of Consumer Protection Principles, including:

1. Adequate education, which means providing customers with a clear understanding of products and/or services benefits, costs and risks, as well as the Bank's procedures and protection mechanisms during the marketing process to resolving complaints.

2. Information disclosure and transparency, such as providing clear, non-misleading and accurate information regarding the Bank's Products/Services to customers.

3. Protection of consumer assets, privacy and data, such as safeguarding customer data, assets, and privacy.

4. Handle complaints from customers and resolve the disputes effectively and efficiently.

5. Enforcing the Bank's compliance with the regulatory provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) regarding Consumer Protection.
6. Healthy and competitive competition for the Bank's products and programs with other banks, by offering competitive products for customers.

The Bank has written policy and procedures of the Implementation of Consumer Protection. The policy include:
1. The Bank provides and/or delivers accurate, honest, clear, and non-misleading information regarding its products and or services.
2. The Bank is required to periodically report complaints, follow-up actions, and settlement of consumer complaints to OJK.

3. Bank wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan berdasarkan ketentuan berikut:
   - Pengaduan Lisan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan
   - Pengaduan Tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa.

Selain memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai Penerapan Perlindungan Konsumen, Bank juga memiliki Kebijakan Kode Etik terkait Pelindungan Konsumen yang mencakup:

1. Pemberian pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan Bank yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
2. Pemberian kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.

CONTACT CENTER

Untuk peningkatan layanan kepada Nasabah dan calon Nasabah, di tahun 2024 Contact Center J Trust Bank melakukan penambahan akses layanan menjadi Omnichannel. Layanan Omnichannel meliputi *Call Center*, *Customer Care*, *Whatsapp* dan *Social Media* (Instagram, Facebook dan Tiktok).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Call Center yang merupakan unit kerja dari *Contact Center Department* J Trust Bank mengacu pada prosedur standar yang telah diperbarui pada bulan Juni 2024, untuk melakukan hal-hal berikut ini di antaranya:

A. CALL CENTER :

1. Menerima telepon dari nasabah/non nasabah yang direkam dalam *Voice Recorder* pada System *Contact Center* sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.

2. Menyampaikan informasi kepada nasabah/non-nasabah melalui telepon, dengan benar dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan nasabah/non nasabah.
3. Berkewajiban untuk selalu melakukan proses identifikasi nasabah khususnya untuk layanan permintaan blokir kartu ATM, informasi saldo,

3. The Bank is required to follow up and resolve complaints based on the following provisions:
   - Verbal Complaint, no later than 5 (five) working days after the Bank receives the complaint
   - Written Complaint, no later than 10 (ten) working days after the Bank receives the complaint
4. Settlement of consumer complaints by OJK can be carried out on complaints that could lead to disputes.

Apart from having Written Policies and Procedures regarding the Implementation of Consumer Protection, the Bank also has a Code of Ethics Policy regarding Consumer Protection, which includes:

1. Providing knowledge and understanding of the Bank's products and/or services that will be used or benefited by consumers and/or the public.

2. Providing legal certainty to protect consumers in fulfilling their rights and obligations in the financial services sector.

CONTACT CENTER

To improve services for customers and potential customers, J Trust Bank Contact Center expanded service access to an Omnichannel platform in 2024. The omnichannel services include Call Center, Customer Care, WhatsApp and Social Media (Instagram, Facebook dan Tiktok).

In carrying out its duties and responsibilities, the Call Center, which is a work unit of the Contact Center Department at J Trust Bank, refers to standard procedures updated in June 2024, including the following:

A. CALL CENTER :

1. Receive telephone calls, from customers/non-customers, which are recorded in the Voice Recorder on the Contact Center System, in accordance with the scope of J Trust Bank services.
2. Deliver information to customers/non-customers via telephone correctly and accurately in accordance with applicable regulations and questions asked by customers/non-customers.

3. Must always carry out customer identification processes, especially for requests such as ATM card blocking, balance inquiries, mutations,

mutasi, transaksi, informasi valas, informasi produk, Layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* perorangan maupun Perusahaan sebelum menjawab pertanyaan nasabah.

4. Menerima keluhan nasabah terkait dengan transaksi di J Trust Bank dan memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
5. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
6. Melakukan eskalasi kepada divisi terkait pertanyaan dan pengaduan yang memerlukan penjelasan khusus dari divisi terkait.
7. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

B. CUSTOMER CARE & SOCIAL MEDIA

Customer Care & Social Media merupakan unit kerja dibawah Contact Center Department, yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Menerima email, *direct message*, komentar dan *Google review* dari nasabah/non-nasabah melalui email *customer care* dan media sosial sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
2. Menyampaikan informasi kepada nasabah/non-nasabah melalui email *direct message*, komentar dan review dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan oleh nasabah/non-nasabah.
3. Mengelola pengiriman *Email Blast* Birthday Greeting dari internal unit kerja *Customer Care*.
4. Menerima pengaduan/keluhan nasabah melalui email, *direct message*, komentar dan review terkait dengan transaksi dan layanan di J Trust Bank dan memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
5. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
6. Menindaklanjuti pengaduan nasabah yang diteruskan oleh Head Office & Branch Division (HOBD) khususnya Contact Center Department paling lambat wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian untuk pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari dan pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan.

transaction history, foreign exchange information, product information, as well as Internet Banking and Mobile Banking services for both individuals and companies, before responding to customer's inquiries.

4. Receive customer complaints related to transactions at J Trust Bank and provide solutions in accordance with their authority and applicable regulations.
5. Make documentation of customer complaints, including settlements that have been made.
6. Escalate complaints and questions that require specific explanations to the relevant division.
7. Resolve customer complaints in accordance with BI/OJK regulations.

B. CUSTOMER CARE & SOCIAL MEDIA

Customer Care & Social Media is a work unit under the Contact Center Department, which has the following duties and responsibilities:

1. Receive emails, direct messages, comments and Google review from customers/non-customers through customer care email and social media in line with the scope of services offered by J Trust Bank.
2. Deliver information to customers/non-customers via emails, direct messages, comments & review correctly, in accordance with applicable regulations and questions raised by customers/non-customers.
3. Manage the delivery of Birthday Greeting Email Blasts from the internal Customer Care work unit.
4. Receive customer objections/complaints via email, direct message, comments & review that are related to transactions and services at J Trust Bank and provide solutions in accordance with their authority and applicable regulations.
5. Make documentation of customer complaints, including settlements that have been made.
6. Follow up on customer complaints forwarded by the Head Office & Branch Division (HOBD), especially the Contact Center Department. It is mandatory to follow up and settle verbal complaints no later than 5 (five) working days and written complaints no later than 10 (ten) working days since documents related to the complaint are received.

7. Melakukan *monitoring* atas pengaduan Nasabah yang masuk melalui dan diproses dari *Call Center*, *Customer Care* & *Social Media*, Kantor Cabang, Internal Divisi, Media Massa (cetak dan elektronik), *Channel Social Media* J Trust Bank dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK OJK).
8. Memberikan jawaban atas pertanyaan/keluhan nasabah/non nasabah melalui email, *direct message*, komentar dan review Google dengan berpedoman pada sistem, operasi, dan prosedur yang berlaku (selanjutnya disebut SOP).
9. Melakukan eskalasi pengaduan nasabah dan permintaan kepada divisi terkait pertanyaan yang memerlukan penjelasan khusus dari divisi terkait.
10. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

C. CUSTOMER EXPERIENCE

Customer Experience merupakan unit kerja dibawah Contact Center Department, yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Menghubungi nasabah melalui telepon sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
2. Menyampaikan informasi layanan, *reminder* rekening tidak aktif/*dormant account*, program dan produk Bank kepada nasabah melalui telepon dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan oleh nasabah.
3. Menerima pengaduan/keluhan nasabah melalui telepon terkait dengan transaksi dan layanan di J Trust Bank dari hasil *outbound call*/*outgoing call* dan memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan eskalasi pengaduan nasabah yang diterima oleh *Customer Experience Staff* ke unit kerja *Customer Care* paling lambat penyelesaian untuk Pengaduan secara Lisan paling lama 5 (lima) hari dan Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan.
5. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
6. Memberikan jawaban atas pertanyaan/ pengaduan/permintaan nasabah/melalui telepon dengan berpedoman pada *system*, *operation*, dan *procedure* yang berlaku (selanjutnya disebut SOP).

7. Monitor Customer complaints that come through and are processed from the Call Center, Customer Care & Social Media, Branch Offices, Internal Division, Mass Media (printed and electronic), J Trust Bank Social Media Accounts, and Customer Protection Portal Application (APPK OJK).
8. Provide answers to questions/complaints from customers /non-customers via email, direct message, comments & Google review based on applicable system, operation, and procedure (hereinafter referred to as SOP).
9. Escalate customer complaints and requests that require specific explanations to the relevant division.
10. Resolve customer complaints in accordance with BI/OJK regulations.

C. CUSTOMER EXPERIENCE

Customer Experience is a work unit under the Contact Center Department, which has the following duties and responsibilities:

1. Contact customers by phone in accordance with the scope of J Trust Bank services.
2. Deliver the Bank's information service, inactive/ dormant account reminders, as well as programs and products to customers via phone correctly and in accordance with applicable regulations and questions asked by customers.
3. Receive customer complaints via phone regarding transactions and services at J Trust Bank from the results of outbound calls/outgoing calls and provide solutions in accordance with the authority possessed and applicable regulations.
4. Escalate customer complaints received by the Customer Experience Staff to the Customer Care work unit. The resolution for verbal complaints must be completed within 5 (five) working days and written complaints within 10 (ten) working days since the documents directly related to the complaint are received.
5. Document customer complaints including the resolutions that have been made.
6. Provide answers to customer questions/ complaints/requests/via phone by referring to the applicable systems, operations and procedures (hereinafter referred to as SOP).

7. Melakukan verifikasi laporan keluhan/ pengaduan nasabah yang masuk (termasuk dari cabang dan unit kerja lain).

8. Melakukan Customer Survey untuk mengukur tingkat kepuasan Nasabah.
9. Membuat Laporan Aktivitas *Customer Experience* termasuk rekapitulasi laporan keluhan nasabah dilaporkan secara harian dan bulanan yang ditujukan ke *Risk Management Division*.

7. Verify incoming customer complaints/ complaints (including from branches and other work units).

8. Conduct a Customer Survey to measure the level of customer satisfaction.
9. Create Customer Experience Activity Reports including recapitulation of customer complaint reports reported daily and monthly to the Risk Management Division.

Tabel Jenis dan Jumlah Serta Penyelesaian Keluhan
Table of Types, Numbers, and Resolution of Complaints

Jenis Keluhan Type of Complaint	2024		2023	
	Jumlah Keluhan Number of Complaint	Penyelesaian Keluhan Complaint Settlement	Jumlah Keluhan Number of Complaint	Penyelesaian Keluhan Complaint Settlement
Keuangan | Financial	332	100%	252	100%
Non Keuangan | Non-financial	397	100%	138	100%
Kualitas Pelayanan | Service Quality	88	100%	45	100%
Lainnya | Others	476	100%	376	100%
Total	**1.293**	**100%**	**811**	**100%**

Tabel Penanganan Pengaduan Tahun 2024
Table of Complaints Settlement in 2024

Jenis Transaksi Keuangan Type of Financial Transaction	Selesai Settled		Dalam Proses In Process		Tidak Selesai Not Settled	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Bancassurance	1	0.31%	0	0.00%	0	0.00%
Deposito	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Direct Debit	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Transaksi Terkait Tabungan	8	2.45%	1	20.00%	0	0.00%
Transaksi Terkait Virtual Account (VA)	3	0.92%	0	0.00%	0	0.00%
Electronic Banking	158	48.32%	1	20.00%	0	0.00%
Kartu ATM/Debit/Mesin ATM ATM Card/Debit/ATM Machine	157	48.01%	3	60.00%	0	0.00%
Total	**327**	**100.00%**	**5**	**100.00%**	**0**	**0.00%**

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENERAPAN STRATEGI ANTI-*FRAUD*

Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan Anti *Fraud* J Trust Bank mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi Anti *Fraud* yang merupakan strategi Bank dalam

POLICIES AND ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF ANTI FRAUD STRATEGIES

The Anti Fraud policy at PT Bank JTrust Indonesia Tbk is part of the Bank's internal control system in building compliance culture and creating risk awareness of potential fraud and its consequences at all levels of the organization.

This Anti Fraud policy regulates the framework, governance, and implementation of the Anti Fraud strategies, which is the Bank's effort for controlling

mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Bank telah menerapkan Strategi Anti *fraud* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi anti *fraud* J Trust Bank yaitu Pilar I (Pencegahan), Pilar II (Deteksi), Pilar III (Investigasi, pelaporan dan sanksi); dan Pilar IV (Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut).

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan "*No Fraud Tolerance*" sejak tanggal 19 April 2012 dan telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 dalam Kebijakan Penerapan Strategi Anti *Fraud*. Bank telah membentuk unit kerja Anti *Fraud* di bawah *Compliance Division* yang bertugas mengkoordinasikan implementasi strategi Anti *Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi Anti *Fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui:

a. Pemberian informasi Anti *Fraud news* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi Garoon).
b. Pemberian "Sosialisasi Anti *Fraud* Awareness (AFA)" kepada kantor-kantor cabang/capem dan unit divisi.
c. Pemberian test materi Anti *Fraud* Awareness (AFA) melalui program *e-learning* HCD.
d. Sosialisasi Anti *Fraud* Awareness (AFA) dalam program *e-learning* HCD, video *GreatDay* 8, serta pemasangan poster Deklarasi Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System* (WBS) di cabang- cabang dan divisi kantor pusat.
e. Pembuatan dan sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*.
f. Pengkinian dan sosialisasi Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS).
g. Pelaksanaan program *Know Your Employee* (KYE) terhadap karyawan Bank.
h. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS)
i. Investigasi kasus indikasi *fraud*
j. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, sejak tahun 2021 Bank secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi Anti *Fraud* Awareness yang

fraud by considering the characteristics and scope of potential, and this is implemented in the form of fraud control system.

The Bank has implemented Anti Fraud Strategy based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 12 of 2024 dated 31 Juli 2024 concerning the Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions, which includes the implementation of 4 (four) Pillars of the Bank's anti fraud strategy, namely Pillar I (Prevention), Pillar II (Detection), Pillar III (Investigation, reporting, and sanction), and Pillar IV (Monitoring, evaluation, and follow-up).

The management of J Trust Bank has established a "No Fraud Tolerance" policy since 19 April 2012 and it has been updated in February 2020 in the Anti Fraud Strategy Implementation Policy. The Bank has established an Anti Fraud work unit under the Compliance Division, which is tasked with coordinating the implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Anti Fraud strategy.

The Bank has continuously and consistently carried out programs in each Pillar of the Anti Fraud Strategy, such as through:

a. Providing Anti Fraud news on a monthly basis through the Bank's internal media (Garoon application).
b. Conducting dissemination on "Anti Fraud Awareness (AFA)" in branch/sub-branch offices and divisions.
c. Organizing tests on Anti Fraud Awareness (AFA) materials through HCD e-learning program.
d. Disseminating Anti Fraud Awareness (AFA) in HCD e-learning program, GreatDay 8 videos, and putting up posters on Anti Fraud Declaration and Whistleblowing System (WBS) in branch offices and divisions at the head office.
e. Creating and disseminating Anti Fraud Declaration.
f. Updating and disseminating the Whistleblowing System (WBS) Policy.
g. Implementing Know Your Employee (KYE) program for the Bank's employees.
h. Implementing the Whistleblowing System (WBS)
i. Investigating cases with fraud indications
j. Evaluating and monitoring follow-up actions to resolve fraud cases

As part of efforts to increase awareness of fraud risk, the Bank has continuously held mandatory Anti Fraud Awareness socialization programs for new and existing

bersifat *mandatory* untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun secara daring yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*.

PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Penanganan penyimpangan (*Internal Fraud*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Penyimpangan (*Internal Fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorer), dan/atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

employees since 2021, through face-to-face meetings and online meetings. This is aimed at increasing employees' knowledge and awareness on fraud prevention and consequences.

PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

To handle Internal Fraud, the Bank refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 12 of 2024 dated 31 Juli 2024 concerning the Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions.

Internal fraud is a violation committed by Management (members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners), Permanent Employees, Non-Permanent Employees (contract), and/or Outsourced Workers related to the Bank's work processes and operational activities, which significantly affect the Bank's financial condition or could generate loss of more than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah).

Status	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh: Number of Cases by:						
	Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners and the Board of Directors		Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees		Tenaga kerja Alih Daya Outsourced Workers
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Telah diselesaikan Settled	0	0	1	5	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of settlement at the Bank's internal	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian Settlement process not yet started	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up by legal proceedings	0	0	1	2	0	0	0
Total	**0**	**0**	**2**	**7**	**0**	**0**	**0**

Sanksi/Sanctions

Sanksi/Sanction	2024	2023
Surat Teguran | Reprimand Letter	0	0
Surat Peringatan 1 | Warning Letter 1	0	0
Surat Peringatan 2 | Warning Letter 2	0	5
Surat Peringatan 3 | Warning Letter 3	0	6
Pemutusan Hubungan Kerja | Termination of Employment	1	6

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN [GRI 2-16]

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2024 sebagai berikut:

a. Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012, Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sejak Desember 2023, Bank melakukan perubahan jalur informasi sarana WBS Bank menjadi sebagai berikut:

- *Hotline number* : (021) 27889235.
- *E-mail* : wbs@jtrustbank.co.id.

WHISTLEBLOWING SYSTEM [GRI 2-16]

As a concrete manifestation of internal control efforts, PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements a policy regarding the Whistleblowing System comprehensively in every aspect of business activities. The mechanism and results of the Whistleblowing System (WBS) for 2024 are as follows:

a. How to submit a violation report

Since 2012, the Bank has implemented WBS as a means of receiving reports of fraud indications that are noticed by employees in their work environment or a means of receiving reports of fraud indications and/or conflicts of interest that are noticed by the Bank's customers/partners. Starting December 2023, the Bank has made changes to the channels for WBS to:

- Hotline number (021) 27889235.
- E-mail: wbs@jtrustbank.co.id

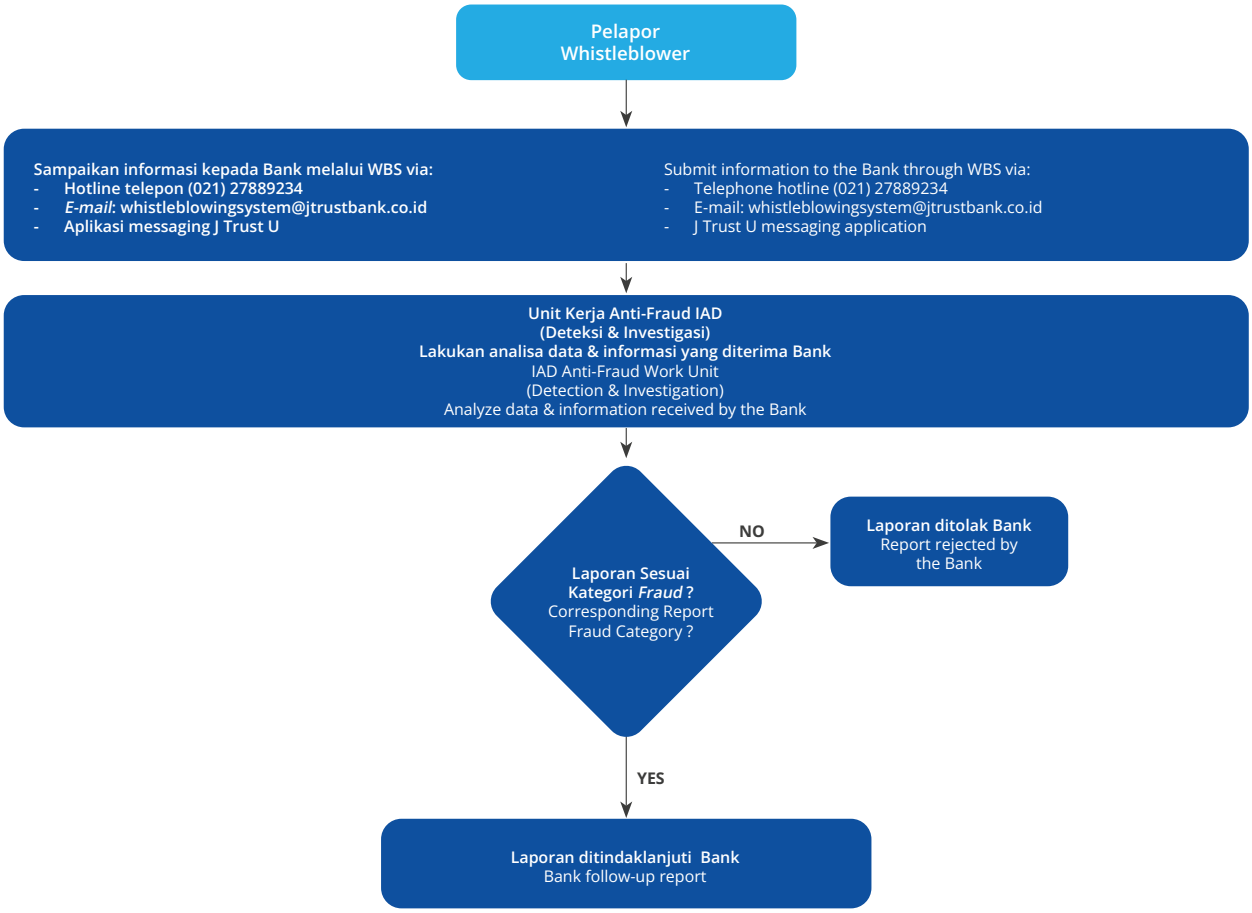

b. Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*).

c. Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS J Trust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu dan mengumpulkan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti–bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d. Pihak yang mengelola pengaduan

WBS JTrust Bank dikelola oleh Anti *fraud Department* yang berada di bawah *Compliance Division* (CPD) sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS J Trust Bank akan diterima langsung oleh pejabat Anti *fraud*, Direktur *Compliance* & *Corporate Legal* dan Direktur Utama untuk ditindak lanjuti.

e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2024 seluruh laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:

b. Protection for whistleblowers

The Bank's management is committed to protecting whistleblowers who report fraud in good faith and will comply with all relevant regulations and best practices in implementing the Whistleblowing System.

The protection for whistleblowers includes the Bank's protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, discrimination in all forms, and adverse records in the employee's personal file record.

c. Complaint Handling

All information received in the J Trust Bank WBS will be analyzed first, and then evidence of potential fraud will be collected. If the analysis results and available evidence strongly indicate the occurrence of fraud, a further investigation will be conducted.

d. The party managing the complaint

The WBS in J Trust Bank is managed by the Anti Fraud Department, which is part of the Compliance Division (CPD), so every complaint submitted to J Trust Bank's WBS will be received directly by the anti fraud officials, Compliance & Corporate Legal Director and the President Director for follow-up actions.

e. Number of complaints received and processed in the last fiscal year

Throughout 2024, all reports were followed up and settled, with the following details:

Status Laporan Whistleblowing (WB) Whistleblowing (WB) Report Status	Jumlah Total
Total Laporan WB yang diterima Total WB reports received	3
Laporan WB yang diproses investigasi WB reports that are eligible for investigation	1
Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED) WB reports that have been investigated (CLOSED)	1
Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN) WB reports that are being investigated (OPEN)	0
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED) WB reports that are not investigated (PRE-CLOSED)	2

f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus, Bank menjatuhkan sanksi berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian, sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas, sampai ke pemutusan hubungan kerja.

f. Sanctions/follow-up on complaints that have been processed

Sanctions/follow-ups that are carried out by the Bank to resolve the complaints in 2024 are as follows:

1. The Bank follows up on the complaint resolution process by reporting to the Management to obtain approval to investigate the complaint.
2. The staff who is found guilty or responsible for the fraud cases will receive punishment/sanction in the form of Warning Letter, a request to pay compensation for the damages, as well as other administrative sanctions, which may include transfer to another work units, either within the city or outside the city where the perpetrator was originally assigned, up to termination of employment.

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Jangka Pendek

Rencana Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2024-2026 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2024 di mana perekonomian dunia sudah mulai menunjukkan perbaikan meskipun masih dibayangi oleh risiko-risiko global. Beberapa strategi fokus bisnis yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat permodalan dan profitabilitas
   i. Memperkuat Permodalan
      - Selama tahun 2024 Bank menjaga pemenuhan modal inti minimum Bank sebesar Rp3 Triliun untuk memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 perihal Konsolidasi Bank Umum.
      - Pada Desember 2024 Bank telah melakukan penambahan Dana Setoran Modal (DSM) Rp51,88 miliar dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk memperkuat permodalan.

THE BANK STRATEGIC PLAN

The Bank has formulated its strategic plan for the long term (corporate plan) as well as the medium- and short-term plans (business plan), which were later revised in June 2024 with the following explanation:

1. Short-Term Plans

The Bank's short-term plans are reflected in the description of the Bank's Business Plan for 2024-2026 with a discussion about the year ahead which is the year of 2024, where the economy has started to show some improvements even though global risks are still shadowing the market. Several business focus strategies that have been implemented in 2024 are as follows:

a. Strengthening capital and profitability
   i. Strengthening Capital
      - In 2024, the Bank maintains the minimum core capital of Rp3 trillion to comply with POJK No. 12/POJK.03/2020 concerning Consolidation of Commercial Banks.
      - In December 2024, the Bank made additional Capital Deposit Funds (DSM) of Rp51.88 billion from Controlling Shareholders (PSP) to strengthen capital.

- Rencana Bank untuk melaku kan proses Right Issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) III melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) III untuk mengkonversi Dana Setoran Modal (DSM) dan publik karena satu dan lain hal masih dalam proses permohonan persetujuan OJK Pasar Modal dan OJK Pengawas sehingga belum berlaku efektif di tahun 2024. Investor baru dari Jepang yang sebelumnya akan masuk melalui PUT III di tahun 2024 menunda investasinya ke tahun 2025 dan Bank akan mengajukan kembali proses persetujuan Right Issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) III tersebut pada tahun 2025.

ii. Meningkatkan Laba Perusahaan
Beberapa strategi bank untuk meningkatkan Laba Perusahaan yaitu:
- Peningkatan pendapatan bisnis melalui pertumbuhan kredit pada segmen korporasi dan retail secara berimbang dengan memberikan bunga yang kompetitif melalui *Pricing Strategy*.
- Peningkatan pendapatan dari *fee-based income* melalui beberapa strategi seperti:
- Meningkatkan Program CASA berbasis teknologi dengan meluncurkan produk dan program baru, fasilitas Internet Banking ritel, Mobile Banking, SMS Banking dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan dengan meluncurkan produk-produk *financial education program*, *micro saving*, *micro insurance*, *micro lending*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* melalui layanan prioritas banking.
- Meningkatkan transaksi *Foreign Exchange* melalui kolaborasi Divisi Bisnis dan produktivitas yang lebih tinggi kantor cabang.
- Dukungan kinerja dari pemegang saham berupa setoran dana Rp300 miliar untuk meningkatkan pendapatan operasional.

b. Menjaga keseimbangan likuiditas antara pemenuhan ketentuan regulasi dengan optimalisasi transaksi operasional sehingga secara bersamaan turut memperkuat profitabilitas bank.

- The Bank's plan to conduct a Rights Issue or Pre-emptive Rights (HMETD) III through a Limited Public Offering (PUT) III to convert the Capital Deposit Funds (DSM) and public funds, for one reason or another, is still in the process of obtaining approval from the OJK Capital Market and OJK Supervisory, and therefore will not be effective in 2024. A new investor from Japan, who initially planned to buy shares through PUT III in 2024, has postponed their investment to 2025. The Bank will resubmit Rights Issue or Pre-emptive Rights (HMETD) III for approval in 2025.

ii. Increasing the Company's Profits
Followings are the Bank's strategies to increase profits:
- Increase business revenue through balanced credit growth in the corporate and retail segments by offering competitive interest rates through a Pricing Strategy.
- Increase fee-based income through the following strategies:
- Enhance the technology-based CASA Program by launching new products and programs, retail Internet Banking facilities, Mobile Banking, SMS Banking and collaborating with third parties for financial inclusion by introducing financial education program, micro savings, micro insurance, micro lending, while maintaining the mass affluent segment through priority banking services.
- Boost Foreign Exchange transactions through collaboration between Business Divisions and higher productivity at branch offices.
- Performance support from shareholders in the form of deposits of Rp300 billion to increase operating income.

b. Maintaining liquidity balance between fulfilling regulatory requirements and optimizing operational transactions, thereby simultaneously strengthening the Bank's profitability.

c. Melakukan efisiensi serta Digitalisasi yaitu:
   i. Melakukan penurunan biaya umum dan administrasi, serta biaya tenaga kerja dalam rekrutmen karyawan baru.
   ii. Melakukan efisiensi biaya Capex dan Opex dari berbagai divisi dengan menerapkan transformasi digital.
   iii. Optimalisasi *New Core Banking System* dengan mengeluarkan produk-produk yang berbasis teknologi sesuai kebutuhan saat ini dan akan datang.

Dalam hal infrastruktur, bank terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan perbankan dengan dukungan teknologi informasi sehingga proses operasional kegiatan usaha Bank menjadi lebih cepat, akurat dan memenuhi kebutuhan pelayanan nasabah. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh nasabah sesuai dengan visi dan misi Bank.

2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, di antaranya:

a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk:
   - Penambahan Setoran Modal dari Investor Dalam dan Luar Negeri.
   - Merger dan Akuisisi baik Bank Lokal maupun Bank Asing.
   - Penambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Pengendali.
b. Penerapan *Prudential Banking* dalam meningkatkan pertumbuhan aset bank.
c. Optimalisasi *New Core Banking System* dengan pengembangan *Data Warehouse* dan sistem Informasi Manajemen agar lebih efisien dan efektif.
d. Peningkatan pangsa pasar dalam persaingan perbankan untuk bisnis *Corporate Banking*, *Commercial & SME*, *Japanese* dan *Korean linkage*, *Trade Finance*, dan *Treasury*.
e. Meningkatkan pertumbuhan Dana Murah, melalui penurunan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru seperti fasilitas *Internet Banking* ritel, *Virtual Account*,

c. Carrying out efficiency and digitalization, such as:
   i. Reduce general and administrative costs, as well as labor costs in recruiting new employees.
   ii. Carry out cost efficiency in Capex and Opex of various divisions through digital transformation.
   iii. Optimize the New Core Banking System by launching technology-based products according to current and future needs.

In terms of infrastructure, the Bank strives to improve banking services with the support of information technology, so the Bank's operational process will be faster, more accurate, and in line with customers' demand. This will ultimately provide satisfactory service to all customers, in accordance with the Bank's vision and mission.

2. Medium-Term Targets

The Medium-Term Target is defined as the targets that will be achieved in the next 3 (three) years, including:

a. Strengthening the capital structure by relying on organic capital growth, in addition to efforts to increase external capital that are relevant to condition of the Bank's capital in the form of:
   - Additional Capital Deposits from Domestic and Foreign Investors.
   - Mergers and Acquisitions of Local Banks or Foreign Banks.
   - Additional Capital Deposits from Controlling Shareholders.
b. Carrying out Prudential Banking in increasing the growth of the Bank's assets.
c. Optimizing the New Core Banking System by developing a Data Warehouse and Management Information system to make it more efficient and effective.
d. Increasing market share in the banking sector for the Corporate Banking, Commercial & SME, Japanese and Korean linkage, Trade Finance, and Treasury business segment.
e. Increasing the growth of Low-Cost Funds by lowering deposit interest rates, launching new products and programs to increase such as, retail Internet Banking facilities, Virtual

Mobile Banking, dan mempertahankan segmen *mass affluent* (komunitas Tionghoa sebagai nasabah utama) melalui layanan perbankan prioritas, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah *Customer Information File* (CIF) atau nasabah baru.

f. Optimalisasi jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.

g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

3. Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, diantaranya:

a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Saving Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2034 berada di atas 20%.

b. Penyaluran *Loan*/Kredit
Pada tahun 2034 Bank tetap fokus terhadap segmen *Corporate banking*, *Commercial* & SME serta *Business Linked* dan *Consumer Retail*. Bank melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk *FinTech* dan *android based mobile application* sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, yang diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke JTrust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Bank juga akan memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

c. Peningkatan *Fee Based Income*
Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan

Accounts, Mobile Banking, as well as maintaining the mass affluent segment (Chinese community as the main customer) through priority banking service. This is expected to increase the number of Customer Information Files (CIF) or new customers.

f. Optimizing existing office networks through branch office relocations, status changes and branch office closures. The arrangement of strategic office network locations will support business performance, increase market share by tapping into regional business potential, and make operational costs more efficient and effective.

g. Implementing good corporate governance and making it an organizational culture with commitment and involvement from all aspects of the organization, including Controlling Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of employees at the Bank.

3. Long-Term Targets

Long-term targets are defined as targets that the Bank wants to achieve within the next 10 (ten) years, including:

a. Improvements in funding mix by carrying out several technology-based product innovations and developments to increase the number of accounts. The Bank seeks gradual profiling of the percentage of CASA (Current Account & Savings Account) so that total composition of CASA in 2034 is above 20%.

b. Loan Disbursement /Credit
In 2034, the Bank will remain focusing on Corporate banking, Commercial & SME, and Business Linked and Consumer Retail segments. The Bank conducts an initial study for the development of FinTech products and android-based mobile applications as an alternative to the Customer Acquisition Channel, which is expected to make it easier for customers to apply for loans to J Trust Bank and widen the Bank's outreach with a limited network of branch offices. The Bank will also expand partnerships with Regional Banks in Japan that facilitate Japanese SMEs to invest in Indonesia.

c. Higher Fee Based Income
An alternative source to generate interest income, in line with the increase in the volume

volume bisnis kredit yang memiliki *margin* lebih besar melalui *cross selling* sehingga *fee-based income* dari komisi, transaksi valas, *fee* produk dan aktivitas Bank akan meningkat

d. Berdasarkan Kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI), Bank berada di KBMI 1. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2034, menjadi KBMI 2. Bank berupaya menjadi Bank KBMI 2 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dengan berkomitmen untuk mewujudkan:
   - Bisnis yang berkesinambungan
   - Penerapan GCG
   - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
   - *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
   - Penguatan *Corporate Branding*.

of credit business with higher margins through cross-selling. This will result in an increase in fee-based income from commissions, foreign exchange transactions, and fees for the Bank's products and activities.

d. According to the category of Bank Group Based on Core Capital (KBMI), the Bank is under KBMI 1. The focus of the Bank's positioning in the long run until 2034 is to become KBMI 2. The Bank strives to become the Bank under KBMI 2 category that is healthy and strong, by prioritizing quality business growth and the Bank's commitment to realize:
   - Sustainable business
   - GCG Implementation
   - Healthy capital and assets.
   - Compliance with applicable provisions and regulations.
   - Stronger Corporate Branding.

PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Merujuk pada peraturan/dasar hukum penindakan anti-korupsi di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016).
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY

Referring to the regulations/legal basis for anti-corruption enforcement in Indonesia:

1. Law No. 31 of 1999 concerning the Corruption Eradication Commission, which has been amended several times, the final one is Law No. 19 of 2019.
2. Law No. 28 of 1999 concerning the State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
3. Government Regulation No. 71 of 2000 concerning Procedures for Community Participation and Awards and Eradication of Corruption
4. The Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (Perma 13/2016).
5. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK) No. 02 of 2014 concerning Reporting Guidelines and Determination of Gratification Status (KPK Regulations regarding Reporting Guidelines and Determination of Gratification Status).
6. The Financial Services Authority Regulation (POJK) No.21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance in Public Companies.
7. The Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in Commercial Banks.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 39/ POJK.03/2019 tahun 202419 tentang Penerapan Strategi Anti *fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Bank Umum
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bank telah memiliki Kode Etik dan Perilaku Bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yaitu integritas dan tanggung Jawab yang dijalankan oleh Manajemen dan Karyawan Bank. Oleh karena itu, Manajemen dan Karyawan telah konsisten melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan suap dan korupsi, seperti:

1. Tidak menerima hadiah dan imbalan dari pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi, keputusan bisnis dengan cara apa pun.
2. Tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan
3. Tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya Bank untuk kepentingan pribadi
4. Tidak menyalahgunakan informasi terkait Bank
5. Dilarang menawarkan atau memberi hadiah kepada Pejabat Publik dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi
6. Dilarang menawarkan hadiah kepada pihak ketiga kecuali telah disetujui melalui program pemasaran

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga telah membuat kebijakan Anti fraud yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan Anti Fraud Charter, Annual Disclosure, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Sedangkan kebijakan anti kecurangan pada aspek korupsi sedang dalam proses pengembangan, sehingga program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap

8. The Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti Fraud Strategies for Financial Services Institutions
9. The Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies.
10. The Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 13/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in Commercial Banks.
11. The Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Annual Report Format and Content of Issuers or Public Companies
12. Law No. 28 of 1999 concerning the State Governance that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.

The Bank has a Code of Ethics and Code of Conduct that uphold its values namely the integrity and responsibility carried out by the Bank's Management and Employees. Therefore, the Management and Employees have consistently taken actions to prevent frauds, including bribery and corruption, such as:

1. Not receiving gifts and rewards from third parties with the intention to influence business decisions in any way.
2. Not involved in activities that have the potential to cause conflicts of interest
3. Not using the Bank's facilities and resources for personal interests
4. Not exploiting information related to the Bank
5. Prohibited from offering or giving gifts to public officials with the intention of gaining personal benefits
6. Prohibited from offering gifts to third parties unless having been approved and the gifts are awarded through marketing programs

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk has also established Anti Fraud policy that is carried out through 4 pillars, such as Prevention Pillar, through the signing of the Anti Fraud Charter, Annual Disclosure, and Integrity Pact. This policy has been disseminated to all employees.

The Bank is in the process of setting up anti-fraud policy on corruption, in the hope that later, the programs and procedures aimed at tackling corruption practices, kickbacks, bribery, and/or gratification can be carried

dan/atau gratifikasi dapat segera diimplementasikan. Selanjutnya akan dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan J Trust Bank.

out immediately. Then, there will be dissemination/training programs on anti-corruption for all employees at J Trust Bank.

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2024 tidak terdapat sanksi administratif yang material dan secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang diberikan oleh regulator.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FROM RELATED AUTHORITIES

In 2024, there were no material administrative sanctions that significantly affected the Bank's business or administrative sanctions on the Board of Directors and Board of Commissioners imposed by the regulator.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*Comply or Explain*". Penerapan di Bank adalah sebagai berikut:

Implementation of Corporate Governance Guidelines in Public Companies

As a public company, the Company is required to meet the Governance Guidelines for Public Companies that are stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015, concerning the Implementation of Governance Guidelines in Public Companies and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015, concerning Governance Guidelines for Public Companies.

The Governance Guidelines for Public Companies contain good corporate governance practices that are in accordance with international practices, including 5 (five) aspects, 8 (eight) good corporate governance principles, and 25 (twenty five) recommendations for the implementation of aspects and principles of good corporate governance based on the "Comply or Explain" approach. The implementation at the Bank is as follows:

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. **A. The Relationship of Public Companies with Shareholders to Secure Shareholders' Rights**	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Improve the Value of General Meeting of Shareholders (GMS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis Pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. 1.1 The Public Company has technical procedures for voting through open or closed method which prioritizes independence and interests of shareholders.	*Comply.* - PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjunjung tinggi hak pemegang saham dalam melakukan pemungutan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. - Rekomendasi ini diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam pengambilan keputusan untuk setiap agenda RUPS Bank. - Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris, sehingga independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. - Tata cara atau prosedur teknis pengumpulan suara tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diunggah dalam situs web Bank, serta dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan sebelum RUPS dimulai. - PT Bank J Trust Indonesia Tbk highly respects shareholders' rights to vote and prioritizes independence and interests of shareholders. - This recommendation is implemented in decision making for each of the Bank's GMS agenda. - The voting calculation is carried out by independent party, namely the Securities Administration Bureau and the Notary, so shareholders' independence and interests can be maintained during the voting process. - Voting methods and technical procedures are stipulated in the GMS Rules that are uploaded on the Bank's website and announced by the Corporate Secretary before GMS begins.
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. 1.2 All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	*Comply.* - RUPS Tahunan merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan secara fisik maupun melalui media telekonferensi. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. - The Annual GMS is the highest hierarchy in the Company's organization whose authority cannot be delegated to the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors within the limits specified in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, Article 19. - All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attend the annual GMS physically or through teleconference. - In case some members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are unable to attend the Annual GMS, then the person must submit written notification for the absence and state a clear reason.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3 Summary of the GMS Minutes of Meeting is available on the Company's website for at least 1 (one) year.	*Comply.* Ringkasan risalah RUPS sejak RUPST tanggal 30 Maret 2015 hingga saat ini tersedia dalam Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id) Summary of the GMS Minutes of Meeting is available on the website of J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id) from the AGMS on 30 March 2015 to present.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2: Improve the Quality of Public Communication with Shareholders or Investors	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. 2.1 Public companies must have a communication policy with shareholders or investors.	*Comply.* PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank diantaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui Press Release, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat e-mail dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), Call Center, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. PT Bank Jtrust Indonesia Tbk has a communication policy with shareholders or investors. The communication is carried out through the GMS, press releases on the Company's activities, publication of quarterly and annual financial statements, as well as accurate and timely information disclosure. J Trust Bank also provides the addresses for the head office and branch offices, e-mail address, and telephone number on the website and annual reports, social media accounts (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), and Call Center, as a means for shareholders and investors to communicate with the Bank easily.
		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 2.2 Public Companies disclose the Communication Policy of Public Companies with shareholders or investors on their website.	*Comply.* PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id) PT Bank Jtrust Indonesia Tbk has disclosed the Company's communication policy with shareholders or investors and uploaded the policy to the J Trust Bank website (www.jtrustbank.co.id)
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris **B. The Roles and Functions of the Board of Commissioners**	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthen membership and composition of the Board of Commissioners.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. 3.1 Determination of the number of members of the Board of Commissioners by considering the Company's condition.	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. • Jumlah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: - Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang. 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Komisaris dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2 (dua) orang dari anggota Komisaris tersebut berkewarganegaraan Jepang. - Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang. - Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. - Determination of the number of members of the Board of Commissioners refers to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance in Commercial Banks, and considers: • The Bank's financial conditions and capabilities. • The Bank's needs, size of organization, and business complexity. • The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2023 was: - There are 4 (four) members of the Board of Commissioners. 2 (two) are Independent Commissioners, 1 (one) President Commissioner, and 1 (one) Commissioner and the number does not exceed members of the Board of Directors. 2 (two) of the members are Japanese. - 3 (three) members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia, 1 (one) in Japan. - The number of Independent Commissioners is 50% of total members of the Board of Commissioners.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3.2 Determination of the composition of members of the Board of Commissioners by considering the diversity of skills, knowledge, and required experiences.	*Comply.* Penentuan komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Determining the composition of 4 (four) members of the Bank's Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience, in line with the main criteria that focus on integrity, competence, professionalism, and financial reputation, in accordance with the fit and proper test requirements set by the Financial Services Authority (OJK).
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Improve the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. 4.1 The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	*Comply* - Self Assessment dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dan individu. - Self-assessment is carried out by each member of the Board of Commissioners to assess the performance of the Board of Commissioners, collegially and individually.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. 4.2 The self-assessment policy is aimed at evaluating the performance of the Board of Commissioners, which is then disclosed in the Annual Report of Public Companies	*Comply.* - Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank. - The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Bank's Annual Report.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 4.3 The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	*Comply.* Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu, dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan). The policy regarding the Board of Commissioners' resignation is stipulated in the Board of Commissioners Work Guidelines and Rules and articles 14.8 to 14.12 of the Company's Articles of Association. The resignation must be followed up with the GMS. In addition, if there is a violation by a member of the Board of Commissioners, the GMS is also given the rights to dismiss the relevant member at any time (in this case, for example, there was a violation or financial crime committed by a member of the Board of Commissioners).
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 4.4 The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function formulates a succession policy for the Nomination process of members of the Board of Directors.	*Comply.* Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners, through the Nomination & Remuneration Committee, carries out the Nomination and Remuneration function, including formulating a succession policy for the nomination process of members of the Board of Directors.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
C. Fungsi dan Peran Direksi. **C. The Roles and Functions of the Board of Directors.**	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. 5.1 Determination of the number of members of the Board of Directors by considering the condition of the Public Company and the effectiveness in decision-making process.	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang. - Determining the number of members of the Board of Directors refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance in Commercial Banks, and considers: • The Bank's financial condition and capability. • The Bank's needs, size of organization, and business complexity. - As of 31 December 2022, the Board of Directors consisted of 7 (seven) people.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 5.2 Determination of the composition of the members of the Board of Directors by considering diversity, expertise, knowledge, and required experiences.	*Comply.* Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Members of the Board of Directors have diverse backgrounds in terms of required skills, knowledge, and experience. This can be seen from the profile of each member of the Board of Directors. The diversity and number of Directors is required by the Company in order to provide the best alternative solutions to the Bank's problems, based on the Bank's needs, size, and business complexity.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance must have expertise and/or knowledge in accounting.	*Comply.* Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS. Beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu. The Company's Finance Director, Mr. Helmi Arief Hidayat, has a Masters' degree in Business Administration at UNKRIS. He is also an expert in finance and has work experiences as Head of Finance Division at Bank Akita in 2003-2009 and Head of Finance Division at Bank Nobu in 2010.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improve the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. 6.1 The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.	*Comply.* Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja Self-Assessment untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegial dan Individu berbasis balance scorecard. Every year, the Board of Directors reports its performance results for the current year at the Bank's annual GMS. In addition, the Bank also evaluates the performance of the Board of Directors by filling out the Self-Assessment work papers based on a balanced scorecard to evaluate duties and responsibilities of the Board of Directors, collegially and individually.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 6.2 The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors must be disclosed in the annual report of Public Companies.	*Comply.* Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors in the current year is disclosed in the Bank's Annual Report.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 6.3 The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	*Comply.* Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Charter) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Members of the Board of Directors, who are involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities, money laundering, and other criminal acts, must resign from the Board of Directors. This policy is outlined in the Board of Directors Charter of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan. **D. Stakeholders' Participation.**	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improve the Corporate Governance Aspects through Stakeholders' Participation.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. 7.1 The Public Company has a policy to prevent insider trading.	*Comply.* Kebijakan mencegah insider trading diatur dalam Kebijakan Larangan Transaksi oleh Orang Dalam yang disahkan pada 30 Maret 2022, Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan Kebijakan Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (Insider Dealing) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar. The policy to prevent insider trading is stipulated in the Prohibition of Insider Transactions Policy passed on 30 March 2022, Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and the Market Code of Ethics, which regulates the prohibition of using Insider Dealing in private transactions of financial market instruments, including the Bank securities, by employees and management as market players.
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud 7.2 The Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Bank telah memiliki kebijakan anti-fraud sedangkan kebijakan anti-korupsi/penyuapan masih dalam tahap perumusan. The Bank has an anti-fraud policy, while the policy on anti-corruption/bribery is still being formulated.
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 7.3 The Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.	*Comply.* Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang jasa tentang seleksi pemasok atau vendor, serta prosedur pemilihan pemasok atau kontraktor, dan juga diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi vendor pada laporan tahunan ini melalui unit kerja procurement. The company has a procurement policy regarding supplier or vendor selection, as well as procedures for selecting suppliers or contractors. This has also been disclosed in the vendor policy and selection section of this Annual Report under the procurement work unit.
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4 The Public Company has a policy to fulfill creditors' rights.	*Comply.* Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (equal treatment) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (disclose). Hak-hak kreditur yang merupakan konsumen PT Bank JTrust Indonesia dituangkan dalam Kebijakan Perlindungan Konsumen yang telah ditinjau ulang dan diperbarui pada 4 April 2022. The company implements and respects the rights of creditors by providing equal treatment, carrying out timely implementation of rights and obligations, and having no undisclosed information about the Company. The rights of creditors, who are consumers of PT Bank JTrust Indonesia, are set forth in the Consumer Protection Policy that has been reviewed and updated on 4 April 2022.
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. 7.5 The Public Company has a policy on the whistleblowing system.	*Comply.* Perusahaan telah memiliki ketentuan mengenai whistleblowing system dalam bentuk Kebijakan Penerapan Whistleblowing System (WBS) tersendiri, yang merupakan pemisahan dari ketentuan Penerapan Strategi Anti Fraud . The Company has provisions regarding the whistleblowing system by having its own policy on the Whistleblowing System (WBS) Implementation, which is a dissolution from provisions on the Anti-Fraud Strategy Implementation Control Policy.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6 The Public Company has a policy on providing long-term incentives to Directors and employees.	*Comply.* Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang mengatur terkait pemberian insentif jangka panjang, di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Executive Vice President (EVP). Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2025. The Bank has a Remuneration policy that regulates the provision of long-term incentives, including selecting the parties designated as MRT, namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executive Vice President (EVP). The Bank is still reviewing the policy related to the provision of long-term incentives for employees. The policy will be made by taking into account the Bank's Business Plan in 2025.
E. Keterbukaan Informasi. **E. Information Disclosure**	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Improve the Disclosure of Information.	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. 8.1 Public Companies utilizes wider use of information technology to disclose information, other than the Companies' Websites.	*Comply.* Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Linkedin, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan. Other than the website of J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), the Company also uses other information technology, such as printed media and social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn, and others, as media to disclose the Company's information.
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. 8.2 The Annual Report of Public Company discloses the Company's ultimate beneficial owner in the report about shareholding structure of at least 5% (five percent). The information on the ultimate beneficial owner in Public Company must be also stated in reports about share ownership through the main and controlling shareholder.	*Comply.* Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. The composition of public shareholders has been disclosed in the Company's Annual Report.

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Jaya

Jaya si pemimpin yang selalu bertindak adil, ia juga mampu diandalkan. Sebagai salah satu maskot J Trust Bank, sosok Jaya dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Harimau Sumatera.

Jaya is a leader who always acts fairly and highly reliable. As one of the mascots of J Trust Bank, Jaya was created to send a message about the importance of preserving Indonesia's endemic wildlife, specifically the Sumatran tiger.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Corporate Social Responsibility

STRATEGI KEBERLANJUTAN [OJK A.1][GRI 2-23]

Sustainability Strategy [OJK A.1][GRI 2-23]

Strategi keberlanjutan Bank dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *target Net Zero Emission Indonesia* dengan memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

The Bank's sustainability strategy is designed to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesia's Net Zero Emission target by paying special attention to environmental, social, and governance (ESG) aspects.

Tobi

Tobi si harimau kecil memiliki sifat yang selalu menghargai temannya dan senang melihat teman-temannya berkembang. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Tobi dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Harimau Sumatera.

Tobi, the little tiger, is always respectful towards his friends and eager to see them make progress. As one of J Trust Bank's mascots, Tobi is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animal, the Sumatran Tiger.

Sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab, J Trust Bank berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek operasional dan bisnisnya. Strategi keberlanjutan Bank dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *target Net Zero Emission Indonesia* dengan memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Melalui pendekatan ini, J Trust Bank berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui penerapan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi, Bank berupaya mewujudkan dampak positif terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial didukung dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang optimal. Dengan demikian, potensi terjadinya dampak negatif dari kegiatan operasional dan usaha dapat diminimalkan. Selanjutnya, visi dan misi tersebut direalisasikan melalui kebijakan dan program prioritas seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank.

VISI DAN MISI KEBERLANJUTAN [OJK C.1]

Visi

Menjadi bank dengan komitmen praktik bisnis dan operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik.

Misi

1. Melaksanakan praktik dan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan
2. Mengembangkan solusi dan layanan keuangan inovatif yang inklusif, mengatasi risiko iklim, dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon
3. Berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang sejalan dengan nilai-nilai Bank.

Upaya mencapai visi dan misi tersebut ditopang oleh empat nilai-nilai perusahaan, sebagai berikut:

As a responsible financial institution, J Trust Bank is committed to integrating sustainability principles into all aspects of its operations and business. The Bank's sustainability strategy is designed to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesia's Net Zero Emission target by paying special attention to environmental, social, and governance (ESG) aspects. Through this approach, J Trust Bank strives to create long-term value for stakeholders while making a positive contribution to society and the environment.

Through the implementation of appropriate strategies in achieving the vision and mission, the Bank strives to realize a positive impact on the economy, environment, and social, supported by the implementation of optimal corporate governance. Therefore, the potential for negative impacts from operational and business activities is minimized. Furthermore, the vision and mission are realized through priority policies and programs as set out in the Bank's Sustainable Finance Action Plan.

SUSTAINABILITY VISION AND MISSION [OJK C.1]

Vision

To be a Bank committed to environmentally, economically, and socially responsible business and operational practices based on good corporate governance.

Mission

1. Carrying out socially and environmentally responsible business practices and activities to promote sustainable development
2. Developing innovative financial solutions and services that are inclusive, address climate risks, and support the transition to a low-carbon economy
3. Contributing to Sustainable Development Goals/ SDGs through collaboration with stakeholders in line with the Bank's values.

Efforts to achieve the vision and mission are supported by four corporate values, as follows:

Super Integrity	Bank berpandangan bahwa integritas merupakan wujud dari kepribadian yang jujur, patuh, serta konsisten dalam tata kelola perusahaan yang baik serta standar peraturan, perundang-undangan, dan etika. The Bank believes that integrity is a manifestation of an honest, compliant, and consistent personality in good corporate governance as well as regulatory, statutory, and ethical standards.
Customer First	Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank mengutamakan kebutuhan dan kepuasan nasabah, menyediakan produk dan layanan inklusif yang bisa diandalkan. In conducting business activities, the Bank prioritizes customer needs and satisfaction, providing inclusive products and services that reliable.
Be Discipline & Responsible	Nilai ini bermakna sebagai upaya melaksanakan aktivitas dan operasional Bank sesuai standar peraturan, perundangan, dan norma yang berlaku tanpa ada paksaan dari pihak luar. This value means an effort to carry out the Bank's activities and operations according to the standards of applicable rules, regulations, and norms, without any coercion from outside parties.
Learning & Trying More	Merupakan wujud pembelajaran tiada henti dari seluruh organisasi Bank agar selalu dapat berinovasi dan memberikan yang terbaik guna menciptakan rasa bahagia bagi para pemangku kepentingan. A form of continuous learning from the entire Bank organization, in order to always innovate and provide the best to create ultimate happiness for stakeholders.

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam mengelola dan menerapkan keuangan berkelanjutan, Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dijadikan sebagai pedoman utama. Dalam RAKB tersebut, J Trust Bank berupaya menyelaraskan tiga aspek keberlanjutan yang umumnya disebut dengan *triple bottom line,* yaitu *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan) untuk menjadi landasan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan J Trust Bank dalam memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan aspek sosial ekonomi masyarakat.

SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN

In managing and implementing sustainable finance, the Bank developed a Sustainable Finance Action Plan (SFAP), which serves as the main guideline. In the SFAP, J Trust Bank strives to harmonize the three aspects of sustainability commonly referred to as the triple bottom line, namely profit (economy), people (social), and planet (environment) to become the basis for sustainable commitments that J Trust Bank will implement in making a real contribution to environmental sustainability and improving the socio-economic aspects of society.

Di dalam RAKB terdapat program-program yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara profit dan komitmen untuk menjaga lingkungan dan kehidupan sosial. Bank telah menyusun program RAKB dalam jangka panjang (lima tahun) dan jangka pendek (satu tahun).

The SFAP contains programs that are expected to provide a balance between profit and commitment to preserving the environment and social life. The Bank developed long-term (five years) and short-term (one year) SFAP programs.

Rencana Lima Tahun
Five Year Plan

Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Target	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2024	Peningkatan portofolio kredit keuangan berkelanjutan Improvement of sustainable finance loan portfolio	Pemberian kredit pada sektor UMKM/RPIM sebesar 19 % dari total portofolio kredit. Lending to the MSME/RPIM sector was 19% of the total loan portfolio.
	Pemantauan kualitas kredit keuangan berkelanjutan Sustainable finance credit quality monitoring	Rasio NPL gross kredit keuangan berkelanjutan dibandingkan total kredit pada sektor keuangan berkelanjutan <5%. Gross NPL ratio of sustainable finance loans compared to total loans in the sustainable finance sector below 5%.
	Dalam satu tahun terdapat penyelenggaraan CSR: Lingkungan • Penanaman pohon • Pengelolaan sampah Ekonomi • Literasi keuangan • Pelatihan UMKM Sosial • Pendidikan anak • Kesehatan anak	Lingkungan • Jumlah pohon yang ditanam • Menghitung jumlah CO^2 dan O^2 • Inisiatif pengelolaan sampah (*softskill/hardskill*) Ekonomi • Sasaran peserta literasi keuangan sesuai dengan target OJK • Jumlah peserta pelatihan • Nilai *pre-post test* Sosial • Inisiatif peningkatan kualitas pendidikan anak melalui perbaikan sarana prasarana • Inisiatif peningkatan kualitas kesehatan anak
	In one year, there are CSR events as follows: Environment • Tree planting • Waste management Economy • Financial literacy • MSME training Social • Children's education • Children's health	Environment • Number of tree planted • Calculating total CO^2 and O^2 • Waste management initiatives (softskill/hardskill) Economy • The beneficiaries of financial literacy programs in OJK targets are met • Number of training participants • Pre-post test score Social • Initiatives to enhance the quality of children's education through facility and infrastructure improvements • Initiatives to enhance the quality of children's health

Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Target	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2025	Peningkatan portofolio kredit dan surat berharga dalam keuangan berkelanjutan Increased portfolio of loans and securities in sustainable finance	• Pemberian kredit pada sektor UMKM/RPIM sebesar 19.5% dari total portfolio kredit • Pemberian kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) target 9% dari total portfolio kredit • Lending to the MSME/RPIM sector at 19.5% of the total loan portfolio • Lending to Eco-Friendly Business Activities (KUBL) target 9% of the total loan portfolio
	Pemantauan kualitas kredit keuangan berkelanjutan Sustainable finance credit quality monitoring	Rasio NPL gross kredit keuangan berkelanjutan dibandingkan total kredit pada sektor keuangan berkelanjutan <5%. Gross NPL ratio of sustainable finance loans compared to total loans in the sustainable finance sector below 5%.
	Dalam satu tahun terdapat penyelenggaraan CSR: Lingkungan • Penanaman pohon • Pengelolaan sampah Ekonomi • Literasi keuangan • Pelatihan UMKM Sosial • Pendidikan anak • Kesehatan anak In one year, there are CSR events as follows: Environment • Tree planting • Waste management Economy • Financial literacy • MSME training Social • Children's education • Children's health	Lingkungan • Jumlah pohon yang ditanam • Menghitung jumlah CO^2 dan O^2 • Inisiatif pengelolaan sampah (softskill/hardskill) Ekonomi • Sasaran peserta literasi keuangan sesuai dengan target OJK • Jumlah peserta pelatihan • Nilai *pre post test* Sosial • Inisiatif peningkatan kualitas pendidikan anak melalui capacity building guru • Inisiatif peningkatan kualitas kesehatan anak Environment • Number of tree planted • Calculating total CO^2 and O^2 • Waste management initiatives (softskill/hardskill) Economy • The beneficiaries of financial literacy programs in OJK targets are met • Number of training participants • Pre-post test score Social • Initiatives to enhance the quality of children's education through teacher capacity building • Initiatives to enhance the quality of children's health
2026	Peningkatan portofolio kredit dan surat berharga dalam keuangan berkelanjutan Increased portfolio of loans and securities in sustainable finance	• Pemberian kredit pada sektor UMKM/RPIM sebesar 19,75% dari total portfolio kredit • Pemberian kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) target 9% dari total portfolio kredit • Lending to the MSME/RPIM sector at 19.75% of the total loan portfolio • Lending to Eco-Friendly Business Activities (KUBL) target 9% of the total loan portfolio
	Pemantauan kualitas kredit keuangan berkelanjutan Sustainable finance credit quality monitoring	Rasio NPL gross kredit keuangan berkelanjutan dibandingkan total kredit pada sektor keuangan berkelanjutan <5%. Gross NPL ratio of sustainable finance loans compared to total loans in the sustainable finance sector below 5%.
	Dalam satu tahun terdapat penyelenggaraan CSR: Lingkungan • Penanaman pohon • Pengelolaan sampah Ekonomi • Literasi keuangan • Pelatihan UMKM Sosial • Pendidikan anak • Kesehatan anak In one year, there are CSR events as follows: Environment • Tree planting • Waste management Economy • Financial literacy • MSME training Social • Children's education • Children's health	Lingkungan • Jumlah pohon yang ditanam • Menghitung jumlah CO^2 dan O^2 • Inisiatif pengelolaan sampah (*softskill/hardskill*) Ekonomi • Sasaran peserta literasi keuangan sesuai dengan target OJK • Jumlah peserta pelatihan • Nilai *pre-post test* Sosial • Inisiatif peningkatan kualitas pendidikan anak melalui perbaikan sarana prasarana • Inisiatif peningkatan kualitas kesehatan anak Environment • Number of tree planted • Calculating total CO^2 and O^2 • Waste management initiatives (softskill/hardskill) Economy • The beneficiaries of financial literacy programs in OJK targets are met • Number of training participants • Pre-post test score Social • Initiatives to enhance the quality of children's education through facility and infrastructure improvements • Initiatives to enhance the quality of children's health

Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Target	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2027	Peningkatan portofolio kredit dan surat berharga dalam keuangan berkelanjutan Increased portfolio of loans and securities in sustainable finance	• Pemberian kredit pada sektor UMKM/RPIM sebesar 20% dari total portfolio kredit • Pemberian kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) target 9% dari total portfolio kredit • Lending to the MSME/RPIM sector at 20% of the total loan portfolio • Lending to Eco-Friendly Business Activities (KUBL) target 9% of the total loan portfolio
	Pemantauan kualitas kredit keuangan berkelanjutan Sustainable finance credit quality monitoring	Rasio NPL gross kredit keuangan berkelanjutan dibandingkan total kredit pada sektor keuangan berkelanjutan <5%. Gross NPL ratio of sustainable finance loans compared to total loans in the sustainable finance sector below 5%.
	Dalam satu tahun terdapat penyelenggaraan CSR: Lingkungan • Penanaman pohon • Pengelolaan sampah Ekonomi • Literasi keuangan • Pelatihan UMKM Sosial • Pendidikan anak • Kesehatan anak In one year, there are CSR events as follows: Environment • Tree planting • Waste management Economy • Financial literacy • MSME training Social • Children's education • Children's health	Lingkungan • Jumlah pohon yang ditanam • Menghitung jumlah CO^2 dan O^2 • Inisiatif pengelolaan sampah (*softskill/hardskill*) Ekonomi • Sasaran peserta literasi keuangan sesuai dengan target OJK • Jumlah peserta pelatihan • Nilai *pre-post test* Sosial • Inisiatif peningkatan kualitas pendidikan anak melalui perbaikan sarana prasarana • Inisiatif peningkatan kualitas kesehatan anak Environment • Number of tree planted • Calculating total CO^2 and O^2 • Waste management initiatives (*softskill/hardskill*) Economy • The beneficiaries of financial literacy programs in OJK targets are met • Number of training participants • Pre-post test score Social • Initiatives to enhance the quality of children's education through facility and infrastructure improvements • Initiatives to enhance the quality of children's health
2028	Peningkatan portofolio kredit dan surat berharga dalam keuangan berkelanjutan Increased portfolio of loans and securities in sustainable finance	• Pemberian kredit pada sektor UMKM/RPIM sebesar 20,5% dari total portfolio kredit • Pemberian kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) target 9% dari total portfolio kredit • Lending to the MSME/RPIM sector at 20.5% of the total loan portfolio • Lending to Eco-Friendly Business Activities (KUBL) target 9% of the total loan portfolio
	Pemantauan kualitas kredit keuangan berkelanjutan Sustainable finance credit quality monitoring	Rasio NPL gross kredit keuangan berkelanjutan dibandingkan total kredit pada sektor keuangan berkelanjutan <5%. Gross NPL ratio of sustainable finance loans compared to total loans in the sustainable finance sector below 5%.
	Dalam satu tahun terdapat penyelenggaraan CSR: Lingkungan • Penanaman pohon • Pengelolaan sampah Ekonomi • Literasi keuangan • Pelatihan UMKM Sosial • Pendidikan anak • Kesehatan anak In one year, there are CSR events as follows: Environment • Tree planting • Waste management Economy • Financial literacy • MSME training Social • Children's education • Children's health	Lingkungan • Jumlah pohon yang ditanam • Menghitung jumlah CO^2 dan O^2 • Inisiatif pengelolaan sampah (*softskill/hardskill*) Ekonomi • Sasaran peserta literasi keuangan sesuai dengan target OJK • Jumlah peserta pelatihan • Nilai *pre-post test* Sosial • Inisiatif peningkatan kualitas pendidikan anak melalui perbaikan sarana prasarana • Inisiatif peningkatan kualitas kesehatan anak Environment • Number of tree planted • Calculating total CO^2 and O^2 • Waste management initiatives (softskill/hardskill) Economy • The beneficiaries of financial literacy programs in OJK targets are met • Number of training participants • Pre-post test score Social • Initiatives to enhance the quality of children's education through facility and infrastructure improvements • Initiatives to enhance the quality of children's health

Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Target	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2029	Peningkatan portofolio kredit dan surat berharga dalam keuangan berkelanjutan Increased portfolio of loans and securities in sustainable finance	• Pemberian kredit pada sektor UMKM/RPIM sebesar 20,75% dari total portfolio kredit • Pemberian kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) target 9% dari total portfolio kredit • Lending to the MSME/RPIM sector at 20.75% of the total loan portfolio • Lending to Eco-Friendly Business Activities (KUBL) target 9% of the total loan portfolio
	Pemantauan kualitas kredit keuangan berkelanjutan Sustainable finance credit quality monitoring	Rasio NPL gross kredit keuangan berkelanjutan dibandingkan total kredit pada sektor keuangan berkelanjutan <5%. Gross NPL ratio of sustainable finance loans compared to total loans in the sustainable finance sector below 5%.
	Dalam satu tahun terdapat penyelenggaraan CSR: Lingkungan • Penanaman pohon • Pengelolaan sampah Ekonomi • Literasi keuangan • Pelatihan UMKM Sosial • Pendidikan anak • Kesehatan anak In one year, there are CSR events as follows: Environment • Tree planting • Waste management Economy • Financial literacy • MSME training Social • Children's education • Children's health	Lingkungan • Jumlah pohon yang ditanam • Menghitung jumlah CO^2 dan O^2 • Inisiatif pengelolaan sampah (*softskill/hardskill*) Ekonomi • Sasaran peserta literasi keuangan sesuai dengan target OJK • Jumlah peserta pelatihan • Nilai *pre-post test* Sosial • Inisiatif peningkatan kualitas pendidikan anak melalui perbaikan sarana prasarana • Inisiatif peningkatan kualitas kesehatan anak Environment • Number of tree planted • Calculating total CO^2 and O^2 • Waste management initiatives (softskill/hardskill) Economy • The beneficiaries of financial literacy programs in OJK targets are met • Number of training participants • Pre-post test score Social • Initiatives to enhance the quality of children's education through facility and infrastructure improvements • Initiatives to enhance the quality of children's health

Rencana Satu Tahun dan Realisasi
One Year Plan and Realization

No.	Uraian Aktivitas Description of Activity	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024
1.	Pejabat dan/atau officer Bank telah mengikuti workshop/seminar atau program peningkatan kompetensi terkait dengan Keuangan Berkelanjutan. The Bank's officers have participated in workshops/seminars or competency improvement programs related to Sustainable Finance.	Selama 2024, Bank secara aktif mengikutsertakan pejabat dan officer Bank pada program peningkatan kapasitas yang berorientasi pada aspek Keberlanjutan dan ESG yaitu: 1. Teknis Menetapkan Target Penurunan Emisi – Pendekatan Ilmiah vs Praktis 2. Emisi Scope 3 & Verifikasi GHG 3. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia 4. *Carbon Footprint, Life Cycle Asessment, and PROPER* 5. *Training Green House (GHG) Emissions Inventory* 6. *How to Prevent Greenwashing in Suitanable Finance* 7. *Board Governance Forum: Climate Reporting in The Financial Statements* 8. *The Carbon Digital Conference 2024* 9. *Navigating For Sustainability: Financial Leadership In A Changing World* 10. Optimalisasi Peran Industri Keuangan Guna Pencegahan *Green Financial Crime* dan Tindak Pidana Lainnya 11. *EV Insurance, International Best Practices for Innovation of New Energy Products and Services* During 2024, the Bank actively involved Bank executives and officers in capacity-building programs oriented towards Sustainability and ESG aspects, namely: 1. Technicalities of Setting Emission Reduction Targets - Scientific vs Practical Approach 2. Scope 3 Emissions & GHG Verification 3. The Role of Taxonomy for Indonesian Sustainable Finance (TKBI) in Driving Energy Transition Towards Net Zero Emission Indonesia 4. Carbon Footprint, Life Cycle Assessment, and PROPER 5. Training Green House (GHG) Emissions Inventory 6. How to Prevent Greenwashing in Suitanable Finance 7. Board Governance Forum: Climate Reporting in the Financial Statements 8. The Carbon Digital Conference 2024 9. Navigating for Sustainability: Financial Leadership In A Changing World 10. Optimizing the Role of the Financial Industry to Prevent Green Financial Crime and Other Criminal Acts 11. EV Insurance, International Best Practices for Innovation of New Energy Products and Services

No.	Uraian Aktivitas Description of Activity	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024
2.	Peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan/kredit pada kegiatan usaha UMKM atau berwawasan lingkungan. Increased financing/credit portfolio growth in MSME or eco-friendly business activities.	RPIM realisasi 19,04% RPIM Non-bank realisasi 19,55% KUBL realisasi 8,74% Realization of RPIM is 19.04% Realization of Non-bank RPIM is 19.55% KUBL realized 8.74%
3.	Evaluasi dan Monitoring kualitas kredit keuangan berkelanjutan. Evaluation and monitoring of Sustainable Finance credit quality.	NPL RPIM realisasi 0,35% NPL RPIM Non-bank realisasi 0,36% Realization of RPIM NPL is 0.35% Realization of Non-bank RPIM NPL is 0.36%
4.	Pengembangan produk dan layanan Development of products and services	• Produk dan layanan ramah lingkungan: 1. Meluncurkan TORA Green Savings yang memfasilitasi nasabah simpanan yang ingin berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan menyisihkan sebesar 0,5 persen per tahun dari bunga tabungan untuk penanaman mangrove bekerja sama dengan Carbon Ethics. 2. Meluncurkan TORA Blue Ocean Savings yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menabung sekaligus berdonasi untuk pengolahan limbah sampah khususnya plastik bermitra dengan Waste4Change. • Environmentally friendly products and services: 1. Launched the TORA Green Savings, which facilitates savings customers who want to contribute to environmental preservation by allocating 0.5 percent per year of savings interest for mangrove planting in in partnership with CarbonEthics. 2. Launched the TORA Blue Ocean Savings, which makes it easy for customers to save and donate for waste management, especially plastic, in partnership with Waste4Change.
5.	Lanjutan pengkinian SOP sesuai dengan perkembangan regulasi Keuangan Berkelanjutan, minimal terdiri dari : • Kebijakan Perkreditan Bank; Continued updating of SOPs in accordance with the development of Sustainable Finance regulations, at least consisting of : • Bank Credit Policy;	• Melakukan kajian Piagam Komite Keberlanjutan • Perbaikan Kebijakan Keberlanjutan (*drafting*) meliputi: - SOP - Credit Policy - Credit Limit • Reviewed the Sustainability Committee Charter • Sustainability Policy improvements (drafting) include: - SOP - Credit Policy - Credit Limit
6.	Implementasi "*green office*" lanjutan, yang dilakukan dengan cara: • pengadaan tempat sampah khusus sampah plastik di lingkungan kantor Advanced "green office" implementation, which is carried out by: • procurement of special plastic waste bins within the office environment	• Penggunaan panel surya (PLTS) pada J Trust Bank cabang Depok • Pengadaan tempat sampah khusus sampah plastik di lingkungan kantor • Penghematan pemakaian listrik dan air • Penghematan penggunaan kertas (*paperless business process*) • Kampanye gaya hidup ramah lingkungan • The use of solar panels (PLTS) at J Trust Bank Depok branch • Procurement of special plastic waste bins within the office • Savings in electricity and water usage • Savings in paper usage (paperless business process) • Environmentally friendly lifestyle campaign
7.	Implementasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR The implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) or CSR activities	• Pelaksanaan 29 kegiatan CSR yang mencangkup pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan • Implementation of 29 CSR activities covering the economic pillar, social pillar, and environmental pillar.

PRIORITAS TERHADAP DUKUNGAN TPB

Bentuk komitmen J Trust Bank sebagai bagian dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam merealisasikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dengan membangun dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mampu menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Selama tahun 2024, J Trust Bank fokus pada upaya memenuhi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni tujuan:

PRIORITY TO SUPPORT THE SDGs

J Trust Bank's commitment as part of Indonesian society to actively participate in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) targets in Indonesia by building and developing sustainable businesses that are not only profit-oriented but also capable of preserving natural resources and environmental sustainability for future generations.

During 2024, J Trust Bank focused on fulfilling the achievement of the Sustainable Development Goals, namely goals:

2 ZERO HUNGER

TUJUAN 2
Goals 2

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, seta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
Alleviate hunger, achievw food security, supply better nutrition, as well as support the sustainable agriculture.

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

TUJUAN 3
Goals 3

Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
Ensure healthy lives and improve the well-being of people of all ages.

4 QUALITY EDUCATION

TUJUAN 4
Goals 4

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Ensure inclusive and equal quality education while supporting lifelong learning opportunities for all.

6 CLEAN WATER AND SANITATION

TUJUAN 6
Goals 6

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Ensure the availability and sustainable mangament of clean water and sanitation for all.

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

TUJUAN 8
Goals 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
Support inclusive and sustainable economic growth, create full and productive employment, and provide decent work for all.

13 CLIMATE ACTION

TUJUAN 13
Goals 13

Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim yang berdampak pada setiap makhluk hidup.
Take urgent action to fight climate changes and its effects that affect well-being.

14 LIFE BELOW WATER

TUJUAN 14
Goals 14

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Conserve and sustainably utilize marine and ocean resources for sustainable development.

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

TUJUAN 17
Goals 17

Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global.
Strengthen implementation and revitalizing global partnership.

J TRUST BANK
SAIKYO
Kerja Sama,
nasi Pendidikan dari
& The Saikyo Bank, Ltd.
の協力協定 JTrust Bank & Saikyo
Bekasi, 21 Oktober 2024

MENGELOLA KEBERLANJUTAN

Managing Sustainability

Tata kelola keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap aktivitas bisnis sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sustainability governance is the main foundation in ensuring that every business activity aligns with sustainability values, covering economic, social, and environmental aspects.

Ratna

Ratna si pemilik pemikiran inovatif yang suka menantang hal-hal baru. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Ratna dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Harimau Sumatra.

Ratna is an innovative thinker who likes to challenge new things. As one of J Trust Bank's mascots, Ratna is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animal, the Sumatran Tiger.

Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan, J Trust Bank menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Tata kelola keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap aktivitas bisnis sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan, Bank terus berupaya memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat ketahanan jangka panjang perusahaan. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan POJK Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

As a financial institution committed to sustainability, J Trust Bank implements transparent, accountable, and responsible governance. Sustainability governance is the main foundation in ensuring that every business activity aligns with sustainability values, covering economic, social, and environmental aspects.

By integrating a sustainable approach into the decision-making process, the Bank continues to have a positive impact on all stakeholders, while strengthening the Company's long-term resilience. This commitment is in line with OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies and POJK Number 17/2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN TATA KELOLA

Dewan Komisaris bertugas mengawasi/mengarahkan/memantau/mengevaluasi aspek keberlanjutan Bank, dan sedangkan Direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola pelaksanaan aspek keberlanjutan Bank. Pada tahap perencanaan serta penerapan strategi umum, Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif menjadi bagian dari proses pembahasan dan persetujuan. [GRI 2-12]

Melalui Komite Keberlanjutan dan keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi ini menghasilkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana bisnis Bank yang secara berkala disampaikan ke regulator dan menjadi panduan bagi Bank dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Adapun sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, RAKB tersebut, secara prosedural telah melalui verifikasi dari Direktur Finance dan Planning. Sedangkan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran dalam mengawasi penyusunan laporan dan yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris. [GRI 2-12][GRI 2-13][GRI 2-14]

Dalam pelaksanaannya, Komite Bank memiliki Komite Keberlanjutan sebagai pelaksana teknis kegiatan keuangan berkelanjutan yang melibatkan banyak divisi. Komite Keberlanjutan mencakup memiliki enam Gugus Tugas yang terdiri dari divisi-divisi yang relevan dibantu oleh pejabat dan karyawan yang ditunjuk dan terdiri dari beragam pengalaman dan disiplin ilmu.

KOMITE KEBERLANJUTAN

Komite Keberlanjutan merupakan pelaksana teknis penerapan keuangan berkelanjutan. Komite ini mencakup gugus tugas Keberlanjutan yang terdiri dari lintas divisi. Komite ini diketuai oleh Business Director kemudian dipimpin oleh Kepala Keberlanjutan yang ditugaskan kepada SEVP Business Banking. [OJK E.1][GRI 2-13]

Mengingat luasnya cakupan tugas Komite Keberlanjutan, gugus tugas Keberlanjutan berperan dalam merancang rencana kerja, menetapkan target, mengimplementasikan kebijakan, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan pengembangan aspek keberlanjutan dapat berjalan dengan fokus dan efektif.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF GOVERNANCE ORGAN

The Board of Commissioners is tasked with overseeing/directing/monitoring/evaluating the Bank's sustainability aspects, while the Board of Directors is fully responsible for managing the Bank's sustainability. At the planning and implementation stage of the general strategy, the Board of Commissioners and Board of Directors are actively involved in the discussion and approval process. [GRI 2-12]

Through the Sustainability Committee and the involvement of the Board of Directors, a Sustainable Finance Action Plan (SFAP) is produced as an integral part of the Bank's business plan, which is regularly submitted to the regulator and serves as a guide for the Bank in implementing sustainable finance. Prior to being approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors, the SFAP has been procedurally verified by the Director of Finance and Planning. Meanwhile, in the preparation of the Sustainability Report, the Board of Directors has a role in preparing the report which is then approved by the Board of Commissioners. [GRI 2-12][GRI 2-13][GRI 2-14]

In its implementation, the Sustainability Committee as the technical executor of the financial activities has six Task Forces consisting of relevant divisions assisted by appointed officials and employees, consisting of diverse experiences and disciplines.

SUSTAINABILITY COMMITTEE

The Sustainability Committee is the technical manager for the implementation of sustainable finance. The committee includes a cross-divisional task force. The committee is led by the Business Director and the Head of Sustainability who is assigned to the SEVP of Business Banking. [OJK E.1][GRI 2-13]

Considering the broad scope of the Sustainability Committee's duties, the Sustainability Task Force plays a role in designing work plans, setting targets, implementing policies, and conducting overall evaluations to ensure the development of sustainability aspects can run with focus and effective.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Keberlanjutan

1. Menyiapkan peta jalan (*roadmap*), merumuskan strategi, dan kerangka kerja yang efektif sehubungan dengan penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank;
2. Merekomendasikan kebijakan, rencana aksi, target, dan pengungkapan yang sesuai dengan strategi penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank;
3. Meningkatkan kapasitas pejabat dan karyawan untuk memastikan terlaksananya strategi dan program Keberlanjutan yang berkualitas;
4. Mengidentifikasi potensi risiko dari penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank yang berdampak baik bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan;
5. Melakukan pengawasan terhadap penerapan keberlanjutan Perusahaan Bank serta melakukan pengelolaan risiko dan dampak dari penerapan tersebut;
6. Melakukan pemantauan integrasi penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank dalam aktivitas operasional Perusahaan;
7. Melakukan penilaian penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank secara menyeluruh dan menentukan potensi untuk perbaikan serta inisiatif baru;
8. Mengelola aktivitas komunikasi dan publikasi aspek Keberlanjutan Perusahaan Bank;
9. Bertindak sebagai liaison untuk regulator dan pihak eksternal lainnya;
10. Menyusun dokumen rencana aksi dan pelaporan terkait penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank;
11. Melaporkan kepada Direksi pada setiap akhir tahun buku, atas pelaksanaan kerja Komite Keberlanjutan beserta pencapaian penerapan Keberlanjutan Perusahaan dan rekomendasi terkait pengembangan penerapan Keberlanjutan Bank Perusahaan;
12. Membangun kemitraan dan atau bekerja sama dengan pihak eksternal jika dibutuhkan dalam upaya meningkatkan nilai dan kualitas penerapan Keberlanjutan Perusahaan Bank.

Duties and Responsibilities of the Sustainability Committee

1. Preparing a roadmap, formulating strategies, and an effective framework concerning the implementation of Corporate Sustainability;
2. Recommending policies, action plans, targets, and disclosures that are in line with the Company's Sustainability implementation strategy;
3. Enhancing the capacity of officers and employees to ensure the implementation of quality Sustainability strategies and programs;
4. Identifying potential risks from the implementation of Corporate Sustainability that impact both the Company and stakeholders;
5. Supervising the implementation of the Company's sustainability program and managing the risks and impacts of such implementation;
6. Monitoring the integration of the implementation of corporate sustainability into the Company's operational activities;
7. Conducting an overall assessment of the Company's Sustainability implementation and determining the potential for improvement and new initiatives;
8. Managing communication and publication activities of the Company's Sustainability aspects;
9. Acting as a liaison to regulators and other external parties;
10. Developing action plans and reporting documents related to the implementation of Corporate Sustainability;
11. Reporting to the Board of Directors at the end of each financial year, on the implementation of the Sustainability Committee's work along with the achievement of the Company's Sustainability implementation and recommendations related to the development of the Company's Sustainability implementation;
12. Building partnerships and or cooperating with external parties if needed to increase the value and quality of the implementation of Corporate Sustainability.

Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas di Bawah Komite Keberlanjutan
Duties and Responsibilities of Task Force under the Sustainability Committee

Gugus Tugas Task Force	**Tugas** Duties
Gugus Tugas Kebijakan dan Peraturan Internal Policy & Internal Regulation Task Force	Menyusun landasan penerapan usaha berkelanjutan yang ditandai dengan tersedianya regulasi internal seperti kebijakan, standar prosedur operasional dan lainnya. Preparing a foundation for sustainable business implementation, characterised by the availability of internal regulations such as policies, standard operating procedures, and others.

Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas di Bawah Komite Keberlanjutan
Duties and Responsibilities of Task Force under the Sustainability Committee

Gugus Tugas Task Force	Tugas Duties
Gugus Tugas Pengembangan Produk dan Layanan Product and Service Development Task Force	Menciptakan dan/atau mengembangkan produk dan layanan perbankan yang berorientasi pada implementasi keberlanjutan perusahaan yang dapat diakses secara inklusif oleh seluruh kelompok nasabah. Creating and/or developing banking products and services that are orientated towards the implementation of corporate sustainability, and that can be accessed inclusively by all customer groups.
Gugus Tugas Peningkatan Kapasitas Karyawan Employee Capacity Building Task Force	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan karyawan melalui rangkaian pelatihan terkait aspek keberlanjutan agar perusahaan dapat menjalankan usaha berkelanjutan yang optimal. Improving the understanding and knowledge of employees through a range of sustainability related training to enable the company to run an optimal sustainable business.
Gugus Tugas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Komunikasi Corporate Social Responsibility and Communications Task Force	• Merancang dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian yang terintegrasi dari strategi pelaksanaan usaha berkelanjutan perusahaan; dan • Melakukan diseminasi informasi dan pengetahuan tentang Keberlanjutan. • Designing and implementing corporate social responsibility as an integrated part of the Company's sustainable business implementation strategy; and • Conducting dissemination of information and knowledge on Sustainability.
Gugus Tugas Green Office Initiatives Green Office Initiatives Task Force	• Merancang dan menjalankan berbagai inisiatif ramah lingkungan dalam operasional perusahaan; dan • Membangun budaya gaya hidup ramah lingkungan pada diri karyawan dan pemangku kepentingan lain yang terlibat pada aktivitas perusahaan. • Designing and implementing various green initiatives in the Company's operations; and • Building a culture of environmentally friendly lifestyles among employees and other stakeholders that are involved in the Company's activities.
Gugus Tugas Perencanaan dan Pelaporan Planning and Reporting Task Force	• Menyusun laporan capaian dan target dari pelaksanaan Keberlanjutan perusahaan yang akan disampaikan kepada Direksi dan pemangku kepentingan lain; dan • Melalukan kajian dan analisa atas capaian dari pelaksanaan keberlanjutan perusahaan. • Preparing a report on the achievements and targets of the Company's Sustainability implementation that will be submitted to the Board of Directors and other stakeholders; and • Reviewing and analyzing the achievements of the Company's sustainability implementation.

Susunan Komite Keberlanjutan
Composition of the Sustainability Committee

Ketua Komite Chairman of the Committee	Business Director
Wakil Ketua Komite Deputy Chairman of the Committee	EVP Human Capital & Corporate Secretary EVP of Human Capital & Corporate Secretary
Sekretaris Komite Secretary of the Committee	Business Strategy & Development Division Head Business Strategy & Development Division Head
Kepala Keberlanjutan Head of Sustainability	SEVP Business Banking SEVP of Business Banking
Wakil Kepala Keberlanjutan Deputy Head of Sustainability	Corporate Communication & CSR Deputy Division Head Head of Corporate Communication & CSR Deputy Division
Anggota Member	1. EVP Commercial & SME Banking, Business Linkage & Consumer 2. EVP Branch Management (Ketua Gugus Tugas Pengembangan Produk dan Layanan – Funding | Chairman of Product and Service Development Task Force - Funding) 3. Corporate Funding & Business Product Division Head 4. Planning & Performance Division Head (Ketua Gugus Tugas Perencanaan dan Pelaporan | Chairman of Planning and Reporting Task Force) 5. Business Linkage & Consumer Division Head 6. Commercial & SME Banking Division Head 7. Corporate Banking Division Head (Ketua Gugus Tugas Pengembangan Produk dan Layanan – Lending | Chairman of Product and Service Development Task Force – Lending) 8. Japan Korean Desk Division Head 9. Human Capital Division Head (Ketua Gugus Tugas Peningkatan Kapasitas Karyawan | Chairman of Employee Capacity Building Task Force) 10. Treasury Capital Markets & FI Division Head 11. Credit Risk Reviewer Division Head 12. Information Technology Division Head 13. Risk Management Division Head (Ketua Gugus Tugas Kebijakan dan Peraturan Internal | Chairman of Internal Policy and Regulation Task Force) 14. Compliance Division Head 15. Corporate Secretary Division Head (Ketua Gugus Tugas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Komunikasi | Chairman of Corporate Social Responsibility and Communication Task Force) 16. General Services Division Head (Ketua Gugus Tugas Green Office Initiatives | Chairman of Green Office Initiatives Task Force) 17. Head Office and Branch Operation Division Head 18. Branch Management Division Head

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEBERLANJUTAN

[OJK E.2][GRI 2-17]

J Trust Bank menyadari bahwa keberhasilan implementasi aspek keberlanjutan tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi keberlanjutan menjadi prioritas dalam membangun kapasitas karyawan di berbagai tingkat organisasi.

Melalui program pelatihan, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya, Bank berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dalam menerapkan strategi keberlanjutan secara efektif, sehingga mendukung tercapainya tujuan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Berikut adalah realisasi pengembangan kompetensi keberlanjutan yang diberikan Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan selama tahun 2024:

SUSTAINABILITY COMPETENCY DEVELOPMENT

[OJK E.2][GRI 2-17]

J Trust Bank realizes that the successful implementation of sustainability aspect is inseparable from the competence of reliable and competitive human resources. Therefore, sustainability competency development is a priority in building employees capacity at various levels of the organization.

Through training programs, workshops, and other educational activities, the Bank is committed to improving the understanding and ability of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees in implementing sustainability strategies effectively, thus supporting the achievement of sustainable business objectives and providing benefits to stakeholders.

The following is the realization of sustainability competency development provided by the Bank to the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees during 2024:

No	Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Teknis Menetapkan Target Penurunan Emisi – Pendekatan Ilmiah vs Praktis Technicalities of Setting Emission Reduction Targets - Scientific vs Practical Approaches	20 Februari 2024 February 20, 2024	Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Public Listed Companies Association
2	Emisi Scope 3 & Verifikasi GHG Scope 3 Emissions & GHG Verification	26 Maret 2024 March 26, 2024	Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Public Listed Companies Association
3	Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia The Role of the Taxonomy for Indonesian Sustainable Finance (TKBI) in Driving Indonesia's Net Zero Emission Energy Transition	28 Maret 2024 March 28, 2024	OJK Institute
4	*Carbon Footprint, Life Cycle Assessment, and PROPER*	23 April 2024 April 23, 2024	Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Public Listed Companies Association
5	Optimalisasi Peran Industri Keuangan Guna Pencegahan Green Financial Crime dan Tindak Pidana Lainnya Optimizing the Role of the Financial Industry to Prevent Environmentally Friendly Financial Crimes and Other Criminal Acts	29 April 2024 April 29, 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Banking Compliance Director Communication Forum
6	*Training Green House (GHG) Emissions Inventory*	15-16 Mei 2024 May 15-16, 2024	Insolity Consulting
7	*How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance*	16 Mei 2024 May 16, 2024	OJK Institute
8	*Navigating For Sustainability: Financial Leadership in a Changing World*	1-3 Agustus 2024 August 1-3, 2024	PERBANAS
9	*EV Insurance, International Best Practices for Innovation of New Energy Product and Services*	31 Oktober 2024 October 31, 2024	OJK Institute
10	*Board Governance Forum: Climate Reporting in the Financial Statements*	14 November 2024 November 14, 2024	KPMG Indonesia
11	The Carbon Digital Conference 2024	10-11 Desember 2024 December 10-11, 2024	Indonesia Carbon Trade Association (IDTCA)

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

[OJK E.3][GRI 2-25]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik, J Trust Bank telah mengembangkan kerangka manajemen risiko yang mencakup berbagai aspek, termasuk risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas, serta risiko iklim. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis dilandasi oleh analisis risiko yang komprehensif, sehingga dapat meminimalkan potensi dampak negatif pada keberlanjutan perusahaan. Terkait risiko iklim (lingkungan dan sosial) Bank sudah mulai mengidentifikasi den mengklasifikasikan kreditur sesuai Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Bank juga sedang dalam proses mengukur Climate Risk Stress Test.

Bank telah mengintegrasikan manajemen risiko sebagai elemen kunci dalam operasional perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan perlindungan bagi pemangku kepentingan. Pendekatan ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan, reputasi, serta pencapaian tujuan keberlanjutan Bank. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), Bank berupaya mengelola risiko secara proaktif guna menghadapi dinamika pasar dan tantangan global.

Bank juga melakukan penelaahan secara berkala efektivitas penerapan manajemen risiko yang diterapkan. Tinjauan tersebut, setidaknya meliputi 4 (empat) hal: perumusan tingkat risiko; kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; alat organisasi manajemen risiko; dan sistem informasi manajemen risiko.

Adapun pengelolaan manajemen risiko di Bank melibatkan organisasi hingga Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Di tingkat pelaksanaan teknis, Bank telah memiliki Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

[OJK E.3][GRI 2-25]

As part of its commitment to good governance, J Trust Bank developed a risk management framework that covers various aspects, including credit, operational, market, and liquidity risks, as well as climate risk. This framework is designed to ensure that every strategic decision is based on a comprehensive risk analysis, to minimize the potential adverse impact on corporate sustainability. Regarding climate risk (environmental and social) the Bank began to identify and classify creditors according to Taxonomy of Green Indonesia (THI) and Taxonomy of Sustainable Finance Indonesia (TKBI). The Bank is also in the process of measuring the Climate Risk Stress Test.

The Bank integrated risk management as a key element in its operations to ensure business sustainability and stakeholder protection. This approach includes identifying, measuring, monitoring, and controlling risks that could potentially affect the Bank's financial performance, reputation, and achievement of sustainability goals. By applying prudential principles, the Bank strives to manage risks proactively to deal with market dynamics and global challenges.

The Bank also periodically reviews the effectiveness of its risk management implementation. The review includes at least 4 (four) matters: risk level formulation; adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors; risk management organizational tools; and risk management information systems.

Risk management in the Bank involves the organization up to the Board of Commissioners, Board of Directors, and other organs under the Board of Commissioners and Board of Directors. At the technical implementation level, the Bank has a Risk Management Division and a Risk Management Committee that is directly responsible to the President Director.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4][GRI 2-29]

J Trust Bank memandang pelibatan pemangku kepentingan sebagai elemen strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi prinsip keberlanjutan. Bank berkomitmen untuk membangun

STAKEHOLDER ENGAGEMENT [OJK E.4][GRI 2-29]

J Trust Bank considers stakeholder engagement as a strategic element in supporting the successful implementation of sustainability principles. The Bank is committed to building transparent, collaborative, and

hubungan yang transparan, kolaboratif, dan saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk yaitu karyawan, nasabah/ pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, pemerintah, media, dan masyarakat.

mutually beneficial relationships with all stakeholders, namely employees, customers, business partners, shareholders, government, media, and the community.

Para pemangku kepentingan tersebut termasuk yang terpengaruh atas kebijakan dan kegiatan operasional Bank, baik secara langsung mau tidak langsung. Oleh karena itu, Bank berupaya menjalin komunikasi dan membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan karakter setiap kelompok pemangku kepentingan.

These stakeholders include those affected by the Bank's policies and operations, either directly or indirectly. Therefore, the Bank strives to establish communication and build cooperation with stakeholders through methods and approaches that are in accordance with the character of each stakeholder group.

Secara umum, Corporate Secretary Division melaksanakan komunikasi Bank dengan para pemangku kepentingan. Bank akan memanfaatkan seoptimal mungkin saluran komunikasi yang ada baik media cetak, media elektronik, media sosial, hingga pertemuan tatap muka. Sedangkan dalam hal yang lebih spesifik, komunikasi dilakukan oleh divisi-divisi yang berkaitan dengan kegiatan perbankan.

In general, the Corporate Secretary Division implements the Bank's communication with stakeholders. The Bank will utilize the existing communication channels as much as possible, including print media, electronic media, social media, and face-to-face meetings. While in more specific matters, communication is carried out by divisions related to banking activities.

Kelompok Pemangku Kepentingan dan Pendekatan yang Dilakukan
Stakeholder Groups and Approaches

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan Bank Bank Approach
Regulator dan Pemerintah Regulator and Government	• Penyampaian laporan secara berkala kepada regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas pasar modal. • Rapat dan pembahasan pada waktu tertentu • Submission of periodic reports to regulators such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and capital market authorities • Meetings and discussions at certain times.
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)
Nasabah Customer	• Kantor cabang • Call Center • Media massa (luar jaringan dan dalam jaringan), media elektronik, dan media sosial • Aplikasi percakapan Whatsapp • Situs perusahaan • Branch offices • Call Center • Mass media (offline and online), electronic media, and social media • WhatsApp application • Company website
Komunitas dan Masyarakat Community and General Public	• Keterbukaan informasi melalui berbagai saluran informasi • Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan • Media sosial dan situs perusahaan • Information disclosure through various information channels • Implementation of social and environmental responsibility programmes • Company social media and website

Pemasok atau Mitra Bisnis Supplier and Business Partner	Proses pengadaan barang dan jasa Procurement of goods and services
Karyawan Employee	• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mencakup kesejahteraan serta hak dan kewajiban karyawan. • Sarana komunikasi internal • Pertemuan berkala • Collective Labor Agreement (CLA) that covers employee welfare, rights, and obligations. • Internal means of communication • Periodic meetings
Media	• Siaran pers • Keterbukaan informasi • Berbagai kegiatan dengan media • Pers release • Information disclosure • Various activities with media
Asosiasi Association	Keanggotaan dan keterlibatan dalam aktivitas asosiasi Membership and engagement in association activities

TANTANGAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

[OJK E.5]

Penerapan keuangan berkelanjutan dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan strategis. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara pelaku industri keuangan dan, nasabah, dan ekosistem bisnis pada umumnya mengenai prinsip keberlanjutan dalam operasional dan investasi.

Selain itu, semakin banyaknya peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku juga memberikan tantangan bagi Bank untuk dapat mengadopsi peraturan, standar, dan pedoman tersebut dengan lebih cepat. Tantangan lainnya adalah penyelarasan antara tujuan keberlanjutan dengan kepentingan bisnis jangka pendek, seperti tantangan untuk mencapai profitabilitas dalam waktu singkat.

Implementasi aspek berkelanjutan sering kali membutuhkan investasi awal yang besar dan perubahan signifikan dalam strategi bisnis, yang dapat menghadirkan resistensi di tingkat organisasi. Oleh karena itu, komitmen kepemimpinan, penguatan regulasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan keberhasilan keuangan berkelanjutan di masa depan.

CHALLENGES IN SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION

[OJK E.5]

The implementation of sustainable finance is faced with various challenges that require a strategic approach. One of the main challenges is how to improve understanding and awareness among financial industry players, customers, and the business ecosystem in general regarding sustainability principles in operations and investments.

In addition, the increasing number of applicable regulations, standards, and guidelines also presents a challenge for the Bank to adopt these regulations, standards, and guidelines more quickly. Another challenge is the alignment of sustainability goals with short-term business interests, such as the challenge of achieving profitability in a short period.

The implementation of sustainability aspects often requires large initial investments and significant changes in business strategy, which can present resistance at the organizational level. Therefore, leadership commitment, regulatory strengthening, and collaboration with various parties are key to overcoming these barriers and ensuring the success of sustainable finance in the future.

Bank juga memastikan untuk mengoptimalkan melibatkan pelibatan para pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal dalam merumuskan dan mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan. Harapannya, program yang direalisasikan dapat memberikan dampak dan manfaat secara maksimal.

The Bank also ensures to optimize the involvement of both internal and external stakeholders in formulating and implementing the application of sustainable finance. Hopefully, the realized program can provide maximum impact and benefits.

MENINGKATKAN BUDAYA KEBERLANJUTAN [OJK F.1] [GRI 2-24]

J Trust Bank menyadari bahwa keberlanjutan tidak hanya merupakan strategi bisnis, tetapi juga harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Untuk itu, Bank secara konsisten mendorong pembentukan budaya keberlanjutan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan seluruh lapisan organisasi. Dimulai dengan meningkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya prinsip-prinsip keberlanjutan, Bank secara rutin mengikutsertakan karyawan pada pelatihan, seminar, dan program edukasi yang relevan dengan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Penerapan budaya keberlanjutan di lingkungan J Trust Bank juga berorientasi pada **Visi Keberlanjutan:** Menjadi bank dengan komitmen praktik bisnis dan operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Visi tersebut berpedoman pada 8 (delapan) prinsip Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan, seperti tertuang dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan

IMPROVING SUSTAINABILITY CULTURE [OJK F.1][GRI 2-24]

J Trust Bank realizes that sustainability is not only a business strategy but should also be an integral part of the organization's culture. For this reason, the Bank consistently encourages the establishment of a culture of sustainability through various initiatives that involve all levels of the organization. Starting with improving employees' understanding of the importance of sustainability principles, The bank regularly includes employees in training, seminars, and educational programs relevant to environmental, social, and governance (ESG) values.

The implementation of a sustainability culture within J Trust Bank is also oriented towards the Bank's **sustainability vision**, which is "To become a bank with a commitment to environmentally, economically and socially responsible business and operational practices, based on good corporate governance". The vision is guided by 8 (eight) principles of Sustainable Financial Management, as stipulated in POJK Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang mencakup: investasi yang bertanggung jawab; strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; tata kelola; komunikasi yang informatif; inklusif; pengembangan sektor unggulan prioritas; koordinasi dan kolaborasi.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan budaya keberlanjutan, Bank juga melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap ketentuan, dan peraturan dan perkembangan implementasi aspek Keberlanjutan yang yang berlaku bertujuan untuk meningkatkan penerapan kesadaran budaya kepatuhan. Selain itu, berharap agar seluruh organisasi di lingkungan Bank terlibat dalam memberikan opini terkait dengan produk dan aktivitas baru, penerbitan ketentuan internal, dan melakukan kajian terhadap kegiatan usaha Bank.

Dalam meningkatkan budaya keberlanjutan, J Trust Bank telah menugaskan Komite Keberlanjutan untuk memastikan adanya kemajuan keselarasan praktik bisnis dan operasional dengan kelestarian alam dan kesejahteraan makhluk hidup, melalui peningkatan nilai-nilai perusahaan, penerapan dan pengelolaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) secara strategis dan berkelanjutan.

of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies which include: responsible investment; sustainable business strategies and practices; social and environmental risk management; governance; informative communication; inclusive; development of priority leading sectors; coordination and collaboration.

In addition, to improve the culture of sustainability, the Bank also conducts continuous socialization of provisions, regulations, and developments in the implementation of Sustainability aspects aimed at increasing the application of compliance culture awareness. In addition, the Bank expects all organizations within the Bank to be involved in providing opinions related to new products and activities, issuing internal regulations, and conducting reviews of the Bank's business activities.

In enhancing the sustainability culture, J Trust Bank assigned a Sustainability Committee to ensure the progress of alignment of business practices and operations with the preservation of nature and the welfare of living beings, through the enhancement of corporate values, implementation and management of Environment, Social, and Governance (ESG) strategically and sustainably.

J TRUST
Mangrove Planting Ceremony

J TRUST BANK
Jトラスト銀行
KCP Depok - Margonda

MENGHASILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Delivering Sustainable Economic Growth

Bank memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai produk dan layanan yang inklusi dan inovatif dengan tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

The Bank must provide a variety of inclusive and innovative products and services while remaining environmentally and socially responsible.

Ulfa

Ulfa si pemilik sifat senang berteman, mengayomi dan penyayang. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Ulfa dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Orang Utan.

Ulfa is the owner of a friendly, nurturing, and caring nature. As one of J Trust Bank's mascots, Ulfa is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animal, the Orang Utan.

PENDEKATAN MANAJEMEN [GRI 3-3]

Sejalan dengan prinsip keberlanjutan, J Trust Bank bertekad memberikan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui filosofi Kaizen, Bank secara konsisten menyempurnakan produk dan layanan untuk memenuhi ekspektasi nasabah sehingga kinerja ekonomi Bank dapat terus berkelanjutan.

Di samping itu, Bank juga terus berupaya menyeimbangkan aspek ekonomi dengan aspek lingkungan dan sosial. Bank menyadari bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan, Bank memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai produk dan layanan yang inklusi dan inovatif dengan tetap mengelola keuangan secara berkelanjutan dan memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

MANAGEMENT APPROACH [GRI 3-3]

In line with the principle of sustainability, J Trust Bank is committed to providing the best value for all stakeholders. Through the Kaizen philosophy, the Bank consistently improves products and services to meet customer expectations so that the Bank's economic performance can continue to be sustainable.

In addition, the Bank also continues to balance economic aspects with environmental and social aspects. The Bank realizes that as a company engaged in the financial services industry, the Bank must provide a variety of inclusive and innovative products and services while remaining environmentally and socially responsible.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank mendukung pembiayaan kepada 11 kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) plus satu: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank juga berpartisipasi pada pembiayaan untuk kaum perempuan dhuafa melalui berbagai jenis pinjaman. Adapun selama tahun 2024, total penyaluran kredit KUBL dan UMKM terealisasi sebesar Rp2,32 triliun atau 8,74% dari total portofolio kredit bank.

In this regard, the Bank supports financing to 11 categories of Eco-friendly Business Activities (KUBL) plus one: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The Bank also participates in financing for impoverished women through various types of loans. During 2024, the total distribution of KUBL and MSME loans was realized at Rp2.32 trillion or 8.74% of the Bank's total loan portfolio.

KINERJA TARGET DAN REALISASI

Kinerja aspek ekonomi Bank pada tahun 2024 mencatat pencapaian yang positif. J Trust Bank berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,83 miliar. Sedangkan pendapatan bunga neto dapat terealisasi Rp802,13 miliar.

TARGET AND REALIZATION PERFORMANCE

The Bank's economic performance in 2024 recorded a positive achievement. J Trust Bank managed to record a net profit of Rp2.83 billion. Meanwhile, net interest income was realized at Rp802.13 billion.

Rincian Perbandingan Target dengan Kinerja (dalam Rp Juta) [OJK F.2]

Details of Comparison between Target and Performance (in Rp Million) [OJK F.2]

Uraian	2024		2023	2022	Description
	Target	Realisasi Realization	Realisasi Realization	Realisasi Realization	
Pendapatan Bunga Neto	877.559	802.130	805.061	627.647	Net Interest Income
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	272.330	2.832	27.902	86.621	Profit (Loss) for the Year
Penyaluran Pinjaman	29.471.057	26.528.066	23.879.838	19.531.947	Loan Disbursement

NILAI EKONOMI DITERIMA DAN DIDISTRIBUSIKAN

J Trust Bank juga mempertimbangkan nilai yang dapat diterima oleh para pemangku kepentingan. Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung prinsip keberlanjutan perusahaan di mana kehadiran Bank dapat memberikan dampak ekonomi yang positif kepada para pemangku kepentingan. Bank telah mendistribusikan nilai manfaat kepada pemerintah, karyawan, dan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung.

ECONOMIC VALUE RECEIVED AND DISTRIBUTED

J Trust Bank also considers the value that can be received by stakeholders. This initiative is carried out to support the principle of corporate sustainability, where the Bank's presence can have a positive economic impact on stakeholders. The Bank distributed value benefits to the government, employees, and the community both directly and indirectly.

(dalam Rp Juta) (in Rp Million)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Nilai Ekonomi Diterima				**Economic Value Received**
Pendapatan Bunga	3.024.176	2.525.270	1.678.244	Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	414.573	255.800	599.801	Other Operating Income
Jumlah Nilai Ekonomi Diterima	3.438.749	2.781.070	2.278.045	Total Economic Value Received
Nilai Ekonomi Didistribusikan				**Economic Value Distributed**
Beban Bunga	2.222.046	1.720.209	1.050.597	Interest Expenses
Beban Operasional Lainnya	758.275	702.150	897.868	Other Operating Expenses
Gaji dan Tunjangan	360.035	333.839	284.395	Salaries and Allowances
Pembayaran Pajak	(103.644)	6.092	39.374	Tax Payment
Jumlah Nilai Ekonomi Didistribusikan	**3.444.000**	**2.750.106**	**2.193.486**	**Total Economic Value Distributed**

PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN [OJK F.3]

Selama tahun 2024, Bank telah memberikan pembiayaan pada 7 kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dari total 11 kategori KUBL plus satu kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank juga telah memberikan pembiayaan kepada Mitra Dhuafa yang difokuskan pada kaum perempuan dhuafa.

FINANCING TO SUSTAINABILITY BUSINESS ACTIVITIES [OJK F.3]

During 2024, the Bank provided financing to seven categories of Eco-friendly Business Activities (KUBL) of a total of 11 KUBL categories plus one category of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The Bank also provided financing to Mitra Dhuafa, which is focused on underprivileged women.

Pembiayaan Kepada Perempuan Dhuafa
Financing for Dhuafa Women

Uraian	Satuan Unit	2024	2023	2022	Description
Total Pembiayaan	Rp miliar Rp billion	820	1.030	535	Total Financing
Pengguna Akhir	Rp miliar Rp billion	146.122	961.803	876.722	End Users

6 Jenis Pinjaman untuk Perempuan Dhuafa

6 Types of Loan for Underprivileged Women

- **Pinjaman Umum** General loan
- **Pinjaman Pendidikan** Education loan
- **Pinjaman Mikro Bisnis/Modal Kerja** Micro business loan/Working capital
- **Pinjaman Alat Rumah Tangga** Household appliance loan
- **Pinjaman Pengadaan Fasilitas Air dan Sanitasi Rumah Tangga** House water and sanitation facility loan
- **Pinjaman Perbaikan Tempat Usaha** Business premises renovation loan

Pembiayaan Pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan
Financing to Eco-Friendly Business Activities

Rp **23,81**
Miliar | Billion

Energi Terbarukan
Renewable Energy

Rp **90,91**
Miliar | Billion

Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan
Sustainable Water and Wastewater Management

Rp **159,40**
Miliar | Billion

Pencegahan dan Pengendalian Polusi
Pollution Prevention and Control

Rp **193,39**
Miliar | Billion

Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan
Prevention of Natural Resources Depletion and Sustainable Land Use

Rp **179,61**
Miliar | Billion

Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (*Eco-efficient*)

Products that Reduce Resource Usage and Generate Less Pollution (Eco-efficient)

Rp **448,76**
Miliar | Billion

Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional

Environmentally Conscious Buildings that Meet National, Regional, or International Standards or Certifications

Rp **1.221**
Miliar | Billion

Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan UMKM

Business Activities and/or Other Activities of MSME Activities

Rp **2,32**
triliun | trillion

Total penyaluran kredit KUBL dan UMKM terealisasi atau 8,74% dari total portofolio kredit bank.
Total KUBL and MSME lending was realized or 8.74% of the Bank's total loan portfolio.

DANA PENSIUN

Bank memiliki program Dana Pensiun Bagi Karyawan (DPLK) untuk memberikan jaminan kehidupan pada hari tua seluruh karyawan. Iuran DPLK dibayarkan sepenuhnya oleh Bank, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Aktuaris dan disesuaikan dengan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja. Untuk memenuhi komitmen pembayaran pensiun secara tepat waktu, Imbalan Kerja dicadangkan secara akuntansi berdasarkan konsep *Accrual Basis*. Pendekatan ini memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pasca kerja.

Adapun tingkat pendanaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pergantian karyawan, angka mortalitas, masa kerja, kenaikan gaji, dan tingkat suku bunga. Besaran iuran yang disisihkan saat ini disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan dana guna menjamin pembayaran manfaat pensiun pada masa mendatang.

PENSION FUNDS

The Bank has a Pension Fund for Employees (DPLK) program to provide retirement security for all employees. DPLK contributions are fully paid by the Bank, based on calculations made by actuaries and in accordance with PSAK 24 on Employee Benefits. To fulfill pension payment commitments promptly, Employee Benefits are accounted for on an accrual basis. This approach ensures the availability of funds to meet post-employment benefit payment obligations.

The funding level is influenced by various factors, such as employee turnover rate, mortality rate, terms of service, salary increases, and interest rates. The amount of contributions currently allocated is adjusted to the estimated need for funds to ensure the payment of pension benefits in the future.

J TRUST BANK
Istilah dalam Pinjaman Bank
DBR
Debt Burden Ratio
Tingkat kemampuan Debitur untuk mencicil pembayaran pinjaman secara berkala
DSR
Debt Service Ratio
Jumlah pendapatan yang dibutuhkan dalam setahun untuk membayar total hutang tahunan
CCR
Collateral Coverage Ratio
Penilaian agunan yang diberikan oleh appraisal

FLOWCHART PENERIMAAN SISWA BARU

MENINGKATKAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN

Raising Environmental Awareness

Pilar lingkungan menjadi landasan strategis Bank dalam menciptakan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan praktik usaha green banking sebagai bentuk nyata penerapan green economy dalam dunia perbankan melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan, produk simpanan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan (*green campaign*).

The environmental pillar is the Bank's strategic foundation in creating business practices that are not only profit-oriented but also prioritize green banking business practices as a concrete form of green economy implementation in the banking world through the distribution of eco-friendly financing, ecofriendly deposit products, and eco-friendly operational activities (green campaigns).

Sangga

Sangga si pemilik sifat ramah, ceria, suka menolong dan bersahabat. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Sangga dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Komodo.

Sangga is the owner of a friendly, cheerful, helpful, and sociable nature. As one of J Trust Bank's mascots, Sangga is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animals, namely the Komodo.

PENDEKATAN MANAJEMEN [GRI 3-3]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, J Trust Bank secara proaktif menjalankan praktik bisnis perbankan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (*green banking*). Meskipun kegiatan operasional J Trust Bank tidak bersentuhan secara langsung dan berdampak pada lingkungan, komitmen terhadap kelestarian lingkungan tetap menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan perusahaan melalui berbagai inisiatif dan program yang dijalankan.

Komitmen Bank terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dimulai dari proses penilaian proposal kredit yang memperhatikan aspek/kriteria lingkungan. Selain itu, Bank juga berkolaborasi dengan nasabah dan mitra bisnis guna mendorong penerapan gaya hidup ramah lingkungan. Dengan demikian, Bank berharap dapat ikut berkontribusi dalam upaya menurunkan potensi dampak negatif operasional dan usaha Bank terhadap lingkungan melawan perubahan iklim dan pemanasan global yang dipicu oleh gas rumah kaca yang ditimbulkan dari dampak negatif operasional dan usaha Bank.

MANAGEMENT APPROACH [GRI 3-3]

As part of its commitment to sustainable development, J Trust Bank proactively implements environmentally responsible banking business practices (green banking). Although J Trust Bank's operational activities do not directly impact the environment, commitment to environmental sustainability remains a important part of the Company's sustainability strategy through various initiatives and programs.

The Bank's commitment to environmental sustainability starts with the credit proposal assessment process, which takes into account environmental aspects/criteria. By doing so, the Bank hopes to contribute to the movement against climate change and global warming caused by greenhouse gases resulting from the negative impacts of the Bank's operations and business.

Berbagai upaya dan inisiatif yang dilakukan Bank, didasari atas penerapan salah satu dari tiga pilar keberlanjutan Bank: Ekonomi, Sosial, dan lingkungan. Pilar lingkungan menjadi landasan strategis Bank dalam menciptakan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga mengedepankan praktik usaha *green banking* sebagai bentuk nyata penerapan *green economy* dalam dunia perbankan melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan, produk simpanan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan (*green campaign*).

The Bank's various efforts and initiatives are based on the implementation of one of the Bank's three sustainability pillars: Economic, Social, and Environmental. The environmental pillar is the Bank's strategic foundation in creating business practices that are not only profit-oriented but also prioritize green banking business practices as a concrete form of green economy implementation in the banking world through the distribution of eco-friendly financing, eco-friendly deposit products, and eco-friendly operational activities (green campaigns).

PENGELOLAAN MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN [OJK F.5]

J Trust Bank berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan material ramah lingkungan di setiap aspek kegiatan operasional. Upaya ini mencakup penerapan prinsip efisiensi, efektivitas dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIAL MANAGEMENT [OJK F.5]

J Trust Bank is committed to implementing environmentally friendly material management in every aspect of operational activities. This includes applying the principles of efficiency, effectiveness, and responsible use of resources to minimize the impact on the environment.

- **Penggunaan Buku Tabungan Elektronik (*E-statement*)**

  Wujud komitmen Bank dalam pengelolaan material ramah lingkungan yaitu transformasi penggunaan buku tabungan fisik menjadi buku tabungan elektronik (*e-statement*) yang dikirimkan langsung ke alamat surat elektronik (*email*) nasabah yang terdaftar.

  Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dan emisi karbon yang dihasilkan dari proses pencetakan serta distribusi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah. Penggunaan e-statement memastikan informasi yang diterima lebih cepat dan tepat, dengan tetap menjaga keamanan data nasabah melalui sistem pengiriman yang aman dan terintegrasi.

- **The Use of Electronic Passbook (E-statement)**

  A manifestation of the Bank's commitment to environmentally friendly material management is the transformation of the use of physical passbooks into electronic passbooks (e-statements) which are sent directly to the registered customer's email address.

  This initiative not only aims to reduce the use of paper and carbon emissions generated from the printing and distribution process but also provides added value to customers. The use of e-statements ensures that information is received more quickly and accurately while maintaining customer data security through a secure and integrated delivery system.

Pengguna *e-statement*
E-statement Users

Tahun	2024	2023	2022	Year
Pengguna	88.009	56.719	42.706	Users

- ***e-Banking***

  Sebagai bagian dari upaya pengelolaan material yang lebih ramah lingkungan, J Trust Bank terus mengembangkan layanan *e-Banking* untuk meminimalkan penggunaan kertas dalam transaksi perbankan. Bank mendorong nasabah beralih ke transaksi digital yang lebih efisien dan berkelanjutan.

- **e-Banking**

  As part of its efforts to manage more environmentally friendly materials, J Trust Bank continues to develop e-Banking services to minimize the use of paper in banking transactions. The Bank encourages customers to switch to more efficient and sustainable digital transactions. This digitization

Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi konsumsi kertas dan jejak karbon akibat mobilitas ke kantor cabang dan mesin ATM. Pada tahun 2024, J Trust Bank melakukan peremajaan layanan e-Banking sehingga lebih *user friendly*, penambahan fitur, meningkatkan sistem keamanan serta melakukan rebranding dengan memperkenalkan nama baru yaitu J MOBILE untuk *mobile banking* dan J NET untuk *internet banking*.

- ***Internal Garoon***
  Portal internal Garoon merupakan salah satu langkah strategis yang diambil dengan memanfaatkan platform digital untuk proses persetujuan dan komunikasi internal. Melalui inisiatif ini, J Trust Bank secara aktif mendorong penggunaan kertas secara bijak dan meminimalkan penggunaan listrik berupa utilisasi peralatan cetak (*printer*). Dengan pendekatan tersebut, Bank menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi proses kerja yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi.

Pada tahun 2024, jumlah penggunaan kertas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sebanyak 4.083 rim, atau meningkat 13% dari tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh kertas yang digunakan bersertifikat ramah lingkungan. J Trust Bank memastikan bahwa kertas yang digunakan memiliki sertifikasi PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Sertifikasi ini memastikan bahwa kertas yang digunakan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan, sehingga mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

PENGELOLAAN ENERGI DAN EMISI [GRI 3-3]

J Trust Bank berupaya mengelola pengunaan energi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasional yang dijalankan. Dalam kegiatan operasional, Bank menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk pengoperasian kendaraan operasional dan listrik untuk peralatan elektronik dan energi listrik untuk peralatan elektronik.

BBM digunakan untuk kendaraan roda empat dan roda dua, adapun jenis BBM yang digunakan disesuaikan dengan tipe kendaraan yang dipakai serta memastikan seluruh unit kendaraan dalam pemeliharaan yang optimal dengan tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi

not only increases convenience and comfort for customers but also contributes to reducing paper consumption and carbon footprint due to mobility to branch offices and ATMs. In 2024, J Trust Bank enhanced its e-Banking services to make them more user-friendly. This will include adding new features, improving the security system, and rebranding the services by introducing new names: J MOBILE for mobile banking and J NET for internet banking.

- **Internal Garoon**
  The Garoon internal portal is one of the strategic steps taken by utilizing digital platforms for approval processes and internal communications. Through this initiative, J Trust Bank actively encourages the wise use of paper and minimizes the use of electricity in the form of utilization of printing equipment (printers). With this approach, the Bank emphasizes its commitment to integrating sustainable business practices while improving the efficiency of work processes that are faster, safer, and more integrated.

In 2024, the amount of paper used at the Head Office and Branch Offices reached 4,083 reams, an increase of 13% from the previous year. However, all paper used is certified as environmentally friendly. J Trust Bank ensures that the paper used has PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) certification. This certification ensures that the paper used comes from sustainably managed forests, thus supporting environmental preservation and sustainability of natural resources.

ENERGY AND EMISSION MANAGEMENT [GRI 3-3]

J Trust Bank strives to manage energy use to reduce greenhouse gas emissions from its operations. In operational activities, the Bank uses fuel oil (BBM) for the operation of operational vehicles, electricity for electronic equipment, and electrical energy for electronic equipment.

Fuel is used for four-wheeled and two-wheeled vehicles, while the type of fuel used is adjusted to the type of vehicle used and ensures that all vehicle units are in optimal maintenance with the aim of reducing any adverse impact on the environment. While the use of

dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Sedangkan penggunaan energi listrik berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang pemakaiannya dihitung berdasarkan biaya setiap bulannya.

electrical energy comes from Perusahaan Listrik Negara (PLN) whose usage is calculated based on monthly fees.

Dalam upaya mengelola penggunaan listrik agar tidak berlebihan, Bank menggunakan lampu berjenis TL (*tubular lamp*) atau lampu neon di seluruh lingkungan kantor. Lampu jenis neon tersebut memiliki daya tahan lama, yaitu sekitar 15.000 jam. Selain itu, Bank juga sudah menggunakan panel surya percontohan pada Kantor Cabang Depok.

In an effort to manage electricity usage, the Bank uses TL (tubular lamp) or fluorescent lamps throughout the office environment. These fluorescent lamps have a long lifespan of approximately 15,000 hours. In addition, the Bank has also used a pilot solar panel at the Depok Branch Office.

Pada tahun 2024, J Trust Bank memperluas cakupan penghitungan konsumsi energi, mencakup tidak hanya kantor pusat, tetapi juga seluruh kantor cabang di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai konsumsi energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh operasional perbankan.

In 2024, J Trust Bank expanded the scope of energy consumption calculation, covering not only the head office but also all branch offices in Indonesia. This move aims to obtain a more accurate picture of electricity and fuel oil consumption across all banking operations.

Dengan adanya cakupan yang lebih luas, terdapat peningkatan signifikan dalam total penggunaan energi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak berarti menunjukkan peningkatan konsumsi, tetapi lebih pada upaya transparansi dan akurasi dalam pelaporan keberlanjutan.

With the broader scope, there was a significant increase in total energy use compared to the previous year. This increase does not necessarily indicate an increase in consumption, but rather an effort for transparency and accuracy in sustainability reporting.

Pada tahun 2024, total penggunaan BBM jenis Pertalite mencapai 129.758 liter dan penggunaan listrik Bank mencapai 4.745.841 kWh, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1.352.213 kWh dengan cakupan kantor pusat dan 47 kantor cabang J Trust Bank. Adapun total penggunaan energi mencapai 21.669 GJ.

In 2024, the total Pertalite fuel usage reached 129,758 liters and the Bank's electricity usage reached 4,745,841 kWh with coverage of the head office and 47 branches of J Trust Bank. The total energy use reached 21,669 GJ.

Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Realization of Fuel Usage

Jenis BBM	Satuan Unit	2024**	2023*	2022*	Type of Fuel
Pertalite	Liter	129.758	29.811	30.091	Pertalite
	GJ	4.282	984	993	
Pertamax	Liter	8.023	8.386	5.418	Pertamax
	GJ	265	277	179	
Pertamina Dex	Liter	967	1.804	2.705	Pertamina Dex
	GJ	37	69	103	
Jumlah	**Liter**	**138.748**	**40.001**	**38.214**	**Total**
	GJ	**4.584**	**1.329**	**1.275**	

Faktor konversi | Conversion factors:
1 liter Pertamax dan Pertalite = 0,033 GJ | 1 liter Pertamax and Pertalite = 0,033 GJ
1 liter Bio Diesel = 0,032 GJ | 1 liter Bio Diesel = 0,032 GJ
1 liter Pertamina Dex = 0,038 GJ | 1 liter Pertamina Dex = 0,038 GJ

*) Tahun 2022 dan 2023 data yang disajikan merupakan penggunaan listrik kantor pusat | The data presented in 2022 and 2023 is the electricity usage of the head office
**) Tahun 2024 data yang disajikan merupakan penggunaan listrik kantor pusat dan kantor cabang | The data presented in 2024 is the electricity usage of the head office and branch offices

Penggunaan Listrik
Electricity Consumption

Sumber Energi	Satuan Unit	2024**	2023*	2022*	Source of Energy
Listrik	kWh	4.745.841	1.352.213	1.230.258	Electricity
	GJ	17.085	4.868	4.429	

*) Tahun 2022 dan 2023 data yang disajikan merupakan penggunaan listrik kantor pusat
**) Tahun 2024 data yang disajikan merupakan penggunaan listrik kantor pusat dan kantor cabang
*) The data presented in 2022 and 2023 is the electricity usage of the head office
**) The data presented in 2024 is the electricity usage of the head office and branch offices

Total Penggunaan Energi [OJK F.6][GRI 302-1]
Total Energy Usage [OJK F.6][GRI 302-1]

Sumber Energi	Satuan Unit	2024**	2023*	2022*	Source of Energy
BBM	GJ	4.584	1.329	1.275	Fuel
Listrik	GJ	17.085	4.429	4.429	Electricity
Total	GJ	21.669	6.197	5.704	**Total**

Dari hasil perhitungan energi BBM dan listrik di atas, J Trust Bank kemudian melakukan penghitungan emisi yang dihasilkan dari kedua sumber energi tersebut. Metode penghitungan emisi GRK dilakukan sesuai dengan Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC-2006) dan faktor emisi nasional berdasarkan Kalkulator Hijau yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2025.

From the results of the above fuel and electricity energy calculations, J Trust Bank then calculated the emissions generated from the two energy sources. The GHG emission calculation method is carried out in accordance with the Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC-2006) and national emission factors based on the Green Calculator issued by Bank Indonesia and the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment in 2025.

Perhitungan Emisi Karbon [OJK F.11][GRI 305-1][GRI 305-2]
Carbon Emission Calculation Results [OJK F.11][GRI 305-1][GRI 305-2]

Cakupan	Jenis Energi Type of Energy	Emisi yang Dihasilkan (Ton CO_2eq) Emission Generated (Tons CO_2eq) Jumlah Total		Scope
		2024	2023	
Cakupan 1	Pertalite	300,0	68,8	Scope 1
	Pertamax	18,5	19,3	
	Pertamina Dex	2,2	4,1	
Cakupan 2	Listrik | Electricity	3.749,2	1.068,2	Scope 2
Jumlah		**4.069,9**	**1.160,4**	**Total**

Sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi, J Trust Bank menerapkan berbagai langkah strategis yang berfokus pada efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon dari kegiatan operasional. Bank menerapkan sistem telekonferensi untuk menggantikan pertemuan tatap muka yang memerlukan perjalanan terutama penggunaan pesawat terbang. Selain itu, Bank juga mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan daring (*online*). Melalui langkah-langkah ini, J Trust Bank terus berupaya mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh kegiatan operasional. [OJK F.7][OJK F.12]

As part of its emission reduction efforts, J Trust Bank implemented various strategic measures focusing on energy efficiency and reducing the carbon footprint of its operations. The Bank implemented a teleconference system to replace face-to-face meetings that require travel, especially by using airplanes. In addition, the Bank also set up adequate facilities and infrastructure to facilitate online meetings. Through these measures, J Trust Bank continues to reduce carbon emissions and increase environmental awareness throughout its operations. [OJK F.7][OJK F.12]

PENGELOLAAN AIR

Air merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan operasional yang dijalankan oleh Bank, seperti untuk konsumsi, penunjang sanitasi dan kebersihan tempat kerja. Kebutuhan air untuk kegiatan operasional di kantor bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karena itu, kami berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan air seefisien dan seefektif mungkin.

Dalam pelaksanaan pencatatan penggunaan air, terdapat beberapa keterbatasan dalam memperoleh data yang spesifik dan terukur secara menyeluruh. Di kantor pusat, penggunaan air tidak dapat dihitung secara terpisah karena biaya konsumsi air sudah termasuk dalam biaya sewa gedung. Dengan demikian, J Trust Bank tidak memiliki akses langsung terhadap data volume penggunaan air secara spesifik.

Sedangkan di kantor cabang hanya dapat mencatat biaya pembelian air dari pihak ketiga sehingga belum memiliki data dalam satuan volume seperti liter atau meter kubik (m^3). Sementara itu, sebagian kantor cabang masih mengandalkan sumber air tanah untuk operasional sehari-hari. Namun, karena belum dilengkapi dengan alat ukur yang memadai, volume pemakaian air dari sumber ini belum dapat dihitung secara pasti.

Meskipun demikian, J Trust Bank tetap berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan menerapkan kebijakan penggunaan air secara bijak di lingkungan kerja serta mendorong kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air. Ke depan, perusahaan terus mengeksplorasi metode pencatatan yang lebih akurat guna meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan air. [OJK F.8]

WATER MANAGEMENT

Water is an important part of every operational activity carried out by the Bank, such as for consumption, sanitation support, and workplace hygiene. Water needs for operational activities in the office are sourced from the Regional Drinking Water Company (PDAM). Therefore, we maximize our efforts to utilize water as efficiently and effectively as possible.

In the implementation of recording water usage, there are several limitations in obtaining comprehensive specific and measurable data. At the head office, water usage cannot be calculated separately as the cost of water consumption is included in the building rental fee. Thus, J Trust Bank does not have direct access to specific water usage volume data.

Meanwhile, branch offices can only record the cost of purchasing water from third parties, so they do not have data in volume units such as liters or cubic meters (m^3). Furthermore, several branch offices still rely on groundwater sources for their daily operations. However, the volume of water usage from this source cannot be accurately calculated because they are not equipped with adequate measuring instruments.

Nevertheless, J Trust Bank continues to strive to improve water use efficiency by implementing a wise water use policy in the work environment and encouraging employee awareness of the importance of maintaining the sustainability of water resources. Going forward, the Company will continue to explore more accurate recording methods to improve transparency and effectiveness in water management. [OJK F.8]

Konsumsi Air Tahun [OJK F.8]

Water Consumption in 2024 [OJK F.8]

Sumber	2024	2023	2022	Source
PDAM	Rp135.459.350	Rp137.429.112	Rp102.688.742	Regional Drinking Water Company (PDAM)

Catatan:
- Penghitungan biaya tahun 2022 terdiri dari 29 kantor cabang, tahun 2023 terdiri dari 31 kantor cabang, dan 2024 terdiri dari 33 kantor cabang yang menggunakan sumber air PDAM.
- Cakupan penghitungan tidak termasuk Kantor Pusat.

Notes:
- The cost calculation for 2022 consists of 29 branch offices, 2023 consists of 31 branch offices, and 2024 consists of 33 branch offices that sources water from PDAM (local water utility).
- The scope of calculation does not include the Head Office.

PENGELOLAAN LIMBAH [OJK F.13][OJK F.14][OJK F.15]

Sampai dengan tahun 2024, J Trust Bank belum melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3). Namun, Bank terus berkomitmen meningkatkan kesadaran lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Bank berinisiatif mendorong karyawan untuk memilah sampah dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Sebagai bagian dari upaya ini, Bank menyediakan fasilitas pemilahan sampah di area kerja, yang memudahkan karyawan dalam memisahkan sampah organik, anorganik, dan limbah lainnya serta menyediakan wadah pembuangan sampah khusus plastik.

WASTE MANAGEMENT [OJK F.13][OJK F.14][OJK F.15]

Until 2024, J Trust Bank has not conducted hazardous and toxic waste (B3) management. However, the Bank continues to be committed to raising environmental awareness in its operational areas. The Bank takes the initiative to encourage employees to sort waste properly and responsibly. As part of this effort, the Bank provides waste segregation facilities in work areas, which make it easier for employees to separate organic, inorganic, and other waste, and provides special plastic waste disposal containers.

Jumlah Limbah Plastik
Total Plastic Waste

54 kg

Saat ini baru mengumpulkan khusus sampah botol plastik berjenis PET dan PP.
At this point, still collecting PET and PP plastic bottle waste types.

Plastic Waste Station
Plastic Waste Station

2

Tahun | Year **2024**

J Trust Bank Luncurkan Seragam Batik Ramah Lingkungan

J Trust Bank Launches Environmentally Friendly Batik Uniforms

Dalam upaya untuk terus mengedepankan prinsip keberlanjutan, J Trust Bank meluncurkan seragam batik inovatif yang mengusung semangat *reuse* dan *recycle* di tahun 2024. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap lingkungan, seragam ini diproduksi dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, di mana energi yang digunakan dalam proses produksinya minim, dan bahkan canting yang digunakan untuk membatik terbuat dari bahan daur ulang.

Motif yang dihadirkan pada seragam ini menggambarkan keindahan laut, yang erat kaitannya dengan logo J Trust Bank, yaitu ombak. Motif laut melambangkan pergerakan dinamis dan kekuatan alam yang mencerminkan perjalanan J Trust Bank yang terus berkembang dan berinovasi. Melalui penggunaan pewarna alami dan ramah lingkungan, kami memastikan bahwa setiap bagian dari seragam batik ini tidak hanya estetis tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan.

In an effort to continue promoting sustainability, J Trust Bank launched an innovative batik uniform promoting the spirit of reuse and recycle in 2024. As part of our commitment to the environment, this uniform was manufactured using eco-friendly technology, where the energy used in the production process is minimal, and even the canting used for batik is made from recycled materials.

The motif presented in this uniform represents the beauty of the sea, which is closely related to J Trust Bank's logo, the waves. The sea motif symbolizes the dynamic movement and power of nature that reflects J Trust Bank's journey of continuous growth and innovation. Through the use of natural and eco-friendly dyes, we ensure that every part of this batik uniform is not only aesthetically pleasing but also supports environmental conservation efforts.

*) Seragam batik ramah lingkungan dapat dilihat di foto profil Dewan Komisaris dan Direksi halaman 34-35 & 48-49
Eco friendly batik outfits can be seen in the profile pictures of the BoC and the BoD on page 34-35 & 48-49

KEANEKARAGAMAN HAYATI [OJK F.9][OJK F.10]

Kegiatan operasional dan wilayah operasional J Trust Bank tidak berdekatan dengan wilayah konservasi atau area yang memiliki keanekaragaman hayati yang signifikan. Oleh karena itu, Bank tidak berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan atau keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, J Trust Bank tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dengan melakukan berbagai program lingkungan. Hal tersebut merupakan komitmen Bank untuk terus berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis dan kelestarian alam.

BIODIVERSITY [OJK F.9][OJK F.10]

J Trust Bank's operations and operational areas are not adjacent to any conservation areas or areas of significant biodiversity. Therefore, the Bank does not have the potential to negatively impact the surrounding environment or biodiversity. Nevertheless, J Trust Bank remains committed to supporting environmental sustainability by conducting various environmental programs. It is the Bank's commitment to continuously strive to maintain a balance between the achievement of business objectives and nature preservation.

Aksi Tanam Mangrove untuk Net Zero Emission Capai 12.000 Pohon

Mangrove Planting Action for Net Zero Emission Reaches 12,000 Trees

Selama tahun 2024, J Trust Bank aktif melakukan aksi tanam mangrove untuk berkontribusi dalam pencapaian Net Zero Emission. Pada HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, J Trust Bank berpartisipasi dalam aksi kolaboratif penanaman mangrove di Desa Sedari, Karawang, Jawa Barat. Acara penanaman bertajuk "Mangrove Melindungi Kita" ini dihadiri oleh perwakilan dari 25 kolaborator yang terdiri dari berbagai lembaga dan organisasi. Total sebanyak 8.000 pohon mangrove ditanam di kawasan pesisir.

Pada bulan Oktober 2024, J Trust Bank menjadi salah satu dari lebih 80 kolaborator dalam perayaan Hari Sumpah Pemuda yang bertajuk Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI) 2024. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Econusa, Penjaga Laut, dan EcoDefender. Dalam kegiatan tersebut, Bank berhasil menanam 3.000 pohon mangrove, menyemai 5.000 bibit mangrove, serta mengumpulkan sampah di area pantai Tanjung Pasir.

Kemudian pada Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, J Trust Bank mengadakan kegiatan penanaman 1.000 bibit mangrove di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, yang bekerja sama dengan CarbonEthics dan Bumi Journey. Adapun total penanaman mangrove yang dilakukan J Trust Bank selama 2024 mencapai 12.000 pohon mangrove.

During 2024, J Trust Bank actively carried out mangrove planting actions to contribute to the achievement of Net Zero Emissions. On the 79th Anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia, J Trust Bank participated in a collaborative mangrove planting action in Sedari Village, Karawang, West Java. The "Mangrove Protects Us" planting event was attended by representatives from 25 collaborators, consisting of various institutions and organizations. A total of 8,000 mangrove trees were planted in the coastal area.

In October 2024, J Trust Bank became one of more than 80 collaborators in the Youth Pledge Day celebration entitled Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI) 2024. The initiative was a collaboration between Econusa, Penjaga Laut, and EcoDefender. In the activity, the Bank managed to plant 3,000 mangrove trees, sow 5,000 mangrove seedlings, and collect garbage in the Tanjung Pasir beach area.

Furthermore, on International Biodiversity Day, J Trust Bank held a planting activity of 1,000 mangrove seedlings on Harapan Island, Kepulauan Seribu, in collaboration with CarbonEthics and Bumi Journey. The total mangrove planting carried out by J Trust Bank during 2024 reached 12,000 mangrove trees.

Total pohon mangrove yang ditanam J Trust Bank selama 2024

Total mangrove trees planted by J Trust Bank during 2024

12.000

Tahun | Year **2024**

Maskot J Trust Bank, Satwa Endemik Kekayaan Keanekaragaman Hayati Indonesia

J Trust Bank Mascots, Endemic Animals of Indonesia's Biodiversity Wealth

J Trust Bank dengan bangga memiliki maskot bernama Jaya, Tobi, Ratna, Ulfa, Sangga, dan Tiara, enam sekawan yang menamakan dirinya JTI Friends (JTrust Indonesia Friends). Mereka adalah hasil karya anak bangsa melalui program J Trust Mascot Competition yang diadakan ditengah pandemi COVID-19.

Mari mengenal lebih dekat JTI Friends dari J Trust Bank

1. Jaya si Harimau, pemimpin yang selalu bertindak adil, ia juga mampu diandalkan
2. Tobi si Harimau selalu menghargai setiap individu serta senang melihat rekannya berkembang
3. Ratna si Harimau adalah pemilik pemikiran yang inovatif dan suka untuk menantang hal-hal baru
4. Ulfa si Orangutan sangat mudah berteman, senang mengayomi dan penyayang
5. Sangga si Komodo pemilik sifat ramah, ceria, suka menolong dan bersahabat
6. Tiara si Badak Bercula Satu, ia anggun yang aktif, juga terkenal lincah.

Sifat dan karakter dari Maskot J Trust Bank adalah representasi dari semangat baru J Trust Bank dalam memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi nasabah dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya maskot yang terinspirasi dari keberadaan satwa endemik Indonesia yang dilindungi, J Trust Bank juga turut beraksi nyata untuk membangun kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kelestariannya melalui serial buku cerita dan video anak-anak.

J Trust Bank proudly has mascots named Jaya, Tobi, Ratna, Ulfa, Sangga, and Tiara, six friends who call themselves JTI Friends (JTrust Indonesia Friends). They are the work of the nation's children through the J Trust Mascot Competition program held amidst the COVID-19 pandemic.

Let's get to know JTI Friends from J Trust Bank more closely

1. Jaya, the Tiger, a leader who always acts fairly and is also dependable.
2. Tobi, the Tiger, always respects each individual and loves to see his colleagues develop
3. Ratna, the Tiger, is an innovative thinker and loves to challenge new things
4. Ulfa, the Orangutan, is easy to make friends with, nurturing and compassionate
5. Sangga, the Komodo dragon, is outgoing, cheerful, helpful, and friendly
6. Tiara, the One-horned Rhinoceros, is graceful and active, also known for her agility.

The nature and character of the J Trust Bank Mascot is a representation of the new spirit of J Trust Bank in providing the best services and products for customers and the people of Indonesia. With a mascot inspired by the existence of protected Indonesian endemic animals, J Trust Bank also takes real action to build public awareness to help preserve them through a series of children's storybooks and videos.

PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN [OJK F.16]

Bank telah menyediakan saluran informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan terkait dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional Bank terhadap lingkungan. Pengaduan tersebut dikategorikan sebagai pengaduan non-transaksional, yaitu pengaduan yang tidak berdampak pada kerugian finansial, melainkan terkait dengan isu lingkungan yang perlu ditangani dan diselesaikan.

Proses pengaduan dan penyelesaian masalah lingkungan dilakukan secara terpadu melalui mekanisme dan tata cara pengaduan yang dimiliki oleh Bank. Setiap pengaduan akan diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa setiap isu lingkungan yang teridentifikasi dapat diselesaikan dengan tepat dan efektif.

ENVIRONMENTAL COMPLAINTS [OJK F.16]

The Bank has provided information channels for the public and stakeholders to submit their complaints regarding the impact of the Bank's operations on the environment. Such complaints are categorized as non-transactional complaints, i.e. complaints that do not have an impact on financial losses, but are related to environmental issues that need to be addressed and resolved.

The process of complaints and settlement of environmental issues is carried out in an integrated manner through the Bank's complaint mechanisms and procedures. Each complaint will be processed in accordance with applicable laws and regulations, ensuring that any identified environmental issues can be resolved appropriately and effectively.

Selama proses pengaduan dan penyelesaian, Bank menjaga kerahasiaan identitas dan informasi penyampai laporan pengaduan, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pihak yang terlibat. Komitmen ini mencerminkan keseriusan Bank dalam menjalankan operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

During the complaint and resolution process, the Bank maintains the confidentiality of the identity and information of the complainant to provide a sense of security and comfort for all parties involved. This commitment reflects the Bank's seriousness in carrying out operations that are responsible for the environment and society.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Complaints can be submitted via:

Surat elektronik (e-mail) ke alamat:
customercare@jtrustbank.co.id
Pos ke alamat: PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, Lt. 33
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Telp: +62212926 1111

E-mail at:
customercare@jtrustbank.co.id
Post to the address: PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, 33th Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Phone: +62212926 1111

Penanganan Pengaduan di Bidang Lingkungan 2024
Complaint Handling in the Environmental Field in 2024

Materi Pengaduan Complaint Material	Jumlah Pengaduan Number of Complaint	Proses Penyelesaian Resolution Process	Telah Diselesaikan Has Been Finalized
Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

BIAYA PROGRAM TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

J Trust Bank terus menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, Bank telah merealisasikan anggaran sebesar Rp236.057.987 untuk kegiatan di bidang lingkungan hidup. [OJK F.4]

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 23% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp180.718.329. Kenaikan ini mencerminkan upaya Bank dalam meningkatkan kontribusi terhadap inisiatif lingkungan yang sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

COSTS OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS

J Trust Bank continues to show its commitment to environmental conservation through various activities that support sustainable environmental management. Throughout 2024, the Bank realized a budget of Rp236,057,987 for environmental activities. [OJK F.4]

This figure shows an increase of 23% compared to 2023, which was recorded at Rp180,718,329. This increase reflects the Bank's efforts to increase its contribution to environmental initiatives in line with the principles of corporate social and environmental responsibility.

Kegiatan Program	2024	2023	2022	Program Activities
Pelatihan UMKM Perempuan Mengolah Limbah Tekstil	47.169.880	30.703.329	32.824.380	Woman MSME Training for Textile Waste Management
Penanaman Pohon	145.655.091	150.015.000	14.472.183	Tree Planting
Tas Daur Ulang	43.233.016	0	133.200.000	Recycled Bags
Transisi Energi Bersih	43.233.016	0	0	Clean Energy Transition
Kegiatan Lingkungan Lainnya	17.630.655	0	0	Other Environmental Activities
Jumlah	**236.057.987**	**180.718.329**	**180.496.563**	**Total**

MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Developing Human Resources

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan praktik terbaik menjadi salah satu prioritas strategis Bank dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta memenuhi standar penerapan aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Managing J Trust Bank recognizes that employees are its most valuable asset in delivering high-quality services and driving sustainable business transformation. Accordingly, the Bank places strategic importance on implementing best-practice human resource (HR) management to support business growth while upholding strong economic, social, and corporate governance standards.

Tiara

Tiara si anggun yang aktif dan terkenal lincah. Sebagai salah satu mascot J Trust Bank, sosok Tiara dihadirkan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yaitu Badak Jawa.

Tiara is graceful, active, and agile. As one of J Trust Bank's mascots, Tiara is presented to campaign for the importance of preserving Indonesia's endemic animals, namely the Javan Rhinoceros.

PENDEKATAN MANAJEMEN [GRI 3-3]

J Trust Bank meyakini bahwa karyawan adalah aset utama dalam mewujudkan layanan berkualitas dan transformasi bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan praktik terbaik menjadi salah satu prioritas strategis Bank dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta memenuhi standar penerapan aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Bank berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Untuk mencapai itu, Bank terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan dan kompetensi.

Selain itu, Bank juga memastikan kepatuhan terhadap seluruh aturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Bank secara konsisten menjalankan praktik ketenagakerjaan yang

MANAGEMENT APPROACH [GRI 3-3]

The management of human resources (HR) through best practices is one of the Bank's strategic priorities in supporting business growth and meeting the standards for implementing sound economic, social, and corporate governance aspects.

The Bank is committed to creating a competent, innovative workforce capable of supporting the Company's vision and mission. To achieve this, the Bank continues to improve the capacity and capability of its human resources (HR) on an ongoing basis through various development and competency programs.

In addition, the Bank also ensures compliance with all applicable laws and regulations in the employment sector. The Bank consistently implements fair and transparent employment practices, including the

adil dan transparan, termasuk penerapan prinsip-prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak karyawan, serta pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

J Trust Bank berkomitmen secara konsisten untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Melalui praktik terbaik yang dijalankan, Bank berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional setiap individu serta menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Dengan begitu, Bank meyakini bahwa dengan mematuhi peraturan yang berlaku akan memberikan rasa nyaman dan terlindungi kepada setiap karyawan sehingga menghasilkan kinerja terbaik yang tentunya berdampak positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan, mendukung keberlanjutan bisnis Bank di masa depan.

Hak Asasi dan Non-diskriminasi [GRI 412-1]

J Trust Bank berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memajukan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aspek operasionalnya. Komitmen ini mencakup upaya pencegahan diskriminasi, perlindungan terhadap hak pekerja, dan penghormatan terhadap komunitas lokal, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional terkait hak asasi. Adapun sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan atau pengaduan terkait tindakan diskriminasi di lingkungan kerja Bank.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja [OJK F.18]

J Trust Bank menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan dan interaksi dengan setiap karyawan. Bank memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan menolak segala bentuk tindakan diskriminasi berdasarkan latar belakang ras, suku, gender, maupun agama. Bank tidak memberikan toleransi terhadap bentuk diskriminasi apa pun yang mungkin terjadi di tempat kerja.

Sebagai wujud komitmen terhadap keberagaman dan inklusi, J Trust Bank berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis di mana setiap individu diperlakukan secara adil dan setara. Dengan

application of the principles of non-discrimination, protection of employee rights, and fulfillment of occupational health and safety (OHS) standards.

EMPLOYMENT PRACTICES

J Trust Bank is consistently committed to improving employee competencies and ensuring the protection and fulfillment of their rights in accordance with applicable rules and regulations in Indonesia. Through best practices, the Bank strives to create a work environment that supports the professional growth of each individual and maintains a balance between employee productivity and welfare.

Hence, the Bank believes that complying with the prevailing regulations will provide a sense of comfort and protection to each employee to produce the best performance, which certainly has a beneficial impact on the Company's overall performance achievement, supporting the Bank's business sustainability in the future.

Human Rights and Non-discrimination [GRI 412-1]

J Trust Bank is committed to respecting, protecting, and promoting human rights principles in every aspect of its operations. This commitment includes efforts to prevent discrimination, protect workers' rights, and respect local communities, in line with applicable laws and regulations and human rights-related international standards. Throughout 2024, no reports or complaints related to discrimination within the Bank.

Gender Equality and Work Opportunities [OJK F.18]

J Trust Bank upholds human rights principles in the management and interaction with each employee. The Bank ensures compliance with all applicable labor regulations and rejects all forms of discrimination based on race, ethnicity, gender, or religious background. The Bank does not tolerate any form of discrimination that may occur in the workplace.

As a form of commitment to diversity and inclusion, J Trust Bank strives to create a healthy and harmonious work environment where every individual is treated fairly and equally. By upholding the principle of non-

memegang teguh prinsip non-diskriminasi, Bank percaya bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan.

discrimination, the Bank believes that every employee has the opportunity to develop their best potential and make a positive contribution to the Company.

Pada tahun 2024, sebanyak 937 orang atau 51% adalah karyawan perempuan, sementara sisanya merupakan karyawan laki-laki. Bank juga berupaya untuk tidak membedakan remunerasi antara karyawan laki-laki dan perempuan dengan memberikan rasio gaji yang seimbang. Bank memastikan bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada karyawan perempuan dan laki-laki berdasarkan kemampuan masing-masing. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Bank berkomitmen untuk membina lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif. [GRI 405-2]

In 2024, 937 people, or 51%, were female employees, while the rest were male employees. The Bank also strives not to differentiate remuneration between male and female employees by providing a balanced salary ratio. The Bank ensures that equal opportunities are provided to female and male employees based on their respective capabilities. By taking these steps, the Bank is committed to fostering a more equitable and inclusive work environment. [GRI 405-2]

Keberagaman Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employees Diversity based on Gender

Jenis Kelamin	2024		2023		Gender
	Jumlah Karyawan Number of Employee	Persentase Percentage	Jumlah Karyawan Number of Employee	Persentase Percentage	
Laki-laki Male	463	49%	470	51%	Laki-laki Male
Perempuan Female	474	51%	443	49%	Perempuan Female
Jumlah	**937**	**100%**	**913**	**100%**	**Total**

Komitmen Anti-Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

Bank berkomitmen mematuhi regulasi ataupun ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, di mana setiap perusahaan dilarang untuk memperkerjakan anak di bawah umur dalam seluruh kegiatan operasional. Bank berkomitmen penuh untuk mencegah terjadinya pekerja anak di bawah umur dimulai dari proses rekrutmen yang dijalankan.

Anti-Child Labor and Forced Labor Commitments [OJK F.19]

The Bank is committed to complying with applicable regulations or provisions in accordance with the labor laws where every company is prohibited from employing minors in all operational activities. The Bank is fully committed to preventing child labor starting from the recruitment.

Selain itu Bank juga selalu berpegang teguh terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku untuk mencegah praktik kerja paksa. Komitmen itu tercermin melalui penerapan jam kerja serta aturan yang mengatur kompensasi jika karyawan bekerja lewat dari waktu yang berlaku (lembur) yang telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

In addition, the Bank also always adheres to the applicable rules and laws to prevent forced labor practices. This commitment is reflected through the implementation of working hours and rules regulating compensation if employees work beyond the applicable time (overtime), which is in line with the laws and regulations.

Sebagai bentuk komitmen terkait tenaga Kerja Paksa dan Tenaga Kerja Anak, Bank senantiasa memastikan pengelolaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana di ubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

As a form of commitment to refraining from Forced Labor and Child Labor practices, the Bank always ensures its employment management complies with the Law on Manpower, referring to Law Number 13 of 2003 as amended by Law Number 6 of 2003, and other relevant laws and regulations.

Remunerasi dan Manfaat Karyawan

J Trust Bank senantiasa memastikan bahwa sistem kesejahteraan dan remunerasi bagi seluruh karyawan diterapkan secara objektif dan kompetitif. Kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prestasi karyawan, jabatan, kompetensi, masa kerja, serta indeks nilai-nilai perusahaan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, golongan, atau aspek diskriminasi lainnya. Bank menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam pemberian remunerasi, di mana tidak terdapat perbedaan antara karyawan pria dan wanita yang berada pada jabatan serta memiliki kinerja dan kompetensi yang setara.

Selain mematuhi peraturan mengenai upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota, Bank juga mempertimbangkan perkembangan industri perbankan sebagai salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan remunerasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa karyawan J Trust Bank memperoleh imbalan yang sesuai prestasi dan kinerja mereka serta tetap kompetitif di industri perbankan.

Employee Remuneration and Benefit

J Trust Bank always ensures that the welfare and remuneration system for all employees is applied objectively and competitively. This policy is designed by considering various factors, including employee achievement, position, competence, term of service, and corporate values index, without distinguishing gender, ethnicity, race, religion, class, or other aspects of discrimination. The Bank upholds equality principles in remuneration, where there is no difference between male and female employees with equal performance and competence.

In addition to complying with regulations regarding provincial and district/municipal minimum wages, the Bank also considers the development of the banking industry as one of the references in determining remuneration policies. This step is made to ensure that J Trust Bank employees are rewarded according to their achievements and performance and remain competitive in the banking industry.

Remunerasi, Tunjangan, dan Bonus Karyawan

Employee Remuneration, Allowance, and Bonus

(Rp Miliar | Rp Billion)

Tahun Year	Jumlah Total
2024	317
2023	295
2022	256

Perbandingan UMP dengan Remunerasi [OJK F.20]

Comparison between Provincial Minimum Wage (UMP) and Remuneration [OJK F.20]

No.	Provinsi	Upah Minimum Provinsi* Provincial Minimum Wage*	Imbal Jasa Karyawan Terendah Employee's Lowest Remuneration [data 2024]	Perbandingan Comparison	Province
		(Rp)	(Rp)	(%)	
1	Sumatra Utara	3.769.083	5.200.000	138%	North Sumatera
2	Riau	3.451.584	5.328.750	154%	Riau
3	Sumatra Selatan	3.677.591	3.875.000	105%	South Sumatera
4	Jambi	3.387.064	4.117.014	122%	Jambi
5	Bangka Belitung	3.640.000	3.895.628	107%	Bangka Belitung
6	Lampung	3.103.631	4.499.452	145%	Lampung
7	DKI Jakarta	5.067.381	5.250.000	104%	DKI Jakarta Jakarta
8	Jawa Barat	2.533.038	4.051.380	160%	West Java
9	Jawa Tengah	2.269.070	4.080.000	180%	Central Java
10	D.I. Yogyakarta	2.492.997	5.722.671	230%	D.I. Yogyakarta
11	Jawa Timur	3.368.275	3.639.584	108%	East Java
12	Bali	3.096.823	4.712.795	152%	Bali
13	Kalimantan Timur	3.475.595	4.000.000	115%	East Kalimantan
14	Kalimantan Barat	2.840.206	4.991.429	176%	West Kalimantan
15	Sulawesi Selatan	3.643.321	5.503.356	151%	South Sumatra

* Data upah minimum menggunakan sumber dari Kementerian Tenaga Kerja 2024 dan mengalami pembulatan angka.
* Minimum wage data is sourced from the Ministry of Labour 2024 and rounded.

LINGKUNGAN KERJA YANG LAYAK DAN KONDUSIF

[OJK F.21]

J Trust Bank berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh karyawan dengan mengacu pada sejumlah regulasi ketenagakerjaan, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di ubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu Bank juga mengedepankan praktik terbaik (*best practices*) dari industri perbankan untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi.

Sedangkan terkait jaminan kesehatan bagi karyawan, Bank menyediakan berbagai fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dan pemberian asuransi tambahan. Bank juga menyediakan berbagai sarana di lingkungan kerja guna mendukung kesehatan dan keselamatan karyawan seperti alat pemadam api ringan (APAR), alat deteksi asap, tabung oksigen dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), toilet terpisah, ruang makan, tempat ibadah, ruang menyusui dan tempat parkir.

Komitmen J Trust Bank terhadap K3, Bank telah menerapkan sistem K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen Bank. Kebijakan yang telah diterapkan, antara lain:

1. Karyawan mengetahui prosedur menyelamatkan diri dalam keadaan darurat;
2. Adanya informasi nomor telepon penting, seperti pemadam kebakaran dan kepolisian;
3. Kewajiban untuk menggunakan kartu identitas selama di lingkungan kerja.
4. Kewajiban identifikasi tamu tidak dikenal yang berada dalam lokasi Bank; dan
5. Pemeriksaan kesehatan badan dan kemampuan fisik karyawan, salah satunya melalui medical check-up secara rutin serta tunjangan kacamata.

Dengan penerapan aspek K3 terbaik, Bank berhasil merealisasikan kinerja K3 yaitu *zero accident* sepanjang tahun 2024.

DECENT AND CONDUCIVE WORKING ENVIRONMENT

[OJK F.21]

J Trust Bank is committed to creating a decent and safe working environment for all employees by referring to a number of employment regulations, including Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 6 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 1996 concerning the Occupational Safety and Health Management System, and Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System. In addition, the Bank also prioritizes best practices from the banking industry to ensure the implementation of high occupational safety and health (K3) standards.

As for health insurance for employees, the Bank provides various facilities in accordance with laws and regulations, including participation in the Social Security for Health (BPJS Kesehatan) program and the provision of additional insurance. The Bank also provides various facilities to support employee health and safety, such as fire extinguishers, smoke detectors, oxygen cylinders and first aid kits, separate toilets, dining rooms, places of worship, nursing rooms, and parking lots.

Following its commitment to OHS, J Trust Bank has implemented an OHS system that is integrated with the Bank's management system. Policies that have been implemented include:

1. Employees are aware of emergency escape procedures;
2. Information on important phone numbers, such as fire brigade and police force;
3. Obligation to use an identity card while in the work environment;
4. Obligation to identify unknown guests on the Bank's premises; and
5. Examination of employees' physical health and abilities, such as through regular medical check-ups and eyewear allowances.

With the implementation of the best OHS aspects, the Bank managed to realize the OHS performance of zero accident throughout 2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI [OJK F.22]

Keberlangsungan operasional dan bisnis J Trust Bank saat ini tidak lepas dari peran karyawan yang adaptif serta mampu menghadapi perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan kompetitif. Menyadari tantangan tersebut, Bank berkomitmen untuk menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi yang bertujuan meningkatkan keahlian, kinerja, dan daya saing seluruh karyawan.

Pada tahun 2024, Bank telah merealisasikan anggaran program pengembangan kompetensi mencapai Rp6.917.879.742.

COMPETENCY DEVELOPMENT [OJK F.22]

J Trust Bank's current operational and business continuity cannot be separated from the adaptive role of employees who can deal with the increasingly complex and competitive development of the banking industry. Recognizing these challenges, the Bank is committed to organizing various competency development programs aimed at improving the skills, performance, and competitiveness of all employees.

By 2024, the Bank had realized Rp6,917,879,742 of the competency development program budget.

Uraian	Jumlah Karyawan Memperoleh Pelatihan Total Employees Attended Trainings	Jumlah Pelatihan Number of Trainings	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hours per Employee	Description
Total Karyawan	**933**	**166**	**51**	**Total Employees**
Laki-laki	460	127	55	Male
Perempuan	473	144	46	Female
Berdasarkan Level Jabatan				**Based on Level of Position**
Kepala Divisi	22	25	39	Head of Division
Wakil Kepala Divisi	18	25	34	Deputy Head of Division
Pimpinan Cabang	36	57	78	Head of Branch
Kepala Departement	83	66	34	Head of Department
Kepala Seksi	270	109	39	Head of Section
Operational Officer	339	121	53	Operational Officer
Staf	165	101	71	Staff

MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

Providing Benefits to The Community

Bank berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dapat mendukung pertumbuhan sosial yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi komunitas dan masyarakat di willayan operasinal J Trust Bank.

The Bank is committed to ensuring that every operational activity supports sustainable social growth and creates added value for the communities in which J Trust Bank operates.

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT [OJK F.23]

Sebagai institusi keuangan, J Trust Bank memegang peranan penting dalam mendorong kesejahteraan ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Untuk itu, Bank berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dapat mendukung pertumbuhan sosial yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Kegiatan operasional perbankan pada dasarnya tidak memiliki potensi dampak negatif langsung yang signifikan kepada masyarakat. Namun, jika perbankan tidak mengelola kegiatan operasional dengan baik, kurang transparan, dan kurang akuntabel maka akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah dan masyarakat. Selain menjalankan praktik perbankan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Bank juga fokus pada peningkatan dampak positif yang mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah dan aman, membuka lapangan pekerjaan melalui jaringan bank di kota-kota besar di Indonesia termasuk pelibatan para pemasok atau mitra kerja lokal yang memberikan *multiplier effect.*

IMPACT OF OPERATIONS ON COMMUNITY [OJK F.23]

As a financial institution, J Trust Bank plays an important role in promoting economic prosperity, expanding financial inclusion, and empowering communities around operational areas. For this reason, the Bank is committed to ensuring that every operational activity can support sustainable social growth and create added value for society.

In principle, banking operations do not inherently pose significant direct negative impacts on society. However, inadequate operational management, lack of transparency, and weak accountability may result in adverse consequences for customers and the broader community. To mitigate such risks, the Bank is committed to responsible and sustainable banking practices. Beyond risk mitigation, the Bank also aims to generate positive social impacts by expanding access to secure and convenient financial services, fostering employment opportunities through its branch network in major Indonesian cities, and engaging local suppliers and business partners to stimulate broader economic benefits through multiplier effects

Bank juga melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bertujuan melakukan pemberdayaan masyarakat. Bank terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program TJSL yang difokuskan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bank secara proaktif turut meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk membantu masyarakat mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

The Bank also implements various Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs, which aim to empower the community. The Bank continues to strive to improve the quality of life of the community through the TJSL program, which focuses on social, economic, and environmental aspects. Banks proactively help increase financial literacy and inclusion to help people manage their finances more effectively and according to their needs.

MEKANISME PENGADUAN [OJK F.24]

J Trust Bank telah menyediakan saluran informasi yang terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan terkait hal-hal yang bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma, serta dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang dapat mengganggu lingkungan hidup dan hal-hal lainnya.

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS), yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pelapor, atau dapat juga disampaikan melalui e-mail atau telepon hotline yang disediakan oleh Bank.

- Hotline number (021) 27889235
- E-mail: wbs@ jtrustbank.co.id

Dengan adanya mekanisme masyarakat ini, J Trust Bank berharap dapat terus menjaga hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan dan memastikan operasional perusahaan selalu sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

COMPLAINT MECHANISM [OJK F.24]

J Trust Bank has provided an open information channel for stakeholders to report or submit complaints regarding matters that conflict with ethics, integrity, and norms, as well as alleged violations of regulations or actions that could disrupt the environment and other matters.

Public complaints can be made through a violation reporting mechanism (whistleblowing system/WBS), which guarantees confidentiality for the reporter, or can also be submitted via e-mail or telephone hotline provided by the Bank.

- Hotline number (021) 27889235
- E-mail: wbs@ jtrustbank.co.id

With this community mechanism, J Trust Bank hopes to continue to maintain harmonious relationships with stakeholders and ensure that company operations are always in line with the principles of social responsibility and sustainability.

Tahun Year	Total Pengaduan WBS yang diterima Total WBS Complaints received	Total Pengaduan WBS yang selesai diinvestigasi Total WBS Complaints completed investigation	Persentasi pengaduan yang selesai diinvestigasi dari total pengaduan yang diterima Percentage of complaints investigated out of total complaints received
2024	3	3	100%
2023	2	2	100%
2022	6	6	100%

KEGIATAN TJSL [OJK F.25]

Dalam implementasi Program TJSL, J Trust Bank berkomitmen untuk selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB merupakan agenda global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 25 September 2015 dan telah menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu 15 tahun. Hal ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, kehidupan yang inklusif, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

TJSL ACTIVITIES [OJK F.25]

In implementing the TJSL Program, J Trust Bank is committed to aligning with the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). TPB is a global agenda initiated by the United Nations on September 25, 2015, and has set 17 goals and 169 targets aimed at encouraging sustainable development over a period of 15 years. This includes aspects of health, education, inclusive living, and sustainable urban development.

Sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap TPB, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan pentingnya pelaksanaan TPB secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan dan dunia usaha.

Dalam rangka mendukung agenda pemerintah tersebut, Bank berperan aktif menyukseskan pencapaian target SDGs melalui berbagai program TJSL yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sepanjang tahun 2024, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan TJSL yang diselaraskan dengan tujuan-tujuan SDGs, yang dijelaskan rinci dalam tabel berikut.

As part of the national commitment to the SDGs, the Indonesian Government has established Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning the implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals. This regulation emphasizes the importance of implementing the TPB in a participatory manner by involving various parties, including the banking sector and the business world.

In order to support the government's agenda, the Bank plays an active role in the success of achieving SDG targets through various TJSL programs that focus on social, economic, and environmental aspects. Throughout 2024, the Bank has implemented various TJSL activities that are aligned with SDG goals, which are explained in detail in the following table.

Periode Kegiatan Activity Period	Nama dan Deskripsi Kegiatan Activity Name and Description	Penerima Manfaat Beneficiaries	Mitra Kerja Work Partners	SDGs
29 Januari 2024 January 29, 2024	**Program Pendampingan Kewirausahaan Sosial melalui Budidaya Sayuran dan Melon Hidroponik** J Trust Bank melaksanakan Program Pendampingan Kewirausahaan Sosial melalui budidaya sayuran dan melon hidroponik. J Trust Bank berkolaborasi dengan Yayasan Balarenik memberikan bantuan rumah hijau (hidroponik), pembentukan kelompok tani, untuk pelaku usaha nano mikro. **Social Entrepreneurship Assistance Program through Hydroponic Vegetable and Melon Cultivation** J Trust Bank implements the Social Entrepreneurship Assistance Program through hydroponic vegetable and melon cultivation. J Trust Bank collaborates with the Balarenik Foundation to provide assistance with greenhouses (hydroponics), the formation of farmer groups, and nano-micro business actors.	Kelompok tani dan pelaku usaha nano mikro Farmer groups and nano-micro business actors	Yayasan Balarenik Balarenik Foundation	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
29 Januari 2024 January 29, 2024	**Literasi Keuangan** J Trust Bank memberikan edukasi keuangan kepada pelaku usaha nano mikro. **Financial Literacy** J Trust Bank provides financial education to nano-micro business actors.	Pelaku usaha nano mikro Micro nano business actors		8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
5-7 Maret 2024 March 5-7, 2024	**Peningkatan Kapasitas Produk Ramah Lingkungan untuk Pelaku Usaha Jahit Perempuan** J Trust Bank menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Produk Ramah Lingkungan untuk Pelaku Usaha Jahit Perempuan. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan usaha, peningkatan ekonomi, dan mengubah perilaku untuk menjalankan bisnis ramah lingkungan. J Trust Bank mengadakan pelatihan untuk pelaku usaha rumahan perempuan mengolah limbah kain menjadi produk bernilai ekonomi. **Increasing the Capacity of Environmentally Friendly Products for Women Tailor Business Actors** J Trust Bank held an Environmentally Friendly Product Capacity Building activity for Women Tailor Business Actors. The aim of this activity is to improve business skills, improve the economy, and change behavior to run an environmentally friendly business. J Trust Bank is holding training for women home businesses to process fabric waste into economically valuable products.	Pelaku usaha rumahan perempuan Female home business actors	Suku Dinas Ketenagakerjaan, Energi, dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan. Pegiat up-cycling fashion Setali Indonesia South Jakarta City Employment, Energy and Transmigration Department. Up-cycling fashion activist Setali Indonesia	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 14 LIFE BELOW WATER 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Periode Kegiatan Activity Period	Nama dan Deskripsi Kegiatan Activity Name and Description	Penerima Manfaat Beneficiaries	Mitra Kerja Work Partners	SDGs
25 Maret 2024 March 25, 2024	**Santunan Keluarga Pra-sejahtera** J Trust Bank mengadakan santunan keluarga pra-sejahtera dengan menyalurkan bantuan sembako dan paket gizi anak di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Total 100 kepala keluarga terdiri dari pekerja non-formal, lansia, kaum dhuafa, yatim piatu menerima paket sembako serta 20 balita terindikasi stunting menerima paket gizi anak. **Compensation for Pre-Prosperous Families** J Trust Bank provides compensation for underprivileged families by distributing basic food aid and child nutrition packages on Panggang Island, Seribu Islands, to welcome Idul Fitri 1445 H. A total of 100 heads of families consisting of non-formal workers, the elderly, the poor, and orphans received basic food packages, and 20 toddlers who were indicated to be stunted received child nutrition packages.	Masyarakat Community	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu Seribu Islands Manpower, Transmigration and Energy Sub-dept	2 ZERO HUNGER 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
28 April 2024	**Kampanye Dukungan Kesetaraan kepada Kelompok Disabilitas** J Trust Bank memberikan dukungan penyelenggaraan Run for Equality yaitu kegiatan olah lari bersama dengan kelompok difabilitas Acara yang mengusung tema: "Unleash Your Inner Superhero" ini diikuti oleh lebih dari 1.100 peserta termasuk kelompok disabilitas. J Trust Bank juga mengikutsertakan 23 pelari dan 30 relawan. **Equality Support Campaign for Disability Groups** J Trust Bank provides support for organizing Run for Equality, namely running activities together with disabled groups The event with the theme: "Unleash Your Inner Superhero" was attended by more than 1,100 participants, including groups with disabilities. J Trust Bank also included 23 runners and 30 volunteers.	Masyarakat Kelompok disabilitas Community Disability group	Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) Plan International Indonesia Foundation (Plan Indonesia)	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
26 Mei 2024 May 26, 2024	**Penanaman Mangrove** J Trust Bank mengadakan penanaman 1.000 bibit mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Penanaman 1.000 bibit mangrove ini merupakan Upaya J Trust Bank dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem pesisir. **Mangrove Planting** J Trust Bank planted 1,000 mangrove seedlings on Pramuka Island, Seribu Islands. The planting of 1,000 mangrove seedlings is J Trust Bank's effort to mitigate climate change and preserve coastal ecosystems.	Carbonethics Bumi Journey	Carbonethics Bumi journey	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
6 Juni 2024 June 6, 2024	**Cepat Tanggap Bencana** Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi penyintas bencana Sumatra Barat, J Trust Bank memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir lahar dingin, banjir bandang, dan longsor. Bantuan yang diserahkan oleh J Trust Bank berupa 300 vitamin, 200 tas sekolah, 100 selimut, 800 popok bayi dan pembalut **Quick Disaster Response** As a form of concern for the condition of West Sumatra disaster survivors, J Trust Bank provides assistance to communities affected by cold lava floods, flash floods, and landslides. The assistance provided by J Trust Bank was in the form of 300 vitamins, 200 school bags, 100 blankets, 800 baby diapers, and sanitary napkins.	Masyarakat Community	United Tractor	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
12 Juni 2024 June 12, 2024	Santunan Keluarga Pra-sejahtera (Idul Adha) J Trust Bank mendonasikan satu ekor sapi untuk kelompok dhuafa pra-sejahtera Compensation for Pre-Prosperous Families (Eid al-Adha) J Trust Bank donated one cow to an underprivileged poor group	Masyarakat	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	2 ZERO HUNGER 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Periode Kegiatan Activity Period	Nama dan Deskripsi Kegiatan Activity Name and Description	Penerima Manfaat Beneficiaries	Mitra Kerja Work Partners	SDGs
26-28 Juni 2024 June 26-28, 2024	**Donor Darah** J Trust Bank bersama dengan para mitra kerja menyelenggarakan. kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) yang diikuti lebih dari 600 peserta donor. **Blood Donors** J Trust Bank together with its partners organized a blood donation activity in collaboration with the Indonesian Red Cross (PMI) which was attended by more than 600 donor participants.	Masyarakat Palang Merah Indonesia Community Red Cross Indonesia	Palang Merah Indonesia (PMI), Sahid Sudirman Center Building Management, Cushman & Wakefield, China Construction Bank, PT Sarana Multi Infrastruktur, Akulaku Finance, Henan Asset Management, PT Trijaya Pratama Futures, dan PT Buwana Mitra Semesta (Teh 63) Indonesian Red Cross (PMI), Sahid Sudirman Center Building Management, Cushman & Wakefield, China Construction Bank, PT Sarana Multi Infrastruktur, Akulaku Finance, Henan Asset Management, PT Trijaya Pratama Futures, and PT Buwana Mitra Semesta (Teh 63)	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
18 Juli 2024 July 18, 2024	**Literasi Keuangan** J Trust Bank memberikan edukasi keuangan untuk ekosistem pendidikan khususnya SMK berkolaborasi dengan United Tractor. **Financial Literacy** J Trust Bank provides financial education for the education ecosystem, especially vocational schools, in collaboration with United Tractor.	Siswa SMK SMK Students	United Tractor	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Agustus 2024 August 2024	**Solar Panel** Proyek percontohan penggunaan sumber energi terbarukan di J Trust Bank penggunaan renewable energy di J Trust Bank Cabang Depok sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. **Solar Panels** Pilot project on the use of renewable energy sources at J Trust Bank using renewable energy at J Trust Bank Depok Branch as an effort to mitigate climate change.	-		13 CLIMATE ACTION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
8 Agustus 2024 August 8, 2024	**Dukungan untuk Pendidikan Kelompok Usaha Dini Dhuafa (Donasi Seragam dan Lomba Mewarnai)** J Trust Bank memberikan donasi berupa seragam sekolah kepada PAUD dan kegiatan mewarnai untuk Pendidikan Anak Usia Dini bukan Pendidikan Kelompok Usaha Dini dhuafa. **Support for Early Destitutes Business Group Education (Donation of Uniforms and Coloring Competition)** J Trust Bank donated school uniforms to PAUD and coloring activities for Early Childhood Education instead of Early Business Group Education for the poor.	PAUD dan kelompok dhuafa PAUD and destitutes groups	Yayasan Sapa Indonesia Sapa Indonesia Foundation	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
17 Agustus 2024 August 17, 2024	**Penanaman Mangrove** J Trust Bank melakukan penanaman 8.000 mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. **Mangrove Planting** J Trust Bank planted 8,000 mangroves as an effort to mitigate climate change.	-	Yayasan Swara Indonesia Cemerlang Springhills Swara Indonesia Foundation Springhills	13 CLIMATE ACTION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Periode Kegiatan Activity Period	Nama dan Deskripsi Kegiatan Activity Name and Description	Penerima Manfaat Beneficiaries	Mitra Kerja Work Partners	SDGs
18 Agustus 2024 August 18, 2024	**Dukungan untuk Pendidikan Informal untuk Kelompok Pra-sejahtera Anak Nelayan (Aneka Kegiatan 17 Agustus, Lomba Mewarnai, dan Beach Clean Up)** J Trust Bank memfasilitasi sekelompok anak nelayan untuk mengikuti serangkaian acara pendidikan non formal seperti mewarnai, mendongeng, kompetisi, dan acara bersih-bersih lingkungan. **Support for Informal Education for Pre-Prosperous Groups of Fishermen's Children (Various Activities of August 17, Coloring Competition, and Beach Clean Up)** J Trust Bank facilitates a group of fishermen's children to take part in a series of non-formal educational events such as coloring, storytelling, competitions, and environmental clean-up events.	Anak nelayan Fishermen's Children	Komunitas Jurnalis Cilik Little Journalist Community	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
28 Agustus 2024 August 28, 2024	**Field Trip Bersama Anak-anak Panti Asuhan** J Trust Bank mengajak anak-anak panti asuhan untuk berkegiatan yang menyenangkan yaitu menggambar, bercerita, dan bermain ke filed trip - Yayasan Yatim Daarul Rahman **Field Trip with Orphanage Children** J Trust Bank invites orphanage children to take part in fun activities, namely drawing, telling stories and playing, to the feld trip - Yatim Daarul Rahman Foundation.	Anak-anak yatim piatu Orphanage children	HiBunda	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
18 September September 18	**Field Trip Bersama Anak-anak Panti Asuhan** J Trust Bank mengajak anak-anak panti asuhan untuk berkegiatan yang menyenangkan yaitu menggambar, bercerita, dan bermain ke filed trip - Yayasan Yatim Mizan Amanah Bintaro. **Field Trip with Orphanage Children** J Trust Bank invites orphanage children to take part in fun activities, namely drawing, telling stories and playing, to the field trip - Mizan Amanah Bintaro Foundation.	Anak-anak yatim piatu Orphanage children	HiBunda	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
21 Oktober 2024 October 21, 2024	**Bantuan Pendidikan kepada SMK Mitra Industri MM2100** J Trust Bank melakukan memberikan bantuan berupa renovasi kelas, dana pendidikan, dan beasiswa pendidikan kepada SMK Mitra Industri MM2100 dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. **Educational Assistance to MM2100 Industrial Partner SMK** J Trust Bank provides assistance in the form of classroom renovations, educational funds and educational scholarships to MM2100 Mitra Industri Vocational School to improve the quality of education in Indonesia.	SMK Mitra Industri MM2100 MM2100 Industrial Partner SMK	SMK Mitra Industri MM2100 MM2100 Industrial Partner SMK	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
21 Oktober 2024 October 21, 2024	**Literasi Keuangan** J Trust Bank memberikan edukasi keuangan untuk siswa SMK MM2100 Mitra Industri jurusan akuntansi. **Financial Literacy** J Trust Bank provides financial education for MM2100 Industrial Partner SMK students majoring in accounting.	Siswa SMK SMK Students	SMK Mitra Industri MM2100 MM2100 Industrial Partner SMK	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
28 Oktober 2024 October 28, 2024	**Penanaman Mangrove** J Trust Bank berpartisipasi melakukan penanaman menanam 3.000 mangrove, menyemai 5.000 bibit mangrove, serta mengumpulkan sampah di area pantai Tanjung Pasir. **Mangrove Planting** J Trust Bank participated in planting 3,000 mangroves, sowing 5,000 mangrove seedlings, and collecting rubbish in the Tanjung Pasir beach area.	Econusa Penjaga Laut, EcoDefender Econusa Cost Guard, EcoDefender	Econusa Penjaga Laut, EcoDefender Econusa Cost Guard, EcoDefender	13 CLIMATE ACTION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
31 Oktober 2024 October 31, 2024	**Field Trip Bersama Anak-anak Panti Asuhan** J Trust Bank mengajak anak-anak panti asuhan untuk berkegiatan yang menyenangkan seperti menggambar, bercerita, dan bermain. **Field Trip with Orphanage Children** J Trust Bank invites orphanage children to have fun activities such as drawing, telling stories, and playing.	Anak-anak yatim piatu Orphanage Children	HiBunda Yayasan Kasih Mandiri Bersinar	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Periode Kegiatan Activity Period	Nama dan Deskripsi Kegiatan Activity Name and Description	Penerima Manfaat Beneficiaries	Mitra Kerja Work Partners	SDGs
11 November 2024 November 11, 2024	**Santunan ke Panti Asuhan** J Trust Bank memberikan bantuan kebutuhan sembako ke panti asuhan Klungkung, Bali. **Donation to the Orphanage** J Trust Bank provides basic food assistance to the Klungkung orphanage, Bali.	Anak-anak yatim piatu Orphanage children	Panti Asuhan Klungkung Bali Klungkung Bali Orphanage	2 ZERO HUNGER 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
25 November 2024 November 25, 2024	**Donor Darah** J Trust Bank mengadakan donor darah. **Blood Donors** J Trust Bank held a blood donation.		Palang Merah Indonesia Indonesian Red Cross	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
28 November 2024 November 28, 2024	**Field Trip Bersama Anak-anak Panti Asuhan** J Trust Bank mengajak anak-anak panti asuhan untuk berkegiatan yang menyenangkan seperti menggambar, bercerita, dan bermain. **Field Trip with Orphanage Children** J Trust Bank invites orphanage children to have fun activities such as drawing, telling stories, and playing.	Anak-anak yatim piatu Orphanage children	HiBunda Yayasan Pondok Taruna	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
29 November 2024 November 29, 2024	**Literasi Keuangan** J Trust Bank memberikan edukasi keuangan untuk siswa SMK MM2100 Mitra Industri jurusan akuntansi. **Financial Literacy** J Trust Bank provides financial education for MM2100 Industrial Partner SMK students majoring in accounting.	Siswa SMK SMK Students	SMK Mitra Industri MM2100 MM2100 Industrial Partner SMK	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
2 Desember 2024 December 2, 2024	**Santunan ke Panti Asuhan** J Trust Bank memberikan bingkisan natal Panti Asuhan Ebenhazer dan Panti Asuhan Tatmawasi. **Donation to the Orphanage** J Trust Bank provided Christmas gifts to Ebenhazer Orphanage and Tatmawasi Orphanage.	Anak-anak yatim piatu Orphanage children	Panti Asuhan Ebenhazer Panti Asuhan Tatmawasi Ebenhazer Orphanage Tatmawasi Orphanage	2 ZERO HUNGER 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
17 Desember 2024 December 17, 2024	**Literasi Keuangan** J Trust Bank memberikan edukasi keuangan untuk siswa SMK MM2100 Mitra Industri jurusan akuntansi. **Financial Literacy** J Trust Bank provides financial education for MM2100 Industrial Partner SMK students majoring in accounting.	Siswa SMK SMK Students	SMK Mitra Industri MM2100 MM2100 Industrial Partner SMK	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
19 Desember 2024 December 19, 2024	**Santunan ke Panti Asuhan** J Trust Bank melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak meliputi kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan golongan darah, dan pemeriksaan umum. Bank juga mengadakan kegiatan fun coloring book yang memberikan ruang bagi mereka mengekspresikan kreativitas melalui gambar dan warna. Pada akhir rangkaian kegiatan, J Trust Bank mengajak anak-anak panti asuhan field trip. Selain menghadirkan rangkaian kegiatan, J Trust Bank memberikan donasi berupa dana operasional, sembako, dua unit rice cooker, mainan edukatif, serta bingkisan Natal. **Donation to the Orphanage** J Trust Bank carries out health checks for children, including dental and oral health, blood type checks, and general examinations. The bank also held fun coloring book activities, which provided space for them to express their creativity through pictures and colors. At the end of the series of activities, J Trust Bank took the orphanage children on a field trip. Apart from presenting a series of activities, J Trust Bank provided donations in the form of operational funds, basic necessities, two rice cooker units, educational toys, and Christmas gifts.	Anak-anak yatim piatu Orphanage children	HiBunda Yayasan Pondok Kasih AGP	4 QUALITY EDUCATION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, J Trust Bank berperan aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Bank menyadari bahwa pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan dan akses terhadap produk keuangan yang memadai merupakan elemen penting untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

J Trust Bank secara rutin mengadakan program literasi atau edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai produk dan layanan perbankan, seperti tabungan, asuransi, elektronik banking dan pinjaman. Kegiatan literasi ini mencakup pelatihan langsung yang menargetkan seluruh segmen masyarakat antara lain pelajar, komunitas, dan pelaku usaha pelaku usaha mikro dan nano.

Selain itu dalam menjalankan inklusi keuangan, Bank juga berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, selain menambah jaringan kantor cabang Bank memastikan tersedianya berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani secara optimal. selain itu, Bank juga terus memperkuat layanan e-Banking agar memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan.

Selama 2024, J Trust Bank telah mengadakan edukasi keuangan kepada 410 orang peserta dari berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari UMKM, pelajar dan ekosistem pendidikan.

FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION

As a form of the company's commitment to supporting inclusive and sustainable economic growth, J Trust Bank plays an active role in increasing financial literacy and inclusion in Indonesia. The Bank realizes that public understanding of financial services and access to adequate financial products are important elements for creating more equitable prosperity and encouraging national economic growth.

J Trust Bank regularly holds financial literacy or education programs to increase public understanding of various banking products and services, such as savings, insurance, electronic banking, and loans. This literacy activity includes direct training targeting all segments of society including students, communities, and micro- and nano-entrepreneurs.

Apart from that, in carrying out financial inclusion, the Bank also seeks to expand public access to financial services, in addition to increasing the Bank's branch office network, ensuring the availability of various products and services designed to reach segments of society that have not been served optimally. Apart from that, the Bank also continues to strengthen e-banking services to make it easier for people to access banking services.

In 2024, J Trust Bank has provided financial education to 410 participants from various community groups consisting of MSMEs, students, and the education ecosystem.

MENGHADIRKAN PRODUK DAN LAYANAN BERKELANJUTAN

Providing Sustainable Products and Services

J Trust Bank senantiasa mengembangkan produk dan layanan melalui kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, terutama terkait keputusan pembiayaan.

J Trust Bank always develops products and services through policies that pay attention to environmental, social, and governance aspects, especially regarding financing decisions.

PENDEKATAN MANAJEMEN [GRI 3-3][OJK F.17]

J Trust Bank selalu berupaya menghadirkan produk dan layanan yang bertanggung jawab. J Trust Bank senantiasa mengembangkan produk dan layanan melalui kebijakan yang selalu memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, terutama terkait keputusan pembiayaan. Bank meyakini bahwa upaya-upaya tersebut akan meningkatkan kesadaran nasabah sebagai upaya bersama dalam menerapkan maupun mempertahankan pola usaha yang berkelanjutan.

Bank menyadari bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi seluruh masyarakat sehingga bank menghindari pembiayaan kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

MANAGEMENT APPROACH [GRI 3-3][OJK F.17]

J Trust Bank always strives to provide responsible products and services. J Trust Bank always develops products and services through policies that always pay attention to environmental, social, and governance aspects, especially regarding financing decisions. The Bank believes that these efforts will increase customer awareness as a joint effort in implementing and maintaining sustainable business patterns.

The Bank realizes that the financing provided to customers has a direct impact on the environment and social economy of the entire community, so the bank avoid financing for business activities that use excessive resources, which can increase social inequality and result in environmental damage.

INOVASI PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.26]

J Trust Bank terus berinovasi untuk menyediakan produk dan layanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah. Bank melakukan fokus penguatan dalam pengembangan inovasi dan transformasi layanan ransformasi layanan *e-Banking*, pembukaan rekening hingga penyaluran bisnis melalui *fintech peer to peer Lending* (P2P) serta penguatan pengembangan aplikasi *Risk Control & Mitigation* untuk penerapan prinsip kehati-hatian Bank.

Bank juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam peningkatan *Current Account Saving Account* (CASA), *Fee Based* melalui penerapan produk baru berbasis teknologi, platform digital untuk transaksi pembayaran atau penjualan serta memperluas akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan agar Bank dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Pada aspek pada aspek keberlanjutan khususnya pada pengembangan produk dan layanan, J Trust Bank telah meluncurkan dua program simpanan yang berbasis lingkungan yaitu TORA Green Savings dan TORA Blue Ocean Savings pada 2024. Program ini memberikan nilai lebih bagi nasabah yaitu menabung sekaligus berbuat baik kepada lingkungan.

SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCT AND SERVICE INNOVATION [OJK F.26]

J Trust Bank continues to innovate to provide products and services in line with evolving customer needs. The Bank focuses on strengthening the development of innovation and transformation of e-Banking service transformation, opening accounts, and channeling business through fintech peer-to-peer lending (P2P) as well as strengthening the development of Risk Control & Mitigation applications to implement the Bank's prudential principles.

The Bank also collaborates with third parties in increasing Current Account Saving Accounts (CASA) and Fee Based through the implementation of new technology-based products, and digital platforms for payment or sales transactions, as well as expanding financial access and increasing financial literacy so that the Bank can be accessed easily by the public.

On sustainability aspects, especially on product and service development, J Trust Bank has launched two environmentally based savings programs, namely TORA Green Savings and TORA Blue Ocean Savings, in 2024. This program provides added value for customers, namely saving while doing good for the environment.

J Trust Bank Ajak Nasabah Lestarikan Ekosistem Laut Melalui TORA Green Savings dan TORA Blue Ocean Savings

J Trust Bank Invites Customers to Preserve Marine Ecosystems Through TORA Green Savings and TORA Blue Ocean Savings

J Trust Bank meluncurkan program simpanan TORA Green Savings pada April 2024 bertepatan dengan Hari Bumi Internasional. TORA Green Savings merupakan program simpanan pertama J Trust Bank yang diciptakan sebagai bagian dari implementasi aspek keberlanjutan perusahaan. Inisiatif ini merupakan upaya kolaboratif untuk merespon isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan dengan mengajak nasabah untuk menjadi bagian dari solusi untuk masa depan berkelanjutan.

Melalui TORA Green Savings J Trust Bank memfasilitasi nasabah yang memiliki perhatian dan ingin berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan menyisihkan 0,5% per tahun dari bunga tabungan untuk penanaman bakau. Setiap Rp25,000 dari dana yang terkumpul secara kolektif akan ditanam 1 (satu) pohon bakau di wilayah kerja CarbonEthics di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Melalui TORA Green Savings, J Trust Bank bersama nasabah beraksi nyata untuk perbaikan area pesisir.

Dari donasi nasabah TORA Green Savings yang terhimpun periode April-November 2024, CarbonEthics selaku mitra kerja J Trust Bank telah menanam 500 mangrove pertama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dengan potensi penyerapan karbon sebanyak 16.500 kg CO2e untuk 20 tahun ke depan.

Selanjutnya pada bulan Desember 2024, J Trust Bank kembali meluncurkan program simpanan beraspek ESG Ekonomi, Sosial, Tata Kelola (EST) bernama TORA Blue Ocean Savings sebagai bukti dukungan J Trust Bank terhadap pelestarian ekosistem laut Indonesia.

Selain kerusakan mangrove, pencemaran laut akibat sampah masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling mengancam. Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik di laut terbesar ke-5 di dunia selama kurun waktu 2020-2023.

Oleh karena itu, melalui program TORA Blue Ocean Savings, J Trust Bank mengambil langkah strategis dengan mengajak nasabah untuk menabung sekaligus berkontribusi pada upaya pengelolaan sampah khususnya sampah plastik melalui kerja sama dengan Waste4Change.

Dengan mendonasikan sebesar 0,5% dari 3,5% bunga tabungan per tahun, nasabah turut serta membiayai proyek lingkungan berupa pengelolaan dan proses daur ulang sampah plastik. Tidak hanya itu, J Trust Bank juga turut berkontribusi dengan menambahkan suku bunga sebesar 0,38% untuk proyek tersebut.

J Trust Bank launched the TORA Green Savings program in April 2024 to coincide with International Earth Day. TORA Green Savings is J Trust Bank's first savings program, which was created as part of the implementation of the company's sustainability aspects. This initiative is a collaborative effort to respond to the issue of climate change and environmental conservation by inviting customers to be part of the solution for a sustainable future.

Through TORA Green Savings, J Trust Bank facilitates customers who care and want to contribute to environmental preservation by setting aside 0.5% per year from savings interest for planting mangroves. For every Rp 25,000 of funds collected collectively, 1 (one) mangrove tree will be planted in the CarbonEthics work area in the Seribu Islands, DKI Jakarta. Through TORA Green Savings, J Trust Bank and its customers take real action to improve coastal areas.

From TORA Green Savings customer donations collected for the April-November 2024 period, CarbonEtchis has planted the first 500 mangroves on Pramuka Island, Seribu Islands, with the potential to absorb 16,500 kg of CO2e for the next 20 years.

Furthermore, in December 2024, J Trust Bank has again launched an ESG (economy, social, governance) savings program called TORA Blue Ocean Savings as proof of J Trust Bank's support for preserving Indonesia's marine ecosystem.

Apart from mangrove damage, marine pollution due to rubbish is still one of the most threatening environmental problems. Based on a World Bank report entitled The Atlas of Sustainable Development Goals 2023, Indonesia is the 5th largest producer of marine plastic waste in the world during the 2020-2023 period.

Therefore, through the TORA Blue Ocean Savings program, J Trust Bank is taking strategic steps by inviting customers to save while contributing to waste management efforts, especially plastic waste, through collaboration with Waste4Change.

By donating 0.5% of the 3.5% interest on savings per year, customers participate in financing environmental projects in the form of managing and recycling plastic waste. Not only that, J Trust Bank also contributed by adding an interest rate of 0.38% for the project.

KEAMANAN PRODUK DAN LAYANAN [OJK F.27][GRI 3-3]

J Trust Bank berkomitmen untuk memastikan keamanan produk dan jasa yang diberikan kepada nasabah, termasuk keamanan data privasi nasabah. Evaluasi pada keamanan produk dan jasa dilakukan secara rutin sesuai dengan regulasi yang relevan, standar etika, dan praktik terbaik di industri.

Beberapa hal penting dalam evaluasi keamanan produk dan jasa Bank seperti berjalannya core banking system, standar operasi dan prosedur, manual produk dan ketentuan pelaksanaan di cabang-cabang. Banyak hal yang dilakukan untuk menjaga keamanan seiring dengan perubahan kebijakan. Semua itu ditujukan agar memastikan transaksi nasabah dapat berjalan dengan lancar, cepat dan aman.

Bank juga terus memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di tengah tantangan perkembangan inovasi keuangan digital. Hal tersebut antara lain diwujudkan dengan pembuatan Kode Etik Pelindungan Konsumen & Masyarakat, yang efektif berlaku untuk seluruh nasabah per Juli 2024. J Trust Bank terus berkomitmen dalam pelaksanaan Pelindungan Konsumen & Masyarakat dan mendorong terwujudnya keyakinan nasabah dan keyakinan pasar.

Di dalam Kode Etik Pelindungan Konsumen & Masyarakat tersebut, Bank memiliki kebijakan Pelindungan Data/Informasi Nasabah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang informasi/data personal nasabah. Bank tidak akan menggunakan data Nasabah untuk tujuan lain tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah, klaim/teguran nasabah segera akan Bank tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Bank menyimpan data nasabah pada tempat yang aman. Perbaikan struktur administrasi dan penanganannya selalu diupayakan oleh Bank untuk melindungi data Nasabah Bank.

Adapun informasi mengenai Kode Etik Pelindungan Konsumen & Masyarakat dapat diakses lebih lanjut di website Bank pada bagian Tata Kelola Perusahaan. Pada tahun 2024, Bank dapat melaporkan bahwa tidak terdapat pengaduan mengenai pelanggaran terhadap privasi, kebocoran, pencurian, atau kehilangan data. [GRI 418-1]

PRODUCT AND SERVICE SAFETY [OJK F.27] [GRI 3-3]

J Trust Bank is committed to ensuring the security of products and services provided to customers, including the security of customer privacy data. Evaluations on the safety of products and services are carried out routinely in accordance with relevant regulations, ethical standards, and industry best practices.

Several important things in evaluating the security of Bank products and services include the functioning of the core banking system, operating standards and procedures, product manuals, and implementation provisions in branches. Many things are being done to maintain security along with policy changes. All of this is aimed at ensuring customer transactions can run smoothly, quickly, and safely.

The Bank also continues to strengthen consumer and community protection amidst the challenges of developing digital financial innovation. This is realized, among other things, by creating a Code of Ethics for Consumer & Community Protection, which is effective for all customers as of July 2024. J Trust Bank continues to be committed to implementing Consumer & Community Protection and encouraging the realization of customer confidence and market confidence.

In the Code of Ethics for Consumer & Community Protection, the Bank has a Customer Data/Information Protection policy in accordance with applicable laws regarding customer personal information/data. The Bank will not use customer data for other purposes without obtaining written consent from the customer. The Bank will immediately follow up on customer claims/reprimands at the first opportunity. Banks store customer data in a safe place. The Bank always strives to improve its administrative structure and handling to protect Bank Customer data.

Further information regarding the Consumer & Community Protection Code of Ethics can be accessed on the Bank's website in the Corporate Governance section. By 2024, the Bank can report that there have been no complaints regarding privacy violations, leaks, theft, or loss of data. [GRI 418-1]

DAMPAK PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN

[OJK F.28][GRI 417-1]

Bank berupaya agar produk dan jasa yang disediakan dapat memberikan dampak positif kepada nasabah. Bank juga berupaya memitigasi dampak negatif produk dan jasa melalui informasi yang jelas dan transparan. Dalam pengembangan produk penghimpunan dana J Trust Bank senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk menginformasikan kepada nasabah mengenai prasyarat simpanan yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Transparansi produk dan layanan bank diberikan kepada nasabah dalam bentuk informasi tertulis dan tidak tertulis. Secara tertulis, nasabah dapat memperoleh informasi dokumen pembukaan rekening di situs perusahaan, brosur produk, iklan di media cetak, media sosial, dan SMS blast. Sedangkan informasi tidak tertulis diperoleh melalui penjelasan dari customer service/staf marketing pada saat nasabah datang ke cabang untuk membuka rekening atau melakukan transaksi, atau pada saat nasabah membutuhkan informasi dengan menghubungi J Trust Call di nomor telepon 1500615.

Langkah-langkah yang dijalankan di antaranya:

1. Informasi yang diberikan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada produk berupa: informasi produk dan layanan, fitur produk, biaya yang dikeluarkan, manfaat dan risiko yang melekat pada produk.
2. Petugas Bank (*customer service & staf marketing*) selalu menjelaskan informasi produk dan layanan secara jelas sebelum nasabah memilih produk, sehingga nasabah memahami fitur, fasilitas, biaya, dan manfaat produk
3. Informasi produk dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada produk. Bank menginformasikan kepada nasabah apabila terjadi perubahan produk melalui pemberitahuan tertulis atau elektronik melalui SMS dan *e-mail blast* serta telepon, hingga melalui situs web.
4. Bank menyediakan informasi tentang produk dan layanan di website bank. Jika nasabah membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menelepon J Trust Call di nomor telpon 1500615

IMPACT OF FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES

[OJK F.28][GRI 417-1]

The Bank strives to ensure that the products and services provided can have a positive impact on customers. The Bank also seeks to mitigate the negative impacts of products and services through clear and transparent information. In developing fund collection products, J Trust Bank always pays attention to the principle of prudence, including informing customers about deposit requirements that are guaranteed by the government through the Deposit Insurance Corporation.

Transparency of bank products and services is provided to customers in the form of written and unwritten information. In writing, customers can obtain information on account opening documents on the company website, product brochures, advertisements in print media, social media, and SMS blasts. Meanwhile, unwritten information is obtained through explanations from customer service/marketing staff when customers come to the branch to open an account or make transactions, or when customers need information by contacting J Trust Call at telephone number 1500615.

The steps taken include:

1. The information provided is delivered in accordance with the provisions applicable to the product in the form of product and service information, product features, costs incurred, and benefits and risks attached to the product.
2. Bank officers (customer service & marketing staff) always explain product and service information clearly before customers choose a product, so that customers understand the features, facilities, costs and benefits of the product
3. Product information is carried out transparently in accordance with the provisions applicable to the product. The bank informs customers if there are product changes through written or electronic notifications via SMS, email blasts, and telephone, as well as via the website.
4. The bank provides information about products and services on the bank website. If customers need further explanation, they can call J Trust Call at telephone number 1500615.

PENARIKAN PRODUK DAN LAYANAN [OJK F.29]

Pada tahun 2024 tidak terdapat penarikan produk dan layanan oleh Bank. J Trust Bank memastikan seluruh produk dan jasa yang dikeluarkan telah melalui proses evaluasi demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah. Evaluasi tersebut, terutama berkenaan dengan kesesuaian dengan regulasi dan standar etika yang ada.

LAYANAN PENGADUAN NASABAH

Untuk menjaga kualitas produk dan layanan, Bank menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah baik secara *online* maupun *offline*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan tanggung jawab Bank terhadap produk dan layanan. Layanan pengaduan ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) yaitu PBI No.10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No.7/7/PBI/2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan POJK No.22 Tahun 2003 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu SEOJK No.2/SEOJK 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Seluruh nasabah termasuk pemangku kepentingan lainnya berhak untuk melaporkan pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan langsung oleh nasabah atau perwakilannya. Apabila pengaduan nasabah disampaikan oleh perwakilan nasabah harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti identitas Identitas Nasabah (E-KTP/ Paspor beserta KITAS/ KMILN) yang berlaku nasabah dan perwakilan nasabah.
2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan nasabah yang menyatakan nasabah memberikan kewenangan kepada perseorangan, lembaga, atau badan hukum yang mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah. Dilengkapi dengan masa berlaku surat kuasa serta bermaterai cukup.
3. Jika perwakilan nasabah adalah lembaga atau badan hukum maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan dari pihak berwenang untuk mewakili lembaga dan/atau badan hukum tersebut.
4. Dokumen lain yang menunjukkan perwakilan nasabah berwenang mewakili nasabah, misalnya Penetapan wali/pengampu dari pengadilan .
5. Bukti identitas nasabah yang diwakili dan dokumen pendukung pengaduan yang diperlukan (misalnya bukti setoran, bukti transfer, rekening koran, dll).

WITHDRAWAL OF PRODUCTS AND SERVICES [OJK F.29]

In 2024, there was no withdrawal of products and services by the Bank. J Trust Bank ensures that all products and services issued have gone through an evaluation process to provide security and comfort for customers. This evaluation primarily concerns conformity with existing regulations and ethical standards.

CUSTOMER COMPLAINTS SERVICE

To maintain product and service quality, the Bank provides complaint channels for customers both online and offline. This is done as a form of information disclosure and the Bank's responsibility for products and services. This complaint service complies with Bank Indonesia (BI) Regulation, namely PBI No.10/10/ PBI/2008 concerning amendments to PBI No.7/7/ PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints and POJK No.22 of 2003 concerning Protection of Consumers and the Community in the Financial Services Sector, Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK), namely SEOJK No.2/SEOJK 07/2014 concerning Services and Settlement of Consumer Complaints on Financial Services Businesses.

All customers, including other stakeholders, have the right to report complaints. Complaints can be submitted directly by customers or their representatives. If a customer complaint is submitted by a customer representative, it must be accompanied by the following documents:

1. Photocopy of proof of identity of the customer (E-KTP/ Passport along with KITAS/ KMILN) valid for the customer and the customer's representative.
2. Special power of attorney from the customer to the customer's representative stating that the customer gives authority to the individual, institution, or legal entity representing him/her to act for and on behalf of the customer. Equipped with a valid power of attorney and sufficient stamp duty.
3. If the customer representative is an institution or legal entity, it must be accompanied by a document stating that it is from the authorized party to represent the institution and/or legal entity.
4. Other documents that show the customer representative has the authority to represent the customer, for example, a determination of a guardian from the court.
5. Proof of identity of the customer being represented and supporting documents for the complaint required (for example, proof of deposit, proof of transfer, bank statement, etc.).

Adapun penerapan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada nasabah oleh Bank juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Nasabah menyampaikan pengaduan, antara lain melalui:

a. Contact Center Dept.;
b. Kantor Cabang / Cabang Pembantu;
c. Internal Divisi;
d. Media massa (cetak , elektronik dan online);
e. Social Media ;
f. Aplikasi Portal Pengaduan Nasabah (APPK);

Petugas Bank memiliki Services Level Agreement (SLA) dalam memproses pengaduan sebagai berikut:

1. Pengaduan nasabah lisan akan diproses maksimal selama 5 (lima) hari kerja
2. Pengaduan nasabah tertulis diproses selama 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan status laporan pengaduan nasabah selesai.
3. Pengaduan yang masih memerlukan penyelesaian Bank dapat diperpanjang selama selama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dokumen persyaratan pengaduan belum lengkap, Nasabah wajib melengkapinya dalam kurun waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja jika dokumen di luar domisili Nasabah dan/atau terdapat hal lain di luar kendali Nasabah.

Selanjutnya, Bank berupaya mempercepat proses penanganan pengaduan nasabah melalui berbagai kanal seperti Contact Center J Trust Call 1500615 dan email customercare@jtrustbank.co.id), kantor cabang, media massa (cetak, elektronik dan online), sosial media. Berikut adalah mekanisme penanganan pengaduan nasabah melalui berbagai kanal tersebut:

1. Layanan Contact Center J Trust Call 1500615
   Petugas Call Center Bank akan menerima pengaduan dan melakukan verifikasi kepada nasabah serta mencatat informasi pengaduan yang disampaikan melalui telepon.

   Kemudian, petugas akan melakukan konfirmasi kembali ke pihak nasabah untuk memastikan seluruh informasi pengaduan tercatat dengan benar dan tepat. Setelah mendapatkan konfirmasi, petugas Call Center Bank akan memberikan nomor tiket pengaduan nasabah dan menyampaikan bahwa pengaduan akan diproses dalam waktu selama lima hari kerja. Selanjutnya Bank akan

The Bank's application of procedures for complaints and dispute resolution to customers is also in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Customers submit complaints, including through:

a. Contact Center Dept.;
b. Branch Offices / Sub-Branch Offices;
c. Internal Division;
d. Mass media (print, electronic, and online);
e. Social Media;
f. Customer Complaint Portal Application (APPK);

Bank officers have a Service Level Agreement (SLA) in processing complaints as follows:

1. Verbal customer complaints will be processed within a maximum of 5 (five) working days
2. Written customer complaints are processed within 10 (ten) working days until the status of the customer complaint report is complete.
3. Complaints that still require Bank resolution can be extended for (ten) working days.
4. Customers need to complete their incomplete document requirements within a maximum period of 10 (ten) working days and can be extended by 10 (ten) working days should the documents be outside the Customer's domicile and/or beyond the Customer's control.

Furthermore, the Bank seeks to speed up the process of handling customer complaints through various channels such as the Contact Center J Trust Call 1500615 and email customercare@jtrustbank.co.id), branch offices, mass media (print, electronic, and online), and social media. The following is the mechanism for handling customer complaints through these various channels:

1. J Trust Call Center Service 1500615
   Bank Call Center officers will receive complaints, verify customers, and record complaint information submitted by telephone

   Furthermore, the officer will confirm again with the customer to ensure that all complaint information is recorded correctly and precisely. After receiving confirmation, the Bank Call Center officer will provide the customer's complaint ticket number and inform them that the complaint will be processed within five working days. Next, the Bank will send an open ticket notification for Complaints via e-mail and/or

mengirimkan notifikasi open ticket Pengaduan melalui e-mail dan atau SMS di alamat email dan nomor yang tercatat pada sistem Bank.

Jika pengaduan lisan belum dapat diselesaikan, Bank akan menyampaikan ke nasabah agar dapat datang ke Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu terdekat untuk mengisi Form Pengaduan Nasabah atau mengirimkan pengaduan ke e-mail Customer Care. Jika pada waktu 5 (lima) hari kerja, pengaduan nasabah terselesaikan, maka nasabah akan mendapatkan notifikasi closed ticket pengaduan yang selesai melalui e-mail dan atau SMS di alamat email dan nomor yang tercatat pada sistem Bank.

2. Kantor Cabang/Cabang Pembantu J Trust Bank
   Petugas Pelayanan Konsumen (P2K) Kantor Cabang/ Cabang Pembantu yang ditunjuk yaitu Branch Service Operation Manager(BSOM) /Operation Officer/Back Office (sebagai alternate BSOM) Bank melakukan verifikasi untuk memastikan nasabah sesuai dengan data Bank. Selanjutnya Petugas P2K akan meminta nasabah untuk mengisi Formulir Pengaduan Nasabah dengan data-data identitas nasabah, rekening yang diadukan, hingga bukti transaksi atau permasalahan. Setelah terisi lengkap, petugas Customer Service Petugas P2K akan memberikan nomor tiket kepada pihak nasabah dan menyampaikan bahwa pengaduan akan diproses selama 10 (sepuluh) hari kerja.

   Selanjutnya, petugas Petugas P2K menyampaikan (eskalasi) informasi pengaduan tersebut melalui Sistem Pengaduan Nasabah Bank ke unit kerja terkait untuk dapat diselesaikan, dengan tembusan dikirim Contact Center . Jika pengaduan masih belum dapat diselesaikan, petugas Petugas P2K akan menyampaikan penambahan waktu penyelesaian selanjutnya adalah 10 (sepuluh) hari kerja kepada nasabah. Jika pengaduan sudah terselesaikan sebelum 10 (sepuluh) hari kerja, petugas Petugas P2K akan menghubungi nasabah atas hasil pengaduannya. Jika nasabah sudah puas atas hasil pengaduan, petugas Petugas P2K akan membuat laporan pengaduan selesai.

SMS to the email address and number recorded in the Bank's system.

If the verbal complaint cannot be resolved, the Bank will tell the customer to come to the nearest Branch Office/Sub-Branch Office to fill out the Customer Complaint Form or send the complaint to Customer Care via e-mail. If within 5 (five) working days, the customer's complaint is resolved, the customer will receive a closed ticket notification of the completed complaint via e-mail and/or SMS at the email address and number recorded in the Bank's system.

2. J Trust Bank Branch/Sub-Branch Office
   The appointed Consumer Service Officer (P2K) of the Branch Office/Capem, namely the Branch Service Operation Manager (BSOM)/Operation Officer/ Back Office (as an alternative BSOM) of the Bank, carries out verification to ensure that customers match the Bank's data. Next, the P2K Officer will ask the customer to fill out a Customer Complaint Form with data on the customer's identity, the account being complained about, and proof of the transaction or problem. Once filled in completely, the P2K Customer Service officer will provide a ticket number to the customer and inform them that the complaint will be processed within 10 (ten) working days.

   Subsequently, P2K officers convey (escalate) the complaint information through the Bank's Customer Complaints System to the relevant work unit for resolution, with a copy sent to the Contact Center. If the complaint still cannot be resolved, the P2K officer will convey to the customer a further additional settlement time of 10 (ten) working days. If the complaint has been resolved before 10 (ten) working days, the P2K officer will contact the customer with the results of the complaint. If the customer is satisfied with the results of the complaint, the P2K officer will make a completed complaint report.

3. Layanan Contact Center – Customer Care e-mail: customercare@jtrustbank.co.id
   Nasabah yang mengajukan pengaduan kepada Bank melalui *e-mail* wajib melampirkan data-data identitas, nomor rekening yang diadukan, fotokopi bukti transaksi, dan fotokopi dokumen lainnya. Setelah menerima *e-mail* nasabah tentang pengaduan nasabah, petugas Customer Care segera melakukan eskalasi/diteruskan ke divisi terkait sesuai SLA serta ke unit kerja yang tepat dalam menanggapi pengaduan nasabah. Nasabah diberikan nomor tiket pengaduan dan jangka waktu penyelesaian, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. Selanjutnya Bank akan mengirimkan notifikasi *Open Ticket* Pengaduan melalui *e-mail* dan atau SMS di alamat email dan nomor yang tercatat pada sistem Bank.

   Apabila penyelesaian pengaduan nasabah selesai lebih cepat, maka petugas Customer Care Bank segera menginformasikan kepada nasabah. Jika nasabah sudah puas atas solusi yang disampaikan, pengaduan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan pengaduan selesai (*case closed*). Nasabah akan mendapatkan notifikasi *Closed Ticket* pengaduan yang selesai melalui *e-mail* dan atau SMS di alamat *e-mail* dan nomor yang tercatat pada sistem Bank.

4. Layanan Contact Center – Saluran Social Media Media Sosial (Whatsapp, Instagram dan Facebook)
   Nasabah yang mengajukan pengaduan melalui sosial media wajib menginformasikan data-data identitas pribadi, cabang pembuka rekening, data pembukaan rekening, dan tanggal kejadian. Pengaduan nasabah yang diterima melalui sosial media akan ditindaklanjuti oleh petugas social media Bank. Pengaduan ini juga langsung diteruskan ke unit kerja/divisi terkait dalam melakukan penyelesaian pengaduan tersebut.

   Petugas social media Bank melakukan eskalasi atau menyampaikan detail pengaduan nasabah sesuai deskripsi pengaduan nasabah yang dilaporkan. Petugas Bank menyampaikan kepada nasabah nomor tiket pengaduan dan jangka waktu penyelesaian, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. Selanjutnya Bank akan mengirimkan notifikasi *Open Ticket* Pengaduan melalui e-mail dan atau SMS di alamat email dan nomor yang tercatat pada sistem Bank.

3. Contact Center Services – Customer Care e-mail: customercare@jtrustbank.co.id
   Customers who submit complaints to the Bank via e-mail are required to attach identity data, the account number being complained about, a photocopy of proof of transaction, and photocopies of other documents. After receiving a customer's e-mail regarding a customer complaint, the Customer Care officer immediately escalates/forwards it to the relevant division according to the SLA and to the appropriate work unit to respond to the customer's complaint. Customers are given a complaint ticket number and a resolution period, namely 10 (ten) working days. Next, the Bank will send an Open Ticket Complaint notification via e-mail and/or SMS to the email address and number recorded in the Bank's system.

   If the customer complaint is resolved more quickly, the Bank Customer Care officer will immediately inform the customer. If the customer is satisfied with the solution provided, the complaint is considered complete and continues with making a completed complaint report (case closed). Customers will receive a completed Closed Ticket notification via e-mail and/or SMS at the email address and number registered in the Bank's system.

4. Contact Center Services – Social Media Channels (Whatsapp, Instagram, and Facebook)
   Customers who submit complaints via social media are required to provide personal identity data, account opening branch, account opening data, and the date of the incident. Customer complaints received via social media will be followed up by Bank social media officers. This complaint is also immediately forwarded to the relevant work unit/division to resolve the complaint.

   Bank social media officers escalate or convey details of customer complaints according to the description of the reported customer complaint. Bank officers convey to customers the complaint ticket number and the resolution period, namely 10 (ten) working days. Next, the Bank will send an Open Ticket Complaint notification via e-mail and/or SMS to the email address and number recorded in the Bank's system.

Jika petugas sosial media Bank sudah menerima penyelesaian pengaduan nasabah lebih cepat, maka segera disampaikan kepada nasabah. Jika nasabah sudah puas atas solusi yang disampaikan, maka pengaduan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan pengaduan selesai (*case closed*). Nasabah akan mendapatkan notifikasi *Closed Ticket* pengaduan yang selesai melalui *e-mail* dan atau SMS di alamat email dan nomor yang tercatat pada sistem Bank.

If the social media staff has received a quicker resolution of a customer complaint, it will immediately be conveyed to the customer. If the customer is satisfied with the solution submitted, the complaint is considered complete and continues with making a completed complaint report (case closed). Customers will receive a completed Closed Ticket notification via e-mail and/or SMS at the email address and number recorded in the Bank's system.

5. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK
   Selain melalui Contact Center dan Kantor Cabang/ Cabang Pembantu J Trust Bank, nasabah juga dapat mengajukan pengaduan/sengketa melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dari OJK. Jika yang disampaikan adalah pengaduan, nasabah wajib menginformasikan data pribadi dan melampirkan dokumen terkait. Pada saat menerima pengaduan nasabah melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK, petugas Customer Care melakukan proses dan menindaklanjuti dengan melakukan eskalasi yang disampaikan ke unit kerja/divisi terkait dalam menanggapi pengaduan tersebut.

   Setelah menetapkan unit kerja yang bertugas untuk menanggapi pengaduan, petugas Customer Care melakukan eskalasi atau menyampaikan detail pengaduan nasabah tersebut. Disampaikan pula kepada unit kerja terkait nomor tiket pengaduan dan jangka waktu penyelesaian, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila petugas Customer Care Bank sudah menerima penyelesaian pengaduan nasabah dari unit kerja terkait lebih cepat, maka segera menyampaikannya melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK dengan mengunggah Surat Tanggapan Bank dan Dokumen lainnya jika ada.

   Setelah nasabah membaca dan melakukan konfirmasi penyelesaian pengaduan dan jika nasabah sudah puas atas solusi yang disampaikan oleh petugas Customer Care, maka pengaduan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan pengaduan selesai (*case closed*).

5. OJK Consumer Protection Portal Application (APPK).
   Apart from the Contact Center and J Trust Bank Branch/Sub-Branch Offices, customers can also submit complaints/disputes through the Consumer Protection Portal Application (APPK) from the OJK. If what is submitted is a complaint, the customer is required to provide personal data and attach related documents. When receiving a customer complaint via the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK), Customer Care officers carry out the process and follow up by carrying out an escalation that is submitted to the relevant work unit/division in response to the complaint.

   After determining the work unit tasked with responding to complaints, Customer Care officers escalate or convey details of the customer's complaint. The complaint ticket number and resolution period are also conveyed to the work unit, namely 10 (ten) working days. If the Bank Customer Care officer has received the resolution of a customer complaint from the relevant work unit more quickly, then immediately submit it via the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK) by uploading the Bank's Response Letter and other documents if any.

   After the customer has read and confirmed the resolution of the complaint and if the customer is satisfied with the solution provided by the Customer Care officer, the complaint is considered complete and continues with making a completed complaint report (case closed).

Selama tahun 2024, Bank telah menerima 1.293 pengaduan nasabah di mana 100% telah diselesaikan sepenuhnya. Berikut adalah rincian pengaduan nasabah melalui berbagai saluran pengaduan:

In 2024, the Bank has received 1,293 customer complaints, of which 100% have been completely resolved. The following are details of customer complaints via various complaint channels:

Jenis/Saluran Pengaduan Complaint Type/Channel	Jumlah Pengaduan Number of Complaints	Status Penyelesaian Completion Status
J Trust Call	263	100%
E-mail Customer Service Customer Service E-mail	416	100%
Media Sosial Social Media	322	100%
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Consumer Protection Portal Application	7	100%
Divisi Internal Internal Division	15	100%
Cabang Branch	270	100%

SURVEI KEPUASAN NASABAH [OJK F.30]

Selama tahun 2024, Bank tidak melakukan survei kepuasan nasabah.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY [OJK F.30]

In 2024, the Bank did not conduct customer satisfaction surveys.

A Happy Day
with
J TRUST BANK
Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
Field Trip

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang transparan dan terukur kepada para pemangku kepentingan mengenai kontribusi J Trust Bank terhadap pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

This report aims to offer stakeholders transparent and measurable insights into J Trust Bank's contributions to economic development, environmental sustainability, and social well-being.

Laporan Keberlanjutan ini disusun sebagai bentuk komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("J Trust Bank", "Bank", atau "kami") terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya J Trust Bank dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG), mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), target Net Zero Emission sebagai agenda Indonesia, sekaligus memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan.

This Sustainability Report is prepared as a form of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's ("J Trust Bank", "Bank", or "we") commitment to the transparency and accountability principles in sustainable business management. This report provides a comprehensive overview of J Trust Bank's efforts in creating long-term value through the implementation of environmentally, socially, and governance (ESG) responsible business practices, supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), Net Zero Emission targets as Indonesia's agenda, while meeting stakeholders' needs and expectations.

Adapun penyusunan laporan ini mengacu pada standar dan pedoman yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pelaporan keberlanjutan dan standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI). Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang transparan dan terukur kepada para pemangku kepentingan mengenai kontribusi J Trust Bank terhadap pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

The preparation of this report refers to relevant standards and guidelines, including the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding sustainability reporting and international standards such as the Global Reporting Initiative (GRI). Through this report, we hope to provide transparent and measurable information to stakeholders regarding J Trust Bank's contribution to economic development, environmental preservation, and social welfare.

Pedoman dan Standar Guidelines and Standards	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. • Format laporan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik • Global Reporting Initiative (GRI) dengan opsi "With Reference" • Dalam melaporkan data keuangan, Bank menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia • Financial Services Authority Regulation No.51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. • The report's format refers to the Circular Letter of the Financial Services Authority No.16/SOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies. • Global Reporting Initiative (GRI) using the "With Reference" option. • In reporting financial data, the Bank uses techniques based on the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards (PSAK).
Siklus dan Periode Pelaporan [GRI 2-3] Reporting Cycle and Period [GRI 2-3]	• Diterbitkan setiap tahun • Periode pelaporan 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 • Laporan sebelumnya diterbitkan pada bulan April 2024 • Issued annually • Reporting period January 1, 2024 to December 31, 2024 • Previous report was published in April 2024
Cakupan dan Batasan [GRI 2-2] Scope and Limitation [GRI 2-2]	• Informasi kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan hanya mencakup data J Trust Bank, karena Bank tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, dan perusahaan ventura bersama • Informasi kinerja lingkungan aktivitas operasional mencakup kantor pusat dan kantor cabang. • The financial, social, and environmental performance information only covers J Trust Bank data, as the Bank does not have subsidiaries, associates, and joint ventures. • Environmental performance information of operational activities covers head office and branch offices.
Penyajian Kembali [GRI 2-4] Restatement [GRI 2-4]	Tidak ada None
Tanggapan Umpan Balik Laporan Sebelumnya [OJK G.3] Previous Report's Feedback Responses [OJK G.3]	Tidak ada None

Verifikasi Pihak Eksternal [OJK G.1][GRI 2-5] External Party Verification [OJK G.1][GRI 2-5]	Pada Laporan Keberlanjutan 2024, Bank belum melakukan verifikasi pihak eksternal. Adapun proses verifikasi dilakukan secara internal serta ditinjau dan disetujui oleh Direksi. In the 2024 Sustainability Report, the Bank has not conducted external party verification. The verification process is conducted internally and reviewed and approved by the Board of Directors.
Kontak Pelaporan [GRI 2-3] Reporting Contact [GRI 2-3]	PT Bank JTrust Indonesia Tbk Corporate Secretary Sahid Sudirman Center, Lt. 33/33th Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia Telp. +62212926 1111 Email: corsec@jtrustbank.co.id

PROSES PENENTUAN DAN DAFTAR TOPIK MATERIAL [GRI 3-1][GRI 3-2]

Dalam penyusunan laporan ini, Bank melibatkan para pemangku kepentingan yang dibagi dalam dua kelompok, yakni internal dan eksternal. Pada lingkup internal terdiri dari karyawan dan pemegang saham, sedangkan lingkup eksternal terdiri dari nasabah, media, pemasok, dan regulator. Para kelompok pemangku kepentingan tersebut telah diidentifikasi sebagai kelompok yang terpengaruh atas kebijakan dan kegiatan operasional Bank.

Pada tahun 2023, Bank melakukan survei untuk menentukan aspek materialitas dan telah melibatkan para pemangku kepentingan tersebut. Survei tersebut mencakup 12 isu yang ditanyakan kepada responden: seberapa penting menurut pemangku kepentingan eksternal, dan seberapa besar pengaruhnya bagi Bank. Bank kemudian membuat pemetaan dan menentukan skor prioritas bagi pemangku kepentingan dan Bank.

Laporan tahun ini masih menggunakan hasil pemetaan survei materialitas tahun 2023 karena dianggap masih relevan. Berikut adalah hasil pemetaan aspek materialitas yang dilakukan pada 2023:

DETERMINATION PROCESS AND LIST OF MATERIAL TOPICS [GRI 3-1][GRI 3-2]

In preparing this report, the Bank involves stakeholders who are divided into two groups, internal and external. The internal scope consists of employees and shareholders, while the external scope consists of customers, media, suppliers, and regulators. These stakeholder groups have been identified as those affected by the Bank's policies and operations.

In 2023, the Bank conducted a survey to determine materiality and engaged these stakeholders. The survey included 12 issues asked to respondents: how important are they to external stakeholders and how much do they affect the Bank. The Bank then created a mapping and determined priority scores for stakeholders and the Bank.

This year's report still uses the 2023 materiality survey mapping results as they are still considered relevant. The following are the results of the materiality aspect mapping conducted in 2023:

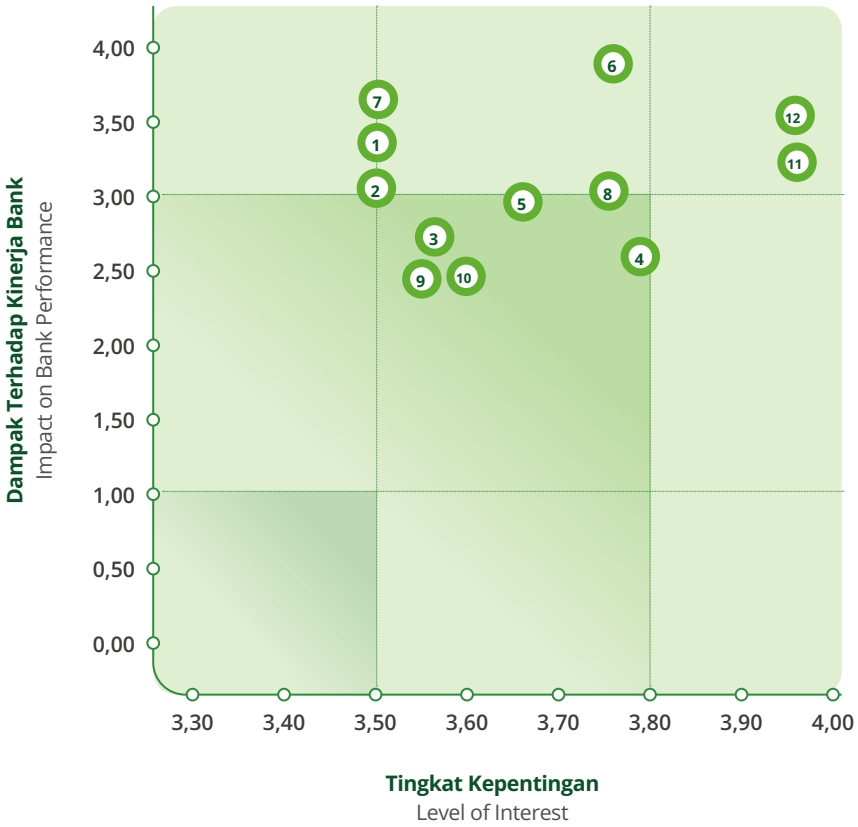

1	Digitalisasi Digitalization
2	Inovasi Produk dan Layanan Product and Service Innovation
3	*Green Bond* Green Bond
4	Risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Environmental, Social and Governance Risks
5	Portofolio Kredit Credit Portfolio
6	Perlindungan Data Data Protection
7	Informasi Produk dan Layanan Product and Service Information
8	Ketersediaan Kantor Cabang Branch Office Availability
9	Pengurangan Penggunaan Energi Energy Use Reduction
10	Reduksi Emisi Emission Reduction
11	Kesempatan yang Setara Equal Opportunities
12	Hak Asasi Manusia Human Rights

Ke-12 topik material tersebut akan menjadi panduan bagi Bank dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan. Bank akan memberikan porsi lebih besar dalam penyampaian informasi pada 12 topik material yang telah diidentifikasi dan divalidasi oleh para pemangku kepentingan.

The 12 material topics will guide the Bank in preparing the Sustainability Report. The Bank will provide a significant portion of information on the 12 material topics that have been identified and validated by stakeholders.

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

These financial statements are originally issued in Indonesian language

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

DAFTAR ISI / ***CONTENTS***

	Ekshibit/ *Exhibit*	
Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan		***Board of Directors' Statement of Responsibility on the Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	A	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	B	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	C	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	D	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	E	*Notes to the Financial Statements*
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ritsuo Fukadai**
   Alamat Kantor : Gedung Sahid Sudirman Center (SSC)
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Alamat Rumah: Resident Chianti 22-08
   Casa Grande 2 Residence Kota Kasablanka
   Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
   No. Telepon : (021) 29261111
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : **Helmi A. Hidayat**
   Alamat Kantor : Gedung Sahid Sudirman Center (SSC)
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Alamat Rumah: Jl. Kembang Agung III F8/2, RT 003 RW 005
   Kembangan Selatan - Jakarta Barat
   No. Telepon : (021) 29261111
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

We the undersigned:

1. *Name* : ***Ritsuo Fukadai***
   Office Address : *Sahid Sudirman Center Building (SSC)*
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Residential Address : *Resident Chianti 22-08*
   Casa Grande 2 Residence Kota Kasablanka
   Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
   Telephone : *(021) 29261111*
   Title : *President Director*

2. *Name* : ***Helmi A. Hidayat***
   Office Address : *Sahid Sudirman Center Building (SSC)*
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Residential Address : *Jl. Kembang Agung III F8/2, RT 003 RW 005*
   Kembangan Selatan - Jakarta Barat
   Telephone : *(021) 29261111*
   Title : *Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank JTrust Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of the Bank has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The financial statements of the Bank do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 14 Februari/*February* 14, 2025

J TRUST BANK

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama/*President Director*

Helmi A. Hidayat
Direktur/*Director*

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 Indonesia
Telp : 62-21 2926 1111 | Fax : 62-21 2788 9248 / 49 | www.jtrustbank.co.id

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank JTrust Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami:

1. **Kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas pinjaman yang diberikan**

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3q (informasi kebijakan akuntansi material - penurunan nilai aset keuangan), Catatan 4 (estimasi dan asumsi - cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan) dan Catatan 12 (pinjaman yang diberikan) atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2024, Bank mencatat pinjaman yang diberikan sebesar Rp 26.528.066 juta dan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp 197.542 juta yang dihitung oleh Bank berdasarkan KKE sesuai dengan persyaratan PSAK 109, "Instrumen Keuangan".

   Kami fokus pada area ini karena signifikasi nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan mewakili 66% dari total aset Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan saldo KKE terkait yang dibentuk melibatkan estimasi yang memiliki ketidakpastian dan pertimbangan subyektif yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah dari KKE.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit:

1. ***Expected credit losses (ECL) on loans***

   As described in Note 3q (material accounting policy information - impairment of financial assets), Note 4 (estimates and assumptions - allowance for impairment losses on financial assets) and Note 12 (loans) to the financial statements, as at December 31, 2024, the Bank recorded loans amounted to Rp 26,528,066 million and allowance for impairment losses on loans amounted to Rp 197,542 million which was calculated by the Bank based on the ECL in accordance with the requirements of PSAK 109, "Financial Instruments".

   We focused on this area due to the significance of the carrying value of loans which account for 66% of the Bank's total assets as at December 31, 2024, and the related ECL provided, which is subject to estimation uncertainty and involves subjective judgements used by management in estimating the amount of ECL.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami: (lanjutan)

1. **Kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)**

   Bank menghitung KKE untuk pinjaman yang diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai maupun yang mengalami penurunan nilai. Untuk pinjaman yang diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai, yang tidak dianggap signifikan secara individual, Bank menilai KKE secara kolektif. Untuk pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai, yang nilainya signifikan secara individual, Bank menilai KKE secara individual.

   Dalam penilaian kolektif KKE, Bank menggunakan metodologi permodelan yang bergantung pada data internal dan eksternal serta sejumlah estimasi meliputi penetapan segmentasi eksposur kredit; penilaian atas peningkatan risiko kredit yang signifikan dan mengalami penurunan nilai; ekspektasi kondisi makro ekonomi masa depan dan asumsi-asumsi model.

   Penilaian individual atas KKE melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi, termasuk asumsi utama manajemen yang diterapkan pada arus kas masa depan yang diharapkan dari debitur, termasuk jumlah dan waktu pemulihan serta penilaian agunan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit: (continued)

1. ***Expected credit losses (ECL) on loans (continued)***

   The Bank calculates ECL for both non-impaired and impaired loans. For non-impaired and impaired loans, which are not considered individually significant, the Bank assesses ECL on a collective basis. For impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses ECL on an individual basis.

   In the collective assessment of ECL, the Bank utilizes modeling methodologies which are reliant on internal and external data as well as a number of estimates including determination of credit exposure segmentation; assessment of significant increase in credit risk and impaired loans; expectations of forward-looking macroeconomic factors and the model assumptions.

   The individual assessment of ECL involves the use of judgments and estimates, including management's key assumptions applied on the expected future cash flows of the debtor, including amounts and timing of recoveries and collateral valuation.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami: (lanjutan)

1. **Kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)**

   Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

   Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan audit kami atas pinjaman yang diberikan, kemudian menilai dan menguji efektivitas penerapan pengendalian tersebut yang meliputi peninjauan identifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan gagal bayar, serta penilaian dan pemantauan agunan. Kami juga melakukan pengujian substantif secara sampel untuk memverifikasi kesesuaian kriteria yang digunakan dalam menilai peningkatan risiko kredit yang signifikan serta keakurasian dan ketepatan alokasi waktu atas eksposur di antara tahapan yang diterapkan dengan menelaah dokumen kredit debitur yang menjadi sampel pinjaman yang diberikan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit: (continued)

1. ***Expected credit losses (ECL) on loans (continued)***

   How our audit addressed the key audit matters

   We obtained an understanding of the controls relevant to our audit for loans, assessed and tested the effectiveness of such controls which include review identification of significant increase of credit risk and default, and collateral valuation and monitoring. We also performed substantive testing on a sampling basis to verified the appropriateness criteria used to assess significant increase in credit risk and accuracy and timeliness of allocation of exposures among the staging that applied by reviewing the debtor's credit files whose selected as loans sampled.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami: (lanjutan)

1. **Kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)**

   Bagaimana audit kami merespons hal audit utama (lanjutan)

   Untuk penilaian kolektif KKE, kami (a) memperoleh pemahaman metodologi permodelan KKE yang digunakan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan; (b) mengevaluasi kesesuaian penilaian Bank atas kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan; (c) menguji pendekatan Bank untuk pemilihan skenario ekonomi dan menilai kewajaran skenario ekonomi dan kesesuaian pembobotan probabilitas yang diterapkan; (d) menilai kewajaran asumsi utama yang digunakan oleh manajemen dalam model dan parameter *probabilities of default* (PD) dan *loss given default* (LGD); dan (e) menghitung ulang kolektif KKE untuk seluruh portofolio.

   Dalam penilaian individual KKE, kami (a) mengevaluasi kesesuaian penilaian Bank atas kriteria gagal bayar (mengalami penurunan nilai); (b) menguji asumsi utama yang digunakan manajemen atas perhitungan arus kas masa depan yang diharapkan dari debitur, termasuk jumlah dan waktu pemulihan; (c) membandingkan nilai agunan yang dapat direalisasikan dengan bukti-bukti eksternal termasuk laporan penilaian independen, jika tersedia; dan (d) melakukan verifikasi perhitungan KKE untuk seluruh portofolio.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit: (continued)

1. ***Expected credit losses (ECL) on loans (continued)***

   How our audit addressed the key audit matters (continued)

   For collective assessment of ECL, we (a) obtained an understanding of the modeling methodologies used in calculating the allowance for impairment losses on loans; (b) evaluated the appropriateness of the Bank's assessment of its significant increase in credit risk criteria; (c) challenged the Bank's approach for the selection of economic scenario and assessed the reasonableness of the economic scenarios and corresponding probability weighting applied; (d) assessed the reasonableness of key assumptions made by management in the probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters; and (e) recalculated the collective ECL for the whole portfolio.

   For individual assessment of ECL, we (a) evaluated the appropriateness of the Bank's assessment of its default criteria (impaired); (b) challenged management's key assumptions applied on expected future cash flows of the debtor, including amounts and timing of recoveries; (c) compared the realizable value of collaterals against externally derived evidence including independent valuation reports, where available; and (d) verified the calculation of ECL for the whole portfolio.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami: (lanjutan)

2. Pengendalian Teknologi Informasi ("TI") yang berdampak pada sistem pelaporan keuangan

Bank sangat bergantung pada aplikasi TI, aplikasi, pengendalian, dan infrastruktur untuk operasional sehari-hari serta proses pelaporan keuangan. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks karena volume data yang besar dan kompleksitas sistem pelaporan keuangan beserta sistem terkaitnya. Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian pengendalian TI Bank sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

(a) Kami melibatkan spesialis audit TI dalam mengevaluasi risiko yang terkait dengan lingkungan TI Bank;
(b) Kami menguji pengendalian TI Bank atas sistem informasi yang relevan dengan audit kami;
(c) Kami memperoleh pemahaman tentang sistem TI dan pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kemudian kami menilai efektivitas rancangan, implementasi, dan pengoperasian dari pengendalian utama yang dirancang untuk mempertahankan integritas dari sistem utama pelaporan keuangan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit: (continued)

2. Information Technology ("IT") controls that impact financial reporting systems

The Bank depends largely on its IT applications, controls, and infrastructure for its day-to-day operations and financial reporting processes. The IT environment of the Bank is considered to be complex due to the large volume of data and the complexity of the financial reporting system and its surrounding systems. Hence, we consider the operation of the Bank's IT controls to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

(a) We involved IT audit specialists in evaluating the risks associated with the Bank's IT environment;
(b) We tested the Bank's IT controls over information systems that were relevant to our audit;
(c) We obtained an understanding of the IT systems and controls that support the financial reporting process. Then we assessed the effectiveness of the design, implementation, and operation of the associated key controls designed to maintain the integrity of the key financial reporting applications.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami: (lanjutan)

2. Pengendalian Teknologi Informasi ("TI") yang berdampak pada sistem pelaporan keuangan (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama (lanjutan)

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini: (lanjutan)

Penilaian ini termasuk evaluasi atas:

- Organisasi dan personel sistem informasi;
- Pengendalian akses logis: pengendalian akses yang mengelola dan melindungi aset informasi. Pengendalian ini biasanya ditentukan berdasarkan fungsi pekerjaan pengguna dan mempertimbangkan pemisahan tugas;
- Manajemen perubahan program: proses dan pengendalian yang dijalankan dalam departemen TI Bank yang dirancang untuk mengelola perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
- Cadangan dan operasi komputer lainnya: pengendalian terhadap pencadangan data dan keamanan data untuk memastikan sistem berfungsi secara efektif dan efisien;

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit: (continued)

2. Information Technology ("IT") controls that impact financial reporting systems (continued)

How our audit addressed the key audit matters (continued)

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter: (continued)

This assessment includes the evaluation as follows:

- *Information systems organization and personnel;*
- *Logical access control: the access controls that manage and protect information assets. It is often determined based on the job function of users and consider segregation of duties;*
- *Program change management: the processes and controls executed within the Bank's IT department designed to manage the changes to functionality and configurations within systems;*
- *Backups and other computer operations: the controls for the backup of data and data security to keep the systems functioning effectively and efficiently;*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Berikut adalah uraian hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami: (lanjutan)

2. **Pengendalian Teknologi Informasi ("TI") yang berdampak pada sistem pelaporan keuangan (lanjutan)**

   Bagaimana audit kami merespons hal audit utama (lanjutan)

   Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini: (lanjutan)

   - Pengendalian keamanan fisik atas pusat data untuk melindungi fasilitas dan peralatan komputer dari kerusakan atau akses tidak sah yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi;
   - Pengendalian pengembangan sistem: pengendalian yang terkait dengan pengembangan, konfigurasi, dan implementasi sistem baru. Tahun ini, Bank mengimplementasikan sistem baru yang digunakan dalam pemrosesan dan pencatatan informasi keuangan yang pada akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan.

   Selanjutnya, kami menguji pengendalian berbasis aplikasi dengan mengidentifikasi komponen aplikasi yang signifikan serta aliran informasi dalam sistem serta memperoleh pemahaman tentang aplikasi utama dengan meninjau dokumentasi yang tersedia dan mewawancarai personel yang relevan. Pengujian kami mencakup inspeksi terhadap program aplikasi komputer dan antarmuka sistem yang relevan serta pemantauan transaksi pemrosesan data mulai dari masukan, melalui penyimpanan, hingga keluaran akhir berdasarkan sampel.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The following is a description of the key audit matters that we identified in our audit: (continued)

2. ***Information Technology ("IT") controls that impact financial reporting systems (continued)***

   How our audit addressed the key audit matters (continued)

   We have performed the following audit procedures to address this key audit matter: (continued)

   - *Physical security controls over data center to protect computer facilities and equipment from damage or unauthorized access that can impair confidentiality, integrity, and availability of information;*
   - *System development controls: the controls associated with developing, configuring, and implementing a new system. This year the Bank implemented a new system used in processing and recording financial information that eventually is included in the financial statements.*

   Further, we tested the application-based controls by identifying the significant application components and the flow of information through the system and gained an understanding of the key applications by reviewing the available documentation and interviewing appropriate personnel. Our testing included the inspection of relevant computer application programs and system interfaces and monitoring data processing transactions from input, through storage, to eventual output on a sample basis.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 48 atas laporan keuangan terlampir, yang menguraikan tentang beberapa pihak telah mengajukan tuntutan hukum kepada Bank di pengadilan dalam maupun luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan ini, tuntutan hukum adalah subyek dari proses hukum dan keputusan atas tuntutan hukum tersebut masih tertunda. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 30 April 2024.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 48 to the accompanying financial statements, which describes that several parties have filed lawsuits case against the Bank in courts both inside and outside the country. As at the date of this report, these lawsuits are the subjects of legal proceedings, and the decisions on such cases are still pending. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Matter

The financial statements of the Bank as at December 31, 2023 and for the year ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on April 30, 2024.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report as at December 31, 2024 and for the year then ended, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information, and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Informasi Lain (lanjutan)

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Other Information (continued)

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00108/2.1133/AU.1/07/1692-1/1/II/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

00108

Riva Utama Winata, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1692

14 Februari 2025/*February 14, 2025*

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ASET				***ASSETS***
Kas	331.700	3,5,42,45,46	201.930	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	474.261	3,6,42,45,46	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.434 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 1.217 pada tanggal 31 Desember 2023	592.577	3,7,42,45,46	548.016	*Current accounts with other banks net of allowance for impairment losses of Rp 1,434 as at December 31, 2024 and Rp 1,217 as at December 31, 2023*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 50 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 185 pada tanggal 31 Desember 2023	2.162.566	3,8,42,45,46	3.370.260	*Placements with Bank Indonesia and other banks net of allowance for impairment losses of Rp 50 as at December 31, 2024 and Rp 185 as at December 31, 2023*
Efek-efek	5.040.567	3,9,42,45,46	3.884.345	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	3,10,45,46	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	4.987	3,11,42,45,46	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 197.542 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 147.255 pada tanggal 31 Desember 2023				*Loans net of allowance for impairment losses of Rp 197,542 as at December 31, 2024 and Rp 147,255 as at December 31, 2023*
Pihak berelasi	350.608	41	375.479	*Related parties*
Pihak ketiga	25.979.916		23.357.104	*Third parties*
Pinjaman yang diberikan - neto	26.330.524	3,12,42,45,46	23.732.583	*Loans - net*
Tagihan akseptasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1 pada tanggal 31 Desember 2023	-	3,13,42,45,46	12.156	*Acceptance receivables net of allowance for impairment losses of Rp 1 as at December 31, 2023*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	187.725	3,14,42,46	207.121	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.732.467	3,15	2.854.304	*Prepaid expenses and advances*
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 87.042 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 75.693 pada tanggal 31 Desember 2023	438.874	3,16	221.114	*Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 87,042 as at December 31, 2024 and Rp 75,693 as at December 31, 2023*
Aset takberwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 205.712 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 189.164 pada tanggal 31 Desember 2023	90.336	3,17	73.660	*Intangible assets net of accumulated amortization of Rp 205,712 as at December 31, 2024 and Rp 189,164 as at December 31, 2023*
Aset hak-guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 90.364 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 54.078 pada tanggal 31 Desember 2023	54.250	3,18	92.757	*Right-of-use assets net of accumulated depreciation of Rp 90,364 as at December 31, 2024 and Rp 54,078 as at December 31, 2023*
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 160.650 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 188.752 pada tanggal 31 Desember 2023	93.124	3,19	83.238	*Foreclosed assets net of allowance for impairment losses of Rp 160,650 as at December 31, 2024 and Rp 188,752 as at December 31, 2023*
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 53.478 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 59.947 pada tanggal 31 Desember 2023	165.848	3,20,42,45,46	129.644	*Other assets net of allowance for impairment losses of Rp 53,478 as at December 31, 2024 and Rp 59,947 as at December 31, 2023*
Aset pajak tangguhan	226.668	3,38b	324.591	*Deferred tax assets*
TOTAL ASET	**40.258.696**		**39.234.312**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As at December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND NET EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	50.385	3,21,42,45,46	86.614	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
Pihak berelasi	250.296	41	330.714	*Related parties*
Pihak ketiga	33.649.231		31.674.917	*Third parties*
Total simpanan dari nasabah	33.899.527	3,22,42,45,46	32.005.631	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2.324.117	3,23,45,46	3.215.559	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	7.745	3,11,42,45,46	343	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	3,13,42,45,46	12.157	*Acceptance payables*
Utang pajak	39.362	3,38a	33.736	*Taxes payable*
Bunga yang masih harus dibayar	107.921	3,24,42,45,46	87.123	*Accrued interest expenses*
Liabilitas imbalan kerja	23.834	3,39	22.112	*Employee benefits liability*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	3,25,42,45,46	11.306	*Accrued expenses and other liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**36.464.540**		**35.474.581**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS NETO				***NET EQUITY***
Modal saham - nilai nominal per saham				*Share capital - par value per share*
Saham seri A - Rp 1.000 (nilai penuh)				*Series A shares - Rp1,000 (full amount)*
Saham seri B - Rp 7.800.000 (nilai penuh)				*Series B shares - Rp 7,800,000 (full amount)*
Saham seri C - Rp 100 (nilai penuh)				*Series C shares - Rp 100 (full amount)*
Modal dasar - 10.011.841.000 saham seri A, 283.501 saham seri B dan 77.768.512.000 saham seri C				*Authorized - 10,011,841,000 series A shares, 283,501 series B shares and 77,768,512,000 series C shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.011.841.000 saham seri A, 283.501 saham seri B dan 8.097.797.508 saham seri C	13.032.929	26	13.032.929	*Issued and fully paid capital - 10,011,841,000 series A shares, 283,501 series B shares and 8,097,797,508 series C shares*
Tambahan modal disetor	1.915.423	3,27	1.915.423	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lain	1.053.735	3,26	1.001.860	*Other components of equity*
Penghasilan komprehensif lain:				*Other comprehensive income:*
Kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(9.087)	3	(8.980)	*Loss on remeasurements of employee benefit liability*
Surplus revaluasi aset tetap - neto	146.976	3	146.976	*Revaluation surplus of fixed assets - net*
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(28.319)	3,9	(8.144)	*Unrealized loss on changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Defisit				*Deficit*
Ditentukan penggunaannya	1.002	28	1.002	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	(12.318.503)		(12.321.335)	*Unappropriated*
EKUITAS NETO	**3.794.156**		**3.759.731**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS NETO	**40.258.696**		**39.234.312**	***TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga	3.024.176	3,29,41,44a	2.525.270	*Interest income*
Beban bunga	(2.222.046)	3,30,41,44a	(1.720.209)	*Interest expenses*
Pendapatan bunga - neto	**802.130**		**805.061**	*Interest income - net*
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan operasional lainnya:				*Other operating income:*
Penerimaan dukungan operasional	300.000	3,32	210.000	*Receipt of operational support*
Provisi, administrasi dan penalti pinjaman yang diberikan	61.802	3	18.866	*Loan fees, administration and penalties*
Keuntungan kurs mata uang asing - neto	31.905	3	4.406	*Gains on foreign exchange - net*
Keuntungan atas penjualan efek-efek - neto	7.032	3,9,31	10.625	*Gains on sale of marketable securities - net*
Provisi lain-lain	3.613	3	2.968	*Other provisions*
Lain-lain	10.221	3	8.935	*Others*
Total pendapatan operasional lainnya	**414.573**	44a	**255.800**	*Total other operating income*
Beban operasional lainnya:				*Other operating expenses:*
Umum dan administrasi	(701.775)	3,33	(669.866)	*General and administrative*
Gaji dan tunjangan	(360.035)	3,34	(333.839)	*Salaries and allowances*
Penyisihan kerugian penurunan nilai - neto	(49.391)	3,35	(26.896)	*Provision of impairment losses - net*
Lain-lain	(7.109)	3	(5.388)	*Others*
Total beban operasional lainnya	**(1.118.310)**	44a	**(1.035.989)**	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL	**98.393**	44a,44b	**24.872**	***PROFIT FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional	12.090	3,36,44a	15.163	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(4.007)	3,37,44a	(18.225)	*Non-operating expenses*
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	8.083		(3.062)	*Non-operating income (expense) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**106.476**		**21.810**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(103.644)	3,38b,44a	6.092	***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES) - NET***
LABA TAHUN BERJALAN	**2.832**	44a	**27.902**	***PROFIT FOR THE YEARS***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				***Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(137)	3,39	1.859	*Remeasurements of employee benefits liability*
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	30	3,38b	(409)	*Related income tax benefit (expense)*
Sub-total	(107)		1.450	*Sub-total*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				***Item that will be reclassified to profit or loss in subsequent period:***
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(25.866)	3,9	5.134	*Net changes in fair value of marketable securities at fair value through other comprehensive income*
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	5.691	3,38b	(1.130)	*Related income tax benefit (expense)*
Sub-total	(20.175)		4.004	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	(20.282)		5.454	*Other comprehensive income (loss) - net of tax*
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(17.450)**		**33.356**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (nilai penuh)	**0,16**	3,40	**1,54**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Komponen ekuitas lain/ *Other component of equity*	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ *Other comprehensive income (loss)*: Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ *Gain (loss) on remeasurements of employee benefit liability*	Surplus revaluasi aset tetap - neto/ *Revaluation surplus of fixed assets - net*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gains (losses) on changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Ekuitas - neto/ *Net equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		**13.032.929**	**1.915.423**	**1.001.860**	**(10.430)**	**146.976**	**(12.148)**	**1.002**	**(12.349.237)**	**3.726.375**	***Balance as at January 1, 2023***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	27.902	27.902	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		-	-	-	1.450	-	4.004	-	-	5.454	*Other comprehensive income for the year - net of tax*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	1.450	-	4.004	-	27.902	33.356	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**13.032.929**	**1.915.423**	**1.001.860**	**(8.980)**	**146.976**	**(8.144)**	**1.002**	**(12.321.335)**	**3.759.731**	***Balance as at December 31, 2023***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	2.832	2.832	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		-	-	-	(107)	-	(20.175)	-	-	(20.282)	*Other comprehensive loss for the year - net of tax*
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(107)	-	(20.175)	-	2.832	(17.450)	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Dana setoran modal	26	-	-	51.875	-	-	-	-	-	51.875	*Capital deposits fund*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**13.032.929**	**1.915.423**	**1.053.735**	**(9.087)**	**146.976**	**(28.319)**	**1.002**	**(12.318.503)**	**3.794.156**	***Balance as at December 31, 2024***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari bunga serta provisi dan komisi	3.108.987		2.506.558	*Interests, provisions and commissions received*
Pembayaran bunga dan provisi	(2.201.248)		(1.721.453)	*Payments for interests and provisions*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(634.212)		(609.186)	*Payments for general and administrative expenses*
Pembayaran beban tenaga kerja	(358.450)		(329.123)	*Payments for employee expenses*
Penerimaan dukungan operasional	300.000	32	210.000	*Receipt of operational support*
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	95.022		20.112	*Receipts from other operating income*
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambli alih	18.216		-	*Receipts from sales foreclosed assets*
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	11.946	36	15.163	*Receipts from non operating income*
Pembayaran beban non-operasional	(4.005)	37	(18.225)	*Payments for non operating expenses*
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	**336.256**		**73.846**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	134.319	10	921.191	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan akseptasi	12.157	13	66.238	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan	(2.659.396)	12	(4.348.356)	*Loans*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	121.837	15	164.679	*Prepaid expenses and advances*
Aset lain-lain	(86.054)	20	(54.935)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(36.229)	21	15.602	*Obligations due immediately*
Liabilitas akseptasi	(12.156)	13	(66.238)	*Acceptance payables*
Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain	1.002.454	22,23	5.604.730	*Deposits from customers and deposits from other banks*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	304	25	193	*Accrued expenses and other liabilities*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(1.186.508)**		**2.376.950**	***Net cash provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(876.038)		(554.365)	*Purchases of securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(2.136.150)		-	*Purchasing of securities measured at amortized cost*
Perolehan aset tetap	(230.955)	16	(15.435)	*Acquisition of fixed assets*
Hasil penjualan dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.837.131		10.625	*Proceeds from securities measured at fair value through other comprehensive income*
Perolehan aset takberwujud	(33.224)	17	(7.630)	*Acquisition of intangible assets*
Hasil penjualan aset tetap	563	16	76	*Proceeds from sale of fixed assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.438.673)**		**(566.729)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dana setoran modal	51.875	26	-	*Receipt of capital deposits fund*
Pembayaran liabilitas sewa	(1.179)	18,50	(1.555)	*Payments of lease liabilities*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**50.696**		**(1.555)**	***Net cash provided by (used in) financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(2.574.485)**		**1.808.666**	***NET INCREASE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	2.319		627	*Effect of changes in foreign currencies exchange rate*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.134.754		4.325.461	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**3.562.588**		**6.134.754**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas	331.700	5	201.930	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	474.261	6	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	594.011	7	549.233	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.162.616	8	3.370.445	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Total	**3.562.588**		**6.134.754**	***Total***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Bank

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank") semula didirikan dengan nama PT Bank Century Intervest Corporation berdasarkan akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Lina Laksmiwardhani, S.H., sebagai pengganti dari Lukman Kirana, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6196.HT.01.01.TH'89 tanggal 12 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 Tambahan No. 1959 tanggal 4 Mei 1993. Bank melakukan penggabungan atau *merger* dengan bank-bank lainnya pada tahun 2004.

Sejak tanggal 6 November 2008, Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Pada tanggal 20 November 2008, berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) sebagai bank gagal yang ditengarai dapat berdampak sistemik. Selanjutnya, sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 menetapkan Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").

Sehubungan dengan pengambilalihan Bank oleh LPS pada bulan November 2008, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang LPS, maka LPS telah melakukan program divestasi atas mayoritas saham milik LPS pada Bank kepada calon investor yang memenuhi syarat melalui penjualan strategis (*strategic sale*).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information of the Bank

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank") was established under the name of PT Bank Century Intervest Corporation by deed No. 136 dated May 30, 1989 of Lina Laksmiwardhani, S.H., substitute of Lukman Kirana, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-6196.HT.01.01.TH'89, dated July 12, 1989, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 36 Supplement No. 1959, dated May 4, 1993. The Bank conducted a business combination through a merger with other banks in 2004.

Since November 6, 2008, the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) has been classified as a Bank Under Intensive Monitoring Unit by Bank Indonesia.

On November 20, 2008, based on Letter No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia has determined the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) as a failed bank that was deemed as to have a systemic impact. Furthermore, in accordance with Government Regulation No. 4 Year 2008 about the Safeguarding of Financial Systems, the Financial System Stability Committee (KSSK), through its Decree No. 04/KSSK.03/2008 dated November 21, 2008, classified the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) as a failed bank that had a systemic impact and assigned the Bank to the Indonesia Deposit Insurance Corporation ("LPS").

In relation to the LPS takeover of the Bank in November 2008, in compliance with Article 42 of Law No. 24 Year 2004 as subsequently amended with Law No. 7 Year 2009 regarding LPS, the LPS has already conducted a divestment program for the majority of the Bank's shares owned by LPS to the qualified prospective investor through a strategic sale.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Bank (lanjutan)

Berdasarkan hasil program divestasi, mayoritas saham LPS di Bank telah dialihkan kepada J Trust Co., Ltd., di Tokyo, Jepang, melalui perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat tanggal 12 September 2014, surat kesepakatan tanggal 18 November 2014 dan akta pengambilalihan No. 52 tanggal 20 November 2014 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir melalui akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0168404 tanggal 4 Juli 2024.

Kantor pusat Bank beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat.

Bank memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information of the Bank (continued)

Based on the results of the divestment program, LPS majority shareholding in the Bank has been sold to J Trust Co., Ltd., in Tokyo, Japan, through conditional sale and purchase agreement dated September 12, 2014, a letter of a agreement dated November 18, 2014, and a deed of sale and purchase agreement No. 52 dated November 20, 2014, as covered by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Bank's articles of association have been amended several times, the latest amendement by deed No. 251 dated June 28, 2024 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta concerning the changes in Article 11 until Article 16. The changes have been accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0168404 dated July 4, 2024.

The Bank's head office is located at Sahid Sudirman Center Building, 33rd Floor, Jenderal Sudirman Street No. 86, Central Jakarta.

The Bank has branches and sub-branches as follows:

	2024	2023	
Kantor cabang	26	25	*Branches*
Kantor cabang pembantu	21	20	*Sub-branches*

Entitas induk terakhir Bank adalah J Trust Co., Ltd., di Tokyo, Jepang.

The ultimate parent of the Bank is J Trust Co., Ltd., in Tokyo, Japan.

b. Penawaran Umum Saham Bank

Pada bulan Juni 1997, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) menjual 70.000.000 sahamnya yang bernilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 900 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjualan saham kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-1144/PM/1997 tanggal 3 Juni 1997.

b. Public Offering of the Bank's Shares

In June 1997, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) sold 70,000,000 shares with a par value of Rp 500 (full amount) per share and an offering price of Rp 900 (full amount) per share to the public through the stock exchange market in accordance with the prevailing regulations. The initial public offering obtained an effective statement from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) through its Letter No. S-1144/PM/1997 dated June 3, 1997.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Pada bulan April 1999, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue I*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 570.400.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 100 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 213.900.000 Waran Seri I yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 19 April 2004.

Setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 8 (delapan) saham baru dengan harga Rp 100 (nilai penuh) per saham. Di samping itu, pada setiap 8 (delapan) saham baru melekat 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue I*) ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 9 Maret 1999.

Pada bulan Juli 2000, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas II (*Rights Issue II*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 401.773.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 200 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 140.620.725 Waran Seri II yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 19 Januari 2001 sampai dengan 18 Juli 2005. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 100 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

In April 1999, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering I (Rights Issue I) to its existing shareholders and issued 570,400,000 common shares with a par value of Rp 100 (full amount) per share and an offering price of Rp 100 (full amount) per share, which were attached to 213,900,000 Warrants Series I that could be converted into shares starting from October 20, 1999 up to April 19, 2004.

Each shareholder, who owned 20 (twenty) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 8 (eight) new shares at the price of Rp 100 (full amount) per share. In addition, every 8 (eight) new shares were attached with 3 (three) Warrants Series I, which were given as an incentive. The Limited Public Offering I (Rights Issue I) obtained an approval from the shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 9, 1999.

In July 2000, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering II (Rights Issue II) to its existing shareholders and issued 401,773,500 common shares with a par value of Rp 100 (full amount) per share and an offering price of Rp 200 (full amount) per share, which were attached to 140,620,725 Warrants Series II that could be converted into shares starting from January 19, 2001 up to July 18, 2005. Each shareholder, who owned 5 (five) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 1 (one) new share with an offering price of Rp 100 (full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Di samping itu, pada setiap 100 (seratus) saham baru melekat 35 (tiga puluh lima) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas II (*Rights Issue II*) ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2000 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-1517/PM/2000 tanggal 26 Juni 2000.

Pada bulan Maret 2003, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas III (*Rights Issue III*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 5.797.941.330 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 120 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 173.938.240 Waran Seri III yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 26 September 2003 sampai dengan 7 April 2008. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 12 (dua belas) saham baru dengan harga Rp 120 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 100 (seratus) saham baru melekat 3 (tiga) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas Ill (*Rights Issue III*) tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2003 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-405/PM/2003 tanggal 27 Februari 2003.

Pada bulan Juli dan Agustus 2003, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (Rights Issue IV) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 2.494.146.934 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 120 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 2.244.732.240 Waran Seri IV, yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 22 Januari 2004 sampai dengan 3 Agustus 2008.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

In addition, every 100 (one hundred) new shares were attached with 35 (thirty-five) Warrants Series II, which were given as an incentive. The Limited Public Offering II (Rights Issue II) was approved by the shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 26, 2000, and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-1517/PM/2000 dated June 26, 2000.

In March 2003, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering III (Rights Issue III) to its existing shareholders and issued 5,797,941,330 common shares with a par value of Rp 100 (full amount) per share and an offering price of Rp 120 (full amount) per share, which were attached to 173,938,240 Warrants Series III, that could be converted into shares starting from September 26, 2003 up to April 7, 2008. Each shareholder, who owned 5 (five) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 12 (twelve) new shares at the price of Rp 120 (full amount) per share.

In addition, every 100 (one hundred) new shares were attached with 3 (three) Warrants Series III, which were given as an incentive. The Limited Public Offering III (Rights Issue III) was approved by the shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 28, 2003, and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-405/PM/2003 dated February 27, 2003.

In July and August 2003, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering IV (Rights Issue IV) to its existing shareholders and issued 2,494,146,934 common shares with a par value of Rp 100 (full amount) per share and an offering price of Rp 120 (full amount) per share, which were attached to 2,244,732,240 Warrants Series IV, which could be converted into shares starting from January 22, 2004 up to August 3, 2008.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 3 (tiga) saham baru dengan harga Rp 120 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 9 (sembilan) Waran Seri IV yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas IV (*Rights Issue IV*) ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2003 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-1534/PM/2003 tanggal 26 Juni 2003. Setelah penggabungan, harga waran menjadi Rp 78 (nilai penuh) per saham.

Pada bulan Juli 2007, Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas V (*Rights Issue V*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 5.670.029.955 saham dengan nilai nominal Rp 78 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 5.670.029.955 Waran Seri V, yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 18 Juni 2010. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 78 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 1 (satu) saham baru melekat 1 (satu) Waran Seri V yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas V (*Rights Issue V*) ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 5 Juni 2007 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-2648/BL/2007 tanggal 5 Juni 2007. Pada saat jatuh tempo, terdapat 1 (satu) pemegang waran yang mengajukan *exercise* waran sejumlah 518 unit atau senilai Rp 40.404 (nilai penuh), namun hal tersebut tidak dilakukan terhitung sejak LPS melakukan penanganan terhadap Bank dan selaku pemegang saham pengendali Bank, berdasarkan UU LPS pasal 40 menyatakan bahwa LPS mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Each shareholder, who owned 10 (ten) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 3 (three) new shares at a price of Rp 120 (full amount) per share.

Furthermore, 9 (nine) Warrants Series IV were associated with each 10 (ten) new shares as an incentive. The Limited Public Offering IV (Rights Issue IV) was approved by shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 27, 2003, and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-1534/PM/2003 dated June 26, 2003. After the merger, the warrant's price became Rp 78 (full amount) per share.

In July 2007, the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) conducted a Limited Public Offering V (Rights Issue V) to its existing shareholders and issued 5,670,029,955 common shares with a par value of Rp 78 (full amount) per share, which were attached to 5,670,029,955 Warrants Series V, which could be converted into shares starting from December 19, 2007 up to June 18, 2010. Each shareholder, who owned 4 (four) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 1 (one) new share for a price of Rp 78 (full amount) per share.

In addition, every 1 (one) new share was attached with 1 (one) Warrant Series V, which was given as an incentive. The Limited Public Offering V (Rights Issue V) was approved by shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 5, 2007, and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-2648/BL/2007 dated June 5, 2007. At the maturity date, there was 1 (one) warrant holder who exercised warrants for a number of 518 units, or equivalent to Rp 40,404 (full amount), but the conversion did not materialize since the LPS took over the Bank and as the controlling shareholder of the Bank, as stipulated in article 40 of the Law of LPS, stating that the LPS takes over all rights and authority of the General Meeting of Shareholders, ownership, management, and/or other interests.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Berdasarkan Surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 November 2008, sehubungan dengan adanya informasi material yang belum disampaikan kepada publik tentang Bank, maka untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar atas saham tercatat di Bursa Efek Indonesia dan untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai tentang hal tersebut, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) di seluruh pasar mulai sesi pertama perdagangan saham pada tanggal 21 November 2008 hingga pengumuman lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tanggal 31 Oktober 2019, Bank telah menginformasikan mengenai pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah sebesar 7,6433%.

Sehubungan dengan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-07875/BEI.PP3/12-2019 tanggal 5 Desember 2019, perihal status suspensi saham perseroan, dalam hal ini Bank telah memenuhi ketentuan V.1 dan ketentuan V.2 Peraturan Bursa No. I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Sebagai tindak lanjut atas penghentian sementara perdagangan efek Bank (*suspense*) di seluruh pasar, Bursa Efek Indonesia meminta Bank menyampaikan dokumen hasil penilaian harga wajar saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar pada OJK sebagai referensi harga saham saat dilakukan pembukaan suspensi.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan terhadap 100% saham Bank, nilai wajar saham Bank adalah sebesar Rp 4,51 triliun. Dengan demikian, harga saham wajar Bank pembukaan suspensi adalah sebesar Rp 450 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Based on the Letter of Temporary Suspension on Shares Trading of Bank (formerly PT Bank Century Tbk) No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 dated November 21, 2008, in connection with a material information that has not been communicated to the public concerning the Bank, to prevent unusual trading activity on the shares listed in the Indonesia Stock Exchange and to obtain more adequate information, the Indonesia Stock Exchange decided to impose a temporary trading suspension of the Bank's shares in all markets (formerly PT Bank Century Tbk) from the first session of trading securities on November 21, 2008, until further notification.

Based on the Monthly Reports of Registration Holders Securities at October 31, 2019, the Bank has informed about the holder of non-controlling shares and minority shareholder shares amounting to 7.6433%.

In connection with the Letter of Indonesia Stock Exchange No. S-07875/BEI.PP3/12-2019 on December 5, 2019, regarding status suspension of the company's shares, in this matter the Bank has fulfilled the provisions of V.1 and provision V.2 Regulation of Exchange No. I-A about listing of shares and equity securities in addition to shares issued by listed companies.

As a follow-up to the trading suspension of the Bank's securities (suspension) in all markets, the Indonesia Stock Exchange requested the submission of the valuation report by the Public Appraisal Office (KJPP) registered with OJK on the fair value of shares as reference of the stock price when lifting the suspension.

Based on an evaluation conducted by the Kusnanto & Partners Public Appraisal Office for 100% shares of the Bank, the fair value of shares of the Bank is amounting to Rp 4.51 trillion. Accordingly, the fair value of the Bank's shares after lifting the suspension is Rp 450 (the full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Mengacu kepada Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC), tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-UPT-00001/ BEI.PP3/01-2020, Bursa Efek Indonesia telah memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk di seluruh pasar mulai dari sesi pra-pembukaan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kewajaran proses pembentukan harga, maka pelaksanaan perdagangan saham Bank di pasar reguler pada tanggal 8 Januari 2020 dilaksanakan melalui sesi pra-pembukaan dengan mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Khusus.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Bank mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 23.05/S.Dir-CSD/ JTRUST/VIII/2021 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 4.545.504.522 saham seri C dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas - Tahun 2021 melalui surat No. S-202/D.04/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

HMETD didistribusikan kepada para pemegang saham Bank yang tercatat pada tanggal yang ditentukan dimana setiap pemilik 500 saham Bank akan memperoleh 227 HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 330 (nilai penuh). Jumlah HMETD yang di*exercise* dalam Penawaran Umum Terbatas - 2021 ini sebanyak 4.130.257.580 saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Following the announcement that PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) securities trading would be temporarily halted, as shown on Board Development No. Peng-UPT-00001/ BEI.PP3/01-2020, the Indonesia Stock Exchange has decided to resume trading in PT Bank JTrust Indonesia Tbk securities in all markets on Wednesday, January 8, 2020, before the market opens.

In addition, to make sure that the process of setting prices was fair, the Bank's stock exchange trade in the regular market on January 8, 2020, took place during a pre-opening session based on Rule Number II-A for Special Securities.

On August 23, 2021, the Bank submitted a registration statement to the chief executive of the Financial Services Authority's capital market through letter No. 23.05/S.Dir-CSD/ JTRUST/VIII/2021. This was in connection with the capital increase, where the bank granted preemptive rights (PMHMETD) for a maximum of 4,545,504,522 series C shares, each with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share. The Bank got permission from OJK to held a Limited Public Offering (LPO) in 2021 through letter No. S-202/D.04/2021, dated November 12, 2021, which was about the Notification of the Effectiveness of the Registration Statement's Trading.

The preemptive rights were distributed to the shareholders of the Bank registered on the specified date, wherein each owner of 500 shares of the Bank will receive 227 preemptive rights. Every 1 preemptive rights can be used to buy 1 share by paying an exercise price of Rp 330 (full amount). The total of preemptive rights exercised in this Limited Public Offering - 2021 is 4,130,257,580 shares.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Total hasil dana Penawaran Umum Terbatas - 2021 ini adalah sebesar Rp 1.362.985 dengan hasil bersih sebesar Rp 1.359.617 yang telah direalisasikan seluruhnya.

Pada tanggal 13 Juni 2022, Bank mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 13.01/S.Dir-CSD/JTRUST/ VI/2022 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 4.242.714.624 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Surat OJK No. SR-166/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022, Bank telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II - 2022.

HMETD didistribusikan kepada para pemegang saham Bank yang tercatat pada tanggal yang ditentukan dimana setiap pemilik 10 saham Bank akan memperoleh 3 HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 300 (nilai penuh). Jumlah HMETD yang di *exercise* dalam Penawaran Umum Terbatas II - 2022 ini sebanyak 3.967.539.928 saham.

Total hasil dana Penawaran Umum Terbatas II - 2022 ini adalah sebesar Rp 1.190.262 dengan hasil bersih sebesar Rp 1.186.820 yang telah direalisasikan seluruhnya.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

The total proceeds from the Limited Public Offering - 2021 amounted to Rp 1,362,985 with net proceeds of Rp 1,359,617 which have been fully realized.

On June 13, 2022, the Bank submitted a registration statement to the Chief Executive of the Capital Market of the Financial Services Authority through letter No. 13.01/S.Dir-CSD/ JTRUST/VI/2022 in connection with capital increase by granting preemptive rights (PMHMETD) of a maximum of 4,242,714,624 common shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share.

Based on OJK's Letter No. SR-166/D.04/2022 dated July 29, 2022, the Bank obtained an effective statement from OJK to conduct a Limited Public Offering II - 2022.

The preemptive rights were distributed to the Bank's shareholders on record on the specified date whereby each holder of 10 shares of the Bank will receive 3 pre-emptive rights. Each 1 pre-emptive rights can be used to purchase 1 share by paying an exercise price of Rp 300 (full amount). The number of pre-emptive rights exercised in this Limited Public Offering II - 2022 is 3,967,539,928 shares.

The total proceeds of this Limited Public Offering II - 2022 amounted to Rp 1,190,262 with net proceeds of Rp 1,186,820 which have been fully realized.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Berikut adalah informasi jumlah modal saham Seri A, Seri B dan Seri C yang ditempatkan dan disetor penuh Bank sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Below is the information on the Bank's issued and fully paid Series A, Series B and Series C shares since the Initial Public Offering until December 31, 2024:

Keterangan	**Jumlah Saham/** ***Number of Shares***	***Description***
Penerbitan saham baru Seri A:		*Issuance of Series A new shares:*
November 2008	676.236.100.000.000	*November 2008*
Januari 2014	124.948.000.000.000	*January 2014*
Januari 2015	30.000.000.000.000	*January 2015*
April 2015	30.000.000.000.000	*April 2015*
Oktober 2015	40.000.000.000.000	*October 2015*
Maret 2017	100.000.000.000.000	*March 2017*
Jumlah saham Seri A - sebelum Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	1.001.184.100.000.000	*Total Series A shares - before reverse stock split*
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock split)* Juni 2018	(1.001.174.088.159.000)	*Effect of reverse stock split in June 2018*
Jumlah saham Seri A - setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	**10.011.841.000**	***Total Series A shares - after reverse stock split***

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Keterangan	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	*Description*
Saham Seri B:		*Series B shares:*
Saham pendiri	160.000.000	*Founders shares*
Saham dari Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 1997	70.000.000	*Shares from Initial Public Offering in 1997*
Saham bonus pada bulan Agustus 1998	55.200.000	*Bonus shares in August 1998*
Pemecahan nilai saham pada bulan Maret 1999	1.140.800.000	*Stock split in March 1999*
Saham setelah pemecahan	1.426.000.000	*Shares after stock split*
Penawaran Umum Terbatas I pada bulan April 1999	570.400.000	*Limited Public Offering I in April 1999*
Pelaksanaan Waran Seri I	13.119.000	*Exercise of Series I Warrants*
Penawaran Umum Terbatas II pada bulan Juli 2000	401.773.500	*Limited Public Offering II in July 2000*
Pelaksanaan Waran Seri II	1.033.900	*Exercise of Series II Warrants*
Penawaran Umum Terbatas III pada bulan Maret 2003	5.797.941.330	*Limited Public Offering III in March 2003*
Pelaksanaan Waran Seri I	66.331.650	*Exercise of Series I Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri II	37.223.788	*Exercise of Series II Warrants*
Penawaran Umum Terbatas IV pada bulan Juli 2003	2.494.146.934	*Limited Public Offering IV in July 2003*
Pelaksanaan Waran Seri I	250.000	*Exercise of Series I Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri II	142.800	*Exercise of Series II Warrants*
Saham sebelum penggabungan usaha	10.808.362.902	*Shares before merger*
Saham dari penggabungan usaha pada bulan Oktober 2004	6.769.653.639	*Shares from merger in October 2004*
Saham setelah penggabungan usaha	17.578.016.541	*Shares after merger*
Penempatan langsung oleh *Klass Consultant Inc.*	2.381.538.461	*Direct placement by Klass Consultant Inc.*
Pelaksanaan Waran Seri II	145.950.973	*Exercise of Series II Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri III dan V	27.262	*Exercise of Series III and V Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri IV	2.574.613.843	*Exercise of Series IV Warrants*
Penawaran Umum Terbatas V pada bulan Juni 2007	5.670.029.955	*Limited Public Offering V in June 2007*
Jumlah saham Seri B - setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	**283.501**	***Total Series B shares - after reverse stock split***
Penerbitan saham baru Seri C: melalui PMHMETD		*Issuance of Series C new shares: implementing the PMHMETD*
Desember 2021	4.130.257.580	*December 2021*
Agustus 2022	3.967.539.928	*August 2022*
Jumlah saham Seri C	**8.097.797.508**	***Total Series C shares***

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Perubahan Saham Portepel Bank dan Peningkatan Modal Dasar

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juli 2021, Bank mengubah seluruh saham portepel menjadi saham seri C serta meningkatkan Modal Dasar menjadi sebesar Rp 20.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas:

- 10.011.841.000 saham seri A dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000 (nilai penuh)
- 283.501 saham seri B dengan nilai masing-masing sebesar Rp 7.800.000 (nilai penuh)
- 77.768.512.000 saham seri C dengan nilai nominal masing-masing Rp 100 (nilai penuh)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 28 Juni 2024 yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No.251 pada tanggal 28 Juni 2024 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0222189 tanggal 4 Juli 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 11 September 2023 yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 28 pada tanggal 11 September 2023.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Changes in Bank's Portfolio Shares and Increase in Authorized Capital

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on July 23, 2021, the Bank changed all unissued shares into series C shares and increased the Authorized Capital to Rp 20,000,000,000,000 (full amount) which is divided into:

- *10,011,841,000 Series A shares with a nominal value of Rp 1,000 (full amount) each*
- *283,501 Series B shares with a value of Rp 7,800,000 (full amount) each*
- *77,768,512,000 Series C shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) each*

c. Composition of the Bank's Management and Employees

Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2024, is based on the Bank's Meeting Decision Statement dated June 28, 2024, as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 251 dated June 28, 2024, which has been accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.09-0222189 dated July 4, 2024.

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2023, is based on the Bank's Meeting Decision Statement dated September 11, 2023, as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 28 dated September 11, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Boards of Commissioners and Directors (continued)

The Bank's Board of Commissioners as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024 dan/*and* 2023	
Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama	Nobiru Adachi	*President Commissioner*
Komisaris	Nobuiku Chiba	*Commissioner*
Komisaris Independen	Iwan Nataliputra	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Benny Siswanto	*Independent Commissioner*

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Bank's Board of Directors as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024 dan/*and* 2023	
Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	Ritsuo Fukadai	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Masayoshi Kobayashi *)	*Vice President Director*
Direktur	Felix Istyono Hartadi Tiono	*Director*
Direktur	Helmi Arief Hidayat	*Director*
Direktur	Cho Won June	*Director*
Direktur	R. Djoko Prayitno	*Director*
Direktur	Widjaja Hendra	*Director*

*) Berdasarkan persetujuan OJK No. KEPR-102/D.03/2023 tanggal 23 Agustus 2023

**) Based on OJK approval No. KEPR-102/D.03/2023 dated August 23, 2023*

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Komite Audit

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21.02/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

The composition of Audit Committee as at December 31, 2024 and 2023 based on Board of Directors Decision Letter No. 21.02/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VI/2023 dated June 21, 2023 is as follows:

Ketua merangkap anggota	Benny Siswanto	*Chairman and member*
Sekretaris merangkap anggota	Richard Steven Dompas	*Secretary and member*
Anggota	I Gde Yadnya Kusuma	*Member*

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05.08/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	Iwan Nataliputra	*Chairman and member*
Sekretaris merangkap anggota	I Gde Yadnya Kusuma	*Secretary and member*
Anggota	Benny Siswanto	*Member*
Anggota	Bambang Setyoko	*Member*

Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05.06/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua	Benny Siswanto	*Chairman*
Sekretaris merangkap anggota	Ong Pey Fang	*Secretary and member*
Anggota	Iwan Nataliputra	*Member*
Anggota	Nobuiku Chiba	*Member*

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.02/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Pejabat Kepala Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Ong Pey Fang.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.02/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, Pejabat Kepala Divisi Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Nathan Tanuwidjaja.

Personil manajemen kunci Bank meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Risk Monitoring Committee

The composition of Risk Monitoring Committee as at December 31, 2024 and 2023 based on Board of Directors Decision Letter No. 05.08/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/VI/2023 dated June 5, 2023 is as follows:

Remuneration and Nomination Committee

The composition of Remuneration and Nomination Committee as at December 31, 2024 and 2023 based on Board of Directors Decision Letter No. 05.06/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/ VI/2023 dated June 5, 2023 is as follows:

Corporate Secretary

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 29.02/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/I/2020 dated January 29, 2020, the Head of Corporate Secretary Division as at December 31, 2024 and 2023 is Ong Pey Fang.

Internal Audit Division

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 01.02/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/II/2023 dated February 1, 2023, the Acting Head of Internal Audit Division as at December 31, 2024 and 2023 is Nathan Tanuwidjaja.

The Bank's key management are Boards of Commissioners, Boards of Directors and Audit Committee.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Jumlah imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang kepada personil manajemen kunci Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Total short-term and long-term employee benefits for the Bank's key management personnel for the years ended December 31, 2024, and 2023 are as follows:

	Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Direksi/ *Board of Directors*		Komite Audit/ *Audit Committee*		
	2024	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**	
Imbalan kerja jangka pendek	6.602	6.277	24.613	23.873	1.215	1.042	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	1.093	724	3.725	2.886	-	-	*Long-term employee benefits*
Total	**7.695**	**7.001**	**28.338**	**26.759**	**1.215**	**1.042**	***Total***

Tidak ada kompensasi dalam bentuk pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada personil manajemen kunci.

There are no termination compensation and share-based payments to the key management personnel.

Bank memiliki masing-masing 937 dan 913 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit).

The Bank has 937 and 913 employees as at December 31, 2024 and 2023, respectively (unaudited).

d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 14 Februari 2025.

d. Completion of the Financial Statements

The management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements, in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on February 14, 2025.

2. AMENDEMEN/PENYESUAIAN STANDAR YANG BERLAKU EFEKTIF PADA TAHUN BERJALAN

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Bank namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan Bank:

- Perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

  Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, DSAK juga mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

  Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada International *Financial Reporting Standards* (IFRS) (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS (diawali dengan angka 3 dan 4).

- Amendemen PSAK 116, "Sewa": Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

  Amendemen ini menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

  Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifilasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

2. AMENDMENTS/IMPROVEMENTS TO STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2024, and relevant to the Bank, and had no material effect on the amounts reported in the Bank's financial statements:

- *Changes in the numbering of PSAK and ISAK in Indonesian Financial Accounting Standards*

  In line with the ratification of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework on December 12, 2022, the DSAK also approved the renumbering of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) in the Indonesian Financial Accounting Standards.

  The change is to differentiate the numbering of PSAK and ISAK that refer to International Financial Reporting Standards (IFRS) (starting with the numbers 1 and 2) and do not refer to IFRS (starting with the numbers 3 and 4).

- *Amendment to PSAK 116, "Leases": Lease Liability in Sale and Leaseback Transactions*

  This amendment establishes the requirements used by sellers and buyers in measuring lease obligations arising from sale and leaseback transactions, to ensure that sellers and buyers do not recognize the amount of any gain or loss related to the retained right of use.

- *Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements": Long-term Liabilities with Covenants*

  This amendment clarifies that only covenants that must be complied with by the entity on or before the reporting date will affect the classification of liabilities as current or non-current.

2. AMENDEMEN/PENYESUAIAN STANDAR YANG BERLAKU EFEKTIF PADA TAHUN BERJALAN (lanjutan)

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2025

- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kekurangan Ketertukaran

  Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara yang bersangkutan tertukarkan menjadi mata uang lain serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan. Amendemen ini menetapkan cara menilai apakah suatu mata uang adalah tertukarkan dan bagaimana menentukan nilai tukar *spot* jika mata uang tersebut tidak tertukarkan. Amendemen ini juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari mata uang yang tidak tertukarkan.

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan"

  Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas (*solely payments of principal and interest)* untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*.

  Selain itu, amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

2. AMENDMENTS/IMPROVEMENTS TO STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR (continued)

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2025

- *Amendments to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates": Lack of Exchangeability*

  When a country's economic conditions deteriorate, such as hyperinflation, it can be difficult to determine whether the country's currency is exchangeable into another currency as well as the exchange rate used when the currency is not exchangeable. This amendment specify how to assess whether a currency is exchangeable and how to determine a spot exchange rate if it is not. It also requires disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable.

January 1, 2026

- *Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments - Disclosures"*

  These amendments add and clarify the provisions in PSAK 109 related to derecognition of financial liabilities, and the assessment of cash flow characteristics (solely payments of principal and interest) for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually binding instruments such as tranches.

  In addition, these amendments also revise the provisions in PSAK 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and add provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

2. AMENDEMEN/PENYESUAIAN STANDAR YANG BERLAKU EFEKTIF PADA TAHUN BERJALAN (lanjutan)

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

1 Januari 2026 (lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan", PSAK 110, "Laporan Keuangan" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas"

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan

2. AMENDMENTS/IMPROVEMENTS TO STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR (continued)

Issued but not yet effective (continued)

January 1, 2026 (continued)

- *2024 Annual Improvements to PSAK 107, "Financial Instruments - Disclosures", PSAK 109, "Financial Instruments", PSAK 110, "Financial Statements" and PSAK 207, "Statement of Cash Flows"*

As at the date of authorization of these financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of the above amendments to PSAKs and has not yet determined the related effects on the financial statements.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bank disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia ("DSAK-IAI") dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah diamendemen dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2024.

Bank telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Basis of Preparation of Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Bank’s financial statements for the year ended December 31, 2023, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2024.

The Bank has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows, present receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the modified direct method. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, and placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted in use.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is also the Bank’s functional currency.

Figures in the financial statements are rounded and stated in millions of Rupiah (“Rp”), unless otherwise specified.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* yang berlaku pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui dalam laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan pada ekuitas karena memenuhi kualifikasi/kriteria sebagai lindung nilai arus kas *(hedging)*.

Selisih penjabaran mata uang asing atas aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam nilai penuh) adalah sebagai berikut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

b. Foreign Currency Translation

Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah using the reporting (closing) rate that is middle rate based on the average of bid rate and ask rate of Reuters prevailing at 16.00 Western Indonesian Time.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in profit or loss, except when it is being deferred in equity as qualifying cash flow (hedges).

Translation differences on other monetary financial assets measured at fair value are included in foreign exchange gains and losses.

The major exchange rates used for translation into Rupiah as at December 31, 2024 and 2023 (full amount) are as follows:

	2024	2023	
Poundsterling Inggris	20.218	19.627	*Great Britain Poundsterling*
Euro Eropa	16.758	17.038	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	16.095	15.397	*United States Dollar*
Dolar Singapura	11.845	11.676	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	10.014	10.521	*Australian Dollar*
Dolar Selandia Baru	9.068	9.766	*New Zealand Dollar*
Yuan Cina	2.199	2.170	*China Yuan*
Dolar Hong Kong	2.073	1.971	*Hong Kong Dollar*
Yen Jepang	103	109	*Japanese Yen*
Won Korea	11	12	*Korea Won*

c. Instrumen Keuangan

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

c. Financial Instruments

The Bank classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangan mencakup: (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") dan (iii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori pada saat pengakuan awal, dan berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki serta karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika dapat mengeliminasi atau mengurangi *mismatch*.

ii. Liabilitas keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Classification

i. Financial assets

The Bank classifies its financial assets as (i) at amortized cost, (ii) fair value through other comprehensive income ("FVOCI") and (iii) fair value through profit or loss ("FVTPL").

Financial assets are classified into one of these categories on initial recognition, and based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieved a particular business objective.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Financial assets maybe designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduce accounting mismatch.

ii. Financial liabilities

The Bank classifies its financial liabilities as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL) or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

The following table presents the Bank's classification of financial instruments based on the characteristics of the financial instruments:

Aset Keuangan	Kategori yang didefinisikan oleh:/ *Category as defined by:* PSAK 109	*Financial Asset*
Kas	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through other comprehensive income*	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	*Derivatives receivables*
Pinjaman yang diberikan	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Loans*
Tagihan akseptasi	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	*Other assets*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut: (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

The following table presents the Bank's classification of financial instruments based on the characteristics of the financial instruments: (continued)

Liabilitas Keuangan	Kategori yang didefinisikan oleh:/ *Category as defined by:* PSAK 109	*Financial Liability*
Liabilitas segera	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities mesaured at fair value through profit or loss*	*Derivative payables*
Bunga yang masih harus dibayar	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	*Accrued interest expenses*
Liabilitas akseptasi	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	*Acceptance payables*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	*Accrued expense and other liabilities*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

a) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Bank mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan pada tanggal tertentu pada arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*SPPI)* dari jumlah pokok terutang.

Detail dari kondisi ini diuraikan dibawah ini.

Pengujian SPPI

Tahap pertama dari proses klasifikasi, Bank menilai persyaratan kontraktual aset keuangan untuk mengidentifikasi apakah memenuhi pengujian SPPI.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement

i. Financial Assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Bank commits to purchase or sell the assets.

a) Financial assets at amortized cost

The Bank measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The details of these conditions are outlined below.

SPPI test

The first stage of the classification process, the Bank assesses the contractual terms of financial assets to identify whether they meet the SPPI test.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit adalah pertimbangan atas nilai waktu uang dan risiko kredit. Dalam membuat penilaian SPPI, Bank menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti ini, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada FVTPL.

Penilaian model bisnis

Bank menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan pengelolaan kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

a) Financial assets at amortized cost (continued)

SPPI test (continued)

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/ discount).

The most significant elements of interest within a lending arrangement are typically considerations for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Bank applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce more exposure than de minimis to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are SPPI on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at FVTPL.

Business model assessment

The Bank determines its business model at the level that best reflects how it manages groups of financial assets to achieve its business objective.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Model bisnis Bank tidak dinilai pada instrumen demi instrumen dasar, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola; dan
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih).

b) Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut terpenuhi:

- Instrumen dimiliki dalam model bisnis, yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Ketentuan kontrak dari aset keuangan yang memenuhi pengujian SPPI.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

a) Financial assets at amortized cost (continued)

Business model assessment (continued)

The Bank's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risk that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular, the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

b) Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

Financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- *The instrument is held within a business model, the objective of which is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset meet the SPPI test.*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang timbul karena perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi dengan cara yang sama seperti pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dijelaskan dalam Catatan 3q.

c) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Setelah pengukuran awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset dimiliki untuk diperdagangkan dan telah ditentukan oleh manajemen pada saat pengakuan awal atau diharuskan untuk diukur pada nilai wajar berdasarkan PSAK 109.

Manajemen menetapkan instrumen pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal ketika salah satu kriteria berikut terpenuhi:

- Penetapan ini menghilangkan, atau mengurangi secara signifikan, perlakuan tidak konsisten yang akan timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan atau kerugian pada aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda; atau

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

b) Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) (continued)

Financial assets at fair value through other comprehensive income are subsequently measured at fair value with gains and losses arising due to changes in fair value recognized in other comprehensive income. Interest income and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The expected credit loss calculation for financial assets at fair value through other comprehensive income is explained in Note 3q.

c) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

After initial recognition, the financial assets included in this category are measured at fair value. The unrealized gains or losses resulting from changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets at fair value through profit or loss are those that are held for trading and have been either designated by management upon initial recognition or are mandatorily required to be measured at fair value under PSAK 109.

Management designates an instrument at fair value through profit or loss upon initial recognition when one of the following criteria are met:

- *The designation eliminates, or significantly reduces, the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the assets or liabilities or recognizing gains or losses on them on a different basis; or*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

c) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

- Aset dan liabilitas yang merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi; atau
- Aset dan liabilitas mengandung satu atau lebih derivatif melekat, kecuali jika tidak secara signifikan mengubah arus kas secara kontrak, atau jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, ketika instrumen serupa dipertimbangkan pertama kali bahwa pemisahan atas derivatif melekat dilarang.

ii. Liabilitas Keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

c) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) (continued)

- *The assets and liabilities are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or*
- *The assets and liabilities containing one or more embedded derivatives, unless they do not significantly modify the cash flows that would otherwise be required by the contract, or it is clear with little or no analysis when a similar instrument is first considered that separation of the embedded derivative is prohibited.*

ii. Financial Liabilities

a) Financial liabilities measured at profit or loss

Financial liabilities are measured at fair value through profit or loss consist of two sub-categories, financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by the Bank as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat sebesar nilai wajar.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laba rugi.

b) Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

a) Financial liabilities measured at profit or loss (continued)

After initial recognition, the financial liabilities at fair value through profit or loss, are recorded at fair value.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading and designated as at fair value through profit or loss are recorded in profit or loss.

b) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss.

After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the effective interest method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest method amortization is included as finance costs in the statement of profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan dalam pengalokasian dan pengakuan pendapatan bunga atau beban bunga pada laba rugi selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

Penghentian Pengakuan

i. Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau yang mana bagian dari aset keuangan yang berlaku atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Effective Interest Method

The effective interest method is a method used in calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and in the allocation and recognition of the interest income or interest expense in profit or loss over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets or financial liability to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortized cost of a financial liability.

When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call, and similar options), but shall not consider the expected credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Derecognition

i. Financial Asset

A financial asset, or where applicable part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

(a) The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

(b) Bank mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas secara penuh yang diterima tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan penyerahan, secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Bank terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Bank.

Dalam hal ini, Bank juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki Bank.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial Asset (continued)

(b) The Bank has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, substantially has neither transferred nor retained all of the risks and rewards of the financial asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower amount of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Bank could be required to repay.

In that case, the Bank also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Bank has retained.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui dalam laba rugi.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial Asset (continued)

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in profit or loss.

ii. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable recognized in profit or loss.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms or the terms of an existing liability are substantially modification of an existing financial liability, then an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, the net amount reported in the statement of financial position if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts of the financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instruments

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to classification fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar didasarkan dari anggapan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

a) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
b) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

a) In the principal market for the asset or liability; or
b) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Bank uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Bank mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- Tingkat 1 - Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik dimana Bank dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 - *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (sesuai dengan harga) atau secara tidak langsung (berasal dari harga); dan
- Tingkat 3 - *Input* untuk aset dan liabilitas berdasarkan input untuk aset atau liabilitas.

Untuk pengukuran nilai wajar yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk setiap kelompok instrumen keuangan, Bank mengungkapkan:

a) Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan, memisahkan pengukuran nilai wajar sesuai tingkat yang ditentukan di atas.

b) Setiap pemindahan signifikan antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 pada hirarki nilai wajar dan alasan atas pemindahannya. Pemindahan ke dalam setiap tingkat diungkapkan dan dijelaskan secara terpisah dari pemindahan keluar dari setiap tingkat.

e. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik Rupiah dan mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas yang telah ditentukan penggunaannya atau kas yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas. Pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam perjalanan dan mata uang yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukaran ke Bank Indonesia.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Fair Value Measurement (continued)

The Bank classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

- *Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the Bank can access at the measurement date;*
- *Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (as a price) or indirectly (as derived from price); and*
- *Level 3 - Inputs for the asset or liability based on observable inputs for the asset or liability.*

For fair value measurements recognized in the statement of financial position for each class of financial instruments, the Bank discloses:

a) The level in the fair value hierarchy into which the fair value measurements are categorized in their entirety, segregating fair value measurements in accordance with the levels defined above.

b) Any significant transfers between Level 1 and Level 2 of the fair value hierarchy and the reasons for those transfers. Transfer into each levels is disclosed and discussed separately from transfers out of each level.

e. Cash

Cash represents currency bills and coins, both in Rupiah and foreign currencies which are valid as legal instruments of payment. Appropriated cash or restricted cash that cannot be used freely cannot be classified as cash. Cash also includes cash in vault, petty cash, cash in transit and currency withdrawn from circulation and still within the grace period for exchange with Bank Indonesia.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain setelah pengakuan awal dinilai sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3q.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk fasilitas deposito, serta penempatan dana pada bank lain dalam bentuk *interbank call money*, deposito berjangka dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Pada awal transaksi penempatan pada bank lain dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3q.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah, Surat Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan efek lainnya yang diperdagangkan di bursa efek.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

f. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at their amortized cost using effective interest rate method less the allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is assessed using the impairment methodology as disclosed in Note 3q.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

g. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facilities and placements with other banks in the form of interbank call money, time deposits, and saving deposits.

Placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balances less unearned interest income.

Placements with other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. Allowance for impairment losses is assessed using the impairment methodology as disclosed in Note 3q.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Marketable Securities

Marketable securities consist of Corporate Bonds, Government Bonds, Medium Term Notes, Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and other debt marketable securities traded in stock exchanges.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3q.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Instrumen Keuangan Derivatif

Dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, Bank terlibat dalam transaksi yang melibatkan instrumen keuangan derivatif untuk mengurangi paparan terhadap risiko pasar, termasuk risiko mata uang. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi syarat sebagai lindung nilai) diakui dalam laba rugi.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama;

2. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif; dan

3. Instrumen *hybrid* (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

h. Marketable Securities (continued)

Allowance for impairment losses is assessed using the impairment methodology as disclosed in Note 3q.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Derivative Financial Instruments

In the ordinary course of its operations, the Bank engages in transactions involving derivative financial instruments to mitigate exposure to market risks, including currency risk. All derivative contracts are recorded as assets when fair value is positive and as liabilities when fair value is negative.

Gain or loss on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in profit or loss.

Embedded derivative instruments are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

1. *The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of economic characteristic and risk of the main contract;*

2. *A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and*

3. *The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui dalam laba rugi. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3q.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Pinjaman yang diberikan dengan perjanjian penerusan pinjaman diakui sebesar porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi pinjaman dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui modifikasi persyaratan pinjaman seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga pinjaman dan ketentuan pinjaman yang baru. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

i. Derivative Financial Instruments (continued)

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recorded in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Loans

Loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by discounted or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in profit or loss. Allowance for impairment losses is assessed using the impairment methodology as disclosed in Note 3q.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Loans under channeling agreement are recognized at the portion of loans in which the risks are covered by the Bank.

Loan restructuring is performed for debtors who are facing financial difficulties in fulfilling their obligations, through a modification of the terms of the loan such as the extension of payment terms, interest rate discount and definitions of the new loan. After restructuring, all future cash receipts under the new terms are accounted for as the recovery of principal loan and interest income, in accordance with the restructuring schemes.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman merupakan bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3q.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih, ketika pinjaman yang tidak dapat dilunasi maka dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali atas pokok pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan bunga atas pinjaman yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan denda atas pinjaman yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan non-operasional.

k. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

j. Loans (continued)

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

The possible losses from loan restructuring are part of the allowance for impairment losses as disclosed in Note 3q.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries of written-off loans are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Interest received on loans previously written-off are recorded as other operating income. Penalties received on loans previously written-off are recorded as non-operating income.

k. Securities Purchased Under Resale Agreements

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the statement of financial position at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using the effective interest rate method.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Dalam kegiatan aktivitas bisnisnya, Bank memberikan jaminan keuangan, seperti *letters of credit*, bank garansi, dan akseptasi.

Tagihan akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3q.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

m. Aset Tetap

Tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi, yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan direvaluasi secara periodik.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi aset tetap langsung dikreditkan ke akun "Surplus revaluasi aset tetap" pada penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi nilai yang dicatat dalam surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

l. Acceptance Receivables and Payables

In the ordinary course of business, the Bank provides financial guarantees, consisting of letters of credit, bank guarantees, and acceptances.

Acceptance receivables are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Acceptance payables are measured at amortized cost by using the effective interest rate method.

Allowance of impairment losses is calculated using the impairment methodology as disclosed in Note 3q.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

m. Fixed Assets

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the date of revaluation, except for land that is not depreciated.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the determined fair value as at the statement of financial position reporting date. Assets with significant changes in fair value will be revalued periodically.

The increase arising from the revaluation of fixed assets is credited to the "Revaluation surplus on fixed assets" account in other comprehensive income, except to the extent that it reverses a revaluation decrease for the same asset that was previously recognized in profit or loss and other comprehensive income, in which case the increase is credited to profit or loss and other comprehensive income to the extent of the decrease previously charged. A decrease in the carrying amount of land and buildings revaluation is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income if the decrease exceeds the asset's revaluation surplus balance, if any.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Selain itu, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan nilai tercatat bruto aset sehingga nilai tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah yang direvaluasi. Pada saat pelepasan, surplus revaluasi atas aset yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Penyusutan atas bangunan yang telah di revaluasi diakui dalam laba rugi.

Kendaraan bermotor, perlengkapan dan peralatan kantor dicatat berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

m. Fixed Assets (continued)

Additionally, the accumulated depreciation on the revaluation date is restated proportionally with the change in the gross carrying amount of the asset so that the carrying amount of the asset after revaluation equals the revalued amount of the asset. Upon disposal, any revaluation surplus relating to the particular asset being sold is transferred to retained earnings.

Depreciation on revalued buildings is recognized in profit or loss.

Motor vehicles, office furniture and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and acquisition accumulated impairment losses.

Land rights are not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land rights is likely or definitely not obtainable.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Perabotan dan peralatan kantor	4 - 8	*Office furniture and equipment*
Kendaraan	4 - 8	*Vehicles*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat, dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Aset yang dimiliki untuk dijual diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai buku atau nilai wajar.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year when the assets derecognized.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

Assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset takberwujud yang dimiliki oleh Bank berupa perangkat lunak dan lisensi. Aset takberwujud diakui jika dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut, hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan, sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak langsung diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at acquisition cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at acquisition cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

Intangible assets held by the Bank are software and license. Intangible assets are recognized if and only if, their acquisition cost can be measured reliably and it is probable that expected future economic benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is acquisition cost less accumulated amortization.

The acquisition cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software, until it is ready to be used for its intended purpose.

Subsequent expenditure on software acquisition can be added to the acquisition cost or capitalized to the value of software only when it increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expense when incurred.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak dengan umur terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis yaitu 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat ekonomis dari perangkat lunak tersebut.

o. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih dinyatakan sebesar nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih atau nilai tercatat pinjaman yang diberikan. Nilai realisasi neto adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo pinjaman di atas nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat aset terjual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laba rugi dan pada saat terjadinya.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

p. Biaya Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran kepada pihak lain yang telah dilakukan namun belum diakui sebagai beban pada saat pembayaran dilakukan. Biaya dibayar dimuka akan digunakan untuk aktivitas Bank dimasa mendatang. Biaya dibayar dimuka diakui sebagai beban pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang diharapkan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Intangible Assets (continued)

Software with a finite useful life is amortized using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 8 (eight) until 12 (twelve) years.

Software amortization is recognized in the statement of profit or loss from the date that is available for use until the economic benefits of software ended.

o. Foreclosed Assets

Foreclosed assets are stated at the net realizable value of those foreclosed assets or at the loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated costs of liquidating the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed assets is charged to the allowance for impairment losses of non-financial assets.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from the sale of such assets is recorded as a gain or loss when the assets are sold.

Expenses for maintaining foreclosed assets are charged in profit or loss as incurred.

Management evaluates the value of foreclosed assets regularly. An allowance for impairment losses of foreclosed assets is provided based on the decline in value of foreclosed assets.

p. Prepaid Expenses and Other Assets

Prepaid expenses are payments made to other parties but have not been recognized as expense at the time of payment. Prepaid expenses will be used for the Bank's activities in the future. Prepaid expenses are recognized as expenses during the amortization in accordance with the expected period of benefit.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Biaya Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain (lanjutan)

Penjaminan kredit dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Sewa dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime Expected Credit Loss/*ECL*)*. *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 (dua belas) bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

ECL diakui untuk seluruh instrumen keuangan utang, komitmen pinjaman, dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *held to collect/held to collect and sell* dan memiliki arus kas (SPPI). Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual atas aset keuangan dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

p. Prepaid Expenses and Other Assets (continued)

The prepaid credit guarantee is amortized over its useful life using the straight-line method.

Prepaid rent is amortized over its useful life using the straight-line method.

Other assets are stated at carrying amount, which is acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any.

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets

Impairment of Financial Assets

A loss allowance is recognized at an amount equal to either 12 (twelve) months or a lifetime expected credit loss (ECL). Lifetime ECL are the ECL that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12 (twelve) months ECL are the portion of ECL that result from default events that are possible within the 12 (twelve) months after the reporting date.

ECLs are recognized for all financial debt instruments, loan commitments, and financial guarantees that are classified as held to collect/held to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI). Expected credit losses are not recognized for equity instrument designated at FVOCI.

In individual valuation is carried out on significant financial assets that are impaired. Insignificant financial assets are included in a group of financial assets that have similar credit risk characteristics and are assessed collectively.

Individual allowances for impairment losses on financial assets are calculated using the discounted cash flows method.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Bank menggunakan permodelan yang menggunakan *Matriks Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif.

- *Probability of Default* (PD)

  Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, disesuaikan sampai dengan periode 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan (tahap 1) atau sepanjang umur (tahap 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini akan berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

- *Loss Given Default* (LGD)

  Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada), dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasi LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

- *Exposure at Default* (EAD)

  Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed*, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The Bank primarily uses models that utilize the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate in calculating the collective allowance for impairment losses.

- *Probability of Default (PD)*

  The probability at a point in time that a debtors will default, calibrated over up to 12 (twelve) months from the reporting date (stage 1) or over the lifetime of the instruments (stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

- *Loss Given Default (LGD)*

  The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- *Exposure at Default (EAD)*

  The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Model "tiga-tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dibawah ini:

i. Tahap 1

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 (dua belas) bulan.

ii. Tahap 2

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari instrumen tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe instrumen dan pihak lawan. Aset keuangan dengan tunggakan 30 (tiga puluh) hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Expected credit loss measurement

The "three-stage" model impairment based on changes in credit quality since initial recognition is as follows:

i. Stage 1

Expected credit losses are recognized at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12 (twelve) months basis.

ii. Stage 2

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provisions is recognized for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is assessed in the context of changes in expected credit loss. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using a number of quantitative and qualitative factors, the weight of which depends on the type of instruments and counterparty. Financial assets that are 30 (thirty) or more days past due and not credit-impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

iii. Tahap 3

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal sebelum penurunan nilai kredit dan nilai tercatat bruto instrumen keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai tahap 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan, yang telah dihitung menggunakan minimum tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana *workout* untuk masing-masing debitur individu. Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Expected credit loss measurement (continued)

iii. Stage 3

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 (ninety) days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realization of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the original effective interest rate before the credit impairment and the gross carrying amount of the financial instrument.

This stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum three scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors. The cash flows projection include realizable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio *revolving* tertentu, termasuk kartu kredit, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik) bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di laporan posisi keuangan mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di laporan posisi keuangan mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian, komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan suku bunga efektif sebagai tingkat diskonto.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen kredit yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Expected credit loss measurement (continued)

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortized cost, the amount stated in the statement of financial position reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the amount stated in the statement of financial position reflects the fair value of the instruments, with expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognized as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognized together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognized as other liabilities.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan keuangan tersebut;

d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

1) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

2) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The criteria that the Bank uses to determine the objective evidence of impairment loss include:

a) Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;

b) Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;

c) The lender, with economic or legal reasons related to the financial difficulties experienced by the debtor, provide relief (concessions) to the debtor that can not be provided if the debtor is not experiencing those financial difficulties;

d) It is probable that the debtor will declare bankruptcy or other financial reorganization;

e) Loss of an active market for the financial asset due to financial difficulties; or

f) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition of the asset, although the decrease can not yet be identified to the individual financial assets in the asset group, including:

1) Deterioration in the payment status of debtors in the group; and

2) National or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Bank membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Pengujian penurunan nilai atas aset takberwujud yang memiliki masa manfaat yang belum tersedia untuk digunakan, dilakukan secara tahunan atau pada saat yang sama, dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah yang dapat dipulihkan.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dengan kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau UPK.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Bank makes an estimate of the assets recoverable amount.

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets exceeded the recoverable amount. The carrying amount of non-financial assets, except for deferred tax assets, are reviewed at each period to determine whether there is any indication of impairment.

The testing of impairment of intangible assets that have indefinite useful lives or that are not yet available for use, is performed annually at the same time, by comparing the carrying amount with the recoverable amount.

An assets recoverable is the higher of the fair value of the assets or its cash-generating unit (CGU) less costs to sell and its value in use for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets.

For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are grouped together into the smallest group that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or CGU.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dipulihkan jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya, maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

r. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

s. Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah (di luar bank lain) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan nasabah terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *interbank call money*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 3c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Non-Financial Assets (continued)

Impairment losses recognized in prior period are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been changes in the estimates used to determine the recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

r. Obligations Due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Obligations due immediately are stated at amortized cost using the effective interest rate method.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

s. Deposits from Customers and Deposits from Other Banks

Deposits from customers are deposits from customers (excluding other banks) to the Bank based on deposit agreements. Deposits from customers consist of demand deposits, savings deposits and time deposits.

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits and interbank call money. Deposits from other banks are stated at the amount due to the other banks.

Deposits from customers and deposits from other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method.

Refer to Note 3c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor.

u. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (tahap 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan tahap 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

v. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan perolehan aset atau liabilitas keuangan diakui sebagai bagian/pengurang dari biaya perolehan aset atau liabilitas keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

t. Shares Issuance Cost

Cost related to Initial Public Offering and Limited Public Offering with Pre-emptive Rights (HMETD) are deducted from the proceeds and presented as a deduction to the additional paid-in capital.

u. Interest Income and Expense

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortized cost and interest expense on all financial liabilities held at amortized cost, are recognized in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortized cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (stage 3) is recognized using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Therefore, interest income is recognized on the amortized cost of the financial asset including expected credit losses. In the condition of credit risk on a stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the gross financial asset.

v. Fees and Commission Income and Expense

Fees and commission income and expense that have material amount directly related with the acquisition of financial assets or liabilities are recognized as part of/deduction to acquisition cost of related financial assets or liabilities and will be recognized as income and amortized using effective interest rate method during the expected life of financial assets or liabilities.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi (lanjutan)

Saldo beban dan pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan atas pinjaman yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo langsung diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaiannya.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan pinjaman yang diberikan atau jangka waktu pinjaman yang diberikan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

w. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada laba rugi saat terjadinya transaksi.

x. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Beban pajak penghasilan tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi dimana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Fees and Commission Income and Expense (continued)

The outstanding balances of deferred fees and income on provision and commission of loans terminated or settled prior to maturity are directly recognized as income in settlement.

Fees and commissions which are not related to loans or loan period, or immaterial are recognized as income or expenses at the time the transactions occur.

w. Other Operating Income and Expenses

All other operating income and expenses are charged to profit or loss at the time the transaction occur.

x. Taxation

The income tax expense is comprised of current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the current period and computed based on the tax rates and tax regulations that are enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Management periodically evaluates position taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Bank bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

x. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized. Deferred income tax is determined using tax rates (or regulations) that have been enacted or substantially enacted at the reporting date and expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax assets to be utilized. At each reporting date, the Bank reviews unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity, or the Bank intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Laba per Saham Dasar dan Dilusian

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode ditambah jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif menjadi saham biasa.

z. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Liabilitas diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Bank dimana semua perubahan pada nilai tercatat dari liabilitas diakui pada laba rugi.

Imbalan pasca kerja

Bank memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti kepada karyawannya berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Bank menyelenggarakan dana pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Pembayaran kepada dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program pensiun. Iuran pensiun ditanggung oleh Bank.

Penyisihan dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal melalui program pensiun dengan imbalan yang dihitung berdasarkan PKB setelah dikurangi akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Jika bagian iuran yang didanai oleh Bank melalui program pensiun kurang dari imbalan yang diwajibkan menurut PKB, Bank akan melakukan penyisihan atas kekurangannya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

y. Basic and Diluted Earnings per Share

Basic earning per share is calculated by dividing earning for the year by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share amounts are calculated by dividing the net profit by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares.

z. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Bank where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Post-employment benefits

The Bank provides defined post-employment benefits for its employees based on the Bank's Collective Labor Agreement (CLA).

The Bank has pension fund covering substantially all of its qualified permanent employees which is managed by Financial Institution Pension Fund Sinarmas MSIG. Payment made to pension fund is based on certain dues on pension plan. Retirement contributions are funded by the Bank.

The provision has been calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the pension plan with the benefit as stipulated under the CLA after deduction of accumulation of contribution and the related investment result. If the funded portion of the pension plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Bank will provide for such shortage.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan pasca kerja dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset); dan
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

z. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Post-employment benefits liability is the present value of defined benefits obligation at the statement of financial position date. Post-employment benefits liability is calculated annually by independent actuary using the Projected-Unit-Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expenses in profit or loss when incurred.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (assets), recognized as other comprehensive income, consists of:

i. Actuarial gain or losses;
ii. Return on program asset, excluding amounts included in net interest on liabilities (assets); and
iii. Every changes in asset ceiling, excluding amounts included in net interest on liabilities (assets).

Remeasurement on net defined benefit liabilities (assets) recognized as other comprehensive income shall not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Bank melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan penghargaan layanan jangka panjang dan tunjangan cuti panjang untuk karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu.

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya - (penghargaan kerja dan cuti besar), kepada para karyawan kuncinya. Biaya untuk menyediakan imbalan ini ditetapkan dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit.* Metode ini merefleksikan jasa yang diserahkan oleh karyawan hingga tanggal penilaian dan memperhitungkan asumsi terkait proyeksi gaji karyawan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk biaya jasa kini, biaya bunga, biaya jasa lalu dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

z. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

A curtailment occurs if one of the following conditions is met:

i. Demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
ii. Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when the Bank enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

Other long-term service benefits

The Bank also provides long service award and long service leave for employees attaining a certain number of years of service.

The Bank provides other long-term employee benefits - (service award and long service leave), to its key employees. The cost of providing this benefit is determined using the Projected-Unit-Credit method. This method reflects service rendered by employees to the date of valuation and incorporates assumptions concerning employees projected salaries. Other long-term employee benefit expense includes current service cost, interest cost, past service costs and recognition of actuarial gains and losses. The actuarial gains and losses and past service costs are recognized immediately in the current year's profit or loss.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan pengunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

(i) Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

(ii) Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

- Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga inkremental penyewa pada tanggal penerapan awal.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

aa. Right of Used Assets and Lease Liabilities

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

(i) The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and

(ii) The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has this right when it has a decision-making right that is the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used predetermined:

- *The Bank has the right to operate the asset; and*
- *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

At the lease commencement date, Bank recognizes a right-of-use asset and a lease liability The right-of-use asset is initially measured at acquisition cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the leases, less any leases incentives received and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Bank menyajikan aset hak-guna secara terpisah dari aset tetap dan liabilitas sewa sebagai bagian dari biaya yang masih harus dibayar di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Ketika Bank adalah pesewa-antara, Bank mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

aa. Right of Used Assets and Lease Liabilities (continued)

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Bank presents right-of-use assets separately from fixed assets and leases liabilities as part of accrued expense in the statement of financial position.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

When the Bank is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sublease as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.

Leases modification

The Bank records lease modification as a separate lease if:

- *The modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

Segmen geografis Bank adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Kalimantan.

ac. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Bank menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

ab. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Bank that are regularly reviewed by "the chief operating decision maker" in order to allocate resources and to assess their performances operating segments.

An operating segment is a component of an entity:

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

b. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c. For which discrete financial information is available.

The Bank presents operating segments based on internal reports that are presented to the operating decision maker which is the Board of Directors.

The Bank's geographical segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged in providing services within a particular economic environment (region) and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments (region). The Bank reports geographical segments based on the area of Jakarta, Java, Sumatera, Sulawesi, Bali and Kalimantan.

ac. Transaction with Related Parties

The Bank applied PSAK 224, "Related Parties Disclosures", which requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments in the financial statements.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor), yang meliputi:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

ac. Transactions with Related Parties (continued)

A related party represents a person or an entity who is related with the Bank (the reporting entity), as follows:

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

(i) Has control or joint control over the reporting entity;
(ii) Has significant influence over the reporting entity; or
(iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:

(i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees from either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor), yang meliputi: (lanjutan)

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
(viii) Entitas yang merupakan bagian dari personil kunci manajemen kepada Bank atau induk dari Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal maupun tidak sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

ad. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Bank memiliki liabilitas kini (bersifat hukum atau bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Ketika Bank mengharapkan sebagian atau seluruh provisi diganti, maka penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah tetapi hanya pada saat timbul keyakinan pengantian pasti diterima. Beban yang terkait dengan provisi disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.

Provisi ditinjau pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

ac. Transactions with Related Parties (continued)

A related party represents a person or an entity who is related with the Bank (the reporting entity), as follows: (continued)

b) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following: (continued)

(vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and
(viii) The entity of which it is party provides key management personnel services to the Bank or to the parent of the Bank.

All significant transactions and balances with related party, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third party, are disclosed in the notes to the financial statements.

ad. Provision and Contingencies

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Where the Bank expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to any provision is presented in profit or loss net of any reimbursement.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Provisi dan Kontinjensi (lanjutan)

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi bersifat kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan di mana kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi.

ae. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

ad. Provision and Contingencies (continued)

Contingent assets and liabilities are not recognized in the financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the financial statements where inflow of economic benefits is probable.

ae. Events After the Reporting Period

Post period end events that provide additional information about the financial position of the Bank as at the statement of financial position date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post period end events that are not adjusting events disclosed in the notes to the financial statements when material.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan:

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi instrumen keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 109.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS, AND ASSUMPTIONS

In the application of the Bank's accounting policies, which are described in Note 3 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made by management that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements:

Judgments

In the process of applying the Bank's accounting policies, management has made the following judgement which have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of the financial instruments

The Bank determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian SPPI dan uji model bisnis. Bank menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer pengelolaan aset diberi kompensasi. Bank memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Bank atas apakah model bisnis di mana aset keuangan tersisa yang dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode penyajian.

Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 3c.

Kelangsungan usaha

Manajemen Bank telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Classification of the financial instruments (continued)

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI testing and the business model. The Bank determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Bank monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Bank continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those financial assets. No such changes were required during the periods presented.

Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 3c.

Going concern

The Bank management has made an assessment of the Bank ability to continue as a going concern and assessed the confidence that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Bank, mata uang fungsional Bank adalah Rupiah.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. *Input* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar.

Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Bank tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga inkremental sebagai tingkat diskonto.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Functional currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Bank's management assessment, Bank's functional currency is in Rupiah.

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible. If observable market data are not available, management's judgment is required to establish fair values.

The management's judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgment to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the identification asset throughout the period of use and right to direct the use of the identification asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement. The Bank cannot easily determine implicit interest rates, management use incremental interest rates as discount rates.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut; risiko kredit korporasi Bank, jangka waktu sewa, lingkungan ekonomi, dan waktu dimana sewa dimulai.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi pemutusan. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pemutusan) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika sewa sewajarnya dipastikan akan diperpanjang (atau tidak diakhiri).

Penilaian ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang mempengaruhi penilaian ini dan itu berada dalam kendali *lessee*.

Aset hak-guna Bank dan liabilitas sewa yang terkait diungkapkan pada Catatan 18.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan, yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi saat ini mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Leases (continued)

In determining incremental rate, the Bank considers the following main factors; the Bank corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, and the time at which the lease is entered into.

In determining the lease term, the Bank considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee.

The Bank's right-of-use assets and related lease liabilities are disclosed in Note 18.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 3q.

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK 109 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit selain dari aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Bank menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan

ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:

- Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil; dan
- Nilai waktu dari uang.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi dua belas bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets

Financial assets accounted for under amortized cost are evaluated for impairment on a basis as described in Note 3q.

The Bank reviews its financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortized cost under PSAK 109 which requires to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. The Bank incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

In carrying out the impairment review, the following management's judgments are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and

ii. Determination of expected credit life that reflect:

- *An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes; and*
- *The time value of money.*

At reporting date, the Bank calculates expected credit loss based on estimated twelve months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Bank.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Seluruh asumsi ditinjau setiap akhir periode pelaporan.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if its available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are collaborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The calculation of useful value is based on a discounted cash flow model.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as at December 31, 2024 and 2023.

Employee benefits

The determination of the Bank's employee benefits liability and expense depends on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include discount rates, annual salary increase rate, annual resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rate. All assumptions are reviewed at the end of reporting period.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja (lanjutan)

Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 23.834 dan Rp 22.112. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 39.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan/nilai revaluasi aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat aset tetap ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditinjau secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan fisik, keusangan teknis atau komersial, dan hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai buku neto aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 438.874 dan Rp 221.114. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 16.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits (continued)

While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual experiences or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its post-employment benefits liability and net post-employment benefits expense. The carrying amount of the Bank's employee benefits liability as at December 31, 2024 and 2023 were Rp 23,834 and Rp 22,112, respectively. Further details are disclosed in Note 39.

Depreciation of fixed assets

The costs/revalued amounts of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. The useful life of each item is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimated based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other lomits on the use of the asset. However, that future result of the operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets. The net book value of the Bank's fixed assets as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 438,874 and Rp 221,114, respectively. Further details are disclosed in Note 16.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Revaluasi aset tetap

Bank mengukur tanah dan bangunan pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar dengan menggunakan pendekatan pasar, pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

Penjaminan kredit dibayar dimuka

Penjaminan kredit dibayar dimuka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat ekonomis sesuai jangka waktu periode sertifikat penjaminan kredit selama 10 tahun.

Nilai tercatat penjaminan kredit dibayar dimuka, yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.656.846 dan Rp 2.818.839. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 15.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut dicatat pada laba rugi pada periode di mana hasil tersebut dikeluarkan.

Akumulasi rugi fiskal Bank adalah sebesar Rp 966.645 dan Rp 1.438.623 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 38b.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Fixed asset revaluation

The Bank measures its land and buildings at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income, the Bank engaged independent valuation specialist to determine fair values using market, income and cost approach. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate. Significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the revaluation of its fixed assets.

Prepaid credit guarantee

Prepaid credit guarantee is amortized using the straight-line method based on the economic useful life of the credit guarantee certificate period of 10 years.

The carrying amount of the prepaid credit guarantee, which has not been amortized as at December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp 2,656,846 and Rp 2,818,839, respectively. Further details are disclosed in Note 15.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of those matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded in the profit or loss in the period in which such determination is made.

The accumulated fiscal loss of the Bank amounting to Rp 966,645 and Rp 1,438,623 for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively. Further details are disclosed in Note 38b.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 38b.

Tuntutan hukum

Bank sedang menghadapi kasus-kasus hukum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, proses hukum terhadap pihak-pihak antara lain seperti nasabah, debitur dan pihak ketiga, sebagian sudah mendapat putusan tetap dan/atau peninjauan kembali.

Bank akan membukukan kerugian atas tuntutan hukum tersebut pada saat hasil keputusan final atas status hukum tersebut diperoleh dan akan dicatat pada laba rugi pada periode dimana hasil putusan final tersebut diterbitkan.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimate are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 38b.

Legal cases

The Bank is facing legal cases. Up to December 31, 2024, legal proceedings against parties such as customers, debtors, and third parties, some cases of which already have the final decision and/or judicial review.

The Bank will record losses on such lawsuits when the final decision on the legal status is obtained and will be recorded in profit or loss in the period in which the final decision is issued.

5. KAS / *5. CASH*

	2024	2023	
Rupiah	227.139	110.096	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currencies (Note 42)*
Dolar Amerika Serikat	94.258	36.730	*United States Dollar*
Mata uang asing lainnya	10.303	55.104	*Other foreign currencies*
Sub-total	104.561	91.834	*Sub-total*
Total	**331.700**	**201.930**	***Total***

Saldo mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp 4.189 dan Rp 4.924 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Balance in Rupiah includes cash in ATM (Automated Teller Machine) amounting to Rp 4,189 and Rp 4,924 as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

Kas dalam mata uang asing lainnya terdiri dari Poundsterling Inggris, Euro Eropa, Dolar Australia, Dolar Singapura, Dolar Selandia Baru, Dolar Hong Kong, Yuan Cina, Yen Jepang, dan Won Korea.

Cash in other foreign currencies is denominated in Great Britain Poundsterling, European Euro, Australian Dollar, Singapore Dollar, New Zealand Dollar, Hong Kong Dollar, Chinese Yuan, Japanese Yen, and Korean Won.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2024	2023	
Rupiah	357.457	1.891.738	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	116.804	121.408	*United States Dollar (Note 42)*
Total	**474.261**	**2.013.146**	***Total***

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 51a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 51a.

7. GIRO PADA BANK LAIN

7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan pihak, mata uang dan bank

a. By parties, currencies and banks

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	25.469	30.399	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	15.706	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.567	16.667	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	569	562	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mega Tbk	105	59	*PT Bank Mega Tbk*
Sub-total	44.416	47.687	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currencies (Note 42)*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	213.856	180.557	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York	103.496	80.216	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York*
PT Bank Central Asia Tbk	100.578	89.827	*PT Bank Central Asia Tbk*
United Overseas Bank (UOB), Singapura	46.925	55.387	*United Overseas Bank (UOB), Singapore*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	33.342	31.592	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	24.152	10.654	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Permata Tbk	16.424	15.671	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.104	34.414	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
KB Kookmin Bank, Korea Selatan	1.359	1.226	*KB Kookmin Bank, South Korea*
Standard Chartered Bank, Hong Kong	1.053	1.001	*Standard Chartered Bank, Hong Kong*
Indonesische Overzeese Bank N.V. (Indover), Belanda	799	813	*Indonesische Overzeese Bank N.V. (Indover), Netherlands*
Bank of China (Hongkong), Limited	220	-	*Bank of China (Hongkong), Limited*
Industrial and Commercial Bank of China, Jakarta	219	130	*Industrial and Commercial Bank of China, Jakarta*
Industrial and Commercial Bank of China, Hong Kong	68	58	*Industrial and Commercial Bank of China, Hong Kong*
Sub-total	549.595	501.546	*Sub-total*
Total	594.011	549.233	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.434)	(1.217)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**592.577**	**548.016**	***Net***

b. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

b. By Financial Service Authority Rule collectibility

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 51b.

c. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

c. The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	1.217	1.007	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 35)	118	(411)	*Provision (reversal) during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	99	621	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**1.434**	**1.217**	***Balance at end of the year***

7. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. The changes in allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	404	-	813	1.217	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	118	-	-	118	*Provision during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	113	-	(14)	99	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**635**	**-**	**799**	**1.434**	***Balance at end of the year***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	216	-	791	1.007	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(411)	-	-	(411)	*Reversal during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	599	-	22	621	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**404**	**-**	**813**	**1.217**	***Balance at end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk giro pada bank lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

d. Tingkat suku bunga rata-rata adalah sebagai berikut:

d. The average interest rates per annum are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	0,45%	1,05%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,36%	0,31%	*Foreign currencies*

e. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pada Indover masing-masing adalah sebesar EUR 47.700 (ekuivalen Rp 799 dan Rp 813).

Bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas rekening giro pada Indover sehubungan dengan telah dibekukannya operasional bank tersebut pada tanggal 7 Oktober 2008.

e. The outstanding balance in Indover as at December 31, 2024 and 2023 amounted to EUR 47,700 (equivalent to Rp 799 and Rp 813, respectively).

The Bank has provided allowance for impairment losses for current accounts with Indover due to the suspension of the banking operations on October 7, 2008.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank / *a. By type, currency and bank*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Fasilitas Deposito			*Deposit Facility*
Bank Indonesia	1.539.775	3.119.545	*Bank Indonesia*
PT Bank Mega Tbk	900	900	*PT Bank Mega Tbk*
Interbank Call Money			*Interbank Call Money*
PT Bank Capital Indonesia Tbk	250.000	100.000	*PT Bank Capital Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	50.000	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan*
PT Bank MNC Internasional Tbk	-	100.000	*PT Bank MNC Internasional Tbk*
Sub-total	1.840.675	3.370.445	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currency (Note 42)*
Term Deposit			*Term Deposit*
Bank Indonesia	321.941	-	*Bank Indonesia*
Total	2.162.616	3.370.445	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50)	(185)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.162.566**	**3.370.260**	***Net***

b. Berdasarkan jatuh tempo / *b. By maturity period*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	1.839.775	3.369.545	*Less than 1 month*
1 - 12 bulan	900	900	*1 - 12 months*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Kurang dari 1 bulan	321.941	-	*Less than 1 month*
Total	2.162.616	3.370.445	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50)	(185)	*Allowances for impairment losses*
Neto	**2.162.566**	**3.370.260**	***Net***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: / *c. The average annual interest rates were as follows:*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Fasilitas deposito Bank Indonesia	5,25%	5,25%	*Bank Indonesia deposit facility*
Fasilitas deposito bank lain	2,50%	2,50%	*Other bank deposit facility*
Interbank call money	6,27%	5,95%	*Interbank call money*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Term deposit			*Term deposits*
Bank Indonesia	4,53%	-	*Bank Indonesia*

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

d. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51c.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

d. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility placement with Bank Indonesia and other bank in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 51c.

e. Allowances for impairment losses

The changes in allowance for impairment losses of placement to other banks are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	185	524	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(24)	(339)	*Reversal during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	(111)	-	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**50**	**185**	***Balance at end of year***

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	185	-	-	185	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(24)	-	-	(24)	*Reversal during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	(111)	-	-	(111)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**50**	**-**	**-**	**50**	***Balance at end of the year***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	524	-	-	524	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(339)	-	-	(339)	*Reversal during the year (Note 35)*
Saldo akhir tahun	**185**	**-**	**-**	**185**	***Balance at end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk penempatan pada bank lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with other banks is adequate.

9. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang

Rincian dari masing-masing kategori tersebut diatas adalah sebagai berikut:

9. MARKETABLE SECURITIES

a. By purpose, type and currencies

The details for each category mentioned above are as follows:

	2024				
	Nilai perolehan/ *Acquisition amount*	Saldo yang belum diamortisasi/ *Unamortized amount* *)	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	Total	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					*Rupiah*
Obligasi Pemerintah	1.089.805	31.007	(39.015)	1.081.797	*Government bonds*
Medium Term Notes	1.034.100	(29.138)	7.432	1.012.394	*Medium Term Notes*
Obligasi lainnya	821.000	-	88	821.088	*Other bonds*
Sub-total	2.944.905	1.869	(31.495)	2.915.279	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)					*Foreign currency (Note 42)*
Obligasi Pemerintah	32.190	1.136	(4.809)	28.517	*Government bonds*
Sub-total	2.977.095	3.005	(36.304)	2.943.796	*Sub-total*
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Rupiah					*Rupiah*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	2.136.150	(39.379)	-	2.096.771	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Total	**5.113.245**	**(36.374)**	**(36.304)**	**5.040.567**	***Total***

	2023				
	Nilai perolehan/ *Acquisition amount*	Saldo yang belum diamortisasi/ *Unamortized amount* *)	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	Total	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					*Rupiah*
Medium Term Notes	1.824.300	(42.206)	4.102	1.786.196	*Medium Term Notes*
Obligasi Pemerintah	1.181.489	38.110	(21.871)	1.197.728	*Government bonds*
Obligasi lainnya	861.000	10	11.645	872.655	*Other bonds*
Sub-total	3.866.789	(4.086)	(6.124)	3.856.579	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)					*Foreign currency (Note 42)*
Obligasi Pemerintah	30.794	1.288	(4.316)	27.766	*Government bonds*
Total	**3.897.583**	**(2.798)**	**(10.440)**	**3.884.345**	***Total***

*) Saldo yang belum diamortisasi terdiri dari nilai premi/(diskonto) yang belum diamortisasi.

**) Unamortized amount consists of unamortized premium/(discount).*

Efek-efek dalam mata uang asing adalah dalam Dolar Amerika Serikat.

Marketable securities in foreign currency are denominated in United States Dollar (USD).

9. EFEK-EFEK (lanjutan) / *9. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan golongan penerbit efek / *b. By issuer*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pemerintah	3.178.568	1.197.728	*Government*
Korporasi	1.833.482	2.658.851	*Corporates*
Sub-total	5.012.050	3.856.579	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currency (Note 42)*
Pemerintah	28.517	27.766	*Government*
Total	**5.040.567**	**3.884.345**	***Total***

c. Berdasarkan peringkat efek-efek / *c. By rating of marketable securities*

	Pemeringkat/ *Rating agency*	2024 Nilai wajar/ nilai tercatat/ *Fair value/ carrying value*	2024 Peringkat/ *Rating*	2023 Nilai wajar/ nilai tercatat/ *Fair value/ carrying value*	2023 Peringkat/ *Rating*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other komprehensif lain***
Rupiah						***Rupiah***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
FR0096-086	-	309.602	-	320.954	-	*FR0096-086*
FR0086-086	-	147.036	-	147.284	-	*FR0086-086*
FR0081-086	-	119.672	-	120.040	-	*FR0081-086*
FR0082-086	-	109.806	-	112.245	-	*FR0082-086*
FR0078-086	-	104.407	-	107.708	-	*FR0078-086*
FR0087-086	-	97.149	-	99.586	-	*FR0087-086*
FR0090-086	-	76.794	-	77.190	-	*FR0090-086*
FR0103-086A	-	49.067	-	-	-	*FR0103-086A*
FR0100-086	-	48.785	-	50.344	-	*FR0100-086*
FR0065-086	-	19.479	-	20.044	-	*FR0065-086*
FR0077-086	-	-	-	92.180	-	*FR0077-086*
FR0070-086	-	-	-	50.153	-	*FR0070-086*
Medium Term Notes						*Medium Term Notes*
MTN Capital Strategic Invesco Tahun 2022	Kredit Rating Indonesia (KRI)	268.561	irA-	267.022	irA	*MTN Capital Strategic Invesco Year 2022*
MTN City Retail Developments I Tahun 2021	Kredit Rating Indonesia (KRI)	262.951	irBBB+	260.307	irBBB+	*MTN City Retail Developments I Year 2021*
MTN Bhakti Mulia Artha Tahun 2022	Kredit Rating Indonesia (KRI)	240.855	irBBB	234.773	irBBB	*MTN Bhakti Mulia Artha Year 2022*
MTN PT Pan Pacific Investama Tahun 2022	Kredit Rating Indonesia (KRI)	131.546	irA	128.884	irA	*MTN PT Pan Pacific Investama Year 2022*
MTN PT Pacific Strategic Financial Tahun 2021	Kredit Rating Indonesia (KRI)	108.481	irA	197.794	irA	*MTN PT Pacific Strategic Financial Year 2021*
MTN Capital Financial Indonesia Tahun 2021	Kredit Rating Indonesia (KRI)	-	-	349.874	idrA	*MTN Capital Financial Indonesia Year 2021*
MTN Metro Healthcare Indonesia Tahun 2021	Kredit Rating Indonesia (KRI)	-	-	347.543	irBBB+	*MTN Metro Healthcare Indonesia Year 2021*
Obligasi lainnya						*Others bonds*
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry						*Continous Bond I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry*
Tahap II Tahun 2023 Seri B	Pefindo	-	-	114.673	idA	*Phase II Year 2023 Series B*
Tahap III Tahun 2024 Seri B	Pefindo	139.894	idA	-	-	*Phase III Year 2024 Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	Pefindo	100.199	idA+	105.570	idA+	*Continous Bond II Indah Kiat Pulp & Paper Phase III Year 2022 Series C*
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold						*Continous Bond II Merdeka Copper Gold*
Tahap I Tahun 2022 Seri B	Pefindo	99.970	idA	101.400	idA	*Phase I Year 2022 Series B*
Tahap II Tahun 2023 Seri B	Pefindo	77.103	idA+	76.393	idA+	*Phase II Year 2023 Series B*
Obligasi Berkelanjutan BFI Multi Finance Tahap V 2023 Seri B	Fitch	99.944	A-(idn)	98.493	AA-(idn)	*Continous Bond BFI Multi Finance Phase V Year 2023 Series B*
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri A	Pefindo	27.675	idAA-	27.376	idAA-	*Continous Bond III Chandra Asri Petrochemical Phase IV Year 2021 Series A*
Tahap V Tahun 2022 Seri A	Pefindo	39.412	idAA-	39.460	idAA-	*Phase V Year 2022 Series A*
Obligasi Berkelanjutan I PT Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri C	Pefindo	-	-	79.905	idA+	*Continous Bond I PT Oki Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023 Series C*
Tahap IV Tahun 2024 Seri C	Pefindo	52.065	idA+	-	idA+	*Phase IV Year 2024 Series C*
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	Pefindo	50.004	idA	-	idA	*Bonds II Merdeka Battery Materials Year 2024 Series B*

9. EFEK-EFEK (lanjutan) / *9. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

c. Berdasarkan peringkat efek-efek (lanjutan) / *c. By rating of marketable securities (continued)*

	Pemeringkat/ *Rating agency*	2024 Nilai wajar/ nilai tercatat/ *Fair value/ carrying value*	2024 Peringkat/ *Rating*	2023 Nilai wajar/ nilai tercatat/ *Fair value/ carrying value*	2023 Peringkat/ *Rating*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other komprehensif lain***
Rupiah						***Rupiah***
Obligasi Berkelanjutan II PT Professional Telekomunikasi Indonesia Tahap II Tahun 2021	Pefindo	39.156	idAAA	38.852	idAAA	*Continous Bond II PT Professional Telekomunikasi Indonesia Phase II Year 2021*
Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri B	Pefindo	24.975	idA-	-	-	*Bonds I Integrasi Jaringan Ekosistem Year 2024 Series B*
Obligasi I PT TBS Energi Utama Tbk Tahap I Tahun 2023 Seri A	Pefindo	20.422	idA	20.361	idA	*Bonds I PT TBS Energi Utama Tbk Phase I Year 2023 Series A*
Obligasi Berkelanjutan IV PT Surya Artha Nusantara Finance Tahap II Tahun 2023 Seri B	Pefindo	19.972	idAA	20.096	idAA	*Continous Bond IV PT Surya Artha Nusantara Finance Phase II Year 2023 Series B*
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri B	Pefindo	15.345	idBBB+	-	-	*Continuous Bonds IV MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2024 Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri B	Pefindo	14.952	idA+	-	-	*Sukuk Ijarah Continuous IV Global Mediacom Phase II Year 2024 Series B*
Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2021 Seri A	Pefindo	-	-	100.005	idAAA	*Bond Ketrosden Triasmitra I Year 2021 Series A*
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2023 Seri B	Pefindo	-	-	30.216	idA+	*Continous Bond III Barito Pacific Phase III Year 2023 Series B*
Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B	Fitch	-	-	10.002	AA+(idn)	*Continous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2021 Series B*
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	Pefindo	-	-	9.852	idA+	*Continous Bonds IV Indomobil Finance Indonesia Phase II Year 2021 Series B*
Sub-total		2.915.279		3.856.579		*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)						***Foreign currency (Note 42)***
Obligasi Pemerintah INDOIS30-086	-	28.517	-	27.766	-	*Government bonds INDOIS30-086*
Biaya perolehan diamortisasi						***Amortized cost***
Rupiah						***Rupiah***
Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	-	2.096.771	-	-	-	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Total		**5.040.567**		**3.884.345**		***Total***

d. Berdasarkan tanggal jatuh tempo / *d. By maturity*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 tahun	2.396.317	959.609	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	1.981.846	2.186.088	*1 up to 5 years*
5 sampai dengan 10 tahun	584.820	660.539	*5 up to 10 years*
Lebih dari 10 tahun	49.067	50.343	*More than 10 years*
Sub-total	5.012.050	3.856.579	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currency (Note 42)*
5 sampai dengan 10 tahun	28.517	27.766	*5 up to 10 years*
Total	**5.040.567**	**3.884.345**	***Total***

9. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***9. MARKETABLE SECURITIES (continued)***

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: / *e. The average interest rates per annum are as follows:*

	2024	2023	
Obligasi Pemerintah	6,61%	6,80%	*Government bonds*
Medium Term Notes	7,92%	8,14%	*Medium Term Notes*
Obligasi lainnya	9,13%	8,27%	*Other bonds*
SRBI	6,80%	-	*SRBI*

f. Perubahan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada FVOCI adalah sebagai berikut: / *f. The changes in unrealized gains (losses) on changes in fair value of marketable securities measured at FVOCI are as follows:*

	2024	2023	
Saldo awal tahun - sebelum pajak penghasilan tangguhan	(10.441)	(15.575)	*Balance at beginning of year - before deferred income tax*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi tahun berjalan - neto	(8.609)	11.730	*Unrealized gain (loss) during year - net*
Kerugian yang direalisasi atas penjualan selama tahun berjalan - neto	(17.257)	(6.596)	*Realized loss from sale during year - net*
Neto sebelum pajak penghasilan tangguhan	(36.307)	(10.441)	*Net before deferred income tax*
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 38b)	7.988	2.297	*Deferred income tax (Note 38b)*
Saldo akhir tahun	**(28.319)**	**(8.144)**	***Balance at end of year***

g. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *g. By Financial Service Authority Rule collectibility*

Kolektibilitas efek-efek sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51d. / *Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 51d.*

h. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek-efek adalah sebagai berikut: / *h. The changes in allowance for impairment losses of marketable securities are as follows:*

	2024	2023	
Saldo awal tahun	1.918	1.761	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 35)	(956)	157	*Provision (reversal) during the year (Note 35)*
Saldo akhir tahun	**962**	**1.918**	***Balance at end of the year***

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	1.918	-	-	1.918	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(956)	-	-	(956)	*Reversal during the year (Note 35)*
Saldo akhir tahun	**962**	-	-	**962**	***Balance at end of the year***

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

h. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek-efek adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

h. The changes in allowance for impairment losses of marketable securities are as follows: (continued)

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	1.761	-	-	1.761	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	157	-	-	157	*Provision during the year (Note 35)*
Saldo akhir tahun	**1.918**	-	-	**1.918**	***Balance at end of the year***

Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

i. Keuntungan penjualan efek-efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp 7.032 dan Rp 10.625 (Catatan 31).

Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities provided is adequate as at December 31, 2024 and 2023.

i. Gains on sale of securities for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 7,032 and Rp 10,625, respectively (Note 31).

10. EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

2024

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis efek yang mendasari/ *Type of underlying securities*	Tanggal mulai/ *Commencement date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai penjualan kembali/ *Resale amount*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Bank Indonesia	VR0034	27 Desember/*December 27,* 2024	3 Januari/*January 3,* 2025	494.040	494.616	(165)	494.451
Bank Indonesia	VR0042	30 Desember/*December 30,* 2024	6 Januari/*January 6,* 2025	343.134	343.534	(285)	343.249
Bank Indonesia	VR0034	31 Desember/*December 31,* 2024	7 Januari/*January 7,* 2025	494.439	495.016	(494)	494.522
Total				**1.331.613**	**1.333.166**	**(944)**	**1.332.222**

2023

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis efek yang mendasari/ *Type of underlying securities*	Tanggal mulai/ *Commencement date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai penjualan kembali/ *Resale amount*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Bank Indonesia	VR0034	27 Desember/*December 27,* 2023	3 Januari/*January 3,* 2024	507.545	508.137	(169)	507.968
Bank Indonesia	VR0034	29 Desember/*December 29,* 2023	5 Januari/*January 5,* 2024	958.094	959.212	(639)	958.573
Total				**1.465.639**	**1.467.349**	**(808)**	**1.466.541**

10. EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, lokasi penyimpanan efek-efek jaminan tanpa warkat (*scriptless*) dicatat pada sistem BI-SSSS Bank Indonesia.

Kolektabilitas efek-efek dengan janji dijual kembali sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51e.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak diperlukan.

10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS (continued)

The storage location for scriptless securities is recorded in the BI-SSSS system of Bank Indonesia as at December 31, 2024 and 2023.

Collectibility securities purchased under resale agreements in accordance with OJK regulation are disclosed in Note 51e.

Management believes that the allowance for impairment losses as at December 31, 2024 and 2023, is not required.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka mata uang asing dengan pihak lain yang memungkinkan Bank atau pihak lain mengurangi risiko atas pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing.

Kontrak berjangka mata uang asing merupakan komitmen untuk menjual sejumlah mata uang tertentu kepada pembeli atau untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dari penjual pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pihak dan mata uang:

11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

The Bank entered into derivative transactions of forward contracts with other parties which enables the Bank or other parties to reduce the fluctuation risk of foreign currency.

A foreign currency forward contract is a commitment to sell a number of foreign currencies to a buyer or to buy a number of foreign currencies from seller at a certain date in the future at a predetermined price.

By parties and currency:

	2024			
	Nilai nosional (kontrak)/ *Notional amount (contract)*	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	
Pihak ketiga				***Third parties***
Spot mata uang asing (Catatan 42)				*Spot foreign currency (Note 42)*
Spot - beli				*Spot - buy*
Dolar Amerika Serikat	309.826	-	1.299	*United States Dollar*
Dolar Australia	900	2	-	*Australian dollar*
Spot - jual				*Spot - sell*
Dolar Amerika Serikat	201.346	814	1	*United States Dollar*
Forward mata uang asing (Catatan 42)				*Forward foreign currency (Note 42)*
Forward - beli				*Forward - buy*
Dolar Amerika Serikat	56.096	-	518	*United States Dollar*
Forward - jual				*Forward - sell*
Dolar Amerika Serikat	1.591.865	4.171	5.927	*United States Dollar*
Total	**2.160.033**	**4.987**	**7.745**	***Total***

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Berdasarkan pihak dan mata uang: (lanjutan)

11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

By parties and currency: (continued)

	2023			
	Nilai nosional (kontrak)/ *Notional amount (contract)*	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	
Pihak ketiga				***Third parties***
Spot mata uang asing (Catatan 42)				*Spot foreign currency (Note 42)*
Spot - beli				*Spot - buy*
Dolar Amerika Serikat	15.399	-	13	*United States Dollar*
Spot - jual				*Spot - sell*
Dolar Amerika Serikat	4.620	8	-	*United States Dollar*
Forward mata uang asing (Catatan 42)				*Forward foreign currency (Note 42)*
Forward - beli				*Forward - buy*
Dolar Amerika Serikat	246.385	-	330	*United States Dollar*
Forward - jual				*Forward - sell*
Dolar Amerika Serikat	1.801.753	18.898	-	*United States Dollar*
Total	**2.068.157**	**18.906**	**343**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kontrak *forward* dan *spot* valuta asing dilakukan dengan PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Victoria Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT Bank MNC Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BCA Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Hana Indonesia, Bank of America, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk dan PT Bank Ganesha Tbk.

As at December 31, 2024 and 2023, foreign currency forward and spot contracts were conducted with PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Victoria Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT Bank MNC Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BCA Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Hana Indonesia, Bank of America, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk and PT Bank Ganesha Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kontrak derivatif tidak ditujukan untuk akuntansi lindung nilai.

As at December 31, 2024 and 2023, derivative contracts were not designated for hedge accounting.

Kolektibilitas tagihan derivatif sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51f.

Derivative receivables in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 51f.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *12. LOANS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Kredit modal kerja	349.360	290.811	*Working capital loans*
Kredit pemilikan rumah	441	1.065	*Housing loans*
Kredit investasi	-	68.376	*Investment loan*
Kredit rekening koran	-	14.499	*Current account loans*
Kredit ekspor impor	-	1.160	*Export import loans*
Lain-lain	1.156	-	*Others*
Sub-total	350.957	375.911	*Sub-total*
Pihak ketiga			***Third parties***
Kredit modal kerja	14.172.071	9.867.960	*Working capital loans*
Kredit investasi	6.364.373	7.927.052	*Investment loans*
Kredit rekening koran	914.681	827.155	*Current account loans*
Kredit ekspor impor	412.625	373.217	*Export import loans*
Kredit pemilikan rumah	389.002	265.244	*Housing loans*
Kredit kendaraan bermotor	56.598	86.410	*Vehicle loans*
Lain-lain	960.245	1.085.855	*Others*
Sub-total	23.269.595	20.432.893	*Sub-total*
Sub-total - Rupiah	23.620.552	20.808.804	*Sub-total - Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)			***Foreign currency (Note 42)***
Pihak ketiga			***Third parties***
Kredit modal kerja	2.238.011	1.085.699	*Working capital loans*
Kredit investasi	407.315	1.920.974	*Investment loans*
Kredit ekspor impor	185.093	-	*Export import loans*
Kredit rekening koran	65.389	50.050	*Current account loans*
Lain-lain	11.706	14.311	*Others*
Sub-total - mata uang asing	2.907.514	3.071.034	*Sub-total - foreign curency*
Total	26.528.066	23.879.838	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(197.542)	(147.255)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**26.330.524**	**23.732.583**	***Net***

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Perantara keuangan	331.096	366.929	*Financial agent*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	18.264	6.757	*Real estate, rental and services*
Rumah tangga	1.597	2.225	*Household*
Sub-total	350.957	375.911	*Sub-total*
Pihak ketiga			***Third parties***
Perantara keuangan	5.066.417	4.845.733	*Financial agent*
Perdagangan besar dan eceran	3.440.676	2.864.605	*Wholesaler and retailer*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	3.386.448	2.752.978	*Real estate, rental and services*
Industri pengolahan	2.982.850	2.807.968	*Processing industry*
Pertambangan dan penggalian	2.408.916	2.235.860	*Mining and excavation*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.442.212	1.028.393	*Transportation, warehousing and communications*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.281.711	1.091.707	*Agribusiness, hunting and forestry*
Konstruksi	1.223.192	1.010.437	*Construction*
Rumah tangga	1.053.550	886.818	*Household*
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	541.996	439.084	*Supply of accommodation, food and beverages*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	417.569	441.211	*Lifestyle, social cultural, entertainment and other individuals*
Listrik, gas dan air	23.812	28.099	*Electricity, gas and water*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	246	-	*Healthcare services and social activities*
Sub-total	23.269.595	20.432.893	*Sub-total*
Sub-total - Rupiah	23.620.552	20.808.804	*Sub-total - Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)			***Foreign currency (Note 42)***
Pihak ketiga			***Third parties***
Industri pengolahan	1.470.327	921.566	*Processing industry*
Perantara keuangan	502.107	480.331	*Financial agent*
Perdagangan besar dan eceran	271.586	134.664	*Wholesaler and retailer*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	241.425	-	*Agribusiness, hunting and forestry*
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	180.218	187.899	*Supply of accommodations, foods and beverages*
Pertambangan dan penggalian	178.133	1.278.020	*Mining and excavation*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	63.718	68.554	*Real estate, rental and services*
Sub-total - mata uang asing	2.907.514	3.071.034	*Sub-total - foreign currency*
Total	26.528.066	23.879.838	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(197.542)	(147.255)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**26.330.524**	**23.732.583**	***Net***

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***12. LOANS (continued)***

c. Berdasarkan periode pinjaman dan sisa umur jatuh tempo

c. By loan period and maturity

Golongan jangka waktu pinjaman yang diberikan berdasarkan periode pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The classification of loans is based on loan period as stated in the loan agreements and the remaining period until maturity were as follows:

	2024		2023		
	Berdasarkan periode perjanjian kredit/ *Based on loan period*	Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *Based on remaining period until maturity*	Berdasarkan periode perjanjian kredit/ *Based on loan period*	Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *Based on remaining period until maturity*	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Rupiah					***Rupiah***
Kurang dari 1 tahun	6.477.841	10.609.140	4.945.453	10.218.824	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 2 tahun	2.168.091	1.658.302	3.613.208	1.528.437	*1 up to 2 years*
2 sampai dengan 5 tahun	7.731.029	6.974.815	6.901.470	5.740.010	*2 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.243.591	4.378.295	5.348.673	3.321.533	*More than 5 years*
Sub-total	23.620.552	23.620.552	20.808.804	20.808.804	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)					***Foreign currency (Note 42)***
Kurang dari 1 tahun	1.584.970	1.725.647	987.158	1.135.749	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 2 tahun	84.445	506.589	68.419	-	*1 up to 2 years*
2 sampai dengan 5 tahun	799.858	362.549	1.666.764	1.747.386	*2 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	438.241	312.729	348.693	187.899	*More than 5 years*
Sub-total	2.907.514	2.907.514	3.071.034	3.071.034	*Sub-total*
Total	**26.528.066**	**26.528.066**	**23.879.838**	**23.879.838**	***Total***

d. Pinjaman sindikasi

d. Syndicated loans

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain, dimana Bank bertindak sebagai anggota sindikasi. Total pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Syndicated loans represent loans provided to debtors under syndication agreements with other banks, where Bank act as a member of syndicated loans. Total syndicated loans as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Total	3.452.117	3.750.451	*Total*
Persentase anggota sindikasi	0,35% - 39,03%	0,61% - 42,78%	*Percentage of syndicated member*

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas pinjaman yang diberikan sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51g

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

12. LOANS (continued)

e. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility loans in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 51g.

f. Allowance for impairment losses

	2024	2023	
Saldo awal tahun	147.255	163.590	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	61.455	11.839	*Provision during the year (Note 35)*
Penghapusbukuan pinjaman	(407)	(465)	*Written-off loans*
Pemulihan yang timbul dari *unwinding interest*	(10.254)	(20.607)	*Reversal arising from unwinding interest*
Selisih perbedaan kurs	(507)	(7.102)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**197.542**	**147.255**	***Balance at end of the year***

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	60.624	13.316	73.315	147.255	*Balance at beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	382	(382)	-	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(19.135)	19.138	(3)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(41.868)	(8.041)	49.909	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	41.381	2.088	17.986	61.455	*Provision during the year (Note 35)*
Penghapusbukuan pinjaman	-	-	(407)	(407)	*Written-off loans*
Pemulihan yang timbul dari *unwinding interest*	-	-	(10.254)	(10.254)	*Reversal arising from unwinding interest*
Selisih perbedaan kurs	17.504	(6.844)	(11.167)	(507)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**58.888**	**19.275**	**119.379**	**197.542**	***Balance at end of the year***

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***12. LOANS (continued)***

f. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *f. Allowance for impairment losses (continued)*

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	67.483	1.427	94.680	163.590	*Balance at beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	21	(21)	-	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(13.003)	13.014	(11)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(10.974)	(431)	11.405	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 35)	28.406	4.651	(21.218)	11.839	*Provision (reversal) during the year (Note 35)*
Penghapusbukuan pinjaman	(3)	(17)	(445)	(465)	*Written-off loans*
Pemulihan yang timbul dari *unwinding interest*	-	-	(20.607)	(20.607)	*Reversal arising from unwinding interest*
Selisih perbedaan kurs	(11.306)	(5.307)	9.511	(7.102)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**60.624**	**13.316**	**73.315**	**147.255**	***Balance at end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans provided is adequate to cover impairment losses that might arise from uncollectible loans.

g. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *g. The average interest rates per annum*

	2024	2023	
Rupiah	12,38%	12,10%	*Rupiah*
Mata uang asing	6,28%	5,95%	*Foreign currency*

h. Informasi penting lainnya / *h. Other important information*

1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, total pinjaman yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 1.604.282 dan Rp 1.067.608. Restrukturisasi pinjaman yang diberikan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit antara lain perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, penjadwalan kembali bunga yang tertunggak dan ketentuan kredit yang baru.

1. As at December 31, 2024 and 2023, total restructured loans amounted to Rp 1,604,282 and Rp 1,067,608, respectively. Loan restructuring is an effort made by the Bank in lending activities for debtors who experience difficulties in fulfilling their obligations through modification of credit terms among other things, by extending the payment term, reducing loan interest rates, rescheduling the outstanding interest, and creating new credit terms.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

h. Informasi penting lainnya (lanjutan)

Bagi debitur yang terdampak Covid-19, Bank telah memberikan relaksasi pinjaman berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Wabah virus Covid-19. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, total pinjaman yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan tersebut masing-masing sebesar nihil dan Rp 152.795 (Catatan 51g). Restrukturisasi pinjaman yang diberikan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang antara lain berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan pengurangan pembayaran pokok kredit.

2. Selama tahun 2024, Bank telah melakukan klaim penjaminan atas pinjaman yang diberikan yang bermasalah sebesar Rp 138.879.

3. Jaminan pemberian kredit pada umumnya berupa harta berwujud (tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, tagihan piutang, persediaan, giro, deposito berjangka, *personal guarantee* dan *corporate guarantee*). Jumlah deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.549.349 dan Rp 3.036.925 (Catatan 22c dan 23a). Jumlah tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 32.354 dan Rp 29.313 (Catatan 22b). Jumlah giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 766.694 dan Rp 143.765 (Catatan 22a).

12. LOANS (continued)

h. Other important information (continued)

For debtors affected by Covid-19, the Bank has provided loan relaxation based on OJK Regulation No. 17/POJK.03/2021, OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 and OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Covid-19 Virus Disease Outbreak. As at December 31, 2024 and 2023, total loans restructured in accordance with these regulations amounted to nil and Rp 152,795 (Note 51g). Loan restructuring is an effort made by the Bank in lending activities for debtors who experience difficulties in fulfilling their obligations, which include lowering loan interest rates, extending credit terms, reducing arrears in loan interest, and reducing loan principal payments.

2. During 2024, the Bank made guarantee claims of non-performing loan amounted to Rp 138,879.

3. Collateral of loans is generally in the form of tangible assets (land, buildings, machinery, equipment, vehicles, receivables collections, inventories, demand deposits, time deposits, personal guarantee, and corporate guarantee). Total time deposits pledged as cash collateral for loans granted as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 2,549,349 and Rp 3,036,925, respectively (Notes 22c and 23a). Savings deposits, which are pledged as collateral on loans as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 32,354 and Rp 29,313, respectively (Note 22b). Demand deposits, which are pledged as collateral on loans as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 766,694 and Rp 143,765, respectively (Note 22a).

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *13. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / *a. By party and currency*

	2023		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	**Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables***	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Nasabah	10.935	10.935	*Debtors*
Mata uang asing (Catatan 42)	1.222	1.222	*Foreign currency (Note 42)*
Total	12.157	12.157	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**12.156**	**12.157**	***Net***

b. Berdasarkan jatuh tempo / *b. By maturity*

	2023		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	**Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables***	
Belum jatuh tempo:			*Not yet due:*
Kurang dari 1 bulan	12.157	12.157	*Less than 1 month*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**12.156**	**12.157**	***Net***

c. Tagihan akseptasi berdasarkan debitur / *c. Acceptance receivables by debtors*

	2023	
Rupiah		*Rupiah*
PT Pro Energi	10.935	*PT Pro Energi*
Mata uang asing (Catatan 42)		*Foreign currency (Note 42)*
PT Kobexindo Tractors Tbk	1.222	*PT Kobexindo Tractors Tbk*
Total	**12.157**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**12.156**	***Net***

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

13. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

d. The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	1	327	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(1)	(311)	*Reversal during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	-	(15)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**-**	**1**	***Balance at end of the year***

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	1	-	-	1	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(1)	-	-	(1)	*Reversal during the year (Note 35)*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	**-**	**-**	***Balance at end of the year***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Saldo awal tahun	327	-	-	327	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 35)	(311)	-	-	(311)	*Reversal during the year (Note 35)*
Selisih perbedaan kurs	(15)	-	-	(15)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**1**	**-**	**-**	**1**	***Balance at end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk tagihan akseptasi yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses on acceptance receivables is adequate to cover impairment losses that might arise from uncollectible acceptance receivables.

e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektabilitas tagihan akseptasi sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 51h.

e. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility acceptance receivables in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 51h.

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *13. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

f. Liabilitas akseptasi berdasarkan nama bank / *f. Acceptance payables based on bank's name*

	2023	
Pihak ketiga		***Third parties***
Rupiah		*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.935	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Mata uang asing (Catatan 42)		*Foreign currency (Note 42)*
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.222	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
Total	**12.157**	***Total***

14. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA / *14. ACCRUED INTEREST INCOME*

	2024	2023	
Pinjaman yang diberikan	149.792	160.897	*Loans*
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	37.933	46.224	*Marketable securities and placements with other banks*
Total	**187.725**	**207.121**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, termasuk dalam pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah pendapatan bunga dalam mata uang asing masing-masing sebesar Rp 10.719 dan Rp 19.610 (Catatan 42).

As at December 31, 2024 and 2023, accrued interest income includes interest income in foreign currency amounting to Rp 10,719 and Rp 19,610, respectively (Note 42).

15. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *15. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	2024	2023	
Penjaminan kredit dibayar dimuka	2.656.846	2.818.839	*Prepaid credit guarantee*
Sewa	1.893	1.807	*Rent*
Lain-lain	73.728	33.658	*Others*
Total	**2.732.467**	**2.854.304**	***Total***

15. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (lanjutan)

Penjaminan kredit dibayar dimuka

Pada tanggal 20 Desember 2023, Bank telah menandatangani perjanjian pengalihan asuransi dan implementasi atas penjaminan dengan PT Asuransi Sinarmas (ASM), dan PT Sinarmas Penjaminan Kredit (SPK), yang menyatakan adanya pengalihan pertanggungan serta hak dan kewajiban asuransi kredit dari ASM ke SPK (novasi). Perjanjian ini tertuang di dalam Akta No. 618 tanggal 20 Desember 2023, dan dibuat dihadapan Syofilawati, SH notaris di Jakarta. Nilai pertanggungan atas penjaminan SPK adalah sebesar Rp 3.373.990 dengan jangka waktu perlindungan penjaminan selama 10 tahun. Bank, ASM dan SPK menyepakati bersama bahwa tanggal efektif perjanjian novasi adalah tanggal 1 Januari 2023. Selain itu, Bank juga menilai bahwa perjanjian novasi dengan SPK yang merupakan penjaminan kredit berbeda secara substansial dengan perjanjian asuransi dengan ASM sebelumnya, dan oleh karena itu, telah diterapkan secara prospektif.

Pada tahun 2024, Bank melakukan penambahan penjaminan dengan total nilai penjaminan sebesar Rp 681.150 dengan jangka waktu perlindungan penjaminan selama 10 tahun yang diamortisasi dengan metode garis lurus.

Perubahan penjaminan kredit dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

15. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES (continued)

Prepaid credit guarantee

On December 20, 2023, the Bank has signed an insurance transfer and implementation agreement with PT Asuransi Sinarmas (ASM), and PT Sinarmas Penjaminan Kredit (SPK), which states the transfer of coverage and rights and obligations of credit insurance from ASM to SPK (novation). This agreement is contained in Deed No. 618 dated December 20, 2023, as covered by Syofilawati, SH notary in Jakarta. The sum covered of the guarantee by SPK amounted to Rp 3,373,990 and the guarantee coverage period is 10 years. The Bank, ASM and SPK have mutually agreed that the novation agreement is effective January 1, 2023. In addition, the Bank has also assessed that the novation agreement with SPK which represents a credit guarantee, is substantially different form the previous insurance agreement with ASM and therefore was accounted for prospectively.

In 2024, the Bank increased its guarantee coverage with a total guarantee amount of Rp 681,150, with a protection period of 10 years which amortized using the straight-line method.

Changes to prepaid credit guarantee are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	2.818.839	2.985.737	*Balance at beginning of year*
Imbalan penjaminan tahun berjalan	163.472	146.306	*Guarantee fee during the year*
Amortisasi tahun berjalan	(325.465)	(313.204)	*Amortization during the year*
Saldo akhir tahun	**2.656.846**	**2.818.839**	***Balance at end of year***

Sewa

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sewa dibayar dimuka merupakan sewa apartemen dan lokasi ATM.

Rent

As at December 31, 2024 and 2023, prepaid rent mainly represents lease of apartment and ATM locations.

16. ASET TETAP / *16. FIXED ASSETS*

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya/nilai revaluasi					***Cost/revalued amount***
Hak atas tanah	161.067	209.234	-	370.301	*Land rights*
Bangunan	24.928	-	-	24.928	*Buildings*
Inventaris kantor	86.506	18.424	(926)	104.004	*Office equipment*
Kendaraan	24.306	3.297	(920)	26.683	*Vehicles*
Total biaya/nilai revaluasi	296.807	230.955	(1.846)	525.916	*Total cost/revalued amount*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	1.246	1.246	-	2.492	*Buildings*
Inventaris kantor	67.878	8.500	(912)	75.466	*Office equipment*
Kendaraan	6.569	3.028	(513)	9.084	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	75.693	12.774	(1.425)	87.042	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**221.114**			**438.874**	***Net book value***

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya/nilai revaluasi					***Cost/revalued amount***
Hak atas tanah	161.067	-	-	161.067	*Land rights*
Bangunan	24.928	-	-	24.928	*Buildings*
Inventaris kantor	76.131	11.856	(1.481)	86.506	*Office equipment*
Kendaraan	20.727	3.579	-	24.306	*Vehicles*
Total biaya/nilai revaluasi	282.853	15.435	(1.481)	296.807	*Total cost/revalued amount*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	-	1.246	-	1.246	*Buildings*
Inventaris kantor	63.227	6.106	(1.455)	67.878	*Office equipment*
Kendaraan	3.801	2.768	-	6.569	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	67.028	10.120	(1.455)	75.693	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**215.825**			**221.114**	***Net book value***

Hak atas tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang terakhir telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilai independen profesional KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan berdasarkan laporan penilaian No. 00458/2.0059-02/PI/07/0242/1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, dengan nama penilai Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar (*market approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*) untuk hak atas tanah dan bangunan berupa ruko sementara pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*) untuk penilaian tanah, bangunan, dan sarana pelengkap berupa gedung kantor.

Land rights and buildings were recorded based on revaluation value, the latest as reviewed by management and supported by an independent professional appraiser of KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan based on its report No. 00458/2.0059-02/PI/07/0242/1/XII/2022 dated December 27, 2022, with appraiser name Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert). The method of approach used is the market approach and income approach for land rights and buildings in the form of shop houses, while the income approach and cost approach are used for the valuation of lands, buildings, and complementary facilities in the form of office buildings.

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2024, Bank membeli sebidang tanah di Jakarta yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Bank dengan total harga perolehan sebesar Rp 209.234.

Jika hak atas tanah dan bangunan dicatat sebesar biaya perolehan, nilai buku neto aset tersebut adalah sebagai berikut:

16. FIXED ASSETS (continued)

In 2024, the Bank purchase land in Jakarta to support its operational activities, with a total acquisition cost of Rp 209,234.

If land rights and buildings were stated using historical cost basis, the net book value of those assets would be as follows:

	2024	2023	
Hak atas tanah	238.514	29.280	*Land rights*
Bangunan	5.615	7.398	*Buildings*
Total	**244.129**	**36.678**	***Total***

Beban penyusutan aset tetap dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Depreciation expense of fixed assets is charged to general and administrative expenses (Note 33).

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of gain on sale of fixed assets are as follows:

	2024	2023	
Hasil penjualan	563	76	*Proceeds from sale*
Nilai buku neto	419	-	*Net book value*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 36)	**144**	**76**	***Gain on sale of fixed assets (Note 36)***

Rincian penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of disposal of fixed assets are as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan	20	310	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(18)	(284)	*Accumulated depreciation*
Rugi penghapusan aset tetap (Catatan 37)	**(2)**	**(26)**	***Loss on disposal of fixed assets (Note 37)***

16. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap Bank telah diasuransikan dengan *property all risk insurance* dan *earthquake insurance* pada PT Asuransi Buana Independent (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 258.240 dan Rp 269.666 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan asuransi kendaraan pada PT Asuransi Buana Independent (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 25.541 dan Rp 21.823 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Bank memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Solo, Surabaya, Makassar, Depok, Tangerang dan Malang dengan hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2054. Seluruh aset tetap berupa hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki sepenuhnya adalah milik Bank dan atas nama Bank.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan masing-masing sebesar Rp 183.783 dan Rp 172.279.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen Bank, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

16. FIXED ASSETS (continued)

The Bank's fixed assets have been insured with property all-risk insurance and earthquake insurance with PT Asuransi Buana Independent (third party) for a total coverage amount of Rp 258,240 and Rp 269,666 as at December 31, 2024 and 2023, respectively, and vehicle insurance with PT Asuransi Buana Independent (third party) for a total coverage amount of Rp 25,541 and Rp 21,823 as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

The Bank owned parcels of land in Jakarta, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Solo, Surabaya, Makassar, Depok, Tangerang and Malang with Building Usage Rights (HGB) which will expire on various dates up to 2054. All fixed assets in the form of land and building rights are fully owned by the Bank and in the name of the Bank.

Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all of the land was acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

As at December 31, 2024 and 2023, there are no fixed assets pledged as collateral.

As at December 31, 2024 and 2023, fixed assets that are fully depreciated but still in use amounted to Rp 183,783 and Rp 172,279, respectively.

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank undertook a review of useful lives, depreciation methods, and residual values of fixed assets and concluded that there was no change in the methods and assumptions.

Based on Bank's management assessment, there were no events or changes in circumstances that indicate an impairment of fixed assets as at December 31, 2024 and 2023.

17. ASET TAKBERWUJUD / *17. INTANGIBLE ASSETS*

	2024			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan				***Acquisition cost***
Perangkat lunak	189.527	32.017	221.544	*Software*
Lisensi	73.297	1.207	74.504	*License*
Total harga perolehan	262.824	33.224	296.048	*Total acquisition cost*
Akumulasi amortisasi				***Accumulated amortization***
Perangkat lunak	134.555	12.903	147.458	*Software*
Lisensi	54.609	3.645	58.254	*License*
Total akumulasi amortisasi	189.164	16.548	205.712	*Total accumulated amortization*
Nilai buku neto	**73.660**		**90.336**	***Net book value***

	2023			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan				***Acquisition cost***
Perangkat lunak	184.056	5.471	189.527	*Software*
Lisensi	71.138	2.159	73.297	*License*
Total harga perolehan	255.194	7.630	262.824	*Total acquisition cost*
Akumulasi amortisasi				***Accumulated amortization***
Perangkat lunak	122.900	11.655	134.555	*Software*
Lisensi	50.674	3.935	54.609	*License*
Total akumulasi amortisasi	173.574	15.590	189.164	*Total accumulated amortization*
Nilai buku neto	**81.620**		**73.660**	***Net book value***

Beban amortisasi aset takberwujud dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Amortization of intangible assets is charged to general and administrative expenses (Note 33).

Berdasarkan penelaahan manajemen Bank, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on the Bank's management assessment, there were no events or changes in circumstances that indicate an impairment of intangible assets as at December 31, 2024 and 2023.

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Bank menyewa beberapa aset seperti bangunan. Rata-rata masa sewa adalah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa bernilai rendah untuk sewa dengan nilai pembayaran sewa dibawah Rp 75.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna yang diakui dan mutasinya selama tahun berjalan:

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The Bank leases several assets, such as buildings. The average lease period is more than 1 (one) year to 25 (twenty-five) years.

The Bank applies the recognition on low-value assets for leases with lease payments below Rp 75.

Below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year:

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Bangunan	146.835	7.657	9.878	144.614	*Building*
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Bangunan	54.078	45.317	9.031	90.364	*Building*
Nilai buku neto	**92.757**			**54.250**	***Net book value***

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Bangunan	248.794	13.730	115.689	146.835	*Building*
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Bangunan	122.572	46.330	114.824	54.078	*Building*
Nilai buku neto	**126.222**			**92.757**	***Net book value***

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa dan mutasinya selama tahun berjalan:

Below are the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the year:

	2024	**2023**	
Saldo awal tahun	1.707	1.046	*Balance at beginning of year*
Penambahan liabilitas sewa	-	3.014	*Addition on lease liabilities*
Pengurangan liabilitas sewa	-	(798)	*Deduction on lease liabilities*
Beban bunga atas liabilitas sewa	39	76	*Interest expense on lease liabilities*
Pembayaran kewajiban sewa:			*Payments of lease liabilities:*
Pokok	(1.179)	(1.555)	*Principal*
Bunga	(39)	(76)	*Interest*
Saldo akhir tahun (Catatan 25)	**528**	**1.707**	***Balance at end of year (Note 25)***

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

	2024	2023	
Beban penyusutan aset hak-guna - neto (Catatan 33)	43.692	44.272	*Depreciation expense of right-of-use assets - net (Note 33)*
Beban bunga liabilitas sewa	39	76	*Interest expense on lease liabilities*
Biaya yang berkaitan dengan sewa jangka pendek (Catatan 33)	3.613	3.521	*Expense relating to short-term leases (Note 33)*
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah (Catatan 33)	3.203	3.063	*Expense relating to leases of low-value assets (Note 33)*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	**50.547**	**50.932**	***Total amount recognised in profit or loss***

Bank memiliki total arus kas keluar untuk pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 1.218 dan Rp 1.631 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Bank had total cash outflows, for payments of leases liabilities of Rp 1,218 and Rp 1,631 as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

19. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH / *19. FORECLOSED ASSETS*

	2024	2023	
Tanah	11.101	29.317	*Land*
Tanah dan bangunan	242.673	242.673	*Land and building*
Sub-total	253.774	271.990	*Sub-total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(160.650)	(188.752)	*Allowance for impairment losses*
Nilai buku neto	**93.124**	**83.238**	***Net book value***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	188.752	178.708	*Balance at beginning of year*
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan - neto (Catatan 35)	(11.086)	16.471	*Provision (reversal) during the year - net (Note 35)*
Penjualan agunan yang diambil alih	(17.016)	-	*Sale of foreclosed assets*
Hapus buku agunan yang diambil alih	-	(6.427)	*Write-off of foreclosed assets*
Saldo akhir tahun	**160.650**	**188.752**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses on foreclosed assets is adequate to cover any possible losses.

20. ASET LAIN-LAIN / *20. OTHER ASSETS*

	2024	2023	
Tagihan kepada Weston Capital Advisors Inc.	53.478	51.159	*Receivable from Weston Capital Advisors Inc.*
Biaya renovasi	24.498	21.516	*Renovation costs*
Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak - 2021 dan 2015 (Catatan 38b)	18.590	16.296	*Tax assessment letters for fiscal year - 2021 and 2015 (Note 38b)*
Setoran jaminan	6.630	6.669	*Security deposits*
Pengembangan sistem dan informasi	4.385	13.464	*System and information development*
Piutang terkait transaksi ATM	4.016	7.176	*Receivables related to ATM*
Lain-lain	107.729	73.311	*Others*
Total	219.326	189.591	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(53.478)	(59.947)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**165.848**	**129.644**	***Net***

Tagihan kepada Weston Capital Advisors Inc.

Tagihan kepada Weston Capital Advisors Inc. sebesar USD 3.322.652 (ekuivalen Rp 53.478 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 51.159 pada tanggal 31 Desember 2023) merupakan dana milik Bank yang harus dikembalikan oleh Weston Capital Advisors Inc. sehubungan dengan Putusan dalam bentuk *Order Vacating Judgment* yang dikeluarkan oleh *United States District Court Southern District of New York* tanggal 19 November 2013.

Receivable from Weston Capital Advisors Inc.

Receivable from Weston Capital Advisors Inc. amounting to USD 3,322,652 (equivalent to Rp 53,478 as at December 31, 2024 and Rp 51,159 as at December 31, 2023) represents the Bank's fund which should be returned by Weston Capital Advisors Inc. in relation to Verdict of Order Vacating Judgment issued by United States District Court Southern District of New York dated November 19, 2013.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	59.947	60.278	*Balance at beginning of year*
Penghapusbukuan tahun berjalan	(8.788)	-	*Written-off during the year*
Selisih perbedaan kurs	2.319	(331)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	**53.478**	**59.947**	***Balance at end of year***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pada aset lain-lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on other assets is adequate.

21. LIABILITAS SEGERA / *21. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Liabilitas cadangan pembayaran	23.378	37.377	*Liability payment reserve*
Titipan asuransi konsumen	17.577	19.205	*Insurance advances from customers*
ATM Prima	2.442	11.536	*ATM Prima*
ATM Bersama	870	4.797	*ATM Bersama*
Transfer, inkaso dan kliring	40	680	*Transfer, check for collection and clearing*
Liabilitas lainnya	5.314	11.840	*Other liabilities*
Sub-total	49.621	85.435	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currency (Note 42)*
Liabilitas cadangan pembayaran	21	22	*Liability payment reserve*
Transfer, inkaso dan kliring	-	1.153	*Transfer, cheques for collection and clearing*
Liabilitas lainnya	743	4	*Other liabilities*
Sub-total	764	1.179	*Sub-total*
Total	**50.385**	**86.614**	***Total***

22. SIMPANAN NASABAH / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Deposito berjangka	28.584.607	27.345.928	*Time deposits*
Giro	2.970.271	2.339.740	*Demand deposits*
Tabungan	2.094.353	1.989.249	*Savings deposits*
Sub-total	33.649.231	31.674.917	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Deposito berjangka	183.928	197.451	*Time deposits*
Tabungan	40.188	23.365	*Savings deposits*
Giro	26.180	109.898	*Demand deposits*
Sub-total	250.296	330.714	*Sub-total*
Total	**33.899.527**	**32.005.631**	***Total***

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif tanggal 22 September 2005, seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta penjaminan LPS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LPS, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2008 nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank diubah menjadi paling banyak Rp 2.000 dan tingkat bunga yang diberikan tidak melebihi tingkat bunga LPS.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Tingkat suku bunga penjaminan LPS untuk simpanan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat adalah masing-masing sebesar 4,25% dan 2,25% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

a. Giro

(i) Berdasarkan pihak dan mata uang

22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which became effective on September 22, 2005, all commercial banks conducting business activities in Indonesia have to become participants of LPS. Based on Government Regulation in Lieu of Law No. 3 Year 2008 regarding the Change in Law No. 24 Year 2004 juncto Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the Maximum Deposit Amount Guaranteed by the LPS, effective from October 13, 2008, total deposits guaranteed by LPS is a maximum of Rp 2,000 per customer in a bank, and the interest rate given for customers should not exceed the interest rate of LPS.

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank was a participant in the above guarantee program.

The interest rates guaranteed by LPS for deposits in Rupiah and United States Dollar were 4.25% and 2.25% as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

a. Demand deposits

(i) By party and currency

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	2.464.478	1.988.748	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	505.793	350.992	*Foreign currencies (Note 42)*
Sub-total	2.970.271	2.339.740	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Rupiah	11.334	39.652	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	14.846	70.246	*Foreign currencies (Note 42)*
Sub-total	26.180	109.898	*Sub-total*
Total	**2.996.451**	**2.449.638**	***Total***

(ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

(ii) Average interest rates per annum:

	2024	2023	
Rupiah	0,49%	0,55%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,49%	0,74%	*Foreign currencies*

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Giro (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat giro yang diblokir oleh Bank karena mengikuti program promosi, jaminan kredit dan lain-lain. Saldo giro yang diblokir adalah sebagai berikut:

22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Demand deposits (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, there are demand deposits frozen by the Bank due to participating in promotional programs, credit guarantees, and others. The demand deposits that are frozen are as follows:

	2024	2023	
Mata Uang			***Currency***
Rupiah	9.032	8.989	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	11.062	10.454	*United States Dollar*
Dolar Australia	10	10	*Australian Dollar*
Total	**20.104**	**19.453**	***Total***

Giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 766.694 dan Rp 143.765 (Catatan 12h).

Demand deposits which are pledged as collateral on loans as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 766,694 and Rp 143,765, respectively (Note 12h).

b. Tabungan

(i) Berdasarkan pihak, mata uang dan jenis

b. Savings deposits

(i) By party, currency and type

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan Jtrust Bisnis	1.446.179	1.379.893	*Tabungan Jtrust Bisnis*
Tabungan Komunitas MOE	583.598	561.402	*Tabungan MOE Community*
Tabungan Rencana Jtrust	15.670	19.707	*Tabungan Rencana Jtrust*
Tabunganku	11.735	11.559	*Tabunganku*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currencies (Note 42)*
Tabungan Jtrust Bisnis	32.966	-	*Tabungan Jtrust Bisnis*
Tabungan Komunitas MOE	4.205	16.688	*Tabungan MOE Community*
Sub-total	2.094.353	1.989.249	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan Jtrust Bisnis	38.162	20.983	*Tabungan Jtrust Bisnis*
Tabungan Komunitas MOE	1.775	1.767	*Tabungan MOE Community*
Tabungan Rencana Jtrust	54	538	*Tabungan Rencana Jtrust*
Tabunganku	2	71	*Tabunganku*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currencies (Note 42)*
Tabungan Jtrust Bisnis	195	6	*Tabungan Jtrust Bisnis*
Sub-total	40.188	23.365	*Sub-total*
Total	**2.134.541**	**2.012.614**	***Total***

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / ***22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)***

b. Tabungan (lanjutan) / *b. Savings deposits (continued)*

(ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *(ii) Average interest rates per annum*

	2024	2023	
Rupiah	0,41%	0,50%	*Rupiah*
Mata uang asing	1,24%	1,03%	*Foreign currency*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat tabungan yang diblokir oleh Bank karena mengikuti program promosi, jaminan kredit dan lain-lain. Saldo tabungan yang diblokir adalah masing-masing sebesar Rp 8.577 dan Rp 10.852.

As at December 31, 2024 and 2023, there are savings deposits frozen by the Bank due to participating in promotional programs, credit guarantees, and others. The frozen savings deposit balances were Rp 8,577 and Rp 10,852, respectively.

Nasabah tabungan yang diblokir tidak memiliki hubungan berelasi dengan Bank.

Blocked saving customers do not have a relationship with the Bank.

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 32.354 dan Rp 29.313 (Catatan 12h).

Savings deposits, which are pledged as collateral on loans as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp 32,354 and Rp 29,313, respectively (Note 12h).

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

(i) Berdasarkan pihak dan mata uang / *(i) By party and currency*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	26.684.721	25.616.300	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	1.899.886	1.729.628	*Foreign currencies (Note 42)*
Sub-total	28.584.607	27.345.928	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Rupiah	77.158	86.994	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	106.770	110.457	*Foreign currencies (Note 42)*
Sub-total	183.928	197.451	*Sub-total*
Total	**28.768.535**	**27.543.379**	***Total***

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / ***22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)***

c. Deposito berjangka (lanjutan) / *c. Time deposits (continued)*

(ii) Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode deposito berjangka / *(ii) Classification of time deposits based on period of time deposits*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
On call	931.212	2.242.627	*On call*
1 bulan	6.842.454	7.093.122	*1 month*
3 bulan	10.903.979	8.461.281	*3 months*
6 bulan	5.751.806	5.191.461	*6 months*
12 bulan	2.332.428	2.714.803	*12 months*
Sub-total	26.761.879	25.703.294	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currencies (Note 42)*
On call	309.459	115.477	*On call*
1 bulan	278.522	651.967	*1 month*
3 bulan	982.306	632.155	*3 months*
6 bulan	292.043	294.214	*6 months*
12 bulan	144.326	146.272	*12 months*
Sub-total	2.006.656	1.840.085	*Sub-total*
Total	**28.768.535**	**27.543.379**	***Total***

(iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo / *(iii) Based on remaining period until maturity*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	11.759.772	11.565.228	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	9.200.751	8.014.998	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	4.101.082	3.600.107	*3 up to 6 months*
6 sampai dengan 12 bulan	1.700.274	2.522.961	*6 up to 12 months*
Sub-total	26.761.879	25.703.294	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currencies (Note 42)*
Kurang dari 1 bulan	927.364	957.421	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	735.773	586.758	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	212.984	206.641	*3 up to 6 months*
6 sampai dengan 12 bulan	130.535	89.265	*6 up to 12 months*
Sub-total	2.006.656	1.840.085	*Sub-total*
Total	**28.768.535**	**27.543.379**	***Total***

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

(iv) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Time deposits (continued)

(iv) Average interest rates per annum

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
On call	5,65%	6,27%	*On call*
1 bulan	5,84%	5,54%	*1 month*
3 bulan	6,16%	5,74%	*3 months*
6 bulan	6,35%	5,80%	*6 months*
12 bulan	5,60%	5,00%	*12 months*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
1 bulan	2,28%	1,49%	*1 month*
3 bulan	3,13%	2,27%	*3 months*
6 bulan	3,98%	2,98%	*6 months*
12 bulan	3,88%	2,29%	*12 months*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat deposito berjangka yang diblokir oleh Bank karena mengikuti program promosi, jaminan kredit dan lain-lain. Saldo deposito yang diblokir adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024 and 2023, there are time deposits frozen by the Bank due to participating in promotional programs, credit guarantees and others. The balance of deposits that are frozen are as follows:

	2024	2023	
Mata Uang			***Currency***
Rupiah	-	2.120	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	2.069	*United States Dollar*
Total	**-**	**4.189**	***Total***

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.497.583 dan Rp 2.977.517 (Catatan 12h).

Time deposits which are pledged as collateral on loans as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 2,497,583 and Rp 2,977,517, respectively (Note 12h).

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Deposito berjangka	1.561.818	1.422.988	*Time deposits*
Giro	566.115	945.524	*Demand deposits*
Tabungan	196.184	275.047	*Savings deposits*
Call money	-	572.000	*Call money*
Total	**2.324.117**	**3.215.559**	***Total***

a. Deposito berjangka / *a. Time deposits*

(i) Berdasarkan periode / *(i) By period*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	67.500	171.522	*Less than 1 month*
1 bulan	881.039	409.175	*1 month*
3 bulan	306.402	575.750	*3 months*
6 bulan	263.027	223.016	*6 months*
12 bulan	43.850	43.525	*12 months*
Total	**1.561.818**	**1.422.988**	***Total***

(ii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo / *(ii) Based on remaining period until maturity*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	1.030.141	773.933	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	379.200	509.464	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	141.277	129.516	*3 up to 6 months*
6 sampai dengan 12 bulan	11.200	10.075	*6 up to 12 months*
Total	**1.561.818**	**1.422.988**	***Total***

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 51.766 dan Rp 59.408 (Catatan 12h).

Time deposits which are pledged as collateral on loans as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 51,766 and Rp 59,408, respectively (Note 12h).

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. *Call money* / *b. Call money*

2023				
Pihak lawan/ *Counter Party*	**Tanggal mulai/ Start date**	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Tingkat suku bunga/ *Interest rate***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***
PT Bank Panin Tbk	12 Desember/*December 12,* 2023	12 Januari/*January 12,* 2024	7,10%	500.000
PT Bank IBK Tbk	27 Desember/*December 27,* 2023	4 Januari/*January 4,* 2024	6,33%	50.000
PT Bank Jatim Tbk	28 Desember/*December 28,* 2023	4 Januari/*January 4,* 2024	6,33%	22.000
Total				**572.000**

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *c. Average interest rate per annum*

	2024	**2023**	
Deposito berjangka	6,14%	6,21%	*Time deposits*
Giro	2,28%	2,66%	*Demand deposits*
Tabungan	2,78%	4,03%	*Savings deposits*
Call money	-	3,20%	*Call money*

24. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *24. ACCRUED INTEREST EXPENSES*

	2024	**2023**	
Rupiah	100.582	82.912	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	7.339	4.211	*Foreign currencies (Note 42)*
Total	**107.921**	**87.123**	***Total***

25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN / *25. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES*

	2024	**2023**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Setoran jaminan	929	921	*Security deposits*
Liabilitas sewa (Catatan 18)	528	1.707	*Lease liabilities (Note 18)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	199	307	*Estimated lossed on commmitment and contingency*
Personalia	113	113	*Personnel*
Lain-lain	9.724	8.025	*Others*
Sub-total	11.493	11.073	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)			*Foreign currency (Note 42)*
Lain-lain	156	233	*Others*
Total	**11.649**	**11.306**	***Total***

26. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Bank berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia, adalah sebagai berikut:

26. SHARE CAPITAL

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank's shareholders and its ownership based on the report from the Shares Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia, are as follows:

2024

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*				Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*	Nilai nominal (nilai penuh)/ *Amount (full amount)*			Total dalam jutaan/ *In millions*
	Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	Seri C/ *Series C*	Total		Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	Seri C/ *Series C*	
J Trust Co., Ltd., Jepang/*Japan*	8.679.019.445	27.033	4.571.699.586	13.250.746.064	73,17%	1.000	7.800.000	100	9.347.047
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura/*Singapore*	467.700.928	-	3.030.681.061	3.498.381.989	19,32%	1.000	-	100	770.769
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	-	312.121.213	412.242.458	2,28%	1.000	-	100	131.333
Masyarakat/*Public*	764.999.382	256.468	183.295.648	948.551.498	5,23%	1.000	7.800.000	100	2.783.780
Total	**10.011.841.000**	**283.501**	**8.097.797.508**	**18.109.922.009**	**100,00%**				**13.032.929**

2023

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*				Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*	Nilai nominal (nilai penuh)/ *Amount (full amount)*			Total dalam jutaan/ *In millions*
	Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	Seri C/ *Series C*	Total		Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	Seri C/ *Series C*	
J Trust Co., Ltd., Jepang/*Japan*	8.679.019.445	27.033	4.751.515.153	13.430.561.631	74,16%	1.000	7.800.000	100	9.365.028
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura/*Singapore*	467.700.928	-	3.030.681.061	3.498.381.989	19,32%	1.000	-	100	770.769
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	-	312.121.213	412.242.458	2,28%	1.000	-	100	131.333
Masyarakat/*Public*	764.999.382	256.468	3.480.081	768.735.931	4,24%	1.000	7.800.000	100	2.765.799
Total	**10.011.841.000**	**283.501**	**8.097.797.508**	**18.109.922.009**	**100,00%**				**13.032.929**

Dana Setoran Modal

a. Bank menerima dana setoran modal dari JTrust Co., Ltd., pada tanggal 11 Juli 2022 sebesar JPY 4.600 atau Rp 501.860 dengan kurs Rp 109,10 (nilai penuh). Berdasarkan Surat OJK No. SR-77/PB.31/2022 tanggal 27 Juli 2022, OJK menyetujui pencatatan dana setoran modal dari JTrust Co., Ltd., dan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 31 Juli 2022 beserta dengan rencana penggunaan pada instrumen *Depo Facility* Bank Indonesia (DF) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).

b. Pada tanggal 27 September 2022, Bank menerima dana setoran modal dari JTrust Co., Ltd., sebesar Rp 140.000. Berdasarkan Surat OJK No. SR-60/PB.311/ 2022 tanggal 3 Oktober 2022, OJK menyetujui pencatatan dana setoran modal sebesar Rp 117.315 dari JTrust Co., Ltd., dan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 30 September 2022 beserta dengan rencana penggunaan pada instrumen *Depo Facility* Bank Indonesia (DF) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).

Capital Deposit Funds

a. The Bank received capital deposit fund from JTrust Co., Ltd., on July 11, 2022 in the amount of JPY 4,600 or Rp 501,860 at the exchange rate Rp 109.10 (full amount). Based on OJK 's Letter No. SR-77/PB.31/2022 dated July 27, 2022, OJK has approved for the recording of capital deposit funds from JTrust Co., Ltd., and in the Bank's calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) for the position period July 31, 2022 along with the Bank's plan to use instruments in Bank Indonesia Depo Facility (DF) and Bank Indonesia Certificates of Deposit (SDBI).

b. On September 27, 2022, the Bank received capital deposit fund amounted to Rp 140,000 from JTrust Co., Ltd. Based on OJK's Letter No. SR-60/PB.311/2022 dated October 3, 2022, OJK has approved for the recording of capital deposit funds from JTrust Co., Ltd., amounted to Rp 117,315 and in the Bank's calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) for the position period September 30, 2022 along with the Bank 's plan to use instruments in Bank Indonesia Depo Facility (DF) and Bank Indonesia Certificates of Deposit (SDBI).

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dana Setoran Modal (lanjutan)

Berdasarkan Surat OJK No. SR-72/PB.311/2022 tanggal 2 November 2022, OJK menyetujui pencatatan dana setoran modal sebesar Rp 22.685 dari JTrust Co., Ltd., dan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 31 Oktober 2022 beserta dengan rencana penggunaan pada instrumen *Depo Facility* Bank Indonesia (DF) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).

c. Pada tanggal 13 Desember 2022, Bank menerima dana setoran modal dari JTrust Co., Ltd., sebesar Rp 360.000. Berdasarkan Surat OJK No. SR-131/PB.31/2022 tanggal 13 Desember 2022, OJK menyetujui pencatatan dana setoran modal sebesar Rp 360.000 dari JTrust Co., Ltd., dan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 31 Desember 2022 beserta dengan rencana penggunaan pada instrumen *Depo Facility* Bank Indonesia (DF), Time Deposit Bank Indonesia serta *Reverse Repo*.

d. Pada tanggal 17 Desember 2024, Bank menerima dana setoran modal dari JTrust Co., Ltd., sebesar Rp 51.875. Berdasarkan Surat OJK No. S-34/PB.312/2024 tanggal 24 Desember 2024, OJK menyetujui pencatatan dana setoran modal sebesar Rp 51.875 dari JTrust Co., Ltd., dan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank untuk periode posisi 31 Desember 2024 beserta dengan rencana penggunaan pada instrumen *Depo Facility* Bank Indonesia (DF), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan/atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

26. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Deposit Funds (continued)

Based on OJK's Letter No. SR-72/PB.311/2022 dated November 2, 2022, OJK has approved for the recording of capital deposit funds from JTrust Co., Ltd., amounted to Rp 22,685 and in the Bank's calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) for the position period October 31, 2022 along with the Bank's plan to use instruments in Bank Indonesia Depo Facility (DF) and Bank Indonesia Certificates of Deposit (SDBI).

c. On December 13, 2022, the Bank received capital deposit fund amounted to Rp 360,000 from JTrust Co., Ltd. Based on OJK's Letter No. SR-131/PB.31/2022 dated December 13, 2022, OJK has approved for the recording of capital deposit funds from JTrust Co., Ltd., amounted to Rp 360,000 and in the Bank 's calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) for the position period December 31, 2022 along with the Bank's plan to use instruments in Bank Indonesia Depo Facility (DF), Bank Indonesia Time Deposit and Reverse Repo.

d. On December 17, 2024, the Bank received capital deposit fund amounted to Rp 51,875 from JTrust Co., Ltd. Based on OJK's Letter No. S-34/PB.312/2024 dated December 24, 2024, OJK has approved for the recording of capital deposit funds from JTrust Co., Ltd., amounted to Rp 51,875 and in the Bank 's calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) for the position period December 31, 2024 along with the Bank's plan to use instruments in Bank Indonesia Depo Facility (DF), Bank Indonesia Rupiah Securities and/or Bank Indonesia Deposit Certificate.

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2024 dan/*and* 2023	
Penggabungan (*merger*) 3 bank di tahun 2004 menjadi PT Bank Century Intervest Corporation		*Merger of 3 banks in 2004 to become PT Bank Century Intervest Corporation*
Tambahan modal disetor	208.416	*Addition paid-in capital*
Biaya emisi saham	(29.657)	*Share issuance cost*
Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham	6	*Effect of reverse stock split*
Sub-total	178.765	*Sub-total*
Penerimaan dari Penawaran Umum Terbatas - 2021 sebanyak 4.130.257.580 saham dengan harga penawaran Rp 330 (nilai penuh) per saham	1.362.985	*Received from Limited Public Offering - 2021 of 4,130,257,580 shares with par value of Rp 330 (full amount) per share*
Nilai nominal saham yang dicatat sebagai modal disetor atas pengeluaran 4.130.257.580 saham	(413.026)	*Amount recorded as issued and paid-in capital from issuance of 4,130,257,580 shares*
Biaya emisi saham	(3.367)	*Share issuance cost*
Sub-total	946.592	*Sub-total*
Penerimaan dari Penawaran Umum Terbatas - 2022 sebanyak 3.967.539.928 saham dengan harga penawaran Rp 300 (nilai penuh) per saham	1.190.262	*Received from Limited Public Offering - 2022 of 3,967,539,928 shares with par value of Rp 300 (full amount) per share*
Nilai nominal saham yang dicatat sebagai modal disetor atas pengeluaran 3.967.539.928 saham	(396.754)	*Amount recorded as issued and paid-in capital from issuance of 3,967,539,928 shares*
Biaya emisi saham	(3.442)	*Share issuance cost*
Sub-total	790.066	*Sub-total*
Total	**1.915.423**	***Total***

28. CADANGAN UMUM / *28. GENERAL RESERVE*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, cadangan umum sebesar Rp 1.002. Cadangan ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dinyatakan dalam akta No. 8 tanggal 25 Juni 2008 dari Hestyani Hassan, S.H., notaris di Jakarta.

As at December 31, 2024 and 2023, the general reserve amounted to Rp 1,002. The reserve was provided in accordance with the Decision of Annual General Meeting of Shareholders as covered by deed No. 8 dated June 25, 2008 of Hestyani Hassan, S.H., notary in Jakarta.

29. PENDAPATAN BUNGA / *29. INTEREST INCOME*

	2024	2023	
Pinjaman yang diberikan			***Loans***
Kredit modal kerja	1.327.405	1.140.103	*Working capital loans*
Kredit investasi	643.169	468.346	*Investment loans*
Kredit kendaraan bermotor	284.915	203.099	*Vehicle loans*
Pinjaman rekening koran	103.690	82.839	*Current account loans*
Kredit konsumer	66.460	66.667	*Consumer loans*
Kredit pemilikan rumah	21.461	37.660	*Housing loans*
Kredit ekspor impor	-	301	*Export import loans*
Sub-total	2.447.100	1.999.015	*Sub-total*
Efek-efek			***Marketable securities***
Obligasi korporasi dan *Medium Term Notes*	220.115	219.319	*Corporate bonds and Medium Term Notes*
Sertifikat Bank Indonesia	183.948	211.542	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi Pemerintah	74.948	62.544	*Government bonds*
Sub-total	479.011	493.405	*Sub-total*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			***Placements with Bank Indonesia and other banks***
Fasilitas deposito	59.756	-	*Deposit facility*
Interbank call money	19.392	15.014	*Interbank call money*
Giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia	18.238	17.294	*Current accounts with Bank Indonesia and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	679	542	*Current accounts with other banks*
Sub-total	98.065	32.850	*Sub-total*
Total	**3.024.176**	**2.525.270**	***Total***

Jumlah pendapatan bunga dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 38.184 dan Rp 28.260 (Catatan 41).

Total interest income from related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 38,184 and Rp 28,260, respectively (Note 41).

30. BEBAN BUNGA / *30. INTEREST EXPENSES*

	2024	2023	
Deposito berjangka	1.855.153	1.390.610	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	192.810	186.731	*Deposits from other banks*
Giro	85.896	50.182	*Demand deposits*
Tabungan	84.461	84.642	*Savings deposits*
Efek-efek	3	-	*Marketable securities*
Provisi dan komisi	3.723	8.044	*Provision and commission*
Total	**2.222.046**	**1.720.209**	***Total***

Jumlah beban bunga kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 8.342 dan Rp 9.102 (Catatan 41).

Total interest expenses to related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 8,342 and Rp 9,102 (Note 41).

31. KEUNTUNGAN ATAS PENJUALAN EFEK-EFEK - NETO

31. GAIN ON SALE FOR MARKETABLE SECURITIES - NET

	2024	2023	
Surat utang negara	9.862	5.272	*Government promissory notes*
Obligasi korporasi	(2.830)	5.124	*Corporate bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	-	229	*Certificates of Bank Indonesia*
Neto (Catatan 9)	**7.032**	**10.625**	***Net (Note 9)***

32. PENERIMAAN DUKUNGAN OPERASIONAL

Pada tanggal 27 Desember 2024 dan 21 Desember 2023, pemegang saham Bank yaitu JTrust Asia Pte., Ltd., menyetorkan dana masing-masing sebesar Rp 300.000 dan Rp 210.000 untuk mendukung operasional Bank (Catatan 41).

Dukungan operasional yang diberikan merupakan dukungan finansial tanpa syarat yang diberikan untuk membantu Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tanpa kewajiban untuk mengembalikan dana di kemudian hari.

32. RECEIPT OF OPERATIONAL SUPPORT

JTrust Asia Pte., Ltd., the Bank's shareholder, deposited Rp 300,000 and Rp 210,000 on December 27, 2024 and December 21, 2023, respectively, to support the Bank's operational needs (Note 41).

Operational support provided is the unconditional financial support that is provided to aid the Bank in the carry out its operational activities, without any obligation to repay the funds at a later date.

33. UMUM DAN ADMINISTRASI

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE

	2024	2023	
Asuransi dan penjaminan	402.814	380.488	*Insurance and guarantee*
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 16, 17 dan 18)	73.014	69.982	*Depreciation and amortization (Notes 16, 17 and 18)*
Umum	47.386	39.453	*General*
Jasa profesional	36.628	27.145	*Professional fees*
Perbaikan dan pemeliharaan	35.354	38.822	*Repairs and maintenance*
Iuran keanggotaan	22.502	22.859	*Membership*
Iklan dan promosi	20.646	29.507	*Advertising and promotion*
Komunikasi	15.914	12.126	*Communication*
Kebersihan dan keamanan	10.585	12.172	*Cleaning and security*
Transportasi dan perjalanan dinas	9.379	9.158	*Transportation and business traveling*
Pendidikan dan pengembangan	7.056	7.163	*Education and development*
Sewa (Catatan 18)	6.816	6.584	*Rent (Note 18)*
Listrik, gas dan air	4.822	4.755	*Electricity, gas and water*
Cetakan dan alat tulis	3.736	4.336	*Printing and stationery*
Pajak dan izin	1.683	1.601	*Taxes and licenses*
Jamuan	1.622	1.100	*Entertainment*
Lain-lain	1.818	2.615	*Others*
Total	**701.775**	**669.866**	***Total***

34. GAJI DAN TUNJANGAN / *34. SALARIES AND ALLOWANCES*

	2024	2023	
Gaji, upah, pensiun dan tunjangan pajak	264.262	237.418	*Salaries, wages, pension and tax allowance*
Kesejahteraan karyawan	40.893	37.885	*Employees benefits*
THR, cuti dan tunjangan terkait lainnya	16.384	16.621	*THR, annual leave and other related benefits*
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 39)	13.349	13.816	*Post-employment benefits expense (Note 39)*
Lain-lain	25.147	28.099	*Others*
Total	**360.035**	**333.839**	***Total***

35. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - NETO / *35. PROVISION OF IMPAIRMENT LOSSES - NET*

	2024	2023	
Giro pada bank lain (Catatan 7)	(118)	411	*Current accounts with other banks (Note 7)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 8)	24	339	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 8)*
Efek-efek (Catatan 9)	956	(157)	*Marketable securities (Note 9)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 12)	(61.455)	(11.839)	*Loans (Note 12)*
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	1	311	*Acceptance receivables (Note 13)*
Agunan yang diambil alih (Catatan 19)	11.086	(16.471)	*Foreclosed assets (Note 19)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	115	510	*Estimated losses on commitment and contingency*
Neto	**(49.391)**	**(26.896)**	***Net***

36. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL / *36. NON-OPERATING INCOME*

	2024	2023	
Komisi asuransi	2.684	2.611	*Insurance commision*
Komisi notaris	272	-	*Notary commision*
Keuntungan penjualan aset tetap - neto (Catatan 16)	144	76	*Gain on sale of fixed assets - net (Note 16)*
Lain-lain	8.990	12.476	*Others*
Total	**12.090**	**15.163**	***Total***

37. BEBAN NON-OPERASIONAL / *37. NON-OPERATING EXPENSES*

	2024	2023	
Biaya perkara	2.158	12.863	*Legal fees*
Denda dan sanksi	275	1.034	*Fine and penalties*
Rugi penghapusan aset tetap - neto (Catatan 16)	2	26	*Loss on disposal of fixed assets - net (Note 16)*
Lain-lain	1.572	4.302	*Others*
Total	**4.007**	**18.225**	***Total***

38. PERPAJAKAN / *38. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Taxes Payable*

	2024	2023	
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4(2)	38.383	29.037	*Article 4(2)*
Pasal 21	513	4.487	*Article 21*
Pasal 23	426	170	*Article 23*
Pasal 26	2	2	*Article 26*
Modul penerimaan negara, pajak pertambahan nilai, bea materai dan lainnya	38	40	*Government revenue module, value-added tax, stamp duty and others*
Total	**39.362**	**33.736**	***Total***

b. Pajak Penghasilan / *b. Income Tax*

	2024	2023	
Pajak kini	-	-	*Current tax*
Pajak tangguhan	(103.644)	6.092	*Deferred tax*
Manfaat (beban) pajak penghasilan	**(103.644)**	**6.092**	***Income tax benefit (expense)***

38. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***38. TAXATION (continued)***

b. Pajak Penghasilan (lanjutan) / ***b. Income Tax (continued)***

Pajak kini / ***Current tax***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax, as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income, with the estimated taxable income (fiscal loss) of the Bank for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	106.476	21.810	*Profit before income tax*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan - neto	226.539	(73.865)	*Allowance for impairment losses on loans - net*
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan	(12.063)	15.056	*Provision (reversal) of impairment losess on financial assets and non financial assets*
Imbalan pasca kerja	1.585	4.714	*Post-employment benefits*
Penyusutan aset tetap	6.647	2.025	*Depreciation of fixed assets*
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	265	447	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Lain-lain	2	3.888	*Others*
Sub-total	222.975	(47.735)	*Sub-total*
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
Iklan dan promosi	174	183	*Entertainment and promotion*
Representasi	565	625	*Representation*
Biaya pajak dan ijin	841	764	*Tax and license*
Denda	-	8	*Penalties*
Sumbangan	1	1	*Donation*
Lain-lain	544	1.005	*Others*
Sub-total	2.125	2.586	*Sub-total*
Laba kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun berjalan	331.576	(23.339)	*Taxable income (fiscal loss) of the year*
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	(1.438.623)	(1.617.992)	*Accumulated fiscal losses at beginning of the year*
Rugi fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan	140.402	202.708	*Unutilized fiscal loss*
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun	**(966.645)**	**(1.438.623)**	***Accumulated fiscal losses at end of year***

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara manfaat pajak Bank dan manfaat pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku terhadap laba akuntansi sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Current tax (continued)

The reconciliation between the Bank's income tax benefit and the income tax benefit calculated by applying the prevailing tax rate to the accounting profit before income tax is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	106.476	21.810	*Profit before income tax per statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	(23.425)	(4.798)	*Income tax expense based on the prevailing tax rate*
Pajak tangguhan tidak diakui dan penyesuaian atas:			*Unrecognized deferred tax and adjustment on:*
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai pinjaman dan lainnya - neto	(47.400)	16.250	*Provision (reversal of) impairment losses on loans and others - net*
Rugi fiskal	-	(5.134)	*Fiscal loss*
Penyusutan aset tetap	(1.462)	(446)	*Depreciation of fixed assets*
Pengaruh pajak atas beda tetap	(468)	(568)	*Effect of tax on permanent differences*
Penyesuaian atas akumulasi rugi fiskal periode sebelumnya	(30.889)	788	*Adjustment to deferred tax on prior period accumulated fiscal loss*
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	**(103.644)**	**6.092**	***Income tax benefit (expense) - net***

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the Taxation Laws in Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax (DGT) may assess or amend taxes payable within 5 (five) years since the tax becomes due.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rugi fiskal dapat dimanfaatkan melalui kompensasi terhadap laba fiskal dalam masa 5 (lima) tahun sejak terjadinya rugi fiskal dengan rincian sebagai berikut:

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Fiscal losses can be utilized through compensation against future taxable income within 5 (five) years since the fiscal loss incurred are as follows:

	2024	2023	
Rugi fiskal tahun			*Fiscal loss year*
2020	(231.666)	(563.241)	*2020*
2021	(531.091)	(671.494)	*2021*
2022	(180.549)	(180.549)	*2022*
2023	(23.339)	(23.339)	*2023*
Total	**(966.645)**	**(1.438.623)**	***Total***

Ketetapan pajak

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2005 - 2008

Pada tanggal 28 November 2013, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk pajak penghasilan pasal 4(2), 23, 26 dan Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 25.933, Rp 30.352, Rp 29.957 dan Rp 24.020.

Pada tanggal yang sama, Bank juga menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 38, Rp 119, Rp 119 dan Rp 205.

Bank mengirimkan Surat Keberatan tertanggal 25 Februari 2014 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas SKPKB tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 tersebut di atas.

Bank telah membayar seluruh SKPKB dan STP untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 sebesar Rp 110.743 pada tanggal 23 Desember 2013.

Berdasarkan pengucapan putusan tanggal 1 Desember 2016, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan pengajuan banding yang diajukan oleh Bank.

Tax assessments

Tax Assessment Letter 2005 - 2008

On November 28, 2013, the Bank received Tax Assessment Letters regarding underpayment (SKPKB) of income tax article 4(2), 23, 26 and Value-Added Tax for fiscal year 2005, 2006, 2007 and 2008 with a total amounting to Rp 25,933, Rp 30,352, Rp 29,957 and Rp 24,020, respectively.

On the same date, the Bank also received Tax Collection Letter (STP) of Value-Added Tax for fiscal year 2005, 2006, 2007 and 2008 amounting to Rp 38, Rp 119, Rp 119 and Rp 205, respectively.

The Bank sent Tax Objection Letters dated February 25, 2014 to the Directorate General of Tax (DGT) on aforementioned SKPKB for fiscal years 2005 up to 2008.

The Bank has paid all tax assessment letters of SKPKB and STP for fiscal years 2005 up to 2008 amounting to Rp 110,743 on December 23, 2013.

Based on the hearing session on December 1, 2016, the Tax Court decided to grant the Bank's appeal application.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Ketetapan Pajak (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2005 - 2008 (lanjutan)

Berikut ini adalah putusan dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan banding yang diajukan oleh pihak Bank:

Tahun/ *Year*	No. Putusan/ *Verdict No.*	Diterima Bank/ *Received by Bank*	Tanggal Terima/ *Received Date*
2005	78369/PP/M.IIIA/25/2016	23.996	24 Januari/*January 24,* 2017
2006	78370/PP/M.IIIA/25/2016	12.072	17 Februari/*February 17*, 2017
2007	78371/PP/M.IIIA/25/2016	8.441	17 Februari/*February 17*, 2017
2008	78372/PP/M.IIIA/25/2016	15.916	24 Januari/*January 24,* 2017
	Total	**60.425**	

Pada tanggal 25 Juli 2019, Bank menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktur Jenderal Pajak telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung mengenai Permohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) untuk putusan Pengadilan Pajak dibawah ini:

Masa Pajak/ *Tax Period*	No. Putusan/ *Verdict No.*
Desember/*December* 2005	78369/PP/M.IIIA/25.2016
Desember/*December* 2006	78370/PP/M.IIIA/25.2016
Desember/*December* 2007	78371/PP/M.IIIA/25.2016
Desember/*December* 2008	78372/PP/M.IIIA/25.2016

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Bank telah menyampaikan Surat Permohonan Pengiriman Kembali Salinan Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2005 - 2008 ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, Bank telah menerima Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 1393/B/PK/Pjk/2021 untuk masa pajak Desember 2005.

Pada tanggal 1 Maret 2022 Bank telah menerima Salinan Keputusan Peninjauan Kembali No. 465/B/PK/Pjk/2021 untuk masa pajak Desember 2006, No. 466/B/PK/Pjk/2021 untuk masa pajak Desember 2007 dan No. 3852/B/PK/Pjk/2020 untuk masa pajak Desember 2008.

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax assessments (continued)

Tax Assessment Letter 2005 - 2008 (continued)

The following is the Tax Court's decision granting an appeal filed by the Bank:

On July 25, 2019, the Bank received a notification from the tax Court that the Director General of Tax had filed a Request for Judicial Review to the Supreme Court on Tax Court regarding Appeals concerning the Final Income Tax article 4 (2) for the Tax Court's decision below:

On October 7, 2021, the Bank has submitted a Letter of Request for Sending of a Copy of the Decision for Judicial Review of Fiscal Year 2005 - 2008 to the Tax Court.

On October 22, 2021, the Bank has received a Copy of Review Decision No. 1393/B/PK/Pjk/ 2021 for the December 2005 tax period.

On March 1, 2022, the Bank has received a Copy of The Review Decision No. 465/B/PK/Pjk/2021 for the tax period of December 2006, No. 466/B/PK/Pjk/2021 for the tax period of December 2007 and No. 3852/B/PK/Pjk/2020 for the tax period of December 2008.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Ketetapan pajak (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2005 - 2008 (lanjutan)

Dengan dikeluarkannya hasil Keputusan Peninjauan Kembali tersebut di atas, di mana pihak DJP mengalami kekalahan. Maka tidak terdapat kewajiban Bank untuk mengembalikan pajak tahun 2005 - 2008 yang telah diterima oleh Bank di tahun 2017.

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2015

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Bank diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) untuk tahun 2015. Pemeriksa menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) tertanggal 17 Desember 2019 untuk semua jenis pajak sebesar Rp 27.861. Bank tidak menyetujui sebagian besar hasil keputusan di dalam SKPKB dan STP tersebut.

Dalam SKPN, rugi fiskal direvisi menjadi Rp 217.165 dan Bank telah menyesuaikan hasil pemeriksaan itu.

Pada tanggal 20 Februari 2020, Bank telah mengajukan Surat Keberatan Pajak atas SKPKB sebesar Rp 21.117. Sedangkan atas STP sebesar Rp 1.764, Bank tidak dapat mengajukan keberatan maupun banding berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal 25 Januari 2021, Bank telah menerima 9 (sembilan) Surat Keputusan Keberatan tertanggal 18 Januari 2021 dan 19 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2021, Bank juga telah menerima 2 (dua) Surat Keputusan Keberatan tertanggal 11 Februari 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan tersebut, DJP hanya menyetujui sebagian keberatan sebesar Rp 6.530 dan Bank telah membayar 1 SKPKB yang ditolak sebesar Rp 55.

Pada tanggal 16 April 2021, Bank telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terkait keberatan pajak yang ditolak oleh DJP sebesar Rp 14.532 tersebut (Catatan 20).

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax assessment (continued)

Tax Assessment Letter 2005 - 2008 (continued)

With the issuance of the Judicial Review Decision in which the DGT lose, there is no obligation of the Bank to return the taxes for 2005 - 2008 that have been received by the Bank in 2017.

Tax Assessment Letter Year 2015

On October 30, 2018, the Bank was reviewed by publicly listed company tax service office (KPP PMB) for fiscal year 2015. The reviewer issued Notice of Tax Underpayment Assesment (SKPKB), Notice of Tax Collection (STP) and Notice of Nil Tax Assesment (SKPN) dated December 17, 2019 for all taxes amounting to Rp 27,861. The Bank also disputes most of the items contained in the SKPKB and STP.

In the SKPN, the fiscal loss has been revised to Rp 217,165 and the Bank has adjusted in accordance with the result of tax assessment.

On February 20, 2020, the Bank has submitted the Tax Objection Letters on SKPKB amounting to Rp 21,117. Meanwhile, for the STP of Rp 1,764, the Bank cannot file an objection or appeal based on the applicable tax regulations. On January 25, 2021, the Bank has received 9 (nine) Objection Decrees dated January 18, 2021 and January 19, 2021. Then on February 16, 2021, the Bank has also received 2 (two) Objection Decrees dated February 11, 2021. Based on the objection decision letter, DGT only approved the objection partially amounted of Rp 6,530 and the Bank has paid for 1 SKPKB that rejected by DGT amounted of Rp 55.

On April 16, 2021, the Bank has submitted an appeal to the Tax Court regarding the tax objection that was rejected by the DGT for the amount of Rp 14,532 (Note 20).

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Ketetapan pajak (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 23 Mei 2022, Bank memperoleh hasil keputusan Surat Tagihan Pajak (STP) No. 00001/110/15/054/22 untuk masa pajak Desember 2015, dimana Bank harus membayar tagihan pajak sebesar Rp 56.

Bank telah menerima 6 (enam) Putusan Banding pada tanggal 4 April 2024.

Berdasarkan pembacaan putusan 25 Maret 2024, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan pengajuan banding yang diajukan oleh bank.

Berikut ini adalah putusan dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan banding yang diajukan oleh pihak Bank:

Tahun/ *Year*	No. Putusan/ *Verdict No.*	Tanggal Terima/ *Received Date*
2015	004041.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
2015	004042.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
2015	004043.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
2015	004044.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
2015	004045.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
2015	004046.13/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*

Pada tanggal 3 Juli 2024, Bank menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktur Jenderal Pajak telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung mengenai Permohonan Banding atas Pajak Pertambahan Nilai untuk putusan Pengadilan Pajak dibawah ini:

Masa Pajak/ *Tax Period*	No. Putusan/ *Verdict No.*	Tanggal Terima/ *Received Date*
Februari/*February* 2015	004041.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
Juni/*June* 2015	004042.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
Oktober/*October* 2015	004043.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*
November/*November* 2015	004044.16/2021/PP/M.XA Tahun 2024	4 April/*April 4, 2024*

Sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, Bank masih menjalani proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax assessment (continued)

Tax Assessment Letter Year 2015 (continued)

On May 23, 2022, the Bank receipt Notice of Tax Collection (STP) No. 00001/110/15/054/22 in December 2015 tax period, which the Bank must to pays the tax bill amounting Rp 56.

The Bank has received 6 (six) Appeal Decisions on April 4, 2024.

Based on the hearing session on March 25, 2024, the Tax Court decided to grant the Bank's appeal application.

The following is the Tax Court's decision granting an appeal filed by the Bank:

On July 3, 2024, the Bank received a notification from the tax Court that the Director General of Tax had filed a Request for Judicial Review to the Supreme Court on Tax Court regarding Appeals concerning Value Added Tax for the Tax Court's decision below:

Until these financial statements were made, the Bank is still undergoing a judicial review process at the Supreme Court.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Ketetapan pajak (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2021

Pada tanggal 12 September 2023, Bank diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) untuk tahun 2021 dan selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan tim anggota pemeriksa pajak.

Pemeriksa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) tertanggal 27 September 2024 untuk semua jenis pajak dengan total sebesar Rp 2.294. Pada tanggal 25 Oktober 2024, Bank telah membayar seluruh SKPKB dan STP tahun 2021 sebesar Rp 2.294. Namun Bank tidak menyetujui 1 (satu) item yang tercantum dalam SKPKB dan STP. Pada tanggal 20 Desember 2024, Bank telah mengajukan Surat Keberatan Pajak atas SKPKB sebesar Rp 2.144 (Catatan 20).

Dalam SKPN, rugi fiskal direvisi menjadi Rp 531.091 dan Bank telah menyesuaikan hasil pemeriksaan.

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax assessment (continued)

Tax Assessment Letter Year 2021

On September 12, 2023, the Bank was reviewed by publicly listed company tax service office (KPP PMB) for fiscal year 2021 and subsequently on October 6, 2023, the Bank received an Audit Order for Changes by the tax auditor team.

The tax auditor issued Letter of Tax Underpayment Assessment (SKPKB), Tax Collection Letter (STP) and Letter of Nil Tax Assessment (SKPN) dated September 27, 2024 for all taxes totally amounting to Rp 2,294. As at October 25, 2024, the Bank has paid all tax assessment letters SKPKB and STP for fiscal years 2021 in amounting to Rp 2,294. The Bank did not agree with 1 (one) item contained in the SKPKB and STP. On December 20, 2024, the Bank has submitted the Tax Objection Letter on SKPKB amounting to Rp 2,144 (Note 20).

In SKPN, the fiscal loss has been revised to Rp 531,091 and the Bank has adjusted in accordance with the result of tax assessment.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets***
Rugi fiskal	316.497	(103.835)	-	212.662	*Fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	4.865	349	31	5.245	*Employee benefits liability*
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Catatan 9f)	2.297	-	5.690	7.987	*Unrealized losses on changes in fair value of securities measured at fair value through comprehensive income (Note 9f)*
Penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai	797	(216)	-	581	*Allowance for impairment losses*
Penyusutan dan beban bunga aset hak-guna	135	58	-	193	*Depreciation and interest expense of rights-of-use assets*
Neto	**324.591**	**(103.644)**	**5.721**	**226.668**	***Net***

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

38. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Rugi fiskal	311.362	5.135	-	316.497	*Fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	4.237	1.037	(409)	4.865	*Employee benefits liability*
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Catatan 9f)	3.427	-	(1.130)	2.297	*Unrealized losses (gain) on changes in fair value of securities measured at fair value through comprehensive income (Note 9f)*
Penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai	976	(179)	-	797	*Allowance for impairment losses*
Penyusutan dan beban bunga aset hak-guna	37	98	-	135	*Depreciation and interest expense of rights-of-use assets*
Neto	**320.039**	**6.091**	**(1.539)**	**324.591**	***Net***

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. Management believes that the deferred tax assets can be utilized in the future.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank telah melaporkan hasil dari perhitungan rekonsiliasi pajak Badan atas tahun perpajakan 2023 kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perhitungan rekonsiliasi pajak badan yang telah dibuat dan telah sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

As at December 31, 2024, the Bank has reported the results of the calculation of corporate tax reconciliation for the tax years 2023 to the Directorate General of Taxes in accordance with the calculation of corporate tax reconciliation that has been made and has complied with Regulation Number VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank telah menghitung dan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perjanjian kerja bersama Bank dan PSAK 219, "Imbalan Kerja". Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh Aktuaris Independen, KKA Azwir Arifin dan Rekan, dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 Januari 2025 dan 12 Januari 2024. Bank menyelenggarakan dana pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Iuran pensiun ditanggung oleh Bank. Pendanaan tersebut diperhitungkan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja.

Imbalan kerja adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Bank has calculated and recorded the employee benefits liability based on the Bank's collective labor agreement and PSAK 219, "Employee Benefits". The employee benefits liability as at December 31, 2024 and 2023 was calculated by an Independent Actuary, KKA Azwir Arifin and Partners, on its report dated January 8, 2025 and January 12, 2024, respectively. The Bank has pension fund covering substantially all of its qualified permanent employees which is managed by Financial Institution Pension Fund Sinarmas MSIG. Retirement contributions are funded by the Bank. Such funding is included in the employee benefits liability calculation.

The employee benefits are as follows:

	2024	2023	
Kewajiban posisi keuangan untuk:			*Financial position obligations for:*
Imbalan pensiun	9.754	10.084	*Pension benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	14.080	12.028	*Other long-term service benefits*
Total	**23.834**	**22.112**	***Total***

a. Beban Imbalan Kerja

a. Employee Benefits Expense

	2024	2023	
Imbalan pensiun			*Pension benefits*
Biaya jasa kini	12.815	13.213	*Current service cost*
Biaya bunga neto	534	603	*Net interest cost*
Sub-total	13.349	13.816	*Sub-total*
Manfaat jangka panjang lainnya	(2.052)	(981)	*Other long-term benefits*
Total	**11.297**	**12.835**	***Total***

Biaya imbalan kerja diakui sebagai akun gaji dan tunjangan (Catatan 34).

Employee benefits expense is recognized in salaries and allowances account (Note 34).

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

b. Liabilitas Imbalan Kerja / *b. Employee Benefits Liability*

	2024	2023	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	114.691	115.336	*Present value of defined benefits obligation*
Nilai wajar aset	(90.857)	(93.224)	*Fair value of plan assets*
Neto	**23.834**	**22.112**	***Net***

Perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The changes in the present value of defined benefits obligation are as follows:

	2024	2023	
Imbalan pensiun			*Pension benefits*
Saldo awal tahun	103.308	95.953	*Balance at beginning of year*
Biaya jasa kini	12.815	13.213	*Current service cost*
Biaya bunga	7.004	7.053	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(19.121)	(13.190)	*Benefits paid*
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Dampak perubahan asumsi keuangan dan demografik	(2.042)	1.231	*Effect of changes in financial and demographic assumptions*
Dampak penyesuaian pengalaman	(1.353)	(952)	*Effect of experience adjustments*
Saldo akhir tahun	100.611	103.308	*Balance at end of year*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	14.080	12.028	*Other long-term service benefits*
Total	**114.691**	**115.336**	***Total***

Perubahan nilai wajar aset program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The changes in the fair value of defined benefit plan assets are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	93.224	87.743	*Balance at beginning of year*
Kontribusi pemberi kerja	13.816	10.083	*Contribution from the Bank*
Pendapatan bunga	6.470	6.449	*Interest income*
Pembayaran manfaat	(19.121)	(13.190)	*Benefits paid*
Pengukuran kembali imbal hasil atas aset program	(3.532)	2.139	*Remeasurement of return on plan assets*
Saldo akhir tahun	**90.857**	**93.224**	***Balance at end of year***

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

Perubahan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The changes in employee benefits liability are as follows:

	2024	2023	
Imbalan pensiun			*Pension benefits*
Saldo awal tahun	10.084	8.210	*Balance at beginning of year*
Biaya manfaat karyawan	13.349	13.816	*Employee benefits expense*
Kontribusi pemberi kerja	(13.816)	(10.083)	*Contribution from the Bank*
Pengukuran kembali	137	(1.859)	*Remeasurements*
Saldo akhir tahun	9.754	10.084	*Balance at end of year*
Manfaat jangka panjang lainnya	14.080	12.028	*Other long-term benefits*
Total	**23.834**	**22.112**	***Total***

Perubahan pengukuran kembali adalah sebagai berikut:

The changes in remeasurement are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	11.512	13.371	*Balance at beginning of year*
Pengukuran kembali tahun berjalan	137	(1.859)	*Remeasurements during the year*
Saldo akhir tahun	**11.649**	**11.512**	***Balance at end of year***

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used to determine employment benefits liability as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Metode perhitungan	Metode Proyeksi Unit Kredit/ *Projected unit credit method*	Metode Proyeksi Unit Kredit/ *Projected Unit Credit Method*	*Actuarial method*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat mortalitas	TMI IV - 2019	TMI IV / 2019	*Mortality rate*
Tingkat kenaikan gaji	3,35% per tahun/*per annum*	3,35% per tahun/*per annum*	*Salary increase rate*
Tingkat diskonto	6,88% - 7,13% per tahun/*per annum*	6,37% - 7,10% per tahun/*per annum*	*Discount rate*
Tingkat pengunduran diri	18 - 29 = 15% 30 - 39 = 10% 40 - 44 = 7,5% 45 - 49 = 5% 50 - 55 = 1%	18 - 29 = 15% 30 - 39 = 10% 40 - 44 = 7,5% 45 - 49 = 5% 50 - 56 = 1%	*Resignation rate*

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	17.402	10.320	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	74.279	81.034	*1 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	584.014	573.603	*More than 5 years*
Total	**675.695**	**664.957**	***Total***

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban manfaat pasti di akhir tahun laporan adalah 15,57 tahun dan 15,39 tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The weighted average duration of the defined benefit plan obligations at the end of reporting year is 15.57 years and 15.39 years as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

Bank memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 24 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan Pasal 185(b) Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

The Bank provides benefits for its employees who has reached the retirement age of 24 based on the provisions of Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185(b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja). The employee benefits liability is unfunded.

Tabel berikut menunjukkan analisis sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table demonstrates the sensitivity analysis to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, to the employee benefits liability of the Bank as at December 31, 2024 and 2023:

	100 basis poin/ ***100 basis point***		
	Kenaikan/ ***Increase***	**Penurunan/** ***Decrease***	
2024			***2024***
Tingkat diskonto	7,88% - 8,13%	5,88% - 6,13%	*Discount rate*
Dampak manfaat liabilitas imbalan kerja	(4.800)	5.266	*Impact on employee benefits liability*
Tingkat kenaikan gaji	4,35%	2,35%	*Salary increase rate*
Dampak manfaat liabilitas imbalan kerja	5.880	(5.453)	*Impact on employee benefits liability*
2023			***2023***
Tingkat diskonto	7,37% - 8,10%	5,37% - 6,10%	*Discount rate*
Dampak manfaat liabilitas imbalan kerja	(4.774)	5.235	*Impact on employee benefits liability*
Tingkat kenaikan gaji	4,35%	2,35%	*Salary increase rate*
Dampak manfaat liabilitas imbalan kerja	5.822	(5.402)	*Impact on employee benefits liability*

40. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan.

40. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing net profit for the year by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

	2024	2023	
Laba neto untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian	2.832	27.902	*Net gain for the computation of the basic/diluted earnings per share*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa - Seri A, B dan C	18.109.922.009 *)	18.109.922.009 *)	*Weighted average number of outstanding common shares - Series A, B and C*
Laba per saham dasar/dilusian (nilai penuh)	**0,16**	**1,54**	***Basic/diluted earnings per share (full amount)***

*) Nilai penuh/*Full amount*

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar telah memperhitungkan efek retroaktif pemecahan saham.

The weighted average number of shares is after considering the retroactive effect of stock split.

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali untuk pinjaman yang diberikan kepada karyawan kunci.

Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan atau perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3ac.

41. RELATED PARTIES INFORMATION

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, with the exception of loans granted to the key employees.

Nature of Relationship

Related parties are companies or individuals who have ownership or management relationship directly or indirectly with the Bank as stated in Note 3ac.

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
J Trust Co., Ltd.	Pemegang saham/ *Shareholder*	Giro, tabungan dan deposito berjangka/*Demand deposits, saving deposits and time deposit*
J Trust Asia Pte., Ltd.	Pemegang saham/ *Shareholder*	Giro/*Demand deposit*
PT JTrust Investments Indonesia	Pemegang saham/ *Shareholder*	Pinjaman yang diberikan, giro, tabungan dan deposito berjangka/ *Loans, demand deposits, saving deposits and time deposits*

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT JTrust Consulting Indonesia	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Giro, tabungan dan biaya konsultan/*Demand deposits, saving deposits and consultan fee*
TA Asset Management Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Giro/*Demand deposits*
Nihon Hoshou Co., Ltd.	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Giro dan tabungan/*Demand deposits and savings deposits*
PT Turnaround Asset Indonesia	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pinjaman yang diberikan, giro, tabungan dan deposito berjangka/ *Loans, demand deposits, saving deposits and time deposit*
Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Cabang, serta keluarga sesuai ketentuan yang berlaku/*Commissioner, Directors, Head of Divisions, Head of Regions, Branch Managers and their families in accordance with the prevailing procedure*	Manajemen dan Karyawan Kunci Bank/ *Management and Key Employees of the Bank*	Pinjaman yang diberikan, giro, tabungan dan deposito berjangka/ *Loans, demand deposits, savings deposits and time deposit*

Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Transaction with Related Parties

Saldo aset dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balance of assets with related parties are as follows:

	2024		2023		
	Total	Persentase terhadap total aset/ *Percentage to total assets*	Total	Persentase terhadap total aset/ *Percentage to total assets*	
Aset					***Assets***
Pinjaman yang diberikan (Catatan 12)					*Loans (Note 12)*
PT JTrust Investments Indonesia	331.096	0,82%	366.929	0,93%	*PT JTrust Investments Indonesia*
PT Turnaround Aset Indonesia	18.264	0,05%	6.757	0,02%	*PT Turnaround Aset Indonesia*
Karyawan kunci	1.597	0,00%	2.225	0,01%	*Key employees*
Total	350.957	0,87%	375.911	0,96%	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(349)	0,00%	(432)	0,00%	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**350.608**	**0,87%**	**375.479**	**0,96%**	***Net***

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi Dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaction with Related Parties (continued)

Saldo liabilitas dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The expense in relation to liabilities with related parties are as follows:

	2024		2023		
	Total	Persentase terhadap total liabilitas/ *Percentage to total liabilities*	Total	Persentase terhadap total liabilitas/ *Percentage to total liabilities*	
Liabilitas					***Liabilities***
Simpanan nasabah (Catatan 22)					*Deposits from customers (Note 22)*
Giro					*Demand deposits*
J Trust Asia Pte., Ltd.	8.197	0,02%	85.794	0,24%	*J Trust Asia Pte., Ltd.*
J Trust Co., Ltd.	6.838	0,02%	12.032	0,03%	*J Trust Co., Ltd.*
PT JTrust Investments Indonesia	5.595	0,02%	5.190	0,01%	*PT JTrust Investments Indonesia*
Karyawan kunci	4.606	0,01%	6.033	0,02%	*Key employees*
PT JTrust Consulting Indonesia	601	0,00%	369	0,00%	*PT JTrust Consulting Indonesia*
TA Asset Management Co.,Ltd.	285	0,00%	418	0,00%	*TA Asset Management Co.,Ltd.*
Nihon Hoshou Co.,Ltd.	49	0,00%	50	0,00%	*Nihon Hoshou Co.,Ltd.*
PT Turnaround Asset Indonesia	9	0,00%	9	0,00%	*PT Turnaround Asset Indonesia*
PT JTrust Olympindo Multi Finance	-	0,00%	3	0,00%	*PT JTrust Olympindo Multi Finance*
Tabungan					*Savings deposits*
J Trust Co., Ltd.	31.698	0,09%	17.439	0,05%	*J Trust Co., Ltd.*
PT JTrust Investments Indonesia	3.760	0,01%	786	0,00%	*PT JTrust Investments Indonesia*
Karyawan kunci	2.418	0,01%	2.348	0,01%	*Key employees*
PT JTrust Consulting Indonesia	2.009	0,01%	2.173	0,01%	*PT JTrust Consulting Indonesia*
Nihon Hoshou Co.,Ltd.	206	0,00%	200	0,00%	*Nihon Hoshou Co.,Ltd.*
PT Turnaround Asset Indonesia	97	0,00%	419	0,00%	*PT Turnaround Asset Indonesia*
Deposito berjangka					*Time deposits*
J Trust Co., Ltd.	129.030	0,35%	134.880	0,38%	*J Trust Co., Ltd.*
Karyawan kunci	47.898	0,13%	20.054	0,06%	*Key employees*
PT JTrust Investments Indonesia	5.000	0,01%	40.517	0,11%	*PT JTrust Investments Indonesia*
PT Turnaround Asset Indonesia	2.000	0,01%	2.000	0,01%	*PT Turnaround Asset Indonesia*
Total	**250.296**	**0,69%**	**330.714**	**0,93%**	***Total***

Saldo pendapatan dan beban dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balance of income and expenses with related parties are as follows:

	2024		2023		
	Total	Persentase terhadap total pendapatan atau beban/ *Percentage to total income or expense*	Total	Persentase terhadap total pendapatan atau beban/ *Percentage to total income or expense*	
Pendapatan bunga (Catatan 29)	38.184	1,26%	28.260	1,12%	*Interest income (Note 29)*
Beban bunga (Catatan 30)	8.342	0,38%	9.102	0,53%	*Interest expenses (Note 30)*
Pendapatan operasional lainnya (Catatan 32)	300.000	72,36%	210.000	82,10%	*Other income from operations (Note 32)*
Biaya konsultan (Catatan 33)	20.633	1,85%	14.807	1,43%	*Consultant expense (Note 33)*

Seluruh saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

All transactions with related parties have been disclosed in notes to the financial statements.

42. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

42. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	2024	2023	
Aset			***Assets***
Kas (Catatan 5)	104.561	91.834	*Cash (Note 5)*
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 6)	116.804	121.408	*Current accounts with Bank Indonesia (Note 6)*
Giro pada bank lain (Catatan 7)	549.595	501.546	*Current accounts with other banks (Note 7)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 8)	321.941	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 8)*
Efek-efek (Catatan 9)	28.517	27.766	*Marketable securities (Note 9)*
Tagihan derivatif (Catatan 11)	4.987	18.906	*Derivative receivables (Note 11)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 12)	2.907.514	3.071.034	*Loans (Note 12)*
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	-	1.222	*Acceptance receivables (Note 13)*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 14)	10.719	19.610	*Accrued interest income (Note 14)*
Aset lain-lain	53.478	59.947	*Other assets*
Sub-total	4.098.116	3.913.273	*Sub-total*
Liabilitas			***Liabilities***
Liabilitas derivatif (Catatan 11)	7.745	343	*Derivative payables (Note 11)*
Liabilitas akseptasi (Catatan 13)	-	1.222	*Acceptance payables (Note 13)*
Liabilitas segera (Catatan 21)	764	1.179	*Obligations due immediately (Note 21)*
Simpanan nasabah (Catatan 22)	2.564.661	2.278.017	*Deposits from customers (Note 22)*
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 24)	7.339	4.211	*Accrued interest expenses (Note 24)*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 25)	156	233	*Accrued expenses and other liabilities (Note 25)*
Sub-total	2.580.665	2.285.205	*Sub-total*
Neto	**1.517.451**	**1.628.068**	***Net***

43. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

a. The Bank has outstanding commitments and contingent receivables and liabilities as follows:

	2024	2023	
Komitmen			***Commitments***
Tagihan komitmen			***Commitment receivables***
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	366.822	261.784	*Current position of buying spot and derivative*
Liabilitas komitmen			***Commitment liabilities***
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1.793.211	1.806.373	*Current position of selling spot and derivatives*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	436.628	314.572	*Unused loan facilities*
Letter of Credit (L/C) yang masih beredar	29.633	2.805	*Outstanding irrevocable Letter of Credit (L/C)*
Sub-total	2.259.472	2.123.750	*Sub-total*
Liabilitas komitmen - neto	**(1.892.650)**	**(1.861.966)**	***Commitment liabilities - net***
Kontinjensi			***Contingencies***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	91.760	19.090	*Interest receivable on non-performing assets*
Pinjaman yang diberikan	69.527	69.185	*Loans*
Sub-total	161.287	88.275	*Sub-total*
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Bank garansi yang diterbitkan	126.559	173.384	*Bank guarantees issued*
Tagihan (liabilitas) kontinjensi - neto	**34.728**	**(85.109)**	***Contingent receivables (liabilities) - net***

b. Jangka waktu rata-rata L/C dan bank garansi adalah antara 1 (satu) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.

b. The average period of L/C and bank guarantees is within 1 (one) month up to 12 (twelve) months.

c. Penjualan tunai mata uang asing yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

c. Unsettled spot of foreign currency sale transactions at the reporting date are as follows:

	2024	2023	
Penjualan tunai mata uang asing			***Sale of foreign currency***
Forward			***Forward***
Dolar Amerika Serikat	1.591.865	1.801.753	*United States Dollar*
Spot			***Spot***
Dolar Amerika Serikat	201.346	4.620	*United States Dollar*
Total	**1.793.211**	**1.806.373**	***Total***

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI

Informasi segmen dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas kinerjanya. Seluruh informasi segmen yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan.

Informasi segmen pada Bank mempertimbangkan aktivitas bisnis dan industri, berdasarkan segmen usaha dan geografis.

Bank mempertimbangkan pendanaan ritel, pinjaman dan ekspor impor, serta *treasury* sebagai informasi segmen atas segmen usaha.

Pendanaan ritel atas segmen usaha merupakan pendanaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah ritel dalam skala segmen kecil, sedang dan konsumen.

Pinjaman dan ekspor impor memperoleh pendapatan dari:

Pendapatan dan beban Bank atas pinjaman yang diberikan yang didasarkan atas penggunaannya yaitu kredit modal kerja, investasi dan konsumen. Pendapatan dan beban Bank atas pinjaman yang diberikan paling besar bersumber dari pinjaman yang diberikan untuk modal kerja baik dalam bentuk Kredit Angsuran Berjangka (KAB), Kredit Atas Permintaan (KAP) dan Kredit Rekening Koran (KRK).

Pendapatan dan beban ekspor impor yang diperoleh berasal dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Wesel Ekspor Impor dan *Letter of Credit* (L/C).

Pendapatan dan beban yang berasal dari *treasury* diperoleh dari efek-efek pendapatan tetap dan transaksi valuta asing.

Bank mempertimbangkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Kalimantan sebagai segmen geografis.

44. OPERATING SEGMENT INFORMATION

Segments information is reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assessing its performance. All segments information used by the Bank meets the definition of a reportable segment.

Segment information on the Bank considers the business activity and industry, based on business and geographical segments.

The Bank considers the retail funding, loan and export import and treasury as the segment information on business segments.

Retail funding on business segment constitutes funding provided by the Bank to retail customers on a segment scale small, medium and consumers.

Loan and export import earn its revenues from the following:

Revenues and expenses on Bank loans, which are based on the usage are working capital loan, investment and consumers. Sources of revenue and expenses on bank loans mostly come from the loans for working capital in the form of Installment Loans (KAB), Demand Loans (KAP) and Current Accounts Loans (KRK).

Export import revenues and expenses are derived from Domestic Letter of Credit (SKBDN), Export Import Notes and Letter of Credit (L/C).

Treasury derives its revenue and expenses from fixed income marketable securities and foreign exchange transactions.

The Bank considers the areas such as Jakarta, Java, Sumatera, Sulawesi, Bali and Kalimantan as geographical segments.

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

a. Segmen Usaha

Untuk tujuan pelaporan manajemen, segmen usaha Bank dibagi menjadi pendanaan retail, pinjaman dan ekspor impor dan *treasury*. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Bank.

44. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Business Segment

The details outlined below are business segment information of the Bank based on business activities consisting of retail funding, loans and export import and treasury. The Bank used this classification as the basis of its primary segment report.

	2024				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	**Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import***	***Treasury***	**Total**	
Pendapatan					***Income***
Pendapatan bunga (Catatan 29)	98.065	2.447.100	479.011	3.024.176	*Interest income (Note 29)*
Pendapatan operasional lainnya	312.848	61.875	39.850	414.573	*Other operating income*
Total	410.913	2.508.975	518.861	3.438.749	*Total*
Beban					***Expenses***
Beban bunga (Catatan 30)	(2.218.320)	(3.723)	(3)	(2.222.046)	*Interest expenses (Note 30)*
Beban operasional lainnya	(720.941)	(397.201)	(168)	(1.118.310)	*Other operating expenses*
Total	(2.939.261)	(400.924)	(171)	(3.340.356)	*Total*
Pendapatan (beban) segmen - neto	(2.528.348)	2.108.051	518.690	98.393	*Income (expenses) of segment - net*
Pendapatan non-operasional (Catatan 36)				12.090	*Non-operating income (Note 36)*
Beban non-operasional (Catatan 37)				(4.007)	*Non-operating expenses (Note 37)*
Laba sebelum pajak penghasilan				106.476	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan (Catatan 38b)				(103.644)	*Income tax expense (Note 38b)*
Laba tahun berjalan				**2.832**	***Profit for the year***
Total aset				40.258.696	*Total assets*
Persentase dari total aset				0,01%	*Percentage to total assets*
Total liabilitas				36.464.540	*Total liabilities*
Persentase dari total liabilitas				0,01%	*Percentage to total liabilities*

	2024				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	**Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import***	***Treasury***	**Total**	
Aset					***Assets***
Aset segmen	3.230.059	26.573.440	9.645.028	39.448.527	*Segment assets*
Aset yang belum dialokasikan				810.169	*Unallocated assets*
Total aset				**40.258.696**	***Total assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segmen	36.219.084	17.592	203.930	36.440.606	*Segment liabilities*
Liabilitas yang belum dialokasikan				23.934	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**36.464.540**	***Total liabilities***

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

44. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Segmen Usaha (lanjutan)

a. Business Segment (continued)

	2023				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	**Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import***	***Treasury***	**Total**	
Pendapatan					***Income***
Pendapatan bunga (Catatan 29)	32.850	1.999.015	493.405	2.525.270	*Interest income (Note 29)*
Pendapatan operasional lainnya	220.034	18.933	16.833	255.800	*Other operating income*
Total	252.884	2.017.948	510.238	2.781.070	*Total*
Beban					***Expenses***
Beban bunga (Catatan 30)	(1.712.165)	(8.044)	-	(1.720.209)	*Interest expenses (Note 30)*
Beban operasional lainnya	(528.020)	(109.401)	(398.568)	(1.035.989)	*Other operating expenses*
Total	(2.240.185)	(117.445)	(398.568)	(2.756.198)	*Total*
Pendapatan (beban) segmen - neto	(1.987.301)	1.900.503	111.670	24.872	*Income (expenses) of segment - net*
Pendapatan non-operasional (Catatan 36)				15.163	*Non-operating income (Note 36)*
Beban non-operasional (Catatan 37)				(18.225)	*Non-operating expenses (Note 37)*
Laba sebelum pajak penghasilan				21.810	*Profit before income tax*
Manfaat pajak penghasilan (Catatan 38b)				6.092	*Income tax benefit (Note 38b)*
Laba periode berjalan				**27.902**	***Profit for the period***
Total aset				39.234.312	*Total assets*
Persentase dari total aset				0,07%	*Percentage to total assets*
Total liabilitas				35.474.581	*Total liabilities*
Persentase dari total liabilitas				0,08%	*Percentage to total liabilities*

	2023				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	**Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import***	***Treasury***	**Total**	
Aset					***Assets***
Aset segmen	3.162.731	24.077.075	11.282.385	38.522.191	*Segment assets*
Aset yang belum dialokasikan				802.121	*Unallocated assets*
Total aset				**39.324.312**	***Total assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segmen	32.218.385	12.622	3.221.383	35.452.390	*Segment liabilities*
Liabilitas yang belum dialokasikan				22.191	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**35.474.581**	***Total liabilities***

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

b. Segmen Geografis

Informasi segmen geografis adalah sebagai berikut:

44. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Geographical Segment

The geographical segment information is as follows:

	2024							
Keterangan	Jakarta	Jawa/*Java*	Sumatera	Sulawesi	Bali	Kalimantan	Total	*Description*
Pendapatan:								***Income:***
Pendapatan bunga dan operasional lainnya	2.616.702	599.138	170.038	17.980	15.921	18.970	3.438.749	*Interest income and other operating income*
Beban:								***Expenses:***
Beban bunga dan operasional lainnya	(2.257.759)	(576.590)	(351.683)	(39.293)	(54.368)	(60.663)	(3.340.356)	*Interest and other operating expenses*
Laba/rugi operasional	**358.943**	**22.548**	**(181.645)**	**(21.313)**	**(38.447)**	**(41.693)**	**98.393**	***Profit/loss from operations***
Laba/rugi tahun berjalan*	**365.343**	**23.160**	**(180.778)**	**(21.204)**	**(38.450)**	**(41.595)**	**106.476**	***Profit/loss for the year****
Total aset*	**31.881.836**	**5.857.953**	**1.726.090**	**211.954**	**188.001**	**166.194**	**40.032.028**	***Total assets****

	2023							
Keterangan	Jakarta	Jawa/*Java*	Sumatera	Sulawesi	Bali	Kalimantan	Total	*Description*
Pendapatan:								***Income:***
Pendapatan bunga dan operasional lainnya	2.199.571	409.283	127.057	10.950	13.148	21.061	2.781.070	*Interest income and other operating income*
Beban:								***Expenses:***
Beban bunga dan operasional lainnya	(1.813.729)	(514.545)	(293.439)	(22.443)	(65.364)	(46.678)	(2.756.198)	*Interest and other operating expenses*
Laba/rugi operasional	**385.842**	**(105.262)**	**(166.382)**	**(11.493)**	**(52.216)**	**(25.617)**	**24.872**	***Profit/loss from operations***
Laba/rugi tahun berjalan*	**381.408**	**(104.388)**	**(166.197)**	**(11.446)**	**(52.195)**	**(25.372)**	**21.810**	***Profit/loss for the year****
Total aset*	**31.622.459**	**5.195.302**	**1.529.352**	**158.162**	**205.879**	**198.567**	**38.909.721**	***Total assets****

* Tidak termasuk pajak tangguhan/*Excluding deferred tax*.

45. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

45. FAIR VALUE MEASUREMENTS

The table below illustrates the carrying value and fair value of financial assets and liabilities as at December 31, 2024 and 2023:

	2024				
	Nilai tercatat/ *Net carrying amount*	**Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss***	**Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Fair value through other comprehensive income***	**Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas	331.700	-	-	331.700	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	474.261	-	-	474.261	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	592.577	-	-	592.577	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.162.566	-	-	2.162.566	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek	5.040.567	-	2.943.796	2.096.771	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	-	-	1.332.222	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	4.987	4.987	-	-	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan - neto	26.330.524	-	-	26.330.524	*Loans - net*
Aset lain-lain - neto	64.084	-	-	64.084	*Other assets - net*
Total	**36.333.488**	**4.987**	**2.943.796**	**33.384.705**	***Total***

45. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan) / *45. FAIR VALUE MEASUREMENTS (continued)*

	2023				
	Nilai tercatat/ ***Net carrying amount***	**Nilai wajar melalui laba rugi/** ***Fair value through profit or loss***	**Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/** ***Fair value through other comprehensive income***	**Biaya perolehan diamortisasi/** ***Amortized cost***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas	201.930	-	-	201.930	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.013.146	-	-	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	548.016	-	-	548.016	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	3.370.260	-	-	3.370.260	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek	3.884.345	-	3.884.345	-	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.466.541	-	-	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	18.906	18.906	-	-	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan - neto	23.732.583	-	-	23.732.583	*Loans - net*
Tagihan akseptasi - neto	12.156	-	-	12.156	*Acceptance receivables - net*
Aset lain-lain - neto	65.004	-	-	65.004	*Other assets - net*
Total	**35.312.887**	**18.906**	**3.884.345**	**31.409.636**	***Total***

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Financial liabilities measured at amortized cost***
Liabilitas segera	50.385	50.385	86.614	86.614	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah					*Deposits from customers*
Giro	2.996.451	2.996.451	2.449.638	2.449.638	*Demand deposits*
Tabungan	2.134.541	2.134.541	2.012.614	2.012.614	*Saving deposits*
Deposito berjangka	28.768.535	28.768.535	27.543.379	27.543.379	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	2.324.117	2.324.117	3.215.559	3.215.559	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	-	-	12.157	12.157	*Acceptance payables*
Bunga yang masih harus dibayar	107.921	107.921	87.123	87.123	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	11.649	11.306	11.306	*Accrued expenses and other liabilities*
Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					***Financial liabilities measured at fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	7.745	7.745	343	343	*Derivative payables*
Total	**36.401.344**	**36.401.344**	**35.418.733**	**35.418.733**	***Total***

45. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi dan aset lain-lain

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan kecuali efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan uang jaminan mendekati nilai tercatatnya karena aset keuangan dalam jumlah signifikan memiliki jangka waktu yang pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Nilai wajar untuk efek-efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*).

Tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari uang jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan.

b. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh cadangan kerugian penurunan nilai.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

45. FAIR VALUE MEASUREMENTS (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, securities purchased under resale agreement, derivative receivables, acceptance receivables and other assets

The estimated fair value of financial assets except for securities measured at fair value through other comprehensive income and security deposits approximate its carrying values because financial assets in significant amount have short-term period and/or the interest rate is frequently reviewed.

The fair values of marketable securities are based on market prices or broker/dealer price quotations.

It is not practical to estimate the fair value of security deposits since these have no fixed repayment period and these are not expected to be completed within 12 (twelve) months after reporting date.

b. Loans

Loans are stated based on its carrying value after deducting allowance for impairment loss.

The carrying amount of floating rate loans is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine the fair value.

45. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

c. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan bank lain, liabilitas akseptasi, liabilitas derivatif, bunga yang masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap, bunga masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, nilai tercatat dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, bunga masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar liabilitas sewa yang dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain didasarkan pada pembayaran sewa yang didiskontokan dengan suku bunga inkremental Bank pada awal sewa.

d. Hak atas tanah dan bangunan

Dalam pengukuran nilai wajar tanah dan bangunan memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan pengguna terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh penilai independen adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya.

45. FAIR VALUE MEASUREMENTS (continued)

c. Obligations due immediately, deposits from customers and other banks, acceptance payables, derivative payables, accrued interest expenses, accrued expenses and other liabilities

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

The estimated fair value of fixed interest bearing deposits, accrued interest expenses, accrued expenses and other liabilities not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is less than 1 (one) year, the carrying amount of deposits from customers, deposits from other banks, accrued interest expenses, accrued expenses and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

The fair value of lease liabilities recorded under accrued expenses and other liabilities is based on lease payments discounted at incremental borrowing rate of the Bank at the beginning of the lease.

d. Land rights and buildings

In the fair value measurement of the land and building, the independent appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participants that would use the assets in its highest and best use. The valuation method used by the independent appraiser is market approach, income approach and cost approach.

45. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari aset dan liabilitas:

45. FAIR VALUE MEASUREMENTS (continued)

The tables below show the asset and liabilities recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of asset and liabilities:

	2024				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/*Fair value* *Level* 1	*Level* 2	*Level* 3	
Aset yang diukur pada nilai wajar					***Assets measured at fair value***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek					*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	1.110.314	1.110.314	-	-	*Government bonds*
Obligasi lainnya dan MTN	1.833.482	821.088	-	1.012.394	*Other bonds and MTN*
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Tagihan derivatif	4.987	-	4.987	-	*Derivative receivables*
Hak atas tanah dan bangunan - neto	392.737	-	-	392.737	*Land rights and buildings - net*
Total aset yang diukur pada nilai wajar	**3.341.520**	**1.931.402**	**4.987**	**1.405.131**	***Total assets measured at fair value***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Pinjaman yang diberikan - neto	26.330.524	-	-	26.330.524	*Loans - net*
Total	**29.672.044**	**1.931.402**	**4.987**	**27.735.655**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					***Liabilities measured at fair value***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Liabilitas derivatif	**7.745**	**-**	**7.745**	**-**	*Derivative payables*

	2023				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/*Fair value* *Level* 1	*Level* 2	*Level* 3	
Aset yang diukur pada nilai wajar					***Assets measured at fair value***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek					*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	1.225.494	1.225.494	-	-	*Government bonds*
Obligasi lainnya dan MTN	2.658.851	872.655	-	1.786.196	*Other bonds and MTN*
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Tagihan derivatif	18.906	-	18.906	-	*Derivative receivables*
Hak atas tanah dan bangunan - neto	184.749	-	-	184.749	*Land rights and buildings - net*
Total aset yang diukur pada nilai wajar	**4.088.000**	**2.098.149**	**18.906**	**1.970.945**	***Total assets measured at fair value***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Pinjaman yang diberikan - neto	23.732.583	-	-	23.732.583	*Loans - net*
Total	**27.820.583**	**2.098.149**	**18.906**	**25.703.528**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					***Liabilities measured at fair value***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Liabilitas derivatif	**343**	**-**	**343**	**-**	*Derivative payables*

46. MANAJEMEN RISIKO

I. Kerangka Manajemen Risiko

Penerapan kerangka manajemen risiko pada Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan secara internasional berpedoman pada dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Informasi tambahan manajemen risiko yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 51.

Penerapan manajemen risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana manajemen risiko menjadi *strategic partner* dari unit bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari unit bisnis secara keseluruhan.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha, transaksi dan produk Bank termasuk produk atau aktivitas baru berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan risiko yang berlaku dengan menjaga keseimbangan antara fungsi pengendalian usaha yang efektif serta kebijakan yang jelas dalam pengelolaan risiko.

Kerangka dasar manajemen risiko Bank merupakan bagian integral dari proses manajemen risiko dalam pengelolaan bisnis dan operasional Bank yang meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

   a. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.

46. RISK MANAGEMENT

I. Risk Management Framework

The implementation of risk management framework of the Bank is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and Financial Services Authority Regulations (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and the use of the international guidelines of Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

The following additional information risk management that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 51.

The implementation of risk management is based on the need to balance the business function with risk management, where the risk management is becoming a strategic partner for the business units to optimize the revenue from the business units as a whole.

The Bank's risk management framework covers the entire scope of business activities, transactions and bank products, including new products or activities based on the applicable basic principles of risk management to maintain a balance between the effective business control functions and a clear policy in business management.

The basic framework of risk management is an integral part of the risk management process in management of business and operations of the Bank which includes 4 (four) pillars as follows:

1. Boards of Commissioners and Directors Active Supervision

   a. The Boards of Commissioners and Directors are responsible for the effectiveness of risk management implementation in the Bank and to ensure its adequate implementation according to the Bank's characteristics, complexity and risk profile.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko
- Komite Audit
- Komite Remunerasi dan Nominasi

c. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR).

Direksi membentuk *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Untuk pengendalian internal, Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Direksi membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi memastikan fungsi kepatuhan Bank.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

a. Seluruh aktivitas Bank dan setiap produk/jasa Bank harus memiliki pedoman dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

b. Kebijakan Umum Manajemen Risiko disusun untuk memenuhi perkembangan terkini dalam industri perbankan yang berpengaruh pada semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha Bank.

c. Kebijakan Umum Manajemen Risiko tersebut secara terus menerus akan disesuaikan dengan perubahan peraturan dan ketentuan regulator eksternal/internal.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management Framework (continued)

1. Boards of Commissioners and Directors Active Supervision (continued)

b. To support its duties and responsibilities, the Board of Commissioners established the following Committees:
- *Risk Monitoring Committee*
- *Audit Committee*
- *Remuneration and Nomination Committee*

c. To support its duties and responsibilities, the Board of Directors formed a Risk Management Committee (KMR).

The Board of Directors established Assets and Liabilities Committee (ALCO) which is responsible for determining strategy in the management of the Bank's assets and liabilities in accordance with applicable regulations.

d. For internal control, the Board of Directors established the Internal Audit Unit, while the Risk Management Unit has a function for identifying, measuring, monitoring and controlling risk.

The Board of Directors established a Compliance Unit which has a function to ensure the Bank's compliance function.

2. Sufficiency of policy, procedure and limit setting

a. All of the Bank's activities and any products/services should have a clear guideline and procedure which is in line with the Bank's vision, mission and business strategy.

b. The Risk Management General Policy is prepared to meet the latest developments of banking industry which affects complexity of the risk in the Bank's business activities.

c. The Risk Management General Policy is continuously being upgraded for the changes in the rules and regulations of external/internal regulator as well.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

4. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

Sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal.

Penerapan manajemen risiko di Bank telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, salah satunya adalah Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai kebijakan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang efektif, Bank telah menetapkan struktur manajemen risiko disertai dengan tugas dan tanggung jawab pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

II. Struktur Organisasi

Dalam struktur pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris dan KMR di tingkat Direksi.

Komite Manajemen Risiko (KMR) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan menyesuaikan kebijakan strategi, serta pedoman penerapan manajemen risiko serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan efektif, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera dengan dilakukan rapat KMR yang bersifat terbatas.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management Framework (continued)

3. Sufficiency of the identification of processes, measurement, monitoring and risk control, as well as management of information system risks.

4. Effective internal control system in the implementation of the Bank's operations.

A reliable and effective internal control system of the Bank is the responsibility of all operational and supporting units as well as Internal Audit Division.

Implementation of risk management in Bank has been prepared under policies and procedures, one of them is General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management in order to secure the Bank from its business risk activities.

In the implementation of risk management and effective corporate governance, the Bank has determined the structure of risk management along with the duties and responsibilities in all units adapted to the objectives and business policy, the size and complexity of the Bank's business activities.

II. Organizational Structure

In the structure of supervision and risk management of the Bank as well as the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is supported by the Risk Oversight Committee at the Commissioner level and KMR at the Board of Directors level.

The Risk Management Committee (KMR) has duties and responsibilities to prepare and enhance strategy, policies and guidelines for the implementation of risk management and to ensure that implementation of the processes and systems of risk management is effective, to evaluate the development of risk profiles and conditions, and also to provide suggestions and remedial measures to address the issues that are specific to certain types of risk and require immediate decision by conducting limited KMR meetings.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko

Bank menyadari bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik, maka risiko-risiko yang dihadapi perlu dikendalikan secara baik, dimana di dalam kegiatannya selalu terdapat risiko yang melekat (*inherent*), yaitu dalam bentuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Rincian risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

(i) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan debitur/*counterparty* dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak memiliki niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

1. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur risiko kredit terhadap aset - neto sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile

The Bank realized that in order to maintain and improve good performance, the risk exposures need to be controlled properly, where in its business activities there is always an inherent risk, which are the credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. The details of these risks are as follows:

(i) Credit risk

Credit risk is risk arising from the loss or potential loss of the debtors/ counterparty to fulfill its obligations in accordance with the agreement, either due to inability, or delibrate intention to default or other causes, which results for the Bank to suffer losses.

1. Maximum exposure to credit risk

The following table presents the maximum exposure to credit risk exposures relating to the assets - net of allowance for possible losses on the statement of financial position and administrative accounts as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Giro pada Bank Indonesia	474.261	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	592.577	548.016	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.162.566	3.370.260	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	5.040.567	3.884.345	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	4.987	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	26.330.524	23.732.583	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	12.156	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	187.725	207.121	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	64.084	65.004	*Other assets*
Total	**36.189.513**	**35.318.078**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

1. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

1. Maximum exposure to credit risk (continued)

Credit risk exposures relating to administrative accounts items as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	436.628	314.572	*Unused loans facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	126.559	173.384	*Bank guarantees issued*
L/C yang masih beredar	29.633	2.805	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**592.820**	**490.761**	***Total***

Eksposur maksimum pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang berasal dari pinjaman yang diberikan yaitu masing-masing sebesar 72,76% dan 67,20%.

The maximum exposure as at December 31, 2024 and 2023 which is derived from loans is 72.76% and 67.20%, respectively.

2. Konsentrasi risiko kredit

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum dalam jumlah bruto berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

2. Concentration of credit risk

The disclosure on the gross maximum credit risk concentration by industry sector is as follows:

	2024					
	Pemerintah/ *Government*	Bank/ *Bank*	Jasa-jasa Dunia Usaha/ *Business Services*	Perusahaan Lainnya dan Perorangan/ *Other Companies and Individual*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	474.261	-	-	-	474.261	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	594.011	-	-	594.011	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.861.716	300.900	-	-	2.162.616	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	3.207.085	-	-	1.833.482	5.040.567	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	-	-	-	1.332.222	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	-	4.987	-	-	4.987	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	691.922	580.161	25.255.983	26.528.066	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	20.205	2.107	973	164.440	187.725	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	64.084	64.084	*Other assets*
Total	**6.895.489**	**1.593.927**	**581.134**	**27.317.989**	**36.388.539**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***46. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan) / *2. Concentration of credit risk (continued)*

	2023					
	Pemerintah/ *Government*	**Bank/ *Bank***	**Jasa-jasa Dunia Usaha/ *Business Services***	**Perusahaan Lainnya dan Perorangan/ *Other Companies and Individual***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	2.013.146	-	-	-	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	549.233	-	-	549.233	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.119.545	250.900	-	-	3.370.445	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.225.494	-	-	2.658.851	3.884.345	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.466.541	-	-	-	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	-	18.906	-	-	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	757.266	22.588.064	534.508	23.879.838	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	-	-	12.157	12.157	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	20.167	4.325	156.371	26.258	207.121	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	65.004	65.004	*Other assets*
Total	**7.844.893**	**1.580.630**	**22.744.435**	**3.296.778**	**35.466.736**	***Total***

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to administrative accounts as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024				
Keterangan	**Bank/ *Bank***	**Perusahaan/ *Corporate***	**Perorangan/ *Individual***	**Total**	***Description***
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	59.149	372.661	4.818	436.628	*Unused loans facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	-	126.559	-	126.559	*Bank guarantees issued*
L/C yang masih beredar	-	29.633	-	29.633	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**59.149**	**528.853**	**4.818**	**592.820**	***Total***

	2023				
Keterangan	**Bank/ *Bank***	**Perusahaan/ *Corporate***	**Perorangan/ *Individual***	**Total**	***Description***
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	58.849	253.906	1.817	314.572	*Unused loans facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	-	173.384	-	173.384	*Bank guarantees issued*
L/C yang masih beredar	-	2.805	-	2.805	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**58.849**	**430.095**	**1.817**	**490.761**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum dalam jumlah bruto berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

The disclosure on the gross maximum credit risk concentration by geography is as follows:

	2024			
	DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta*	**Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta***	**Total**	
Aset				***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	474.261	-	474.261	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	436.055	157.956	594.011	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.162.616	-	2.162.616	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	5.040.567	-	5.040.567	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji janji dijual kembali	1.332.222	-	1.332.222	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	4.987	-	4.987	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	20.054.595	6.473.471	26.528.066	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	140.146	47.579	187.725	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	64.084	-	64.084	*Other assets*
Total Aset	**29.709.533**	**6.679.006**	**36.388.539**	***Total Assets***

	2023			
	DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta*	**Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta***	**Total**	
Aset				***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	2.013.146	-	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	544.975	4.258	549.233	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.370.445	-	3.370.445	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	3.884.345	-	3.884.345	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji janji dijual kembali	1.466.541	-	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	18.906	-	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	18.022.378	5.857.460	23.879.838	*Loans*
Tagihan akseptasi	12.157	-	12.157	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	150.561	56.560	207.121	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	65.004	-	65.004	*Other assets*
Total Aset	**29.548.458**	**5.918.278**	**35.466.736**	***Total Assets***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

The exposures relating to credit risk of administrative accounts as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024			
Keterangan	**DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta***	**Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta***	**Total**	***Description***
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	216.555	220.073	436.628	*Unused loans facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	62.266	64.293	126.559	*Bank guarantees issued*
L/C yang masih beredar	29.633	-	29.633	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**308.454**	**284.366**	**592.820**	***Total***

	2023			
Keterangan	**DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta***	**Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta***	**Total**	***Description***
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	118.047	196.525	314.572	*Unused loans facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	93.000	80.384	173.384	*Bank guarantees issued*
L/C yang masih beredar	2.805	-	2.805	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**213.852**	**276.909**	**490.761**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan sektor ekonomi yang terdapat pada pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

The disclosure on the maximum credit risk concentration by economic sector on loans is as follows:

	2024		2023		
Perantara keuangan	5.899.620	22,24%	5.692.993	23,84%	*Financial agent*
Industri pengolahan	4.453.177	16,79%	3.729.534	15,62%	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	3.712.262	13,99%	2.999.269	12,56%	*Wholesaler and retailer*
Real estate , usaha persewaan dan jasa perusahaan	3.468.430	13,07%	2.828.289	11,84%	*Real estate, rental and services*
Pertambangan	2.587.049	9,75%	3.513.880	14,71%	*Mining*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.523.136	5,75%	1.091.707	4,57%	*Agribusiness, hunting and forestry*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.442.212	5,44%	1.028.393	4,31%	*Transportation, warehousing and communication*
Konstruksi	1.223.192	4,61%	1.010.437	4,23%	*Constructions*
Rumah tangga	1.055.147	3,98%	889.043	3,72%	*Household*
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	722.214	2,72%	626.983	2,63%	*Supply of accommodation, food and beverages*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	417.569	1,57%	441.211	1,85%	*Life style, social culture, entertainment and other individuals*
Listrik, gas dan air	23.812	0,09%	28.099	0,12%	*Electricity, gas and water*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	246	0,00%	-	-	*Health care and social activities*
Total	**26.528.066**	**100,00%**	**23.879.838**	**100,00%**	***Total***

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kelompok debitur adalah sebagai berikut:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by debtor classification is as follows:

	2024		2023		
Komersial	25.472.919	96,02%	22.990.795	96,28%	*Commercial*
Konsumen	1.055.147	3,98%	889.043	3,72%	*Consumer*
Total	**26.528.066**	**100,00%**	**23.879.838**	**100,00%**	***Total***

Pengungkapan risiko kredit maksimum adalah sebelum efek mitigasi melalui *master netting* dan/atau perjanjian jaminan. Apabila instrumen keuangan dicatat berdasarkan nilai wajar, angka yang ditunjukkan mencerminkan pengungkapan risiko kredit saat ini tetapi bukan pengungkapan risiko maksimal yang dapat timbul di masa yang akan datang sebagai akibat perubahan nilai.

The details of maximum credit risks by economic sector are before the effect of mitigation through the use of master netting and/or collateral agreements. Where the financial instruments are recorded at fair value, the amounts shown represent the current credit risk exposure but not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of changes in value.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit adalah:

a. Pengelolaan Risiko Kredit dilakukan dengan penerapan *Four Eyes Principles* sebagai prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Credit Risk Reviewer Division* (CRRD), yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan pemberian kredit atau penyediaan dana dan berfungsi juga melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2A agar tidak berpotensi menjadi *Non-Performing Loan* (NPL);
- *Credit Risk Reviewer Division* (CRRD) adalah unit yang melakukan reviu Nota Analisa Kredit dan hasilnya dalam bentuk Analisa Risiko dan Rekomendasi (ARR) serta dilengkapi kewenangan dalam batas *limit* tertentu untuk menyetujui atau menolak proposal yang diusulkan oleh Divisi Bisnis;
- Divisi *Corporate Legal and Litigation* dan Divisi *Compliance* sebagai *Non-Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan, legal, dan *Operation* dan *Credit Administration Division* serta *Financial Control Division* sebagai tim *ad hoc* dalam pemberian opini operasional dan restrukturisasi pinjaman didalam mekanisme komite kredit;

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

There are several actions which have been taken to anticipate the credit risk:

a. The Credit Risk Management is applied by implementing Four Eyes Principles that underlies the main principle to decide approval of credit proposal with the involvement of Business Units and units of Credit Risk Reviewer Division (CRRD), which are working independently with different authority and responsibility, as follows:

- *Business Division is a business unit that proposes credit granting or funding availability, as well as functions to handle the debtors with credit collectability of 2A in order not to potentially become a Non-Performing Loan (NPL);*
- *Credit Risk Reviewer Division (CRRD) is a unit which reviews Credit Memorandum Notes and results in Risk Analysis and Recommendation (ARR) and is authorized within certain limits to approve or reject proposals proposed by the Business Division;*
- *Corporate Legal and Litigation Division and Compliance Division as Non-Voting Member in providing compliance, legal, and Operation and Credit Administration Division and Financial Control Division as ad hoc team providing operational opinion and loan restructuring in the credit committee mechanism;*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit adalah: (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit dilakukan dengan penerapan *Four Eyes Principles* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Credit Risk Reviewer Division* (CRRD), yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut: (lanjutan)

- *Management All Delinquencies* (MAD) berfungsi membantu penagihan debitur kualitas 2A dan 2B bersama-sama dengan Unit Bisnis, dan melakukan penanganan debitur kualitas 2C agar tidak berpotensi menjadi *Non-Performing Loan* (NPL) serta penyelamatan kredit dengan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*, serta *Non-Performing Loan* (NPL) dengan penjualan agunan dll, dan penyelesaian aset bermasalah.

- Divisi Manajemen Risiko berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, memantau risiko kredit dengan berpegang pada *prudent banking policy*; dan
- Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang telah ditetapkan oleh Direksi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

There are several actions which have been taken to anticipate the credit risk: (continued)

a. The Credit Risk Management is applied by implementing Four Eyes Principles that underlies the main principle to decide approval of credit proposal with the involvement of Business Units and units of Credit Risk Reviewer Division (CRRD), which are working independently with different authority and responsibility, as follows: (continued)

- *Management All Delinquencies (MAD) whose functions serve to assist the collection of 2A and 2B quality debtors together with the Business Unit, and to handle the debtors with credit collectability of 2C in order not to potentially become a Non-Performing Loan (NPL) and to save credit by rescheduling, reconditioning and restructuring, and handle debtors with Non-Performing Loan (NPL) by selling collateral etc, and the assets settlement.*
- *Risk Management Division (RMD) whose function as an independent unit to identify, measure and monitor credit risk by implementing a prudent banking policy; and*

- *Credit Committee evaluates the process of credit approval in accordance with the Limitation of Credit Authorization Limit (BWMK) assigned by the Board of Directors.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit adalah: (lanjutan)

b. Melakukan penetapan *limit*/batas wewenang untuk memutuskan kredit yang direviu secara berkala.

c. Melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit Bank perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat namun tetap berpedoman terhadap asas *prudent banking*.

d. Melengkapi Bank dengan Kebijakan Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan Kredit yang secara berkala dilakukan peninjauan kembali, selain itu terus melengkapi dan menyempurnakan *Standard Operating Procedure* bidang perkreditan.

e. Melakukan *monitoring* terhadap portofolio pinjaman Bank, yang dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, serta terhadap 25 (dua puluh lima) debitur inti.

f. Melakukan penyempurnaan atas Nota Analisa Kredit yang disertakan dengan *spreadsheet* laporan keuangan.

g. Melakukan pembahasan rutin terkait dengan permasalahan di bidang kredit termasuk didalamnya mengenai Kredit Kualitas Rendah (KKR) dan pinjaman bermasalah.

h. Melakukan perbaikan pada pinjaman bermasalah dengan melakukan penyelesaian pinjaman bagi debitur yang bermasalah.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

There are several actions which have been taken to anticipate the credit risk: (continued)

b. Setting up of credit limits/level of authority to approve credit are being evaluated on a regular basis.

c. Credit Authorization Limit (BWMK) makes improvement to the Bank's process of evaluation of granting credits so that the credit decision-making processes will be faster but still guided by the principles of prudent banking.

d. Complementing the Bank with the Credit Policy and Credit Manual which are regularly being reviewed also to complement and enhance the Standard Operating Procedure for granting credit sector.

e. Monitoring of the Bank's loans portfolio, which covers, among others, segment of credit, credit quality, for the top 25 (twenty five) debtors.

f. Improving Credit Analysis Memorandum and with attached financial statements spreadsheet.

g. Conducting regular discussion related to the problems in the field of credit which includes Low Quality Loans and Non-Performing Loans.

h. Improving the Non-Performing Loans by resolving the problems of non-performing debtors.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit adalah: (lanjutan)

i. Melakukan penyusunan portofolio pinjaman per sektor industri yang digunakan untuk menyusun *Industry Code and Catalogues*, dan Rekomendasi *Approved Industries* dan *Target Market*.

j. Pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan BMPK, *limit* kredit dan konsentrasi kredit.

Proses pemberian kredit dilakukan dengan penentuan *target market* terlebih dahulu, dengan memperhatikan industri *outlook* yang direkomendasikan serta memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan manajemen Bank, selanjutnya melakukan analisis kredit termasuk di dalamnya melakukan *BI Checking* dan *Trade Checking*, pengajuan kepada Rapat Komite Kredit sesuai dengan kewenangan masing-masing pemutus, ditindaklanjuti dengan memberikan keputusan atas permohonan kredit oleh Rapat Komite Kredit.

Setelah adanya persetujuan pinjaman tersebut, maka Surat Penawaran Kredit diberikan kepada debitur dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman, pengikatan agunan dan penutupan asuransi agunan. Setelah proses tersebut maka dilanjutkan dengan proses dokumentasi dan administrasi kredit, melakukan pencairan, dilanjutkan dengan pemantauan serta pelaporan kredit.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

There are several actions which have been taken to anticipate the credit risk: (continued)

i. Preparing the loan portfolio by industry sector to compile the Industry Code and Catalogues, and Recommendations of Approved Industries and Target Market.

j. Granting loan by considering the Legal Lending Limit, credit limit and credit concentration.

The credit granting evaluation process is conducted initially by determining the target market, and considering recommendation from outlook of industry and attention to risk appetite and risk tolerance established by the Bank's management, and then conducting evaluation and credit analysis including BI Checking and Trade Checking, submission to Credit Committee Meeting in accordance with the limit authority, followed by a decision on a credit application by the Credit Committee Meeting.

After the loan has been approved, the debtor is going to receive an Offering Letter of Credit, and continued by signing on the loan agreement, binding of collateral and collateral insurance. The process is continued with the documentation and credit administration, credit disbursement, followed by monitoring and reporting of credit.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Praktik perbankan yang umum dilakukan adalah dengan meminta agunan sebagai uang muka. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah: hipotek atas properti hunian, agunan atas aset usaha seperti tanah dan bangunan, persediaan dan piutang usaha dan agunan atas instrumen keuangan.

Kualitas kredit per golongan aset keuangan

Kualitas kredit aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan pedoman dari Bank Indonesia. Kualitas kredit berdasarkan golongan aset yang memiliki risiko kredit mengacu pada hasil penilaian dari lembaga pemeringkat eksternal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Agunan yang diambil alih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mengakui keuntungan (kerugian) atas penjualan agunan yang diambil alih masing-masing sebesar nihil.

Penilaian penurunan nilai

Bank menganggap instrumen keuangan gagal bayar dan oleh karena itu Tahap 3 (mengalami penurunan nilai kredit) untuk perhitungan ECL dalam semua kasus ketika peminjam telah jatuh tempo 90 hari pada pembayaran kontraktualnya. Instrumen *treasury* dan antar bank dianggap gagal dan Bank mengambil tindakan segera jika pembayaran dalam satu hari yang diperlukan tidak diselesaikan pada penutupan bisnis seperti yang diuraikan dalam perjanjian individu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Collateral and other credit protection

The Bank implements policies and practices to mitigate the credit risk. The general banking practice is to secure collateral as an advance. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal types of collateral for loans are as follows: mortgage over residential properties, collaterals over business assets such as land and buildings, inventories and accounts receivable and collaterals over financial instruments.

Credit quality per class of financial assets

On determining the credit quality of financial assets managed by the Bank, it uses the guidance from Bank Indonesia. The credit quality based on asset classification that has a credit risk refers to the assessment of external agencies as stipulated by Bank Indonesia.

Foreclosed assets

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the Bank recognized a gain (loss) on the sale of foreclosed assets amounting to nil, respectively.

Impairment assessment

The Bank considers a financial instrument defaulted and therefore Stage 3 (credit-impaired) for ECL calculations in all cases when the borrower becomes 90 days past due on its contractual payments. The Bank considers treasury and interbank balances defaulted and takes immediate action when the required intraday payments are not settled by the close of business as outlined in the individual agreements.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Penilaian penurunan nilai (lanjutan)

Sebagai bagian dari penilaian kualitatif tentang apakah debitur gagal bayar, Bank juga mempertimbangkan berbagai contoh yang mungkin menunjukkan keengganan untuk membayar. Ketika peristiwa seperti itu terjadi, Bank dengan hati-hati mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut akan mengakibatkan debitur diperlakukan sebagai lalai dan oleh karena itu dinilai sebagai Tahap 3 untuk perhitungan ECL atau apakah Tahap 2 masih sesuai. Peristiwa tersebut meliputi:

a. Peringkat internal debitur menunjukkan *default* atau hampir gagal bayar.
b. Debitur yang meminta dana darurat dari Bank.
c. Debitur memiliki kewajiban jatuh tempo kepada kreditur publik atau karyawan.
d. Debitur sudah meninggal.
e. Penurunan material dalam nilai agunan yang mendasari dimana pemulihan pinjaman diharapkan dari penjualan agunan.
f. Penurunan material dalam perputaran usaha debitur atau hilangnya pelanggan utama.
g. Pelanggaran perjanjian tidak diabaikan oleh Bank.
h. Debitur (atau badan hukum dalam kelompok debitur) yang mengajukan permohonan/perlindungan kebangkrutan.
i. Utang atau ekuitas debitur yang terdaftar ditangguhkan di bursa utama karena rumor atau fakta tentang kesulitan keuangan.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Impairment assessment (continued)

As a part of a qualitative assessment of whether a debtor is in default, the Bank also considers a variety of instances that may indicate unlikeliness to pay. When such events occur, the Bank carefully considers whether the event should result in treating the debtor as defaulted and therefore assessed as Stage 3 for ECL calculations or whether Stage 2 is appropriate. Such events include:

a. Internal rating of the debtor indicating default or near-default.
b. The debtor requesting emergency funding from the Bank.
c. The debtor having past due liabilities to public creditors or employees.
d. The debtor is deceased.
e. A material decrease in the underlying collateral value where the recovery of the loan is expected from the sale of the collateral.
f. A material decrease in the debtor's turnover or the loss of a major customer.
g. A covenant breach not waived by the Bank.
h. The debtor (or any legal entity within the debtor's group) filing for bankruptcy application/protection.
i. Debtor's listed debt or equity suspended at the primary exchange because of rumours or facts about financial difficulties.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai individual

Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nlai secara individual untuk masing-masing aset keuangan pinjaman yang diberikan yang signifikan secara individu. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai antara lain mencakup:

a. Kemungkinan rencana bisnis debitur;
b. Kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan;
c. Proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan;
d. Kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya; dan
e. Jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu arus kas.

Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif

Cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas aset keuangan yang tidak signifikan secara individu.

Evaluasi penurunan nilai

Bank memberlakukan *monitoring* dan pengawasan kredit yaitu *Early Warning System*.

Tujuan dari *Early Warning System* digunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin apabila terjadi penyimpangan/deviasi yang dapat berdampak pada turunnya kualitas kredit (kolektibilitas) sehingga Bank dapat secepat mungkin mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga Bank tidak mengalami kerugian.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Individually assessed allowances

The Bank provides the individual allowances for each individually significant financial assets of loans. Items considered when determining allowance include:

a. The sustainability of the debtors business plan;
b. Ability to improve performance once a financial difficulty has arisen;
c. Projected cash receipt and the expected payout if debtor is bankrupt;
d. The availability of other source of payment; and
e. The realizable value of collateral and the timing of expected cash flows.

Collectively assessed allowances

Allowances are assessed collectively for losses on financial assets that are not individually significant.

Impairment evaluation

The Bank imposed a monitoring and supervision of credit that is the Early Warning System.

Early Warning System is used by the Bank to conduct credit monitoring to recognize as early as possible if there any event of irregularities/deviations that could impact the decline of credit quality (collectibilities) as soon as possible so that the Bank can take corrective measures as soon as possible to avoid suffering losses.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Berikut beberapa hal yang menjadi *warning signs* atas diberlakukannya *Early Warning System*, sebagai berikut:

a. Laporan keuangan
b. Kondisi bisnis debitur
c. Sikap debitur
d. Ekonomi makro

Early Warning System atas debitur dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat profil risiko, sebagai berikut:

a. Risiko tinggi
b. Risiko menengah tinggi
c. Risiko menengah
d. Risiko menengah rendah
e. Risiko rendah

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Impairment evaluation (continued)

Below are some indicators that serve as warning signs on the implementation of the Early Warning System, as follows:

a. Financial statements
b. Business conditions of debtor
c. Attittude of debtor
d. Macro economy

The Early Warning System on debtors are categorized into 5 (five) ranks of risk profile, as follows:

a. High risk
b. Medium to high risk
c. Medium risk
d. Medium to low risk
e. Low risk

The following is credit risk based on allowance for impairment losses assessment classification as at December 31, 2024 and 2023:

Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts with Bank Indonesia*

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Rupiah	357.457	-	-	357.457	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	116.804	-	-	116.804	*Foreign currencies (Note 42)*
Total	**474.261**	**-**	**-**	**474.261**	***Total***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Rupiah	1.891.738	-	-	1.891.738	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	121.408	-	-	121.408	*Foreign currencies (Note 42)*
Total	**2.013.146**	**-**	**-**	**2.013.146**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***46. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Rupiah	44.416	-	-	44.416	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	548.796	-	799	549.595	*Foreign currencies (Note 42)*
Total	593.212	-	799	594.011	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(635)	-	(799)	(1.434)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**592.577**	**-**	**-**	**592.577**	***Net***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Rupiah	47.687	-	-	47.687	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	500.733	-	813	501.546	*Foreign currencies (Note 42)*
Total	548.420	-	813	549.233	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(404)	-	(813)	(1.217)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**548.016**	**-**	**-**	**548.016**	***Net***

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain / *Placements with Bank Indonesia and other banks*

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Rupiah					*Rupiah*
Fasilitas Deposito Bank Indonesia dan bank lain	1.540.675	-	-	1.540.675	*Deposit Facility Bank Indonesia and other banks*
Interbank Call Money	300.000	-	-	300.000	*Interbank Call Money*
Mata uang asing (Catatan 42)					*Foreign currency (Note 42)*
Term deposit Bank Indonesia	321.941	-	-	321.941	*Term deposit Bank Indonesia*
Total	2.162.616	-	-	2.162.616	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50)	-	-	(50)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.162.566**	**-**	**-**	**2.162.566**	***Net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***46. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan) / *Placements with Bank Indonesia and other banks (continued)*

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Rupiah					*Rupiah*
Fasilitas Deposito Bank Indonesia dan bank lain	3.120.445	-	-	3.120.445	*Deposit Facility Bank Indonesia and other banks*
Interbank Call Money	250.000	-	-	250.000	*Interbank Call Money*
Total	3.370.445	-	-	3.370.445	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(185)	-	-	(185)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.370.260**	**-**	**-**	**3.370.260**	***Net***

Efek-efek / *Marketable securities*

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Rupiah					*Rupiah*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	2.096.771	-	-	2.096.771	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Obligasi Pemerintah	1.081.797	-	-	1.081.797	*Government bonds*
Medium Term Notes	1.012.394	-	-	1.012.394	*Medium Term Notes*
Obligasi lainnya	821.088	-	-	821.088	*Other bonds*
Sub-total	5.012.050	-	-	5.012.050	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)					*Foreign Currency (Note 42)*
Obligasi Pemerintah	28.517	-	-	28.517	*Government bonds*
Total	**5.040.567**	**-**	**-**	**5.040.567**	***Total***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Rupiah					*Rupiah*
Medium Term Notes	1.786.196	-	-	1.786.196	*Medium Term Notes*
Obligasi Pemerintah	1.197.728	-	-	1.197.728	*Government bonds*
Obligasi lainnya	872.655	-	-	872.655	*Other bonds*
Sub-total	3.856.579	-	-	3.856.579	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 42)					*Foreign Currency (Note 42)*
Obligasi Pemerintah	27.766	-	-	27.766	*Government bonds*
Total	**3.884.345**	**-**	**-**	**3.884.345**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***46. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased under resale agreements*

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Rupiah	1.332.222	-	-	1.332.222	*Rupiah*

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Rupiah	1.466.541	-	-	1.466.541	*Rupiah*

Pinjaman yang diberikan / *Loans*

	2024				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Kredit modal kerja	16.469.072	48.273	242.097	16.759.442	*Working capital loans*
Kredit investasi	6.768.352	-	3.336	6.771.688	*Investment loans*
Kredit rekening koran	965.414	-	14.656	980.070	*Current accounts loans*
Kredit ekspor impor	597.718	-	-	597.718	*Export import loans*
Kredit pemilikan rumah	377.792	3.998	7.653	389.443	*Housing loans*
Kredit kendaraan bermotor	10.357	-	46.241	56.598	*Vehicle loans*
Lain-lain	769.986	66.868	136.253	973.107	*Others*
Total	25.958.691	119.139	450.236	26.528.066	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58.888)	(19.275)	(119.379)	(197.542)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**25.899.803**	**99.864**	**330.857**	**26.330.524**	***Net***

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Kredit modal kerja	11.104.635	116.887	22.948	11.244.470	*Working capital loans*
Kredit investasi	9.882.542	23.372	10.488	9.916.402	*Investment loans*
Kredit rekening koran	839.706	30.486	21.512	891.704	*Current accounts loans*
Kredit ekspor impor	373.217	-	-	373.217	*Export import loans*
Kredit pemilikan rumah	255.567	7.717	3.025	266.309	*Housing loans*
Kredit kendaraan bermotor	39.963	-	46.447	86.410	*Vehicle loans*
Lain-lain	971.130	2.211	127.985	1.101.326	*Others*
Total	23.466.760	180.673	232.405	23.879.838	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(60.624)	(9.927)	(76.704)	(147.255)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**23.406.136**	**170.746**	**155.701**	**23.732.583**	***Net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan debitur.

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemik COVID-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, pihak lawan maupun debitur dari Bank dan manajemen telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Bank sebagai berikut:

- Melakukan penyaluran kredit yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan efisiensi biaya operasional.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Bank.

Manajemen melakukan reviu kualitatif atas perhitungan ECL terhadap sektor-sektor tersebut untuk meyakinkan bahwa ECL mencukupi.

Tagihan akseptasi

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Loans (continued)

Where there is doubt on the ability of the debtors to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the debtors.

Direct and indirect effects of the COVID-19 outbreak are impacting the global economy, markets, counterparties and debtors of the Bank and management has taken actions to mitigate the impact on the Bank's business as follows:

- *Provide loans to debtors selectively with prudent principles.*
- *Increase efforts on collections and settlements of non-performing loans.*
- *Manage operational expenses efficiently.*
- *Implement liquidity risk management optimally to maintain the Bank's liquidity position.*

Management performs a qualitative review of the ECL calculation associated with those sectors to ensure that overall ECL is sufficient.

Acceptance receivables

	2023				
	Tahap/ *Stage* 1	**Tahap/ *Stage* 2**	**Tahap/ *Stage* 3**	**Total**	
Rupiah	10.935	-	-	10.935	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 42)	1.222	-	-	1.222	*Foreign currencies (Note 42)*
Total	12.157	-	-	12.157	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	-	-	(1)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**12.156**	**-**	**-**	**12.156**	***Net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Profil Risiko (lanjutan)

III. Risk Profile (continued)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

(i) Credit risk (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan:

The table below shows the credit quality per class of financial assets:

	2024							
	Tahap/*Stage* 1							
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat sedang/ *Standard grade*	Tingkat rendah/ *Low grade*	Tanpa peringkat/ *Unrated*	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Aset Keuangan								***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	474.261	-	-	474.261	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	-	593.212	-	799	594.011	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	2.162.616	-	-	2.162.616	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.314.332	519.151	-	3.207.084	-	-	5.040.567	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	-	-	-	-	-	1.332.222	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	-	-	-	4.987	-	-	4.987	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	25.958.691	119.139	450.236	26.528.066	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	9.705	441	-	176.710	869	-	187.725	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	64.084	-	-	64.084	*Other assets*
Total	2.656.259	519.592	-	32.641.645	120.008	451.035	36.388.539	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai							(252.504)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**36.136.035**	***Net***

	2023							
	Tahap/*Stage* 1							
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat sedang/ *Standard grade*	Tingkat rendah/ *Low grade*	Tanpa peringkat/ *Unrated*	Tahap/ *Stage* 2	Tahap/ *Stage* 3	Total	
Aset Keuangan								***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	2.013.146	-	-	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	-	548.420	-	813	549.233	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	3.370.445	-	-	3.370.445	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	334.285	538.370	-	3.011.690	-	-	3.884.345	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.466.541	-	-	-	-	-	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	-	-	-	18.906	-	-	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	23.466.760	180.673	232.405	23.879.838	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	-	-	12.157	-	-	12.157	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10.117	-	-	196.697	307	-	207.121	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	65.004	-	-	65.004	*Other assets*
Total	1.810.943	538.370	-	32.703.225	180.980	233.218	35.466.736	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai							(208.605)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**35.258.131**	***Net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

a. Tingkat tinggi: peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas sangat baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah.

b. Tingkat sedang: peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas yang baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah.

c. Tingkat rendah: peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas yang cukup dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sedang.

d. Tanpa peringkat: kategori ini tidak menyediakan peringkat dikarenakan ketidaktersediaan dari model-model peringkat pemerintah dan/atau agen-agen yang berhubungan dengan pemerintah.

Analisis umur pinjaman pada tahap 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

The credit qualities are defined as follows:

a. High grade: rating in this category has an excellent capacity to meet financial commitments with very low credit risk.

b. Standard grade: rating in this category has a good capacity to meet financial commitments with very low credit risk.

c. Low grade: rating in this category has fairly acceptable capacity to meet financial commitments with standard credit risk.

d. Unrated: this category is currently not assigned with any ratings due to unavailability of rating models from governments and/or government-related agencies.

The aging analysis of loans under stage 2 as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024					
	Tahap/*Stage* 2					
	Belum jatuh tempo/ *Not yet due*	**Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days***	**31 sampai dengan 60 hari/ *31 up to 60 days***	**61 sampai dengan 90 hari/ *61 up to 90 days***	**Total**	
Konsumen	**114.033**	**93**	**13**	**5.000**	**119.139**	*Consumer*

	2023					
	Tahap/*Stage* 2					
	Belum jatuh tempo/ *Not yet due*	**Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days***	**31 sampai dengan 60 hari/ *31 up to 60 days***	**61 sampai dengan 90 hari/ *61 up to 90 days***	**Total**	
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	31.263	19.309	-	-	50.572	*Commercial/Small and Medium Enterprises (SME)*
Konsumen	66.221	10.702	53.178	-	130.101	*Consumer*
Total	**97.484**	**30.011**	**53.178**	**-**	**180.673**	***Total***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit pinjaman tahap 1 berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat internal sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

The credit quality of loans under stage 1 based on maturity as at December 31, 2024 and 2023 can be assessed by reference to the internal rating as follows:

	2024	**2023**	
Belum jatuh tempo	25.881.948	23.435.042	*Note yet due*
Kurang dari 30 hari	76.743	31.718	*Less than 30 days*
Total	**25.958.691**	**23.466.760**	***Total***

(ii) Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di *banking book* maupun *trading book*. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar yang mencakup risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

1. Risiko suku bunga

Potensi risiko suku bunga pada Bank cukup signifikan karena penyaluran dana selain dalam bentuk pinjaman, juga berupa portofolio investasi pada surat berharga. Kondisi ini akan menekan *Net Interest Margin* (NIM) saat suku bunga dana cenderung meningkat. Beberapa antisipasi/strategi dan mitigasi risiko Bank dalam menyikapi kondisi ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

a. Bank melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aset produktif dan non-produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.

(ii) Market risk

Market risk is risk on the statement of financial position and administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of change of option price. Market risk is almost inherent in all Bank's events and activities in both of its banking book and trading book. The Bank manages the market risk including interest rate risk and foreign exchange risk.

1. Interest rate risk

Potential interest rate risk in the Bank is significant because of the distribution of funds, other than loan and investment portfolio in marketable securities.This condition will suppress Net Interest Margin (NIM) when the interest rate is likely to increase. There are some anticipation/strategies and the Bank's risk mitigation in addressing the issues, among others, are as follows:

a. The Bank makes improvement to the composition structure of productive and non-productive assets to make profit for the Bank's position.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

b. Mengupayakan pengelolaan struktur liabilitas Bank dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.

c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari *government funding* dengan jangka waktu panjang.

d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian pinjaman jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.

e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aset maupun liabilitas melalui forum rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya.

f. Melakukan *monitoring* atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi *Treasury* dan *Capital Market* secara harian dan melaporkannya ke Direksi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

b. Arrange the management of Bank's liabilities structure in improving the long-term funding sources, by providing attractive and competitive interest rates on time deposits for three months to one year.

c. Increase Third Party Fund (DPK) from government funding with the long-term period.

d. Apply the floating rate on certain types of loans, then the risk of decrease in interest rates will not suffer the Bank, and on the other hand, will not charge the debtors if interest rates rise.

e. Monitor the development of the market pricing and strengthen policy of asset and liabilities pricing through meetings of Assets and Liabilities Committee (ALCO) to discuss some important calculations such as cost of money, base lending rate and other calculations.

f. Conduct monitoring of liquidity, activity and risk limitation of Treasury and Capital Market Division on daily basis and report to the Board of Directors.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

The following table summarizes the range of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as at December 31, 2024 and 2023:

	2024							
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Yen Jepang/ *Japanese Yen*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Hong Kong/ *Hong Kong Dollar*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	
	%	%	%	%	%	%	%	
Aset								*Assets*
Giro pada bank lain	0,78	0,16	0,37	5,86	18,60	3,47	1,55	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,69	0,14	-	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	6,93	2,74	-	-	-	-	-	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	12,38	6,28	-	-	-	-	-	*Loans*
Liabilitas								*Liabilities*
Simpanan nasabah	1,26	1,96	0,14	0,22	-	0,54	0,62	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	5,08	-	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*

	2023							
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Yen Jepang/ *Japanese Yen*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Hong Kong/ *Hong Kong Dollar*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	
	%	%	%	%	%	%	%	
Aset								*Assets*
Giro pada bank lain	1,08	0,12	0,24	10,73	17,08	2,62	1,03	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,40	0,13	-	-	-	-	0,50	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	7,40	2,80	-	-	-	-	-	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	12,11	5,95	-	-	-	-	-	*Loans*
Liabilitas								*Liabilities*
Simpanan nasabah	1,32	1,56	0,16	0,23	-	0,63	0,61	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	4,95	-	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan yang memiliki tingkat suku bunga pada nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dikategorikan berdasarkan tanggal kontraktual perubahan tingkat suku bunga atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih dahulu:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

The following table presents the interest bearing financial assets and liabilities at the carrying amount as at December 31, 2024 and 2023, which are categorized by the earlier contractual repricing or maturity dates:

	2024						
	Kurang dari 6 bulan/ *Less than 6 months*	6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *6 months until 12 months*	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *1 year until 2 years*	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ *2 years until 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	
Giro pada bank lain	594.011	-	-	-	-	594.011	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.162.616	-	-	-	-	2.162.616	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.760.642	331.527	-	1.554.754	1.393.644	5.040.567	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	26.463.326	4.249	9.077	45.986	5.428	26.528.066	*Loans*
Total aset keuangan	30.980.595	335.776	9.077	1.600.740	1.399.072	34.325.260	*Total financial assets*
Simpanan nasabah	25.379.225	8.515.992	4.310	-	-	33.899.527	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2.017.240	306.877	-	-	-	2.324.117	*Deposits from other banks*
Total liabilitas keuangan	27.396.465	8.822.869	4.310	-	-	36.223.644	*Total financial liabilities*
Selisih penilaian bunga - neto	**3.584.130**	**(8.487.093)**	**4.767**	**1.600.740**	**1.399.072**	**(1.898.384)**	***Net interest repricing gap***

	2023						
	Kurang dari 6 bulan/ *Less than 6 months*	6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *6 months until 12 months*	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *1 year until 2 years*	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ *2 years until 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	
Giro pada bank lain	549.233	-	-	-	-	549.233	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.370.445	-	-	-	-	3.370.445	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	-	-	2.485.172	1.399.173	3.884.345	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	23.798.176	6.014	11.582	59.849	4.217	23.879.838	*Loans*
Total aset keuangan	27.717.854	6.014	11.582	2.545.021	1.403.390	31.683.861	*Total financial assets*
Simpanan nasabah	23.812.487	5.943.676	2.249.468	-	-	32.005.631	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2.956.518	221.516	37.525	-	-	3.215.559	*Deposits from other banks*
Total liabilitas keuangan	26.769.005	6.165.192	2.286.993	-	-	35.221.190	*Total financial liabilities*
Selisih penilaian bunga - neto	**948.849**	**(6.159.178)**	**(2.275.411)**	**2.545.021**	**1.403.390**	**(3.537.329)**	***Net interest repricing gap***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

Analisis atas sensitivitas Bank, berupa perubahan pendapatan bunga neto sampai dengan 1 (satu) pelaporan periode kedepan, atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris pada kurva imbal hasil dan laporan posisi keuangan yang tetap adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

An analysis of the Bank's sensitivity, in terms of net interest income changes for the whole 1 (one) reporting period ahead as an impact of the increase or decrease in market interest rates, by assuming no asymmetrical movement in curves and a constant statement of financial position are as follows:

	IDR		USD		
	Kenaikan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Increase in average interest rate of 1%*	**Penurunan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Decrease in average interest rate of 1%***	**Kenaikan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Increase in average interest rate of 1%***	**Penurunan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Decrease in average interest rate of 1%***	
2024					***2024***
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(41.384)	41.384	12.247	(12.247)	*Sensitivity of projected interest income - net*
2023					***2023***
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(17.580)	17.580	11.569	(11.569)	*Sensitivity of projected interest income - net*

2. Risiko nilai tukar

Sebagai bank devisa, Bank tentunya tidak dapat terlepas dari risiko nilai tukar atau risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing sebagai akibat belum stabilnya kondisi ekonomi makro Indonesia maupun negara lain akibat krisis keuangan global yang sangat dirasakan. Kondisi ini mengharuskan Bank menjaga posisi instrumen dan liabilitas valuta asingnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia, untuk memitigasi potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

Bank membentuk ALCO yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan instrumen dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah menetapkan batasan-batasan seperti batas transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Foreign Exchange), Bank Notes* dan *Money Market*.

2. Foreign exchange rate risk

As a foreign exchange bank, the Bank is inseparable from the foreign exchange rate risk or the risk of exchange rate fluctuations as a result of the unstable macro economic conditions in Indonesia and other countries due to the global financial crisis that is very much felt. This condition requires the Bank to maintain the position of assets and liabilities denominated in foreign currency in a position in accordance with Bank Indonesia regulation, to mitigate potential losses in the event of exchange rate fluctuations.

The Bank established ALCO which is responsible in setting the strategy in the management of its assets and liabilities in accordance with the applicable regulations. In addition, the Bank also has set-up restrictions such as transaction limits for Foreign Exchange, Bank Notes and Money Market.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

2. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Dari sisi pengembangan *Information Technology* (IT), Bank mengoptimalkan aplikasi OPICS, yang saat ini telah diimplementasikan sebagai sistem yang mendukung transaksi *Treasury*.

Bank telah mengelola posisi mata uang asing untuk aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan memonitor Posisi Devisa Neto (PDN). Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PDN Bank telah diungkapkan dalam Catatan 51j.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

2. Foreign exchange rate risk (continued)

In terms of Information Technology (IT) development, the Bank optimizes OPICS application, which has been implemented as a system that supports the Treasury transaction.

The Bank manages its foreign currency position for its financial assets and liabilities by monitoring the Bank's Net Open Position (NOP). As at December 31, 2024 and 2023, the Bank's NOP has been disclosed in Note 51j.

The table below summarizes the exposure to foreign currency exchange rate risk as at December 31, 2024 and 2023. Included in the table are financial instruments at carrying amounts, categorized by currency is as follows:

	2024						
	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Lain-lain/ *Others*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	94.258	782	4.881	269	4.371	104.561	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	116.804	-	-	-	-	116.804	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	291.843	16.890	17.348	7.542	215.972	549.595	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	321.941	-	-	-	-	321.941	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	28.517	-	-	-	-	28.517	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	4.985	-	-	2	-	4.987	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	2.907.514	-	-	-	-	2.907.514	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10.719	-	-	-	-	10.719	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	53.478	-	-	-	53.478	*Other assets*
Sub-total	3.776.581	71.150	22.229	7.813	220.343	4.098.116	*Sub-total*
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	31	-	-	733	-	764	*Obligations due immediately*
Liabilitas derivatif	7.745	-	-	-	-	7.745	*Derivative payables*
Simpanan nasabah	2.340.397	16.824	24.166	7.958	175.316	2.564.661	*Deposits from customers*
Bunga yang masih harus dibayar	7.301	2	21	5	10	7.339	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	20	-	-	1	135	156	*Accrued expenses and other liabilities*
Sub-total	2.355.494	16.826	24.187	8.697	175.461	2.580.665	*Sub-total*
Neto	**1.421.087**	**54.324**	**(1.958)**	**(884)**	**44.882**	**1.517.451**	***Net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

2. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang sebagai berikut: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

2. Foreign exchange rate risk (continued)

The table below summarizes the exposure to foreign currency exchange rate risk as at December 31, 2024 and 2023. Included in the table are financial instruments at carrying amounts, categorized by currency is as follows: (continued)

	2023						
	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	**Euro Eropa/ *European Euro***	**Dolar Singapura/ *Singapore Dollar***	**Dolar Australia/ *Australian Dollar***	**Lain-lain/ *Others***	**Total**	
Aset							***Assets***
Kas	36.730	1.818	8.888	2.628	41.770	91.834	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	121.408	-	-	-	-	121.408	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	271.026	435	38.084	8.843	183.158	501.546	*Current accounts with other banks*
Efek-efek	27.766	-	-	-	-	27.766	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	18.906	-	-	-	-	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	3.071.034	-	-	-	-	3.071.034	*Loans*
Tagihan akseptasi	1.222	-	-	-	-	1.222	*Acceptances receivable*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	19.610	-	-	-	-	19.610	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	51.159	8.788	-	-	-	59.947	*Other assets*
Sub-total	3.618.861	11.041	46.972	11.471	224.928	3.913.273	*Sub-total*
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	488	-	-	-	691	1.179	*Obligations due immediately*
Liabilitas derivatif	343	-	-	-	-	343	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	1.222	-	-	-	-	1.222	*Acceptance payables*
Simpanan nasabah	1.996.112	2.565	45.973	11.331	222.036	2.278.017	*Deposits from customers*
Bunga yang masih harus dibayar	4.101	1	103	6	-	4.211	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	128	1	-	-	104	233	*Accrued expenses and other liabilities*
Sub-total	2.002.394	2.567	46.076	11.337	222.831	2.285.205	*Sub-total*
Neto	**1.616.467**	**8.474**	**896**	**134**	**2.097**	**1.628.068**	***Net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

2. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel dibawah ini menggambarkan posisi mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dimana Bank memiliki risiko yang signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisis tersebut menghitung pengaruh dari pergerakan wajar mata uang asing yang memungkinkan terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lain dianggap konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (akibat adanya perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

2. Foreign exchange rate risk (continued)

The table below indicates the foreign currency position of non-trading monetary assets and liabilities as at December 31, 2024 and 2023 which the Bank has significant exposure against its forecasted cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the statement of profit or loss and other comprehensive income (due to changes in the fair value of currency sensitive to non-trading monetary assets and liabilities).

	2024		
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase/(decrease) in exchange rate*	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity of profit or loss*	
Mata uang			***Currency***
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	886,97/(886,97)	*United States Dollar*
Euro Eropa	10/(10)	0,01/(0,01)	*European Euro*
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,21/(0,21)	*Great Britain Poundsterling*

	2023		
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase/(decrease) in exchange rate*	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity of profit or loss*	
Mata uang			***Currency***
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	1.003/(1.003)	*United States Dollar*
Euro Eropa	10/(10)	(0,18)/0,18	*European Euro*
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,64/(0,64)	*Great Britain Poundsterling*

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book*

Risiko suku bunga dalam *Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

3. Interest rate risk in the Banking Book

Interest rate ratio in the Banking Book is a risk due to interest rate movements in the market that are opposite to the Banking Book position, which has the potential to have an impact on capital and income of the Bank, both now and in the future.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

a. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
b. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi *sensitivity analysis* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book (continued)

In accordance SEOJK No. 12/SEOJK. 03/2018 concerning "Application of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach to Interest Rate Risk in the Banking Book for Commercial Banks", the Bank uses 2 (two) methods in measuring IRRBB Risk is as follows:

a. Measurement based on changes in the economic value of equity, hereinafter abbreviated as EVE, is a method that measures the impact of changes in interest rates on the economic value of the Bank's equity; and
b. Measurement based on changes in net interest income, hereinafter abbreviated as NII, is a method that measures the impact of changes in interest rates on the Bank's income.

Based on the results of a sensitivity analysis simulation for the years ended December 31, 2024 and 2023, the impact of changes in interest rates on the economic value of equity and net interest income is as follows:

	ΔEVE		ΔNII	
Pada/*As of*	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Parallel up	(283.304)	(168.897)	(141.041)	(47.180)
Parallel down	345.341	230.044	141.041	47.180
Steepener	(57.187)	(118.621)	-	-
Flattener	(7.231)	76.778	-	-
Short rate up	146.562	24.607	-	-
Short rate down	(138.358)	(22.596)	-	-
Nilai Maksimum Negatif (absolut)/*Negative Maximum Value (absolute)*	283.304	168.897	141.041	47.180
Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)/ *Tier 1 Capital (for ΔEVE) or Projected Income (for ΔNII)*	3.245.475	3.071.466	753.242	575.011
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)/*Maximum Value divided by Tier 1 Capital (for ΔEVE) or Projected Income (for ΔNII)*	8,73%	5,50%	18,72%	8,21%

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Metode perhitungan dalam tabel diatas sesuai dengan SEOJK *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)* No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Analisa Kualitatif IRRBB

a. Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan liabilitas atau strategi *hedging*.

b. Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh Dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung dari posisi duration (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan liabilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, ΔEVE Bank masih berada di bawah 15% dari modal inti, sehingga berdasarkan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari IRRBB tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang. Bank melakukan langkah-langkah penambahan modal dan perbaikan manajemen risiko.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book (continued)

The calculation method in the table above is in accordance with SEOJK Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) No. 12/SEOJK.03/2018 dated August 21, 2018.

IRRBB Qualitative Analysis

a. An explanation of how the Bank defines the IRRBB for risk measurement and management.

The Bank carries out control and mitigation of interest rate risk through asset and liability recomposition strategies or hedging strategies.

b. A description of the IRRBB management and mitigation strategy.

The Bank determines the IRRBB control strategy that is in line with the Bank's overall business strategy by taking into account the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance approved by the Board of Directors. Meanwhile, the IRRBB mitigation strategy for changes in the economic value of capital (ΔEVE) is determined depending on the position duration (average repricing maturity) of assets and liabilities. As at December 31, 2024, ΔEVE Bank is still below 15% of Tier 1 capital, so that based on SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 the potential decrease in economic value from IRRBB is low for a certain period of time in the future. The Bank has taken steps to increase capital and improve its risk management.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Analisa Kualitatif IRRBB (lanjutan)

c. Periodisasi perhitungan IRRBB Bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

- Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
- Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan *margin* komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

d. Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan Bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Berdasarkan ketentuan regulator untuk ΔEVE, Bank menerapkan skenario:

- *Shock* suku bunga yang paralel ke atas (*parallel shock up*).
- *Shock* suku bunga yang paralel ke bawah (*parallel shock down*).
- *Shock* suku bunga yang melandai (*steepener shock*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book (continued)

IRRBB Qualitative Analysis (continued)

c. Periodization of Bank IRRBB calculations, and an explanation of the specific actions used by Banks to measure sensitivity to IRRBB.

To ensure that the IRRBB is properly monitored, the Bank performs an IRRBB calculation for each position at the end of the reporting month and reports according to applicable regulations. Measurement of sensitivity to IRRBB is carried out according to the provisions in the SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 dated August 21, 2018, among others, as follows:

- *IRRBB calculation takes into account the entire Banking Book position by issuing equity and grouped by material currency positions for the Bank.*
- *Calculation ΔEVE does not take into account the existence of commercial margins in cash flows and discounts on cash flows.*

d. An explanation of the interest rate shock scenario and the stress scenario used by Bank to estimate changes in economic value and earnings.

Based on the regulatory provisions for ΔEVE, the Bank applies a scenario:

- *Parallel interest rate shock upwards (parallel shock up).*
- *Parallel shock down interest rates (parallel shock down).*
- *Sloping interest shock (steepener shock).*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Analisa Kualitatif IRRBB (lanjutan)

d. Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan Bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*. (lanjutan)

- *Shock* suku bunga yang mendatar (*flattener shock*).
- *Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat (*short rates shock up*).
- *Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun (*short rates shock down*).

Untuk ΔNII:

- *Shock* suku bunga yang *parallel* ke atas (*parallel shock up*).
- *Shock* suku bunga yang *parallel* ke bawah (*parallel shock down*).

e. Asumsi permodalan yang berdampak signifikan dalam perhitungan.

Dalam perhitungan IRRBB, Bank menggunakan asumsi permodalan dengan pendekatan standar maupun acuan yang ditetapkan oleh regulator.

f. Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodalan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung IRRBB merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book (continued)

IRRBB Qualitative Analysis (continued)

d. An explanation of the interest rate shock scenario and the stress scenario used by Bank to estimate changes in economic value and earnings. (continued)

- *Horizontal tribal shock (flattener shock).*
- *Short-term shock on rising interest rates (short rates shock up).*
- *Shock short-term interest rates decrease (short rates shock down).*

For ΔNII:

- *Parallel interest rate shock upwards (parallel shock up).*
- *Shock in parallel interest rates (parallel shock down).*

e. Capital assumptions that have a significant impact on calculations.

In the IRRBB calculation, the Bank uses capital assumptions using standard approach and references that is set by the regulator.

f. A comprehensive explanation of the key assumptions of capitalization and parametric used in calculating ΔEVE and ΔNII.

The assumptions used by the Bank in calculating IRRBB refer to the Financial Services Authority Regulation which regulates the Implementation of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book and the Financial Services Authority Regulation which regulates the obligation to fulfill liquidity adequacy ratio.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Analisa Kuantitatif IRRBB

a. Rata-rata *repricing maturity* yang ditetapkan untuk NMD.

Dalam menetapkan *maturity repricing* untuk NMD, Bank melakukan pendekatan konservatif dengan memperhitungkan NMD ke dalam penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) *overnight.*

b. *Maturity repricing* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

Bank melakukan pendekatan konservatif dengan memperhitungkan NMD ke dalam penyesuaian suku bunga (*maturity repricing*) *overnight*.

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul dari ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban arus kas yang bersifat kontraktual baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang atau kewajiban yang diharuskan peraturan yang telah jatuh tempo tanpa mempengaruhi aktivitas harian dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima.

Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book (continued)

IRRBB Quantitative Analysis

a. Average repricing maturity set for NMD.

In setting up maturity repricing for NMD, the Bank takes a conservative approach by calculating NMD into maturity repricing overnight.

b. Longest maturity repricing applied for NMD.

The Bank takes a conservative approach by calculating NMD into overnight maturity repricing.

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the current and prospective risk to earnings or capital arising from the Bank's inability to meet its current and future contractual cash flows or regulatory obligations when they are due without affecting daily operations and incurring unacceptable losses.

The main objective of liquidity risk management is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain funding sources of cash flow.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Bank berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, dan juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, Bank telah mempunyai Standar Prosedur Operasional *Liquidity Contingency Plan* (LCP).

Limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis Bank, kompleksitas kegiatan usaha Bank, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar dimana Bank tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas dan modal yang tersedia.

Beberapa strategi yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain, adalah:

1. Komitmen dari pemegang saham Bank untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pengendalian risiko likuiditas, sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid;
3. Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*;
4. Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap*, proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin;
5. Meningkatkan kerja sama dengan bank lain agar dapat memanfaatkan fasilitas *interbank call money* maupun *repurchase* (*repo*) efek *interbank*.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The Bank has program to increase effectiveness of liquidity maturity gap management (maturity gap and the projected cash flows) to anticipate the liquidity risk as early as possible and also controls the liquidity risk during stressful conditions. The Bank also has developed a Contingency Funding Plan, and also maintain its ability to access the money market by maintaining relationship with correspondent banks. To detect liquidity risk, the Bank has established Standard Operating Procedures for Liquidity Contingency Plan (LCP).

Liquidity risk limit must be consistent and relevant to the Bank's business, the complexity of the Bank's business, risk tolerance, characteristics of the product, currency, markets in which the Bank has active transactions, historical data, the level of profitability and available capital.

The Bank carried out several strategies to manage the risks which, among others, are as follows:

1. *The Bank's shareholders commitment to comply with the provisions of Bank Indonesia in order to control liquidity risk, at any time if needed;*
2. *Conduct investments portfolio towards more liquid investments;*
3. *Encourage development of the number of low cost investment funds at reasonable price or low cost fund customers;*
4. *Increase effectivity on management of liquidity gap (maturity gap, cash flows projections) to anticipate liquidity risk as early as possible;*
5. *Develop cooperation with other banks in order to utilize the facilities of interbank call money and repurchase (repo) interbank securities.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iii)Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis jatuh tempo aset dan liabilitas (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The maturity analysis of assets and liabilities (before allowance for impairment losses) by maturity groups based on the remaining period until the maturity date as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024						
	Kurang dari atau sampai dengan 1 bulan/ *Less than 1 month or up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan/ *More than 3 months up to 6 months*	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 6 months up to 12 months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	331.700	-	-	-	-	331.700	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	474.261	-	-	-	-	474.261	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	594.011	-	-	-	-	594.011	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.162.616	-	-	-	-	2.162.616	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	424.282	631.394	1.263.430	77.210	2.644.251	5.040.567	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.332.222	-	-	-	-	1.332.222	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	4.987	-	-	-	-	4.987	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	3.033.953	4.119.226	2.834.886	2.294.930	14.245.071	26.528.066	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	24.594	39.316	15.413	8.463	99.939	187.725	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	10.606	-	-	-	53.478	64.084	*Other assets*
Total aset	**8.393.232**	**4.789.936**	**4.113.729**	**2.380.603**	**17.042.739**	**36.720.239**	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	50.385	-	-	-	-	50.385	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	18.374.091	9.473.908	4.472.046	1.222.004	357.478	33.899.527	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.811.440	367.600	133.877	11.200	-	2.324.117	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	7.745	-	-	-	-	7.745	*Derivative payables*
Bunga yang masih harus dibayar	54.577	34.712	15.544	2.921	167	107.921	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	-	-	-	-	11.649	*Accrued expenses and other liabilities*
Total liabilitas	**20.309.887**	**9.876.220**	**4.621.467**	**1.236.125**	**357.645**	**36.401.344**	***Total liabilities***
Aset (liabilitas) - neto	**(11.916.655)**	**(5.086.284)**	**(507.738)**	**1.144.478**	**16.685.094**	**318.895**	***Assets (liabilities) - net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Profil Risiko (lanjutan)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

(iii) Liquidity risk (continued)

Analisis jatuh tempo aset dan liabilitas (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (lanjutan):

The maturity analysis of assets and liabilities (before allowance for impairment losses) by maturity groups based on the remaining period until the maturity date as at December 31, 2024 and 2023 are as follows (continued):

	2023						
	Kurang dari atau sampai dengan 1 bulan/ *Less than 1 month or up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan/ *More than 3 months up to 6 months*	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 6 months up to 12 months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	201.930	-	-	-	-	201.930	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.013.146	-	-	-	-	2.013.146	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	549.233	-	-	-	-	549.233	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.370.445	-	-	-	-	3.370.445	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	-	-	-	3.884.345	3.884.345	*Marketable securities*
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.466.541	-	-	-	-	1.466.541	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	18.906	-	-	-	-	18.906	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	23.744.062	53.575	539	6.014	75.648	23.879.838	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	10.935	-	1.222	-	12.157	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	162.506	35	-	-	44.580	207.121	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	65.004	-	-	-	-	65.004	*Other assets*
Total aset	**31.591.773**	**64.545**	**539**	**7.236**	**4.004.573**	**35.668.666**	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	86.614	-	-	-	-	86.614	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	14.565.446	9.093.436	5.485.675	2.861.074	-	32.005.631	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2.566.504	509.464	129.516	10.075	-	3.215.559	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	343	-	-	-	-	343	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	10.935	-	1.222	-	12.157	*Acceptance payables*
Bunga yang masih harus dibayar	87.123	-	-	-	-	87.123	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.306	-	-	-	-	11.306	*Accrued expenses and other liabilities*
Total liabilitas	**17.317.336**	**9.613.835**	**5.615.191**	**2.872.371**	**-**	**35.418.733**	***Total liabilities***
Aset (liabilitas) - neto	**14.274.437**	**(9.549.290)**	**(5.614.652)**	**(2.865.135)**	**4.004.573**	**249.933**	***Assets (liabilities) - net***

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The table below shows the maturity analysis of liabilities of the Bank as at December 31, 2024 and 2023 based on the remaining contractual maturities of the Bank's financial liabilities based on undiscounted cash flow:

	2024						
	Nilai jatuh tempo/ *Maturity value*	**Tidak memiliki jatuh tempo/ *No maturity***	**≤ 1 bulan/ *≤ 1 month***	**> 1 - 3 bulan/ *> 1 - 3 months***	**> 3 - 12 bulan/ *> 3 - 12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	50.385	50.385	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	3.129.373	3.129.373	-	-	-	-	*Demand deposits*
Tabungan	2.214.003	2.198.583	617	1.324	6.367	7.112	*Saving deposits*
Deposito	29.771.583	16.685	13.712.686	9.829.892	5.849.027	363.293	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	2.416.273	820.518	1.063.621	383.023	149.111		*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	7.745	-	7.745	-	-	-	*Derivative liabilities*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.649	11.649	-	-	-	-	*Accrued expenses and other liabilities*
Total liabilitas keuangan	**37.601.011**	**6.227.193**	**14.784.669**	**10.214.239**	**6.004.505**	**370.405**	***Total financial liabilities***

	2023						
	Nilai jatuh tempo/ *Maturity value*	**Tidak memiliki jatuh tempo/ *No maturity***	**≤ 1 bulan/ *≤ 1 month***	**> 1 - 3 bulan/ *> 1 - 3 months***	**> 3 - 12 bulan/ *> 3 - 12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	86.614	86.614	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	2.576.426	2.576.426	-	-	-	-	*Demand deposits*
Tabungan	2.145.104	2.145.104	-	-	-	-	*Saving deposits*
Deposito	28.345.316	41	13.422.511	8.548.579	5.678.894	695.291	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	3.332.854	1.865.495	823.777	524.044	119.538	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	343	-	343	-	-	-	*Derivative liabilities*
Liabilitas akseptasi	12.157	-	12.157	-	-	-	*Acceptance payables*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	11.306	11.306	-	-	-	-	*Accrued expenses and other liabilities*
Total liabilitas keuangan	**36.510.120**	**6.684.986**	**14.258.788**	**9.072.623**	**5.798.432**	**695.291**	***Total financial liabilities***

(iv) Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang akan mempengaruhi operasional Bank.

Bank menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Bank telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi *risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation* serta dilakukan *monitoring* dan *reporting* atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan *benefit* dari suatu produk/layanan atau proses transaksi/aktivitas dengan potensi risiko operasional yang telah diperhitungkan.

(iv) Operational risk

Operational risk is the risk that arise from the malfunction and/or inadequacy of internal proccess, human errors, system failure, or external problem affecting the operations of the Bank.

The Bank implements operational risk management with the goal of ensuring that it has performed a risk management process that includes risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation and performed monitoring and reporting on its implementation. It is done with the ultimate goal to maximize the benefits of a product/service or transaction/activity process with the potential operational risks are being considered.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iv) Risiko operasional (lanjutan)

Pengelolaan risiko operasional ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dari tiap unit kerja, sehingga dapat menurunkan frekuensi dan dampak dari suatu kerugian. Bentuk pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru, Bank selalu melakukan kajian risiko sesuai dengan amanat dari regulator.
2. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas Standar Prosedur Operasional masing-masing unit kerja secara berkala.
3. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
4. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan keandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
5. Melakukan peningkatan pada IT *Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada Bank.
6. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem yang digunakan untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai maupun biaya diamortisasi atas provisi sesuai PSAK 109.
7. Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
8. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui *Internal Audit Division* (IAD) dan *Anti Fraud* sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian internal.
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
10. Melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Operational Risk Report.*

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iv) Operational risk (continued)

Operational risk management is being addressed in order to increase a culture of risk awareness of each working unit, so it can reduce the frequency and impact of a loss. The operational risk management being performed is as follows:

1. *On each new product or activity, the Bank is performing the risk assessment in accordance with the requirement of the regulators.*
2. *Conducting a periodic review and improvement of the Standard Operating Procedures of each working unit on a regular basis.*
3. *Ensuring the availability of the Disaster Recovery Plan (DRP) that is being tested periodically in case of IT disruption.*
4. *Operational risk management is also being supported by strengthening the security and reliability of information technology, so that the system failure and human error can be reduced.*
5. *Increasing the IT Security System for the entire system in the Bank.*
6. *Developing and improving the system that is used for the calculation of allowance for impairment losses and amortized cost of provision in accordance with PSAK 109.*
7. *Setting-up of limit of authority in banking operational transactions.*
8. *Improving the internal control functions through the Internal Audit Division (IAD) and Anti Fraud to strengthen the internal control system.*
9. *Improving the quality of human resources by developing the frequency of internal and external training in the function of credit, marketing products and motivational work.*
10. *Identifying of the risk events that may occur in branches resulting to losses and then the monitoring is performed by using the Operational Risk Report.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iv) Risiko operasional (lanjutan)

Pengelolaan risiko operasional ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dari tiap unit kerja, sehingga dapat menurunkan frekuensi dan dampak dari suatu kerugian. Bentuk pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan sebagai berikut (lanjutan):

11. Melakukan pencatatan atas data kerugian, dimana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
12. Melakukan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau tren tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan identifikasi melalui RCSA tersebut akan diterapkan pada seluruh unit kerja.
13. Meningkatkan fungsi *Quality Assurance* baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat untuk mengoptimalkan *internal control* di *second line of defense* serta memastikan pelaksanaan aktivitas operasional dan perkreditan berjalan sesuai dengan Kebijakan/SOP Bank.

Bank membentuk tim *Bussiness Continuity Plan* (BCP), dimana tim tersebut memiliki tugas untuk mengoordinasi pelaksanaan BCP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Pelaksanaan BCP itu sendiri mempunyai tujuan untuk meminimalkan risiko, menangani dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. Selain itu, Bank juga telah dilengkapi dengan Kebijakan maupun *Standard Operating Procedure* dan kebijakan BCP. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan reviu *Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process* dan telah melakukan sosialisasi dan uji coba BCP ke seluruh cabang dengan simulasi antara lain bencana kebakaran dan dilanjutkan melakukan reviu Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional, serta reviu Prosedur Alternatif (*Contingency Plan*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iv) Operational risk (continued)

Operational risk management is being addressed in order to increase a culture of risk awareness of each working unit, so it can reduce the frequency and impact of a loss. The operational risk management being performed is as follows (continued):

11. Maintaining recording the loss of data, where the data is used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profile.

12. Performing the Risk and Control Self-Assessment (RCSA), a methodology for identifying the sources of risk, which is used to measure the level of risk, monitor the level of trend of risk, as well as controlling and mitigating risks. Implementation of identification through the RCSA is applied to all working units.

13. Improve the Quality Assurance function both at Branch Offices and at Headquarter to optimize internal control in the second line of defense and ensure the implementation of operational and credit activities in accordance with the Bank's Policies/SOP.

The Bank has setup a Business Continuity Plan (BCP) team, where the team has duties to coordinate the implementation of the BCP in accordance with the requirements and conditions of the Bank. The implementation of BCP has the objectives to minimize the risk, to handle the impact of disruption/disaster and recovery process so the operational activities of the Bank and services to customers are running continuously. In addition, the Bank is also equipped with Standard Operating Procedures and Policy of BCP. The Bank has improved its BCP by reviewing Business Impact Analysis (BIA) in accordance with the business process and has socialized and tested the BCP to the entire branches, such as, fire disaster simulation and continued with the review of Policies and Standard Operating Procedures, as well as the review of Alternative Procedures (Contingency Plan).

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(v) Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Sebagai sebuah entitas yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Bank harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia dan instansi berwenang lainnya terkait dengan Bank. Selain itu, Bank juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Bank. Kegagalan Bank dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Bank.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan penelaahan kembali dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Selain itu, juga dilakukan pendataan atas kasus-kasus hukum yang terjadi dan telah dikelola oleh Divisi C*orporate Legal and Litigation*. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit. Selain itu, untuk melengkapi Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur di bidang Hukum, Divisi *Corporate Legal and Litigation* telah melengkapi dengan membuat Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur mengenai produk, *advice and policy*, litigasi dan kebijakan hukum Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(v) Legal risk

Legal risk is the risk related to legal claims and/or weakness in the legal aspect, such weakness in legal aspect is caused, among others, by the lack of the supporting legislation or weakness of the contracts such as incomplete requirements for a valid contract and imperfect document contract.

As an entity that is established in the jurisdiction of the law of Indonesia, the Bank shall always be subjected to all the regulations issued by Financial Services Authority and Bank Indonesia as the regulator of the banking industry in Indonesia and other authorities related to the Bank. In addition, the Bank must also comply with any regulations in society that is relevant either directly or indirectly to its business activities. The Bank's incompliance to the regulation may result in the claim or lawsuits that will be addressed to the Bank.

Legal risk management is performed by reviewing the legal documents, agreements and contracts with third parties. Further more, it also performed an assessment of legal cases that occured and has been managed by the Corporate Legal and Litigation Division. The legal cases handling have been prepared on the priority basis and the progress is well monitored and reported to the management to be followed up through a completion which contains less potential legal risk. In addition, to complete the Legal Policy and Standard Operating Procedure, the Corporate Legal and Litigation Division has fit up the policy by establishing the Policies and Standard Operating Procedure regarding the products, advice and policy, litigation and legal policy of the Bank.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(v) Risiko hukum (lanjutan)

Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Bank memiliki Divisi *Corporate Legal and Litigation*. Divisi tersebut memiliki peranan antara lain:

1) Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
2) Memberikan analisa/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
3) Memberikan advis atas eksposur hukum akibat perubahan ketentuan atau peraturan;
4) Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga;
5) Melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat; dan
6) Memantau risiko hukum yang ada di seluruh cabang Bank.

Dengan adanya divisi tersebut, maka Bank memiliki kebijakan hukum dan standar dokumen hukum baku yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat, dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek yuridis dari Bank. Selain itu, Divisi *Corporate Legal and Litigation* Bank juga memiliki fungsi litigasi yang salah satu tugasnya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisasi.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Bank senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara musyawarah mufakat/damai ataupun melalui jalur pengadilan. Bank juga memberikan perhatian khusus atas kasus hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian secara signifikan.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(v) Legal risk (continued)

To mitigate the legal risks that may arise from lawsuit or juridical weakness, the Bank has a Corporate Legal and Litigation Division. This division has the following roles:

1) Conducts legal analysis on the new product and/or activities as well as creating a standard legal documents related to the product and/or activities;
2) Provide analysis/legal advice to all employees at every level of the organization;
3) Provide advice on the legal exposure due to changes in rule or regulation;
4) Examine any agreements that will be made between the Bank and third parties;
5) Conduct periodic inspections on the agreement that has been made; and
6) Monitor the legal risks in the overall Bank's branches.

Through this division, the Bank has legal policies and standard general legal documents related to the product or banking facilities offered by the Bank to the community, where such legal policy and standard general legal documents are created with reference to the provisions of applicable laws and considering the interest of the juridical aspects of the Bank. In addition, the Bank's Corporate Legal and Litigation Division has the litigation function by handling all legal issues related to litigation in order to minimize legal risks that may arise.

The legal risk is also conducted by monitoring the development of legal cases and take lessons learned principle from those cases. The management of legal cases conducted by the Bank at all time calculates potential loss, either through settlement or court. The Bank also pays special attention to legal cases which potentially may create significant loss to the Bank.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(vi) Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Kegagalan Bank dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Bank. Apabila risiko ini dihadapi oleh Bank, maka dalam waktu singkat dapat terjadi hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan usaha dan *volume* aktivitas Bank.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui pemantauan terhadap publikasi media yang bekerjasama dengan jasa pihak ketiga. Selain itu, Bank juga melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *call center* dalam penanganan keluhan nasabah.

Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media dan *gathering* dengan nasabah.

Bank meyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Bank yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memperbaiki reputasi.

Reputasi dan dukungan pemegang saham secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(vi) Reputation risk

Reputation risks are the risks related to the decreasing level of stakeholder confidence arising from the negative perception of the Bank.

The Bank's failure to protect its reputation in the public's perception may result in negative view and also perception by the public towards the Bank. If the Bank faces this risk, in the short run the Bank may lose the customer's trust that will ultimately result in a negative impact to the Bank's income and activity's volume.

The management of reputation risk includes monitoring through media publication collaboration with third party services. In addition, the Bank also monitors customer complaints to handle complaints promptly, as well as to optimize the function of call center in the handling of customer complaints.

In implementation of risk management, the Bank is actively running its Corporate Social Responsibility (CSR) and other social activities, public expose, building relationship with the media and conducting customer gatherings.

The Bank believes that every aspect of the effectiveness of its good management (including risk management and internal control systems) in relation to Good Corporate Governance (GCG) will improve its reputation.

The reputation and professional support from shareholder assists management to improve the reputation and public trust through better performance improvement and work programs that directly implicates the risk management reputation.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(vii) Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan dari manajemen risiko untuk risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa dalam proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah institusi keuangan terdepan di Indonesia, Bank membutuhkan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ketidakmampuan Bank dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Bank di masa yang akan datang.

Risiko ini juga mencakup kemampuan Bank dalam mengembangkan daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif Bank di tengah kompetisi industri perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan Bank dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu akan mengakibatkan kegagalan bagi Bank untuk mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan. Dalam jangka panjang, apabila risiko ini terus dihadapi oleh Bank, hal ini akan berdampak terhadap kelangsungan bisnis Bank. Oleh sebab itu, Bank telah melakukan beberapa langkah mitigasi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(vii) Strategic risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in deciding and/or implementing a strategic decision as well as the failure in anticipating the changes in the business environment.

The purpose of risk management for strategic risk is to ensure that the process of risk management will minimize possible negative impacts of inaccurate implementation of the strategy and failure to anticipate changes in the business environment.

In order to grow and develop as one of the leading financial institutions in Indonesia, the Bank needs to adopt certain strategies to achieve such goals. The Bank's failure in formulating the right strategy may deteriorate the Bank's business in the future.

This risk also includes the Bank's ability to develop its competitiveness and to create a competitive excellence amidst the tight competition in the banking industry. The inability to cope with such business challenges which are constantly changing from time to time will lead to failure to accomplish specified vision. In the longer term, if the Bank faces such risks, it will affect the continuity of the Bank's operations. Therefore, the Bank has taken several mitigation steps.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(vii) Risiko stratejik (lanjutan)

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini dilakukan dengan cara:

a. Bank menetapkan stratejik menyesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi makro dengan Visi dan Misi serta arah bisnis Bank.

b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan target sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

c. Melakukan revisi dan pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal sehingga menjadi realistis dengan pencapaian target Bank.

d. Pemantauan atas pelaksanaan rencana strategi dan bisnis secara rutin dilakukan baik harian, mingguan dan bulanan.

(viii) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jika risiko kepatuhan tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah. Selain itu, Bank juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan yang mengatur Jasa Keuangan, Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas dan Perpajakan.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(vii) Strategic risk (continued)

Some steps taken to anticipate these risks are as follows:

a. The Bank establishes strategic adjustments in line with macroeconomic developments, its Vision and Mission, and business direction.

b. Monitoring financial performance by comparing actual results with targets in accordance with the Bank's Business Plan.

c. Revising and updating strategies to align with internal and external developments, ensuring they remain realistic in achieving the Bank's targets.

d. Regular monitoring of the implementation of strategic and business plans is conducted on a daily, weekly, and monthly basis.

(viii) Compliance risk

Compliance risk is the risk that arise when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. If compliance risk is not well managed, it will lead to potential penalty charges, punishments, or damage to reputation.

In running the banking industry, the Bank is required to comply with the banking regulations issued by Bank Indonesia and the Government. In addition, the Bank is also required to comply with several other rules such as: Financial Services Authority Regulation and Regulation on Deposit Guarantee Program, Limited Liability Company and Taxation.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(viii) Risiko kepatuhan (lanjutan)

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada sebuah perseroan terbatas yang terkait erat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, yang mengatur kewajiban Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Kualitas Aset Produktif; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Penerapan Tata Kelola yang Baik; dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha Bank.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini adalah dengan:

a. Menyusun Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single Customer Identity File (CIF)* serta penanganan rekening pasif/dorman.

c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana Bank secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Divisi Kepatuhan.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(viii) Compliance risk (continued)

In general, the compliance risk is embedded in the limited liability company which is related to the prevailing laws and regulations and other regulations, which regulate the Bank's responsibility as a banking institution, such as: credit risks related to Capital Adequacy Ratio (CAR) regulations; Earning Assets Quality; Allowance for Impairment Losses (CKPN); Legal Lending Limit (LLL); Good Corporate Governance (GCG); and other risks related to certain regulations. The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to the Bank's business activities may affect the continuity of the Bank.

The steps to be taken to anticipate these risks are as follows:

a. Develop a Compliance Policy and Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT).

b. Monitor update of customer data and implementation of a single Customer Identity File (CIF) as well as passive/dormant account management.

c. Implement the Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Program in accordance with the mandate in the Regulation of Bank Indonesia, where the Bank routinely socialize the regulation to the relevant units through the Compliance Division.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(viii) Risiko kepatuhan (lanjutan)

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini adalah dengan: (lanjutan)

d. Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang, Bank secara konsisten telah melakukan analisis dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

e. Peningkatan fungsi Divisi Kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

f. Penyusunan Laporan Kepatuhan untuk kepentingan eksternal dan internal Bank.

g. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan pemantauan secara aktif terhadap tingkat kepatuhan Bank melalui laporan yang disampaikan secara berkala oleh Divisi Kepatuhan, seperti Laporan Pemantauan Kepatuhan, Laporan Uji Kepatuhan dan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik.

h. Memantau pelaksanaan proses pemberian pinjaman dan proses pemulihan atas aset ataupun pinjaman bermasalah (NPL), untuk memastikan bahwa pelaksanaan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal dan eksternal yang berlaku.

i. Memastikan bahwa setiap penerbitan produk dan aktivitas baru dijalankan sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang berlaku serta mengingatkan kepada unit kerja terkait agar melakukan analisis dan reviu secara berkala terkait dengan *costs* dan *benefits,* serta aspek risiko yang mungkin muncul dari penerbitan produk dan aktivitas baru tersebut.

j. Memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan pelaporan kepada pihak regulator secara akurat dan tepat waktu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(viii) Compliance risk (continued)

The steps to be taken to anticipate these risks are as follows: (continued)

d. Support the Anti-Money Laundering Regime, the Bank has consistently analyzed and delivered the Suspicious Transaction Reports and Cash Transaction Reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center.

e. Improve the function of Compliance Division to conduct compliance tests on any regulations, both internal and external.

f. Prepare Compliance Reports for the needs of external and internal of the Bank.

g. The Boards of Commissioners and Directors actively monitors the compliance level of the Bank through periodic reports that are submitted by the Compliance Division which include Compliance Monitoring Report, Fit and Proper Test and Implementation Report of GCG.

h. Monitor the implementation of lending process and the recovery of assets or Non-Performing Loans (NPL), to ensure that the implementation is executed in accordance with the applicable internal and external policies and procedures.

i. Ensure each issuance of new products and the activities are carried out in accordance with internal and external policies and reminds the related work unit to perform analysis and review regularly the related costs and benefits and aspects of risk that may arise from the issuance of new products and activities.

j. Monitor the compliance on reporting to the regulator accurately and on a timely basis.

47. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin liabilitas bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan *deposits on call*, obligasi, efek-efek, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, *Letters of Credit*, akseptasi, *swap* mata uang dan liabilitas kontinjensi lainnya seperti bank garansi, *standby Letters of Credit*, *performance bonds* dan liabilitas sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti obligasi subordinasi dan liabilitas kepada direksi, komisaris dan pihak berelasi dengan Bank.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100 diubah menjadi maksimum Rp 2.000 dan tentang LPS, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Berdasarkan hal tersebut, Bank merupakan Bank peserta penjaminan LPS. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 76.286 dan Rp 66.250.

47. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATION OF COMMERCIAL BANKS

Since 1998, the Government guarantees the obligations of commercial banks including demand deposits, savings deposits, time deposits and deposits on call, bonds, marketable securities, interbank borrowings, fund borrowings, Letters of Credit, acceptances, currency swap and other contingent liabilities such as bank guarantees, standby Letters of Credit, performance bonds and other kinds of liabilities other than those excluded in this regulation such as subordinated bonds and liabilities to board of directors, commissioners and related parties of the Bank.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia issued the Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by LPS. Based on these regulations, the amount of deposits guaranteed for each of the customers in one bank, which was originally based on Law No. 24 Year 2004, was set for a maximum of Rp 100 and was eventually changed to a maximum of Rp 2,000 and about the LPS, whereas any banks conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, shall become participants of LPS. Accordingly, Bank is a participant of LPS. Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2009, the Government Regulation in Lieu of Law regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation has been determined into Law since January 13, 2009.

The Government guarantee premium paid for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 76,286 and Rp 66,250, respectively.

48. KASUS HUKUM

Bank sedang menghadapi kasus-kasus hukum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, beberapa pihak telah mengajukan tuntutan hukum kepada Bank di pengadilan di dalam maupun di luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan ini, tuntutan hukum adalah subjek dari proses hukum dan keputusan atas tuntutan hukum tersebut masih tertunda. Hasil final dari kasus-kasus tersebut belum dapat ditentukan oleh Bank.

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius

Pada tanggal 27 Desember 2012, di Mahkamah Agung Mauritius (Divisi Komersial), First Global Funds Limited PCC ("FGFL") mengajukan klaim terhadap Bank untuk pembayaran kembali dugaan pinjaman dan bunga sebesar USD 18.292.131 bersama dengan bunga hingga tanggal pembayaran akhir dan Weston International Asset Recovery Co., Ltd. ("WIARCO") mengajukan klaim terhadap Bank dengan kasus bahwa Bank memiliki kewajiban untuk membayar WIARCO sebagai pemegang obligasi jumlah pokok di bawah *Mandatory Convertible Bond* (MCB) yang diduga dikeluarkan oleh Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) pada 16 Juni 2006 dan 14 April 2008, masing-masing sebesar USD 15.000.000 dan USD 40.000.000, bunga yang masih harus dibayar sebesar USD 10.350.000 bersama dengan seluruh bunga hingga tanggal pembayaran akhir (secara bersama-sama disebut "Proses Hukum Mauritian 2013"). Bank tidak muncul dalam Proses Hukum Mauritian 2013. Pada tanggal 15 Februari 2013, Pengadilan Mauritius memberikan keputusannya tanpa dihadiri Bank dan mendukung FGFL dan WIARCO memerintahkan Bank untuk membayar USD 18.292.131 ditambah bunga kepada FGFL dan WIARCO sebesar USD 65.350.000 (secara bersama-sama disebut dengan "Putusan Mauritian 2013"). Menurut pendapat hukum dari penasihat hukum Bank Pradjoto & Associates, sebagaimana dinyatakan dalam surat No. 35/PNA/LO-BM.MCB/04/14 tanggal 29 April 2014, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, keputusan Pengadilan Mauritius tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Jika Weston ingin mengeksekusi keputusan Pengadilan Mauritius di Indonesia, maka Weston harus mengajukan gugatan baru di Pengadilan Indonesia dan menggunakan Hukum Indonesia sebagai rujukan.

48. LEGAL CASES

The Bank is facing several legal cases. Until December 31, 2024, several parties have filed legal cases against the Bank in courts both in and outside the country. As at the date of this report, these legal cases are the subjects of legal proceedings and decisions on such cases are still pending. The final decision of the legal cases has not been determined by the Bank.

a. Proceedings in the Mauritius Court

On December 27, 2012, in the Supreme Court of Mauritius (Commercial Division), First Global Funds Limited PCC ("FGFL") filed a claim against the Bank for repayment of alleged loans and interest of USD 18,292,131 together with interest there on until the final payment date and Weston International Asset Recovery Co., Ltd. ("WIARCO") filed a claim against the Bank with the case that the Bank has an obligation to pay WIARCO as bondholder of the principal amounts under Mandatory Convertible Bond (MCB) allegedly issued by the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) on June 16, 2006 and April 14, 2008, with an amount of USD 15,000,000 and USD 40,000,000, respectively, their accrued interest of USD 10,350,000 together with any interest thereon until the final payment date (collectively, the "2013 Mauritian Proceedings"). The Bank did not appear in the 2013 Mauritian Proceedings. On February 15, 2013, the Mauritius Court rendered its decision in the absence of the Bank in favor of FGFL and WIARCO ordering the Bank to pay USD 18,292,131 plus interest to FGFL, and USD 65,350,000 plus interest to WIARCO (collectively, the "2013 Mauritian Judgments"). According to the legal opinion from Bank's legal counsel, Pradjoto & Associates, as stated in its letter No. 35/PNA/LO-BM.MCB/04/14 dated on April 29, 2014, under the provisions of applicable law in Indonesia, the decision of the Mauritius Court can not be executed in Indonesia. If Weston wishes to execute the decision of the Mauritius Court in Indonesia, then Weston must file a new lawsuit in the Indonesian Court and use Indonesian Law as a reference.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Pada pertengahan Maret 2015, FGFL bersama-sama dengan perusahaan afiliasinya, WIARCO, Weston Capital Advisors, Inc. ("WCAI") dan Weston International Asset Recovery Corporation Inc. ("WIARCI") (secara kolektif, "Weston") mengajukan tindakan terhadap Bank dan J Trust Co., Ltd. di Mahkamah Agung Mauritius (Divisi Komersial) dengan klaim berikut ("Proses Persidangan Mauritian 2015"):

- Klaim yang diajukan oleh FGFL:

  Wanprestasi atas pembayaran registrasi ulang dan biaya transfer saham sebesar USD 4.171.231 (termasuk bunga dan denda bunga) dan panggilan modal atas biaya yang dapat diganti sebesar USD 635.430 (termasuk bunga dan denda bunga).

- Klaim yang diajukan oleh WCAI dan WIARCI:

  Sehubungan dengan Keputusan Proses Hukum Mauritian 2013, antara lain Obligasi Konversi, Bank telah gagal menyelesaikan jumlah USD 97.556.515 (termasuk bunga).

- Klaim yang diajukan oleh WIARCO:

  Wanprestasi atas pembayaran kewajiban kontraktual atas pelunasan Sertifikat Setoran Dana LB Barat *Linked Note* sebesar USD 8.176.821 (termasuk bunga).

Bank dan J Trust Co., Ltd., tidak muncul dalam Persidangan Mauritian 2015. Pada tanggal 29 Mei 2015, Mahkamah Agung Mauritius mengeluarkan keputusan tanpa Bank dan J Trust Co., Ltd., memerintahkan Bank dan J Trust Co., Ltd. untuk membayar sejumlah USD 4.806.661 kepada FGFL dengan bunga sampai pembayaran terakhir, dan meminta J Trust Co., Ltd., untuk membayar sejumlah USD 97.556.515 dengan bunga sampai pembayaran akhir ke WCAI dan WIARCI, dan sejumlah USD 8.176.821 dengan bunga sampai pembayaran akhir ke WIARCO ("Putusan Mauritian 2015").

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

In mid March 2015, FGFL together with its affiliated companies, WIARCO, Weston Capital Advisors, Inc. ("WCAI") and Weston International Asset Recovery Corporation Inc. ("WIARCI") (collectively, "Weston") filed an action against the Bank and J Trust Co., Ltd. in the Supreme Court of Mauritius (Commercial Division) with the following claims (the "2015 Mauritian Proceedings"):

- *Claim filed by FGFL:*

  Default on payment on the re-registration and share transfer fees amounting to USD 4,171,231 (including interest and penalty interest) and capital calls on reimbursable expenses amounting to USD 635,430 (including interest and penalty interest).

- *Claim filed by WCAI and WIARCI:*

  In connection with the Decision of the 2013 Mauritian Proceedings, among others the Convertible Bond, the Bank has failed to settle the amount of USD 97,556,515 (including interest).

- *Claim filed by WIARCO:*

  Default on payment on contractual obligation of the redemption of West LB Fund Linked Note Certificate of Deposit amounting to USD 8,176,821 (including interest).

The Bank and J Trust Co., Ltd., did not appear in the 2015 Mauritian Proceedings. On May 29, 2015, the Supreme Court of Mauritius issued a decision in the absence of the Bank and J Trust Co., Ltd., ordering the Bank and J Trust Co., Ltd., to pay an amount of USD 4,806,661 to FGFL with interest until final payment, and ordering J Trust Co., Ltd., to pay an amount of USD 97,556,515 with interest until final payment to WCAI and WIARCI, and an amount of USD 8,176,821 with interest until final payment to WIARCO (the "2015 Mauritian Judgment").

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Pada bulan September 2015, Weston memperoleh *ex parte Mareva Injunction* dari Mahkamah Agung Mauritius (Divisi Komersial) terhadap Bank dan J Trust Co., Ltd., yang melarang mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membuang dan/atau berurusan dengan uang hingga nilai USD 120 juta untuk mengamankan pembayaran Keputusan pengadilan Mauritian 2015 ("Keputusan Mareva").

Pada 2016, Weston mengajukan persidangan hukum di Mauritius terhadap Bank, J Trust Co., Ltd., dan pihak-pihak lain (termasuk direktur individual Bank) meminta bahwa para terdakwa melakukan penghinaan terhadap pengadilan atas tuduhan pelanggaran keputusan Mareva dan untuk kegagalan Bank dan kegagalan J Trust Co., Ltd., untuk membayar Putusan Mauritian 2015. Pada tahun 2017, pengadilan Mauritius mengabulkan mosi Weston dengan tidak adanya Bank dan J Trust Co., Ltd. dan menyatakan semua terdakwa dengan penghinaan terhadap keputusan Mareva ("Perintah Penghinaan").

Pada bulan Maret 2017, FGFL, WIARCO, WCAI dan WIARCI mengaku berkaitan dengan 12 penyitaan terkait Weston, semua uang atau properti yang saat ini dipegang oleh *garnishees* Weston untuk rekening Bank, termasuk Perintah Revestasi Pengadilan New York (didefinisikan di bawah). Pada bulan Juli 2018, pengadilan Mauritian mengesahkan *Attachment Order* dengan tidak adanya Bank ("*Attachment Order*").

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

In September 2015, Weston obtained an ex parte Mareva Injunction from the Supreme Court of Mauritius (Commercial Division) against the Bank and J Trust Co., Ltd., prohibiting them, whether directly or indirectly, from disposing of and/or dealing with any money up to the value of USD 120 million to secure payment of the 2015 Mauritian Judgment (the "Mareva Injunction").

In 2016, Weston filed contempt proceedings in Mauritius against the Bank, J Trust Co., Ltd., and other parties (including the Bank's individual directors) asking for an order that the defendants committed contempt of court for alleged breaches of the Mareva Injunction and for the Bank and J Trust Co., Ltd., failure to pay the 2015 Mauritian Judgment. In 2017, the Mauritius court granted Weston's motion in the absence of the Bank and J Trust Co., Ltd., and declared all defendants in contempt of the Mareva Injunction (the "Contempt Order").

In March 2017, FGFL, WIARCO, WCAI and WIARCI purported to attach in the hands of 12 Weston-related garnishees, all money or properties presently held or to be held by the Weston garnishees for the account of the Bank, including the New York Court's Revesting Orders (defined below). In July 2018, the Mauritian court validated the Attachment Order in the absence of the Bank ("Attachment Order").

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Pengadilan Mauritius tidak memiliki yurisdiksi atas Bank karena keputusan di atas dikeluarkan tanpa kehadiran Bank (*in*-absentia). Putusan Mauritian 2013 dan 2015, Putusan Mareva, Perintah Penghinaan atau Perintah Lampiran ("Keputusan Mauritian") mungkin tidak dapat dieksekusi langsung di Indonesia. Bank telah mengambil tindakan hukum untuk menolak upaya apapun oleh Weston untuk menegakkan Keputusan Mauritian di luar yurisdiksi Indonesia. Pada bulan September 2017, FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI dan Weston International Capital Limited memulai tindakan hukum terhadap 21 terdakwa, termasuk Bank dan J Trust Co., Ltd. di mana mereka mencari, di antara klaim lain, untuk membuat lebih banyak pihak yang bertanggung jawab atas putusan untuk membayar yang dikeluarkan dalam Persidangan Mauritian 2013 dan Persidangan Mauritian 2015 ("Kasus Utama 2017"). Weston mengklaim ganti rugi USD 400 juta untuk penipuan dan konspirasi (beberapa kerugian terkait dengan utang 2015 keputusan Mauritian sebelumnya). Bank dan J Trust Co., Ltd. belum hadir. Terdakwa tertentu muncul untuk mengikuti layanan dan yurisdiksi pengadilan Mauritian dan untuk tetap melanjutkan proses ini.

Dalam perkembangannya Bank memohon penundaan atas pembacaan putusan atas kasus ini yang dijadwalkan pada tanggal 26 November 2018, terhadap pihak Para Tergugat. Permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Mauritius dimana Pengadilan menolak pembacaan putusan pada tanggal 26 November 2018 tersebut. Pengadilan memutuskan untuk tidak menjatuhkan putusan tersebut kepada Para Tergugat dan memilih untuk menyidangkan pokok perkara terlebih dahulu dan Pengadilan memutuskan untuk mengadakan *hearing* lanjutan pada tanggal 28 Januari 2019. Pengadilan juga tertarik dengan masalah perwakilan WCAI di dalam persidangan/kasus ini. Adapun dalam hal ini WCAI memiliki 2 perwakilan. Perwakilan pertama adalah dari pihak Weston sedangkan perwakilan kedua adalah Bank selaku pemilik WCAI berdasarkan Putusan Pengadilan New York.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

The Mauritius Courts had no jurisdiction over the Bank as the above decisions were issued without the presence of the Bank (in-absentia). The 2013 and 2015 Mauritian Judgments, the Mareva Injunction, the Contempt Order or the Attachment Order (the "Mauritian Decisions") may not be directly executed in Indonesia. The Bank had taken legal action to resist any attempt by Weston to enforce the Mauritian Decisions outside the jurisdiction of Indonesia. In September 2017, FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI and Weston International Capital Limited commenced a legal action against 21 defendants, including the Bank and J Trust Co., Ltd. in which they sought, among other claims, to make more parties liable to pay for the judgments issued in the 2013 Mauritian Proceedings and the 2015 Mauritian Proceedings (the "2017 Main Case"). Weston is claiming USD 400 million in damages for fraud and conspiracy (some of the damages related to the previous 2015 Mauritian Judgment debts). The Bank and J Trust Co., Ltd. have not entered an appearance. Certain defendants have appeared to contest service and jurisdiction of Mauritian court and to continue these proceedings.

In its development, the Bank requested a delay in reading the verdict on this case scheduled for November 26, 2018, against the Defendants. This request was granted by the Mauritius Court where the Court refused to read the verdict on November 26, 2018. The court decided not to impose the decision on the Defendants and chose to hear the main case first and the Court decided to hold a follow-up hearing on January 28, 2019. The court was also interested in the issue of WCAI representatives in this trial/case. In this case WCAI has 2 representatives. The first representative was from Weston while the second representative was from the Bank as WCAI owner which was based on the New York Court Decision.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Pada Juni 2018, entitas JTrust dan individu terkait mengajukan serangkaian aplikasi untuk mengesampingkan putusan yang memungkinkan entitas Weston untuk menyajikan dokumen tentang mereka di luar yurisdiksi. Akhir-akhir ini, pengadilan Mauritius mulai menyelidiki kasus-kasus yang tidak ada kemajuan untuk jangka waktu yang signifikan, dan memanggil para pihak untuk sidang pada tanggal 29 September 2022 untuk pembaruan. Oleh karena itu, Dentons (pengacara entitas JTrust) telah mengajukan surat kepada hakim untuk meminta penundaan kasus sampai penyelesaian masalah perwakilan WCAI dan masalah perwakilan Weston diselesaikan melalui pengajuan surat tertanggal 28 September 2022. Hasilnya sidang ditunda hingga 24 Februari 2023 agar pihak-pihak dapat melaporkan perkembangannya.

Selain hal yang dijelaskan di atas, pengadilan Mauritius telah menulis surat kepada para pihak karena sifat kasus yang tidak ada kemajuan. Dentons telah meminta agar proses itu ditunda, yang dikabulkan pada Maret 2022. Pengadilan telah mengajukan surat kepada pihak untuk meminta kemajuan lebih lanjut, dan Dentons telah mengajukan surat tertanggal 29 September 2022 untuk menghadiri pemeriksaan dalam sidang dan memberikan informasi terbaru pada tanggal 31 Januari 2023 sehubungan dengan masalah representasi Weston.

Financial Services Commission (FSC) menulis surat kepada pengadilan Mauritius untuk menyatakan bahwa mereka akan menggunakan pengacara baru dalam kasus ini dan meminta agar sidang ditunda. Pengadilan menjawab pada hari yang sama dan menyatakan bahwa sidang akan tetap berlangsung dan FSC dapat mengajukan mosi penundaan. Mosi ini dikabulkan dan pengadilan menetapkan tanggal sidang berikutnya pada tanggal 6 Maret 2023.

Pengadilan juga meminta klarifikasi mengenai siapa yang akan mewakili WCAI selama argumen mengenai masalah representasi Weston. Hal ini merupakan poin yang telah diangkat dalam sidang sebelumnya dimana pengacara Mauritius telah menjelaskan kepada hakim bahwa masalah ini akan ditangani dalam kasus *Exequatur*. Namun, hakim mengangkat masalah ini dan menyarankan agar semua pengacara bertemu dan menyepakati langkah kedepan dengan mempertimbangkan pengamatan yang telah dilakukan.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

In June 2018, the JTrust entity and related individuals filed a series of applications to override the ruling that allowed the Weston entity to present documents about them outside of jurisdiction. Recently, the Mauritian courts appear to have been looking into cases that have remained idle for a significant period of time, and to call parties for a hearing on September 29, 2022, presumably for an update. As such, Dentons (JTrust Group's Lawyer) had proposed writing in to the judge to raise the issue and to request a pending of the case until the resolution of both the WCAI representation issue and the Weston representation issue are resolved and Dentons have proceeded to file the letter accordingly dated September 28, 2022. The matter was adjourned to February 24, 2023 for parties to report progress.

Aside of mathers discussed above, the Mauritius court had previously written to parties due to the idle nature of the case. Dentons had written in to request that the proceedings be stayed, which was granted in March 2022. The court has written to parties to request a further progress update, and Dentons have filed a letter dated September 29, 2022 updating the court on the hearing on January 31, 2023 in relation to the Weston representation issue.

Financial Services Commission (FSC) wrote to the Mauritius court stating that they would use a new attorney in this case and requested that the trial be adjourned. The court responded the same day and stated that the trial would continue and the FSC could file a motion to adjourn. This motion was granted and the court set a date for the next hearing on March 6, 2023.

The court also sought clarification as to who would represent WCAI during arguments over Weston's representation issues. This is a point that was raised in a previous hearing where the lawyer for Mauritius had explained to the judge that this issue would be dealt with in the Exequatur case. However, the judge brought up the issue and suggested that all lawyers meet and agree on the next step taking into account the observations that had been made.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

1. Kasus Eksekusi

Pengadilan telah menjadwalkan untuk mendengar argumen tentang Masalah Representasi WCAI dalam Kasus *Exequatur* pada tanggal 23 Oktober 2023, sementara Kasus Penghinaan dan Permohonan yang Disisihkan sehubungan dengan Kasus Penghinaan akan mengikuti untuk pemeriksaan prosedural pada hari yang sama.

Langkah selanjutnya, Kuasa Hukum Bank (*Linklaters*) akan terus berdiskusi dengan pengacara Mauritius tentang persiapan yang diperlukan untuk sidang yang akan datang, termasuk apakah Melissa (Direktur WCAI) perlu menghadiri sidang sebagai perwakilan WCAI.

2. Permohonan Bantuan Sementara

Kasus ini sudah tidak aktif selama beberapa waktu, tetapi pengadilan Mauritius telah meminta para pihak untuk memberikan pembaruan terkini untuk mencegah kasus ini menganggur. Pengadilan kembali meminta pembaruan kemajuan tentang Masalah Representasi WCAI. Sebagai tanggapan, Dentons telah mengajukan surat yang memperbarui Pengadilan bahwa Masalah Representasi WCAI akan diperdebatkan pada tanggal 23 Oktober 2023 di *Exequatur*.

Langkah selanjutnya, Pengacara Mauritius akan memperbarui Pengadilan lebih lanjut pada November 2023 (yaitu, setelah argumen yang dijadwalkan di *Exequatur*).

3. Keputusan Mareva Abadi

Dalam kasus ini, Pengadilan telah mengadakan sidang fisik dari waktu ke waktu untuk melaporkan perkembangan Masalah Representasi WCAI. Pengadilan telah meminta pembaruan kemajuan lebih lanjut. Penasihat Mauritius untuk WCAI tampaknya memperbarui Pengadilan bahwa argumen tentang Masalah Representasi WCAI dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober 2023.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

1. Exequatur Case

The Court has scheduled to hear arguments on the WCAI Representation Issue in the Exequatur Case on October 23, 2023, while the Contempt Case and the Set Aside Applications in relation to the Contempt Case will simply follow for procedural appearances on the same day.

Next steps, Bank attorney (Linklaters) will continue to discuss with Mauritius counsel on preparations required for such upcoming hearing, including whether it would be necessary for Melissa (Director of WCAI) to attend the hearing as representative for WCAI.

2. Interim Reliefs Application

This case has been inactive for some time, but the Mauritius court has been asking the parties for the latest updates to prevent the case from being idle. The Court has again asked for a progress update on the WCAI Representation Issue. In response, Dentons has filed a updating the Court that the WCAI Representation Issue will be argued on October 23, 2023 in the Exequatur.

Next steps, Mauritius counsel will update the Court further in November 2023 (i.e., after the scheduled arguments in the Exequatur).

3. Perpetual Mareva Injunction

In this case, the Court has called physical hearings from time to time to report progress on the WCAI Representation Issue. The Court had asked for a further progress update. Mauritius counsel for WCAI appeared to update the Court that the arguments on the WCAI Representation Issue is scheduled to take place on October 23, 2023.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

3. Keputusan Mareva Abadi (lanjutan)

Langkah selanjutnya, Pengadilan memerintahkan agar kasus ditunda hingga 3 November 2023 agar para pihak dapat melaporkan perkembangan lebih lanjut. Kuasa Hukum Bank (*Linklaters*) akan bekerja sama dengan penasihat hukum Mauritius untuk memperbarui Pengadilan sebagaimana mestinya pada saat itu.

4. Weston vs Asedor

Kuasa Hukum Bank (*Linklaters*) memahami bahwa AAB dan Asedor telah memulai proses penutupan terhadap dua entitas Weston Mauritian, WIARCO dan WICL sekitar November 2020. Meskipun grup JTrust bukan pihak dalam proses ini, Dentons dari waktu ke waktu mengetahui adanya persidangan yang diadakan dalam kasus antara Asedor dan WIARCO dan bahwa pada bulan Desember 2022, Pengadilan Mauritius telah mengeluarkan perintah dalam petisi Asedor terhadap WIARCO yang menunjuk penerima sehubungan dengan WIARCO ("Perintah Penerimaan").

Baru-baru ini, Dentons mengetahui bahwa kasus antara WIARCO dan Asedor telah dipanggil beberapa kali (paling baru, pada 3 Juli 2023). WIARCO (seperti yang diwakili oleh pengacara Weston, Thierry Koenig) tampaknya meminta penangguhan pelaksanaan Perintah Kurator. Penerima mengajukan keberatan awal, yang menurut pemahaman Denton, perlu ditangani sebelum pokok masalah. WIARCO sedang mengajukan pernyataan tertulis dari Liegey tentang masalah tersebut dan penerima telah mengindikasikan akan menanggapinya. Pengacara Weston juga menunjukkan kepada Pengadilan bahwa masalah ini harus ditangani segera karena dalam kasus terpisah (antara WIARCO dan National Australia Bank), amandemen telah diminta oleh penerima untuk mencerminkan bahwa WIARCO saat ini berada dalam kurator dan untuk kasus tersebut juga melibatkan penerima.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

3. Perpetual Mareva Injunction (continued)

Next steps, The Court ordered that the case be adjourned to November 3, 2023 for parties to further report progress. Bank attorney (Linklaters) will work with Mauritius counsel to update the Court accordingly at that juncture.

4. Weston vs Asedor

Bank attorney (Linklaters) understood that AAB and Asedor had commenced winding up proceedings against two Weston Mauritian entities, WIARCO and WICL on around November 2020. While the JTrust group are not party to these proceedings, Dentons from time to time became aware of hearings being called in the case between Asedor and WIARCO and that in December 2022, the Mauritius Court had issued an order in Asedor's petition against WIARCO appointing a receiver in respect of WIARCO ("Receivership Order").

Recently, Dentons became aware that the case between WIARCO and Asedor had been called several times (most recently, on July 3, 2023). WIARCO (as represented by Weston's counsel Thierry Koenig) appears to be seeking a stay of the execution of the Receivership Order. The receiver is raising preliminary objections, which to Dentons understanding, will need to be dealt with before the merits of the matter. WIARCO is filing an affidavit from Liegey on the matter and the receiver has indicated that it will respond. Weston's counsel also indicated to the Court that this matter should be dealt with promptly as in a separate case (between WIARCO and National Australia Bank), amendments have been sought by the receiver to reflect that WIARCO is currently in receivership and for such case to also involve the receiver.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

4. Weston vs Asedor (lanjutan)

Langkah selanjutnya, *Linklaters* berdiskusi dengan penasihat hukum Mauritius implikasi (jika ada) dari kasus ini pada sidang tanggal 23 Oktober 2023 (sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 di atas).

5. Usulan permohonan kekebalan negara oleh LPS

Linklaters dengan Dentons Mauritius telah menghadiri panggilan dengan penasihat internasional LPS (James Wood) dan salah satu penasihat Mauritius (Georgy Wong) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang aplikasi kekebalan negara yang diusulkan LPS. Dari pembahasan antara Kuasa Hukum Bank (Linklaters) dengan kuasa hukum LPS di atas, pemahaman Kuasa Hukum Bank (Linklaters) tentang usulan penerapan kekebalan negara adalah sebagai berikut:

a. LPS percaya bahwa upaya mereka untuk menolak gugatan Weston terhadap LPS di Mauritius (yaitu, Kasus Utama 2017 dan Kasus Penghinaan) telah tertunda akibat pandemi serta masalah awal yang muncul dalam kasus tersebut (yaitu, kasus Masalah Representasi WCAI dan Weston).

b. LPS ingin agar Perkara Pokok 2017 dikesampingkan lebih cepat terhadap para pihak LPS dengan mengajukan keberatan pendahuluan lainnya untuk mempermasalahkan yurisdiksi Mahkamah, khususnya atas dasar kekebalan negara. Permohonan ini akan didukung oleh bukti surat pernyataan dari LPS dan pemerintah Indonesia yang sebagian besar menyatakan bahwa tindakan LPS yang ingin disengketakan oleh Weston dalam Perkara Utama 2017 (misalnya, penyelamatan dan penjualan kembali bank) dilakukan dalam pelaksanaan dan pembebasan kedaulatan pemerintah Indonesia. LPS juga bermaksud meminta Pengadilan untuk mengundang Kejaksaan Agung Mauritius untuk mendukung permohonan tersebut, yang melalui diskusi dengan LPS telah mengindikasikan bahwa mereka akan memberikan dukungan tersebut.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

4. Weston vs Asedor (continued)

Next steps, Linklaters are discussing with Mauritius counsel the implications (if any) of this case on the October 23, 2023 hearing (as mentioned in paragraph 1 above).

5. LPS proposed state immunity application

Linklaters with Dentons Mauritius has attended a call with LPS's international advisor (James Wood) and one of Mauritius's advisors (Georgy Wong) to obtain further information on LPS's proposed state immunity application. From the discussion between the Bank's Attorney (Linklaters) and the LPS attorney above, the understanding of the Bank's Attorney (Linklaters) regarding the proposed implementation of state immunity is as follows:

a. LPS believes that their efforts to resist Weston's suits against LPS in Mauritius (i.e., the 2017 Main Case and the Contempt Case) have been delayed as result of the pandemic as well as the preliminary issues that have arisen in those cases (i.e., the WCAI and Weston Representation Issues).

b. LPS would like to have the 2017 Main Case set aside as against the LPS parties more speedily by raising another preliminary objection to dispute the Court's jurisdiction, specifically on the grounds of state immunity. This application will be supported by affidavit evidence from LPS and the Indonesian government largely stating that the actions of LPS which Weston seeks to dispute in the 2017 Main Case (e.g., the rescue and resale of the bank) were done in the exercise and discharge of the sovereign authority of the Indonesian government. LPS also intends to ask the Court to invite the Mauritius Attorney General's Office to support the application, who through discussion with LPS have indicated that they will provide such support.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

5. Usulan permohonan kekebalan negara oleh LPS (lanjutan)

c. Secara prosedur, karena Perkara Utama 2017 saat ini tidak aktif (yaitu, sebelumnya ditunda menunggu penetapan Masalah Representasi WCAI), LPS telah menyurati Pengadilan untuk meminta sidang prosedural diadakan di Perkara Utama 2017 agar mereka dapat mengajukan permohonan kekebalan negara pada sidang tersebut. Meskipun mereka berharap agar permohonan tersebut segera dikabulkan, penasihat hukum LPS mengindikasikan bahwa mungkin ada beberapa potensi keberatan atas permohonan tersebut, seperti: (i) Pengadilan mungkin tidak memberikan kesempatan kepada LPS untuk mengajukan argumentasi dalam Perkara Pokok 2017 mengingat secara teknis LPS tidak hadir dalam perkara tersebut (sebaliknya LPS mengajukan syarat untuk menolak yurisdiksi Mahkamah); dan (ii) Hakim, mengetahui Masalah Representasi WCAI yang dijadwalkan untuk sidang di *Exequatur*, juga dapat mengambil pandangan bahwa Masalah Representasi WCAI harus ditentukan terlebih dahulu, sebelum aplikasi kekebalan negara dapat disidangkan.

Meskipun pihak LPS juga menjadi tergugat dalam Perkara Penghinaan, rencana LPS hanya mengajukan permohonan di Perkara Pokok 2017 terlebih dahulu. Jika mereka mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam kasus itu, mereka kemudian dapat mengandalkannya untuk mengesampingkan Kasus Penghinaan terhadap pihak LPS.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

5. LPS proposed state immunity application (continued)

c. As a matter of procedure, since the 2017 Main Case is currently inactive (i.e., it was previously stayed pending determination of the WCAI Representation Issue), LPS has written to the Court asking for a procedural hearing to be held in the 2017 Main Case so that that they can make the state immunity application at said hearing. While they are hopeful for the request to be granted soon, LPS' counsel indicated there may be some potential challenges with the request, such as: (i) the Court might not grant the opportunity for LPS to raise the argument in the 2017 Main Case given that LPS have not technically appeared in the case (instead they have put in a conditional appearance to resist the jurisdiction of the Court); and (ii) the Judge, being aware of the WCAI Representation Issue being scheduled for hearing in the Exequatur, might also take the view that the WCAI Representation Issue should be determined first, before the state immunity application can be heard.

Although the LPS parties are also defendants in the Contempt Case, LPS plans on only filing the application in the 2017 Main Case first. If they obtain a favourable decision in that case, they might subsequently rely on it to also have the Contempt Case set aside as against the LPS parties.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

5. Usulan permohonan kekebalan negara oleh LPS (lanjutan)

Langkah selanjutnya, akan sulit bagi grup Jtrust untuk membuat keberatan yang sama terhadap yurisdiksi Mahkamah atas dasar kekebalan negara (mengingat bahwa JTrust tidak terhubung dengan pemerintah Indonesia dengan cara yang sama seperti LPS dan perannya sebagai pembeli bank), Kuasa Hukum Bank (*Linklaters*) akan terus berdiskusi dengan pengacara Mauritius mengenai posisi grup JTrust jika Pengadilan setuju untuk mengadakan sidang dalam Kasus Utama 2017 tentang aplikasi kekebalan negara.

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Kasus Perdata:

Posisi Bank sebagai Tergugat:

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari:

a. Gugatan yang diajukan beberapa investor ADS di Surakarta selaku penggugat kepada Bank selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam perkara No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 31 Maret 2010. Dalam gugatan para penggugat menuntut Bank mengembalikan uang pembelian produk *Discretionary Fund* (DF) sebesar Rp 35.437 berikut keuntungan sebesar Rp 5.676.

Pada tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, gugatan Penggugat dikabulkan.

48. LEGAL CASES (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

5. LPS proposed state immunity application (continued)

Next steps, It will be difficult for the Jtrust group to make a similar objection to the Court's jurisdiction on the basis of state immunity (given that JTrust is not connected to the Indonesian government in the same way as LPS and its role as a bank buyer), the Bank's Legal Counsel (Linklaters) will continue to discuss with lawyers Mauritius regarding the position of the JTrust group if the Court agrees to hold a hearing in the 2017 Main Case on the application of state immunity.

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows:

Civil Cases:

Bank as the Defendant:

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of:

a. The lawsuit submitted by some ADS investors as plaintiff in Surakarta against the Bank in the District Court of Surakarta which is registered in case No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska dated March 31, 2010. The plaintiffs claimed from the Bank to refund the purchase money of Discretionary Fund (DF) product amounting to Rp 35,437 with gain amounting to Rp 5,676.

At the level of District Court, High Court and Supreme Court, the claim from the Plaintiffs was accepted.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Setelah mengalami proses Pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, pada tanggal 15 Oktober 2012, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) No. 2838K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2012, yang menolak permohonan kasasi dari Bank dan menghukum Bank untuk mengembalikan uang pembelian produk investasi kepada Para Penggugat sebesar Rp 35.437 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 5.676.

Bank telah mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali No. 105/Pdt.G/2014/PN.Ska.

Pada tanggal 11 Desember 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memberitahukan bahwa Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Bank.

Bank telah menerima Surat Teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dan pada bulan April 2015, Bank telah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Surakarta berupa tanggapan dan keberatan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung mengingat Putusan Mahkamah Agung dikategorikan sebagai Putusan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*).

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

After having proceeding process for District Court to Supreme Court level, on October 15, 2012, the Bank has received a Notification Letter of The Supreme Court of the Republic of Indonesia (RI) Decision No. 2838K/Pdt/2011 dated April 19, 2012, which rejected the Bank's cassation and ordered the Bank to refund the purchase price of investment products to the Plaintiffs amounting Rp 35,437 and pay a loss compensation amounting to Rp 5,676.

The Bank has submitted extraordinary legal act by filing Judicial Review and Memory of Judicial Review No. 105/Pdt.G/2014/PN.Ska.

On December 11, 2014, the Bank has received a Notification Letter of Judicial Review from The District Court of Surakarta which confirmed that the Supreme Court of RI has rejected the Bank's Judicial Review.

The Bank has received a Reprimand Letter (aanmaning) from the District Court of Surakarta to execute the Supreme Court Decision and in April 2015, the Bank has submitted to the Court of Surakarta in the form of comments and objections to execute the Supreme Court Decision in view of Supreme Court Decision is categorized as Non-Executable Verdict.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juli 2017, Pengadilan Negeri Surakarta telah berkirim surat kepada para investor bahwa sehubungan dengan penyelesaian eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara di atas maka Pengadilan Negeri Surakarta menginformasikan agar para investor menghubungi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perkembangan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah berkirim surat kepada para investor bahwa sehubungan dengan eksekusi pengadilan yang menghukum Bank untuk mengembalikan uang ditangguhkan pelaksanaannya.

Pada tanggal 27 Desember 2017, petugas pengadilan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Khusus melakukan sita eksekusi di kantor Bank di Surakarta. Namun, sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kantor Bank Cabang Surakarta adalah milik pihak ketiga, sehingga sita eksekusi tidak dapat dilakukan oleh Petugas Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Khusus.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

On July 11, 2017, the Surakarta Court delivered letter to the investors related to the execution of the Surakarta verdict, the investors must coordinate with Deposit Insurance Corporation (LPS). Further, on August 1, 2017, the Surakarta Court also sent a letter to the investors that the execution of Surakarta Court, which orders the Bank to return the money, is postponed.

On December 27, 2017, the bailiffs in the Surakarta District Court Class 1 A Special conducted an attachment on the Bank's office in Surakarta. However, the attachment was unable to perform because the Bank's branch office of Surakarta is a third party's property, therefore the attachment can not be done by the Bailiffs of Surakarta District Court Class 1 A Special.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

   Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Khusus melalui Surat No. W12-U2/094/PDT.04.10/II/ 2018 tanggal 6 Februari 2018, menjelaskan kepada investor ADS di Surakarta bahwa sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Bank Cabang Surakarta dimiliki oleh pihak ketiga dan terkait perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska jo. No. 30PK/Pdt/2014 tanggal 8 April 2014.

   b. Gugatan perbuatan melawan hukum dari investor ADS di Surabaya kepada Bank melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara No. 55/Pdt.G/2012/ PN.Sby yang menuntut Bank mengembalikan dana sebesar Rp 66.250 berikut keuntungan yang seharusnya didapat dan kerugian bunga sebesar Rp 10.600.

   Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusannya No. 55/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 29 Oktober 2012, telah menyatakan Bank melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Bank mengembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp 66.250 berikut keuntungan sebesar Rp 2.153 dan ganti rugi materiil sebesar Rp 25.921.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

   Furthermore, the Surakarta District Court Class 1 A Special through Letter No. W12-U2/094/PDT.04.10/II/2018 dated February 6, 2018, explains to the ADS investor in Surakarta that the attachment can not be executed because the Bank's branch office in Surakarta is owned by third party and in relation to the case, it has permanent legal force (inkracht van gewijsde) based on the decision of the Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska jo. No. 30PK/Pdt/2014 dated April 8, 2014.

   b. The lawsuits from ADS investors in Surabaya to the Bank through the District Court of Surabaya under Case No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby suing Bank to return the funds amounting to Rp 66,250 including any benefits earned and interest cost amounting to Rp 10,600.

   The District Court of Surabaya through its Verdict No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby dated October 29, 2012, has been declared that the Bank committed an unlawful act and punished the Bank to return the fund amounting to Rp 66,250 including gain of Rp 2,153 and compensation of Rp 25,921 to the Plaintiff.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Bank telah menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan sekaligus menyampaikan memo Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Bank telah menerima Surat Teguran (*unmanning*) dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dan pada bulan Agustus 2016, Bank telah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya berupa tanggapan dan keberatan untuk melaksanakan.

Bank telah mendapatkan Relaas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 04 PK/PDT/2017 tanggal 14 Maret 2018, yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Bank. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018, Bank juga sudah menerima Berita Acara Sita Eksekusi terhadap bangunan dari kantor cabang Bank Cabang Rajawali dan Cabang Kertajaya.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

At the level of District Court, High Court and Supreme Court, the claim from the Plaintiffs was granted.

On August 1, 2016, the Bank has filed a Judicial Review (PK) and handed the Judicial Review memo (PK) to the Supreme Court of RI through the Surabaya District Court.

The Bank has received a Reprimand Letter (unmanning) from Surabaya District Court to implement the Supreme Court Verdict and in August 2016, the Bank has submitted to the District Court of Surabaya as form of responses and objections to implement.

The Bank obtained a Notice of Judicial Review Verdict No. 04 PK/PDT/2017 dated March 14, 2018, which essentially rejected the Bank's Request of Review. On March 28, 2018, the Bank also received an attachment request on the building of the Rajawali and Kertajaya Branch Office.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Bank sudah mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan dengan mengajukan gugatan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2018. Selain itu, Bank telah menyampaikan bantahan terhadap lelang atas aset Bank di Surabaya dan mengumumkan bantahan melalui media cetak pada tanggal 28 dan 29 Juni 2018 dan melakukan permohonan blokir kepada kantor pertanahan setempat pada tanggal 26 Juni 2018.

Pada tanggal 6 Juli 2018, Bank telah mendapatkan informasi pengumuman lelang kedua terkait eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby melalui media massa.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Bank telah menerima Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dengan perkara No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang saat ini merupakan gedung kantor Bank Cabang Rajawali dan Cabang Kertajaya Surabaya, dengan jadwal pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada 20 Juli 2018.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 dan 17 Juli 2018, telah diumumkan pengumuman lelang kedua dan ketiga terkait “objek lelang yang sedang menjadi objek sengketa” melalui media massa nasional Kompas dan Surabaya Pagi.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

The Bank has already filed a resistance against the confiscation by filing a claim against the Surabaya District Court on April 13, 2018. In addition, the Bank has submitted an objection to the auction of the Bank’s assets in Surabaya and announced an objection through mass media on June 28 and 29, 2018 and made a blockage request to the local land office on June 26, 2018.

On July 6, 2018, the Bank received an information on the announcement of the second auction related to the execution of the Surabaya District Court No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby through the mass media.

On July 10, 2018, the Bank has received a Notice of Notification of Auction Execution by Case No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby on 2 (two) land and building which is currently the Bank’s office buildings of the Rajawali Branch and Kertajaya Branch in Surabaya, with the schedule for the auction held on July 20, 2018.

On July 14, 2018 and July 17, 2018, the announcement of the second and third auction was regarding "the object of the auction being the object of dispute" through the Kompas and Surabaya Pagi national mass media.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor: 778/45/2018 tanggal 20 Juli 2018, bahwa terhadap aset milik Bank telah dilaksanakan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya atas barang tidak bergerak.

Berdasarkan berita acara sita eksekusi PN Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2019 dan berita acara sita eksekusi PN Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2019, Penggugat telah melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) aset Bank di Tanah Abang, Pangeran Jayakarta dan Puri Kembangan.

Berdasarkan berita acara sita eksekusi PN Palembang tanggal 29 Januari 2019, Penggugat telah melakukan penyitaan eksekusi terhadap 3 (tiga) aset Bank di Palembang yaitu di Kebumen, Letkol Iskandar dan Sudirman.

Bank mengajukan permohonan blokir terhadap aset-aset Bank yang telah dilakukan eksekusi penyitaan.

Bareskrim telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset Bank terkait dengan Laporan Polisi dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam proses pembuktian perkara ADS.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

Based on the Auction Minutes Copy Number: 778/45/2018 dated July 20, 2018, the assets of the Bank has been executed for auction by the Surabaya District Court as an immovable property.

Based on the minutes of the seizure execution of the Central Jakarta District Court on January 3, 2019 and the minutes of the seizure execution of West Jakarta District Court on January 4, 2019, the Plaintiff has placed foreclosures on 3 (three) Bank's assets in Tanah Abang, Pangeran Jayakarta and Puri Kembangan.

Based on the minutes seizure execution of the PN Palembang on January 29, 2019, the Plaintiff has placed foreclosures on 3 (three) Bank's assets in Palembang, namely in Kebumen, Letkol Iskandar and Sudirman.

The Bank submitted a blocking application to the Bank's assets that have been placed for foreclosure.

Bareskrim has confiscated the Bank's assets concerning with Police Report of alleged criminal fraud in the process of proving ADS case.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Bank telah menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) II dan sekaligus menyampaikan memo Peninjauan Kembali (PK) II ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih menunggu proses pemeriksaan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung.

c. Gugatan ganti kerugian (*schadevergoeding*) yang diajukan beberapa investor ADS di Yogyakarta dan Gugatan Intervensi dari Yayasan sebuah Universitas di Yogyakarta kepada Bank melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdaftar dengan perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk. Para Penggugat menuntut Bank dengan ADS masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, untuk mengembalikan pokok sebesar Rp 22.700 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 10.700. Sedangkan Penggugat Intervensi menuntut Bank mengembalikan pokok sebesar Rp 16.600 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 7.700.

Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Putusan No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk tanggal 16 Oktober 2013, telah memutuskan bahwa Bank selaku Pelaku Usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Bank untuk mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp 22.700 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 10.700 serta mengembalikan kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp 16.600 serta membayar ganti rugi sebesar Rp 7.700.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

Whereas on July 18, 2024 the Bank submitted a request for Judicial Review (PK) II and at the same time submitted a memo for Judicial Review (PK) II to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Surabaya District Court.

As at the issuance date of the financial statements, the Bank is waiting for the examination process until the Supreme Court decides.

c. Lawsuit of a compensation (schadevergoeding) filed by several ADS's investors in Yogyakarta and Intervention Lawsuit from a Foundation of University in Yogyakarta to the Bank through the District Court of Yogyakarta registered by case No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk. The Plaintiffs are suing the Bank together with ADS as the Defendant and Co-Defendant, to return the principal of Rp 22,700 and to pay compensation amounting to Rp 10,700. The Plaintiff Intervenient sue the Bank to return the principal amount of Rp 16,600 and to pay a compensation amounting to Rp 7,700.

The District Court of Yogyakarta through its Verdict No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk dated October 16, 2013, has decided that the Bank as part of business communities committed an unlawful act and punish the Bank to return to the Plaintiff an amount of Rp 22,700 and pay a compensation amounting to Rp 10,700 and return to the plaintiff the amount of Rp 16,600 and pay a compensation amounting to Rp 7,700.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung gugatan Penggugat dikabulkan.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Bank telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk Jo. No. 36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Bank telah mendapat Surat No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 perihal Pemeriksaan Peradilan Tingkat PK dari Bank, Perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk Jo. No. 36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015, surat dimaksud pada intinya memberitahukan berkas Bundel A dan Bundel B yang dimohonkan untuk pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juni 2016 dalam Perkara Perdata antara Bank, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Bunadi Wijaya, M.Sc, dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

At the level of District Court, High Court, and Supreme Court, the claim from Plaintiff was granted.

On January 11, 2017, the Bank has submitted a review request to review the Verdict No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk Jo. No. 36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015.

On December 27, 2017, the Bank received a Letter No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 regarding the Judicial Review Examination Level of the Bank, the Case No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk Jo. No. 36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015, the letter basically notify files Bundles A and Bundles B that were requested for an examination of the level of Judicial Review of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated June 15, 2016 in the Civil Case between the Bank, as an applicant for Judicial Review against Bunadi Wijaya, M.Sc, and others as Applicants for Judicial Review.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Tanggal 20 Maret 2018, Bank telah mendapat Surat dari Mahkamah Agung RI No. 223 PK/PDT/2018 Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali, surat dimaksud pada intinya memberitahukan bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Bank sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Bunadi Wijaya, M.Sc, dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah dikirim dengan surat pengantar No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, telah diterima pada tanggal 13 Februari 2018 dan telah didaftarkan dengan Register Nomor: 223 PK/PDT/2018.

Tanggal 11 Maret 2019, Bank menerima relaas pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali No. 223 PK/PDT/2018 Jo., No. 2230K/PDT/2015 Jo., No. 36/PDT/2014/PT.YYK Jo., dan No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yyk., yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Bank.

Bank saat ini masih memantau dan menunggu ada atau tidaknya upaya hukum dari pihak Bunadi Wijaya, M.Sc, dkk mengenai eksekusi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

On March 20, 2018, the Bank has received a Letter from the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 223 PK/PDT/2018 regarding the Receipt and Notification of the Judicial Review File Register, the letter basically tells that the civil case file requested for review by the Bank, as the applicant for Judicial Review against Bunadi Wijaya, M.Sc, and others as Judicial Reviewers, who have been sent with a cover letter No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 dated December 27, 2017, has been received on February 13, 2018 and has been registered with Register Number: 223 PK/PDT/2018.

On March 11, 2019, the Bank received a notification notice of the contents of the Judicial Review Decision No. 223 PK/PDT/2018 Jo., No. 2230K/PDT/2015 Jo., No. 36/PDT/2014/PT.YYK Jo., and No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yyk., which stated that it refused the request for a review from the Bank.

The Bank is currently monitoring and awaiting whether there will be any legal action from Bunadi Wijaya, M.Sc, and others regarding the execution of the contents of the decision which has permanent legal force.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi (*Discretionary Fund*) milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

   Bank juga menegaskan produk yang dikeluarkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia adalah bukan produk Bank. Hal ini sebagaimana disebut dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-01/BL/PE/S.5/2009 tanggal 31 Desember 2009, sehingga tidak tepat jika Bank dituntut harus mengembalikan kerugian Investor Antaboga, mengingat dana Investor Antaboga dalam Investasi Dana Tetap Terproteksi dan/atau Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*) digunakan untuk membeli produk Antaboga dan terbukti ditempatkan pada rekening atas nama PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia pada PT Bank Century Tbk.

2. Gugatan yang diajukan oleh PT Tjitajam (Penggugat) antara lain: menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku akta-akta maupun perbuatan hukum lainnya yang timbul, menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, kerugian materiil Rp 123.541 dan kerugian immateriil Rp 5.000. Hasil keputusan atas tuntutan ganti rugi telah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan konkrit tentang berapa nilai kerugian yang nyata dan dapat diperhitungkan secara pasti.

   Pada tanggal 30 Januari 2020, agenda pembacaan Putusan yang bunyinya antara lain: “mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku akta-akta maupun perbuatan hukum lainnya yang timbul/lahir berdasarkan Akta-akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual”. Dalam hal ini, Bank kalah.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

   The Bank also emphasizes that the products issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia are not the Bank's products. This is as stated in the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions Number: Kep-01/BL/PE/S.5/ 2009 dated December 31, 2009, so it is not appropriate if the Bank is required to return the losses of Antaboga Investors, considering that Antaboga Investors' funds in Protected Fixed Fund Investments and/or Fund Management (Discretionary Fund) were used to purchase Antaboga products and proven to be placed in an account in the name of PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia at PT Bank Century Tbk.

2. The lawsuit submitted by PT Tjitajam (Plaintiff) include: to declare that the Defendant have committed an unlawful act which caused harm to the Plaintiff, to declare null and void and do not apply deeds and other legal actions that arise, to punish the Defendants to give joint compensation to the Plaintiff, material loss of Rp 123,541 and immaterial loss of Rp 5,000. The result of the decision on the claim for compensation was rejected by the Panel of Judges because it was not supported and could not be proven by valid and concrete evidence about the value of real and calculable losses.

   On January 30, 2020, the agenda for the reading of the Decision stated, among other things: "granting the plaintiff's claim in part and declaring it null and void and of no effect are the deeds or other legal acts which arise/give birth based on the Deeds of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney to Sell". In this case, the Bank loses.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

Pada tanggal 11 Februari 2020, Bank menyerahkan surat pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 244/PDT/2020/PT.BDG pada intinya “menolak Banding dari para Pemohon Banding (di antaranya Bank) serta sekaligus menguatkan putusan PN Cibinong sebelumnya”. Dengan kata lain Bank kalah.

Atas dasar putusan banding, pada tanggal 30 Juli 2020, Bank telah mendaftarkan akta pernyataan kasasi di Pengadilan Negeri Cibinong.

Pada tanggal 15 Juli 2022, Bank telah menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi No: 759 K/Pdt/2021 Jo. No: 244/Pdt/2020/PT.BDG Jo. No: 137/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang amarnya berbunyi “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Bahana Wirya Raya dan Pemohon Kasasi III PT Bank JTrust Indonesia Tbk” (dalam arti Bank kalah).

Pada tanggal 4 Januari 2023, Bank telah menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali, kemudian pada tanggal 1 Februari 2023 Bank telah menyerahkan kontra memori peninjauan kembali melalui PN Cibinong.

Pada tanggal 7 Maret 2024, Bank telah menerima pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali PT Bahana Dkk selalu pemohon yang intinya berbunyi “Menolak permohonan PK PT Bahana Wirya Raya” dan untuk diketahui terkait dengan hasil keputusan atas tuntutan ganti rugi telah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan konkrit tentang berapa nilai kerugian yang nyata dan dapat diperhitungkan secara pasti. (Bank kalah).

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

On February 11, 2020, the Bank submitted a statement of appeal through the Cibinong District Court.

West Java High Court Decision Results No. 244/PDT/2020/PT.BDG essentially "rejects the appeal from the Appellants (including the Bank) and at the same time strengthens the previous Cibinong District Court decision". In other words, the Bank loses.

On the basis of the appeal decision, on July 30, 2020, the Bank has registered a deed of cassation at the Cibinong District Court.

On July 15, 2022, the Bank received the Notification of Cassation Decision No: 759 K/Pdt/2021 Jo. No: 244/Pdt/2020/PT.BDG Jo. No: 137/Pdt.G/2019/PN.Cbi whose message reads "Rejects the Cassation Petition from Cassation Petitioner I PT Bahana Wirya Raya and Cassation Petitioner III PT Bank JTrust Indonesia Tbk" (in the sense of the Bank loses).

On January 4, 2023, the Bank has received Relaas Notice of Statement and submission of Review Memorandum, then the Bank will prepare a response by making and submitting Counter Review Memorandum.

On March 7 2024, the Bank received notification of PT Bahana Wirya Raya's Judicial Review decision, which essentially read "Rejects PT Bahana Wirya Raya's PK request” and to be noted the decision on the claim for compensation was rejected by the Panel of Judges because it was not supported and could not be proven by valid and concrete evidence about the value of real and calculable losses. (the Bank loses).

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

3. Gugatan Perdata No. 114/Pdt.G/*e-court*/2020/PN.Bdg antara Rahmat Ibrahim (Penggugat) melawan Bank (Tergugat IV) adapun dasar gugatan terkait Penggugat meminta agar Objek Sengketa yang saat ini dijadikan agunan di Bank agar dapat diserahkan kepada Penggugat karena berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, Perjanjian tersebut semata-mata hanya dibuat untuk formalitas dalam mengajukan fasilitas kredit di Bank Akita Bandung.

   Pada tanggal 14 September 2021, Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut yang "mengabulkan gugatan Penggugat sebagian".

   Pada tanggal 15 Oktober 2021, Bank secara resmi telah menerima Relaas pemberitahuan isi putusan.

   Pada tanggal 21 Oktober 2021, Bank telah menyatakan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

   Pada tanggal 6 Desember 2021, Bank telah mendaftarkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

   Pada tanggal 23 Mei 2022, Bank telah menerima surat dari PN Bandung yang inti suratnya Berkas perkara banding No. 114/Pdt.G/*e-court*/2020/PN.Bdg telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa.

   Pada tanggal 18 Agustus 2022 Pengadilan Tinggi Bandung telah memutus Perkara No. 309/PDT/2022/PT.BDG yang intinya Bank menang.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

3. Civil Lawsuit No. 114/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg between Rahmat Ibrahim (Plaintiff) against the Bank (Defendant IV) as for the basis of the lawsuit regarding the Plaintiff requesting that the object of the dispute which is currently used as collateral to the Bank so that it can be submitted to the Plaintiff because based on the agreement between the Plaintiff and Defendant I and II, the agreement was only made as a formality in applying for credit facilities at Bank Akita Bandung.

   On September 14, 2021, the Panel of Judges decided on the case which "partially granted the Plaintiff's claim".

   On October 15, 2021, the Bank officially received the Relaas notification of the contents of the verdict.

   On October 21, 2021, the Bank has declared an appeal through the Registrar of the Bandung District Court.

   On December 6, 2021, the Bank has registered the memorandum of appeal at the Registrar's Office of the Bandung District Court.

   On May 23, 2022, the Bank has received Relaas from the District Court of Bandung, which informs that the document of memorandum of appeal with case No. 114/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg has been sent to the high court for examination.

   On August 18, 2022, the Bandung High Court has decided on Case No. 309/PDT/2022/PT.BDG which basically means Bank wins.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

Pada tanggal 14 Oktober 2022, Bank telah menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi melalui delegasi Pengadilan Negeri Surabaya yang intinya Rahmat Ibrahim menyatakan Kasasi serta menyerahkan Memori Kasasi.

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Bank telah memberikan tanggapan atas Memori Kasasi dengan menyerahkan Kontra Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih memantau pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

4. Gugatan Perdata No. 178/Pdt.Bth/2020/PN.Bgr antara Iyet Rachmawati (Penggugat) melawan Bank (Tergugat I) adapun dasar gugatan terkait penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor No. 1/Pdt/Eks.Akta/2019/PN.Bgr tanggal 16 Januari 2019. Adapun penetapan tersebut terkait eksekusi lelang milik Pembantah yang dijadikan jaminan kredit oleh PT Bunga Mas yang saat ini debitur PT Bunga Mas telah dialihkan ke PT Jtrust Investments Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 2021, telah dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Para pihak telah menyerahkan kesimpulannya dalam persidangan tersebut. Majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang dan melanjutkannya kembali pada tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda pembacaan putusan akhir yang bunyinya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya;

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

On October 14, 2022, the Bank has received the Relaas notification of the Cassation Statement and Submission of the Cassation Memorandum through the Surabaya District Court delegation, essentially Rahmat Ibrahim declaring the Cassation and submitting the Cassation Memorandum.

On October 27, 2022, the Bank has responded to the Memorandum of Cassation by submitting a Counter Memorandum of Cassation through the Registrar of the Bandung District Court.

As at the issuance date of the financial statements, the Bank still monitoring the cassation examination at the Supreme Court.

4. Civil Lawsuit No. 178/Pdt.Bth/2020/PN.Bgr between Iyet Rachmawati (Plaintiff) and the Bank (Defendant I) as for the basis for the lawsuit related to the determination of the Chairman of the Bogor City District Court No. 1/Pdt/Eks.Akta/2019/PN.Bgr dated January 16, 2019. The stipulation is related to the execution of the Disputer's assets which were used as credit collateral by PT Bunga Mas, which currently the debtor PT Bunga Mas has been transferred to PT Jtrust Investments Indonesia.

On May 5, 2021, a session was held at the Bogor District Court with a conclusion agenda from the parties. The parties have submitted their Conclusions at the hearing. The panel of judges decided to postpone the trial and resume it on June 9, 2021 with the agenda of reading the final verdict which reads:

In Exception

Rejecting the exception of Disputed I;

In the Main Case

Reject the Claimant's claim in its entirety;

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

Dalam Penggugat intervensi: mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi, menghukum Tergugat Intervensi/Pembantah untuk membayar biaya perkara; atas putusan tersebut Pembantah/Tergugat Intervensi menyatakan upaya hukum banding. Atas upaya hukum Penggugat, Bank akan menunggu relaas memori Banding pengugat sebagai dasar mengajukan kontra memori banding atas upaya banding dari Pembantah.

Pada tanggal 22 September 2021, Bank telah menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan PN Bogor.

Pada tanggal 11 November 2021, Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah membacakan Putusan yang bunyinya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor" dalam arti lain Bank menang.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Bank telah menerima Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi.

Pada tanggal 28 Desember 2021, Bank telah mengajukan Kontra Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih memantau dan menunggu hasil pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

In the intervention Plaintiff: granting the intervention claim from the Intervening Plaintiff, punishing the Intervening Defendant/Denier to pay court fees; based on this decision, the Intervention Defendant/Defendant declares an appeal. Based on the Plaintiff's legal efforts, the Bank will wait for the release of the plaintiff's memorandum of appeal as a basis for filing a counter appeal against the Defendant's appeal.

On September 22, 2021, the Bank has submitted a Counter Memorandum of Appeal through the Registrar of the Bogor District Court.

On November 11, 2021, the West Java High Court has read out its Decision which reads "Strengthening the Decision of the Bogor District Court" which means the Bank won.

On December 21, 2021, the Bank has received the Notice and Submission of the Memorandum of Cassation.

On December 28, 2021, the Bank has filed a Counter Memorandum of Cassation through the Registrar of the Bogor District Court.

As at the issuance date of the financial statements, the Bank is currently still monitoring and waiting for the results of the Cassation examination at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

5. Gugatan Perdata No. 573/Pdt.G.BTH. PLW/2019/PN.Jkt.Pst PN Jakarta Pusat antara Renold Parulian melawan Bank, dkk adapun dasar gugatan, bahwa Renold Parulian (Penggugat) sangat keberatan atas pengalihan utangnya kepada JTII (Tergugat I) karena tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dan atau persetujuan Penggugat;

   Pada tanggal 2 Juni 2020, Majelis Hakim telah membacakan Putusan yang intinya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" dalam arti Bank menang;

   Pada tanggal 18 November 2020, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membacakan putusan yang intinya "Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 537/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juni 2020 dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini" dalam arti Bank menang.

   Pada tanggal 12 Januari 2021, Bank telah menerima Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari PN Jakarta Pusat.

   Pada tanggal 25 Januari 2021, Bank telah mengajukan Kontra Memori Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

   Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih memantau dan menunggu hasil pemeriksaan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

5. Civil Lawsuit No. 573/Pdt.G.BTH.PLW/ 2019/PN.Jkt.Pst Central Jakarta District Court between Renold Parulian against Bank, et al. As for the basis for the lawsuit, that Renold Parulian (Plaintiff) strongly objected to the transfer of his debt to JTII (Defendant I) due to without prior written notification and or the Plaintiff's approval;

   On June 2, 2020, the Panel of Judges read out the Decision which essentially "Declares the Plaintiff's claim unacceptable" in the sense that Bank wins;

   On November 18, 2020, the DKI Jakarta High Court read out a decision which essentially "Revises the Decision of the Central Jakarta District Court No. 537/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dated June 2, 2020 by stating that the Central Jakarta District Court has no authority to try this case" in the sense of the Bank wins.

   On January 12, 2021, the Bank received notification of the Cassation Statement from the Central Jakarta District Court.

   On January 25, 2021, the Bank has filed a Counter Memorandum of Cassation at the Central Jakarta District Court.

   As at the issuance date of the financial statements, the Bank is currently monitoring and waiting for the results of the Cassation examination from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

6. Gugatan yang diajukan oleh PT Arifindo Grha Pratama selaku Debitur kepada Bank selaku Kreditur. Terdaftar dengan Perkara No. 677/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bank digugat oleh PT Arifindo Grha Pratama terkait upaya pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, serta menerbitkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dan menunjuk jasa pihak ketiga dan Jtrust Investments Indonesia untuk melakukan upaya penjualan lelang di bawah tangan.

   Pada tanggal 22 April 2024 Bank telah menerima Putusan Kasasi (Bank menang)

   Pada tanggal 21 Agustus 2024, Bank telah menerima Relaas pemberitahuan Permohonan PK beserta Memori PK PT Arifindo Grha Pratama.

   Pada tanggal 12 September 2024, Bank telah menyerahkan Kontra Memori PK melalui Kepaniteraan PN Jak Pst.

   Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih memantau jalannya proses pemeriksaan sampai dengan putusan di Mahkamah Agung.

7. Gugatan Perdata No. Nomor: 51/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana Fauziyah Novita Tajuddin, SH., MH. (P) selaku penggugat, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk selaku Tergugat dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung Bali selaku Turut Tergugat. Gugatan Lain-lain yang diajukan Fauziyah Novita selaku Kurator PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam Pailit) kepada Bank mengenai biaya pengurusan dan kepailitan sebesar Rp 1.844.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

6. The lawsuit was filed by PT Arifindo Grha Pratama as the Debtor to the Bank as the Creditor. Registered with Case No. 677/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST at the Central Jakarta District Court. The Bank was sued by PT Arifindo Grha Pratama related to efforts to conduct an auction of Mortgage Rights, as well as issuing Warning Letters 1, 2 and 3 and appointing third party services and Jtrust Investments Indonesia to conduct underhand auction sales efforts.

   On April 22, 2024, the Bank received the Cassation Decision (the Bank wins).

   On August 21, 2024, the Bank received the notification of the PK Application along with the PK Memorandum of PT Arifindo Grha Pratama.

   On September 12, 2024, the Bank submitted the PK Memorandum Counter through the Jak Pst District Court Registrar's Office.

   As at the issuance date of the financial statements, the Bank is currently monitoring the progress of the examination process up to the decision at the Supreme Court.

7. Civil Lawsuit No. Number: 51/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2023/PN Niaga Sby Jo. Number 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court, which is where Fauziyah Novita Tajuddin, SH., MH. (P) as plaintiff, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk as defendant and Badung Bali Regency Land Agency Office as Co-Defendant. Miscellaneous Lawsuits filed by Fauziyah Novita as Curator of PT Gilimanuk Bay Tourism (in Bankruptcy) to Bank regarding management and bankruptcy fees amounting to Rp 1,844.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

Pada tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Bank kalah, sehingga Bank mengajukan upaya Kasasi.

Hasil putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung adalah Bank menang.

8. Gugatan Perdata No. 197/Pdt.G/2024/ PN.TNG antara Lim On Nie, Dkk selaku Penguggat melawan :
Tergugat I : Thjin Dian Phin;
Tergugat II : Notaris Bambang Suwondo;
Tergugat III : Bank JTrust Indonesia
Tergugat IV : Nuryanto;
Tergugat V : KPKNL Tangerang;
Tergugat VI : Ali Suwito;
Turut Tergugat I : BPN Kota Tangerang.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Objek yang disengketakan, dimana Ahli Waris berdalil bahwa Pewaris tidak pernah menjual atau mengagunkan objek tersebut kepada Bank.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, proses persidangan masih berjalan dengan agenda terakhir penyerahan bukti awal/permulaan.

9. Gugatan Perdata No. 563/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Brt antara Suadi Marbun (PT Merapi Karya Utama) selaku pengugat melawan: Elisabet Ramadiharja (tergugat I); Hidayat Adiwinata (tergugat II); PT Jtrust Investments Indonesia (tergugat III); PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. (tergugat IV); Christina Octaviani Salim (tergugat V); KPKNL Tangerang I (turut tergugat I); kantor pertanahan kota Tangerang Selatan (turut tergugat II).

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

At the Commercial Court level at the Surabaya District Court, the Bank lost, so the Bank filed an appeal.

The decision at the Cassation level at the Supreme Court is the Bank won.

8. Civil Lawsuit No. 197/Pdt.G/2024/PN.TNG between Lim On Nie, et al as Plaintiff against:
Defendant I: Thjin Dian Phin;
Defendant II: Notary Bambang Suwondo;
Defendant III: Bank JTrust Indonesia
Defendant IV: Nuryanto;
Defendant V: KPKNL Tangerang;
Defendant VI: Ali Suwito;
Also Defendant I: Tangerang City BPN.
The Lawsuit for Unlawful Actions was filed by the Plaintiff who is the Heir of the disputed Object, where the Heir argued that the Heir never sold or mortgaged the object to the Bank.

As at the issuance date of the financial statements, the trial process is still ongoing with the final agenda being the submission of preliminary/preliminary evidence.

9. Civil Suit No. 563/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt between Suadi Marbun (PT Merapi Karya Utama) as plaintiff against: Elisabet Ramadiharja (defendant I); Hidayat Adiwinata (defendant II); PT Jtrust Investments Indonesia (defendant III); PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. (defendant Iv); Christina Octaviani Salim (defendant V); KPKNL Tangerang I (co-defendant I); South Tangerang city land office (co-defendant II).

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

kasus perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

Bahwa pada tahun 2006 Penggugat merupakan debitur Bank Century (sekarang Bank Jtrust), kemudian pada tahun 2015 fasilitas kredit Penggugat telah dialihkan kepada JTII. Atas hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Bank yang telah melakukan pengalihan kepada JTII dengan dalil tidak pernah dimintakan persetujuan kepada Penggugat, serta Penggugat menuntut lelang yang telah terlaksana cacat hukum dan batal demi hukum.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, proses persidangan masih berjalan dengan agenda mediasi.

10. Gugatan Perdata No. 315/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Jtrust Investments Indonesia sebagai Penggugat melawan PT Damar Kristal Mas sebagai Tergugat; Bank sebagai Turut Tergugat I; PT Asuransi Sinar Mas sebagai Turut Tergugat II; PT Okamu Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; dan Notaris Martina, S.H. sebagai Turut Tergugat IV.

    Gugatan ini diajukan oleh PT Jtrust Investments Indonesia atas dasar adanya perbuatan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Damar Kristal Mas (eks debitur Bank) dan untuk menagih sisa *outstanding* (OS) yang sebagian dananya masih ada pada Bank.

    JTII selaku penggugat telah mengajukan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana juru sita pengadilan negeri Jakarta Pusat telah melakukan penyitaan terhadap rekening milik PT Damar Kristal Mas yang tercatat di Bank.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

Whereas in 2006 the Plaintiff was a debtor at Century Bank (now Jtrust Bank), then in 2015 the Plaintiff's credit facility was transferred to JTII. Due to this matter, the Plaintiff filed a lawsuit for Unlawful Actions regarding Bank's actions in carrying out the transfer to JTII with the argument that the Plaintiff had never asked for approval, and the Plaintiff claimed that the auction that had been carried out was legally flawed and null and void.

As at the issuance date of the financial statements, the trial process is still ongoing with a mediation agenda.

10. Civil Lawsuit No. 315/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst. in the Central Jakarta District Court between PT Jtrust Investments Indonesia as the Plaintiff against PT Damar Kristal Mas as the Defendant; the Bank as Co-Defendant I; PT Asuransi Sinar Mas as Co-Defendant II; PT Okamu Capital Indonesia as Co-Defendant III; and Notary Martina, S.H. as Co-Defendant IV.

This lawsuit was filed by PT Jtrust Investments Indonesia on the basis of an act of Default committed by PT Damar Kristal Mas (former debtor of the Bank) and to collect the remaining outstanding (OS), of which some of the funds are still in Bank.

JTII as the plaintiff has submitted an execution request to the chairman of the Central Jakarta District Court where the Central Jakarta District Court bailiff has confiscated the account belonging to PT Damar Kristal Mas which is registered at the Bank.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

11. Gugatan Perdata No. 386/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Pst antara Adhi Persada Properti (Penggugat), KPKNL Jakarta V (Tergugat II), BPN Kota Palembang (TT – 3) dengan Bank sebagai Tergugat I. Adapun Gugatan diajukan kerena Bank melakukan lelang terhadap jaminan PT Adhi Persada Properti (debitur) yang dimana menurut debitur bahwa Bank terikat dengan putusan homologasi atas PKPU PT Adhi Persada Properti, Bank melakukan lelang terhadap jaminan debitur karena Bank tidak terikat dengan putusan homologasi karena mengunakan haknya sesuai Pasal 281 Undang-Undang PKPU dan Kepailitan.

    Pada tanggal 10 Desember 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan Putusan yang menyatakan:

    ”Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

    Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank sedang menunggu pelaksanaan lelang yang dijadwalkan tanggal 14 Februari 2025.

12. Gugatan Perdata No. 345/Pdt.G/2024/ PN.LBP antara PT Mewah Indah Jaya selaku Penggugat, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk selaku Tergugat I, PT Jtrust Invesments Indonesia selaku Turut tergugat II; PT Balai Mandiri Prasarana selaku Turut tergugat III; dan KPKNL Medan selaku Turut tergugat 1, BPN Kabupaten Deli Serdang selaku Turut Tergugat II;

    Penggugat dahulu merupakan debitur Bank Jtrust dan telah dilakukan *cessie* kepada PT Jtrust Invesments Indonesia (penerima *cessie*).

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

11. Civil Lawsuit No. 386/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Pst between Adhi Persada Properti (Plaintiff), KPKNL Jakarta V (Defendant II), BPN Palembang City (TT – 3) with the bank as Defendant I. The lawsuit was filed because the Bank was auctioning collateral of PT Adhi Persada Properti (debtor) which according to the debtor that the Bank is bound by the homologation decision regarding PKPU PT Adhi Persada Properti, Bank conducted an auction of the debtor's collateral because Bank was not bound by the homologation decision because it exercised its rights in accordance with Article 281 of the PKPU and Bankruptcy Law.

    On December 10, 2024, the Central Jakarta District Court read out the Decision which stated:

    "Declaring that the Plaintiff's claim is unacceptable"

    As at the issuance date of the financial statements, the Bank is waiting for the auction to be held on February 14, 2025.

12. Civil Lawsuit No. 345/Pdt.G/2024/PN.LBP between PT Mewah Indah Jaya as Plaintiff, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk as Defendant I, PT Jtrust Investments Indonesia as co-defendant II; PT Balai Mandiri Prasarana as co-defendant III; and KPKNL Medan as Co-Defendant 1, BPN Deli Serdang Regency as Co-Defendant II;

    The plaintiff was previously a debtor of the Bank and a cession had been made to PT Jtrust Investments Indonesia (cessie recipient).

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

Penggugat melakukan perlawanan atas lelang yang dilaksanakan oleh Jtrust Invesments Indonesia terhadap agunan/aset milik PT Mewah Indah Jaya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, proses persidangan sedang memasuki agenda Saksi dari Penggugat.

13. Gugatan Perdata No. 8/Pdt.Plw/2017/ PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Hartawan sebagai Pelawan melawan Bank sebagai Terlawan.

Gugatan ini diajukan oleh Pelawan merupakan upaya hukum perlawanan (*Verzet*), dimana *verzet* ini dilaksanakan atas putusan *verstek* dengan Nomor Perkara No. 8/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 21 Mei 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan Putusan yang intinya ”Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Juli 2017, dalam hal ini Bank Kalah dan atas Putusan tersebut Bank mengajukan upaya banding.

Pada tanggal 22 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi DKI telah membacakan Putusan yang intinya "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding" dalam arti Bank menang.

Pada tahap pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bank dinyatakan menang dan saat ini Hartawan Aluwi mengajukan upaya Kasasi.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

The plaintiff fought against the auction carried out by Jtrust Investments Indonesia for collateral/assets belonging to PT Mewah Indah Jaya located in Deli Serdang Regency.

As at the issuance date of the financial statements, the trial is entering the Plaintiff's Witness agenda.

13. Civil Lawsuit No. 8/Pdt.Plw/2017/ PN.Jkt.Sel. at the South Jakarta District Court between Hartawan as Opponent and Bank as Defendant.

This lawsuit filed by Pelawan is a legal effort against (Verzet), where this verzet is implemented based on the verstek decision with Case No. 8/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL at the South Jakarta District Court which has permanent legal force.

On May 21 2024, the South Jakarta District Court read out the Decision which essentially "Cancels the Verstek Decision of the South Jakarta District Court Number: 8/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Sel dated July 6, 2017, in this case the Bank loses and based on the Decision then the Bank submitted an appeal.

On October 22 2024, the DKI High Court read out its decision which essentially "Cancelled the Decision of the South Jakarta District Court Number: 8/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Sel dated May 21, 2024 which was appealed for" in the sense that the Bank wins.

At the DKI Jakarta High Court stage, the Bank was declared victorious and currently Hartawan Aluwi is filing an appeal.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Penggugat

1. Bank saat ini sedang mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara No. 8/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, dimana pada perkara tersebut Bank telah dinyatakan menang.

   Permohonan eksekusi telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Mei 2022.

   Pada tanggal 28 Oktober 2022, Bank telah menerima surat panggilan/pelaksanaan *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

   Pada tanggal 23 November 2022, Bank telah menghadiri agenda *aanmaning* namun Termohon eksekusi tidak hadir seluruhnya maka ketua pengadilan memanggil kembali para Termohon Eksekusi melalui media cetak.

   Pada tanggal 25 Januari 2023, Bank telah menghadiri agenda *aanmaning* namun Termohon eksekusi tidak hadir seluruhnya maka ketua pengadilan memanggil kembali para Termohon Eksekusi melalui media cetak.

   Pada tanggal 29 Maret 2023, Bank telah menghadiri agenda *aanmaning* namun Termohon eksekusi tidak hadir maka akan segera dilakukan eksekusi terhadap Para Termohon.

   Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank sedang mempersiapkan penetapan eksekusi terhadap para termohon eksekusi.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

The Lawsuit filed by Bank as Plaintiff

1. The Bank is currently applying for execution of case No. 8/Pdt.G/2017/ PN.JKT.SEL, in which the Bank has been declared won.

   The request for execution was submitted to the South Jakarta District Court on May 18, 2022.

   On October 28, 2022, Bank received a summons/execution of aanmaning from the South Jakarta District Court.

   On November 23, 2022, Bank attended the aanmaning agenda however, the execution Respondent was not fully present, so the chairman of the court summoned the Execution Respondent again through printed media.

   On January 25, 2023, Bank attended the aanmaning agenda however, the execution Respondent was not fully present, so the chairman of the court summoned the Execution Respondent again through printed media.

   On March 29, 2023, Bank attended the aanmaning agenda but the Respondent for the execution is not present, the Respondent will be executed immediately.

   As at the issuance date of the financial statements, the Bank is preparing a stipulation of execution against the executed defendants.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Penggugat (lanjutan)

2. Gugatan Perdata No. 1285/Pdt.G/2023/ PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara Bank melawan Koperasi Karyawan Nestle Dkk, gugatan ini diajukan oleh Bank atas dasar adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan para *end user* dalam kerjasama pemberian fasilitas KTA-EBP antara Bank dengan Koperasi Karyawan Nestle.

   Majelis Hakim menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2024 Nomor 1285/Pdt.G/2023/PN Sby yang dimohonkan banding. Dengan kata lain Bank menang dalam tingkat Banding.

3. Gugatan Perdata No. 405/Pdt.G/2023/ PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Bank Melawan Penjamin PT Arifindo Grha Pratama (debitur), dimana Bank mengajukan gugatan ini dengan tujuan menagih kewajiban utang PT Arifindo Grha Pratama berdasarkan Akta *Personal Guarantee*.

   Tanggal 2 April 2024, Bank telah menyatakan Banding

   Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank saat ini masih menunggu putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

The Lawsuit filed by Bank as Plaintiff (continued)

2. Civil Suit No. 1285/Pdt.G/2023/PN.Sby at the Surabaya District Court between the Bank and the Nestle Employees Cooperative, et al., this lawsuit was filed by the Bank on the basis of an act of default committed by the Defendants who were end users in the collaboration providing KTA-EBP facilities between the Bank and the Nestle Employee Cooperative.

   The Panel of Judges stated that it confirmed the decision of the Surabaya District Court dated July 16, 2024 Number 1285/Pdt.G/ 2023/PN Sby which was requested for appeal. In other words, Bank won at the appeal level.

3. Civil Suit No. 405/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST in the Central Jakarta District Court between the Bank and the Guarantor PT Arifindo Grha Pratama (debtor), where the Bank filed this lawsuit with the aim of collecting PT Arifindo Grha Pratama's debt obligations based on the Personal Guarantee Deed.

   On April 2, 2024, the Bank has declared an appeal

   As at the issuance date of the financial statements, the Bank is currently still awaiting examination at the DKI Jakarta High Court.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Penggugat (lanjutan)

4. Gugatan Perdata No. 610/Pdt.Bth/2023/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang antara Bank selaku Pelawan melawan Rudi Rusmadi selaku Terlawan Penyita, RR Mahmildi Partanegara selaku Terlawan Tersita dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan selaku Turut Terlawan, dimana gugatan ini diajukan oleh Bank atas dasar adanya permohonan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tangerang terhadap objek yang telah diletakkan Hak Tanggungan oleh Bank. Bank tidak dapat melakukan lelang terhadap objek tersebut karena di dalam SKPT objek tersebut diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Tangerang sehingga merugikan Bank.

   Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 18 Desember 2023 dimana Bank menang. Adapun amar putusan sebagai berikut:

   1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, benar dan jujur;
   2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
   3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 01113/Buaran atas nama RADEN RUDI MAHMILDI PARTANEGARA yang terletak di Perumahan Bumi Serpong Residence, Jalan Gunung Krakatau 1, Blok C Nomor 7, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan seluas 160 M^2 (Seratus enam puluh meter persegi) yang telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PELAWAN berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No: 2340/2017 tanggal 24 Maret 2017;

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

The Lawsuit filed by Bank as Plaintiff (continued)

4. Civil Suit No. 610/Pdt.Bth/2023/PN.Tng at the Tangerang District Court between Bank as Opponent versus Rudi Rusmadi as Defendant Confiscated, RR Mahmildi Partanegara as Defendant Confiscated and the South Tangerang City Land Office as Co-Opponent, where this lawsuit was filed by the Bank on the basis of an application for confiscation of execution which had been placed by the Tangerang District Court bailiff for the object which had been placed in Mortgage by Bank. The Bank cannot auction the object because in the SKPT the object is confiscated by the Tangerang District Court, causing losses to the Bank.

   The case was decided on December 18, 2023 where the Bank won. The verdict is as follows:

   1. Declare that the Opponent is a Contrarian who has good intentions, is true and honest;
   2. Accept the resistance of the Opponent in part;
   3. Declare legal ownership certificate (SHM) No: 01113/Buaran in the name of RADEN RUDI MAHMILDI PARTANEGARA which is located at Bumi Serpong Residence Housing, Jalan Gunung Krakatau 1, Block C Number 7, Buaran Village, Serpong District, South Tangerang City covering an area 160 M^2 (One hundred and sixty square meters) which has been encumbered with Mortgage Rights in the name of the Opponent based on Mortgage Rights Certificate No: 2340/2017 dated March 24, 2017;

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Penggugat (lanjutan)

4. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi No: 52/Pdt.EKS/2022/PN.TNG Jo. No: 1084/Pdt.G/2021/PN.TNG tanggal 31 Mei 2022 terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01113/Buaran atas nama RADEN RUDI MAHMILDI PARTANEGARA yang terletak di Perumahan Bumi Serpong Residence, Jalan Gunung Krakatau 1, Blok C Nomor 7, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan seluas 160 M^2 (Seratus enam puluh meter persegi) yang telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PELAWAN berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 2340/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01113/Buaran atas nama RADEN RUDI MAHMILDI PARTANEGARA yang terletak di Perumahan Bumi Serpong Residence, Jalan Gunung Krakatau 1, Blok C Nomor 7, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan seluas 160 M^2 (Seratus enam puluh meter persegi) sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi No: 52/Pdt.EKS/2022/ PN.TNG Jo. No: 1084/Pdt.G/2021/ PN.TNG tanggal 31 Mei 2022;
6. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk menaati dan tunduk pada isi putusan;
7. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,4.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

The Lawsuit filed by Bank as Plaintiff (continued)

4. Declare Execution Confiscation in accordance with Determination of Execution Confiscation Number: 52/Pdt.EKS/2022/PN.TNG Jo. No: 1084/Pdt.G/2021/PN.TNG dated May 31, 2022 regarding a plot of land and building with Certificate of Ownership (SHM) Number 01113/Buaran in the name of RADEN RUDI MAHMILDI PARTANEGARA located at Bumi Serpong Residence Housing, Jalan Gunung Krakatau 1, Block C Number 7 Buaran Village Serpong Districk, South Tangerang City covering an area 160 M2 Tangerang District Court Bailiff is invalid and worthless;

5. Ordered to lift the Execution Confiscation on a plot of land and building with Certificate of Ownership Rights (SHM) Number 01113/Buaran in the name of RADEN RUDI MAHMILDI PARTANEGARA located at Bumi Serpong Residence Housing, Jalan Gunung Krakatau 1, Block C Number 7, Buaran Village, Serpong District, South Tangerang City, covering an area of 160 M2 (One Hundred and Sixty Square Meters) as per Determination of Execution Confiscation No: 52/Pdt.EKS/2022/PN.TNG Jo. No: 1084/Pdt.G/2021/PN.TNG dated 31 May 2022;
6. Punish the Defendants and Co-Opponents to obey and submit to the contents of the decision;
7. Reject any resistance from the Opponent other than that;
8. Sentence the Opponents to pay court costs in the amount of Rp 2.4.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

b. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Penggugat (lanjutan)

Bank telah menerima memori banding pada tanggal 31 Januari 2024 dan akan segera membuat kontra memori banding guna disampaikan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Bank telah menerima pemberitahuan putusan banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula terlawan I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 610/Pdt.Bth/2023/ PN.TNG tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding semula terlawan I untuk membayar biaya perkara; (Bank menang).

Atas Putusan Pengadilan Tinggi, Rudi Rusmadi mengajukan upaya hukum kasasi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank saat ini menunggu putusan kasasi.

5. Gugatan Perdata No. 186/Pdt.Plw/2024/PN Plg di Pengadilan Negeri Palembang antara Bank sebagai Pelawan, Wahyudi Prasetyo selaku terlawan I, PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku Terlawan 2, Lembaga Penjamin Simpanan selaku turut terlawan 1, KPKNL Palembang selaku turut terlawan 2 dan BPN Kota Palembang turut terlawan 3.

   Gugatan Perlawanan diajukan oleh Pelawan terkait Penetapan Sita Eksekusi Ketua PN Palembang terhadap asset milik Pelawan.

   Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, proses persidangan memasuki agenda pemanggilan terlawan II.

48. LEGAL CASES (continued)

b. The outstanding legal and fraud cases up to December 31, 2024 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

The Lawsuit filed by Bank as Plaintiff (continued)

The Bank has received the appeal memorandum on January 31, 2024 and will immediately prepare a counter appeal memorandum to be submitted to the Tangerang District Court.

The Bank has received notification of the appeal decision with the following decision:

1. *Received the Appeal Application from the original Appellant, defendant I;*
2. *Strengthening the Decision of the Tangerang District Court Number: 610/Pdt.Bth/2023/PN.TNG dated 18 December 2023 which is requested to be appealed;*
3. *Sentencing the original Appellant, defendant I, to pay the court costs;(Bank wins)*

Based on the decision of the High Court, Rudi Rusmadi has filed a cassation appeal. As at the issuance date of the financial statements, the Bank is currently awaiting the cassation ruling.

5. Civil Lawsuit No. 186/Pdt.Plw/2024/PN Plg at the Palembang District Court between the Bank as Opponent, Wahyudi Prasetyo as Defendant I, PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia as Defendant 2, the Deposit Insurance Corporation as co-opponent 1, KPKNL Palembang as co-opponent 2 and BPN Kota Palembang Also Fights 3.

The Perlawanan lawsuit was filed by Pelawan regarding the Palembang District Court Chairman's decision to confiscate the execution of Pelawan's assets.

As at the issuance date of the financial statements, the trial entering the summons of opponents II agenda.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

c. Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Pemohon

Kasus Hukum dimana Posisi Bank sebagai Kreditur Separatis

1. Nomor Perkara: 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama PT Kartika Asri Prima, Adi Nugraha, H. Moh. Lili Juharli dan Louise Widjaja (dalam Pailit). Bank telah melakukan pendaftaran tagihan/klaim kepada Tim Kurator dan telah diakui oleh Tim Kurator terkait tagihan/klaim tersebut sehingga Bank sebagai Kreditur Separatis. Bank akan selalu memantau terkait pemberesan boedel pailit oleh Tim Kurator.

   Bank selaku kreditur telah mengirimkan surat permohonan perkembangan pemberesan harta pailit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 dan 15 September 2022 kepada Tim Kurator guna menjalankan fungsi pengawas, tetapi surat tersebut sampai dengan saat ini belum dibalas oleh Tim Kurator.

   Dengan tidak adanya tanggapan dari Tim Kurator, maka Bank mengirimkan surat pengaduan kepada Hakim Pengawas Perkara pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

   Tim Kurator telah memberikan tanggapan atas surat permohonan perkembangan pemberesan harta pailit, dimana Tim Kurator belum melaksanakan lelang terhadap harta pailit dengan alasan terdapat kendala administrasi dokumen dalam pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung.

48. LEGAL CASES (continued)

c. Cases of Debt Payment Obligation (PKPU) and Bankruptcy

Legal Cases where the Bank's Position is the Applicant

Legal Cases where the Bank's Position as Separatist Creditor

1. Case Number: 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on behalf of PT Kartika Asri Prima, Adi Nugraha, H. Moh. Lili Juharli and Louise Widjaja (in Bankruptcy). The Bank has registered the claim to the Curator Team and has been recognized by the Curator Team regarding the claim so that the Bank is a Separatist Creditor. The Bank will always carry out monitoring related to the settlement of the bankruptcy account by the Curator Team.

   The Bank as the creditor has sent a letter requesting the progress of the settlement of bankruptcy assets 2 (two) times, namely on August 19, 2022 and September 15, 2022 to the Curator Team to carry out the monitoring function, but the letter has not yet been replied to by the Curator Team.

   With no response from the Curator Team, the Bank sent a letter of complaint to the Case Supervisory Judge at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court.

   The Curator Team has provided a response to the letter requesting progress on the settlement of bankruptcy assets, where the Curator Team has not yet carried out an auction for bankruptcy assets on the grounds that there are document administration problems in carrying out the auction at the Bandung City State Property and Auction Service Office (KPKNL).

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

c. Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Pemohon (lanjutan)

Kasus Hukum dimana Posisi Bank sebagai Kreditur Separatis (lanjutan)

2. Nomor Perkara: 32/Pdt.Sus-PK2PU/2021/ PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nama PT Teja Sekawan Cocoa Industries (dalam Pailit). Bank telah melakukan pendaftaran tagihan/klaim kepada Tim Kurator dan telah diakui oleh Tim Kurator terkait tagihan/klaim tersebut sehingga Bank sebagai Kreditur Separatis.

   Bank akan selalu melakukan *monitoring* terkait pemberesan boedoel pailit oleh Tim Kurator; Bank selaku kreditur telah mengirimkan surat permohonan perkembangan pemberesan harta pailit pada tanggal 23 Agustus 2022 kepada Tim Kurator guna menjalankan fungsi pengawas, Tim Kurator menanggapi surat tersebut melalui lisan terlebih dahulu dimana telah dilakukan lelang sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil tidak ada pembeli. Tim Kurator akan membalas surat tersebut guna mendapat penjelasan lebih detail. Bank selaku kreditur telah menerima laporan perkembangan pemberesan harta pailit pada tanggal 10 Oktober 2022 dari Tim Kurator, dimana pada intinya telah dilakukan lelang sebanyak 6 (enam) kali terhadap harta pailit tetapi tidak ada peminat/pembeli.

3. Permohonan PKPU No. 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Bank melawan PT Arifindo Grha Pratama, permohonan ini diajukan oleh Bank atas dasar adanya utang yang dilakukan oleh PT Arifindo Grha Pratama. Pada tanggal 6 Oktober 2022 terdapat Putusan yang hasilnya mengabulkan PT Arifindo Grha Pratama dalam PKPU.

   Tanggal 18 November 2022, agenda Rapat Hakim Pengawas dengan Tim Pengurus terkait Masa Perpanjangan PKPU, dalam rapat para kreditur setuju untuk perpanjangan PKPU tetap selama 2 bulan kepada PT Arifindo Grha Pratama.

48. LEGAL CASES (continued)

c. Cases of Debt Payment Obligation (PKPU) and Bankruptcy (continued)

Legal Cases where the Bank's Position is the Applicant (continued)

Legal Cases where the Bank's Position as Separatist Creditor (continued)

2. Case Number: 32/Pdt.Sus-PK2PU/2021/ PN.Niaga.Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court name PT Teja Sekawan Cocoa Industries (in Bankruptcy). The Bank has registered the bill/claim with the Curator Team and has been acknowledged by the Curator Team regarding the bill/claim so that the Bank is a Separatist Creditor.

   The Bank will always monitor the resolution of bankruptcy cases by the Curator Team; The Bank as the creditor has sent a letter requesting progress on the settlement of bankruptcy assets on August 23, 2022 to the Curator Team to carry out its supervisory function. The Curator Team responded to the letter verbally first where auctions were held 3 (three) times with the result that there were no buyers. The Curatorial Team will reply to the letter to obtain a more detailed explanation. The bank as the creditor has received a progress report on the settlement of the bankruptcy assets on October 10, 2022 from the Curator Team, where in essence the bankruptcy assets have been auctioned 6 (six) times but there were no takers/buyers.

3. PKPU Application No. 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst in the Commercial Court at the Central Jakarta District Court between the Bank and PT Arifindo Grha Pratama, this application was submitted by the Bank on the basis of a debt owed by PT Arifindo Grha Pratama. On October 6, 2022, the agenda of the Decision which resulted in the approval of PT Arifindo Grha Pratama in PKPU.

   On November 18, 2022, the agenda for the Supervisory Judge Meeting with the Management Team regarding the PKPU Extension Period, at the meeting the creditors agreed to a fixed PKPU extension for 2 months to PT Arifindo Grha Pratama.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

c. Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (lanjutan)

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Pemohon (lanjutan)

Kasus Hukum dimana Posisi Bank sebagai Kreditur Separatis (lanjutan)

Tanggal 22 Februari 2023, agenda Putusan yang dimana Majelis Hakim telah membacakan putusan yang berbunyi "PT Arifindo Grha Pratama dalam keadaan Pailit".

Tanggal 5 April 2024, PT. AGP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Selanjutnya, Bank menyiapkan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK).

Bank memantau Putusan Peninjauan Kembali dan menindaklanjuti pergantian kurator.

Pada tanggal 13 September 2024, Mahkamah Agung RI telah mengirimkan salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 36 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 19 Agustus 2024, suratnya memberitahukan bahwa salah satu bunyi Putusan menyebutkan "Menolak permohonan pemeriksaan PK dari Pemohon PK PT Arifindo Grha Pratama tersebut" dalam arti Bank menang.

Bank saat ini menunggu pemberesan harta Pailit oleh Tim Kurator.

48. LEGAL CASES (continued)

c. Cases of Debt Payment Obligation (PKPU) and Bankruptcy (continued)

Legal Cases where the Bank's Position is the Applicant (continued)

Legal Cases where the Bank's Position as Separatist Creditor (continued)

On February 22, 2023, the agenda for the Decision in which the Panel of Judges read out the decision which read "PT Arifindo Grha Pratama is in a state of bankruptcy".

On April 5, 2024, PT. AGP submits a request for Judicial Review (PK)

Then, Bank prepared Contra Memory Review (PK)

The Bank monitors the Judicial Review Decision and follows up on the change of curator.

On September 13, 2024, the Indonesian Supreme Court sent a copy of Judicial Review Decision No. 36 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 dated August 19, 2024, in essence the letter informed that one of the rulings stated "Rejecting the request for PK examination from the PK Petitioner PT Arifindo Grha Pratama" in the sense of Bank wins.

The Bank is currently awaiting the settlement of the Bankruptcy assets by the Curator Team.

49. KELANGSUNGAN USAHA

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Bank akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mengalami akumulasi kerugian operasional yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 12.317.501 dan Rp 12.320.333.

49. GOING CONCERN

The financial statements have been prepared assuming that the Bank will continue to operate as a going concern entity. As at December 31, 2024 and 2023, the Bank experienced accumulated operating losses which resulted to a net deficit amounting to Rp 12,317,501 and Rp 12,320,333, respectively.

49. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Untuk memperbaiki kondisi ini, Bank mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bank berencana untuk memperkuat permodalan baik secara organik melalui penguatan laba operasional maupun unorganik dengan cara mengumpulkan dana yang merupakan campuran ekuitas dan utang.

b. Bank akan meningkatkan ekspansi bisnis melalui pemberian kredit yang berfokus pada pengembangan bisnis korporat, komersial atau sindikasi serta konsumer dan penghimpunan dana murah atau CASA pada segmen retail maupun korporasi untuk meningkatkan pendapatan bunga bersih.

c. Bank juga berencana untuk meningkatkan laba operasional melalui peningkatan dan melakukan langkah-langkah efisiensi biaya pada biaya umum administrasi, biaya *legal fee* serta penghematan biaya tenaga kerja dengan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen karyawan baru.

d. Bank akan memperkuat infrastruktur perkreditan melalui perbaikan fungsi *Credit Risk Reviewer* dalam melaksanakan analisa kredit, memperkuat fungsi SKAI dalam proses audit untuk memastikan pengendalian internal Bank berjalan dengan baik, dan proses monitoring yang lebih ketat atas kredit yang berpotensi memburuk agar dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan/ pemulihan.

e. Untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin bank berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan gap likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) dengan berpedoman pada *Standard Operation Procedure* LCP (*Liquidity Contingency Plan*).

f. Bank juga akan memantau eksposur dalam mata uang asing dan suku bunga pasar dengan melakukan *monitoring* pergerakan harga dari portofolio investasi Bank, melakukan mitigasi risiko konsentrasi dengan membuat batas transaksi mulai dari batas pemutus, batas *limit* antarbank, dan *limit dealer*, serta analisa yang mendalam (*rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed and market price*) sebelum melakukan investasi.

49. GOING CONCERN (continued)

To improve this condition, the Bank has prepared the following plans:

a. The Bank plans to strengthen its capital base organically by improving operational profit and inorganically by raising funds from a combination of equity and debt.

b. The Bank will increase business expansion focusing on the development of corporate, commercial or syndicated and consumer businesses, and increase low-cost of funds or CASA in the retail and corporate segments to increase net interest income.

c. To improve operational profit, The Bank plans to focus on generating fee-based income and implementing cost efficiency strategy for general administrative costs and legal fee costs, as well as labor cost savings by being more selective in recruiting new employees.

d. The Bank will strengthen credit infrastructure through improving the Credit Risk Reviewer function in carrying out credit analysis, strengthening the SKAI function in the audit process to ensure that the Bank's internal controls are running properly, and a tighter monitoring process for potentially worsening credit quality so that corrective steps can be taken immediately.

e. To anticipate liquidity risk as early as possible, the bank strives to improve the effectiveness of liquidity gap management (maturity gap and cash flow projection) by referring to the Standard Operation Procedure LCP (Liquidity Contingency Plan).

f. The Bank will also monitor exposure in foreign currency and market interest rates by monitoring price movements of the Bank's investment portfolio, mitigating concentration risk by setting transaction limits ranging from breaker limits, interbank limits, and dealer limits, as well as in-depth analysis (rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed and market price) before making an investment.

49. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

g. Pergantian *core banking system* yang baru, diharapkan dapat mengadopsi teknologi terbaru seperti *fintech*, untuk meningkatkan layanan digital perbankan, efisiensi biaya operasional, juga mempermudah pemanfaatan *big data* dan analitikal dalam riset perilaku nasabah untuk meningkatkan diversifikasi produk.

h. Bank juga telah menyusun *Recovery Plan* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha, seperti tekanan keuangan (*financial stress*) baik yang disebabkan oleh internal Bank maupun eksternal makro ekonomi domestik dan internasional.

Pemegang saham utama dalam surat tertanggal 31 Desember 2024, menyatakan persetujuannya untuk memberikan dukungan finansial kepada Bank dengan tujuan agar Bank mampu memenuhi kewajibannya dimasa mendatang.

49. GOING CONCERN (continued)

g. The replacement of the new core banking system is expected to adopt the latest technology such as fintech, to improve digital banking services, operational cost efficiency, and also facilitate the use of big data and analytics in customer behavior research to increase product diversification.

h. The Bank has also prepared a recovery plan, which has been submitted to the Financial Services Authority (OJK), to be implemented in order to address conditions that threaten business sustainability, such as financial distress caused by either internal bank factors or external domestic macroeconomic conditions.

The majority shareholder in a letter dated December 31, 2024, stated its agreement to provide financial support to the Bank so as to enable the Bank to fulfill its future obligations.

50. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

Rincian transaksi non kas adalah sebagai berikut:

50. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO CASH FLOWS

Details of non-cash transactions are as follows:

	2024	2023	
Pinjaman yang dihapusbuku (Catatan 12)	407	465	*Written-off loans (Note 12)*
Aset tetap yang dihapusbuku (Catatan 16)	2	26	*Written-off fixed assets (Note 16)*
Harga perolehan aset hak-guna (Catatan 18)	7.657	13.730	*Acquisition cost right of use assets (Note 18)*

Berikut merupakan rekonsiliasi atas perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

The following is the reconciliation of movements of liabilities to cash flows arising from financing activities:

Komponen dari aktivitas pendanaan (diluar ekuitas)	1 Januari/ *January 1,* 2024	Kas/ *Cash*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember/ *December 31,* 2024	*Component of financing activities (excluding equity)*
Liabilitas sewa	1.707	(1.179)	-	528	*Lease liabilities*

Komponen dari aktivitas pendanaan (diluar ekuitas)	1 Januari/ *January 1,* 2023	Kas/ *Cash*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember/ *December 31,* 2023	*Component of financing activities (excluding equity)*
Liabilitas sewa	1.046	(1.555)	2.216	1.707	*Lease liabilities*

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Giro Wajib Minimum Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang efektif pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 24/04/PBI/2022 yang efektif pada tanggal 1 Maret 2022, dan juga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang efektif pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 24/8/PADG/2022 yang efektif pada tanggal 30 Juni 2022 yang masing-masing sebesar:

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No. 20/3/PBI/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units effective on July 16, 2018 where the regulation has undergone several amendments, the latest amendment is contained in the Bank Indonesia Regulation No. 24/04/PBI/2022 effective on March 1, 2022, and also Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 20/10/PADG/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units effective on July 16, 2018 where the regulation has undergone several amendments, the latest amendment is contained in the Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 24/8/PADG/2022 effective on June 30, 2022, are as follows:

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
GWM	9,00%	9,00%	*GWM*
Harian*)	0,00%	0,00%	*Daily*)*
Rata-rata*)	9,00%	9,00%	*Average*)*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	6,00%	6,00%	*Macroprudential Liquidity Buffer*
Mata uang asing	4,00%	4,00%	*Foreign currencies*
Harian	2,00%	2,00%	*Daily*
Rata-rata	2,00%	2,00%	*Average*

*) Berdasarkan PADG Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023, Bank mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 3,30% karena Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 yang seharusnya sebesar 9,00% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 9,00% menjadi sebesar 5,70% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 5,70%.

**) Based on PADG No. 12/2023 dated October 1, 2023, Bank gets incentives in the form of relaxation of the Statutory Reserves in Rupiah on December 31, 2024 amounting to 3.30% because Bank provides funds for certain and inclusive economic activities. The Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled by the Bank on December 31, 2024 which should be 9.00% with daily provisions of 0.00% and an average of 9.00% become 5.70% with daily provisions of 0.00% and an average of 5.70%.*

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (PBI Insentif) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/12/PADG/2022 (PADG Insentif), insentif yang diberikan kepada Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 3,3% dan 1%.

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

Referring to Bank Indonesia Regulation No. 24/5/PBI/2022 concerning Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (PBI Incentives) and Regulation of Members of the Board of Governors No. 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities as amended by Regulation of Members of the Board of Governors No. 24/12/PADG/2022 (PADG Incentives), incentives given to Banks on December 31, 2024 and 2023 amounted to 3.3% and 1%, respectively.

The Bank's GWM ratios as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	**2023**	
Rupiah			*Rupiah*
GWM	5,91%	8,12%	*GWM*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-rata	5,91%	8,12%	*Average*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	13,67%	9,42%	*Macroprudential Liquidity Buffer*
Mata uang asing	4,67%	4,95%	*Foreign currencies*
Harian	2,00%	2,00%	*Daily*
Rata-rata	2,67%	2,95%	*Average*

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 6.

Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserve as at 31 December 2024 and 2023.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 6.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

b. Giro pada bank lain

b. Current accounts with other banks

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2024		2023		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	593.212	(635)	548.420	(404)	*Current*
Macet	799	(799)	813	(813)	*Loss*
Total	**594.011**	**(1.434)**	**549.233**	**(1.217)**	***Total***

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 7.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 7.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan sebagai lancar.

All placements with Bank Indonesia and other banks as at 31 December 2024 and 2023 are classified as current.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 8.

The further disclosures on placement with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 8.

d. Efek-efek

d. Marketable securities

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

Seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan sebagai lancar.

All marketable securities as at December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

Pengungkapan lebih lanjut pada efek-efek diungkapkan pada Catatan 9.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 9.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

e. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan sebagai lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diungkapkan pada Catatan 10.

f. Tagihan derivatif

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan sebagai lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan derivatif diungkapkan pada Catatan 11.

g. Pinjaman yang diberikan

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

e. Securities purchased under agreements to resell

By Financial Service Authority Rule collectibility

All securities purchased under agreements to resell as at December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

The further disclosures on securities purchased under agreements to resell are presented in Note 10.

f. Derivative receivable

By Financial Service Authority Rule collectibility

All derivative receivable as at December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

The further disclosures on derivative receivables are presented in Note 11.

g. Loans

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2024		2023		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	25.781.967	(50.996)	23.240.471	(58.224)	*Current*
Dalam perhatian khusus	228.733	(9.776)	393.403	(11.553)	*Special mention*
Kurang lancar	129.850	(50.581)	29.256	(8.699)	*Substandard*
Diragukan	56.070	(5.772)	2.270	(1.553)	*Doubtful*
Macet	331.446	(80.417)	214.438	(67.226)	*Loss*
Total	**26.528.066**	**(197.542)**	**23.879.838**	**(147.255)**	***Total***

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

g. Loans (continued)

Restrukturisasi berdasarkan jenis kredit dan kolektibilitas

Restructuring by loan type and collectibility

		2024	2023		
	Kolektibilitas/ ***Collectibility***	**Restruktur/** ***Restructure***	**Restruktur/** ***Restructure***	**Restruktur Covid-19/** ***Covid-19 restructure***	
Kredit investasi	1	190.751	227.739	76.049	*Investment loans*
	2	-	5.341	17.429	
	3	-	13.559	-	
	4	-	325	-	
	5	-	-	-	
Sub-total		190.751	246.964	93.478	*Sub-total*
Kredit modal kerja	1	706.745	180.333	8.950	*Working capital loans*
	2	164.452	21.400	19.309	
	3	6.579	-	-	
	4	50.000	-	-	
	5	19.188	-	-	
Sub-total		946.964	201.733	28.259	*Sub-total*
Kredit kepemilikan rumah	1	8.968	157	8.859	*Housing loans*
	2	326	-	1.327	
	3	-	-	-	
	4	-	333	-	
	5	1.327	-	-	
Sub-total		10.621	490	10.186	*Sub-total*
Pinjaman rekening koran	1	72.610	61.536	10.873	*Current account loans*
	2	11.500	3.487	9.999	
	3	-	9.528	-	
	4	-	-	-	
	5	7.499	-	-	
Sub-total		91.609	74.551	20.872	*Sub-total*
Kredit lainnya	1	184.369	292.016	-	*Other loans*
	2	11.706	144.123	-	
	3	60.550	-	-	
	4	-	-	-	
	5	107.712	107.731	-	
Sub-total		364.337	543.870	-	*Sub-total*
Total		**1.604.282**	**1.067.608**	**152.795**	***Total***

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi berdasarkan jenis kredit dan kolektibilitas (lanjutan)

Restrukturisasi pinjaman Bank dilakukan sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, total pinjaman yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 1.604.282 dan Rp 1.067.608. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

1. Rasio pinjaman bermasalah

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

g. Loans (continued)

Restructuring by loan type and collectibility (continued)

The Bank's loan restructuring is in accordance with POJK No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks. As at December 31, 2024 and 2023, total restructured loans amounted to Rp 1,604,282 and Rp 1,067,608, respectively. The restructuring scheme is generally carried out by extending the repayment period of the loan and rescheduling the outstanding interest.

Other significant information relating to loans

1. Non-performing loan (NPL) ratios

	2024		**2023**		
	Bruto/ *Gross*	Neto/ *Net*	Bruto/ *Gross*	Neto/ *Net*	
Pinjaman bermasalah	1,95%	1,43%	1,03%	0,71%	*Non-performing loan*

Rasio pinjaman bermasalah terhadap aset produktif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 1,53% dan 0,82%.

Non performing loans ratios to earnings assets as at December 31, 2024 and 2023 were 1.53% and 0.82%, respectively.

2. Rasio pinjaman usaha kecil dan mikro terhadap pinjaman yang diberikan masing-masing adalah sebesar 1,36% dan 2,15% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

2. Ratio of small and micro business loans to total loans were 1.36% and 2.15% as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

3. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank tidak memiliki debitur yang telah melanggar atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3. As at December 31, 2024 and 2023, the Bank does not have debtor which violated or exceeded the Legal Lending Limit (LLL), respectively.

4. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank melakukan hapus buku serta hapus tagih masing-masing 3 (tiga) dan 2 (dua) debitur dengan jumlah keseluruhan masing-masing Rp 9 dan Rp 318. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank melakukan hapus buku tetapi tidak hapus tagih masing-masing 2 (dua) dan 1 (satu) debitur dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp 398 dan Rp 147. Hapus buku kredit telah mendapatkan persetujuan dari manajemen Bank.

4. As at December 31, 2024 and 2023, the Bank written-off loans and charged off 3 (three) and 2 (two) debtors respectively, with total amounts of Rp 9 and Rp 318 respectively. As at December 31, 2024 and 2023, the Bank has written-off loans but did not collect from 2 (two) and 1 (one) debtors respectively, with a total amount of Rp 398 and Rp 147, respectively. The loans written-off have been approved by the Bank's management.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Other significant information relating to loans (continued)

Perubahan pinjaman yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

The changes in the balance of loans that have been written-off are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	69.185	69.070	*Balance at beginning of the year*
Penghapusbukuan pinjaman yang diberikan tahun berjalan	407	465	*Written-off loans during the year*
Hapus tagih pinjaman yang diberikan tahun berjalan	(9)	(318)	*Claims written-off during the year*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	(56)	(32)	*Recoveries from written-off loans*
Saldo akhir tahun	**69.527**	**69.185**	***Balance at end of year***

Pengungkapan lebih lanjut pada pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 12.

Further disclosures on loans and advances are disclosed in Note 12.

h. Tagihan akseptasi

h. Acceptance receivables

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

Seluruh tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 diklasifikasikan sebagai lancar.

All acceptance receivables as at December 31, 2023 are classified as current.

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan akseptasi diungkapkan pada Catatan 13.

The further disclosures on acceptance receivables are presented in Note 13.

i. Manajemen modal

i. Capital management

Tujuan dari manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, nasabah dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham dan keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The objective of the Bank's capital management is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, customers and market confidence. In managing its capital, the Bank consider factors such as providing optimal capital rate of return to shareholders and safety resulting from a good capital position.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan Otoritas Jasa Keuangan untuk pengukuran tersebut terutama berdasarkan pengawasan atas hubungan antara kecukupan modal dengan ketersediaan modal.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital. The Financial Service Authority approach to such measurement is primarily based on monitoring the correlation of the capital adequacy to availability of capital resources.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

i. Manajemen modal (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank. Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (Tier 1) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1) paling rendah sebesar 4,5%.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 (dua) Tier yaitu Modal Tier 1 dan Modal Tier 2.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yaitu minimum Modal Inti (Tier 1) sebesar minimum Rp 3.000.000 (tiga triliun Rupiah) paling lambat 31 Desember 2022.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

i. Capital management (continued)

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk-Weighted Assets (RWA). In accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 amendments to the OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Conventional Commercial Bank Report Publication, since the end of the September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Bank's Capital. This regulation also stipulates requirement of Tier 1 ratio at a minimum of 6% and Common Equity Tier 1 ratio at a minimum of 4.5%.

The Bank calculates its capital adequacy requirements using the prevailing OJK regulation, where the regulatory capital is classified into2 (two) Tiers, i.e., Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank has fulfilled the requirement as stipulated in OJK regulation No. 12/POJK.03/2020 dated March 17, 2020 regarding Consolidation of Commercial Bank, of which minimum Tier 1 Capital at Rp 3,000,000 (three trillions Rupiah) at the latest by December 31, 2022.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

i. Manajemen modal (lanjutan)

i. Komposisi permodalan Bank

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

i. Capital management (continued)

i. Composition of the Bank's capital

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank's Capital Adequacy Ratio which is calculated in compliance with Financial Services Authority's regulation is as follows:

	2024	2023	
Komponen modal			***Component of capital***
A. Modal inti			***A. Core capital***
Modal disetor	13.032.929	13.032.929	*Paid-in capital*
Cadangan tambahan modal	(9.781.985)	(9.965.495)	*Reserve for additional capital*
Total modal inti	3.250.944	3.067.434	*Total core capital*
B. Modal pelengkap			***B. Supplementary capital***
Cadangan umum penyisihan penghapusan aset produktif	249.970	225.441	*General reserve of allowance for possible losses on earning assets*
Total modal	**3.500.914**	**3.292.875**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit	24.343.565	22.829.305	*Risk Weighted Assets (RWA) for credit risk*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar	12.074	53.026	*Risk Weighted Assets (RWA) for market risk*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional	851.240	568.795	*Risk Weighted Assets (RWA) for operational risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	13,90%	14,07%	*Capital Adequacy Ratio for credit risk and operational risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	13,89%	14,04%	*Capital Adequacy Ratio for credit risk, market risk and operational risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	10,00%	10,00%	*Minimum Capital Adequacy Ratio Requirement*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank has complied with all capital requirements.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

i. Manajemen modal (lanjutan)

ii. Alokasi permodalan

Pengalokasian permodalan untuk aktivitas bisnis dan operasional Bank merupakan tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Risiko yang terkait dengan profil risiko Bank. Pengambilan keputusan atas alokasi modal dilakukan dalam rapat ALCO.

Pengalokasian modal untuk aktivitas bisnis dan operasional bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal dengan rasio KPMM yang terjaga pada *level* yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank dan ketentuan regulasi perbankan.

j. Posisi devisa neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal.

Rasio posisi devisa neto untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Rasio posisi devisa neto secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam akun administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

i. Capital management (continued)

ii. Capital allocation

The capital allocation for business activities and operations of the Bank is the duty and responsibility of the Risk Management Unit related to the Bank's risk profile. The capital allocation decisions were made in the ALCO meeting.

The capital allocation for business and operational activities is aimed to achieve an optimal level of income while the CAR is maintained at a predetermined level by the Bank's management and the provision of banking regulation.

j. Net open position

The Net Open Position calculation of the Bank is based on Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on such regulation, the Bank is required to maintain the overall net open position at a maximum of 20% from total capital.

Net open position ratio of statement of financial position is the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency which is stated in Rupiah. The overall net open position is the sum of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency, which are stated in Rupiah.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

j. Posisi devisa neto (lanjutan)

j. Net open position (continued)

	2024			
Mata Uang Asing	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto (nilai absolut)/ *Net Open Position (absolute amount)***	***Foreign Currency***
Keseluruhan (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				*Aggregate (Statement of financial position and administrative accounts)*
Dolar Amerika Serikat	4.139.185	4.144.209	5.024	*United States Dollar*
Euro Eropa	16.062	16.826	764	*European Euro*
Poundsterling Inggris	420	-	420	*Great Britain Poundsterling*
Yen Jepang	231.918	232.005	87	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	24.199	24.188	11	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	8.706	8.697	9	*Australian Dollar*
Mata uang lainnya	1.931	6	1.925	*Other currencies*
Total	**4.422.421**	**4.425.931**	**8.240**	***Total***
Modal			3.498.206	***Capital***
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)			0,24%	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position and administrative accounts)***

	2023			
Mata Uang Asing	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto (nilai absolut)/ *Net Open Position (absolute amount)***	***Foreign Currency***
Keseluruhan (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				*Aggregate (Statement of financial position and administrative accounts)*
Dolar Amerika Serikat	6.021.152	6.067.590	46.438	*United States Dollar*
Euro Eropa	3.459	4.587	1.128	*European Euro*
Yen Jepang	441.217	442.329	1.112	*Japanese Yen*
Dolar Australia	22.763	22.634	129	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	88.184	87.105	1.079	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	2.518	1.257	1.261	*Great Britain Poundsterling*
Mata uang lainnya	3.757	1.878	1.879	*Other currencies*
Total	**6.583.050**	**6.627.380**	**53.026**	***Total***
Modal			3.353.641	***Capital***
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)			1,58%	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position and administrative accounts)***

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya

i. Penerapan Tata Kelola yang Baik

Bank senantiasa dituntut untuk beroperasi dalam setiap aktivitas usaha dan *lines of defense* dengan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (*governance, risk, and compliance* atau GRC) yang andal dan terintegrasi dengan didukung digitalisasi dan inovasi teknologi, serta berwawasan lingkungan dan sosial (*environment, social, and governance* atau ESG), agar mampu memenuhi peraturan perundang-undangan, standar, nilai-nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum, menjaga dan membangun fondasi penciptaan nilai serta mengoptimalkan capaian kinerja secara berkelanjutan, mengelola hak dan tanggung jawab, serta menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lain (*stakeholders*) dalam upaya untuk berkontribusi lebih luas dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam Tata Kelola yang Baik. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari "*governance structure*", dengan didukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (*governance process*). Dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dicapai suatu hasil (*governance outcome*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information

i. Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

Bank is always required to operate in every business activity and lines of defense by implementing reliable and integrated governance, risk management and compliance (governance, risk, and compliance or GRC) supported by digitalization and technological innovation, as well as having an environmental and social perspective (environment, social, and governance or ESG), in order to be able to comply with statutory regulations, standards, ethical values, generally accepted principles and practices, maintain and build the foundation for value creation and optimize performance achievements on an ongoing basis, manage rights and responsibilities, as well as maintaining a balance in the interests of shareholders and all other stakeholders in an effort to contribute more broadly in driving the national economy.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Bank, the Bank through the Board of Commissioners, Directors and all employees, is committed to implement the basic principles of Good Corporate Governance (GCG) and conservatism principles in any business activities with appropriate basic values contained in GCG. It is implemented as a major part of the "governance structure", supported by the availability and readiness of other infrastructure to process (governance process). The priority is the implementation of moral and ethical principles and practices for sound banking business in accordance with applicable regulations, in order to achieve an outcome (governance outcome) in accordance with GCG basic principles.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

i. Penerapan Tata Kelola yang Baik (lanjutan)

Etika dan perilaku merupakan pilar terpenting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis ditetapkan dalam Buku Etika Korporasi Perusahaan yang berlaku untuk seluruh karyawan dan manajemen tanpa terkecuali. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.

Tata kelola yang baik pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

Penerapan tata kelola untuk menjadi pedoman bagi setiap pihak pada Bank untuk peningkatan kualitas pengelolaan Bank yang sehat, dan mendukung penegakkan *market discipline*, penguatan, daya saing, dan resiliensi Bank serta penegakkan integritas sistem keuangan.

Penerapan tata kelola yang baik pada Bank dalam setiap aktivitas usaha dan *lines of defense* Bank diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung penguatan dan daya saing Bank, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*).

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

i. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

Ethics and behavior are the most important pillar in building a responsible corporate culture. Therefore, the standards and conduct of business and personal ethical behavior as set out in the Book of the Company's Corporate Ethics are applicable to all employees and management without exception. In order to improve Bank's performance, protect stakeholders' interests and increase compliance to prevailing laws and regulations as well as code of conduct in the banking industry, the Bank shall conduct its business activity in reference to Good Corporate Governance principles.

Good Corporate Governance at the Bank is the structure, processes, and management mechanisms of the bank to achieve the implementation of the bank's business activities that take into account the interests of all relevant stakeholders, create and optimize corporate value at the Bank sustainably, and are based on the provisions of laws and regulations, standards, and generally accepted ethical values, principles, and practices.

Implementation of good governance will serve as a guideline for every party in the bank to improve the quality of healthy bank management and support the enforcement of market discipline, strengthen the competitiveness and resilience of the Bank, as well as upholding the integrity of the financial system.

The implementation of good governance at the Bank in every business activity and line of defense is expected to make a positive contribution to supporting the strengthening and competitiveness of the bank, as well as supporting inclusive and sustainable national economic growth.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

i. Penerapan Tata Kelola yang Baik (lanjutan)

Penerapan Tata Kelola yang Baik mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan, dan wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik, Bank harus melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcomes*, serta paling sedikit menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (*root cause*) dan kekuatan penerapan Tata Kelola, meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

i. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) includes the implementation of the 5 (five) basic principles of Good Corporate Governance (GCG): transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness that are needed to achieve business sustainability of the Bank by taking into account the Stakeholders interest, and should be implemented in every business activity and in every level of organization of the Bank. In order to ensure the application of the 5 (five) basic principles of Good Corporate Governance (GCG), the Bank must conduct self-assessment periodically classified into a governance system which consists of 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcomes, as well as at least explain the identification of problems in the form of weaknesses and root causes and the strength of the implementation of GCG, containing at least 11 (eleven) Good Corporate Governance (GCG) assessment factors as follows:

1. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.*
2. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
3. *Completeness and task implementation of the Committee.*
4. *Conflicts of interest handling.*
5. *Implementation of the Bank's compliance function.*
6. *Internal audit function implementation.*
7. *External audit function implementation.*
8. *Risk management application including internal control system.*
9. *Provision of funds to related party and large exposure.*
10. *Transparency of financial and non-financial condition, GCG implementation and internal reports.*
11. *Bank's strategic plan.*

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

i. Penerapan Tata Kelola yang Baik (lanjutan)

Selain dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik, perlu diperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Bank seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik tersebut akan mendukung pelaksanaan 4 (empat) bidang utama penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang secara berkelanjutan menjadi fokus perbaikan antara lain: Penguatan Permodalan (*Capital*), Pendapatan (*Earnings*), Perbaikan Penerapan Tata Kelola dan Perbaikan Profil Risiko (*Risk Profile)*. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*/RBBR) tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penerapan tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk dapat berkembang secara sehat, berhati-hati dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai, etika, prinsip, dan menjunjung tinggi integritas, serta menegakkan market disciplines sehingga memiliki daya saing dan daya tahan (resiliensi) yang mampu memberikan nilai tambah pada kinerja perusahaan dan perekonomian.

Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Bank diharapkan memahami dengan benar kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing agar penegakan profesionalisme dan integritas dapat berjalan secara optimal.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

i. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

In addition to the 11 (eleven) appraisal factors for the implementation of Good Corporate Governance, consideration must be given to other information relating for implementation of the Bank's Governance as an impact of remuneration policy or internal disputes that interfere with the Bank's operational and/or business operations.

The 5 (five) basic principles of GCG will support the implementation of the 4 (four) major areas of the Bank's Soundness Rating that continuously become the focus of improvement among others: Capital Strengthening (Capital), Income (Earnings), Corporate Governance Improvement and Risk Profile Improvement. Bank Rating is based on Level of Risk (Risk Based Bank Rating/RBBR) contained in POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 date March 17, 2017 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.

The implementation of good governance is very fundamental in managing the business activities of a bank so that it can develop in a sound, prudent and sustainable manner by prioritizing values, ethics, principles and upholding integrity, as well as upholding market disciplines so that it has competitiveness and resilience which is able to provide added value to company and economic performance.

All parties involved in the Bank's business activities are expected to properly understand their respective positions, roles and responsibilities so that upholding professionalism and integrity can run optimally.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

ii. Susunan Pengurus Bank

Memperhatikan susunan pengurus terbaru Bank untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari keputusan hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2024, maka jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan anggota Direksi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

iii. Penyelamatan Aset Bank

Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen saat ini adalah membentuk fungsi penyelamatan aset untuk menelusuri, menyelamatkan dan menyelesaikan aset-aset Bank yang diduga bermasalah (*asset recovery*), melakukan pemetaan, analisa dan rekomendasi mengenai kondisi seluruh aset, baik berupa pinjaman diberikan, efek-efek, agunan pinjaman dan aset-aset lainnya.

Dalam rangka penyelamatan aset Bank, selain membentuk fungsi penyelamatan aset, dalam struktur organisasi Bank juga membentuk *Management All Deliquencies Division* (MAD) yang merupakan divisi yang menangani restrukturisasi pinjaman bermasalah, realisasi upaya penjualan agunan yang diambil alih (AYDA), hapus buku aset dan *collections*. Selain itu, Bank juga melakukan pengalihan piutang terhadap debitur-debitur bermasalah (NPL).

Bank senantiasa mendukung upaya pengembalian aset-aset Bank di luar negeri yang dilaksanakan oleh Tim Bersama Penyelesaian Permasalahan Aset Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) yang anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, LPS, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 220/KMK.01/2009 mengenai Pembentukan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Bank.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

ii. The Bank's Organizational Structure

Looking at the latest organization structure of the Bank for the Board of Commissioners and Directors of the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder's decision on June 28, 2024, the number and composition of the Board of Commissioners as compared to members of the Board of Directors already met the regulations.

iii. Recovery of the Banks's Assets

One of the management's effort was establishing assets recovery function to investigate, secure and recover the Bank's non-performing assets, prepare mapping, analysis and provide recommendation on the condition of the overall assets such as loans, marketable securities, loan collaterals and other assets.

In order to recover the Bank's assets, besides establishing an assets recovery function, the Bank has also set-up Management All Deliquencies Division (MAD) as the division which handles restructuring of non-performing loans, the realization of the sale of foreclosed assets (AYDA), written-off assets and collections. In addition, the Bank also transfers receivables of NPL debtors.

The Bank always supports the efforts to recover the Bank's assets overseas by the Joint Team for Settlement of Non-Performing Assets of the Bank (formerly PT Bank Century Tbk), in which the members consist of Ministry of Finance, Police Department of the Republic of Indonesia, Financial Services Authority (formerly Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency), Financial Transaction Reports and Analysis Center (FTRAC), Bank Indonesia, Attorney General, LPS, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Law and Human Rights, based on Ministry of Finance Decree No. 220/KMK.01/2009 regarding the Establishment of Joint Team for Handling the Bank's Problems.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

iv. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Mengacu juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta ketentuan terkait yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bank telah melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM), antara lain sebagai berikut:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penerapan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

iv. Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) and Counter - Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financiang (PPPSPM)

The application of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and the Law of the Republic of Indonesia No. 9 Year 2013 concerning Preventing and Combating Terrorism Financing Criminal Offense. Referring also to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8 Year 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Banking Sector, as well as related provisions issued by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (FTRAC).

The Bank has implemented programs on Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), and Counter - Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financiang (PPPSPM), among others, as follows:

1. Report about AML and CFT Implementation periodically to Directors and Board of Commissioners, in the context of supervision by the Directors and Board of Commissioners.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

iv. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) (lanjutan)

2. Melakukan peninjauan dan perbaikan atas kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penerapan APU, PPT dan PPPSPM di Bank, untuk memastikan sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

3. Melakukan analisa dan reviu atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU, PPT dan PPPSPM.

4. Melakukan pengendalian internal melalui program audit internal yang dilaksanakan secara berkala.

5. Meningkatkan fungsi Sistem Informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada otoritas atau regulator serta pelaksanaan pemantauan tingkat risiko nasabah berdasarkan profil dan transaksi yang dilakukan.

6. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan APU, PPT, dan PPPSPM kepada seluruh karyawan Bank melalui sosialisasi/pelatihan tatap muka dan *Electronic Learning.*

7. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK dan OJK, serta mendukung implementasi sistem pelaporan Go AML, SIPENDAR dan APOLO, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan APU, PPT dan PPPSPM di Indonesia.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

iv. Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) and Counter - Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financiang (PPPSPM) (continued)

2. Reviewing and improving the adequacy of policies and procedures in the implementation of AML, CFT and PPPSPM at the Bank, to ensure that they are in line with changes and developments in the Bank's products, services and technology and in accordance with developments in the modes of money laundering, financing of terrorism and funding for the proliferation of weapons of mass destruction.

3. Conduct analysis and review of new product and activity plans to ensure compliance with AML, CFT and PPPSPM regulations.

4. Conduct internal control through internal audit program as conducted periodically.

5. Improve the function of Information System in order to support reporting to authorities/regulators as well as monitoring the implementation of client's risk rating based on profile and transactions.

6. Improve the understanding and ability in the application of AML, CFT, and PPPSPM to all employees of the Bank through socialization/face-to-face training and Electronic Learning.

7. Implement reporting obligations to the authorities (INTRAC and OJK), and support the implementation of the Go AML, SIPENDAR and APOLO reporting systems, based on the laws and regulations governing the implementation of AML and CFT and PPPSPM in Indonesia.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

iv. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) (lanjutan)

8. Turut membantu Institusi Penegak Hukum dan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

9. Berpartisipasi di dalam *Collaborative Analysis Team (CAT)* yang dibentuk oleh PPATK dalam rangka pencegahan praktik pencucian uang di dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, serta pencegahan praktik pencucian uang dari hasil tindak pidana judi daring (*online*).

10. Berpartisipasi sebagai responden dalam penyusunan naskah dan penilaian risiko yang dilakukan oleh PPATK, terkait *shadow economy* pada area berisiko tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor sumber daya alam.

Pada tahun 2024, Bank kembali berhasil meraih predikat Sangat Baik dengan peningkatan nilai secara keseluruhan dalam penilaian efektifitas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dikenal sebagai *Financial Integrity Rating (FIR) On Money Laundering and Financing Terrorism*, yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta melibatkan PT Sucofindo sebagai asesor.

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Other Information (continued)

iv. Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) and Counter - Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financiang (PPPSPM) (continued)

8. Assist Law Enforcement Institutions and PPATK in the prevention and eradication of money laundering, terrorism financing and proliferation financing of weapons of mass destruction.

9. The Bank participated in the Collaborative Analysis Team (CAT) that formed by PPATK in order to prevent money laundering practices in the implementation of Regional Head Elections year of 2024, as well as the prevention of money laundering practices from the proceeds of online gambling.

10. Participating as a respondent in the preparation of manuscripts and risk assessments conducted by PPATK, related to the shad`ow economy in high-risk areas of Money Laundering in the natural resources sector.

In 2024, the Bank succeeded in achieving the Very Good title with the assessment of the effectiveness of the implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing, known as the Financial Integrity Rating (FIR) On Money Laundering and Financing Terrorism, which was organized by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and involving PT Sucofindo as assessor.

51. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARD (continued)

k. Informasi lainnya (lanjutan)

k. Other Information (continued)

v. Perhitungan rasio keuangan

v. Financial ratios calculation

	2024	2023	
	%	%	
Aset produktif			***Earnings assets***
Aset produktif bermasalah	1,54	0,83	*Non-performing earning assets*
Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) terhadap aset produktif	0,59	0,50	*Allowance for Possible Losses (PPAP) on earning assets*
Pemenuhan PPAP	58,47	40,71	*Allowance for possible losses (PPAP) compliance*
Rentabilitas			***Rentability***
Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA)	0,26	0,06	*Return on Assets Ratio (ROA)*
Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)	0,09	0,89	*Return on Equity Ratio (ROE)*
Margin bunga bersih (NIM)	2,30	2,67	*Net Interest Margin (NIM)*
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,26	99,12	*Operating Expenses to Operating Revenues Ratio (BOPO)*
Likuiditas			***Liquidity***
Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LFR)	78,25	74,61	*Loan to Funding Ratio (LFR)*
Efisiensi			***Efficiency***
Cost to Income Ratio (CIR)	87,85	95,12	*Cost to Income Ratio (CIR)*

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 31 Januari 2025, pemegang saham Bank yaitu JTrust Asia Pte., Ltd., menyetorkan dana sebesar Rp 50.000 untuk mendukung operasional Bank.

Dukungan operasional yang diberikan merupakan dukungan finansial tanpa syarat untuk membantu kinerja keuangan Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tanpa kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dimasa mendatang.

52. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On January 31, 2025, the Bank's shareholder, namely JTrust Asia Pte., Ltd., deposited Rp 50,000 to support the Bank's operational.

Operational support provided is the unconditional financial support to assist the Bank's financial performance in carrying out its operational activities, without any obligation to return the funds a later date.

Halaman ini sengaja dikosongkan
Thi spage is intentionally left blank

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

LAMPIRAN

Attachment

INDEKS ISI GRI

GRI Content Index – with Reference

Pernyataan penggunaan	PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks GRI ini untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2024 dengan mengacu pada Standar GRI
Statement of use	PT Bank JTrust Indonesia Tbk has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 January - 31 December 2024 with reference to the GRI Standards.
GRI 1 used	GRI 1: Foundation 2021

GRI Standard	Pengungkapan Disclosure		Lokasi Halaman Page Location
GRI 2	2-1	Informasi Organisasi Organization Details	55, 54, 74, 105
	2-2	Entitas yang Termasuk dalam Laporan Keuangan Dikonsolidasi Entities Included in the Consolidated Financial Statement	647
	2-3	Periode Pelaporan, Frekuensi, dan Titik Kontak Reporting Period, Frequency and Contact Point	647
	2-4	Pernyataan Kembali Informasi Restatement of Information	647
	2-5	Verifikasi Pihak Eksternal External Assurance	647
	2-6	Kegiatan, Rantai Pasokan, dan Hubungan Bisnis Lainnya Activities, Value Chain and Other Business Relationships	54, 68, 69
	2-7	Karyawan Employees	97
	2-9	Struktur Tata Kelola dan Komposisi Governance Structure and Composition	303
	2-10	Nominasi dan Seleksi Badan Tata Kelola Tertinggi Nomination and Selection of the Highest Governance Body	375
	2-12	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Mengawasi Pengelolaan Dampak Role of the Highest Governance Body in Overseeing the Management of Impacts	593
	2-13	Delegasi Tanggung Jawab untuk Mengelola Dampak Delegation of Responsibility for Managing Impacts	593
	2-14	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Laporan Keberlanjutan Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting	593
	2-15	Konflik Kepentingan Conflict of Interest	391
	2-16	Komunikasi Hal-hal Kritis Communication of Critical Concern	563
	2-17	Pengetahuan Kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi Collective Knowledge of the Highest Governance Body	596
	2-18	Evaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi Evaluation of the Performance of the Highest Governance Body	364, 401
	2-19	Kebijakan Remunerasi Remuneration Policies	405
	2-20	Proses Menentukan Remunerasi Process to Determine Remuneration	406
	2-21	Rasio Kompensasi Total Tahunan Annual Total Compensation Ratio	411
	2-22	Pernyataan Tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan Statement on Sustainable Development Strategy	36
	2-23	Komitmen Kebijakan Policy Commitments	582

GRI Standard	Pengungkapan Disclosure		Lokasi Halaman Page Location
	2-24	Menerapkan Komitmen Kebijakan Embedding Policy Commitments	600
	2-25	Proses untuk Memulihkan Dampak Negatif Processes to Remediate Negative Impacts	597
	2-28	Keanggotaan Asosiasi Membership Associations	60
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Approach to Stakeholder Engagement	597
GRI 3	3-1	Proses Menentukan Topik Material Process to Determine Material Topics	648
	3-2	Daftar Topik Material List of Material Topics	648

GRI Standard	Pengungkapan Disclosure		Lokasi Halaman Page Location
LINGKUNGAN | ENVIRONMENT			
GRI 3	3-3	**Pengelolaan Topik Material** Management of Material Topics	612
GRI 302 Energi Energy	302-1	Konsumsi Energi dalam Organisasi Energy Consumption Within the Organization	614
GRI 3	3-3	**Pengelolaan Topik Material** Management of Material Topics	612
GRI 305 Emisi Emission	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) Direct GHG Emissions (Scope1)	614
	305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung Energy Indirect (Scope 2) GHG Emmisions	614
SOSIAL | SOCIAL			
GRI 3	3-3	**Pengelolaan Topik Material** Management of Material Topics	622
Keanekaragaman dan Kesempatan yang Setara Diversity and Equal Opportunity	405-2	Rasio Gaji Pokok dan Remunerasi Perempuan Dibandingkan Laki-laki Ratio of Basic Salary and Remuneration of Women to Men	622
GRI 3	3-3	**Pengelolaan Topik Material** Management of Material Topics	638
GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labeling	417-1	Persyaratan untuk Pelabelan dan Informasi Produk dan Jasa Requirements for Product and Service Information and Labeling	638
GRI 3	3-3	**Pengelolaan Topik Material** Management of Material Topics	637
GRI 418 Privasi Pelanggan Customer Privacy	418-1	Pengaduan yang Berdasar Mengenai Pelanggaran Terhadap Privasi Pelanggan dan Hilangnya Data Pelanggan Substantiated Complaints Concerning Breaches of Customer Privacy and Losses of Customer Data	637

PENGUNGKAPAN INDEKS KEUANGAN BERKELANJUTAN POJK 51/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK [OJK G.4]

Disclosure of Sustainable Finance Index POJK 51/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies [OJK G.4]

No. Indeks No. Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan | Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan | Explanation on Sustainability Strategies	582
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan | Overview of Sustainability Aspects Performance		
B.1	Aspek Ekonomi | Economy Aspects	12
B.2	Aspek Lingkungan Hidup | Environmental Aspects	12
B.3	Aspek Sosial | Social Aspects	13
Profil Perusahaan | Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan | Vission, Mission, Sustainable Values	583
C.2	Alamat Perusahaan | Company Address	55
C.3	**Skala Usaha:** a. Total aset atau kapitalisasi dan total kewajiban; b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. Wilayah operasional **Business Scale:** a. Total assets or assets capitalizationm and total liabilities; b. Total employee based on gender, position, age, education and employment status; c. Percentage of share ownership; and d. Operational area.	54, 74, 97, 105
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Product, Service and Business Activities	68, 69
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi | Member Association	60
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan | Significant Changes	Tidak Ada None
Penjelasan Direksi | Director Explanation		
D.1	Penjelasan Direksi | Director Explanation	36
Tata Kelola Keberlanjutan | Sustainable Corporate Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge Responsibility for Sustainable Finance	593
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Competency Development	596
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Risk Assessment Implementation	597
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholders Relations	597
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Implementation Problems	599

No. Indeks No. Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
	Kinerja Keberlanjutan | Sustainable Performance	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan The Activities of Building a Culture of Sustainability	600
Kinerja Ekonomi | Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit	605
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line With the Implementation of Sustainable Finance	606
Kinerja Lingkungan Hidup | Environmental Performance		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup | Environment Cost Incurred	619
	Aspek Material | Material Aspect	
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan | Use of Environmentally Friendly Materials	611
	Aspek Energi | Energy Aspect	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan | The Amount and Intensity of Energy Used	614
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement of Energy Efficiency Including Use of Renewable Energy Sources	615
	Aspek Air | Water Aspect	
F.8	Penggunaan Air | Water Used	615
	Aspek Keanekaragaman Hayati | Biodiversity Aspect	
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts from Operational Areas Close to or in Conservation Areas or Having Biodiversity	617
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati | Biodiversity Conservation Efforts	617
	Aspek Emisi | Emission Aspect	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type	614
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out	615
	Aspek Limbah dan Efluen | Waste and Effluent Aspect	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Produced by Type	616
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen | Mechanism of Waste and Effluent Management	616
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) | Spills that Occur (if any)	616
	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup | Environmental Complaint Aspect	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	618
Kinerja Sosial | Social Aspect		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Provide Services for Equivalent Products and/or Services to Consumers	
	Aspek Ketenagakerjaan | Employment Aspect	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja | Equality of Employment Opportunities	621
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa | Child Labor and Forced Labor	622
F.20	Upah Minimum Regional | The Regional Minimum Wage	623
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman | Decent and Safe Working Environment	624
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Capacity Building of Employees	625
	Aspek Masyarakat | Society Aspect	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to the Surrounding Community	626
F.24	Pengaduan Masyarakat | Public Complaints	627

No. Indeks No. Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities	627
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan **Responsibilities for Developing Sustainable Products/Services**	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products and/or Services	635
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievalualsi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers	637
F.28	Dampak Produk/Jasa | Products/Service Impacts	638
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali | Number of Products Recalled	639
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey of Sustainable Finance and/or Services	644
Lain-lain | Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	648
G.2	Lembar Umpan Balik | Feedback Form	959
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Feedback on Previous Year's Sustainability Report	647
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Disclosure List Based on POJK No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Listed Companies and Public Companies	926

LAMPIRAN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9/SEOJK.03/2020: Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

Attachment

To Financial Services Authority Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020: Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports

Keterangan	Halaman Page	Description
1. Informasi Umum		**1. General Information**
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan paling kurang 2 (dua) tahun buku atau sejak memulai usaha jika Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 2 (dua) tahun, paling sedikit memuat:	8-11	**a. Financial Highlights presents financial information in a comparative format for 2 (two) financial years, or since the Bank begins its business for banks that have been in business for less than 2 (two) years. At the very least, financial highlights covers:**
1) Pendapatan bunga bersih;		1) Net interest income;
2) Laba operasional;		2) Operating profit;
3) Laba sebelum pajak;		3) Profit before tax;
4) Laba bersih;		4) Net profit;
5) Total laba (rugi) komprehensif;		5) Total comprehensive profit/loss;
6) Laba bersih per saham;		6) Net income per share;
7) Jumlah aset;		7) Total assets;
8) Jumlah liabilitas;		8) Total liabilities;
9) Jumlah ekuitas;		9) Total equity;
10) Aset produktif;		10) Earning assets;
11) Dana pihak ketiga;		11) Third party funds;
12) Pinjaman yang diterima;		12) Borrowings;
13) Rasio KPMM;		13) CAR;
14) Return on Asset (ROA);		14) Return on Asset (ROA);
15) Return on Equity (ROE);		15) Return on Equity (ROE);
16) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;		16) Profit margin (profit/loss to income ratio);
17) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);		17) Rasio Beban Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO);
18) Cost to Income Ratio (CIR);		18) Cost to Income Ratio (CIR);
19) Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);		19) Percentage of Violation and Exceedance of Legal lending Limit (LLL);
20) Rasio Giro Wajib Minimum (GWM);		20) Mandatory Minimum Reserves (GWM) Ratio;
21) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan		21) Net Open Position (PDN) Ratio; and
22) Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan industri perbankan.		22) Other information and ratios relevant to the banking industry.
b. Profil Bank		**b. Bank Profile**
Profil Bank paling sedikit memuat:		Bank profile covers at the very least:
1) Nama Bank, termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	54	1) Name of Bank, including if any, change of name, reaon for the change, and effective date of name change in the financial year;
2) Akses terhadap Bank, termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	55	2) Access to the Bank, including branch or representative offices, whereby the general public may obtain information on the Issuer or Public Company, comprising of:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Alamat;		a) Address;
b) Nomor telepon;		b) Telephone number;
c) Alamat surat elektronik; dan		c) E-mail address; and
d) Alamat situs web;		d) Website address;
3) Riwayat singkat Bank;	57	3) Brief profile of the Bank;
4) Visi dan misi Bank;	62	4) Vision and mission of the Bank;
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	68-70	5) Line(s) of business according to the latest articles of association, business activites performed in the Financial Year, and types of products and/or services provided;
6) Struktur organisasi Bank paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	66-67	6) Organization structure of Bank, at the very least to 1 (one) level below the Directors, with names and positions;
7) Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan, termasuk:	105-111	7) Shareholding structure and composition, that is, names of shareholders and percentage of shareownership, including:
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Bank;		a) Shareholders with a minimum of 5% (five percent) of shares of the Bank;
b) Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham Bank;		b) Members of the Board of Directors and Board of Commissioners that own shares of the Bank;
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Bank;		c) Public shareholders, that is, shareholders that each held less than 5% (five percent) of shares of the Bank;
d) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Bank, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;		d) information on the majority and controlling shareholder(s) of the Bank, direct or indirect, up to the individual ultimate shareholders, presented in a schematic diagram or chart;
8) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana bank memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Bank (jika ada);	111	8) Name of subsidiary entity, associated company or joint venture company where the Bank exercise a joint control with the entity, along with the percentage of shareownership, lines of business, total assets, and operating status of the entity (if any);
9) Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak;		9) For subsidiary entities, include information on address of such subsidiary entities;
10) Profil direksi dan dewan komisaris, paling sedikit, memuat:	76-87	10) Profiles of the Board of Directors and Board of Commissioners, covering at least
a) Susunan direksi, dewan komisaris beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya;		a) Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with the position and brief resume of the respective members thereof;
b) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;		b) Names and position according to the duties and responsibilities;
c) Foto terbaru;		c) Latest photograph;
d) Usia;		d) Age;
e) Kewarganegaraan;		e) Nationality;
f) Riwayat pendidikan;		f) Education background;
g) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		g) Work history, including information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota direksi dan dewan komisaris pada Bank yang bersangkutan;		(1) Legal basis of appointment as member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lain (jika ada); dan		(2) Concurrent position(s), as member of the board of directors, board of commissioners, and/or committes and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Bank;		(3) Work history, with period of service thereon, with or without the Bank;

Keterangan	Halaman Page	Description
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi dan dewan komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan		h) Education and/or training attended by member of the Board of Directors and Board of Commissioners for competence development during the financial year (if any); and
i) Hubungan afiliasi dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.		i) Affiliation with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the majority shareholder (if any), disclosing the name of affiliated party.
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan yaitu susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sebelum dan setelah perubahan;	87	11) In the event of changes in the membership composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners occuring subsequent to the end of the Financial Year and up to the deadline for submission of the annual report of published financial statements and information on financial performance, membership composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be presented both prior and after such change(s);
12) Profil singkat pejabat eksekutif, termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	88-89	12) Brief profiles of executive officers, with structure, position and summary curriculum vitae;
13) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku; dan	97-100	13) Total headcount, and employee distribution in the Financial Year by education and age; and
14) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Bank baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	114	14) Awards and/or certifications in domestic as well as international scope, received by the Bank in the last Financial Year (if any), which covers:
a) Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;		a) Name of award and/or certification;
b) Badan atau lembaga yang memberikan; dan		b) Issuing institution or agency; and
c) Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);		c) Validity period of such award and/or certification (if any).
2. Informasi Kinerja Keuangan		**2. Information on Financial Performance**
a. Laporan Direksi	36-49	**a. Report of the Board of Directors**
Uraian singkat mengenai kinerja Bank, yang paling sedikit meliputi:		Brief description of the Bank performance, at the very least covering:
1) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS;		1) Strategy and policies of the Bank's management, including for the Sharia Business Unit (UUS) for banks that have an UUS;
2) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;		2) Comparison between achievement and targets;
3) Kendala yang dihadapi Bank;		3) Constraints faced by the Bank;
4) Gambaran tentang prospek usaha;		4) Overview of business prospects;
5) Penerapan tata kelola Bank;		5) Implementation of Bank governance;
6) Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahan (jika ada);		6) Changes in the composition of the Board of Directors and reason for such changes (if any);
7) Struktur organisasi;		7) Organization structure;
8) Aktivitas utama;		8) Primary activities;
9) Teknologi informasi;		9) Information Technology;
10) Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;		10) Types of products and services, including lending to debtors in the micro-, small- and medium-business sectors;
11) Perkembangan perekonomian dan target pasar;		11) Developments in the economy and target market;
12) Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.		12) Human resources, covering number of employees as well as education, training, and development programs for human resources.
b. Laporan Dewan Komisaris	24-35	**b. Report of the Board of Commissioners**
Laporan dewan komisaris paling sedikit memuat:		The report of the Board of Commissioners covers at least:
1) Susunan dewan komisaris, beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;		1) Structure of the Board of Commissioners, with position and summary curriculum vitae;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Bank;		2) Assessment of the performance of the Board of Directors in the management of the Bank;
3) Pengawasan terhadap implementasi strategi Bank;		3) Supervision of the implementation of Bank's strategies;
4) Pandangan atas prospek usaha Bank yang disusun oleh direksi;		4) Opinion on the business prospects as prepared by the Board of Directors;
5) Pandangan atas penerapan tata kelola Bank;		5) Opinion on the implementation of Bank governance;
6) Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahan (jika ada); dan		6) Changes in the composition of the Board of Commissioners and reason for such changes (if any); and
7) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota direksi;		7) Frequency and mechanism for advising members of the Board of Directors;
c. Analisis dan Pembahasan Manajemen		**c. Management Discussion & Analysis**
Analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, paling sedikit mengenai:		Management discussion and analysis presents an analysis and discussion of financial statements accounts and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the Financial Year, which at least includes:
1) Tinjauan kinerja per segmen usaha termasuk UUS, paling sedikit mengenai:	126-138	1) Review of operations by business segment, including for UUS, at least of:
a. Pendapatan; dan		a. Revenues; and
b. Profitabilitas;		b. Profitability;
2) Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit mengenai:		2) Review of financial performance, comprising a comparison of the financial performance for the current year wuth the previous year, as well as explanation on the cause of changes and impact of such changes, covering at least:
a. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset;	143-156	a. Investment of funds (investments and disbursement of loan/financing) and total assets;
b. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	156-160	b. Third party funds and other sources of funding;
c. Ekuitas;	160-163	c. Equity;
d. Pendapatan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif;	163-168	d. Revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss);
e. Arus kas; dan	168-169	e. Cash flows; and
f. Suku bunga dasar kredit;	170-171	f. Prime lending rate;
3) Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan;	172	3) Analysis of the quality of earning assets and relevant financial ratios;
4) Struktur permodalan Bank;	173-174	4) Capital structure of Bank;
5) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); dan	175	5) Material information and facts subsequent to the date of accountant report (if any); and
6) Aspek pemasaran atas produk Bank, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	179-180	6) Marketing aspects of Bank's products, at least on marketing strategy amd market share;
3. Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	218-297	**3. Information on Risk Exposure and Capital**
Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.		In the event that the Bank includes the corporate governance report into the Annual Financial Publication Report and Financial Performance Information, the scope and guidelines for such report shall refer to the applicable POJK on implementation of governance for commercial banks.
4. Informasi Tata Kelola	300-579	**4. Governance Information**
Dalam hal Bank menggabungkan laporan pelaksanaan tata kelola dalam Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian mengacu pada POJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.		In the event that the Bank combines the report on the implementation of governance in the Financial Published Report and Annual Financial Performance Information, the scope and guidelines for filling out refer to the POJK regarding the implementation of governance for commercial banks.

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Laporan Keberlanjutan	582-649	**5. Sustainability Report**
a. Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahan publik. Dalam hal bank menggabungkan laporan keberlanjutan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian laporan mengacu pada POJK dimaksud.		a. As regulated in the relevant POJK, a Sustainability Report covers the implementation of sustainable financing for financial services institutions, issuers and public companies. In the event that the Bank includes the sustainability report into the Annual Financial Publication Report and Financial Performance Information, the scope and guidelines for such report shall refer to the applicable POJK.
b. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.		b. Report on the implementation of social and environmental responsibility as regulated in the relevant laws and regulations on social and environmental repsonsibility for limited liability companies.
1) Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:		1) Information on the implementation of social and environmental responsibility covers the management policy, types of programs and costs expended, on aspects of:
a) lingkungan hidup;		a) environment;
b) praktik ketenagakerjaan;		b) labor practices;
c) praktik kegiatan institusi yang sehat;		c) sound institutional practices;
d) konsumen; dan		d) consumer; and
e) pengembangan masyarakat.		e) community development.
2) Dalam hal Bank menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bank dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.		2) In the event that the Bank presents information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in a separate report such as in a social and environmental responsibility report, the Bank is exempted from disclosing information regarding social and environmental responsibility in the annual report of published financial statements and information on financial performance.
6. Laporan Keuangan Tahunan	651	**6. Annual Financial Statements**
Laporan keuangan tahunan yaitu Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.		The annual financial statements that have been audited by a Public Accountant and Public Accountant Firm registered with the OJK.
7. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	105-111	**7. Information on the Business Group of the Bank**
a. Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:		a. A Bank that is part of a business group and/or have a Subsidiary, shall additionally report on:
1) struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		1) Structure of the Bank business group, covering:
a) struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (sister company), Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder;		a) the structure of the business group, comprising of the Bank, Subsidiary Entities, related (sister) companies, Parent Entity, and up to the ultimate shareholder;
b) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan		b) the structure of management inter-relationship of entities in the business group; and
c) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;		c) any shareholders acting in concert. Shareholders acting in concert refer to individual or institutional shareholders with a common objective of controlling the Bank, with or without a formal agreement;
2) transaksi antara Bank dengan pihak-pihak berelasi dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan:	183-184	2) transactions between the Bank and related parties in the Bank's business group, with consideration of the following:
a) informasi transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;		a) information on transactions with related parties, whether conducted by Bank or by any entity in the Bank business group in the financial sector;
b) pihak-pihak berelasi yaitu pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;		b) related parties are parties defined as such in relevant financial accounting standards;

Keterangan	Halaman Page	Description
c) jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi, antara lain:		c) types of transaction with related parties, including:
(1) kepemilikan silang;		(1) cross shareholding;
(2) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;		(2) transactions by a business group performed in the interest of another business group
(3) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;		(3) short-term liquidity management in the business group;
(4) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;		(4) funding provided to, or received by, another entity in a business group;
(5) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan		(5) exposure to a majority shareholder in the form of, among others, loans, commitments and contingencies; and
(6) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo);		(6) transactions for the purchase, sale and/or rental of assets with another entity in the business group, including transactions with repurchase agreement (repo);
3) transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;	183-184	3) transactions with related parties conducted by each entity in the Bank business group in the financial sector;
4) penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan		4) the provision of funding, commitments or equivalent facilities from an entity in the Bank business group to the customers and/or parties that already received financing from the Bank; and
5) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.		5) any prohibition, restriction, and/or other significant constraint to transfer funds or to fulfill the required regulatory capital between the Bank and other entities in a business group;
8. Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik		**8. Additional Information for Banks that are also an Issuer and/or Public Company**
Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik		The Bank that is also an Issuer and/or a Public Company should include in addition the scope of information in accordance with the provisions of OJK Regulation regarding the annual report of issuer or public company.

REFERENSI SEOJK

Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK Reference

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
Ketentuan Umum		**I. General Provision**
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.		a. The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.		b. Issuers are parties who make public offerings
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		c. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.		d. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically- listed Company
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.		e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business
f Direksi:		f Board of Directors:
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan		1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.		2) For an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:		g. Board of Commissioners:
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan		1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and

Keterangan	Halaman Page	Description
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.		2) For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:		h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan		1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.		2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.
2. Laporan Tahuna Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		2. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.		3. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.		4. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.
5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.		5 This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.
II. Bentuk Laporan Tahunan		**II. Format of Annual Report**
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy..
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.		2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.		3. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.		4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.

Keterangan	Halaman Page	Description
III. Isi Laporan Tahunan		**III. Content Of Annual Report**
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	8-11	a. Summary of key financial information;
b. Informasi saham (jika ada);	14-16	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	36-49	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	24-35	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	53-115	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	117-297	f. Management discussion and analysis;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	299-579	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	581-649	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	651	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	50-51	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	**8-11**	**a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:**
1) pendapatan/penjualan;		1) income/sales;
2) laba bruto;		2) gross profit;
3) laba (rugi);		3) profit (loss);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;		4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) total laba (rugi) komprehensif;		5) total comprehensive profit (loss);
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;		6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) laba (rugi) per saham;		7) earning (loss) per share;
8) jumlah aset;		8) total assets;
9) jumlah liabilitas;		9) total liabilities;
10) jumlah ekuitas;		10) total equities;
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;		11) profit (loss) to total assets ratio;
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;		12) profit (loss) to equities ratio;
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;		13) profit (loss) to income ratio;
14) rasio lancar;		14) current ratio;
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;		15) liabilities to equities ratio;
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan		16) liabilities to total assets ratio; and

Keterangan	Halaman Page	Description
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;		17) other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham **Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:**	14-16	**b. Stock Information** **Stock Information (if any) at least contains:**
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:		1) shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) jumlah saham yang beredar;		a) number of outstanding shares;
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;		b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan		c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;		d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:		2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;		a) date of corporate action;
b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham		b) stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan		c) number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan		d) The number of convertible securities exercised (if any); and
e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;		e) share price prior to and after corporate action;
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan		3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and

Keterangan	Halaman Page	Description
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut;		4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi **Laporan Direksi paling sedikit memuat:**	36-49	**c. The Board of Directors Report** **The Board of Directors Report should at least contain the following items:**
1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:		1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;		a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;		b) Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;		c) Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;
d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan		d) comparison between achievement of results and targets; and
e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;		e) challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) gambaran tentang prospek usaha;		2) description on business prospects;
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan		3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);		4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);
d. Laporan Dewan Komisaris **Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:**	24-35	**d. The Board of Commissioners Report** **The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:**
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;		1) Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;		2) Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;		3) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;		4) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan		5) Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;		6) Frequency and manner of providing advice to members of the Board of Directors;

Keterangan	Halaman Page	Description
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik **Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:**		**e. Profile of the Issuer or Public Company** **Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:**
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	54	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	55	2) access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat;		a) Address;
b) Nomor telepon;		b) Telephone number;
c) Nomor faksimile;		c) Facsimile number;
d) Alamat surat elektronik; dan		d) E-mail address; and
e) Alamat Situs *Web*;		e) Website address;
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	57	3) Brief history of the Issuer or Public Company;
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	62	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company;
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	68-70	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	74-75	6) Operational area of the Issuer or Public Company
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	66-67	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	60-61	8) List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	80-86	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;		a) Name and short description of duties and functions;
b) Foto terbaru;		b) Latest photograph;
c) Usia;		c) Age;
d) Kewarganegaraan;		d) Citizenship;
e) Riwayat pendidikan;		e) Education;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) history position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;		g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	76-79	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a) Nama;		a) Name;
b) Foto terbaru;		b) Latest photograph;
c) Usia;		c) Age;
d) Kewarganegaraan;		d) Citizenship;
e) Riwayat pendidikan;		e) Education;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		(1) Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(3) Dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias		g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);		h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	87	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	97-100	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	105-108	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;		a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan		b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;		c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	106-107	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	107-108	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:

Keterangan		Halaman Page	Description	
	a) Kepemilikan institusi lokal;			a) Ownership of local institutions;
	b) Kepemilikan institusi asing;			b) Ownership of foreign institutions;
	c) Kepemilikan individu lokal; dan			c) Ownership of local individual; and
	d) Kepemilikan individu asing;			d) Ownership of foreign individual;
16)	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	110-111	16)	Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
17)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	111	17)	Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;			For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
18)	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	108-109	18)	Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19)	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);		19)	Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:	113	20)	Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/ associations/alliances include:
	a) nama dan alamat;			a) name and address;
	b) periode penugasan;			b) period of assignment;
	c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;			c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;
	d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan			d) Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and
	e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan			e) In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and
21)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	113	21)	Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP

Keterangan	Halaman Page	Description
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		**f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:**
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	126-138	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;		a) Production, including process, capacity, and growth;
b) Pendapatan/penjualan; dan		b) Income/sales; and
c) Profitabilitas;		c) Profitability;
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	143-156	a) Current assets, non-current assets, and total assets;
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	156-160	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) Ekuitas;	160-163	c) Equities;
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	163-168	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) Arus kas	168-170	e) Cash flows
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	171-172	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	172	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	173-174	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	174	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut;		a) The purpose of such ties;
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;		b) Source of funds expected to fulfill the said ties;
c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan		c) Currency of denomination; and
d) Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;		d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;

Keterangan		Halaman Page	Description	
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	175	7)	Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a)	Jenis investasi barang modal;		a)	Type of investment of capital goods;
b)	Tujuan investasi barang modal; dan		b)	Objective of the investment of capital goods; and
c)	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;		c)	Value of the investment of capital goods;
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	175	8)	Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9)	Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	176-177	9)	Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	177-178	10)	Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a)	Pendapatan/penjualan;		a)	Income/sales;
b)	Laba (rugi);		b)	Profit (loss);
c)	Struktur modal (*capital structure*);		c)	Capital structure; or
d)	Kebijakan dividen; atau		d)	Dividend policy; or
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;		e)	Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	178-179	11)	Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a)	Pendapatan/penjualan;		a)	Income/sales;
b)	Laba (rugi);		b)	Profit (loss);
c)	Struktur modal (*capital structure*);		c)	Capital structure; or
d)	Kebijakan dividen; atau		d)	Dividend policy;
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;		e)	Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	179-180	12)	Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	182-183	13)	Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a)	Kebijakan dividen;		a)	Dividend policy;
b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;		b)	The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan		c)	Amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar;		d)	Amount of dividend per year paid;

Keterangan	Halaman Page	Description
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	183	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan		a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;		b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	183-184	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;		a) Transaction date, value, and object;
b) Nama pihak yang melakukan transaksi;		b) Name of transacting parties;
c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);		c) Nature of related parties (if any);
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan		d) Description of the fairness of the transaction; and
e) Pemenuhan ketentuan terkait;		e) Compliance with related rules and regulations;
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		f) In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); dan		1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*);		2) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;
g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.		g) For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;		h) For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		i) In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	184-196	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	196-197	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik **Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:**		**g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company** **Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:**
1) RUPS, paling sedikit memuat:	316-338	1) GMS, at least contains:
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:		a) Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:
1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan		1) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and

Keterangan	Halaman Page	Description
2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;		2) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;
b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2) Direksi, mencakup antara lain:	373-405	2) The Board of Directors, covering:
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;		a) The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi;		b) Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;		c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:		d) Training and/or competency development of members of the Board of Directors:
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan		(1) Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);		(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);
e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:		e) The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:
(1) prosedur penilaian kinerja; dan		(1) Performance appraisal procedures; and
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan		(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and
f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	339-372	3) The Board of Commissioners, among others include:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;		a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris;		b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;		c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:		d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan		(1) Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);		(2) Competency training and/ or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);
e) penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:		e) The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;		(1) procedure for the implementation of performance assessment;
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan		(2) Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and
(3) Pihak yang melakukan penilaian;		(3) Assessor;
f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:		f) Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:
(1) prosedur penilaian kinerja; dan		(1) Performance appraisal procedures; and
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;		(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	405-416	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan		a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:
(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;		(1) Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan		(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and
(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;		(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:		5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) nama;		a) name;
b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;		b) Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;
c) periode penugasan dewan pengawas syariah;		c) Period of assignment of the sharia supervisory board;
d) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan		d) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;		e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	424-436	6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		a) Name and position in the committee;
b) Usia;		b) Age;
c) Kewarganegaraan;		c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;		d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) History of position; including:
(1) Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite;		(1) Legal basis for appointment as committee member;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and

Keterangan	Halaman Page	Description
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;		f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi Komite Audit;		g) statement of independence of the Audit Committee;
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan		h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;		i) Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and
j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit;	447-456	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		7) The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		a) Name and position in committee membership;
b) Usia;		b) Age;
c) Kewarganegaraan;		c) Nationality;
d) Riwayat pendidikan;		d) Educational history;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) Position history, including information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;		(1) Legal basis for appointment as committee member;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/ or committee member and other positions (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;		f) Period and term of office of the committee members;
g) Pernyataan independensi komite;		g) Statement of committee independence;
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan		h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;		i) Description of duties and responsibilities;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;		j) A statement that it has a guideline or charter;

Keterangan	Halaman Page	Description
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;		k) Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan		l) Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and
m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		m) In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan		(1) Reasons for not forming the committee; and
(2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;		(2) The party carrying out the nomination and remuneration function;
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	437-446, 457-490	8) Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		a) Name and position in the Committee;
b) Usia;		b) Age;
c) Kewarganegaraan;		c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;		d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;		(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;		f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite;		g) Statement of committee independence;
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan		h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;		i) Description of duties and responsibilities;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;		j) A statement that the committee has had guidelines or charters;

Keterangan	Halaman Page	Description
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;		k) Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan		l) A brief description of the committee's activities for the fiscal year;
9) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	491-493	9) Corporate Secretary, including:
a) nama;		a) name;
b) domisili;		b) domicile;
c) riwayat jabatan, meliputi informasi:		c) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan		(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) riwayat pendidikan;		d) education background;
e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan		e) education and/or training during the year under review; and
f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;		f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	493-499	10) Internal Audit Unit, among others including:
a) Nama kepala Unit Audit Internal;		a) Name of Head of Internal Audit Unit;
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:		b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan		(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;		(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);		c) Qualification or certification as internal auditor (if any);
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;		d) Education and/or training during the year under review;
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;		e) Structure and position of Internal Audit Unit;
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;		f) Description of duties and responsibilities;
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Unit Audit Internal; dan		g) Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;		h) Brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;

Keterangan	Halaman Page	Description
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	533-535	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan		a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;		b) Review on the effectiveness of internal control systems;
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;		c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	524-533	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;		a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan		b) Types of risk and the management; and
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;		c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;		d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	535-537	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan;		a) Substance of the case/claim;
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan		b) Status of settlement of case/claim; and
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;		c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	571	14) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	548-549	15) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik;		a) Key points of the code of conduct;
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan		b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;		c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership* program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	419	16) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/ or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);
a) jumlah saham dan/atau opsi;		a) Number of shares and/or options;
b) jangka waktu pelaksanaan;		b) Implementation period;
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan		c) Requirements for eligible employees and/or management; and
d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;		d) Exercise price or determination of exercise price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	417-418	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan		a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;		b) Implementation of the policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	563-565	18) Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;		a) Mechanism for violation reporting;
b) Perlindungan bagi pelapor;		b) Protection for the whistleblower;
c) Penanganan pengaduan;		c) Handling of violation reports;
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan		d) Unit responsible for handling of violation report; and
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:		e) Results from violation report handling, at least includes:
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan		(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) Tindak lanjut pengaduan;		(2) Follow up of complaints;
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	569-571	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan		a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and
b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;		b) Anti-corruption training/ socialization to employees of Issuers or Public Companies;
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	571-579	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau		a) statement regarding recommendation that have been implemented; and/or
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);		b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik		**h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company**
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		1) The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:
a) penjelasan strategi keberlanjutan;		a) Explanation of the sustainability strategy;
b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);		b) Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);
c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;		c) Brief profile of the Issuer or Public Company;
d) penjelasan Direksi;		d) Explanation of the Board of Directors;
e) tata kelola keberlanjutan;		e) Sustainability governance;
f) kinerja keberlanjutan;		f) Sustainability performance;
g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;		g) Written verification from an independent party, if any;
h) lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan		h) Feedback sheet for readers, if any; and
i) anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;		i) The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;		2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;

Keterangan	Halaman Page	Description
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:		3) Information on the Sustainability Report in number 1) can:
a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		a) Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or
b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;		b) Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;
4) Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;		4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:
a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		a) Contains all the information as referred to in number 1); and
b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;		b) Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan		6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.

Keterangan		Halaman Page	Description	
i	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit**		i	**Audited Annual Financial Statement**
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan			Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan**		j	**Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting**
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.			Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

Feedback Sheet [OJK G.2]

Laporan Keuangan Berkelanjutan PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan gambaran kinerja sepanjang tahun buku 2024. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk pengembangan kinerja di masa mendatang, dengan mengirimkan lembar umpan balik ini melalui email maupun faksimili atau pos.

Profil

Nama (jika berkenan) :
Institusi/Perusahaan :
Email :
Telp/Hp :

Golongan Pemangku Kepentingan

A. Pemegang Saham dan/atau Investor
B. Nasabah
C. Serikat Pekerja
D. Media
E. Pemasok
F. Organisasi Bisnis
G. Organisasi Masyarakat
H. Pemerintah/Regulator (PJK/BI)

The Sustainable Financial Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk provides an overview of performance throughout the 2024 financial year. We look forward to your input, criticism and suggestions for future performance development, by sending this feedback sheet via email or post.

Profile

Full Name (optional) :
Institution/Company :
Email :
Phone/Cellular Phone :

Stakeholder Groups

A. Shareholders and/or Investors
B. Customers
C. Trade unions
D. Media
E. Suppliers
F. Business Organization
G. Community Organization
H. Government/Regulator (PJK/BI)

Pilihlah jawaban berikut yang paling sesuai:

Select your answer to the following:

No.	Pertanyaan	Jawaban Respond	Question
1	Laporan ini mudah dimengerti	Ya/Tidak | Yes/No	Easy to understand
2	Laporan ini bermanfaat bagi Anda	Ya/Tidak | Yes/No	I find this helpful
3	Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Laporan Keuangan Berkelanjutan	Ya/Tidak | Yes/No	This report gives a clear description of the Sustainable Financial Report

Mohon berikan penilaian aspek paling penting menurun Anda bagi keberlanjutan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan skor1-5, dan nilai 5 bermakna paling penting.

Please provide give your assessment of the most important aspect of the sustainability of PT Bank JTrust Indonesia Tbk with a score of 1-5, with 5 being the most important.

No.	Pertanyaan	Jawaban Respond	Question
1	Kinerja Ekonomi	1-2-3-4-5	Economic Performance
2	Kinerja bisnis Bank	1-2-3-4-5	Business Performance
3	Ketenagakerjaan	1-2-3-4-5	Employment
4	Produk	1-2-3-4-5	Product
5	Pelatihan dan Pendidikan	1-2-3-4-5	Training and Education
6	Masyarakat Lokal	1-2-3-4-5	Local Communities
7	Nasabah	1-2-3-4-5	Customer
8	Anti korupsi	1-2-3-4-5	Anti-Corruption
9	Energi, Sosial dan Tata Kelola (ESG)	1-2-3-4-5	Energy, Social and Governance (ESG)

Jika masih ada aspek lain, mohon disampaikan:

_____

Terima kasih atas partisipasi Anda
Mohon dikirimkan ke alamat:

PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Sahid Sudirman Center, Lt. 33
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia

Telp. +62212926 1111
Email: corsec@jtrustbank.co.id

If there are other aspects, please submit:

_____

Thank you for your participation
Please return this sheet to:

PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Sahid Sudirman Center, Lt. 33
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia

Telp. +62212926 1111
Email: corsec@jtrustbank.co.id

Tanggapan Terhadap Umpan Balik

Selama tahun 2024 Bank tidak menerima adanya tanggapan terhadap umpan balik dari pemangku kepentingan.

Response to Feedback

During 2024 the Bank did not receive any response to feedback from stakeholders.

2024

LAPORAN TAHUNAN
Annual Report

Advancing Our Journey for **A Sustainable Future**

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center 33rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 12920, Indonesia
T: +62 21 2926 1111

jtrustbank.co.id